



LKBUN

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Tahun 2024

(Audited)



Mei 2025



LKBUN

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Tahun 2024

(Audited)



Mei 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2024 *Audited* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

LKBUN Tahun 2024 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024 *Audited* terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

LKBUN Tahun 2024 *Audited* ini merupakan upaya nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUN. Kami menyadari LKBUN Tahun 2024 *Audited* masih belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*). Kami sebagai BUN akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKBUN secara akurat dan tepat waktu.

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024 *Audited* yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi Anggaran, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, kecuali untuk hal-hal yang terkait dengan badan lainnya yang berada di luar kendali Bendahara Umum Negara.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Bendahara Umum Negara untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Bendahara Umum Negara. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Bendahara Umum Negara, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bendahara Umum Negara tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 32.b/LHP/XV/05/2025 tanggal 18 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Anggota

Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc., CSFA., CFA., CertDA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
OPINI BPK	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR SINGKATAN	xv
RINGKASAN	1
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	5
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	9
3. NERACA	11
4. LAPORAN OPERASIONAL	15
5. LAPORAN ARUS KAS	17
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	19
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	21
A. PENJELASAN UMUM	21
A.1. DASAR HUKUM	21
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	22
A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI	29
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	58
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN	58
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	58
B.2.1. Pendapatan BUN dan Hibah	58
B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	58
B.2.1.2. Pendapatan Hibah	65
B.2.2. Belanja BUN	65
B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat	65
B.2.2.2. Transfer ke Daerah	78
B.2.3. Defisit Anggaran	86
B.2.4. Pembiayaan	87
B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri	87
B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri	99
B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran - SiKPA	102
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	102
C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL	125
C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL	125
C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL	125
C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	125
C.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	126
C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	126
C.2.4. Penyesuaian SAL	126
C.2.4.1. Penyesuaian Pembukuan	126
C.2.4.2. Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	130
C.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	132

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	134
D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	134
D.2. PENJELASAN PER POS NERACA	135
D.2.1. Aset.....	135
D.2.1.1. Aset Lancar	135
D.2.1.1.1. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah.....	135
D.2.1.1.2. Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	135
D.2.1.1.3. Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	136
D.2.1.1.4. Kas di Rekening Kas di KPPN	136
D.2.1.1.5. Kas Dalam Transito	137
D.2.1.1.6. Kas di Bendahara Pengeluaran	137
D.2.1.1.7. Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	138
D.2.1.1.8. Kas Lainnya dan Setara Kas.....	138
D.2.1.1.9. Kas pada Badan Layanan Umum	139
D.2.1.1.10. Uang Muka dari Rekening Khusus.....	139
D.2.1.1.11. Belanja Dibayar di Muka (<i>Prepaid</i>)	140
D.2.1.1.12. Uang Muka Belanja (<i>Prepayment</i>)	140
D.2.1.1.13. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	140
D.2.1.1.14. Piutang Bukan Pajak.....	142
D.2.1.1.15. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	159
D.2.1.1.16. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman.....	161
D.2.1.1.17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak	161
D.2.1.1.18. Piutang PFK.....	166
D.2.1.1.19. Persediaan.....	166
D.2.1.2. Investasi Jangka Panjang.....	166
D.2.1.2.1. Dana Bergulir.....	167
D.2.1.2.2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih.....	174
D.2.1.2.3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya.....	177
D.2.1.2.4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	183
D.2.1.2.5. Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	184
D.2.1.2.6. Investasi Permanen Badan Layanan Umum.....	194
D.2.1.2.7. Investasi Permanen Lainnya	194
D.2.1.3. Aset Tetap	199
D.2.1.3.1. Tanah.....	199
D.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin	199
D.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan.....	200
D.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	200
D.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	201
D.2.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	202
D.2.1.3.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	202
D.2.1.4. Properti Investasi.....	203
D.2.1.4.1. Properti Investasi	203
D.2.1.4.2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi.....	214
D.2.1.5. Piutang Jangka Panjang.....	218
D.2.1.5.1. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	218
D.2.1.5.2. Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	218
D.2.1.5.3. Piutang Jangka Panjang Lainnya.....	219
D.2.1.5.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang.....	221

D.2.1.6. Aset Lainnya.....	222
D.2.1.6.1. Aset Tak Berwujud.....	222
D.2.1.6.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya.....	223
D.2.1.6.3. Dana Cadangan Penjaminan.....	236
D.2.1.6.4. Dana Kelolaan Badan Layanan Umum.....	237
D.2.1.6.5. Dana Jangka Panjang.....	242
D.2.1.6.6. Aset Lain-lain.....	244
D.2.1.6.7. Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL.....	274
D.2.1.6.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya.....	278
D.2.2. Kewajiban.....	286
D.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek.....	286
D.2.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga.....	286
D.2.2.1.2. Utang Kepada Pihak Ketiga.....	287
D.2.2.1.3. Utang Bunga.....	299
D.2.2.1.4. Utang Subsidi.....	299
D.2.2.1.5. Utang Transfer.....	305
D.2.2.1.6. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.....	308
D.2.2.1.7. Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek.....	309
D.2.2.1.8. Pendapatan Diterima di Muka.....	310
D.2.2.1.9. Pendapatan Yang Ditangguhkan.....	313
D.2.2.2. Kewajiban Jangka Panjang.....	313
D.2.2.2.1. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara.....	313
D.2.2.2.2. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT.....	314
D.2.2.2.3. Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan.....	315
D.2.2.2.4. Utang Jangka Panjang Subsidi.....	315
D.2.2.2.5. Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri.....	316
D.2.2.2.6. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.....	316
D.2.2.2.7. Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri.....	320
D.2.2.2.8. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya.....	320
D.2.3. Ekuitas.....	321
D.3. Catatan Penting Lainnya.....	322
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	496
E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN.....	496
E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL.....	496
E.2.1. Pendapatan Operasional.....	496
E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam.....	497
E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan.....	499
E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya.....	500
E.2.1.4. Pendapatan Hibah.....	512
E.2.2. Beban Operasional.....	513
E.2.2.1. Beban Pegawai.....	513
E.2.2.2. Beban Persediaan.....	514
E.2.2.3. Beban Barang dan Jasa.....	514
E.2.2.4. Beban Pemeliharaan.....	515
E.2.2.5. Beban Bunga.....	516

E.2.2.6. Beban Subsidi	517
E.2.2.7. Beban Hibah	525
E.2.2.8. Beban Transfer ke Daerah	526
E.2.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	530
E.2.2.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	533
E.2.2.11. Beban Lain-Lain	538
E.2.3. Kegiatan Non Operasional	544
E.2.3.1. Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	545
E.2.3.2. Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	546
E.2.3.3. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	547
E.2.4. Pos Luar Biasa	555
E.3. Catatan Penting Lainnya	555
F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	557
F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	557
F.1.1. Saldo Awal Kas	557
F.1.2. Perubahan Kas	557
F.1.3. Saldo Akhir Kas dan Bank	560
F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	562
F.2.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	562
F.2.1.1. Penerimaan Perpajakan	562
F.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	566
F.2.1.3. Penerimaan Hibah	568
F.2.1.4. Belanja Pegawai	569
F.2.1.5. Belanja Barang	569
F.2.1.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang	570
F.2.1.7. Belanja Subsidi	572
F.2.1.8. Belanja Hibah	572
F.2.1.9. Belanja Bantuan Sosial	572
F.2.1.10. Belanja Lain-lain	573
F.2.1.11. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	573
F.2.1.12. Transfer Dana bagi Hasil Sumber Daya Alam	573
F.2.1.13. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	574
F.2.1.14. Transfer Dana Alokasi Umum	574
F.2.1.15. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	574
F.2.1.16. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Insentif Fiskal (IF)	574
F.2.1.17. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	575
F.2.1.18. Dana Desa	576
F.2.1.19. Hibah kepada Daerah	576
F.2.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	576
F.2.2.1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	577
F.2.2.2. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	577
F.2.2.3. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	578
F.2.2.4. Penerimaan Investasi Pemerintah	578
F.2.2.5. Belanja Modal	578
F.2.2.6. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	579
F.2.2.7. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	579

F.2.2.8. Penyertaan Modal Negara	579
F.2.2.9. Pengeluaran Investasi Pemerintah	580
F.2.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	580
F.2.3.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	580
F.2.3.2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	582
F.2.3.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	582
F.2.3.4. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain	583
F.2.3.5. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	583
F.2.3.6. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	583
F.2.3.7. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	583
F.2.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	584
F.2.4.1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	584
F.2.4.2. Transito (Netto)	585
F.2.4.3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	585
F.2.4.4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	586
G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	587
G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	587
G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	587
G.2.1. Ekuitas Awal	587
G.2.2. Surplus/(Defisit) LO	588
G.2.3. Koreksi-koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	589
G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan	589
G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	589
G.2.3.3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	595
G.2.3.4. Koreksi SAL	598
G.2.3.5. Lain lain	598
G.2.4. Transaksi Antar Entitas	615
G.2.5. Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	617
G.2.6. Mutasi Ekuitas BUN DI K/L	617
G.2.7. Ekuitas Akhir	618
H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	619
I. LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN LRA	
LB.1. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Per Akun Tahun 2024	LB1
LB.2. Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2024	LB2
LB.3. Realisasi PNBPN Lainnya Per BA BUN Tahun 2024	LB3
LB.4. Rincian Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2024 Berdasarkan Pemberi Hibah	LB4
LB.5. Rincian Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2024 Audited Per Kementerian/Lembaga Penerima Hibah	LB5
LB.6. Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024	LB6
LB.7. Rekapitulasi Transfer ke Daerah Tahun 2024	LB7
LB.8. Laporan Realisasi Transfer ke Daerah Tahun 2024	LB8
LB.9. Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Tahun 2024	LB9

LB.10.	Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2024.....	LB10
LB.11.	Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Tahun 2024.....	LB11
LB.12.	Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum Tahun 2024	LB12
LB.13.	Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2024	LB13
LB.14.	Laporan Realisasi Anggaran Hibah Kepada Daerah Tahun 2024.....	LB14
LB.15.	Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Yogyakarta Tahun 2024.....	LB15
LB.16.	Laporan Capaian Output LKBUN Tahun 2024 Audited	LB16

B. LAMPIRAN NERACA

LD.1.	Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum Dalam Rupiah Tahun 2024.....	LD1
LD.2.	Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dalam Valuta Asing Tahun 2024	LD2
LD.3.	Rekening Pemerintah Lainnya Tahun 2024.....	LD3
LD.4.	Rincian Kas di KPPN Tahun 2024.....	LD4
LD.5.	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per KPPN Tahun 2024	LD5
LD.6.	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per K/L Tahun 2024	LD6
LD.7.	Rincian Kas Hibah per KPPN Tahun 2024	LD7
LD.8.	Rincian Kas Hibah per K/L Tahun 2024	LD8
LD.9.	Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum per KPPN Tahun 2024.....	LD9
LD.10.	Rincian Kas Pada Badan Layanan Umum per K/L Tahun 2024	LD10
LD.11.	Uang Muka Rekening Khusus Tahun 2024	LD11
LD.12.	Rincian Piutang PNB Dividen dan Denda Tahun 2024	LD12
LD.13.	Rincian Piutang Transfer ke Daerah.....	LD13
LD.14.	Rincian Aset Kredit Eks BPPN	LD14
LD.15.	Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA.....	LD15
LD.16.	Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).....	LD16
LD.17.	Penyisihan Piutang tidak Tertagih Tahun 2024	LD17
LD.18.	Aset Inventaris Eks BPPN	LD18
LD.19.	Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks BPPN.....	LD19
LD.20.	Rincian Aset Nostro	LD20
LD.21.	Surat Berharga Non Saham Eks BPPN.....	LD21
LD.22.	Aset Saham Eks BPPN	LD22
LD.23.	Jumlah dan Nilai Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero).....	LD23
LD.24.	Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA.....	LD24
LD.25.	Aset Saham Eks Kelolaan PT PPA.....	LD25
LD.26.	Daftar ABMA/T Yang Belum Dapat Dilunasi/Diselesaikan.....	LD26
LD.27.	Daftar ABMA/T Yang Ditetapkan Besarannya.....	LD27
LD.28.	Daftar ABMA/T Yang Telah Diterbitkan KMK Penyelesaian	LD28
LD.29.	Daftar Barang Milik Negara Eks BMN Idle yang diserahkan kepada Pengguna Barang atau Pemda	LD29
LD.30.	Daftar Barang Milik Negara Eks BMN Idle yang Diterima Pengelola Barang.....	LD30
LD.31.	Rincian Utang Pajak Rokok Tahun 2024.....	LD31
LD.32.	Rincian Utang Pihak Ketiga Kuasa BUN Pusat	LD32
LD.33.	Rincian Utang Pihak Ketiga TDF	LD33
LD.34.	Rincian Utang Jangka Pendek – Transaksi Khusus BKF	LD34
LD.35.	Rincian Utang Transfer ke Daerah	LD35

LD.36. Utang SBN Jangka Pendek dan Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Rupiah	LD36
LD.37. Bagian Lancar SBN Jangka Panjang Valas.....	LD37
LD.38. Outstanding Utang PDN	LD38
LD.39. Unamortized Discount/Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah	LD39
LD.40. Unamortized Discount/Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Valas.....	LD40
LD.41. Unamortized Discount/Premium Bagian Lancar SBSN Rupiah	LD41
LD.42. Rincian Pendapatan Diterima Di muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	LD42
LD.43. Saldo Awal Kewajiban Jangka Pendek ABMA/T Tahun 2024	LD43
LD.44. Daftar Pembayaran/Pelunasan Kompensasi ABMA/T Tahun 2024.....	LD44
LD.45. Daftar Kompensasi Atas ABMA/T Yang Diselesaikan/Diterbitkan KMK Pelepasan Tahun 2024.....	LD45
LD.46. Klasifikasi Utang Pemerintah berdasarkan Jatuh Tempo (Umur Utang).....	LD46
LD.47. Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Rupiah	LD47
LD.48. Unamortized Discount/Premium Obligasi Negara Valas.....	LD48
LD.49. Unamortized Discount/Premium SBSN Rupiah	LD49
LD.50. Daftar Seri SBN Yang Diterbitkan Sebagai Pembiayaan SBN Ditangguhkan.....	LD50
LD.51. Outstanding Utang Program Pinjaman Luar Negeri per Kreditor	LD51
LD.52. Outstanding Utang Proyek Pinjaman Luar Negeri per Kreditor.....	LD52
LD.53. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Perusahaan Negara (BUMN)	LD53
LD.54. Ikhtisar Neraca Perusahaan Negara (BUMN).....	LD54
LD.55. Penyertaan Modal Pemerintah Pada Non-BUMN (Minoritas).....	LD55
LD.56. Ikhtisar Laporan Laba Rugi Keuangan Non-BUMN (Minoritas)	LD56
LD.57. Ikhtisar Neraca Keuangan Non-BUMN (Minoritas)	LD57
LD.58. Perusahaan Negara/Lembaga dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan – Laporan Laba Rugi	LD58
LD.59. Perusahaan Negara/Lembaga dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan – Laporan Neraca	LD59
LD.60. Laporan Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Keuangan Internasional	LD60
LD.61. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan	LD61
LD.62. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan	LD62
LD.63. Penjelasan Mutasi Lain Lain Perusahaan Negara (BUMN)	LD63
LD.64. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Indonesia	LD64
LD.65. Ikhtisar Laporan Keuangan BPJS.....	LD65
LD.66. Ikhtisar Laporan Keuangan PTNBH.....	LD66
LD.CPL.1. Mutasi Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas	LDCPL1
LD.CPL.2. Mutasi Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi	LDCPL2
LD.CPL.3. Daftar Pinjaman ISDB <i>Closing Date</i> (Selesai) dan <i>On Going</i> (Masih Berjalan).....	LDCPL3
LD.CPL.4. Rincian Portofolio Kewajiban Penjaminan Aktif per Program Penjaminan.....	LDCPL4
LD.CPL.5. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya Pendapatan, Beban, dan Surplus/(Defisit) (Dalam Ribuan Rupiah)	LDCPL5
LD.CPL.6. Ikhtisar Laporan Keuangan Unit Badan Lainnya - Lembaga Non Struktural Dana APBN dan Non APBN (Dalam Ribuan Rupiah)	LDCPL6
LD.CPL.7. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas (Dalam Ribuan Rupiah)	LDCPL7
LD.CPL.8. Rekapitulasi Penyetoran Pajak Rokok Ke RKUD Provinsi Dan Rekening BPJS Kesehatan Tahun 2024	LDCPL8

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BP MIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPb	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DMO	: <i>Domestic Market Obligation</i>
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HJE	: Harga Jual Eceran
ICP	: <i>Indonesian Crude Price</i>
JBT	: Jenis Bahan Bakar Tertentu
JBKP	: Jenis Bahan Bakar Penugasan Khusus
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama

K/L	: Kementerian Negara/Lembaga
KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
LAK	: Laporan Arus Kas
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LKI	: Lembaga Keuangan Internasional
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LPSAL	: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
MPN	: Modul Penerimaan Negara
NPG	: <i>Non-Public Goods</i>
PC-PEN	: Penanganan Pandemi COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
PFK	: Perhitungan Fihak Ketiga
PG	: <i>Public Goods</i>
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PKP2B	: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
PT PLN	: PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
RDI	: Rekening Dana Investasi
RIPPEN	: Rekening Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional
RPATA	: Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
SABL	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain
SABS	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi

SAIP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
SAL	: Sisa Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPBL	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Badan Lainnya
SAPP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
SAPPP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman
SATD	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah
SATK	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus
SAUP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SiAP	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat
SiKPA	: Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIKP	: Sistem Informasi Kredit Program
Sikubah	: Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah
SPAN	: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
SLA	: <i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SPN	: Surat Perbendaharaan Negara
SUN	: Surat Utang Negara
TA	: Tahun Anggaran
TDF	: <i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
THT	: Tabungan Hari Tua
TKD	: Transfer ke Daerah
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	: <i>Treasury Single Account</i>
TSP	: Tempat Simpan Pinjam
UAKBUN	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara
UAKKPA BUN	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAKPA BUN	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN
UAKPBUN	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN
UAPBUN	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN
UABUN	: Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN
USD	: <i>United State Dollar</i>
USP	: Usaha Simpan Pinjam
UP	: Uang Persediaan
UPSL	: <i>Unfunded Past Service Liability</i>

RINGKASAN

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAP BUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAP BUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK).

LKBUN Tahun 2024 *Audited* merupakan gabungan laporan keuangan entitas pelaporan BUN, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan kementerian Negara/lembaga, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran BUN menggambarkan perbandingan antara Pagu Anggaran BUN Tahun 2024 dengan realisasinya. Laporan Realisasi Anggaran BUN menyajikan informasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/(defisit), dan pembiayaan serta SiLPA/SiKPA periode Tahun 2024.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah BUN pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp274,90 triliun atau 97,91 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp240,51 triliun atau 97,11 persen, dan realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp34,39 triliun atau 103,88 persen. Sementara itu, realisasi Belanja BUN pada Tahun 2024 *Audited* adalah sebesar Rp2.035,76 triliun atau 98,57 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara BUN tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.172,22 triliun atau 98,46 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp863,54 triliun atau 98,70 persen dari anggarannya.

Realisasi Defisit Anggaran BUN Tahun 2024 adalah sebesar Rp1.760,86 triliun atau 98,67 persen dari anggarannya. Sedangkan realisasi Pembiayaan Neto Tahun 2024 adalah sebesar Rp554,89 triliun atau 102,56 persen dari anggarannya. Dari data tersebut maka SiKPA sebelum Pendapatan dan Belanja K/L sebesar Rp1.205,98 triliun.

Ringkasan LRA BUN Tahun 2024 Audited disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023	Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi	%		Rp	%
Pendapatan BUN dan Hibah	280,77	274,90	97,91	272,81	2,09	0,77
Penerimaan Negara Bukan Pajak	247,67	240,51	97,11	255,63	(15,12)	(5,91)
Penerimaan Hibah	33,10	34,39	103,88	17,18	17,20	100,11
Belanja BUN	2.065,39	2.035,76	98,57	1.968,99	66,77	3,39
Belanja Pemerintah Pusat	1.190,51	1.172,22	98,46	1.087,56	84,66	7,78
Transfer ke Daerah	874,88	863,54	98,70	881,43	(17,89)	(2,03)
Surplus (Defisit)	(1.784,61)	(1.760,86)	98,67	(1.696,18)	(64,69)	(3,81)
Pembiayaan	541,03	554,89	102,56	356,66	198,22	55,58
Pembiayaan Dalam Negeri	528,76	462,58	87,48	275,46	187,11	67,93
Pembiayaan Luar Negeri	12,27	92,31	752,10	81,20	11,11	13,68
SILPA (SIKPA) Sebelum K/L	(1.243,58)	(1.205,98)	96,98	(1.339,51)	133,54	9,97

2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Awal tahun 2024 adalah Rp459,50 triliun, Penggunaan SAL adalah minus Rp56,38, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berjalan adalah Rp45,73 triliun, Penyesuaian sebesar minus Rp8,70 triliun, sehingga Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 adalah Rp457,54 triliun.

Ringkasan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUN Tahun 2024 Audited dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Saldo Anggaran Lebih Awal	459,50	478,96	(19,46)	(4,06)
Penggunaan SAL	(56,38)	(35,00)	(21,38)	(61,09)
SILPA/SIKPA	45,73	19,38	26,35	136,00
Penyesuaian SAL	8,70	(3,84)	12,53	326,75
Saldo Anggaran Lebih Akhir	457,54	459,50	(1,96)	(0,43)

3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan BUN mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2024.

Jumlah Aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.961,60 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp523,35 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp4.391,55 triliun, Aset Tetap sebesar Rp1,29 triliun, Properti Investasi sebesar Rp32,76 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp47,39 triliun dan Aset Lainnya sebesar Rp965,25 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp9.538,22 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.208,89 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp8.329,33 triliun. Sementara itu, jumlah Ekuitas Neto per 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp3.576,62 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	31 Des 2024	31 Des 2023	Naik (Turun)	%
Aset	5.961,60	5.547,54	414,06	7,46
Aset Lancar	523,35	516,60	6,75	1,31
Investasi Jangka Panjang	4.391,55	4.077,23	314,32	7,71
Aset Tetap	1,29	1,10	0,19	17,13
Properti Investasi	32,76	32,34	0,42	1,30
Piutang Jangka Panjang	47,39	47,83	(0,44)	(0,92)
Aset Lainnya	965,25	872,44	92,81	10,64
Kewajiban	9.538,22	8.875,73	662,49	7,46
Kewajiban Jangka Pendek	1.208,89	1.021,41	187,48	18,36
Kewajiban Jangka Panjang	8.329,33	7.854,32	475,01	6,05
Ekuitas	(3.576,62)	(3.328,19)	(248,43)	(7,46)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.961,60	5.547,54	414,06	(7,46)

4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional memberikan informasi tentang ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BUN untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah Tahun 2024. Laporan Operasional memberikan informasi bahwa Pendapatan Operasional selama Tahun 2024 *Audited* adalah Rp579,64 triliun, Beban Operasional sebesar Rp2.183,82 triliun dan Kegiatan Non Operasional sebesar minus Rp19,72 triliun, sehingga terdapat Defisit sebesar Rp1.584,45 triliun.

Ringkasan Laporan Operasional BUN Tahun 2024 *Audited* dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Kegiatan Operasional	(1.604,17)	(1.524,73)	(79,44)	(5,21)
Pendapatan Operasional	579,64	565,95	13,70	2,42
Beban Operasional	2.183,82	2.090,68	93,14	4,46
Kegiatan Non Operasional	19,72	61,05	(41,33)	(67,70)
Surplus (Defisit) LO	(1.584,45)	(1.463,68)	(120,77)	(8,25)

5. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2024. Saldo Akhir Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas di Kementerian Negara/Lembaga (K/L) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp629,02 triliun. Saldo Akhir tersebut merupakan penjumlahan dari saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp606,01 triliun dan Kenaikan Kas sebesar Rp23,00 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari arus kas aktivitas operasi sebesar minus Rp154,15 triliun, arus kas aktivitas investasi sebesar minus Rp414,40 triliun, arus kas aktivitas pendanaan sebesar Rp614,28 triliun, dan arus kas aktivitas transitoris sebesar Rp24,39 triliun serta Penyesuaian sebesar Rp9,26 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2024 Audited dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	(154,15)	(34,79)	(119,36)	(343,05)
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(414,40)	(391,62)	(22,78)	(5,82)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan	614,28	445,79	168,49	37,79
Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris	24,39	88,76	(64,37)	(72,52)
Koreksi dan Penyesuaian	9,26	(3,57)	12,83	359,70
Penggunaan SAL	(56,38)	(35,00)	(21,38)	(61,09)
Kenaikan (Penurunan) Kas	23,00	69,57	(46,57)	(66,94)
Saldo Awal Kas	606,01	536,44	69,57	12,97
Saldo Akhir Kas	629,02	606,01	23,00	3,80

6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp3.328,19 triliun, Defisit LO sebesar Rp1.584,45 triliun, Koreksi-Koreksi yang Langsung Mengurangi Ekuitas sebesar Rp97,99 triliun, Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.236,87 triliun, dan Mutasi Ekuitas BUN di KL sebesar Rp1,17 triliun. Dari data tersebut diketahui bahwa Penurunan Ekuitas sebesar Rp248,43 triliun dan Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 adalah minus Rp3.576,62 triliun.

Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2024 Audited dapat disajikan sebagai berikut (dalam triliun rupiah):

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Ekuitas Awal	(3.328,19)	(3.262,26)	(65,93)	(2,02)
Surplus (Defisit) LO	(1.584,45)	(1.463,68)	(120,77)	(8,25)
Koreksi yang Langsung +/- Ekuitas	97,99	34,51	63,48	183,96
Transaksi Antar Entitas	1.236,87	1.338,75	(101,88)	(7,61)
Mutasi Ekuitas BUN di K/L	1,17	24,50	(23,33)	(95,22)
Kenaikan (Penurunan) Ekuitas	(248,43)	(65,93)	(182,50)	(276,82)
Ekuitas Akhir	(3.576,62)	(3.328,19)	(248,43)	(7,46)

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum penyusunan LK BUN, metodologi penyusunan LKBUN dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
A. PENDAPATAN BUN DAN HIBAH	B.2.1	280.774.447.910.000	274.898.283.178.566	97,91%	272.810.959.159.689
1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.1	247.672.619.000.000	240.510.919.462.810	97,11%	255.626.800.279.964
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	B.2.1.1.1	123.816.153.792.000	113.330.835.745.742	91,53%	118.872.894.679.746
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	B.2.1.1.2	85.845.465.000.000	86.384.593.538.563	100,63%	82.058.743.373.870
c. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.1.3	38.011.000.208.000	40.795.490.178.505	107,33%	54.695.162.226.348
2. Pendapatan Hibah	B.2.1.2	33.101.828.910.000	34.387.363.715.756	103,88%	17.184.158.879.725
B. BELANJA BUN	B.2.2	2.065.386.541.321.000	2.035.762.478.740.043	98,57%	1.968.987.928.663.857
1. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.190.511.065.721.000	1.172.219.672.257.679	98,46%	1.087.557.384.455.403
a. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	175.645.472.918.000	173.106.602.391.953	98,55%	151.424.302.225.988
b. Belanja Barang	B.2.2.1.2	1.714.427.698.000	1.577.434.000.681	92,01%	1.415.601.962.907
c. Belanja Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.3	497.319.602.591.000	488.426.422.143.817	98,21%	439.882.584.341.259
d. Belanja Subsidi	B.2.2.1.4	297.889.378.638.000	292.692.594.096.846	98,26%	269.592.086.053.747
e. Belanja Hibah	B.2.2.1.5	371.444.876.000	278.430.938.953	74,96%	219.140.718.777
f. Belanja Lain Lain	B.2.2.1.6	217.570.739.000.000	216.138.188.685.429	99,34%	225.023.669.152.725
2. Transfer ke Daerah	B.2.2.2	874.875.475.600.000	863.542.806.482.364	98,70%	881.430.544.208.454
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1	153.278.976.730.000	153.174.562.784.262	99,93%	205.666.564.020.630
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.2	433.577.123.851.000	429.210.611.278.998	98,99%	398.029.628.594.542
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.3	189.327.884.084.000	183.538.473.113.006	96,94%	181.357.561.783.241
1) Dana Alokasi Khusus Fisik	B.2.2.2.3.1	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55%	50.334.741.347.305
2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik	B.2.2.2.3.2	133.106.472.004.000	130.441.233.738.467	98,00%	128.081.946.376.309
3) Hibah ke Daerah	B.2.2.2.3.3	2.398.948.245.000	2.207.162.260.694	92,01%	2.940.874.059.627

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
d. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.4	18.271.490.935.000	18.271.490.935.000	100,00%	17.241.263.570.000
e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	B.2.2.2.5	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	100,00%	1.372.725.809.224
f. Dana Desa	B.2.2.2.6	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	99,90%	69.856.768.617.317
g. Insentif Fiskal	B.2.2.2.7	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500	87,52%	7.906.031.813.500
C. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A-B)	B.2.3	(1.784.612.093.411.000)	(1.760.864.195.561.477)	98,67%	(1.696.176.969.504.168)
D. PEMBIAYAAN	B.2.4	541.032.171.563.000	554.888.579.353.028	102,56%	356.663.766.369.521
1. Pembiayaan Dalam Negeri	B.2.4.1	528.758.369.161.000	462.577.425.084.416	87,48%	275.463.701.706.796
a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	B.2.4.1.1	151.381.000.000.000	56.419.615.865.000	37,27%	37.225.200.000.000
b. Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.2	(4.171.912.452.000)	(4.242.437.773.274)	101,69%	(1.905.999.112.657)
c. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	B.2.4.1.3	3.921.260.000.000	4.023.538.398.833	102,61%	6.374.398.495.969
d. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.4	649.230.000.000	1.400.109.062.740	215,66%	1.097.737.606.166
e. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.5	554.655.048.027.000	450.733.252.420.187	81,26%	308.193.788.405.962
1) Penerimaan Penjualan Surat Berharga Negara		-	1.075.437.376.773.300	-	848.108.055.742.428
2) Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara		-	(624.704.124.353.113)	-	(539.914.267.336.466)
f. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.6	(636.230.414.000)	15.019.471.247.141	(2.360,70%)	14.558.368.405.525
1) Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri		3.258.429.586.000	20.122.653.359.752	617,56%	17.504.129.527.679
2) Pembayaran cicilan pokok PDN		(3.894.660.000.000)	(5.103.182.112.611)	131,03%	(2.945.761.122.154)
g. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (Neto)	B.2.4.1.7	(151.216.040.000.000)	(44.332.592.681.665)	29,32%	(69.897.795.440.654)
h. Pengeluaran Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.8	(823.986.000.000)	(1.458.986.000.000)	177,06%	(330.511.505.000)
i. Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.9	(25.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	60,00%	(20.000.000.000.000)
j. Pembiayaan Lain-Lain	B.2.4.1.10	-	15.454.545.454	-	148.514.851.485
2. Pembiayaan Luar Negeri	B.2.4.2	12.273.802.402.000	92.311.154.268.612	752,10%	81.200.046.007.725
a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	B.2.4.2.1	97.751.162.402.000	179.765.350.519.789	183,90%	162.650.352.798.218
1) Penarikan Pinjam Tunai	B.2.4.2.1.1	60.000.000.000.000	60.028.929.576.507	100,05%	82.990.780.840.684

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
2) Penarikan Pinjaman Kegiatan	B.2.4.2.1.2	37.751.162.402.000	119.736.420.943.282	317,17%	79.659.571.957.534
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(85.477.360.000.000)	(87.454.196.251.177)	102,31%	(81.450.306.790.493)
E. SILPA (SiKPA) SEBELUM PENDAPATAN DAN BELANJA K/L (C+D)	B.2.5	(1.243.579.921.848.000)	(1.205.975.616.208.449)	96,98%	(1.339.513.221.789.647)

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
A. SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	C.2.1.	459.497.872.070.698	478.957.156.319.401
B. PENGGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	C.2.2.	(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)
C. SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	C.2.3.	45.727.115.463.645	19.376.178.937.101
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A + B + C)		448.843.987.534.343	463.333.335.256.502
D. PENYESUAIAN SAL	C.2.4.		
1. Penyesuaian Pembukuan	C.2.4.1.	9.293.355.123.095	(3.548.034.701.030)
2. Penyesuaian Lain-Lain	C.2.4.2.	(594.067.608.219)	(287.428.484.774)
Total Penyesuaian SAL		8.699.287.514.876	(3.835.463.185.804)
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A+B+C+D)	C.2.5.	457.543.275.049.219	459.497.872.070.698

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET	D.2.1		
ASET LANCAR	D.2.1.1		
Kas dan Setara Kas			
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah	D.2.1.1.1	180.923.940.557.096	149.595.370.820.262
Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing	D.2.1.1.2	169.108.412.005.997	193.240.328.220.314
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	D.2.1.1.3	9.936.262.585.075	3.507.746.680.531
Kas di Rekening Kas di KPPN	D.2.1.1.4	697.379.362.618	5.128.787.424.755
Kas Dalam Transito	D.2.1.1.5	2.750.411.765	4.930.665.723
Kas di Bendahara Pengeluaran	D.2.1.1.6	230.036.155.068	197.710.858.794
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga	D.2.1.1.7	10.552.112.773.536	13.992.553.217.607
Kas Lainnya dan Setara Kas	D.2.1.1.8	5.000.005.190	5.008.114.675.567
Kas pada Badan Layanan Umum	D.2.1.1.9	96.973.278.750.758	92.393.578.520.721
Jumlah Kas dan Setara Kas		468.429.172.607.103	463.069.121.084.274
Uang Muka			
Uang Muka dari Rekening Khusus	D.2.1.1.10	47.984.869.011	44.479.546.335
Jumlah Uang Muka		47.984.869.011	44.479.546.335
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)			
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	D.2.1.1.11	30.664.150.302	22.930.421.699
Uang Muka Belanja (Prepayment)	D.2.1.1.12	10.000.000	10.000.000
Jumlah Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)		30.674.150.302	22.940.421.699
Piutang			
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	D.2.1.1.13	6.369.768.939.715	4.303.538.793.658
Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.14	253.122.402.777.910	241.872.476.098.171
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.1.15	7.718.639.716.238	7.506.739.181.179
Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	D.2.1.1.16	21.286.136.965.214	20.910.716.095.280
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak	D.2.1.1.17	(233.653.899.504.306)	(221.131.800.263.552)
Piutang PFK	D.2.1.1.18	-	109.652.841
Jumlah Piutang		54.843.048.894.771	53.461.779.557.577
Persediaan			
Persediaan	D.2.1.1.19	2.490.243.783	1.216.445.390
Jumlah Persediaan		2.490.243.783	1.216.445.390
Jumlah Aset Lancar		523.353.370.764.970	516.599.537.055.275
INVESTASI JANGKA PANJANG	D.2.1.2		
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	D.2.1.2.1	16.831.926.939.422	19.553.196.920.303
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	D.2.1.2.2	(1.404.183.720.277)	(1.562.930.032.200)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	D.2.1.2.3	269.364.784.080.765	280.412.334.935.034

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	D.2.1.2.4	(974.366.095.513)	(945.649.215.159)
Jumlah Investasi Non Permanen		283.818.161.204.397	297.456.952.607.978
Investasi Permanen			
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	D.2.1.2.5	3.317.709.229.098.828	3.093.225.298.186.938
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	D.2.1.2.6	8.053.004.500	8.053.004.500
Investasi Permanen Lainnya	D.2.1.2.7	790.019.190.222.637	686.539.843.221.699
Jumlah Investasi Permanen		4.107.736.472.325.965	3.779.773.194.413.137
Jumlah Investasi Jangka Panjang		4.391.554.633.530.362	4.077.230.147.021.115
ASET TETAP	D.2.1.3		
Tanah	D.2.1.3.1	49.598.506.000	26.594.107.000
Peralatan dan Mesin	D.2.1.3.2	311.503.452.236	419.497.435.733
Gedung dan Bangunan	D.2.1.3.3	81.252.321.014	60.946.355.841
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	D.2.1.3.4	1.722.156.865.217	1.401.969.922.187
Aset Tetap Lainnya	D.2.1.3.5	50.504.068.840	47.793.132.611
Konstruksi Dalam Pengerjaan	D.2.1.3.6	8.954.062.424	36.069.517.195
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	D.2.1.3.7	(931.230.799.820)	(889.177.503.566)
Jumlah Aset Tetap Kotor		2.223.969.275.731	1.992.870.470.567
Jumlah Aset Tetap Bersih		1.292.738.475.911	1.103.692.967.001
PROPERTI INVESTASI	D.2.1.4		
Properti Investasi	D.2.1.4.1	89.271.007.649.686	88.129.217.464.588
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	D.2.1.4.2	(56.513.502.716.643)	(55.793.665.352.171)
Jumlah Properti Investasi		32.757.504.933.043	32.335.552.112.417
PIUTANG JANGKA PANJANG	D.2.1.5		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	D.2.1.5.1	15.020.833	-
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	D.2.1.5.2	48.201.737.216.319	48.644.267.627.749
Piutang Jangka Panjang Lainnya	D.2.1.5.3	2.301.698.582.578	2.207.678.942.380
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang	D.2.1.5.4	(3.112.146.112.575)	(3.021.919.255.806)
Jumlah Piutang Jangka Panjang bersih		47.391.304.707.155	47.830.027.314.323
ASET LAINNYA	D.2.1.6		
Aset Tak Berwujud	D.2.1.6.1	236.386.021.679	116.979.217.170
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	D.2.1.6.2	486.632.618.588.563	446.302.794.935.058
Dana Cadangan Penjaminan	D.2.1.6.3	13.675.145.505.000	12.216.159.505.000
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	D.2.1.6.4	53.287.731.646.004	16.047.968.379.573
Dana Jangka Panjang	D.2.1.6.5	28.528.648.017.150	36.015.899.438.036
Aset Lain-lain	D.2.1.6.6	697.896.841.387.119	644.945.117.418.303
Aset Lainnya dari Ekuitas pada UBL	D.2.1.6.7	31.292.147.271.351	29.854.766.285.853
Jumlah Aset Lainnya kotor		1.311.549.518.436.866	1.185.499.685.178.993
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada Aset Lainnya	D.2.1.6.8	(346.296.838.636.420)	(313.057.084.376.498)
Jumlah Aset Lainnya Bersih		965.252.679.800.446	872.442.600.802.495
JUMLAH ASET		5.961.602.232.211.887	5.547.541.557.272.626

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
KEWAJIBAN	D.2.2		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	D.2.2.1		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	D.2.2.1.1	4.320.940.427.530	4.536.797.626.051
Utang Kepada Pihak Ketiga	D.2.2.1.2	114.541.686.926.029	153.795.462.145.737
Utang Bunga	D.2.2.1.3	118.250.088.626.967	112.693.785.312.937
Utang Subsidi	D.2.2.1.4	27.307.329.522.064	27.848.746.955.563
Utang Transfer	D.2.2.1.5	97.460.927.735.555	52.187.965.129.846
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	D.2.2.1.6	786.566.436.441.466	638.823.906.087.471
<i>Unamortized Discount</i>		(885.329.385.000)	(368.630.075.000)
<i>Unamortized Premium</i>		265.185.148.000	440.320.180.000
Utang Surat Berharga Negara Jangka Pendek	D.2.2.1.7	62.418.300.000.000	31.412.000.000.000
<i>Unamortized Discount</i>		(1.566.657.675.000)	(467.650.585.000)
Pendapatan Diterima di Muka	D.2.2.1.8	97.758.669.978	98.847.394.100
Pendapatan Yang Ditangguhkan	D.2.2.1.9	111.122.213.990	403.617.716.901
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		1.208.887.788.651.579	1.021.405.167.888.606
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	D.2.2.2		
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara	D.2.2.2.1	6.890.023.998.123.707	6.563.241.522.670.168
<i>Unamortized Discount</i>		(49.634.944.892.000)	(49.942.041.191.000)
<i>Unamortized Premium</i>		42.720.368.963.000	44.567.904.657.000
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	D.2.2.2.2	31.042.846.841.712	25.871.215.355.337
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	D.2.2.2.3	86.273.473.974.300	39.891.869.021.700
Utang Jangka Panjang Subsidi	D.2.2.2.4	530.768.330.796	560.625.887.734
Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri	D.2.2.2.5	44.273.286.260.921	31.552.061.212.395
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	D.2.2.2.6	340.727.372.109.611	312.277.312.036.535
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		7.385.957.169.712.047	6.968.020.469.649.869
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri	D.2.2.2.7	943.345.582.337.528	886.277.290.731.920
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	D.2.2.2.8	27.335.416.515	26.579.390.708
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		943.372.917.754.043	886.303.870.122.628
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		8.329.330.087.466.090	7.854.324.339.772.497
JUMLAH KEWAJIBAN		9.538.217.876.117.669	8.875.729.507.661.103
EKUITAS	D.2.3	(3.576.615.643.905.782)	(3.328.187.950.388.477)
JUMLAH EKUITAS NETO		(3.576.615.643.905.782)	(3.328.187.950.388.477)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.961.602.232.211.887	5.547.541.557.272.626

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
A. KEGIATAN OPERASIONAL			
I. Pendapatan			
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak		535.426.617.430.135	539.048.066.196.555
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	E.2.1.1	139.138.205.840.997	145.845.627.194.635
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	E.2.1.2	2.254.798.245	4.529.734
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	E.2.1.3	396.286.156.790.893	393.202.434.472.186
2. Pendapatan Hibah	E.2.1.4	44.216.321.039.110	26.897.256.729.004
a. Pendapatan Hibah Dalam Negeri		35.496.411.343.168	18.681.668.376.346
b. Pendapatan Hibah Luar Negeri		8.719.909.695.942	8.215.588.352.658
Jumlah Pendapatan	E.2.1	579.642.938.469.245	565.945.322.925.559
II. Beban			
1. Beban Pegawai	E.2.2.1	173.001.346.744.056	155.015.591.372.012
2. Beban Persediaan	E.2.2.2	1.476.311.019	1.364.078.683
3. Beban Barang dan Jasa	E.2.2.3	1.578.465.424.841	1.424.429.200.233
4. Beban Pemeliharaan	E.2.2.4	18.200.253	16.984.662
5. Beban Bunga	E.2.2.5	524.147.192.364.375	489.648.053.202.050
6. Beban Subsidi	E.2.2.6	279.267.883.221.775	251.951.604.553.533
7. Beban Hibah	E.2.2.7	278.430.938.953	219.140.718.777
8. Beban Transfer	E.2.2.8	902.646.703.693.172	881.390.373.057.804
9. Beban Penyusutan dan Amortisasi	E.2.2.9	27.839.399.821.259	27.767.138.903.095
10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	E.2.2.10	12.482.753.654.145	(2.426.602.692.679)
11. Beban Lain-Lain	E.2.2.11	262.572.777.745.764	285.685.594.646.021
Jumlah Beban	E.2.2	2.183.816.448.119.612	2.090.676.704.024.191
Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional		(1.604.173.509.650.367)	(1.524.731.381.098.632)
B. KEGIATAN NON OPERASIONAL			
1. Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	E.2.3.1	(684.927.964.114)	(548.331.294.499)
2. Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	E.2.3.2	(129.960.500.000)	(431.442.410.900)
3. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	E.2.3.3	20.536.219.742.948	62.029.888.345.150
Jumlah Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional	E.2.3	19.721.331.278.834	61.050.114.639.751
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(1.584.452.178.371.533)	(1.463.681.266.458.881)
C. POS LUAR BIASA			
1. Pendapatan Luar Biasa		-	-
2. Beban Luar Biasa		-	-
Jumlah Pos Luar Biasa	E.2.4	-	-
D. SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(1.584.452.178.371.533)	(1.463.681.266.458.881)

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
A ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	F.2.1		
I Arus Kas Masuk			
1 Penerimaan Perpajakan	F.2.1.1	2.231.839.822.879.833	2.154.208.219.467.830
a Pajak Penghasilan	F.2.1.1.1	1.061.940.526.200.605	1.061.234.020.639.596
b Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	F.2.1.1.2	828.436.302.857.826	763.632.668.212.526
c Pajak Bumi dan Bangunan	F.2.1.1.3	32.491.020.191.825	33.270.661.547.958
d Cukai	F.2.1.1.4	226.371.492.151.997	221.851.144.542.725
e Pajak Lainnya	F.2.1.1.5	8.742.804.515.348	9.729.790.060.612
f Pajak Perdagangan Internasional	F.2.1.1.6	73.857.676.962.232	64.489.934.464.413
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	F.2.1.2	583.878.607.181.721	611.990.337.922.242
a Pendapatan Sumber Daya Alam	F.2.1.2.1	228.928.767.532.781	254.203.031.073.614
b Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	F.2.1.2.2	86.384.593.538.563	82.058.743.373.870
c Pendapatan PNBP Lainnya	F.2.1.2.3	163.848.513.738.956	179.868.171.315.795
d Pendapatan BLU	F.2.1.2.4	104.716.732.371.421	95.860.392.158.963
3 Penerimaan Hibah	F.2.1.3	34.387.363.715.756	17.184.158.879.725
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		2.850.105.793.777.310	2.783.382.716.269.797
II Arus Kas Keluar			
1 Belanja Pegawai	F.2.1.4	464.859.258.914.201	412.711.324.466.564
2 Belanja Barang	F.2.1.5	523.368.042.639.998	432.714.969.865.127
3 Belanja Pembayaran Bunga Utang	F.2.1.6	488.426.422.143.817	439.882.584.341.259
4 Belanja Subsidi	F.2.1.7	292.692.594.096.846	269.592.086.053.747
5 Belanja Hibah	F.2.1.8	278.430.938.953	219.140.718.777
6 Belanja Bantuan Sosial	F.2.1.9	154.949.830.442.829	156.601.633.832.214
7 Belanja Lain-lain	F.2.1.10	216.138.188.685.429	225.023.669.152.725
8 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	F.2.1.11	54.241.430.203.000	63.845.997.623.000
9 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	F.2.1.12	93.845.576.439.722	135.944.555.602.100
10 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	F.2.1.13	5.087.556.141.540	5.876.010.795.530
11 Transfer Dana Alokasi Umum	F.2.1.14	429.210.611.278.998	398.029.628.594.542
12 Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	F.2.1.15	50.890.077.113.845	50.334.741.347.305
13 Transfer Dana Otonomi Khusus, DK-DIY, IF	F.2.1.16	26.693.231.531.500	26.520.021.192.724
14 Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	F.2.1.17	130.441.233.738.467	128.081.946.376.309
15 Dana Desa	F.2.1.18	70.925.927.774.598	69.856.768.617.317
16 Hibah Kepada Daerah	F.2.1.19	2.207.162.260.694	2.940.874.059.627
Jumlah Arus Kas keluar (A.II)		3.004.255.574.344.437	2.818.175.952.638.867
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I-A.II)		(154.149.780.567.127)	(34.793.236.369.070)
B ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	F.2.2		
I Arus Kas Masuk			
1 Pengelolaan dan Penjualan BMN	F.2.2.1	499.450.401.555	546.960.660.401
2 Penjualan Aset Program Restrukturisasi	F.2.2.2	1.400.109.062.740	1.097.737.606.166
3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.3	3.268.707.260.033	359.653.415.387
4 Penerimaan Investasi Pemerintah	F.2.2.4	19.619.717.681.824	26.441.256.275.225
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		24.787.984.406.152	28.445.607.957.179
II Arus Kas Keluar			
1 Belanja Modal	F.2.2.5	355.511.133.723.811	303.041.293.068.751
2 Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	F.2.2.6	15.000.000.000.000	20.000.000.000.000
3 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	F.2.2.7	0	2.225.200.000.000
4 Penyertaan Modal Negara	F.2.2.8	42.149.731.758.522	41.421.985.992.266
5 Pengeluaran Investasi Pemerintah	F.2.2.9	26.530.271.865.000	53.382.030.644.000
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		439.191.137.347.333	420.070.509.705.017

URAIAN		CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I – B.II)			(414.403.152.941.181)	(391.624.901.747.838)
C	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	F.2.3		
I	Arus Kas Masuk			
1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.1	1.151.979.645.998.052	902.837.385.270.107
2	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.2	179.765.350.519.789	162.650.352.798.218
3	Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	F.2.3.3	4.023.538.398.833	6.374.398.495.969
4	Penerimaan Pembiayaan Lain	F.2.3.4	15.454.545.454	148.514.851.485
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)			1.335.783.989.462.128	1.072.010.651.415.779
II	Arus Kas Keluar			
1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	F.2.3.5	629.807.306.465.724	542.860.028.458.620
2	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	F.2.3.6	87.454.196.251.177	81.450.306.790.493
3	Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	F.2.3.7	4.242.437.773.274	1.905.999.112.657
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)			721.503.940.490.175	626.216.334.361.770
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I-C.II)			614.280.048.971.953	445.794.317.054.009
D	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	F.2.4		
1	Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	F.2.4.1	(215.134.088.039)	620.329.866.094
2	Transito (Netto)	F.2.4.2	1.581.530.989.101	14.112.089.380.009
3	Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	F.2.4.3	23.022.929.532.814	74.033.583.845.555
4	Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	F.2.4.4	2.179.402.806	(4.129.878.872)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris			24.391.505.836.682	88.761.873.212.786
KENAIKAN/PENURUNAN KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN (A+B+C+D)			70.118.621.300.327	108.138.052.149.887
KOREKSI SILPA			2.052.665.074.805	1.496.864.847.086
PENYESUAIAN ATAS SELISIH KURS			6.326.893.741.118	(529.364.838.247)
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASI				
AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUAN			883.764.180.317	(4.534.436.524.122)
PENGUNAAN SAL			(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN		F.1.2	23.000.944.296.567	69.571.115.634.604
SALDO AWAL KAS		F.1.1	606.014.272.515.831	536.443.156.881.227
SALDO AKHIR KAS		F.1.3	629.015.216.812.398	606.014.272.515.831

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

BENDAHARA UMUM NEGARA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
(DALAM RUPIAH)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2024	TAHUN 2023
A. EKUITAS AWAL	G.2.1	(3.328.187.950.388.477)	(3.262.260.267.295.775)
B. SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	G.2.2	(1.584.452.178.371.533)	(1.463.681.266.458.881)
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
1. Koreksi Nilai Persediaan	G.2.3.1	-	59.355.000
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset Lainnya Non Revaluasi	G.2.3.2	24.873.996.185.564	(4.984.035.702.940)
3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	G.2.3.3	1.437.380.985.498	229.322.791.975
4. Koreksi SAL	G.2.3.4	2.074.667.959.503	1.498.554.940.209
5. Lain-lain	G.2.3.5	69.599.521.111.279	37.762.853.060.389
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	G.2.3	97.985.566.241.844	34.506.754.444.633
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	G.2.4	1.236.867.333.530.144	1.338.745.845.087.589
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI	G.2.5	-	-
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L			
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran		32.325.296.274	(18.216.293.568)
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah		(3.440.440.444.071)	11.096.844.487.771
3. Mutasi Kas BLU		4.579.700.230.037	13.422.355.639.754
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN di K/L	G.2.6	1.171.585.082.240	24.500.983.833.957
G. KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS		(248.427.693.517.305)	(65.927.683.092.702)
EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E)	G.2.7	(3.576.615.643.905.782)	(3.328.187.950.388.477)

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara s.t.d.d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 s.t.d.d. Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 278/PMK.05/2014;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan s.t.d.d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran;
17. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, s.t.d.t.d. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa kewenangan Presiden dalam pengelolaan fiskal dikuasakan kepada Menteri Keuangan. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan pengelolaan fiskal (*Chief Financial Officer/CFO*) tersebut adalah melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara. Bendahara Umum Negara (BUN) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melaksanakan fungsi BUN.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN berwenang untuk:

1. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
2. mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran negara;
4. menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;
5. menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara;
7. menyimpan uang negara;
8. menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum negara;
10. melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah;
11. memberikan pinjaman atas nama pemerintah;
12. melakukan pengelolaan utang dan piutang negara;
13. mengajukan rancangan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan;
14. melakukan penagihan piutang negara;
15. menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara;
16. menyajikan informasi keuangan negara;
17. menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan Barang Milik Negara;
18. menentukan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dalam rangka pembayaran pajak;
19. menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara.

Selain menjalankan fungsi dan kewenangan BUN tersebut di atas, Menteri Keuangan juga mendapat alokasi dana APBN yang hanya dikelola oleh BUN dan tidak dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain, yaitu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN). Atas anggaran yang dikelola tersebut, Menteri Keuangan kemudian menunjuk Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BUN untuk mengelola BA BUN serta Unit Kementerian Negara/Lembaga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) BUN.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta, dengan alamat Gedung Juanda I Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat.

Anggaran dan transaksi yang dikelola Menteri Keuangan selaku BUN meliputi transaksi:

1. Utang Pemerintah terdiri dari:
 - a. Penerimaan utang luar negeri;
 - b. Penerimaan utang dalam negeri;
 - c. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri;

- d. Pembayaran cicilan utang luar negeri;
 - e. Pembayaran cicilan utang dalam negeri;
2. Hibah terdiri dari:
- a. Hibah dalam bentuk uang;
 - b. Hibah dalam bentuk barang, jasa, dan/atau surat berharga;
3. Investasi Pemerintah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan terkait Investasi Pemerintah, yang antara lain meliputi penyertaan modal negara, Investasi pada lembaga keuangan internasional, pembiayaan untuk badan layanan umum, Investasi nonpermanen pada badan hukum lainnya, dana penjaminan serta pemberian pinjaman kepada badan usaha dan/atau pemerintah daerah;
4. Pemberian Pinjaman yaitu transaksi pemberian pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, BUMN, dan/atau BUMD yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu;
5. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Transaksi TKD meliputi beban dan realisasi TKD, piutang TKD, kewajiban TKD dan transaksi transitoris TKD.
- TKD terdiri atas:
- a. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - d. Dana Otonomi Khusus;
 - e. Dana Keistimewaan;
 - f. Dana Desa;
 - g. Insentif Fiskal;
6. Belanja Subsidi yaitu pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/ jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat;
7. Belanja Lain-lain yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah;
8. Transaksi Khusus antara lain meliputi transaksi:
- a. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan hubungan internasional;
 - b. belanja/beban Fasilitas Penyiapan Proyek;
 - c. belanja/beban Dukungan Kelayakan;
 - d. PNBPN yang dikelola oleh DJA;
 - e. transaksi aset dan belanja/beban yang berada dalam pengelolaan DJKN;
 - f. belanja/beban jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Perum Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun;
 - g. pendapatan dan belanja/beban pengelolaan kas negara;

- h. transaksi penggunaan PNBPN BUN PKN;
 - i. utang perhitungan pihak ketiga pegawai;
 - j. utang perhitungan pihak ketiga Pajak Rokok;
 - k. pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara;
 - l. belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan;
 - m. pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valuta asing pada kuasa BUN daerah;
9. Badan Lainnya yaitu transaksi pada Badan Lainnya (yayasan dan lembaga non struktural) baik yang melalui APBN maupun yang tidak melalui mekanisme APBN.

Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku BUN di atas dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawabannya telah ditetapkan Kode Bagian Anggaran BUN (BABUN) yaitu BA 999.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Arus Kas (LAK). Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Entitas Pelaporan terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Daerah;
3. Kementerian Negara/Lembaga; dan
4. Bendahara Umum Negara.

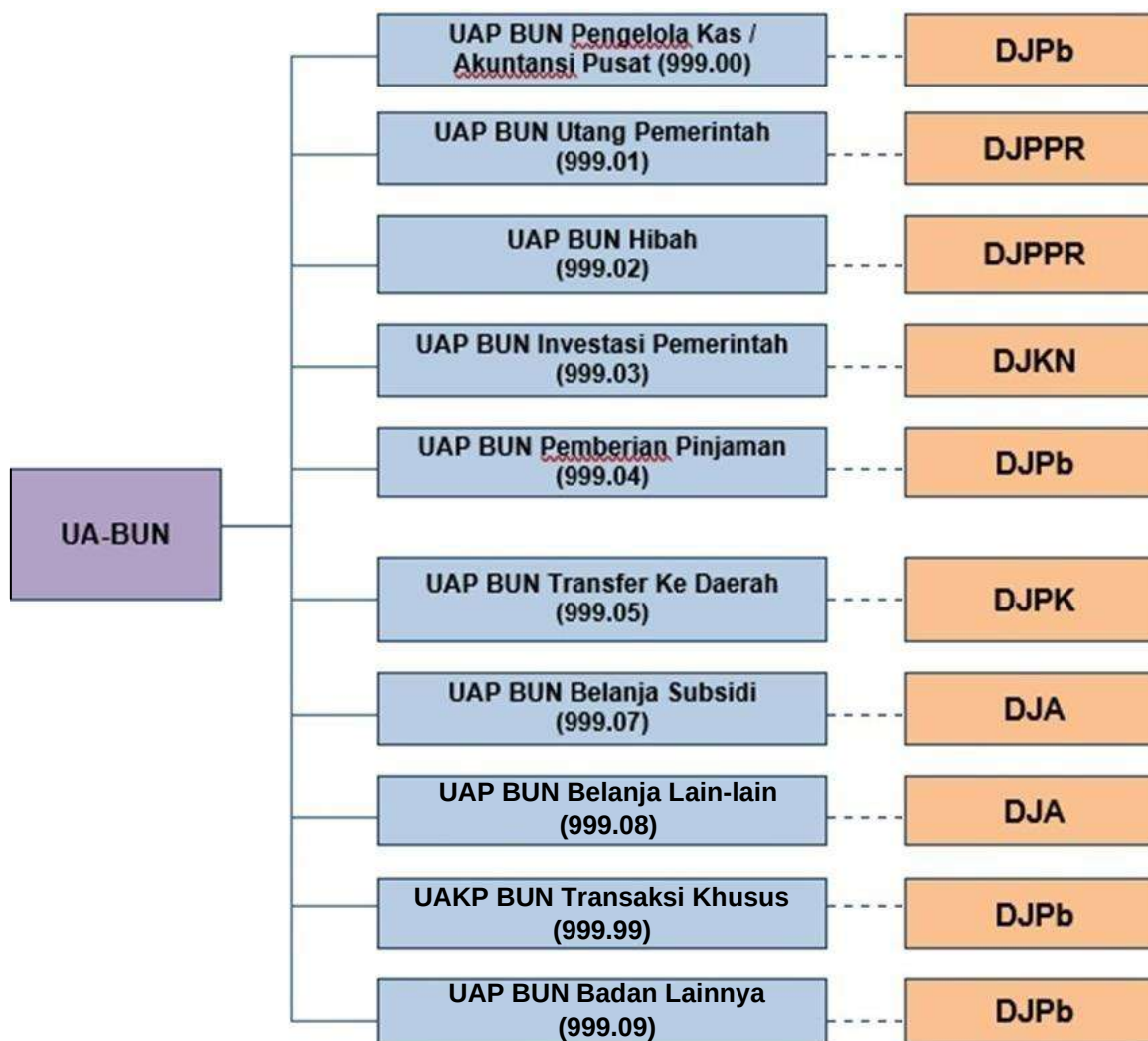
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan tugas BUN serta sesuai ketentuan sebagaimana tersebut di atas, Menteri Keuangan selaku BUN merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan dihasilkan dari Sistem Akuntansi BUN (SABUN). Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (LK BABUN) dan Laporan Keuangan Kuasa BUN yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) beserta Catatan atas Laporan Keuangan.

LAK merupakan Laporan Keuangan yang menginformasikan penerimaan/pengeluaran kas ke/dari kas negara. LAK tidak terkait dengan BA tertentu tetapi mencakup seluruh Bagian Anggaran. Berdasarkan PMK Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang selanjutnya akan dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

SABUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemberian Pinjaman (SAPPP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-lain (SABL), Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK), dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL).

Dalam rangka pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk unit akuntansi dan pelaporan berupa Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) pada unit eselon I terkait pada Kementerian Keuangan. Khusus untuk SATK, karena UAPBUN TK tersebar pada beberapa unit eselon I, Menteri Keuangan menetapkan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN Transaksi Khusus (UAKP BUN TK). Setiap UAPBUN membawahi satu atau lebih Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) dan/atau Unit Akuntansi Kuasa BUN (UAKBUN). Struktur organisasi akuntansi dan penanggung jawab untuk setiap subsistem SA-BUN diatur pada masing-masing subsistem SA-BUN. Dalam rangka proses konsolidasi laporan keuangan BUN, Menteri Keuangan membentuk Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN (UA BUN). Selain itu dalam kerangka SiAP, Menteri Keuangan selaku BUN juga menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN di Daerah.

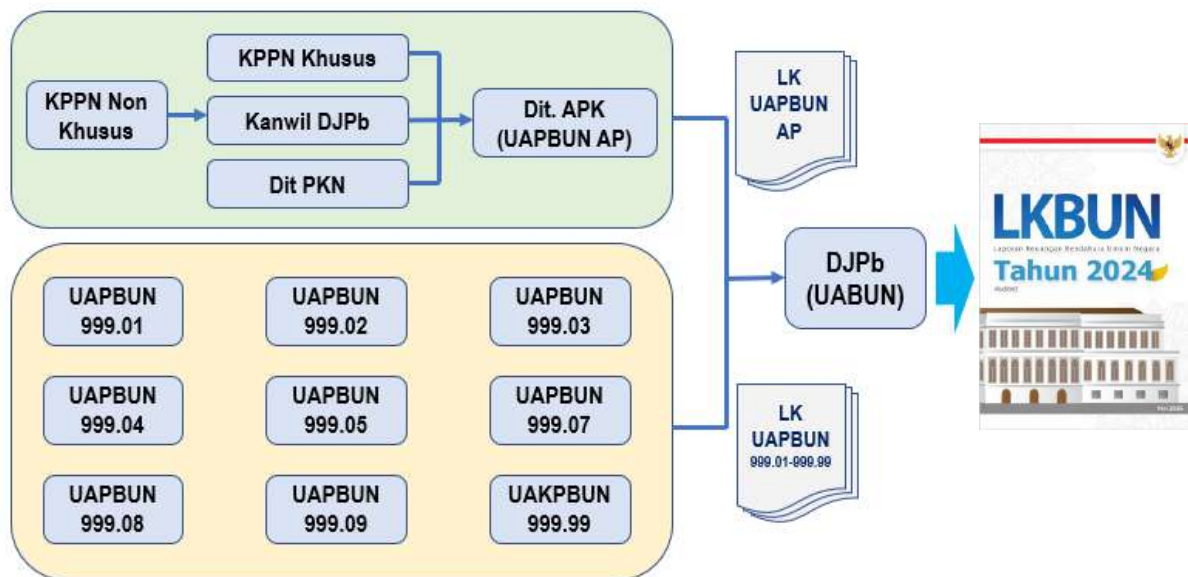


Berdasarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh UAPBUN dan UAKP BUN TK, UA BUN melakukan proses konsolidasi setiap semester dan tahunan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara yang dilaksanakan dengan cara menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari masing-masing laporan serta melakukan eliminasi terhadap akun timbal balik (*reciprocal accounts*).

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN yang disajikan per 31 Desember 2024, yang meliputi:

No.	BA	Uraian	Jumlah Satker
1	999.00	UAPBUN Akuntansi Pusat (UAPBUN AP)	184
2	999.01	BA BUN Pengelola Utang Pemerintah (DJPPR)	1
3	999.02	BA BUN Pengelola Hibah (DJPPR)	2
4	999.03	BA BUN Pengelola Investasi (DJKN)	18
5	999.04	BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (DJPb)	1
6	999.05	BA BUN Pengelola Transfer ke Daerah (DJPK)	520
7	999.07	BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (DJA)	15
8	999.08	BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (DJA)	12
9	999.99	Transaksi Khusus (DJPb)	35
10	999.09	Badan Lainnya: Yayasan dan LNS*) (DJPb)	1
Total Satuan Kerja			789

Dengan demikian, selaku UABUN/entitas pelaporan adalah Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Sedangkan anggaran dan transaksi BA-BUN dilaksanakan oleh Unit Eselon I di Kementerian Keuangan yang sekaligus sebagai Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara (UAPBUN)/entitas akuntansi.



KEBIJAKAN PENYUSUNAN LKBUN TAHUN 2024

Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah yang disusun oleh KPPN dan Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat yang disusun oleh Direktorat PKN merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam Laporan Keuangan Tahun 2024, penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN menggunakan aplikasi SPAN.

Kebijakan penyajian LK Kuasa BUN Tingkat KPPN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah;
2. Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui Rekening Kuasa BUN Daerah namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan penihilan/pengesahan dari KPPN; dan/atau

3. Penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah namun mempengaruhi Neraca UAKBUN Daerah.

Kebijakan penyajian UAKBUN-Pusat Direktorat PKN secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat; dan
2. Penerimaan dan pengeluaran pada SPM atau dokumen yang dipersamakan, dengan potongan, yang pembayarannya melalui rekening Kuasa BUN Pusat.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara disusun dengan menggunakan mata uang Rupiah.

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/(defisit), pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA BUN disusun berdasarkan LRA yang disampaikan oleh UAPBUN dan UAKP BUN TK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. LRA Pendapatan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan negara dan hibah. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pendapatan tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi pendapatan tahun anggaran berjalan. LRA Pendapatan disusun oleh

UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos pendapatan berdasarkan pos-pos pendapatan yang disajikan pada LRA UAPBUN.

- b. LRA Belanja dan Transfer menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi belanja dan transfer. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian belanja dan transfer tahun anggaran berjalan, mengurangi realisasi belanja dan transfer tahun anggaran berjalan. LRA Belanja dan Transfer disusun oleh UAPBUN selaku pengguna anggaran BUN. UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada seluruh UAPBUN dan LRA UAKPBUN TK selain UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian LRA Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos belanja berdasarkan pos-pos belanja yang disajikan pada LRA UAPBUN dan UAKPBUN TK selain UAPBUN AP.
- c. LRA Pembiayaan menyajikan informasi mengenai anggaran dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam hal terdapat transaksi pengembalian pembiayaan, mengurangi realisasi pembiayaan tahun anggaran berjalan. LRA Pembiayaan disusun oleh UAPBUN yang melaksanakan aktivitas pembiayaan maupun oleh UAPBUN selaku pengelola kas negara (UAPBUN AP). UABUN menerima LRA dari seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada LRA seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.
- d. Penyajian SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN berisi selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca disusun oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. UABUN menyusun neraca dengan menjumlahkan nilai pos-pos yang sama pada neraca seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK. Dalam hal terdapat pos-pos neraca yang disajikan ganda antara UAPBUN dan UAPBUN AP dilakukan pengurangan pada neraca UAPBUN agar tidak terjadi duplikasi penyajian. Dalam hal terdapat realisasi pos-pos neraca yang bersifat *reciprocal*, dilakukan eliminasi (*reciprocal elimination*).

3. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN yang meliputi data penerimaan dan pengeluaran kas melalui Rekening Kas Umum Negara, Subrekening Kas Umum Negara, Rekening Kas Saldo Anggaran Lebih, Rekening Kas Penempatan, Rekening Khusus, Rekening Penerimaan, dan Rekening Pengeluaran termasuk transaksi pendapatan dan belanja operasional pada BLU. UAPBUN AP menyusun LAK dengan menjumlahkan pos-pos yang sama pada LAK seluruh UAKBUN Daerah dan UAKBUN Pusat.

4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah sampai dengan periode 31 Desember 2024. Laporan Operasional disusun berdasarkan

data pendapatan dan beban atas kegiatan operasional serta kegiatan nonoperasional yang dilakukan oleh seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK kecuali UAPBUN AP. Dalam rangka penyajian Laporan Operasional Konsolidasian BUN, UABUN menyajikan pos-pos Laporan Operasional berdasarkan hasil konsolidasi pos-pos Laporan Operasional yang disajikan pada Laporan Operasional seluruh UAPBUN dan UAKPBUN TK.

5. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan data ekuitas akhir tahun lalu yang merupakan ekuitas awal tahun berjalan ditambah surplus/(defisit) yang dihasilkan oleh Laporan Operasional ditambah koreksi karena dampak kumulatif kebijakan akuntansi dan transaksi antar entitas.

6. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN, penjelasan, daftar terinci, atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis akrual yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dan pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyusunan dan penyajian LKBUN Tahun 2024 *Audited* mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKBUN telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKBUN ini adalah:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat pengesahan pendapatan oleh BUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKBUN Tahun 2024 Audited adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411980) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084980 diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP).

Pendapatan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran BUN merupakan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN berupa realisasi pendapatan pada seluruh UAPBUN dan UAKP BUN TK.

Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari UAPBUN AP berfungsi sebagai penguji (kontrol) data realisasi BA BUN.

SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

2. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah dalam hal ini UAPBUN yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak tagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (atau tidak setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat pengesahan belanja oleh BUN. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka lembar (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja.

Belanja yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran merupakan gabungan dari seluruh belanja Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi Koordinator Pembantu BUN TK.

Untuk transaksi pengembalian pendapatan dan pengembalian belanja tahun berjalan, menggunakan mata anggaran (akun) yang sama dengan mata anggaran (akun) realisasinya, tetapi dibedakan dalam penggunaan dokumen sumber. Jika terjadi pengembalian pendapatan/belanja pada tahun anggaran berjalan, maka langsung mengurangi realisasi pendapatan/belanja dengan mata anggaran pendapatan/belanja yang berkenaan.

SiLPA/SiKPA dalam LRA BUN merupakan selisih antara pendapatan BA BUN, belanja BA BUN, dan pembiayaan BA BUN.

4. **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat: (1) terjadinya penurunan manfaat ekonomi; (2) potensi jasa atau terjadinya konsumsi aset; (3) timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban karena penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Pengakuan beban karena konsumsi aset adalah saat terjadinya pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Pengakuan beban karena timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Negara. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beban yang disajikan pada Laporan Operasional merupakan gabungan dari seluruh beban Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN selaku pengguna anggaran BUN dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Pembantu BUN TK.

5. **Pembiayaan**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran), meskipun penyajian dalam LKBUN secara neto. Penyajian pagu anggaran pembiayaan menggunakan data yang bersumber dari pagu APBN dan APBN-P.

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku

BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKBUN berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

7. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan dalam Neraca LKBUN menggunakan data Kas Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Kas Lainnya dan Setara Kas dapat berupa bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, serta kas penerimaan hibah dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.

Kas pada BLU merupakan Saldo Kas pada BLU yang telah disahkan pendapatan dan belanja ke KPPN, tidak termasuk pendapatan dan belanja BLU yang belum disahkan ke KPPN.

Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kas di Kementerian Negara/Lembaga merupakan Saldo Kas yang berada di Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari pengesahan hibah dalam bentuk uang yang langsung diterima

oleh Kementerian Negara/Lembaga.

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1) Transaksi Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan.

3) Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran

Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:

1) Transaksi Belanja Negara/Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3) Transaksi Pengeluaran Transfer

Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus oleh pemerintah pusat.

4) Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan, dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang PNBPN, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), dan piutang lainnya yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam piutang lainnya adalah piutang bunga atas pemberian pinjaman Rekening Dana

Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD).

Pada LKBUN Tahun 2024 *Audited* ini, Piutang yang disajikan antara lain Piutang Bukan Pajak BA-BUN, Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan Uang Muka Belanja.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- 1) harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian,
- 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, BMN berupa persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah yang sudah tidak berada dalam penguasaannya namun belum mendapatkan persetujuan pemindahtanganan, dikecualikan dari ketentuan pelaksanaan opname.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka pendek termasuk dalam kelompok aset lancar. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca per 31 Desember 2024 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi Non Permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP), atau nasabah BPR.

LKBUN Tahun 2024 *Audited* menyajikan Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir pada BLU Kementerian/Lembaga yang pendanaan Dana Bergulir berasal dari BA 999.03 (Investasi Pemerintah). Selain itu LKBUN juga menyajikan Investasi Non Permanen Lainnya pada

Kementerian Perindustrian dan Lembaga Manajemen Aset Negara Kementerian Keuangan.

Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/ diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

Penilaian Investasi Non Permanen Lainnya menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat, misalnya dana bergulir.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada badan usaha yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN. Termasuk dalam investasi permanen adalah nilai ekuitas (kekayaan bersih) Bank Indonesia (BI).

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Aset-aset yang berstatus BPYBDS telah dikeluarkan dari neraca LKKL.

Penyertaan Pemerintah pada lembaga internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan (*net realizable value*). Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap

yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca UAPBUN/UAKPBUN TK per 31 Desember 2024 pada harga perolehan.

Sesuai ketentuan pasal 40 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2018 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak memenuhi batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas tidak dikapitalisasi sebagai penambah nilai aset (diperlakukan sebagai biaya), kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Dalam LKBUN Tahun 2024 *Audited*, seluruh aset tetap yang dikelola oleh UAPBUN selaku pengguna barang telah disusutkan/didepresiasi. Kebijakan akuntansi umur ekonomis dan nilai buku aset secara nasional sebagai dasar penyusutan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Selain berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, terdapat beberapa aset dalam pengelolaan BA BUN yang tata cara penyusunannya diatur tersendiri. Pengaturan khusus tersebut meliputi:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 188/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerja sama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 207/PMK.05/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-1/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan BMN yang berasal dari KKKS berupa Aset Lainnya pada Laporan Keuangan Transaksi Khusus Bendahara Umum Negara;
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, serta dana lain yang sejenis.

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) minyak dan gas bumi. Di samping itu, piutang macet Kementerian Negara/Lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Aset KKKS yang disajikan pada LKBUN Tahun 2024 *Audited* adalah aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian yang belum diserahkan kepada Pemerintah. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK. Aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Terhadap pengakuan Aset KKKS sebagai Aset Lain-lain, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan aset tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menyatakan bahwa seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang

dibeli Kontraktor menjadi Milik/Kekayaan Negara. Dengan demikian, Pemerintah tidak mengakui adanya kewajiban atas pengakuan Aset KKKS.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan dan piutang pemberian pinjaman yang berasal dari Naskah Perjanjian Pemberian Pinjaman (NPPP) tahun 2009 dan setelah tahun 2009.

Terkait dengan pelaporan Badan Lainnya diantaranya Otorita Asahan, Yayasan Gedung Veteran, dan Taman Mini Indonesia Indah disajikan sebagai Aset Lainnya dari Ekuitas Pada Unit Badan Lainnya.

8. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Utang SBN Jangka Pendek, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Utang SBN Jangka Pendek adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan. Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai bagian lancar.

Termasuk juga bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi yang dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

Pengakuan Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

- 1) terdapat kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
- 2) penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah.

Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk.

Dalam hal besaran final nilai kompensasi ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban kompensasi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang-utang jangka panjang lainnya.

Pengukuran Utang Kompensasi Jangka Pendek:

Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:

- 1) kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
- 2) besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah

Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000.411980 dan 508.000.084980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada kontraktor kontrak kerjasama berdasarkan verifikasi yang dilakukan Pemerintah bersama SKK Migas.

Estimasi Kurang Bayar Tagihan Belanja Subsidi

Kewajiban subsidi diestimasi merupakan tagihan kurang pembayaran belanja subsidi kepada pemerintah yang diakui saat KPA BUN belanja subsidi menetapkan nilai estimasi kewajiban kurang bayar belanja subsidi atau dokumen yang dipersamakan. KPA tetap memperhatikan nilai yang andal terkait derajat kepastian estimasi kewajiban berdasarkan asas konservatif harus dilaporkan. Derajat kepastian nilai estimasi kewajiban belanja subsidi dapat disusun dalam kertas kerja yang didukung dengan data sumber yang andal

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Utang jangka panjang pemerintah dapat bersumber dari sumber pinjaman dan sumber penerbitan SBN Jangka Panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman diakui pada saat tanggal valuta (*value date*) sebagaimana tercantum dalam *Notice of Disbursement (NoD)*, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan yang tercantum dalam NoD. Nilai utang jangka panjang dari sumber pinjaman disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber pinjaman menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam PMK No. 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang diakui pada saat tanggal setelmen yang tercantum dalam dokumen setelmen, dan diukur sebesar nilai nominal sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN. Nilai utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN disajikan sebagai utang jangka panjang di Neraca dalam pos kewajiban jangka panjang.

Utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN yang menggunakan mata uang asing dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal setelmen sesuai dengan hasil ketetapan penerbitan SBN.

Pada setiap periode pelaporan semesteran dan tahunan, saldo posisi (*outstanding*) utang jangka panjang dari sumber pinjaman dan utang jangka panjang dari sumber penerbitan SBN Jangka Panjang yang menggunakan mata uang asing yang telah dilakukan penjabaran ke dalam nilai rupiah, dilakukan penyesuaian dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca pelaporan semesteran dan tahunan.

Penyesuaian atas penjabaran nilai rupiah utang jangka panjang pada periode semesteran dan tahunan dapat menghasilkan nilai perhitungan selisih kurs belum terealisasi yang dicatat sebagai pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan mempengaruhi penurunan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah atau beban selisih kurs belum terealisasi yang mempengaruhi penambahan nilai saldo utang dalam penjabaran rupiah. Nilai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di LO dalam pos kegiatan nonoperasional lainnya.

Utang jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman program dan pinjaman proyek yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari 1 (satu) tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai kewajiban jangka panjang.

c. Konversi Pinjaman

Konversi pinjaman merupakan strategi Direktorat Jenderal Pengelola Pinjaman dan Risiko (DJPPR) selaku BA BUN 999.01 dalam melakukan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang berasal dari penarikan pinjaman.

Konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pertukaran atau konversi yang disetujui oleh pemberi pinjaman (kreditur) dengan memanfaatkan tingkat suku bunga yang rendah

untuk pinjaman dan/atau disertai dengan konversi mata uang asing lama dengan mata uang asing baru yang disepakati.

Pada saat tanggal pelaksanaan konversi pinjaman, dapat mengakibatkan selisih lebih atau kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman yang mempengaruhi nilai *outstanding* pinjaman dalam mata uang asing baru terkonversi maupun penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah.

Selisih lebih perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih besar dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih besar dari semula.

Selisih kurang perhitungan hasil pelaksanaan konversi pinjaman merupakan nilai *outstanding* pinjaman yang belum terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah lebih kecil dari nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah, sehingga nilai *outstanding* pinjaman yang terkonversi dan penjabaran mata uang asingnya ke dalam rupiah menjadi lebih kecil dari semula.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih lebih perhitungan, maka nilai selisih lebih perhitungan dicatat sebagai beban penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 596611 (Beban Lain-lain) dan menambah nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

Dalam hal hasil pelaksanaan konversi pinjaman menghasilkan selisih kurang perhitungan, maka nilai selisih kurang perhitungan dimaksud dicatat sebagai pendapatan penyesuaian untuk disajikan di Laporan Operasional menggunakan akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan mengurangi nilai *outstanding* utang jangka panjang pinjaman terkait di Neraca.

UAKPA BUN 999.01 melakukan penjelasan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terhadap penyajian akun 491311 (Pendapatan Penyesuaian Lainnya) dan/atau akun 596611 (Beban Lain-lain) di Laporan Operasional yang timbul dari pelaksanaan konversi pinjaman, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) identitas pinjaman (loan ID) yang menjadi obyek konversi pinjaman;
- 2) perubahan tingkat suku bunga yang menjadi obyek konversi pinjaman; dan
- 3) kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan konversi pinjaman.

9. Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena (i) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau (ii) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Kewajiban kontinjensi belum diatur secara khusus dalam Standar Akuntansi Pemerintahan dengan PSAP tersendiri, tetapi di dalam PSAP No. 4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan paragraf 58 sampai dengan 62 sudah mensyaratkan bahwa kewajiban kontinjensi perlu diungkapkan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya.

10. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Dalam Basis Akrua, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas. Ekuitas disajikan dalam Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

11. Kurs Valuta Asing

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan lampiran I dijelaskan sebagai berikut:

- a. Paragraf 99 Kerangka Konseptual Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa "Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah".
- b. Paragraf 74 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP menyebutkan bahwa: "Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca".
- c. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 63-66 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
 - 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
 - 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
 - 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b) transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- d. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas Paragraf 43-45 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
 - 1) Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah

berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

- 2) Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.
 - 3) Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.
- e. PSAP 12 tentang Laporan Operasional Paragraf 53-56 Lampiran I PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP, menyebutkan bahwa:
- 1) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.
 - 2) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
 - 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
 - 4) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024 Audited, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang asing di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Dalam satu hari, Bank Indonesia menerbitkan dua publikasi kurs, sebagai berikut:

- a) Kurs Khusus Pemerintah (kurs tengah yang terbit pada pukul 08.00 WIB) merupakan kurs tengah pada H-1 yang diterbitkan oleh BI pada pukul 16.15 WIB. Kurs tersebut dihitung berdasarkan transaksi mata uang asing terhadap rupiah antar bank yang terjadi di pasar valuta asing Indonesia yang terjadi pada H-1;
- b) Kurs Penutup (kurs tengah yang terbit pada pukul 16.15 WIB) merupakan kurs yang dihitung berdasarkan transaksi mata uang asing terhadap rupiah antar bank yang terjadi di pasar valuta asing Indonesia yang terjadi pada hari berkenaan. Kurs penutup (H+0) tersebut akan secara otomatis menjadi kurs tengah pada H+1 pukul 08.00 WIB.

Rekening koran yang dihasilkan oleh system pada BI mencatat transaksi harian menggunakan kurs tengah yang terbit pada pukul 08.00 WIB. Namun, transaksi tersebut akan direvaluasi berdasarkan kurs tengah yang diperbaharui datanya pada pukul 16.15 WIB. Revaluasi tersebut dilakukan ketika BI telah melakukan tutup buku/*End of Day (EoD)*. Oleh karena itu, kurs tengah yang digunakan sebagai referensi kurs acuan dalam konversi nilai valuta asing ke nilai ekuivalen rupiah untuk keperluan penyajian laporan keuangan menggunakan kurs tengah pada tanggal pelaporan yang

datanya diperbaharui setiap pukul 16.15 WIB yang kemudian disebut sebagai kurs penutup.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup yaitu kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Pada tahun 2021 terjadi perubahan kebijakan penggunaan kurs BI yang digunakan sebagai acuan penjabaran nilai mata uang asing di tanggal pelaporan. Perubahan kebijakan tersebut merujuk pada kebijakan BI yang mempublikasikan kurs penutup sebagai kurs untuk keperluan pelaporan. Kebijakan akuntansi terkait penggunaan kurs penutup BI pada entitas lingkup BUN diatur dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-258/PB/2021 tanggal 22 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas penggunaan Kurs Penutup pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan atau selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*). Dengan demikian LKBUN Tahun 2024 Audited menyajikan selisih kurs belum terealisasi atas kas dan utang kepada pihak ketiga dalam mata uang asing, bagian lancar pemberian pinjaman, utang luar negeri, pemberian pinjaman, utang jangka panjang luar negeri, dan SBN Valas sebagai pendapatan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi pada Laporan Operasional, kenaikan/penurunan ekuitas pada Neraca, dan penyesuaian pada Laporan Arus Kas.

Kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2024 dan kurs penutup BI tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	16.157,00	15.439,00
Dolar Australia [AUD]	1	10.052,89	10.552,56
Dolar Canada [CAD]	1	11.245,52	11.661,76
Franc Swiss [CHF]	1	17.883,67	18.352,45
Yuan China [CNY]	1	2.213,48	2.176,02
Kroner Denmark [DKK]	1	2.255,71	2.292,35
EURO [EUR]	1	16.822,67	17.086,34
Poundsterling Inggris [GBP]	1	20.296,42	19.683,18
Yen Jepang [JPY]	100	103,43	10.920,60
Korean Won [KRW]	1	10,96	11,91
Special Drawing Right [SDR]	1	21.070,83	20.714,04

Dalam penyajian LKBUN Tahun 2024 Audited, sebagai dasar kebijakan serta perlakuan selisih kurs atas investasi pada bentuk mata uang asing dan mata uang rupiah, di mana investasi dalam mata uang asing, selisih kursnya masuk pada Laporan Operasional dan investasi mata uang rupiah yang dasar pencatatannya menggunakan mata uang asing yang dirupiahkan, selisih kursnya masuk dalam komponen LPE.

Selain itu, secara khusus pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas) dalam penyusunan LKBUN Tahun 2024 Audited diatur tersendiri melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-19/PB/2016 tentang Perlakuan Akuntansi Selisih Kurs pada Rekening Milik BUN. Dalam Perdirjen tersebut antara lain mengatur bahwa dalam rangka pengelolaan kas, Kuasa BUN dapat:

- menyimpan kas dalam mata uang asing;
- melakukan konversi;
- melakukan kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan/atau

d. melakukan pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Pengelolaan kas di atas dapat menimbulkan selisih kurs yang terdiri dari:

- a. Selisih Kurs Belum Terealisasi (*unrealized*);
- b. Selisih Kurs Terealisasi (*realized*).

Dalam penyusunan, Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas): LKBUN

Selisih kurs yang belum terealisasi diakui pada saat translasi/ penjabaran saldo Kas di Rekening Milik BUN dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih Kurs Belum Terealisasi dilakukan penyesuaian pada saat Kuasa BUN melakukan:

- a. kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dalam mata uang asing yang sama; dan
- b. pembayaran dengan menggunakan mata uang asing.

Selisih kurs belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut dibukukan dengan menggunakan akun Selisih Kurs (311711). Pada akhir periode pelaporan (bulanan, semesteran, dan tahunan), saldo akun Selisih Kurs (311711) diakui sebagai Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi (491111) apabila bersaldo kredit (negatif) dan diakui sebagai Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211) apabila bersaldo debit (positif) sehingga akan tersaji dalam Laporan Operasional.

Selisih Kurs Terealisasi diakui pada saat Kuasa BUN melakukan konversi. Konversi tersebut dapat terjadi:

- a. dari mata uang asing ke mata uang rupiah; dan/atau
- b. dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.

Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi transaksi dan diperhitungkan dengan Selisih Kurs Belum Terealisasi yang telah dihitung sebelumnya. Selisih Kurs Terealisasi dan penyesuaian Selisih Kurs dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dan dibukukan sebagai berikut:

- a. untuk Selisih Kurs Terealisasi yang dihasilkan dari transaksi konversi, akun yang digunakan adalah Pendapatan Dari Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (425751) atau akun Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN (581415).
- b. untuk penyesuaian Selisih Kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar Rekening Milik BUN dan pembayaran, akun yang digunakan adalah SILPA (311211).

Untuk selisih kurs pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Utang dan Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Hibah, diatur sebagai berikut:

- a. Sesuai PMK Nomor 160/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah, selisih kurs belum terealisasi dicatat sebagai kerugian/pendapatan selisih kurs belum terealisasi pada Laporan Operasional dan disajikan pada Kegiatan Non Operasional;
- b. Beban/Pendapatan Selisih Kurs yang timbul sebagai akibat dari perbedaan kurs pada tanggal SPP dengan SP2D seluruhnya dihilangkan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- 1) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi pengeluaran pembiayaan (72xxxx) dijurnal ke akun utang (22xxxx);
- 2) Beban/pendapatan selisih kurs (581611/423943) yang muncul sebagai akibat dari transaksi 54xxxx dijurnal ke akun sesuai dengan SPM/SP2D (54xxxx).

12. Transaksi Non Anggaran pada Laporan Arus Kas

Transaksi Transitoris (non anggaran) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu:

a. Transaksi transit

Transaksi transit adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.

b. Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari potongan langsung gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai negeri/pejabat negara, iuran asuransi kesehatan yang disetor oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil Pusat/Daerah untuk disalurkan/dikembalikan kepada Pihak Ketiga, serta transaksi penerimaan dan penyetoran pajak rokok.

c. Transaksi pemindahbukuan dan kiriman uang

Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Negara. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA dan Laporan Operasional.

d. Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN

Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUN merupakan transaksi antara rekening BUN dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

13. Satuan Kerja Transaksi Khusus Suspen Penerimaan

Suspen Penerimaan merupakan transaksi penerimaan yang diterima kasnya di Kas Negara tetapi tidak teridentifikasi entitas penyetornya dan/atau tidak diakui oleh Kementerian Negara/Lembaga/Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Untuk Laporan Keuangan BUN Tahun 2024 *Audited* telah dibentuk satuan kerjanya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-801/PB/2016 tentang Penunjukan KPPN Khusus Penerimaan Sebagai satuan kerja transaksi khusus suspen penerimaan. Pembentukan satker ini merupakan salah satu bentuk pengendalian atas penerimaan Negara dan upaya menyelesaikan permasalahan suspen penerimaan. Satker Transaksi Khusus Suspen Penerimaan merupakan UAKPA BUN TK lingkup Ditjen Perbendaharaan yang bertugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Penyelesaian atas suspen penerimaan dilakukan terhadap suspen transaksi pendapatan, pengembalian belanja, dan/atau penerimaan transitoris, dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Transaksi setoran penerimaan yang tidak teridentifikasi di dalam SPAN karena COA tidak lengkap; yang terdiri dari:

- 1) Suspen kode satker (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZXXX menggunakan kode akun sesuai setoran);
 - 2) Suspen kode BA, ES1 (SPAN mereklasifikasi menjadi ZZZ ZZ dengan kode akun sesuai setoran);
 - 3) Suspen kode akun (SPAN mencatat dengan kode akun 498111).
- b. Transaksi setoran dengan kode COA lengkap, namun tidak diakui oleh satker pada saat pelaksanaan rekonsiliasi antara UAKPA dengan KPPN yang dibuktikan dengan surat pernyataan tidak mengakui transaksi penerimaan dari KPA satker.

14. Transfer ke Daerah (TKD)

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.05/2022, pada pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat SATD, dibentuk unit akuntansi dan pelaporan yang terdiri atas:

- a. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKPA BUN) yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
- b. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran BUN (UAKKPA BUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
- c. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu BUN (UAPBUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
- d. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN yang selanjutnya disingkat UABUN yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Realisasi anggaran TKD diakui pada saat diterbitkannya SP2D oleh KPPN mitra kerja KPA BA BUN TKD.

Beban TKD diakui pada saat:

- a. Resume tagihan yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN sehubungan dengan pelaksanaan realisasi anggaran TKD;
- b. Timbul kewajiban pemerintah atas kurang salur TKD yang menjadi hak Pemerintah Daerah dalam satu periode tahun anggaran berjalan.

Piutang TKD diakui sebagai piutang pada saat dana atas TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat melebihi jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dan telah ditetapkan sebagai piutang TKD berdasarkan:

- a. dokumen penetapan lebih salur transfer atau yang dipersamakan sebagaimana ketentuan dan peraturan mengenai pengelolaan TKD.
- b. dokumen hasil rekonsiliasi perhitungan sisa dana yang harus dikembalikan ke rekening kas umum negara antara KPA penyaluran TKD dengan Pemerintah Daerah dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian pengembalian lebih salur TKD.

Piutang Transfer Diestimasi merupakan piutang yang timbul dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran TKD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kelebihan salur transfer dan belum diketahui secara definitif Pemerintah Daerah penerima yang

kelebihan salur transfer dan/atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan lebih salur atau yang dipersamakan.

Piutang Transfer dan Piutang Transfer Diestimasi disajikan dalam Neraca pada pos aset lancar.

Kewajiban TKD diakui sebagai kewajiban pada saat dana TKD yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun anggaran yang bersangkutan kurang jumlah yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan telah ditetapkan sebagai kewajiban TKD berdasarkan dokumen penetapan kurang salur transfer atau yang dipersamakan dan sampai dengan tanggal laporan keuangan tahun berjalan belum dilakukan penyelesaian kurang salur TKD.

Dalam proses pelaksanaan anggaran TKD tahun anggaran berjalan yang masih berlangsung, pagu anggaran dan/atau sisa pagu anggaran TKD yang belum terealisasi tidak dicatat dan disajikan sebagai Kewajiban TKD di Neraca.

Kewajiban Transfer Diestimasi timbul dalam hal perhitungan rekonsiliasi dan verifikasi atas penyaluran TKD tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran yang lalu terdapat kekurangan salur transfer dan belum diketahui secara definitif Pemerintah Daerah penerima yang kekurangan salur dan/ atau belum ditetapkan dalam dokumen penetapan kurang salur atau yang dipersamakan. Nilai kewajiban transfer diestimasi diukur sebesar nilai nominal sesuai Berita Acara Nota Kesepakatan Final (BA NKF) atau dokumen lain yang menyatakan jumlah kewajiban-piutang diestimasi.

Kewajiban Transfer dan Kewajiban Transfer Diestimasi disajikan di neraca pada pos kewajiban jangka pendek.

15. Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban Putusan Hukum Inkracht

Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dalam hal terjadi tuntutan hukum, pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ditatausahakan dalam sistem aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Setiap Entitas Pelaporan yang memiliki perkara tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) melakukan pemutakhiran informasi pada sistem informasi tersebut. Selain melakukan pemutakhiran informasi tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), setiap Entitas Pelaporan juga melaporkan tuntutan hukum yang telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atas tuntutan hukum kepada Pemerintah dalam Laporan Keuangan dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- a. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, maka nilai tuntutan hukum tersebut disajikan sebagai utang kepada pihak ketiga dalam Neraca setelah tidak ada upaya lainnya;
- b. Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan hukum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), telah dilakukan teguran (*aanmaning*) dari PN setempat, dan masih ada upaya lainnya maka tidak dilakukan penyajian pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK; dan
- c. Yang dimaksud dengan upaya lainnya adalah masih ada upaya hukum lainnya yang dapat

dilakukan dan belum tersedia anggaran di Entitas Pelaporan/Bagian Anggaran yang bersangkutan.

Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (*carrying amount*) harus diungkapkan pada CaLK.

b. Tunggakan

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Pembayaran kepada Kreditur pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

c. Restrukturisasi Utang

Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

d. Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

16. Pencatatan Dana ASR

Pemerintah telah mengatur lebih lanjut atas kebijakan akuntansi dan pelaporan atas pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) yang ditempatkan pada rekening bersama antara SKK Migas/ BPMA dan KKKS terkait kegiatan hulu migas. Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan

nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022, pencatatan Dana ASR dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan kode satker 999975 yang dikonsolidasi ke BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 99908). Pencatatan dilakukan dengan menggunakan kode akun debet 163119 Dana Lainnya dan kredit 221919 Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya.

17. Pencatatan Kewajiban Dana Talangan Pengadaan Tanah PSN

Kewajiban talangan pengadaan tanah PSN untuk penyajian laporan keuangan tahun 2024 pada LK K/L diakui berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan antara LMAN, badan usaha, Satker penerima dan/atau pengguna tanah PSN, Badan Pengatur Jalan Tol, dan/atau pihak lain yang dibutuhkan konfirmasinya, untuk menentukan nilai kewajiban talangan pengadaan tanah PSN yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum terselesaikan (*outstanding*), baik skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 maupun skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020.

Berdasarkan berita acara atau dokumen yang dipersamakan, LMAN melakukan jurnal manual penyesuaian di aplikasi SAKTI 2024 untuk penghentian penyajian kewajiban atas pendanaan pengadaan tanah PSN (akun 212191) di Neraca atas akuntabilitas skema sesuai Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 sebesar saldo nilai tercatat penyajiannya per 31 Desember 2024, sebagai upaya konsistensi satu kesatuan penyajian dan penatausahaan perolehan tanah PSN yang berasal dari kewajiban talangan pengadaan tanah PSN pada Satker vertikal penerima dan/atau pengguna tanah PSN, dengan jurnal manual penyesuaian debet 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya pada kredit 391119 Koreksi Lainnya.

18. Konsolidasi dan Eliminasi

Kebijakan konsolidasi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan BUN adalah sebagai berikut:

- a. Mengkonsolidasi seluruh akun yang tercatat pada buku besar satker-satker lingkup BUN (BA 999);
- b. Mengkonsolidasi akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP (BA 999.00), dengan kaidah sebagai berikut:
 - 1) Konsolidasi Kas di Bendahara Pengeluaran dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111611 dan 111613 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399911. Saldo akun 111611 dan 111613 disajikan di neraca pos Kas pada Bendahara Pengeluaran sedangkan akun 399911 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
 - 2) Konsolidasi Kas pada BLU dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111911 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399912. Saldo akun 111911 disajikan di neraca pos Kas pada BLU sedangkan akun 399912 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
 - 3) Konsolidasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah dilakukan dengan menambahkan akumulasi nilai akun 111822 dari seluruh satker Pemerintah Pusat ke buku besar konsolidasian UAPBUN-AP (999.00) dengan akun kontra 399913. Saldo akun 111822 disajikan di neraca pos Kas Lainnya di K/L dari Hibah sedangkan akun 399913 disajikan di LPE pada pos Ekuitas BUN di K/L;
- c. Mengeliminasi penyajian ganda antar Bagian Anggaran BUN, dengan kaidah sebagai berikut:

- 1) Transaksi pengeluaran pembiayaan pembentukan Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dicatat oleh dua entitas yaitu UAPBUN Investasi Pemerintah (999.03) sebagai akun 164111 (Dana Penjaminan) dan UAPBUN-AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana Lainnya). Pada buku besar konsolidasian BUN, nilai akun 163119 akan dieliminasi sebesar nilai akun 164111 dengan akun kontra 391111. Eliminasi akun 163119 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain;
- 2) Transaksi RPATA dicatat oleh UAPBUN-AP (999.00) sebagai akun 163119 (Dana Lainnya) sedangkan UAKPBUN Transaksi Khusus (999.99) dan UAPBUN Belanja Lain-lain (999.08) juga mencatat transaksi tersebut sebagai akun 163139 (Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga). Oleh karena itu pada buku besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi atas akun 163139 dengan akun kontra 391111. Eliminasi akun 163139 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Dana Yang Dibatasi Penggunaannya, sedangkan akun 391111 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Koreksi Lain-Lain;
- 3) Kebijakan konsolidasi atas akun Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada buku besar seluruh satker lingkup Pemerintah Pusat untuk disajikan pada laporan keuangan UAPBUN-AP mengakibatkan nilai Kas di Bendahara Pengeluaran pada UAPBUN-AP termasuk Kas di Bendahara Pengeluaran pada Bagian Anggaran BUN. Oleh karena itu pada buku besar konsolidasian BUN dilakukan eliminasi kembali atas akun 111611 dan 111613 beserta akun kontranya yaitu 399911 senilai saldo yang berada di Bagian Anggaran BUN. Eliminasi akun 111611 dan 111613 akan mempengaruhi neraca BUN pada pos Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan akun 399911 akan mempengaruhi LPE BUN pada pos Ekuitas BUN di K/L.

19. Kebijakan Akuntansi Terkait Properti Investasi

- a. Sehubungan dengan terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi (PSAP 17), terdapat kemungkinan satuan kerja (Satker) di lingkungan pemerintah pusat untuk melakukan reklasifikasi keluar dari pos Aset Tetap dan/atau pos Aset Lainnya atas penyajian aset berwujud yang bersifat properti.
- b. Paragraf 63 sampai dengan paragraf 66 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan paragraf 4 sampai dengan paragraf 14 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap, memberikan panduan bahwa aset tetap pemerintah yang disajikan di Neraca pos Aset Tetap diberikan tekanan hanya yang memenuhi kriteria:
 - 1) aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - 2) digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;
 - 3) dalam kondisi siap dipakai, dan
 - 4) jika aset tetap tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah, maka disajikan di Neraca di pos Aset Lainnya, termasuk dalam hal ini aset Kerjasama dalam kemitraan.
- c. PSAP 17 memberikan panduan prinsip akuntansi berlaku umum bagaimana suatu Satker memperlakukan kebijakan akuntansi atas aset berwujud yang bersifat properti yang mengandung unsur kejadian digunakannya aset tersebut untuk menghasilkan pendapatan sewa atau intensi untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

- d. Atas hal tersebut, untuk kebutuhan penerapan PSAP 17 di lingkungan pemerintah pusat, diperlukan kebijakan teknis akuntansi yang bersifat *regulatory-based accounting* yang memberikan panduan pencatatan dan penyajian Barang Milik Negara (BMN) yang bersifat properti yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau intensi untuk meningkatkan nilai aset.

20. Kebijakan Akuntansi Pajak Ditanggung Pemerintah (Pajak DTP)

- a. Transaksi atas Pajak DTP dan Bea Masuk (BM) DTP mengakibatkan adanya aliran ekonomi yang terjadi dalam lingkup entitas pemerintah pusat dengan mengakui adanya pendapatan dan belanja dengan nilai yang sama. Berbeda dengan perlakuan belanja perpajakan (*tax expenditure*), dimana pemerintah tidak mengumpulkan pajak dari pihak ketiga. *Tax expenditure* tidak dialokasikan dalam mekanisme penganggaran maupun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran terhadap APBN sehingga *tax expenditure* tersebut dilaporkan secara terpisah dari Laporan Keuangan oleh Satuan Kerja (Satker) yang mempertanggungjawabkan alokasi anggaran belanja subsidi untuk Pajak DTP dan BM DTP maupun pendapatan atas Pajak DTP dan BM DTP.
- b. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan
 - 1) Pajak DTP dan BM DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA 015) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan, yaitu pada saat SPM Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan dan nihil dengan potongan penerimaan Pajak DTP atau BM DTP telah diterbitkan SP2D-nya oleh KPPN.
 - 2) Dengan demikian secara bersamaan dengan pengakuan pendapatan Pajak DTP dan BM DTP pada potongan SPM/SP2D, Belanja Subsidi Pajak DTP dan BM DTP diakui oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA 999) melalui mekanisme penerbitan SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan yang diajukan oleh Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07).
 - 3) Belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP diukur sebesar nilai SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan, dan pendapatan dari Halm. 4 dari 8 Pajak DTP atau BM DTP diukur sebesar nilai potongan pada SPM/SP2D Belanja Subsidi Pajak DTP atau BM DTP yang bersifat pengesahan.
 - 4) Nilai belanja subsidi Pajak DTP atau BM DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan BUN (BA 999) melalui Satker BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebagai belanja subsidi di LRA dan sebagai beban subsidi di LO pos kegiatan operasional.
 - 5) Nilai pendapatan Pajak DTP atau BM DTP disajikan oleh entitas akuntansi/pelaporan Kementerian Keuangan (BA 015) sebagai pendapatan perpajakan di LRA dan sebagai pendapatan-LO perpajakan di LO pos kegiatan operasional.
 - 6) Belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP dan pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP diungkapkan secara memadai dan paling sedikit menjelaskan informasi mengenai:
 - a) Nilai realisasi anggaran masing-masing belanja subsidi Pajak DTP/BM DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP/BM DTP; dan
 - b) Jenis belanja subsidi Pajak DTP/BM DTP dan/atau pendapatan Pajak DTP/BM DTP.
- c. Konsolidasi Transaksi atas Pajak DTP dan BM DTP di Tingkat LKPP

1) Konsolidasi Laporan Keuangan di LRA

- a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LRA seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.
- b) Tidak ada eliminasi atas penyajian belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP terhadap penyajian pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP.
- c) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP disajikan di LRA secara bruto pada masing-masing pos pendapatan perpajakan dan pos belanja subsidi.
- d) Penyajian pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP di LRA sebagai ketaatan dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran yang diamanatkan dan ditetapkan dalam APBN/APBN-P, sehingga penyajian realisasinya diperbandingkan dengan pagu anggarannya dalam satu tahun anggaran.

2) Konsolidasi Laporan Keuangan di LAK

- a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LAK yang ada di entitas pelaporan BUN yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- b) Tidak ada eliminasi atas penyajian arus kas masuk pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan penyajian arus kas keluar belanja subsidi untuk Pajak DTP dan/atau BM DTP.
- c) Konsolidasi pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP disajikan di LAK secara bruto masing-masing pos arus kas dari operasi.
- d) Penyajian arus kas dari operasi secara bruto di LAK terhadap pendapatan Pajak DTP dan/atau BM DTP dan belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP memberikan informasi historis transaksional masing-masing pos arus kas dari operasi pemerintah, dan dapat juga digunakan sebagai pengendalian dan konsisten perlakuan akuntansi atas transaksi berbasis kas yang berlaku terhadap penyajian LRA dan LAK.

3) Konsolidasi Laporan Keuangan di LO

- a) Entitas konsolidator pelaporan tingkat LKPP menggabungkan LO seluruh entitas pelaporan bagian anggaran, baik Bagian Anggaran Kementerian
- b) Negara/Lembaga maupun Bagian Anggaran BUN.

Dalam melakukan konsolidasi sebagaimana dimaksud angka 1), diperlukan eliminasi akun-akun timbal balik di tingkat LKPP terhadap penyajian di LO untuk nilai beban subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang berhubungan dengan penyajian pendapatan – LO Pajak DTP dan/atau BM DTP dengan nilai yang sama sebagaimana didasarkan dalam satu dokumen yang sama dalam SPM/SP2D belanja subsidi Pajak DTP dan/atau BM DTP yang bersifat pengesahan dengan potongan pajak DTP dan/atau BM DTP tahun anggaran berjalan.

21. Kebijakan Akuntansi UPSL THT

- a. Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 52/PMK.02/2023 yang merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 25/PMK.02/2013, yang mengatur bahwa *Unfunded Past Service Liability* atas Program THT (UPSL THT) PT Taspen (Persero) yang diakui dalam Peraturan Menteri ini adalah *Unfunded PSL* yang terjadi akibat kondisi a. perubahan formula manfaat Program THT

PNS; b. kenaikan besaran gaji pokok PNS yang menjadi dasar pembayaran manfaat Program THT PNS; dan/atau c. perubahan metode dan/atau asumsi aktuarial yang disetujui oleh Menteri Keuangan.

- b. Kebijakan Akuntansi pencatatan UPSL THT tahun 2024 adalah disajikan sebagai Beban Tunjangan Hari Tua (*Unfunded Liability*) (513161) pada Utang Kepada Dana Pensiun dan THT (Kewajiban Jangka Panjang). Pencatatan dalam Kewajiban Jangka Panjang dilakukan karena rencana penyelesaian kewajiban yang melebihi 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- c. Pengakuan dan penyajian UPSL THT sebagai Kewajiban Jangka Panjang, sejalan dengan pengaturan dalam Paragraf 11 PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa "Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan". Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

22. Treasury Deposit Facility

- a. TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia.
- b. Atas saldo dana TDF, pemerintah daerah akan menerima remunerasi yang tarifnya sama dengan persentase yang diterima pemerintah dari BI. Remunerasi dibayarkan dari RKUN ke RKUD setiap 3 bulan sekali, berdasarkan rekonsiliasi antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPb dengan Direktorat Transfer Umum DJPK.
- c. *Holding period* TDF ditetapkan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya DAU dan/atau DBH di fasilitas TDF pada Bank Indonesia. Setelah masa *holding period*, dana tetap di fasilitas TDF sampai dengan dilakukan penyaluran ke RKUD.
- d. Penarikan dana di rekening TDF dapat dilakukan dalam masa *holding period* dan setelah masa *holding period* berdasarkan permintaan kepala daerah. Penarikan dana pada masa *holding period* dilaksanakan dengan kondisi kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana, kebutuhan kas Daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya; dan/atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.
- e. Sedangkan untuk penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa *holding period* dilaksanakan apabila Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan perbaikan pelayanan public, infrastruktur dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah, Investasi, penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri, terdapat kebutuhan kas daerah yang mendesak akibat bencana, dan/atau terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh Menteri dalam Keputusan Menteri.

23. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

- a. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat RPATA adalah rekening lain-lain milik BUN untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

- b. RPATA dibuka dengan nama Rekening Lain BI RPATA yang merupakan satu rekening yang digunakan untuk menampung dana atas transaksi dari seluruh Satker untuk membayar pekerjaan.
- c. Dana yang tersimpan di RPATA selanjutnya akan dibayarkan apabila:
 - 1) pekerjaan selesai 100%,
 - 2) masa kontrak berakhir; atau
 - 3) batas waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan berakhir.
- d. Dalam hal setelah dilakukan pembayaran masih terdapat saldo dalam RPATA atas sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan, dananya akan dipindahbukukan ke RKUN.

24. Penyajian Dana Equipment Services

- a. Kebijakan Akuntansi dan pelaporan atas Dana E & S yang berlaku mulai tahun Pelaporan Keuangan 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Untuk memenuhi prinsip pelaporan secara berjenjang maka pencatatan dan pelaporan Dana E & S dilaksanakan oleh satker yang secara langsung mengelola Dana E & S yaitu:

No.	Kode	Nama	Bagian Anggaran	Keterangan
1	999975	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	BUN-Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08)	Dilakukan Penggabungan Pada Laporan Keuangan BUN
2	447009	Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)	Kementerian ESDM-Ditjen Migas (020.04)	Dilakukan penggabungan pada Laporan Keuangan KESDM

- 2) Pencatatan dan pelaporan Dana E&S dilakukan secara periodik, dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan, dan tidak menyajikan secara transaksional, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut:

- a) Dana E & S yang saat ini berada di Rekening Pemerintah Lainnya belum dapat diakui sebagai PNBPN. Dana tersebut belum sepenuhnya menjadi hak negara karena belum ada pengaturan hukum yang spesifik, seperti peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menetapkan Dana E & S sebagai PNBPN dan mekanisme penggunaannya. Dana E & S dapat diakui sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya-Dana Lainnya (akun 163119) dengan kontra akun Kewajiban Jangka Panjang-Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya (akun 221919);
- b) Saldo Dana E & S disajikan di Neraca SKK Migas dan BPMA dalam mata uang rupiah. Jika terdapat Dana E & S dalam mata uang selain rupiah maka dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs Jisdor/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan sesuai peruntukannya;
- c) Terhadap saldo Dana E & S perlu diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang memuat antara lain dasar hukum Dana E & S, daftar bank penyimpan dan rekeningnya, rekapitulasi mutasi tambah dan kurang, jumlah saldo dana, nilai pokok dana dan penambahannya yang berasal dari bunga/jasa giro/pengembangan, dan pengungkapan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka penyajian secara wajar.

25. Penyaluran Dana SP2D Yang Belum Dapat Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024

Penyaluran Dana SP2D Yang Belum Dapat Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-18/PB/2024

tentang Mekanisme Penyelesaian Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana yang Belum Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana SP2D dilakukan melalui mekanisme:
 - 1) Sistem *Overbooking*; dan
 - 2) *Window Time* Sistem BI-RTGS/SKN-BI.
- b. Batas waktu Sistem *Overbooking* mengikuti waktu operasional Sistem *Overbooking* pada Bank Operasional.
- c. Batas waktu *Window Time* Sistem BI-RTGS/SKN-BI diatur oleh Bank Indonesia selaku penyelenggara Sistem BIRTGS/SKN-BI.
- d. Dalam hal terjadi transaksi pengeluaran negara di luar batas waktu operasional Sistem *overbooking* dan *window time* Sistem BI-RTGS/SKN-BI sehingga terdapat dana SP2D tanggal 31 Desember 2024 yang belum disalurkan ke pihak penerima, maka dana SP2D dimasukkan ke Rekening Pengeluaran Lainnya, yang digunakan untuk menampung dana SP2D yang belum dapat disalurkan pada 31 Desember 2024.
- e. Mekanisme Pemindahbukuan Dana SP2D Pada Tanggal 31 Desember 2024 yang Belum Dapat Disalurkan Kepada Pihak Penerima antara lain sebagai berikut:
 - 1) Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan Bank Operasional melakukan rekonsiliasi atas dana SP2D sebagaimana yang belum dapat disalurkan pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi dana SP2D, Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPT untuk memerintahkan Bank Operasional:
 - a) Memindahbukukan dana dari RPKBUNP SPAN ke Rekening Pengeluaran Lainnya paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 23.59 WIB.
 - b) Memasukkan data SP2D yang belum disalurkan ke dalam Cash Management System (CMS).
 - 3) Pada tanggal 2 Januari 2025, Direktur Pengelolaan Kas Negara menerbitkan SPT untuk memerintahkan Bank Operasional memindahbukukan dana dari Rekening Pengeluaran Lainnya ke RPKBUNP SPAN.
 - 4) Berdasarkan SPT tersebut, Bank Operasional memindahbukukan dana dari Rekening Pengeluaran Lainnya ke RPKBUNP SPAN.
 - 5) Setelah pemindahbukuan dilakukan oleh Bank Operasional, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melakukan persetujuan data SP2D melalui CMS.
 - 6) Berdasarkan persetujuan Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Bank Operasional menyalurkan dana SP2D dari RPKBUNP SPAN ke rekening penerima.
- f. Rekening Pengeluaran Lainnya
 - 1) Rekening Pengeluaran Lainnya dibuka pada masing-masing Bank Operasional yang akan digunakan untuk menampung dana SP2D yang belum disalurkan setelah Sistem BIRTGS/SKN-BI tidak beroperasi pada tanggal 31 Desember 2024.
 - 2) Kuasa BUN Pusat membuka Rekening Pengeluaran Lainnya paling lambat pada bulan Desember 2024.

- 3) Kuasa BUN Pusat melakukan penutupan Rekening Pengeluaran Lainnya setelah seluruh dana SP2D disalurkan ke rekening penerima.

g. Akuntansi dan Pelaporan

- 1) Perlakuan akuntansi atas transaksi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran dana dari RPKBUNP SPAN dicatat sebagai realisasi anggaran berdasarkan data SP2D.
 - b) Penerimaan dana di Rekening Pengeluaran Lainnya dicatat sebagai penerimaan transitoris (nonanggaran).
- 2) Perlakuan akuntansi atas transaksi pada tanggal 2 Januari 2025 adalah sebagai berikut:
 - a) Pemindahan dana dari Rekening Pengeluaran Lainnya ke RPKBUNP SPAN dicatat sebagai kiriman uang antar rekening.
 - b) Pengeluaran dana pada RPKBUNP SPAN ke pihak penerima dicatat sebagai pengeluaran transitoris (nonanggaran).

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN BUN

Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2024 adalah sebesar **Rp274.898.283.178.566** atau mencapai **97,91 persen** dari target APBN 2024 sebesar **Rp280.774.447.910.000**. Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah berasal dari Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp240.510.919.462.810** dan Pendapatan Hibah sebesar **Rp34.387.363.715.756**. Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp 2.087.324.018.877** atau **0,77 persen** dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar **Rp272.810.959.159.689**. Rincian Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah Tahun 2024 dapat dilihat di **Lampiran LB1**.

Realisasi Belanja BUN pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp2.035.762.478.740.043** atau mencapai **98,57 persen** dari target APBN sebesar **Rp2.065.386.541.321.000**. Realisasi Belanja BUN Tahun 2024 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.172.219.672.257.679** dan Transfer ke Daerah sebesar **Rp863.542.806.482.364**.

Realisasi Pembiayaan BUN pada Tahun 2024 adalah sebesar **Rp554.888.579.353.028** atau mencapai **102,56 persen** dari target APBN sebesar **Rp541.032.171.563.000**. Realisasi pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar **Rp462.577.425.084.416** dan pembiayaan luar negeri sebesar **Rp92.311.154.268.612**. Seluruh pembiayaan negara berasal dari pembiayaan BUN.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan BUN dan Hibah

Realisasi Pendapatan dan Hibah Tahun 2024 sebesar **Rp274.898.283.178.566** berasal dari PNBP sebesar **Rp240.510.919.462.810** dan Pendapatan Hibah sebesar **Rp34.387.363.715.756**.

B.2.1.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 sebesar **Rp240.510.919.462.810** atau **97,11 persen** dari target sebesar **Rp247.672.619.000.000**. Realisasi PNBP Tahun 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp15.115.880.817.154** atau **5,92 persen** dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar **Rp255.626.800.279.964**. Realisasi PNBP berasal dari (i) Pendapatan Sumber Daya Alam; (ii) Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan; dan (iii) PNBP Lainnya.

B.2.1.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Realisasi Pendapatan Sumber Daya Alam Tahun 2024 adalah sebesar **Rp113.330.835.745.742** atau **91,53 persen** dari target APBN Tahun 2024 sebesar **Rp123.816.153.791.000**. Realisasi pendapatan SDA tersebut lebih kecil **Rp5.542.058.934.004** atau mengalami penurunan sebesar **4,66 persen** dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar **Rp118.872.894.679.746**. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan *lifting* minyak dan kontraksi ICP pada tahun 2024.

Pendapatan Sumber Daya Alam merupakan PNBP yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya alam, berasal dari pengolahan minyak bumi, gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. Sesuai dengan ketentuan perundangan, ketiga jenis pendapatan tersebut dibagikan ke daerah dalam rangka desentralisasi fiskal. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan SDA Tahun 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Minyak Bumi	89.248.050.000.000	77.961.123.337.930	87,35%
2	Pendapatan Gas Bumi	32.240.760.000.000	32.661.085.038.989	101,30%
3	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.327.343.791.000	2.708.627.368.823	116,38%
Jumlah		123.816.153.791.000	113.330.835.745.742	91,53%

Rincian realisasi Pendapatan SDA Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	(Kenaikan/ Penurunan)	Kenaikan/ (Penurunan)%
1	Pendapatan Minyak Bumi	77.961.123.337.930	87.408.885.465.416	(9.447.762.127.486)	(10,81)
2	Pendapatan Gas Bumi	32.661.085.038.989	28.769.670.492.312	3.891.414.546.677	13,53
3	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.708.627.368.823	2.694.338.722.018	14.288.646.805	0,53
Jumlah		113.330.835.745.742	118.872.894.679.746	(5.542.058.934.004)	(4,66)

Pendapatan Minyak Bumi

Pendapatan minyak bumi TA 2024 terealisasi sebesar Rp77.961.123.337.930 atau 87,35 persen dari estimasi APBN TA 2024 sebesar Rp89.248.050.000.000. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, pendapatan minyak bumi lebih rendah Rp9.447.762.127.486 atau 10,81 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan realisasi ICP pada tahun 2024. Selain itu, penurunan Pendapatan minyak bumi juga disebabkan penurunan nilai *lifting* pada tahun 2024.

Realisasi Pendapatan SDA Minyak Bumi sebesar Rp77.961.123.337.930 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari perhitungan alokasi PNBPN Migas yang menyebabkan perubahan alokasi Pendapatan Minyak Bumi menjadi Pendapatan Gas Bumi dan Pendapatan Minyak Mentah DMO sebagai berikut:

- Terdapat Koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan gas bumi (kode akun 421211) sebesar Rp32.661.085.038.989.
- Koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan minyak mentah DMO (kode akun 423132) sebesar Rp4.775.446.292.310.

Pendapatan Gas Bumi

Pendapatan Gas Bumi pada tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp32.661.085.038.989 atau mencapai 101,30 persen dari estimasi pendapatan pada APBN TA 2024 sebesar Rp32.240.760.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, realisasinya meningkat sebesar Rp3.891.414.546.677 atau 13,53 persen.

Pendapatan Gas Bumi Tahun 2024 sebesar Rp32.661.085.038.989 telah memperhitungkan koreksi atas reklasifikasi akun yang berasal dari hasil perhitungan alokasi PNBPN SDA Migas yang menyebabkan perubahan alokasi dari pendapatan minyak bumi menjadi pendapatan gas bumi, yaitu koreksi kurang atas reklasifikasi pendapatan minyak bumi (kode akun 421111) menjadi pendapatan gas bumi (kode akun 421211) sebesar Rp32.661.085.038.989.

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi

Realisasi Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan LRA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.708.627.368.823 atau mencapai 116,38 persen dari target Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi tahun 2024 sebesar Rp2.327.343.791.000. Keseluruhan

Pendapatan Panas Bumi Satker PNBP Khusus BUN Pengelola Panas Bumi merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian realisasi PNBP panas bumi dapat dilihat sebagai berikut.

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
a	Setoran Bagian Pemerintah	3.610.596.954.925	3.727.920.311.039	(3,15)
b	Reimbursement PPN	349.698.846.372	517.000.000.000	(32,36)
c	PBB Pertambangan Panas Bumi	447.695.185.254	439.988.647.320	1,75
d	Penggantian bonus produksi panas bumi	105.992.162.460	110.179.077.605	(3,80)
e	Pendapatan perusahaan Panas Bumi (a-b-c-d)	2.707.210.760.839	2.660.752.586.114	1,75
f	Pendapatan Perusahaan Panas Bumi pembulatan ke bawah	2.707.210.760.839	2.660.752.586.113	1,75
g	PNBP Panas Bumi yang berasal dari saldo cadangan reimbursement PPN	-	33.586.135.905	(100)
h	Pendapatan perusahaan Panas Bumi yang berasal dari kekurangan penyeteroran bagian pemerintah	1.416.607.984	-	100
Total Pendapatan Perusahaan Panas Bumi (f+g+h)		2.708.627.368.823	2.694.338.722.018	0,53

Realisasi Pendapatan Perusahaan Panas Bumi sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,53 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 terutama disebabkan oleh berkurangnya kewajiban pemerintah yang berasal dari pencadangan pembayaran kembali PPN dan pencadangan penggantian bonus produksi Panas Bumi meskipun realisasi SBP mengalami penurunan sebesar 3,15 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Perusahaan Panas Bumi selama 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 berasal dari Setoran Bagian Pemerintah setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakan (*reimbursement* PPN, Pajak Bumi dan Bangunan, serta penggantian bonus produksi panas bumi) sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

No	Badan Usaha	Wilayah Kerja Panas Bumi	Jumlah
1	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Kamojang, Jawa Barat	470.361.093.509
2	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Lahendong, Sulawesi Utara	118.700.922.590
3	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Ulubelu, Lampung	156.008.867.111
4	PT Pertamina Geothermal Energy, Tbk	Lumut Balai, Sumatera Selatan	-
5	Star Energy Geothermal Salak, Ltd	Gunung Salak, Jawa Barat	900.870.141.949
6	Star Energy Geothermal Salak Pratama, Ltd		
7	Star Energy Geothermal Darajat I, Ltd	Darajat, Jawa Barat	373.367.217.795
8	Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd		
9	PT Darajat Geothermal Indonesia		
10	Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	Wayang Windu, Jawa Barat	735.570.676.835
11	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng, Jawa Tengah	-
12	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha, Jawa Barat	14.881.833.416
13	<i>Faktor Pengurang: Pembayaran PBB *)</i>		61.133.384.382
	a. Sarulla Operations Ltd	Gunung Sibual-buali, Sumatera Utara	60.229.591.645
	b. Bali Energy, Ltd	Bedugul, Bali	513.324.477
	c. PT PLN Tulehu	Maluku Tengah, Maluku	390.468.260
PNBP Perusahaan Panas Bumi (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12-13)			2.708.627.368.823

Keterangan:

*) Pembayaran PBB sebesar Rp61.133.384.382 adalah pembayaran PBB untuk Wilayah Kerja yang belum menyetorkan bagian Pemerintah

B.2.1.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan

Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp86.384.593.538.563** atau sebesar **100,63 persen** dari target penerimaan selama Tahun 2024 sebesar **Rp85.845.465.000.000**.

Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.325.850.164.693 atau 5,27 persen apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2023 yang mencapai Rp82.058.743.373.870. Secara umum peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh membaiknya kinerja Badan Usaha pada tahun buku 2023. Perbaikan tersebut tercermin dari peningkatan realisasi Penerimaan Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023. Kondisi ini disebabkan oleh meningkatnya kinerja BUMN pada tahun buku 2023 utamanya pada sektor perbankan, sedangkan sektor non-perbankan mengalami penurunan. Dalam realisasi penerimaan bagian pemerintah dari pembagian dividen secara tunai pada periode TA 2024, juga termasuk pembayaran piutang dividen tahun-tahun sebelumnya.

Rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	%
Pend. Laba BUMN Perbankan	49.590.787.691.195	40.839.347.648.527	21,43
Pend. Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	35.982.197.522.268	40.377.896.128.343	(10,89)
Pend. Laba BUMN dibawah Kementerian Keuangan	811.608.325.100	841.499.597.000	(3,55)
Jumlah	86.384.593.538.563	82.058.743.373.870	5,27

Rincian Realisasi Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran LRA LB2.

B.2.1.1.3. Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya Tahun 2024 adalah sebesar **Rp40.795.490.178.505** atau **107,33 persen** dari target APBN Tahun 2024 sebesar **Rp38.011.000.208.000**. Realisasi PNPB Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.899.672.047.843 atau 25,41 persen dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp54.695.162.226.348. Penurunan Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya didominasi oleh Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening sebesar Rp10.108.817.763.579 atau 25,85 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan atas penempatan uang negara pada Bank Indonesia akibat adanya penurunan rata-rata saldo rekening harian. Realisasi PNPB Lainnya ini terdiri dari:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan Pengelolaan BMN	5.688.906.897.694	5.754.146.701.830	(65.239.804.136)	(1,13)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	161.185.250	456.468.837	(295.283.587)	(64,69)
Pendapatan Bunga dan Pengelolaan Rekening	28.994.741.912.984	39.103.559.676.563	(10.108.817.763.579)	(25,85)
Pendapatan Iuran dan Denda	33.449.201.660	8.990.578.863	24.458.622.797	272,05
Pendapatan Lain-lain	6.078.230.980.917	9.828.008.800.255	(3.749.777.819.338)	(38,15)
Jumlah	40.795.490.178.505	54.695.162.226.348	(13.899.672.047.843)	(25,41)

Rincian Realisasi Pendapatan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya dapat dilihat pada lampiran LRA LB3.

Realisasi PNBPN Lainnya pada BA BUN 999.01 (Pengelola Utang) tahun 2024 sebesar Rp3.926.058.890.083 berasal dari pengelolaan transaksi SBN mayoritas berasal dari pendapatan premium atas transaksi penerbitan SUN dan SBSN.

Realisasi PNBPN Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang Tahun 2024 lebih rendah sebesar Rp3.301.579.533.257 atau 45,68 persen daripada Tahun 2023 sebesar Rp7.227.638.423.340. Hal ini dikarenakan penurunan nilai pendapatan premium dalam rangka penerbitan SBN.

Pendapatan PNBPN Lainnya dari pengelolaan transaksi SBN berasal dari transaksi:

1. *Gain* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang sebesar Rp30.359.000.000.
2. Penjualan Obligasi Negara dan SBSN dalam rupiah berupa pendapatan premium atas transaksi penerbitan SUN dan SBSN sebesar Rp3.895.699.644.400.
3. Pengujian Evaluasi Tahunan atas Sistem Mitra Distribusi dalam Rangka Penjualan SUN Ritel 2024 sebesar Rp93.200.
4. *Wire test* dari BoFA dalam rangka Penerbitan *Global Bond* sebesar Rp15.522.
5. Pelaksanaan Pengujian Evaluasi Tahunan atas Sistem Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan SUN Ritel 2024 sebesar Rp148.000.
6. DRP Drill MPN G3 sebesar Rp10.000.
7. Percobaan Transfer Dalam Rangka Rencana Penerbitan Sukuk Valas Untuk Pembiayaan (Prefunding) Tahun 2025 Rp72.161.

Realisasi PNBPN Lainnya pada BA BUN 999.02 (Pengelola Hibah) tahun 2024 sebesar Rp404.410.273, sementara pada tahun 2023 terdapat realisasi PNBPN sebesar Rp0. PNBPN tersebut berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran yang Lalu pada Satker LDKPI yaitu pengembalian belanja hibah bantuan kemanusiaan Pemerintah Indonesia kepada Palestina tahun 2023 berupa obat-obatan dan barang medis habis pakai.

Penerimaan bukan pajak lainnya sebesar Rp1.415.020.328.033 pada BA BUN 999.03 (Pengelola Investasi Pemerintah) merupakan pendapatan yang berasal dari:

1. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah sebesar Rp144.765.627.268 terdiri dari Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* yang diterima dari PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo sebesar Rp8.502.554.683 dan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur sebesar Rp136.263.072.585. Pendapatan IJP *Loss Limit* dari PT Askrindo yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2024 merupakan realisasi kas atas pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2023. Pendapatan ini terkait dengan program Penjaminan *Loss Limit Gen-1*, yang telah berakhir pada tahun 2023. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pendapatan IJP *Loss Limit* dipungut dari pemberian dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo dan PT Askrindo yang melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku UMKM. Sedangkan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur dipungut berdasarkan perjanjian penjaminan proyek KPBU antara Pemerintah dengan Badan Usaha pelaksana proyek KPBU.
2. Setoran bunga IP PEN sebesar Rp274.119.975.903. Rincian penysetoran bunga yang berasal dari Perusahaan Negara penerima Investasi Jangka Panjang Pemerintah Non Permanen dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional dan setoran denda keterlambatan penysetoran bunga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp37.200.053.951 untuk kewajiban bunga periode 30 Oktober 2023 s.d. 29 April 2024. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT PN III No. 75 tanggal 28 Desember 2020.
 - b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp40.328.767.118 untuk kewajiban bunga periode 30 April 2024 s.d. 30 Oktober 2024. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT PN III No. 75 tanggal 28 Desember 2020.
 - c. Perum Perumnas sebesar Rp19.500.000.000 untuk kewajiban bunga periode 30 November 2023 s.d. 30 Mei 2024. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada Perumnas Nomor 179 tanggal 25 November 2020.
 - d. Perum Perumnas sebesar Rp19.500.000.000 untuk kewajiban bunga periode 30 Mei 2024 s.d. 30 November 2024. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada Perumnas Nomor 179 tanggal 25 November 2020.
 - e. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp81.283.854.167 untuk kewajiban bunga periode 30 Oktober 2023 s.d. 30 April 2024. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 173 tanggal 28 Desember 2020.
 - f. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp76.307.291.667 untuk kewajiban bunga periode 30 April 2024 s.d. 30 Oktober 2024. Perhitungan pembayaran bunga berdasarkan Perjanjian Pemberian Investasi Pemerintah RI kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor 173 tanggal 28 Desember 2020.
 - g. Terdapat setoran sebesar Rp9.000 yang sampai dengan batas waktu periode laporan belum teridentifikasi.
3. Pemindahan saldo dana dari RIBUN ke RKUN dalam rangka realisasi PNBPN Pemerintah sebesar Rp535.815.270.038, terdiri dari imbal hasil Investasi Pemerintah pada BP Tapera sebesar Rp510.725.086.120 dan imbal hasil optimalisasi dana cadangan penjaminan sebesar Rp25.090.183.918.
 4. Hasil penempatan dana pengelolaan Pinjaman PEN Daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp460.319.454.824, yang berupa pendapatan bunga Pinjaman PEN Daerah sebesar Rp459.667.927.719 dan pendapatan bunga deposito atas pengelolaan dana PEN PT SMI sebesar Rp651.527.105.

Realisasi PNBPN Lainnya pada BA BUN 999.04 (Pengelola Pemberian Pinjaman) tahun 2024 sebesar Rp1.746.743.610.602 diperoleh dari pengelolaan pemberian pinjaman yaitu Pendapatan Bunga sebesar Rp1.743.166.835.238, Pendapatan Denda sebesar Rp3.238.748.754, dan Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp338.026.610.

Realisasi PNBPN Lainnya pada BA BUN 999.05 (Pengelola Transfer ke Daerah) tahun 2024 sebesar Rp5.487.822.046.826 merupakan gabungan penerimaan dari masing-masing Satker BA 999.05. Rincian PNBPN Lainnya ditampilkan pada tabel berikut:

	Realisasi
KPA Penyalur BUN Dana Transfer Umum	3.832.871.747.000
KPA Penyalur BUN Dana Transfer Khusus	1.631.051.783.088
KPA Penyalur BUN DDIOKK	23.842.547.568
KPA Penyalur BUN DAK Fisik dan Dana Desa	55.048.650
Transfer Dana Perimbangan (DBH)	920.520
	5.487.822.046.826

Realisasi PNBPN Lainnya pada BA BUN 999.07 (Pengelola Belanja Subsidi) tahun 2024 sebesar Rp39.998.801.883 berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp39.990.676.669, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp8.106.080, dan Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) sebesar Rp19.134.

Realisasi Pendapatan PNBPN Lainnya pada BA BUN 999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain) Tahun 2024 sebesar Rp97.218.440.543. Realisasi tersebut Rp628.545.129.763 lebih rendah dari realisasi pada Tahun 2023 sebesar Rp725.763.570.306. Pendapatan negara tersebut terdiri atas Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp75.406.193.790, Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp7.199.052.707, dan Pendapatan Denda Lainnya sebesar Rp14.203.540.480, Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp360.438.000, Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga sebesar Rp49.204.066 dan Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp11.500. Realisasi pendapatan dari PNBPN Lainnya pada BA 999.08 mengalami penurunan signifikan dibanding tahun sebelumnya karena penurunan pengembalian belanja tahun sebelumnya terutama pengembalian belanja kompensasi.

Realisasi PNBPN Lainnya pada BA BUN 999.99 (Pengelola Transaksi Khusus) tahun 2024 adalah sebesar Rp28.082.223.650.262 terdiri dari Pendapatan Dari Penjualan BMN, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha, Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum, Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening dan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Denda, dan Pendapatan Lain-lain. Berikut rincian PNBPN Lainnya pada BA BUN 999.99:

No	Uraian	Tahun 2024
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	21.933.304.811.570
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	399.412.261.127
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	2.747.872.094
4	PNBP Pengelola KPPN KPH	3.826.591.542
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	3.921.483.682
6	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	207.326.632.292
7	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS	110.966.444.184
8	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	-
9	PNBP Setoran Lainnya Surplus Otoritas Jasa Keuangan	45.872.656.283
10	PNBP Satker Migas	4.848.940.188.304
11	PNBP Pengelola Panas Bumi	-
12	PNBP Pengelola BMN PKP2B	440.565.775.779
13	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	67.756.241.637
14	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	17.531.291.768
15	PNBP Pengelola BMN Idle	51.400.000
Jumlah		28.082.223.650.262

B.2.1.2. Pendapatan Hibah

Realisasi Anggaran atas Pendapatan Hibah selama Tahun 2024 sebesar **Rp34.387.363.715.756** atau **103,88 persen** dari jumlah yang dianggarkan sebesar **Rp33.101.828.910.000**. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp17.203.204.836.031** atau **100,11 persen** dibanding realisasi Tahun 2023 sebesar **Rp17.184.158.879.725**.

Rincian Pendapatan Hibah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
Hibah Dalam Negeri	32.247.196.309.907	15.361.429.146.772	109,92
Hibah yang Direncanakan	-	-	-
Hibah Langsung	32.247.196.309.907	15.361.429.146.772	109,92
Hibah Luar Negeri	2.140.167.405.849	1.822.729.732.953	17,42
Hibah yang Direncanakan	540.471.344.113	423.174.970.047	27,72
Hibah Langsung	1.599.696.061.736	1.399.554.762.906	14,30
Jumlah	34.387.363.715.756	17.184.158.879.725	100,11

Pendapatan Hibah bersumber dari Pendapatan Hibah dalam negeri sebesar **Rp32.247.196.309.907** merupakan Pendapatan Hibah dalam negeri tidak melalui kuasa BUN dalam bentuk uang dan Pendapatan Hibah luar negeri sebesar **Rp2.140.167.405.849** terdiri atas Pendapatan Hibah Luar Negeri yang direncanakan (melalui Kuasa BUN) sebesar **Rp540.471.344.113** dan Pendapatan Hibah Luar Negeri langsung (tidak melalui Kuasa BUN) sebesar **Rp1.599.696.061.736**. Kenaikan realisasi Pendapatan Hibah terutama dipengaruhi meningkatnya penerimaan pendapatan hibah dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara serentak pada tahun 2024 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum sebesar **Rp19.082.362.771.120** dan Badan Pengawas Pemilu sebesar **Rp6.047.008.032.779**. Sementara itu, atas non-pilkada serentak berjumlah **Rp9.257.992.911.857**. Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri berdasarkan pemberi hibah terdapat pada **Lampiran LB4**. Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri dirinci per Kementerian/Lembaga penerima hibah terdapat pada **Lampiran LB5**.

B.2.2. Belanja BUN

Realisasi Belanja BUN Tahun 2024 adalah sebesar **Rp2.035.762.478.740.043** atau **98,57 persen** dari anggaran sebesar **Rp2.065.386.541.321.000**. Realisasi Belanja BUN mengalami kenaikan sebesar **Rp66.774.550.076.190** atau **3,39 persen** dari realisasi Belanja BUN tahun 2023 yang sebesar **Rp1.968.987.928.663.857**. Realisasi Belanja BUN terdiri dari (i) Belanja Pemerintah Pusat sebesar **Rp1.172.219.672.257.679** dan (ii) Transfer ke Daerah sebesar **Rp863.542.806.482.364**.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 adalah sebesar **Rp1.172.219.672.257.679** atau **98,46 persen** dari anggaran sebesar **Rp1.190.511.065.721.000**. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar **Rp84.662.287.802.270** atau **7,78 persen** dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023 yang sebesar **Rp1.087.557.384.455.403**. Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja antara lain terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Lain-lain.

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun 2024 adalah sebesar **Rp173.106.602.391.953** atau sebesar **98,55 persen** dari alokasi anggaran sebesar **Rp175.645.472.918.000**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp21.682.300.165.965** atau **14,32 persen** dari realisasi Belanja Pegawai tahun 2023 sebesar **Rp151.424.302.225.988**. Kenaikan belanja pegawai didominasi adanya kenaikan yang signifikan pada Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS yang disebabkan kenaikan pokok pensiun PNS dan Anggota TNI Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2024, serta adanya belanja baru pada tahun 2024 berdasarkan Perpres Nomor 110 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri yaitu Belanja Asuransi Kesehatan Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri. Realisasi Belanja Pegawai terdiri dari.

AKUN	Deskripsi AKUN	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
513111	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS	31.964.066.114.611	28.632.610.811.947	11,64
513112	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Daerah	103.880.961.755.358	87.144.803.352.030	19,20
513113	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS TNI/Kemhan	2.821.017.116.835	2.482.805.232.818	13,62
513114	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Polri	720.658.769.312	610.326.988.068	18,08
513115	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu PNS Eks Pegadaian	10.430.642.652	10.573.245.839	(1,35)
513121	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Polri (Lama)	1.876.953.007.926	1.890.634.169.233	(0,72)
513122	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu TNI/Kemhan	10.038.655.978.619	8.792.673.649.905	14,17
513123	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Polri	6.184.923.420.987	5.316.453.430.700	16,34
513131	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Pejabat Negara	145.737.742.202	145.625.689.704	0,08
513132	Belanja Pensiun dan Uang Tunggu Hakim	223.002.814.246	190.932.693.663	16,80
513141	Kontribusi APBN Sebagai Pendanaan Bersama Dalam Pembayaran Pensiun Eks PNS Kemhub pada PT KAI	615.560.630.797	568.323.764.079	8,31
513151	Belanja Tunjangan Veteran	2.017.650.317.396	2.205.690.658.950	(8,53)
513152	Belanja Dana Kehormatan Veteran	11.088.070.650	12.631.488.000	(12,22)
513153	Belanja Tunjangan PKRI dan KNIP	9.435.015.706	8.929.525.033	5,66
513161	Belanja Tunjangan Hari Tua (Unfunded Liability)	0	2.270.263.772.727	(100)
513211	Belanja Askes PNS	4.384.023.017.968	4.006.644.218.747	9,42
513212	Belanja Askes Pejabat Negara	380.090.907.474	281.412.332.313	35,07
513213	Belanja Asuransi Kesehatan Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	165.003.075.000	0	100
513221	Belanja Askes Penerima Pensiun	3.746.975.775.606	3.200.147.268.718	17,09
513231	Belanja Askes TNI/Kemhan	1.395.665.752.689	1.327.514.605.819	5,13
513241	Belanja Askes Polri	1.503.969.831.623	1.405.372.494.197	7,02
513251	Belanja Askes Veteran	81.972.328.694	90.495.409.498	(9,42)
513271	Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai	326.922.812.119	294.187.728.596	11,13

AKUN	Deskripsi AKUN	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
513281	Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai	601.837.493.483	535.249.695.404	12,44
Total		173.106.602.391.953	151.424.302.225.988	14,32

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 adalah sebesar **Rp1.577.434.000.681** atau **92,01 persen** dari anggaran sebesar **Rp1.714.427.698.000**. Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp161.832.037.774** atau **11,43 persen** bila dibandingkan dengan Tahun 2023 yang sebesar **Rp1.415.601.962.907**. Rincian Belanja Barang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Uraian	Realisasi TA 2024	Realisasi TA 2023	Naik (Turun)
Satker TK DJPb (987361)	1.086.777.823.908	1.078.469.777.126	0,77
Satker TK BKF (984438)	238.734.433.000	225.654.456.440	5,80
Satker TK DJPPR (978010)	6.879.661.760	26.851.576.322	(74,38)
Satker TK DJKN (984515)	6.985.849.410	5.487.896.908	27,30
Satker TK DJPPR (999903)	1.414.519.000	1.401.380.000	0,94
Satker TK DJPPR (999982)	236.641.713.603	77.736.876.111	204,41
Jumlah	1.577.434.000.681	1.415.601.962.907	11,43

1. Belanja Barang satker TK DJPb (987361) sebesar Rp1.086.777.823.908, terdiri atas :

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Belanja Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran Manfaat Pensiun	764.694.791.784
2	Belanja Fee Pelayanan Bank/Pos Persepsi	319.552.359.000
3	Belanja Jasa Pelayanan Perbendaharaan	2.530.673.124
	TOTAL	1.086.777.823.908

2. Belanja Barang pada satker TK BKF (984438) sebesar Rp238.734.433.000 merupakan pembayaran kontribusi dan *trust fund* organisasi internasional.
3. Belanja Barang pada Satker TK DJKN (984515) sebesar Rp6.985.849.410 merupakan belanja penggantian biaya dan margin IP PEN kepada Pelaksana Investasi untuk periode tagihan bulan Oktober 2023, April 2024, dan Oktober 2024.
4. Belanja Barang pada Satker TK DJPPR (978010) sebesar Rp6.879.661.760 berupa Belanja Dukungan Kelayakan pada Proyek KPBU untuk infrastruktur air minum.
5. Belanja Barang pada Satker TK DJPPR (999903) sebesar Rp1.414.519.000 berupa Belanja Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit* atas penjaminan Program PEN.
6. Belanja Barang pada Satker TK DJPPR (999982) sebesar Rp236.641.713.603 berupa Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek yang dilaksanakan oleh BUMN pelaksana penugasan.

B.2.2.1.3. Belanja Pembayaran Bunga Utang

Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2024 adalah sebesar **Rp488.426.422.143.817** atau **98,21 persen** dari anggaran sebesar **Rp497.319.602.591.000**. Realisasi belanja pembayaran bunga utang Tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp48.543.837.802.558 atau 11,04 persen dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp439.882.584.341.259. Kenaikan tersebut seiring adanya penambahan

utang pada Tahun 2024. Realisasi tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang luar negeri sebesar Rp42.487.792.193.659 dan pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp445.938.629.950.158 yang terdiri dari pembayaran bunga utang Surat Berharga Negara sebesar Rp443.568.558.825.337 dan Pembayaran Bunga Utang Pinjaman Dalam Negeri senilai Rp2.370.071.124.821.

Adapun komposisi belanja pembayaran bunga tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun) %
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	42.487.792.193.659	30.575.331.536.948	38,96
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	445.938.629.950.158	409.307.252.804.311	8,95
-Pembayaran Bunga SBN	443.568.558.825.337	408.030.933.844.172	8,71
-Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	2.370.071.124.821	1.276.318.960.139	85,70
Jumlah	488.426.422.143.817	439.882.584.341.259	11,04

Realisasi Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Tahun 2024 mengalami kenaikan 38,96 persen dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp30.575.331.536.948. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan utang program dan proyek di Tahun 2024.

Rincian belanja pembayaran bunga utang luar negeri Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun)
Belanja Bunga Pinjaman Program	21.520.400.453.814	15.872.411.363.545	35,58
Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	188.436.044.066	169.262.862.242	11,33
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	15.871.395.895.386	10.633.085.208.424	49,26
Belanja Biaya/Kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	4.907.257.692.930	3.900.239.224.662	25,82
Belanja Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	302.107.463	332.878.075	(9,24)
JUMLAH PEMBAYARAN BUNGA UTANG LUAR NEGERI	42.487.792.193.659	30.575.331.536.948	38,96

Realisasi pembayaran bunga SBN Tahun 2024 sebesar Rp443.568.558.825.337 dan Tahun 2023 sebesar Rp408.030.933.844.172. Realisasi Pembayaran Bunga SBN Tahun 2024 terdapat di dalamnya kontribusi BI atas *Public Goods* (PG) sebesar Rp26.096.131.880.000, kontribusi BI atas *Non-Public Goods* (NPG) sebesar Rp308.887.803.000 dan Kontribusi BI atas *Cluster A* sebesar Rp6.447.448.409.220. Realisasi pembayaran bunga SBN Tahun 2024 mengalami kenaikan 8,71 persen dibandingkan realisasi Tahun 2023, hal ini disebabkan karena meningkatnya *outstanding* SBN.

Realisasi Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2024 sebesar Rp2.370.071.124.821 dan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.276.318.960.139. Realisasi Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 85,70 persen dibandingkan realisasi Tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pembayaran pinjaman dalam negeri di Tahun 2024.

Rincian belanja pembayaran bunga utang dalam negeri Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

KODE	KEGIATAN/SUBKEGIATAN /JENIS BELANJA/RINCIAN	Tahun 2024	Tahun 2023
541211	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Rupiah	298.380.324.974.246	276.602.884.583.198
541219	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	231.387.637.000	242.515.144.295
541231	Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	2.370.071.124.821	1.276.318.960.139
541251	Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	43.168.967.648.620	42.065.189.258.483
541259	Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	82.914.760.737	43.726.664.053
541311	Belanja Pembayaran Imbalan Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	74.872.184.741.953	69.535.481.128.261
541312	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya-Imbalan SBSN Jangka Panjang	322.740.183.995	307.098.351.120
541341	Belanja Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	14.021.639.612.500	12.177.677.712.500
541342	Belanja Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya - Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	25.106.549.436	22.242.447.640
542111	Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.686.875.072.000	1.468.337.011.000
542121	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara	3.392.865.751.600	1.138.430.387.136
542141	Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	630.536.088.750	841.964.472.192
544111	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara	160.319.500.000	536.653.910.900
544113	Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Valas	0	-
545111	Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	4.435.167.932.300	2.719.227.753.394
545131	Belanja Pembayaran Discount SPN Syariah	2.157.528.372.200	329.505.020.000
JUMLAH PEMBAYARAN BUNGA UTANG DALAM NEGERI		445.938.629.950.158	409.307.252.804.311

B.2.2.1.4. Belanja Subsidi

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 adalah sebesar **Rp292.692.594.096.846** atau **98,26 persen** dari pagu anggarannya sebesar **Rp297.889.378.638.000**. Sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 adalah sebesar Rp269.592.086.053.747 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp23.100.508.043.099 atau sebesar **8,57 persen**. Rincian realisasi belanja subsidi menurut jenis subsidi Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada **lampiran LRA LB6**.

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 pada Kementerian Negara/Lembaga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Satker	Anggaran	Realisasi TA 2024	%
Kementerian Keuangan	189.214.148.284.000	187.464.120.909.729	99,08
Kementerian Pertanian	49.874.556.743.000	47.387.443.789.782	95,01
Kementerian Perhubungan	7.918.210.504.000	7.799.688.716.109	98,50
Kementerian PUPR	5.512.424.553.000	5.468.486.699.525	99,20
Kementerian Kominfo	176.350.160.000	176.322.920.000	99,98
Kementerian KUKM	45.189.911.744.000	44.393.486.214.789	98,24
Kementerian Perdagangan	3.776.650.000	3.044.846.912	80,62
Total	297.889.378.638.000	292.692.594.096.846	98,26

1. Kementerian Keuangan

Realisasi belanja subsidi sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp187.464.120.909.729 atau 99,08 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp189.214.148.284.000. Pada tahun 2023 realisasi belanja subsidi sebesar Rp177.119.333.415.508, sehingga apabila dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi belanja subsidi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.344.787.494.221 atau 5,84 persen.

Rincian Realisasi Belanja Subsidi pada Kementerian Keuangan per jenis subsidi Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik	%
			(Turun)	
Subsidi Energi	177.615.236.208.519	164.292.262.183.397	13.322.974.025.122	8,11
Subsidi Minyak Solar	17.115.109.641.445	16.573.537.577.398	541.572.064.047	3,27
Subsidi Minyak Tanah	4.469.228.489.490	4.716.272.138.615	(247.043.649.125)	(5,24)
Subsidi Elpiji	80.213.612.965.648	74.300.193.555.508	5.913.419.410.140	7,96
Subsidi Listrik	75.817.285.111.936	68.702.258.911.876	7.115.026.200.060	10,36
Subsidi Pajak DTP	9.116.394.780.661	11.285.195.030.132	(2.168.800.249.471)	(19,22)
Subsidi PPh DTP	8.311.642.153.441	8.587.136.656.062	(275.494.502.621)	(3,21)
Subsidi PPnBM DTP- KBLBB	138.246.168.593	0	138.246.168.593	100,00
Subsidi PPN DTP- Rusun dan KBLBB	666.506.458.627	0	666.506.458.627	100,00
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	0	604.334.469.803	(604.334.469.803)	(100,00)
Subsidi PPN-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	0	2.028.573.395.855	(2.028.573.395.855)	(100,00)
Subsidi PPnBM-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	0	65.150.508.412	(65.150.508.412)	(100,00)
Subsidi Bunga Kredit Program	252.159.126.358	904.972.849	251.254.153.509	27.763,72
Subsidi Bunga Pinjaman CPP	252.159.126.358	863.768.416	251.295.357.942	29.092,91
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	0	41.204.433	(41.204.433)	(100,00)
Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	114.365.781.222	160.320.970.852	(45.955.189.630)	(28,66)
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK) - Penanganan Pandemi Covid-19	114.365.781.222	160.320.970.852	(45.955.189.630)	(28,66)
Subsidi Imbal Jasa Penjamin	365.965.012.969	1.380.650.258.278	(1.014.685.245.309)	(73,49)
Subsidi IJP Program PEN(DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19	365.965.012.969	1.380.650.258.278	(1.014.685.245.309)	(73,49)
Total	187.464.120.909.729	177.119.333.415.508	10.344.787.494.221	5,84

a. Subsidi Energi

Realisasi Belanja Subsidi Energi pada tahun 2024 sebesar Rp177.615.236.208.519 atau 99,49 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp178.527.544.053.000. Realisasi Belanja Subsidi Energi tahun 2024 naik sebesar Rp13.322.974.025.121 atau 8,11 persen dari realisasinya pada tahun 2023 Rp164.292.262.183.397. Subsidi Energi terdiri dari Subsidi JBT Minyak Solar, Subsidi JBT Minyak Tanah, Subsidi Elpiji, dan Subsidi Listrik.

Realisasi pembayaran subsidi JBT pada tahun 2024 sebesar Rp21.584.338.130.935 terdiri atas 2 jenis, yaitu Subsidi JBT Minyak Solar dan Subsidi JBT Minyak Tanah, dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

- 1) Pembayaran sebesar Rp17.115.109.641.445 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Solar, yang terdiri atas:
 - a) Rp16.949.654.793.558 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga, yang terdiri atas pembayaran subsidi tahun

berjalan sebesar Rp15.841.273.096.950 dan pembayaran kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp1.108.381.696.608;

- b) Rp165.454.847.887 merupakan pembayaran subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2024 kepada PT AKR Corporindo, Tbk., yang terdiri atas pembayaran subsidi tahun berjalan sebesar Rp149.699.219.495 dan pembayaran kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp15.755.628.392.
- 2) Pembayaran sebesar Rp4.469.228.489.490 merupakan pembayaran subsidi JBT Jenis Minyak Tanah kepada PT Pertamina Patra Niaga, yang terdiri atas pembayaran subsidi tahun berjalan sebesar Rp3.991.205.883.382 dan pembayaran kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp478.022.606.108.
- 3) Realisasi pembayaran subsidi Elpiji sebesar Rp80.213.612.965.648 merupakan pembayaran subsidi Elpiji Tabung 3 Kg tahun 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga terdiri atas subsidi harga sebesar Rp72.383.695.544.043 dan PPN atas penyerahan Elpiji Tabung 3 Kg oleh PT Pertamina Patra Niaga kepada Pemerintah sebesar Rp7.829.917.421.605.

Pembayaran subsidi Elpiji Tabung 3 Kg tahun berjalan pada periode Tahun 2024 Unaudited merupakan pembayaran kepada PT Pertamina Patra Niaga sampai dengan tagihan periode 1-15 Desember 2024. Sementara itu, jumlah Elpiji Tabung 3 Kg yang disalurkan sampai dengan bulan Desember 2024 berdasarkan berita acara verifikasi antara KPA dengan badan usaha adalah sebesar 8.236,303 juta Kg atau mencapai 99,37 persen dari kuota sebesar 8.288,573 juta Kg sesuai dengan Kepmen ESDM Nomor 349.K/MG.01/MEM.M/2024.

- 4) Realisasi pembayaran subsidi listrik pada Periode Tahun 2024 adalah sebesar Rp75.817.285.111.936, yang terdiri atas pembayaran atas beban subsidi listrik tahun berjalan periode tagihan Januari s.d. 15 Desember 2024 (termasuk koreksi s.d. triwulan III 2024) sebesar Rp73.229.347.633.936 dan pembayaran sebagian kurang bayar subsidi listrik tahun 2023 sebesar Rp2.587.937.478.000.

b. Subsidi Pajak DTP

Realisasi Belanja Subsidi Pajak-DTP tahun 2024 sebesar Rp9.116.394.780.661 atau 91,73 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp9.938.456.436.000. Realisasi Belanja Subsidi Pajak DTP tahun 2024 turun sebesar Rp2.168.800.249.471 atau 19,21 persen dari realisasinya tahun 2023 Rp11.285.195.030.132. Penurunan ini dikarenakan pembayaran tagihan pajak DTP terkait PEN sudah berkurang.

Belanja subsidi untuk P-DTP terdiri atas belanja subsidi P-DTP reguler, berupa: PPh DTP Panas Bumi, PPh DTP SBN Valas, dan PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM serta belanja subsidi P-DTP lainnya, berupa: PPN DTP atas Rumah Tapak dan Rumah Susun, PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.

Realisasi belanja subsidi P-DTP reguler di tahun 2024 adalah sebesar Rp8.311.642.153.441 atau 100,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp8.311.702.470.000. Realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.587.136.656.062 mengalami penurunan sebesar 3,21 persen. Realisasi belanja subsidi P-DTP lainnya di tahun 2024 adalah sebesar Rp804.752.627.220 atau 49,47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp1.626.753.966.000.

c. Subsidi Bunga Kredit

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program 31 Desember 2024 sebesar Rp252.159.126.358 atau 95,4 dari pagu anggarannya sebesar Rp264.320.400.000. Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Program tahun 2024 naik sebesar Rp251.254.153.509 atau 27.763,7 persen dari realisasinya pada Tahun 2023 Rp904.972.849. Hal ini disebabkan pada Tahun 2023 baru mendapat Pagu DIPA dan tidak terdapat tagihan subsidi/bunga margin untuk Cadangan Pangan Pemerintah yang signifikan pada periode tersebut.

d. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah tahun 2024 sebesar Rp114.365.781.222 atau 99,99 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp114.381.883.000. Capaian realisasi Belanja Subsidi Bunga Pinjaman Daerah yang rendah disebabkan oleh rendahnya pencairan dana pinjaman daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dimana untuk pencairan pinjaman, pemerintah daerah harus memenuhi persyaratan efektif pinjaman dan persyaratan pencairan per tahap. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat 29 pemerintah daerah yang melakukan pencairan dana pinjaman daerah dari 32 pemerintah daerah yang telah melakukan penandatanganan perjanjian pemberian pinjaman daerah dalam rangka mendukung program PEN dengan PT SMI. Hal ini disebabkan karena terdapat 2 pemerintah daerah yang melakukan penghentian perjanjian pemberian pinjaman dan 1 pemerintah daerah sudah lunas pinjaman pada tahun 2024.

e. Subsidi Imbal Jasa Penjamin

Realisasi belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) tahun 2024 sebesar Rp Rp365.965.012.969 atau 99,06 persen dari anggaran sebesar Rp369.445.512.000. Realisasi pembayaran belanja subsidi tersebut merupakan realisasi atas tagihan Imbal Jasa Penjaminan Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit sebesar Rp72.674.265.000 dan tagihan Imbal Jasa Penjaminan Pelaku Usaha UMKM sebesar Rp296.771.247.000. Adapun untuk capaian rincian output Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program PEN tercapai 95,21 persen dan Subsidi IJP UMKM Program PEN tercapai 100 persen dengan rincian masing-masing 2 Penjamin yaitu, LPEI dan PT. PII (Korporasi) serta PT. Jamkrindo dan PT. Askrindo (UMKM).

2. Kementerian Pertanian

Realisasi belanja subsidi tahun 2024 sebesar Rp47.387.443.789.782 atau 95,01 persen dari pagu Anggaran sebesar Rp49.874.556.743.000. Pada Tahun 2023 realisasi belanja subsidi sebesar Rp42.057.450.059.622 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi belanja subsidi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp5.329.993.730.160 atau 12,67 persen. Hal ini disebabkan untuk menyelesaikan tagihan subsidi pupuk tahun-tahun sebelumnya dan terdapat subsidi bunga kredit alsintan.

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Alsintan dan Pupuk Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik	%
			(Turun)	
Subsidi Bunga Alsintan	41.353.431	0	41.353.431	100,00
Subsidi Pupuk	47.387.402.436.351	42.057.450.059.622	5.329.952.376.729	12,67
Total	47.387.443.789.782	42.057.450.059.622	5.329.993.730.160	12,67

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Realisasi belanja subsidi tahun 2024 sebesar Rp176.322.920.000 atau sebesar 99,98 persen dari pagu Anggaran sebesar Rp176.350.160.000. Pada Tahun 2023 realisasi belanja subsidi sebesar Rp172.000.950.000 sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2024, realisasi belanja subsidi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.321.970.000 atau 2,51 persen. Hal ini dikarenakan adanya inflasi sekitar 2 persen hingga 3 persen, kenaikan target produksi pada jenis produk digital pada tahun 2024, dan kenaikan beban biaya produksi sebagai komponen biaya penyusun harga pokok produksi pada tahun 2024

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 sebesar Rp5.468.486.699.525 atau 99,20 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp5.512.424.553.000. Realisasi Belanja Subsidi netto Tahun 2023 sebesar Rp4.353.279.130.449. Sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.115.207.569.076 atau 25,62 persen.

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik	%
			(Turun)	
Subsidi Bunga Kredit Lainnya	6.702.617.829	963.718.561	5.738.899.268	595,50
Subsidi Bunga KPR	4.609.436.081.696	3.457.315.411.888	1.152.120.669.808	33,32
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	852.348.000.000	895.000.000.000	(42.652.000.000)	(4,77)
Total	5.468.486.699.525	4.353.279.130.449	1.115.207.569.076	25,62

Realisasi Belanja Subsidi Bunga Kredit Lainnya sebesar Rp6.702.617.829 merupakan subsidi yang diberikan kepada 13 PDAM yang melakukan perjanjian kredit berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2009 sejumlah 10 PDAM dan Perpres No. 46 Tahun 2019 sejumlah 3 PDAM.

Realisasi Belanja Subsidi Perumahan sebesar Rp5.461.784.081.696 terdiri dari Subsidi Bunga Kredit sebesar Rp4.609.436.081.696 dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan sebesar Rp852.348.000.000.

5. Kementerian Perhubungan

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 sebesar Rp7.799.688.716.109 atau 98,5 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp7.918.210.504.000, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp4.920.346.567.157. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.879.342.148.952 atau 58,52 persen. Kenaikan ini disebabkan bertambahnya tagihan untuk subsidi LRT Jabodetabek.

Realisasi per jenis subsidi pada Kementerian Perhubungan tahun 2024 dan 2023 sebagaimana dalam tabel berikut.

	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik	%
			(Turun)	
Subsidi/PSO PT. PELNI	3.203.970.376.875	2.395.825.002.151	808.145.374.724	33,73
Subsidi/PSO PT. KAI	4.595.718.339.234	2.524.521.565.006	2.071.196.774.228	82,04
Total	7.799.688.716.109	4.920.346.567.157	2.879.342.148.952	58,52

Realisasi belanja subsidi/PSO PT PELNI sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.203.970.376.875 atau 99,99 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp3.203.971.154.000, sedangkan realisasi belanja subsidi Tahun 2023 sebesar Rp2.395.825.002.151 sehingga apabila

dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp808.145.374.724 atau 33,73 persen.

Realisasi belanja subsidi/PSO PT KAI per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.595.718.339.234 atau 97,49 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp4.714.239.350.000. Sementara itu, realisasi belanja subsidi Tahun 2023 sebesar Rp2.524.521.565.006. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi belanja subsidi 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.071.196.774.228 atau 82,04 persen. Pembayaran PSO Perkeretaapian adalah sebesar Rp2.365.140.452.783 dan Penyelenggaraan LRT Jabodebek sebesar Rp1.647.970.237.510 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2024.

6. Kementerian Perdagangan

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 sebesar Rp3.044.846.912 atau 80,62 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp3.776.650.000, sedangkan Tahun 2023 realisasi belanja subsidi sebesar Rp2.142.819.505 sehingga ada kenaikan sebesar Rp902.027.407 atau 42,09 persen.

7. Kementerian Koperasi dan UKM

Realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 sebesar Rp44.393.486.214.789 atau 98,24 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp45.189.911.744.000, sedangkan realisasi Belanja Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp40.967.533.111.506. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, realisasi Belanja Subsidi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.425.953.103.283 atau 8,36 persen.

Perbandingan Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik	%
			(Turun)	
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	41.519.920.292.932	40.967.533.111.506	3.409.817.898.145	8,32
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19	2.857.430.716.719			100,00
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	16.135.205.138			100,00
Total	44.393.486.214.789	40.967.533.111.506	3.425.953.103.283	8,36

Realisasi belanja subsidi sebesar Rp41.519.920.292.932 terdiri dari Belanja Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Reguler sebesar Rp35.097.060.130.125 dan Belanja *Carry Over* Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Reguler sebesar Rp6.422.860.162.807. Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19 sebesar Rp2.857.430.716.719 merupakan *Carry Over* Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR Tambahan. Sedangkan Belanja Subsidi sebesar Rp16.135.205.138 merupakan Belanja Subsidi IJP KUR.

B.2.2.1.5. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 adalah sebesar **Rp278.430.938.953** atau **74,96 persen** dari anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp371.444.876.000**. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp59.290.220.176 atau 27,06 persen dari realisasi Tahun 2023 sebesar Rp219.140.718.777. Kenaikan belanja hibah didominasi oleh kenaikan belanja hibah kepada pemerintah Luar Negeri naik sebesar Rp114.117.390.773 atau 163,44 persen dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar Rp69.824.315.937.

Perbandingan realisasi belanja hibah Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	183.941.706.710	69.824.315.937	163,44
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	94.227.497.856	149.215.239.063	(36,85)
Belanja Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Terkait Pendapatan/Belanja Hibah	261.734.387	101.163.777	158,72
Jumlah Belanja	278.430.938.953	219.140.718.777	27,06

Realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing sebesar Rp277.957.585.380 terdiri dari Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri Rp183.941.706.710 dan Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional Rp94.227.497.856. Realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri dan Organisasi Internasional bersumber dari PNPB hasil pengelolaan dana kelolaan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI). Penyaluran hibah tersebut antara lain untuk pembangunan “Kampung Indonesia” di daerah terdampak gempa Turki, bantuan dan perlindungan untuk orang-orang terdampak konflik, serta dukungan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria. Sedangkan Belanja Hibah sebesar Rp261.734.387 merupakan belanja pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*).

B.2.2.1.6. Belanja Lain-Lain

Realisasi Belanja Lain-Lain Tahun 2024 sebesar Rp216.138.188.685.429 atau sebesar 99,34 persen dari DIPA Tahun 2024 sebesar Rp217.570.739.000.000. Realisasi Belanja Lain-lain terdapat pada BA BUN 999.08 dan 999.99. Dibandingkan dengan Tahun 2023, Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.885.480.467.296 atau 3,95 persen dari Tahun 2023 sebesar Rp225.023.669.152.725.

Rincian Realisasi Neto Belanja Lain-Lain adalah sebagai berikut.

Uraian	Realisasi Belanja		Naik/Turun	%
	2024	2023		
UAP BUN Belanja Lain-lain (999.08)	215.042.260.698.507	224.316.238.098.211	(9.273.977.399.704)	(4,13)
Belanja Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua	106.854.376.765	115.898.315.312	(9.043.938.547)	(7,80)
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	209.288.136.932.586	206.073.493.135.814	3.214.643.796.772	1,56
Belanja Lain-lain	5.647.269.389.156	5.251.702.041.664	395.567.347.492	7,53
Belanja Cadangan Pangan Pemerintah	-	12.875.144.605.421	(12.875.144.605.421)	(100,00)
UAP BUN Transaksi Khusus (999.99)	1.095.927.986.922	707.431.054.514	388.496.932.408	54,92
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	727.120.009.219	546.650.473.751	180.469.535.468	33,01
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency	1.103	694	409	58,93
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	119.748.067.230	121.245.799.637	(1.497.732.407)	(1,24)
Belanja Lain-lain Penggunaan PNPB BUN	249.059.909.370	39.534.780.432	209.525.128.938	529,98
Realisasi Belanja Neto	216.138.188.685.429	225.023.669.152.725	(8.885.480.467.296)	(3,95)

Realisasi Belanja Lain-lain Tahun 2024 pada BA 999.08 di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Belanja Ongkos Angkut Beras (OAB) PNS Distrik Pedalaman Papua, pada satker Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku KPA. Pada Tahun 2024, realisasi OAB Papua sebesar Rp106.854.376.765 atau 70,55 persen dari anggaran sebesar Rp151.452.988.000.

2. Belanja Lain-lain BUN Lainnya (Dana Kompensasi) pada satker Dit. PNBPN SDA KND, merupakan pembayaran utang kompensasi dengan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp209.288.136.932.586 dengan rincian:

No	Nama Operator	Jenis	Periode	Nilai
1	PT. Pertamina (Persero)	Solar	2023	25.355.440.919.632
2	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	2023	18.164.916.265.855
3	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	2023	232.578.572.757
4	PT PLN (Persero)	Listrik	2023	17.835.197.231.014
5	PT. Pertamina (Persero)	Solar	Triwulan I 2024	17.941.762.134.289
6	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	Triwulan I 2024	11.945.261.813.715
7	PT. Pertamina (Persero)	Solar	Triwulan II 2024	18.718.389.058.227
8	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	Triwulan II 2024	19.309.260.523.037
9	PT. Pertamina (Persero)	Solar	Triwulan III 2024	3.356.249.677.000
10	PT. Pertamina (Persero)	Pertalite	Triwulan III 2024	13.143.750.322.457
11	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	Triwulan I 2024	171.574.640.383.
12	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	Triwulan II 2024	174.436.686.117
13	PT AKR Corporindo, Tbk.	Solar	Triwulan III 2024	187.430.362.348
14	PT PLN (Persero)	Listrik	Triwulan I 2024	23.489.296.982.369
15	PT PLN (Persero)	Listrik	Triwulan II 2024	23.050.022.106.386
16	PT PLN (Persero)	Listrik	Triwulan III 2024	16.212.569.637.000
Jumlah				209.288.136.932.586

Belanja Lain-lain neto sebesar Rp5.647.269.389.156 dengan rincian realisasi sebagai berikut.

- Istana Kepresidenan, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp143.456.406.000 dengan pengembalian Rp21.072.159.994 sehingga realisasi neto sebesar Rp122.384.246.006 atau 85,31 persen dari anggaran sebesar Rp143.456.406.000. Belanja Lain-lain tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan presiden yang terdiri dari bantuan pendidikan, bantuan keagamaan, bantuan sosial, bantuan organisasi kemasyarakatan dan kegiatan lain. Realisasi dana bantuan kemasyarakatan Presiden berdasarkan arahan/perintah langsung dari Presiden dan banyaknya jumlah proposal/pengajuan dari organisasi kemasyarakatan/sosial/pendidikan yang disetujui oleh Presiden.
- Sekretariat Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, sebesar Rp36.984.191.000 dengan pengembalian sebesar Rp215.009.995 sehingga realisasi neto sebesar Rp36.769.181.005 atau mencapai 99,42 persen dari anggaran Rp36.984.191.000. Belanja Lain-Lain tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan wakil presiden yang terdiri dari bantuan pendidikan, bantuan keagamaan, bantuan sosial, bantuan organisasi kemasyarakatan dan kegiatan lain. Realisasi dana Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden berdasarkan arahan/perintah langsung dari Wakil Presiden dan banyaknya jumlah proposal/pengajuan dari organisasi kemasyarakatan/sosial/pendidikan yang disetujui oleh Wakil Presiden.
- Direktorat PPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebesar Rp366.844.830.481 atau 99,20 persen dari anggaran belanja sebesar Rp369.802.535.000 yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Layanan Pos Universal di 2.400 KPC LPU.
- DKPBPB Batam, sebesar Rp238.881.207.527 dengan pengembalian Rp22.327.560 sehingga realisasi neto sebesar Rp238.858.879.967 atau 93,70 persen dari pagu anggaran sebesar

Rp254.910.054.000. Belanja Lain-Lain tersebut untuk kegiatan Pengelolaan Kawasan Bintang dan Karimun.

- e. Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas), sebesar Rp1.773.928.041.083 dengan pengembalian sebesar Rp862.735.475 sehingga realisasi neto sebesar Rp1.773.065.305.608 atau 97,18 persen dari anggaran sebesar Rp1.824.551.524.000. Realisasi Belanja Lain-Lain TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 4,13 persen dari periode TA 2023. Hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi belanja layanan dukungan manajemen pada SKK Migas.
- f. Satker Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) sebesar Rp6.516.846.398.860 dengan pengembalian sebesar Rp3.422.359.117.653 sehingga realisasi neto sebesar sebesar Rp3.094.487.281.207 atau 61,89 persen dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000.000. Realisasi sebesar Rp3.094.487.281.207,00 tersebut terdiri atas realisasi Implementasi Pelatihan dan Insentif Program Kartu Prakerja sebesar Rp2.923.797.725.800,00 (terdiri dari biaya Pelatihan Rp2.123.387.925.800,00, Insentif Biaya Mencari Kerja Rp726.288.600.000,00, dan Insentif Survey sebesar Rp74.121.200.000,00), dan realisasi Belanja Operasional MPPKP sebesar Rp170.689.555.407,00.
- g. Realisasi Belanja sebesar Rp14.859.664.882 atau 85,31% dari anggaran sebesar Rp17.418.606.000. Realisasi belanja ini merupakan realisasi OAB Papua Barat yang menggunakan akun Belanja Lain-Lain (581919) karena pada DIPA tahun 2024 masih menggunakan akun tersebut.

Realisasi Belanja Lain-Lain pada BA 999.99 Tahun 2024 sebesar Rp1.095.927.986.922 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Pembayaran Selisih Harga Bulog sebesar Rp119.748.067.230. Belanja ini berasal dari Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran selisih lebih atau kurang antara nilai HPB Pemerintah yang digunakan dalam potongan beras dalam bentuk natura pada gaji pegawai (PFK) yang sudah dibayarkan oleh KPA BUN kepada Perum Bulog dibandingkan dengan dengan nilai HPB Pemerintah yang seharusnya dibayar KPA BUN kepada Perum Bulog.
2. Belanja Karena Rugi Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN sebesar Rp727.120.009.219.
3. Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice/SPP ke SP2D dan Exotic Currency sebesar Rp1.103.
4. Belanja Lain-lain Penggunaan PNBPN BUN PKN sebesar Rp 249.059.909.370. Belanja penggunaan PNBPN BUN PKN direalisasikan sejak tahun 2023 dengan dasar Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Persetujuan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bendahara Umum Negara Pengelolaan Kas Negara. Penggunaan PNBPN BUN PKN Tahun 2024 sebagai berikut

No	Kegiatan	Instansi pengguna	Anggaran	Realisasi
1	Pemeliharaan dan pengembangan sistem IT dan Infrastruktur	Dit SITP Itjen	213.557.638.000,00	187.978.939.608,00
2	Pengembangan peraturan dan kebijakan Pengelolaan Kas Negara	Dit SITP, Bagian keuangan, Dit PA, Dit PKN, Dit SP, Dit PPK BLU, Dit APK, DJA	36.583.889.000,00	12.748.937.526,00
3	Pengembangan aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	Dit SITP, DJA,	4.497.854.000,00	2.976.562.123,00
4	Pengawasan dan Monitoring Kegiatan BUN	Itjen	21.232.116.000,00	13.571.403.797,00

No	Kegiatan	Instansi pengguna	Anggaran	Realisasi
5	Pengembangan Kualitas SDM	Bagian SDM, BPPK, Pusintek, DJA, Itjen	76.111.179.000,00	31.784.066.316,00
	Jumlah		351.982.676.000,00	249.059.909.370,00

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Realisasi belanja Transfer ke Daerah sampai dengan Tahun 2024 sebesar **Rp863.542.806.482.364** atau **98,70** persen dari anggaran sebesar **Rp874.875.475.600.000**. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp881.430.544.208.454, realisasi belanja Transfer ke Daerah mengalami penurunan sebesar Rp17.887.737.726.090 atau 2,03 persen. Penurunan realisasi TKD Tahun 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 utamanya disebabkan karena pada Tahun 2023 terdapat tambahan penyaluran DBH yang terdiri dari tambahan DBH regular dan kurang bayar sebesar Rp69,6 triliun pada akhir Desember 2023.

Sesuai PMK Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, penyaluran transfer ke daerah (TKD) yang mencakup DBH dan/atau DAU dapat dilakukan dalam bentuk nontunai berupa *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar. Teknis pelaksanaan DBH/DAU nontunai melalui fasilitas TDF diatur dalam PMK Nomor 16/PMK.07/2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi hasil dan/atau Dana Alokasi Umum/ yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, yang diantaranya mengatur bahwa dalam rangka penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan perkiraan saldo kas untuk menentukan Daerah dan besaran DBH dan/atau DAU yang akan disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF, serta batas saldo kas.

Transfer ke Daerah terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, Dana Desa, dan Insentif Daerah sebagaimana tabel berikut.

Jenis Dana	Tahun 2024			Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
	Pagu	Realisasi	%		
Transfer ke Daerah					
A. Dana Bagi Hasil	153.278.976.730.000	153.174.562.784.262	99,93	205.666.564.020.630	-25,52
B. Dana Alokasi Umum	433.577.123.851.000	429.210.611.278.998	98,99	398.029.628.594.542	7,83
C. Dana Alokasi Khusus	189.327.884.084.000	183.538.473.113.006	96,94	181.357.561.783.241	1,20
1. Transfer DAK Fisik	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55	50.334.741.347.305	1,10
2. Transfer DAK Non Fisik	133.106.472.004.000	130.441.233.738.467	98,00	128.081.946.376.309	1,84
3. Hibah Kepada Daerah	2.398.948.245.000	2.207.162.260.694	92,01	2.940.874.059.627	-24,95
D. Dana Otonomi Khusus	18.271.490.935.000	18.271.490.935.000	100,00	17.241.263.570.000	5,98
E. Dana Keistimewaan DIY	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	100,00	1.372.725.809.224	3,44
F. Dana Desa	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	99,90	69.856.768.617.317	1,53
G. Insentif Fiskal	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500	87,52	7.906.031.813.500	-11,44
Jumlah	874.875.475.600.000	863.542.806.482.364	98,70	881.430.544.208.454	-2,03

Rincian Realisasi Transfer Daerah per Akun Tahun 2024 dapat dilihat di **Lampiran LB7** dan Rincian Realisasi Transfer Daerah per Daerah Tahun 2024 dapat dilihat di **Lampiran LB8**.

B.2.2.2.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi transfer DBH sampai dengan 31 Desember TA 2024 sebesar **Rp153.174.562.784.262** atau sebesar **99,93 persen** dari pagu anggaran sebesar **Rp153.278.976.730.000**. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp205.666.564.020.630, realisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp52.492.001.236.368 atau 25,52 persen. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya pagu alokasi DBH pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sehingga berpengaruh pada nilai realisasinya. Selain itu, pada akhir TA 2024 tidak terdapat penyaluran tambahan DBH reguler dan kurang bayar sebesar Rp69,6 triliun sebagaimana pada akhir Desember 2023. Pada akhir TA 2024, hanya terdapat penyaluran KB DBH sebesar Rp13,21 triliun. Realisasi DBH per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA LB9**. Berikut tabel rincian realisasi Dana Bagi Hasil Tahun 2024.

Jenis Dana	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Naik/(Turun) (%)
	Pagu	Realisasi	%		
1. DBH Non SDA	59.338.542.701.000	59.328.986.344.540	99,98	69.722.008.418.530	(14,91)
DBH PPh	32.733.740.472.000	32.733.740.472.000	100,00	41.526.659.300.000	(21,17)
DBH PBB	21.507.689.731.000	21.507.689.731.000	100,00	22.319.338.323.000	(3,64)
DBH Cukai	5.097.112.498.000	5.087.556.141.540	99,81	5.876.010.795.530	(13,42)
2. DBH Sumber Daya Alam	91.093.943.292.000	91.020.649.057.222	99,92	132.739.779.094.100	(31,43)
DBH Minyak bumi	8.944.481.225.000	8.944.481.225.000	100,00	16.491.258.147.000	(45,76)
DBH Gas Bumi	7.006.411.326.000	7.006.411.326.000	100,00	11.738.041.628.000	(40,31)
DBH Minerba	71.110.816.829.000	71.110.816.829.000	100,00	99.425.415.550.000	(28,48)
DBH Panas Bumi	1.586.280.291.000	1.586.280.291.000	100,00	2.005.232.650.000	(20,89)
DBH Kehutanan	1.494.254.859.000	1.420.960.624.222	95,09	1.984.193.334.100	(28,39)
DBH Perikanan	951.698.762.000	951.698.762.000	100,00	1.095.637.785.000	(13,14)
3. DBH Lainnya	2.846.490.737.000	2.824.927.382.500	99,24	3.204.776.508.000	(11,85)
DBH Perkebunan Sawit	2.846.490.737.000	2.824.927.382.500	99,24	3.204.776.508.000	(11,85)
Jumlah	153.278.976.730.000	153.174.562.784.262	99,93	205.666.564.020.630	(25,52)

Rincian Realisasi Anggaran untuk DBH Pajak disajikan pada **Lampiran LB10** dan DBH SDA per Daerah disajikan pada **Lampiran LB11**.

DBH Lainnya merupakan DBH jenis baru yang dihasilkan dari hasil perkebunan sawit. DBH ini baru dialokasikan dan disalurkan pada tahun 2023 berdasarkan PMK 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Sawit.

B.2.2.2.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2024 sebesar **Rp429.210.611.278.998**. Realisasi DAU tahun 2024 dari pagu anggaran sebesar **Rp433.577.123.851.000** mencapai **98,99 persen**. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp398.029.628.594.542, realisasi pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp31.180.982.684.456 atau 7,83 persen. Peningkatan realisasi DAU TA 2024 seiring dengan peningkatan pagu dan realisasi porsi DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya. Realisasi DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya TA 2024 meningkat sebesar Rp54.597.717.515.000 atau 18,90 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023.

Realisasi DAU yang melampaui anggaran antara lain berasal dari adanya tambahan alokasi anggaran untuk Tambahan DAU, yang dialokasikan dari Satker Pengelolaan Belanja Lainnya untuk pembayaran THR dan Gaji 13 Guru ASN Daerah yang tidak menerima tunjangan kinerja atau tunjangan perbaikan penghasilan yang dibayarkan sebesar satu kali Tunjangan Profesi Guru atau Tambahan Penghasilan. Rincian Realisasi Anggaran DAU Tahun 2024 per pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran LB12**.

Rincian realisasi DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya dan DAU Ditentukan Penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Uraian Akun	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
	Anggaran	Realisasi	%		
Dana Alokasi Umum	433.577.123.851.000	429.210.611.278.998	98,99	398.029.628.594.542	7,83
Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	343.527.595.289.000	343.527.595.289.000	100,00	288.929.877.774.000	18,90
Belanja Dana Alokasi Umum	343.527.595.289.000	343.527.595.289.000	100,00	288.929.877.774.000	18,90
Dana Alokasi Umum Ditentukan Penggunaannya	90.049.528.562.000	85.683.015.989.998	95,15	109.099.750.820.542	(21,46)
Belanja Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPK	15.676.719.569.000	11.682.211.062.523	74,52	25.741.997.004.000	(54,62)
Belanja Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.699.600.000.000	1.649.654.425.851	97,27	1.644.028.375.953	0,34
Belanja Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	37.470.690.538.000	37.276.919.147.598	99,48	39.993.776.407.340	(6,79)
Belanja Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	17.141.720.743.000	17.112.772.095.184	99,83	26.023.518.505.877	(34,24)
Belanja Dana Alokasi Umum Pekerjaan Umum	12.182.977.404.000	12.083.638.950.842	99,18	15.696.430.527.372	(23,02)
Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	5.877.820.308.000	5.877.820.308.000	100	-	100

Realisasi Transfer DAU sampai dengan 31 Desember 2024 merupakan realisasi bruto yang di dalamnya termasuk pemotongan atas penyaluran DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dengan jumlah potongan sebesar Rp4.157.931.175.587,00. Pemotongan dimaksud dilaksanakan berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2021 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Kabupaten Aceh Timur sebagai Penyelesaian Tunggal Pinjaman Pemerintah Kabupaten Aceh Timur kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp16.563.661.200.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.7/2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dan Pemotongan Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp16.563.661.200.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum untuk Penyelesaian Tunggal Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah sebesar Rp32.649.852.477,00. Pemotongan ini dikenakan kepada 5 Pemda yaitu Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Mamasa.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 3/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Untuk Periode Penyaluran Bulan Februari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp307.799.892.646.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sebesar Rp555.405.026.000,00. Pemotongan tersebut dikenakan kepada 56 Pemda pada periode penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya di bulan September 2024.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 23/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok dan/atau Pembayaran Bunga Atas Pinjaman Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 Periode Penyaluran Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp2.725.081.999.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2024 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya Kota Subulussalam sebagai Penyelesaian Tunggalan Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok, Pembayaran Bunga, dan/atau Pembayaran Denda Atas Kewajiban Pinjaman Daerah Dalam Rangka Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Periode Penyaluran Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp1.500.000.000.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dalam Rangka Penyelesaian Selisih Lebih Penyaluran Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024 untuk 15 daerah sebesar Rp87.217.670.537.
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KM.7/2024 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Dalam Rangka Penyelesaian Selisih Lebih Penyaluran Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Dukungan Penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan KMK dimaksud, terdapat perubahan nilai pemotongan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Kabupaten Konawe Kepulauan menjadi Rp0,00 dari sebelumnya Rp6.643.846.961.
10. Terdapat permintaan pengembalian kelebihan salur DAU yang ditentukan penggunaannya Dukungan Penggajian PPPK dari Direktur Dana Transfer Umum melalui surat Nomor S-109/PK.2/2024 tanggal 27 Desember 2024 kepada Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp2.171.956.536 dan surat nomor S-108/PK.2/2024 tanggal 27 Desember 2024 kepada Kabupaten Puncak sebesar Rp200.433.352. Permintaan pengembalian ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil rekonsiliasi data PPPK pada tanggal 9 Desember 2024. Pemda telah menyeter pengembalian tersebut pada tanggal 31 Desember 2024.

B.2.2.2.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi keseluruhan Dana Alokasi Khusus sampai dengan tahun 2024 mencapai sebesar **Rp183.538.473.113.006** atau telah mencapai **96,94 persen** terhadap anggarannya sebesar **Rp189.327.884.084.000**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.180.911.329.765 atau 1,20 persen dari realisasi periode yang sama tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp181.357.561.783.241. Dana Alokasi Khusus terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus non Fisik, dan Hibah Kepada Daerah. Realisasi Dana Alokasi Khusus per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA LB13**. Rincian Realisasi penyaluran Dana Transfer Khusus sebagaimana disajikan dalam tabel realisasi Dana Transfer Khusus Tahun anggaran 2024 pada Tabel berikut ini:

URAIAN	Tahun 2024		%	Realisasi Tahun 2023	Naik/ (Turun) (%)
	PAGU	REALISASI			
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55	50.334.741.347.305	1,10
Dana Alokasi Khusus Penugasan	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55	50.334.741.347.305	1,10
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	133.106.472.004.000	130.441.233.738.467	98,00	128.081.946.376.309	1,84
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.710.544.576.000	51.850.462.245.921	98,37	49.547.218.967.514	4,65
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.075.612.911.000	2.075.612.901.562	100,00	1.594.366.287.923	30,18
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.495.777.805.000	1.495.768.803.108	100,00	1.166.575.891.867	28,22
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.575.943.270.000	53.303.572.819.195	99,49	53.094.401.455.075	0,39
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	11.481.642.480.980	89,15	12.412.991.969.900	(7,50)
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.237.433.806.000	99,94	3.230.739.603.000	0,21
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	65.827.750.000	60.811.675.450	92,38	62003157725	(1,92)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	250.000.000.000	247.175.338.000	98,87	249.210.260.000	(0,82)
Dana Pelayanan Kepariwisata	133.300.000.000	132.033.514.000	99,05	131.787.586.500	0,19
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	4.009.229.010.000	3.962.494.428.245	98,83	4.086.064.854.769	(3,02)
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.620.244.530.000	1.550.857.706.506	95,72	1.475.083.542.036	5,14
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00	169.975.000.000	-
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	129.806.000.000	98,34	128.562.300.000	0,97
Dana Fasilitas Penanaman Modal	250.000.000.000	248.324.714.500	99,33	247.386.450.000	0,38
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.045.000.000	297.142.612.500	99,03	292.704.050.000	1,52
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	200.000.000.000	198.119.692.500	99,06	192.875.000.000	2,72
HIBAH KEPADA DAERAH	2.398.948.245.000	2.207.162.260.694	92,01	2.940.874.059.627	24,92
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman LN	956.998.838.000	810.103.833.952	84,65	1.977.982.930.618	(59,04)
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	106.439.542.000	101.257.208.226	95,13	143.405.713.248	(100,00)
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dihilahkan	1.335.509.865.000	1.295.801.218.516	97,03	819.485.415.761	(87,64)
DANA ALOKASI KHUSUS	189.327.884.084.000	183.538.473.113.006	96,94	181.357.561.783.241	(87,64)

B.2.2.2.3.1. Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik

Realisasi Transfer DAK Fisik pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp50.890.077.113.845** dan **Rp50.334.741.347.305**. Realisasi Transfer DAK Fisik tahun 2024 mencapai **94,55 persen** dari anggaran transfer DAK Fisik sebesar **Rp53.822.463.835.000**. Realisasi penyaluran dana transfer DAK Fisik Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp555.335.766.540 atau naik sebesar 1,10 persen dari periode Tahun 2023. Secara umum, kenaikan realisasi ini disebabkan oleh perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi *readiness criteria* kegiatan DAK Fisik serta lebih banyak OPD yang memulai lelang dini/pra DPA sehingga capaian kontrak menjadi lebih tinggi. Realisasi transfer DAK Fisik sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp50.890.077.113.845 seluruhnya disalurkan untuk DAK Fisik Penugasan.

BIDANG	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
	PAGU	Realisasi	%		
Air Minum	2.441.600.000.000	2.319.286.566.128	94,99	1.830.797.280.205	26,68
Industri Kecil dan Menengah	400.000.000.000	355.295.984.662	88,82	398.053.146.865	(10,74)
Infrastruktur Energi Terbarukan	88.000.000.000	87.452.503.920	99,38	87.215.780.515	0,27
Irigasi	1.688.900.000.000	1.559.041.608.960	92,31	1.507.510.515.757	3,42
Jalan	12.205.228.957.000	11.725.995.830.588	96,07	12.162.540.594.920	(3,59)
Kehutanan	31.869.256.000	29.402.396.409	92,26	29.220.059.595	0,62
Kelautan dan Perikanan	1.309.900.000.000	1.236.188.298.833	94,37	1.120.669.462.214	10,31
Kesehatan dan KB	13.400.000.000.000	12.496.924.270.572	93,26	12.376.619.051.710	0,97
Lingkungan Hidup	137.630.744.000	132.605.872.545	96,35	146.853.293.816	(9,70)
Pariwisata	450.000.000.000	402.845.647.941	89,52	349.057.002.092	15,41
Pendidikan	15.820.300.000.000	15.117.195.311.790	95,56	15.095.592.187.700	0,14
Perdagangan	130.000.000.000	69.499.769.000	53,46	149.622.533.098	(53,55)
Pertanian	2.462.600.000.000	2.310.501.901.284	93,82	2.174.853.051.003	6,24
Perumahan dan Permukiman	312.734.878.000	240.733.176.587	76,98	137.324.360.524	75,30
Sanitasi	1.693.700.000.000	1.658.452.595.251	97,92	1.550.016.807.373	7,00
Transportasi Perairan	400.000.000.000	348.006.240.634	87,00	401.797.186.095	(13,39)
Transportasi Perdesaan	750.000.000.000	707.527.853.146	94,34	722.014.296.662	(2,01)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	100.000.000.000	93.121.285.595	93,12	94.984.737.161	(1,96)
TOTAL	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55	50.334.741.347.305	1,10

B.2.2.2.3.2. Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Realisasi Transfer DAK Non Fisik pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp130.441.233.738.467** dan **Rp128.081.946.376.309**. Realisasi Transfer DAK Non Fisik tahun 2024 mencapai **98,00 persen** dari anggaran transfer DAK Non Fisik sebesar **Rp133.106.472.004.000**. Realisasi DAK Non Fisik tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp2.359.287.362.158** atau **1,84 persen** dari realisasi DAK Non Fisik pada periode yang sama Tahun 2023 sebesar **Rp128.081.946.376.309**. Kenaikan ini utamanya disebabkan oleh rekomendasi penyaluran Dana Tunjangan Guru yang disampaikan Kemendikdasmen lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain terdapat serta adanya kenaikan pagu alokasi DAK Non Fisik TA 2024 dibandingkan TA 2023, yaitu sebesar **Rp2.892.361.242.000** atau **2,22**. Laporan Realisasi Anggaran DAK Nonfisik Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

BIDANG	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan %
	PAGU	Realisasi	%		
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.710.544.576.000	51.850.462.245.921	98,37	49.547.218.967.514	4,65
Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	2.075.612.911.000	2.075.612.901.562	100,00	1.594.366.287.923	30,18
Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	1.495.777.805.000	1.495.768.803.108	100,00	1.166.575.891.867	28,22
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.575.943.270.000	53.303.572.819.195	99,49	53.094.401.455.075	0,39
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	4.009.229.010.000	3.962.494.428.245	98,83	4.086.064.854.769	(3,02)
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.620.244.530.000	1.550.857.706.506	95,72	1.475.083.542.036	5,14
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00	169.975.000.000	0,00

BIDANG	Tahun 2024			Realisasi Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan %
	PAGU	Realisasi	%		
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	11.481.642.480.980	89,15	12.412.991.969.900	(7,50)
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.237.433.806.000	99,94	3.230.739.603.000	0,21
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	65.827.750.000	60.811.675.450	92,38	62.003.157.725	(1,92)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	250.000.000.000	247.175.338.000	98,87	249.210.260.000	(0,82)
Dana Pelayanan Kepariwisataaan	133.300.000.000	132.033.514.000	99,05	131.787.586.500	0,19
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	129.806.000.000	98,34	128.562.300.000	0,97
Dana Fasilitas Penanaman Modal	250.000.000.000	248.324.714.500	99,33	247.386.450.000	0,38
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.045.000.000	297.142.612.500	99,03	292.704.050.000	1,52
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	200.000.000.000	198.119.692.500	99,06	192.875.000.000	2,72
Jumlah DAK NON FISIK	133.106.472.004.000	130.441.233.738.467	98,00	128.081.946.376.309	1,84

Realisasi penyaluran DAK Non Fisik dilakukan berdasarkan nota dinas rekomendasi untuk setiap tahapan sesuai dengan masing-masing jenis DAK Non Fisik.

B.2.2.2.3.3. Hibah Kepada Daerah

Realisasi Hibah Kepada Daerah sebagaimana tercantum dalam LRA Tahun 2024 mencapai **Rp2.207.162.260.694**. Realisasi hibah kepada daerah tahun 2024 mencapai **92,01 persen** dari anggaran Tahun 2024 sebesar **Rp2.398.948.245.000**. Realisasi Hibah ke Daerah mengalami penurunan sebesar Rp733.711.798.933 atau 24,95 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama TA 2023 sebesar Rp2.207.162.260.694. Pada tahun 2024, terdapat penambahan pagu Hibah Daerah, namun secara keseluruhan realisasinya tetap menurun apabila dibandingkan dengan pagu TA 2023. Transfer Hibah ke Daerah disalurkan oleh KPPN selaku KPA BUN Penyaluran Dana Transfer Khusus mulai tahun 2023 dan hanya disalurkan melalui KPPN Jakarta I. Rincian Realisasi Hibah Kepada Daerah TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

URAIAN	Pagu	Realisasi	%
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	956.998.838.000	810.103.833.952	84,65
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	106.439.542.000	101.257.208.226	95,13
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Diberikan	1.335.509.865.000	1.295.801.218.516	97,03
Jumlah Hibah Kepada Daerah	2.398.948.245.000	2.207.162.260.694	92,01

Rincian Hibah Kepada Daerah per jenis Hibah per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel berikut. Sedangkan rincian per jenis Hibah per Pemda periode 31 Desember 2024 sebagaimana disajikan dalam lampiran LB14.

URAIAN	PAGU TA 2024	REALISASI TA 2024	%
HIBAH KEPADA DAERAH	2.387.939.152.000	2.207.162.260.694	92,01
Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah	1.324.500.772.000	1.295.801.218.516	97,83
READSI	49.365.113.000	43.381.003.471	87,88
UPLAND IsDB	105.163.820.000	102.188.223.002	97,17
UPLAND IFAD	84.180.405.000	79.793.885.455	94,79
UPLAND IsDB ISFD	27.562.500.000	8.500.000.000	30,84
PSCP	4.790.000.000	4.790.000.000	100,00

URAIAN	PAGU TA 2024	REALISASI TA 2024	%
Bio CF ISFL	23.406.257.000	20.760.997.313	88,70
MRT	690.727.000.000	576.240.722.024	83,43
Hibah Air Minum berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia	78.243.285.000	75.706.210.913	96,76
Blokir Anggaran	11.009.093.000	0	0

B.2.2.2.4. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otsus pada LRA Tahun 2024 sebesar **Rp18.271.490.935.000** atau **100,00 persen** dari pagu anggaran sebesar **Rp18.271.490.935.000**. Dibandingkan dengan periode yang sama 31 Desember TA 2023, realisasi Dana Otsus per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.030.227.365.000 atau sebesar 5,98 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama TA 2023 sebesar Rp17.241.263.57.000. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pagu alokasi Dana Otsus TA 2024 yang dihitung berdasarkan alokasi DAU dibandingkan dengan pagu TA 2023. Selain itu, alokasi Dana Otsus pada tahun 2024 telah disalurkan seluruhnya ke RKUD Pemda penerima sesuai pasal 49 ayat 7 dan pasal 76 ayat 8 PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang pengelolaan TKD dalam rangka Otsus.

Rincian realisasi per jenis Dana Otsus TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 tersaji pada tabel berikut.

URAIAN	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	4.276.993.035.000	3.960.000.000.000	8,00
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	717.359.936.000	697.537.158.000	2,84
Dana Tambahan Infrastruktur Papua	770.087.411.000	734.634.275.000	4,83
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	883.469.568.000	871.921.448.000	1,32
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	547.131.349.000	448.666.078.000	21,95
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	665.304.462.000	472.527.485.000	40,80
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	704.887.057.000	560.832.598.000	25,69
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	848.562.171.000	734.493.413.000	15,53
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	825.817.651.000	773.555.973.000	6,76
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	1.079.234.834.000	918.116.766.000	17,55
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	1.073.576.144.000	784.905.913.000	36,78
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	861.274.294.000	826.649.561.000	4,19
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	1.395.865.798.000	981.132.390.000	42,27
Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	485.551.411.000	665.426.268.000	(27,03)
Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	636.516.027.000	803.970.737.000	(20,83)
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	630.041.924.000	831.782.835.000	(24,25)
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	604.812.025.000	628.971.170.000	(3,84)
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	612.263.725.000	759.925.539.000	(19,43)
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	652.742.113.000	786.213.963.000	(16,98)
Jumlah	18.271.490.935.000	17.241.263.570.000	5,98

B.2.2.2.5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Realisasi Transfer DK-DIY Tahun 2024 adalah sebesar **Rp1.420.000.000.000** yaitu **100,00 persen** dari pagu anggarannya. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 yang berjumlah Rp1.372.725.809.224, jumlah tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp47.274.190.776 atau 3,44 persen. Hal ini disebabkan oleh telah disalurnkannya alokasi Dana

Keistimewaan DIY TA 2024 sebesar 100 persen. Realisasi Dana Keistimewaan DIY per tahap sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	Tahun 2024			Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
	Pagu	Realisasi	Realisasi (%)		
Tahap I	1.420.000.000.000	213.000.000.000	100	165.725.809.224	28,53
Tahap II		923.000.000.000		923.000.000.000	0,00
Tahap III		284.000.000.000		284.000.000.000	0,00
Jumlah	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	100	1.372.725.809.224	3,44

B.2.2.2.6. Dana Desa

Realisasi Transfer Dana Desa pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp70.925.927.774.598 dan Rp69.856.768.617.317. Realisasi Transfer Dana Desa Tahun 2024 adalah sebesar 99,90 persen dari anggaran transfer Dana Desa sebesar Rp71.000.000.000.000 merupakan penggabungan realisasi transfer Dana Desa Tingkat UAKPA BUN. Realisasi transfer Dana Desa pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.069.159.157.281 atau sebesar 1,53 persen dari periode Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena desa lebih cepat menyampaikan syarat salur, dan beberapa desa diantaranya telah salur 100 persen sebagai dampak adanya redesain penyaluran yang menjadi lebih sederhana yang semula 3 tahap menjadi 2 tahap. Realisasi Dana Desa per-Daerah dapat dilihat di **Lampiran LRA LB15**.

Sesuai dengan KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2024, ditetapkan penggunaan alokasi tambahan dana desa sebesar Rp2.000.000.000.000 yang dibagikan kepada 15.124 desa. Alokasi tambahan ini telah termasuk dalam pagu alokasi Dana Desa TA 2024 sebesar Rp71.000.000.000.000.

Rincian realisasi Dana Desa Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Uraian	Pagu	Realisasi	%
Earmark	71.000.000.000.000	36.729.933.960.798	51,73%
Non-earmark		32.196.558.705.800	45,35%
Tambahan Dana Desa		1.999.435.108.000	2,82%
Jumlah	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	99,90%

B.2.2.2.7. Insentif Fiskal

Realisasi Insentif Fiskal tahun 2024 sebesar Rp7.001.740.596.500 atau 87,52 persen dari pagu anggarannya sebesar Rp8.000.000.000.000. Jika dibandingkan Tahun 2023 sebesar Rp7.906.031.813.500, realisasi Transfer Insentif Fiskal TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp904.291.217.000 atau 11,44 persen. Penurunan Insentif Fiskal kelompok kategori kesehatan masyarakat dan kinerja tahun sebelumnya disebabkan adanya lima Kepala Daerah yang tersangkut korupsi sehingga tidak salur dan terdapat 63 daerah yang tidak memenuhi syarat salur. Selain itu, Insentif Fiskal kategori pengendalian inflasi periode II dan III tidak dialokasikan.

B.2.3. Defisit Anggaran

Berdasarkan Realisasi Pendapatan BUN dan Hibah dan Realisasi Belanja BUN Tahun 2024, maka Defisit Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp1.760.864.195.561.477 yang berarti 98,67 persen dari yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp1.784.612.093.411.000 dengan perhitungan sebagai berikut.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Pendapatan BUN dan Hibah	274.898.283.178.566	272.810.959.159.689	0,77
Belanja BUN	2.035.762.478.740.043	1.968.987.928.663.857	3,39
Defisit Anggaran	(1.760.864.195.561.477)	(1.696.176.969.504.168)	3,81

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Tahun 2024 adalah sebesar Rp554.888.579.353.028 atau 102,56 persen dari anggaran sebesar Rp541.032.171.563.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp356.663.766.369.521, realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp198.224.812.983.507 atau naik 55,58 persen.

Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri selama Tahun 2024 adalah sebesar Rp462.577.425.084.416 atau 87,48 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp528.758.369.161.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp275.463.701.706.796, realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp187.113.723.377.620 atau naik 67,93 persen. Pembiayaan Dalam Negeri meliputi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan, Pemberian Pinjaman, Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman, Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Retrukturisasi, Surat Berharga Negara, Pinjaman Dalam Negeri, PMN/Dana Investasi Pemerintah, Pengeluaran Kewajiban Penjaminan, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dan Pembiayaan Lain-Lain.

B.2.4.1.1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan selama Tahun 2024 sebesar Rp56.419.615.865.000 atau 37,27 persen dari yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp151.381.000.000.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp37.225.200.000.000, realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp19.194.415.865.000 atau naik 51,56 persen. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan terdiri atas Penerimaan Saldao Anggaran Lebih yang bersumber dari Rekening Lain BI SAL sebesar Rp56.381.000.000.000 dan Rekening Kas BLU LDKPI sebesar Rp38.615.865.000.

B.2.4.1.2. Pemberian Pinjaman

Realisasi Pemberian Pinjaman Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.242.437.773.274 atau 101,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp4.171.912.452.000. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.905.999.112.657, realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.336.438.660.617 atau naik 122,58 persen. Pemberian Pinjaman Tahun 2024 terdiri dari

Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah sebesar Rp2.801.304.537.758 dan Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN sebesar Rp1.441.133.235.516.

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan	2.801.304.537.758	286.277.630.136	878,53
Pemberian Pinjaman Luar Negeri Kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan	1.441.133.235.516	1.619.721.482.521	(11,03)
Jumlah	4.242.437.773.274	1.905.999.112.657	122,58

Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Daerah Tahun Anggaran Berjalan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.801.304.537.758 dan Rp286.277.630.136. Realisasi tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.515.026.907.622 atau naik 878,53 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2023. Kenaikan signifikan tersebut akibat dimulainya penarikan pinjaman oleh Pemprov. DKI Jakarta untuk Pembiayaan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2)*. Realisasi tersebut berdasarkan dokumen Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) Periode Januari s.d. Desember 2024 yang diterbitkan atas Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada Pemprov DKI Jakarta.

Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.441.133.235.516 dan Rp1.619.721.482.521. Realisasi tahun 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp178.588.247.005 atau turun 11,03 persen bila dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2023.

Realisasi tersebut berdasarkan dokumen Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) Periode Januari s.d. Desember 2024 yang diterbitkan atas Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada tiga BUMN yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara, PT. Sarana Multi Infrastruktur dan PT. Pertamina. Berikut rincian Realisasi Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran Berjalan Tahun 2024:

No	Nama BUMN	Cara Penarikan	Jumlah (Rp)
1.	PT. Perusahaan Listrik Negara	PP	4.367.554.942
		PL	26.015.268.775
		LC	0
		Jumlah	30.382.823.717
2.	PT. Pertamina	PL	62.682.242.433
		LC	551.158.477.203
		Jumlah	613.840.719.636
3.	PT. SMI	PL	796.909.692.163
		Jumlah	796.909.692.163
Jumlah Keseluruhan			1.441.133.235.516

B.2.4.1.3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Tahun 2024 adalah sebesar Rp4.023.538.398.833 atau 102,61 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp3.921.260.000.000. Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman mengalami penurunan sebesar Rp2.350.860.097.136 atau 36,88 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp6.374.398.495.969.

Rincian Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagaimana berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) %
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri (PPDN)	268.991.443.728	2.041.258.121.405	(86,82)
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPDN Kepada Pemda	1.120.000.000	1.120.000.000	-
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPDN Kepada BUMD	1.149.090.909	198.181.821	479,82
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPDN Kepada BUMN	258.288.664.984	2.030.566.500.738	(87,28)
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPDN Kepada Non Pemerintah	8.433.687.835	9.373.438.846	(10,03)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri (PPLN)	3.754.546.955.105	4.333.140.374.564	(13,35)
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Daerah	67.746.694.812	77.691.349.491	(12,80)
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada BUMN	3.662.304.059.667	4.233.335.861.730	(13,49)
Penerimaan Cicilan Pengembalian PPLN kepada Non Pemerintah	24.496.200.626	22.113.163.343	10,78
Jumlah	4.023.538.398.833	6.374.398.495.969	(36,88)

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 berasal dari pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman oleh debitur melalui Rekening Dana Investasi (RDI), Rekening Pembangunan Daerah (RPD), dan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL). Nilai pembayaran terbesar dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) dengan nilai pembayaran mencapai Rp2.948.576.567.426,00 atau 73,28 persen dari jumlah penerimaan pembiayaan.

Berikut merupakan 10 (sepuluh) debitur dengan nilai pembayaran Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman terbesar sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama Debitur	Nilai (dalam rupiah)
1.	PT. PLN	2.948.576.567.426
2.	PT.SMI	377.877.723.235
3.	PT PGN	252.091.995.838
4.	PERTAMINA	246.625.685.634
5.	PT. TELKOM	78.691.921.529
6.	PEMPROV DKI	33.629.623.430
7.	PT. BANK MANDIRI	16.771.910.552
8.	Pemkab Aceh Timur	10.571.402.112
9.	Perusahaan Inti Rakyat	6.938.895.814
10.	Pemkab Muara Enim	6.278.516.130

B.2.4.1.4. Penerimaan Hasil Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI sebesar **Rp1.400.109.062.740** yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp302.371.456.574 atau **27,54** persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.097.737.606.166. Penerimaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi yang berasal dari penerimaan pengelolaan aset eks BLBI berasal dari Pengelolaan atas Aset Program Restrukturisasi Perbankan yang dilakukan DJKN melalui mekanisme pengurusan aset kredit oleh Panitia Urusan Piutang Negara, penjualan secara lelang aset properti, penebusan aset properti, penjualan secara lelang aset inventaris, pengelolaan surat berharga dan saham, dan pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) di mana yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan adalah yang telah tercatat dalam aplikasi Treasury Billing System (TBS), Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI), SPAN, serta modul Penerimaan setoran ke RKUN (FIRA). Rincian Realisasi Penjualan Aset Program Restrukturisasi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan) (%)
1	Penerimaan hasil penjualan / penyelesaian aset eks BPPN	1.221.059.570.444	1.030.646.856.018	18,48
2	Penerimaan hasil Penjualan / Penyelesaian aset eks BDL	179.049.492.296	67.090.750.148	166,88
Total		1.400.109.062.740	1.097.737.606.166	27,54

a. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN.

Realisasi Penerimaan Penjualan/ Penyelesaian Aset Eks BPPN tahun 2024 sebesar Rp1.221.059.570.444 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp190.412.714.426 atau 18,48 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp 1.030.646.856.018. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks BPPN terdiri dari realisasi pengelolaan aset eks BPPN, realisasi pengelolaan aset eks Kelolaan PT PPA, dan realisasi pengelolaan aset eks BPPN aset yang diserahkan kepada PT PPA. Penerimaan hasil pengelolaan aset eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) serta hasil pengelolaan aset yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) berasal dari pembayaran dan/atau pelunasan dalam rangka penyelesaian/pengurusan piutang negara, penjualan melalui lelang aset properti dan/atau aset inventaris, penebusan aset properti, pencairan aset nostro, pelepasan aset saham/surat berharga dan penjualan melalui lelang barang jaminan obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara.

b. Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL.

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BDL tahun 2024 sebesar Rp179.049.492.296 yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp111.958.742.148 atau 166,88 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp67.090.750.148. Penerimaan hasil penjualan/penyelesaian aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) diperoleh dari hasil pembayaran/pelunasan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), penjualan barang jaminan diambil alih/aset properti, pendapatan bunga dari obligasi, dan deviden dari saham yang telah disetorkan oleh unit-unit terkait ke Rekening Kas Umum Negara.

B.2.4.1.5. Surat Berharga Negara (Neto)

Realisasi Pembiayaan dari SBN Tahun 2024 adalah sebesar Rp450.733.252.420.187 atau 81,26 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp554.655.048.027.000. Realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp142.539.464.014.225 atau 46,25 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp308.193.788.405.962. Realisasi SBN, terdiri dari penerimaan penjualan SBN dan pengeluaran untuk pembayaran/pelunasan SBN. Realisasi Penerimaan SBN Tahun 2024 sebesar 1.075.437.376.773.300 dan Tahun 2023 sebesar Rp848.108.055.742.428, sedangkan Realisasi Pengeluaran SBN Tahun 2024 sebesar Rp 624.704.124.353.113 dan Tahun 2023 sebesar Rp539.914.267.336.466. Rincian Realisasi SBN Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun %
Penerimaan Penjualan Surat Berharga Negara	1.075.437.376.773.300	848.108.055.742.428	26,80
Penerbitan/Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	33.504.000.000.000	34.542.000.000.000	(3,01)
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara	590.125.540.000.000	445.320.497.000.000	32,52
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara	8.634.640.335.000	5.605.322.706.060	54,04
Penerbitan/Penjualan SBSN Jangka Panjang	222.421.958.000.110	221.619.255.704.658	0,36
Penerimaan Imbalan dibayar dimuka SBSN Jk. Panjang	2.328.793.438.300	2.469.080.982.310	(5,68)
Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	54.213.300.000.000	13.830.000.000.000	292,00
Penerbitan SBSN dlm rangka Pembiayaan Proyek-PBS	32.894.999.999.890	34.348.433.295.342	(4,23)
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara-Valas	92.879.895.000.000	58.971.351.694.000	57,50
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara-Valuta Asing	0	4.114.360.058	(100,00)
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas Jangka Panjang	38.434.250.000.000	31.398.000.000.000	22,41
Pengeluaran Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	624.704.124.353.113	539.914.267.336.466	15,70
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	34.896.000.000.000	54.005.000.000.000	(35,38)
Pelunasan Obligasi Negara	277.851.067.798.505	159.532.411.170.979	74,17
Pelunasan Obligasi Negara melalui Pembelian Kembali	11.148.500.000.000	32.780.366.000.000	(65,99)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara	7.471.744.860.158	5.993.063.722.946	24,67
Pelunasan SBSN Jangka Panjang	171.081.697.000.000	174.659.931.000.000	(2,05)
Pembayaran Imbalan dibayar dimuka SBSN - Jk Panjang	2.272.251.668.300	2.582.477.419.452	(12,01)
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	21.815.000.000.000	11.983.000.000.000	82,05
Pelunasan Obligasi Negara - Valas	63.305.247.366.000	79.319.816.212.000	(20,19)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	365.660.150	8.201.811.089	(95,54)
Pelunasan SBSN Valas - Jangka Panjang	34.862.250.000.000	19.050.000.000.000	83,00
Jumlah SBN Neto	450.733.252.420.187	308.193.788.405.962	46,25

B.2.4.1.6. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Neto Tahun 2024 adalah sebesar **Rp15.019.471.247.141** atau **2.360,70 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar **Rp636.230.414.000** yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp461.102.841,616 atau 3,17 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp14.558.368.405.525. Adanya kenaikan realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri disebabkan terjadinya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan.

Rincian Realisasi Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun %
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	20.122.653.359.752	17.504.129.527.679	14,96
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	18.649.607.994.305	16.672.197.186.598	11,86
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	1.473.045.365.447	831.932.341.081	77,06
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri	5.103.182.112.611	2.945.761.122.154	73,24
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri - Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	5.103.182.112.611	2.945.761.122.154	73,24
Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	15.019.471.247.141	14.558.368.405.525	3,17

Realisasi Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri (Neto) tersebut terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp20.122.653.359.752 dan Pembayaran Cicilan Pokok PDN sebesar Rp5.103.182.112.611. Rincian pemberi Pinjaman Dalam Negeri baik yang berasal dari BUMN dan Perusahaan Daerah, termuat dalam tabel berikut:

Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN dan Perusahaan Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/Turun %
Bank DKI	1.473.045.365.447	1.016.169.511.081	44,96
PT. Bank Mandiri Tbk	16.924.459.665.665	11.027.048.333.513	53,48
PT. BNI (Persero)	836.555.462.175	2.301.682.518.960	-63,65
PT. BTN (Persero)	888.592.866.465	3.159.229.164.125	-71,87
Jumlah	20.122.653.359.752	17.504.129.527.679	14,96

Pada Tahun 2024, penarikan pinjaman berasal dari BUMN, yaitu Bank Mandiri, PT. BNI dan PT. BTN dan Perusahaan Daerah yaitu Bank DKI. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai kegiatan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI dan kegiatan pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) Polri serta beberapa kegiatan pada BIN.

B.2.4.1.7. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah (Neto)

Realisasi Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2024 adalah sebesar minus Rp44.332.592.681.665 atau 29,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp151.216.040.000.000. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25.565.202.758.989 atau 36,58 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. sebesar minus Rp69.897.795.440.654.

Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Dana Investasi Pemerintah Tahun 2024 sebesar Rp44.332.592.681.665 terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp22.888.424.941.857
2. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp67.221.017.623.522

Rincian penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan bila dibandingkan dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik/ Turun (%)
Penerimaan Pembiayaan	22.888.424.941.857	26.800.909.690.612	(14,60)
Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	4.084.647.335.605	2.944.155.651.898	38,74
Penerimaan Pembiayaan pada UAKPA KBUMN	218.750.000.000	5.285.019.139.000	(95,86)
Penerimaan pembiayaan atas pengesahan belanja modal K/L pada BLU LMAN	14.994.205.687.037	18.207.083.934.327	(17,65)
Penerimaan Investasi dari UAKPA Set BPJT	3.268.707.260.033	359.653.415.387	808,85
Penerimaan Pembiayaan dari UAKPA BLU BPD LH (Mangrove)	322.114.659.182	4.997.550.000	6345,45
Pengeluaran Pembiayaan	(67.221.017.623.522)	(96.698.705.131.266)	(30,48)
Investasi Klaster Infrastruktur	(51.014.999.997.857)	(75.318.000.000.000)	(32,27)
Investasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(512.670.000.000)	(5.589.910.241.052)	(90,83)
Investasi Klaster Perlindungan Masyarakat	-	(4.300.000.000.000)	(100,00)
Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(2.023.117.731.764)	(3.559.632.528.929)	(43,16)
Investasi Klaster Lainnya	(13.670.229.893.901)	(6.883.643.222.285)	98,59
Investasi Pemerintah	-	(1.047.519.139.000)	100,00
Jumlah	(44.332.592.681.665)	(69.897.795.440.654)	(36,58)

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari PMN/Dana Investasi Pemerintah tahun 2024 sebesar Rp22.888.424.941.857 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp3.912.484.748.755 atau 14,60 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp26.800.909.690.612. Penerimaan ini berasal dari UAP DJPK, UAKPA Set BPJT, UAKPA BLU LMAN, UAKPA Kementerian BUMN, dan UAKPA BLU BPD LH dengan rincian sebagai berikut:

- a. Realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAP DJPK Tahun 2024 sebesar Rp4.084.647.335.605 terdiri dari pengembalian pokok pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU bulan Januari-Desember 2024 sebesar Rp3.927.418.935.932 dan Pengembalian Dana Pengelolaan Pinjaman PEN Daerah dari PT SMI sebesar Rp157.228.399.673
- b. Realisasi Penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAKPA Kementerian BUMN adalah sebesar Rp218.750.000.000 berasal dari penyetoran ke Kas Negara atas Pokok Pinjaman IP PEN PT Kereta Api periode April 2024:
- c. Pos Penerimaan pembiayaan pada LRA UAKPA BLU LMAN menyajikan total pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah terbit SP2D pengesahan belanja modal. Nilai pengesahan belanja modal sama dengan total pengeluaran Dana Jangka Panjang oleh Entitas pada tahun 2024 sebelum dikurangi dengan retur Dana Jangka Panjang yang mengatribusi pengeluaran sebelum tahun 2024. Hingga 31 Desember 2024 telah direalisasikan penggunaan dana jangka panjang sebesar Rp14.994.205.687.037 dengan rincian sebagai berikut:

K/L	Jenis PSN	Nominal Pokok
PUPR	Air baku	62.790.158.500
	Bendungan	1.476.741.663.131
	Irigasi	19.822.077.282
	Ibu Kota Nusantara	2.106.409.275.212
	Jalan Tol	11.252.687.323.222
Perhubungan	Pelabuhan	-
	Perkeretaapian	75.755.189.690
Jumlah		14.994.205.687.037

- d. Realisasi penerimaan pembiayaan yang berasal dari UAKPA Set BPJT tahun 2024 sebesar Rp3.268.707.260.033 merupakan angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU BP Set BPJT dengan rincian sebagai berikut.

No	Debitur	Jumlah (Rp)
1	PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways	1.000.000.000
2	PT Cibitung Tanjung Priok Tollways	284.996.789.617
3	PT Cimanggis Cibitung Tollways	168.494.978.731
4	PT Citra Waspphutowa	525.448.216.382
5	PT Jasamarga Kunciran Cengkayang	446.422.762.955
6	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	96.253.672.738
7	PT Marga Trans Nusantara	356.264.665.621
8	PT Pejagan Pemalang Tol Road	176.007.138.972
9	PT Pemalang Batang Tol Road	141.174.076.398
10	PT Trans Jabar Tol	691.921.936.197
11	PT Trans Marga Jateng	66.729.349.100
12	PT Translingkar Kita Jaya	313.993.673.322
Jumlah		3.268.707.260.033

- e. Realisasi penerimaan pembiayaan pada UAKPA BPD LH tahun 2024 terdapat penerimaan pembiayaan atas pengesahan belanja BRGM atas pengelolaan dana rehabilitasi mangrove sebesar Rp322.114.659.182.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari PMN/Dana Investasi Pemerintah tahun 2024 sebesar minus Rp67.221.017.623.522 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp29.477.687.507.744 atau 30,48 persen jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp96.698.705.131.266. Dalam APBN tahun anggaran 2024 pembiayaan investasi dilakukan antara lain dalam rangka: (1) mengembangkan pembiayaan inovatif melalui penguatan BUMN, BLU, *sovereign wealth fund* (SWF), dan *special mission vehicle* (SMV) sebagai dukungan alternatif pembiayaan yang efisien dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas nasional; (2) mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait pembangunan IKN dan proyek proyek infrastruktur yang ditargetkan selesai paling lambat tahun 2024; (3) mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR; (4) mengembangkan infrastruktur pariwisata dan aviasi serta; (5) mendukung pembebasan lahan yang diperlukan dalam penyelesaian proyek strategis dan prioritas. Berikut realisasi pengeluaran pembiayaan pada masing-masing klaster:

Uraian	DIPA 2024	Tahun 2024	Realisasi (%)
Investasi Klaster Infrastruktur	(59.515.000.000.000)	(51.014.999.997.857)	85,72
PMN Kepada PT Utama Karya (Persero)	(19.604.000.000.000)	(18.604.000.000.000)	94,90
PMN Kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	(6.000.000.000.000)	(5.999.999.997.857)	100,00
PMN Kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1.891.000.000.000)	(1.891.000.000.000)	100,00
PMN Kepada BP Tapera	(17.020.000.000.000)	(17.020.000.000.000)	100,00
Investasi Kepada BLU LMAN	(15.000.000.000.000)	(7.500.000.000.000)	50,00
Investasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup	(1.212.670.000.000)	(512.670.000.000)	42,28
Investasi Kepada BLU BPD LH	(1.212.670.000.000)	(512.670.000.000)	42,28
Investasi Klaster Kerja Sama Internasional	(2.023.117.732.000)	(2.023.117.731.764)	100,00
Investasi Kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(1.594.641.387.000)	(1.594.641.386.764)	100,00
Investasi Kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(63.068.000.000)	(63.068.000.000)	100,00
Investasi Kepada International Development Association (IDA)	(326.792.480.000)	(326.792.480.000)	100,00
Investasi Kepada BLU LDKPI	(38.615.865.000)	(38.615.865.000)	100,00
Investasi Pemerintah Lainnya	(18.670.230.000.000)	(13.670.229.893.901)	73,22
PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	(3.556.000.000.000)	(3.556.000.000.000)	100,00
PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)	100,00
PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero)	(965.000.000.000)	(965.000.000.000)	100,00
PMN kepada PT Pelayaran Indonesia (Persero)	(1.500.000.000.000)	(1.500.000.000.000)	100,00
PMN Non-tunai kepada PT LEN Industri (Persero)	(649.230.000.000)	(649.229.893.901)	100,00
PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(10.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)	50,00
Jumlah	(81.421.017.732.000)	(67.221.017.623.522)	82,56

a. Investasi Klaster Infrastruktur

Realisasi Pembiayaan Investasi Pemerintah klaster infrastruktur tahun 2024 sebesar Rp51.014.999.997.857 atau 85,72 persen dari alokasi yang telah dianggarkan sebesar Rp59.515.000.000.000. Realisasi ini terdiri atas:

- 1) PMN kepada PT Utama Karya (Persero) sebesar Rp18.604.000.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024. Alokasi PMN kepada PT Utama Karya (Persero) ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan

pembangunan jalan tol di Sumatera. Pada Semester II Tahun 2024, PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan tambahan anggaran PMN sebesar Rp1.000.000.000.000,00 berdasarkan KMK Nomor 380 Tahun 2024 tanggal 3 Oktober 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 338 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran, namun sampai berakhirnya tahun anggaran 2024, alokasi tambahan anggaran PMN tersebut tidak terealisasi. Hal ini dikarenakan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dan kinerja BUMN konstruksi, serta jaminan terhadap efisiensi dan kinerja dari BUMN Karya, sehingga proses penerbitan Rancangan Peraturan Pemerintah Penambahan PMN kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp1.000.000.000.000 tidak dilanjutkan.

- 2) PMN Kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp5.999.999.997.857 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024. Alokasi PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada PT Wijaya Karya Tbk.
 - 3) PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp1.891.000.000.000 sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2024. Alokasi PMN tersebut ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan serta menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang sektor perumahan.
 - 4) PMN kepada Satker Direktorat SMI sebesar Rp17.020.000.000.000 yang merupakan nilai Investasi Non Permanen yang disalurkan kepada BP Tapera selaku Operator Investasi Pemerintah (OIP) dan menghasilkan output berupa pembiayaan kepada MBR.
 - 5) PMN kepada KPA Satker BLU LMAN sebesar Rp7.500.000.000.000 atau 50% dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA Tahun 2024 sebesar (Rp15.000.000.000.000). Nilai realisasi tersebut merupakan nilai yang telah disepakati dalam rapat ALCO.
- b. Investasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup
- Realisasi Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup tahun 2024 sebesar Rp512.670.000.000 atau 42,28 persen dari alokasi yang telah dianggarkan sebesar Rp1.212.670.000.000. Alokasi investasi klaster pangan dan lingkungan hidup merupakan alokasi kepada BLU BPDH untuk dana rehabilitasi mangrove. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove, kegiatan rehabilitasi mangrove dilaksanakan oleh BRGM dengan menggunakan dana yang disalurkan melalui BLU BPDH. BRGM menggunakan mekanisme pengesahan belanja atas beban DIPA Kementerian/Lembaga (K/L), sedangkan BLU BPDH dalam mencairkan dana dari RKUN menggunakan mekanisme Bagian Anggaran BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah.
- c. Investasi Klaster Kerjasama Internasional
- Realisasi Klaster Kerjasama Internasional tahun 2024 sebesar Rp2.023.117.731.764 atau 100 persen dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp 2.023.117.732.000. Realisasi ini terdiri atas:
- 1) Realisasi Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB) sebesar Rp1.594.641.386.764.

- 2) Realisasi Investasi kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD) sebesar Rp63.068.000.000.
- 3) Realisasi Investasi kepada International Development Association (IDA) sebesar Rp326.792.480.000.
- 4) Realisasi Investasi Klaster Kerja Sama Internasional KPA Satker BLU LDKPI adalah sebesar Rp38.615.865.000.

Pembayaran International Fund for Agricultural Development (IFAD), International Development Association (IDA), dan Islamic Development Bank (IsDB) dilakukan melalui KPA Satker PKPPIM BKF. Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, anggaran pembiayaan Investasi Pemerintah pada LKI TA 2024 ditetapkan sebesar Rp1.984.501.867.000 dan dapat dilakukan melebihi pagu sepanjang disebabkan oleh selisih kurs. Atas pembayaran investasi kepada ketiga LKI tersebut pemerintah telah menerima konfirmasi penerimaan pembayaran dari ketiga LKI tersebut. IFAD dan IDA telah menerima pembayaran sesuai dengan tagihan/pembayaran investasi yang seharusnya diterima. Namun untuk pembayaran investasi kepada IsDB, IsDB mencatatkan adanya surplus atau kelebihan pembayaran investasi pemerintah senilai ID225.452,35. Pencatatan surplus oleh IsDB ini terjadi akibat perbedaan tanggal pencatatan. Meski pembayaran investasi pemerintah sebesar USD101.137.907,45 telah SP2D di tanggal 26 Januari 2024, IsDB mencatat penerimaan tersebut di tanggal 30 Januari 2024. Lalu, IsDB melakukan konversi investasi dimaksud dalam kurs Islamic Dinar yang digunakan per tanggal 29 Januari 2024. Oleh karena itu, terdapat kelebihan pembayaran Pemerintah Indonesia kepada IsDB dan atas kelebihan tersebut dapat digunakan untuk mengurangi jumlah tagihan yang harus dibayar pemerintah Indonesia kepada IsDB di periode berikutnya.

Penambahan investasi jangka panjang pada BLU LDKPI merupakan penambahan investasi yang bersumber dari saldo kas BLU LDKPI yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari Saldo Kas pada BLU.

d. Investasi Klaster Lainnya

Realisasi Klaster Lainnya tahun 2024 sebesar Rp13.670.229.893.901 atau 73,22 persen dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp18.670.230.000.000. Realisasi tersebut terdiri atas:

- 1) PMN kepada PT BPUI sebesar Rp3.556.000.000.000 sesuai PP No. 16 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi Indonesia termasuk penyelesaian polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah direstrukturisasi dan/atau dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
- 2) PMN kepada PT KAI sebesar Rp2.000.000.000.000 sesuai PP No. 52 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka mendukung ketersediaan sarana perkeretaapian Kereta Rel Listrik untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang kereta api perkotaan.
- 3) PMN kepada PT INKA sebesar Rp965.000.000.000 sesuai PP No. 51 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam

rangka memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian untuk pasar dalam negeri dan luar negeri melalui investasi fasilitas produksi dan pendukung.

- 4) PMN kepada PT Peln sebesar Rp1.500.000.000.000 sesuai PP No. 53 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka mendukung konektivitas dan aksesibilitas melalui penyediaan kapal.
- 5) PMN kepada PT LEN Industri sebesar Rp649.230.000.000 sesuai PP No. 54 Tahun 2024 berupa PMN non-tunai yang berasal dari konversi piutang pokok negara berupa aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung pembangunan bidang pertahanan dan keamanan serta optimalisasi industri pertahanan nasional.

PMN tersebut telah dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2024, namun proses realisasinya dilaksanakan pada tahun 2025. Realisasi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 179 PMK Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 107 Tahun 2024, yang memberikan ruang atas revisi anggaran yang melewati batas waktu dalam hal terdapat direktif Presiden/Wakil Presiden atau prioritas Kementerian/Lembaga yang bersifat penting dan mendesak, sepanjang mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pada bulan Februari 2025, Kementerian BUMN selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan revisi anggaran yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran. Kemudian, pada bulan Maret 2025 revisi tersebut disahkan.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) atas pencairan PMN, yang kemudian terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN Jakarta II pada tanggal 29 April 2025.

Realisasi PMN kepada PT LEN Industri (Persero) sebesar Rp649.230.000.000 belum dicatat sebagai penambah ekuitas pada ILKPN Tahun 2024 *Audited*. Hal ini disebabkan karena hingga penyampaian LKBUN Tahun 2024 *Audited*, PT LEN Industri (Persero) masih dalam proses audit laporan keuangan oleh KAP dan belum mencatat penambahan PMN tersebut dalam laporan keuangannya. Terdapat perbedaan nilai piutang pokok negara berupa aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang menjadi objek PMN kepada PT LEN Industri Persero), di mana berdasarkan PP tercatat sebesar Rp649.230.000.000,00, sedangkan pada LK UAPBUN TK Pengelola Aset BA 999.99 TA 2024 *Audited* tercatat sebesar Rp672.094.959.385,47. Perbedaan tersebut disebabkan karena aset piutang tersebut dicatat dalam bentuk mata uang USD, sementara pada LK UAPBUN TK Pengelola Aset BA 999.99 TA 2024 *Audited*, konversi ke mata uang rupiah masih menggunakan kurs penutup JISDOR per 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp15.439,00. Dengan demikian, nilai mutasi piutang adalah sebesar Rp672.094.959.385,57 (USD43.532.285,72 x Rp15.439)

- 6) PMN kepada PT LPEI sebesar Rp5.000.000.000.000 atau 50 persen dari alokasi yang dianggarkan dalam DIPA sebesar Rp10.000.000.000.000. Investasi tersebut dialokasikan kepada LPEI untuk melaksanakan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) dari pemerintah untuk menyediakan pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh Pemerintah untuk mendukung kebijakan ekspor nasional. PMN kepada LPEI dilaksanakan sesuai PP No. 50 Tahun 2024. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, PMN kepada LPEI disetujui sebesar Rp5 triliun,

dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, good corporate governance, dan tidak mengulang kesalahan pengelolaan.

Pada akhir Tahun Anggaran 2024, terdapat transaksi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mekanisme pencairannya melalui rekening penampungan Rekening Pengeluaran Lainnya Bank Umum SKN RTGS atau RPgI in transit karena proses penerbitan SP2D belum dapat diselesaikan hingga berakhirnya *window time* BI pada tanggal 31 Desember 2024. Dari rekening penampung tersebut kemudian diteruskan ke rekening masing-masing BUMN/BHL dan diterima pada tanggal 2 Januari 2025. Transaksi yang melalui mekanisme rekening penampung tersebut antara lain PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp2.000.000.000.000, PT Industri Kereta Api (persero) sebesar Rp965.000.000.000, PT Pelayaran Indonesia (Persero) sebesar Rp1.500.000.000.000, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebesar Rp1.891.000.000.000, dan LPEI sebesar Rp5.000.000.000.000.

B.2.4.1.8. Pengeluaran Kewajiban Penjaminan

Realisasi Pengeluaran Kewajiban Penjaminan tahun 2024 sebesar **Rp1.458.986.000.000** atau **177,06 persen** dari anggaran yang ditetapkan pada APBN 2024 sebesar **Rp823.986.000.000**. Realisasi ini naik sebesar Rp1.128.474.495.000 atau 341,43 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp330.511.505.000. Hal ini disebabkan karena pada TA 2023, kewajiban penjaminan hanya dianggarkan untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional. Sedangkan pada TA 2024 kewajiban penjaminan terdiri dari anggaran untuk Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebesar Rp823.986.000.000 dan dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan sebesar Rp635.000.000.000. Kewajiban Penjaminan Tahun 2024 dialokasikan kepada Satker Direktorat EAS. Kewajiban Penjaminan merupakan pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2024 ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. Rincian realisasi kewajiban Tahun 2024 dijelaskan pada tabel berikut.

Uraian	APBN TA 2024	Realisasi 31 Desember 2024
Kewajiban Penjaminan	(823.986.000.000)	(1.458.986.000.000)
KPA Satker EAS DJPPR	(823.986.000.000)	(1.458.986.000.000)
Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(823.986.000.000)	(823.986.000.000)
Penjaminan Infrastruktur dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(681.543.000.000)	(681.543.000.000)
Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(55.492.000.000)	(55.492.000.000)
Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	(25.444.000.000)	(25.444.000.000)
Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(61.507.000.000)	(61.507.000.000)
Dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan	-	(635.000.000.000)

B.2.4.1.9. Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi Pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Tahun 2024 adalah sebesar **Rp15.000.000.000.000** atau **60 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar **Rp25.000.000.000.000**. Realisasi tersebut merupakan pencairan Dana Abadi Pendidikan kepada BLU LPDP. LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Pengeluaran Dana Pengembangan

Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan (*endowment fund*) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dana Abadi di Bidang Pendidikan yang dikelola LPDP sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 meliputi Dana Abadi Pendidikan (DAP), Dana Abadi Penelitian (DAPL), Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT), dan Dana Abadi Kebudayaan (DAKB). Anggaran pembiayaan dana abadi tahun 2024 sebesar Rp15.000.000.000.000. Total akumulasi pokok dana abadi per 31 Desember 2024 telah mencapai Rp154.107.700.000.000.

Adapun rincian akumulasi pencairan Dana Abadi di Bidang Pendidikan disajikan pada tabel berikut.

Uraian	Akumulasi sd 31 Desember 2023	Pencairan TA 2024	Akumulasi sd 31 Desember 2024
DAP	111.117.700.000.000	15.000.000.000.000	126.117.700.000.000
DAPL	12.990.000.000.000		12.990.000.000.000
DAPT	10.000.000.000.000		10.000.000.000.000
DAKB	5.000.000.000.000		5.000.000.000.000
Jumlah	139.107.700.000.000	15.000.000.000.000	154.107.700.000.000

B.2.4.1.10. Pembiayaan Lain-Lain

Realisasi Pembiayaan Lain-Lain Tahun 2024 adalah sebesar Rp15.454.545.454 yang berasal dari penerimaan pembiayaan atas pemberian pinjaman dalam rangka penanggulangan lumpur Sidoarjo sebagai pengembalian sebagian Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo sebesar Rp.15.454.545.454

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri Tahun 2024 adalah sebesar Rp92.311.154.268.612 atau sebesar 752,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp12.273.802.402.000. Dengan demikian realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp11.111.108.260.887 atau 13,68 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp81.200.046.007.725.

Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman tunai dan (ii) penarikan pinjaman kegiatan.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2024 adalah sebesar Rp179.765.350.519.789 atau sebesar 183,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp97.751.162.402.000. Dengan demikian realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.114.997.721.571 atau 10,52 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp162.650.352.798.218.

Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman tunai dan (ii) penarikan pinjaman kegiatan.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Tunai

Realisasi Pinjaman tunai Tahun 2024 adalah sebesar Rp60.028.929.576.507 atau sebesar 100,05 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar Rp60.000.000.000.000. Dengan demikian realisasi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.961.851.264.177 atau 27,67 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp82.990.780.840.684. Sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang tentang APBN Tahun 2024 dimana terdapat opsi fleksibilitas pembiayaan utang

sehingga pemerintah dapat merubah komposisi instrumen pembiayaan utang dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi dan fiskal, dengan mempertimbangkan ketersediaan instrumen utang. Pinjaman Tunai merupakan salah satu instrumen pembiayaan yang dapat disesuaikan berdasarkan fleksibilitas pembiayaan utang tersebut. Detail realisasi penarikan pinjaman tunai termuat dalam tabel berikut:

No.	Lender	MTU	Jumlah Valas	Jumlah Rupiah	Nama Program
1	ADB	EUR	459.475.000	7.774.666.201.000	ASET 1
			461.383.000	7.806.951.011.080	RMDP - Subprogram 1
			119.250.000	2.023.688.380.000	SEHAT PROGRAM
		JPY	4.930.000.000	7.948.312.145.000	BPHCDP Sub Program 2
		USD	7.314.980	117.081.472.228	IPDMIP AIF RECLASSIFICATION
			36.507.543	584.199.768.645	IPDMIP RECLASSIFICATION
2	AFD	EUR	200.000.000	3.351.270.000.000	PBL-MARINE DEBRIS
3	AIIB	EUR	468.800.000	8.238.236.464.000	BPHCDP Subprogram 2
			471.000.000	8.276.897.130.000	CITA Subprogram 2
4	IBRD	EUR	107.849.885	1.850.359.289.584	SINERGIS
		JPY	20.411.250.000	2.162.265.768.750	INEY Phase 2 Program
		USD	75.000.000	1.206.585.000.000	IDRFI
			83.640.000	1.306.182.600.000	JKN Reform
			41.815.190	632.998.346.220	TB Response
5	KfW	EUR	400.000.000	6.749.236.000.000	Marine Debris
Total				60.028.929.576.507	

Pinjaman tunai dapat menggunakan *policy matrix*, yaitu kumpulan kebijakan yang digunakan sebagai *underlying* dalam proses pencairan pinjaman. Untuk pinjaman tunai ini, setelah terpenuhinya *policy matrix* akan dilakukan negosiasi dan penandatanganan *loan agreement*, selanjutnya akan dilakukan pencairan. Pinjaman tunai juga dapat menggunakan *modalitas Program for Result (PforR)* dan *Investment Project Financing with Performance Based Conditions (IPF with PBC's)* dimana untuk PforR pengukuran capaian menggunakan *Disbursement Linked Indicators* yang selanjutnya disingkat DLIs. DLIs merupakan indikator-indikator berupa target-target yang harus dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Dalam proses pencairan pinjaman, DLIs terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Independent Verification Agency (IVA) yang disepakati antara Pemerintah dan *lender* dalam beberapa pinjaman tunai yang ditunjuk adalah BPKP. Hasil verifikasi tersebut akan dijadikan dasar penarikan pinjaman tunai. Untuk pinjaman dengan modalitas IPF with PBC seperti pinjaman *Mangrove for Coastal Resilience (M4CR)* dilakukan penarikan setelah target PBC dicapai oleh *executing agency/implementing agency*. Daftar pinjaman tunai dengan menggunakan *policy matrix* dan DLIs/PBC untuk penarikan pinjaman tunai Tahun 2024.

No	Lender	Program	Policy Matrix/Output/Pilar	
1	ADB	Supporting Essential Health Actions for Transformation/SEHAT (RBL)		Disbursement Linked Indicators (DLI)
2	WB	Intergovernmental Transfers and Sub-national Finance (SINERGIS) (PforR)		Disbursement Linked Indicators (DLI)
3	WB	National Health Insurance (JKN) Reforms and Results (PforR)		Disbursement Linked Indicators (DLI)
4	WB	Investing in Nutrition and Early Years (PforR - AF)		Disbursement Linked Indicators (DLI)
5	ADB	Boosting Productivity through Human Capital Program Subprogram 2 (PBL)	1	Strengthened Policies to Finance and Monitor Implementation of SDGs
			2	Improved Educational Attainment and Skills Development
			3	Enhanced Social Protection and Public Health Systems

No	Lender	Program	Policy Matrix/Output/Pillar	
6	AIIB	Co-financing Competitiveness, Industrial Modernization and Trade Acceleration Program, Sub Program 2	1	Creating and enabling environment for investments
			2	Easing barriers to trade
			3	Growing and upscaling enterprises
7	AIIB	Co-financing Boosting Productivity through Human Capital Program Subprogram 2	1	Strengthened Policies to Finance and Monitor Implementation of SDGs
			2	Improved Educational Attainment and Skills Development
			3	Enhanced Social Protection and Public Health Systems
8	WB	Disaster Risk Finance and Insurance (IPF with PBCs)	1	Performance Based Conditions (PBC)
			2	Expenditure
9	WB	Strengthening National Tuberculosis Response Program (TB PfR)		Disbursement Linked Indicators (DLI)
10	ADB	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program		Disbursement Linked Indicators (DLI)
11	AIF	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program		Disbursement Linked Indicators (DLI)
12	ADB	Co-financing Marine Debris Program (PBL)	1	Plastic Waste Management Improved
			2	Problematic Plastic Production and Consumption Reduced.
			3	Data and Monitoring Tools for Policy Making Strengthened
13	ADB	Affordable and Sustainable Energy Transition Program (PBL)	1	Policies and regulatory framework for clean energy transition established
			2	Sector governance and financial sustainability strengthened
14	KfW	Marine Debris Program	1	Plastic Waste Management Improved
			2	Problematic Plastic Production and Consumption Reduced.
			3	Data and Monitoring Tools for Policy Making Strengthened
15	AFD	Co-financing Marine Debris Program	1	Plastic Waste Management Improved
			2	Problematic Plastic Production and Consumption Reduced.
			3	Data and Monitoring Tools for Policy Making Strengthened

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Kegiatan

Realisasi penarikan pinjaman kegiatan Tahun 2024 adalah sebesar **Rp119.736.420.943.282** atau sebesar **317,17 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar **Rp37.751.162.402.000**. Dengan demikian realisasi Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp40.076.848.985.748 atau 50,31 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp79.659.571.957.534. Kenaikan realisasi Pinjaman Proyek disebabkan terjadinya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan. Pinjaman kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan BUMN.

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2024 adalah sebesar **Rp87.454.196.251.177** atau **102,31 persen** dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN 2024 sebesar

Rp85.477.360.000.000. Atas hal tersebut, realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.003.889.460.684 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp81.450.306.790.493 atau 7,37 persen. Realisasi tersebut lebih besar dari yang dianggarkan dalam APBN disebabkan oleh adanya penguatan kurs pada saat transaksi pembayaran. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2024.

Realisasi pengeluaran pembiayaan Utang Luar Negeri terdiri dari:

1. Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Tunai
Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman tunai sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.109.598.460.079.
2. Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Kegiatan
Realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman kegiatan sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp40.344.597.791.098.

Debitur	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Tunai	47.109.598.460.079	41.620.171.896.141	13,19
Pengeluaran Pembiayaan Cicilan Pokok Utang Luar Negeri-Pinjaman Kegiatan	40.344.597.791.098	39.830.134.894.352	1,29
Jumlah	87.454.196.251.177	81.450.306.790.493	7,37

B.2.5. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran – SiKPA

Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2024 sebesar Rp1.205.975.616.208.449 atau 96,98 persen dari jumlah yang dianggarkan Tahun 2024 sebesar minus Rp1.243.579.921.848.000. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA merupakan penjumlahan dari defisit anggaran sebesar Rp1.760.864.195.561.477 dan Pembiayaan Neto sebesar Rp554.888.579.353.028. Atas hal tersebut, realisasi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran–SiKPA Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp133.537.605.581.198 atau 9,97 persen jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp1.339.513.221.789.647.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

A. BA BUN 999.01

1. Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Pemerintah merespon kejadian luar biasa pandemi COVID 19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Negara (PC-PEN). Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan KB I tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 190/KMK.08/2020 dan

Nomor 22/4/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 565/KMK.08/2020 dan Nomor 22/15/KEP.GBI/2020).

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme pembagian beban (*burden sharing*) antara Pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II tahun 2020 (Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 326/KMK.08/2020 dan Nomor 22/8/KEP.GBI/2020 jo. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 347/KMK.08/2020 dan Nomor 22/9/KEP.GBI/2020). Sesuai SKB II, BI membeli SBN yang diperuntukkan untuk *Public Goods* (PG) dan menanggung seluruh beban yang timbul sampai dengan SBN tersebut jatuh tempo. Selain itu, BI dan Pemerintah juga berbagi beban (*burden sharing*) biaya penerbitan SBN yang ditujukan untuk pembiayaan *Non-Public Goods* (NPG). Penerbitan SBN untuk pemenuhan pembiayaan PG dan NPG sesuai SKB II hanya dilakukan pada tahun 2020, yaitu melalui 8 kali transaksi *private placement* dengan nilai Rp397,56 triliun untuk PG dan 9 kali lelang dengan nilai Rp177,03 triliun untuk NPG.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada tahun 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan, diantaranya kondisi pandemi yang masih berlanjut dan munculnya varian baru virus Covid-19, konsumsi masyarakat yang masih terbatas, belum pulihnya aktivitas dunia usaha, serta masih rendahnya pertumbuhan kredit pada sektor perbankan. Menyebarnya varian delta mengharuskan Pemerintah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan berdampak pada peningkatan pembiayaan utang Pemerintah. Peningkatan pembiayaan tersebut utamanya untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan serta upaya untuk pemulihan ekonomi tetap *on track*.

Merespon kondisi tersebut, pada bulan Agustus 2021, Pemerintah kembali melanjutkan kerjasama dengan Bank Indonesia melalui SKB III (Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 347/KMK.08/2021 dan Nomor 23/11/KEP.GBI/2021 tentang skema dan mekanisme koordinasi antara Pemerintah dan Bank Indonesia untuk pembiayaan penanganan kesehatan dan kemanusiaan dalam rangka penanganan dampak pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) melalui penerbitan Surat Utang Negara dan atau Surat Berharga Syariah Negara oleh Pemerintah dan pembelian di Pasar perdana oleh BI). Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia tersebut digunakan sebagai dasar dalam melakukan koordinasi penerbitan SUN dan/atau SBSN oleh Pemerintah, serta pembeliannya di pasar perdana oleh Bank Indonesia, serta dasar mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Bank Indonesia guna menurunkan beban keuangan negara untuk pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan. Besaran nilai SBN sesuai kesepakatan adalah sebesar Rp439 triliun, yang direalisasikan tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun.

SBN yang diterbitkan pemerintah sesuai SKB II dan SKB III, khususnya dengan seri VR yang dibeli di pasar perdana, bersifat *tradable* dan *marketable* sehingga dapat dipergunakan BI untuk pelaksanaan operasi moneter. Dengan meningkatnya kepemilikan SBN *tradable* oleh BI maka kondisi ini sejalan dengan kebijakan untuk penggunaan SBN dalam operasi moneter, yang pada akhirnya dapat mendorong likuiditas pasar SBN.

SBN seri VR yang dibeli BI di pasar perdana dalam rangka SKB II dan SKB III, akan mulai jatuh tempo pada tahun 2025. Sejalan dengan rencana operasi moneter tahun 2025, Bank Indonesia akan melakukan pembelian SBN di pasar sekunder dari pelaku pasar dan melalui mekanisme

pertukaran SBN secara bilateral (*bilateral debt switch*) dengan Pemerintah. Pelaksanaan *debt switch* akan dilakukan melalui pertukaran antara SBN yang jatuh tempo tahun 2025 dengan SBN tradable dengan menggunakan harga pasar yang berlaku sesuai mekanisme pasar. SBN pengganti adalah SBN dengan tenor yang lebih panjang sesuai dengan kebutuhan operasi moneter Bank Indonesia dan kesinambungan fiskal Pemerintah. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter melalui penerbitan SBN dan operasi moneter diharapkan dapat menjaga stabilitas pasar keuangan dan meminimalkan terjadinya disrupsi pada pasar SBN akibat konsentrasi jatuh tempo pada periode tertentu.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai pengurang beban/belanja bunga sebagaimana tujuan skema *burden sharing*. Bank Indonesia memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian beban belanja bunga yang ditanggung Pemerintah. Pada Tahun 2024. Rincian kontribusi Bank Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1 Porsi Pemerintah dan BI dalam skema *burden sharing*

No	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Januari	1.063.218.760.000	-	1.063.218.760.000
2	Februari	2.311.539.140.000	-	2.311.539.140.000
3	Maret	2.984.585.270.000	-	2.984.585.270.000
4	April	1.108.478.470.000	-	1.108.478.470.000
5	Mei	2.291.361.160.000	-	2.291.361.160.000
6	Juni	2.931.325.430.000	-	2.931.325.430.000
7	Juli	1.093.170.890.000	-	1.093.170.890.000
8	Agustus	2.380.368.360.000	-	2.380.368.360.000
9	September	3.187.289.920.000	-	3.187.289.920.000
10	Oktober	1.189.877.760.000	-	1.189.877.760.000
11	November	2.453.153.280.000	-	2.453.153.280.000
12	Desember	3.101.763.440.000	-	3.101.763.440.000
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG		26.096.131.880.000	-	26.096.131.880.000
B. Non Public Goods				
1	Juni	263.610.395.000	4.757.363.605.000	5.020.974.000.000
2	Desember	45.277.408.000	4.764.264.807.500	4.809.542.215.500
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK NPG		308.887.803.000	9.521.628.412.500	9.830.516.215.500

No	Bulan	Porsi Bank Indonesia	Porsi Pemerintah	Total
C. Cluster A				
1	Januari	336.453.795.750	-	336.453.795.750
2	Februari	142.229.566.980	-	142.229.566.980
3	Maret	936.062.000.000	-	936.062.000.000
4	April	502.162.768.080	-	502.162.768.080
5	Mei	140.365.183.860	-	140.365.183.860
6	Juni	919.358.000.000	-	919.358.000.000
7	Juli	494.117.329.940	-	494.117.329.940
8	Agustus	145.817.625.060	-	145.817.625.060
9	September	1.158.161.119.840	-	1.158.161.119.840
10	Oktober	378.245.359.200	-	378.245.359.200
11	November	150.276.314.880	-	150.276.314.880
12	Desember	1.144.199.345.630	-	1.144.199.345.630
SUBTOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK CLUSTER A		6.447.448.409.220	-	6.447.448.409.220
TOTAL KONTRIBUSI BI UNTUK PG, NPG DAN CLUSTER A		32.852.468.092.220	9.521.628.412.500	42.374.096.504.720

2. Sampai dengan Tahun 2024, pagu dan realisasi SBSN proyek per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 2 Pagu dan Realisasi SBSN Proyek

No	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi
1	Kejaksaan Republik Indonesia	319.541.881.000	318.382.603.580
2	Kementerian Pertahanan	1.348.570.555.000	1.348.499.493.232
3	Kementerian Pertanian	317.138.369.000	307.509.160.188
4	Kementerian Perindustrian	68.454.888.000	68.410.360.860
5	Kementerian Perhubungan	11.047.070.155.000	6.507.290.013.869
6	Kementerian Pendidikan Nasional	2.042.182.040.000	1.835.149.066.094
7	Kementerian Agama	3.123.051.991.000	3.101.884.038.463
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	52.405.606.000	42.822.450.973
9	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	16.787.845.893.000	16.126.937.168.089
10	Badan Pusat Statistik	19.295.370.000	14.176.767.985
11	Kepolisian Negara Republik Indonesia	562.506.354.000	556.909.438.187
12	Badan Kepegawaian Negara	60.604.570.000	49.341.420.379
13	Badan Kemanan Laut	188.089.151.000	187.952.228.931
14	Badan Riset dan Inovasi Nasional	140.092.245.000	140.080.422.705
	Jumlah	36.076.849.068.000	30.605.344.633.535

Realisasi pelaksanaan SBSN proyek TA 2024 s.d 31 Desember 2024 adalah 84,83 persen (dari total alokasi termasuk lanjutan/luncuran). Secara umum, kinerja pelaksanaan SBSN proyek TA

2024 tersebut cukup baik namun terdapat beberapa proyek dengan alokasi besar yang akan dilanjutkan/diluncurkan pada tahun 2025 khususnya pada Kementerian Perhubungan.

3. Nilai realisasi proyek SBSN Single Year Contract (SYC) yang dilanjutkan pelaksanaannya dari tahun 2023 ke tahun 2024 per masing-masing Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

Tabel 3 Nilai Proyek SBSN SYC 2023 yang Dilanjutkan Pelaksanaannya ke 2024

NO	Kementerian/Lembaga	Pagu	Realisasi
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	22.138.606.000	22.138.606.000
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.368.470.000	47.368.465.885
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	61.525.767.000	61.227.243.183
4	KEMENTERIAN AGAMA	60.432.815.000	60.428.578.365
5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	81.834.475.000	63.452.568.304
JUMLAH		273.300.133.000	254.615.461.737

4. Nilai proyek SBSN Single Year Contract (SYC) 2024 yang akan dilanjutkan pelaksanaannya ke tahun 2025 berdasarkan rekonsiliasi data lanjutan 2024 ke 2025 yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian/Lembaga dan menjadi dasar untuk proses revisi anggaran yang dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Nilai Proyek SBSN SYC 2024 yang Dilanjutkan Pelaksanaannya ke 2025

NO	Kementerian/Lembaga	Pagu
1	KEMENTERIAN PERTANIAN	3.893.556.167
2	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	174.787.234.623
3	KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	57.901.455.544
4	KEMENTERIAN AGAMA	24.315.404.004
5	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	57.303.614.000
6	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.093.432.386
JUMLAH		321.294.696.724

5. Sampai dengan Tahun 2024, Direktorat Pengelolaan Kas Negara telah melakukan pengembalian dana (*refund*) kepada Lender sebesar Rp61.355.941.348 dikarenakan adanya *refund* administratif dan *refund ineligible*. *Refund* merupakan koreksi nilai ekuitas tahun lalu, sehingga tidak mempengaruhi akun penarikan pinjaman kegiatan. Rincian *refund* termuat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5 *Refund* (*Ineligible* dan Prosedur Administratif)

No	Loan Id	Register	Kementerian Lembaga	Lender	Nilai Rupiah
Refund Administratif					(32.426.515.613)
1	20421000	1ZZ7LGXA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(1.900.054.309)
2	20600002	1XH37L2A	DITJEN S.D.AIR-PU	AIIB	(1.902.630.968)
3	20818000	1116F8FA	KEMEN PU & PERA	IFAD	(21.461.078.584)
4	21265000	17D37YEA	DITJEN S.D.AIR-PU	ADB	(3.658.238.782)
5	20434000	1BUY9N3A	KEMEN ATR/BPN	IBRD	(307.971.386)
6	21246000	10884001	KEMEN PU & PERA	ADB	(1.033.481.517)
7	21265000	17D37YEA	KEMEN PU & PERA	ADB	(2.163.060.067)
Refund Ineligible					(28.929.425.735)
6	20413000	10881901	BRIN	IBRD	(112.708.548)
7	20419000	18K6ECNA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(6.079.779.794)
8	20426000	1HG72SWA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(6.010.693.858)
9	20600001	1PTDQQAA	KEMEN PU & PERA	AIIB	(5.652.203.278)
10	20408000	10864001	KEMENRISTEK	IBRD	(24.289.892)
11	20421000	1ZZ7LGXA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(5.114.008.417)
12	20433000	1M1JWRAA	KEMEN PU & PERA	IBRD	(761.840.501)
13	20600002	1XH37L2A	KEMEN PU & PERA	AIIB	(5.114.008.571)
14	20818000	1116F8FA	KEMEN PU & PERA	IFAD	(59.892.876)
JUMLAH					(61.355.941.348)

6. Penundaan Pembayaran kepada Lender Rusia

Akibat adanya sanksi pembatasan transaksi dan penutupan SWIFT terhadap entitas utama di Rusia, sejak 2022 Pemerintah Rusia menyampaikan kebijakan pemberian penangguhan pembayaran utang sementara untuk Pemerintah Indonesia. Untuk penundaan Pembayaran Pokok dan Bunga periode Tahun 2024 adalah sebesar USD 29,7 Juta sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 6 Penundaan Pembayaran kepada Lender Rusia

LOAN_ID	MTU	POKOK	BUNGA	TOTAL
23901000	USD	2.125.000	57.564	2.182.564
23902000	USD	4.768.500	193.058	4.961.558
23903000	USD	4.760.000	320.956	5.080.956
23904000	USD	255.000	17.194	272.194
23906000	USD	4.590.000	556.818	5.146.818
23907000	USD	424.261	51.468	475.728
23908000	USD	9.690.000	1.958.699	11.648.699
Grand Total		26.612.761	3.155.757	29.768.517

Sesuai kesepakatan sementara antara Pemerintah Indonesia dan Rusia telah disepakati bahwa *Repayment* ULN akan menggunakan kurs USD atau CNY dengan melibatkan pihak ketiga yang akan ditunjuk oleh pihak Rusia. Teknis pelaksanaan mekanisme dimaksud akan dibahas lebih lanjut.

Terhadap penundaan pembayaran tersebut, Pemerintah Rusia menyatakan tidak mengenakan biaya tambahan.

7. Output kegiatan Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang tercapai 100 persen, sebagaimana pada rincian capaian output (Lampiran).

B. BA BUN 999.04

Pemberian Pinjaman Luar Negeri kepada BUMN Tahun Anggaran 2024

1. PT PLN (Persero)

Terdapat 3 (tiga) kegiatan/proyek yang masih dalam masa penarikan dan mendapat pembiayaan dari DIPA BA BUN 999.04, yaitu:

No	Nama Proyek	Lokasi Proyek	Kegiatan	Keterangan
1.	SLA-1265/DSMI/2016 (Hululais Geothermal Power Plant Project (E/S))	Provinsi Bengkulu	Engineering Services	Closing Date: 14 Oktober 2025
2.	SLA-1290/DSMI/2022 (Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System Project)	Provinsi Jawa Barat	Konstruksi dan Konsultasi	Closing Date: 15 September 2027
3.	SLA-1294/DSMI/2023 (Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project II)	Provinsi Aceh	Konstruksi dan Konsultasi	Closing Date: 24 Agustus 2028

Untuk Subsidiary Loan Agreement (“SLA”) No. SLA-1265/DSMI/2016 yang berasal dari pinjaman lender Japan International Cooperation Agency (“JICA”) No. Loan Agreement (“LA”) IP-572 merupakan pembiayaan kegiatan engineering services kegiatan/proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (“PLTP”) Hululais baik untuk kegiatan konsultasi perencanaan maupun konsultasi pelaksanaan konstruksi. Untuk kegiatan konstruksi PLTP Hululais rencana akan dibiayai dari pinjaman JICA, progres terkini PT PLN telah mengadakan rapat pembahasan Aide Memoire dengan JICA, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk membahas kelanjutan konstruksi PLTP Hululais yang telah tercantum pada *Green Book* 2024.

Terdapat isu terkait pembiayaan dengan skema SLA yaitu terkait pembiayaan Pembangkit Listrik Tenaga Air (“PLTA”) pada proyek *Development of Pumped Storage Hydropower in the Java-Bali System* (“Upper Cisokan”) yang memiliki kapasitas 1.040 MW dengan co-financing lenders IBRD dan AIIB. Adanya ketentuan dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) 10 Tahun 2011 menjadi kendala pada loan baru, mengingat telah dilakukan tanda tangan kontrak atas pekerjaan berdasarkan pendanaan loan sebelumnya. Biro Hukum Kementerian Keuangan telah menyampaikan tanggapan atas analisis hukum atas pendanaan PLTA Upper Cisokan dalam kaitannya dengan PP 10 Tahun 2011 yang disampaikan Direktorat Sistem Manajemen Investasi DJPb. Adapun tanggapan terhadap permasalahan kelanjutan pendanaan atas kontrak PLTA Upper Cisokan, diperlukan langkah penyesuaian dalam bentuk amandemen perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak terkait, yakni:

- Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, *World Bank/IBRD*, dan AIIB selaku para pihak yang menandatangani LA;

- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PT PLN selaku para pihak yang menandatangani SLA; dan
- PT PLN dan vendor selaku para pihak yang menandatangani Kontrak PLTA Upper Cisokan.

Dengan demikian, diharapkan pembiayaan PLTA Upper Cisokan dapat menggunakan sumber dana dari loan baru yakni LA IBRD No. 9278/2021 dan LA AIIB No. L0512A/2022. Progres terkini yaitu PT PLN sudah menyampaikan permohonan amandemen LA PLTA Upper Cisokan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Amandemen SLA akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan setelah amandemen LA ditandatangani oleh Kementerian Keuangan dan lenders.

Pembiayaan Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project II (“PLTA Peusangan II”) merupakan additional loan dari pembiayaan PLTA Peusangan yang mengalami kendala berupa gempa bumi pada tahun 2013. SLA-1294/DSMI/2023 belum efektif karena *front-end fee* belum dibayarkan, PT PLN bersedia membayar tagihan *front-end fee* SLA-1294/2023 setelah mendapat kepastian bahwa PT PLN dapat memanfaatkan dan mencairkan pinjaman dari SLA-1294/DSMI/2023 untuk penyelesaian proyek pembangunan PLTA Peusangan II. Progres saat ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyampaikan pendapat aspek hukum dari Biro Hukum Kemenkeu kepada PT PLN terkait penyelesaian dan solusi permasalahan SLA PLTA Peusangan II melalui Nota Dinas Kepala Biro Hukum No. ND-1011/SJ.3/2024 tanggal 16 Juli 2024 hal Penyampaian Pendapat Hukum dalam rangka Pembiayaan Proyek PLTA Peusangan. Dalam Nota tersebut disampaikan bahwa penyelesaian pembiayaan proyek PLTA Peusangan tidak dapat dipersamakan dengan penyelesaian proyek PLTA Upper Cisokan Pumped Storage yang menggunakan amendemen LA/SLA dan kontrak sebagai solusi. Atas kejadian gempa pada tahun 2013, guna menjaga governance penggunaan dana pinjaman, PT PLN masih perlu menyampaikan hasil pemeriksaan/audit atas perhitungan penggunaan dana pinjaman sebelum terjadinya gempa dan kesesuaian dengan tambahan biaya pasca gempa.

PT PLN telah menanggapi Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui surat Direktur Keuangan PT PLN No. Nomor 60563/KEU.01.08/F01070000/2024 tanggal 21 Oktober 2024 hal Penyampaian Tanggapan atas Pendapat Aspek Hukum untuk Penyelesaian Pembiayaan Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction Project (II). Dalam surat tersebut, PT PLN menyampaikan laporan hasil audit BPKP tertanggal 23 Agustus 2018 yang mencakup ruang lingkup usulan tambahan anggaran untuk Loan Agreement IP-538 yang berakhir pada 29 Januari 2019. Laporan hasil audit BPKP meliputi: (i) peningkatan jumlah kuantitas, (ii) variasi akibat perubahan desain yang disebabkan oleh kondisi geologis yang tidak terduga, dan (iii) penyesuaian harga. Additional loan dengan skema Penerusan Pinjaman dari JICA dipandang sebagai opsi pendanaan yang lebih efisien bagi PT PLN untuk melanjutkan penyelesaian PLTA Peusangan.

2. PT SMI

Terdapat 5 perjanjian penerusan pinjaman kepada PT SMI dalam masa penarikan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor SLA	Nomor LA	Tujuan Pinjaman	Lender	Plafon Pinjaman (USD)
1.	SLA-1269/DSMI/2020	3840-INO	Pembiayaan Leveraging Private Infrastructure Investment Project	ADB	50.000.000
2.	SLA-1270/DSMI/2020	9009-ID	Pembiayaan eksplorasi panas bumi	World Bank	100.000.000
3.	SLA-1271/DSMI/2020	TF0B0306		World Bank (CTF)	40.000.000
4.	SLA-1272/DSMI/2021	TF0B3799		World Bank (GCF)	7.500.000,
5.	SLA-1292/DSMI/2022	4172-INO	Pembiayaan SIO-GFF	ADB	150.000.000

Dari kelima SLA dimaksud, penerusan pinjaman untuk pembiayaan eksplorasi panas bumi belum dilakukan penarikan disebabkan beberapa faktor yakni belum adanya kesepakatan terkait tarif jual listrik ke PT PLN (Persero) (PPA), terbatasnya sisa masa eksplorasi yang dimiliki pengembang PLTP, dan skema pembiayaan yang kurang menarik bagi pengembang swasta. Saat ini sedang dilakukan proses restrukturisasi pinjaman kepada lender untuk menyesuaikan plafon pinjaman dan skema yang menarik minat swasta.

3. PT Pertamina

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 1 (satu) kegiatan/proyek pada PT Pertamina yang masih dalam masa penarikan dan mendapat pembiayaan dari DIPA BA BUN 999.04, yaitu SLA-1242/DSMI/2011, Proyek Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Lumut Balai. Proyek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pasokan energi listrik sistem Sumatera. Profil penerusan pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

Kategori	Uraian
<i>Loan Agreement</i>	JICA IP-557 Tanggal 29 Maret 2011
SLA	1242/DSMI/2011 Tanggal 20 Oktober 2011
Jumlah Pinjaman	JPY 26.966.000.000
Tingkat Bunga Tranch I (Plafon JPY 25.834.000.000)	0,09% s.d. 0,3% per tahun
Tingkat Bunga Tranch II (Plafon JPY 1.132.000.000)	03% s.d. 0,01%per tahun
<i>Closing Date</i>	31 Desember 2026 (amandemen ke-4, diperpanjang dari sebelumnya 25 Oktober 2023)
Jangka waktu	40 tahun termasuk masa tenggang 10 tahun sejak tanggal LA aktif

Pada tanggal 28 November 2023, telah terbit Surat Menteri Keuangan No. S-103/PMK.05/2023 tentang Perubahan PPLN No. SLA-1242/DSMI/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebagaimana terakhir diubah dengan Side Letter No. S-63/MK.05/2021 tanggal 6 Agustus 2021 antara Pemerintah RI dan PT Pertamina (Persero) ("Amandemen Keempat"). Berdasarkan amandemen tersebut, tanggal terakhir penarikan pinjaman penerusan diperpanjang dari 25 Oktober 2023 menjadi 31 Desember 2026.

PT Pertamina melalui Surat Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Nomor 075/H00000/2024-S4 tanggal 14 Maret 2024 mengajukan realokasi sejumlah plafon pada Loan

Agreement Nomor IP-557 Lumut Balai *Geothermal Power Plant Project* (selanjutnya disebut “LA IP-557”) dari porsi *Contingencies ke porsi Consulting Services* sebesar JPY 252.000.000 dalam rangka memenuhi kewajiban kepada kontraktor.

Menindaklanjuti permohonan PT Pertamina dimaksud, Direktur Pinjaman dan Hibah a.n. Menteri Keuangan melalui surat S-12/MK.8/PR.2/2024 menyampaikan permohonan realokasi kedua LA IP-557 kepada JICA.

Adapun rincian realokasi adalah sebagai berikut:

Kategori	Alokasi Semula	Alokasi Perubahan	Penambahan/ Pengurangan
(A) <i>Civil Works and Equipmet Supply</i>	25.327.000.000	25.327.000.000	0
(B) <i>Consulting Services</i>	1.387.000.000	1.639.000.000	+252.000.000
(C) <i>Contingencies</i>	252.000.000	0	-252.000.000
(B) <i>Unavailable Balance</i>	0	0	0
Total	26.966.000.000	26.966.000.000	0

JICA melalui melalui surat *Chief Representative* JICA Indonesia Office Nomor JICA-202406100001 tanggal 10 Juni 2024 menyampaikan dokumen amendemen LA IP-557 yang pada intinya menyetujui seluruh permohonan yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan.

Direktorat SMI melalui Surat No. S-220/PB.4/2024 tanggal 6 September 2024 telah menyampaikan Penyampaian Naskah Perjanjian Perubahan (Amendemen) Kelima terhadap Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri Nomor SLA-1242/DSMI/2011 Tanggal 20 Oktober 2011 Sebagaimana Terakhir Diubah dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-103/MK.5/2023 Tanggal 28 November 2023 antara Pemerintah RI dengan PT Pertamina (Persero) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

C. BA BUN 999.05

1. Program Percepatan Penurunan Stunting

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, terdapat 3 (tiga) jenis TKDD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan (3) Dana Desa.

(1) DAK Fisik

Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Selain itu, program penanggulangan stunting juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

a. DAK Fisik Bidang Air Minum

DAK Fisik Bidang Air Minum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan 100 persen akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau TPB Goal ke 6.1.1 dan untuk mewujudkan pemenuhan SPM serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang terkait dengan pencegahan stunting terdori dari Subbidang Air Minum dan Subbidang Air Minum – Tematik Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu.

Untuk Tahun 2024, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Air Minum yang mendukung penanganan stunting mencapai 94,99 persen atau dari pagu Rp2.441,6 Milyar telah tersalur Rp2.319,3 Milyar dengan 259 daerah lokasi yang disalurkan.

b. DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terdapat 2 subbidang yang terkait dengan upaya penurunan stunting tahun 2024, yaitu subbidang Keluarga Berencana dan Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting. Pada tahun 2024, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan mencapai 91,87 persen atau dari pagu Rp1.617,8 Milyar telah tersalur Rp1.486,2 Milyar dengan 509 daerah lokasi yang disalurkan.

c. DAK Fisik Bidang Sanitasi

DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung prevalensi stunting terdiri dari Subbidang Sanitasi dan Subbidang Santitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.

Untuk Tahun 2024, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung penanganan stunting mencapai 97,92 persen atau dari pagu Rp1.693,7 Milyar telah tersalur Rp1.658,4 Milyar dengan 257 daerah lokasi yang disalurkan.

(2) DAK Non Fisik

Dukungan Percepatan Pencegahan Stunting melalui DAK Nonfisik Tahun 2024 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Secara umum total penyaluran untuk keempat DAK Nonfisik terkait stunting adalah sebesar 99,54 persen atau sebesar Rp9.748,2 Milyar dari pagu sebesar Rp9.793,1 Milyar.

a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju target SDGs atau TPB. Kegiatan yang didanai BOK meliputi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu (1) upaya kesehatan, (2) penyelenggaraan manajemen kesehatan, serta (3) upaya pendukung/penunjang untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dibiayai BOK diantaranya upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan upaya kesehatan lainnya. Terkait kegiatan penunjang, BOK juga bisa membiayai kegiatan diantaranya meliputi kegiatan Poskesdes dan Posyandu, pengelolaan administrasi BOK, rapat koordinasi lintas sektor, pendampingan musyawarah masyarakat desa, orientasi kader kesehatan, penyuluhan kesehatan dan studi banding antar Puskesmas.

Tahun 2024, penyaluran BOK Stunting telah mencapai 99,45 persen atau Rp7.057,4 milyar dari pagu sebesar Rp7.096,2 milyar, artinya hampir seluruh daerah sudah mendapatkan penyaluran BOK Stunting.

b. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Tujuan dari BOKB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan Kespro; mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan stunting melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.

Per 31 Desember 2024, BOKB untuk stunting sudah tersalurkan sebesar Rp2.212,7 Miliar atau sebesar 99,95 persen dari alokasi anggaran ke Kabupaten/Kota untuk DAK Non Fisik Stunting-BOKB sebesar Rp2.213,9 Miliar.

c. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) adalah dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pekarangan pangan lestari. Dukungan program percepatan pencegahan stunting melalui DKPP ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari yang dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk

rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Pada tahun 2024, DKPP terkait stunting telah disalurkan sebesar 99,30 persen atau Rp128,4 Milyar dari alokasi sebesar Rp129,3 Milyar.

d. BOP PAUD

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah dana yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan secara bertahap SPM pendidikan dan mendukung pelaksanaan satu tahun pra sekolah. Dukungan program percepatan pencegahan stunting melalui BOP PAUD ini dilakukan dalam bentuk kegiatan 'pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain' dengan sub kegiatan 'pembiayaan diskusi perkembangan anak', dan kegiatan 'penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan' yang meliputi sub kegiatan 'penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang' dan 'penyediaan makanan tambahan'.

Pada tahun 2024, BOP PAUD terkait stunting telah disalurkan sebesar 98,85 persen atau Rp349,7 Milyar dari alokasi sebesar Rp353,7 Milyar.

(3) Dana Desa

Dukungan Dana Desa untuk pencegahan stunting pada Tahun Anggaran 2024 dari 434 daerah penerima Dana Desa dialokasikan sebesar Rp6.832,6 miliar dan terealisasi sebesar Rp6.832,6 miliar atau 100 persen.

Terkait dana desa untuk kegiatan penanganan stunting, antara lain dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, yang terdiri atas:

1. Pelatihan Pengolahan makanan bergizi bagi guru PAUD dan orangtua siswa
2. Pendayagunaan Lahan Desa dalam rangka Penyediaan Makanan Sehat dan Bergizi untuk Ibu Hamil Balita dan Anak Sekolah
3. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah.

Sedangkan Kegiatan penanganan stunting melalui pembangunan desa antara lain terdiri dari:

1. Pengelolaan Advokasi Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa melalui Aplikasi Digital (e-HDW)
2. Biaya Operasional KPM Stunting
4. Pembiayaan Pelatihan Guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting
5. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting
6. Tindakan Promotif dan Preventif untuk Pencegahan Stunting melalui Rumah Desa Sehat
7. Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi.

Adapun penggunaan Dana Desa dalam mendukung penurunan dan pencegahan stunting melalui tindakan promotif dan preventif seperti;

1. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;

2. penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
3. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
4. pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
5. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
6. konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
7. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
8. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Rincian Program Percepatan Penurunan Stunting – TKD TA 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT1	Jumlah Kabupaten/ Kota	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Penyaluran	Persentase
	1	2	3	4	5	6
A	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		5.753.109.178.000		5.463.958.217.532	94,97%
	Bidang Air Minum	259	2.441.600.000.000		2.319.286.566.128	94,99%
	Subbidang Air Minum	244	2.375.753.042.000		2.260.368.257.857	95,14%
	Subbidang Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	27	65.846.958.000		58.918.308.271	89,48%
	Bidang Kesehatan	509	1.617.809.178.000		1.486.219.056.153	91,87%
	Subbidang Keluarga Berencana	318	400.000.000.000		377.638.505.657	94,41%
	Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	457	1.217.809.178.000		1.108.580.550.496	91,03%
	Bidang Sanitasi	257	1.693.700.000.000		1.658.452.595.251	97,92%
	Subbidang Sanitasi	242	1.643.855.791.000		1.614.084.133.585	98,19%
	Subbidang Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	30	49.844.209.000		44.368.461.666	89,01%
B	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) NON Fisik		9.793.098.944.248		9.748.209.438.742	99,39%
	Stunting-BOK	546	7.096.196.314.448		7.057.440.411.877	99,45%
	Stunting-BOKB	513	2.213.860.351.000		2.212.704.582.000	99,95%
	Stunting-BOP PAUD	509	353.723.203.800		349.655.369.865	98,85%
	Stunting-KPP	235	129.319.075.000		128.409.075.000	99,30%
C	Dana Desa					
	Penanganan Stunting	434	6.832.632.728.000		6.832.632.728.000	100,00%
	TOTAL		22.378.840.850.248		22.044.800.384.274	98,51%

2. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah

Dalam melaksanakan kebijakan pencapaian visi Indonesia Maju 2045 di bidang pendidikan, anggaran pendidikan dalam APBN TA 2024 dialokasikan sebesar Rp668,69 Triliun atau 20 persen dari belanja negara sebesar Rp3.343,49. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan. Anggaran pendidikan melalui TKD terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dan DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otsus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otsus. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat block grant. Komponen terbesar anggaran pendidikan melalui DAU diperkirakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah.

Kontribusi DBH pada anggaran pendidikan adalah melalui earmarking alokasi Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus yang dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas daerah. Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu paling sedikit 30 persen dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh. Selanjutnya, alokasi tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 digunakan sekurang-kurangnya 35 persen untuk biaya pendidikan. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30 persen untuk bidang pendidikan.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, antara lain untuk pendidikan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang pendidikan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pendidikan serta belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND guru dan tenaga kependidikan di daerah. Pada tahun 2024, kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang pendidikan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan bidang pendidikan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang pendidikan.

Selanjutnya, komponen DAK yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK Nonfisik terkait pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik terutama sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas. Sedangkan DAK Nonfisik bidang pendidikan antara lain meliputi BOSP (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan), Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru ASND, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Realisasi anggaran Pendidikan melalui TKD TA 2024 adalah sebesar Rp340,6 Triliun. Alokasi dan realisasi anggaran Pendidikan melalui TKD TA 2024 sebagai berikut:

Uraian	APBN 2024	DIPA	Realisasi
Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah			
DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	212.177.520.091.000	211.972.547.508.650	208.057.038.003.144
Dana Bagi Hasil	-	516.811.411.650	516.811.411.650
Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	-	382.688.268.150	382.688.268.150
Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	-	134.123.143.500	134.123.143.500
Dana Alokasi Umum	-	211.455.736.097.000	207.540.226.591.494
Non Gaji			
DAU <i>Earmarked</i> Pendidikan (Non Gaji)	-	28.103.017.904.000	27.957.689.361.000
Gaji			
DAU <i>Earmarked</i> Pendidikan (Gaji)	-	9.367.672.635.000	9.319.229.787.000
DAU <i>Blockgrant</i> Untuk Gaji Pendidik	-	144.924.338.036.000	144.924.338.036.000
DAU <i>Blockgrant</i> Untuk PPP Guru diangkat 2023	-	12.492.196.724.000	12.492.196.724.000
DAU Tambahan Komponen THR/G13	-	5.877.820.308.000	5.877.820.308.000
DAU <i>Earmarked</i> PPPK Guru	-	10.690.690.490.000	6.968.952.375.494
Dana Alokasi Khusus	132.135.766.740.000	132.135.766.740.000	129.532.285.853.696
DAK Fisik	15.820.300.000.000	15.820.300.000.000	15.117.625.243.790
DAK Nonfisik	116.315.466.740.000	116.315.466.740.000	114.414.660.609.906
Tunjangan Profesi Guru ASND	52.872.544.576.000	52.872.544.576.000	51.850.462.245.921
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.595.777.805.000	1.595.777.805.000	1.495.768.803.108
Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	2.183.612.911.000	2.183.612.911.000	2.075.612.901.562
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.864.082.908.000	53.864.082.908.000	53.308.509.500.854
BOP PAUD	4.009.229.010.000	4.009.229.010.000	3.963.347.151.955
BOP Pendidikan Kesetaraan	1.620.244.530.000	1.620.244.530.000	1.550.985.006.506
BOP Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	169.975.000.000
Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.245.421.344.000	2.245.421.343.450	3.064.565.775.764
JUMLAH	346.558.708.175.000	346.353.735.592.100	340.653.889.632.604

D. BA BUN 999.08

1. Satker MPPKP

a. *Going-Concern* Entitas MPPKP

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 terkait keberlanjutan Program Kartu Prakerja serta mempertimbangkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Program Kartu Prakerja, telah diputuskan Program Kartu Prakerja akan dialihkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 Desember 2024 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Tim Transisi lewat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Cipta Kerja Nomor 432 Tahun 2024 tentang Tim Transisi Pengalihan Program Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepada Kementerian Ketenagakerjaan ("Kepmenko 423/2024").

Merujuk pada Kepmenko 423/2024, Tim Transisi yang bertugas untuk:

- 1) Memfasilitasi tindak lanjut arahan/kebijakan Presiden guna memperlancar proses transisi;
- 2) Mengambil langkah terkait penyelesaian masalah dan hambatan selama proses transisi;

- 3) Merencanakan dan mengkoordinasikan transisi pengalihan program yang mencakup mitigasi risiko, pengawalan audit, perubahan regulasi dan keberlanjutan Program Kartu Prakerja;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transisi pengalihan Program Kartu Prakerja;
- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan transisi pengalihan program; dan
- 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka transisi program.

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Transisi, pelaksanaan Program Kartu Prakerja di tahun 2025 akan dibagi menjadi dua periode yaitu:

- 1) Semester 1 dengan batas akhir 30 Juni 2025, pelaksanaan Program Kartu Prakerja akan dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja secara business as usual dengan berdasarkan pada aturan yang ada yaitu Perpres 36/2020 dan perubahannya, Permenko 17/2022, dan PMK 25/2020 dan perubahannya. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp800 miliar; dan
- 2) Semester 2 mulai 1 Juli 2025, pelaksanaan Program Kartu Prakerja akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan aturan yang baru.

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Semester 2 tahun 2025 di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Tim Transisi merencanakan penyusunan peraturan dasarnya yaitu Peraturan Presiden telah rampung pada bulan Maret 2025. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan rampung pada bulan April 2025. Sedangkan ketentuan teknis Keputusan Menteri, Juknis, dan SOP selesai pada bulan Mei 2025. Adapun semua instrumen hukum di atas berlaku efektif per 1 Juli 2025.

- b. Sampai dengan 31 Desember 2024, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja diketahui memiliki transaksi resiprokal dengan tiga entitas, yaitu:
 - 1) Universitas Mataram dengan kode satuan kerja 67752;
 - 2) Politeknik Negeri Bali dengan kode satuan kerja 677608; dan
 - 3) Universitas Tanjung Pura dengan kode satuan kerja 677517di mana MPPKP bertindak sebagai pemberi kerja dan tiga entitas tersebut sebagai penyedia.

Rincian Transaksi Resiprokal Per 31 Desember 2024

No	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Uraian Kegiatan	Satker Itraco	Nama Satker Intraco	Skema Pembayaran	Nilai Bruto (Rp)	Pajak (Rp)	Netto
1	24019130 204 2067	28-08- 2024	Kegiatan Pemantauan Pelatihan Secara Pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	67752	Universitas Mataram	Pembayaran Langsung	46.634.700	932.694	45.702.006
2	24019130 205 0149	03-10- 2024	Kegiatan Pemantauan Pelatihan Secara Daring Pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	67752	Universitas Mataram	Pembayaran Langsung	16.806.300	336.126	16.470.174
3	24019130 401 2172	17-07- 2024	Kegiatan Pemantauan Pelatihan Secara Luring Pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	677608	Politeknik Negeri Bali	Pembayaran Langsung	31.842.000	636.840	31.205.160
4	24019130 401 2171	17-07- 2024	Kegiatan Pemantauan Pelatihan Secara Daring Pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	677608	Politeknik Negeri Bali	Pembayaran Langsung	119.419.000	2.388.380	117.030.620
5	24019130 401 2171	09-10- 2024	Kegiatan Pemantauan Pelatihan Secara Luring Pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	677608	Politeknik Negeri Bali	Pembayaran Langsung	41.828.000	836.560	40.991.440
6	24019130 401 2171	18-10- 2024	Kegiatan Pemantauan Pelatihan Secara Daring Pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	677608	Politeknik Negeri Bali	Pembayaran Langsung	257.299.000	5.145.980	252.153.020
7	24019130 401 2171	02-09- 2024	Kegiatan Pemantauan Pelatihan Secara Daring Pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	677517	Universitas Tanjung Pura	Pembayaran Langsung	35.912.410	718.248	35.194.162
8	24019130 401 2171	09-10- 2024	Kegiatan Pemantauan Pelatihan Secara Daring Pada Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	677517	Universitas Tanjung Pura	Pembayaran Langsung	9.931.740	198.635	9.733.105
Total							559.673.150	11.193.463	548.479.687

2. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

- Kanwil DJPb Provinsi Papua telah menindaklanjuti Temuan dan Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BUN Tahun 2017 dan 2018 sebagaimana terlampir.
- Pada tahun 2024 terjadi perubahan operator distribusi beras ASN distrik pedalaman Provinsi Papua yang sebelumnya pada tahun 2023 adalah PT Pos Indonesia menjadi PT Irian Bhakti selaku pemenang tender pengadaan distribusi (pemindahan dan pengiriman) beras pegawai negeri sipil (PNS) distrik pedalaman Provinsi Papua Tahun 2024 sesuai dengan Surat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Nomor 444/01/Pmng-KONS-PBJ/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Surat Pemberitahuan Pemenang dan juga ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor KEP-39/WPB.34/2024 tentang Penetapan

Pemenang Tender Pekerjaan Distribusi (Pemindahan dan Pengiriman) Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.

- c. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat lima kali addendum kontrak dengan nomor ADDENDUM-01/OAB/WPB.34/2024 tanggal 28 Juni 2024, ADDENDUM-02/OAB/WPB.34/2024 tanggal 11 September 2024, ADDENDUM 03/OAB/WPB.34/2024 tanggal 20 November 2024, ADDENDUM- 04/OAB/WPB.34/2024 tanggal 19 Desember, ADDENDUM- 05/OAB/WPB.34/2024 tanggal 31 Desember 2024.
- 1) Addendum kontrak pertama tidak mengubah nilai total kontrak hanya mengurangi nilai tagihan termin I dan dipindahkan ke nilai tagihan termin IV.
 - 2) Addendum kontrak kedua tidak mengubah nilai total kontrak hanya mengurangi nilai tagihan termin II dan dipindahkan ke nilai tagihan termin IV.
 - 3) Addendum kontrak ketiga mengubah nilai total kontrak yang sebelumnya Rp125.581.846.971,60 menjadi Rp105.462.155.550 dan mengubah jumlah termin yang sebelumnya 4 termin menjadi 5 termin dengan rincian termin III dan termin IV diubah menjadi termin III, IV, dan V.
 - 4) Addendum kontrak keempat tidak mengubah nilai total kontrak hanya mengurangi nilai tagihan termin IV dan dipindahkan ke nilai tagihan termin V.
 - 5) Addendum kontrak kelima mengubah nilai total kontrak yang sebelumnya Rp105.462.155.550 menjadi Rp105.537.180.123 dan menambah nilai tagihan termin V.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran beras PNS distrik pedalaman Provinsi Papua tahun 2024, penyaluran beras pada tahun 2024 sebagai berikut.

PERIODE	VOLUME/Kg	KOREKSI SURAT TAGIHAN	PEMBAYARAN	SELISIH
TERMIN I	3.024.340	Rp 21.589.012.751	Rp 21.589.012.751	
TERMIN II	4.245.710	Rp 28.420.298.556	Rp 28.420.298.556	
TERMIN III	2.866.220	Rp 18.372.855.614	Rp 18.372.855.614	
TERMIN IV	3.203.150	Rp 18.031.306.392	Rp 18.031.306.392	
TERMIN V	2.036.740	Rp 19.070.294.670	Rp 19.048.682.237	Rp 21.612.433
TOTAL	15.376.160	Rp105.483.767.983	Rp105.462.155.550	Rp 21.612.433

Berdasarkan BAST-05/OAB/WPB.34/2024 sisa pekerjaan yang dimasukkan ke dalam rekening RPATA Penampungan (SPM No.00033T tanggal 23 Desember 2024) sebesar Rp19.048.682.237 dan Realisasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 Rp19.070.294.670 sehingga terdapat selisih sebesar Rp21.612.433 akan tetapi pekerjaan dan pembayaran telah dilaksanakan 100 persen sehingga PT. Irian Bhakti Papua menyatakan bahwa selisih tersebut tidak akan ditagihkan kepada OAB Distrik Pedalaman Papua.

- d. Alur pencabutan daftar sanksi hitam PT Pos Indonesia (Persero):
- 1) Berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Nomor KEP-43/WPB.34/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, menetapkan sanksi daftar hitam kepada PT Pos Indonesia berdasarkan rekomendasi dari APIP/ITJEN atas pelanggaran kontrak yang dilakukan penyedia pada tahun 2023.

Pelanggaran kontrak dimaksud adalah Penyedia melakukan pengalihan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK.

- 2) Berdasarkan surat permohonan dari PT Pos Indonesia Nomor Pos.1124/HK 000/P00/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Permohonan Pencabutan Sanksi Daftar Hitam (Black List) PT Pos Indonesia (Persero) dan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor 10092/D.4.3/04/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Perbaikan Surat Tanggapan, dilakukan Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda antara Kanwil DJPb Provinsi Papua dan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor PERJ-001/999292/2024 | 780/REG I/ADM PENJUALAN/4/0524 tanggal 15 Mei 2024 dengan kesepakatan bahwa PT Pos Indonesia diharuskan membayar denda sebesar Rp16.094.173.971 yang akan dibayarkan melalui metode angsuran/cicilan selama 12 bulan secara pro-rata sebesar Rp1.341.181.164. Kanwil DJPb Provinsi Papua akan melakukan pembatalan pengenaan sanksi daftar hitam berdasarkan Surat Keputusan KPA setelah PT Pos Indonesia melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar nilai yang telah disepakati.
3. Berdasarkan poin b di atas, Kanwil DJPb Provinsi Papua menetapkan keputusan nomor KEP-74/WPB.34/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Pembatalan Sanksi Daftar Hitam. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua Barat pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat.
 - a. Pada tahun 2024 dan sebagaimana telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, dalam rangka memperbaiki pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Ongkos Angkut Beras, operator tidak lagi diberikan uang muka kerja. Selain itu, setiap permohonan tagihan yang disampaikan oleh Operator, PPK tetap melakukan pengujian secara formil atas lampiran dokumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2023, yang meliputi Tanda bukti Pengiriman (Delivery Order) beras, Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran Beras, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Guna meningkatkan pengendalian dan kebenaran tagihan yang diajukan oleh Operator, untuk tahun 2024 setiap lampiran tagihan tetap ditambahkan dengan BAPB (Berita Acara Penyerahan Beras) yang merupakan berita acara yang ditandatangani operator, pihak pengangkut beras, dan pejabat/pegawai (ASN) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras.

Adapun kewajiban melampirkan BAPB tersebut diatur dalam kontrak OAB tahun 2024 dan Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-1/WPB.33/999976/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor PER-1/WPB.33/999976/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang antara lain menegaskan bahwa terkait dengan pencairan dana, operator harus pula menyampaikan BAPB masing-masing distrik selain persyaratan-persyaratan yang sudah ada di peraturan sebelumnya.

Selain untuk penyaluran ke distrik pedalaman, BAPB juga menjadi persyaratan pada pengambilan dalam kota pada Gudang Operator. BAPB untuk pengambilan dalam kota pada Gudang Operator ditandatangani oleh operator dan pejabat/ pegawai (ASN) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Untuk pengajuan tagihan dan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan OAB, operator tetap diwajibkan untuk menyampaikan tagihan lengkap secara hardcopy kepada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat, meskipun transportasi udara/darat masih terdapat kendala di beberapa lokasi di Provinsi Papua Barat. Menindaklanjuti Berita Acara Pembicaraan Hasil Audit (BAPHA) – Audit Tujuan Tertentu tentang Penyaluran Beras dan Pembayaran Tagihan Ongkos Angkut Beras (OAB) ASN (BA BUN 999.08) Tahun 2022 dan 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, atas audit terdapat temuan terkait Pelaksanaan Pengangkutan Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat oleh PT Pos Indonesia tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian dikarenakan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain (PT Yasa Artha Trimanunggal) dengan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp5.289.122.680. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan surat kepada PT Pos Indonesia surat nomor S- 017/WPB.33/999976/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia.
- 2) Menerbitkan Surat Bersama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat nomor S-486/WPB.33/2024 dan S-380/WPB.34/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Penyampaian Pendapat/Rekomendasi LKPP dan Permintaan Tanggapan atas Rencana Penetapan Daftar Hitam (Blacklist) sebagai penyedia barang/jasa pemerintah kepada PT Pos Indonesia (Persero).
- 3) Menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor KEP-27/WPB.33/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 15 Maret 2024 telah menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Pos Indonesia (Persero).
- 4) Mempertimbangkan berbagai masukan dari beberapa pihak atas pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Pos Indonesia (Persero), KPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dapat membatalkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam dengan syarat PT Pos Indonesia (Persero) dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - i. mengganti selisih 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor yang terakhir;
 - ii. Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada); dan
 - iii. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- b. Membuat Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: PERJ-001/999976/2024 dan Nomor 681/Penjualan-KCU Jap/ASN/0524 pada tanggal 13 Mei 2024 untuk membayar Denda kepada Negara sebesar 2 (dua) kali lipat

selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor yang terakhir yaitu sebesar Rp10.578.245.360 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dikurangi nilai yang sudah diperhitungkan dalam pembayaran sebesar Rp5.367.108.610 (Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga nilai kekurangan menjadi Rp5.211.136.750 (Lima Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang akan dibayarkan melalui metode angsuran/cicilan selama 12 (dua belas) bulan secara pro-rata sebesar Rp434.261.396 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) tiap bulan. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan Mei 2024 hingga April 2025.

CAPAIAN OUTPUT BELANJA BUN

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur bahwa:

a. *Pasal 9 huruf (g):*

Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas penggunaan anggaran.

b. *Pasal 30 ayat (2):*

Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian negara/lembaga.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah diatur bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja, termasuk kementerian negara/lembaga.

Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai entitas pelaporan hakikatnya tidak menyusun laporan kinerja sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dalam rangka pelaksanaan APBN, namun pada entitas BUN terdapat Belanja yang pada prinsipnya dapat menghasilkan output dari belanja tersebut walaupun pada beberapa belanja tidak dapat diukur secara ideal seperti pada Kementerian/Lembaga yang menghasilkan output berupa barang dan jasa. Pada entitas BUN beberapa belanja diukur pada target realisasi saja, misalnya belanja bunga utang, belanja hibah dan belanja transfer ke daerah. Beberapa volume keluarannya juga belum ideal misalnya layanan, dokumen dan laporan.

Realisasi anggaran belanja BUN *Audited* tahun 2024 sebesar Rp2.035.762.478.740.043. Dari nilai realisasi tersebut menghasilkan output antara lain, sebagai berikut:

1. Subsidi Solar sebanyak 16.143.103 Kilo liter.
2. Subsidi Minyak Tanah sebanyak 417.367 Kilo liter
3. Subsidi Pupuk sebanyak 6.808.295 Ton
4. Subsidi Listrik sebanyak 68,46 TeraWattHour

5. Subsidi Elpiji 3 kg sebanyak 7.868.951 Metrik Ton
6. PMN/Dana Investasi Pemerintah kepada 8 BUMN
7. Penerusan Pinjaman kepada BUMN dan Pemda sebanyak 6 Proyek
8. Program Kartu Prakerja sebanyak 1.334.399 peserta
9. Kompensasi BBM sebanyak 44.057.882 Kilo Liter
10. Kompensasi Listrik sebanyak 204,41 Terawatt Hour

Capaian output Belanja BUN pada seluruh entitas pelaporan pada masing-masing Bagian Anggaran BUN (BA BUN) selengkapnya dapat dilihat di [Lampiran LB16](#).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN SAL

Ringkasan Laporan Perubahan SAL selama periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	459.497.872.070.698	478.957.156.319.401
Penggunaan SAL	(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah Penggunaan SAL	403.116.872.070.698	443.957.156.319.401
	45.727.115.463.645	19.376.178.937.101
Penyesuaian Pembukuan	9.293.355.123.095	(3.548.034.701.030)
Penyesuaian Lain-lain	(594.067.608.219)	(287.428.484.774)
Total Penyesuaian	8.699.287.514.876	(3.835.463.185.804)
Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	457.543.275.049.219	459.497.872.070.698

C.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN SAL

C.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih awal per 1 Januari 2024 adalah sebesar **Rp459.497.872.070.698** yang merupakan Saldo Anggaran Lebih Fisik per 31 Desember 2023. Saldo Anggaran Lebih Fisik meliputi Kas BUN, Kas di KPPN, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU yang telah disahkan dan Kas Hibah di Kementerian Negara/Lembaga yang telah disahkan setelah memperhitungkan Utang PFK, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan penyesuaian karena selisih transaksi Kiriman Uang, Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan dan transito lainnya pada tahun 2023.

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2024	1 Januari 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal		
Kas BUN	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Kas di KPPN	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Kas di Bendahara Pengeluaran	197.710.858.794	215.927.152.362
Kas pada BLU yang sudah disahkan	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967
Kas Hibah Langsung K/L yg telah Disahkan	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Saldo Anggaran Lebih Awal sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	454.548.329.062.453	478.954.317.677.062
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN	-	-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pengurang Fisik SAL	(44.029.816.776)	5.390.038.579
Utang kepada Pihak Ketiga Pengurang Fisik SAL	(513.135.846)	210.753.180
Selisih Kiriman Uang	4.129.878.872	649.111.176
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	(3.336.178.894)	3.355.675.440
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(6.707.739.111)	(6.766.936.036)
Transito Lainnya	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	5.000.000.000.000	-
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	4.949.543.008.245	2.838.642.339
Saldo Anggaran Lebih Awal	459.497.872.070.698	478.957.156.319.401

Rincian Saldo Anggaran Lebih Awal Per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023

C.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar minus Rp56.381.000.000.000 dan Rp35.000.000.000.000. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024, Pemerintah menganggarkan Penerimaan Pembiayaan Lainnya dari Saldo Anggaran Lebih dengan rinciannya sesuai dengan Perpres Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian APBN TA 2024 Jo. Perpres Nomor 206 tahun 2024. Kemudian PMK Nomor 147/PMK.05/2021 pada Pasal 8 tentang Pengolaan Saldo Anggaran Lebih menyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya. Penggunaan SAL sebesar minus Rp56.381.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dari APBN tahun 2024 yang seluruhnya bersumber dari Rek Lain BI SAL dalam rangka pemenuhan pembiayaan APBN tahun 2024.

C.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN selama satu periode pelaporan. Pada LKBUN, tidak menggunakan nilai SiLPA/SiKPA yang tertera pada LRA LKBUN dikarenakan transaksi yang tertuang dalam LRA LKBUN hanya terbatas pada lingkup Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, tidak dapat mencerminkan keseluruhan realisasi pendapatan dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN (BA BUN dan BA K/L). Pada LKBUN, nilai SiLPA/SiKPA tersebut tercermin pada akumulasi Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi dan Aktivitas Pendanaan pada LAK.

SiLPA pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp45.727.115.463.645** dan **Rp19.376.178.937.101**. SiLPA TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp26.350.936.526.544 atau naik 136% dari TA 2023. Kenaikan SiLPA tersebut tergambar pada kenaikan Arus Kas Bersih TA 2024 dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp168.485.731.917.944 walaupun terdapat penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dan Aktivitas Investasi masing-masing sebesar Rp119.356.544.198.057 dan Rp22.778.251.193.343 jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih pada TA 2023.

Adapun rincian SiLPA adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(154.149.780.567.127)	(34.793.236.369.070)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(414.403.152.941.181)	(391.624.901.747.838)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	614.280.048.971.953	445.794.317.054.009
SiLPA/(SiKPA)	45.727.115.463.645	19.376.178.937.101

Rincian SiLPA TA 2024 dan TA 2023

C.2.4. Penyesuaian SAL

C.2.4.1. Penyesuaian Pembukuan

Penyesuaian Pembukuan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp9.293.355.123.095** dan **minus Rp3.548.034.701.030** Penyesuaian Pembukuan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.841.389.824.125 atau naik 361,93% dari TA 2023.

Penyesuaian Pembukuan merupakan penyesuaian/koreksi tahun berjalan akibat koreksi SiLPA dan selisih kurs (*unrealized*), koreksi kas dan koreksi utang yang berpengaruh terhadap perhitungan SAL.

Adapun rincian Penyesuaian Pembukuan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Koreksi SiLPA	2.052.665.074.805	1.496.864.847.086
Selisih Kurs Kas BUN (<i>Unrealized</i>)	6.326.893.741.118	(529.364.838.247)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(61.355.941.239)	(243.005.835.551)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	85.975.723.953	(27.019.436.853)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	859.144.688.316	(4.264.411.251.718)
Koreksi Utang PFK	613.457.641	-
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	4.371.606.409	(200.381.898)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	25.046.772.092	19.102.196.151
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	9.293.355.123.095	(3.548.034.701.030)

Rincian Penyesuaian Pembukuan TA 2024 dan TA 2023

Penjelasan Penyesuaian Pembukuan sebesar Rp9.293.355.123.095 terdiri dari:

C.2.4.1.1. Koreksi SILPA

Koreksi SILPA sebesar Rp2.052.665.074.805 terdiri dari pengembalian atas pendapatan tahun anggaran yang lalu sebesar minus Rp75.370.736.893 serta penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp2.128.035.811.698. Pengembalian atas pendapatan TAYL terdiri dari transaksi pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan akun SiLPA (311212) melalui penerbitan SPM PP senilai minus Rp53.367.852.195 dan transaksi pengembalian Pendapatan Hibah melalui penerbitan SP3HL dengan akun 311911 senilai minus Rp22.002.884.698.

C.2.4.1.2. Selisih Kurs (*Unrealized*)

Penyesuaian Selisih Kurs Belum Terealisasi (*Unrealized*) sebesar Rp6.326.893.741.118 merupakan penyesuaian yang berasal dari perhitungan keuntungan selisih kurs sebesar Rp7.436.474.073.826 dan kerugian selisih kurs sebesar minus Rp1.109.580.332.708 yang belum terealisasi pada Kas di Rekening Valas yang dikelola oleh BUN.

C.2.4.1.3. Koreksi Kas BUN

Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp61.355.941.239 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (refund) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.

C.2.4.1.4. Koreksi Kas BLU

Koreksi Kas BLU sebesar Rp859.144.688.316 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada TA 2024, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, koreksi kas BLU akibat kekurangan/kelebihan setor PNBP TAYL, penyesuaian kas BLU akibat kesalahan pembukuan, penyesuaian kas BLU akibat pengembalian kas hibah yang diterima BLU, serta koreksi kas BLU dalam rangka reklasifikasi investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang.

Rincian koreksi Kas BLU pada TA 2024 terdapat pada KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	PADANG (010)	7.671.473.705
2	JAMBI (012)	651.742.254
3	PALEMBANG (014)	(416.369.923)
4	PANGKAL PINANG (015)	3.131.841.919
5	BANDAR LAMPUNG (017)	402.261.158
6	JAKARTA II (019)	839.237.282.469
7	TASIKMALAYA (025)	2.636.106.271
8	SURAKARTA (028)	8.553.806.863
9	SURABAYA I (031)	5.023.904.197
10	PALANGKARAYA(043)	(7.887.349.143)
11	BANJARMASIN (045)	195.253.449
12	JAKARTA III (088)	(977.362.119)
13	BANDUNG II (095)	(8.003.266)
14	BATAM (137)	(2.015.225.541)
15	MAMUJU (178)	2.945.325.023
16	JAKARTA VII (182)	1.000
Jumlah Koreksi Kas BLU		859.144.688.316

Rincian Koreksi Kas BLU TA 2024

Koreksi Kas BLU paling besar terdapat pada KPPN Jakarta II sebesar Rp839.237.282.469 yang merupakan penyesuaian saldo kas BLU pada BLU BDPKS, LDKPI dan LPDP dalam rangka reklasifikasi Kas pada BLU ke investasi jangka panjang.

Koreksi terbesar kedua yaitu pada KPPN Surakarta yang merupakan penyesuaian saldo awal BLU pada satker Institut Seni Indonesia Surakarta akibat pembentukan BLU baru.

C.2.4.1.5. Koreksi Kas Hibah

Koreksi Kas Hibah sebesar Rp85.975.723.953 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada TA 2024 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar Rp108.425.756.794, revaluasi saldo kas hibah sebesar minus Rp13.074.500.841, reklasifikasi dan transfer kas hibah ke kas BLU sebesar minus Rp6.338.497.000 serta penyesuaian kas hibah senilai minus Rp3.037.035.000.

C.2.4.1.6. Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)

Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp4.371.606.409 merupakan koreksi terhadap saldo Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas sebesar Rp2.850.145.840, selisih kurs sebesar Rp122.014.302.049 dan koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar minus Rp120.492.841.480.

Rincian koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan pada TA 2024 per KPPN dapat dirinci sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	(87.170)
2	KPPN Jakarta III (088)	(86.335.195)
3	KPPN Jakarta V (139)	(2.176.785)
4	KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah (140)	(1.268.362)
5	KPPN Jakarta VI (175)	359.856
6	Direktorat Pengelolaan Kas Negara (999)	4.461.114.065
Jumlah Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga		4.371.606.409

Rincian Koreksi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2024

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) yang dilakukan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal Utang Kepada Pihak Ketiga	128.907.360.569	247.752.918.368
Saldo Akhir Utang Kepada Pihak Ketiga	580.770.692.629	(128.907.360.569)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	451.863.332.060	118.845.557.799
Mutasi Transaksi Utang kepada Pihak Ketiga	456.234.938.469	(119.045.939.697)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	4.371.606.409	(200.381.898)
Penjelasan Selisih: Penyesuaian akibat revaluasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) dalam Valas, selisih kurs dan penyesuaian saldo Utang kepada pihak ketiga Pemindahan Dana Penyertaan Modal Negara yang belum dapat disalurkan kepada Pihak Penerima	4.371.606.409	(200.381.898)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN)	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang kepada Pihak Ketiga (KPPN) TA 2024 dan TA 2023

C.2.4.1.7. Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)

Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp25.046.772.092 merupakan penyesuaian terhadap saldo-saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN), karena adanya Revaluasi Kas di Bendahara Pengeluaran dalam Valas sebesar Rp20.146.086.805, Selisih Kurs antara SPM dengan SP2D sebesar Rp1.504.317.373 serta koreksi akuntansi/pembukuan lainnya sebesar Rp3.396.367.914.

Rincian koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran pada TA 2024 pada masing-masing KPPN sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	KPPN Jakarta I (018)	22.370.069.738
2	KPPN Jakarta II (019)	238.153.090
3	KPPN Jakarta III (088)	1.779.298.845
4	KPPN Jakarta IV (133)	(526.903.120)
5	KPPN Jakarta V (139)	988.755.136
6	KPPN Jakarta VI (175)	162.105.478
7	KPPN Jakarta VII (182)	35.292.925
Jumlah Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran		25.046.772.092

Rincian Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilakukan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	197.710.858.794	(215.927.152.362)
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	230.036.155.068	197.710.858.794
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(32.325.296.274)	(18.216.293.568)
Mutasi Transaksi Kas di Bendahara Pengeluaran	(7.278.524.182)	37.318.489.719
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	25.046.772.092	19.102.196.151
Penjelasan Selisih : Revaluasi, Penyesuaian Selisih Kurs dan Penyesuaian lainnya atas Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran (Jurnal Manual)	25.046.772.092	19.102.196.151
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan TA 2023

C.2.4.1.8. Koreksi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Koreksi Utang PFK sebesar Rp613.457.641 merupakan selisih penerimaan dengan pengeluaran non anggaran pihak ketiga dan piutang pengembalian kelebihan penyaluran PFK TAYL. Rincian perhitungan dan penjelasan dari Utang PFK yang dilakukan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal Utang PFK	4.536.797.626.051	3.916.380.112.882
Saldo Akhir Utang PFK	4.320.940.427.530	(4.536.797.626.051)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	(215.857.198.521)	620.417.513.169
Mutasi Transaksi PFK	(215.134.088.039)	620.329.866.094
Invoice PFK	(109.652.841)	87.647.075
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	613.457.641	-
Penjelasan Selisih: Penyesuaian penerimaan dengan pengeluaran non anggaran pihak ketiga dan dan piutang pengembalian kelebihan penyaluran PFK TAYL.	613.457.641	-
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Transaksi PFK	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Utang Perhitungan Pihak Ketiga TA 2024 dan TA 2023

C.2.4.2. Penyesuaian Lain-lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)

Penyesuaian Lain-lain pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **minus Rp594.067.608.219** dan **minus Rp287.428.484.774**. Penyesuaian Lain-lain TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp306.639.123.445 atau turun 106,68% dari TA 2023. Penyesuaian lain-lain merupakan penyesuaian terhadap perhitungan catatan SAL yang dilakukan sebagai hasil rekonsiliasi antara catatan SAL dengan fisik SAL pada akhir periode pelaporan.

Adapun rincian Penyesuaian Lain-lain adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2024	TA 2023
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(286.740)	-
Penyesuaian Transaksi RPL	77.811.228.379	(290.350.819.934)
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	(677.792.588.991)	160.185.740
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yg Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	5.914.039.133	2.762.149.420
Pembulatan	-	-
Jumlah Penyesuaian Lain-Lain (Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL)	(594.067.608.219)	(287.428.484.774)

Rincian Penyesuaian Lain-lain TA 2024 dan TA 2023

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL terkait dengan transaksi Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris merupakan penyesuaian catatan SAL yang harus dilakukan dalam rangka menyajikan nilai catatan SAL yang sesuai dengan fisik SAL. RPL, Rekening *Escrow*, dan Kas Transitoris bukan merupakan bagian fisik SAL, namun pada nilai catatan SAL (yang merupakan akumulasi SiLPA tahun lalu ditambah dengan SiLPA tahun berjalan) masih terpengaruh oleh transaksi-transaksi dari aktivitas rekening tersebut. Penyesuaian Transaksi RPL sebesar Rp77.811.228.379 dan Penyesuaian Transaksi Rekening *Escrow* sebesar minus Rp677.792.588.991 merupakan nilai total transaksi yang memengaruhi Catatan SAL tahun berjalan yang berasal dari aktivitas transaksi rekening non-SAL tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai ini harus disesuaikan terhadap catatan SAL sehingga tersaji nilai SAL yang sesungguhnya.

Rincian perhitungan dan penjelasan dari Rekening Pemerintah Lainnya dan Rekening Escrow yang dilakukan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal Rekening Pemerintah Lainnya	3.379.352.455.808	5.203.653.636.302
Saldo Akhir Rekening Pemerintah Lainnya	9.705.631.964.379	(3.379.352.455.808)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	6.326.279.508.571	1.824.301.180.494
Koreksi Kas RPL	3.973	-
Mutasi Transaksi Rekening Pemerintah Lainnya	6.404.090.740.923	(2.114.652.000.428)
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	77.811.228.379	(290.350.819.934)
Penjelasan Selisih : Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Migas dan Panas Bumi, Penerimaan di RPL yang belum dipindahbukukan ke RKUN	77.811.228.379	(290.350.819.934)
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Pemerintah Lainnya	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Pemerintah Lainnya TA 2024 dan TA 2023

2. Rekening Escrow

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal Rekening Escrow	143.663.249.475.207	48.331.400.902.982
Saldo Akhir Rekening Escrow	157.050.664.847.791	(143.663.249.475.207)
Mutasi Saldo Awal dan Saldo Akhir	13.387.415.372.584	(95.331.848.572.225)
Mutasi Transaksi Rekening Escrow	12.709.622.783.593	95.332.008.757.965
Selisih Mutasi Saldo dan Mutasi Transaksi	(677.792.588.991)	160.185.740
Penjelasan Selisih : Penyesuaian unsur Selisih Kurs di Rekening Escrow Dana Cadangan Alutsista TNI AU dan Kemenhan serta penyesuaian dalam rangka penggunaan Dana SAL BUN dari Rekening Pembangunan Hutan sebagai Pembiayaan APBN Tahun 2024	(677.792.588.991)	160.185.740
Penyesuaian Catatan SAL: Selisih mutasi Rekening Escrow	-	-

Rincian Perhitungan dan Penjelasan Rekening Escrow TA 2024 dan TA 2023

Penyesuaian Perhitungan Catatan SAL sebesar Rp5.914.039.133 merupakan perhitungan penyesuaian Fisik SAL TAYL yg perlu dibalik pada tahun berjalan. Penyesuaian ini harus dilakukan pada tahun berjalan untuk menghindari adanya pencatatan/perhitungan ganda pada Catatan SAL.

Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2024
Selisih Kiriman Uang TAYL	(4.129.878.872)
Pendapatan Hibah Dalam Rekening Khusus Ditangguhkan TAYL	3.336.178.894
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	6.707.739.111
Pembulatan	-
Jumlah Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang Perlu Dibalik pada Tahun Berjalan	5.914.039.133

Selisih Kiriman Uang TAYL sebesar minus Rp4.129.878.872 merupakan penyesuaian saldo awal di TA 2024 yang disebabkan pelimpahan antara rekening pemerintah pada akhir Desember 2023 yang baru diterima di awal Januari 2024.

Rincian perhitungan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Saldo Awal SAL	459.497.872.070.698	478.957.156.319.401
Koreksi Saldo Awal SAL	-	-
Penggunaan SAL sebagai Pembiayaan TAB	(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)
SAL Awal setelah Penggunaan SAL & Koreksi Saldo Awal	403.116.872.070.698	443.957.156.319.401
SiLPA (SiKPA) Tahun Berjalan	45.727.115.463.645	19.376.178.937.101
SAL Akhir sebelum Penyesuaian SAL:	448.843.987.534.343	463.333.335.256.502
Penyesuaian Pembukuan:		
Koreksi SiLPA	2.052.665.074.805	1.496.864.847.086
Selisih Kurs Kas di BUN (<i>Unrelized</i>)	6.326.893.741.118	(529.364.838.247)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BUN	(61.355.941.239)	(243.005.835.551)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas KPPN	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas Hibah	85.975.723.953	(27.019.436.853)
Akumulasi Koreksi Pembukuan-Koreksi Kas BLU	859.144.688.316	(4.264.411.251.718)
Pembulatan	-	-
Koreksi Utang PFK	613.457.641	-
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	4.371.606.409	(200.381.898)
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	25.046.772.092	19.102.196.151
Total Penyesuaian Pembukuan	9.293.355.123.095	(3.548.034.701.030)
Penyesuaian Catatan SAL		
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	(286.740)	-
Penyesuaian Transaksi RPL	77.811.228.379	(290.350.819.934)
Penyesuaian Transaksi Rek. Escrow	(677.792.588.991)	160.185.740
Penyesuaian Terkait Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) di Rek. RPL	-	-
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL yang perlu dibalik pada tahun berjalan	5.914.039.133	2.762.149.420
Transito Lainnya		-
Pembulatan		-
Total Penyesuaian Catatan SAL	8.699.287.514.876	(3.835.463.185.804)
Saldo Akhir SAL	457.543.275.049.219	459.497.872.070.698
SALDO AKHIR CATATAN SAL	457.543.275.049.219	459.497.872.070.698

Rincian Perhitungan Sisa Anggaran Lebih TA 2024 dan TA 2023

C.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp457.543.275.049.219. Nilai saldo akhir SAL ini merupakan nilai yang telah sesuai antara perhitungan Catatan SAL dengan perhitungan Fisik SAL.

Adapun rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Anggaran Lebih Akhir		
Kas BUN	350.032.352.563.093	342.835.699.040.576
Kas di KPPN	697.379.362.618	5.128.787.424.755
Kas di Bendahara Pengeluaran	230.036.155.068	197.710.858.794
Kas pada BLU yang sudah disahkan	96.973.278.750.758	92.393.578.520.721
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan	10.552.112.773.536	13.992.553.217.607
Total Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	458.485.159.605.073	454.548.329.062.453
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL		

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dana di Rekening Khusus Penanganan Pandemi COVID-19 dan PEN		-
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Penyesuai Fisik SAL	(547.774.498.003)	(44.029.816.776)
Utang kepada Pihak Ketiga Penyesuai Fisik SAL	(350.140.071.933)	(513.135.846)
Penyesuaian Rekening Khusus		-
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	-	(3.336.178.894)
Uang Muka Belanja Pegawai (<i>Prepayment</i>)	-	-
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan	-	-
Pengembalian Escrow PNBK	-	-
Penyesuaian Selisih Kiriman Uang	(2.179.402.806)	4.129.878.872
Transito Transaksi Remunerasi TDF-TKD	(41.790.583.112)	(6.707.739.111)
Transito Lainnya	-	-
Transito Hibah	-	-
Penempatan Dana di Bank Umum	-	5.000.000.000.000
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	(941.884.555.854)	4.949.543.008.245
Saldo Anggaran Lebih Akhir	457.543.275.049.219	459.497.872.070.698

Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

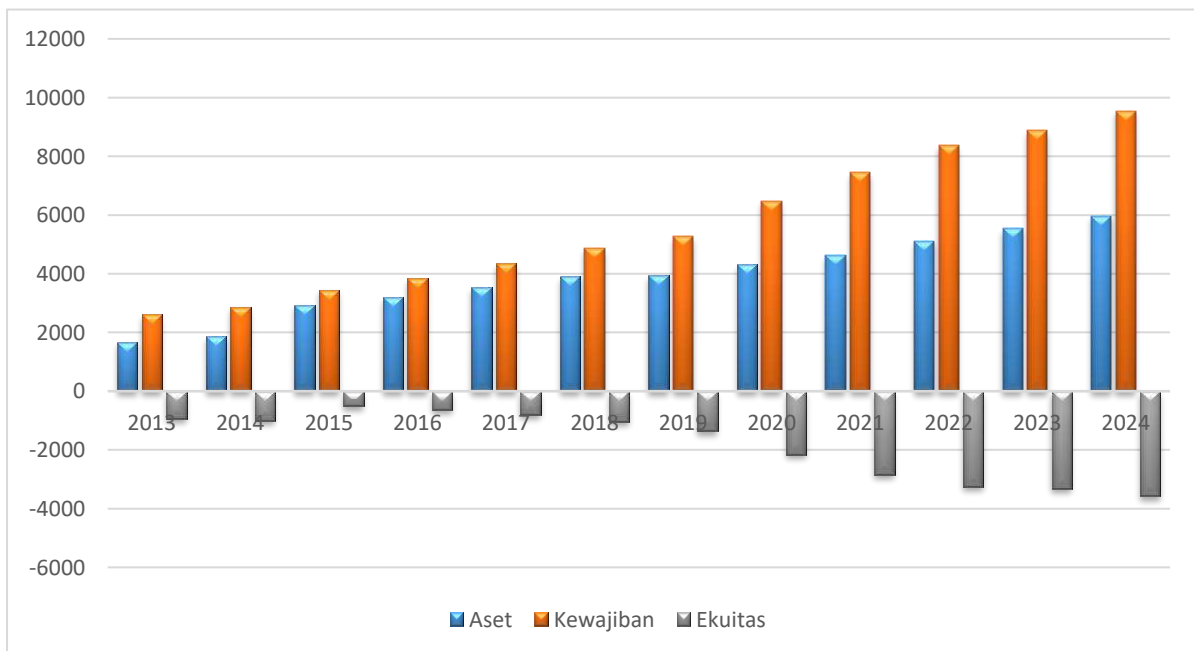
Dengan demikian, terdapat penurunan Saldo SAL pada TA 2024 adalah sebesar Rp1.954.597.021.479 atau turun 0,4% dari Saldo SAL TA 2023.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

D.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lancar	523.353.370.764.970	516.599.537.055.275
Investasi Jangka Panjang	4.391.554.633.530.362	4.077.230.147.021.115
Aset Tetap	1.292.738.475.911	1.103.692.967.001
Properti Investasi	32.757.504.933.043	32.335.552.112.417
Piutang Jangka Panjang	47.391.304.707.155	47.830.027.314.323
Aset lainnya	965.252.679.800.446	872.442.600.802.495
Jumlah Aset	5.961.602.232.211.887	5.547.541.557.272.626
Kewajiban Jangka Pendek	1.208.887.788.651.579	1.021.405.167.888.606
Kewajiban Jangka Panjang	8.329.330.087.466.090	7.854.324.339.772.497
Jumlah Kewajiban	9.538.217.876.117.669	8.875.729.507.661.103
Jumlah Ekuitas	(3.576.615.643.905.782)	(3.328.187.950.388.477)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	5.961.602.232.211.887	5.547.541.557.272.626

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:



D.2. PENJELASAN PER POS NERACA

D.2.1. ASET

D.2.1.1. ASET LANCAR

D.2.1.1.1. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

Kas di Rekening Pemerintah di BI dan Bank Umum dalam rupiah merupakan rekening yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam mata uang rupiah. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp180.923.940.557.096** dan **Rp149.595.370.820.262** atau mengalami kenaikan sebesar Rp31.328.569.736.834 (20,94%).

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2024 sebesar Rp180.923.940.557.096 merupakan saldo pada rekening koran sebesar Rp180.809.710.557.097 ditambah saldo pada Rekening Pengeluaran Lainnya *In Transit* sebesar Rp114.230.000.000 yang merupakan kelebihan pemindahbukuan RKUN atas transaksi PMN akhir tahun anggaran serta pembulatan sebesar Rp1.

Perubahan saldo yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap peningkatan saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah adalah peningkatan saldo pada Rekening Lain BI SAL (500000002980) dan RPKBUNP. Peningkatan saldo pada Rekening Lain BI SAL antara lain disebabkan adanya pengembalian atas penggunaan SAL untuk memenuhi kebutuhan kas temporer (peminjaman SAL) tanggal 28 Desember 2023 sebesar Rp90.000.000.000.000 yang dikembalikan pada tanggal 2 Februari 2024 serta Pemenuhan Dana SAL BUN sebesar Rp1,8 triliun pada tanggal 28 Juni 2024. Selain itu peningkatan saldo pada RPKBUN P Rp2,12 triliun merupakan dari transaksi dropping dana untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Januari 2025 yang dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2025.

Rincian saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Rupiah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada [lampiran LD1](#)

D.2.1.1.2. KAS DI REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing merupakan saldo rekening pemerintah di BI dan Bank Umum yang digunakan untuk menampung penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam valuta asing. Saldo Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam Valuta Asing per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp169.108.412.005.997** dan **Rp193.240.328.220.314** atau mengalami penurunan sebesar Rp24.131.916.214.317 (12,49%). Penurunan tersebut bersumber dari beragam faktor karena salah satu komponen pembentuk saldo pada pos kas di rekening pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing adalah Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Rekening Kas Penempatan dalam valuta asing yang merupakan rekening tujuan akhir atas transaksi penerimaan dan pengeluaran negara baik berupa pendapatan perpajakan/non pajak maupun penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam valuta asing, dengan rincian yang disajikan pada [lampiran LD2](#).

Adapun secara umum melihat rincian kenaikan/penurunan saldo di tiap-tiap rekening pada pos Kas di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan Bank Umum dalam valuta asing, dapat disarikan bahwa

penyumbang terbesar penurunan saldo pos tersebut pada rekening Sub RKUN Penempatan USD (608001411980) yang turun sebesar Rp36,20 triliun. Penurunan saldo tersebut bersumber dari transaksi pembayaran/pelunasan pokok serta pembayaran bunga SBN yang jatuh tempo pada periode Triwulan IV 2024.

D.2.1.1.3. KAS DI REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Jumlah Kas di Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp9.936.262.585.075** dan **Rp3.507.746.680.531** atau mengalami kenaikan sebesar Rp6.428.515.904.544 (183,27%) merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di BI dan Bank Umum yang menampung rekening pemerintah selain rekening penerimaan dan rekening pengeluaran. Kenaikan saldo tersebut secara signifikan dipengaruhi oleh Rekening Pengelolaan Migas (DEPKEU K/HASIL MINYAK PERJANJIAN KARYA PRODUCTION SHARING) yang pada tahun 2024 sebesar Rp7.622.914.791.421 mengalami kenaikan saldo sebesar Rp6.156.473.487.688 atau 419,82 persen dibandingkan dengan saldo tahun 2023 sebesar Rp1.466.441.303.733. Berdasarkan peruntukannya, rekening pengelolaan migas ini dibuka untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Aliran uang masuk pada rekening ini dikategorikan sebagai penerimaan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S), bagian Pemerintah dari Sumber Daya Alam yang meliputi: hasil penjualan minyak mentah, hasil penjualan gas alam, dan *over lifting*.

Rincian rekening yang membentuk saldo pada pos Rekening Pemerintah Lainnya tersaji pada [lampiran LD3](#)

D.2.1.1.4. KAS DI REKENING KAS DI KPPN

Saldo Kas di Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp697.379.362.618** dan **Rp5.128.787.424.755** atau mengalami penurunan sebesar Rp4.431.408.062.137 (86,40%) merupakan saldo pada Kas di Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) sebesar Rp697.379.362.611, dan saldo pada Kas di Rekening Sub RKUN Penerimaan sebesar Rp7. Penurunan tersebut disebabkan adanya penerimaan negara yang datanya berasal dari MPN G3 yang telah dilimpahkan ke RKUN.

Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan (Persepsi/Devisa Persepsi) pada KPPN Khusus Penerimaan merupakan saldo rupiah dan setara rupiah dengan kurs JISDOR Bank Indonesia per tanggal 31 Desember 2024 pada *collecting agent* yang belum dilimpahkan ke RKUN.

Terdapat selisih sebesar Rp102.822.725.774 antara Saldo Kas KPPN pada Rekening Penerimaan pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp697.379.362.618 dengan saldo rekening koran pada KPPN Khusus Penerimaan sebesar Rp800.201.088.377. Adapun rincian selisih sebesar Rp102.822.725.774 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih	Keterangan	Nilai	Tindak Lanjut Atas Selisih
RK ONLY	Transaksi yang hanya dicatat di Rekening CA, namun bukan transaksi MPN	(1.022.971.994)	Koreksi pendebetan di rekening CA
DUPLIKASI	Pencatatan doble (lebih dari satu kali) kode billing pada catatan rekening CA	(160.896.147)	Koreksi pendebetan di rekening CA
SETTLEMENT ONLY	Kode billing hanya ada di settlement, namun tidak ada di Rekening CA	3.468.036	Koreksi pengkreditan di rekening CA

Rincian Selisih	Keterangan	Nilai	Tindak Lanjut Atas Selisih
PENDEBETAN RK	Pengurangan di rekening CA yang bukan transaksi pelimpahan ke negara	195.451	Koreksi pengkreditan di rekening CA
PELIMPAHAN DANA TALANGAN	Pengurangan di rekening CA memiliki nomor sakti namun tidak ditemukan di BI	(1.081)	Koreksi pendebetan di rekening CA
PERBEDAAN PENCATATAN	Perbedaan tanggal pencatatan antara rekening koran CA dengan catatan di settlement	(101.642.244.612)	Tidak ada tindak lanjut karena akan sama di periode berikutnya
BEDA NOMINAL	Nominal yang tercatat pada CA berbeda dengan yang seharusnya terdapat di settlement	(275.427)	Koreksi pendebetan di rekening CA
Total selisih		(102.822.725.774)	

Selisih lainnya sebesar Rp1.000.015 berasal dari pembatalan NTPN oleh BRI yang terbatalkan penyesuaiannya di periode penyusunan laporan keuangan sebesar Rp1.000.000 dan pembulatan atas setoran yang memiliki nilai desimal sebesar Rp15.

Daftar Rincian Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada [lampiran LD4](#).

D.2.1.1.5. KAS DALAM TRANSITO

Saldo Kas Dalam Transito per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar minus **Rp2.750.411.765** dan **Rp4.930.665.723** atau mengalami penurunan sebesar Rp2.180.253.958 (44,22%). Saldo tersebut terdiri dari kas dalam transito pada BUN, rekening pinjaman/hibah, dan transaksi DTP pada seluruh rekening yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku Kuasa BUN Pusat dan KPPN selaku Kuasa BUN Daerah ditambah selisih penerimaan kiriman uang dan pengeluaran kiriman uang. Kas Dalam Transito pada Tahun 2024 mengalami penurunan disebabkan bertambahnya aktivitas non anggaran pemerintah yang melibatkan rekening-rekening yang dikelola oleh Kuasa BUN Pusat Per 31 Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kas Dalam Transito BUN	2.750.411.765	800.786.851
Selisih Kiriman Uang	-	4.129.878.872
Total	2.750.411.765	4.930.665.723

D.2.1.1.6. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp230.036.155.068** dan **Rp197.710.858.794** atau mengalami kenaikan sebesar Rp32.325.296.274 (16,35%). Kementerian dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terbesar diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri sebesar Rp132.479.164.274, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp41.477.233.276, Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar Rp16.763.297.761, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp9.061.181.177, Kementerian Agama sebesar Rp6.656.800.070, dan Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp5.832.658.156. Kas di Bendahara pengeluaran adalah total saldo yang dibukukan seluruh KPPN atas saldo kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran satuan kerja mitra kerja KPPN yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan. Kas Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan Kas di Bendahara Pengeluaran menurut data KPPN yang telah diverifikasi dengan data Kementerian Negara/Lembaga.

Daftar Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada [lampiran LD5, LD6](#).

D.2.1.1.7. KAS LAINNYA PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Jumlah Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp10.552.112.773.536** dan **Rp13.992.553.217.607** atau mengalami penurunan sebesar Rp3.440.440.444.071 (24,59%) merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari selisih antara pendapatan dan belanja Hibah Langsung yang diterima Kementerian Negara/Lembaga dan telah disahkan ke KPPN sampai dengan 31 Desember 2024. Kas Lainnya pada Kementerian/Lembaga dengan saldo Kas Lainnya terbesar diantaranya adalah Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp6.944.323.745.821, Badan Pengawasan Pemilihan Umum sebesar Rp2.073.113.220.390, Kementerian Kesehatan sebesar Rp573.088.460.416, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebesar Rp258.029.703.901, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp237.152.919.019.

Rincian saldo Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga yang berasal dari hibah langsung dapat dilihat di [lampiran LD7, LD8](#).

D.2.1.1.8. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp5.000.005.190** dan **Rp5.008.114.675.567** atau mengalami penurunan sebesar Rp5.003.114.670.377 (99,90%). Akun ini merupakan Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari BA 999.00, BA 999.07 dan BA 999.08. Detail menurut BA BUN adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No	BA BUN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	999.00	-	5.000.000.000.000
2.	999.07	5.190	709
3.	999.08	5.000.000.000	8.114.674.858
Total		5.000.005.190	5.008.114.675.567

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.00

Saldo Kas Lainnya dan Setara kas pada neraca tingkat Kuasa BUN Pusat per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp5.000.000.000.000. Saldo Kas Lainnya dan Setara kas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000.000.000 atau 100,00 persen dikarenakan tidak terdapat nilai *outstanding* penempatan kas Pemerintah di bank umum atau instrument lainnya yang dilakukan melalui operasionalisasi Treasury Dealing Room (TDR) Direktorat PKN dengan berpedoman pada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 44 Tahun 2024 tentang Strategi dan Pelaksanaan Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Pemerintah Pusat. Saldo pada neraca menunjukkan nilai *outstanding* transaksi penempatan kas Pemerintah di bank umum atau instrumen lainnya untuk jangka waktu 0 s/d 3 bulan sesuai dengan PMK Nomor 03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 115/PMK.05/2016. Transaksi penempatan uang negara pada bank umum mitra dilakukan melalui operasionalisasi *Treasury Dealing Room* (TDR) Direktorat PKN dengan berpedoman pada PMK Nomor 53/PMK.05/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum.

2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.190. Jumlah Kas Lainnya dan Setara

Kas tersebut, Rp4.481 atau (632,02%) lebih besar dari Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp709. Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 merupakan pendapatan jasa giro yang belum disetor per tanggal 31 Desember 2024.

Saldo sebesar Rp5.190 terdapat pada Kementerian PUPR yaitu pendapatan jasa giro yang belum disetor pada Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan per tanggal 31 Desember 2024. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	Bank/ Kantor/ Pos	Saldo
1	100001000231768	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	Mega Syariah	525
2	70122065906	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	DKI SYARIAH	332
3	0010103666778	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	BPD Kalsel Syariah	4.333
Total				5.190

3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA.999.08

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.000.000.000 dan Rp8.114.674.858. Saldo kas lainnya yang terdapat pada Satker Istana Kepresidenan Jakarta yang merupakan Sisa Dana Banmas tahun anggaran berjalan untuk digunakan pada akhir tahun dan awal tahun anggaran selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan anggaran Banmas dalam rangka kunjungan kerja Presiden ke daerah selama akhir tahun dan minggu awal tahun.

D.2.1.1.9. KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM

Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp96.973.278.750.758** dan **Rp92.393.578.520.721** atau mengalami kenaikan sebesar Rp4.579.700.230.037 (4,96%) terdiri dari Kas pada Badan Layanan Umum yang telah disahkan oleh KPPN melalui SP2D Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional Badan Layanan Umum serta koreksi saldo awal kas pada Badan Layanan Umum sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Kementerian/Lembaga yang memiliki saldo kas pada Badan Layanan Umum terbesar diantaranya adalah Kementerian Keuangan sebesar Rp68.933.652.959.427, Kementerian Komunikasi dan Digital sebesar Rp6.778.270.447.046, Kementerian Kesehatan sebesar Rp6.273.531.460.080, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebesar Rp4.933.255.688.770, dan Kementerian Agama sebesar Rp2.442.365.670.635.

Rincian Saldo Kas pada Badan Layanan Umum dapat dilihat pada lampiran [LD9](#), [LD10](#).

D.2.1.1.10. UANG MUKA DARI REKENING KHUSUS

Jumlah Uang Muka dari Rekening Khusus per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp47.984.869.011** dan **Rp44.479.546.335** atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.505.322.676 (7,88%). Uang Muka dari Rekening Khusus merupakan bagian dari kelompok akun uang muka rekening BUN yang digunakan untuk menampung pengeluaran-pengeluaran Satker yang telah diterbitkan SP2D atas kegiatan tertentu yang sumber dananya berasal dari Pinjaman dan Hibah dengan menggunakan mekanisme Rekening Khusus (Reksus) yaitu rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada BI atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dan pada tanggal pelaporan keuangan belum dibebankan pada Rekening Khusus berkenaan.

Rincian Saldo Uang Muka Rekening BUN dapat dilihat pada [lampiran LD11](#).

D.2.1.1.11. BELANJA DIBAYAR DIMUKA (PREPAID)

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp30.664.150.302 dan Rp22.930.421.699 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7.733.728.603 (33,73%). Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya belanja secara penuh dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima. Belanja Dibayar Dimuka sebesar Rp30.664.150.302 terdapat pada SKK Migas sebesar Rp30.663.101.915 dan MPPKP sebesar Rp1.048.387.

D.2.1.1.12. UANG MUKA BELANJA (PREPAYMENT)

Jumlah Uang Muka Belanja (*Prepayment*) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.000.000 dan Rp10.000.000, tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Uang Muka Belanja (*Prepayment*) merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Saldo ini terdapat pada SKK Migas, merupakan Belanja Lain-Lain (*prepayment*) atas deposit sewa rumah dinas Kantor Perwakilan Sumbagsel.

D.2.1.1.13. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp6.369.768.939.715 dan Rp4.303.538.793.658 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.066.230.146.057 (48,01%). Rincian Pendapatan yang masih harus diterima sebagai berikut:

1. BA 999 01 sebesar Rp3.291.777.706.915 merupakan penyesuaian akrual kontribusi BI dari tanggal kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo tersebut mengalami kenaikan Rp125.632.927.835 (3,97%) dibanding dengan tahun 2023 sebesar Rp3.166.144.779.080.
2. BA 999 03 sebesar Rp23.631.514.571 merupakan pendapatan yang masih harus diterima berasal pengakuan pendapatan pada UAKPA KBUMN dan UAKPA Direktorat SMI. Saldo tersebut mengalami kenaikan Rp980.275.797 (4,33%) dengan rincian:

No	Satker	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	UAKPA Kementerian BUMN	16.839.041.094	14.148.684.091
2	UAKPA Direktorat SMI	6.792.473.477	-
3	UAKPA Direktorat EAS	-	8.502.554.683
Total		23.631.514.571	22.651.238.774

- a. Pendapatan yang masih harus diterima pada UAKPA Kementerian BUMN yaitu pengakuan akrual atas bunga yang belum jatuh tempo atas investasi non permanen pada BUMN selaku Penerima Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Negara selaku Penerima Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-	-
2	PT Perkebunan Nusantara III	13.589.041.094	10.898.684.091
3	Perum Perumnas	3.250.000.000	3.250.000.000
Total		16.839.041.094	14.148.684.091

- b. Pendapatan yang masih harus diterima pada UAKPA Direktorat SMI pada 31 Desember 2024 sebesar Rp6.792.473.477 dan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp0 yang berasal dari nilai pendapatan akrual imbal hasil optimalisasi dana cadangan penjaminan sebesar Rp4.661.062.262 dan pencatatan nilai pendapatan akrual imbal hasil dana FLPP belum diigulirkan BP Tapera sebesar Rp2.131.411.215.

- c. Pendapatan yang masih harus diterima pada UAKPA Direktorat EAS pada 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp8.502.554.683 yang berasal dari pendapatan yang masih harus diterima yang terkait dengan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit untuk pelaku usaha UMKM.
3. BA 999.07, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.282.238.051.794. Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tersebut lebih tinggi Rp2.160.266.408.400 (1.771,12%) dari Jumlah Pendapatan Masih Yang Harus Diterima per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.971.643.394. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 terdapat pada:
 - a. Kementerian Pertanian
Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp1.942.332.641.125 dan Rp52.190.709.

Saldo per 31 Desember 2024 Pendapatan yang Masih Harus Diterima berada pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian senilai Rp1.942.332.641.125 merupakan kelebihan pembayaran belanja subsidi pupuk kepada PT. Pupuk Kalimantan Timur TA.2020 berdasarkan koreksi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor R.470/PW.110/G.3/12/2022 sebesar Rp52.190.709 dan koreksi penyajian atas penyaluran pupuk bersubsidi di 5 (lima) operator sebesar Rp1.942.280.450.416.
 - b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Pendapatan yang Masih Harus Diterima berada pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan senilai Rp912.110.186 dan Rp306.060.315. Nilai tersebut diperoleh karena adanya koreksi atas lebih bayar kepada 303 debitur subsidi bunga KPR yang berstatus dihentikan dan 205 debitur yang telah dilunasi klaim asuransinya oleh asuradur.
 - c. Kementerian Koperasi dan UMKM
Saldo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Pendapatan yang Masih Harus Diterima berada pada Deputi Bidang Usaha Mikro senilai Rp338.993.300.483 dan Rp121.613.392.370. Nilai tersebut diperoleh karena adanya koreksi penyajian utang dan beban subsidi bunga kredit program lainnya atas penyaluran tahun 2024 oleh Himbara.
 4. BA 999.99, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp772.121.666.435 dan Rp992.771.132.410 atau mengalami penurunan sebesar Rp220.649.465.975 (22,23%). Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari:
 - a. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.551.597.135 dan Rp2.202.433.834. Pendapatan yang masih harus diterima berasal dari kewajiban pembayaran ke kas negara atas Transfer BMN Hulu Migas antar KKKS;
 - b. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp685.180.716.922 dan Rp893.433.077.141. Jumlah tersebut merupakan SBP Triwulan I TA 2025 (atas hasil kegiatan usaha Panas Bumi periode Triwulan IV Tahun 2024) yang diterima pada bulan Januari 2025.
 - c. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp82.389.352.378 dan Rp97.135.621.435. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima tersebut

terdapat pada satker transaksi khusus pengelola kas Negara yang berasal dari:

- Pendapatan dari Pelaksanaan *Treasury Notional Pooling* bulan Desember 2024 yang akan diterima pada bulan Januari 2025 senilai Rp39.738.004.402;
- Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau hibah bulan Desember 2024 yang diterima pada bulan Januari 2025 sebesar Rp41.150.657.557; serta
- Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji bulan Desember 2024 yang diterima bulan Januari 2025 sebesar Rp1.500.690.419.

D.2.1.1.14. PIUTANG BUKAN PAJAK

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp253.122.402.777.910** dan **Rp241.872.476.098.171** atau mengalami kenaikan sebesar Rp11.249.926.679.739 (4,65%). Piutang Bukan Pajak tersebut merupakan piutang pada Investasi Pemerintah (BA 999.03), Transfer Ke Daerah (BA 999.05), Belanja Subsidi (BA 999.07), Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dan Transaksi Khusus (BA 999.99).

Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang Bukan Pajak ini terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Piutang Dividen (BA 999.03)	10.924.958.559.900	49.577.182.163
2.	Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)	14.014.954.200.303	12.892.897.399.321
3.	Piutang Subsidi (BA 999.07)	12.350.000.000	12.350.000.000
4.	Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	299.050.825.309	310.101.704.547
5.	Piutang PNPB (BA 999.99)	227.871.089.192.398	228.607.549.812.140
Jumlah		253.122.402.777.910	241.872.476.098.171

D.2.1.1.14.1. Piutang Dividen (BA 999.03)

Piutang Negara Bukan Pajak (Laba BUMN) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.924.958.559.900 dan Rp49.577.182.163, mengalami kenaikan sebesar Rp10.875.381.377.737 (21.936,26%).

Perubahan saldo piutang negara bukan pajak per 31 Desember 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

- Saldo piutang negara bukan pajak pada tanggal 1 Januari 2024 Rp49.577.182.163 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp23.826.578.448 dan denda sebesar Rp25.750.603.715.
- Terdapat pembayaran Piutang Negara Bukan Pajak dari Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai sebelum TB 2023 sebesar Rp7.141.188.641. Pembayaran tersebut merupakan pembayaran denda keterlambatan dividen dari PT Inhutani V (TB 1999) sebesar Rp692.788.265 dan PT Perkebunan Nusantara II (TB 1999) sebesar Rp6.448.400.376.
- Terdapat penambahan pengakuan piutang negara bukan pajak dari bagian pemerintah atas dividen interim PT Bank Rakyat Indonesia Tahun Buku 2024 sebesar Rp10.882.481.878.260, berdasarkan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tahun Buku 2024 PT Bank Rakyat Indonesia. Atas piutang dividen tersebut, seluruhnya telah disetorkan ke Rekening Umum Kas

Negara (RKUN) pada tanggal 15 Januari 2025 berdasarkan NTPN Nomor 938593CIFT5FH32P dan 1855161QVCSKO3V7.

- d. Dengan demikian, Piutang Negara Bukan Pajak (Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai) per tanggal 31 Desember 2024 tercatat menjadi sebesar Rp10.924.917.871.782 yang terdiri dari pokok dividen sebesar Rp10.906.308.456.707 dan denda sebesar Rp18.609.415.075.
- e. Terdapat piutang lainnya pada UAKPA DJPK pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp40.688.118 dan Rp0. Nilai tersebut berasal dari koreksi PNBP bunga PT SMI yang belum disetor ke kas negara.

Rincian Piutang PNB Dividen dan Denda dapat dilihat pada [lampiran LD12](#).

D.2.1.1.14.2. Piutang Transfer ke Daerah (BA 999.05)

Piutang Transfer ke Daerah BA 999.05 per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.014.954.200.303 dan Rp12.892.897.399.321 atau mengalami penurunan sebesar Rp1.122.056.800.982 (8,70%). Aset yang disajikan dalam Neraca TA 2024 terdiri atas Piutang Transfer ke Daerah sebagaimana rincian berikut:

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Piutang TKD	12.316.984.195.966	10.498.054.168.192
a.	Piutang DBH	9.795.347.278.000	6.370.424.360.396
b.	Piutang DAK Non Fisik	2.497.771.161.333	4.103.787.260.228
c.	Piutang DK DIY	23.865.756.633	23.842.547.568
2.	Piutang TKD Lainnya – Dana Desa	80.977.185.711	2.188.819.277
3.	Piutang TKD Diestimasi – DBH Diestimasi	1.616.992.818.626	2.392.654.411.852
Total		14.014.954.200.303	12.892.897.399.321

Rincian Piutang DBH, DAK Non Fisik dan DK DIY dapat dilihat pada [lampiran LD13](#)

1. Piutang TKD

a. Piutang DBH

Piutang Transfer Dana Perimbangan Per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp9.795.347.278.000, mengalami kenaikan sebesar Rp3.424.922.917.604 atau 53,76% dari 31 Desember TA 2023 sebesar Rp6.370.424.360.396.

Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan realisasi penerimaan PPh dan PBB bagian daerah serta realisasi penerimaan SDA, terutama Migas, Panas Bumi, dan Minerba. Selain itu, terdapat pula penyelesaian sebagian lebih bayar DBH.

Rincian sisa Saldo Piutang transfer DBH sebagai berikut:

Uraian	Nilai
LB Dana Bagi Hasil PBB Bagian Pemerintah Pusat yang Dikembalikan Sama Rata ke Kabupaten/Kota	3.165.815.000
LB Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Migas	200.342.444.000
LB Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Non Migas	561.333.383.000
LB Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Panas Bumi	1.769.843.000
LB Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Perhutanan	79.843.424.000
LB Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Perkebunan	48.465.185.000
LB Dana Bagi Hasil PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya	19.974.653.000
LB Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB Migas	13.753.743.000

Uraian	Nilai
LB Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut Non Migas	21.838.440.000
LB Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut Panas Bumi	80.136.000
LB Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut Perhutanan	1.223.702.000
LB Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut Perkebunan	2.702.380.000
LB Dana Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut Sektor Lainnya	711.869.000
LB Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	47.369.229.000
LB Transfer Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	56.397.013.000
LB Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	93.698.787.000
LB Dana Bagi Hasil Gas Bumi	1.113.542.728.000
LB Tambahan Dana Bagi Hasil Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	1.355.683.879.000
LB Dana Bagi Hasil Minyak Bumi	426.122.457.000
LB Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus	138.498.435.000
LB Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara-luran Tetap	199.997.263.000
LB Dana Bagi Hasil Mineral dan Batubara-Royalti	3.561.455.667.000
LB Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi-luran Produksi (Royalti)	10.379.532.000
LB Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi-luran Tetap	9.965.600.000
LB Dana Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah	40.409.260.000
LB Dana Bagi Hasil Perikanan	537.929.368.000
LB Dana Bagi Hasil Kehutanan-PSDH	165.677.042.000
LB Dana Bagi Hasil Kehutanan-IIUPH/IHPH	39.611.779.000
LB Dana Bagi Hasil Kehutanan-Dana Reboisasi	56.408.918.000
LB Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	986.995.304.000
Total	9.795.347.278.000

Rincian Sisa Saldo Piutang Transfer DBH (dalam Rp)

No.	Transaksi	Jumlah
a.	Piutang DBH TA 2023 Audited	6.370.424.360.396
b.	Penetapan (Penyesuaian) Piutang DBH TA 2024 berdasarkan PMK 89 Tahun 2024	7.256.406.444.604
c.	Penyelesaian Piutang DBH sampai dengan TA 2023 berdasarkan KMK 44/KM.7/2024	(3.831.483.527.000)
Total		9.795.347.278.000

b. Piutang Satker DAK Non Fisik

Aset Lancar per 31 Desember 2024 Transfer DAK Nonfisik sebesar Rp2.497.771.161.333, mengalami penurunan sebesar Rp1.606.016.098.895 atau 39,13% dari 31 Desember 2023 sebesar Rp4.103.787.260.228.

No.	Transaksi	Jumlah
1)	Piutang DAK Nonfisik TA 2023 Audited	4.103.787.260.228
2)	Pengakuan Piutang DAK Non Fisik TA 2023 sesuai rekomendasi tahun 2024 yang belum diakui pada piutang audited 2023	844.315.767.538
3)	Penyelesaian Piutang DAK Non Fisik TA 2023 sesuai rekomendasi tahun 2024	(3.114.959.625.579)
4)	Pengakuan Piutang DAK Non Fisik berdasarkan data sisa dana pada Laporan Penggunaan Pemda per April 2025	189.524.605.194
5)	Pengakuan Piutang DAK Non Fisik 2024 berdasarkan nilai potongan dalam rekomendasi penyaluran tahap I 2025	1.573.463.464.936
6)	Penyelesaian atas lebih bayar atau piutang DAK Non Fisik (TPG, TKG, Tamsil) berdasarkan data perhitungan alokasi per April 2025	(1.098.360.310.984)
Total		2.497.771.161.333

- Saldo awal sebesar Rp4.103.787.260.228 merupakan saldo piutang dana DAK Non Fisik berdasarkan LKBUN Audited 2023.
- Rincian saldo piutang DAK Non Fisik tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
i.	Dana TPG ASND	1.448.973.498.412
ii.	Dana TKG ASND	156.179.538.532
iii.	Dana Tamsil Guru ASND	138.145.691.035
iv.	Dana BOK	2.010.480.414.638
v.	Dana BOKB	256.269.455.893
vi.	Dana PK2UMK	6.443.494.143
vii.	Dana Pelayanan Adminduk	62.579.523
viii.	Dana Pelayanan Kepariwisataa	6.050.126.970
ix.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	4.563.960.022
x.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	19.184.205.881
xi.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	14.692.657.688
xii.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	520.727.950
xiii.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	34.733.935.729
xiv.	Dana BOS	5.582.518.319
xv.	Dana BOP PAUD	1.635.498.673
xvi.	Dana BOP Kesetaraan	268.956.820
Total		4.103.787.260.228

- Terdapat pengakuan Piutang DAK Non Fisik TA 2023 sesuai dengan rekomendasi tahun 2024 yang belum diakui pada piutang audited 2023 sebesar Rp844.315.767.538 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
i.	Dana BOK	466.092.099.577
ii.	Dana BOKB	58.301.825.651
iii.	Dana PK2UMK	617.334.766
iv.	Dana Pelayanan Adminduk	-
v.	Dana Pelayanan Kepariwisataa	494.448.895
vi.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	1.822.467.190
vii.	Dana Biaya Layanan Pengolahan Sampah	4.041.733.675
viii.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.052.409.027
ix.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	8.020.627.063
x.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.915.943.887

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
xi.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	5.854.652.531
xii.	Dana BOS	214.287.592.828
iii.	Dana BOP PAUD	5.085.440.704
xiv.	Dana BOP Kesetaraan	55.729.191.744
Total		844.315.767.538

- 4) Penyelesaian Piutang DAK Non Fisik TA 2024 adalah sebesar Rp3.114.959.625.579. Penyelesaian piutang ini diperhitungkan saat dilakukan penyaluran DAK Non Fisik di tahun 2024 berdasarkan rekomendasi penyaluran DAK Non Fisik Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
i.	Dana BOK	2.391.047.082.478
ii.	Dana BOKB	314.479.700.443
iii.	Dana PK2UMK	7.060.828.909
iv.	Dana Pelayanan Adminduk	-
v.	Dana Pelayanan Kepariwisata	6.109.981.661
vi.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	6.386.427.212
vii.	Dana Biaya Layanan Pengolahan Sampah	4.041.733.675
viii.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	22.997.507.398
ix.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	22.614.318.761
x.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.174.568.182
xi.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	39.211.412.675
xii.	Dana BOS	219.391.454.146
xiii.	Dana BOP PAUD	5.563.253.345
xiv.	Dana BOP Kesetaraan	55.881.356.694
Total		3.114.959.625.579

- 5) Terdapat pengakuan Piutang DAK Non Fisik berdasarkan data sisa dana yang berasal dari Laporan Penggunaan Pemda per April 2025 sebesar Rp189.524.605.194. Rincian per jenis dana sebagai dampak pengakuan piutang tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
i.	Dana BOK	51.471.527.701
ii.	Dana BOKB	55.563.588.912
iii.	Dana PK2UMK	9.490.254.489
iv.	Dana Pelayanan Adminduk	-
v.	Dana Pelayanan Kepariwisata	9.497.654.398
vi.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	72.756.429
vii.	Dana Biaya Layanan Pengolahan Sampah	-
viii.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	17.525.539.196
ix.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	18.910.524.538
x.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.173.238.611
xi.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	12.118.483.969
xii.	Dana BOS	341.424.399
xiii.	Dana BOP PAUD	577.326.520
xiv.	Dana BOP Kesetaraan	782.286.032
Total		189.524.605.194

- 6) Terdapat Pengakuan Piutang DAK Non Fisik 2024 berdasarkan nilai potongan dalam rekomendasi penyaluran DAK Non Fisik tahap I 2025 sebesar Rp1.573.463.464.936.

Rincian pengakuan piutang tersebut per jenis dana sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
i.	Dana BOK	1.398.566.046.449
ii.	Dana BOKB	151.255.978.601
iii.	Dana PK2UMK	2.038.181.020
iv.	Dana Pelayanan Adminduk	-
v.	Dana Pelayanan Kepariwisataa	-
vi.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	7.765.095.628
vii.	Dana Biaya Layanan Pengolahan Sampah	-
viii.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	499.470.265
ix.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	-
x.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.138.992.965
xi.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	5.447.954.975
xii.	Dana BOS	3.751.745.033
xiii.	Dana BOP PAUD	-
xiv.	Dana BOP Kesetaraan	-
Total		1.573.463.464.936

- 7) Penyelesaian atas lebih bayar atau piutang DAK Non Fisik (TPG, TKG, Tamsil) adalah berdasarkan data perhitungan alokasi per April 2025 dari tim teknis sebesar Rp1.098.360.310.984 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
i.	Dana BOK	947.034.458.473
ii.	Dana BOKB	77.753.045.030
iii.	Dana PK2UMK	73.572.807.481
Total		1.098.360.310.984

- 8) Rincian Piutang DAK Non Fisik per jenis dana untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 tersaji dalam tabel di bawah ini:

No.	Jenis Dana	Nilai Piutang
i.	Dana TPG ASND	501.939.039.939
ii.	Dana TKG ASND	78.426.493.502
iii.	Dana Tamsil Guru ASND	64.572.883.554
iv.	Dana BOK	1.535.563.005.887
v.	Dana BOKB	206.911.148.614
vi.	Dana PK2UMK	11.528.435.509
vii.	Dana Pelayanan Adminduk	62.579.523
viii.	Dana Pelayanan Kepariwisataa	9.932.248.602
ix.	Dana BOP Museum dan Taman Budaya	7.837.852.057
x.	Dana Biaya Layanan Pengolahan Sampah	-
xi.	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	18.264.116.971
xii.	Dana Fasilitas Penanaman Modal	19.009.490.528
xiii.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.574.335.231
xiv.	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	18.943.614.529
xv.	Dana BOS	4.571.826.433
xvi.	Dana BOP PAUD	1.735.012.552
xvii.	Dana BOP Kesetaraan	899.077.902
Total		2.497.771.161.333

c. Piutang Lebih Salur Satker DK DIY

Piutang transfer ke Daerah DK DIY yang disajikan per 31 Desember 2024 sejumlah Rp23.865.756.633, mengalami kenaikan Rp23.209.065 atau 0,10% dari 31 Desember TA 2023 sejumlah Rp23.842.547.568. Pengakuan atas sisa DK DIY di RKUD TAYL pada TA 2023 sebesar Rp23.865.756.633 telah sesuai dengan sisa DK DIY di RKUD pada akhir TA 2024 yang telah diverifikasi dan dituangkan dalam Laporan Realisasi Penyerapan Dana Keistimewaan DIY Tahap III Tahun Anggaran 2024. Pengakuan atas sisa dana tersebut menjadi piutang TKD Dana Keistimewaan DIY TA 2024.

2. Piutang TKD Lainnya - Dana Desa

Piutang TKD Lainnya - Dana Desa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ialah sebesar Rp80.977.185.711 dan Rp2.188.819.277 mengalami kenaikan sebesar Rp78.788.366.434 atau 3.599,58%. Kenaikan ini disebabkan oleh terdapatnya pengakuan piutang dana desa berdasarkan data potongan SPM Penyaluran periode tahun 2024.

3. Piutang TKD Diestimasi – DBH Diestimasi

Piutang TKD Diestimasi – DBH Diestimasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 ialah sebesar Rp1.616.992.818.626 dan Rp2.392.654.411.852 mengalami penurunan sebesar Rp775.661.593.226 atau 32,42%. Penurunan nilai piutang TKD diestimasi tahun 2024 seiring dengan berkurangnya jenis DBH yang mengalami lebih bayar. Estimasi LB DBH Tahun 2024 merupakan selisih antara realisasi penerimaan negara dan realisasi penyaluran DBH tahun 2024. Saldo akhir piutang TKD Diestimasi Tahun 2024 terdiri dari DBH Perikanan sebesar Rp190.366.284.622 dan DBH Perkebunan Sawit sebesar Rp1.426.626.534.004.

D.2.1.1.14.3. Piutang Subsidi (BA 999.07)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.350.000.000. Saldo tersebut terdiri dari Hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca yang berasal dari satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian sebesar Rp12.350.000.000. Piutang ini merupakan sisa kelebihan pembayaran atas Subsidi Benih oleh PT Sang Hyang Seri. Jumlah Piutang Bukan Pajak tersebut sama dengan Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023.

D.2.1.1.14.4. Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp299.050.825.309 dan Rp310.101.704.547 atau mengalami penurunan sebesar Rp11.050.879.238 (3,56%). Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Perbandingan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2024	31 Desember 2023
059	Kementerian Kominfo	-	9.097.887.689
015	Kementerian Keuangan	7.101.770.243	6.398.716.692
018	Kementerian Pertanian	288.901.122.353	288.901.122.353
999	MPP Kartu Prakerja	2.445.234.900	5.269.130.000
999	SKK Migas	602.697.813	434.847.813
Total		299.050.825.309	310.101.704.547

Piutang bukan pajak tersebut terdapat pada:

1. Kementerian Kominfo, per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp9.097.887.689. Saldo pada 31 Desember 2023 merupakan kelebihan pembayaran bantuan operasional LPU Triwulan IV Tahun 2023 berdasarkan hasil verifikasi Ditjen PPI pada 29 Februari 2024 dimana pembayaran untuk Triwulan IV pada bulan Desember 2023 masih menggunakan dasar prognosa, pada tahun 2024 telah dilakukan penyetoran sehingga saldo 31 Desember 2024 menjadi Rp0.
2. Kementerian Keuangan, Kanwil DJPB Papua sebesar Rp5.364.724.659 dan pada Kanwil DJPB Papua Barat sebesar Rp1.737.045.584, yang merupakan piutang atas pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah akibat pelanggaran kontrak oleh PT Pos Indonesia (persero)
3. Kementerian Pertanian, Ditjen Tanaman Pangan sebesar Rp288.901.122.353 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah	PT. SHS	PT. Pertani	Jumlah
Piutang CBN	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166	235.312.610.399	36.794.725.767	272.107.336.166
Biaya Distribusi CBN	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441	13.133.698.434	3.698.612.007	16.832.310.441
Temuan LHP CBN	4.700.000.000	-	4.700.000.000	4.700.000.000	-	4.700.000.000
Jasa Giro Dana CBN	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)	(1.039.912.247)	(3.698.612.007)	(4.738.524.254)
Total	252.106.396.586	36.794.725.767	288.901.122.353	252.106.396.586	36.794.725.767	288.901.122.353

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dijelaskan rincian piutang bukan pajak sebagai berikut:

- a. Saldo Piutang CBN merupakan nilai benih CBN per tanggal pelaporan yang masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) dan PT. Pertani (Persero). Nilai Piutang CBN per 31 Desember 2024 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020. Nilai Piutang CBN PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp235.312.610.399 terdiri dari:
 - 1) Persediaan bahan dan pestisida sebesar Rp109.232.000;
 - 2) Uang muka fee pengelolaan CBN sebesar Rp7.608.666.240;
 - 3) Piutang lain-lain untuk relokasi senilai Rp234.096.700;
 - 4) Biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN sebesar Rp4.930.295.737 (sebesar Rp1.041.018.103 pada rekening bank per 31 Desember 2019);
 - 5) Benih yang tidak berada di gudang dan penangkar sebesar Rp222.430.319.722.

Sedangkan untuk nilai piutang CBN pada PT. Pertani (Persero) sebesar Rp36.794.725.767 merupakan benih yang tidak berada di gudang penangkar.

- a. Biaya Distribusi CBN merupakan nilai biaya distribusi penyaluran CBN per tanggal pelaporan yg masih terdapat pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp13.133.698.434 dan PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007. Nilai Biaya Distribusi CBN per 31 Desember 2024 ini diperoleh berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Atas Pengelolaan Bagian Anggaran 999.08 Kegiatan Cadangan Benih Nasional (CBN) Pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan No: R.320/PW.130/G.3/12/2020 tanggal 3 Desember 2020.
- b. Saldo Piutang Bukan Pajak Tahun 2016 sebesar Rp4.811.607.957 tersebut merupakan Temuan LHP BPK RI No. 25/LHP/XVII/06/2013 berupa uang muka penyegaran benih CBN pada PT Sang Hyang Seri (Persero) yang harus disetorkan ke Kas Negara. Pada periode TA. 2022 terdapat cicilan pembayaran penyelesaian kewajiban PT. SHS sebesar Rp111.607.957. Sehingga saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.700.000.000.
- c. Jasa giro pengelolaan dana CBN pada BUMN pelaksana CBN sebesar Rp4.738.524.254 yang sudah disetorkan ke Kas Negara dengan rincian: 1) PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebesar Rp1.039.912.247, merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya penyimpanan dan pemeliharaan CBN; dan 2) PT. Pertani (Persero) sebesar Rp3.698.612.007 merupakan Saldo Induk yang berasal dari biaya distribusi benih yang masih disimpan di rekening bank PT. Pertani (Persero).
- d. Terhadap piutang bukan pajak tersebut, Ditjen Tanaman Pangan telah melakukan upaya penagihan sebagai berikut:
 - 1) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. B.111/PW.220/C.1/04/ 2022 tanggal 5 April 2022 tentang penyelesaian kewajiban atas temuan BPK-RI;
 - 2) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. B.1907/PW.220/C.1/06/ 2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang penyelesaian kewajiban tahun 2023;
 - 3) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. B.2991/PW.220/C.1/09/ 2023 tanggal 6 September 2023 tentang penyelesaian kewajiban tahun 2023;
 - 4) Surat Plt. Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. B-4359 /KU.100/C.1/12/2023 Tanggal 10 Desember 2023 tentang Penyelesaian Kewajiban Tahun 2023;
 - 5) Surat Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan No. 2321/ PW.030/C.1/06/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang penyelesaian kewajiban Tahun 2024.
4. Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp2.445.234.900 yang merupakan Pengembalian belanja implementasi pelatihan Program Kartu Prakerja atas temuan dari Direktorat Pemantauan dan Evaluasi MPPKP dan Tuntutan Perbendaharaan atas Rekomendasi Pemeriksaan BPK RI dan Inspektur Kemenko Perekonomian kepada Penyedia Jasa Perorangan yang belum dilakukan pengembalian belanja kepada MPPKP.
5. SKK Migas sebesar Rp602.697.813 merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya

D.2.1.1.14.5. Piutang Bukan Pajak (BA 999.99)

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp227.871.089.192.398 dan Rp228.607.549.812.140 atau mengalami penurunan sebesar Rp736.460.619.742 (0,32%). Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Pada UAPBUN TK DJPB	107.792.038.684	133.599.138.234
Piutang Pada UAPBUN TK DJA	15.778.396.457.441	16.892.965.586.621
Piutang Pada UAPBUN TK DJKN	211.984.900.696.273	211.580.985.087.285
Jumlah	227.871.089.192.398	228.607.549.812.140

1. Piutang Pada UAPBUN TK DJPB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp107.792.038.684 dan Rp133.599.138.234. Piutang pada UAPBUN TK DJPB sebesar Rp107.792.038.684 terdiri dari:

No	Uraian	Nominal	Dokumen
a.	Piutang IJP Rampung 2022	4.000	
b.	Jasa Giro Bulan Desember 2024 Asabri	313.287.128	1/BA/LK/DJPb-ASB/2025
c.	Potongan utang non TGR (non dapem Desember 2024) Asabri	390.093.822	1/BA/LK/DJPb-ASB/2025
d.	Setoran SUP (SUP bulan dan SUP Retur Des 24) Asabri	4.016.366.129	1/BA/LK/DJPb-ASB/2025
e.	Kelebihan Pencairan Des 24 Asabri	2.208.427.643	1/BA/LK/DJPb-ASB/2025
f.	SUP Retur Des 24 Taspen	21.850.882.643	1/BA/LK/DJPb-TSP/2025
g.	SUP Kompensasi Des 24 Taspen	31.532.118.489	1/BA/LK/DJPb-TSP/2025
h.	Kelebihan Pencairan Belanja Pensiun Des 24 Taspen	38.489.743.709	1/BA/LK/DJPb-TSP/2025
i.	Setoran Kas Negara Non Dapem dan Susulan Des 24 Taspen	517.782.788	1/BA/LK/DJPb-TSP/2025
j.	Jasa Giro Bulan Desember 2024 Taspen	3.916.023.456	1/BA/LK/DJPb-TSP/2025
k.	Kelebihan Pencairan Dana JKK TW IV 24 Asabri	501.509.029	BA-2/PB.7/2025
l.	Kelebihan Pencairan Dana JKm TW IV 24 Asabri	655.197.261	BA-3/PB.7/2025
m.	Kelebihan pembayaran Jamkes TW IV BPJS 2024	3.400.602.587	BA-1/PB.7/2025
Jumlah		107.792.038.684	

2. Piutang PNBPN UAPBUN TK DJA merupakan Piutang PNBPN Sumber Daya Alam periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp15.778.396.457.441 dan Rp16.892.965.586.621 merupakan piutang yang berasal dari kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi.

Jumlah tersebut terdiri dari piutang hasil penjualan minyak bumi bagian pemerintah, hasil penjualan gas bumi bagian pemerintah, *overlifting* KKKS dan piutang PNBPN migas lainnya, serta kekurangan setoran bagian pemerintah, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	
			(Rp)	%
Hasil Penjualan Minyak	8.436.256.854.277	9.126.643.089.767	(690.386.235.490)	(7,56)
Hasil Penjualan Gas	4.516.099.950.074	2.653.801.451.359	1.862.298.498.715	70,17
Overlifting KKKS	1.898.439.889.435	4.362.688.151.564	(2.464.248.262.129)	(56,48)
PNBP Migas lainnya	927.599.763.655	748.416.285.947	179.183.477.708	23,94
Kekurangan Setoran Bagian Pemerintah atas kegiatan usaha panas bumi	-	1.416.607.984	(1.416.607.984)	(100,00)
Total Piutang	15.778.396.457.441	16.892.965.586.621	(1.114.569.129.180)	(6,60)

Saldo piutang PNBPN Sumber Daya Alam Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.778.396.457.441 adalah lebih rendah Rp1.114.569.129.180 dari posisi per 31 Desember 2023.

Dari saldo piutang PNBPN Sumber Daya Alam Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.778.396.457.441 tersebut terdiri dari:

- a. Hasil penjualan minyak atas transaksi *lifting* minyak yang berasal dari transaksi belum jatuh tempo sebesar Rp8.436.256.854.277. Piutang dimaksud umumnya diselesaikan pada bulan Januari 2025.
- b. Hasil penjualan gas atas transaksi *lifting* gas yang berasal dari transaksi yang belum jatuh tempo sebesar Rp4.516.099.950.074. Piutang dimaksud umumnya diselesaikan pada bulan Januari 2025.
- c. Dari saldo piutang *overlifting* sebesar Rp1.898.439.889.435 sudah diselesaikan seluruhnya pada bulan Januari dan Februari 2025. Terhadap saldo piutang PNBPN Migas Tahun 2023, terdapat saldo piutang *overlifting* KKKS yang masih belum disepakati dengan KKKS sejumlah USD1,549,916, dengan penjelasan sebagai berikut.
 - 1) *Outstanding* piutang *overlifting* yang masih belum disepakati sejumlah USD1,549,916 tersebut berasal dari piutang *overlifting* KKKS Medco E&P Malaka yang disebabkan ketidakcukupan bagian negara dari gas bumi untuk menutupi sisa kekurangan KKKS Medco E&P Malaka terkait dengan implementasi kebijakan Harga Bumi Tertentu (HGBT), sehubungan dengan pemberlakuan harga USD6,56/MMBTU dari yang seharusnya menggunakan harga USD7,03/MMBTU;
 - 2) Sehubungan dengan hal tersebut, BPMA telah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM terkait dengan ketidakcukupan bagian negara dari gas bumi untuk menutupi sisa kekurangan Medco E&P Malaka sebagai dampak dari Pengembalian *Volume Gas In Kind* kepada buyer (PTGN). Salah satu pokok hasil pembahasan, telah disepakati bahwa periode perhitungan harga gas USD6,90/MMBTU dapat berlaku sebelum Kepmen ESDM Nomor 89K/2020 dan Kepmen 91K/2020 ditetapkan. Dengan demikian, perlu dilakukan perhitungan ulang atas pengembalian secara *Volume In-Kind* dengan mekanisme *business-to-business* dan tidak melibatkan *entitlement* bagian negara.
 - 3) Menindaklanjuti hal tersebut, BPMA telah menerbitkan Surat Instruksi Penyelesaian Koreksi Kesetaraan Penyesuaian Tagihan Tahun 2020 antara KKKS Medco E&P Malaka dan PT Pertamina Niaga. Selanjutnya, KKKS Medco E&P Malaka telah menerbitkan tagihan kepada PT Pertamina Niaga mengenai Selisih Harga *Gas Sales Agreement* (GSA) dengan harga sebelum Kepmen ESDM Nomor 89K/2020 dan Kepmen 91K/2020 untuk *In Kind Gas* Periode Tahun 2020.
 - 4) Terkait *dispute* atas *outstanding* piutang *overlifting* yang masih belum disepakati sejumlah USD1,549,916 dalam Laporan Keuangan Tahun 2023 yang berasal dari piutang *overlifting* KKKS Medco E&P Malaka di atas, pada bulan Februari tahun 2025 BPMA dan KKKS Medco E&P Malaka telah mencapai kesepakatan atas *dispute* yang disebabkan oleh ketidakcukupan bagian negara dari gas bumi untuk menutupi sisa kekurangan KKKS Medco E&P Malaka terkait dengan implementasi kebijakan Harga Bumi Tertentu (HGBT). Kesepakatan kedua belah pihak dituangkan di dalam risalah rapat yang telah diselenggarakan pada tanggal 6-7 Februari 2025. Berdasarkan hasil pembahasan antara BPMA dan KKKS Medco dalam rapat tersebut, nilai *overlifting* gas disepakati sebesar USD1,890,095.27 yang diselesaikan melalui mekanisme *offset* dengan penerimaan negara tahun berjalan yang diberikan untuk penyesuaian kekurangan kontraktor atas kebijakan HGBT sebesar USD1,890,109.29.

- 5) Medco E&P Malaka juga telah menerbitkan tagihan kepada PT Pertagas Niaga mengenai Selisih Harga *Gas Sales Agreement* (GSA) dengan harga sebelum Kepmen ESDM Nomor 89K/2020 dan Kepmen 91K/2020 untuk *In Kind Gas* Periode Tahun 2020 yang dibagi ke dalam tiga termin dengan total nilai sebesar USD1,724,195.11. Dari total nilai tersebut, sebesar USD1,446,386.11 merupakan bagian negara dan USD277,809.00 merupakan bagian kontraktor sebagaimana disajikan di dalam Laporan Pengiriman Gas (A0 4) BPMA periode November dan Desember 2024. Atas tagihan tersebut, PT Pertagas Niaga telah melakukan pembayaran atas bagian negara sebesar USD411,869.04 pada bulan November 2024 dan sebesar USD 517,258.53 pada bulan Januari 2025 dan sebesar USD 517,258.54 pada bulan Februari 2025.
- d. Transaksi PNBPN Migas Lainnya sebesar Rp927.599.763.655, dari saldo piutang tersebut termasuk di dalamnya sebagai berikut.
- 1) Piutang atas denda keterlambatan penyeteroran atas Gas Bumi sebesar Rp3.903.628.800;
 - 2) Piutang atas DMO sebesar Rp923.256.343.362;
 - 3) Piutang atas transaksi Jasa Pandu Tunda sebesar Rp439.791.493.
- e. Pada periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, terdapat penagihan atas kekurangan penyeteroran bagian pemerintah atas kegiatan usaha panas bumi berdasarkan hasil audit BPKP untuk PT PGE tahun buku 2019-2020 melalui surat tagihan nomor S-330/AG/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp1.416.607.984. Pada tanggal 10 Januari 2024, PT PGE membayar tagihan dimaksud melalui surat Nomor 014/PGE300/2024-S4, maka Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.
3. Piutang PNBPN UAPBUN TK DJKN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp211.984.900.696.273 dan Rp211.580.985.087.285 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a.	Sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP	-	-
b.	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	211.957.341.532.847	211.549.299.194.630
c.	Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset KKKS	27.559.163.426	31.685.892.655
TOTAL		211.984.900.696.273	211.580.985.087.285

- a. Piutang yang berasal dari UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina.

Perhitungan sewa aset eks Pertamina pada mulanya didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523. Berdasarkan surat tersebut, seluruh BMN eks Pertamina kelompok aset eks KKKS senilai Rp16,2 Triliun yang digunakan oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP disetujui untuk dikenakan biaya sewa, kecuali terhadap aset berupa sumur dan tanah sepanjang merupakan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP).

Selanjutnya, PT Pertamina (Persero) menyampaikan Laporan Inventarisasi Aset Eks Pertamina kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menerangkan hasil inventarisasi aset eks Pertamina kelompok eks KKKS yang digunakan oleh Pertamina berupa sumur, tanah, peralatan, bangunan, dan aset lainnya, dengan pengelompokan sebagai aset masih digunakan, aset tidak digunakan, aset digunakan anak perusahaan lainnya, aset tidak ditemukan, dan aset dalam proses usul hapus, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam juta Rupiah)

Status Aset	Bangunan	Equipment	Lain-Lain	Sumur	Tanah	Grand Total
Digunakan	601.111	5.889.151	140.667	5.404.568	1.741.017	13.776.514
Digunakan Anak Usaha Lain	241	203.899	1.312	-	-	205.452
Proses Usul Hapus	9.366	86.619	519	9.456	2.028	107.988
Tidak Digunakan	103.168	1.161.309	19.121	207.227	449.777	1.940.602
Tidak Ditemukan	11.185	185.587	12.524	1.498	742	211.536
Grand Total	725.071	7.526.565	174.143	5.622.749	2.193.564	16.242.092

SKK Migas melalui suratnya Nomor SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 menyampaikan kepada Menteri Keuangan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa peralatan, bangunan, dan aset lain-lain yang berstatus digunakan sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan rincian sebagai berikut:

UNIT	Equipment	Bangunan	Lain-lain	Grand Total
	Masih Digunakan	Masih Digunakan	Masih Digunakan	
Reg Jawa	1.224.326.862.000	102.658.104.000	111.023.870.000	1.438.008.836.000
Kawasan Timur	419.133.095.522	77.183.384.000	15.515.077.000	511.831.556.522
Reg Sumatera	2.855.534.590.000	274.425.208.000	3.673.196.000	3.133.632.994.000
UBEP Adera	116.409.369.551	501.242.000	-	116.910.611.551
Talisman	4.065.030.000	1.780.968.000	-	5.845.998.000
UBEP Jambi	144.393.015.000	71.588.257.000	5.153.085.000	221.134.357.000
UBEP Lirik	293.053.917.000	19.668.524.000	3.103.672.000	315.826.113.000
UBEP Satar	36.711.086.000	13.881.564.267	45.894.000	50.638.544.267
UBEP Limau	234.690.912.000	67.942.000	2.133.534.000	236.892.388.000
UBEP Tanjung	560.833.422.333	39.355.713.665	18.819.000	600.207.954.998
TOTAL	5.889.151.299.406	601.110.906.932	140.667.147.000	6.630.929.353.338

Perhitungan Piutang PNBPD didasarkan pada Surat Kepala SKK MIGAS Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 hal Sewa Aset Eks Pertamina, yang menyampaikan bahwa dasar pengenaan sewa adalah BMN eks Pertamina berupa equipment, bangunan dan aset lainnya yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menunjang kegiatan operasional senilai Rp6.630.929.353.338. Untuk aset yang berupa lahan dan sumur sepanjang merupakan bagian dari Wilayah Kerja Pertambangan dapat dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS).

Atas dasar tersebut, SKK Migas menghitung besaran tunggakan biaya sewa Aset eks Pertamina oleh PT Pertamina EP dari bulan September 2003 s.d. Juni 2014 sebesar Rp2.227.577.829.636,98 dan telah dilunasi dengan cara swap off dengan utang subsidi Pemerintah kepada Pertamina pada Tahun 2014 tersebut.

Kemudian, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan dokumen perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338.

PT Pertamina EP telah melakukan penyeteroran kembali pada Tahun 2016 sebesar Rp518.041.355.730 sehingga posisi saldo piutang pada Tahun 2016 berdasarkan perhitungan PT Pertamina EP sudah nihil. Pembayaran tersebut dilanjutkan untuk periode tahun-tahun

selanjutnya sebesar Rp207.216.542.292 per tahun.

Jumlah BMN Eks Aset Pertamina sebesar Rp6.630.929.353.338 tersebut diperhitungkan oleh PT Pertamina (Persero) sebagai tarif sewa dengan perhitungan secara prorata untuk jangka waktu 32 (tiga puluh dua) tahun sejak PT Pertamina (Persero) berdiri pada 17 September 2003.

Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan = Rp17.268.045.191 per bulan atau Rp207.216.542.292 per tahun.

PT Pertamina pada Tahun 2024 ini telah melakukan pembayaran sewa untuk tahun 2024 yaitu sebesar Rp207.216.542.292. Sehingga tidak lagi Piutang PNBPN yang tercatat, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Mutasi Piutang PNBPN	Nilai (Rp)
Saldo 1 Januari 2024	-
Mutasi Tambah:	207.216.542.292
Penggunaan sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sampai dengan 31 Desember Tahun 2024	207.216.542.292
Mutasi Kurang:	207.216.542.292
Pembayaran Sewa oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sampai dengan 31 Desember Tahun 2024	207.216.542.292
Saldo 31 Desember 2024	-

Adapun progres sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA-01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.
- 2) Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan.
- 3) Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.
- 4) Oleh karena itu besaran sewa BMN Eks Pertamina yang perlu dibayar oleh PT Pertamina EP selama 32 (tiga puluh dua) tahun setelah ditambahkan hasil pemetaan adalah sebesar Rp7.243.343.227.811 (Rp6.630.929.353.338+Rp612.413.874.473). Sehingga besaran sewa BMN eks Pertamina yang harus dibayarkan per tahun setelah diperhitungkan hasil pemetaan adalah Rp226.354.475.869.
- 5) Realisasi biaya sewa yang telah dibayarkan oleh PT PEP mulai periode September 2003 s.d. Desember 2021 (jangka waktu 219 bulan = 18,25 tahun) adalah sebesar Rp3.781.701.896.827 (tiga triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus satu juta

delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).

- 6) Adapun perhitungan sewa yang seharusnya dibayarkan oleh PT Pertamina EP dengan menggunakan tarif sewa setelah pemetaan untuk periode dari September 2003 s.d. Desember 2021 = Rp4.130.969.184.609 (Rp226.354.475.869 x 18,25 tahun), sehingga, kekurangan sewa yang belum dibayar PT Pertamina EP sebesar = Rp349.267.287.782 (Rp4.130.969.184.609 - Rp3.781.701.896.827).
- 7) Berdasarkan perhitungan di atas, maka terdapat perubahan besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782.
- 8) Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.
- 9) PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-SO tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:
 - a) Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d Semester I 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil *Physical Check* BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutakhiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN
 - b) Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil *Physical Check* Aset 2019 sebagai berikut:

Kelas Aset	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Objek Sewa			
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.119	5.889.151.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.986	6.630.929.353.338

- c) Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352
- 10) Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
- 11) Selanjutnya, terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17

November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.

- 12) Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.
 - 13) Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina, telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338, dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.
 - 14) Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.
 - 15) Mengingat telah disepakati angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338. Oleh karena itu, maka tarif sewa untuk penggunaan BMN Eks Aset Pertamina adalah sebesar Rp6.630.929.353.338: 384 bulan = Rp 17.268.045.191 per bulan atau Rp207.216.542.292 per tahun atau Rp103.608.271.146 per semester. Pada 31 Desember 2024 PT Pertamina c.q. PT Pertamina EP telah melakukan penyetoran ke negara sebesar Rp207.216.542.292, sehingga piutang PNPB sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp0
- b. Piutang Bukan Pajak Aset Eks BLBI

Piutang Bukan Pajak pada Neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp211.957.341.532.847 dan Rp211.549.299.194.630 yang terdiri dari:

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Kredit eks BPPN	101.677.737.767.431	103.094.434.266.065
Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA	100.789.774.362.132	98.650.243.861.984
Piutang BDL	9.489.829.403.284	9.804.621.066.581
Jumlah	211.957.341.532.847	211.549.299.194.630

1) Aset Kredit Eks BPPN

Aset kredit eks BPPN yang dilaporkan di Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp101.677.737.767.431 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.094.434.266.065, atau terjadi pengurangan piutang pada Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp1.416.696.498.634.

Adapun rincian Aset Kredit Eks BPPN sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN (ATK serta Non ATK yang telah melalui tahap PB/PJPN)	49.747.446.548.535	43.279.078.895.965
2	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	33.787.431.802.566	34.016.836.940.477
3	Aset kredit ATK yang masih dikelola DJKN	15.464.700.114.762	23.138.424.009.605
4	Aset Kredit ATK Lainnya	2.678.159.301.568	2.660.094.420.018
	Jumlah	101.677.737.767.431	103.094.434.266.065

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit yang berasal dari Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham disajikan lebih lanjut pada Pengungkapan Penting Lainnya.

Rincian lebih lanjut terkait Aset Kredit dilihat di [lampiran LD14](#).

2) Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan kepada PT PPA (Persero) yang kemudian setelah berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai Berita Acara Serah Terima tertanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT PPA (Persero).

Pengelolaan Aset Kredit eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara menyerahkan pengurusan/penagihan aset kredit dimaksud kepada PUPN.

Nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp100.789.774.362.132 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp98.650.243.861.984 atau terjadi kenaikan nilai Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebesar Rp2.139.530.500.148. Detil dapat dilihat pada [lampiran LD15](#).

Adapun rincian Aset Kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023
1.	Aset kredit yang telah diserahkan kepada PUPN	98.867.673.004.272	96.097.715.704.311
2.	Aset kredit yang masih dikelola DJKN	1.922.101.357.860	2.552.528.157.673
	Jumlah	100.789.774.362.132	98.650.243.861.984

3) Piutang Eks Bank Dalam Likuidasi

Piutang eks BDL per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.489.829.403.284 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.804.621.066.581, atau terjadi penurunan Piutang eks BDL sebesar Rp314.791.663.297. Piutang eks BDL per 31 Desember 2024 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Eks Dana Talangan	7.289.839.895.890	7.563.499.414.004
2	Eks Dana Penjaminan	2.199.989.507.394	2.241.121.652.577
	Jumlah	9.489.829.403.284	9.804.621.066.581

Penurunan nilai Piutang eks BDL dikarenakan pembayaran/penyelesaian atas aset kredit eks BDL yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN dan pencairan deviden atas saham eks BDL yang telah jatuh tempo pada tahun 2024. Rincian tersebut dapat dilihat pada [lampiran LD16](#).

c. Piutang Bukan Pajak pada satker TK DJKN Pengelola aset KKKS

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar sebesar Rp27.559.163.426 dan Rp31.685.892.655 yang semula tercatat pada akun piutang lain-lain. Piutang Lain-Lain merupakan piutang terhadap pemanfaatan sewa BMN yang berasal dari KKKS oleh Pihak lain yang belum dibayarkan ke kas Negara dan piutang terhadap transfer antar KKKS yang telah melebihi periode 1 tahun dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Pihak Ketiga	Jumlah per 31 Desember 2024	
			USD	Rp
1	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Java*	PT Pertamina (Persero)	1.413.347	22.835.441.824
2	Sewa pada KKKS - Job Pertamina Petrochina East Java*	PT Pertamina (Persero)	68.393	1.105.017.623
3	Sewa pada KKKS - Conocophillips Indonesia Inc,Ltd	Perusda Anambas Sejahtera	-	145.582.002
4	Sewa pada KKKS – PT Pertamina Hulu Rokan	Yayasan Lembaga Pendidikan Islam	-	1.999.695.000
5	Transfer Material Persediaan PT Pertamina EP	PT PHE Ogan Komering	-	22.937.310
6	Transfer Material Persediaan – Medco E&P Grissik Ltd.	Premier Oil Natuna Sea B.V.	33.898	547.694.672
7	Transfer Material Persediaan - PearlOil (Sebuku) Ltd.	Premier Oil Natuna Sea B.V.	952	15.379.848
8	Transfer Material Persediaan - Saka Indonesia Pangkah Ltd.	Premier Oil Natuna Sea B.V.	1.967	31.780.657
9	Transfer Material Persediaan - BP Berau	PT. Pertamina Hulu Energi OSES	51.781	836.625.617
10	Transfer Material Persediaan - PC Ketapang II Ltd.	Premier Oil Natuna Sea B.V.	504	8.135.211
11	Transfer Material Persediaan - EMP Bentu Ltd.	PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang	673	10.873.661
Jumlah				27.559.163.425**

*Kurs konversi mata uang sesuai JISDOR 31 Desember 2024 (Rp16.157)

**selisih Rp1 karena pembulatan

D.2.1.1.15. BAGIAN LANCAR PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp7.718.639.716.238** dan **Rp7.506.739.181.179**, atau mengalami kenaikan sebesar Rp211.900.535.059 (2,82%). Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

No.	Debitur	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA.999.03)	40.000.000.000	33.500.000.000
2.	Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA 999.99)	7.678.639.716.238	7.473.239.181.179
Jumlah		7.718.639.716.238	7.506.739.181.179

1. Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA.999.03)

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya BA 999.03 sebesar Rp40.000.000.000 merupakan bagian dari piutang atas tunggakan Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas dengan total tunggakan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.225.637.648. Total Piutang atas Perum Perumnas sebesar Rp57.225.637.648 tersebut dicatat pada dua akun pada LKBUN, yaitu pada akun Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp40.000.000.000 dan pada akun Piutang Jangka Panjang sebesar Rp17.225.637.648. Piutang yang jatuh tempo setahun ke depan dan piutang tahun sebelumnya

yang belum dibayarkan dicatat pada akun Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya. Sedangkan piutang selain piutang yang jatuh tempo setahun ke depan dicatat pada akun Piutang Jangka Panjang. Rincian Bagian Lancar Piutang jangka Panjang Lainnya BA 999.03 Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tahun	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya Perumnas		
	Angsuran yang Ditetapkan	Pembayaran	Kurang bayar
2020	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000
2021	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000
2022	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000
2023	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000
2024	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000
2025	7.500.000.000	-	7.500.000.000
Jumlah			40.000.000.000

2. Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang (BA 999.99)

Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya BA 999.99 sebesar Rp7.678.639.716.238 terdiri dari:

a. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulungan Lumpur Sidoarjo

Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulungan Lumpur Sidoarjo per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.708.785.209.470 dan Rp2.724.239.754.924, tidak mengalami perubahan. Sehingga rincian Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Penanggulungan Lumpur Sidoarjo adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang	773.382.049.559	773.382.049.559
Bunga	275.324.009.644	275.324.009.644
Denda	1.829.048.547.206	1.829.048.547.206
Pembiayaan	(168.969.396.939)	(153.514.851.485)
Jumlah	2.708.785.209.470	2.724.239.754.924

Piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo telah menjadi kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-53/KN/2023 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALS) a.n Lapindo Brantas, Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan Bakrie. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Penyerah Piutang menghentikan pembebanan bunga, denda, ongkos/biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat pengurusan Piutang Negara diserahkan kepada PUPN.

b. Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya kepada Yayasan Supersemar

Bagian Lancar Piutang jangka panjang Yayasan Supersemar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.969.854.506.768 dan Rp4.748.999.426.255, atau mengalami kenaikan sebesar Rp220.855.080.513 (4,65%). Kenaikan berasal perubahan kurs per tanggal 31 Desember 2024 (dari Rp15.439 menjadi Rp16.157) dari saldo piutang sebesar USD307.597.605,17 (selisih terjadi karena pembulatan). Dengan adanya perubahan kurs per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157, maka saldo piutang per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Dalam mata uang asing (USD)	307.597.605,17	307.597.605,17
Kurs tengah	16.157	15.439

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Konversi (Rp)	4.969.854.506.768	4.748.999.426.255
Jumlah	4.969.854.506.768	4.748.999.426.255

Piutang kepada Yayasan Supersemar merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata antara Negara Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia melawan Yayasan Beasiswa Supersemar sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 140/PK/Pdt/2015 tanggal 8 Juli 2015.

D.2.1.1.16. BAGIAN LANCAR PIUTANG PEMBERIAN PINJAMAN

Jumlah Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp21.286.136.965.214** dan **Rp20.910.716.095.280** mengalami kenaikan sebesar Rp375.420.869.934 (1,80%). Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman meliputi Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman, dan Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua. Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2024 terdiri dari:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	12.672.218.564.890	12.335.896.343.702
2.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	8.293.593.433.556	8.140.563.689.625
3.	Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman untuk Penyesuaian Akrua	320.324.966.768	434.256.061.953
Jumlah		21.286.136.965.214	20.910.716.095.280

D.2.1.1.17. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG BUKAN PAJAK

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp233.653.899.504.306** dan **Rp221.131.800.263.552** mengalami kenaikan sebesar Rp12.522.099.240.753 (5,66%). Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Penyisihan Piutang Dividen (BA 999.03)	123.498.402.913	69.727.182.163
2.	Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman (BA 999.04)	13.495.592.874.640	12.914.325.478.458
3.	Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)	12.350.000.000	12.350.000.000
4.	Penyisihan Piutang Belanja Lain-lain (BA 999.08)	290.261.567.261	289.642.082.960
5.	Penyisihan Piutang Transaksi Khusus (BA 999.99)	219.732.196.659.492	207.845.755.519.971
Jumlah		233.653.899.504.306	221.131.800.263.552

D.2.1.1.17.1. Penyisihan Piutang Dividen (BA 999.03)

Perhitungan Penyisihan Piutang Bukan Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019.

Nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp123.498.402.913, yang terdiri dari:

1. Saldo Penyisihan Piutang Bukan Pajak atas piutang dividen sebelum TB 2023 sebesar Rp42.435.993.522 yang merupakan penyisihan piutang dividen dengan kualitas Macet pada 6 BUMN;
2. Penyisihan piutang tak tertagih dengan kualitas lancar sebesar Rp54.412.409.391 yang berasal dari pengakuan piutang dividen interim PT Bank Rakyat Indonesia Tahun Buku 2024 dengan penyisihan 5 permil; dan
3. Penyisihan atas restrukturisasi Piutang Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas sebesar Rp26.650.000.000.

Piutang Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp26.650.000.000 dan Rp20.150.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai Angsuran Restrukturisasi	Pembayaran	Bagian Lancar	% Penyisihan	Status Piutang	Nilai Penyisihan
2020	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2021	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2022	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2023	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2024	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	10%	Kurang Lancar	650.000.000
2025	7.500.000.000	-	7.500.000.000			-
Jumlah Piutang			32.500.000.000	Jumlah Penyisihan		26.650.000.000

D.2.1.1.17.2. Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman (BA 999.04)

Penyisihan Piutang Pemberian Pinjaman per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.495.592.874.640 dan Rp12.914.325.478.458. Penyisihan Piutang Tak Tertagih berupa Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak, terdiri dari:

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman, dan
- b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman.

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih, sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Piutang Pemberian Pinjaman	7.938.269.850.261	7.519.181.669.315
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya Pemberian Pinjaman	5.557.323.024.379	5.395.143.809.143
Jumlah	13.495.592.874.640	12.914.325.478.458

D.2.1.1.17.3. Penyisihan Piutang Subsidi (BA 999.07)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp12.350.000.000 dan Rp6.175.000.000. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.350.000.000 terdapat pada Kementerian Pertanian yang terdiri dari:

Uraian	Ditjen TP	Total
Piutang Bukan Pajak	12.350.000.000	12.350.000.000
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	12.350.000.000	12.350.000.000
Piutang Bukan Pajak (Netto)	-	-

Berdasarkan tabel diatas, penyisihan piutang tak tertagih-jangka pendek dirubah tingkat kolektibilitas Piutang PNBP pada PT Sang Hyang Seri dari kategori diragukan menjadi macet, sehingga nilai akumulasi penyisihan dan beban penyisihan atas piutang PNBP pada PT Sang Hyang Seri dengan persentase penyisihan 100%. Terkait hal ini, Ditjen Tanaman Pangan telah bersurat dengan Nomor 2321/PW.030/C.1/06/2024 tanggal 5 Juni 2024 tentang penyelesaian kewajiban Tahun 2024.

D.2.1.1.17.4. Penyisihan Piutang Belanja Lain-Lain (BA 999.08)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp290.261.567.261 dan Rp289.642.082.960. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Perbandingan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2024	31 Desember 2023
059	Kementerian Kominfo	-	45.489.439
015	Kementerian Keuangan	26.823.623	31.993.583
018	Kementerian Pertanian	288.901.122.353	288.901.122.353
999	MPP Kartu Prakerja	1.222.617.450	553.313.000
999	SKK Migas	111.003.835	110.164.585
Total		290.261.567.261	289.642.082.960

D.2.1.1.17.5. Penyisihan Piutang Transaksi Khusus (BA 999.99)

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp219.732.196.659.492 dan Rp207.845.755.519.971 merupakan penyisihan Piutang DJPB, Pemanfaatan Aset Eks Pertamina, Aset Kredit Eks BPPN, Aset KKKS, Piutang kepada Yayasan Supersemar dan Piutang Migas. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyisihan Piutang DJPB	538.960.193	667.995.691
Penyisihan Piutang Aset Kredit eks BPPN	211.592.587.482.199	199.878.507.984.609
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset Eks Pertamina	-	-
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset KKKS	25.085.888.948	23.888.526.730
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Piutang kepada Yayasan Supersemar	4.824.639.506.770	4.604.483.426.257
Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS	2.673.844.809.470	2.689.299.354.924
Penyisihan Piutang Sumber Daya Alam	615.500.011.912	648.908.231.760
Total	219.732.196.659.492	207.845.755.519.971

1. Penyisihan piutang tak tertagih piutang DJPB per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp538.960.193 dan Rp667.995.691.
2. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas Aset Kredit Eks BPPN berasal dari penyisihan piutang lain-lain.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berasal dari penyisihan piutang lain-lain. Metode penyisihan piutang tidak tertagih atas aset kredit eks BPPN, aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero), dan Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA (Persero) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Eks BPPN, dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero). Sedangkan metode penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang eks BDL diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 207/PMK.09/2019.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp211.592.587.482.199 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp199.878.507.984.609, terdapat kenaikan sebesar Rp11.714.079.497.590 atau 5,86%.

Rincian Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan di [Lampiran LD17](#).

3. Penyisihan piutang tak tertagih piutang atas pemanfaatan aset eks Pertamina

Mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, atas Piutang PNBPN berupa piutang sewa BMN sebesar Rp1.176.715.352.919 dilakukan penyisihan sebesar 100%. Dengan pertimbangan bahwa masih dilakukan proses pembahasan bersama antara DJKN dengan PT Pertamina EP untuk menentukan besarnya nilai piutang sewa.

Piutang sewa sebesar Rp1.176.715.352.919 telah timbul sejak tahun 2017 karena terdapat perbedaan pengakuan nilai perolehan BMN Eks Pertamina yang disewa oleh Pertamina EP antara DJKN dengan Pertamina EP. DJKN mengakui nilai perolehan BMN yang disewa Pertamina EP didasarkan pada surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 23 Januari 2009 yang menjelaskan nilai objek sewa selama 32 Tahun sebesar Rp9.472.807.941.523, sedangkan Pertamina EP mengakui BMN Eks Pertamina yang disewa sebesar Rp6.630.929.353.338 berdasarkan surat SKK Migas Nomor SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 tanggal 30 Desember 2014 sebagaimana tertuang dalam perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan dengan PT Pertamina EP Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 yang menyatakan objek sewa menyewa adalah BMN yang berasal dari kelompok aset eks KKKS Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP berupa fasilitas produksi, bangunan, HBM bergerak, dan aset lain-lain senilai Rp6.630.929.353.338.

Mengingat telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka penyisihan piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

Mengingat PT Pertamina EP telah melakukan pembayaran pada 2024 atas sewa penggunaan aset Eks Pertamina sebesar Rp207.216.542.292, maka atas penyisihan piutang disesuaikan menjadi Rp0.

4. Penyisihan piutang tak tertagih Aset KKKS

Penyisihan piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp25.085.888.948 dan Rp23.888.526.730. Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 berasal dari:

- a. Piutang kategori Macet (Lebih dari 3 tahun sejak tahun tempo), dengan Penyisihan Piutang 100% pada 3 Piutang dengan total nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp24.086.041.448; dan
 - b. Piutang kategori Kurang Lancar, dengan Penyisihan Piutang 10% pada 10 Piutang dengan total nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp999.847.500.
5. Penyisihan piutang tak tertagih kepada Yayasan Supersemar
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih kepada Yayasan Supersemar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.824.639.506.770 dan Rp4.604.483.426.257, atau mengalami kenaikan sebesar Rp220.156.080.513 (4,78%). Penurunan tersebut disebabkan adanya Koreksi Penyajian Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp220.156.080.513. Koreksi tersebut antara lain disebabkan adanya koreksi kurang selisih kurs sebesar Rp220.855.080.513 dan koreksi tambah dari penilaian ulang barang sitaan Yayasan Supersemar oleh KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan sebesar Rp699.000.000 pada tanggal 31 Desember 2024. Nilai agunan atau nilai barang sitaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp145.214.999.998 naik Rp699.000.000 dari periode sebelumnya sebesar Rp144.515.999.998. Nilai tersebut merupakan nilai barang sitaan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (ditetapkan sebesar 60%).
6. Penyisihan Piutang Pemanfaatan Aset BPLS
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang Bukan Pajak Aset BPLS per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.673.844.809.470 sedang nilai penyisihan per 31 Desember 2023 adalah Rp2.689.299.354.924, artinya Penyisihan atas Piutang Tidak Tertagih telah dikenakan tarif 100% atau kategori dengan kualitas piutang macet karena piutang tidak dilunasi lebih dari 3 (tiga) tahun sejak jatuh tempo.
- Perubahan saldo penyisihan ini berdasarkan hasil kesepakatan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS. Adapun nilai Penyisihan Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Jangka Pendek Lainnya Penanganan Lumpur Sidoarjo ini diperoleh dari jurnal koreksi BPK.
- Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut :
- a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor: 00347/2.00113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar minus 137.276.401.432 rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif.
 - b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor: 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000 rupiah dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang macet.
7. Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNBPN Sumber Daya Alam per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp615.500.011.912 dan Rp648.908.231.760 merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek migas dari piutang minyak bumi, gas bumi dan migas lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Rincian penyisihan piutang berdasarkan kualitas terdiri dari:

Kualitas Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kualitas Lancar	75.432.137.277	77.938.376.804
Kualitas Kurang Lancar	7.645.385.747	21.772.128.774
Kualitas Diragukan	83.092.655.537	536.954.604.137
Kualitas Macet	449.329.833.351	12.243.122.045
Jumlah	615.500.011.912	648.908.231.760

D.2.1.1.18. PIUTANG PFK

Piutang PFK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp109.652.841 mengalami penurunan sebesar Rp109.652.841 (100,00%). Piutang tersebut berasal dari Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Piutang Dari	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan Pegawai (118111)	-	-
2	Piutang PFK 8% Gaji (118114)	-	-
3	Piutang Pengembalian Kelebihan Penyaluran PFK Tahun Anggaran Yang Lalu (118122)	-	109.652.841
4	Piutang Dana PFK Iuran Jaminan Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain (118123)	-	-
5	Piutang PFK 8% Gaji TNI/PNS Kemhan dan Polri/PNS Polri (118124)	-	-
	Jumlah	-	109.652.841

D.2.1.1.19. PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.490.243.783 dan Rp1.216.445.390 mengalami kenaikan sebesar Rp1.273.798.393 (104,71%). Persediaan yang terdapat pada SKK Migas, Setneg dan BP Batam tersebut merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perbandingan persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	1.271.525.548	1.202.342.988
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	11.860.315	8.720.208
3	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.202.040.000	-
4	Persediaan Lainnya	4.817.920	5.382.194
	Jumlah	2.490.243.783	1.216.445.390

D.2.1.2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.391.554.633.530.362 dan Rp4.077.230.147.021.115. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp314.324.486.509.247 atau 7,71% dari periode sebelumnya. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp283.818.161.204.397 dan Rp297.456.952.607.978. Investasi Non Permanen terdiri dari Dana Bergulir sebesar Rp16.831.926.939.422, Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebesar Rp1.404.183.720.277, Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya sebesar Rp269.364.784.080.765 dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya sebesar Rp974.366.095.513.

Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp4.107.736.472.325.965 dan Rp3.779.773.194.413.137. Investasi Permanen terdiri dari Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah, Badan Layanan Umum, dan Lainnya.

D.2.1.2.1. DANA BERGULIR

Nilai Dana Bergulir per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.831.926.939.422 dan Rp19.553.196.920.303 mengalami penurunan sebesar Rp2.721.269.980.881 (13,92%). Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dana bergulir yang dilaporkan merupakan dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran 999.03 atau dana bergulir yang bersumber dari Bagian Anggaran Lainnya, dan sedang dalam proses perguliran atau outstanding di masyarakat atau pihak ketiga lainnya.

Nilai dana bergulir yang disajikan sesuai dengan rincian:

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	5.197.083.516.907	5.468.632.719.703
2	BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	621.633.119.508	3.890.340.379.540
3	BLU Pusat Investasi Pemerintah	8.399.546.659.356	8.019.775.521.545
4	BLU Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	1.289.162.028.597	874.548.562.835
5	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)	1.308.416.308.939	1.283.355.073.501
6	BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	16.085.306.116	16.544.663.179
JUMLAH		16.831.926.939.422	19.553.196.920.303

D.2.1.2.1.1. Dana Bergulir LPDB KUMKM

Dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp5.197.083.516.907 dan Rp5.468.632.719.703.

Adapun rincian detail dana bergulir pada BLU LPDB KUMKM per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN	JUMLAH
Piutang Dana Bergulir	4.855.061.286.975
NRB Dana Bergulir BA 044 sd 31 Desember 2024	342.022.229.929
Jumlah	5.197.083.516.904*

*Selisih Rp3 karena pembulatan

Nilai Piutang Dana Bergulir 31 Desember 2024 sebesar Rp5.197.083.516.907 merupakan nilai piutang pokok mitra yang didalamnya tidak termasuk pembayaran piutang oleh Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah, Jamkrida Cabang Khusus Jakarta dan Jamkrida Riau) atas klaim subrogasi mitra. Nilai Realisasi Bersih Dana Bergulir merupakan potensi pengembalian atas dana bergulir yang telah dicairkan dari Kementerian Koperasi dan UKM kepada mitra Koperasi dan UKM, dimana pengembalian dana tersebut dikembalikan kepada LPDB-KUMKM sebagai Pengalihan Dana Bergulir. Besarnya Nilai Realisasi Bersih dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, tertagihnya dana bergulir dari mitra Koperasi dan UKM (sebagai pengalihan) serta piutang lancar dan piutang tidak lancar. LPDB-KUMKM mendapatkan Nilai Realisasi Bersih Dana Bergulir dari Biro Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM yang merupakan hasil dari laporan masing-masing Deputi Pelaksana Program, LPDB-KUMKM melaksanakan rekonsiliasi kas terkait dana pengalihan yang telah masuk ke rekening LPDB-KUMKM.

Adapun dalam laporan keuangan BA 999.03 klaim yang dicairkan oleh LPK dicatat sebagai penambah Dana Kelolaan BLU sehingga menambah juga nilai di kewajiban jangka panjang/kewajiban subrogasi. Klaim subrogasi sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Uraian	Dokumen PKS		Total
	Nomor	Tanggal	
Koperasi Kampus Unsoed (klaim tahun 2022)	025/SP3-JJT/III/2020	18 Maret 2020	860.633.286
KSU Monjari 45 (klaim tahun 2023)	064/SP3-JJT-XII/2020	8 Desember 2020	348.412.800
KJKS BMT Bina Umat Mulia (klaim tahun 2023)	2731/C.19/VIII/2017	21 Agustus 2017	140.961.811
Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonesia (klaim tahun 2023 dan 2024)	1700/DR-DP/JR/XII/2023	27 Desember 2023	784.606.643
Jumlah			2.134.614.540

Berdasarkan tabel di atas, klaim subrogasi atas Koperasi Kampus Unsoed sebesar Rp860.633.286 telah dicatat pada tahun 2022 dan terdapat klaim subrogasi atas KSU Monjari 45 sebesar Rp348.412.800, KJKS BMT Bina Umat Mulia sebesar Rp140.961.811, dan Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonusa sebesar Rp400.000.000 telah dicatat pada tahun 2023. Serta pada tahun 2024 terdapat klaim subrogasi kembali atas mitra Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonusa sebesar Rp384.606.643 dengan demikian total klaim subrogasi atas mitra Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonusa sebesar Rp784.606.643.

Mutasi dana bergulir per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

MUTASI DANA BERGULIR PER 31 Desember 2024	Nilai
Piutang Dana Bergulir Per 1 Januari 2024	5.468.632.719.703
Mutasi Tambah:	
- Penyaluran Tahun 2024	1.907.594.085.291
- Koreksi Pencatatan atas Lebih Bayar Piutang Dana Bergulir	379.661
Mutasi Kurang:	
- Mutasi NRB 2024	(5.246.160.574)
- Pengembalian Pokok Tahun 2024	(2.084.018.911.415)
- Crash program 2024	(13.972.011.699)
- PSBDT 2024	(1.746.571.770)
- Koreksi pencatatan pembayaran pokok mitra	(27.255.330)
- Pembayaran Uang Pengganti Atas Piutang mitra yang disetorkan oleh Kejaksaan	(74.119.120.599)
- Koreksi atas transaksi pembayaran angsuran 2 koperasi (Sejahtera Padang dan Makmur Mandiri) ke LPDB yang teridentifikasi di periode TA 2025	(13.636.364)
Piutang Dana Bergulir Per 31 Desember 2024	5.197.083.516.904*

*Selisih Rp3 karena pembulatan

Adapun penjelasan dari mutasi-mutasi yang disajikan pada tabel di atas sebagai berikut:

1. Mutasi tambah
 - a. Nilai sebesar Rp1.907.594.085.291 merupakan dana bergulir yang telah tersalurkan ke koperasi periode Januari sampai dengan 31 Desember 2024; dan
 - b. Nilai sebesar Rp379.661 merupakan nilai koreksi atas pencatatan lebih bayar pada piutang dana bergulir.
2. Mutasi kurang
 - a. Nilai sebesar Rp5.246.160.574 merupakan nilai mutasi NRB periode Januari sampai dengan 31 Desember 2024. NRB berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM dan telah dicatat LPDB-KUMKM pada akun dana bergulir sesuai dengan Nota Dinas Asisten Deputi Pembiayaan dan

Perlindungan Koperasi Kementerian Komerasi dan UKM Nomor 001/D.1.1/PK.01.00/I/2025 tanggal 02 Januari 2025.

- b. Nilai sebesar Rp2.084.018.911.415 merupakan pengembalian dana bergulir dari koperasi ke LPDB-KUMKM dari periode Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
- c. Nilai sebesar Rp13.972.011.699 merupakan nilai atas mitra yang mengikuti Crash Program pada Tahun 2024 dari Januari sampai dengan 31 Desember 2024.
- d. Nilai sebesar Rp1.746.571.770 merupakan nilai atas koperasi yang terbit surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Tahun 2024.
- e. Nilai sebesar Rp27.255.330 merupakan nilai koreksi atas pencatatan pembayaran pokok mitra.
- f. Nilai sebesar Rp74.119.120.599 merupakan nilai BAST atas uang pengganti piutang koperasi sebanyak 30 koperasi yang dilimpahkan penanganan piutangnya kepada Kejaksaan.
- g. Nilai sebesar Rp13.636.364 merupakan koreksi atas transaksi pembayaran angsuran dana bergulir 2 koperasi (Sejahtera Padang dan Makmur Mandiri) ke rekening LPDB yang telah diidentifikasi di periode TA 2025.

D.2.1.2.1.2. Dana Bergulir Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT

Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp621.633.119.508 dan Rp3.890.340.379.540 yang merupakan semua hak atau klaim pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran.

Rincian Dana Bergulir Kementerian Pekerjaan Umum berupa piutang kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang timbul dari penggunaan dana bergulir untuk pengadaan tanah jalan tol yang Perjanjian Pengadaan Jalan Tol nya telah ditandatangani antara BPJT dan BUJT. Piutang pada BUJT akan jatuh tempo dan dibayar kembali oleh BUJT kepada BLU BP Set BPJT setelah pengadaan tanah selesai dan/atau jalan tol telah dioperasikan, mana yang lebih dahulu tercapai.

Rincian Dana Bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol yang digulirkan dan menjadi piutang pada BUJT adalah sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	45.804.619.447	142.058.292.184
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	32.556.096.062	173.730.172.460
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	29.735.705.526	96.465.054.626
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	-	176.007.138.972
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	-	313.993.673.322
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	-	691.921.936.197
PT. Jasamarga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	303.802.866.247	750.225.629.202
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	192.353.001.405	548.617.667.026
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	-	525.448.216.382
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways / Cibitung-Cilincing	-	285.996.789.617
PT Cimanggis Cibitung Tollway / Cimanggis-Cibitung	-	168.494.978.731
Jumlah	621.633.119.508	3.890.340.379.540

Rincian nilai penyaluran dan pengembalian pokok dana bergulir per 31 Desember 2024 Audited sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran Pokok	Pengembalian Pokok
2007	179.564.079.598	-
2008	461.561.311.518	105.387.690.235
2009	375.880.107.714	57.450.000.000
2010	938.767.004.911	327.292.606.467
2011	753.022.593.125	-
2012	571.561.373.299	154.792.210.168
2013	1.204.414.669.524	300.000.000.000
2014	1.585.543.081.210	520.476.479.788
2015	41.988.563.340	254.266.360.343
2016	652.312.381.419	306.765.382.473
2017	108.061.886.000	230.112.102.608
2018	-	300.496.638.650
2019	-	43.643.786.000
2020	-	1
2021	-	-
2022	-	22.000.000.000
2023	-	359.653.415.387
2024	-	3.268.707.260.033
Jumlah	6.872.677.051.658	6.251.043.932.153
Saldo dana bergulir		621.633.119.505*

*Selisih Rp3 karena pembulatan

Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, maka sejak bulan Januari Tahun 2015 pembayaran UGR menggunakan dana APBN sehingga penggunaan dana bergulir BLU menjadi terhenti.

Perkembangan Penting Sehubungan dengan Penyaluran Dana Bergulir:

Berdasarkan Surat Kepala BPJT No. HK02.03-P/95 tanggal 7 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama dan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor HK.02.03-Mn/539 tanggal 3 Juli 2015 dilakukan Pengakhiran Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) ruas Semarang-Batang dengan nama BUJT PT Marga Setiapuritama.

Sebagai tindak lanjut pengakhiran PPJT, Kepala Satker BLU BP Set BPJT telah menyampaikan surat nomor KU.02.03.Pt5/Kasatker/2334 tanggal 9 Juli 2015 kepada PT Marga Setiapuritama untuk Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian Layanan Dana Bergulir. Dan sebagai konsekwensinya adalah segala piutang BLU BP Set BPJT kepada PT Marga Setiapuritama menjadi jatuh tempo seketika dan perhitungan Nilai Tambah dan Denda Nilai Tambah dihentikan sejak tanggal 7 Juli 2015.

Selanjutnya Kepala BLU BP Set BPJT mengirim Surat ke Kepala BPJT agar piutang tersebut diatas dijadikan kewajiban bagi BUJT baru yang mendapat hak pengusahaan untuk ruas tersebut.

Ruas Semarang-Batang ditender ulang dan telah dibentuk BUJT baru untuk menyelesaikan ruas jalan tol tersebut yaitu PT Jasamarga Semarang Batang sebagai pemenang tender dengan PPJT Nomor 01/PPJT/BPJT/2016 tanggal 27 April 2016.

BUJT lama yaitu PT Marga Setiapuritama mengajukan permohonan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diadakan dan diselenggarakan pemeriksaan arbitrase (permohonan arbitrase) atas perselisihan atau sengketa antara BPJT dan PT Marga Setiapuritama, dengan surat nomor

193/MSP-1601/AF/VIII/16 tanggal 18 Agustus 2016, dan telah didaftarkan di Sekretariat BANI dengan Register Nomor 881/VIII/ARB-BANI/2016 tanggal 18 Agustus 2016. BANI telah memberikan keputusan pada tanggal 13 September 2017 namun PT Marga Setiapuritama tidak puas dengan keputusan BANI dan kemudian menggugat keputusan BANI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI dengan Register Nomor 504/Pdt.G.Arb/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 9 Agustus 2017 dan PN Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 28 September 2017.

Kemudian PT Marga Setiapuritama mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Februari 2018. PN Jakarta Selatan menolak gugatan tersebut pada tanggal 30 Agustus 2018. PT Marga Setiapuritama kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Nomor Register 199/PDT/2019/PT.DKI dan PT DKI Jakarta telah memberikan keputusan pada tanggal 30 April 2019 yang pada intinya menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta.

Upaya penyelesaian piutang PT Marga Setiapuritama telah dilakukan oleh Satker Set BPJT. Adapun upaya terakhir yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 Direktur Badan Usaha Direktorat Jenderal Hukum Umum Kemenkumham memberikan tanggapan melalui surat nomor AHU.7 -AH.01-2982 perihal Pemberian Data dan Informasi PT Marga Setiapuritama yang memberitahukan bahwa akses PT Marga Setiapuritama sedang terblokir karena belum melaporkan pemilik manfaat/beneficial ownership (BO) sesuai Perpres No. 13 Tahun 2018 tentang Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

D.2.1.2.1.3. Dana Bergulir Pusat Investasi Pemerintah

Nilai Dana Bergulir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada BLU PIP sebesar Rp8.399.546.659.356 dan Rp8.019.775.521.545 terjadi kenaikan sebesar Rp379.771.137.811 atau 4,74%. Kenaikan tersebut karena Dana Bergulir telah disalurkan kepada penyalur/masyarakat. Realisasi tersebut berupa pemberian pinjaman kepada beberapa Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu sebagai berikut:

No	LKBB/ Linkage	Outstanding
		31 Desember 2024
1	PT. PNM	7.399.999.999.976
2	Koperasi Syariah Annisa	400.000.000
3	KSP KARYA BAITUL MANDIRI	39.227.666.669
4	PT. USAHA PEMBIAYAAN RELIANCE INDONESIA	6.752.138.848
5	LKMA Mojo Agung	545.000.004
6	LKMA Tani Makmur	1.025.000.000
7	PT LKMS MAHIRAH MUAMALAH (Syariah)	2.384.666.659
8	KSPPS BMT AL AMANAH SINJAI (Syariah)	163.333.341
9	Kopdit Pelangi Kasih	3.073.599.404
10	Koperasi Al Manar	2.709.999.996
11	KSPPS RAYA BANDA MADANI	19.289.417.992
12	KSPPS Artha Bahana Syariah	10.013.793.108
13	KSP Jujur Utama Mandiri	2.571.428.569
14	KSP Sila Mukti	2.005.194.808
15	KSP Sari Sedana Bali	1.942.857.138
16	KSP KUD Mintorogo	5.994.996.444

No	LKBB/ Linkage	Outstanding
		31 Desember 2024
17	SPPS Abdi Kerta Raharja	5.899.487.178
18	KSP GUNA PRIMA DANA	1.866.666.662
19	PT LKM Gentha Persada	673.777.780
20	KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	5.677.374.349
21	KSU Gapoktan Al Basiko II	760.000.000
22	SPPS BMT Jati	270.833.337
23	PT LKM Batang	6.974.358.974
24	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	100.689.655.169
25	KSPPS Mitra Dhuafa Syariah	28.622.222.221
26	Koperasi Jasa Karya Abadi	7.000.000.000
27	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	14.219.999.997
28	KSP Permata Siaga	733.333.336
29	KSPPS BMT Al Ishlah	220.000.000
30	KSPPS BMT Ibaadurrahman	3.334.222.219
31	Koperasi Konsumen Central Utama Mandiri	733.333.336
32	SPPS BMT Bina Auladi Mandiri	1.303.333.331
33	KSPPS BMT Ayyasi	728.333.331
34	BMT Niaga Utama	2.300.000.000
35	BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	1.150.000.000
36	KSP Karya Mandiri	2.000.000.002
37	KSP Permata Utama	2.500.000.000
38	KSU Krama Bali	1.000.000.000
39	KSPPS BMT El Itqan	791.666.665
40	KSPPS Muhammadiyah Surya Mandiri	4.600.000.001
41	KSPPS BMT Al Fataya	1.799.999.999
42	KSPPS Nusa Ummat Sejahtera	144.999.999.999
43	KSP Mitra Dhuafa	281.931.034.483
44	Koperasi Dana Raharja	2.320.000.000
45	KSPPS BMT Ampek Jurai	760.000.000
46	KSP Citra Mandiri	1.000.000.000
47	KM Sedasa	500.000.000
48	Koperasi BMT Muhammadiyah (Sumbar)	2.000.000.000
49	KSPPS BMT Harapan Bersama Kalingga	4.000.000.000
50	KSPPS BMT Huwaiza	500.000.000
51	KSPPS BMT Alhikmah Semesta	30.000.000.000
52	PT LKM BKD Pekalongan	2.000.000.000
53	PT BAV - Langsung	15.000.000.000
54	Pembiayaan Direct Lending	4.000.000
55	PT BAV - Linkage	220.583.934.070
Jumlah		8.399.546.659.395*

*Selisih Rp39 karena akumulasi pembulatan

D.2.1.2.1.4. Dana Bergulir Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Pos Dana Bergulir berasal dari saldo akhir Dana Bergulir pada buku besar akrual yang merupakan transaksi penyaluran dana bergulir oleh BLU kepada masyarakat yang sumber dananya berasal dari APBN (BA BUN Investasi). Jumlah Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir per 31 Desember

2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.289.162.028.597 dan Rp874.548.562.835, mengalami peningkatan Rp414.613.465.762 dari tahun 2023.

Tahun	Penyaluran Dana Bergulir	Akumulasi Penyaluran Dana Bergulir
2017	11.125.000.000	11.125.000.000
2018	215.732.780.000	226.857.780.000
2019	182.530.860.000	409.388.640.000
2020	192.674.433.490	602.063.073.490
2021	270.553.725.000	872.616.798.490
2022	133.229.750.000	1.005.846.548.490
2023	328.512.512.900	1.334.359.061.390
2024	509.830.181.125	1.844.189.242.515
Pengembalian Pokok		555.027.213.918
Outstanding Dana Bergulir		1.289.162.028.597

Jumlah Dana Bergulir tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Selama Tahun 2024 per Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, LPMUKP telah melakukan pencairan Dana Bergulir sebesar Rp509.830.181.125 kepada 146 Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Total keseluruhan pencairan Dana Bergulir sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.844.189.242.515 dengan total debitor sebanyak 3.158 pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang mencakup Koperasi-KP, UMKM-KP dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan.

D.2.1.2.1.5. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup – Dit. SMI

Saldo dana bergulir pada BLU BPD LH (Dit. SMI) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.308.416.308.939 dan Rp1.283.355.073.501 mengalami kenaikan sebesar Rp25.061.235.438 atau 1,95% dari saldo 31 Desember 2023.

Rincian mutasi dana bergulir BLU BPD LH adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nominal
1	Saldo Awal Dana Reboisasi Sektor Kehutanan TA 2024	1.283.355.073.501
2	Penyaluran Dana Reboisasi Sektor Kehutanan kepada Debitur	147.396.893.222
3	Pengembalian Dana Reboisasi Sektor Kehutanan dari Debitur	(111.380.121.357)
4	Pengembalian belum teridentifikasi (dicatat sebagai pengurang pokok dana bergulir)	(1.693.259.363)
5	Transaksi belum direkonsiliasi dari debitor yang restrukturisasi (dicatat sebagai pengurang Pokok dana bergulir/outstanding)	(346.126.732)
6	Penyesuaian akibat crash program berupa keringanan yang diterima debitor yang belum dilakukan rekonsiliasi (dicatat sebagai pengurang pokok dana bergulir)	(6.024.437.703)
7	Penyesuaian akibat crash program yang dibayar debitor yang belum dilakukan rekonsiliasi (dicatat sebagai pengurang pokok dana bergulir)	(1.988.239.715)
8	Penyesuaian akibat penghapusan secara bersyarat terhadap piutang (PSBDT) berupa keringanan yang diterima debitor yang belum dilakukan rekonsiliasi (dicatat sebagai pengurang pokok dana bergulir)	(903.472.913)
9	Pembulatan	(1)
Total		1.308.416.308.939

D.2.1.2.1.6. Dana Bergulir Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

KPA BA 999.03 BLU BPD LH ditetapkan melalui KMK nomor 89/KMK.06/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Pada tanggal 2 November 2022 dilakukan pemindahbukuan dana DNS dari Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP) kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) sesuai dengan BAST Nomor BA-14/KN.3/2022 dan Nomor BAST-24/BPD LH.2/2022 tanggal 2 November 2022, sehingga pencatatan dana DNS dicatat oleh KPA BLU BPD LH.

Nilai dana bergulir pada KPA BLU BPD LH sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.085.306.116 dan Rp16.544.663.179, terdapat penurunan sebesar Rp459.357.063 dari nilai per 31 Desember 2023. Adapun rincian dana DNS eks KLH dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Rp
Nilai Dana Bergulir 31 Desember 2023	Rp16.544.663.179
Pengembalian dari Debitur selama tahun 2024 yang diakui sebagai Pokok	(Rp459.841.375)
Retur ke debitur selama tahun 2024	Rp484.312
Nilai Dana Bergulir DNS akhir Per 31 Desember 2024	Rp16.085.306.116

D.2.1.2.2. DANA BERGULIR DIRAGUKAN TERTAGIH

Nilai dana bergulir diragukan tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.404.183.720.277** dan **Rp1.562.930.032.200** mengalami penurunan sebesar Rp158.746.311.923 (10,16%). Akun dana bergulir diragukan tertagih merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir. Secara rinci, penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih dibentuk pada entitas sebagai berikut:

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM	732.408.871.754	788.878.222.350
2	Satker BUN Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol	77.806.059.690	404.676.785.693
3	BLU LPMUKP	68.004.075.492	67.200.566.340
4	BLU BPD LH (Dit. SMI)	422.224.809.462	245.257.000.363
5	BLU PIP	87.654.597.764	40.372.794.275
6	BLU BPD LH	16.085.306.116	16.544.663.179
	JUMLAH	1.404.183.720.278*	1.562.930.032.200

*selisih Rp1 karena pembulatan

Perhitungan penyisihan piutang dana bergulir diragukan tertagih sesuai dengan metode yang terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

1. BLU LPDB KUMKM

Nilai Dana Bergulir yang Diragukan Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp732.408.871.754 dan Rp788.878.222.350.

Dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk di dalamnya dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah tunggakan pokok piutang.

Rincian perhitungan penyisihan piutang diragukan tertagih sebagai berikut:

URAIAN	Nilai
Penyisihan Piutang Dana Bergulir Tahun 2023	788.878.222.350
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester I Tahun 2024	(865.887.130)
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir atas Penghapusan Crash Program Triwulan III 2024	(3.187.720.100)
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir atas Penghapusan Crash Program Triwulan IV 2024	(3.567.104.126)
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir atas Penghapusan Piutang PSBDT	(1.747.480.861)
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir atas penghapusan piutang atas uang pengganti Kejaksaan	(71.581.651.894)
Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir Semester II 2024	24.494.129.879
Koreksi Dana Bergulir Diragukan Tertagih atas transaksi pembayaran angsuran 2 koperasi (Sejahtera Padang dan Makmur MAndiri) e LPDB yang teridentifikasi di periode TA 2025	(13.636.364)
Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2024	732.408.871.754

Dana bergulir yang diragukan realisasinya sebesar Rp732.408.871.754 disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya adalah resiko bisnis (kegagalan bisnis), karakter pengurus dan/atau manager, dan fraud manajemen/pengurus. Atas penyebab tersebut, dalam rangka pembinaan terhadap mitra LPDB-KUMKM yang telah menerima dana bergulir dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet telah dilakukan upaya penanganan diantaranya monitoring pembayaran piutang mitra, monitoring komitmen pembayaran piutang mitra, *rescheduling* dan *restructuring*. Berikut ini rincian perhitungan penyisihan diragukan tertagih sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dalam Bentuk Tagihan.

Klasifikasi	Dana Bergulir 31 Desember 2024	Tarif Penyisihan	Dana Bergulir 31 Desember 2024 yang dapat diperhitungkan	Nilai Jaminan	Dana Bergulir diragukan Tertagih per 31 Desember 2024
Lancar	3.594.008.683.390	0,50%	17.970.043.417	5.281.803.318.266	93.723.568
Lancar CP	-	0,50%	-	240.000.000	-
Lancar Kejaksaan	1	0,50%	-	5.808.422.931	-
Lancar PSBDT	-	0,50%	-	-	-
Kurang Lancar	69.939.118.500	10%	6.993.911.850	142.901.251.076	-
Diragukan	18.512.035.200	50%	9.256.017.600	26.142.086.744	-
Macet	1.156.397.692.501	100%	1.156.397.692.501	585.840.885.610	717.523.573.689
Macet CP	221.208.000	100%	221.208.000	818.147.200	-
Macet Kejaksaan	15.982.549.384	100%	15.982.549.384	1.693.000.000	14.791.574.496
Lunas	-	100%	-	23.542.700.801	-
Lunas CP 2024	-	100%	-	19.307.380.000	-
Jumlah	4.855.061.286.976		1.206.821.422.752	6.088.097.192.628	732.408.871.753*

*selisih Rp1 karena pembulatan

2. BLU Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengelola Jalan Tol

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp77.806.059.690 dan Rp404.676.785.693. Terjadi penurunan sebesar Rp326.870.726.003 atau 80,77% dari nilai penyisihan periode sebelumnya yang disebabkan oleh perubahan kualitas dana bergulir.

Rincian Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

BUJT/Ruas Jalan Tol	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	4.580.461.945	14.205.829.218
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang – Batang	3.255.609.606	17.373.017.246
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	2.973.570.553	9.646.505.463
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	-	17.600.713.897
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	-	31.399.367.332
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	-	69.192.193.620
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	30.380.286.625	75.022.562.920
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	19.235.300.141	54.861.766.703
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	-	52.544.821.638
PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways/Cibitung-Cilincing	-	28.599.678.962
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	-	16.849.497.873
Jumlah	77.806.059.691*	404.676.785.693

*selisih Rp1 karena pembulatan

3. BLU LPMUKP

Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya. Nilai Investasi Jangka Panjang berupa Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp68.004.075.492 dan Rp67.200.566.340. Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih meningkat Rp803.509.152 dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2023.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada 31 Desember 2024 senilai Rp68.004.075.492 merupakan nilai penyisihan piutang pokok dari hasil akumulasi outstanding pokok senilai Rp1.289.162.028.597 dikurang dengan nilai penyisihan jaminan sesuai kualitas piutang setiap debitor.

Rincian berdasarkan kolektibilitas dijelaskan sebagai berikut:

Kolektibilitas	Nominal Piutang	Outstanding setelah penyesuaian	Tarif Penyisihan	Penyisihan
Lancar	776.776.308.937	399.067.603.212	0,5%	1.995.338.016
Kurang Lancar	75.988.136.920	22.130.422.735	10%	2.213.042.274
Diragukan	8.736.551.134	623.933.999	50%	311.967.000
Macet	427.661.031.606	63.483.728.202	100%	63.483.728.202
Jumlah	1.289.162.028.597	485.305.688.148		68.004.075.491*

*selisih Rp1 karena pembulatan

4. BLU BPD LH (Dit. SMI)

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp422.224.809.462 dan Rp245.257.000.363, mengalami kenaikan sebesar Rp176.967.809.099 atau 72,16% dari tahun sebelumnya. Pada BLU BPD LH mulai tahun 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang.

Perhitungan nilai dana bergulir diragukan tertagih pada BLU BPD LH disajikan pada tabel berikut:

Kualitas Piutang	Outstanding Awal	Pengurangan Nilai Jaminan	Saldo Setelah Dikurangi Jaminan	Tarif	Penyisihan Akhir
Lancar	697.569.955.980	177.006.712.267	520.563.243.713	0,50%	2.602.816.219
Kurang Lancar	75.480.938.366	33.087.120.000	42.393.818.366	10%	4.239.381.837
Diragukan	14.816.203.251	421.808.000	14.394.395.251	50%	7.197.197.626
Macet	543.562.428.074	112.363.797.561	431.198.630.513	100%	431.198.630.513
Lunas Pokok	-	-	-		-
Total	1.331.429.525.671	322.879.437.828	1.008.550.087.843		445.238.026.194
Dana DNS (tidak menambah beban penyisihan)					(16.085.306.116)
Penyelesaian dana bergulir diragukan tertagih akibat crash program					(6.024.437.703)
Penyelesaian dana bergulir diragukan tertagih akibat penghapusan secara bersyarat terhadap piutang (PSBDT)					(903.472.913)
Dana bergulir diragukan tertagih 2024					422.224.809.462

Berdasarkan pendataan yang dilakukan, nilai perhitungan jaminan ini akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang saat ini tengah dilakukan.

5. BLU PIP

Nilai Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU PIP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp87.654.597.764 dan Rp40.372.794.275, mengalami kenaikan sebesar Rp47.281.803.489 atau 117,11% dari nilai penyisihan per 31 Desember 2023.

BLU PIP baru melaksanakan penyisihan dana bergulir diragukan tertagis pada tahun 2021 sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non permanen Dalam Bentuk Tagihan.

Rincian Perhitungan dana bergulir diragukan tertagih sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Outstanding	Tarif	Dana Bergulir diragukan tertagih
		Penyisihan	
Lancar	8.351.516.162.166	0,50%	41.757.580.811
Kurang Lancar	1.823.908.044	10%	182.390.804
Diragukan	983.926.072	50%	491.963.036
Macet	45.222.663.113	100%	45.222.663.113
Jumlah	8.399.546.659.395		87.654.597.764

6. BLU BPD LH

Nilai dana bergulir diragukan tertagih pada KPA BLU BPD LH per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.085.306.116 dan Rp16.544.663.179, nilai tersebut berasal dari pengalihan dana DNS eks KLH yang disisihkan seluruhnya, dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2024
Nilai Dana Bergulir 31 Desember 2023	Rp16.544.663.179
Pengembalian dari Debitur selama tahun 2024 yang diakui sebagai Pokok	(Rp459.841.375)
Retur ke debitur selama tahun 2024	Rp484.312
Nilai Dana Bergulir DNS akhir TA 2024	Rp16.085.306.116
Dana Bergulir diragukan tertagih akhir TA 2024	Rp16.085.306.116

D.2.1.2.3. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN LAINNYA

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp269.364.784.080.765 dan Rp280.412.334.935.034 mengalami penurunan sebesar

Rp11.047.550.854.269 (3,94%).

Investasi nonpermanen Lainnya merupakan investasi nonpermanen yang dimiliki oleh Pemerintah selain Dana Bergulir. Rincian Investasi Nonpermanen Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
IP PEN Kementerian BUMN	9.693.749.999.411	9.912.499.999.411
UAIP	278.424.972.731	278.424.972.731
UAKPA Dit SMI (BLU LPDP, BP Tapera, BPDPKS)	233.746.918.386.731	240.529.752.919.543
UAKPA BLU LDKPI	8.038.681.014.148	8.000.000.000.000
PPA DJPK Pinjaman PEN Daerah	17.607.009.707.744	21.691.657.043.349
Jumlah	269.364.784.080.765	280.412.334.935.034

1. Investasi Pemerintah Pemulihan Ekonomi Nasional

Investasi Pemerintah Non Permanen lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional adalah masing-masing sebesar Rp9.693.749.999.411 dan Rp9.912.499.999.411. Terdapat penurunan investasi sebesar Rp218.750.000.000 atau 2,21% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 karena adanya pembayaran cicilan pokok oleh PT KAI Persero sebesar nilai tersebut.

Program pemulihan ekonomi nasional baru dijalankan pada tahun 2020 sejalan dengan kebijakan Pemerintah yang telah menetapkan Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Non Alam tingkat nasional, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020. Adapun investasi pemerintah non permanen yang telah tersalurkan kepada BUMN penerima adalah sebagai berikut:

Penerima Investasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.843.750.000.000	3.062.500.000.000
Perum Perumnas	650.000.000.000	650.000.000.000
PT Krakatau Steel	2.200.000.000.000	2.200.000.000.000
PT Perkebunan Nusantara III	3.999.999.999.411	3.999.999.999.411
Jumlah	9.693.749.999.411	9.912.499.999.411

- PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp3.500.000.000.000 untuk mendanai biaya operasional dan mendukung kinerja perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-13/KN/2020 sesuai Surat Ketetapan Pencairan (SKP) Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/12/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-77/PB/PB.3/2020. Saat ini sudah dilakukan pembayaran cicilan pokok sebesar Rp656.250.000.000 sehingga nilai pokoknya menjadi sebesar Rp2.843.750.000.000.
- Perum Perumnas sebesar Rp650.000.000.000 untuk membantu likuiditas perusahaan dan dalam rangka melaksanakan program pembangunan kawasan rumah tapak yang tersebar di seluruh

Indonesia. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-12/KN/2020 dan Nomor 179/PPI/SMF -KKRI/XI/2020 sesuai SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-68/PB/PB.3/2020, dan SKP Nomor SK-3/KPA999.03.MBU/11/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-173/PB/PB.3/2021.

- c. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Sebesar Rp2.200.000.000.000 untuk memberikan relaksasi di industri hilir dan industri pengguna. Pembiayaan Investasi Pemerintah PEN atas Perjanjian Nomor PRJ-14/KN/2020 dan PERJ-187/SMI/1220 sesuai SKP Nomor SK-5/KPA999.03.MBU/12/2020 dan Pengesahan SKP Nomor S-89/PB/PB.3/2020.
- d. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp3.999.999.999.411 sesuai Perjanjian Nomor PRJ-16/KN/2020 dan 595/PKS/12/2020 sesuai SKP Nomor SK-2/KPA999.03.MBU/04/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-103/PB/PB.3/2021, SKP Nomor SK-4/KPA999.03.MBU/06/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-1 85/PB/PB.3/2021, dan SKP Nomor SK-7/KPA999.03.MBU/12/2021 dan Pengesahan SKP Nomor S-309/PB/PB.3/2021 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.02/2022 Tanggal 27 Juli 2022.

2. Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada UAIP

Investasi nonpermanen pada UAIP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp278.424.972.731 dan Rp278.424.972.731. Pada tahun 2024 investasi jangka panjang non permanen terdiri dari:

- a. Investasi jangka panjang non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp4.089.232.145.

Investasi Non Permanen lainnya pada Kementerian Perindustrian merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) melalui Skim 2 dan diatur melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Tekstil dan Produk Tekstil.

Skim 2 adalah pinjaman pembelian mesin dengan suku bunga rendah melalui sistem modal padanan. Pengelolaan pinjaman dengan suku bunga rendah untuk pembiayaan pembelian mesin/peralatan tersebut dilakukan melalui kerja sama antara Ditjen BIM dengan Lembaga Pengelola Program (LPP). Proporsi modal padanan untuk pembelian mesin tersebut adalah: perusahaan ITPT sebesar 20%, LPP sebesar 10% dan Kemenperin sebesar 70%.

Pihak yang bertindak sebagai LPP untuk penyaluran pinjaman pada tahun 2007 dan 2008 adalah PT PNM, sedangkan untuk pinjaman TA 2009 adalah BSM.

Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp0 yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya sebesar Rp4.089.232.145.

- b. Investasi jangka panjang non permanen pada tiga entitas yaitu PT Karabha Digdaya PT SEG dan PT Aldevco sebesar Rp274.335.740.586.

Investasi Non Permanen pada PT Karabha Digdaya, PT SEG dan PT Aldevco senilai Rp274.335.740.586 merupakan pengalihan pencatatan aset saham dari LK BUN Transaksi Khusus DJKN tahun 2020.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Karabha Digdaya sebesar Rp251.240.740.586. PT Karabha Digdaya adalah perusahaan yang berasal dari aset eks. PT PPA. Perusahaan tersebut memiliki 2 (dua) divisi usaha, yaitu pengelolaan lapangan golf (Emeralda Golf) dan pengembangan perumahan (estate) di Cimanggis, Kota Depok.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT SEG sebesar Rp22.470.000.000. PT SEG berasal dari aset saham Eks PT PPA. Perusahaan tersebut melakukan usaha pengelolaan *real estate* serta pengembangan kawasan Danau Bogor Raya, serta pengelolaan pariwisata (*club house*) yang dikenal dengan nama "Klub Bogor Raya".

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada PT Aldevco sebesar Rp625.000.000. PT Aldevco berasal dari hibah Ir AR Soehoed. Saat ini, perusahaan memperoleh pendapatan operasional dari sewa Gedung Aldevco Octagon.

3. Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Dit SMI (BLU LPDP, BP Tapera, BDPKPS)

Investasi Jangka Panjang nonpermanen pada Direktorat SMI pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp233.746.918.386.731 dan Rp240.529.752.919.543 terdiri dari:

- a. Investasi Non permanen BLU LPDP Rp117.471.804.386.731.
- b. Investasi Non permanen BP Tapera Rp116.275.114.000.000.
- c. Investasi Non permanen BDPKPS Rp0.

a. Investasi Non permanen BLU LPDP

Investasi jangka BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari dua belas bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU. Nilai investasi jangka panjang non permanen BLU LPDP pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp117.471.804.386.731 dan Rp140.037.133.919.543. Terjadi penurunan Rp22.565.329.532.812 atau 16,11%, disebabkan adanya pencairan pokok investasi berupa amortisasi kas bagian premium Surat Utang Negara.

Rincian klasifikasi portofolio LPDP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Instrumen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Deposito	-	34.292.400.229.705
2	Obligasi menurut harga perolehan		
	a. Obligasi Negara-HTM	109.819.905.386.731	103.583.483.689.838
	b. Obligasi Korporasi-HTM	7.651.899.000.000	2.161.250.000.000
	Total	117.471.804.386.731	140.037.133.919.543

b. Investasi Non permanen BP Tapera

Investasi Non permanen BP Tapera per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp116.275.114.000.000 dan Rp99.255.114.000.000, terdiri dari:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera sebesar Rp60.675.114.000.000 berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pengalihan dari BLU PPDPP.
- 2) Akumulasi dana FLPP yang berasal dari APBN TA 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp55.600.000.000.000.

BP Tapera merupakan badan hukum publik (*sui generis*) yang dibentuk sebagai amanat Undang-Undang nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Tujuan pembentukan badan ini adalah menghimpun dan menyediakan dana murah jangka Panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya pada BP Tapera per 31 Desember 2024 sebesar

Rp116.275.114.000.000 adalah berupa dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.596.006.813.852 dikelola oleh BLU PPDPP dan dicatat sebagai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34; PP Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah; serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Nilai saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000 berdasarkan hasil reviu BPKP. Nilai saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021-Nomor BAST-07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, dari Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/I/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Berdasarkan perjanjian tersebut antara lain mengatur:

- 1) Bahwa skema investasi merupakan Tabungan Pemerintah pada BP Tapera.
- 2) Bahwa Pemerintah berhak menarik Dana FLPP sewaktu-waktu dari BP Tapera dalam hal tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Hasil yang didapat Pemerintah adalah sebagai berikut:
 - a. Sebesar imbal hasil atas pengelolaan Dana FLPP yang sedang digulirkan yaitu minimal sebesar 0,5% pertahun dari akumulasi Dana FLPP yang sedang digulirkan dikurangi dengan jasa pengelolaan Dana FLPP.
 - b. Sebesar rata-rata tingkat suku bunga/margin deposito standar per tahun untuk jangka waktu 3 (tiga bulan) yang terbitkan oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara yang berlaku di pasar atas pendapatan atas Dana FLPP yang belum digulirkan.
 - c. Seluruh pendapatan jasa giro dan pendapatan lainnya yang diakibatkan oleh penempatan dana yang bersumber dari Dana FLPP.
- 4) Hasil investasi (imbal hasilnya) akan disetor ke RIBUN atas nama Rekening Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara Nomor 513000001980 di Bank Indonesia, Jalan Thamrin, Jakarta atau nama dan/atau nomor rekening lain yang ditentukan kemudian oleh Kementerian Keuangan.

Skema penyaluran dana FLPP oleh BP Tapera menggunakan mekanisme yang sama seperti saat dikelola oleh BLU PPDPP. Pada skema dimaksud, BP Tapera menggulirkan dana melalui Bank Penyalur kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur FLPP.

Investasi Non Permanen BP Tapera Rp60.675.114.000.000 disajikan sebesar nilai perolehannya dengan pertimbangan bahwa tidak terdapat intensi permintaan penysetoran sebagian atau seluruh Dana FLPP oleh Pemerintah; merupakan investasi nonpermanen yang tidak untuk dimiliki berkelanjutan; dan bukan merupakan model bisnis investasi nonpermanen berbentuk tagihan.

Pada tahun 2024 terdapat pembiayaan dana FLPP sebesar Rp17.020.000.000.000 melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara kepada Operator Investasi Pemerintah yaitu BP Tapera. Dana FLPP yang sedang digulirkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp115.374.484.819.463 dan dana yang belum digulirkan sebesar Rp900.629.180.537. Selain itu terdapat penysetoran imbal hasil dari dana FLPP ke RIBUN dan selanjutnya ke RKUN sebesar Rp510.725.086.120.

c. Investasi Non permanen BDPKS

Investasi Non permanen BDPKS per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp1.237.505.000.000. Investasi non permanen pada 31 Desember 2023 ini hasil reklasifikasi dari kas setara kas BLU. Investasi Jangka Panjang Non Permanen tersebut berasal dari penggunaan Kas BLU BDPKS untuk perolehan surat utang negara (SUN) dengan kategori hold-to-maturity (HTM) yang diniatkan untuk dimiliki sampai dengan jatuh tempo selama lebih dari 12 bulan sejak perolehan. Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian sebesar Rp1.237.505.000.000 dikarenakan investasi tersebut telah jatuh tempo dan dikembalikan ke Kas BLU sebesar Rp1.028.105.000.000 dan penyesuaian intensi atau strategi dari HTM menjadi Available For Sale (AFS) sebesar Rp209.400.000.000, sehingga nilai investasi non permanen BDPKS menjadi sebesar Rp0.

Perubahan intensi tersebut dinyatakan dalam Peraturan Direktur BDPKS Nomor Per-1/DPKS/2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Utama Nomor Per-6/DPKS/2023 tentang Kebijakan dan Rencana Investasi Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang ditetapkan pada 27 Juni 2024. Peraturan Direktur tersebut antara lain mengatur bahwa Investasi atas saldo dana cadangan yang ditempatkan pada instrument Surat Berharga Negara, Obligasi Korporasi dan/atau saham dilakukan dengan intensi Available For Sale (AFS).

4. Investasi Jangka Panjang Non Permanen BLU LDKPI (KPA Dit. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral)

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya BLU LDKPI pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.038.681.014.148 dan Rp8.000.000.000.000, mengalami kenaikan sebesar Rp38.681.014.148 dikarenakan hal sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi pencatatan dari investasi jangka pendek menjadi investasi jangka Panjang sebesar Rp65.322.148. Reklasifikasi tersebut dilakukan atas temuan pemeriksaan BPK RI yang disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kementerian Keuangan Tahun 2023 Nomor 33.a/LHP/XV/05/2024. LHP tersebut menyatakan bahwa saldo investasi jangka panjang BLU LDKPI tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Reklasifikasi tersebut dilakukan sesuai dengan nota dinas Direktur APK nomor ND-727/PB.6/2024 tanggal 23 Agustus 2024 hal Penyampaian Kebijakan Pencatatan dan Penyajian Investasi SBN pada LDKPI.
- b. Adanya penambahan investasi jangka panjang yang bersumber dari saldo kas BLU LDKPI sebesar Rp38.615.692.000. Penambahan investasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 172/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penambahan Investasi Pemerintah yang bersumber dari Saldo Kas pada BLU.

5. Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah

Pinjaman PEN Daerah merupakan dukungan pembiayaan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

Investasi Pemerintah tersebut ditempatkan pada PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai pengelola Pinjaman PEN Daerah sesuai dengan pasal 4, BAB II, PRJ-2/PK/2020 yang telah diubah menjadi PRJ-3/PK/2020.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen untuk Pinjaman PEN Daerah pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp17.607.009.707.744 dan Rp21.691.657.043.349. Terdapat penurunan nilai investasi sebesar Rp4.084.647.335.605 atau 18,83% dari nilai investasi tahun 2023. Fluktuasi tersebut disebabkan oleh adanya pengembalian pokok pinjaman selama tahun 2024 melalui

pemotongan DAU maupun pengembalian pinjaman PEN dari PT SMI. Pada Tahun 2024 tidak terdapat pencairan pinjaman PEN.

Investasi pemerintah untuk pinjaman PEN Daerah yang di transfer langsung ke rekening khusus PT Sarana Multi Infrastruktur yang kemudian dikelola sebagai pinjaman PEN daerah yaitu dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di daerah sebagai bagian dari Program PEN.

D.2.1.2.4. INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN LAINNYA DIRAGUKAN REALISASINYA

Nilai Investasi jangka panjang non permanen lainnya diragukan realisasinya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp974.366.095.513 dan Rp945.649.215.159 mengalami kenaikan sebesar Rp28.716.880.354 (3,04%).

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya terdapat pada investasi non permanen skim 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian, BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), IP PEN, LDKPI, dan BPDPKS.

No	UNIT PENGELOLA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Investasi nonpermanen pada Kementerian Perindustrian (SKIM-2)	4.089.232.145	4.089.232.145
2	Dit SMI	955.257.621.372	916.204.591.745
3.	IP PEN	34.218.749.997	35.312.499.997
4.	LDKPI	(19.199.508.001)	(9.957.108.728)
	JUMLAH	974.366.095.513	945.649.215.159

Kementerian Perindustrian

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.089.232.145 dan Rp4.089.232.145, tidak terdapat pergerakan nilai investasi jangka Panjang nonpermanen diragukan realisasinya pada Kementerian Perindustrian.

Direktorat SMI

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya pada Direktorat SMI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp955.257.621.372 dan Rp916.204.591.745. Nilai tersebut berasal dari penyesuaian nilai investasi jangka pangang non permanen pada BLU LPDP dan BLU BPDPKS dengan penjelasan sebagai berikut:

BLU LPDP

Perhitungan nilai Investasi Jangka Panjang Non-Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya pada Dit SMI - BLU LPDP sebagaimana berikut:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Amortisasi Investasi Held to Maturity :		
- Akumulasi amortisasi Premium	(1.146.828.365.016)	(929.433.951.945)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
- Akumulasi amortisasi Diskon	74.942.931.327	40.080.917.263
Pencairan Premium Obligasi 2024	66.765.314.917	-
Mark-to-Market SRBI 31-Des-24	(15.133.717.340)	-
Unrealized Holding Gain/(Loss) Investasi Available for Sale	64.996.214.740	(5.780.366.587)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	(955.257.621.372)	(895.133.401.269)

BLU BDPKS

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat dalam neraca pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp21.071.190.476. Nilai per 31 Desember 2023 tersebut berasal dari amortisasi premium atas penempatan investasi jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga Negara yang memenuhi karakteristik HTM diperoleh secara premium. Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian sebesar Rp21.071.190.476 dikarenakan investasi tersebut telah jatuh tempo dan dikembalikan ke Kas BLU sebesar Rp18.736.666.667 serta terdapat penyesuaian intensi atau strategi dari HTM menjadi Available For Sale (AFS) sebesar Rp2.334.523.809, sehingga nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya menjadi Rp0.

IP PEN

Investasi jangka panjang nonpermanen lainnya diragukan realisasinya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.218.749.997 dan Rp35.312.499.997 yang merupakan nilai pencadangan investasi non permanen pada perusahaan negara yang berupa pinjaman. Nilai pencadangan tersebut sebesar 0,5% dari nilai perolehan awal pinjaman, maka rinciannya adalah sebagai berikut:

Perusahaan Negara	Nilai Perolehan Awal Pinjaman	Jumlah
(1)	(2)	(3) = (2) x 0,5%
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	3.999.999.999.411	19.999.999.997
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.843.750.000.000	14.218.750.000
Jumlah		34.218.749.997

LDKPI

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya yang tercatat dalam neraca pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp19.199.508.001 dan minus Rp9.957.108.728. Terdapat kenaikan sebesar Rp9.242.399.273 dari periode 2023. Nilai tersebut berasal dari amortisasi diskonto atas penempatan investasi jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga Negara.

D.2.1.2.5. INVESTASI PERMANEN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

Nilai investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah, atau dapat disebut juga penyertaan modal Negara, per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp3.317.709.229.098.828** dan **Rp3.093.225.298.186.938** mengalami kenaikan sebesar Rp224.483.930.911.890 (7,26%)

Investasi jangka panjang permanen PMN meliputi:

1. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero;
2. Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum;
3. Penyertaan Modal Luar Negeri;
4. Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero	3.109.055.891.450.581	2.890.480.531.829.837
Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum	38.959.606.930.482	36.912.745.897.463
Penyertaan Modal Luar Negeri	35.559.449.396.360	32.347.909.903.362
Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya	134.134.281.321.405	133.484.110.556.276
Total	3.317.709.229.098.828	3.093.225.298.186.938

1. PMN pada Persero

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp3.109.055.891.450.581** dan **Rp2.890.480.531.829.837**.

Pernyataan Modal Pemerintah atau disebut juga Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Persero, merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertujuan mencari keuntungan dan memberikan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah $\geq 51\%$, sehingga Nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

PMN pada Persero dilakukan oleh 2 pihak yakni:

a. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN

Penyertaan Modal Negara pada Persero bertujuan untuk mencari keuntungan dan pelayanan umum. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Persero adalah lebih dari sama dengan 50% sehingga nilai PMN pada BUMN Persero dihitung menggunakan metode ekuitas.

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian BUMN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.023.668.410.040.017 dan Rp2.809.922.466.950.580 atau terdapat peningkatan sebesar Rp213.745.943.089.437 atau 7,61%.

Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah dari perusahaan negara yang mengalami kenaikan kinerja sehingga mampu mencatatkan surplus operasional. Selain itu, peningkatan nilai investasi juga dipengaruhi adanya penambahan Penyertaan Modal Pemerintah kepada BUMN yang dilakukan pemerintah pada tahun 2024.

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah. Kepemilikan pemerintah untuk BUMN persero disajikan dalam mata uang rupiah untuk itu terhadap 4 BUMN yang menyusun Laporan Keuangan dengan mata uang asing maka akan ditranslasikan ke dalam mata uang rupiah. Empat BUMN yang menggunakan mata Uang dollar adalah PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, dan PT Krakatau Steel.

b. Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp85.387.481.410.564 dan Rp80.558.064.879.257, meningkat sebesar Rp4.829.416.531.306 atau 5,99% dari nilai per 31 Desember 2023.

Investasi ini merupakan investasi permanen penyertaan modal negara ke dalam modal Badan Usaha Milik Negara atau lembaga di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan yang dimiliki Negara Republik Indonesia. Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia diwakili dalam bentuk saham atau kuota atau merupakan bentuk kekayaan negara dipisahkan.

Badan Usaha Milik Negara/lembaga tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- 1) Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
- 2) Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah pada Persero Kementerian Keuangan

No	Perusahaan	Kepemilikan Pemerintah	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1)	PT Sarana Multigriya Finansial	100%	20.559.960.000.000	18.231.142.000.000
2)	PT Sarana Multi Infrastruktur	100%	43.811.220.354.747	42.261.465.973.664
3)	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	100%	16.672.573.693.000	15.962.800.178.000
4)	PT Geo Dipa Energi	94,5%	4.343.727.362.817	4.102.656.727.593
5)	PT Bina Karya	100%	-	-
Total			85.387.481.410.564	80.558.064.879.257

Perubahan nilai kepemilikan pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara/Lembaga dibawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan disebabkan oleh peningkatan nilai ekuitas pada masing-masing Perusahaan dan Lembaga.

Rincian persero di bawah Kementerian Keuangan sebagai berikut :

1) PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (PT SMF) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan. PT SMF berfungsi untuk mengalirkan dana dari pasar modal ke sektor perumahan dengan menyediakan fasilitas pinjaman, transaksi sekuritisasi, dan efisiensi pasar primer.

2) PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (PT SMI) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur. PT SMI bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur salah satunya melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.

3) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Negara Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. PT PII bergerak di bidang penjaminan infrastruktur dalam rangka peningkatan kelayakan kredit dari proyek infrastruktur dengan skema Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS).

4) PT Geo Dipa Energi (Persero)

PT Geo Dipa Energi (Persero) (PT GDE) didirikan pada tanggal 5 Juli 2002. PT GDE memanfaatkan nilai ekonomis dan lingkungan energi panas bumi untuk menghasilkan listrik. PT GDE berupaya untuk memenuhi permintaan daya listrik nasional dengan memanfaatkan sifat-sifat hemat biaya dan lingkungan dari energi panas bumi.

5) PT Bina Karya (Persero)

PT Bina Karya (Persero) (PT BIKa) pada awalnya berbentuk Perusahaan Negara (PN) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 133 Tahun 1962 hingga akhirnya berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1970. Sejak berdiri pada tahun 1962, pembinaan dan pengawasan Perseroan berada di bawah Menteri Pekerjaan Umum yang kemudian pembinaannya dialihkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998. Dalam rangka repurposing PT Bina Karya (Persero) menjadi Badan Usaha Otorita (BUO) Ibu Kota Nusantara, Pemerintah telah menerbitkan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sejak diterbitkannya PP tersebut, pembinaan dan pengawasan PT BIKa berada di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya, Menteri Keuangan telah memberikan Kuasa Pemegang Saham kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), sesuai Surat Kuasa Nomor SKU 625.1/MK.06/2023 pada tanggal 5 Desember 2023. Pasca repurposing, saat ini PT BIKa menjalankan fungsi sebagai master developer, business owner, dan operator di IKN yang digunakan OIKN sebagai vehicle dalam 4P (Percepatan Persiapan, Pembangunan dan Pemindahan) IKN dan Daerah Mitra.

Nilai Investasi Permanen PT BIKa pada tabel di atas tercatat Rp0 baik untuk periode 31 Desember 2024 maupun 31 Desember 2023. Periode pelaporan Tahun 2023 merupakan pertama kalinya PT BIKa masuk dalam laporan keuangan UAKPA BUN BA 999.03 DJKN sebagai dampak diterbitkannya Pemerintah Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Pada periode pelaporan sebelumnya, PT BIKa merupakan bagian dari UAKPA BA 999.03 Kementerian BUMN. Namun demikian, PT BIKa memiliki ekuitas yang negatif yaitu sebesar minus Rp22.165.573.115. Sesuai dengan PMK Nomor 174 Tahun 2023, maka nilai outstanding negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK.

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset BUMN secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

2. PMN pada Perum

Penyertaan Modal Pemerintah pada Perum per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp38.959.606.930.482** dan **Rp36.912.745.897.463**. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp2.046.861.033.019 (5,55%) dari tahun sebelumnya. Peningkatan nilai Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah dipengaruhi oleh naiknya bagian laba pemerintah dari perusahaan negara yang mengalami kenaikan kinerja sehingga mampu mencatatkan surplus operasional.

Pernyataan Modal Pemerintah pada Perum merupakan kepemilikan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berorientasi memberikan pelayanan umum namun dengan tetap memperhatikan laba perusahaan. Kepemilikan Pemerintah pada BUMN Perum dinilai PMN pada Perum dihitung menggunakan metode ekuitas. BUMN berbentuk Perum semuanya dilakukan pembinaan oleh

Kementerian BUMN.

3. PMN Luar Negeri

Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Negara Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp35.559.449.396.360** dan **Rp32.347.909.903.362**. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp3.211.539.492.998 (9,93%) dari tahun sebelumnya.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, perubahan nilai investasi pemerintah Indonesia pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) diakibatkan dari perubahan nilai tukar.

No	PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Asian Development Bank (ADB)	6.071.724.791.356	5.977.449.868.229
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	4.037.613.618.555	3.858.186.337.617
3	International Development Association (IDA)	2.067.947.630.222	1.657.356.424.865
4	International Finance Corporation (IFC)	4.997.440.885.000	4.775.359.895.000
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	61.361.377.740	58.634.542.980
6	Islamic Development Bank (IDB)	5.065.835.782.925	3.413.928.173.617
7	International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)	33.283.420.000	31.804.340.000
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	5.181.089.713	5.100.643.571
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	1.485.781.563.000	1.357.999.001.000
10	Common Fund for Commodities (CFC)	20.382.990.680	19.703.156.520
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	359.372.347.169	343.402.219.963
12	Credit Guarantee and Investment Facility	494.404.200.000	472.433.400.000
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	10.859.119.700.000	10.376.551.900.000
JUMLAH		35.559.449.396.360	32.347.909.903.362

Perubahan nilai Investasi Pemerintah pada LKI dalam rupiah berasal dari:

- Penambahan investasi pemerintah tahun berjalan pada tiga LKI, yaitu IFAD, IDA, dan IsDB senilai Rp1.984.501.866.764;
- Pendapatan selisih lebih hasil konfirmasi senilai Rp3.024.045.380 yang berasal dari IsDB;
- Beban selisih hasil konfirmasi senilai minus Rp521.370.292 yang berasal dari IDA;
- Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.224.534.951.147; dan
- Selisih Rp1 karena pembulatan.

4. PMN pada Badan Usaha Lainnya

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp134.134.281.321.405** dan **Rp133.484.110.556.276**. Terdapat kenaikan sebesar Rp650.170.765.129 atau (0,49%) jika dibandingkan dengan 2023.

Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya terdiri dari :

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Penyertaan pada Badan Usaha lainnya (UAKPA DJKN)	124.754.540.945.568	125.073.797.670.565
Penyertaan pada Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (UAKPA Dit EAS DJPPR)	637.129.177	625.792.238
Penyertaan pada Perusahaan (Minoritas) Dalam Negeri (UAKPA Kementerian BUMN)	1.687.799.417.150	1.737.793.416.650
Penyertaan Badan Usaha Lainnya Luar Negeri (UAKPA BKF)	2.003.468.000.000	1.914.436.000.000
Penyertaan Pada BP Tapera (UAKPA Dirjen Pembiayaan)	2.845.624.180.464	2.794.889.273.282
Bank Tanah (UAKPA Dirjen Pengadaaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan)	2.842.211.649.046	1.962.568.403.541
JUMLAH	134.134.281.321.405	133.484.110.556.276

a. UAKPA DJKN

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada Badan Usaha Lainnya pada UAKPA DJKN terdiri dari Penyertaan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI) dan Lembaga Pengelola Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp124.754.540.945.568 dan Rp125.073.797.670.565. Terjadi penurunan sebesar Rp319.256.724.997 atau 0,26% dari periode 2023.

URAIAN	Persentase	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (UAKPA DJKN)	100%	13.992.629.000.000	8.761.466.000.000
PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI)	35,23%	3.215.436.945.568	2.582.402.670.565
Lembaga Pengelola Investasi	100%	107.546.475.000.000	113.729.929.000.000
Total		124.754.540.945.568	125.073.797.670.565

Nilai aset yang tercatat dalam Neraca tersebut bukan merupakan nilai aset Lembaga/Badan usaha secara keseluruhan tetapi hanya terkait investasi jangka panjang permanen yang dimiliki pemerintah.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

Sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPEI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp13.992.629.000.000 dan Rp8.761.466.000.000, mengalami peningkatan sebesar Rp5.231.163.000.000 atau 59,71% dari tahun 2023.

PT Tuban Petrochemical Industries (PT TPI)

Nilai penyertaan Pemerintah pada PT TPI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp3.215.436.945.568 dan Rp2.582.402.670.565 mengalami peningkatan sebesar Rp633.034.275.003 atau 24,51% dari nilai tahun 2023.

PT TPI didirikan pada 16 Maret 2001, pada awalnya, BPPN adalah pemilik 70% saham PT TPI dan sisanya dikuasai oleh Grup Tirtamas Majutama. Pengakhiran tugas BPPN pada 2004, mengakibatkan beralihnya kepemilikan 70% saham kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA). Pada tahun 2019, komposisi kepemilikan saham TubanPetro berubah dikarenakan adanya konversi MYB menjadi saham yang dilakukan sesuai Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan penambahan modal saham melalui right issue yang seluruhnya diambil oleh PT Pertamina (Persero), sehingga struktur kepemilikan TubanPetro terdiri dari PT Pertamina (Persero) (51%), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (46,99%) dan PT Pertamina Pedeve Indonesia (2%) per 27 November 2019.

Pada November 2022 terdapat penambahan modal saham oleh pemegang saham lain yaitu PT Pertamina (Persero) ke dalam ekuitas PT TPI. Dengan adanya penambahan modal oleh pemegang saham lainnya tersebut, persentase kepemilikan saham oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan mengalami penurunan dari 46,99% menjadi 35,23%.

Lembaga Pengelola Investasi

Lembaga Pengelola Investasi ("LPI/INA") didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Paragraf 2 Pasal 165 yang ditetapkan pada tanggal 2 November 2020 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 74 Tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi. ruang lingkup kegiatan INA terutama meliputi mengelola investasi dan merencanakan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi investasi. Pemerintah Indonesia adalah entitas induk dan pemegang saham pengendali INA. INA bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Nilai penyertaan Pemerintah pada LPI/INA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp107.546.475.000.000 dan Rp113.729.929.000.000 mengalami penurunan sebesar Rp6.183.454.000.000 atau 5,44%. Penurunan tersebut dikarenakan LPI membukukan rugi komprehensif yang menyebabkan nilai investasi pemerintah mengalami penurunan.

Badan Usaha Milik Negara/Lembaga terkecuali PT TPI dan INA (hanya pembinaannya saja yang berada di bawah Kemenkeu), seluruhnya berada di bawah pengawasan dan pembinaan Kementerian Keuangan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- Memiliki potensi kontijensi yang sangat tinggi terhadap APBN;
- Sinkronisasi stimulus fiskal terhadap infrastruktur yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga.
- Salah satu fiscal tools yang digunakan dalam penentuan kebijakan fiskal oleh Menteri Keuangan.

b. UAKPA Dit EAS DJPPR

Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN. Perusahaan yang akan menerbitkan SBSN adalah perusahaan yang secara khusus dibentuk guna kepentingan penerbitan SBSN (special purpose vehicle-SPV).

Nilai penyertaan Pemerintah pada Perusahaan Penerbit SBSN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp637.129.177 dan Rp625.792.238, mengalami peningkatan sebesar Rp11.336.939 atau 1,81% dari tahun 2023.

Jumlah Investasi Jangka Panjang merupakan jumlah saldo penyertaan modal pemerintah pada badan usaha lainnya sejak tahun 2008 yang didepositokan dalam deposito mudharabah pada Bank Mandiri Syariah Cabang Jakarta Thamrin.

c. UAKPA Kementerian BUMN

PMP pada Perseroan Terbatas Lainnya (minoritas) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah

sebesar Rp1.687.799.417.150 dan Rp1.737.793.416.650. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp49.993.999.500. Penurunan tersebut berasal dari penurunan ekuitas PT Istaka Karya yang dikeluarkan dari pencatatan ILKPN Tahun 2024 dengan mempertimbangkan telah terdapat surat dari Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit) tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan bahwa “tidak ada lagi potensi penerimaan negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah.”

PMN pada Non BUMN merupakan kepemilikan Negara pada perusahaan dengan persentase kepemilikan Negara kurang dari sama dengan 50%. Nilai PMN pada Non BUMN dihitung menggunakan metode ekuitas atau metode biaya.

Metode ekuitas digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya sebesar lebih dari sama dengan 20%. Adapun metode biaya digunakan untuk Non BUMN yang kepemilikannya di bawah 20%.

Non BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah saat ini dinilai dengan menggunakan metode biaya. Adapun Non BUMN yang dimiliki oleh Pemerintah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) PT Perkebunan Nusantara I (10,58%);
- 2) PT Perkebunan Nusantara IV (7,07%);
- 3) PT Nindya Karya (0%);
- 4) PT Rekayasa Industri (4,97%);
- 5) PT PANN Pembiayaan Maritim (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 6) PT Indosat Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 7) PT Asean Bintulu Fertilizer (13%);
- 8) PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 9) PT Timah Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 10) PT Aneka Tambang Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 11) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 12) PT Kimia Farma Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 13) PT Indofarma Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 14) PT Asuransi Jasa Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 15) PT Jasa Raharja (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 16) PT Jaminan Kredit Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 17) PT Asuransi Kredit Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 18) PT Energy Management Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 19) PT Pegadaian (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 20) PT Permodalan Nasional Madani (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 21) PT Hotel Indonesia Natour (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 22) PT Sarinah (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 23) PT TWC BP dan RB (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 24) PT Angkasa Pura (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 25) PT Sucofindo (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 26) PT Surveyor Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A

- 27) PT Perikanan Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 28) PT Berdikari (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 29) PT Sang Hyang Seri (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 30) PT Garam (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 31) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 32) PT Kawasan Berikat Nusantara (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 33) PT Kawasan Industri Wijayakusuma (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 34) PT Kawasan Industri Medan (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 35) PT Kawasan Industri Makassar (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 36) PT Balai Pustaka (0,01%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 37) PT Kliring Berjangka Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 38) PT Perusahaan Pengelola Aset (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 39) PT Dahana (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 40) PT Pindad (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 41) PT Dirgantara Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 42) PT PAL Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 43) PT Industri Nuklir Indonesia (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 44) PT Semen Baturaja Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 45) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 46) PT Indonesia Asahan Aluminium (0%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 47) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (0%); Pemerintah memiliki saham seri A
- 48) PT Petrokimia Gresik (0,00%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 49) PT Pupuk Kalimantan Timur (0,00%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 50) PT Pupuk Kujang (0,00%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 51) PT Pupuk Iskandar Muda (0,00%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 52) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (0,00%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 53) PT Inhutani I (0,00%); Pemerintah RI memiliki saham seri A
- 54) PT Inhutani V (0,00%); Pemerintah RI memiliki saham seri A

Pada Non BUMN dengan kepemilikan Negara dengan metode biaya, nilai penyertaan negara pada Non BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan Non BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

d. UAKPA BKF

PMP Badan Usaha Lainnya pada UAKPA BKF merupakan Penyertaan pada ASEAN Infrastructure Fund (AIF) dan International Rubber Consortium Limited (IRCo). Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 nilai Penyertaan Modal Pemerintah pada AIF dan IRCo sebesar Rp2.003.468.000.000 dan Rp1.914.436.000.000, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp89.032.000.000 atau 4,65% yang berasal dari selisih Kurs yang belum terealisasi dengan rincian sebagai berikut.

LKI	Nilai Investasi per 31 Desember 2024	Nilai Investasi per 31 Desember 2023	Selisih KURS
ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	1.938.840.000.000	1.852.680.000.000	86.160.000.000
International Rubber Consortium Limited (IRCo)	64.628.000.000	61.756.000.000	2.872.000.000
Jumlah	2.003.468.000.000	1.914.436.000.000	89.032.000.000

e. UAKPA Dirjen Pembiayaan

BP Tapera merupakan badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BP Tapera ditetapkan dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. BP Tapera bertanggungjawab kepada Komite Tapera (yang terdiri dari Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Dewan Komisiner OJK, dan unsur profesional).

BP Tapera memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal BP Tapera diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2018 tentang Modal Awal BP Tapera.

Posisi penyertaan pada BP Tapera pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.845.624.180.464 dan Rp2.794.889.273.282, terjadi kenaikan sebesar Rp50.734.907.182 atau 1,82%. Kenaikan nilai investasi pada Modal Awal BP Tapera disebabkan adanya surplus dari kegiatan operasional selama tahun 2024.

f. UAKPA Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Bank Tanah)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, Bank Tanah ditetapkan dengan tujuan mengelola tanah dengan fungsi untuk melaksanakan perencanaan perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.

Badan Bank Tanah adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk diberi kewenangan khusus dalam mengelola tanah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Komite yang terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sedangkan Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Komite Bank Tanah Nomor 04/SK/Kom-BTI/XII/2021 dengan susunan sebagai berikut:

- 1) Kepala Badan Pelaksanaan Bank Tanah;
- 2) Deputi Bidang Perencanaan Strategi dan Pengadaan Tanah; dan
- 3) Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Keuangan.

Kepala Badan Pelaksana dan Deputi bertanggung jawab kepada Komite Badan Bank Tanah.

Badan Bank Tanah memperoleh modal awal yang bersumber dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Modal Awal Badan Bank Tanah diatur melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Posisi penyertaan pada Badan Bank Tanah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.842.211.649.046 dan Rp1.962.568.403.541. Terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp879.643.245.505 atau 44,82% yang dikarenakan adanya keuntungan/surplus sepanjang tahun 2024.

D.2.1.2.6. INVESTASI PERMANEN BADAN LAYANAN UMUM

Nilai investasi jangka panjang permanen BLU per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp8.053.004.500** dan **Rp8.053.004.500**, tidak terjadi kenaikan atau penurunan nilai investasi dari nilai investasi per 31 Desember 2023.

No	BLU	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	UIN Sumatera Utara Medan	1.415.810.000	1.415.810.000
2	PPK Gelora Bung Karno	6.637.194.500	6.637.194.500
	Jumlah	8.053.004.500	8.053.004.500

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (PP Nomor 74/2012), BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan. Selain itu, investasi merupakan kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Oleh karena itu, semua investasi jangka panjang yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum akan dicatat dan dilaporkan pada Laporan Keuangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, tidak dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang menjadi induk Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Investasi permanen BLU terdapat pada BLU Pengelola Kawasan dan BLU Pelayanan Pendidikan. Adapun rincian investasi adalah sebagai berikut:

1. Penyertaan modal oleh BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10% dengan nilai sebesar Rp6.637.194.500. Tidak ada perubahan nilai kepemilikan BLU PPK Gelora Bung Karno pada PT STS karena penyertaan BLU PPK Gelora Bung Karno dicatat dengan metode biaya.
2. BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan memiliki penyertaan pada PT BPRS Paduarta Insani dengan kepemilikan sebanyak 3.518 lembar saham seri A dan 30.348 lembar saham seri B. Pada tahun 2019 terdapat penerbitan saham baru dari BPRS yang tidak diambil bagian oleh UIN Sumatera Utara sehingga persentase kepemilikan sahamnya turun atau terdilusi dari 30,82% menjadi 22,82%. Saldo investasi permanen BLU Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan per 31 Desember 2024 tersebut merupakan hasil perhitungan Nilai Investasi Permanen dengan menggunakan metode ekuitas dimana laba BPRS dikalikan langsung dengan porsi saham UIN SU Medan dikurangi penarikan deviden Tahun 2020 dan koreksi Penyesuaian dengan aktual saham di BPRS Puduarta Insani berdasarkan Laporan Auditor Independen Tahun 2022 yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2023.

D.2.1.2.7. INVESTASI PERMANEN LAINNYA

Nilai Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp790.019.190.222.637** dan **Rp686.539.843.221.699**, terjadi kenaikan nilai investasi sebesar Rp103.479.347.000.938 atau 15,07% dari nilai investasi per 31 Desember 2023.

Investasi Permanen Lainnya terdiri dari:

No	Investasi Permanen Lainnya	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia	473.944.440.890.756	401.109.298.000.000
2	Penyertaan Modal Negara pada Otorita/Lembaga Penjamin Simpanan	239.408.499.778.000	211.972.301.807.000
3	Penyertaan Modal Negara Lain-lain	76.666.249.553.881	73.458.243.414.699
	Jumlah	790.019.190.222.637	686.539.843.221.699

1. Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Bank Indonesia per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp473.944.440.890.756 dan Rp401.109.298.000.000, terdapat kenaikan sebesar Rp72.835.142.890.756 atau 18,16% yang berasal dari peningkatan nilai akumulasi surplus dan selisih revaluasi sampai dengan 31 Desember 2024.

Sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

Dengan mulai efektifnya Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/13/PDG/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, mulai tahun 2014 Bank Indonesia tidak lagi menyajikan subklasifikasi ekuitas di Laporan Posisi Keuangan dan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen laporan keuangan.

Bank Indonesia berpandangan bahwa Bank Indonesia sebagai entitas independen menempatkan seluruh pemangku kepentingan pada prioritas yang setara, selain itu Bank Indonesia beraktivitas bukan untuk memperoleh keuntungan atau laba, sehingga penyusunan laporan keuangan Bank Indonesia bukan ditujukan untuk mengetahui kekayaan bersih (net worth).

Selain itu, Bank Indonesia juga tidak menyajikan Laporan Arus Kas karena keberhasilan Bank Indonesia dalam mencapai tujuan tidak tercermin dari kemampuan menghasilkan kas masa depan. Kewenangan Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga sui generis yang dapat mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah menyebabkan laporan arus kas tidak relevan karena Bank Indonesia tidak memiliki kendala dalam menghasilkan arus kas.

Dalam menghadapi perubahan kebijakan ini, DJKN dalam menentukan nilai penyertaan Pemerintah pada Bank Indonesia menggunakan pendekatan menjumlahkan sub-sub akun yang pada laporan keuangan Bank Indonesia tahun sebelumnya menjadi komponen ekuitas antara lain:

- a. Selisih Revaluasi.
- b. Modal.
- c. Akumulasi Surplus/(Defisit) yang terdiri dari:
 - 1) Cadangan Umum;
 - 2) Cadangan Tujuan;
 - 3) Surplus/(Defisit) Tahun berjalan.

2. Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan

Nilai Penyertaan Modal Negara pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp239.408.499.778.000 dan Rp211.972.301.807.000. Terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp27.436.197.971.000 yang berasal dari surplus tahun berjalan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Oleh karena itu, modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03.

3. Penyertaan Modal Negara Lain-lain

Investasi Lain-lain terdiri dari Penyertaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Nilai penyertaan modal Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp76.666.249.553.881 dan Rp73.458.243.414.699.

Adapun rincian investasi lain-lain disajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Institut Pertanian Bogor**	2.990.843.503.969	2.910.480.548.431
2	Universitas Airlangga	3.591.352.850.630	3.386.481.519.574
3	Institut Teknologi Bandung	2.205.593.497.050	2.137.070.933.465
4	Universitas Indonesia	4.987.446.197.141	4.791.021.213.806
5	Universitas Gajah Mada	4.690.537.636.727	4.459.932.986.932
6	Universitas Pendidikan Indonesia	1.337.549.025.053	1.142.149.933.752
7	Universitas Sumatera Utara	1.974.779.275.696	1.898.360.166.970
8	Universitas Padjajaran	1.385.194.813.264	1.346.990.132.123
9	Universitas Diponegoro***	4.503.404.904.260	4.086.012.209.150
10	Universitas Hassanudin	2.653.554.569.612	2.492.172.787.826
11	Institut Teknologi Sepuluh November	2.024.869.034.265	1.879.170.650.603
12	Universitas Negeri Sebelas Maret	1.779.364.907.379	1.706.907.381.088
13	Universitas Negeri Malang**	2.142.369.181.646	1.954.637.430.081
14	Universitas Andalas**	1.401.297.719.035	1.278.810.808.160
15	Universitas Brawijaya	3.821.445.509.872	3.610.213.266.894
16	Universitas Negeri Padang**	1.403.755.330.398	1.358.228.340.297
17	Universitas Syah Kuala	1.590.623.277.520	1.528.961.186.361
18	Universitas Terbuka	3.370.784.028.495	3.675.028.228.668
19	Universitas Negeri Surabaya**	1.977.372.725.959	1.765.447.318.340
20	Universitas Negeri Yogyakarta**	1.709.485.958.936	1.452.469.064.422
21	Universitas Negeri Semarang**	2.010.881.734.706	1.868.130.629.320
22	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	10.581.197.310.345	10.289.025.406.713
23	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan***	12.532.546.561.923	12.440.541.271.726
	Jumlah	76.666.249.553.881	73.458.243.414.702*

*Selisih Rp3 karena pembulatan

**Menggunakan angka LK Unaudited 2024

***Menggunakan angka LK Draft Audited 2024

a. PTN BH

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa Perguruan Tinggi eks BHMN yang sudah menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum ditetapkan sebagai PTN Badan Hukum dan harus mengikuti ketentuan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak aturan tersebut diundangkan. Hingga saat ini 21 Perguruan Tinggi eks BHMN tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Rincian Penetapan statuta PTN BH adalah sebagai berikut:

- 1) Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- 2) Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor;

- 3) Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada;
- 4) Universitas Indonesia (UI) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
- 5) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
- 6) Universitas Sumatera Utara (USU) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara;
- 7) Universitas Airlangga (UNAIR) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga;
- 8) Universitas Padjajaran (UNPAD) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjajaran;
- 9) Universitas Diponegoro (UNDIP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
- 10) Universitas Hasanuddin (UNHAS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin;
- 11) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- 12) Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;
- 13) Universitas Sebelas Maret (UNS) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret;
- 14) Universitas Andalas (UNAND) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas;
- 15) Universitas Brawijaya (UB) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya;
- 16) Universitas Negeri Padang (UNP) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang;
- 17) Universitas Negeri Malang (UNM) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang;
- 18) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta;
- 19) Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
- 20) Universitas Negeri Surabaya (UNESA) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
- 21) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
- 22) Universitas Terbuka (UT) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
- 23) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta;
- 24) Universitas Sriwijaya (Unsri) sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam PP penetapan masing-masing PTNBH tersebut telah diamanatkan bahwa kekayaan awal dari PTNBH akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan perhitungan bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nilai kekayaan awal PTNBH yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan menjadi dasar pencatatan pada Laporan Keuangan BUN. Per 31 Desember 2024, Menteri Keuangan telah menetapkan KMK Penetapan Nilai Kekayaan Awal (PNKA) pada 21 PTNBH yang dicatat dalam Laporan Keuangan BUN. Sementara itu, terdapat tiga PTNBH, yakni PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia, yang belum ditetapkan kekayaan awalnya oleh Menteri Keuangan, yakni:

- PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia, dikarenakan masih menunggu penyelesaian proses hibah dari Kementerian Agama kepada PTNBH Universitas Islam Internasional Indonesia;
- PTNBH Universitas Negeri Jakarta, dikarenakan belum terdapat usulan penetapan nilai kekayaan awal;
- PTNBH Universitas Sriwijaya, dikarenakan belum terdapat usulan penetapan nilai kekayaan awal.

Nilai penyertaan modal lain-lain pada PTNBH per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp53.552.505.681.613 dan Rp50.728.676.736.263.

b. BPJS

Investasi pada BPJS merupakan penyertaan negara pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 41 UU BPJS yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah PP Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan, bahwa sumber aset BPJS Kesehatan diantaranya adalah modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham serta hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat UU dan PP tersebut, pada akhir tahun 2013 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013 tentang Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang pada salah satu pasalnya menetapkan nilai kekayaan awal BPJS sebesar Rp500.000.000.000 berbentuk uang tunai dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.

Adapun modal yang bersumber dari hasil pengalihan aset BUMN yang menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan yaitu bersumber dari PT Askes (Persero) pada tanggal 1 Januari 2014 sebesar Rp9.151.813.376.805 sehingga total modal BPJS adalah sebesar Rp9.651.813.376.805. Jumlah tersebut telah disahkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Nomor 510/KMK.06/2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengesahan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Laporan Posisi Keuangan Pembuka Dana Jaminan Sosial per 1 Januari 2014.

Selain membentuk BPJS Kesehatan, Pemerintah RI juga membentuk BPJS Ketenagakerjaan. Modal BPJS Ketenagakerjaan berasal dari pengalihan aset dan liabilitas PT Jamsostek (Persero) sebesar Rp7.323.338.452.469 sebagaimana tercantum dalam LK Penutup PT Jamsostek (Persero) per 31 Desember 2013 dan modal awal dari pemerintah yang merupakan kekayaan negara dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sebesar Rp500.000.000.000 sesuai PP Nomor 83 Tahun 2013.

Nilai investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada BPJS Kesehatan adalah sebesar Rp10.581.197.310.345 dan Rp10.289.025.406.713. Sedangkan nilai investasi pada BPJS ketenagakerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.532.546.561.923 dan Rp12.440.541.271.726.

D.2.1.3 ASET TETAP

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp2.223.969.275.731** dan **Rp1.992.870.470.567** mengalami kenaikan sebesar Rp231.098.805.164 (11,60%). Jumlah tersebut merupakan nilai bruto sebelum dikurangi akumulasi penyusutan, dengan rincian sebagai berikut: (dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tanah	49.598.506.000	26.594.107.000
Peralatan dan Mesin	311.503.452.236	419.497.435.733
Gedung dan Bangunan	81.252.321.014	60.946.355.841
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.722.156.865.217	1.401.969.922.187
Aset Tetap Lainnya	50.504.068.840	47.793.132.611
Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.954.062.424	36.069.517.195
Jumlah Aset Tetap	2.223.969.275.731	1.992.870.470.567

D.2.1.3.1. TANAH

Saldo Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp49.598.506.000** dan **Rp26.594.107.000**. Terjadi kenaikan sebesar Rp23.004.399.000 atau 86,50%. Tanah tersebut terdapat pada Satuan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Aset berupa tanah berada pada BP Karimun sebesar Rp26.594.107.000 dan BP Tanjungpinang sebesar Rp23.004.399.000. Tanah pada BP Karimun terletak di Jalan Simpang Parit Rampak – Simpang PT. Saipem Kabupaten Karimun, seluas 113.794 m².

Selama Periode Tahun 2024, mutasi tambah aset Tanah yang merupakan Alih Status Penggunaan BMN dari Kementerian Perhubungan c.q. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan Wilayah Tanjungpinang sebesar Rp23.004.399.000.

D.2.1.3.2. PERALATAN DAN MESIN

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp311.503.452.236** dan **Rp419.497.435.733**. Terdapat penurunan sebesar Rp107.993.983.497 atau 25,74%. Perbandingan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2024	31 Desember 2023
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	19.739.856.323	18.354.277.323
-	Otoritas Jasa Keuangan	66.685.257.107	241.568.251.266
-	SKK Migas	172.750.558.806	159.574.907.144
	PPP BUN	52.327.780.000	-
	Total	311.503.452.236	419.497.435.733

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut sebagai berikut.

Mutasi pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Otoritas Jasa Keuangan dan SKK Migas:

Saldo Awal	419.497.435.733
Penambahan :	14.907.985.660
Pembelian	2.666.817.915
Perolehan Lainnya	10.793.048.089
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	54.578.100
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	305.440.056
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	34.114.500
Koreksi Susulan	1.034.187.000
Reklasifikasi Masuk	19.800.000
Pengurangan:	(175.229.749.157)
Koreksi Pencatatan	(64.285.998)
Hibah Keluar	(147.058.006.943)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(27.990.174.216)
Reklasifikasi Keluar	(117.282.000)
Saldo per 31 Desember 2024	259.175.672.236
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(221.388.226.878)
Nilai buku per 31 Desember 2024	37.787.445.358

Aset Peralatan dan Mesin pada satker PPP BUN per 31 Desember 2024 sebesar Rp52.327.780.000 sedang dalam proses penetapan status penggunaan (PSP) kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan DJKN.

D.2.1.3.3. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp81.252.321.014 dan Rp60.946.355.841, terdapat kenaikan nilai selama periode tahun 2024 sebesar Rp20.305.965.173 atau 33,32%. Nilai Gedung dan Bangunan tersebut berasal dari BP Batam. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal	60.946.355.841
Penambahan :	26.254.088.979
Pembelian	269.677.915
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	25.886.929.064
Reklasifikasi Masuk	97.482.000
Pengurangan	(5.948.123.806)
Koreksi Pencatatan	(2.098.841.206)
Reklasifikasi Keluar	(3.849.282.600)
Saldo per 31 Desember 2024	81.252.321.014
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(3.878.344.566)
Nilai buku per 31 Desember 2024	77.373.976.448

D.2.1.3.4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.722.156.865.217 dan Rp1.401.969.922.187, terjadi kenaikan sebesar Rp320.186.943.030 atau 22,84% Perbandingan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2024	31 Desember 2023
112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.722.140.774.717	1.401.953.831.687
-	SKK Migas	16.090.500	16.090.500
Total		1.722.156.865.217	1.401.969.922.187

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	1.401.969.922.187
Penambahan:	358.580.347.338
Transfer Masuk	125.012.704.660
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	198.271.172.170
Reklasifikasi Masuk	14.182.182.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	16.815.494.900
Perolehan Lainnya	4.298.793.608
Pengurangan:	(38.393.404.308)
Koreksi Pencatatan	(21.114.288.508)
Reklasifikasi Keluar	(17.279.115.800)
Saldo per 31 Desember 2024	1.722.156.865.217
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(684.974.726.680)
Nilai buku per 31 Desember 2024	1.037.182.138.537

D.2.1.3.5. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.504.068.840 dan Rp47.793.132.611, mengalami kenaikan sebesar Rp2.710.936.229 atau 5,67%. Perbandingan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam Rupiah)

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2024	31 Desember 2023
112	BP Batam	1.349.159.900	1.349.159.900
-	SKK Migas	49.154.908.940	46.443.972.711
Total		50.504.068.840	47.793.132.611

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	47.793.132.611
Penambahan :	5.862.860.969
Pembelian	236.300.000
Perolehan Lainnya	4.204.768.730
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.421.792.239
Pengurangan:	3.151.924.740
Reklasifikasi Keluar	3.151.924.740
Saldo per 31 Desember 2024	50.504.068.840
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(14.464.919.196)
Nilai buku per 31 Desember 2024	36.039.149.644

D.2.1.3.6. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp8.954.062.424** dan **Rp36.069.517.195**, mengalami penurunan sebesar Rp27.115.454.771 atau 75,18%. KDP tersebut terdapat pada BP Batam. Mutasi KDP tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo Awal	36.069.517.195
Penambahan:	244.299.526.667
Perolehan/Penambahan KDP	24.232.239.036
Pengembangan KDP	179.456.064.529
Koreksi Nilai KDP Bertambah	39.412.367.434
Perolehan Lainnya KDP	1.198.855.668
Pengurangan	(271.414.981.438)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(39.299.648.932)
Penghapusan/Penghentian KDP	(3.447.022.486)
Reklasifikasi KDP Menjadi Barang Jadi	(228.668.310.020)
Saldo per 31 Desember 2024	8.954.062.424

D.2.1.3.7. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp931.230.799.820** dan **Rp889.177.503.566**, mengalami kenaikan sebesar Rp42.053.296.254 atau (4,73%). Akumulasi penyusutan terdiri dari:

1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp227.912.809.378;
2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.878.344.566;
3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp684.974.726.680;
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.464.919.196.

Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2024	31 Desember 2023
112	BP Batam		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	15.549.852.111	13.858.937.984
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	3.878.344.566	2.459.771.970
	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	684.965.876.905	496.295.849.682
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	39.305.131	37.438.464
-	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.685.257.107	241.450.771.434
-	SKK Migas		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	139.153.117.660	120.774.659.138
	Akumulasi Penyusutan Jaringan	8.849.775	7.240.725
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	14.425.614.065	14.292.834.169
-	PPP BUN		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.524.582.500	-
Total		931.230.799.820	889.177.503.566

D.2.1.4. PROPERTI INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Nomor 17 Properti Investasi. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau meningkatkan nilai aset atau keduanya. Saldo Properti Investasi (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) per 31 Desember 2024 sebesar **Rp32.757.504.933.043** sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp32.335.552.112.417**, terjadi kenaikan sebesar Rp421.952.820.626 atau 1,30 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023.

Adapun perbandingan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

No	BA BUN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1.	999.03	12.143.026.669.492	11.303.263.278.101	839.763.391.391
	Properti Investasi	31.409.555.874.245	30.273.971.040.544	1.135.584.833.701
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(19.266.529.204.753)	(18.970.707.762.443)	(295.821.442.310)
2.	999.99	20.614.478.263.551	21.032.288.834.316	(417.810.570.765)
	Properti Investasi	57.861.451.775.441	57.855.246.424.044	6.205.351.397
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(37.246.973.511.890)	(36.822.957.589.728)	(424.015.922.162)
Total		32.757.504.933.043	32.335.552.112.417	421.952.820.626

D.2.1.4.1. PROPERTI INVESTASI

D.2.1.4.1.1. PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.03

Posisi Properti Investasi dalam kelolaan LMAN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp31.409.555.874.245 dan Rp30.273.971.040.544 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp19.266.529.204.753 dan Rp18.970.707.762.443 sehingga nilai Properti Investasi bersih adalah sebesar Rp12.143.026.669.492 dan Rp11.303.263.278.101.

Rincian Properti Investasi per kelompok aset menurut penyerahkelolaan secara komparatif pada 31

Desember 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Kelompok Aset Penyerahkelolaan	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
Properti Investasi eks BPPN	964.787.053.773	1.003.505.753	963.783.548.020
Properti Investasi eks PPA	652.379.473.774	63.685.461.433	588.694.012.341
Properti Investasi eks Pertamina	28.821.040.315.002	19.164.621.538.252	9.656.418.776.750
Properti Investasi eks HTBI	754.881.078.467	25.766.813.591	729.114.264.876
Properti Investasi Lainnya	216.467.953.229	11.451.885.724	205.016.067.505
Total Properti Investasi	31.409.555.874.245	19.266.529.204.753	12.143.026.669.492

1. Properti Investasi eks BPPN

Posisi Properti Investasi eks BPPN pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp964.787.053.773 dengan akumulasi penyusutan Rp1.003.505.753. Nilai bersih dari Properti Investasi eks BPPN adalah sebesar Rp963.783.548.020. Penyajian pos Properti Investasi eks BPPN sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi.

Rincian Properti Investasi eks BPPN per klasifikasi per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Tanah	651.986.218.000	295.090.378.518	-	947.076.596.518
Gedung dan Bangunan	14.651.546.247	2.221.303.000	-	16.872.849.247
Properti Investasi dalam Pengerjaan	68.182.537	769.425.471	-	837.608.008
Total Properti Investasi	666.705.946.784	298.081.106.989	-	964.787.053.773

Mutasi Properti Investasi eks BPPN pada tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 31-Des-2023	651.986.218.000	14.651.546.247	-	68.182.537
Perubahan Tambah:				
(+) Reklasifikasi	275.766.050.767	-	-	-
(+) Selisih Penilaian Wajar	19.324.327.751	2.221.303.000	-	-
(+) Pengakuan PIDP	-	-	-	769.425.471
Total perubahan tambah	295.090.378.518	2.221.303.000	-	769.425.471
Posisi 31-Des-2024	947.076.596.518	16.872.849.247	-	837.608.008
Posisi 31-Des-2024	964.787.053.773			

2. Properti Investasi eks PPA

Posisi Properti Investasi eks PPA pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp652.379.473.774 dengan total akumulasi penyusutan Rp63.685.461.433. Nilai bersih Properti Investasi eks PPA adalah sebesar Rp588.694.012.341. Penyajian pos Properti Investasi eks PPA sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi.

Rincian Properti Investasi eks PPA per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Tanah	388.427.787.000	25.441.745.000	-	413.869.532.000
Gedung dan Bangunan	208.440.030.683	5.110.282.774	-	213.550.313.457
Peralatan dan Mesin	16.824.346.799	28.411.750	-	16.852.758.549

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Properti Investasi dalam Pengerjaan	1.069.500.998	7.615.727.707	(578.358.937)	8.106.869.768
Total Properti Investasi	614.761.665.480	38.196.167.231	(578.358.937)	652.379.473.774

Mutasi Properti Investasi eks PPA pada tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 31-Des-2023	388.427.787.000	208.440.030.683	16.824.346.799	1.069.500.998
Perubahan Tambah:				
(+) CAPEX	-	5.110.282.774	28.411.750	-
(+) Reklasifikasi	25.441.745.000	-	-	-
(+) Pengakuan PIDP	-	-	-	7.615.727.707
Total perubahan tambah	25.441.745.000	5.110.282.774	28.411.750	7.615.727.707
Perubahan Pengurang:				
(-) Pendetilan PIDP	-	-	-	(578.358.937)
Total perubahan kurang	-	-	-	(578.358.937)
Posisi 31-Des-2024	413.869.532.000	213.550.313.457	16.852.758.549	8.106.869.768
Posisi 31-Des-2024	652.379.473.774			

3. Properti Investasi eks Pertamina

Penyajian pos Properti Investasi eks Pertamina sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi. Posisi Properti Investasi eks Pertamina pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp28.821.040.315.002 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp19.164.621.538.252 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp9.656.418.776.750.

Rincian Properti Investasi eks Pertamina per kelompok adalah sebagai berikut:

Kelompok	Posisi 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Kawasan	26.772.680.778.739	793.989.780.900	-	27.566.670.559.639
Non-Kawasan	1.254.369.755.363	-	-	1.254.369.755.363
Total Properti Investasi	28.027.050.534.102	793.989.780.900	-	28.821.040.315.002

Mutasi kurang bersih Properti Investasi eks Pertamina pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2024 terdiri dari:

Keterangan	Kawasan	Non-Kawasan	Total
Posisi 31-Des-2023	26.772.680.778.739	1.254.369.755.363	28.027.050.534.102
Perubahan Tambah:			
(+) Kilang LNG Badak	793.714.432.000	-	793.714.432.000
(+) Kawasan Ciperna	(169.639.000)	-	(169.639.000)
(+) Pengakuan PIDP	444.987.900	-	444.987.900
Total perubahan tambah	793.989.780.900	-	793.989.780.900
Posisi 31-Des-2024	27.566.670.559.639	1.254.369.755.363	28.821.040.315.002

4. Properti Investasi eks HTBI

Penyajian pos Properti Investasi eks HTBI sejak tahun pelaporan 2022 berasal dari implementasi PSAP 17 Properti Investasi. Posisi Properti Investasi eks HTBI pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp754.881.078.467 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp25.766.813.591 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp729.114.264.876.

Rincian Properti Investasi eks HTBI per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Tanah	617.553.811.140	-	-	617.553.811.140
Gedung dan Bangunan	130.496.206.311	101.600.000	-	130.597.806.311
Peralatan dan Mesin	2.744.216.167	-	-	2.744.216.167
Properti Investasi dalam Pengerjaan	721.875.010	3.263.369.839	-	3.985.244.849
Total Properti Investasi	751.516.108.628	3.364.969.839	-	754.881.078.467

Mutasi Properti Investasi eks HTBI pada tahun 2024 dirinci sebagai berikut:

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 31-Des-2023	617.553.811.140	130.496.206.311	2.744.216.167	721.875.010
Perubahan Tambah:				
(+) CAPEX	-	101.600.000	-	-
(+) Reklasifikasi	-	-	-	-
(+) Pengakuan PIDP	-	-	-	3.263.369.839
Total perubahan tambah	-	101.600.000	-	3.263.369.839
Perubahan Pengurang:				
(-) Pendetilan PIDP	-	-	-	-
Total perubahan kurang	-	-	-	-
Posisi 31-Des-2024	617.553.811.140	130.597.806.311	2.744.216.167	3.985.244.849
Posisi 31-Des-2024	754.881.078.467			

5. Properti Investasi Lainnya

Posisi Properti Investasi Lainnya pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp216.467.953.229 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp11.451.885.724 sehingga nilai bersih setelah penyusutan adalah sebesar Rp205.016.067.505.

Rincian Properti Investasi Lainnya per klasifikasi aset adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	198.938.852.000	-	-	198.938.852.000
Peralatan dan Mesin	14.997.933.550	2.377.548.120	-	17.375.481.670
PI dalam Pengerjaan	-	153.619.560	-	153.619.560
Total	213.936.785.550	2.531.167.680	-	216.467.953.230*

*selisih Rp1 karena pembulatan

Penambahan Properti Investasi Lainnya pada periode ini berasal dari serah terima aset kelolaan baru berupa Active Harmonic Filter (AHF), pembelian peralatan dan mesin, serta adanya pengerjaan renovasi/pengembangan aset.

D.2.1.4.1.2. PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.99

Saldo Properti Investasi tahun 2024 sebesar Rp57.861.451.775.441, sedangkan per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp57.855.246.424.044, mengalami kenaikan sebesar Rp6.205.351.397.

Rincian Properti Investasi dari per 31 Desember 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Satker	Nilai Aset	Akumulasi Penyusutan	Nilai Bersih
1	UAKPA BMN Eks BMN Idle	88.809.950.101	140.554.714	88.669.395.387
2	UAKPA Aset Eks Pertamina	18.759.780.038.841	7.685.669.636.181	11.074.110.402.660
3	UAKPA Aset PKP2B	38.990.110.003.101	29.561.163.320.995	9.428.946.682.106
4	UAKPA BMN Hulu Migas pada DJKN	22.751.783.398	-	22.751.783.398
	Total	57.861.451.775.441	37.246.973.511.890	20.614.478.263.551

D.2.1.4.1.2.1. Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN Idle

Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp88.809.950.101 dan Rp92.242.781.101. Rincian Properti Investasi UAKPA BMN Eks BMN Idle adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
Tanah	92.070.345.626	795.372.000	4.228.203.000	88.637.514.626
Bangunan	172.435.475	-	-	172.435.475
Total Properti Investasi	92.242.781.101	795.372.000	4.228.203.000	88.809.950.101

Mutasi Properti Investasi BMN Eks BMN Idle Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah dengan rincian sebagai berikut:

Kode BMN Idle	Uraian Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1	141.344.000
2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	4	632.111.000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	21.917.000
Grand Total		6	795.372.000

Sesuai dengan Deklarasi PI atas reklasifikasi Aset Idle yang diserahkan ke DJKN ke Properti Investasi sesuai dengan Deklarasi PI Periode TA 2024.

2. Mutasi kurang dengan rincian sebagai berikut:

Kode BMN Idle	Uraian Barang	Jumlah Barang	Nilai Perolehan
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	228.000.000
2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	2	589.875.000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3.068.000.000
2010307999	Tanah Untuk Jalan Lainnya	2	181.855.000
2010202003	Tanah Lapangan Parkir Sirtu (Pasir Batu)	1	160.473.000
Grand Total		7	4.228.203.000

D.2.1.4.1.2.2. Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp18.759.780.038.841 dan Rp18.644.290.105.918.

Rincian Properti Investasi UAKPA Eks Pertamina adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
Tanah & Bangunan	47.580.000.000	-	-	47.580.000.000
Aset Eks Kontrak Kerjasama	18.596.710.105.918	164.590.753.000	(49.100.820.077)	18.712.200.038.841
Total Properti Investasi	18.644.290.105.918	164.590.753.000	(49.100.820.077)	18.759.780.038.841

1. Peningkatan signifikan akun properti investasi disebabkan oleh adanya Inventarisasi dan Penilaian

terhadap aset Eks Pertamina selama tahun 2024 sebesar Rp164.590.753.000 yang terdiri dari:

- a. Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada Field Tarakan (wilayah kerja KPKNL Tarakan) akhir tahun 2023, namun hasil penilaian terbit tahun 2024 sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor BA-20/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2023 Lampiran LP-01 sebesar Rp114.618.962.000;
 - b. Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada Field Pendopo (wilayah kerja KPKNL Lahat) tahun 2024 sesuai BA-01/KN.04/IPEKSPERTAMINA/2024 Lampiran LP-01 sebesar Rp27.914.508.000;
 - c. Hasil inventarisasi dan penilaian aset eks Pertamina pada Field Jatibarang berdasarkan BA-02/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2024 sebesar Rp9.856.000.000;
 - d. Hasil inventarisasi dan penilaian aset eks Pertamina pada Field Limau berdasarkan BA-03/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2024 sebesar Rp5.176.304.000;
 - e. Hasil inventarisasi dan penilaian aset eks Pertamina pada Field Prabumulih berdasarkan BA-04/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2024 sebesar Rp7.024.979.000.
2. Terdapat pengurangan nilai atas Aset Eks Kontrak Kerjasama sebesar Rp49.100.820.077 yang terdiri dari:
- a. Pelepasan aset berlokasi di Jambi dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada BPOM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KM.6/KN.4/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp2.261.594.986;
 - b. Penghapusan aset sesuai dengan KMK 35/KM.6/KN.4/2024 tanggal 3 Agustus 2024 sebesar Rp204.645.091;
 - c. Pelepasan aset berlokasi di Tarakan dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada BPOM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.6/2024 tanggal 28 Februari 2024, penghapusan BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.06/2025 tanggal 5 Februari 2025, dan BAST tanggal 06 September 2024 sebesar Rp21.924.564.000;
 - d. Pelepasan aset berlokasi di Tarakan dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada Kementerian Agama berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.6/2025 tanggal 17 Maret 2024, penghapusan BMN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.06/2025 tanggal 5 Februari 2025, dan BAST tanggal 06 September 2024 sebesar Rp24.710.016.000.

D.2.1.4.1.2.2.1. Aset Berupa Tanah dan Bangunan

No	Lokasi Aset	Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Nilai (Rp)
1	Sawangan, Depok	8.345	-	-
2	Jl. Abdul Muis 68, Jakarta	4.000	-	47.580.000.000
Jumlah				47.580.000.000

Aset tanah di Jl. Abdul Muis Jakarta dan Sawangan Depok, Direktorat PKN telah mengirimkan surat kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) Nomor S-369/KN.4/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Pengelolaan atas Aset Eks Pertamina di Jalan Abdul Muis dan Sawangan, Depok. Selain itu Tanah di Sawangan Depok masih dalam proses identifikasi lahan oleh PT Pertamina (Persero).

Terhadap Aset eks Pertamina di Jalan Abdul Muis, terdapat surat usulan sewa dari Commercial&Operation Director Pertamina Retail. Selanjutnya atas usulan tersebut Dit PKN telah mengirimkan surat Nomor S-1553/KN.4/2023 tanggal 29 September 2023 yang intinya memintakan

kelengkapan dokumen atas usulan pemanfaatan yang diusulkan. Sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dari PT Pertamina.

D.2.1.4.1.2.2.2. Aset Eks Kontrak Kerjasama Pertamina

Properti Investasi Aset Eks Kontrak Kerjasama per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp18.712.200.038.841 dan Rp18.596.710.105.918, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Tanah	10.367.794.016.064	10.284.008.943.050
2	Bangunan	1.254.097.259.798	1.245.387.526.797
3	Equipment	3.864.236.562.672	3.846.777.393.764
4	Sumur	3.090.209.637.153	3.084.964.929.153
5	Lain-lain	135.862.563.154	135.571.313.154
	Jumlah	18.712.200.038.841	18.596.710.105.918

Aset eks Kontrak Kerjasama berada pada wilayah kerja di 12 Kanwil DJKN, rincian Properti Investasi Aset Eks Kontrak Kerjasama sebagai berikut:

No	Kanwil DJKN	31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Des 2024
1	Aceh	485.510.795.000	-	-	485.510.795.000
2	Sumatera Utara	466.628.624.040	-	-	466.628.624.040
3	Riau, Kepri dan Sumbar	1.213.380.999.499	-	-	1.213.380.999.499
4	Sumatera Selatan dan Babel	7.511.161.945.065	40.115.791.000	2.466.240.077	7.548.811.495.988
5	Serang	16.903.044.000	-	-	16.903.044.000
6	Jakarta	2.369.256.486	-	-	2.369.256.486
7	Jawa Barat	5.511.812.113.245	9.856.000.000	-	5.521.668.113.245
8	Jawa Tengah dan DIY	396.640.557.166	-	-	396.640.557.166
9	Jawa Timur	45.090.263.409	-	-	45.090.263.409
10	Kalimantan Selatan dan Tengah	876.316.852.300	-	-	876.316.852.300
11	Kaltimara	1.478.753.638.330	114.618.962.000	46.634.580.000	1.546.738.020.330
12	Papua, Papua Barat, Maluku	592.142.017.378	-	-	592.142.017.378
	TOTAL	18.596.710.105.918	164.590.753.000	49.100.820.077	18.712.200.038.841

Adapun transaksi yang mempengaruhi aset eks kontrak kerjasama sampai dengan 30 September tahun 2024 sebagai berikut:

1. Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada Field Tarakan (wilayah kerja KPKNL Tarakan) akhir tahun 2023, namun hasil penilaian terbit tahun 2024 sebesar Rp114.618.962.000;
2. Hasil Inventarisasi dan Penilaian aset Eks Pertamina pada Field Pendopo (wilayah kerja KPKNL Lahat) akhir tahun 2023, namun hasil penilaian tahun 2024 sebesar Rp27.914.508.000;
3. Hasil inventarisasi dan penilaian aset eks Pertamina pada Field Jatibarang berdasarkan BA-02/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2024 sebesar Rp9.856.000.000;
4. Hasil inventarisasi dan penilaian aset eks Pertamina pada Field Limau berdasarkan BA-03/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2024 sebesar Rp5.176.304.000;
5. Hasil inventarisasi dan penilaian aset eks Pertamina pada Field Prabumulih berdasarkan BA-04/KN.4/IPEKSPERTAMINA/2024 sebesar Rp7.024.979.000;
6. Penghapusan aset tanah yang terletak pada Field Jambi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 25/KM.6/KN.4/2024 tanggal 5 Juli 2024 tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari Aset Eks Pertamina, karena telah ditetapkan status penggunaannya pada BPOM Jambi sebesar Rp2.261.594.986;

7. Penghapusan aset dari neraca sesuai KMK 35/KM.6/KN.4/2024 tanggal 3 Agustus 2024 sebesar Rp204.645.091;
8. Pelepasan aset berlokasi di Tarakan dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada BPOM berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.6/2024 tanggal 28 Februari 2024 dan BAST tanggal 06 September 2024 sebesar Rp21.924.564.000;
9. Pelepasan aset berlokasi di Tarakan dengan mekanisme penetapan status penggunaan pada Kementerian Agama Keputusan Menteri Keuangan Nomor 46/KM.6/2025 tanggal 17 Maret 2024 dan BAST tanggal 06 September 2024 sebesar Rp24.710.016.000.

D.2.1.4.1.2.3. Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp38.990.110.003.101 dan Rp39.113.646.034.627. Rincian Properti Investasi UAKPA PKP2B adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Saldo 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Des 2024
Tanah	3.334.423.902.630	149.536.828.309	117.714.221.406	3.366.246.509.533
Non Tanah	35.779.222.131.997	319.051.424.148	474.410.062.577	35.623.863.493.568
Total Properti Investasi	39.113.646.034.627	468.588.252.457	592.124.283.983	38.990.110.003.101

Mutasi Properti Investasi BMN BMN PKP2B Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Mutasi tambah Properti Investasi yaitu sebesar Rp468.588.252.457 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mutasi Tambah Tanah sebesar Rp149.536.828.309 terdiri atas:
 - 1) Penambahan Tanah PT KPC sebelum TA 2024 yang baru dilaporkan dengan tahun perolehan di atas tahun 2010 sebesar Rp6.633.038.661 sesuai Berita Acara nomor 434.BA/BN.04/SDB/2024 tanggal 15 Agustus 2024;
 - 2) Penambahan Tanah PT KPC sebanyak 88 (delapan puluh delapan) line item dengan tahun perolehan dibawah 2010 sebesar Rp44.858.279.000 yang belum pernah dilaporkan dan dicatatkan pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) namun telah dilakukan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian (IP) BMN dalam rangka pencatatan dengan Berita Acara Inventarisasi nomor 386.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 25 September 2024;
 - 3) Penambahan Tanah pada PT MHU sesuai Berita Acara Inventarisasi nomor 493.8A/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 29 November 2024 dan LHIP tanggal 18 Desember 2024 sebesar Rp896.001.000;
 - 4) Koreksi tambah pada PT KPC atas bidang tanah yang terkait dengan koridor Jalan Pengganti Permanen Ruas Sangatta – Simpang Perdu (SPRD) dan bidang lainnya diluar koridor tersebut namun pembebasannya dilakukan secara bersamaan, dengan tahun perolehan 2011 s.d 2023 sebesar Rp29.376.564.811 sesuai Berita Acara Penelitian Administrasi dan Dokumen Pendukung Nomor 73.BA/SDB.K/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
 - 5) Koreksi tambah pada PT KPC sebesar Rp1.132.837 karena kesalahan perhitungan proporsi nilai pembebasan tanah koridor Jalan Ruas SPRD Berita Acara Penelitian Administrasi dan Dokumen Pendukung Nomor 73.BA/SDB.K/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
 - 6) Koreksi tambah sebesar Rp67.771.812.000 berupa BMN PKP2B pada PT KPC atas tanah sebanyak 90 (sembilan puluh) line item tanah yang berada di area sekitaran Jalan Pengganti Sementara (JPS) ruas Simpang Perdu – Batu Ampar (MWRD) dan 8 (delapan line item tanah yang berada di area yang akan dilakukan pemanfaatan oleh PT Kaltim Nusantara Coal

(KNC) yang didasarkan pada Berita Acara Inventarisasi (BAI) nomor 497.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 5 Desember 2024.

b. Mutasi Tambah Non Tanah sebesar Rp319.051.424.148 terdiri atas:

- 1) Mutasi tambah Properti Investasi Non Tanah berupa penambahan sebesar Rp50.049.610.781, merupakan penyelesaian pekerjaan yang dimulai pada masa PKP2B dan diselesaikan pada masa IUPK TA 2024 pada PT Kaltim Prima Coal sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN yang berasal dari PKP2B PT Kaltim Prima Coal Tahunan Tahun Anggaran 2024 Nomor: 69.BA/BN.10/SJA2.2/2025;
- 2) Penambahan BMN Non Tanah pada PT KJA sesuai Surat Direktur PKKN Nomor S-100/KN.2/2024 tanggal 29 April 2024 hal Penyampaian Laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN PKP2B PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp260.188.477.000;
- 3) Penambahan BMN Non Tanah pada PT Arutmin Indonesia sesuai Surat Direktur PKKN Nomor S-155/KN.2/2024 tanggal 12 Juni 2024 hal Penyampaian Laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN PKP2B PT Arutmin Indonesia sebesar Rp930.170.000;
- 4) Koreksi tambah sebesar Rp5.850.065.367 atas BMN non tanah PT KPC dengan perolehan di bawah tahun 2024 sesuai Berita Acara nomor 523.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 3 Oktober 2024;
- 5) Koreksi tambah sebesar Rp896.089.000 karena reklasifikasi pencatatan atas 1 paket Furniture Apartemen Kemang dengan kode Aset JKT-8-143-10.06.25 pada PT Kideco Jaya Agung menjadi 29 unit BMN sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN yang berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung Tahun Tahun Anggaran 2024 Nomor: 73.BA/BN.10/SJA2.2/2025;
- 6) Koreksi tambah sebesar Rp1.137.012.000 karena Reklas dari CALK ke Neraca atas BMN Non Tanah PT Tanito Harum sesuai Berita Acara Inventarisasi (BAI) nomor 492.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 29 November 2024.

2. Mutasi kurang Properti Investasi yaitu sebesar Rp592.124.283.983 karena:

a. Mutasi kurang tanah sebesar Rp117.714.221.406 terdiri atas:

- Mutasi kurang atas Tanah pada PT Multi Harapan Utama sebesar Rp116.626.694.000 sesuai SK Penghapusan dengan Nomor 423.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 26 Juni 2024 tentang Penghapusan BMN Berupa Tanah Yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama Di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur Yang Telah Dihilangkan Kepada Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur;
- Mutasi kurang atas Tanah pada PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp558.000.000 merupakan penghapusan atas sebagian bidang Tanah yang dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Paser Kalimantan Timur sesuai SK Penghapusan Nomor 649.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
- Koreksi kurang sebesar Rp148.092.381 karena kesalahan perhitungan proporsi nilai pembebasan tanah koridor Jalan Ruas SPRD pada PT Kaltim Prima Coal sesuai Berita Acara Penelitian Administrasi dan Dokumen Pendukung Nomor 73.BA/SDB.K/V/2024 tanggal 15 Mei 2024;
- Koreksi kurang sebesar Rp381.435.025 karena merupakan tanah yang telah tercatat pada Koridor Jalan Ruas SPRD namun pembebasannya dilakukan pada masa IUPK (Tahun 2023). Terhadap tanah tersebut, dikoreksi terlebih dahulu dari LK PKP2B SM I 2024 sampai menunggu proses pengelolaan BMN PKP2B yang berasal dari IUPK PT Kaltim Prima Coal selesai dilakukan (baik melalui hibah atau menggunakan klausul ketentuan lain pada PMK Pengelolaan BMN PKP2B) sesuai Berita Acara Penelitian Administrasi dan Dokumen Pendukung Nomor 73.BA/SDB.K/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.

b. Mutasi kurang non tanah sebesar Rp474.410.062.577 terdiri atas:

- SK Menteri ESDM Nomor 47.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 29 Januari 2024 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama di Area Blok Tanjung Dalam Operation Kalimantan Timur sebesar Rp31.651.590.995;
- SK Menteri ESDM Nomor 418.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 29 Juni 2024 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Tanito Harum berupa Peralatan dan Mesin di Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebesar Rp1.955.200.000;
- SK Menteri ESDM Nomor 918.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Tanito Harum berupa Peralatan dan Mesin di Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebesar Rp1.159.000;
- Koreksi kurang sebesar Rp14.817.350.088 dikarenakan adanya penerimaan hasil penjualan lelang BMN PT Arutmin Indonesia dengan NTPN BBC2E48VET3PPC8 tanggal 25 Juni 2024, saat ini sudah dihapuskan pada CALK sesuai SK Penghapusan Nomor 1011.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 11 November 2024;
- Koreksi kurang sebesar Rp896.089.000 karena reklasifikasi pencatatan atas 1 paket Furniture Apartemen Kemang dengan kode Aset JKT-8-143-10.06.25 pada PT Kideco Jaya Agung menjadi 29 unit BMN sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN yang berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung Tahun Tahun Anggaran 2024 Nomor: 73.BA/BN.10/SJA2.2/2025;
- Koreksi kurang pencatatan BMN dari Neraca ke CALK pada PT Adaro Indonesia sebesar Rp30.168.896.587 yang menjadi koreksi tambah pada CaLK karena telah diterima PNPB penjualan lelang atas aset BMN tersebut sebesar Rp1.367.054.000 dengan nomor NTPN 12B9255DFA1004B9 tanggal 5 Desember 2024, namun SK Penghapusannya belum terbit;
- Koreksi kurang BMN dari Neraca ke CALK pada PT Multi Harapan Utama sebesar Rp44.511.572.501 karena telah diterima PNPB atas penjualan lelang aset tersebut senilai Rp1.653.750.000 sesuai NTPN AC17C48VVF2FADCO tanggal 5 Agustus 2024, saat ini telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor 962.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 1 November 2024 dan telah dilakukan penghapusan pada CALK;
- Koreksi kurang dari Neraca ke CALK pada PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp349.964.233.408 karena telah diterima PNPB atas penjualan lelang aset tersebut sebesar Rp16.165.135.000 sesuai NTPN 144C63CIFKDFIAO5 tanggal 18 Juli 2024, saat ini telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor 1087.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 29 November 2024 dan telah dilakukan penghapusan pada CALK;
- Koreksi kurang pada Neraca ke CALK PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp443.971.000 karena telah diterima PNPB atas penjualan lelang aset tersebut sebesar Rp31.677.000 sesuai NTPN 0C67955DF9065U1N tanggal 17 September 2024, saat ini telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor 1137.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan telah dilakukan penghapusan pada CALK.
- Selisih pembulatan sebesar minus Rp2.

3. Saldo akhir 31 Desember 2024 Properti Investasi yaitu sebesar Rp38.990.110.003.101.

D.2.1.4.1.2.4. Properti Investasi pada UAKPA BMN Hulu Migas pada DJKN

Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.751.783.398 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.067.502.398. Seluruh Properti Investasi UAKPA PL BMN Hulu Migas pada DJKN adalah berupa tanah sebagaimana tabel berikut berikut:

Klasifikasi	31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Des 2024
Tanah	5.067.502.398	17.684.281.000	-	22.751.783.398
Total Properti Investasi	5.067.502.398	17.684.281.000	-	22.751.783.398

Saldo tanah tersebut terdiri atas:

No	KKKS Asal	Nilai
1	Star Energy (Sekayu) Ltd.	479.504.520
2	Orchard Energy (West Belida Limited)	77.760.000
3	Aset eks Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd.	4.510.237.878
4	Aset eks Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd	417.099.000
5	Aset eks SPE Petroleum Ltd	17.267.182.000
Total		22.751.783.398

Secara rinci aset properti investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Aset eks Star Energy Sekayu berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Sekayu (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0023.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-4/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Danau Cala, Lais, Musi Banyuasin, Sumsel	07 September 2013	-	25.643	479.504.520	-

2. Aset eks Orchard Energy (West Belida Limited) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja West Belida (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 0024.BA/92/SJA.4/2019 dan Nomor BA-5/KN.4/2019 tanggal 17 Mei 2019.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Sungai Merah, Pelawan, Sarolangun, Jambi	7 Agustus 2012	12 November 2021	8.099,78	809.978.000	26.497.000
2	Pelawan Jaya, Pelawan, Sarolangun, Jambi	7 Agustus 2012	12 November 2021	12.888,29	1.501.329.000	51.263.000

3. Aset eks Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Citarum (Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan) Nomor 16.BA/92/SJA.4/2020 dan Nomor BA-1/KN.4/2020 tanggal 29 Juli 2020 untuk aset di lokasi Kabupaten Karawang.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Kec. Pangkalan, Kab. Kewarang, Jawa Barat	2011	-	54.196	4.510.237.878	-

4. Aset eks Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. yang dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Star Energy Sentosa (Sebatik) Ltd. pada Wilayah Kerja Sebatik dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan Nomor 417.BA/BN.05/SJA.4/2023 dan Nomor BA-8/KN.4/2023 tanggal 8 Desember 2023.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Desa Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara	2009		52.503,00	715.400.205	210.012.000
2	Jl. Sinualing RT. 07, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan	2016	-	10.000,00	207.087.000	-

5. Aset eks SPE Petroleum Ltd yang dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi Berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja SPE Petroleum Ltd pada Wilayah Kerja Madura dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan Nomor 416.BA/BN.05/SJA.4/2023 dan Nomor BA-9/KN.4/2023 tanggal 8 Desember 2023.

No	Lokasi	Tanggal Perolehan	Tanggal Penilaian	Luas (m2)	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Wajar (Rp)
1	Dungok #1 Desa Gunung Eleh, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur	13 Agustus 2009	30 Agustus 2024	53.526,00	4.469.421.000	2.203.381.000
2	Dungok #2 Desa Gunung Eleh & Desa Batuporo Timur, Kec. Kedungdung, Kab. Sampang, Prov. Jawa Timur	15 Juli 2010	5 September 2024	15.954,00	1.332.159.000	652.006.000
3	Dolang #1 Desa Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	9 Juli 2009	30 Agustus 2024	44.998,00	-	3.070.298.000
4	Dolang #2 Desa Batokaban, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	10 April 2010	5 September 2024	30.676,00	-	2.145.518.000
5	Dolang #3 Desa Genteng, Kec. Konang, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	7 Agustus 2009	30 Agustus 2024	36.312,00	-	2.469.275.000
6	Madederop #1 Desa Banyoneng Dajah, Kec. Gege, Kab. Bangkalan, Prov. Jawa Timur	15 September 2009	30 Agustus 2024	30.296,00	-	6.726.704.000

D.2.1.4.2. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI

Nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp56.513.502.716.643 dan Rp55.793.665.352.171, terdapat peningkatan sebesar Rp719.837.364.472 dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi adalah sebagai berikut:

D.2.1.4.2.1. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA BA 999.03

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.266.529.204.753 dan Rp18.970.707.762.443, terdapat peningkatan sebesar Rp295.821.442.310 atau 1,56% dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023.

Kelompok Aset Penyerahkelolaan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
Properti Investasi eks BPPN	1.003.505.753	405.466.565	598.039.188
Properti Investasi eks PPA	63.685.461.433	54.658.307.197	9.027.154.236
Properti Investasi eks Pertamina	19.164.621.538.252	18.890.126.863.729	274.494.674.523
Properti Investasi eks HTBI	25.766.813.591	20.899.716.138	4.867.097.453
Properti Investasi Lainnya	11.451.885.724	4.617.408.814	6.834.476.910
Total Properti Investasi	19.266.529.204.753	18.970.707.762.443	295.821.442.310

1. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks BPPN

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks BPPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.003.505.753 dan Rp405.466.565 dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2024
Gedung dan Bangunan	405.466.565	598.039.188	-	1.003.505.753
	405.466.565	598.039.188	-	1.003.505.753

Perubahan Penambahan penyusutan pada periode ini merupakan pembebanan penyusutan.

2. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks PPA

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks PPA per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp63.685.461.433 dan Rp54.658.307.197 dengan rincian sebagai berikut:

Penyusutan	31-Des-2023	Tambah	Kurang	31-Des-2024
Gedung dan Bangunan	44.505.447.869	6.673.822.496	-	51.179.270.365
Peralatan dan Mesin	10.152.859.328	2.353.331.740	-	12.506.191.068
	54.658.307.197	9.027.154.236	-	63.685.461.433

Penambahan penyusutan pada periode ini merupakan pembebanan penyusutan.

3. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks Pertamina

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks Pertamina per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.164.621.538.252 dan Rp18.890.126.863.729 dengan rincian sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2024
Kawasan	18.888.602.526.791	274.082.468.309	-	19.162.684.995.100
Non-Kawasan	1.524.336.938	412.206.214	-	1.936.543.152
	18.890.126.863.729	274.494.674.523	-	19.164.621.538.252

4. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi eks HTBI

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi eks HTBI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.766.813.591 dan Rp20.899.716.138 dengan rincian sebagai berikut.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2024
Gedung dan Bangunan	20.070.204.133	4.431.472.862	-	24.501.676.995
Peralatan dan Mesin	829.512.005	435.624.591	-	1.265.136.596
	20.899.716.138	4.867.097.453	-	25.766.813.591

5. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi Lainnya

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp11.451.885.724 dan Rp4.617.408.814.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31-Des-2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2024
Gedung dan Bangunan	1.989.388.520	3.978.777.040	-	5.968.165.560
Peralatan dan Mesin	2.628.020.294	2.855.699.870	-	5.483.720.164
	4.617.408.814	6.834.476.910	-	11.451.885.724

D.2.1.4.2.2. AKUMULASI PENYUSUTAN PROPERTI INVESTASI PADA BA 99.999

Nilai akumulasi penyusutan properti investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp37.246.973.511.890 dan Rp36.822.957.589.728, terdapat peningkatan sebesar Rp424.015.922.162 atau 1,15% dari saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023.

Kelompok Properti Investasi	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Kenaikan/ Penurunan
UAKPA BMN Eks BMN <i>Idle</i>	140.554.714	139.617.044	937.670
UAKPA BMN Eks Pertamina	7.685.669.636.181	7.615.680.476.297	69.989.159.884
UAKPA PKP2B	29.561.163.320.995	29.207.137.496.387	354.025.824.608
Total Properti Investasi	37.246.973.511.890	36.822.957.589.728	424.015.922.162

D.2.1.4.2.2.1. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA BMN Eks BMN Idle

No	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	88.637.514.626	-	88.637.514.626
2	Gedung dan Bangunan	172.435.475	140.554.714	31.880.761
	Total	88.809.950.101	140.554.714	88.669.395.387

D.2.1.4.2.2.2. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA Eks Pertamina

Saldo akumulasi properti investasi pada UAKPA Eks Pertamina pada tahun 2024 sebesar Rp7.685.669.636.181 yang berasal dari penyusutan Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan 2023 di Neraca	7.615.680.476.297
Mengakui penyusutan selama tahun 2024	71.598.747.796
Menghapus akumulasi penyusutan untuk aset yang dihapuskan sesuai KMK 35/KM.6/KN.4/2024	(204.645.091)
Koreksi perhitungan penyusutan	(1.404.942.821)
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024 di Neraca	7.685.669.636.181

D.2.1.4.2.2.3. Akumulasi Properti Investasi pada UAKPA PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp29.561.163.320.995 dan Rp29.207.137.496.387. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2024	29.207.137.496.387
Mutasi Tambah:	781.524.813.852
Penyusutan	511.279.897.696
Koreksi Reklas	262.064.699.000
Koreksi Pencatatan	8.180.217.156
Mutasi Kurang:	(427.498.989.244)
Penghapusan	(396.234.001.474)
Koreksi Reklas	(28.505.317.276)
Koreksi Pencatatan	(2.759.670.494)
Saldo Akhir 31 Desember 2024	29.561.163.320.995

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan properti investasi yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada 31 Desember 2023 sebesar Rp29.207.137.496.387.
2. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp781.524.813.852 merupakan penyusutan Properti Investasi rincian sebagai berikut.
 - a. Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp511.279.897.696;
 - b. Koreksi tambah atas Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp270.244.916.156 dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi tambah atas Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yang diakibatkan oleh reklas BMN dari CALK ke Neraca hasil Inventarisasi dan Penilaian pada PT Arutmin Indonesia dan PT Kideco Jaya Agung yang nilai bukunya sudah habis sebesar Rp260.927.687.000;
 - Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan pada PT Arutmin Indonesia dikarenakan adanya selisih antara penyusutan dan nilai buku dari BMN yang telah dihapuskan pada TA 2023 sebesar Rp739.530.635;
 - Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan pada PT Arutmin Indonesia dikarenakan adanya selisih antara penyusutan dan nilai buku dari BMN yang telah dihapuskan pada TA 2023 sebesar Rp2.393.752.161;
 - Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan pada PT Tanito Harum dikarenakan koreksi dari CALK ke Neraca atas BMN Non Tanah hasil IP yang nilai bukunya sudah habis sebesar Rp1.137.012.000 sesuai Berita Acara Inventarisasi (BAI) nomor 492.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 29 November 2024;
 - Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan pada PT Adaro Indonesia dikarenakan koreksi perhitungan penyusutan sebesar Rp265.288.752;
 - Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp3.885.556.607,00 dikarenakan koreksi atas kesalahan perhitungan penyusutan tahun anggaran yang lalu;
 - Mutasi tambah atas Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp896.089.000 karena koreksi reklasifikasi pencatatan atas 1 paket Furniture Apartemen Kemang dengan kode Aset JKT-8-143-10.06.25 pada PT Kideco Jaya Agung menjadi 29 unit BMN.
3. Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp427.498.989.244 dengan rincian sebagai berikut.
 - a. Mutasi kurang akibat penghapusan sebesar Rp396.234.001.474 dengan rincian sebagai berikut:
 - SK Menteri ESDM Nomor 47.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 29 Januari 2024 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama di Area Blok Tanjung Dalam Operation Kalimantan Timur sebesar Rp31.161.072.747;
 - SK Menteri ESDM Nomor 1011.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 14 November 2024 Tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp12.543.827.725;
 - SK Menteri ESDM Nomor 962.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 1 November 2024 Tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebesar Rp10.422.997.038;
 - SK Menteri ESDM Nomor 1087.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 29 November 2024 Tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari Eks PKP2B PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebesar Rp342.104.944.964;
 - SK Menteri ESDM Nomor 918.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 22 Oktober 2024 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Tanito Harum berupa Peralatan dan Mesin di Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebesar Rp1.159.000;

b. Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan Properti Investasi akibat penghapusan sebesar Rp31.264.987.770 dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp896.089.000 karena reklasifikasi pencatatan atas 1 paket Furniture Apartemen Kemang dengan kode Aset JKT-8-143-10.06.25 pada PT Kideco Jaya Agung menjadi 29 unit BMN;
- Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan pada PT Kendilo Coal Indonesia dikarenakan koreksi perhitungan penyusutan sebesar Rp9.793.681;
- SK Menteri ESDM Nomor 418.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 29 Juni 2024 Tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Tanito Harum berupa Peralatan dan Mesin di Tenggarong, Kutai Kartanegara Kalimantan Timur sebesar Rp1.853.787.813;
- Koreksi kurang Akumulasi Penyusutan sebesar Rp28.505.317.276 karena reklasifikasi pencatatan dari Neraca ke CALK pada PT Adaro Indonesia karena telah diterima PNBP penjualan lelang atas aset BMN dengan nomor NTPN 12B9255DFA1004B9, namun SK Penghapusannya belum terbit.

4. Saldo akhir 31 Desember 2024 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi yaitu sebesar Rp29.561.163.320.995.

D.2.1.5. PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp47.391.304.707.155 dan Rp47.830.027.314.323 atau mengalami penurunan sebesar Rp438.722.607.168 atau (0,92%).

Rincian Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	15.020.833	-
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman	48.201.737.216.319	48.644.267.627.749
Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.301.698.582.578	2.207.678.942.380
(Peny.Piutang Tak Tertagih Piutang Jangka Panjang)	(3.112.146.112.575)	(3.021.919.255.806)
Jumlah Piutang Jangka Panjang	47.391.304.707.155	47.830.027.314.323

D.2.1.5.1. TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

Jumlah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.020.833 dan Rp0. Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Piutang Tagihan TP/TGR yaitu pada satker OJK yaitu Tuntutan Ganti Rugi BMN Hilang.

D.2.1.5.2. PIUTANG JANGKA PANJANG PEMBERIAN PINJAMAN

Sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, jumlah Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman sebesar Rp48.201.737.216.319 dan Rp48.644.267.627.749, mengalami penurunan sebesar Rp442.530.411.430 atau (0,91%).

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman pada BA 999.04 per 31 Desember 2024 sebesar Rp48.201.737.216.319, dengan rincian adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (153111)	47.613.855.967.381	48.048.014.311.995
Aset Lainnya Kredit Program (153117)	587.881.248.938	596.253.315.754
Jumlah	48.201.737.216.319	48.644.267.627.749

Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (153111) sebesar Rp47.613.855.967.381 merupakan pokok Piutang Pemberian Pinjaman yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun setelah periode Laporan Keuangan TA 2024 (jatuh tempo setelah 31 Desember 2025).

Aset Lainnya Kredit Program (153117) sebesar Rp587.881.248.938 merupakan saldo piutang pokok atas pemberian pinjaman dengan skema kredit program.

Nilai piutang di neraca harus dijaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau tingkat kolektabilitasnya. Dalam menetapkan kebijakan penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang sebaiknya dibedakan menurut jenis/karakteristik piutang. Untuk jenis/ karakteristik piutang pada bagian anggaran pengelolaan pemberian pinjaman dapat dibedakan menjadi pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda/BUMD/ badan hukum lainnya. Sedangkan untuk kualitas piutangnya dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Berikut adalah rincian daftar umur piutang menurut klasifikasi debitur penerusan pinjaman:

Kategori	Klasifikasi Kualitas Piutang				Jumlah
	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
PEMDA	9.401.312.553.173	7.840.618.533	11.511.954.272	183.139.548.766	9.603.804.674.744
BUMN	42.805.860.250.636	1.990.976.194.902	268.443.647.846	11.630.605.863.346	56.695.885.956.730
BUMD	21.927.194.247	-	-	26.605.632.013	48.532.826.260
Perbankan	684.684.811.615	139.778.180.954	-	1.310.092.298.336	2.134.555.290.905
Koperasi	35.577.097.548	181.000.000	-	64.559.936.195	100.318.033.743
Proyek	-	-	-	40.380.207.023	40.380.207.023
IEPC	96.999.515.220	-	-	-	96.999.515.220
Kredit Program	-	-	-	588.042.123.501	588.042.123.501
Total	53.046.361.422.439	2.138.775.994.389	279.955.602.118	13.843.425.609.180	69.308.518.628.126

D.2.1.5.3. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Jumlah Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.301.698.582.578 dan Rp2.207.678.942.380, mengalami kenaikan sebesar Rp94.019.640.198 atau (4,26%). Piutang untuk Tahun 2024 terdiri dari BA 999.03 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya bagian laba BUMN Perumnas sebesar Rp17.225.637.648 dan pada BA999.99 bagian Piutang Jangka Panjang lainnya sebesar Rp2.284.472.944.930, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.225.637.648 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.725.637.648, yang merupakan Piutang dari Perum Perumnas.

Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp17.225.637.648 tersebut merupakan bagian dari piutang atas tunggakan Dana Pembangunan Semesta (DPS) Perum Perumnas dengan

total tunggakan per 31 Desember 2024 sebesar Rp57.225.637.648.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S-693/MK.02/2019 tanggal 23 September 2019 telah dilakukan restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 menjadi piutang jangka panjang. Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.03 sebesar Rp17.225.637.648 berasal dari saldo restrukturisasi piutang Perum Perumnas tahun buku 1991-1997 sebesar Rp62.225.637.648 dikurangi dengan Bagian Lancar atas Piutang Jangka Panjang Lainnya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025 masing-masing sebesar Rp7.500.000.000.

2. Piutang Jangka Panjang lainnya pada BA 999.99 per 31 Desember 2024 sebesar USD141,392,144 atau ekuivalen sebesar Rp2.284.472.944.930 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.182.953.304.732, yang seluruhnya merupakan piutang migas yang berasal dari PT TPPI. Dalam jumlah tersebut di dalamnya juga termasuk piutang yang berasal dari denda/penalti PT TPPI sebesar USD2,158,778 atau ekuivalen sebesar Rp34.879.369.683. Saldo piutang jangka panjang tahun 2024 setelah dikurangi dengan penyisihan piutang jangka panjang adalah sebesar Rp0, karena piutang ini digolongkan sebagai piutang macet dengan penyisihan sebesar 100%.

Atas Piutang Jangka Panjang yang berasal dari PT TPPI, DJA telah meminta pendapat hukum Jamdatun yang telah disampaikan melalui Surat Jamdatun Nomor B-209/G/Gph.1/3/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang pada intinya menyatakan bahwa Piutang Jangka Panjang yang berasal dari PT TPPI dicatat berdasarkan hubungan keperdataan yang mengikat PT TPPI sebagai badan hukum dengan BP Migas (sekarang SKK Migas).

Atas piutang dimaksud, TPPI telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Pengadilan Niaga No: 47/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., jo. Nomor: 60/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst per tanggal 26 Desember 2012.

Namun demikian, mempertimbangkan Surat Jamdatun No. R-116/G/Gph. 1/01/2023, tanggal 31 Januari 2023 perihal Pendapat Hukum Terkait Eksekusi Jaminan Fidusia PT TPPI oleh SKK Migas, yang pada intinya menyampaikan bahwa:

- a. Meskipun terdapat Putusan Perdamaian/Homologasi terhadap TPPI sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat Nomor 47/PKPU/2012/PN.Niaga,Jkt,Pst, jo, Nomor 60/Pailit/2012/PN. Niaga, Jkt. Pst, namun berdasarkan ketentuan Pasal 286 jo. Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, SKK Migas tidak tunduk pada penyelesaian kewajiban pembayaran TPP/ yang diatur dalam Putusan Homologasi dimaksud.
- b. Penyelesaian kewajiban pembayaran TPPI kepada SKK Migas terkait penjualan kondensat bagian negara mengacu pada Seller Appointed Agreement (SAA) beserta amandemennya yaitu dengan melakukan pencairan jaminan-jaminan fidusia yang termuat dalam Akta Fiducia sebagaimana diatur dalam Pasal 5.10 jo. Pasal 19.3 SAA.

Berdasarkan Sertifikat Jaminan Fiducia. No. W7-000819 AH.05.01.TH2011/STD dengan Salinan Buku Daftar Fiducia tanggal 10 Januari 2011 dan perubahannya tanggal 28 Juni 2011, bahwa nilai Jaminan Fidusia sebesar USD300.000.000 dengan nilai Obyek Jaminan Fidusia sebesar USD178.736.443,98.

Adapun obyek Jaminan Fidusia terdiri dari:

- a. Kondensat Bagian Negara yang hak kepemilikannya telah beralih sepenuhnya kepada PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Perjanjian Penunjukan Penjual maupun perubahannya, terakhir dengan Amandemen Kedua, ditandatangani maupun yang akan dimiliki PT TPPI di kemudian hari yang jumlahnya sebanyak 55.719 ton atau 488.122 barrel.
- b. Barang setengah jadi (Sweet Naphta BTX, Intermediate Products) milik PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki PT TPPI di kemudian hari dengan total

sejumlah 20.727 ton atau 158.861 barrel.

- c. Barang jadi milik PT TPPI, baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki PT TPPI di kemudian hari.
- d. Accounts Receivable atau piutang yang merupakan hasil penjualan dari barang jadi milik PT TPPI baik yang telah ada pada saat Akta ditandatangani maupun yang dimiliki oleh PT TPPI di kemudian hari.
- e. Klaim Asuransi atas kondensat dalam pengiriman dan inventory baik yang telah ada pada saat Akta ini ditandatangani maupun yang akan dimiliki PT TPPI di kemudian hari.

Saat ini, SKK Migas selaku pihak yang berikat kontrak dengan PT TPPI sedang mempertimbangkan untuk menempuh opsi eksekusi Jaminan Fidusia dan opsi lainnya dalam penyelesaian piutang PT TPPI, di antaranya:

- a. Penyelesaian Pembayaran Penuh atas Total Outstanding (Pokok dan Denda);
- b. Skema debt to equity swap;
- c. Pelimpahan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- d. Pembayaran tunai melalui pemotongan (cicilan) revenue PT TPPI;
- e. Tunduk pada putusan PKP.

D.2.1.5.4. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH PIUTANG JANGKA PANJANG

Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp3.112.146.112.575** dan **Rp3.021.919.255.806**, mengalami kenaikan sebesar Rp90.226.856.769 atau (2,99%) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	75.104	-
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Pemberian Pinjaman	825.950.528.776	836.493.387.309
3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya	2.286.195.508.695	2.185.425.868.497
Total		3.112.146.112.575	3.021.919.255.806

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp75.104 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur yang terdapat pada satker OJK.

2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Pemberian Pinjaman

Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Pemberian Pinjaman adalah sebesar Rp825.950.528.776 dan sebesar Rp836.493.387.309. Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Pemberian Pinjaman tahun 2024 ini berasal dari Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Pemberian Pinjaman (156511) sebesar Rp238.069.279.837, dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya Kredit Program (156513) sebesar Rp587.881.248.939.

3. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.286.195.508.695 dan Rp2.185.425.868.497.

Saldo penyisihan piutang jangka panjang sebesar Rp2.286.195.508.695 berasal dari saldo piutang jangka panjang BA 999.03 sebesar sebesar Rp17.225.637.648 disisihkan sebesar 10 (sepuluh) persen atau sejumlah Rp1.722.563.765, dan dari BA 999.99 sebesar Rp2.284.472.944.930 berasal dari saldo piutang jangka panjang PT TPPI yang digolongkan dalam piutang macet, yaitu dengan jumlah penyisihan sebesar 100 persen, sehingga penyisihan piutang jangka panjang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp2.284.472.944.930.

D.2.1.6. ASET LAINNYA

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.311.549.518.436.866 dan Rp1.185.499.685.178.993 atau mengalami kenaikan sebesar Rp126.049.833.257.873 (10,63%).

Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tak Berwujud	236.386.021.679	116.979.217.170
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	486.632.618.588.563	446.302.794.935.058
Dana Cadangan Penjaminan	13.675.145.505.000	12.216.159.505.000
Dana Kelolaan BLU	53.287.731.646.004	16.047.968.379.573
Dana Jangka Panjang	28.528.648.017.150	36.015.899.438.036
Aset Lain-lain	697.896.841.387.119	644.945.117.418.303
Aset Lainnya dari Ekuitas UBL	31.292.147.271.351	29.854.766.285.853
TOTAL	1.311.549.518.436.866	1.185.499.685.178.993

D.2.1.6.1. ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp236.386.021.679 dan Rp116.979.217.170, terdapat kenaikan nilai sebesar Rp119.406.804.509 (102,08%). Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Perbandingan Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Tak Berwujud BA 999.08	135.000.450.399	116.979.217.170
Aset Tak Berwujud BA 999.99	101.385.571.280	-
Total	236.386.021.679	116.979.217.170

D.2.1.6.1.1. Aset Tak Berwujud BA 999.08

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2024	31 Desember 2023
112	BP Batam		
	Hasil Kajian/penelitian	13.528.803.766	11.413.946.166
	Aset Tak Berwujud Lainnya	13.988.913.218	2.735.096.589
-	SKK Migas		
	Software	104.676.328.415	100.133.563.415
	Lisensi	2.280.897.000	2.280.897.000
	Aset Tak Berwujud Lainnya	525.508.000	415.714.000
Total		135.000.450.399	116.979.217.170

Mutasi Aset Tak Berwujud tersebut per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

Saldo Awal	116.979.217.170
Penambahan :	18.601.905.729
Pembelian	681.055.764
Reklasifikasi Masuk	10.098.141.140
Perolehan Lainnya	2.825.161.625
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	400.274.600
Koreksi Susulan	2.482.415.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.114.857.600
Pengurangan	580.672.500
Koreksi Pencatatan	580.672.500
Saldo per 31 Desember 2024	135.000.450.399
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(101.896.802.126)
Nilai buku per 31 Desember 2024	33.103.648.273

D.2.1.6.1.2. Aset Tak Berwujud BA 999.99

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp101.385.571.280 dan Rp0. Aset tersebut berupa lisensi pada satker Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan BUN. Aset tak berwujud tersebut sedang dalam proses penetapan status penggunaan (PSP) kepada Kepala Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan DJKN.

D.2.1.6.2. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp486.632.618.588.563** dan **Rp446.302.794.935.058**, mengalami kenaikan sebesar Rp40.329.823.653.505 atau (9,04%). Angka untuk tahun 2024 ini didapat setelah dikurangi penyesuaian eliminasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp13.277.982.516.721 yang terdiri dari Dana Cadangan Penjaminan sebesar Rp13.175.145.505.000 dan RPATA sebesar Rp102.837.011.721. Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
BA 999.00	160.823.830.777.318	148.155.907.631.641	12.667.923.145.677
BA 999.07	170.974.000.000	-	170.974.000.000
BA 999.08	58.632.821.728.923	51.085.061.052.125	7.547.760.676.798

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/Penurunan
BA 999.99	280.282.974.599.043	259.362.135.477.663	20.920.839.121.380
Penyesuaian eliminasi dana yang dibatasi penggunaannya	(13.277.982.516.721)	(12.300.309.226.371)	(977.673.290.350)
TOTAL	486.632.618.588.563	446.302.794.935.058	40.329.823.653.505

D.2.1.6.2.1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Akuntansi Pusat

Jumlah Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp160.823.830.777.318 dan Rp148.155.907.631.641 mengalami kenaikan sebesar Rp12.667.923.145.677 atau 8,55 persen apabila dibandingkan dengan saldo tahun 2023. Peningkatan saldo dana yang dibatasi penggunaannya pada tahun 2024 sebagian besar disebabkan pemindahbukuan hasil lelang penerbitan Surat Berharga Negara dalam rangka Prefunding Tahun 2025 sebesar Rp86,27 triliun.

No	Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023
1	Dana di Rekening Treasury Deposit Facility-Transfer Keuangan Daerah	20.558.040.446.440	66.498.332.128.500
2	Dana Lainnya	114.456.529.130.618	56.037.396.458.509
3	Dana Perhitungan Pihak Ketiga	3.773.165.929.527	4.492.658.156.434
4	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	22.036.095.270.733	21.127.520.888.198
JUMLAH DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA		160.823.830.777.318	148.155.907.631.641

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang merupakan hak Pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau uang yang merupakan hak pemerintah namun dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan baik pemerintah maupun dari pihak diluar pemerintah misalnya pengadilan ataupun pihak luar lainnya.

Direktorat PKN melaporkan pos aset yang dibatasi penggunaannya sebagai bagian dari aset lainnya dalam rangka mencatat kegiatan untuk tujuan tertentu. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat tahun 2024 tercatat sebesar Rp160.938.060.777.318 yang diantaranya sebesar Rp13.175.145.505.000 menampung dana cadangan penjaminan yang telah disajikan sebagai cadangan penjaminan sehingga dilakukan eliminasi. Perincian saldo dana yang dieliminasi dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Akun	Segmen Bank	Deskripsi	Saldo Akhir
1	163119	S0009	Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980)	12.768.268.505.000
2	163119	S2040	Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980)	406.877.000.000
Total				13.175.145.505.000

Rekening Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yang dikelola oleh Direktorat PKN adalah sebagai berikut:

1. Rekening Pembangunan Hutan (RPH) dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi (DR) dibuka berdasarkan :
 - a. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/ 2007 dan Nomor 02/MENHUT-11/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan; dan
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.05/2007 tentang Pembukaan Rekening Pembangunan Hutan dan Penempatan Dana Reboisasi Pertama Kali dalam Rekening Pembangunan Hutan.

Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi dilakukan berdasarkan petunjuk-petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Pembangunan Hutan.
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 86/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 54/PB/2011 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bank Penyimpan Dana Cadangan.
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 6/PB/2019 tentang Penyimpanan Dana Reboisasi pada Bank Umum.

Rekening Pembangunan Hutan dan Rekening Cadangan Dana Reboisasi dibuka untuk menampung Dana Reboisasi (dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alami yang berupa kayu) untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan menggunakan sistem pinjaman dan dikelola dengan sistem dana bergulir.

Transaksi penerimaan meliputi:

- a. penerimaan dalam rangka penyimpanan dana reboisasi ke dalam RPH; dan
- b. penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH.

Transaksi pengeluaran meliputi:

- a. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer dari RPH ke Rekening KUN; dan
 - b. pengeluaran dalam rangka pemindahbukuan/transfer penerimaan bunga dan/atau jasa giro atas pengelolaan RPH ke Rekening KUN.
2. Rekening Dana Cadangan Alutsista dibuka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Rekening Dana Cadangan Alutsista adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana titipan milik Kementerian Pertahanan yang digunakan untuk membiayai pengadaan alutsista yang tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran dan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan akhir tahun 2023, terdapat 6 rekening Dana Cadangan Alutsista yang terdiri dari:
 - a. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AD (519000144980);
 - b. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU (519000145980);
 - c. Rekening Dana Cadangan Alutsista Kemhan (519000146980);
 - d. Rekening Dana Cadangan Alutsista Mabes TNI (519000147980);

- e. Rekening Dana Cadangan Alutsista TNI AU dalam USD (609027411980);
- f. Rek Lain BI Dana Cadangan Alutsista TNI AL dalam IDR (519000154980).

Jika masih terdapat sisa rekening dana cadangan alutsista sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam PMK 143/PMK.05/2018, maka Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktur PKN menyampaikan surat perintah penihilan saldo rekening dana cadangan alutsista kepada KPA Satker dan dicatat sebagai pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu melalui potongan SPM. Dan jika KPA Satker tidak melakukan penihilan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam PMK, maka Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan langsung melakukan pemindahbukuan sisa dana dari rekening dana cadangan alutsista ke Rekening Kas Umum Negara.

3. Rekening Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dibuka berdasarkan Kebijakan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat untuk menampung dana penerbitan SBN dan dana pembayaran pokok, bunga utang dan kewajiban lainnya SBN yang jatuh tempo dengan Nama "Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara". Rekening ini terdiri dari 3 (tiga) rekening yaitu:
 - a. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara dalam Rupiah (502000001980);
 - b. Menteri Keuangan Pengelolaan Surat Berharga Negara dalam valuta USD (609024411980);
 - c. Menteri Keuangan Pengelolaan SBN EURO (609024991980).

Pada akhir November s.d. Desember 2024 terdapat kebijakan prefunding yang dilakukan pemerintah yang dananya disimpan pada Rek Lain BI Pengelolaan SBN IDR dan SBN USD sebesar Rp86,27 triliun dengan rincian:

No	Jenis SBN	Seri	Nilai Bersih	
			USD	Rupiah
1	SBSN (lelang)	SPNS09062025, SPNS01092025, PBS030, PBS032, PBS034, dan PBS038		7.797.489.461.300
2	SBSN (lelang)	SPNS01092025, PBS003, PBS030, dan PBS038		6.849.599.119.500
3	SBSN Valas	SNI0530, SNI1134, dan SNI1154	2.750.000.000	44.431.750.000.000
4	SUN (lelang)	FR0097, FR0098, FR0102, FR0103, FR0104, dan FR0105		22.286.180.393.500
5	SUN (private placement)	FR0065		4.908.455.000.000
Jumlah				86.273.473.974.300

4. Rekening Khusus Dana PFK dengan nomor 510000281980 dibuka berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-66/PB/2016 tentang Pemisahan Dana PFK dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Khusus Dana PFK yang digunakan untuk menampung dana realisasi penerimaan PFK dalam rangka meningkatkan akurasi data monitoring dana PFK dan sebagai fungsi kontrol atas saldo dana pada Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pengelolaan rekening khusus dana PFK diatur dalam PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara. Aliran Uang pada rekening ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dana masuk berasal dari Rekening Kas Umum Negara.
 - b. Pengeluaran dana keluar berasal Nota Perintah Pemindahbukuan dana ke Rekening Kas Umum Negara dari Direktur PKN.
5. Rekening Lain BI BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan dengan nomor 502000002980 dibuka dengan dasar:
 - a. Keppres Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia serta Penerbitan

- Jaminan Bank Oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.
- b. Keppres Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Rekening ini digunakan untuk menampung dana yang berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999 tanggal 28 Mei 1999 dan digunakan untuk membayar kewajiban negara serta untuk menjamin bank umum apabila terjadi krisis moneter.

Aliran uang rekening:

- a. Sumber dana berasal dari penerbitan SU-004/MK/1999.
 - b. Pengeluaran dana dari Rekening BUN untuk Obligasi dalam Rangka Penjaminan ditujukan ke bank penjamin.
6. Rekening Stabilisasi Surat Berharga Negara (500000006980) untuk menampung dana pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder dalam rangka stabilisasi pasar SBN domestik dan dibuka berdasarkan PMK nomor 188/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Penggunaan Saldo Anggaran Lebih dalam rangka Stabilisasi Pasar Surat Berharga Negara Domestik. Ketentuan penggunaan saldo adalah berdasarkan kondisi pasar SBN domestik ditetapkan dalam level krisis berdasarkan protokol manajemen krisis pasar SBN oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Utang atas nama Menteri Keuangan dan mendapatkan persetujuan Badan Anggaran DPR.
 7. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Asset BPR (500000004980) dibuka dengan tujuan untuk menampung pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR. Dasar hukum pembukaan rekening adalah Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI tanggal 31 Januari 2001 tentang Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pengelolaan Rekening ini diatur dalam:
 - a. PMK 218/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pembukaan dan Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
 - b. Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-40/PB/2014 tentang Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara melalui Sistem Bank Indonesia Government-Electronic Banking (BIG-eB).

Kebijakan pencairan dana pada rekening ini dilakukan setelah status hukum Aset BPR sebagai milik pemerintah sudah jelas. Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber dana berasal dari pengembalian dana talangan dan pencairan aset BPR.
 - b. Pengeluaran/pencairan dana berdasarkan kebijakan pemerintah.
8. Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah (519000126980) atau disebut RDCPP ini diperlukan dalam hal anggaran kewajiban penjaminan pemerintah yang telah dialokasikan dalam APBN tidak habis digunakan dalam tahun berjalan. Anggaran dimaksud dapat diakumulasikan dengan mekanisme pemindahbukuan ke dalam rekening tersebut yang dibuka di Bank Indonesia untuk pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah pada tahun anggaran yang akan datang.

Dasar hukum pembukaan rekening:

- a. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012.
- b. Peraturan Menteri Keuangan nomor 30/PMK.8/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Pengelolaan RDCPP ini diatur menggunakan petunjuk teknis sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan nomor 69 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana

Cadangan Penjaminan untuk Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

Dirjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Kuasa BUN Pusat dan berdasarkan permintaan tersebut Dirjen Perbendaharaan mengajukan permintaan pembukaan RDCPP kepada Bank Indonesia melalui surat Direktur Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia nomor 14/892/DASP tanggal 19 Desember 2013 hal Pembukaan Rekening. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan pemerintah untuk:

- a. Pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
- b. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
- c. Pelaksanaan Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
- d. Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
- e. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;
- f. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah perkotaan;
- g. Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
- h. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
- i. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi;
- j. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM; dan
- k. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk BUMN.

Aliran kas masuk dan kas keluar dari rekening ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Dana masuk berasal dari pencairan alokasi DIPA Dana Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang tidak habis dipergunakan sampai dengan akhir dalam tahun anggaran berjalan oleh DJPPR sebagai KPA ke RDCPP.
 - b. Dana keluar dari RDCPP akan disalurkan ke penerima jaminan atas permintaan KPA guna melunasi kewajiban Pemerintah akibat pemberian jaminan apabila pihak terjamin tidak dapat membayar kewajibannya dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Anggaran Kewajiban Penjaminan tidak dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan.
 - 2) Anggaran Kewajiban Penjaminan dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berjalan tetapi tidak mencukupi; atau
 - 3) Sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak dapat memenuhi kewajiban Kementerian/Lembaga kepada BUPI.
9. Rekening Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah (519000142980) atau disebut Rekening DJPPID adalah rekening yang akan digunakan untuk menampung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, dan/atau sumber-sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka membayar terlebih dahulu sebagaimana telah diatur dalam PMK 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah, dimana nantinya rekening digunakan sebagai rekening penampungan alokasi

anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah dalam hal tidak digunakan pada tahun anggaran berjalan dan penampungan dana hasil pemotongan DAU dan/atau DBH. Kemudian, dalam hal tidak terdapat alokasi anggaran kewajiban jaminan pemerintah atas penugasan pembiayaan infrastruktur daerah atau dana pada alokasi dimaksud tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI), maka rekening dimaksud juga digunakan untuk membayar kewajiban penjaminan pemerintah kepada PT. SMI. rekening DJPPID dimaksud dikategorikan pada Rekening Lainnya Milik BUN.

10. Rekening Investasi Pemerintah PEN (519000151980) adalah Rekening milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia pada tahun 2020 berdasarkan KMK 533/KMK.06/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Investasi Pemerintah dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional pada Rekening Milik BUN. Rekening tersebut digunakan untuk mengelola dana investasi Pemerintah dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu untuk menampung pencairan dana, pengembalian pokok dan pendapatan hasil investasi Pemerintah PEN. Dana investasi Pemerintah tersebut ditujukan kepada penerima investasi sebagaimana diatur dalam KMK 525/KMK.02/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.02/2020 tentang Penetapan Rincian Pembiayaan Anggaran pada Bagian Anggaran BUN Pengelolaan Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun Anggaran 2020.

11. Rek Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara (513000001980)

Rekening Investasi Bendahara Umum Negara yang disingkat RIBUN adalah rekening yang dibuka untuk menampung dana dan/atau imbal hasil Investasi Pemerintah. Rekening tersebut dibuka di Bank Indonesia dengan nama Rekening Lain BI Investasi Bendahara Umum Negara dengan nomor 5120000001980 dengan dasar hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Investasi Pemerintah.
- c. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara.
- d. Surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-276/PB/PB.3/2021 tanggal 20 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
- e. Surat Bank Indonesia nomor 23/189/DPPT/Srt/B tanggal 30 Nopember 2021 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.

RIBUN bersifat kumulatif dan berfungsi untuk:

- a. menyalurkan dana Investasi Pemerintah kepada OIP;
- b. menerima dana Investasi Pemerintah beserta imbal hasilnya dari OIP; dan
- c. mengkonsolidasikan pencatatan dana Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh BUN melalui OIP.

Sampai dengan 31 Desember 2024, penerimaan RIBUN bersumber dari tiga jenis:

- a. pencairan dana Investasi Pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari RKUN ke RIBUN yang akan disalurkan ke OIP, dalam hal ini adalah BP Tapera senilai Rp17,02 triliun.
- b. Penerimaan untuk optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan yang terdapat pada RDCPP senilai Rp500 miliar. Optimalisasi ini dilaksanakan oleh BLU LDKPI mulai tahun 2024 berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2023.
- c. Penerimaan pada RIBUN juga berasal dari penyeteroran hasil investasi pemerintah dan

pengembalian pokok investasi dari OIP. Penerimaan imbal hasil Investasi Pemerintah sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu Rp117,42 miliar (imbal hasil Triwulan I), Rp133,37 miliar (imbal hasil Triwulan II), Rp119,46 miliar (imbal hasil Triwulan III) dan Rp165,57 miliar (imbal hasil Triwulan IV).

Sedangkan pengeluaran RIBUN selama 2024 dilakukan untuk penyaluran Investasi Pemerintah untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari RIBUN ke rekening BP Tapera di Bank Umum senilai Rp17,02 triliun, penyaluran Investasi Pemerintah pada BLU LDKPI senilai Rp500 miliar. Selain penyaluran investasi Pemerintah, pengeluaran RIBUN juga terjadi atas pemindahbukuan hasil investasi pemerintah dan pokok investasi dari RIBUN ke RKUN atas perintah Menteri Keuangan untuk diperlakukan sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp535,81 miliar.

12. Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Sentral (Bank Indonesia). Bentuk penyimpanan adalah overnight pada rekening lain BI Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah Pemerintah Daerah (TDF-TKD Pemda) yang dibuka di Bank Indonesia dengan dasar hukum pembukaan rekening sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.5/2023 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Treasury Deposit Facility dalam Rangka Penyaluran Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023 Dalam Bentuk Nontunai.
- d. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-143/PB/PB.3/2023 tanggal 21 Desember 2023, S-144/PB/PB.3/2023 tanggal 22 Desember 2023 dan S-146/PB/PB.3/2023 tanggal 23 Desember 2023 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
- e. Surat Bank Indonesia nomor 24/272/DPPT/Srt/B tanggal 26 Desember 2023, 24/273/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2023 dan 24/275/DPPT/Srt/B tanggal 27 Desember 2023 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.
- f. Surat Bank Indonesia nomor 25/299/DPPT/Srt/B tanggal 28 Desember 2023 hal-hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 546 rekening lain BI TDF-TKD Pemda dengan total saldo Rp20,56 triliun.

13. Rekening Lain BI Penampungan Akhir Tahun Anggaran

Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan rekening lain-lain milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000700980 untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Dasar hukum pembukaan rekening sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 109 tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran.
- b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara atas nama Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-184/PB/PB.3/2023 tanggal 13 November 2023 hal Permohonan Pembukaan Layanan Jasa Kebanksentralan Layanan Rekening Giro di Bank Indonesia.
- c. Surat Bank Indonesia nomor 25/275/DPPT/Srt/B tanggal 28 November 2023 hal Persetujuan Pembukaan Rekening Giro di Bank Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2024, saldo RPATA sebesar Rp22,04 triliun.

14. Rekening Pengeluaran Lainnya Bank Umum SKN RTGS In Transit yang selanjutnya disingkat RPgL in transit merupakan rekening milik BUN yang dibuka di Bank Umum sebagai rekening antara/transit untuk menampung dana SP2D tanggal 31 Desember 2024 yang belum dapat disalurkan sampai dengan akhir tahun 2024 karena keterbatasan sistem perbankan. Dasar pembukaan RPgL in transit sebagai berikut:
 - a. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-18/PB/2024 tentang Mekanisme Penyelesaian Penyaluran Dana Surat Perintah Penyaluran Dana yang Belum Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024.
 - b. Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-261/PB/PB.3/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Permohonan Pembukaan Rekening Pengeluaran Lainnya.

RPgL in transit dibuka pada lima Bank Operasional dengan detail sebagai berikut:

- a. RPgL BU SKN RTGS IN TRANSIT BRI (032901006289303) sesuai dengan surat Executive Vice President Institutional Business Division Bank BRI nomor 1479/S/LIFD/GOV/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Informasi Pembukaan Rekening Pengeluaran Lainnya.
- b. RPgL BU SKN RTGS IN TRANSIT BMRI (1190011591532) sesuai surat Branch Manager Bank Mandiri Cabang Jakarta Gambir nomor R04.Br.JGR/626/2024 tanggal 30 Desember 2024 hal Laporan Pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya (RPL).
- c. RPgL BU SKN RTGS In Transit BNI (1909160502) sesuai surat Pemimpin KCP Kemenkeu Bank Mandiri nomor PCG/20.4/178 tanggal 27 Desember 2024 hal Konfirmasi Pembukaan Rekening.
- d. RPgL BU SKN RTGS IN TRANSIT BTN (0001401300027155) sesuai surat Division Head Large Institutional Funding Division Bank BTN nomor 1479/S/LIFD/GOV/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024 hal Pemberitahuan Pembukaan Rekening RPGL BU SKN RTGS IN TRANSIT BTN.
- e. RPgl BU SKN RTGS In Transit BSI (7296162797) sesuai surat Group Head Institutional Banking Group BSI nomor 04/4319-/IBG tanggal 27 Desember 2024 hal Penyampaian Nama dan Nomor Rekening RPGL BU SKN RTGS INTRANSIT pada Bank Syariah Indonesia.

Sampai dengan 31 Desember 2024 Saldo RPgL in transit sebesar Rp11.470.230.000.000 yang dibagi dalam dua pengakuan pencatatan:

- a. Diakui sebagai Dana Dibatasi Penggunaannya sebagai bagian dari penyelesaian penyaluran dana PMN tahun 2024 sebesar Rp11.356.000.000.000.
- b. Diakui sebagai sisa dropping dana yang merupakan bagian dari RKUN sebesar Rp114.230.000.000.

D.2.1.6.2.2. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.07

Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp170.974.000.000 dan Rp0. Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp170.974.000.000 atau 100 persen dari Jumlah Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023. Dana tersebut terdapat pada satker Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian

PUPR. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 pada Neraca merupakan dana subsidi yg sudah terbit SP2D-nya per tanggal pelaporan, akan tetapi belum disalurkan dan masih tercatat di rekening RPL bank yang bersangkutan. Saldo dana yang dibatasi penggunaannya merupakan dana Subsidi BUM yang belum disalurkan per 31 Desember 2024 dari rekening RPL Bank Pelaksana ke debitur. Rincian atas saldo tersebut pada tabel di bawah ini:

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Bank/Kantor/ Pos	Saldo 31 Desember 2024
1	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	480635545	BANK BNI	7.056.000.000
2	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	121101000137308	BANK BRI	12.864.000.000
3	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1501300010194	BANK BTN	116.072.000.000
4	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	7121002393	BANK BTN SYARIAH	20.300.000.000
5	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1260007322810	BANK MANDIRI	5.210.000.000
6	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1032330505	BANK BSI	1.448.000.000
7	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	73947634001	BPD BJB	3.156.000.000
8	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	70102000821	BPD BJB SYARIAH	2.028.000.000
9	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	40001209936	BANK DKI	744.000.000
10	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	70122065906	DKI SYARIAH	160.000.000
11	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1034025173	BPD JATENG	100.000.000
12	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	5031002339	BPD JATENG SYARIAH	112.000.000
13	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	1000001844	BPD KALBAR	268.000.000
14	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	2011001942	BPD KALBAR SYARIAH	80.000.000
15	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	11100279	BPD KALTIMTARA	176.000.000
16	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	5100520000000060	BPD SULSELBAR SYARIAH	448.000.000
17	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	8013200004	BPD SUMSELBABEL SYARIAH	632.000.000
18	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	61001060000130	BPD SUMUT SYARIAH	120.000.000
Jumlah				170.974.000.000

D.2.1.6.2.3. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.08

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.632.821.728.923 dan Rp51.085.061.052.125. Dana Lainnya merupakan Dana yang Dibatasi Penggunaannya yang terdiri dari:

1. Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 Satker SKK Migas sebesar Rp58.555.708.079.202 dan Rp51.000.911.330.754 yang merupakan dana kegiatan pasca-operasi dan Pemulihan Lingkungan atau Abandonment and Site Restoration (ASR), Dana

Equipment & Services (E&S), serta kegiatan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) Wilayah Kerja Rokan dalam kegiatan usaha hulu migas. Saldo tersebut merupakan konversi saldo ASR sebesar USD2,956,492,921.42, saldo E&S sebesar USD30,284,960.03, saldo TTM sebesar USD637,391,709.39 menggunakan kurs penutup BI 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157. Mutasi saldo dana ASR tersebut sebagai berikut:

Uraian	Nilai ASR (USD)	Nilai E&S (USD)	Nilai TTM (USD)
Saldo Awal	3,303,381,781.90	29,785,784.56	-
Mutasi tambah	313,790,515.52	499,175.47	666,232,407.39
Mutasi kurang:	(660,679,376.00)	-	(28,840,698.00)
Saldo Akhir USD	USD2,956,492,921.42	USD30,284,960.03	USD637,391,709.39
Saldo Akhir Rupiah	Rp47.768.056.131.383	Rp489.314.099.205	Rp10.298.337.848.614

Mutasi kurang pada Tahun 2024 merupakan pemindahan dana untuk kegiatan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) Wilayah Kerja Rokan yang bersumber dari rekening bersama dana ASR. Dana ASR adalah akumulasi dana yang dicadangkan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan ASR yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke Rekening Bersama SKK Migas dan KKKS yang digunakan hanya untuk pemulihan lingkungan di wilayah kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan Abandonment and Site Restoration (ASR) atau Kegiatan Pasca Operasi adalah kegiatan untuk penutupan sumur secara permanen, penghentian pengoperasian dan menghilangkan kemampuan Fasilitas Produksi dan fasilitas penunjang untuk dapat dioperasikan kembali termasuk pembongkarannya secara permanen serta melakukan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Sesuai PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas Pasal 36, KKKS sebagai pelaksana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi kegiatan hulu migas. Kewajiban tersebut dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran. Pengeluaran yang terjadi dalam penanganan pasca operasi sumur eksplorasi dan pemulihan lokasi pemboran akan dibebankan sebagai Biaya Operasi (cost recoverable). Dana ASR dapat diajukan cost recovery pada saat bersamaan setelah KKKS melakukan penyetoran ke rekening bersama.

Kesepakatan substansi pengaturan kebijakan akuntansi Dana ASR tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-34/MK.5/2021 tanggal 23 Mei 2021 hal Kebijakan Akuntansi Pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration Yang Ditempatkan pada Rekening Bersama Antara SKK Migas dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas, yang mengatur kebijakan akuntansi pencatatan Dana Abandonment & Site Restoration (ASR) sebagai berikut:

- Kebijakan akuntansi dimaksud telah diatur sebelumnya dalam surat nomor S- 9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 yang didalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan disajikan sebagai Aset Yang Dibatasi Penggunaannya (debit) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan SKK Migas selaku Unit Badan Lainnya (UBL) Bukan Satker;
- Untuk kepentingan transparansi dan akuntabilitas, penyajian Saldo Rekening Dana ASR on face dalam laporan keuangan perlu disempurnakan menjadi disajikan sebagai Aset/Dana Yang Dibatasi Penggunaannya (debit) dan Kewajiban Tidak Lancar (kredit) pada Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN);
- Selanjutnya agar SKK Migas dapat menyampaikan perhitungan jumlah Saldo Rekening Dana ASR dari Kontrak Kerjasama yang menggunakan mekanisme pengembalian biaya operasi (Cost

Recovery) maupun dari Kontrak Kerjasama yang berbentuk Kontrak Bagi Hasil Gross Split, disertai penjelasan yang memadai untuk proses pencatatannya pada LKBUN dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP);

- d. Ketentuan mengenai Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana ASR sebagaimana pengaturan sebelumnya dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-9405/MK.5/2015 tanggal 6 November 2015 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan maksud surat ini;
 - e. Kebijakan akuntansi ini dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara dalam Penyusunan LKBUN untuk dikonsolidasikan ke dalam LKPP yang mulai diberlakukan sejak pelaporan tahun 2020.
 - f. Pencatatan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2020 Nomor: 25b/LHP/XV/05/2021 tanggal 29 Mei 2021, yaitu pengaturan yang lebih detil atas kebijakan akuntansi dan mekanisme pelaporan atas pencadangan Dana ASR, termasuk Dana ASR yang dikelola oleh BPMA. Hal tersebut berdasarkan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 4 Maret 2022 hal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas dan surat Kuasa Pengguna Anggaran SKK Migas Nomor SRT-0032/SMKPA0000/2022/S4 tanggal 8 Maret 2022 hal Laporan Keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) Satker SKK Migas Tahun 2021.
2. Saldo Dana di Rekening Penampungan-K/L per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp77.113.649.721 dan Rp84.149.721.371. Dana di Rekening Penampungan-K/L merupakan Dana Pada Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Dana di Rekening Penampungan-K/L telah disajikan pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada BA BUN 999.00, maka dari itu saldo sebesar Rp77.113.649.721 pada BA BUN 999.08 dieliminasi.

BA Pel	Uraian BA Pel	31 Desember 2024	31 Desember 2023
015	Kementerian Keuangan	24.824.302.727	45.004.622.761
-	MPP Kartu Pekerja	2.524.964.225	5.745.773.362
-	SKK Migas	48.643.514.019	33.399.325.248
-	BP Batam	1.120.868.750	-
Total		77.113.649.721	84.149.721.371

D.2.1.6.2.4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.99

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp280.282.974.599.043 dan Rp259.362.135.477.663, terdapat kenaikan Rp20.920.839.121.380 atau 8,07% jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2023.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan) Rp
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	250.426.347.869.742	231.572.672.909.516	18.853.674.960.226
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	29.830.903.367.301	27.789.462.568.147	2.041.440.799.154

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan) Rp)
RPATA satker PPP BUN	25.723.362.000	-	25.723.362.000
Total Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	280.282.974.599.043	259.362.135.477.663	20.920.839.121.380

Catatan:

1. Berdasarkan Laporan AIP Audited PT Taspen (Persero) Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2025 saldo AIP PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2024 sebesar Rp250.426.347.869.742 dan Laporan AIP Audited PT Asabri (Persero) Tahun 2024 tanggal 7 Maret 2025 saldo AIP PT ASABRI (Persero) per 31 Desember 2024 sebesar Rp29.830.903.367.301 dengan perkembangan dana AIP sebagai berikut:

Uraian	PT Taspen	PT Asabri
Penambahan		
Hasil Investasi	17.220.345.016.014	1.028.990.895.856
Peningkatan (Penurunan) Nilai Investasi	(5.696.956.669.615)	(745.010.663.604)
Iuran Peserta	8.615.786.187.678	1.861.732.328.453
Pendapatan di Luar Investasi	2.162.643.720	12.093.980.417
Jumlah Penambahan	20.141.337.177.797	2.157.806.541.122
Pengurangan		
Beban AIP	(1.287.662.217.571)	(116.557.668.968)
Jumlah Pengurangan	(1.287.662.217.571)	(116.557.668.968)
Selisih Revaluasi Aset Tetap		191.927.000
Peningkatan Dana Bersih	18.853.674.960.226	2.041.440.799.154
Dana Bersih Awal Tahun	231.572.672.909.516	27.789.462.568.147
Dana Bersih Akhir Tahun	250.426.347.869.742	29.830.903.367.301

- a. Hasil investasi pada PT Taspen sebesar Rp17,2 triliun dan pada PT Asabri sebesar Rp1,02 triliun merupakan pendapatan bunga deposito, bunga obligasi, bagi hasil sukuk, deviden saham, deviden reksadana, laba rugi pelepasan investasi dan pendapatan investasi lainnya. Hasil investasi pada PT Taspen terbesar berasal dari bunga obligasi pemerintah sebesar Rp8,27 triliun. Hasil investasi pada PT Taspen Tahun 2024 mengalami kenaikan Rp1,7T dari Tahun 2023 dikarenakan terdapat kenaikan signifikan pada bunga deposito yang disebabkan adanya kenaikan nilai deposito dari tahun 2023 +/- sebesar Rp20T, sedangkan hasil investasi PT Asabri Tahun 2024 menurun sebesar (Rp149M) dari tahun 2023 yang mana untuk PT Asabri pada tahun 2024 terdapat unrealized penurunan nilai saham sebesar (Rp691M) disebabkan adanya penurunan nilai saham karena pergerakan IHSG;
- b. Penurunan nilai investasi pada PT Taspen sebesar Rp5,69 triliun dan PT Asabri sebesar Rp745,01 miliar merupakan selisih antara nilai wajar dengan nilai tercatat investasi pada tahun berjalan. Hal ini menunjukkan nilai investasi AIP pada instrumen investasi obligasi, sukuk, reksadan dan saham turun, namun kepemilikan investasinya masih dikuasai PT Taspen/ PT Asabri. Nilai investasi tahun 2024 baik PT Taspen maupun PT Asabri mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2023. Untuk PT Taspen sebesar (Rp9T) dan PT Asabri sebesar (Rp1T) dikarenakan adanya penurunan nilai IBPA Fair Price dan harga di pasar pada hampir seluruh instrumen investasi;
- c. Iuran peserta pada tahun 2024 baik di PT Taspen maupun PT Asabri mengalami kenaikan yang disebabkan adanya kenaikan gaji ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya terdapat pada satker Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan BUN senilai Rp25.723.362.000 merupakan saldo Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Dana di Rekening Penampungan-K/L telah disajikan pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya pada BA BUN 999.00, maka dari itu saldo sebesar Rp25.723.362.000 pada BA BUN 999.99 dieliminasi.

D.2.1.6.3. DANA CADANGAN PENJAMINAN

Dana Cadangan penjaminan adalah dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2022
Dana Penjaminan EAS	13.268.268.505.000	11.809.282.505.000
Dana Penjaminan PRKN	406.877.000.000	406.877.000.000
Total	13.675.145.505.000	12.216.159.505.000

Dana Penjaminan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.675.145.505.000 dan Rp12.216.159.505.000. Pada Tahun 2019, Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah disepakati bahwa pencatatan atas saldo dana cadangan penjaminan (pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN) dialihkan dari satker 999986 (Direktorat PRKN) ke satker 970974 (Direktorat EAS).

Terdapat dua KPA Dana Penjaminan yakni Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara dan Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.

Dana Penjaminan yang dikelola Direktorat EAS sebesar Rp13.268.268.505.000. Pada tahun 2024 terdapat penambahan dana kewajiban penjaminan sebesar Rp1.458.986.000.000 yang ditujukan untuk penugasan percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp823.986.000.000 dan dukungan penjaminan pada program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan sebesar Rp635.000.000.000.

Dana Cadangan Penjaminan sebesar Rp13.268.268.505.000 terdiri dari sebesar Rp12.768.268.505.000 berada di Rekening BI Nomor 519000126980 dengan Nama Rekening Rek Lain BI Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah dan sebesar Rp500.000.000.000 sedang dikelola melalui mekanisme Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan sebagaimana diatur dalam PMK 69 Tahun 2023 dan KMK Nomor 13 Tahun 2024 oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP) BLU LDKPI, terdiri dari Rp122.905.310.000 sebagai Investasi Non Permanen dalam bentuk SUN dan sebesar Rp377.094.690.000 sebagai Dana Kelolaan BLU dalam bentuk Giro/Deposito dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jenis	Tanggal Transaksi	Nilai
Investasi non-permanen	SUN - FR0095	26/04/2024	49.286.360.000
	SUN - FR0095	29/05/2024	34.346.950.000
	SUN - FR0087	29/05/2024	39.272.000.000
Total Investasi non-permanen			122.905.310.000
Dana kelolaan BLU	Deposito 3 bulan	13/12/2024	377.090.000.000
	Giro		4.690.000
Total Dana Kelolaan BLU			377.094.690.000

Dari total dana penjaminan sebesar Rp13.268.268.505.000, terdapat Dana Cadangan Pemerintah untuk

program Penjaminan PC-PEN sebesar Rp6.449.000.000.000. Dana Cadangan Penjaminan digunakan untuk program:

1. Pemberian Jaminan Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batu bara;
2. Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum;
3. Pelaksanaan Penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
4. Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN;
5. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol;
6. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan kereta api ringan/light rail transit terintegrasi di wilayah perkotaan;
7. Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
8. Pemberian Jaminan Pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan;
9. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha Korporasi;
10. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk Pelaku Usaha UMKM; dan
11. Pemulihan Ekonomi Nasional Penjaminan untuk BUMN.

Adapun Dana Penjaminan yang dikelola oleh Direktorat PRKN adalah sebesar Rp406.877.000.000 yang merupakan dana penjaminan atas penugasan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam rangka penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah.

Dana Penjaminan dengan total sebesar Rp406.877.000.000 ditampung di rekening Bank Indonesia pada nomor rekening 519.000142980 dengan nama rekening "Rek Lain BI Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur", yang merupakan rekening penempatan dalam rupiah yang pembayaran bunganya disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah pada akhir bulan berjalan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/KMK.05/2009 dan 11/3/KEP.GBI/2009 tentang Koordinasi Pengelolaan Uang Negara.

D.2.1.6.4. DANA KELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM

Nilai dana kelolaan BLU yang belum digulirkan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp53.287.731.646.004** dan **Rp16.047.968.379.573**, terjadi kenaikan sebesar **Rp37.239.763.266.431** atau **232,05%**.

Dana kelolaan BLU yang belum digulirkan adalah dana yang dikelola oleh BLU pengelola dana yang bersumber dari BA 999.03 atau pengalihan dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang belum digulirkan atau diinvestasikan sesuai dengan penganggarnya atau merupakan dana yang berasal dari pengembalian pokok perguliran atas investasi, dan belum digulirkan atau diinvestasikan kembali.

Rincian dana kelolaan pada masing-masing BLU adalah sebagai berikut:

No	Instansi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	BLU PIP	1.600.453.340.644	1.980.224.478.455
2	BLU BPD LH (Dit. SMI)	2.924.438.479.445	2.956.427.625.499
3	BLU LPDB KUMKM	1.377.389.357.978	1.193.503.022.225

No	Instansi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4	BLU LPMUKP	60.837.971.403	475.451.437.165
5	BLU LMAN	1.247.520.036.882	1.266.323.666.466
6	BLU BPD LH (PFB)	7.360.423.866.350	7.359.964.509.287
7	BLU BPD LH (Mangrove)	985.557.790.818	795.002.450.000
8	BLU BPD PKS	-	21.071.190.476
9	BLU LPDP (Dit. SMI)	37.731.110.629.484	-
10	BLU LDKPI	173.000	-
JUMLAH		53.287.731.646.004	16.047.968.379.573

1. Dana Kelolaan pada BLU PIP

Dana Kelolaan BLU PIP yang belum digulirkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.600.453.340.644 dan Rp1.980.224.478.455. Terjadi penurunan sebesar Rp379.771.137.811 atau 19,18 persen dari tahun sebelumnya.

Adapun rincian penempatan dana kelolaan BLU PIP adalah sebagai berikut:

No	Bank	No Rekening	Jumlah
1	BRI	0329-01-003827-30-6	469.964.430.566,75
2	BNI	2018220615	4.820.058.321,00
3	Mandiri	103-00-10816995	100.698.316.497,00
4	BTN (Deposito)	0001401400503687	1.000.000.000.000,00
5	BSI	7292781215	25.056.197.862,91
Jumlah			1.600.539.003.247,66

Terdapat selisih kurang antara catatan akuntansi dan rekening koran sebesar Rp85.662.603,66 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Perbankan yang belum dipindahbukukan ke rekening operasional sebesar Rp85.662.512; dan
- Akumulasi Pembulatan Rp91,66.

2. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (Dit. SMI)

Dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) merupakan dana kelolaan yang diserahkan dari BLU P3H. Nilai dana kelolaan BLU BPD LH per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.924.438.479.445 dan Rp2.956.427.625.499, terjadi penurunan sebesar Rp31.989.146.054 atau 1,08% dari periode sebelumnya.

Dana tersebut dikelola dalam rekening dengan saldo per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Bank	No Rekening	Jumlah
1	BRI Cabang Jakarta Kebayoran	0193-01-003531-30-4	14.046.732.804
2	BRI Cabang Jakarta Kebayoran	0193-01-000830-30-1	2.997.075.098
3	BNI Cabang Jakarta Menteng	1548674583	8.559.978.451
4	Mandiri KC Jakarta AKR Gallery	1650200907393	376.000.000.000
5	Mandiri KC Jakarta AKR Gallery	1650200904531	200.000.000.000
6	BTN Syariah Cabang Harmoni	3000084814	100.000.000.000

No	Bank	No Rekening	Jumlah
7	Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	1030206268779	500.000.000.000
8	Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	1030206268761	500.000.000.000
9	Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	1030206268787	500.000.000.000
10	Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	1030206268795	500.000.000.000
11	Mandiri Cabang Jakarta Thamrin	1030206268803	225.000.000.000
Jumlah			2.926.603.786.353

Terdapat selisih sebesar Rp2.165.306.908 antara saldo rekening dengan nilai dana kelolaan dengan rincian sebagai berikut:

- Penyesuaian atas penerimaan dana pembayaran piutang dari debitur yang melebihi saldo outstanding pokok dan bunga. Dana ini seharusnya dikembalikan oleh BPD LH ke debitur yang bersangkutan dan masih berada di rekening dana kelolaan sebesar Rp635.110.888.
- Kelebihan pembayaran dari KSP Balo' Toraja yang harus dikembalikan ke KSP Toraja sebesar Rp450.000.000.
- Pendapatan investasi layanan penyaluran dana bergulir sektor kehutanan yang sudah diterima namun belum disahkan hingga periode pelaporan sebesar Rp1.063.555.222.
- Bunga Jasa Giro atas rekening Dana Kelolaan Dana Reboisasi yang belum dipindahbukukan ke Rekening Operasional Penerimaan sebesar Rp16.640.802. Bunga Jasa Giro ini belum diakui dan belum disahkan sebagai Pendapatan BLU.
- Pembulatan minus Rp4.

3. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana bergulir KUMKM

Nilai Dana Kelolaan Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.377.389.357.978 dan Rp1.193.503.022.225, terjadi kenaikan sebesar Rp183.886.335.753 atau 15,41%. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan sebagai pinjaman/pembiayaan dana bergulir kepada mitra LPDB-KUMKM. Dana Kelolaan BLU terdiri dari pengembalian pokok dana bergulir dan program Kementerian Koperasi dan UKM pada saldo pengelolaan pokok dana bergulir BA 999.03.

Saldo Rekening Giro per 31 Desember 2024 sebesar Rp234.683.975.643 dan nilai deposito sebesar Rp1.151.800.000.000, dengan total nilai yang ada di rekening pokok sebesar Rp1.386.483.975.643, kemudian dilakukan rekonsiliasi sebesar minus Rp9.094.617.665. Pada nilai rekonsiliasi tersebut termasuk di dalamnya kas yang belum teridentifikasi sebesar Rp8.802.052.503 dikarenakan adanya pembayaran angsuran pokok namun tidak diketahui nama debiturnya, sehingga LPDB-KUMKM memerlukan waktu lebih untuk identifikasi atas pembayaran angsuran tersebut. Kemudian terdapat penyesuaian hasil rekonsiliasi sebesar Rp292.565.161 dan pembulatan sebesar Rp1, sehingga dana kelolaan akhir Badan Layanan Umum LPDB-KUMKM per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.377.389.357.978 merupakan dana bergulir yang siap untuk disalurkan pada tahun 2025.

Pada nilai dana kelolaan sebesar Rp1.377.389.357.978 nilai sebesar Rp2.134.614.540 merupakan pembayaran piutang beberapa koperasi dengan mencairkan klaim subrogasi. Adapun koperasi tersebut sebagai berikut:

- Koperasi Kampus Unsoed dengan mencairkan klaim subrogasi melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Jawa Tengah) sebesar Rp860.633.286;
- KSU Monjari 45 sebesar Rp348.412.800 melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrindo);
- BMT Bina Umat Mulia kepada Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrindo) sebesar Rp140.961.811; dan

- d. Koperasi Produsen Cahaya Multi Indonesia melalui Lembaga Penjamin Kredit (Jamkrida Riau) sebesar Rp784.606.643.

4. Dana Kelolaan pada BLU LPMUKP

Dana Kelolaan BLU LPMUKP yang belum Digulirkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp60.837.971.403 dan Rp475.451.437.165. Terjadi penurunan Aset Lainnya berupa Dana Kelolaan Badan Layanan Umum sebesar Rp414.613.465.762 atau 87,20 persen karena meningkatnya realisasi pencairan Dana Bergulir.

Dari total nilai dana kelolaan tersebut, terdapat perbedaan nilai antara Dana Kelolaan yang tersaji di neraca dengan total nilai dana kelolaan pada rekening koran dan deposito per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.817.844.233,13. Perbedaan tersebut terjadi karena:

- Terdapat angsuran pokok yang terdapat pada rekening operasional senilai Rp2.150.548.830.
- Terdapat angsuran jasa layanan yang terdapat pada rekening Dana Kelolaan senilai Rp313.321.097,13. Atas hal tersebut telah dipindahbukukan pada tanggal 10 Oktober 2024.
- Terdapat kelebihan pembayaran angsuran pokok Debitur sebesar Rp4.383.500 dan pembayaran provisi sebesar Rp15.000.000. Atas hal tersebut telah dipindahbukukan ke rekening operasional penerimaan pada tanggal 30 Januari 2025.

5. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara

Nilai dana kelolaan pada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.247.520.036.882 dan Rp1.266.323.666.466. Terjadi penurunan sebesar Rp18.803.629.584 atau 1,48 persen.

Pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan menyajikan dana yang digunakan oleh LMAN untuk upgrade aset kelolaan yang diperoleh melalui pembiayaan investasi APBNP TA 2015. Pada periode yang berakhir 31 Desember 2024, LMAN menggunakan dana sebesar Rp18.803.629.584 untuk melakukan upgrade aset kelolaan, baik dalam bentuk pekerjaan fisik maupun pekerjaan penunjang berupa perencanaan dan pengawasan.

Rincian mutasi pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2023	1.266.323.666.466
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> properti investasi eks BPPN	(776.015.230)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> properti investasi eks PPA	(11.773.052.971)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> aset properti investasi eks Pertamina	(449.977.900)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> properti investasi eks HTBI	(3.638.195.104)
(-) Penggunaan dana untuk <i>upgrade</i> properti investasi lainnya (<i>heritage</i>)	(2.166.388.379)
Posisi per 31 Desember 2024	1.247.520.036.882

Penggunaan dana investasi untuk upgrade aset kelolaan dan penebusan HTBI yang dirinci per tahun adalah sebagai berikut:

Uraian	Nominal (Rp)
Alokasi APBN-P TA 2015	1.500.000.000.000
(-) Penggunaan di tahun 2016	(26.734.113.000)
(-) Penggunaan di tahun 2017	(54.778.165.126)
(-) Penggunaan di tahun 2018	(11.908.277.761)
(-) Penggunaan di tahun 2019	(16.608.319.662)

Uraian	Nominal (Rp)
(-) Penggunaan di tahun 2020	(65.868.718.321)
(-) Penggunaan di tahun 2021	(20.247.945.147)
(-) Penggunaan di tahun 2022	(17.056.125.398)
(-) Penggunaan di tahun 2023	(20.474.669.119)
(-) Penggunaan di tahun 2024 (s.d. 31 Desember 2024)	(18.803.629.584)
Posisi per 31 Desember 2024	1.247.520.036.882

6. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (*Pooling Fund Bencana* (PFB))

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 407/KMK.010/2021 tentang Penugasan Kepada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana, BPD LH ditunjuk menjadi pengelola dana PFB. Selanjutnya, berdasarkan KMK nomor 393/KMK.06/2022 tanggal 28 September 2022, Direktur Penghimpunan dan Pengembangan Dana BLU BPD LH ditetapkan menjadi KPA BUN BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah untuk Dana Bersama Penanggulangan Bencana (PFB) dan dana DNS.

Dana kelolaan pada BLU BPD LH per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.360.423.866.350 dan Rp7.359.964.509.287, terjadi kenaikan sebesar Rp459.357.063 atau 0,01%. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999.03 pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana dan dana DNS, dengan rincian dana bersama penanggulangan bencana sebesar Rp7.300.000.000.000 dan dana DNS sebesar Rp60.423.866.350.

Dana Bersama Penanggulangan Bencana merupakan dana cadangan yang dikelola dengan mekanisme dana abadi. Dana Kelolaan Pokok diinvestasikan, untuk kemudian imbal hasil investasinya digunakan untuk mendanai kegiatan terkait bencana. Sesuai dengan draft peraturan teknis terkait pengelolaan dana ini, dalam hal tertentu, Dana Pokok dapat digunakan untuk pendanaan bencana. Dana Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB) / *Pooling Fund Bencana* (PFB) dicairkan dalam dua kali pencairan, yaitu sebesar Rp3.000.000.000.000 pada tahun 2022 dan Rp4.300.000.000.000 pada tahun 2023, sehingga per 31 Desember 2024 berjumlah Rp7.300.000.000.000.

Dana Kelolaan Debt for Nature Swap (DNS) eks KLH merupakan Dana Kelolaan yang diserahterimakan dari PPA BUN DJKN ke KPA BUN BPD LH melalui BAST antara UAIP dan UAKPA BLU BPD LH Nomor BA-14/KN.3/2022 dan BAST24/BPD LH.2/2022 tanggal 2 November 2022. Nilai dana DNS pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.423.866.350.

7. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (*Mangrove*)

Dana kelolaan pada BLU BPD LH per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 Audited masing-masing sebesar Rp985.557.790.818 dan Rp795.002.450.000. terdapat kenaikan sebesar Rp190.555.340.818 atau (23,97%) dari periode 2023. Dana Kelolaan BLU merupakan dana yang berasal dari BA 999.03 berupa Dana Rehabilitasi Mangrove yang belum disalurkan sesuai peruntukannya.

8. Dana Kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Nilai dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp21.071.190.476. Terjadi penurunan sebesar Rp21.071.190.476 atau 100 persen. Nilai pada 31 Desember 2023 tersebut berasal dari amortisasi premium atas penempatan investasi jangka Panjang non permanen lainnya dalam bentuk Surat Berharga

Negara yang memenuhi karakteristik HTM diperoleh secara premium. Pada tahun 2024 dilakukan penyesuaian sebesar Rp21.071.190.476 dikarenakan investasi tersebut telah jatuh tempo dan dikembalikan ke Kas BLU sebesar Rp18.736.666.667 serta terdapat penyesuaian intensi atau strategi dari HTM menjadi Available For Sale (AFS) sebesar Rp2.334.523.809, sehingga nilai dana kelolaan pada BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menjadi Rp0.

9. Dana Kelolaan pada BLU LPDP (UAKPA Dit. SMI)

Dana kelolaan pada BLU LPDP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp37.731.110.629.484 dan Rp0, terjadi kenaikan sebesar Rp37.731.110.629.484 atau 100%. Nilai tersebut terbentuk karena terdapat penyesuaian nilai dana kelolaan dan investasi jangka panjang non permanen lainnya pada BLU LPDP.

Pada tahun 2024, terdapat penambahan nilai Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan sebesar Rp37.731.110.629.484 yang sebelumnya disajikan pada Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan:

- a. PMK Nomor 174 Tahun 2023 pada Bab IV Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah pada Pembiayaan untuk Badan Layanan Umum yang menyatakan pada periode pelaporan setelah perolehan awal, UAKPA BUN melakukan pengujian substansi model bisnis yang mempengaruhi untuk reklasifikasi penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen sesuai dengan model bisnis portofolio manajemen kas jangka pendek atas dana kelolaan BLU yang belum digulirkan dan/atau diinvestasikan sesuai dengan maksud penugasan pokok dari dana kelolaan BLU dimaksud.
- b. Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-159/LPDP/2024 yang merubah Keputusan Direktur Utama Nomor KEP-56/LPDP/2021 tentang Kebijakan Strategis Alokasi Aset Investasi (Strategic Asset Allocation) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dalam keputusan nomor KEP-159/LPDP/2024 mengatur bahwa jenis investasi/instrument antara lain berupa instrument investasi jangka pendek minimum 25% dan maksimum 100%.

10. Dana Kelolaan pada BLU LDKPI

Dana kelolaan pada BLU LDKPI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp173.000 dan Rp0, terjadi kenaikan sebesar Rp173.000 atau 100%. Nilai tersebut merupakan sisa saldo atas penempatan *endowment fund* pada Surat Berharga Negara sebesar Rp38.615.692.000 yang bersumber dari saldo kas BLU LDKPI Tahun Anggaran 2024.

D.2.1.6.5. DANA JANGKA PANJANG

Posisi pos Dana Jangka Panjang pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.528.648.017.150 dan Rp36.015.899.438.036, terdapat penurunan sebesar Rp7.487.251.420.886 atau 20,79%.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, dana jangka panjang adalah dana hasil akumulasi dari pembiayaan beserta hasil pengelolaannya untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional, yang dikelola oleh LMAN.

Pada tahun 2020, melalui surat nomor S-941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerbitkan kebijakan penyajian

atas dana investasi untuk pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional pada pos Dana Jangka Panjang (165211). Sebelumnya, penyajian atas dana tersebut dilakukan pada pos Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan.

Mutasi tambah dan kurang untuk pos Dana Jangka Panjang di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian		Nominal (Rp)
Posisi per 31 Desember 2023		36.015.899.438.036
(-)	Penggunaan dana untuk pembayaran langsung	(14.510.738.184.850)
(-)	Penggunaan dana untuk penggantian dana talangan	(483.467.502.187)
+	Retur/pengembalian dana atas transaksi sebelum tahun 2024	6.954.266.151
+	Pencairan anggaran pembiayaan investasi dari RKUN	7.500.000.000.000
Posisi per 31 Desember 2024		28.528.648.017.150

Penerimaan dan penggunaan dana jangka panjang untuk pendanaan pengadaan tanah PSN yang dirinci per tahun sejak 2017-2024 adalah sebagai berikut:

Uraian		Nominal (Rp)	Total (Rp)
Pencairan Alokasi			
	Pencairan Alokasi APBN-P TA 2016	16.000.000.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN-P TA 2017	32.050.560.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN TA 2018	31.152.730.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN TA 2019	12.000.000.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN TA 2021	11.123.000.000.000	
	Pencairan Alokasi Pembiayaan dari SAL TA 2021	3.300.000.000.000	
	Pencairan Alokasi APBN TA 2022	28.840.000.000.000	
	Pencairan alokasi APBN TA 2023	25.424.000.000.000	
	Pencairan alokasi APBN TA 2024 (s.d. September 2024)	7.500.000.000.000	
	Total Pencairan Alokasi 2016 s.d. 31 Desember 2024		167.390.290.000.000
Penggunaan Dana			
(-)	Penggunaan di tahun 2017 untuk penggantian dana badan usaha	(11.722.231.996.179)	
	Total Tahun 2017		(11.722.231.996.179)
(-)	Penggunaan di tahun 2018 untuk penggantian dana badan usaha	(19.789.900.738.239)	
(-)	Penggunaan di tahun 2018 untuk pembayaran langsung	(1.461.797.730.377)	
	Total Tahun 2018		(21.251.698.468.616)
(-)	Penggunaan di tahun 2019 untuk penggantian dana badan usaha	(11.255.023.776.662)	
(-)	Penggunaan di tahun 2019 untuk pembayaran langsung	(2.622.078.588.471)	
	Total Tahun 2019		(13.877.102.365.133)
(-)	Penggunaan di tahun 2020 untuk penggantian dana badan usaha *)	(16.188.530.391.558)	
(-)	Penggunaan di tahun 2020 untuk pembayaran langsung	(3.766.644.434.006)	
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian dana talangan proyek jalan tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar	21.928.205.059	
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian pembayaran langsung proyek LRT Jabodebek	19.012.419.000	
	Total Tahun 2020		(19.914.234.201.505)
(-)	Penggunaan di tahun 2021 untuk penggantian dana Badan Usaha *)	(7.075.903.330.513)	
(-)	Penggunaan di tahun 2021 untuk pembayaran langsung	(15.783.555.647.233)	
(+)	Retur/pengembalian dana atas penggantian dana talangan proyek Jalan Tol Pandaan-Malang, Serang-Panimbang, Ciawi-Sukabumi dan Cinere-Serpong	1.877.307.181	
	Total Tahun 2021		(22.857.581.670.565)

Uraian		Nominal (Rp)	Total (Rp)
(-)	Penggunaan di tahun 2022 untuk penggantian dana Badan Usaha *)	(2.977.320.020.714)	
(-)	Penggunaan di tahun 2022 untuk pembayaran langsung	(13.069.743.347.352)	
(+)	Retur/pengembalian dana atas proyek Jalan Tol Ciawi Sukabumi	1.859.450.374	
Total Tahun 2022			(16.045.203.917.692)
(-)	Penggantian dana talangan	(1.064.608.892.506)	
(-)	Pembayaran langsung	(17.142.475.041.822)	
(+)	Retur penggantian dana talangan	326.766.505	
(+)	Retur pembayaran langsung	419.225.549	
Total Tahun 2023			(18.206.337.942.274)
(-)	Penggantian dana talangan	(483.467.502.187)	
(-)	Pembayaran langsung	(14.510.738.184.850)	
(+)	Retur penggantian dana talangan	147.286.132	
(+)	Retur pembayaran langsung	6.806.980.019	
Total Tahun 2024			(14.987.251.420.886)
Posisi per 31 Desember 2024			28.528.648.017.150

Penggunaan dana jangka panjang pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang dirinci per proyek adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Proyek Air Baku	62.790.158.500	22.945.264.480
Proyek Bendungan	1.476.236.509.747	1.969.712.922.391
Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara	2.106.409.275.212	1.426.137.165.291
Proyek Irigasi	19.822.077.282	31.769.023.220
Proyek Jalan Tol	11.246.731.987.455	14.396.683.929.514
Proyek Pelabuhan	-	975.468.666
Proyek Perkeretaapian	75.261.412.690	358.114.168.711
Jumlah Penggunaan Dana s.d. 31 Desember 2024	14.987.251.420.886	18.206.337.942.273

D.2.1.6.6. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp697.896.841.387.119** dan **Rp644.945.117.418.303**, mengalami kenaikan sebesar Rp52.951.723.968.816 atau (8,21%). Nilai per tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari aset KKKS, aset PKP2B, aset lainnya BLBI, aset ABMA/T, aset BMN Idle, Aset Eks Pertamina dan Aset Lain-lain:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Aset KKKS Hulu Migas pada DJKN	-	17.161.363.257
2.	Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN	243.028.148.370	104.061.918.709
3.	Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas	668.740.738.490.428	615.910.897.460.531
4.	Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA	14.371.313.426.237	14.331.042.210.113
5.	Aset PKP2B	3.063.230.520.563	2.941.049.250.958
6.	Aset Lainnya BLBI	10.230.620.927.132	10.355.953.839.630
7.	Aset ABMA/T	35.474.626.100	37.267.219.100

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
8.	Aset BMN Idle	14.113.278.239	20.081.172.095
9.	Aset Lain-lain	363.502.761.721	362.572.834.719
10.	Aset Lain-lain 999.03	764.944.939.588	822.118.554.755
11.	Aset Lain-lain 999.08	69.874.268.741	42.911.594.436
	Jumlah	697.896.841.387.119	644.945.117.418.303

D.2.1.6.6.1. Aset KKKS Hulu Migas pada DJKN

Aset lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.161.363.257. Aset lainnya tersebut berupa tanah yang merupakan himpunan dari BMN Hulu Migas yang telah diserahkan ke Pengelola Barang dari KKKS Terminasi. Ringkasan mutasi aset lainnya pada UAKPA Pengelola BMN Hulu Migas Pada DJKN adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	31 Desember 2024
17.161.363.257	17.297.182.001	34.458.545.258	-

Mutasi tambah BMN Hulu Migas pada Pengelola Barang merupakan hasil inventarisasi dan penilaian atas aset eks SPE Petroleum Ltd yang dicatat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi berupa Tanah yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja SPE Petroleum Ltd pada Wilayah Kerja Madura dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Keuangan Nomor 416.BA/BN.05/SJA.4/2023 dan Nomor BA-9/KN.4/2023 tanggal 8 Desember 2023 sebesar Rp17.297.182.000, ditambah dengan koreksi tambah nilai aset tanah KKKS Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd. senilai Rp1.

Kemudian, mutasi kurang BMN Hulu Migas pada Pengelola Barang diakibatkan penghapusan 98 bidang tanah BMN yang berasal dari KKKS Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd. dengan nilai Rp16.774.264.258 dan reklasifikasi aset lainnya ke Properti Investasi senilai Rp17.684.281.000.

D.2.1.6.6.2. Aset KKKS Hulu Migas pada PPBMN

Aset Lainnya pada KKKS/Hulu Migas PBMN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp243.028.148.370 dan Rp104.061.918.709. Aset KKKS terdiri atas Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Barang yang termasuk dalam kategori tanah dan Material Persediaan tidak dilakukan penyusutan sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2022. Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

1. Aset Tanah

SALDO 1 JAN 2024	-
MUTASI TAMBAH	19.149.437.850
Alih Terima	19.149.437.850
MUTASI KURANG	19.149.437.850
Alih Serah	19.149.437.850
SALDO 31 DESEMBER 2024	-

Penjelasan atas aset KKKS berupa aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- Saldo awal sebesar Rp0 merupakan Aset Tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2023 (Audited).

- b. Mutasi tambah sebesar Rp19.149.437.850 berasal dari Alih terima karena penyerahan aset tanah Eks KKKS KKKS Job Pertamina-Jadestone Energy (OK) dari SKK Migas kepada KESDM sesuai BAST nomor 516.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- c. Mutasi Kurang tanah sebesar Rp19.149.437.850 berasal dari Alih serah karena penyerahan aset tanah dari KESDM kepada KKKS Job Pertamina-Jadestone Energy (OK) sesuai BAST nomor 517.BA/BN.05/SJA.4/2023 tanggal 16 Desember 2024. KKKS Job Pertamina-Jadestone Energy (OK) terminasi pada tahun 2024 sehingga masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dimana ketentuan SK Penggunaan baru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 140/PMK.06/2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- d. Saldo akhir aset tanah sebesar Rp0.

2. Aset Non Tanah Berupa HBM

SALDO 1 JAN 2024	12.805.500
MUTASI TAMBAH	3.388.629.974
Alih Terima	3.388.629.974
MUTASI KURANG	12.805.500
Pemindahtanganan/penjualan lelang	12.805.500
SALDO 31 DESEMBER 2024	3.388.629.974

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal sebesar Rp12.805.500 merupakan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2023 (Audited);
- b. Mutasi tambah HBM sebesar Rp3.388.629.974 berasal dari:
- 1) Penyerahan aset HBM Eks KKKS Eni Bukat Limited dari SKK Migas kepada KESDM sesuai BAST nomor BAC-0611/SKKIG0000/2024/S4 dan 514.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebesar Rp1.888.014.056; dan
 - 2) Penyerahan aset HBM Eks KKKS Repsol Andaman B.V dari BPMA kepada KESDM sebesar Rp1.500.615.918 sesuai BAST nomor BAC-0002/BPMA00002024/B0 dan 012.BA/92/SJA.4/2019 tanggal 6 Maret 2019.
- c. Mutasi kurang HBM sebesar Rp12.805.500 berasal dari pemindahtanganan melalui penjualan lelang HBM Eks KKKS Husky Anugerah Limited sebesar Rp12.805.500 sesuai risalah lelang Nomor 652/08.02/2024-01 tanggal 4 Juli 2024. Atas BMN tersebut, telah ditindaklanjuti pula dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 825.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 19 September 2024;
- d. Saldo akhir aset HBM sebesar Rp3.388.629.974.

3. Aset Non Tanah Berupa HBI

SALDO 1 JAN 2024	29.083.554
MUTASI TAMBAH	215.608.537
Alih Terima	215.608.537
MUTASI KURANG	29.083.554
Pemindahtanganan/penjualan lelang	29.083.554
SALDO 31 DESEMBER 2024	215.608.537

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal sebesar Rp29.083.554 merupakan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2023 (Audited).
- b. Mutasi Tambah sebesar Rp215.608.537 berasal dari alih terima karena penyerahan aset HBI dari KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Metan Tanjung II kepada KESDM sebesar Rp215.608.537 sesuai BAST nomor 513.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 16 Desember 2024.
- c. Mutasi Kurang sebesar Rp29.083.554 berasal pemindahtanganan melalui penjualan lelang yang berasal dari:
 - 1) Eks KKKS PT. Pertamina Hulu Energi Metana Suban I sebesar Rp22.869.948 sesuai risalah Lelang Nomor 2292/08.03/2024-01 tanggal 5 September 2024 dan telah ditindaklanjuti pula dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 1071.K/BN.09/SJN.A/2024 Tanggal 26 November 2024;
 - 2) Eks KKKS Husky Anugerah Limited sebesar Rp6.213.606 sesuai risalah Lelang Nomor 652/08.02/2024-01 tanggal 4 Juli 2024 dan telah ditindaklanjuti pula dengan Surat Keputusan Penghapusan nomor 1071.K/BN.09/SJN.A/2024 Tanggal 26 November 2024.
- d. Saldo akhir aset HBI sebesar Rp215.608.537.

4. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

Saldo Awal 1 Januari 2024*	USD	Nilai Konversi Rupiah
	6.747.536,95	104.020.029.655
Mutasi Tambah	14.814.002,59	239.423.909.860
Alih Terima	14.814.002,59	239.423.909.860
Mutasi Kurang	6.747.536,95	109.053.692.222
Pemindahtanganan/Penjualan Lelang**	6.747.536,95	109.053.692.222
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	14.814.002,59	234.390.247.293
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2024		5.033.662.566
Saldo Akhir 31 Desember 2024**	14.814.002,59	239.423.909.859

Ket : * menggunakan kurs tengah Transaksi BI pada 31 Desember 2023 (Rp15.416/US\$)

** menggunakan kurs tengah Transaksi BI pada 31 Desember 2024 (Rp16.162/US\$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Saldo Awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2023 (audited) sebesar USD6,747,536.95 atau setara Rp104.020.029.655 (kurs per 31 Desember 2023 adalah Rp15.416/USD);
- b. Mutasi Tambah berasal dari alih terima sebesar USD14,814,003.00 atau setara dengan Rp239.423.909.860 karena penyerahan dari:
 - 1) KKKS Eni Bukat Limited kepada KESDM sebesar USD9,068,518.74 atau setara dengan Rp146.565.399.876 sesuai BAST nomor 514.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 16 Desember 2024;
 - 2) KKKS CBM Sekayu kepada KESDM sebesar USD387,573.43 atau setara dengan Rp6.263.961.776 sesuai BAST nomor 515.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 16 Desember 2024;
 - 3) KKKS Medco E&P Bengara kepada KESDM sebesar USD173,971.76 atau setara dengan Rp2.811.731.585 sesuai BAST nomor 512.BA/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 16 Desember 2024;
 - 4) KKKS PHE Metana Tanjung II kepada KESDM sebesar USD35,889.05 atau setara dengan Rp580.038.826 sesuai BAST nomor 23.Pj/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 16 Desember 2024;
 - 5) KKKS Repsol Andaman kepada KESDM sebesar USD5,148,049.61 atau setara dengan Rp83.202.777.797 sesuai BAST nomor 23.Pj/BN.05/SJA.4/2024 tanggal 16 Desember 2024
- c. Mutasi Kurang sebesar USD6,747,536.95 atau setara dengan Rp109.053.692.222 penjualan melalui

lelang aset MP yang berasal dari:

- 1) KKKS Talisman East Jabung B.V. sebesar USD66,871.00 atau setara dengan Rp1.080.768.007 sesuai Risalah Lelang Nomor 537/04.02/2024-1 tanggal 27 Juni 2024 dan telah ditindaklanjuti pula dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 936.K/BN.09/SJN.A/2024;
 - 2) KKKS Cue Kalimantan PTE. LTD. sebesar USD2,068,749.00 atau setara dengan Rp33.435.128.449 sesuai Risalah Lelang Nomor 155/13.02/2024-01 tanggal 2 Mei 2024 dan telah ditindaklanjuti pula dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 526.K/BN.07/SJN.A/2024;
 - 3) KKKS Star Energy Sentosa sebesar USD1,853,969.00 atau setara dengan Rp29.963.846.978 sesuai Risalah Lelang Nomor 247/03.04/2024-01 tanggal 26 April 2024 dan telah ditindaklanjuti pula dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 581.K/BN.07/SJN.A/2024;
 - 4) KKKS Medco Ses dh. Ophir Ses Indonesia Limited sebesar USD2,757,948.00 atau setara dengan Rp44.573.948.788 sesuai Risalah Lelang Nomor 270/13.01/2024-1 dan Nomor 272/13.01/2024-1 tanggal 12 Juni 2024 dan telah ditindaklanjuti pula dengan Surat Keputusan Penghapusan Nomor 413.K/BN.09/SJN.A/2024 19 Juni 2024 dan nomor 659.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- d. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS per 31 Desember 2024 senilai USD14,814,002.59 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2024 yaitu setara dengan Rp239.423.909.859. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian tambah selisih kurs sebesar Rp5.033.662.566.

D.2.1.6.6.3. Aset KKKS Hulu Migas pada SKK Migas

Aset KKKS per 31 Desember 2024 sebesar Rp668.740.738.490.428. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

No	Aset	31 Des 2024	31 Des 2023
1.	Aset Tanah	45.574.688.348.898	32.770.359.696.798
2.	Aset Non Tanah HBM	593.583.489.821.101	555.683.710.256.668
3.	Aset Non Tanah HBI	132.223.585.160	132.110.773.061
4.	Aset Non Tanah MP	29.450.336.735.267	27.324.716.734.003
Jumlah		668.740.738.490.426*	615.910.897.460.530

*selisih Rp2 karena pembulatan

A. Aset Tanah

SALDO 1 JAN 2024	32.770.359.696.798
MUTASI TAMBAH	14.066.552.869.388
PIS Tahun Sebelumnya	204.689.695.054
Koreksi Pencatatan	1.261.321.579.480
Koreksi Tambah Hasil IP	12.581.392.157.004
Alih Terima	19.149.437.850
MUTASI KURANG	1.262.224.217.288
Koreksi Pencatatan	1.236.057.452.155
Alih Serah	23.125.155.120
Penghapusan	3.041.610.013
Transfer Keluar	-
SALDO 31 DESEMBER 2024	45.574.688.348.898

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp32.770.359.696.798 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 audited;
2. Mutasi tambah sebesar Rp14.066.552.869.388 yang terdiri dari:

- a. Pengadaan Tanah dengan tahun perolehan sebelum tahun 2024 sebesar Rp204.689.695.054 pada KKKS:

No	KKKS	Nilai
1)	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	3.551.447.335
2)	EXXONMOBIL CEPU LTD.	15.212.582.899
3)	EXXONMOBIL CEPU LTD. (JTB)	92.285.430.651
4)	PT MEDCO E&P LEMATANG	5.849.484.086
5)	PT PERTAMINA EP	526.835.000
6)	PT PERTAMINA HULU SANGA SANGA	59.852.417.423
7)	PT PERTAMINA HULU ENERGI JAMBI MERANG	4.056.740.000
8)	PT MEDCO CBM SEKAYU	1.518.560.000
9)	PT PERTAMINA HULU ROKAN	21.836.197.660
Total		204.689.695.054

- b. Koreksi pencatatan sebesar Rp1.261.321.579.480 pada KKKS:

No	KKKS	Nilai
1)	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	7.564.626.167
2)	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	878.400.000
3)	JINDI SOUTH JAMBI B CO. LTD	5.000.353.500
4)	PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR	1.082.292.776.000
5)	JADESTONE ENERGY (LEMANG) PTE. LTD.	256.461.399
6)	PT PERTAMINA HULU ROKAN	165.328.962.414
Total		1.261.321.579.480

- c. Koreksi tambah nilai aset sebesar Rp12.581.392.157.004 pada Neraca terkait dengan hasil Inventarisasi dan Penilaian atas 3 KKKS:

- PT. Sele Raya Merangin Dua sebesar Rp661.445.073;
- PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga sebesar Rp1.706.370.860.180; dan
- PT. Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp10.874.359.851.751. Pelaksanaan IP tahun 2022 dan 2023 atas BMN Hulu Migas berupa Tanah pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan (PT PHR) menunjukkan bahwa sebagian tanah telah digunakan oleh K/L yang selanjutnya akan dilakukan identifikasi dan penetapan status penggunaannya.

- d. Alih Terima merupakan transaksi Penyerahan Tanah dari KESDM – PPBMN kepada KKKS PT Pertamina Hulu Energi Ogan Komering sebesar Rp19.149.437.850.

3. Mutasi Kurang sebesar Rp1.262.224.217.288 yang terdiri dari:

- a. Koreksi pencatatan sebesar Rp1.236.057.452.155 yang merupakan transaksi mutasi kurang sertifikasi luas dengan mengoreksi nilai perolehan pada KKKS:

No	KKKS	Nilai
1)	MEDCO E&P GRISSIK LTD.	7.564.626.167
2)	PT PERTAMINA HULU KALIMANTAN TIMUR	1.082.292.776.000
3)	PT PERTAMINA HULU ROKAN	143.707.282.000
4)	STARBORN ENERGY BONTANG PTE. LTD.	2.492.767.988
Total		1.236.057.452.155

- b. Alih Serah sebesar Rp23.125.155.120 merupakan transaksi penyerahan Tanah dari SKK Migas kepada PPBMN – KESDM atas tanah dari KKKS JOB Pertamina – Jadestone Energy (OGAN

KOMERING) LTD. sebesar Rp19.149.437.850 dan ke Mahkamah Agung sebesar Rp3.975.717.270;

c. Penghapusan atas tanah pada PT Pertamina Hulu Rokan senilai Rp3.041.610.013;

4. Saldo akhir sebesar Rp45.574.688.348.898.

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berupa HBM

Saldo Awal 1 Januari 2024	555.683.710.256.668
Mutasi Tambah:	171.590.914.472.602
PIS	145.841.016.669.990
PIS Tahun Sebelumnya	21.207.968.453.217
Koreksi Tambah	4.125.091.964.389
Alih Terima	-
Transfer Masuk	14.115.193.626
Selisih Pembulatan	56.755
SE	402.722.134.625
Mutasi Kurang:	2.434.219.905.169
Penghapusan	5.116.082.553
Alih Serah	1.888.014.056
Transfer Keluar	14.115.193.625
Selisih Pembulatan	48.072.565
Koreksi Kurang	1.914.168.025.229
Dalam Proses Penghapusan	498.884.517.141
Saldo Akhir 31 Desember 2024	724.840.404.824.101

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

- Saldo awal sebesar Rp555.683.710.256.668 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 audited.
- Mutasi tambah HBM sebesar Rp40.333.999.469.602 berasal dari:
 - Pembelian HBM pada Tahun 2024 sebesar Rp14.584.101.666.990.
 - Penambahan HBM baru dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2024 yang baru dicatat pada tahun 2024 sebesar Rp21.207.968.453.217.
 - Koreksi tambah nilai perolehan HBM sebesar Rp4.125.091.964.389, berasal dari late charges dan koreksi nilai AFE.
 - Subsequent Expenditure* merupakan Pengeluaran biaya setelah pengakuan awal HBM yang mengikuti persetujuan WP&B dan/atau AFE. *Subsequent Expenditure* tahun 2024 sebesar Rp402.722.134.625 pada KKKS PT PHR.
 - Transfer In* pada JOB PERTAMINA – MEDCO E&P SIMENGGARIS sebesar Rp14.115.193.626.
 - Selisih pembulatan sebesar Rp56.755.
- Mutasi kurang HBM sebesar Rp2.434.219.905.169 berasal dari:
 - Penghapusan sebesar Rp5.116.082.553 merupakan penghapusan HBM berdasarkan surat hapus buku SKK Migas yang telah laku lelang.

- b. Alih serah atas KKKS Terminasi sebesar Rp1.888.014.056.
 - c. *Transfer Out* sebesar Rp14.115.193.625.
 - d. Selisih Pembulatan sebesar Rp48.072.565.
 - e. Koreksi kurang nilai perolehan HBM yang antaa lain berasal dari koreksi nilai AFE sebesar Rp1.914.168.025.229.
 - f. Terdapat HBM yang sudah laku lelang yang dijelaskan dalam risalah lelang namun belum diterbitkan surat keputusan penghapusan dan/atau surat hapus bukunya dan aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Menteri ESDM sebesar Rp498.884.517.141.
4. Saldo akhir sebesar Rp724.840.404.824.101.

B.2. Aset Non Tanah Berupa HBI

Saldo Awal 1 Januari 2024	132.110.773.061
Mutasi Tambah:	3.634.686.245
Koreksi Saldo Awal	-
PIS/Pengadaan Tahun Berjalan	1.334.574.243
PIS/Pengadaan Tahun Sebelumnya	1.250.075.859
Koreksi Tambah	1.050.036.143
Alih Terima	-
Mutasi Kurang:	3.521.874.146
Penghapusan	232.385.143
Alih Serah	215.608.537
Koreksi Kurang	2.075.433.934
Dalam Proses Penghapusan	998.446.532
Saldo Akhir 31 Desember 2024	132.223.585.160

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal sebesar Rp132.110.773.061 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 audited.
2. Mutasi tambah sebesar Rp3.634.686.245 berasal dari:
 - a. Pembelian HBI pada Tahun 2024 sebesar Rp1.334.574.243.
 - b. Penambahan HBI baru dengan tahun perolehan sebelum Tahun 2024 yang baru dicatat pada tahun 2023 sebesar Rp1.250.075.859.
 - c. Koreksi tambah nilai perolehan HBI sebesar Rp1.050.036.143 yang disebabkan koreksi tanggal PIS dan *late charges*.
3. Mutasi Kurang sebesar Rp3.521.874.146 berasal dari:
 - a. Penghapusan HBI KKKS Premier Oil Natuna Sea B.V. sebesar Rp232.385.143.
 - b. Penyerahan HBI KKKS Terminasi PT. Pertamina Hulu Energi Metan Tanjung II kepada Pengguna Barang sebesar Rp215.608.537.
 - c. Koreksi kurang nilai perolehan HBI yang antara lain berasal dari koreksi nilai AFE sebesar Rp2.075.433.934.
 - d. Proses penghapusan sebesar Rp998.446.532.
4. Saldo Akhir sebesar Rp132.223.585.160.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

Deskripsi	USD	Nilai Konversi Rupiah
Saldo Awal 1 Januari 2024	1.772.490.707	27.324.716.734.003
Mutasi Tambah :	1.302.408.142	21.022.678.963.798
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	35.980.430	554.674.304.605
Pengadaan**	1.183.722.980	19.131.330.795.818
Pengembalian MP Non Cap**	31.161.327	503.629.362.655
Pengembalian MP Cap**	32.902.974	531.777.860.816
Transfer Masuk**	18.640.431	301.266.639.904
Alih Kelola Terima**	-	-
Mutasi Kurang :	1.252.702.539	20.221.914.688.313
Penyesuaian Saldo Awal Kurang*	14.930.836	230.173.768.887
Pemakaian Capital**	576.715.369	9.320.873.794.767
Pemakaian Non Capital**	562.324.764	9.088.292.839.538
Transfer Keluar**	25.597.965	413.714.311.394
Penghapusan*	17.594.287	271.233.531.629
Alih Kelola Serah**	9.665.953	156.221.132.063
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola C	12.446.482	201.160.041.338
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola NC	28.761.999	464.851.420.277
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain C	2.748.823	44.426.477.488
Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain NC	1.916.061	30.967.370.932
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	1.822.196.310	28.125.481.009.488
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2024	-	1.324.855.725.779
Saldo Akhir 31 Desember 2024	1.822.196.310	29.450.336.735.267

Ket :

* menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2023 (Rp15.416/US\$)

** menggunakan kurs tengah BI pada 31 Desember 2024 (Rp16.162/US\$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

- Saldo awal sebesar USD1,772,490,707 atau setara dengan Rp27.324.716.734.003 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 audited.
- Mutasi tambah sebesar USD1,302,408,140.00 atau setara dengan Rp21.022.678.963.798 berasal dari:
 - Koreksi tambah saldo awal sebesar USD35,980,430.00 atau setara Rp554.674.304.605 terjadi pada 51 KKKS;
 - Pengadaan Material Persediaan sebesar USD1,183,722,980.00 atau setara dengan Rp19.131.330.795.818 terjadi pada 71 KKKS;
 - Pengembalian atas Material Persediaan Non Capital sebesar USD31,161,327.00 atau setara dengan Rp503.629.362.655 terjadi pada 25 KKKS;
 - Pengembalian atas Material Persediaan Capital sebesar USD32,902,974.00 atau setara dengan Rp531.777.860.816 terjadi pada 16 KKKS;
 - Transfer Masuk sebesar USD18,640,431.00 atau setara Rp301.266.639.904 terjadi pada 41 KKKS.
- Mutasi kurang sebesar USD1,252,702,539.00 atau setara dengan Rp20.221.914.688.313 berasal dari:
 - Koreksi kurang saldo awal sebesar USD14,930,836.00 atau setara dengan Rp230.173.768.887 terjadi pada 47 KKKS;

- b. Pemakaian atas Material Persediaan capital sebesar USD576,715,369.00 atau setara dengan Rp9.320.873.794.767 terjadi pada 64 KKKS;
 - c. Pemakaian atas Material Persediaan non-capital sebesar USD562,324,764.00 atau setara dengan Rp9.088.292.839.538 terjadi pada 67 KKKS;
 - d. Transfer Keluar sebesar USD25,597,965.00 atau setara dengan Rp413.714.311.394 terjadi pada 48 KKKS;
 - e. Penghapusan sebesar USD17,594,287.00 atau setara dengan Rp271.233.531.629 terjadi pada 10 KKKS;
 - f. Alih serah sebesar USD9,665,953.00 atau setara dengan Rp156.221.132.063 terjadi pada 4 KKKS;
 - g. Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Alih Kelola sebesar USD41,208,480.00 atau setara dengan Rp666.011.461.615 terjadi pada 13 KKKS;
 - h. Pemanfaatan MP Alih Kelola oleh KKKS Lain sebesar USD4,664,884.00 atau setara dengan Rp75.393.848.420 terjadi pada 6 KKKS.
4. Saldo akhir material persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar USD1,822,196,310.00 yang jika dikonversikan menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2024 (Rp16.162/US\$) setara dengan Rp29.450.336.735.267 menyebabkan terjadinya pendapatan selisih kurs sebesar Rp1.324.855.725.779.

D.2.1.6.6.4. Aset KKKS Hulu Migas pada BPMA

Aset KKKS per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14.371.313.426.237 dan Rp14.331.042.210.113. Aset KKKS terdiri atas Tanah, Harta Benda Modal (HBM), Harta Benda Inventaris (HBI), dan Material Persediaan (MP). Penjelasan atas Aset KKKS sebagai berikut:

No	Aset	31 Des 2024	31 Des 2023
1.	Aset Tanah	547.251.182.593	527.439.579.793
2.	Aset Non Tanah HBM	12.449.928.456.830	12.427.199.088.895
3.	Aset Non Tanah HBI	2.021.681.631	1.895.800.687
4.	Aset Non Tanah MP	1.372.112.105.182	1.374.507.740.738
Jumlah		14.371.313.426.236*	14.331.042.210.113

*selisih Rp1 karena pembulatan

A. Aset Tanah

Mutasi tanah meliputi:

(Dalam Rupiah)

Saldo Awal 1 Januari 2024	527.439.579.793
Mutasi Tambah:	19.811.602.800
PIS tahun sebelumnya	19.560.019.800
PIS tahun berjalan	238.906.000
Mutasi Hasil IP	12.677.000
Mutasi Kurang:	-
Saldo Akhir 31 Desember 2024	547.251.182.593

Penjelasan atas aset tanah yang disajikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp527.439.579.593 merupakan saldo per tanggal 31 Desember

2023 Audited.

2. Mutasi tambah sebesar Rp19.560.019.800 merupakan pengadaan aset tanah tahun 2023 di KKKS Medco E&P Malaka.
3. Mutasi tambah sebesar Rp238.906.000 merupakan pengadaan aset tanah tahun 2024 di KKKS Medco E&P Malaka.
4. Mutasi tambah sebesar Rp12.677.000 merupakan hasil IP pada KKKS Triangle Pase
5. Saldo akhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp547.251.182.593.

B. Aset Non Tanah

B.1. Aset Non Tanah Berupa HBM

Saldo Awal 1 Januari 2024	12.427.199.088.895
Mutasi Tambah:	24.240.996.470
Koreksi Saldo Awal	3.705.938.799
PIS Tahun Berjalan	553.333.670
PIS Tahun Sebelumnya	18.415.521.825
Koreksi Perbaikan Kurs	1.566.202.176
Mutasi Kurang:	1.511.628.535
Penghapusan	11.012.617
Alih Serah	1.500.615.918
Saldo Akhir 31 Desember 2024	12.449.928.456.830

Penjelasan atas mutasi Aset HBM adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal yang disajikan sebesar Rp12.427.199.088.895 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2023 Audited.
2. Mutasi tambah sebesar Rp24.240.996.470 adalah disebabkan sebagai berikut:
 - a. Koreksi saldo awal sebesar Rp3.705.938.799 merupakan koreksi nilai wajar pada KKKS Medco E&P Malaka;
 - b. PIS pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp405.802.834;
 - c. PIS Pada KKKS ONWA Pte Ltd sebesar Rp80.772.630;
 - d. PIS Pada KKKS Aceh Energy sebesar Rp66.758.206;
 - e. PIS Tahun Sebelumnya pada KKKS Medco E&P Malaka sebesar Rp15.102.640.456;
 - f. PIS Tahun Sebelumnya Pada KKKS Triangle Pase Inc sebesar Rp1.560.312.263;
 - g. PIS Tahun Sebelumnya Pada KKKS ONWA Pte Ltd sebesar Rp1.752.569.106;
 - h. Koreksi Perbaikan Kurs sebesar Rp12.153.496 pada KKKS Medco E&P Malaka;
 - i. Koreksi Mutasi Pada KKKS Pertamina Hulu Energi NSB sebesar Rp1.554.048.680.
3. Mutasi kurang sebesar Rp1.511.628.535 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penghapusan pada KKKS Repsol Andaman B.V sebesar Rp11.012.617;
 - b. Alih Serah Aset kepada PPBMN sebesar Rp1.500.615.918.
4. Saldo akhir 31 Desember 2024 sebesar Rp12.449.928.456.830.

B.2. Aset Non Tanah Berupa HBI

Saldo Awal 1 Januari 2024	1.895.800.687
Mutasi Tambah:	125.880.944
PIS Tahun Berjalan	106.188.262
PIS Tahun Sebelumnya	19.692.682
Koreksi Berdasarkan IP	-
Mutasi Kurang:	-
Saldo Akhir 31 Desember 2024	2.021.681.631

Penjelasan atas mutasi Aset HBI adalah sebagai berikut:

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp1.895.800.687 merupakan saldo per tanggal 31 Desember 2023 Audited;
- Mutasi tambah sebesar Rp125.880.944 dengan rincian sebagai berikut:
 - PIS pada KKKS PT Pema Global Energy sebesar Rp66.478.869;
 - PIS pada KKKS ONWA Pte Ltd sebesar Rp21.484.643;
 - PIS pada KKKS Aceh Energy sebesar Rp18.224.750;
 - PIS tahun sebelumnya pada KKKS Triangle Pase Inc. sebesar Rp19.692.682.
- Saldo akhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.021.681.631.

B.3. Aset Non Tanah Berupa Material Persediaan

	USD	Nilai konversi rupiah
Saldo Awal 1 Januari 2024	89.161.114,47	1.374.507.740.738
Mutasi Tambah:	4.805.383,49	77.663.649.989
Penyesuaian Saldo Awal Tambah*	1.284,15	19.796.456
Pengadaan**	4.781.073,32	77.271.706.998
Pengembalian <i>Non Capital</i> **	16.070,37	259.729.320
Transfer Masuk**	6.955,65	112.417.215
Mutasi Kurang:	(9.069.077,77)	(146.518.019.415)
Penyesuaian Saldo Awal Kurang*	(75.624,00)	(1.165.819.584)
Pemakaian <i>Capital</i> **	(109.908,74)	(1.776.345.056)
Pemakaian <i>Non Capital</i> **	(2.130.160,24)	(34.427.649.799)
Transfer Keluar <i>Capital</i> **	(1.605.335,18)	(25.945.427.179)
Alih Kelola Serah	(5.148.049,61)	(83.202.777.797)
Jumlah Sebelum Penyesuaian Kurs	84.897.420,19	1.305.653.371.312
Penyesuaian Selisih Kurs 31 Desember 2024		66.458.733.870
Saldo Akhir 31 Desember 2024	84.897.420,19	1.372.112.105.182

Ket : * menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2023 (Rp15.416/US\$)

** menggunakan kurs tengah pada 31 Desember 2024 (Rp16.162/US\$)

Penjelasan atas mutasi Aset Material Persediaan adalah sebagai berikut:

- Saldo awal aset material persediaan merupakan saldo material persediaan per 31 Desember 2023 (audited) sebesar USD89,161,114.47 atau setara Rp1.374.507.740.738.
- Mutasi tambah sebesar USD4,805,383.49 atau setara dengan Rp77.663.649.989 berasal dari:
 - Penyesuaian Saldo Awal sebesar USD1,284.15 atau setara dengan Rp19.796.456;
 - Pengadaan sebesar USD4,781,073.32 atau setara dengan Rp77.271.706.998 merupakan Pengadaan dari KKKS Medco E&P Malaka;

- c. Pengembalian sebesar USD16,070.37 atau setara dengan Rp259.729.320 yang merupakan Pengembalian MP Non Capital dari KKKS Triangle Pase Inc;
 - d. Transfer Masuk sebesar USD6,955.65 atau setara dengan Rp112.417.215 merupakan Transfer Masuk pada KKKS Medco E&P Malaka.
1. Mutasi kurang sebesar USD1,729,516.22 atau setara dengan Rp26.202.440.010 berasal dari:
 - a. Penyesuaian Saldo Awal sebesar USD75,624 atau setara dengan Rp1.165.819.584;
 - b. Pemakaian Capital sebesar USD10,908.74 atau setara dengan Rp1.776.345.056 merupakan pemakaian Aset MP dari KKKS Medco E&P Malaka;
 - c. Pemakaian Non-capital sebesar USD2,130,160.24 atau setara dengan Rp34.427.649.799 merupakan pemakaian Aset MP dari KKKS Medco E&P Malaka;
 - d. Transfer Capital sebesar USD1,605,335.18 atau setara dengan Rp25.945.427.179 merupakan transfer aset MP sebagai antar KKKS;
 - e. Alih Serah kepada PPBMN sebesar USD5,148,049.61 atau setara dengan Rp83.202.777.797.
 1. Saldo akhir material persediaan merupakan stok material persediaan KKKS berdasarkan laporan BPMA per 31 Desember 2024 senilai USD84,897,420.19 yang jika dikonversikan dengan kurs tengah BI per 31 Desember 2024 yaitu setara dengan Rp1.372.112.105.182. Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan penyesuaian kurang selisih kurs sebesar Rp66.458.733.870.

D.2.1.6.6.5. Aset PKP2B

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.063.230.520.563 dan Rp2.941.049.250.958. Penjelasan atas Aset PKP2B sebagai berikut.

NO	Aset PKP2B	Per 31 Desember 2024
1	Aset Tanah	442.761.205.303
2	Aset Non Tanah	2.620.469.315.260
	Saldo Akhir 31 Desember 2024	3.063.230.520.563

A. Penjelasan Aset Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2024	393.622.957.292
Mutasi Tambah:	87.729.001.803
Penambahan BMN Tanah	27.525.263.810
Koreksi Tambah	60.203.737.993
Mutasi Kurang:	(38.590.753.792)
Koreksi Kurang	(38.590.753.792)
Saldo Akhir 31 Desember 2024	442.761.205.303

1. Saldo awal merupakan aset tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2023 sebesar Rp393.622.957.292 pada PT Berau Coal.
2. Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp87.729.001.803 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penambahan BMN PT Berau Coal berupa Tanah yang diperoleh sebelum TA 2024 dengan tahun perolehan 2010-2014 dan baru dilaporkan sebesar Rp27.525.263.810 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi TW III nomor 420/BA/BN.10/SJA2.2/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
 - b. Koreksi tambah Terdapat koreksi tambah pencatatan tanah yang semula tercatat sebanyak 544

bidang menjadi 146 persil sebesar Rp38.590.753.793 pada PT Berau Coal sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN yang berasal dari PKP2B PT Berau Coal SM I TA 2024 Nomor 292.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 8 Juli 2024;

- c. Koreksi Tambah BMN dari CALK ke Neraca Hasil Inventarisasi Penilaian (IP) BMN Tanah pada PT Berau Coal dalam rangka pencatatan yang didasarkan pada Berita Acara Inventarisasi nomor 481.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 20 November 2024 sebesar Rp21.612.984.200.
3. Koreksi kurang pencatatan tanah yang semula tercatat sebanyak 544 bidang menjadi 146 persil sebesar Rp38.590.753.793 pada PT Berau Coal sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN yang berasal dari PKP2B PT Berau Coal SM I TA 2024 Nomor 292.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 8 Juli 2024;
4. Nilai Aset tanah yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2024 sebesar Rp442.761.205.303 yaitu aset tanah yang berasal dari PT Berau Coal.

B. Penjelasan Aset Non Tanah

Saldo Awal 1 Januari 2024	2.547.426.293.666
Mutasi Tambah:	73.043.021.594
Penambahan Aset Baru	45.340.709.594
Koreksi Tambah	27.702.312.000
Mutasi Kurang:	-
Koreksi Pencatatan BMN Non Tanah ke Tanah	-
Saldo Akhir 31 Desember 2024	2.620.469.315.260

Penjelasan atas aset yang disajikan dalam neraca adalah sebagai berikut:

1. Saldo awal merupakan Aset NonTanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2022 sebesar Rp2.547.426.293.666 pada PT Berau Coal;
2. Mutasi tambah Aset Non Tanah yaitu adanya pembelian aset pada PT Berau Coal sebesar Rp45.340.709.595 yang terdiri dari 154 Aset Non Tanah berupa Peralatan dan Mesin sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN PKP2B PT Berau Coal Tahunan TA 2024 Nomor 71.BA/BN.10/SJA.2.2/2025 tanggal 23 Januari 2025;
3. Koreksi tambah Aset Non Tanah dari CALK ke Neraca pada PT Berau Coal sebesar Rp27.702.312.000 yang merupakan hasil Inventarisasi Penilaian (IP) BMN Non Tanah dalam rangka pencatatan yang didasarkan pada Berita Acara Inventarisasi nomor 481.a.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 20 November 2024;
4. Saldo akhir 31 Desember 2024 Aset Non Tanah PKP2B sebesar Rp2.620.469.315.260 yang berasal dari PT Berau Coal.

D.2.1.6.6.6. Aset Lainnya Eks BLBI

Jumlah aset Lainnya BLBI per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.230.620.927.132 sedangkan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.355.953.839.630, atau terjadi penurunan sebesar Rp859.562.612.488. Aset eks BPPN terdiri dari aset inventaris, aset properti eks BPPN, aset nostro, surat berharga eks BPPN dan aset saham eks BPPN. Rincian aset eks BPPN per 31 Desember 2024 sebagai berikut.

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	31 Desember 2023
1	Aset Inventaris	5.209.616.797	(88.973.924)	5.298.590.721
2	Aset Properti eks BPPN	3.317.862.433.615	(262.030.247.428)	3.579.892.681.042
3	Aset Nostro	2.920.898.206	(584.179.642)	3.505.077.848

No	Uraian	31 Desember 2024	Mutasi	31 Desember 2023
4	Surat Berharga Eks BPPN	540.677.395.604	23.742.056.078	516.935.339.526
5	Aset Saham Eks BPPN	47.276.314.736	(9.356.905.704)	56.633.220.440
6	Aset Lain-lain	6.316.674.268.174	122.985.338.122	6.193.688.930.053
	Jumlah	10.230.620.927.132	(125.332.912.498)	10.355.953.839.630

1. Aset Inventaris Eks BPPN

Aset inventaris adalah aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Aset Eks Bank asal (Bank Beku Operasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) berupa aset Properti dan Non Properti. Aset Inventaris yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 10.059 unit dengan nilai sebesar Rp5.209.616.797 sedangkan 31 Desember 2023 adalah sejumlah 10.238 unit dengan nilai sebesar Rp5.298.590.721 sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp88.973.924 yang disebabkan oleh:

- Pengurangan sejumlah 4 (empat) unit lukisan dengan nilai Rp8.613.000, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 118/KN/2023 tanggal 7 Agustus 2023 dan BAST nomor BA-3/KN.4/2024 tanggal 18 Januari 2024.
- Pengurangan sejumlah 8 (delapan) unit lukisan dengan nilai Rp8.837.000, ditetapkan status penggunaannya pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 165/KN/2023 tanggal 20 November 2023 dan BAST nomor BA-3/KN.4/2024 tanggal 18 Januari 2024.
- Koreksi kurang sebesar Rp69.248 atas saldo asset yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma, Surabaya.
- Pengurangan sejumlah 76 (tujuh puluh enam) aset dengan nilai Rp32.452.700 yang terletak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan yang ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 569/KN/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima nomor BA-14/KN.4/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- Pengurangan sejumlah 15 (enam belas) aset dengan nilai Rp3.925.436 yang terletak di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang I yang ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 569/KN/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima nomor BA-14/KN.4/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- Pengurangan sejumlah 1 (satu) aset dengan nilai Rp4.099.613 yang terletak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara yang ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 569/KN/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima nomor BA-14/KN.4/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
- Pengurangan sejumlah 75 (tujuh puluh lima) unit aset dengan nilai Rp30.976.927 yang terletak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur, ditetapkan status penggunaannya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 569/KN/2022 tanggal 21 Desember 2022 dan Berita Acara Serah Terima nomor BA-14/KN.4/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

Selain itu terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu 18 unit aset dengan nilai Rp33.700.000 yang terletak di Kepolisian Negara Republik Indonesia ditetapkan status penggunaannya sesuai Keputusan

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 574/KN/2022 tanggal 23 Desember 2022.

Rincian Aset Inventaris Eks BPPN terlampir pada [lampiran LD18](#).

2. Aset Properti Eks BPPN

Aset Properti eks BPPN yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks BPPN per 31 Desember 2024 sejumlah 1.382 aset dengan nilai sebesar Rp3.317.862.433.615 sedangkan per 31 Desember 2023 sejumlah 1.460 aset dengan nilai sebesar Rp3.579.892.681.042.

Rincian mutasi aset properti eks BPPN adalah sebagai berikut:

No.	Kelompok Aset	Saldo Per 31 Desember 2024		Mutasi 2024		Saldo Per 31 Desember 2023	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi2011)	873	1.216.797.033.458	(31)	(719.101.380.678)	904	1.935.898.414.136
2	TemuanBPK	363	1.619.564.206.869	(1)	740.261.728.000	364	879.302.478.869
3	BJDA (Verifikasi2009)	62	229.922.917.300	-	5.722.772.300	62	224.200.145.000
4	Settlement	-	-	-	-	-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	2	46.613.347.327	(40)	(92.595.052.673)	42	139.208.400.000
6	Griya Potensa	2	295.000.000	-	-	2	295.000.000
7	Covernote	80	204.669.928.661	(6)	(196.318.314.376)	86	400.988.243.037
Jumlah		1.382	3.317.862.433.615	(78)	(262.030.247.427)	1.460	3.579.892.681.042

Perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks BPPN disebabkan oleh adanya perubahan nilai, penyerahkelolaan ke LMAN dan penetapan status penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga beserta rincian jumlah dan nilai aset properti eks BPPN per 31 Desember 2024 tersaji pada [lampiran LD19 dan Pengungkapan Penting Lainnya](#).

3. Aset Nostro

Aset Nostro per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.920.898.206 sedangkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.505.077.848. Rincian mutasi aset nostro per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

	Saldo Akhir	Mutasi	Saldo Awal	Ket.
Aset Nostro di Bank Ganesha	2.920.898.206	(584.179.642)	3.505.077.848	
Total	2.920.898.206	(584.179.642)	3.505.077.848	

Aset Nostro yang tidak didukung dengan dokumen kepemilikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp454.445.361.290, dokumen kepemilikan tersebut masih dalam penelusuran oleh DJKN. Sehingga dalam hal aset nostro tersebut telah memenuhi syarat pengakuan aset, aset nostro tersebut akan disajikan di Neraca.

Rincian aset Nostro terlampir pada [lampiran LD20](#).

4. Surat Berharga Eks BPPN

Surat berharga eks BPPN merupakan surat berharga yang belum free and clear pada saat pembubaran BPPN. Surat Berharga Eks BPPN disimpan di Kustodi Citibank berdasarkan Custodial Agreement tanggal 20 Juli 1999 antara BPPN dan Citibank. Namun, setelah tugas-tugas BPPN diteruskan oleh Kementerian Keuangan belum dilakukan pembaharuan Perjanjian Kustodi.

Nilai surat berharga eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Citibank per 31 Desember 2024 sebesar Rp540.677.395.604, sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp516.935.339.526 atau terjadi kenaikan nilai Surat Berharga Eks BPPN sebesar Rp23.742.056.078 yang berasal dari selisih kurs.

Rincian surat berharga non saham eks BPPN terlampir pada [lampiran LD21](#).

5. Aset Saham Eks BPPN

Aset Saham adalah aset yang berupa kepemilikan saham pada Perseroan yang sebagian besar aset saham berasal dari Asset settlement BTO dan BBU. Saham eks BPPN terbagi atas aset saham pada kustodi Citibank dan aset saham yang dikelola langsung oleh DJKN. Nilai aset saham eks BPPN per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp47.276.314.736 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.633.220.440 sehingga terjadi penurunan nilai aset saham eks BPPN sebesar Rp9.356.905.704. Penurunan yang terjadi karena fluktuasi nilai saham 14 emiten, yaitu:

a. Penurunan nilai aset saham eks BPPN terdiri dari:

- PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX) mengalami penurunan sebesar Rp803.432.500;
- PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX) mengalami penurunan sebesar Rp936.492.500;
- PT Holcim Indonesia Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB) mengalami penurunan sebesar Rp8.269.607.500;
- PT Merck, Tbk. (MERK) mengalami penurunan sebesar Rp49.000;
- PT Sreeya Sewu Indonesia (PT Sierad Produce, Tbk (SIPD) mengalami penurunan sebesar Rp287.829.750;
- PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO) mengalami penurunan sebesar Rp5.586.000; dan
- PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO) mengalami penurunan sebesar Rp2.777.040.000.

b. Kenaikan nilai aset saham eks BPPN terdiri dari:

- PT Citatah Tbk (CTTH) mengalami kenaikan sebesar Rp158.261.950;
- PT Citatah Tbk (CTTH) mengalami kenaikan sebesar Rp579.900.146;
- PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL) mengalami kenaikan sebesar Rp17.000;
- PT Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI) mengalami kenaikan sebesar Rp1.447.525.050;
- PT Star Pacific, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net) (LPLI) mengalami kenaikan sebesar Rp2.000;
- PT Trias Sentosa, Tbk (TRST) mengalami kenaikan sebesar Rp12.600; dan
- PT Kabelindo Murni, Tbk (KBLM) mengalami kenaikan sebesar Rp1.537.412.800.

Rincian aset saham eks BPPN sebagaimana terlampir pada [lampiran LD22](#).

6. Aset Lain-Lain Eks BPPN

Aset Lain-lain pada neraca Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.316.674.268.174 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.193.688.930.053. Terdapat kenaikan nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp122.985.338.121. Aset Lain-Lain adalah aset non lancar lainnya yang terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Aset Properti eks PPA	5.104.817.636.841	5.035.495.899.789
2	Surat Berharga eks PPA	1.193.302.433.132	1.140.273.773.063
3	Saham Non Bank eks PPA	18.554.198.201	17.919.257.201
	Jumlah	6.316.674.268.174	6.193.688.930.053

a. Aset Lain-lain Eks BPPN - Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan di Neraca adalah aset properti yang dalam pengelolaan oleh Pemerintah didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau covernote).

Jumlah aset properti eks Kelolaan PT PPA (Persero) per 31 Desember 2024 sejumlah 1.339 aset dengan nilai sebesar Rp5.104.817.636.841, sedangkan per 31 Desember 2023 sejumlah 1.386 aset dengan nilai sebesar Rp5.035.495.899.789. Perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) disebabkan oleh adanya perubahan nilai, penyerahkelolaan ke LMAN, penarikan kembali dari LMAN, telah dilakukan pelelangan, baru dicatat karena telah ditemukan dokumen kepemilikan asli dan penetapan status penggunaannya kepada Kementerian/Lembaga beserta Rincian Aset Properti Eks Kelolaan PT PPA berikut perubahannya disajikan pada [lampiran LD23](#).

Rincian lebih lanjut terkait Aset Properti disajikan lebih lanjut pada [Pengungkapan Penting Lainnya](#).

b. Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

Surat berharga eks kelolaan PT PPA merupakan surat berharga yang telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Nilai surat berharga eks PT PPA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.193.302.433.132 sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.140.273.773.063. Terdapat kenaikan nilai surat berharga eks kelolaan PT PPA pada Tahun 2024 karena penyesuaian kurs senilai Rp53.028.660.069.

Rincian Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA terlampir pada [lampiran LD24](#).

c. Saham Non Bank Eks PPA

Nilai aset saham (non bank) eks PT PPA per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp18.554.198.201 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.919.257.201 atau terjadi kenaikan nilai saham sebesar Rp634.941.000. Kenaikan nilai yang terjadi karena fluktuasi nilai saham 3 emiten yaitu PT Sarana Kalsel Ventura mengalami kenaikan sebesar Rp17.371.000, PT Jembo Cable Company Tbk (JECC.JK) mengalami penurunan sebesar Rp1.662.430.000 dan PT Sukapraja Estetika Padang Golf mengalami kenaikan sebesar Rp2.280.000.000.

Saham eks kelolaan PT PPA merupakan saham telah free and clear pada saat pembubaran BPPN dan termasuk aset yang diserahkan kepada PT PPA hingga berakhirnya masa perjanjian pengelolaan aset tahun 2009. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA dilakukan sendiri oleh DJKN dengan berpedoman kepada PMK Nomor 154/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Aset Eks BPPN oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui PMK Nomor 230/PMK.06/2022. Pengelolaan aset saham eks kelolaan PT PPA oleh DJKN meliputi menghadiri dan mengambil keputusan dalam RUPS, permintaan pembayaran atas dividen saham atau hasil likuidasi, penjualan, penilaian, dan/atau penatausahaan.

Terdapat tindak lanjut transfer keluar aset saham PT Sejahtera Eka Graha senilai Rp26.563.266.134 ke Dit. KND (BA 999.03 Aset Investasi) sesuai Surat Perintah PRIN-25.1/KN/2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020. Rincian terlampir pada [lampiran LD25](#).

D.2.1.6.6.7. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T)

Saldo Aset Lainnya pada Aset Bekas Milik Asing Tionghoa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp35.474.626.100 dan Rp37.267.219.100.

Berikut rincian mutasi saldo aset lainnya:

Saldo Awal	37.267.219.100
Penambahan nilai aset lainnya dari nilai wajar ABMA/T yang ditetapkan kompensasinya s.d. 31 Desember 2024	77.848.653.000
Pengurangan nilai aset lainnya dari penyelesaian ABMA/T yang terjadi s.d. 31 Desember 2024	(79.641.246.000)
Saldo Akhir 31 Desember 2024	35.474.626.100

Adapun rincian nilai saldo awal Aset Lainnya Tahun 2024 yang merupakan nilai saldo akhir Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp37.267.219.100 berasal dari nilai wajar atas ABMA/T yang belum dapat dilunasi/diselesaikan sejak awal pengurusan pelepasan ABMA/T hingga 31 Desember 2023 disajikan di [lampiran LD26](#)

Guna membentuk saldo akhir Aset Lainnya sampai dengan Tahun 2024, maka saldo awal Aset Lainnya tersebut selanjutnya ditambah dengan nilai wajar atas ABMA/T yang ditetapkan besaran kompensasinya hingga Tahun 2024 dan/atau ditetapkan kembali besaran kompensasinya sehingga menimbulkan kenaikan nilai dari aset terdahulu, dengan total nilai sebesar Rp77.848.653.000 disajikan di [lampiran LD27](#).

Selanjutnya dikurangi dengan nilai wajar atas ABMA/T yang dilepaskan karena telah diterbitkan KMK pelepasannya, koreksi penetapan kembali besaran kompensasi ABMA/T, dengan total nilai sebesar Rp79.641.246.000 disajikan pada [lampiran LD28](#).

Dengan demikian, total nilai aset hingga Tahun 2024 adalah sebesar Rp35.474.626.100 (tiga puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh enam ribu seratus rupiah).

D.2.1.6.6.8. Aset BMN Idle

Aset BMN idle per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14.113.278.239 dan Rp20.081.172.095. BMN idle merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh BMN eks BMN idle dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN idle yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN yang telah ditetapkan menjadi BMN idle dan sudah

diserahkan kepada Pengelola Barang (dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang dalam hal ini Kepala KPKNL) atau disebut dengan BMN eks BMN Idle dan disajikan di dalam pos Aset Lainnya dengan perkiraan Aset Lain-Lain.

Pada periode Tahun 2024 terdapat mutasi atas BMN idle sebagai berikut:

Mutasi kurang:

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN idle pada Tahun 2024 sebesar Rp10.528.650.856 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan status penggunaan dua bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp163.000.000, satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp174.979.281, satu unit Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen dengan nilai perolehan Rp26.555.288 dan satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp77.520.134 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mamuju kepada Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/KM.6/KN.4/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle pada Badan Pengawas Pemilihan Umum tanggal 30 Januari 2024, dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-01/KNL.1501/BMN-EKS-IDLE/2024 tanggal 7 Maret 2024;
2. Penetapan status penggunaan dua bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp547.300.000, dan sembilan unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen dengan total nilai perolehan sebesar Rp54.512.900 dari Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon kepada Badan Keamanan Laut, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/KM.6/KN.4/2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BAST-04/KNL.1701/2024 Tanggal 29 Mei 2024;
3. Penghapusan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp71.000.000 pada KPKNL Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/KM.6/2024 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle Pada KPKNL Semarang;
4. Penghapusan delapan unit Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen dengan total nilai perolehan sebesar Rp228.632.000 pada KPKNL Banjarmasin, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/KM.6/2023 Tentang Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan Bongkaran Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle Berupa Rumah Negara Pada Kpknl Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hibah satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp103.210.000 pada KPKNL Semarang kepada Pemerintah Desa Srumbung, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle dari Pengelola Barang Kepada Pemerintah Desa Srumbung, dan Nomor: BAST- 001/KNL.0901/2024 tanggal 13 Juni tahun 2024;
6. Penghapusan satu unit Bangunan Gudang Tertutup Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp7.000.000 pada KPKNL Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/KM.6/2024 tentang Penghapusan Dengan Tindak Lanjut Penjualan Bongkaran Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle pada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan tanggal 7 Oktober 2024;
7. Penghapusan satu unit Gedung Pos Jaga Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp16.567.169 pada KPKNL Pamekasan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/KM.6/2024 Tentang Penghapusan dengan Tindak Lanjut Penjualan Bongkaran Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle Pada Pengelola Barang c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan tanggal 7 Oktober 2024;

8. Penetapan Status Penggunaan dua bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II seluas total 324 m2 dengan total nilai perolehan sebesar Rp589.875.000 dan dua unit Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen dengan total nilai perolehan sebesar Rp1.769.625.000 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/KM.6/KN.4/2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle Pada Kementerian Keuangan tanggal 6 Juli 2024 serta BAST Nomor BAST BA-12/KNL.0402/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA – 41 /KN.1/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
9. Penetapan Status Penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah seluas 472 m2 dengan nilai perolehan sebesar Rp3.068.000.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen dengan nilai perolehan sebesar Rp3.060.546.084 pada Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.6/KN.4/2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle Pada Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Oktober 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-01/KNL.0703/2024 Tanggal 1 November 2024;
10. Penetapan Status Penggunaan satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I dengan nilai perolehan sebesar Rp228.000.000 pada Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.6/KN.4/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara Idle pada Kementerian Kesehatan;
11. Koreksi Pencatatan atas aset Tanah Idle di KPKNL Lhokseumawe sebagai tindak lanjut Hasil Inventarisasi BMN eks BMN Idle sejumlah tiga bidang tanah dengan nilai perolehan total sebesar Rp342.328.000.

Nilai mutasi kurang BMN eks BMN Idle pada Periode Tahun 2024 lebih rinci disajikan pada [lampiran LD29](#).

Mutasi Tambah:

Nilai mutasi tambah BMN idle pada Tahun 2024 sebesar Rp1.127.926.000 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penetapan BMN idle atas satu bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan nilai perolehan sebesar Rp141.344.000, dan satu unit Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen dengan total nilai perolehan Rp60.729.000 dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK No.20/KM.6/KNL.1004/2023;
2. Penetapan BMN idle atas empat bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan dengan total nilai perolehan sebesar Rp632.111.000 dan empat unit Gedung Pos Jaga Permanen dengan total nilai perolehan Rp135.032.000 dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.6/KNL.1002/2023 tanggal 17 April 2023;
3. Penetapan BMN idle atas satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah senilai Rp21.917.000 dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp136.793.000 dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian Keuangan RI c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KM.6/KNL.1602/2022 Tanggal 23 Agustus 2022.

Nilai mutasi tambah BMN eks BMN Idle pada Periode Tahun 2024 lebih rinci disajikan pada [lampiran LD30](#).

Reklasifikasi Aset Properti Investasi ke Aset Lainnya:

Pada periode pelaporan per tanggal 31 Desember 2024, terdapat Aset Properti Investasi berupa tujuh bidang Tanah Idle yang diserahkan ke DJKN dengan nilai perolehan sebesar Rp4.228.203.000 yang direklasifikasi menjadi Aset lainnya dikarenakan:

1. Satu bidang tanah dengan nilai perolehan Rp228.000.000 selanjutnya akan dimutasi kurang karena telah ditetapkan status penggunaannya kepada Kementerian Kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.6/KN.4/2024 tanggal 24 Juli 2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara eks Barang Milik Negara Idle pada Kementerian Kesehatan;
2. Tiga bidang tanah dengan total nilai perolehan Rp589.875.000 selanjutnya akan dimutasi kurang karena telah ditetapkan status penggunaannya kepada Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 26/KM.6/KN.4/2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle Pada Kementerian Keuangan tanggal 6 Juli 2024 serta BAST Nomor BAST BA-12/KNL.0402/2024 tanggal 8 Agustus 2024 dan Berita Acara Serah Terima Nomor : BA – 41 /KN.1/2024 tanggal 8 Agustus 2024;
3. Satu bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp3.068.000.000 selanjutnya akan dimutasi kurang karena telah ditetapkan status penggunaannya kepada Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KM.6/KN.4/2024 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks Barang Milik Negara Idle Pada Komisi Pemilihan Umum tanggal 9 Oktober 2024;
4. Tiga bidang tanah dengan total nilai perolehan Rp342.328.000 akan dikoreksi dari pencatatan sebagai tindak lanjut Hasil Inventarisasi BMN eks BMN Idle Tahun 2024.

Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Properti Investasi:

Pada periode pelaporan periode tahun 2024, terdapat deklarasi Aset Lainnya ke Properti Investasi, berupa 6 (enam) bidang tanah senilai Rp795.372.000.

Saldo Akhir:

Saldo BMN Idle yang telah diserahkan ke Pengelola Barang (sebelum penyusutan) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.113.278.239.

D.2.1.6.6.9. Aset Lain-lain dalam Pengelolaan TK DJKN

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp363.502.761.721. Nilai ini merupakan saldo akhir aset lain-lain dalam pengelolaan DJKN. Rincian nilai aset lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Aset	Jumlah Aset	Nilai Aset (Rp)
1	Barang Gratifikasi	3.546	115.391.969.721
2	Aset Rampasan PT TLI	17.317 m2	248.110.792.000
Total			363.502.761.721

1. BARANG GRATIFIKASI

Nilai barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN per 01 Januari 2024 adalah Rp114.462.042.719. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi perolehan tahun 2015 hingga 2023 yang masih belum selesai

proses pengelolaannya. Barang gratifikasi diakui sebagai aset lainnya dalam pengelolaan DJKN setelah diserahkan kepada DJKN. Aset lain-lain dicatat berdasarkan nilai perolehan. Apabila nilai perolehan dicatat dalam mata uang asing maka nilai pencatatan dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal penyerahan.

Selama Tahun 2024, KPK melakukan penyerahan barang gratifikasi sebanyak 26 kali. Penerimaan barang gratifikasi dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) antara DJKN dan KPK, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Nomor dan Tanggal BAST	Jumlah Barang	Nilai Barang (Rp)
1	BAST-01/GTF.02.00/13/02/2024 tanggal 16 Februari 2024	389	323.677.206
2	BAST-02/GTF.02.00/13/03/2024 tanggal 5 Maret 2024	2	550.000
3	BAST-03/GTF.02.00/13/05/2024 tanggal 8 Mei 2024	3	2.500.000
4	BAST-04/GTF.02.00/13/05/2024 tanggal 20 Mei 2024	1	500.000
5	BAST-05/GTF.02.00/13/05/2024 tanggal 13 Mei 2024	1	1.000.000
6	BAST-06/GTF.02.00/13/05/2024 tanggal 27 Mei 2024	8	3.050.000
7	BAST-07/GTF.02.00/13/07/2024 tanggal 30 Mei 2024	697	289.192.855
8	BAST-08/GTF.02.00/13/06/2024 tanggal 26 Juni 2024	1	1.000.000
9	BAST-09/GTF.02.00/13/06/2024 tanggal 26 Juni 2024	1	600.000
10	BAST-10/GTF.02.00/13/06/2024 tanggal 27 Juni 2024	6	2.750.000
11	BAST-11/GTF.02.00/13/06/2024 tanggal 27 Juni 2024	1	300.000
12	BAST-12/GTF.02.00/13/06/2024 tanggal 27 Juni 2024	1	500.000
13	BAST-13/GTF.02.00/13/07/2024 tanggal 16 Juli 2024	203	84.255.007
14	BAST-14/GTF.02.00/13/07/2024 tanggal 26 Juli 2024	45	61.618.200
15	BAST-15/GTF.02.00/13/08/2024 tanggal 22 Agustus 2024	69	81.610.971
16	BAST-16/GTF.02.00/13/09/2024 tanggal 9 September 2024	256	119.801.494,17
17	BAST-17/GTF.02.00/13/09/2024 tanggal 9 September 2024	42	20.381.000
18	BAST-18/GTF.02.00/13/09/2024 tanggal 17 September 2024	21	10.823.000
19	BAST-19/GTF.02.00/13/09/2024 tanggal 25 September 2024	12	13.968.000
20	BAST-20/GTF.02.00/13/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024	31	18.875.009
21	BAST-21/GTF.01.00/13/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024	37	35.028.662
22	BAST-22/GTF.02.00/13/11/2024 tanggal 5 November 2024	16	3.149.500
23	BAST-23/GTF.02.00/13/11/2024 tanggal 19 November 2024	19	12.001.000
24	BAST-24/GTF.02.00/13/11/2024 tanggal 29 November 2024	34	13.142.000
25	BAST-25/GTF.02.00/13/12/2024 tanggal 12 Desember 2024	49	45.114.000
26	BAST-26/GTF.02.00/13/12/2024 tanggal 23 Desember 2024	39	308.044.500
Jumlah		1.984	1.453.432.404

Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan 16 kali lelang dengan barang yang laku terjual sebanyak 656 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan nilai perolehan sebesar Rp332.920.893 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Mutasi Keluar Tahun 2024 Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
1	Penjualan Gratifikasi 29 Februari 2024	63	29.010.879

No	Keterangan	Mutasi Keluar Tahun 2024 Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)
2	Penjualan Gratifikasi 27 Maret 2024	26	40.292.091
3	Penjualan Gratifikasi 25 April 2024	5	2.300.000
4	Penjualan Gratifikasi 4 Juni 2024	46	41.268.958
5	Penjualan Gratifikasi 10 Juni 2024	5	2.100.000
6	Penjualan Gratifikasi 12 Juni 2024	89	30.622.619
7	Penjualan Gratifikasi 9 Agustus 2024	110	53.432.471
8	Penjualan Gratifikasi 15 Agustus 2024	3	3.000.000
9	Penjualan Gratifikasi 6 September 2024	63	31.148.180
10	Penjualan Gratifikasi 23 September 2024	35	15.133.800
11	Penjualan Gratifikasi 23 September 2024	23	13.277.000
12	Penjualan Gratifikasi 17 Oktober 2024	19	6.467.000
13	Penjualan Gratifikasi 17 Oktober 2024	36	14.161.667
14	Penjualan Gratifikasi 23 Oktober 2024	34	6.875.000
15	Penjualan Gratifikasi 23 Oktober 2024	24	13.374.000
16	Penjualan Gratifikasi 29 November 2024	75	30.457.228
	Jumlah	656	332.920.893

Terdapat penjelasan tambahan terkait dengan penjualan barang gratifikasi di Risalah Lelang Nomor RL-228/09.01/2024-01 sebanyak 31 barang di mana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 63 barang, RL-605/08.01/2024-01 sebanyak 23 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 26 barang, RL-138/13.02/2024-01 sebanyak 4 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 5 barang, RL-1154/45/2024 sebanyak 54 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 5 barang, RL-399/27/2024 sebanyak 41 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 46 barang, dan R-440/27/2024 sebanyak 48 barang dengan 1 barang wanprestasi dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 89 barang, RL-628/07.03/2024-01 sebanyak 52 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 110 barang, RL-725/07.03/2024-01 sebanyak 34 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 63 barang, RL-752/14.01/2024-01 sebanyak 3 barang, RL-851/06.02/2024-01 sebanyak 18 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot laku yang terdiri dari 35 barang, dan RL-85/06.02/2024-01 sebanyak 15 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot yang terdiri dari 23 barang, RL-1140/08.02/2024-01 terdiri dari 14 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot yang terdiri dari 19 barang, RL-1141/08.02/2024-01 sebanyak 18 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot yang terdiri dari 36 barang, RL-2777/08.03/2024-01 sebanyak 17 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot yang terdiri dari 34 barang, RL-2778/08.03/2024-01 sebanyak 18 barang dimana angka tersebut merupakan jumlah lot yang terdiri dari 24 barang, dan RL-1065/07.03/2024-01 terdiri dari 31 barang di mana angka tersebut merupakan jumlah lot yang terdiri dari 75 barang dengan nilai PNBP keseluruhan per 31 Desember 2024 sebesar Rp161.185.250 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Risalah Lelang	PNBP (Rp)
1	RL-228/09.01/2024-01	13.604.500
2	RL-605/08.01/2024-01	20.892.500
3	RL-138/13.02/2024-01	2.044.000
4	RL-1154/45/2024	640.000
5	RL-399/27/2024	20.067.000
6	RL-440/27/2024	12.766.000
7	RL-628/07.03/2024-01	34.565.000

No	Nomor Risalah Lelang	PNBP (Rp)
8	RL-725/07.03/2024-01	13.732.500
9	RL-752/14.01/2024-01	2.325.000
10	RL-851/06.02/2024-01	6.386.500
11	RL-852/06.02/2024-01	4.788.000
12	RL-1140/08.02/2024-01	2.568.000
13	RL-1141/08.02/2024-01	5.841.000
14	RL-2778/08.03/2024-01	4.436.500
15	RL-2777/08.03/2024-01	3.700.000
16	RL-1065/07.03/2024-01	12.828.750
Jumlah		161.185.250

Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan 3 kali PSP sebanyak 49 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

No	Keputusan Menteri Keuangan	BAST dan Tanggal BAST	Satker Penerima	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	KMK 19/KM.6/KN.4/2024	BA-8/KN.4/2024 tanggal 29 Mei 2024	Kementerian Keuangan c.q. Kanwil DJKN Jawa Barat	21	25.284.000
2	KMK 18/KM.6/KN.4/2024	BA-10/KN.4/2024 tanggal 5 Agustus 2024	Kementerian Keuangan c.q. KPKNL Medan	1	450.000
3	KMK 49/KM.6/KN.4/2024	BA-17/KN.4/2024 tanggal 20 Desember 2024	Kementerian Keuangan c.q. KPKNL Serang	27	32.740.000
Total				49	58.474.000

Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan satu kali Hibah sebanyak 373 unit/buah/set/lembar barang gratifikasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Keputusan Menteri Keuangan	BAST dan Tanggal BAST	Penerima	Jumlah Barang	Nilai (Rp)
1	KMK-33/KM.6/KN.4/2024 direvisi menjadi KMK-38/KM.6/KN.4/2024	BA-13/KN.4.2024 tanggal 16 Agustus 2024 direvisi dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-148/MK.6/KN.4/2024 tanggal 28 Agustus 2024	Panti Asuhan Rumah Piatu Muslimin	373	57.160.334
Total				373	57.160.334

Selama tahun 2024, telah dilakukan 1 kali pemusnahan barang gratifikasi sejumlah 238 barang dengan nilai perolehan sebesar Rp74.950.175 melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/MK.6/KN.4/2024 tanggal 5 November 2024 yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemusnahan Nomor 01/KN.43/2024 tanggal 6 November 2024.

Dengan demikian, saldo akhir barang gratifikasi yang dicatat sebagai aset lain-lain adalah sebesar Rp115.391.969.721. Nilai tersebut merupakan barang gratifikasi dalam pengelolaan DJKN sampai dengan 31 Desember 2024 dengan jumlah barang sebanyak 3.546 unit/buah/set/lembar.

2. ASET RAMPASAN PT TUBAN LPG INDONESIA (PT TLI)

Dalam surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor PRIN-257/M.1.10/Ft.1/01/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Sdr. Honggo Wendratno diduga telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Berdasarkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Juni 2020 atas nama HONGGO WENDRATNO, pengadilan telah menetapkan bahwa barang bukti berupa tanah dan bangunan di atasnya berupa pabrik/kilang LPG PT TLI yang berada di kawasan pabrik PT TPPI yang terletak di Jl. Tanjung Dusun Tanjung Awar-Awar, Desa Remen Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 11 dan 12 dengan alamat Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur atas nama PT. Tuban LPG Indonesia, dirampas untuk Negara cq. Menteri Keuangan RI.

Guna menjalankan putusan dimaksud, Kejaksaan RI diwakili Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menyerahkan barang bukti dimaksud kepada Menteri Keuangan diwakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara, sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) tanggal 07 Juli 2020, bertempat di Gedung Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI Jakarta. Dengan penyerahan sesuai BAST tanggal 07 Juli 2020 dimaksud, Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari rampasan dimaksud dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang.

BAST aset tidak mencantumkan nilai perolehan aset beserta akumulasi penyusutan maupun nilai wajar aset. Selayaknya aset tetap, memperhatikan PSAP 07 Paragraf 20, apabila penilaian aset dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset agar didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Berkenaan dengan hal tersebut telah dilakukan penilaian oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar Aset (Rp)
1.	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.277.846.000
2.	Tanah	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	2.309.215.000
3.	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0023/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021	243.523.731.000

Kemudian, dalam rangka pengamanan serta menjunjung prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan BMN, Kilang LPG tersebut dititipkan kepada PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sejak tanggal 7 Juli 2020 melalui surat penitipan aset Pengelola Barang Nomor S-429/KN/2020 tanggal 7 Juli 2020 dan Berita Acara Penitipan BMN eks Rampasan tanggal 7 Juli 2020 untuk dioperasikan dengan ketentuan hasil pengelolaan Kilang LPG disetorkan ke kas negara setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan.

Atas kegiatan penitipan Kilang LPG tersebut, PT TPPI telah melakukan perhitungan hasil pengelolaan Kilang LPG (setelah dikurangi segala biaya yang timbul akibat proses penitipan) dan telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara. Sepanjang Triwulan III Tahun 2024, PNBPN hasil pengelolaan kilang LPG yang telah disetorkan sebesar:

No.	Periode	Jumlah	Ket.
1.	01 Oktober s.d. 31 Desember 2023	2.956.588.425	Disetorkan pada 23 Feb 2024
2.	01 Januari s.d. 31 Maret 2024	4.121.245.071	Disetorkan pada 29 Mei 2024

No.	Periode	Jumlah	Ket.
3.	01 April s.d. 30 Juni 2024	30.219.036.702	Disetorkan pada 25 Juli 2024
4.	01 Juli s.d. 30 September 2024	30.298.186.189	Disetorkan pada 27 Desember 2024

Kegiatan penitipan bersifat sementara sampai Pengelola Barang memutuskan bentuk pengelolaan lebih lanjut atas aset dimaksud. Dalam hal ini, Dit. PKNSI selaku Pengelola Barang telah melakukan pengkajian optimalisasi aset Kilang LPG dalam jangka pendek dengan opsi bentuk pemanfaatan sewa serta optimalisasi dalam jangka panjang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP).

Berkenaan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan penilaian nilai wajar atas sewa aset tersebut oleh KPKNL Surabaya sebagaimana telah disampaikan pada Laporan Penilaian Nomor LAP-0024/1/1/WKN.10/KNL.01/01.00/2021 tanggal 21 Januari 2021 diperoleh nilai wajar atas sewa sebagai berikut:

No.	Periodesitas Sewa	Nilai Sewa (Rp)
1.	1 Tahun	20.650.659.000
2.	3 Tahun	73.184.696.000

Namun, memperhatikan trend hasil pengelolaan Kilang LPG melalui kegiatan penitipan yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai sewa aset tersebut, dilakukan revaluasi kembali atas bentuk pemanfaatan Kilang LPG yang mempertimbangkan nilai keekonomian kilang LPG sehingga lebih menguntungkan bagi Pengelola Barang dengan bentuk pemanfaatan berupa Kerja Sama Pemanfaatan untuk Mengoperasikan Kilang LPG.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pengelola Barang telah memintakan permohonan penilaian kelayakan bisnis KSP Operasional kepada KPKNL Surabaya melalui Nota Dinas Nomor ND-1619/KN.5/2021 tanggal 16 Juli 2021 hal Permohonan Penilaian KSP Untuk Mengoperasikan Barang Milik Negara berupa Kilang LPG Eks PT TLI dan saat ini sedang dilakukan proses penilaian oleh Tim Penilai KPKNL Surabaya.

Kemudian terhadap rencana KSPO tersebut, telah dilaksanakan penilaian atas Kilang LPG sebagaimana tertuang dalam Laporan Penilaian Nomor LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022 dan Laporan Analisis Kelayakan Bisnis Nomor Lap-001/WKN.10/KNL.01/AKB/KSP/2022 tanggal 15 Februari 2022. Atas penilaian tersebut diperoleh nilai wajar BMN berupa Kilang LPG sebesar Rp164.937.148.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Objek Penilaian	Nomor dan Tanggal Laporan Penilaian	Nilai Wajar (Rp) Aset
1	Tanah	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	2.279.710.000
2	Tanah	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	2.311.105.000
3	Bangunan pabrik/kilang LPG	LAP-0027/1/PRO-01/WKN.10/KNL.01/01.02.02/2022 tanggal 15 Februari 2022	160.346.333.000

Namun, tidak perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai aset TLI untuk tahun 2022 karena tujuan penilaian kembali atas aset TLI tersebut adalah untuk memperoleh nilai wajar dalam rangka pemanfaatan aset dan bukan sebagai nilai perolehan baru. Sehingga, nilai aset TLI yang tercatat pada neraca tetap sebesar Rp248.110.792.000.

Aset TPPI dan TLI termasuk sebagai BMN yang men-supply LPG nasional yang menyangkut hajat orang banyak dan atas aset TPPI beberapa kali kilangnya mendapat arahan/atensi langsung presiden. TLI memproses offgas buangan Kilang TPPI yang membantu mewujudkan program pemerintah Zero Flaring. Telah diperoleh hasil audit BPKP terhadap kewajaran pengenaan biaya pengelolaan kilang LPG dan

tolling fee antara pihak DJKN selaku pemilik kilang, PT TPPI selaku operator, serta PT KPI selaku supplier. Tim Audit BPKP telah menyelesaikan audit atas hasil Kewajaran Biaya Pengelolaan/Pengolahan Kilang LPG eks PT TLI dengan dilaksanakannya exit meeting pada Kamis, 10 Agustus 2023 yang dihadiri perwakilan PT TPPI. Selanjutnya, telah diperoleh hasil audit sebagai berikut:

- Diperlukan koreksi pengenaan beban oleh PT TPPI selaku operator penitipan pada beberapa pos baik biaya rutin dan non rutin dengan total sebesar Rp56.661.855.791;
- Koreksi pembebanan biaya yang cukup materiil terdapat pada pos Estimasi Turnaround minus Rp22.782.359.246 dan pencadangan PPN serta PPh 23 minus Rp32.447.914.772.

Atas dasar hasil audit tersebut, Direktorat PKN telah bersurat kepada PT TPPI melalui surat Nomor S-1169/KN.4/2023 tanggal 31 Agustus 2023 hal Tindak Lanjut Hasil Audit Kewajaran Biaya Pengelolaan Kilang LPG eks PT TLI dan telah ditindaklanjuti oleh PT TPPI dengan menyetorkan hak negara sebesar Rp56.661.855.791 pada tanggal 27 September 2023.

Melalui surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S-471/KN.4/2024 tanggal 4 Juli 2024, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara telah bersurat kepada PT TPPI untuk melakukan penyetoran atas hasil pengelolaan pabrik/kilang untuk periode April s.d.Juni 2024 ke Rekening Umum Kas Negara.

Melalui surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor S-990/KN.4/2024 tanggal 3 Desember 2024, Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara telah bersurat kepada PT TPPI untuk melakukan penyetoran atas hasil pengelolaan pabrik/kilang untuk periode Juli s.d. September 2024 ke Rekening Umum Kas Negara.

C.2.1.6.6.10. Aset Lain-Lain BA 999.03

Aset Lain-lain BA 999.03 per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp764.944.939.588 dan Rp822.118.554.755. Nilai tersebut merupakan aset lain-lain pada BLU LMAN dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Aset eks BPPN	43.730.869.333	50.142.844.000
2	Aset eks kelolaan PT PPA	135.440.964.393	169.178.500.393
3	Aset eks Pertamina	557.961.421.612	583.403.259.612
4	Aset lain-lain BUN	27.811.684.250	19.393.950.750
	TOTAL	764.944.939.588	822.118.554.755

Aset lain-lain pada Laporan Keuangan BA 999.03 terdiri dari :

1. Aset Eks BPPN

Posisi Aset Lain-lain eks BPPN pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp43.730.869.333 dan Rp50.142.844.000. Perubahan posisi Aset Lain-lain eks BPPN pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdiri dari:

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
Posisi 31-Des-2023	50.142.844.000	-	-	-
Perubahan Tambah:				
(+) Perolehan asset baru	2.977.303.333	653.193.000	-	-
(+) Penilaian wajar aset	789.069.000	648.500.000		
Total perubahan tambah	3.766.372.333	1.301.693.000	-	-
Perubahan Kurang:				
(-) Reklasifikasi	(11.480.040.000)	-	-	-

Keterangan	Tanah	Gedung dan Bangunan	Peralatan dan Mesin	KDP
(-) Reklasifikasi Sebagian	-	-	-	-
Total perubahan kurang	(11.480.040.000)	-	-	-
Posisi 31-Des-2024	42.429.176.333	1.301.693.000	-	-
Posisi 31-Des-2024				43.730.869.333

Pengurangan aset lain-lain eks BPPN pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp11.480.040.000 disebabkan adanya reklasifikasi Aset Serang Kramatwatu dari Aset Lain-Lain ke Properti Investasi.

Atas Aset Lain-lain eks BPPN dengan klasifikasi gedung dan bangunan dilakukan penyusutan apabila telah memiliki nilai wajar, sedangkan yang belum dilakukan penilaian wajar tidak dilakukan penyusutan. Aset lain-lain eks BPPN yang telah dilakukan penilaian wajar pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 yaitu Aset Cibening Permai 24-25 dengan nilai wajar sebesar Rp653.193.000 sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bekasi Nomor LAP-0268/1/PRO-01/KNL.0802/01.01.00/2024 tanggal 25 November 2024 dan akumulasi penyusutan sebesar Rp26.127.720.

2. Aset Eks Kelolaan PT PPA

Nilai aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA menyajikan Aset eks PPA yang tidak direklasifikasi ke properti investasi. Posisi Aset eks PPA pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp135.440.964.393 dan Rp169.178.500.393.

Secara terperinci mutasi Aset eks PPA sebelum akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi
	31-Des-2023			31-Des-2024
Tanah	151.490.156.250	-	(25.441.745.000)	126.048.411.250
Gedung dan Bangunan	17.688.344.143	-	(8.295.791.000)	9.392.553.143
	169.178.500.393	-	(33.737.536.000)	135.440.964.393

Pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 terdapat penarikan 8 (delapan) unit Aset eks Kelolaan PT PPA yang berlokasi di Apartemen Taman Rasuna Kuningan Jakarta Selatan. Penarikan tersebut dituangkan dalam Kepdirjen Nomor 187/KN/2023 dan Berita Acara Serah Terima nomor BAST-1/LMAN/2024. Nilai aset yang ditarik adalah Rp9.142.461.000 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp548.547.660. Selain itu terdapat reklasifikasi ke pos Properti Investasi sebesar Rp25.441.745.000 atas Aset Grogol Permai dan Aset Blok M (Sultan Hasanudin) yang telah berhasil dikuasai secara fisik oleh LMAN.

3. Aset Eks Pertamina

Posisi Aset eks Pertamina pada pengelolaan LMAN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp557.961.421.612 dan Rp583.403.259.612.

Secara terperinci mutasi Aset eks Pertamina sebelum akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Kelompok	Posisi 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Kawasan	440.632.478.714	-	(25.441.838.000)	415.190.640.714
Non-Kawasan	142.770.780.898	-	-	142.770.780.898
	583.403.259.612	-	(25.441.838.000)	557.961.421.612

4. Aset Lain-lain BUN

Pos Aset Lain-lain BUN menyajikan:

a. Aset hasil pendanaan pengadaan tanah Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, dan PMK Nomor 139/PMK.06/2020 yang belum dihentikan pengakuannya melalui pengesahan belanja modal pada KL.

b. Aset eks Hak Tanggungan Bank Indonesia (HTBI) yang tidak memenuhi klasifikasi Properti Investasi.

Posisi Aset Lain-lain BUN (sebelum akumulasi) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp27.811.684.250 dan Rp19.393.950.750. Akumulasi penyusutan sebesar Rp182.975.504, sehingga nilai aset lain-lain BUN bersih Rp27.628.708.746 yang terdiri dari Aset Tanah PSN sebesar Rp0 dan Aset Lain-lain BUN eks HTBI (setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp27.628.708.746.

a. Aset Tanah Infrastruktur Proyek Strategis Nasional

Sesuai PMK Nomor 139/PMK.06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara, pencatatan aset hasil pengadaan tanah oleh LMAN dilakukan sebesar ganti kerugian kepada pihak yang berhak dalam skema pembayaran langsung dan sebesar penggantian dana kepada badan usaha untuk skema penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu. Selanjutnya, LMAN akan melakukan penghentian pengakuan atas aset hasil pengadaan tanah setelah adanya pengesahan belanja modal oleh kementerian/lembaga terkait.

Posisi Aset Lain-lain BUN tanah PSN pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Sampai dengan bulan Desember 2024 telah terbit 75 (tujuh puluh lima) SP2D pengesahan belanja modal K/L sebesar Rp14.994.205.687.037. Besaran nilai pendanaan pada 2024 yang akan disahkan dengan perincian per jenis proyek dan luasan tanah adalah sebagai berikut:

Periode s.d 31 Desember 2024	Jumlah PSN	Nominal	Luas Tanah
Kementerian Perhubungan:			
Jalur Kereta Api	4	75.755.189.690	26.341
Kementerian PUPR			
Jalan Tol	39	11.252.687.323.222	11.967.864
Bendungan	16	1.476.741.663.131	18.660.934
Irigasi	2	19.822.077.282	390.859
Air Baku	1	62.790.158.500	178.058
IKN	13	2.106.409.275.212	4.673.178
Jumlah	75	14.994.205.687.037	35.897.234
Telah Disahkan	75	14.994.205.687.037	35.897.234

b. Aset Eks Hak Tanggungan Bank Indonesia

Posisi Aset Lain-lain BUN eks HTBI per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.811.684.250 dan Rp27.811.684.250 dengan akumulasi penyusutan tahun 2024 sebesar Rp182.975.504 sehingga nilai bersih Aset Lain-lain BUN eks HTBI adalah sebesar Rp27.628.708.746. Mutasi Aset Lain-lain BUN eks HTBI pada periode yang berakhir di 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Klasifikasi	Posisi 31-Des-2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31-Des-2024
Tanah	18.935.950.750	6.812.710.500	-	25.748.661.250
Gedung dan Bangunan	458.000.000	1.605.023.000	-	2.063.023.000
	19.393.950.750	8.417.733.500	-	27.811.684.250

C.2.1.6.6.11. Aset Lain-lain BA 999.08

Aset Lain-lain pada BA 999.08 per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp69.874.268.741 dan Rp42.911.594.436. Saldo Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintah terdapat pada Satker OJK berupa Alat Angkutan Darat Bermotor yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.709.081.741 dan pada Satker SKK Migas berupa Aset Eks BPMIGAS yang diusulkan untuk penghapusan sebesar Rp165.187.000. Mutasi Aset Lain-lain tersebut per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	42.911.594.436
Penambahan :	27.990.174.216
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	27.990.174.216
Pengurangan	1.027.499.911
Penghapusan	1.027.499.911
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	-
Saldo per 31 Desember 2024	69.874.268.741
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(69.761.442.285)
Nilai buku per 31 Desember 2024	112.826.456

D.2.1.6.7. ASET LAINNYA DARI EKUITAS PADA UBL

Jumlah Aset Lainnya dari ekuitas UBL per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp31.292.147.271.351** dan **Rp29.854.766.285.853** mengalami kenaikan sebesar Rp1.437.380.985.498 atau (4,81%) merupakan Aset Lainnya dari Unit Badan Lainnya yang berada di 8 (delapan) Unit Badan Lainnya Bukan Satker.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya pada neraca Laporan Keuangan Badan Lainnya merupakan nilai ekuitas bersih dari UBL bukan satuan kerja.

Rincian aset lainnya UBL berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

NO	UBL	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Otorita Asahan	5.396.635.686	5.396.635.686
2	Taman Mini Indonesia Indah	-	4.334.012.243
3	Yayasan Gedung Veteran	6.574.375.517	4.269.425.631
4	Baznas	412.670.873.066	372.961.149.121
5	Badan Wakaf Indonesia	32.798.408.382	26.562.574.185
6	SKK MIGAS	-	-
7	Badan Pengelola Keuangan Haji	22.246.225.752.806	20.956.233.856.603
8	Otoritas Jasa Keuangan	8.588.481.225.894	8.485.008.632.384
	JUMLAH	31.292.147.271.351	29.854.766.285.853

Penjelasan Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Aset Lainnya yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.396.635.686 dan Rp5.396.635.686. Aset Lainnya sebesar Rp5.396.635.686 merupakan total ekuitas bersih Otorita Asahan berdasarkan laporan keuangan penutup Otorita Asahan hasil audit BPKP per tanggal 15 Mei 2019 dikurangi nilai Aset yang telah dilikuidasi periode 2022 Audited. Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-604/AG/2014 tanggal 10 April 2014 hal penyampaian SP-SABA.999.08 untuk keperluan penyediaan anggaran untuk gaji, operasional dan kegiatan Otorita Asahan TA 2014 dan Surat penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran NOMOR DIPA: 019.01.1.247101/2015 Tanggal 14 November 2015, dialokasikan Pagu Program Rp8.300.000.000 Unit Organisasi 019.01 Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2024 masih dalam proses penyelesaian berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan, bahwa tim likuidasi dimaksud bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

2. Aset Lainnya dari Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (YHK/BPP TMII) yang disajikan pada Laporan Keuangan Badan Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp4.334.012.243. Aset Lainnya Sebesar Rp0 merupakan nilai ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan YHK/BPP TMII Tahun 2020 Audited serta hasil Inventarisasi Aset Tahap I Kemensetneg pada TMII dikurangi dengan eliminasi dalam rangka penyelesaian proses likuidasi.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, YHK/BPP TMII berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Yayasan Harapan Kita TMII telah dibubarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, sesuai pasal 1 ayat 1 penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan pasal 2 dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir.

Pada periode penyusunan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024, proses likuidasi YHK/BPP TMII telah selesai dilakukan melalui penetapan KMK 99/KM.6/2021 dan KMK 27/KM.6/KNL.0702/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Sekretariat Negara.

3. Aset Lainnya yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.574.375.517 dan Rp4.269.425.631. Aset Lainnya sebesar Rp6.574.375.517 adalah total ekuitas bersih Yayasan Gedung Veteran berdasarkan Laporan Keuangan Yayasan Gedung Veteran Tahun 2024. Laporan keuangan Yayasan Gedung Veteran disusun berdasarkan SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
4. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp412.670.873.066 dan Rp372.961.149.121. Aset Lainnya yang berasal dari Baznas sebesar Rp412.670.873.066 merupakan total Ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2024. Laporan Keuangan BAZNAS disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sejak tanggal 1 Januari 2012.
5. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp32.798.408.382 dan Rp26.562.574.185. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia sebesar Rp32.798.408.382 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan BWI Tahun 2024. Aset Lainnya dari Badan Wakaf Indonesia merupakan jumlah keseluruhan dana yang bersumber dari APBN dan Dana Wakaf. Dalam penyusunan laporan keuangan, Badan Wakaf Indonesia berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 mengenai Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba dimodifikasi dengan akuntansi pemerintahan karena Badan Wakaf Indonesia menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Aset Lainnya yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp0.
7. Aset Lainnya sebesar Rp0 merupakan total ekuitas bersih berdasarkan Laporan Keuangan SKK MIGAS Tahun 2024 sebesar minus Rp1.568.317.378.795 ditambah penyesuaian atas pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.652.256.265.477 dikurangi ekuitas bersih pada Laporan Keuangan satuan kerja SKK MIGAS (BA 999.08) sebesar Rp111.726.535.867 dan dilakukan penyesuaian atas penyajian Ekuitas Negatif sebesar minus Rp27.787.649.185.

Rincian perhitungan ekuitas bersih SKK Migas sebagai berikut :

KETERANGAN	Nilai
Ekuitas Bersih SKK Migas Bukan Satker	(1.568.317.378.795)
Penyesuaian Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	1.652.256.265.477
Dikurangi Ekuitas Bersih Satker SKK Migas BA 999.08	(111.726.535.867)
Penyesuaian Penyajian Ekuitas Negatif	27.787.649.185
Aset Lainnya yang berasal dari SKK Migas	-

Selanjutnya terhadap penyesuaian pos Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 November 2012 yang membubarkan kelembagaan BPMIGAS, pemerintah telah menerbitkan beberapa payung hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur bahwa pelaksanaan tugas dan

fungsi kegiatan usaha hulu migas dialihkan ke menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, sampai dengan diterbitkannya peraturan yang baru.

- 2) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi, dan Organisasi, dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain menetapkan bahwa:
 - a) pelaksanaan tugas, fungsi dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKSP Migas);
 - b) Seluruh personalia Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dialihkan kepada SKSP Migas.
 - 3) Keputusan Menteri ESDM Nomor 3136 K/73/MEM/2012, yang antara lain menetapkan bahwa:
 - a) Para pekerja yang semula jabatannya sebagai Wakil Kepala dan Deputi pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas dialihkan pada jabatan yang sama pada SKSP Migas;
 - b) Seluruh pejabat dan pekerja lainnya dialihkan sebagai pejabat dan pekerja pada SKSP Migas dengan jabatan yang sama.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain mengatur bahwa pegawai SKK Migas untuk pertama kali berasal dari pengalihan pegawai eks Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa :
- a) Tidak terjadi pemutusan hubungan kerja antara eks BPMIGAS dengan para pekerjanya.
 - b) Tidak ada kewajiban finansial yang harus ditanggung oleh Pemerintah terkait pengalihan para pekerja eks BPMIGAS baik ke SKSP Migas maupun ke SKK Migas.
8. Aset Lainnya yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp22.246.225.752.806 dan Rp20.956.233.856.603. Aset Lainnya sebesar Rp22.246.225.752.806 merupakan Aset Bersih Laporan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji Tahun 2024. Laporan Keuangan BPKH yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan syariah, PSAK umum lainnya untuk transaksi yang belum diatur pada PSAK Syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ISAK 35 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.
 9. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan sebagai UBL Satker dan UBL Bukan Satker. Hal ini dilakukan mengingat OJK sebagai sebuah lembaga yang independen, namun di sisi lain juga merupakan UBL Satker dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.08 (BA BUN Belanja Lain-Lain).

Aset bersih OJK selaku satker BA 999.08 per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.945.729 dan Rp117.479.832.

Selanjutnya, sebagai UBL Bukan Satker OJK mulai tahun 2014 mulai melakukan pungutan. Pungutan ini dilakukan sehubungan dengan fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sektor jasa keuangan serta edukasi dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam PP di atas, mengatur antara lain bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya pada tahun anggaran berikutnya. Dalam hal pungutan pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke kas negara. Berdasarkan Laporan Keuangan Otoritas Jasa, selaku lembaga independen nilai aset OJK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.588.496.171.623 dan Rp8.485.126.112.216. Saldo Aset Lainnya dari OJK sebagai bukan satker Tahun 2023 Audited berdasarkan Laporan Keuangan OJK yang telah diaudit adalah sebesar Rp8.485.126.112.216.

Berdasarkan dua Laporan Keuangan OJK yaitu selaku satuan kerja BA BUN 999.08 dan OJK selaku lembaga independen, maka untuk konsolidasi Laporan Keuangan, nilai aset bersih OJK adalah sebesar Rp8.588.481.225.894, yaitu nilai ekuitas bersih OJK selaku lembaga dikurangi dengan nilai ekuitas OJK selaku satker BA BUN 999.08. Hal ini dilakukan karena selaku satker BA BUN 999.08, laporan keuangan telah dikonsolidasi pada LK BA BUN 999.08.

Laporan Keuangan OJK disusun berdasarkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

D.2.1.6.8. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI PADA ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp346.296.838.636.420 dan Rp313.057.084.376.498 dengan perhitungan sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Aset Lainnya (BA 999.03)	402.077.317.174	425.242.810.889
2.	Aset Lainnya (BA 999.08)	171.658.244.411	139.690.103.410
3.	Aset Lainnya (BA 999.99)	345.723.103.074.835	312.492.151.462.199
	Jumlah	346.296.838.636.420	313.057.084.376.498

C.2.1.6.8.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya BA 999.03

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	BA 999.03 – Eks Kelolaan PT PPA	1.182.858.342	1.247.388.940
2.	BA 999.03 – Aset Eks Pertamina	400.685.355.608	423.880.011.094
3.	BA 999.03 – Aset Lain-lain BUN (Eks HTBI)	182.975.504	115.410.855
4.	BA 999.03 – Aset Lain-lain BUN (Eks BPPN)	26.127.720	-
	Jumlah	402.077.317.174	425.242.810.889

1. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS KELOLAAN PT PPA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Kelolaan PT PPA yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.182.858.342 dan Rp1.247.388.940.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	1.247.388.940	484.017.062	(548.547.660)	1.182.858.342
	1.247.388.940	484.017.062	(548.547.660)	1.182.858.342

2. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET EKS PERTAMINA

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain eks Pertamina yang berada pada pengelolaan LMAN per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp400.685.355.608 dan Rp423.880.011.094.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Kawasan	423.520.874.522	-	(23.224.583.537)	400.296.290.985
Non-Kawasan	359.136.572	29.928.051	-	389.064.623
	423.880.011.094	920.777.023	(23.224.583.537)	400.685.355.608

3. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET LAIN-LAIN BUN (EKS HTBI)

Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain BUN (eks HTBI) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp182.975.504 dan Rp115.410.855

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	115.410.855	67.564.649	-	182.975.504
	115.410.855	67.564.649	-	182.975.504

4. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.03 ASET LAIN-LAIN BUN (EKS BPPN)

Nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain BUN (eks BPPN) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.127.720 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan	Posisi 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Posisi 31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	-	26.127.720	-	26.127.720
	-	26.127.720	-	26.127.720

C.2.1.6.8.2 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.08

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp171.658.244.411 dan Rp139.690.103.410. Akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya terdiri dari:

BA Pelaksana	Uraian BA Pelaksana	31 Desember 2024	31 Desember 2023
999.08	Otoritas Jasa Keuangan		
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	69.709.081.741	42.911.594.436
999.08	SKK Migas		
	Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	100.316.693.576	95.426.490.124
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	1.580.108.550	1.352.018.850
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	52.360.544	-
Total		171.658.244.411	139.690.103.410

C.2.1.6.8.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA BA 999.99

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp345.723.103.074.835 dan Rp312.492.151.462.199, mengalami kenaikan sebesar Rp33.230.951.612.636 atau (10,63%) yang terdiri dari akumulasi penyusutan aset lain-lain Aset Eks Pertamina, akumulasi penyusutan aset lain-lain aset BMN *Idle*, akumulasi penyusutan aset KKKS dan akumulasi penyusutan aset PKP2B.

Kelompok	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Akumulasi penyusutan aset BMN Idle	6.113.239.732	7.275.644.182
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada PPBMN	3.604.238.511	41.889.055
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada SKK Migas	336.347.544.867.366	304.346.680.186.626
Akumulasi penyusutan aset Hulu Migas pada BPMA	7.663.075.772.814	6.530.194.618.480
Akumulasi penyusutan aset PKP2B	1.673.035.046.864	1.589.463.650.617
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	24.660.630.984	18.495.473.239
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya pada PPP BUN	5.069.278.564	-
TOTAL	345.723.103.074.835	312.492.151.462.199

1. Akumulasi Penyusutan Aset BMN Idle

Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat maka diimplementasikan penyusutan BMN termasuk untuk BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang.

No.	Akun Neraca	Nilai (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	14.113.278.239	6.113.239.732	8.000.038.507
	Total	14.113.278.239	6.113.239.732	8.000.038.507

Akumulasi penyusutan pada akhir periode Tahun 2024:

Akumulasi penyusutan periode Tahun 2023 (Audited)	7.275.644.182
Penyusutan Reguler	487.669.619
Penyusutan Transaksional mutasi tambah BMN idle	153.933.912
Penyusutan Transaksional mutasi kurang BMN eks idle	(1.804.007.981)
Akumulasi penyusutan periode Tahun 2024	6.113.239.732

2. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada PPBMN

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.604.238.511 dan Rp41.889.055. Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM dan HBI. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2024	41.889.055
Mutasi Tambah	3.604.238.511
Mutasi Kurang	41.889.055
Saldo Akhir 31 Desember 2024	3.604.238.511

a. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

Saldo Awal 1 Januari 2024	12.805.500
Mutasi Tambah	3.388.629.974
Transfer masuk dari SKK Migas	3.388.629.974
Mutasi Kurang	12.805.500
Pemindahtanganan/Penjualan	12.805.500
Saldo Akhir 31 Desember 2024	3.388.629.974

Penjelasan atas penyusutan aset HBM yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal sebesar Rp12.805.500 merupakan penyusutan Aset HBM yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2023 (audited);
- 2) Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset HBM sebesar Rp3.388.629.974 merupakan penambahan akumulasi penyusutan yang berasal dari transfer masuk BMN Eks KKKS Eni Bukat Limited senilai Rp1.888.014.056 dan KKKS Repsol Andaman B.V. senilai Rp1.500.615.918 dari SKK Migas;
- 3) Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset HBM sebesar Rp12.805.500 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang berasal dari transaksi penjualan BMN Eks KKKS Husky Anugerah Ltd.
- 4) Saldo akhir akumulasi penyusutan HBM per 31 Desember 2024 Rp3.388.629.974.

b. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Saldo Awal 1 Januari 2024	29.083.555
Mutasi Tambah	215.608.537
Transfer masuk dari SKK Migas	215.608.537
Mutasi Kurang	29.083.555
Pemindahtanganan/Penjualan	29.083.555
Saldo Akhir 31 Desember 2024	215.608.537

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- 1) Saldo awal sebesar Rp29.083.555 merupakan penyusutan Aset HBI yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2023 (audited);
- 2) Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp215.608.537 merupakan penambahan akumulasi penyusutan yang berasal dari transfer masuk BMN Eks PT. Pertamina Hulu Energi Metan Tanjung II dari SKK Migas;
- 3) Mutasi kurang akumulasi penyusutan aset HBM sebesar Rp12.805.500 merupakan pengurangan akumulasi penyusutan yang berasal dari transaksi penjualan BMN Eks KKKS PT Pertamina Hulu Energi Metana Suban I senilai Rp22.869.948 dan BMN Eks KKKS Husky Anugerah Limited senilai Rp6.213.606.
- 4) Saldo akhir akumulasi penyusutan aset HBI sebesar Rp215.608.537.

3. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada SKK Migas

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp330.795.689.428.800 dan Rp304.346.680.186.626. Akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca terdiri dari akumulasi penyusutan aset non tanah berupa HBM dan HBI. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

Akumulasi penyusutan aset non tanah terdiri dari:

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

Saldo Awal 1 Januari 2024	304.233.978.653.719
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	27.349.272.946.183
Penyusutan Tahun Berjalan	24.757.832.337.850
Koreksi Tambah	2.591.440.608.333
Mutasi Kurang Akumulasi Penyusutan:	787.562.171.102
Koreksi Kurang	787.562.171.102
Saldo Akhir 31 Desember 2024	330.795.689.428.800

- a. Saldo awal sebesar Rp304.233.978.653.719 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 audited.
- b. Penambahan penyusutan HBM sebesar Rp27.349.272.946.183 berasal dari:
 - 1) Beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp24.757.832.337.850;
 - 2) Koreksi tambah penyusutan sebesar Rp2.591.440.608.333, disebabkan karena adanya koreksi tambah nilai perolehan HBM, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, serta adanya aset perolehan tahun sebelum tahun 2024 yang baru dicatatkan ditahun 2024.
- c. Pengurangan penyusutan HBM sebesar Rp787.562.171.102 berasal dari koreksi kurang penyusutan yang disebabkan koreksi kurang nilai perolehan HBM, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, penghapusan aset, dan aset yang dalam proses penghapusan;
- d. Saldo Akhir sebesar Rp330.795.689.428.800.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Penjelasan atas penyusutan aset HBI yang disajikan dalam Neraca 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2024	112.701.532.908
Mutasi Tambah:	6.342.717.391
Penyusutan Tahun Berjalan	6.066.815.767
Koreksi Tambah	275.901.624
Mutasi Kurang:	2.057.623.725
Koreksi Kurang	2.057.623.725
Saldo Akhir 31 Desember 2024	116.986.626.574

- Saldo awal sebesar Rp112.701.532.908 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 audited.
- Penambahan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp6.342.717.391 terdiri dari:
 - Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp6.066.815.767.
 - Koreksi tambah penyusutan sebesar Rp275.901.624 disebabkan karena adanya koreksi tambah nilai perolehan HBI, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, serta adanya aset perolehan tahun sebelum tahun 2024 yang baru dicatatkan ditahun 2024.
- Pengurangan Akumulasi Penyusutan HBI sebesar Rp2.057.623.725 berasal dari koreksi kurang penyusutan yang disebabkan koreksi kurang nilai perolehan HBM, perubahan kategori, perubahan tanggal PIS, penghapusan aset, dan aset yang dalam proses penghapusan.
- Saldo akhir sebesar Rp116.986.626.574.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Hulu Migas/KKKS Pada BPMA

Akumulasi penyusutan aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.663.075.772.814 dan Rp6.530.194.618.480.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBM

Saldo Awal 1 Januari 2024	6.529.134.376.414
Mutasi Tambah Akumulasi Penyusutan:	1.132.557.274.218
Koreksi Saldo Awal Tambah	-
Penyusutan Tahun Berjalan	356.596.744.628
Koreksi Tambah	775.960.529.590
Mutasi Kurang :	-
Koreksi kurang	-
Koreksi saldo awal Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2024	7.661.691.650.632

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp6.529.134.376.414 merupakan saldo awal per tanggal 31 Desember 2023 Audited;
- Mutasi tambah sebesar Rp1.132.557.274.218 merupakan penyusutan tahun berjalan;
 - Penyusutan tahun berjalan sebesar Rp356.596.744.628;
 - Koreksi penyusutan sebesar Rp775.960.529.590.
- Saldo akhir 31 Desember 2024 sebesar Rp7.661.691.650.632.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang berasal dari HBI

Saldo 1 Januari 2024	1.060.242.066
Mutasi Tambah:	323.880.116
Transfer Masuk Saldo Awal dari UAKPA-PB	-
Penyusutan Tahun Berjalan	172.784.563
Koreksi Tambah	151.095.553
Mutasi Kurang:	-
Koreksi Kurang	-
Saldo Akhir 31 Desember 2024	1.384.122.182

- Saldo awal yang disajikan sebesar Rp1.060.242.066 merupakan saldo awal 31 Desember 2023 Audited;
- Mutasi tambah sebesar Rp323.880.116 disebabkan dari penyusutan tahun berjalan sebesar Rp172.784.563 dan koreksi penyusutan sebesar Rp151.095.553;
- Saldo akhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.384.122.182.

5. Akumulasi Penyusutan Aset PKP2B

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.673.035.046.864 dan Rp1.589.463.650.617. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Saldo 1 Januari 2024	1.589.463.650.617
Mutasi Tambah:	83.571.396.247
Penyusutan	55.869.036.390
Koreksi Akumulasi Penyusutan	27.702.359.857
Saldo Akhir 31 Desember 2024	1.673.035.046.864

Penjelasan atas nilai akumulasi penyusutan aset non tanah yang disajikan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

- Saldo awal merupakan Akumulasi penyusutan aset non tanah yang telah dilaporkan dalam LKPP tahun 2023 sebesar Rp1.589.463.650.617 pada PT Berau Coal;
- Mutasi tambah Akumulasi penyusutan Aset Non Tanah sebesar Rp55.869.036.390 merupakan penyusutan selama tahun 2024 pada PT Berau Coal;
- Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan dikarenakan koreksi dari CALK ke Neraca atas BMN Non Tanah hasil IP pada PT Berau Coal yang nilai bukunya sudah habis sebesar Rp27.702.312.000 yang didasarkan pada Berita Acara Inventarisasi nomor 481.a.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 20 November 2024;
- Koreksi tambah Akumulasi Penyusutan dikarenakan kesalahan perhitungan penyusutan pada PT Berau Coal yaitu sebesar Rp47.857;
- Saldo Akhir 31 Desember 2024 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp1.673.035.046.864 yaitu berasal dari PT Berau Coal.

6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp24.660.630.984 dan Rp18.495.473.239. Akumulasi penyusutan aset tersebut sebesar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Akun Neraca	Akumulasi Penyusutan Awal	Beban Penyusutan Tahun 2024	Akumulasi Penyusutan Akhir
1.	Aset Eks PT TLI	18.495.473.239	6.165.157.745	24.660.630.984
	Jumlah	18.495.473.239	6.165.157.745	24.660.630.984

7. Akumulasi amortisasi aset lainnya pada PPP BUN

Saldo Akumulasi amortisasi aset lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp5.069.278.564 dan Rp0 merupakan amortisasi aset berupa lisensi pada satker Pengelolaan, Pengembangan, Pengawasan BUN.

D.2.2. KEWAJIBAN**D.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK****D.2.2.1.1. UTANG PERHITUNGAN FIAK KETIGA**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.320.940.427.530 dan Rp4.536.797.626.051 atau mengalami penurunan sebesar Rp-Rp215.857.198.521 (4,76%).

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga terdapat pada:

Utang PFK BA 999.99

Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp 4.320.907.912.454 dan Rp4.536.797.626.051 terdiri dari:

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Utang PFK DJPb	809.372.413.024	932.586.210.358
2.	Utang PFK DJKN	-	887.002.856
3.	Utang PFK DJPK	3.511.568.014.506	3.603.324.412.837
	Jumlah	4.320.940.427.530	4.536.797.626.051

1. UTANG PFK BA 999.99 DJPb

Utang Perhitungan Fihak Ketiga DJPB sebesar Rp809.372.413.024, rincian Utang PFK Pegawai sebagai berikut:

No	Badan Penyelenggara	Akun	Nilai (Rp)	
			31 Desember 2024	31 Desember
1	BPJS Kesehatan	211111, 211112, 211116, 211117, 211118, 211119, & 211121	764.116.700.443	810.479.628.369
2	Perum BULOG	211113	12.167.064	-
3	PT Taspen	211114	44.610.450.818	121.484.623.448
4	PT Asabri	211151	252.560.339	197.192.160
5	BP Tapera	211115, 211152, 211153, & 211154	380.534.360	424.766.381
	Jumlah		809.372.413.024	932.586.210.358

Saldo Utang PFK Pegawai di atas diperoleh dari saldo awal Utang PFK Pegawai Bulan Januari 2024 ditambah penerimaan dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2024 dikurangi pembayaran dana PFK Pegawai sampai dengan Bulan Desember 2024. Apabila Badan Penyelenggara menerima kelebihan penerimaan pada tahun anggaran berjalan (tahun lalu), maka saldo utang (awal utang) ikut diperhitungkan dengan saldo 118122 berjalan (tahun lalu). Pelunasan atas piutang Akun 118122 tahun lalu menggunakan akun 811921 di tahun berjalan juga turut diperhitungkan dalam komponen penerimaan penambah saldo Utang PFK 2024.

2. UTANG PFK BA 999.99 DJKN

Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp887.002.856.

Penjelasan atas mutasi Utang Perwalian/PFK Hasil Penjualan/ Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai (Rp)
Saldo awal	887.002.856
Mutasi tambah:	
• Penerimaan hasil penjualan / penyelesaian aset eks BDL	491.306.579
Mutasi kurang:	
• Pembayaran utang perwalian/PFK kepada OJK	764.851.794
• Reklasifikasi utang perwalian/PFK ke pos Utang Pihak Ketiga Lainnya	613.457.639
• Koreksi atas saldo utang perwalian/PFK	2
Saldo akhir	-

3. UTANG PFK BA 999.99 DJPK

Utang Perhitungan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.511.568.014.506 dan Rp3.603.324.412.837. Utang PFK tersebut merupakan Hak daerah atas penerimaan Pajak Rokok yang akan disetorkan pada periode penyetoran triwulan berikutnya Tahun Anggaran 2024. Penyetoran periode Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan berdasarkan data penerimaan yang disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nominal
a. Saldo awal tahun 2024 (Utang PFK tahun 2023)	3.603.324.412.837
b. Penerimaan s.d. Triwulan IV Tahun 2024	21.664.230.159.735
c. Penyetoran Tahun 2024	
Penyetoran Utang Saldo PFK Tahun 2023	(3.603.324.412.837)
Penyetoran Triwulan I	(5.187.351.017.976)
Penyetoran Triwulan II	(4.443.282.425.384)
Penyetoran Triwulan III	(5.113.456.751.149)
Penyetoran Triwulan IV	(3.408.571.950.720)
Total	(21.755.986.558.066)
d. Hak Daerah yang akan disetorkan pada periode berikutnya setelah Pemda memenuhi persyaratan	3.511.568.014.506

Rincian utang pajak rokok TA 2024 per pemda, sebagaimana tercantum pada [Lampiran LD31](#).

D.2.2.1.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp114.541.686.926.029** dan **Rp153.795.462.145.737** atau mengalami penurunan sebesar Rp39.253.775.219.708 (25,52%). Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

No.	Instansi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	(BA 999.00)	11.936.770.692.629	128.907.360.569	11.807.863.332.060	9159,96
2.	(BA 999.03)	253.152.246	674.852.747	(Rp421.700.501)	(62,49)
3.	(BA 999.05)	20.619.467.553.611	66.515.508.256.604	(45.896.040.702.993)	(69)
4.	(BA 999.08)	68.647.993.489.467	73.779.210.341.878	(5.131.216.852.411)	(6,95)
5.	(BA 999.99)	13.585.614.307.816	13.752.893.343.901	(167.279.036.085)	(1,22)
Jumlah		114.790.099.195.769	154.177.194.155.699	(39.387.094.959.930)	(25,55)
Eliminasi *)		(248.412.269.740)	(381.732.009.962)	381.732.009.962	100
Jumlah Bersih		114.541.686.926.029	153.795.462.145.737	(39.253.775.219.708)	(25,52)

Keterangan:

*)Pemindahbukuan PNPB panas bumi Transaksi Khusus DJA BA 999.99 dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada:**D.2.2.1.2.1. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.00**

Jumlah Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp11.936.770.692.629 dan Rp128.907.360.569 yang mengalami kenaikan sebesar Rp11.807.863.332.060 atau naik 9159,96 persen yang salah satunya disebabkan karena kenaikan pada utang angka pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan pada Direktorat PKN. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Unit Akuntansi Keuangan Kuasa BUN Pusat adalah Utang Kepada Pihak Ketiga berupa utang dari Retur SP2D, utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran UP pada satker Pengembalian SAL, Kelebihan Pelimpahan Bank/Pos Persepsi, dan utang dari adanya kesalahan perbankan, dan utang *invoice* yang berasal dari SPM yang belum SP2D. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari:

No.	Utang	Jumlah	Penjelasan
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191)	580.764.605.789	1. Utang retur SP2D di KPPN selaku Kuasa BUN sebesar 580.097.902.013. 2. Utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran uang persediaan yang belum diterbitkan SPM pengembalian pendapatannya pada satker pengembalian penerimaan negara atas beban SAL sebesar sebesar Rp666.703.776.
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga karena Keterbatasan Sistem Perbankan (212215)	11.356.000.000.000	Berasal dari Update Jurnal Penyesuaian Akun SLA <i>Liability Mapping</i> Atas Transaksi Pada Rekening Pengeluaran Lainnya Bank Umum SKN/RTGS In Transit Akhir Tahun Anggaran 2024 sesuai ND-220/PB.6/2025 tanggal 18 Maret 2025
3.	Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan (219944)	6.086.840	Anomali sistem BRI yang menyebabkan <i>double</i> pembukuan pada rekening retur RPKBUN P SPAN BRI atas SP2D nomor 240511401000018000001 yang belum terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai surat BRI nomor B.121.e-INS/FPC/02/2025 tanggal 6 Februari 2025
Total		11.936.770.692.629	

Rincian utang pihak ketiga pada BA 999.00 tersaji dalam [Lampiran LD32](#).

D.2.2.1.2.2. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.03

Nilai kewajiban jangka pendek pada 31 Desember 2024 *Unaudited* dan 31 Desember 2023 *Audited* sebesar Rp253.152.246 dan Rp674.852.747. Nilai tersebut merupakan kewajiban kepada penyedia jasa *upgrade/renovasi* aset yang mana hasil pekerjaan *upgrade/renovasi*nya telah diterima oleh LMAN namun belum dilakukan pembayaran.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga BA 999.03 terdiri dari:

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
Pengawasan <i>upgrade</i> Aset eks HTBI di Danadyaksa Cikini	2.453.000	2.453.000
Pengawasan <i>upgrade</i> Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap I	1.877.150	1.877.150
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap IV	-	7.569.400
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset eks BPPN di Graha Famili Surabaya	-	6.589.759

Keterangan	31 Des 2024	31 Des 2023
Pembangunan pagar di community area Kilang Arun	-	4.990.000
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset eks HTBI di Ruko Duta Harapan Indah	-	155.141.892
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset eks PPA di Ruko Klender	-	156.943.099
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset eks HTBI di Ruko Beteng Plaza Solo	-	118.083.373
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset eks PPA di Puri Casablanca tahap V	-	221.205.074
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset Kebayoran Lama 47	153.759.989	-
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset Latumenten	69.215.757	-
Konstruksi & pengawas <i>upgrade</i> Aset Mangga Besar XIII Sawah Besar	25.846.350	-
Total	253.152.246	674.852.747

D.2.2.1.2.3. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.05

Utang Kepada Pihak Ketiga dalam LKBUN 999.05 adalah utang/kewajiban yang terjadi akibat kebijakan penyaluran Dana Bagi Hasil secara nontunai dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran Transfer ke Daerah nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain Bank Indonesia TDF-TKD Pemda di Bank Indonesia.

Total Utang Kepada Pihak Ketiga pada LKBUN 999.05 Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.619.467.553.611 dan Rp66.515.508.256.604 atau mengalami penurunan sebesar Rp45.896.040.702.993 (69%). Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya pembayaran kewajiban pilkada serentak oleh Pemda melalui pemotongan saldo TDF Pemda dan *intercept* DAU/DBH. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga terdiri dari utang penyaluran pokok DBH yang disimpan pada rekening TDF TKD sebesar Rp20.558.040.446.440 dan utang penyaluran remunerasi DBH yang disimpan pada rekening TDF TKD sebesar Rp61.427.107.171.

Rincian utang pihak ketiga TDF pada BA 999.05 tersaji dalam [Lampiran LD33](#).

D.2.2.1.2.4. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA BA 999.08

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp68.647.993.489.467 dan Rp73.779.210.341.878. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian BA Pel	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Setneg	-	1
2	Kementerian Keuangan	68.601.134.793.366	61.611.677.143.451
3	MPP Kartu Prakerja	2.512.309.626	3.792.394.157
4	SKK Migas	43.344.681.625	30.010.238.382
5	BP Batam	1.001.704.850	-

No	Uraian BA Pel	31 Desember 2024	31 Desember 2023
6	Dit Distribusi dan Cadangan Pangan	-	12.133.730.565.887
Total		68.647.993.489.467	73.779.210.341.878

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga terdapat pada:

1. KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

Kementerian Sekretariat Negara per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp1.

2. KEMENTERIAN KEUANGAN

Kementerian Keuangan sebesar Rp68.601.134.793.366 yang terdiri:

No	Uraian Entitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	ICSID Sekretariat Jenderal	3.555.347.850	3.397.351.950
2	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat	1.782.088.140	10.643.346.890
3	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua	19.048.682.237	14.217.330.727
4	Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi	68.576.748.675.139	61.583.419.113.884
Jumlah		68.601.134.793.366	61.611.677.143.451

a. ICSID Sekretariat Jenderal

ICSID Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.555.347.850, Utang Kepada Pihak Ketiga tersebut berasal dari biaya pembayaran tahap III atas penyedia Jasa Hukum Rajah & Tann LLP sebesar USD200.000 sesuai Perjanjian Penyediaan Jasa Hukum nomor 1/PPK-ICSID/2014 tanggal 2 Desember 2014 ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai dan biaya transfer yang dihitung berdasarkan pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-940/MK.01/2017 tanggal 24 November 2017 hal Usulan Penggunaan Anggaran BA BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain (BA 999.08) dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1/MK.1/SJ.44/2024 tanggal 18 September 2024 hal Usulan Alokasi Anggaran Untuk Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga atas Penanganan Arbitrase di ICSID Tahun 2024. Angka tersebut mengalami perubahan nilai dibanding 31 Desember 2023 karena adanya selisih kurs yang digunakan sebagai rujukan pelaporan. Nilai kurs penutup BI yang digunakan per 31 Desember 2023 adalah Rp15.439/USD, sedangkan nilai kurs penutup BI yang digunakan per 31 Desember 2024 adalah Rp16.157/USD.

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian		Nilai
1	Pembayaran Tahap III atas Penyedia Jasa Hukum oleh Rajah dan Tann LPP	=USD200.000 x Rp16.157 (Nilai Kurs Penutup BI per 31 Desember 2024)	3.231.400.000
2	PPN (10% dari Biaya Pengacara)	=USD20.000 x Rp16.157	323.140.000
3	Biaya Transfer valuta asing	=USD50 x Rp16.157	807.850
Total Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga			3.555.347.850

b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat sebesar Rp1.782.088.140 berasal dari pengkinian progres penyelesaian pekerjaan Kegiatan OAB TA 2024 sesuai dengan BAPP Nomor BAPP-007/WPB/2024.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (83,26) persen apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.643.346.890.

Penurunan Saldo Kewajiban Jangka Pendek disebabkan oleh beberapa transaksi sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai	Keterangan
Saldo Awal	10.643.346.890	Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023
Penyelesaian Utang Kepada Pihak Ketiga	(8.469.178.890)	Realisasi Pembayaran transaksi RPATA Belanja Lainnya atas kegiatan penyaluran beras Tahun 2023, yaitu sebesar Rp8.469.178.890 dengan nomor SP2D 249991304001842
	(2.174.168.000)	Tagihan atas kegiatan penyaluran beras pada Tahun Anggaran 2012 sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015. Terhadap penyelesaian utang tersebut telah dilaksanakan rapat pada tanggal 21 Mei 2019 dengan dihadiri oleh para pengelola keuangan satker OAB, Direktur PD. Irian Bhakti, masing-masing Kepala Cabang PD. Irian Bhakti wilayah kerja Provinsi Papua Barat, dan Pejabat/Pegawai dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua.
pengkinian progres penyelesaian pekerjaan Kegiatan OAB TA 2024 sesuai dengan BAPP Nomor BAPP-007/WPB/2024	1.782.088.140	Atas pengkinian progres penyelesaian pekerjaan OAB TA 2024 belum dilakukan pembayaran hingga akhir tahun karena telah menggunakan mekanisme RPATA yang mana akan dilakukan pembayaran sekaligus pada akhir penyelesaian pekerjaan OAB TA 2024.
Saldo Akhir	1.782.088.140	

c. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua sebesar Rp19.048.682.237 yang merupakan tagihan termin V kontrak ongkos angkut beras kepada PT Irian Bhakti atas prestasi pekerjaan sampai 31 Desember 2024.

d. Satker Pengguna Anggaran Dana Kompensasi

Dit PNBPD SDA KND (Dana Kompensasi) per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.576.748.675.139. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2023 Audited adalah sebesar Rp61.583.419.113.884. Atas utang tersebut telah dilakukan pembayaran.

Sampai dengan 31 Desember 2024, utang kompensasi yang dapat diakui adalah sebesar Rp68.576.748.675.139, terdiri dari:

No	Deskripsi	Nilai	Keterangan
1.	Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Tahun 2024	28.603.640.937.149	berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kompensasi BBM Tahun 2024 pada PT Pertamina Patra Niaga tanggal 5 Mei 2025.

No	Deskripsi	Nilai	Keterangan
2.	Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBKP Peralite Tahun 2024	2.403.668.225.426	berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kompensasi BBM Tahun 2024 pada PT Pertamina Patra Niaga tanggal 5 Mei 2025.
3.	Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2024	118.541.858.793	berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kompensasi BBM Tahun 2024 pada PT AKR Corporindo Tbk tanggal 5 Mei 2025.
4.	Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik (TTL) Tahun 2024	37.450.897.653.771	berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kompensasi Listrik Tahun 2024 pada PT PLN (Persero) tanggal 5 Mei 2025
Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2024		68.576.748.675.139	

Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp68.576.748.675.139 sebagaimana tabel berikut:

Uraian			Utang Unaudited		Jumlah	Koreksi Berdasarkan BA Pemeriksaan BPK AKN 7	Utang Audited
			TW III	TW IV			
BBM			16.161.712.873.929	15.035.365.466.813	31.197.078.340.742	(71.227.319.374)	31.125.851.021.368
	PPN		16.161.712.873.929	14.916.810.464.985	31.078.523.338.914	(71.214.176.339)	31.007.309.162.575
		Solar	16.161.712.873.929	12.511.258.712.398	28.672.971.586.327	(69.330.649.178)	28.603.640.937.149
		Pertalite	-	2.405.551.752.587	2.405.551.752.587	(1.883.527.161)	2.403.668.225.426
	AKR		-	118.555.001.828	118.555.001.828	(13.143.035)	118.541.858.793
		Solar	-	118.555.001.828	118.555.001.828	(13.143.035)	118.541.858.793
Listrik (PLN)			9.857.681.018.950	27.704.385.115.858	37.562.066.134.808	(111.168.481.037)	37.450.897.653.771
			26.019.393.892.879	42.739.750.582.671	68.759.144.475.550	(182.395.800.411)	68.576.748.675.139

3. MANAJEMEN PELAKSANA PROGRAM KARTU PRAKERJA

Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar Rp2.512.309.626. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan realisasi dana atas penyelesaian pekerjaan yang dicadangkan pada RPATA yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga pada TA 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran.

4. SKK MIGAS

SKK Migas sebesar Rp43.344.681.625, merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

5. BP Batam

BP Batam sebesar Rp1.001.704.850, merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perolehan.

6. DIT DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Dit Distribusi dan Cadangan Pangan, Bapanas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp12.133.730.565.887. Terdapat transaksi pengalihan hutang kepada Satker Badan Pangan Nasional yang merupakan kewajiban jangka pendek Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp12.133.730.565.887 dalam rangka Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan BA BUN (999801).

D.2.2.1.2.5. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TRANSAKSI KHUSUS BA 999.99

Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp13.337.202.065.076 dan Rp13.371.161.333.939 terdiri dari:

No	Instansi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJPB	161.875.635.664	132.298.574.491
2.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJKN	1.660.048.429	4.559.988.950
3.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – DJA	13.422.069.786.625	13.613.633.419.350
4.	Utang Kepada Pihak Ketiga TK – BKF	8.864.098	2.401.361.110
Jumlah		13.585.614.334.816	13.752.893.343.901
Eliminasi *)		(248.412.269.740)	(381.732.009.962)
Total		13.337.202.065.076	13.371.161.333.939

*)Keterangan:

Pemindahbukuan PNBPN panas bumi Transaksi Khusus DJA BA 999.99 dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah

a. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJPB

Utang Kepada Pihak Ketiga DJPB sebesar Rp161.875.635.664 terdiri dari:

No	Uraian	Nominal	Keterangan
1	Utang IJP Bank/Pos Persepsi TA 2024 (termasuk Utang IJP rampung 2022-2023)	50.992.396.000	IJP s.d Pembayaran di Desember 2024
2	Utang PPN RTGS/Swift Bank pada BI s.d Agustus 2024	316.412.991	BAR PPN BI s.d 2024
3	Utang Kepada Pihak Ketiga karena kesalahan penyetoran oleh pihak ketiga tersebut	1.000.000	01/BA/LK/DJPb-TSP/2024 18 Jan 24
4	Kekurangan Pencairan Belanja Pensiun Bulan Des 24 Asabri	590.518.808	1/BA/LK/DJPb-ASB/2025
5	Kekurangan Pencairan Belanja Pensiun KAI TW IV 24 Taspen	1.451.741.486	1/BA/LK/DJPb-TSP/2025
6	Kekurangan Pencairan Dana JKK TW IV 24 Taspen	281.691.539	BA-4/PB.7/2025
7	Kekurangan Pencairan Dana JKm TW IV 24 Taspen	845.074.628	BA-5/PB.7/2025
8	Kekurangan pembayaran Jamkes TW IV BPJS 2024	81.673.438.212	BA-1/PB.7/2025
9	Utang Kepada Pihak Ketiga Satker PPP BUN	25.723.362.000	
Jumlah		161.875.635.664	

b. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJKN

Utang Kepada Pihak Ketiga DJKN sebesar Rp1.660.048.429. Nilai tersebut terdiri dari kewajiban pembayaran kepada nasabah penyimpan dana atas penetapan aset properti eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebagai BMN pada Pengguna Barang pada satker BLBI sebesar Rp613.457.639 dan kewajiban diestimasi yang merupakan pengakuan kewajiban atas tagihan penggantian biaya

margin IP PEN yang diusulkan Pelaksana Investasi untuk periode November dan Desember Tahun 2024 sebesar Rp1.046.590.790.

c. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – DJA

Utang Kepada Pihak Ketiga DJA sebesar Rp13.422.069.786.625 terdiri dari:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Utang Kepada Pihak Ketiga Migas	10.654.171.896.758	10.807.330.069.114
2	Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi	2.767.897.889.867	2.806.303.350.236
Jumlah		13.422.069.786.625	13.613.633.419.350

1) Utang Kepada Pihak Ketiga Migas

Utang Kepada Pihak Ketiga Migas merupakan kewajiban kontraktual pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu Migas. Jumlahnya yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp10.654.171.896.758. Sumber dana pembayaran kewajiban kontraktual tersebut berasal dari penerimaan migas pada Rekening Migas Nomor 600.000411980. Adapun rincian Utang Kepada Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	<i>Reimbursement</i> PPN	-	979.144.019.592
2.	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	1.074.470.588	1.296.393.971
3.	DMO Fee KKKS	1.371.471.469.018	1.445.305.862.052
4.	Utang <i>Underlifting</i> KKKS	9.054.316.723.770	8.113.018.240.965
5.	Utang <i>Fee</i> Penjualan Migas	227.309.233.382	268.565.552.534
Jumlah		10.654.171.896.758	10.807.330.069.114

1. *Reimbursement* PPN

Mekanisme pembayaran *reimbursement* PPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak Kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan *reimbursement* PPN kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas meneruskan tagihan kepada Kementerian Keuangan (dhi. Direktur Jenderal Anggaran). Rincian utang *reimbursement* PPN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp979.144.019.592, adalah sebagai berikut:

No	KKKS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	BOB PT. BSP – Pertamina Hulu		11.262.740.833
2	Medco E&P Grissik Ltd	-	81.928.304.495
3	Medco E&P Natuna Ltd	-	561.629.792.040

No	KKKS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
4	JOB. PERT-MEDCO E&P TOMORI SULAWESI	-	18.811.841.919
5	EXXON MOBIL CEPU LTD	-	56.105.824.748
6	PETROCHINA INT'L BANGKO LTD	-	1.025.430.962
7	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD	-	2.488.689.710
8	PT. MEDCO E&P INDONESIA	-	20.485.386.365
9	PT. MEDCO E&P RIMAU	-	6.278.811.245
10	Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd.	-	21.594.924.282
11	STAR ENERGY (KAKAP) LTD	-	13.168.975.127
12	ENI MUARA BAKAU B.V.	-	169.058.490.127
13	Medco Energi Bangkanai Limited	-	11.660.073.122
14	PT. TROPIK ENERGI PANDAN	-	902.895.832
15	PT. SELERAYA BELIDA	-	2.741.838.785
Jumlah		-	979.144.019.592

2. Pajak Penerangan Jalan

Seperti halnya Pajak Air Tanah dan Air Permukaan, Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Migas juga merupakan pajak daerah yang dibayarkan oleh Pemerintah Pusat sebagai implementasi *assumed and discharged* yang diatur dalam PSC. Demikian pula halnya dengan mekanisme penyampaian tagihan dan kelengkapan dokumen penagihan serta mekanisme pembayarannya mengacu kepada ketentuan yang berlaku pada Pajak Air Tanah dan Air Permukaan.

Berikut rincian saldo utang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.074.470.588 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.296.393.971.

No	KKKS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kab. Musi Rawas	-	80.423.862
2	Kab. Banggai	-	892.389.134
3	Kab. Pali	-	323.580.975
4	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.074.470.588	-
Jumlah		1.074.470.588	1.296.393.971

3. DMO Fee KKKS

Mekanisme pembayaran DMO Fee kepada KKKS mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran *Domestic Market Obligation Fee*, *Over Lifting* Kontraktor dan/atau *Under Lifting* Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. KKKS menagihkan DMO Fee kepada SKK Migas untuk diverifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya SKK Migas melakukan penagihan kepada Kementerian Keuangan (d.h.i Direktur Jenderal Anggaran).

Berikut ini adalah rincian dari Utang DMO Fee per 31 Desember 2024 sebesar USD84,884,042 atau setara dengan Rp1.371.471.469.018 dan 31 Desember 2023 sebesar USD84,787,837 atau setara dengan Rp1.445.305.862.052. Atas utang DMO Fee sebesar Rp1.371.471.469.018 telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2025.

4. Utang *Underlifting* KKKS

Underlifting KKKS adalah kekurangan pengambilan minyak dan/atau gas bumi oleh kontraktor apabila dibandingkan dengan haknya yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama pada periode tertentu. Saldo utang per 31 Desember 2024 adalah sebesar USD560,395,909 atau setara dengan Rp9.054.316.723.770, sedangkan saldo utang per 31 Desember 2023 adalah sebesar USD525,488,584 atau setara dengan Rp8.113.018.240.965. Terhadap Utang atas *underlifting* KKKS dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Per 31 Desember 2024, dapat disampaikan terdapat nilai *outstanding* utang *underlifting* dari 3 KKKS yang tidak mengalami perubahan karena belum adanya realisasi tagihan yang disampaikan kepada pemerintah. KKKS tersebut, yaitu Inpex Mahakam, Chevron Makassar Ltd, dan Energy Equity Epic (Sengkang) PTY Ltd;
- b. Dari saldo akhir *underlifting* sebesar USD560,395,909 seluruhnya nilai estimasi *underlifting* tahun 2024 dan telah diselesaikan sebesar USD21,628,949.89, yaitu atas tagihan dari PT Pertamina EP.

5. Utang *Fee* Penjualan Migas

Utang *fee* penjualan Migas merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang berasal dari tagihan *fee* atas penjualan migas bagian negara yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) yang telah diverifikasi, diteliti dan disepakati bersama antara DJA dan SKK Migas. Per 31 Desember 2024 terdapat saldo utang *fee* penjualan migas sebesar USD14,068,777 atau ekuivalen sebesar Rp227.309.233.382 menggunakan kurs JISDOR per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157, sedangkan per 31 Desember 2023 terdapat saldo utang *fee* penjualan migas sebesar USD17,395,269 atau ekuivalen sebesar Rp268.565.552.534 menggunakan kurs JISDOR per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439.

Atas utang *fee* tersebut sebesar USD14,068,777 telah dilakukan pembayaran di tanggal 8 Januari 2025.

Utang *Fee* Penjualan Migas tersebut merupakan *fee* penjualan Minyak Mentah dan Kondensat Bagian Negara (MMKBN) periode April-September 2024 yang dihitung berdasarkan kriteria dan besaran tarif imbalan (*fee*) penjualan yang ditentukan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 7.K/MG.05/MEM.M/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 21.K/MG.05/MEM.M/2022.

2) UTANG KEPADA PIHAK KETIGA PANAS BUMI

Utang Kepada Pihak Ketiga panas bumi adalah dana yang tersedia di rekening panas bumi yang dialokasikan sebagai pencadangan untuk pengembalian (*reimbursement*) PPN panas bumi, pencadangan pembayaran PBB panas bumi, dan pencadangan penggantian bonus produksi panas bumi.

Pada Neraca, diakui adanya utang pihak ketiga diestimasi, yaitu pada saat pencadangan utang kepada Pengusaha (*reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi) dan pencadangan pembayaran PBB panas bumi dalam rekonsiliasi triwulanan. Adapun utang pihak ketiga *reimbursement* PPN dan utang pihak ketiga PBB panas bumi diakui pada saat pengajuan tagihan dari pihak ketiga, sedangkan utang pihak ketiga penggantian bonus produksi diakui pada saat

diterbitkannya Kepmen ESDM tentang besaran bonus produksi panas bumi.

Utang Kepada Pihak Ketiga Panas Bumi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp2.767.897.889.867 dan Rp2.806.303.350.236.

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga panas bumi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Uraian	2024	2023
1	Utang Kepada Pihak Ketiga panas bumi-reimbursement PPN	916.882.156.360	661.796.767.489
2	Utang Kepada Pihak Ketiga panas bumi-PBB Panas bumi	-	-
3	Utang Kepada Pihak Ketiga panas bumi-penggantian bonus produksi	47.514.671.795	72.023.814.631
4	Utang Kepada Pihak Ketiga panas bumi diestimasi-reimbursement PPN	1.163.320.344.789	1.260.189.088.463
5	Utang Kepada Pihak Ketiga panas bumi diestimasi- PBB	375.813.805.470	430.561.669.691
6	Utang Kepada Pihak Ketiga panas bumi diestimasi - penggantian bonus produksi	15.954.641.713	-
7	Bagian pemerintah dari penerimaan panas bumi yang belum dipindahbukukan	248.412.269.740	381.732.009.962
Total (1+2+3+4+5+6+7)		2.767.897.889.867	2.806.303.350.236

d. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA TK – BKF

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.864.098 dan Rp2.401.361.110. Besaran nilai Utang Kepada Pihak Ketiga dalam rupiah tersebut menurun Rp2.392.497.012 jika dibandingkan saldo utang per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp2.401.361.110. Penurunan saldo utang tersebut disebabkan beberapa hal antara lain:

1. Terdapat pembayaran tagihan kontribusi/trust fund pada Pandemic Fund FIF tanggal 20 Maret 2024 sesuai dengan SP2D nomor 241401105000343 sebesar USD10,155,000 (SP2D ekuivalen Rp159.555.360.000) yang merupakan pembayaran atas komitmen kontribusi/trust fund tahun 2024 sebesar USD10,000,000 dan pembayaran utang atas kekurangan pembayaran tahun 2023 sebesar USD155,000. Atas transaksi tersebut menyebabkan 2 jurnal utang, yaitu;
 - a. Penambahan Utang sebesar Rp36.115.000 yang disebabkan *revaluasi* nilai utang kepada Pandemic Fund saat pembayaran, hal ini terjadi karena perbedaan kurs jisdor 30 Des 23 dengan kurs jisdor 20 Maret 2024 (kurs pada tanggal SPM);
 - b. Penghapusan Utang sebesar Rp2.429.160.000 yang disebabkan karena utang kepada Pandemic Fund sebesar USD155,000 telah dibayarkan lunas sehingga saldo utang dihapus. Utang yang dihapus adalah nilai utang yang telah direvaluasi menggunakan kurs jisdor pada tanggal SPM.
2. Kekurangan pembayaran sebesar USD10 yang berasal dari hasil konfirmasi penerimaan pembayaran kontribusi/*trust fund* kepada AMTF, sehingga dicatat sebagai utang sebesar Rp160.950 (dicatat berdasarkan kurs SPM tanggal 29 Mei 2024);
3. Penambahan saldo utang pada tahun berjalan di Semester I yang disebabkan adanya tagihan kontribusi/*trust fund* kepada Asian Development Fund tahun 2024 sebesar USD3,943,600 yang belum dilakukan pembayaran sehingga dicatat pada Laporan Keuangan Semester I sebagai utang sebesar Rp64.651.378.400 (dicatat berdasarkan tanggal *invoice* tagihan tanggal 28 Juni 2024);

4. Penyesuaian Saldo utang per 30 Juni 2024 (menggunakan kurs pelaporan) yang disebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (EUR dan USD) dibandingkan kurs 31 Desember 2023, sehingga terdapat kenaikan utang sebesar Rp517.205;
5. Penyesuaian Saldo utang 30 September 2024 yang disebabkan karena penguatan kurs Rupiah terhadap USD pada tanggal pelaporan 30 September 2024 dibandingkan kurs pada tanggal 30 Juni 2024 sehingga terdapat pengurangan atas saldo utang sebesar Rp4.930.185.562;
6. Terdapat pembayaran tagihan kontribusi/*trust fund* kepada Asian Development Fund tahun 2024 sebesar USD3,943,600 yang dilakukan pada tanggal 26 November 2024 sesuai SP2D nomor 241401105001293 SP2D ekuivalen Rp62.821.548.000. Atas transaksi ini menyebabkan 2 jurnal utang yaitu;
 - a. Penambahan Utang sebesar Rp2.839.392.000 yang disebabkan *revaluasi* nilai utang kepada ADF pada saat pembayaran, hal ini terjadi karena perbedaan kurs jisdor 30 September 2024 dengan kurs jisdor 26 November 2024 (kurs pada tanggal SPM);
 - b. Penghapusan Utang sebesar Rp62.561.270.400 yang disebabkan saldo utang kepada ADF sebesar USD3.943.600 telah dibayarkan lunas sehingga saldo utang dihapus. Utang yang dihapus adalah nilai utang yang telah *direvaluasi* menggunakan kurs jisdor pada tanggal SPM.
7. Penyesuaian Saldo utang 31 Desember 2024 yang disebabkan karena pelemahan kurs Rupiah terhadap USD pada tanggal pelaporan 31 Desember 2024 dibandingkan kurs pada tanggal 30 September 2024 sehingga terdapat kenaikan atas saldo utang sebesar Rp555.395.

Kurs yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tanggal	USD	EUR
31 Desember 2024 (kurs penutup)	Rp16.157	Rp16.822,67
30 September 2024 (Kurs Penutup)	Rp15.144	Rp16.929
30 Juni 2024 (Kurs Penutup)	Rp16.394	Rp17.533,38
31 Desember 2023 (kurs penutup)	Rp15.439	Rp17.086,34

Pada laporan keuangan terdapat saldo awal utang jangka pendek yang disebabkan oleh kekurangan pembayaran kontribusi dan *trust fund* akibat selisih kurs karena pagu anggaran yang tidak mencukupi dan/atau karena terdapat pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak Organisasi Internasional (OI) akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

Utang tersebut berasal dari transaksi pembayaran sejak awal dibentuknya BA BUN 999.99 (Pengelolaan Transaksi Khusus) BKF-PKPPIM (Kode Satker: 984438) tahun 2014. Adanya saldo awal utang jangka pendek tersebut akan menimbulkan pendapatan atau kerugian selisih kurs yang belum terealisasi.

Pada saldo awal utang jangka pendek yang kepada APTCF dan Pandemic Fund FIF berasal dari akumulasi kurang bayar akibat selisih kurs antara anggaran dan pada saat pembayaran sehingga mengakibatkan kurangnya pagu anggaran saat pembayaran. Sedangkan, pada saldo awal utang jangka pendek yang berasal dari OI lainnya diakibatkan adanya pengurangan nilai pembayaran yang diterima oleh pihak OI akibat adanya biaya transfer bank (*bank charges*).

Rincian Utang Jangka Pendek TK BKF per 31 Desember 2024 disajikan pada dalam [Lampiran LD34](#).

D.2.2.1.3. UTANG BUNGA

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp118.250.088.626.967** dan **Rp112.693.785.312.937** atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.556.303.314.030 (4,93%) disebabkan karena meningkatnya *outstanding* utang. Utang Bunga Tahun 2024 meningkat dibanding Tahun 2023 disebabkan karena meningkatnya *outstanding* utang.

Akun	Uraian	Utang Biaya Pinjaman 31 Desember 2024	Utang Biaya Pinjaman 31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
213111	Utang Bunga Luar Negeri	9.532.992.045.637	14.084.429.640.806	(4.551.437.595.169)	(32,32)
213113	Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri	787.685.924.925	494.312.527.035	293.373.397.890	59,35
213112	Utang Bunga Dalam Negeri	107.929.410.656.405	98.115.043.145.096	9.814.367.511.309	10
	Jumlah	118.250.088.626.967	112.693.785.312.937	5.556.303.314.030	4,93

- a. Utang Bunga Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.532.992.045.637 dan Rp14.084.429.640.806 dengan rincian:

Uraian	Jumlah	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Bunga Pinjaman Program	5.178.387.072.513	8.693.777.637.505
Utang Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	11.532.562.394	9.889.419.726
Utang Bunga Pinjaman Proyek	4.148.819.786.675	5.233.829.803.446
Utang Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	194.252.624.055	146.932.780.129
Jumlah	9.532.992.045.637	14.084.429.640.806

- b. Utang Bunga Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2024 sebesar Rp787.685.924.925.
- c. Utang Bunga Dalam Negeri berupa Utang Bunga SBN Tahun 2024 sebesar Rp107.929.410.656.405. Utang Bunga SBN tersebut meningkat 10% dibanding Tahun 2023 disebabkan karena meningkatnya *outstanding* SBN. Utang Bunga SBN Tahun 2024 di dalamnya termasuk penerimaan utang bunga obligasi negara rupiah, penerimaan imbalan diterima di muka SBSN Jangka Panjang dan penerimaan utang bunga obligasi negara-valuta asing yang belum dibayarkan.

D.2.2.1.4. UTANG SUBSIDI

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar **Rp27.307.329.522.064**. Jumlah Utang Subsidi tersebut, Rp541.417.433.499 (1,94%) lebih kecil dari Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2023 sebesar **Rp27.848.746.955.563**. Terdapat Utang Subsidi Estimasi dikarenakan adanya tagihan-tagihan yang telah disampaikan oleh BUMN Operator/Bank/Lembaga Penyalur kepada KPA, namun KPA belum melakukan verifikasi atas tagihan dimaksud, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rincian Utang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

NO.	K/L	JUMLAH		Kenaikan/	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Penurunan)	
1	Keuangan	24.448.204.017.570	13.744.959.186.456	10.703.244.831.114	77,87
2	Perhubungan	1.329.383.027.036	1.544.109.295.439	(214.726.268.403)	(13,91)
3	PUPR	340.567.087.938	602.874.649.812	(262.307.561.874)	(43,51)
4	KUKM	-	2.112.882.040.781	(2.112.882.040.781)	(100)
5	Perdagangan	2.001.449.037	22.831.160	1.978.617.877	8.666,30
6	Pertanian	1.187.173.940.483	9.843.898.951.915	(8.656.725.011.432)	(87,94)
	Jumlah	27.307.329.522.064	27.848.746.955.563	(541.417.433.499)	(1,94)

1. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KEUANGAN

Saldo Utang Subsidi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp24.448.204.017.570 dan Rp13.744.959.186.456. Utang subsidi per 31 Desember 2024 merupakan nilai penyaluran subsidi yang belum dibayar.

Rincian Utang Subsidi per satker lingkup Kementerian Keuangan per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Utang Subsidi	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
DJA	16.585.913.331.387	11.103.565.148.217	5.482.348.183.170	49,37
DJP	7.862.290.686.183	2.641.394.038.239	5.220.896.647.944	197,66
Total	24.448.204.017.570	13.744.959.186.456	10.703.244.831.114	77,87

a. DJA

Utang subsidi pada satker Ditjen Anggaran merupakan kewajiban pemerintah yang masih harus dibayar atas pelaksanaan PSO yang berupa penyediaan JBT, LPG Tabung 3 Kg, dan Listrik. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain, Utang subsidi diakui pada saat berita acara verifikasi atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan oleh KPA BUN. Pengelolaan Belanja Subsidi berdasarkan hasil rekonsiliasi data dengan unit teknis yang telah diverifikasi oleh KPA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi.

Sampai dengan 31 Desember 2024, utang subsidi yang dapat diakui adalah sebesar Rp16.585.913.331.387 yang terdiri atas:

- 1) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2023 kepada PT Pertamina Patra Niaga sesuai Berita Acara Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp831.793.477.249;
- 2) Kekurangan subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) Tahun 2023 sesuai Berita Acara Pemeriksaan BPK RI sebesar Rp2.023.862.968.113;
- 3) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga sebesar Rp1.607.044.084.266;
- 4) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Solar Tahun 2024 kepada PT AKR Corporindo Tbk sebesar Rp15.719.102.050;
- 5) Kekurangan Subsidi JBT Minyak Tanah Tahun 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN) sebesar Rp406.992.245.656;

- 6) Kekurangan Subsidi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN) sebesar Rp7.884.514.223.721;
- 7) Kekurangan subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) Tahun 2024 sebesar Rp3.815.987.230.334.

Dengan demikian, utang subsidi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.585.913.331.387 yang terdiri dari:

Utang Subsidi	Nilai
Utang Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg	10.746.063.132.940
Utang Subsidi Listrik	5.839.850.198.447
Total Utang Subsidi	16.585.913.331.387

b. DJP

Kewajiban Jangka Pendek pada Ditjen Pajak per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.862.290.686.183 dan Rp2.641.394.038.239 .

Utang Subsidi tersebut atas tagihan subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2024 sebesar Rp1.327.677.975.851 dan subsidi PPh DTP SBN Valas tahun 2024 sebesar Rp351.444.453.735.

Selain itu, terdapat pula Utang Subsidi tahun 2024 yang berasal dari tagihan subsidi Pajak DTP reguler tahun-tahun sebelumnya, yang meliputi Utang Subsidi atas tagihan subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2019 s.d. 2020 sebesar Rp1.416.607.984 , subsidi PPh DTP Panas Bumi tahun 2023 sebesar Rp917.820.311.039 , dan subsidi PPh DTP SBN Valas tahun 2023 sebesar Rp323.169.474.517.

Kemudian, terdapat juga Utang Subsidi tahun 2024 yang berasal dari tagihan subsidi Pajak DTP lainnya yang telah terverifikasi namun belum dilakukan pembayaran, terdiri dari Utang Subsidi atas tagihan subsidi PPN DTP KBLBB tahun 2023 sebesar Rp505.554.567.558 , subsidi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun tahun 2023 sebesar Rp580.159.885.270 , subsidi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun tahun 2024 sebesar Rp2.280.420.562.138 , subsidi PPN DTP KBLBB tahun 2024 sebesar Rp617.494.771.407 , dan subsidi PPhBM DTP KBLBB tahun 2024 sebesar Rp956.033.158.000.

Uraian (1)	Pagu (2)	Tagihan (3)	Realisasi (4)	Kurang Bayar (5) = (3)-(4)
a. Jumlah Tagihan pada Tahun Berjalan (Reguler)	8.311.702.470.000	9.990.764.583.027	8.311.642.153.441	1.679.122.429.586
1. PPh DTP Panas Bumi				
- SBP Januari 2024 (Kegiatan Triwulan IV 2023)		893.433.077.141	893.433.077.141	-
- SBP April 2024 (Kegiatan Triwulan I 2024)		945.117.163.724	945.117.163.724	-
- SBP Juli 2024 (Kegiatan Triwulan II 2024)		915.030.474.772	915.030.474.772	-
- SBP Oktober 2024 (Kegiatan Triwulan III 2024)		857.016.239.292	214.518.980.363	642.497.258.929
- SBP Januari 2025 (Kegiatan Triwulan IV 2024)		685.180.716.922	-	685.180.716.922
Jumlah PPh DTP Panas Bumi	2.968.099.696.000	4.295.777.671.851	2.968.099.696.000	1.327.677.975.851
2. PPh DTP SBN Valas				
- Januari s.d Maret 2024		1.873.346.273.829	1.873.346.273.829	-
- April s.d Juni 2024		964.998.054.003	964.998.054.003	-

Uraian (1)	Pagu (2)	Tagihan (3)	Realisasi (4)	Kurang Bayar (5) = (3)-(4)
- Juli s.d September 2024		2.056.914.299.975	2.056.914.299.975	-
- Oktober s.d November 2024		561.199.275.634	448.214.525.193	112.984.750.441
- Desember 2024		238.459.703.294	-	238.459.703.294
Jumlah PPh DTP SBN Valas	5.343.473.153.000	5.694.917.606.735	5.343.473.153.000	351.444.453.735
3. PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM				
Jumlah PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM	129.621.000	69.304.441	69.304.441	-
b. Jumlah Tagihan pada Tahun Berjalan (Pajak DTP Lainnya)	1.626.753.966.000	4.659.800.037.449	804.752.627.220	3.855.047.410.229
1. PPN DTP Rumah				
- Januari s.d Juni 2024		1.496.296.803.067	-	1.496.296.803.067
- Juli s.d Desember 2024		1.293.423.759.071	509.300.000.000	784.123.759.071
Jumlah PPN DTP Rumah	509.300.000.000	2.789.720.562.138	509.300.000.000	2.280.420.562.138
2. PPN DTP KBLBB				
- Januari s.d Oktober 2024		618.544.163.853	-	618.544.163.853
- November s.d Desember 2024		157.255.984.865	157.206.458.627	49.526.238
Jumlah PPN DTP KBLBB	698.145.796.000	775.800.148.718	157.206.458.627	618.593.690.091
3. PPnBM DTP KBLBB				
- Januari s.d Oktober 2024		956.033.158.000	-	956.033.158.000
- November s.d Desember 2024		138.246.168.593	138.246.168.593	-
Jumlah PPnBM KBLBB	419.308.170.000	1.094.279.326.593	138.246.168.593	956.033.158.000
C. Jumlah Tagihan pada Tahun-Tahun Sebelumnya (Reguler)	-	1.242.406.393.540	-	1.242.406.393.540
2019-2020				
1) PPh DTP Panas Bumi atas SBP Januari 2024 (Kegiatan 2019-2020)	-	1.416.607.984	-	1.416.607.984
Jumlah (2019-2020)		1.416.607.984		1.416.607.984
2023				
1) PPh DTP Panas Bumi atas SBP Juli 2023 (Kegiatan Triwulan II 2023)	-	11.182.614.865	-	11.182.614.865
2) PPh DTP Panas Bumi atas SBP Oktober 2023 (Kegiatan Triwulan	-	906.637.696.174	-	906.637.696.174
3) PPh DTP SBN Valas Oktober s.d November 2023	-	90.742.313.530	-	90.742.313.530
4) PPh DTP SBN Valas Desember 2023	-	232.427.160.987	-	232.427.160.987
Jumlah	-	1.240.989.785.556	-	1.240.989.785.556
d. Jumlah Tagihan pada Tahun-Tahun Sebelumnya (Lainnya)	-	1.085.714.452.828	-	1.085.714.452.828
2023				
1) PPN DTP KBLBB April s.d Desember 2023	-	505.554.567.558	-	505.554.567.558
2) PPN DTP Rumah November s.d Desember 2023	-	580.159.885.270	-	580.159.885.270
Jumlah	-	1.085.714.452.828	-	1.085.714.452.828
e. Total (a+b+c+d)	9.938.456.436.000	16.978.685.466.844	9.116.394.780.661	7.862.290.686.183

2. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Nilai Utang Subsidi Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.329.383.027.036 dan Rp1.544.109.295.440. Nilai Utang Subsidi tersebut berasal dari Eselon I Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Nilai Utang Subsidi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi sebesar Rp241.921.103.312 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024.

Nilai Utang Subsidi Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebesar Rp1.087.461.923.724 terdiri dari:

Rincian Utang Subsidi eselon I lingkup Kementerian Perhubungan per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Nama	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	241.921.103.312	333.461.160.423
Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.087.461.923.724	1.210.648.135.016
Total	1.329.383.027.036	1.544.109.295.440

a. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Nilai Utang Subsidi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi sebesar Rp241.921.103.312 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024.

b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan

Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp1.087.461.923.724 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Jumlah Tagihan
1.	Utang Subsidi PSO Perkeretaapian TA 2023	542.641.481.356
2.	Utang Subsidi penyelenggaraan LRT Jabodebek TA 2023	115.256.561.659
3.	Utang Subsidi PSO Perkeretaapian TA 2024	313.494.229.188
4.	Utang Subsidi penyelenggaraan LRT Jabodebek TA 2024	116.069.651.521
Total		1.087.461.923.724

3. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PUPR

Saldo Utang Subsidi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp340.567.087.977 dan Rp602.674.452.545. Rincian Utang Subsidi adalah sebagai berikut:

Nama	AKUN	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan	Utang Subsidi	337.115.561.301*	601.551.930.162	(264.436.368.861)
Direktorat Jenderal Cipta Karya	Utang Subsidi - Estimasi	3.451.526.637	1.322.719.650	2.128.806.987
Total		340.567.087.938	602.874.649.812	(262.307.561.874)

*)selisih pembulatan Rp39

a. Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan

Saldo utang subsidi adalah kewajiban yang belum dipenuhi pemerintah atas penyaluran subsidi. Saldo pada pos utang subsidi juga meliputi saldo dana yang dibatasi penggunaannya (163112) pada posisi kredit, saldo utang subsidi per 31 Desember 2024 senilai Rp337.115.561.301 sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024.

Keterangan	Nilai
Penambahan utang SBUM Tagihan BTN tahun 2023	38.112.000.000
Penambahan utang SBK Tagihan BTN tahun 2023	563.239.732.895
Pengurangan utang karena ter dapat irisan utang SBK antara kelebihan pembayaran asuadur dengan butir B -audit BPK AKN IV	(10.295.095)

Keterangan	Nilai
Penambahan utang SBK - kekurangan pembayaran ke Bank BTN-audit BPK AKN VII	210.492.362
Total Utang Subsidi per 31 Desember 2023	601.551.930.162
Penambahan Dana yang Dibatasi penggunaannya	1.374.000.000
Pengurangan utang Subsidi karena terdapat irisan debitor -Koreksi jurnal butir 4 (hasil audit BPK AKN VII)	(210.492.362)
Saldo per 30 Juni 2024	602.715.437.800
Penambahan Dana yang Dibatasi penggunaannya	22.420.000.000
Saldo utang Subsidi pada Neraca per 30 September 2024	625.135.437.800
Pengurangan utang SBK 2023 karena adanya pembayaran di 2024	(400.564.673.000)
Pengurangan utang SBUM2023 karena adanya pembayaran di 2024	(38.112.000.000)
Penambahan utang SBK 2024 karena perbedaan asumsi awal suku bunga (11,6%) dengan bunga real (12,08%)	1.550.796.540
Penambahan utang SBUM karena penambahan jumlah penyaluran sebanyak 300 unit	1.926.000.000
Penambahan Dana yang Dibatasi penggunaannya	147.180.000.000
Koreksi hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024	(39)
Saldo utang Subsidi pada Neraca per 31 Desember 2024	337.115.561.301

b. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Kenaikan utang subsidi-estimasi sebesar Rp2.128.806.987 (160,94%) disebabkan adanya penambahan 3 PDAM penerima manfaat subsidi yang mengikuti Perpres No 46 Tahun 2019 yaitu PDAM Kota Palembang, PDAM Kota Bogor dan PDAM Giri Menang. Utang subsidi yang disajikan pada Tahun 2024 sebesar Rp3.451.526.637 merupakan utang bulan September s.d. Desember 2024 yang akan dibayarkan pada Periode April 2025.

4. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM

Nilai Utang Subsidi Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.112.882.040.781.

5. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Nilai Utang Subsidi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.001.449.037 dan Rp22.831.160.

Utang Subsidi adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran pemerintah untuk diberikan kepada perusahaan/lembaga yang menjadi operator subsidi resi gudang atas perintah KPA Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Utang Subsidi sebesar Rp2.001.449.037 terdiri atas:

- Utang subsidi tahun sebelumnya sebesar Rp22.831.160
- Utang subsidi sebesar Rp1.473.207.838 timbul karena adanya tagihan dari 3 (tiga) bank penyalur (Bank BRI senilai Rp1.365.355.951; Bank Aceh Syariah senilai Rp95.041.514; Bank Kalsel senilai Rp12.810.373) yang sudah ditagihkan dan terverifikasi namun belum dapat dibayarkan karena terdapat kendala teknis pada Tanda Tangan Elektronik Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) sehingga pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) terbit melebihi batas

waktu yang telah ditentukan, dan permohonan penerbitan Surat Dispensasi juga mengalami kendala

- c) Utang subsidi berdasarkan BAV KPA bulan Des 2024 sebesar Rp505.410.039.

6. UTANG SUBSIDI KEMENTERIAN PERTANIAN

Utang subsidi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah senilai Rp1.187.173.940.483 dan Rp9.843.898.951.915. Nilai Utang subsidi per 31 Desember 2024 terdiri tagihan atas penyaluran kredit usaha alsintan yang belum dibayarkan pada periode Desember 2024 sebesar Rp81.572.807 dan tagihan PSO Penyalur subsidi pupuk atas pupuk bersubsidi yang belum dibayarkan sebesar Rp1.187.092.367.676.

Adapun, Bank penyalur kredit yang tagihannya belum dibayarkan pada sebagai berikut:

No	Bank	Nilai
1.	Bank Pembangunan Daerah Bali Bulan November 2024	33.832.898
2.	Bank Pembangunan Daerah Bali Bulan Desember 2024	34.400.319
3.	Bank Pembangunan Daerah DI Yogyakarta Bulan November 2024	3.487.757
4.	Bank Pembangunan Daerah DI Yogyakarta Bulan Desember 2024	9.258.604
5.	Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	593.229
Total		81.572.807

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2024, terdapat koreksi penyajian utang subsidi yang berasal dari penyaluran pupuk bersubsidi pada 5 (lima) operator sehingga hanya tersisa utang subsidi pada 2 (dua) operator dengan rincian berikut:

NO	PRODUSEN	NILAI UTANG SUBSIDI
1	PUPUK ISKANDAR MUDA	917.144.267.984
2	PUPUK KUJANG	269.948.099.692
JUMLAH		1.187.092.367.676

Dengan demikian saldo utang subsidi per 31 Desember 2024 menjadi Rp1.187.173.940.483

D.2.2.1.5. UTANG TRANSFER

Jumlah Utang Transfer per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp97.460.927.735.555 dan Rp52.187.965.129.846 atau mengalami penurunan sebesar Rp45.272.962.605.709 (86,75%).

Jenis Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
Kewajiban TKD	43.227.738.725.030	200.961.455.619	43.026.777.269.411
Kewajiban TKD Estimasi	54.233.189.010.525	51.987.003.674.227	2.246.185.336.297
Total	97.460.927.735.555	52.187.965.129.846	45.272.962.605.709

KEWAJIBAN TKD

Kewajiban transfer ke Daerah yang disajikan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 audited sejumlah Rp43.227.738.725.030 dan Rp200.961.455.619. Kewajiban TKD terdiri dari kewajiban DBH dan Kewajiban DAK Non Fisik. Apabila dibandingkan, terdapat peningkatan dari nilai kewajiban TKD pada 31 Desember 2024 sebesar Rp43.026.777.269.411 atau sebesar 21.410,46%. Naiknya nilai

kewajiban TKD ini disebabkan oleh telah ditetapkannya PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kurang Bayar/Lebih Bayar Tahun 2023 sebagai dasar penetapan utang/piutang DBH definitif.

Rincian Kewajiban TKD sampai dengan Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel berikut:

Jenis Kewajiban	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
DBH	43.011.107.391.000	2.356.367	43.011.105.034.633
DAK Nonfisik	216.631.334.030	200.959.099.252	15.672.234.778
Total	43.227.738.725.030	200.961.455.619	43.026.777.269.411

a. Kewajiban TKD Satker DBH

Transfer Dana Perimbangan yang Masih Harus Dibayar (Transfer Dana Perimbangan YMHD) merupakan kewajiban jangka pendek yang muncul karena adanya Kurang Bayar DBH. Transfer Dana Perimbangan YMHD yang dicatat dalam Laporan Keuangan Transfer ke Daerah Satker DBH meliputi seluruh hak Pemerintah Daerah atas Kurang Bayar transfer yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. Nilai Kewajiban Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp43.011.107.391.000.

Saldo akhir Kurang Bayar Dana Bagi Hasil per 31 Desember TA 2023 sebesar Rp2.356.367,00. Kemudian melalui PMK Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023, Pemerintah menetapkan Kurang Bayar Kurang Bayar DBH TA 2023 sebesar Rp56.216.473.637.633. Selanjutnya pada Bulan Desember 2024 Kementerian Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 yang menjadi dasar penyaluran Kurang Bayar DBH TA 2023 sebesar Rp13.205.368.603.000, sehingga sisa saldo Transfer Dana Perimbangan Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 adalah Rp43.011.107.391.000.

Rincian Kewajiban DBH disajikan pada tabel berikut ini:

No.	Transaksi	Jumlah
1.	Kewajiban DBH TA 2023 Audited	2.356.367
2.	Penetapan kewajiban DBH TA 2023 berdasarkan PMK No. 89 Tahun 2024	56.216.473.637.633
3.	Penyelesaian kewajiban DBH TA 2023 berdasarkan KMK No. 44KM.7/2024	(13.205.368.603.000)
Sisa Kewajiban		43.011.107.391.000

b. Kewajiban TKD Satker DAK Non Fisik

Nilai kewajiban Transfer DAK Nonfisik sebagaimana tersaji pada Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp216.631.334.030 dan Rp200.959.099.252 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.672.234.778 (7,80%). Saldo tersebut merupakan Utang Transfer DAK Nonfisik yang terdiri dari kurang salur Dana TPG ASND, TKG ASND, dan Tamsil Guru ASND tahun 2024. Terdapat pengakuan dan penyelesaian utang atas kurang salur DAK Non Fisik – TPG, TKG, dan Tamsil guru ASND berdasarkan laporan sisa dana yang disampaikan oleh Pemda sampai dengan 31 Desember 2024.

Mutasi kewajiban TKD – DAK Non Fisik per 31 Desember 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Nilai (dalam rupiah)
1.	Nilai kewajiban DAK Non Fisik per 31 Desember 2023 audited	200.959.099.252
2.	Pengakuan utang atas kurang salur DAK Non Fisik TA 2024 untuk Dana Tamsil Guru ASND dan Dana TPG ASND	182.155.325.370
3.	Penyelesaian utang atas kurang salur Dana TKG ASND TA 2023	(166.483.090.592)
Total		216.631.334.030

Rincian utang DAK Non Fisik Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Jenis Dana	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Dana TPG ASND	81.998.462.116	52.585.123.249
2.	Dana TKG ASND	6.095.345.532	37.952.927.237
3.	Dana Tamsil Guru ASND	128.537.526.382	75.430.823.831
4.	Pengakuan utang atas kurang salur DAK Non Fisik TA 2023 untuk Dana Tamsil Guru ASND dan Dana TPG ASND	-	43.813.921.184
5.	Penyelesaian utang atas kurang salur Dana TKG ASND TA 2023	-	(8.823.696.249)
Total		216.631.334.030	200.959.099.252

KEWAJIBAN TKD ESTIMASI

Kewajiban TKD Diestimasi - DBH per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp54.233.189.010.525 dan Rp51.987.003.674.227 atau naik sebesar Rp2.246.185.336.297 atau 4,32%. Kenaikan kewajiban diestimasi ini seiring dengan kenaikan penerimaan negara yang akan dibagihasilkan yang berasal dari komponen penerimaan Non-SDA/Pajak, sehingga potensi/estimasi kurang bayar DBH tahun 2024 meningkat.

Saldo akhir Kewajiban TKD Diestimasi - DBH per 31 Desember 2024 secara ringkas dapat dilihat pada Tabel berikut:

No.	Jenis Dana	Saldo Kewajiban TKD Diestimasi - DBH
1.	DBH PPh Pasal 21	19.254.598.969.225
2.	DBH PPh Pasal 25/29 OP	1.120.527.339.668
3.	DBH PBB Perkebunan	1.491.699.899.192
4.	DBH PBB Perhutanan	314.216.253.744
5.	DBH PBB Pertambangan	5.594.560.370.817
6.	DBH PBB Migas	4.254.614.530.463

No.	Jenis Dana	Saldo Kewajiban TKD Diestimasi - DBH
7.	DBH PBB Pertambangan Panas Bumi	168.063.591.610
8.	DBH PBB Lainnya	135.884.219.906
9.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.514.190.954.436
10.	DBH Minyak Bumi	3.377.542.571.379
11.	DBH Gas Bumi	3.492.231.044.390
12.	DBH Mineral dan Batubara - Landrent	278.547.556.195
13.	DBH Mineral dan Batubara - Royalti	11.846.933.254.702
14.	DBH Kehutanan - DR	115.827.916.622
15.	DBH Kehutanan - IIUPH	48.718.470.000
16.	DBH Kehutanan - PSDH	333.970.079.464
17.	DBH Panas Bumi-luran Tetap	1.947.825.903
18.	DBH Panas Bumi-Setoran Bagian Pemerintah	849.767.998.058
19.	DBH Panas Bumi-luran Produksi	39.346.164.751
Total		54.233.189.010.525

Rincian utang transfer DBH dan DAK Nonfisik tersaji pada [Lampiran LD35](#).

D.2.2.1.6. BAGIAN LANCAR UTANG JANGKA PANJANG

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp786.566.436.441.466** dan **Rp638.823.906.087.471** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp147.742.530.353.995** (23,13%) disebabkan karena meningkatnya *outstanding* utang. Saldo tersebut merupakan reklasifikasi utang jangka panjang yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca.

Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, *Unamortized Discount* sebesar **minus Rp885.329.385.000** dan *Unamortized Premium* sebesar **Rp265.185.148.000**, sebagai berikut:

Akun		Uraian	Jumlah	
			2024	2023
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	786.566.436.441.466	638.823.906.087.471
216111		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	92.568.473.192.354	87.150.338.807.931
216112		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	6.980.796.808.650	4.682.550.610.035
216121		Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	337.103.824.940.462	278.109.787.798.505
216131		Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta Asing	85.782.635.500.000	63.289.655.871.000
216141		Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	217.275.406.000.000	170.853.823.000.000
216151		Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing	46.855.300.000.000	34.737.750.000.000
		Unamortized Discount	(885.329.385.000)	(368.630.075.000)
213122		Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Rupiah	(155.874.083.000)	(103.827.563.000)
213124		Discount Bagian Lancar Obligasi Negara dalam Valuta asing	(18.042.401.000)	(2.853.536.000)
213126		Discount Bagian Lancar Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	(711.412.901.000)	(261.948.976.000)
		Unamortized Premium	265.185.148.000	440.320.180.000
213131		Premium Bagian Lancar Obligasi Negara Rupiah	152.040.584.000	175.242.064.000
213133		Premium Surat Berharga Syariah Negara dalam Rupiah	113.144.564.000	265.078.116.000

Rincian Bagian Lancar utang SBN dan Pinjaman termuat pada [Lampiran LD36, LD37, LD38, LD39, LD40 dan LD41](#).

D.2.2.1.7. UTANG SURAT BERHARGA NEGARA – JANGKA PENDEK

Utang Surat Berharga Negara – Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp62.418.300.000.000** dan **Rp31.412.000.000.000** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp31.006.300.000.000 (98,71%)** dengan *Unamortized Discount* sebesar **minus Rp1.566.657.675.000**. Terdapat kenaikan Utang SBN – Jangka Pendek di Tahun 2024 dikarenakan penerbitan SBN Jangka Pendek pada Tahun 2024 yang lebih besar dari pelunasannya.

Akun	Uraian	Jumlah	
		2024	2023
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek		62.418.300.000.000	31.412.000.000.000
217111	Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	26.400.000.000.000	27.792.000.000.000
217132	Surat Perbendaharaan Negara Syariah	36.018.300.000.000	3.620.000.000.000
Unamortized Discount		(1.566.657.675.000)	(467.650.585.000)
213121	Discount Surat Perbendaharaan Negara dalam Rupiah	(811.138.136.000)	(425.123.903.000)
213125	Discount Surat Perbendaharaan Negara Syariah dalam Rupiah	(755.519.539.000)	(42.526.682.000)

D.2.2.1.8. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp97.758.669.978** dan **Rp98.847.394.100** atau mengalami penurunan sebesar Rp1.088.724.122 (1,10%).

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Umum Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP dengan rincian sebagai berikut:

No	UAKPA BUN TK	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pengelola BMN yang berasal dari KKKS	45.568.869.723	59.666.370.529	(14.097.500.806)	(23,63)
2	Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA	823.788.327	19.455.290	804.333.037	4134,26
3	Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B	41.565.437.991	28.053.148.898	13.512.289.093	48,17
4	Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI	2.618.455.537	3.131.221.991	(512.766.454)	(16,38)
5	Pengelola BMN Eks <i>Idle</i>	45.763.333	33.500.000	12.263.333	36,61
6	Pengelola ABMA/T	2.795.377.748	3.621.561.100	(826.183.352)	(22,81)
7	Pengelola Aset Eks Pertamina	299.660.562	460.319.535	(160.658.973)	(34,90)
8	PNBP Minyak Bumi dan Gas Bumi	4.041.316.757	3.861.816.757	179.500.000	4,65
Total		97.758.669.978	98.847.394.100	(1.088.724.122)	(1,10)

1. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari KKKS per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp45.568.869.723 dan Rp59.666.370.529 sebagaimana tabel berikut:

Saldo 1 Januari 2024	59.666.370.529
Mutasi Tambah:	45.568.869.723
Pendapatan Sewa Diterima di Muka	45.568.869.723
Mutasi Kurang:	(59.666.370.529)
Penutupan Saldo	(59.666.370.529)
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2024	45.568.869.723

- a. Saldo awal sebesar Rp59.666.370.529 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 Audited;
 - b. Mutasi tambah sebesar Rp45.568.869.723 merupakan pemanfaatan BMN Hulu Migas yang disebabkan adanya tambahan pendapatan diterima dimuka Rp45.568.869.723 yang berasal dari pembayaran sewa BMN;
 - c. Mutasi kurang sebesar Rp59.666.370.529 disebabkan Penutupan Saldo Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2024
2. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA, per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp823.788.327 dan Rp19.455.290 sebagaimana tabel berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2024	19.455.290
Mutasi Tambah:	823.788.327
Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka tahun 2024	823.788.327
Mutasi Kurang:	19.455.290
Penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka tahun 2024 (Penerimaan sewa lahan ROW KKKS Medco E&P Malaka)	19.455.290
Saldo pendapatan diterima dimuka 31 Desember 2024	823.788.327

3. Pendapatan Diterima Dimuka pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN yang berasal dari Kontraktor PKP2B per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp41.565.437.991 dan sebesar Rp28.053.148.898 yang berasal dari:

Deskripsi	Nilai
Saldo Awal per 1 Januari 2024	28.053.148.898
Mutasi Tambah	19.329.797.000
Mutasi kurang	5.817.507.907
Saldo Akhir per 31 Desember 2024	41.565.437.991

- a. Saldo Awal Pendapatan diterima dimuka per 1 Januari 2024 sebesar Rp28.053.148.898 terdiri dari:

No	Deskripsi	Nilai
1.	Pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Petromine Energy Trading dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2024	406.182.288
2.	Uang muka sewa atas pemanfaatan BMN PKP2B pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT PLN (Persero) berupa tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC	15.000.000
3.	Pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Bayan Resources dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031	27.631.966.610
Total Saldo Awal		28.053.148.898

- b. Terdapat Mutasi Tambah sebesar Rp19.329.797.000 terdiri atas:

No	Deskripsi	Nilai
1.	Pendapatan diterima dimuka atas pemanfaatan BMN tanah PT Kaltim Prima Coal yang digunakan untuk kegiatan niaga umum BBM oleh PT Petromine Energy dengan jangka waktu sewa mulai dari 23 Maret 2024 sampai dengan 22 Desember 2031	19.287.797.000
2.	Pendapatan diterima dimuka atas pemanfaatan BMN sebagian tanah pada PKP2B PT KPC oleh PT PLN atas pemanfaatan tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC	42.000.000
Total Mutasi Tambah		19.329.797.000

- c. Terdapat Mutasi kurang sebesar Rp5.817.507.907 dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi	Nilai
1.	Pengakuan PNPB Januari s.d Desember 2024 atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal oleh PT Bayan dengan jangka waktu 10 tahun mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2031	3.461.088.220
2.	Pengakuan PNPB atas pemanfaatan tanah untuk tapak tower dan jalur span ROW yang tersebar di 8 (delapan) titik pada area lahan konsesi PKP2B PT KPC oleh PT PLN dengan jangka waktu 9 tahun 6 bulan mulai 13 Juni 2022 s.d 12 Desember 2031	15.325.937
3.	Pengakuan PNPB sebesar Januari s.d Desember 2024 atas pemanfaatan BMN tanah PT Kaltim Prima Coal yang digunakan untuk kegiatan niaga umum BBM oleh PT Petromine Energy dengan jangka waktu sewa mulai dari 23 Maret 2024 sampai dengan 22 Desember 2031	1.934.911.462
4.	Pengakuan PNPB atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Petromine Energy Trading dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 22 Maret 2024	406.182.288
Total Mutasi Kurang		5.817.507.907

d. Saldo Akhir 31 Desember 2024 Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp41.565.437.991.

4. Pendapatan Diterima di Muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI, nilai pendapatan diterima di muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.618.455.537, sedangkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.131.221.991 yang berasal dari penurunan transaksi sewa atas aset properti eks BPPN dan transaksi sewa aset properti eks Kelolaan PT PPA

Rincian Pendapatan Diterima Di muka Aset Yang Timbul Dari Pemberian BLBI disajikan pada [Lampiran LD42](#).

5. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Eks *Idle* pada periode Tahun 2024, terdapat saldo utang jangka pendek berupa Pendapatan Diterima Dimuka dengan nilai total sebesar Rp45.763.333. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Deskripsi	Nilai
1.	Pendapatan sewa dibayar dimuka atas pemanfaatan BMN eks BMN Idle sesuai dengan KMK 146/KM.6/2021 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN Idle dengan Sdr. Renan Amru Kafi	11.000.000
2.	Pendapatan sewa dibayar dimuka atas pemanfaatan BMN eks BMN Idle sesuai dengan KMK 166/KM.6/2023 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN Idle pada KPKNL Metro	10.500.000
3.	Pendapatan sewa dibayar dimuka atas pemanfaatan BMN eks BMN Idle sesuai dengan KMK No. 179/KM.6/2024 tentang Pelaksanaan Sewa BMN Eks BMN Idle pada KPKNL Pekalongan.	24.263.333
Total		45.763.333

6. Pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T, Pendapatan diterima di muka berasal dari pembayaran pihak ketiga untuk kompensasi ABMA/T namun belum dapat diterbitkan KMK pelepasan ABMA/T. Saldo pendapatan diterima di muka sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.795.377.748, dengan rincian saldo awal sebagaimana disajikan pada [Lampiran LD43](#).

Ditambah dengan kewajiban yang berasal dari nilai pembayaran/pelunasan kompensasi ABMA/T yang dilakukan sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp17.531.291.768, dengan rincian sebagaimana disajikan pada [Lampiran LD44](#).

Nilai tersebut selanjutnya dikurangi dengan nilai kompensasi atas ABMA/T yang diselesaikan/diterbitkan KMK pelepasan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp18.257.475.120 dengan rincian sebagaimana disajikan pada [Lampiran LD45](#).

Terdapat koreksi kurang atas pengakuan pendapatan diterima di muka yang seharusnya diakui pada tahun 2022 sehubungan dengan diterbitkannya KMK penetapan kompensasi baru atas aset ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran (sekarang Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo) RI di Sulawesi Selatan sebesar Rp100.000.000.

Dengan demikian membentuk nilai kewajiban sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp2.795.377.748.

7. Kewajiban dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Aset Eks Pertamina, Kewajiban berupa kewajiban jangka pendek, yang mana harus diselesaikan dalam 1 (satu) periode pelaporan, dan kewajiban jangka panjang, yang diselesaikan lebih dari 1 (satu) periode pelaporan.

Kewajiban jangka pendek sebesar Rp299.660.562 merupakan pendapatan diterima dimuka yang akan berubah menjadi pendapatan pada tahun berjalan, dalam hal ini 2024. Komponennya adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Pendapatan Diterima di Muka 1 Januari 2024 di Neraca	460.319.535
Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Palembang untuk KCP Prabumulih bulan Januari s.d. Desember 2024 yang diakui sebagai pendapatan.	(69.060.000)
Mengakui kewajiban jangka panjang sebagai pendapatan diterima di muka tahun 2025	69.060.000
Pendapatan diterima di muka dari sewa Bank Mandiri Sudirman untuk aset yang berada di Jalan Cemara bulan Januari s.d. Desember 2024 yang diakui sebagai pendapatan.	(136.600.000)
Mengakui kewajiban jangka panjang sebagai pendapatan diterima di muka tahun 2025	136.600.000
Pendapatan diterima di muka dari sewa penyediaan infrastruktur PT PLN untuk aset yang berada di Cirebon bulan Januari s.d. Desember 2024 yang diakui sebagai pendapatan.	(1.900.000)
Mengakui kewajiban jangka panjang sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2025	1.900.000
Pendapatan diterima di muka dari sewa Bass Oil Sukananti Limited bulan Januari s.d. Desember 2024 yang diakui sebagai pendapatan.	(50.539.535)
Mengakui kewajiban jangka panjang sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2025 (Januari s.d. Juli 2025)	29.481.395
Mengakui pendapatan diterima dimuka periode Juli s.d. Desember 2024	4.800.000
Pendapatan diterima di muka atas Perpanjangan Sewa Bank Mandiri Prabumulih bulan Juli s.d. Desember 2024 yang diakui sebagai pendapatan.	(4.800.000)
Mengakui kewajiban jangka panjang sebagai pendapatan diterima dimuka tahun 2025	9.600.000
Mengakui pendapatan diterima di muka bulan Oktober s.d. Desember 2024	22.722.500
Pendapatan diterima dimuka atas sewa tanah SP Randegan untuk periode bulan Oktober s.d. Desember 2024 diakui sebagai pendapatan.	(22.722.500)
Mengakui kewajiban jangka panjang sebagai pendapatan diterima dimuka (Januari s.d. Juli 2025)	53.019.167
Mengakui pendapatan diterima di muka bulan Oktober s.d. Desember 2024 atas sewa PT Pertamina EP	51.804.135.573
Pendapatan diterima di muka atas sewa PT Pertamina EP bulan Oktober s.d. Desember 2024 diakui sebagai pendapatan	(51.804.135.573)
Pengakuan pendapatan karena sudah dilakukan penghapusan atas tindak lanjut penjualan lelang pada Field Pendopo berdasarkan KMK 11/KM.6/KN.4/2022 dan Penghapusan sesuai KMK 35/KM.6/KN.4/2024 (BAST tahun 2024)	(202.220.000)
Pendapatan Diterima di Muka s.d 31 Desember 2024 di Neraca	299.660.562

8. Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp4.041.316.757 dan Rp3.861.816.757. Saldo tersebut merupakan PNBP Migas Lainnya atas adanya tagihan bonus produksi pada KKKS PHE Tomori yang diterbitkan dan dibayarkan pada tahun 2017 sebesar US\$2.500.000, kemudian terdapat koreksi tagihan oleh SKK Migas pada tahun 2021 menjadi sebesar US\$2.250.000 sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar US\$250.000.

D.2.2.1.9. PENDAPATAN YANG DITANGGUHKAN

Saldo Pendapatan Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp111.122.213.990 dan Rp403.617.716.901 atau mengalami penurunan sebesar Rp292.495.502.911 (72,47%). Saldo Pendapatan Migas Ditangguhkan merupakan saldo penerimaan yang masih tersedia di Rekening Migas per tanggal pelaporan, yang masih belum jelas peruntukannya dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

D.2.2.2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

D.2.2.2.1. UTANG JANGKA PANJANG SURAT BERTAGIH NEGARA

Utang Jangka Panjang Surat Bertagih Negara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.890.023.998.123.707 dan Rp6.563.241.522.670.168 atau mengalami kenaikan sebesar Rp326.782.475.453.539 (4,98%) dengan *Unamortized Discount* sebesar minus Rp49.634.944.892.000 dan *Unamortized Premium* sebesar Rp42.720.368.963.000. Terdapat kenaikan Utang Jangka Panjang

SBN dikarenakan penerbitan SBN yang lebih besar dari pelunasannya.

Rincian Utang Utang Jangka Panjang SBN per 31 Desember 2024 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

Akun	Uraian	Jumlah	
		2024	2023
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri		6.890.023.998.123.707	6.563.241.522.670.168
221211	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Rupiah	4.610.896.602.892.707	4.368.764.667.833.168
221221	Utang Dalam Negeri Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	1.012.387.927.231.000	970.791.364.837.000
221231	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Rupiah	957.736.843.000.000	919.923.165.000.000
221241	Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dalam Valuta Asing	309.002.625.000.000	303.762.325.000.000
Unamortized Discount		(49.634.944.892.000)	(49.942.041.191.000)
221251	Discount Obligasi Negara - dalam rupiah	(28.402.121.623.000)	(29.494.544.271.000)
221252	Discount Obligasi Negara - dalam valuta asing	(4.871.523.417.000)	(4.765.122.691.000)
221253	Discount SBSN - dalam rupiah	(16.361.299.852.000)	(15.682.374.229.000)
Unamortized Premium		42.720.368.963.000	44.567.904.657.000
221261	Premium Obligasi Negara - dalam rupiah	33.690.114.900.000	34.466.036.431.000
221262	Premium Obligasi Negara - dalam valuta asing	522.547.650.000	566.951.405.000
221263	Premium SBSN - dalam rupiah	8.507.706.413.000	9.534.916.821.000

Rincian Profil Jatuh tempo Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri dapat dilihat pada [Lampiran LD46, LD47, LD48 dan LD49](#).

D.2.2.2.2. UTANG KEPADA DANA PENSIUN DAN THT

Saldo Utang Kepada Dana Pensiun dan THT 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp31.042.846.841.712** dan **Rp25.871.215.355.337** atau mengalami kenaikan sebesar Rp5.171.631.486.375 (19,99%).

Pada Tahun 2022 telah ditetapkan Kewajiban Kekurangan Pendanaan Program THT dan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) pada PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2023 hal Penetapan dan Pengakuan Kewajiban atas Kekurangan Pendanaan Program Tabungan Hari Tua pada PT Taspen (Persero) sebesar Rp22.176.507.759.421 dan pada Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Surat Menteri Keuangan nomor S-263/MK.02/2024 Hal Pengakuan dan Penetapan *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Program THT yang Dikelola PT Taspen (Persero) Tahun 2023 sebesar Rp3.694.707.595.916, maka total UPSL PT Taspen (Persero) di Tahun 2023 sebesar Rp25.871.215.355.337.

Selanjutnya terdapat Surat Menteri Keuangan nomor S-310/MK.02/2024 Hal Pengakuan dan Penetapan UPSL Program THT yang Dikelola PT Asabri (Persero) Tahun 2024 sebesar Rp5.171.631.486.375,

dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Pembayaran	Sisa
1	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2022	22.176.507.759.421	-	22.176.507.759.421
2	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Taspen Tahun 2023	3.694.707.595.916	-	3.694.707.595.916
3	Pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) Asabri Tahun 2024	5.171.631.486.375	-	5.171.631.486.375
Jumlah				31.042.846.841.712

D.2.2.2.3. PEMBIAYAAN SURAT BERHARGA NEGARA DITANGGUHKAN

Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp86.273.473.974.300** dan **Rp39.891.869.021.700** atau mengalami kenaikan sebesar Rp46.381.604.952.600 (116,27%). Transaksi ini merupakan total dari nilai *cash proceeds* penerbitan SBN yang diterbitkan dalam rangka *prefunding* pembiayaan Tahun Anggaran 2025.

Daftar Seri SBN yang diterbitkan sebagai pembiayaan SBN ditangguhkan dapat dilihat pada [Lampiran LD50](#).

D.2.2.2.4. UTANG JANGKA PANJANG SUBSIDI

Jumlah Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp530.768.330.796** dan **Rp560.625.887.734** atau mengalami penurunan sebesar Rp29.857.556.938 (5,33%).

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	K/L	Jumlah		Kenaikan/	%
		31 Desember 2024	31 Desember 2023	(Penurunan)	
1	Pertanian	420.266.452.275	420.266.452.275	-	-
2	Perhubungan	110.501.878.521	140.359.435.459	(29.857.556.938)	(21,27)
Jumlah		530.768.330.796	560.625.887.734	(29.857.556.938)	5,33

1. Kementerian Pertanian

Utang subsidi jangka panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing masing adalah senilai Rp420.266.452.275 dan Rp420.266.452.275 pada satker Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Utang Jangka Panjang Subsidi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kurang Bayar TA. 2020 Audited yang dikoreksi oleh Itjen Kementan senilai Rp419.393.597,78 menjadi Rp420.266.452.272,22.

Produsen	Total Kurang Bayar TA. 2020	Temuan BPK AKN IV Sedang Diklarifikasi	Hasil Reviu Itjen/Yang Tidak Dapat Dibayarkan	Realisasi APBN 2021	Sisa Kurang Bayar TA. 2020	Hasil Reviu Itjen/Yang Tidak Dapat Dibayarkan	Sisa Kurang Bayar TA. 2020
PT. Pusri Palembang	98.290.428.910	13.063.200.315	11.042.347	85.227.228.595	13.052.157.968	1.960.120.717	11.092.037.251
PT. Pupuk Kujang	195.325.144.012	2.723.099.565	106.059.465	192.602.044.447	2.617.040.100	242.599.779	2.374.440.321
PT. Petrokimia Gresik	2.047.776.862.427	310.001.107.711	302.291.786	1.634.046.315.624	413.428.255.017	7.317.418.097	406.110.836.920

Produsen	Total Kurang Bayar TA. 2020	Temuan BPK AKN IV Sedang Diklarifikasi	Hasil Reviu Itjen/Yang Tidak Dapat Dibayarkan	Realisasi APBN 2021	Sisa Kurang Bayar TA. 2020	Hasil Reviu Itjen/Yang Tidak Dapat Dibayarkan	Sisa Kurang Bayar TA. 2020
PT Pupuk Iskandar Muda	159.074.081.479	718.093.145	-	158.355.988.334	718.093.145	28.955.369	689.137.776
PT. Pupuk Kaltim	-	68.201.630.133	-	-	-	52.190.709	(52.190.709)
Jumlah	2.500.466.516.828	394.707.130.869	419.393.598	2.070.231.577.000	429.815.546.230	9.601.284.671	420.214.261.559

Berdasarkan rincian tabel diatas, kurang bayar tahun 2020 dapat dijelaskan, bahwa total kurang bayar tahun 2020 senilai Rp2.500.466.516.828 menggunakan perhitungan kurang bayar Tahun 2020 pembulatan desimal ke bawah sehingga terdapat selisih Rp3 dengan yang tercatat di neraca senilai Rp2.500.466.516.831.

Sedangkan yang sudah terbayarkan di tahun 2021 senilai Rp2.070.231.577.000 dan terkoreksi dari hasil reviu Itjen Kementan No. R-662/PW.220/G/12/2022 senilai Rp419.393.597,78 dan Nomor R.470/PW.110/G.3/12/2023 senilai Rp9.549.093.961,39 sehingga masih ada sisa kurang bayar tahun 2020 senilai Rp420.266.452.268,53 yang dibulatkan menjadi Rp420.266.452.272,22

Selanjutnya, sebagai tambahan informasi bahwa atas tindaklanjut atas utang jangka panjang senilai Rp420.266.452.272 terhadap kurang bayar subsidi pupuk tahun 2020, telah dilakukan cek fisik oleh Inspektorat Jenderal Kementan didampingi oleh Tim Satker Dit. Pupuk dan Pestisida, Ditjen PSP, Kementan pada tahun 2024. Hasil TLHP tersebut sedang dalam proses penyelesaian laporan.

2. Kementerian Perhubungan

Utang Jangka Panjang Subsidi merupakan Kewajiban pemerintah yang belum dianggarkan pembayarannya. Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp110.501.878.521 dan Rp140.359.435.459

Rincian Utang Jangka Panjang Subsidi per 31 Desember 2024 sebesar Rp110.501.878.521 hanya berada di Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp110.501.878.521 terdiri dari kurang bayar PSO TA 2015 sebesar Rp2.216.878.521 dan TA 2016 sebesar Rp108.285.000.000.

Rincian nilai utang jangka panjang sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang subsidi PSO TA 2015	2.216.878.521	2.216.878.521
2	Utang subsidi PSO TA 2016	108.285.000.000	108.285.000.000
3	Sisa tunggakan PSO hasil audit BPK TA 2022	-	29.857.556.938
Total		110.501.878.521	140.359.435.459

D.2.2.2.5. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN DALAM NEGERI

Jumlah Utang Jangka Panjang Pinjaman Dalam Negeri per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2022 sebesar **Rp44.273.286.260.921** dan **Rp31.552.061.212.395** atau mengalami kenaikan sebesar Rp12.721.225.048.526 (40,32%). Kenaikan pinjaman dalam negeri disebabkan karena adanya akselerasi dalam pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana awal yang bertujuan untuk mempercepat penyelesaian kegiatan.

D.2.2.2.6. UTANG JANGKA PANJANG DALAM NEGERI LAINNYA

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp340.727.372.109.611** dan **Rp312.277.312.036.535** atau mengalami kenaikan sebesar Rp28.450.060.073.076 (9,11%)

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	BA 999.03	2.134.614.540	1.750.007.897	384.606.643	21,98
2	BA 999.04	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159	-	-
3	BA 999.08	58.555.708.079.202	51.000.911.330.754	7.554.796.748.448	14,81
4	BA 999.99	280.257.601.688.710	259.362.722.970.725	20.894.878.717.985	8,06
Jumlah		340.727.372.109.611	312.277.312.036.535	28.450.060.073.076	9,11

1. BA 999.03

Nilai utang jangka panjang dalam negeri lainnya berasal dari UAKPA BLU LPDB KUMKM sebesar pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.134.614.540 dan Rp1.750.007.897. Nilai tersebut merupakan pencairan klaim subrogasi mitra pada tahun 2022 sebesar Rp860.633.286 dan pencairan klaim subrogasi mitra tahun 2023 sebesar Rp889.374.611 yang sebelumnya dicatat sebagai ekuitas dan pencairan klaim subrogasi mitra tahun 2024 sebesar Rp384.606.643.

Pencatatan tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Akuntansi 05 tentang Akuntansi pada Satker BLU Pengelola Dana Bergulir, bahwa atas penerimaan klaim penjaminan utang pokok dan bergulir oleh satker BLU Pengelola Dana, Satker BUN Investasi Pemerintah pada BLU (BA BUN 999.03) menyajikan saldo kewajiban subrogasi dengan melakukan perekaman jurnal penyesuaian secara manual pada SPAN.

2. BA 999.04

Tidak terdapat perubahan nilai Kewajiban Jangka Panjang posisi 31 Desember 2024 dengan posisi 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.911.927.727.159. Namun telah dilakukan kesepakatan *Risk Sharing* KUT Tahun Penyediaan 1998/1999 antara Pemerintah, Bank Indonesia, dan PT Jamkrindo pada tanggal 21 Februari 2023. Bank Indonesia mencatat adanya penurunan nilai tunggakan KUT pada periode 2010-2019 sebesar Rp8.669.721.689,81 sehingga nilai porsi utang Pemerintah menjadi sebesar Rp1.908.221.550.684.

Kewajiban Jangka Panjang tersebut merupakan Kewajiban atas *risk sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999. Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skema Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija dan hortikultura. Terdapat dua pola dalam penyaluran KUT yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM. Sedangkan koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah. sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia dan sebesar 5% ditanggung Perum Jamkrindo.

Realisasi penyaluran KUT TP 1998/1999 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79. terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.699,61 sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut

terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235,53. Dengan demikian estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar Rp3.659.191.822.314,56. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25% sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 ($52,25\% \times \text{Rp}3.659.191.822.314,56$).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai Kewajiban atas *risk sharing* Kredit Program KUT berdasarkan hasil verifikasi lapangan, putusan pengadilan atau hal lain yang menyebabkan Pemerintah dapat menyesuainya. Di samping itu, dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

Terdapat temuan BPK atas laporan keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2021 yaitu Penyajian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya atas Risk Sharing Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999 pada LKBUN Tidak Andal dan Terdapat Perbedaan Pengakuan Outstanding Tunggakan antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar:

- a. Berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia dan pihak terkait lainnya untuk penyelesaian utang KUT TP1998/1999 secara akuntabel;
- b. Melakukan rekonsiliasi data tunggakan KUT dengan BI dan Jamkrindo untuk penyelesaian perbedaan penyajian nilai KUT TP 1998/1999 serta menyesuaikan penyajiannya pada LKBUN.

Tindak lanjut temuan sampai dengan tahun 2024 adalah dalam rapat yang dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2023, Bank Indonesia menyajikan nilai tersebut dalam Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) secara total sebagai Tagihan kepada non-bank di Dalam Negeri (tidak terdapat pengungkapan secara rinci terkait jumlah tagihan KUT kepada Pemerintah).

3. BA 999.08

Saldo Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.555.708.079.202 dan Rp51.000.911.330.754.

Saldo utang tersebut berasal dari satker SKK Migas. Kewajiban ini merupakan lawan akun dari Dana ASR dan Dana E&S yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya.

4. BA 999.99

Berdasarkan PMK Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 127/PMK.05/2018, pencatatan utang jangka panjang dalam negeri lainnya merupakan penjurnalan dari aset lainnya sebagai akun lawannya.

Utang jangka panjang dalam negeri lainnya terdiri dari Akumulasi Iuran Pensiun (AIP) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) serta utang jangka panjang yang dikelola oleh satker aset eks pertamina. AIP ini dicatat selain dicatat sebagai Aset Lainnya, juga dicatat sebagai utang karena merupakan dana milik peserta yang kolektif dikuasai oleh pemerintah.

Perbandingan nilai Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan) Rp)
Utang Jangka Panjang Lainnya			
AIP yang dikelola PT Taspen (Persero)	250.426.347.869.742	231.572.672.909.516	18.853.674.960.226
AIP yang dikelola PT Asabri (Persero)	29.830.903.367.301	27.789.462.568.147	2.041.440.799.154
Aset Eks Pertamina	350.451.667	587.493.062	(237.041.395)
Total Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	280.257.601.688.710	259.362.722.970.725	20.894.878.717.985

Nilai AIP di atas dicatat berdasarkan dokumen sumber Berita Acara Perhitungan AIP antara Kuasa Pengguna Anggaran dengan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) sebagaimana dijelaskan pada Dana Yang Dibatasi Penggunaannya yaitu:

1. Berdasarkan Laporan AIP Audited PT Taspen (Persero) Tahun 2024 tanggal 28 Februari 2025 disebutkan bahwa saldo AIP PT Taspen (Persero) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp250.426.347.869.742.
2. Berdasarkan Laporan AIP Audited PT Asabri (Persero) Tahun 2024 tanggal 7 Maret 2025 disebutkan bahwa saldo AIP PT ASABRI (Persero) per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp29.830.903.367.301.

Sementara Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya pada Aset Eks Pertamina (DJKN) per 31 Desember 2024 berasal dari Aset Eks Pertamina sebesar Rp350.451.667.

Hingga akhir 2023 eksisting kewajiban jangka panjang sebesar Rp587.493.062. Kemudian sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat transaksi kewajiban jangka panjang sebagai berikut:

1. Mutasi Tambah sebesar Rp62.619.167 dengan rincian:
 - a. Kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan pada tahun 2025 atas Sewa Bank Mandiri Prabumulih (KMK 17/KM.6/KN.4/2024) sebesar Rp9.600.000.
 - b. Kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan pada tahun 2025 atas Sewa Tanah SP Randegan (KMK 34/KM.6/KN.4/2024) sebesar Rp53.019.167.
2. Mutasi Kurang sebesar Rp299.660.562 dengan rincian:
 - a. Reklasifikasi kewajiban jangka panjang atas Sewa Bank Mandiri Prabumulih (KMK 17/KM.6/KN.4/2024) menjadi kewajiban jangka pendek/pendapatan diterima di muka di akhir tahun 2024 (bulan Januari s.d. Desember 2025) sebesar Rp9.600.000.
 - b. Reklasifikasi Kewajiban jangka panjang yang harus diselesaikan pada tahun 2025 atas Sewa Tanah SP Randegan (KMK 34/KM.6/KN.4/2024) menjadi kewajiban jangka pendek/pendapatan diterima di muka di akhir tahun 2024 (bulan Januari s.d. Juli 2025) Rp53.019.167.
 - c. Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi kewajiban jangka pendek/pendapatan diterima di muka (bulan Januari s.d. Desember 2025) atas Sewa KCP Prabumulih (KMK 6/KM.6/KN.3/2021) sebesar Rp69.060.000.
 - d. Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka (bulan Januari s.d. Desember 2025) atas sewa Bank Mandiri Sudirman untuk aset yang berada di Jalan Cemara (KMK 09/KM.6/KN.3/2021) sebesar Rp136.600.000.

- e. Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka (bulan Januari s.d. Desember 2025) atas sewa penyediaan infrastruktur PT PLN untuk aset yang berada di Cirebon (KMK 01/KM.6/KN.3/2022) sebesar Rp1.900.000.
 - f. Reklasifikasi Kewajiban Jangka Panjang menjadi Kewajiban Jangka Pendek/Pendapatan diterima di muka atas sewa *Bass Oil* Sukananti Limited (bulan Januari s.d. Juli 2025) sebesar Rp29.481.395.
3. Sehingga jumlah kewajiban jangka panjang hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp350.451.667

D.2.2.2.7. UTANG JANGKA PANJANG PINJAMAN LUAR NEGERI

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp943.345.582.337.528** dan **Rp886.277.290.731.920** atau mengalami kenaikan sebesar Rp57.068.291.605.608 (6,44%). Terdapat kenaikan dikarenakan penarikan pokok pinjaman pada Tahun 2024 yang lebih besar dari pembayarannya.

Akun	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Utang Jangka Panjang Pinjaman Luar Negeri					
222115	Utang Program	514.882.523.504.606	496.507.150.437.946	18.375.373.066.660	3,70
222116	Utang Proyek	428.463.058.832.922	389.770.140.293.974	38.692.918.538.948	9,93
Jumlah		943.345.582.337.528	886.277.290.731.920	57.068.291.605.608	6,44

Rincian Utang Jangka Panjang Luar Negeri termuat pada [Lampiran LD51 dan LD52](#).

D.2.2.2.8. UTANG JANGKA PANJANG LUAR NEGERI LAINNYA

Nilai utang jangka panjang luar negeri lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp27.335.416.515** dan **Rp26.579.390.708** atau mengalami kenaikan sebesar Rp756.025.807 (2,84%). Kewajiban tersebut berasal dari utang jangka panjang luar negeri lainnya. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 *Unaudited* tidak terdapat tagihan pencairan utang. Kewajiban jangka panjang pada Lembaga Keuangan Internasional IDA, MIGA dan CFC berupa *promissory notes*. Kenaikan saldo utang jangka panjang berasal dari perubahan nilai tukar.

Rincian kewajiban sebagai berikut:

No	Investasi Permanen	Mata Uang Awal		31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	International Development Association (IDA)	IDR	5.237.901.545	5.237.901.545	5.237.901.545	-	-
2	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	1.135.018	18.338.485.826	17.523.542.902	814.942.924	4,65
3	Common Fund for Commodities (CFC)	EUR	223.450,21	3.759.029.144	3.817.946.261	(58.917.117)	(1,54)
Total*				27.335.416.515	26.579.390.708	756.025.807	2,84

Keterangan:

*)Kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157/USD dan Rp16.822/EUR

Detail *promissory note* Pemerintah Indonesia pada IDA, MIGA, dan CFC adalah sebagai berikut:

No	LKI	Mata Uang Penempatan	Rincian	Tanggal	Jumlah
1	IDA	IDR	2 (two) <i>promissory notes</i>	19-Jan-73	129.523.754
			1 (one) <i>promissory note</i>	21-Sep-73	355.340.804
			1 (one) <i>promissory note</i>	26-Dec-73	71.956.501
			1 (one) <i>promissory note</i>	25-Mei-74	514.542.829
			1 (one) <i>promissory note</i>	14-Jul-00	2.163.936.250
			1 (one) <i>promissory note</i>	22-Mei-03	2.002.601.407
2	MIGA	USD	1 (one) <i>promissory note</i>	27-Jun-88	1.135.018
3	CFC	EUR	1 (one) <i>promissory note</i>	03-Agu-90	742.326
			1 (one) <i>promissory note</i>	19-Agu-91	2.969.303

D.2.3. EKUITAS

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **minus Rp3.576.615.643.905.782** dan **minus Rp3.328.187.950.388.477** atau mengalami penurunan sebesar Rp248.427.693.517.305 (7,46%).

D.3. CATATAN PENTING LAINNYA

D.3.1. BA 999.00

D.3.1.1. Rekening Pemerintah Lainnya

1. Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980

Rekening Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Migas Nomor 600.000411980 pada Bank Indonesia adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan usaha hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut.

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian Kontrak Production Sharing (KPS) atau rekening Migas per tanggal 31 Desember 2023 (*Audited*) adalah sebesar USD94.982.920,40 atau ekuivalen sebesar Rp1.466.441.303.733.

Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

Pemindahbukuan dari rekening 600.000411980 ke RKUN/KKKS/Pemda didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2024. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama periode Tahun 2024 *Audited* dengan rincian sebagaimana pada [Lampiran LDCPL1](#)

Dengan demikian, saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian Kontrak Production Sharing (KPS) atau rekening Migas per tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) adalah sebesar USD471.802.611,34 atau ekuivalen sebesar Rp7.622.914.791.421.

Dampak Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Berdasarkan data resume rekapitulasi yang diperoleh dari SKK Migas dan BPMA, terhadap KKKS yang berada dalam kewenangan SKK Migas dan BPMA diketahui terdapat besaran bagian Pemerintah yang terdampak oleh kebijakan HGBT dengan rincian:

- a. Pada tahun 2024 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp43.836.298.588.038 dan Rp85.193.127.074. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp7.251.980.232.795 dan Rp1.809.039.059. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp13.509.705.487.059 dan Rp30.538.766.662. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp4.269.443.320.167 dan Rp22.752.551.699. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp18.805.169.548.017 dan Rp30.092.769.654.

- b. Pada tahun 2023 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp38.681.435.809.060 dan Rp81.298.459.247. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.356.957.354.460 dan Rp3.458.340.691. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp11.362.912.854.107 dan Rp48.416.510.302. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp7.305.320.925.338 dan Rp3.135.779.299. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp13.656.244.675.155 dan Rp26.287.828.954.
- c. Pada tahun 2022 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp52.228.049.220.107 dan Rp151.131.951.406. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp9.523.533.983.284 dan Rp6.856.148.650. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp15.948.330.215.292 dan Rp95.985.566.897. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp3.075.963.489.095 dan Rp8.577.758.915. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp23.680.221.532.435 dan Rp39.712.476.945.
- d. Pada tahun 2021 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp40.992.195.353.406 dan Rp133.384.528.710. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.408.926.449.236 dan Rp4.700.821.802. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp10.583.363.221.527 dan Rp65.811.152.672. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp6.131.465.924.649 dan Rp25.779.665.891. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp17.868.439.757.994 dan Rp37.092.888.344.
- e. Pada tahun 2020 nilai penerimaan gas bagian Pemerintah pada SKK Migas dan BPMA sebelum diberlakukannya kebijakan HGBT masing-masing sebesar Rp27.970.425.235.344 dan Rp200.129.371.792. Atas penerapan HGBT terjadi penurunan bagian Pemerintah yang disebabkan oleh penyesuaian atas perubahan harga gas pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp2.454.640.286.309 dan Rp3.222.044.251. Sedangkan nilai penyesuaian untuk mempertahankan bagian KKKS (*keptwhole*) pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp3.924.671.965.471 dan Rp25.591.368.636. Adapun realisasi kewajiban pemerintah pada SKK Migas dan BPMA masing-masing sebesar Rp5.204.357.297.105 dan Rp94.397.142.981. Maka dengan memperhitungkan kewajiban pemerintah dan penyesuaian HGBT, nilai akhir penerimaan bagian pemerintah pada SKK Migas dan BPMA menjadi sebesar Rp16.386.755.686.457 dan Rp76.918.815.925. Pada tahun 2020 terdapat nilai kekurangan bagian KKKS Medco E&P Malaka yang tidak tertutupi oleh bagian pemerintah senilai Rp18.133.883.933. Namun demikian, atas nilai tersebut pada tahun 2024 telah

ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan mengakumulasi seluruh KKKS di bawah kewenangan SKK Migas dan BPMA, maka total nilai kewajiban pemerintah, penyesuaian HGBT, dan bagian negara akhir ditunjukkan pada tabel berikut:

Rincian	2020	2021	2022	2023	2024
(1) Bagian negara awal (sebelum HGBT)	28.170.554.607.136	41.125.579.882.116	52.379.181.171.513	38.762.734.268.307	43.921.491.715.112
(2) Kewajiban pemerintah terhadap Kontraktor	5.298.754.440.086	6.157.245.590.541	3.084.541.248.010	7.308.456.704.637	4.292.195.871.866
(3) Bagian negara setelah memperhitungkan kewajiban pemerintah [3 = 1 - 2]	22.871.800.167.050	34.968.334.291.575	49.294.639.923.503	31.454.277.563.670	39.629.295.843.246
(4) Penyesuaian HGBT (<i>kept-whole</i> kontraktor + penurunan <i>entitlement</i> GOI akibat HGBT)	6.408.125.664.668	17.062.801.645.237	25.574.705.914.123	17.771.745.059.561	20.794.033.525.575
(5) Bagian negara akhir atau setelah HGBT [5 = 3 - 4]	16.463.674.502.382	17.905.532.646.338	23.719.934.009.380	13.682.532.504.109	18.835.262.317.671
(6) Proporsi penyesuaian bagian negara [6 = 4 / 3]	28,02%	48,80%	51,88%	56,50%	52,47%
(7) Kekurangan Bagian Pendapatan KKKS yang Tidak Tertutupi dari <i>Keptwhole</i> *)	18.133.883.933	-	-	-	-
Total penyesuaian HGBT sejak 2020 s.d. tahun ybs:	6.408.125.664.668	23.470.927.309.905	49.045.633.224.028	66.817.378.283.589	87.611.411.809.164

*) Pada tahun 2024, nilai kekurangan bagian pendapatan KKKS (Medco E&P Malaka) yang tidak tertutupi dari *keptwhole* tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyesuaian dari sisi harga dan/atau volume atas penjualan gas yang mengimplementasikan kebijakan HGBT sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku

Lebih lanjut, sejalan dengan ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik bagi Kepentingan Umum, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, SKK Migas, BPMA, serta Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Migas melakukan rekonsiliasi hulu-hilir atas implementasi HGBT. Berdasarkan data SKK Migas dan BPMA, diketahui bahwa terdapat penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023 sebesar USD255,305,550.

Tahun	Total Hasil Rekon	Penyelesaian 2022	Penyelesaian 2023	Penyelesaian 2024	Total penyelesaian	%	Outstanding	%
SKK Migas								
2020	51.950.364		45.903.905	4.741.341	50.645.246	97,49	1.305.118	2,51
2021	80.434.950	6.167.215	69.121.549	4.015.067	79.303.831	98,59	1.131.119	1,41
2022	64.300.968		54.304.427	7.053.859	61.358.286	95,42	2.942.682	4,58
2023	58.375.256			55.025.108	55.025.108	94,26	3.350.148	5,74
Subtotal	255.061.538	6.167.215	169.329.881	70.835.375	246.332.471	96,58	8.729.067	3,42
BPMA								
2020	95.257			95.257	95.257	100		
2021	133.569		18.742	114.827	133.569	100		
2022	13.592		4.109	9.483	13.592	100		
2023	1.594			1.594	1.594	100		
Subtotal	244.012	-	22.851	221.161	244.012	100		
Total	255.305.550	6.167.215	169.352.732	71.056.536	246.576.483	96,58	8.729.067	3,42

Pada periode pelaporan keuangan tahun 2024, diketahui bahwa terhadap nilai penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT untuk KKKS yang berada di bawah kewenangan SKK Migas dan BPMA telah dilakukan penyelesaian sebesar USD6,167,215 pada tahun 2022, USD169,352,732 pada tahun 2023, dan USD71,056,636 pada tahun 2024. Nilai penyelesaian 2023 telah diterima pada rekening kas umum negara pada tahun 2023, sedangkan atas penyelesaian tahun 2022 dan 2024 telah dicadangkan untuk dipindahbukukan pada tahun 2025. Secara keseluruhan, realisasi nilai pembayaran atas penerimaan bagian negara dari hasil rekonsiliasi hulu hilir HGBT telah mencapai USD246,576,483

atau 96,58 persen dari total penerimaan bagian negara atas hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023. Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2024 tersisa outstanding hasil rekonsiliasi hulu-hilir HGBT Tahun 2020-2023 yang belum diselesaikan senilai USD8,729,067 atau mencapai 3,42 persen dari nilai totalnya.

2. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi, antara lain reimbursement PPN, PBB, dan penggantian bonus produksi. Pemindahbukuan dari Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi Nomor 508.000084980 ke RKUN/ rekening Pengusaha Panas Bumi didasarkan pada surat permintaan dari Dirjen Anggaran yang didahului dengan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

Saldo Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.082.717.172.953 dan Rp1.912.870.273.099.

Mutasi Rek Lain BI Penerimaan dan Pengeluaran Panas Bumi selama periode Tahun 2024 tercantum pada [Lampiran LDCPL2](#)

3. Rekening Lainnya di BI TDF-TKD Pemda

Sesuai PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*, TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi pemerintah daerah (pemda) untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI). Penyaluran DBH dan/atau DAU dalam bentuk nontunai berupa TDF dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang sehat, efisien, dan efektif melalui pengendalian kas untuk mengoptimalkan belanja pemerintah, serta untuk mengurangi kas simpanan pemda di perbankan dalam jumlah tidak wajar. DBH dan/ atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/ atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya. Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

Dalam rangka penyimpanan DBH dan/atau DAU yang disalurkan dalam bentuk nontunai berupa TDF pada BI, Kuasa BUN Pusat telah membuka 546 rekening lain BI TDF-TKD Pemda berdasarkan permohonan KPA BUN Pengelolaan DTU di Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPk). Atas penyimpanan dana dalam rekening lain BI TDF-TKD Pemda tersebut, BI memberikan remunerasi sesuai kesepakatan antara Menteri Keuangan dengan Gubernur BI, dimana remunerasi tersebut ditransfer oleh BI ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) secara bulanan. Ketentuan mengenai pembentukan dan pengelolaan TDF dalam rangka penyaluran DBH TA 2022 dalam bentuk nontunai diatur dalam KMK Nomor 10/KM.5/2022, di mana pengisian rekening lain BI TDF-TKD Pemda didahului dengan penerbitan SPM nihil penyaluran DBH nontunai oleh KPA BUN Penyaluran DTU yang diajukan Bersama dokumen pendukungnya ke KPPN Jakarta II. Berdasarkan SPM tersebut, KPPN Jakarta II menerbitkan SP2D nihil penyaluran DBH nontunai, dilanjutkan dengan pemindahbukuan dana oleh Kuasa BUN Pusat dari RKUN ke rekening lain BI TDF-TKD Pemda.

Tahap	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda	Keterangan
1	807.081.149.891	436	Penarikan DBH (Cukai Hasil Tembakau, Kehutanan Dana Reboisasi serta Tambahan Migas Otsus) setelah <i>holding period</i> Berdasarkan PMK 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF
2	83.336.251.053	1	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU pada bulan April 2023
3	12.121.273.222.000	541	Berdasarkan KMK 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah sebagai akibat dari Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
4	5.180.591.195	2	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Juni 2023
5	12.061.933.629	4	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Juli 2023
6	218.956.327.468	7	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Agustus 2023
7	366.897.676.114	5	Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan September 2023
8	11.518.176.131.174	546	Berdasarkan KMK 362 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Belanja Daerah pada Akhir Tahun Anggaran 2023

Selain penarikan DBH nontunai berupa TDF, pada sepanjang 2023 terdapat pengisian TDF yang berasal dari penyaluran DBH Nontunai tahun 2023 dengan total Rp67.185.058.895.450 dan terdapat pula penarikan DBH non tunai sebesar Rp686.726.766.950. dengan rincian sebagai berikut

No	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda Penerima	Keterangan
1	16.237.365.176.000	356	Penyaluran DBH dalam bentuk nontunai berupa TDF berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023
2	50.947.693.719.450	546	
3	686.726.766.950	4	Penarikan DBH dalam bentuk nontunai berupa TDF untuk Kab Siak, Provinsi Kepulauan Riau, Kab. Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna

Sehingga dana DBH nontunai berupa TDF yang disimpan di rekening TDF pada 31 Desember 2023 sebesar Rp66.498.332.128.500.

Realisasi TDF tahun 2024

Sampai dengan Triwulan III tahun 2024 telah dilakukan penarikan DBH nontunai berupa TDF yang berasal dari saldo TDF tahun 2023 kepada 546 pemda dengan total Rp55.189.182.222.060 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda	Keterangan
1	15.159.876.875.525	544	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD setelah <i>holding period</i> Berdasarkan PMK 164 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> dalam rangka Mendukung Kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
2	1.905.985.256.543	20	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan April 2024
3	3.080.633.026.789	14	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Mei 2024
4	10.016.333.880.221	173	Berdasarkan KMK nomor 267 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> dalam rangka mendukung kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024
5	2.288.679.995.685	18	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Juli 2024

No	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda	Keterangan
6	2.385.470.087.298	16	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Agustus 2024
7	4.075.960.250.110	22	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan September 2024
8	67.856.238.075	19	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD dalam rangka penyelesaian pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mendanai pemilihan Kepala Daerah Serentak
9	4.728.884.658.849	28	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Oktober 2024
11	5.871.879.647.485	26	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan November 2024
12	5.607.622.305.480	33	Penarikan DBH non Tunai dalam bentuk TDF-TKD Berdasarkan rekomendasi KPA BUN Pengelolaan DTU bulan Desember 2024

Sampai dengan tanggal 30 Desember 2024 masih terdapat sisa saldo TDF 2023 yang belum dilakukan penarikan sebesar Rp11.309.149.906.440 dari 33 Pemda.

Pada Tanggal 31 Desember 2024 terdapat pengisian TDF yang berasal dari penyaluran Kurang Bayar DBH Tahun 2023 non tunai - TDF yang Dialokasikan pada TA 2024 dengan total Rp 9.248.890.540.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nilai (Rp)	Jumlah Pemda Penerima	Keterangan
1	7.162.106.606.000	546	Pengisian Kurang Bayar DBH SDA Tahun 2023 non tunai - TDF yang Dialokasikan pada TA 2024
2	2.086.783.934.000	546	Pengisian Kurang Bayar DBH Pajak Tahun 2023 non tunai - TDF yang Dialokasikan pada TA 2024

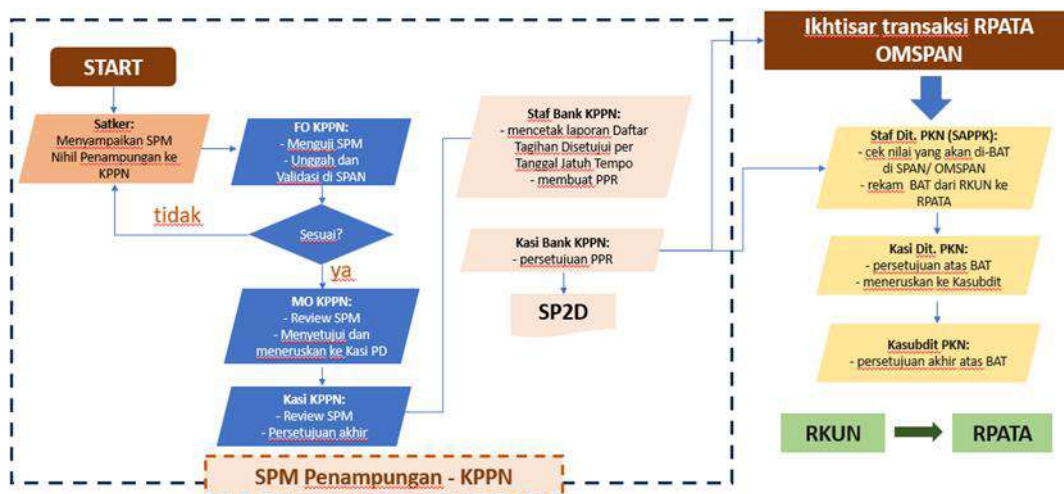
Berdasarkan pengisian tersebut, dana DBH nontunai berupa TDF yang disimpan di rekening TDF pada 31 Desember 2024 sebesar Rp20.558.040.446.440.

4. Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA)

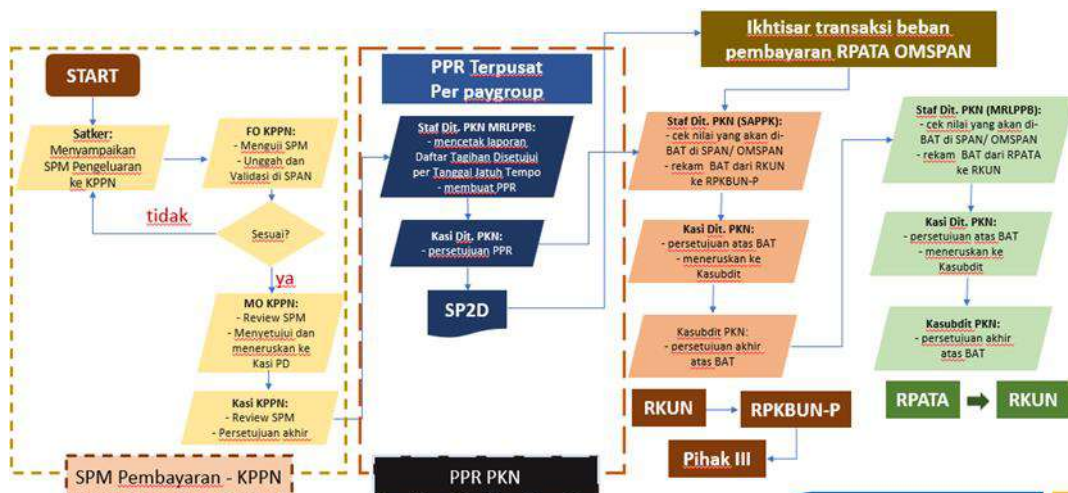
Dalam rangka menjaga prinsip pembayaran setelah barang/jasa diterima serta mendukung optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan anggaran atas pekerjaan yang belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran, dibuka Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung dana dalam rangka penyelesaian pekerjaan tersebut. RPATA merupakan rekening lain-lain milik BUN yang dibuka di Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000700980 untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara s.d. tanggal 31 Desember TA berkenaan dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Pengelolaan RPATA berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 109 tahun 2023 menggantikan probis Bank Garansi yang diterapkan sebelumnya.

Proses bisnis pengelolaan RPATA sebagai berikut:

a. Proses bisnis Penampungan RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

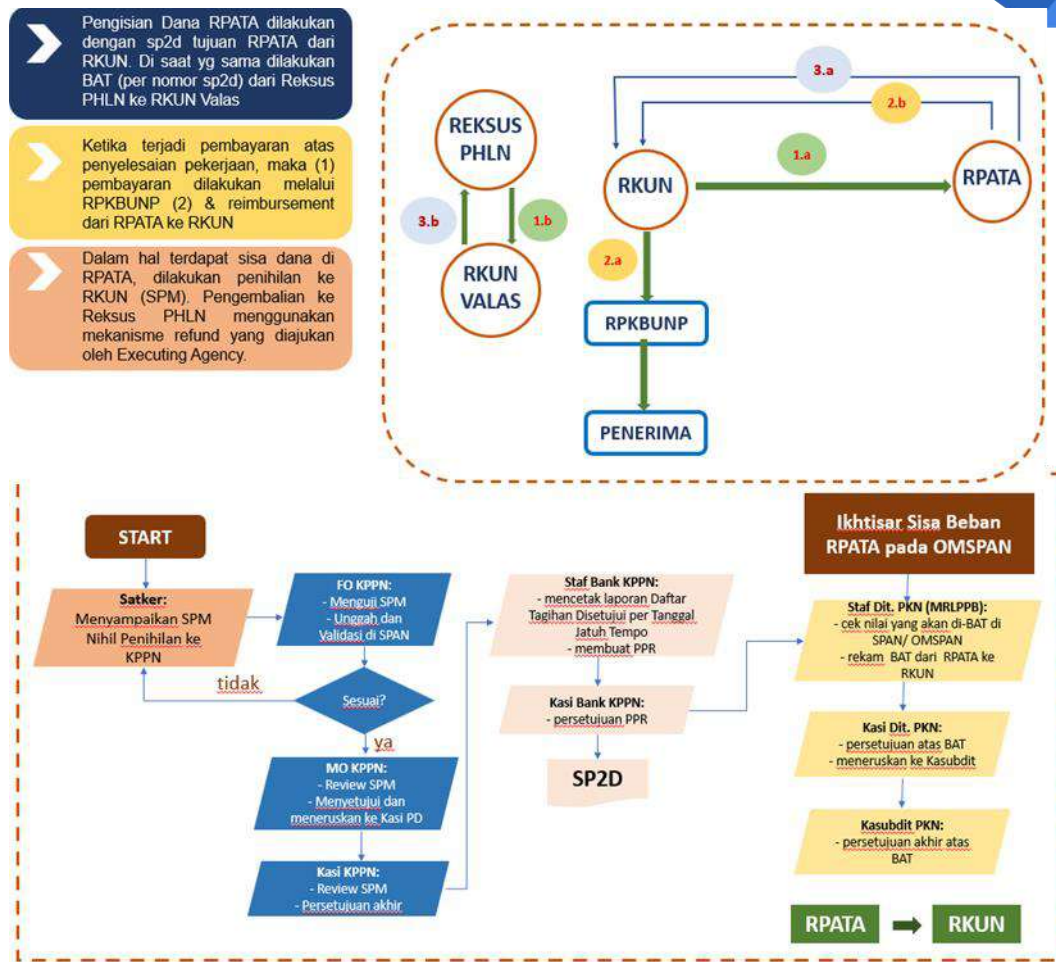


b. Proses bisnis Pembayaran RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

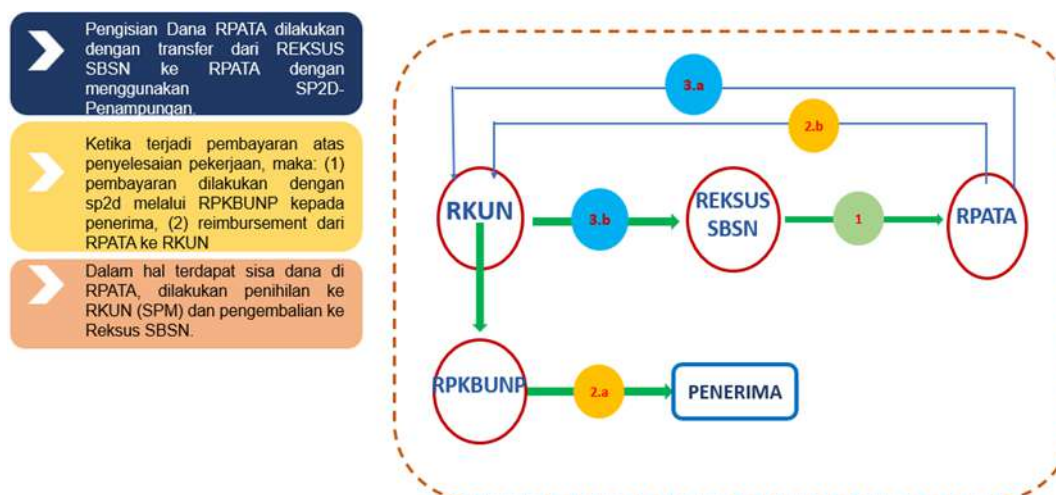


c. Proses bisnis Penihlan RPATA yang bersumber dari dana Rupiah Murni (RM)

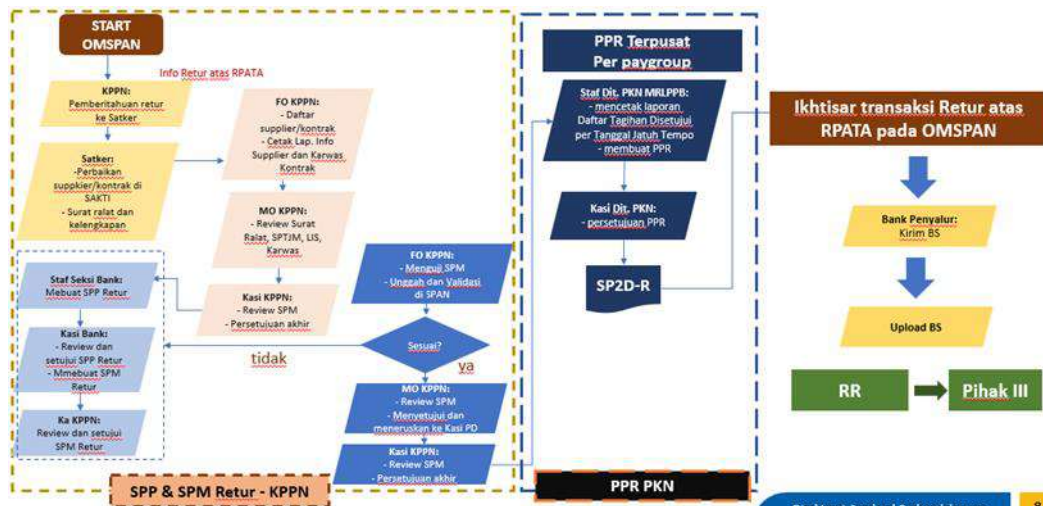
d. Proses bisnis Penampungan, Pembayaran dan Penihlan RPATA yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)



- e. Proses bisnis Penampungan, Pembayaran dan Penihsilan RPATA yang bersumber dari dana Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)



f. Proses bisnis penyelesaian retur SP2D RPATA



Berdasarkan proses bisnis diatas, pada bulan Desember 2024 telah dilakukan penampungan, pembayaran dan penihilan RPATA baik yang bersumber dari dana RM, PHLN maupun SBSN dengan total saldo pada Rekening RPATA per 31 Desember 2024 sebesar Rp22.036.095.270.733 dengan jumlah kontrak 14.079 yang didaftarkan.

5. Rekening SAL dalam Valuta USD

Berdasarkan data saldo Dana SAL BUN periode akhir tahun 2017 s.d. 2022, diketahui bahwa proporsi Dana SAL BUN dalam mata uang USD cenderung meningkat secara signifikan, dibandingkan dengan proporsi Dana SAL BUN dalam mata uang Rupiah.

Disisi lain, data historis pengeluaran negara pada periode Triwulan I dalam empat tahun terakhir dalam mata uang USD, menunjukkan kebutuhan mata uang USD cukup tinggi, dengan rata-rata pengeluaran sebesar USD2,7 miliar.

Untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran negara dalam mata uang USD tersebut, tidak cukup dipenuhi dari penerimaan negara dalam mata uang USD yang diterima melalui Modul Penerimaan Negara (MPN). Selanjutnya, Direktorat PKN akan melakukan penukaran mata uang Rupiah ke dalam mata uang valuta asing (USD) melalui Bank Indonesia. Hal ini menyebabkan timbulnya risiko nilai tukar yang besar (selisih kurs *realized*).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk mempertahankan Dana SAL BUN dalam bentuk mata uang USD melalui pembukaan Rekening SAL dalam mata uang USD (Rek SAL BUN USD), sehingga seluruh saldo penerimaan dalam mata uang USD, tetap dapat dipertahankan dan dapat digunakan untuk kebutuhan di awal tahun berikutnya, tanpa pemerintah perlu melakukan penukaran valuta asing.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, telah ditetapkan dasar hukum pembukaan rekening melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2023 tentang Perubahan Kedua atas Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2022 tentang Tata Cara Perhitungan dan Pemindahbukuan Dana SAL BUN Serta Formula Perhitungan Jumlah Dana SAL BUN Efisien, pada tanggal 6 Desember 2023.

Penyimpanan Dana SAL BUN dalam valuta asing Pengelolaan rekening SAL valas secara akuntansi tetap menimbulkan selisih kurs *unrealized* yang pencatatannya diatur dalam Perdirjen Perbendaharaan nomor Per-19/PB/2016 dengan formula perhitungan selisih kurs *unrealized* sebagai berikut:

$$\text{Unrealized Gain/Loss} = \text{Saldo Akhir} - \{\text{Saldo Awal} + (\text{Mutasi Penerimaan} - \text{Mutasi Pengeluaran})\}$$

Jika hasilnya positif maka merupakan Selisih Kurs **Unrealized Gain**,
jika hasilnya negatif merupakan Selisih Kurs **Unrealized Loss**.

- ❖ Saldo Awal = Saldo Valas Pada Awal Periode x Kurs Tengah BI
- ❖ Mutasi Penerimaan = Jumlah {Transaksi Penerimaan x Kurs Transaksi}
- ❖ Mutasi Pengeluaran = Jumlah {Transaksi Pengeluaran x Kurs Transaksi}
- ❖ Saldo Akhir = Saldo Valas Pada Akhir Periode x Kurs Tengah BI

Dengan catatan:

- a. Saldo Awal merupakan saldo awal Dana SAL BUN pada RKUN USD dan Rekening Penempatan USD sebelum Pemenuhan Dana SAL BUN ke Rek SAL USD berdasarkan LKPP 2023 Audited yaitu sebesar USD8.415.517.653
- b. kurs tengah BI pada posisi saldo awal tanggal 2 Januari 2024 yaitu Rp15.439
- c. Mutasi Penerimaan merupakan transaksi masuk ke Rek SAL USD, dengan rincian sebagai berikut:
 - O Tgl 19 April 2024 : pengembalian SAL untuk kebutuhan kas temporer sebesar USD 113 juta dengan kurs transaksi Rp16.177
 - O Tgl 13 September 2024 : pengembalian SAL untuk kebutuhan kas temporer sebesar USD 1 miliar dengan kurs transaksi Rp15.421
- d. Mutasi Pengeluaran merupakan transaksi keluar dari RKUN USD dengan rincian sebagai berikut:
 - O Tgl 5 April 2024 : peminjaman SAL untuk kebutuhan kas temporer sebesar USD 113 juta dengan kurs transaksi Rp15.907
 - O Tgl 10 September 2024 : peminjaman SAL untuk kebutuhan kas temporer sebesar USD 1 miliar dengan kurs transaksi Rp15.446
- e. kurs tengah BI pada posisi pelaporan LK Tahun 2024 yaitu Rp16.157

Berdasarkan formula dimaksud, perhitungan selisih kurs *unrealized* disajikan sebagai berikut:

$$\text{Unrealized gain (loss)} = (8.415.517.653 \times 16.157) - \{(8.415.517.653 \times 15.416) + ((113.000.000 \times 16.177) + (1.000.000.000 \times 15.421) - (113.000.000 \times 15.907) + (1.000.000.000 \times 15.446))\} = 6.230.388.580.873$$

sehingga selisih kurs *unrealized* dalam rangka pengelolaan Dana SAL BUN pada Rekening SAL USD per tanggal 31 Desember 2024 mengalami *gain* (selisih kurs *unrealized loss*).

6. Rekening Pengeluaran Lainnya di Bank Umum SKN RTGS *In transit*

Berdasarkan *lesson learned* tahun 2023 yaitu terjadi ketidakselarasan dalam penyaluran dana SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dengan aliran kas keluar dari RKUN dan RPKBUN yang disebabkan oleh berakhirnya operasional SKN-BI/BI-RTGS, telah dilakukan langkah-langkah mitigasi sebagai berikut:

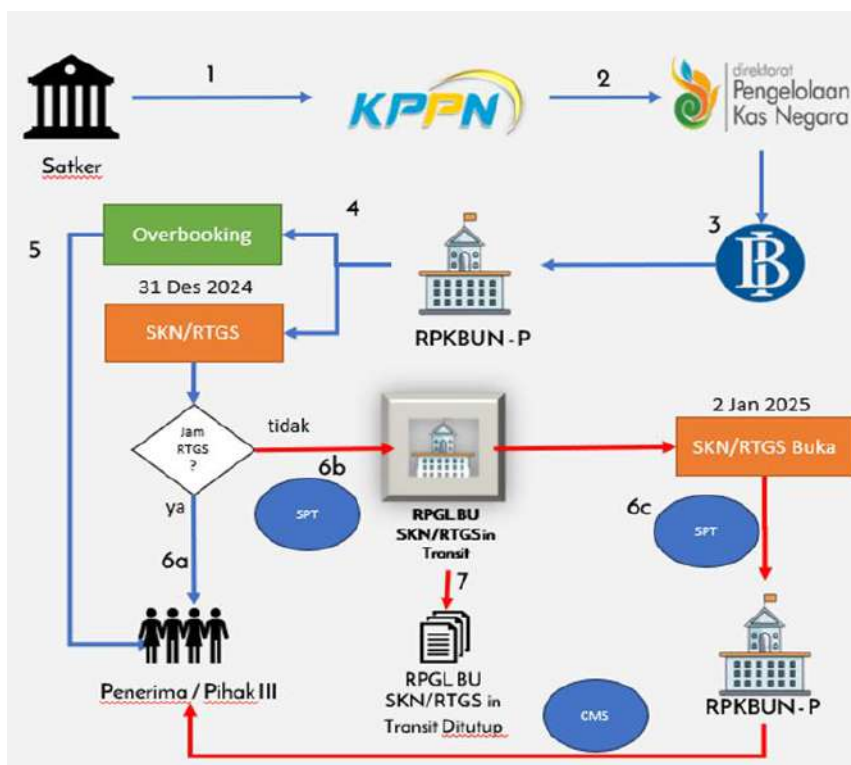
- a. Pemetaan potensi risiko.

- b. Peningkatan koordinasi antar unit di Internal Kemenkeu.
- c. Koordinasi dengan Bank Indonesia tentang perpanjangan sistem SKN-BI/BI-RTGS

berdasarkan hasil langkah-langkah mitigasi dimaksud, terdapat potensi risiko serupa pada akhir tahun 2024, terutama pada belanja Kementerian/Lembaga (K/L) untuk proyek strategis seperti Proyek IKN, kebutuhan optimalisasi penyerapan anggaran akibat reorganisasi kementerian/lembaga, belanja pada Bendahara Umum Negara (BUN) untuk transaksi Penyertaan Modal Negara (PMN), dan transfer ke daerah. Risiko ini dapat menjadi signifikan jika aliran kas atas beban SP2D tidak terselesaikan akibat berakhirnya operasional sistem perbankan Bank Indonesia di penghujung tahun.

Guna mengantisipasi kebijakan akhir tahun yang masih dinamis, diperlukan mitigasi paling akhir dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-18/PB/2024 tentang Mekanisme Penyelesaian Penyaluran Dana SP2D yang Belum Dapat Diselesaikan pada Akhir Tahun anggaran 2024. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa SP2D yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2024 tetap dapat disalurkan secara optimal meskipun operasional sistem SKN-BI/BI-RTGS telah berakhir.

Sebagai amanat dari PER-18/PB/2024 telah dibuka rekening pengeluaran lainnya di masing-masing Bank Operasional dengan proses bisnis sebagai berikut:



Selain penyiapan mitigasi akhir, telah diatur ketentuan dropping dana mendahului SP2D berdasarkan perkiraan kebutuhan pengeluaran negara sampai dengan 31 Desember 2024 pada Pasal 53 PER-13/PB/2024 Tentang Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2024.

Penggunaan Rekening pada Akhir Tahun 2024

Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat permintaan dropping dana mendahului xml dengan data sebagai berikut:

No	Unit	ND Permintaan	ND Pemindahbukuan	Tgl	Tujuan Dropping	Jumlah Dropping
1	DJKN	ND-939/KN/2024	S-707/PB.3/2024	31 Des 2024	BRI	1.500.000.000.000
2	DJKN	ND-939/KN/2024	S-708/PB.3/2024	31 Des 2024	MANDIRI	6.970.230.000.000
3	DJKN	ND-939/KN/2024	S-709/PB.3/2024	31 Des 2024	BTN	3.000.000.000.000
Jumlah						11.470.230.000.000

Permintaan dropping dana tersebut dilakukan dalam rangka penyelesaian persyaratan administrasi pembayaran PMN belum dapat dipenuhi dalam batas waktu jam operasional sistem BI-RTGS/SKN-BI. Sampai dengan batas waktu layanan perbankan, SP2D belum diterbitkan sehingga dana Rp11,47 triliun dipindahbukukan ke RPgI BU SKN RTGS *In transit* pada masing-masing Bank Operasional.

Rincian saldo di RPgI BU SKN RTGS *in transit*:

No	No SPM	Penerima	Bank Operasional	No SP2D	Tgl SP2D	Nilai SP2D
1	00001T/999986/2024	LPEI	MANDIRI	240191302073178	31 Des 2024	500.000.000.000
2	00002T/999986/2024	LPEI	BRI	240191301077112	31 Des 2024	1.500.000.000.000
3	00003T/999986/2024	LPEI	BTN	240191304025509	31 Des 2024	3.000.000.000.000
4	00001T/977191/2024	PT SMF	MANDIRI	240191302073177	31 Des 2024	1.891.000.000.000
5	00007T/986917/2024	Industri KA	MANDIRI	240190302000045	31 Des 2024	965.000.000.000
6	00008T/986917/2024	KAI	MANDIRI	240190302000044	31 Des 2024	2.000.000.000.000
7	00009T/986917/2024	PT. Pelayaran Nasional Indonesia	MANDIRI	240190302000043	31 Des 2024	1.500.000.000.000
Jumlah						11.356.000.000.000

Berdasarkan hal-hal diatas, sampai dengan akhir tahun 2024 Saldo RPgI *in transit* sebesar Rp11,47 triliun yang berasal dari SP2D PMN tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp11,356 triliun yang disalurkan pada tanggal 2 Januari 2025 serta Rp114,23 miliar merupakan kelebihan dropping dana pada Bank Mandiri yang telah dilakukan penihilan pada tanggal 2 Januari 2025. Saldo RPgI *in transit* setelah tanggal 2 Januari 2025 sudah nihil.

D.3.2. BA 999.01

- Utang pemerintah Indonesia dapat diklasifikasi berdasarkan utang luar negeri dan utang dalam negeri sebagaimana definisi dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI). Utang luar negeri pemerintah adalah termasuk nilai Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk, sedangkan Utang Dalam Negeri adalah utang pemerintah yang dimiliki oleh penduduk.

Rincian dengan klasifikasi tersebut sebagai berikut:

No.	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah
		valas (Rp)	Rupiah (Rp)	(Rp)
1	Utang Luar Negeri			
a	SBN yang dimiliki oleh bukan penduduk	1.334.483	867.342	2.201.825

No.	Jenis Utang	Denominasi Mata Uang		Jumlah
		valas (Rp)	Rupiah (Rp)	(Rp)
	b Pinjaman luar negeri	1.035.914	-	1.035.914
	Jumlah Utang Luar Negeri	2.370.397	867.342	3.237.739
2	Utang Dalam Negeri			
	a SBN yang dimiliki oleh penduduk	119.545	5.318.089	5.437.635
	b Pinjaman dalam negeri	-	51.254	51.254
	Jumlah Utang Dalam Negeri	119.545	5.369.343	5.488.889
	Jumlah Utang Luar Negeri dan Utang Dalam Negeri pemerintah	2.489.943	6.236.685	8.726.628

*) Data tabel di atas adalah nilai pokok atas utang (tidak memperhitungkan unamortized discount dan unamortized premium)

Sebagaimana tabel di atas yang dimaksud dengan penduduk adalah suatu unit ekonomi baik Orang atau Badan yang berdomisili atau berencana berdomisili di suatu negara sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang pusat kegiatan ekonomi utamanya berada pada negara domisili tersebut. Yang tidak masuk kriteria tersebut dikategorikan bukan penduduk (*Part IV Balance of Payments Manual (BOPM) IMF, Edisi 4, Public Sector Debt Statistic: Guide for Compilers and Users Tahun 2013 dan External Debt Statistics: Guide for Compiler and User Tahun 2014*).

Seluruh SBN yang diterbitkan di pasar domestik dan pasar internasional diklasifikasikan sebagai Utang Dalam Negeri sesuai dengan Bultek SAP Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua.

- Penyajian *Discount* dan *premium* pada Neraca pada Tahun 2024 disajikan secara rinci sebagaimana dimuat pada Lampiran 14, 15, 17, 18 dan 19. Adapun penggunaan koefisien dalam perhitungan *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi (*Unamortized Discount* dan *Unamortized Premium*) atas seri-seri SBN yang diterbitkan sebelum tahun 2007, perhitungan nilainya yang disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2007 (*Audited*) menjadi saldo awal *Discount* dan *Premium* yang belum diamortisasi untuk tahun-tahun selanjutnya. Seri SBN yang diterbitkan mulai 2007, nilai *unamortized* diskon/premium disajikan pada neraca dengan memperhitungkan amortisasinya menggunakan metode garis lurus dan koefisiennya sebesar nilai *unamortized* diskon/premium saat penerbitan yang diperhitungkan selama umur utang tersebut sampai dengan tanggal pelunasannya.
- BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN pada penerbitan SBSN sampai dengan Tahun 2024 adalah sejumlah 1.076 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) dengan nilai sebesar Rp256.239.795.312.019,00. Seluruh BMN yang digunakan sebagai *underlying asset* SBSN sampai dengan Tahun 2024 merupakan BMN yang telah menggunakan nilai revaluasi.
- Outstanding* SBSN per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.566.888.474.000.000,00 (menggunakan kurs pelaporan). Adapun *Outstanding* aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.583.618.137.996.040,00 yang terdiri dari:
 - BMN sebesar Rp923.669.722.366.089,00;
 - Proyek sebesar Rp 654.093.415.629.952,00; dan
 - Jasa sebesar Rp5.855.000.000.000,00.

Dalam rangka memenuhi ketentuan PMK Nomor 99/PMK.08/2021 Tentang Perubahan atas PMK 205/PMK.08/2017 Tentang Penggunaan BMN Sebagai Dasar penerbitan SBSN dan PMK Nomor 100 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Proyek Sebagai Dasar Penerbitan SBSN, pada tahun 2023 telah dilakukan penggantian BMN yang menjadi *underlying asset* baik berupa BMN dan proyek.

5. Dari Pinjaman Luar Negeri yang dikelola Pemerintah terdapat 59 *Oustanding* Pinjaman berasal dari IsDB. Dari pinjaman IsDB tersebut, terdapat 2 pinjaman dengan status *closing date* tahun 2024 dan 9 pinjaman berstatus *on going* (masih berjalan) sebagaimana pada Lampiran LDCPL3, selebihnya telah memasuki periode pembayaran cicilan kewajiban. Pinjaman IsDB tersebut menggunakan beberapa akad yaitu: *Loans*, *Istisna*, *Installment sale* dan *Ijarah muntahiyah Bittamlik*, namun dari bisnis proses perencanaan, pelaksanaan, pencairan, dan pertanggungjawaban, serta pencatatan tetap menggunakan dan berpedoman pada regulasi terkait pengelolaan utang dan sistem akuntansi utang pemerintah (SAUP). Atas penarikan pinjaman tersebut akan dilakukan pembayaran cicilannya dan IsDB mengenakan tambahan kewajiban yang harus dibayar sesuai akadnya (antara lain *Future Value*, *Service Fee*, *Advance Payment*, *Markup*) yang perlakuannya oleh Pemerintah diperlakukan sebagai biaya/imbal hasil/sewa.

D.3.3. BA 999.02

Penyusunan Laporan Keuangan UAP BUN BA 999.02 Tahun 2024 (*Audited*) mencakup pendapatan hibah terencana maupun langsung yang telah dilakukan pengesahan sesuai amanat PMK Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah serta PMK Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, serta PMK Nomor 195/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 39 PMK No.99/PMK.05/2017 bahwa PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah. Berdasarkan pasal tersebut, sepanjang belum terdapat BAST antara pemberi dan penerima hibah, baik KL maupun Kementerian Keuangan belum dapat mengakui hal tersebut sebagai pendapatan hibah tahun berjalan. Hal tersebut karena belum terdapat perpindahan kepemilikan serta peralihan hak dan kewajiban dari donor kepada penerima hibah.

D.3.4. BA 999.03

D.3.4.1. Kondisi Status ILKPN

1. Kondisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 Audited

Laporan Keuangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai UAKPA BUN BA 999.03 Investasi Pemerintah pada Tahun 2024 *Audited* telah disusun berdasarkan ILKPN yang disampaikan kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Adapun rekapitulasi status laporan keuangan perusahaan negara (termasuk BUMN dalam proses likuidasi) dirinci pada tabel berikut:

	Status Terakhir	Jumlah Perusahaan
BUMN	<i>Audited</i> 2024	45
	<i>UnAudited</i>	19
	Lainnya	5
	Total	69
Minoritas	<i>Audited</i> 2024	28
	<i>UnAudited</i> 2024	24
	Lainnya	2
	Total	54

Pada ILKPN Tahun 2024 *Audited* PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) telah dikeluarkan dari ILKPN dengan mempertimbangkan telah terdapat surat dari Tim Kurator PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (dalam pailit) tanggal 24 Januari 2025 yang menyatakan “tidak ada potensi Penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah”.

Selain itu, pada ILKPN Tahun 2024 Audited PT Istaka Karya juga telah dikeluarkan dari ILKPN dengan mempertimbangan telah terdapat surat dari Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit) tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan bahwa “tidak ada potensi Penerimaan Negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah”.

Beberapa BUMN belum menyelesaikan Laporan Keuangan Audited 2024 termasuk perusahaan yang sedang menjalani proses restrukturisasi di antaranya:

No	BUMN	Alasan Keterlambatan	Audit Terakhir
1	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	Adanya pergantian KAP sehingga membutuhkan waktu tambahan terkait penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian	TB 2023
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	1. Masih terdapat penyelesaian audit laporan keuangan entitas PT Perkebunan Nusantara Group. 2. Terdapat perhitungan Aktuaris untuk tahun 2024, 2023, dan 2022 yang masih dalam proses perhitungan dan reviu oleh KAP PWC. 3. Keterbatasan waktu yang diberikan oleh KAP EY kepada KAP PWC dalam melakukan reviu kertas kerja audit terdahulu. 4. Terdapat potensi dampak atas temuan isu akuntansi yang berpotensi adanya penyajian kembali laporan keuangan tahun 2022 dan 2023, sehingga memerlukan waktu untuk memastikan kembali bahwa dampak dari penyajian kembali tersebut telah tepat sesuai dengan kaidah PSAK yang berlaku.	TB 2023
3	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Menunggu konfirmasi atas permohonan keringanan atas Pokok Penerimaan Negara Bukan Pajak <i>Track Access Charge</i>	TB 2023
4	PT LEN Industri (Persero)	Proses Finalisasi Angka dan Temuan Audit pada PTDI, PAL, Pindad dan LEN konsolidasi	TB 2023
5	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	1. Menunggu proses penyelesaian audit di entitas anak perusahaan. 2. KAP juga meminta dilakukan revaluasi aset tetap tanah dan properti investasi pada seluruh entitas ID Food group.	TB 2023
6	PT Bio Farma (Persero)	Masing-masing entitas anak yang dikonsolidasi masih dalam proses penyelesaian audit	TB 2023
7	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dalam proses pembubaran/likuidasi	TB 2023
8	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Sedang dalam proses restrukturisasi dan/atau terkendala penyelesaian pembayaran KAP untuk Audit tahun-tahun buku sebelumnya sehingga berdampak pada penyelesaian Audit TB 2024	TB 2023
9	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)		TB 2023
10	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)		TB 2023
11	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)		TB 2023
12	PT PDI Pulau Batam (Persero)		TB 2023
13	PT Boma Bisma Indra (Persero)		TB 2023
14	PT Semen Kupang (Persero)		TB 2023
15	PT Barata Indonesia (Persero)		TB 2023
16	PT Primiissima (Persero)		TB 2022
17	PT Amarta Karya (Persero)		TB 2022
18	PT Indah Karya (Persero)		TB 2021
19	PT Djakarta Lloyd (Persero)		TB 2020
20	PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi)		

2. Kejadian Penting setelah Tanggal Pelaporan (Subsequent Event)

Melalui UU No. 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah menetapkan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (“Danantara”) yang membawahi Holding Operasi (PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)) dan Holding Investasi.

Pada tanggal 21 Maret 2025 melalui PP No. 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia

untuk Pendirian Holding Operasional, Pemerintah melakukan pengalihan seluruh saham Seri B dan/atau Seri C milik Negara Republik Indonesia pada 52 BUMN kepada Holding Operasi, yaitu:

a. 39 BUMN PT (Persero)

- 1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- 2) PT Pertamina (Persero);
- 3) PT TASPEN (Persero);
- 4) PT Mineral Industri Indonesia (Persero)
- 5) PT Pupuk Indonesia (Persero)
- 6) PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
- 7) PT Utama Karya (Persero)
- 8) PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
- 9) PT Kereta Api Indonesia (Persero)
- 10) PT ASABRI (Persero)
- 11) PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
- 12) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- 13) PT Pos Indonesia (Persero)
- 14) PT Bio Farma (Persero)
- 15) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
- 16) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
- 17) PT LEN Industri (Persero)
- 18) PT Brantas Abipraya (Persero)
- 19) PT Industri Kereta Api (Persero)
- 20) PT BPUI (Persero)
- 21) PT Danareksa (Persero)
- 22) PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
- 23) PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
- 24) PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero)
- 25) PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)
- 26) PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)
- 27) PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- 28) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
- 29) PT Amarta Karya (Persero)
- 30) PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
- 31) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
- 32) PT Primiissima (Persero)
- 33) PT PDI Pulau Batam (Persero)
- 34) PT Semen Kupang (Persero)
- 35) PT Boma Bisma Indra (Persero)
- 36) PT Produksi Film Negara (Persero)
- 37) PT Rekayasa Industri
- 38) PT Perkebunan Nusantara I
- 39) PT Perkebunan Nusantara IV

b. 13 BUMN PT (Persero) Tbk

- 1) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- 2) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- 3) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- 4) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- 5) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
- 6) PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- 7) PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
- 8) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- 9) PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
- 10) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- 11) PT Adhi Karya (Persero) Tbk
- 12) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
- 13) PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Selanjutnya, pada tanggal yang sama melalui PP No. 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Negara Republik Indonesia melakukan penyertaan modal negara pada BPI Danantara yang berasal dari pengalihan 99% saham milik negara berupa saham Seri B pada PT Biro Klasifikasi Indonesia, sehingga komposisi pemegang saham PT Biro Klasifikasi Indonesia menjadi:

- a. Negara Republik Indonesia melalui Menteri BUMN memiliki 1% saham berupa saham Seri A Dwiwarna.
- b. BPI Danantara memiliki 99% saham berupa saham seri B.

Selanjutnya, dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional, kepemilikan Negara dalam hal ini Saham Seri B dan Seri C telah sepenuhnya dialihkan ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Holding Operasional.

Akibat dari hal tersebut, Dividen BUMN untuk Tahun Buku 2024 untuk BUMN tertutup disetorkan kepada para Pemegang Saham sesuai pada tanggal RUPS dan untuk BUMN Tbk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana penjelasan dalam kejadian setelah tanggal neraca, maka Pemerintah melalui Menteri BUMN masih mempunyai saham 1 lembar pada BUMN dan 1% pada PT BKI (selaku Holding Operasional). Terkait hal tersebut, saat ini masih dilakukan kajian mengenai pengelolaan dividen 1 lembar dan 1% saham. Adapun dividen dari laba BUMN tahun buku 2024 yang sudah disetorkan ke Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2025 adalah sebesar Rp10,88 triliun yang merupakan dividen interim dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

D.3.4.2. Perkembangan BUMN/Perusahaan Negara yang mengalami Defisit Ekuitas

Jumlah BUMN/Perusahaan Negara yang mengalami defisit ekuitas pada Tahun 2024 Audited adalah sebagai berikut:

No	Perusahaan	Ekuitas Atribusi Entitas Pengendali (Rp Juta)	
		31 Desember 2023	31 Desember 2024
1	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)*	(1.650.787)	-
2	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	(807.577)	(703.250)
3	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)**	(270.343)	(415.058)
4	PT ASABRI (Persero)	(1.069.317)	(906.735)
5	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	(19.258.289)	(21.318.766)
6	PT Barata Indonesia (Persero)	(1.631.066)	(3.673.947)
7	PT Semen Kupang (Persero)	(516.171)	(539.373)
8	PT Indah Karya (Persero)	(4.200)	(645.615)
9	PT Primmisima (Persero)	(17.776)	(47.631)
10	PT Produksi Film Negara (Persero)	(416)	(4.209)
11	PT PANN (Persero)***	(5.807.943)	-
12	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)*	(708.594)	-
13	PT Djakarta Lloyd (Persero)****	-	(13.664)

* PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) per 31 Desember 2024 tidak lagi mencatatkan ekuitas negatif.

** PT Asuransi Jiwasraya sedang dalam proses pembubaran (likuidasi).

***PT PANN (Persero) per 31 Desember 2024 telah terbit PP pembubarannya pada 17 Oktober 2024 (PP No. 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional).

**** PT Djakarta Lloyd per 31 Desember 2024 tercatat memiliki ekuitas negatif, sedangkan per 31 Desember 2023 masih memiliki ekuitas positif.

D.3.4.3. Estimasi Dari Dampak Finansial yang Diukur Kewajiban Penjaminan

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2024, kewajiban penjaminan adalah kewajiban yang menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam hal kementerian negara/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dimaksud tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman atau perjanjian kerjasama.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diatur bahwa Anggaran kewajiban penjaminan merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 999.03 (Pengelolaan Investasi Pemerintah) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai Pembantu Pengguna Anggaran (PPA) BA BUN 999.03.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 220/KMK.08/2019 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 j.o. PMK nomor 28/PMK.08/2022 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN sebagaimana diubah menjadi PMK 32/PMK.08/2021, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah untuk program

penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional (pasal 36 ayat (1) Undang-Undang nomor 20 Tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021), anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah untuk program PEN (dukungan *loss limit* pelaku UMKM dan dukungan *back stop loss limit* pelaku Korporasi), dan pengelolaan dana cadangan kewajiban penjaminan dalam rangka pelaksanaan anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah. Kemudian Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara juga ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran untuk program penugasan penyediaan pembiayaan infrastruktur daerah kepada Badan Usaha Milik Negara berdasarkan PMK nomor 125/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah.

Kewajiban penjaminan adalah:

- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau
- b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Amanat pengaturan pemberian jaminan

Sesuai Perpres Nomor 91/2007, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara.

Kemudian melalui Perpres Nomor 46/2019, Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM kepada kreditor perbankan yang menyediakan pendanaan kredit perbankan dalam rangka percepatan penyediaan air minum, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan Pemerintah tersebut menjadi beban utang PDAM apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 78/2010 dan Nomor 38/2015 pasal 17 juga memberikan jaminan terhadap proyek kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI), dan sebagaimana Perpres Nomor 78/2010 pasal 4: penjaminan infrastruktur diberikan atas risiko infrastruktur yang (a) lebih mampu dikendalikan, dikelola atau dicegah terjadinya, atau diserap oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) daripada Badan Usaha, (b) bersumber (*risk factor*) dari Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama, dan/atau (c) bersumber (*risk factor*) dari Pemerintah selain Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama.

Kemudian melalui Perpres Nomor 100/2014 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 117/2015, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Hutama Karya (Persero) dalam rangka pembangunan jalan tol di Sumatera.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 82/2015 memberikan jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran pinjaman PT PLN (Persero) kepada Lembaga Keuangan Internasional (LKI) yang menyediakan pendanaan kredit jangka panjang setara pinjaman Pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur.

Kemudian melalui Perpres Nomor 49/2017, Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT Kereta Api (Persero) dalam rangka mendukung proyek penyelenggaraan *Light Rail Transit/LRT* Jabodebek.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 14/2017 memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman dan obligasi PT PLN (Persero) dalam rangka mendukung percepatan Infrastruktur Ketenagalistrikan (35GW).

Kemudian melalui Perpres Nomor 58/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres 109/2020, Pemerintah memberikan jaminan atas risiko politik bagi Kementerian/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD dalam Perjanjian Kerjasama/dokumen yang dipersamakan dengan Badan Usaha dalam rangka mendukung Proyek Strategis Nasional.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat dari dampak pandemi Covid-19, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 (diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020), Pemerintah dapat memberikan penjaminan secara langsung dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk. Penjaminan secara langsung oleh Pemerintah hanya dapat diberikan kepada BUMN, sedangkan penjaminan melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk penjaminan atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Adapun tujuan pemberian penjaminan pemerintah tersebut untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.

Dalam rangka pelaksanaan penjaminan pemerintah melalui badan usaha penjaminan di Tahun 2020 kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pemerintah telah menugaskan/menunjuk PT Jaminan Kredit Indonesia/Jamkrindo (Persero) dan PT Asuransi Kredit Indonesia/Askindo (Persero) untuk melaksanakan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial atas kredit modal kerja yang diberikan oleh perbankan. Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan berupa pembayaran subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan dukungan *loss limit* kepada PT Jamkrindo (Persero) dan PT Askindo (Persero).

Selain melakukan penjaminan kepada pelaku UMKM, pemerintah juga memberikan penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, Pemerintah menugaskan/menunjuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan penugasan, Pemerintah memberikan dukungan *loss limit* yang ditujukan untuk membatasi risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. Dalam rangka pemberian dukungan *loss limit* tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan menugaskan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). PT PII sebagai pelaksana dukungan *loss limit* juga menerima dukungan Pemerintah berupa *Backstop Loss Limit* sebagai antisipasi adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan *loss limit* yang ditanggung oleh PT PII. Selain itu, bagi BUMN yang melakukan penugasan dari Pemerintah dan terdampak pandemik Covid -19, Pemerintah bersama PT PII juga memberikan penjaminan bersama untuk pinjaman kredit dari BUMN dimaksud.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 125/2022 dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Pemerintah melalui Perpres Nomor 107/2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 93/2021 dapat memberikan jaminan atas pinjaman pimpinan konsorsium badan usaha milik negara untuk memenuhi kewajiban penempatan modal pada perusahaan patungan yang dibentuk konsorsium BUMN Indonesia dan

konsorsium BUMN Tiongkok atau untuk memenuhi kewajiban membiayai perubahan harga (*cost overrun*) pada proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Karakteristik Kewajiban Penjaminan Pemerintah

Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur atau badan usaha baru akan timbul jika pihak yang dijamin (BUMN, BUMD, PJP/PJPSN/Badan Usaha) tidak mampu memenuhi kewajibannya (mengalami *default*). Akibatnya, kewajiban ini memiliki unsur ketidakpastian mengenai timbul/tidak timbulnya di masa depan, termasuk mengenai jumlahnya yang tidak dapat diukur secara pasti.

Latar belakang timbulnya penjaminan antara lain sebagai berikut:

- a. Perlu pembangunan infrastruktur sebagai penggerak perekonomian v.s. keterbatasan dana Pemerintah; dan
- b. Perlu dukungan fiskal dalam menarik peran swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta pembagian risiko yang wajar antara Pemerintah dan swasta.

Sebagai konsekuensi atas dukungan percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional, mekanisme penjaminan oleh Pemerintah diberikan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan kredit (perbankan dan obligasi) dan penjaminan investasi.

Penjaminan kredit diberikan untuk mendukung pelaksanaan proyek 10.000 MW tahap I, proyek percepatan penyediaan air minum, proyek jalan tol di Sumatera, proyek infrastruktur dengan skema pinjaman langsung, proyek LRT Jabodebek, dan proyek infrastruktur ketenagalistrikan, yaitu Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/atau obligasi atas keenam program penjaminan dimaksud yang tidak dapat dibayarkan oleh pihak terjamin. Sementara itu, penjaminan investasi diberikan bersama Pemerintah dan/atau PT PII (Persero) dalam menjamin kewajiban keuangan pada proyek KPBU dan penjaminan risiko politik oleh Pemerintah pada proyek strategis nasional.

Estimasi dari Dampak Finansial yang Diukur

Estimasi besaran alokasi anggaran kewajiban penjaminan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.458.986.000.000 yang dialokasikan untuk program percepatan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp823.986.000.000 dan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19 sebesar Rp635.000.000.000. Program penugasan infrastruktur daerah meskipun programnya masih berjalan namun tidak dialokasikan anggaran kewajiban penjaminannya. Sedangkan untuk program cadangan pangan pemerintah, jaminan pemerintah sudah selesai dengan berakhirnya fasilitas kredit di tanggal 2 April 2024. Adapun alokasi anggaran kewajiban penjaminan dalam APBN TA 2024 tersebut sebagai konsekuensi dan komitmen dalam penerbitan jaminan pemerintah dan untuk mendukung mitigasi risiko *default* dari program penjaminan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara (10.000 MW tahap I), penjaminan infrastruktur pada proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), penjaminan pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui pinjaman langsung dari lembaga keuangan internasional kepada BUMN, penjaminan pemerintah untuk percepatan proyek pembangunan jalan tol di Sumatera dan penjaminan pemerintah untuk percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 diatur bahwa anggaran kewajiban penjaminan pada APBN diakumulasikan ke rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah yang digunakan untuk pembayaran klaim pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutnya.

Sampai dengan akhir Desember 2024 jumlah akumulasi pemberian penjaminan terhadap penugasan proyek-proyek infrastruktur dari awal penerbitan jaminan tahun 2008 adalah 101 surat jaminan pemerintah dengan

nilai sebesar ekuivalen Rp654,07 triliun (Rp210,55 triliun, USD28,14 miliar, dan EUR1,04 miliar). Per akhir Desember 2024, 54 penjaminan masih berstatus aktif dengan nilai sebesar ekuivalen Rp485,76 triliun (Rp154,72 triliun, USD20,71 miliar, dan EUR1,04 miliar) dengan nilai *outstanding*/eksposur investasi sebesar Rp348,65 triliun (Rp96,36 triliun, USD15,59 miliar, EUR0,49 miliar, dan JPY75,77 miliar). Rincian portofolio kewajiban penjaminan yang masih aktif per program penjaminan sampai dengan akhir Desember 2024 (data *outstanding* per Triwulan 3 tahun 2024) disajikan dalam [lampiran LDCPL4](#)

Selanjutnya, terkait dengan penjaminan terhadap Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk tahun 2024 tidak terdapat penerbitan atau pemberian penjaminan. Hal tersebut dikarenakan PT RNI (Persero) selaku calon terjamin tidak melanjutkan proses permohonan penjaminan, dengan mempertimbangkan i) penugasan CPP kepada PT RNI (Persero) dari Badan Pangan Nasional tidak dilakukan perpanjangan ke tahun 2025, dan ii) tidak terlaksananya penandatanganan Perjanjian Kredit sebagai syarat permohonan penjaminan.

Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga

Anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada kreditur/ badan usaha akan diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
- b. Berdasarkan PMK Nomor 60/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya menjadi utang PDAM kepada Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat telah membayar klaim penjaminan ke Bank Pemberi Kredit, sedangkan Pemerintah Daerah memberikan dukungan kepada PDAM untuk menyelesaikan utang kepada Pemerintah, namun apabila Pemerintah Daerah tidak memberikan dukungan dan gagal memampukan PDAM, maka kewajiban pembayaran penyelesaian utang PDAM beralih kepada Pemerintah Daerah. Atas beban utang dimaksud, Pemerintah Daerah dapat: (i) membayar secara langsung melalui mekanisme penganggaran APBD tahun berjalan dan/atau (ii) mengkonversi beban menjadi pinjaman Pemerintah Daerah melalui perjanjian pinjaman antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan, dimana dalam hal terdapat tunggakan kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat berdasarkan perjanjian pinjaman, Pemerintah Daerah dapat dikenakan sanksi berupa pemotongan atas penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
- c. Berdasarkan PMK Nomor 8/PMK.08/2016 Tentang Perubahan PMK Nomor 260/PMK.011/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Pemerintah memberikan jaminan atas kewajiban finansial PJPK. Kewajiban finansial PJPK adalah kewajiban untuk membayar kompensasi finansial kepada badan usaha atas terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan Alokasi Risiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Kerjasama. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PJPK kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPK (PMK nomor

260/PMK.011/2010 pasal 25). Penjaminan untuk proyek ini dilakukan bersama antara Pemerintah dengan PT PII secara *risk sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 3, atau *amount sharing* (PMK nomor 260/PMK.011/2010 pasal 37 ayat (4))).

- d. Berdasarkan PMK Nomor 142/PMK.08/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera, apabila PT Utama Karya (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur/pemegang obligasi, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur/pemegang obligasi PT Utama Karya (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT Utama Karya (Persero).
- e. Berdasarkan PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah atas pembiayaan infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara, anggaran kewajiban penjaminan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah selaku pihak penjamin kepada pihak terjamin akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara.
- f. Berdasarkan PMK Nomor 135/PMK.08/2019 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 130/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- g. Berdasarkan PMK Nomor 148/PMK.08/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/ *Light Rail Transit* Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Dan Bekasi, setiap pelaksanaan atas pembayaran Jaminan Pinjaman atau Jaminan Obligasi menimbulkan akibat berupa timbulnya utang dari Terjamin kepada Penjamin.
- h. Berdasarkan PMK Nomor 30/PMK.08/2021 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN), kecuali jika Kementerian/Lembaga sebagai PJPSN.
- i. Berdasarkan PMK Nomor 28/PMK.08/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pelaksanaan pembayaran klaim dukungan *loss limit* yang berasal dari dana cadangan penjaminan, tidak mengakibatkan piutang Pemerintah dan/atau Regres Pemerintah.
- j. Berdasarkan PMK Nomor 27/PMK.08/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah untuk Pelaku Usaha Korporasi Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari LPEI/Pemerintah kepada Terjamin (pelaku usaha korporasi).
- k. Berdasarkan PMK Nomor 211/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Untuk Badan Usaha Milik Negara Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, pembayaran klaim atas pelaksanaan Penjaminan Pemerintah menimbulkan piutang dan/atau Regres dari PT PII/Pemerintah kepada Terjamin (BUMN penugasan).
- l. Berdasarkan PMK Nomor 34 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, pembayaran klaim penjaminan kepada Penerima Jaminan atas porsinya timbul piutang dalam bentuk Regres kepada Terjamin.

- m. Berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Ceka-eka Jakarta dan Bandung, pembayaran klaim penjaminan kepada Penerima Jaminan atas persinya timbul piutang dalam bentuk Regres kepada Terjamin.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Kewajiban Penjaminan

Sampai dengan Desember Tahun 2024, tidak terdapat gagal bayar (default) pihak terjamin (BUMN, BUMD, PJPK/PJPSN/Badan Usaha) yang mendapat jaminan Pemerintah untuk seluruh program penjaminan, sehingga Pemerintah tidak mempunyai kewajiban pembayaran klaim penjaminan kepada kreditur/badan usaha untuk seluruh program penjaminan atau NIHIL.

Dalam APBN TA 2024 telah dialokasikan anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp823.986.000.000,00 untuk alokasi penjaminan infrastruktur nasional dan Rp635.000.000.000,00 untuk alokasi penjaminan program Pemulihan Ekonomi Nasional. Alokasi tersebut telah dipindahbukukan ke rekening dana cadangan penjaminan pada bulan Desember tahun 2024. Adapun saldo akumulasi pada rekening dana cadangan penjaminan pemerintah sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar Rp13.268 miliar dengan dana sebesar Rp500 miliar di tempatkan dalam instrumen investasi. Saldo rekening dana jaminan penugasan pembiayaan infrastruktur daerah sebesar Rp406,87 miliar.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Akuntansi 23: Akuntansi Transaksi Optimalisasi Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah, PMK 69 tahun 2023 menyebutkan bahwa Dana Cadangan Penjaminan disajikan sebagai dana cadangan pada neraca LKBUN dan LKPP dengan nilai nominal Dana Cadangan Penjaminan memperhitungkan nilai Dana Cadangan Penjaminan yang ditempatkan ke dalam instrumen Investasi Pemerintah. Sehingga dalam rangka penyajian Dana Cadangan Penjaminan pada LKBUN, maka dilakukan penjurnalan manual pada level konsolidasi atas transaksi optimalisasi dana cadangan yang ditempatkan pada instrumen investasi pemerintah tersebut.

D.3.4.4. Pembentukan Subholding PalmCo (PTPN IV) dan SupportingCo (PTPN I)

Dalam rangka mewujudkan kemandirian di bidang ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan melalui hilirisasi sektor pangan, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan juga membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim melalui akselerasi pengembangan energi terbarukan Kementerian BUMN menggabungkan 13 perusahaan di bawah holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menjadi dua subholding yakni PalmCo dan SupportingCo.

PalmCo didorong untuk fokus meningkatkan hilirisasi produk-produk kelapa sawit serta diharapkan menjadi Perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan yang mencapai lebih dari 600.000 hektare pada 2026. Adapun, SupportingCo akan menjadi perusahaan pengelola aset Perkebunan unggul, yang mencakup kegiatan pemanfaatan aset Perkebunan melalui optimalisasi dan divestasi aset, pengelolaan tanaman Perkebunan, serta diversifikasi usaha lainnya. Menteri BUMN melalui surat Nomor S-595/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 perihal Persetujuan atas Integrasi PTPN Grup telah menyetujui:

1. Pemisahan tidak murni (spin off) usaha perkebunan kelapa sawit dan karet PT PTPN III (Persero) dengan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva bisnis kelapa sawit dan karet PT PTPN III (Persero) kepada PT PTPN IV;

2. Penambahan penyertaan modal PT PTPN III (Persero) kepada PT PTPN IV sebanyak 2.456.849 saham atau seluruhnya sebesar Rp2.456.849.000.000,- atau setara dengan 2,93% saham dalam PT PTPN IV sebagai kompensasi dari pemisahan tidak murni;
3. Penggabungan PTPN V, PTPN VI dan PTPN XIII ke dalam PTPN IV (Sub Holding PalmCo); serta
4. Penggabungan PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, dan PTPN XIV ke dalam PTPN I (Sub Holding SupportingCo).

Terkait dengan penggabungan pada poin 3 dan 4 di atas, persentase kepemilikan pemerintah pada PTPN I dan PTPN IV pasca penggabungan berubah, sedangkan untuk investasi pemerintah pada PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIV, PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII yang pada periode sebelumnya dicatat melalui metode biaya telah dihapuskan sebagaimana penerapan atas perusahaan negara yang di merger sebelumnya.

Perubahan kepemilikan negara atas PTPN I dan PTPN IV

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074929.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara I, terdapat perubahan kepemilikan saham dikarenakan adanya pembentukan SubHolding SupportingCo dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jenis dan Lembar Saham	Nilai
1	PT PTPN III (Persero)	7.995.757 Seri B	7.995.757.000.000
2	Negara Republik Indonesia	1 Seri A	1.000.000
3	Negara Republik Indonesia	946.238 Seri B	946.238.000.000
Total			8.941.996.000.000

Dengan adanya perubahan ini, kepemilikan negara pada PT PTPN I yang semula 24% menjadi 10,58%. Sehingga pencatatan PT PTPN I dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara yang semula dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) menjadi metode biaya (*cost method*).

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0074926.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara IV, terdapat perubahan kepemilikan saham dikarenakan adanya pembentukan SubHolding PalmCo dengan rincian sebagai berikut:

No	Pemegang Saham	Jenis dan Lembar Saham	Nilai
1	PT PTPN III (Persero)	5.344.622 Seri B	5.344.622.000.000
2	Negara Republik Indonesia	1 Seri A	1.000.000
3	Negara Republik Indonesia	593.846 Seri B	593.846.000.000
Total			5.938.469.000.000

D.3.4.5. Perkembangan Pembubaran Perusahaan Negara

Berdasarkan arahan Presiden RI dalam Rapat Internal Pembentukan Holding Danareksa – PPA tanggal 8 Maret 2021 dan Rakor KBUMN tanggal 14 Oktober 2021 mengenai BUMN yang mengalami kinerja operasional dan keuangan yang buruk untuk dilakukan penutupan. Dalam rangka menindaklanjuti arahan

tersebut Menteri BUMN telah menyampaikan rencana pembubaran Tujuh BUMN kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor SR-1009/MBU/12/2021 tanggal 22 Desember 2021.

Tujuh Perusahaan Negara yang dinilai tidak layak dipertahankan sehingga diusulkan untuk dilakukan pembubaran, antara lain PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), dan PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero). Menteri Keuangan telah memberikan tanggapan melalui surat No. S-494/MK.06/2022 tanggal 7 Juni 2022 yang menyampaikan sependapat tujuh BUMN tersebut dapat dibubarkan. Selain 7 (tujuh) BUMN tersebut, PT Asuransi Jiwasraya dilikuidasi berdasarkan surat nomor S-30/MBU/01/2025 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya tanggal 22 Januari 2025.

Berikut merupakan penjelasan atas proses pembubaran BUMN dan pencatatannya dalam ILKPN Tahun 2024:

1. PT Iglas (Persero)

- Telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat keputusan RUPS Nomor: S-149/MBU/03/2022 pada tanggal 10 Maret 2022. Pada tanggal 3 April 2023 sudah diterbitkan PP No. 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Gelas.
- PT Iglas (Persero) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan Keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.15/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Sby tanggal 23 November 2023. Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (PKPU), khususnya pasal 16 jo. Pasal 69 Undnag-undnag PKPU, Dimana segala tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit menjadi kewenangan dari Kurator.
- Pada tanggal 13 Agustus 2024, telah dilakukan pertemuan antara Direktorat Lelang Kementerian Keuangan, PT PPA, dan PT BNI (Persero) Tbk, dan disepakati bahwa akan dilakukan pelaksanaan Lelang Bersama antara aset yang menjadi boedel pailit PT Iglas (Persero) dan aset yang dimiliki PT PPA (milik PT Iglas yang dibeli oleh PT PPA sehubungan dengan upaya restrukturisasi menyeluruh dan penyelesaian kewajiban PT Iglas).
- Sebagai informasi, telah dilakukan penjualan aset scrap pada bulan September 2024 senilai Rp26 Miliar, Hingga saat ini belum dilakukan pembagian oleh Kurator dikarenakan adanya gugatan keberatan atas daftar pembagian dari salah satu kreditur IGLAS. Namun, sudah terdapat upaya dari PT PPA untuk meminta Kurator segera melakukan pembagian dana hasil penjualan.
- Selanjutnya, telah dilakukan Lelang ke -2 aset boedel pailit dan aset PPA pada tanggal 15 November 2024 dan 19 Desember 2024, namun hasil Tidak Ada Penawaran" (TAP). Saat ini Kurator dalam proses pembaharuan penilaian aset oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai persiapan jadwal Lelang ke -3.
- Pada tanggal 21 Februari 2025, PT PPA telah bersurat kepada PT BNI (Persero) Tbk (tembusan kepada Kementerian BUMN) yang pada intinya menyampaikan bahwa proses lelang bersama dapat dilaksanakan mengingat bahwa penjualan aset secara lelang bersama dapat meningkatkan nilai penjualan boedel pailit, dengan tetap memperhatikan kepentingan hak dan kewajiban seluruh pihak terkait atas proses kepailitan PT Iglas (Persero).
- PT Iglas (Persero) mencatatkan ekuitas negatif

2. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

- Dinyatakan dibubarkan setelah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) Kertas Kraft Aceh tanggal 3 April 2023 yang kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) No. 08 tanggal 21 Juli 2023 dan ditegaskan kembali melalui Akta Penegasan Berita Acara RUPS Luar Biasa PT Kertas Kraft Aceh (Persero) No. 01 tanggal 2 Oktober 2023, yang secara definitif menetapkan pembubaran KKA dan penunjukan likuidator.
- Likuidator selanjutnya mencatat dan menginventarisasi aset dan kewajiban PT Kertas Kraft Aceh (Persero) ("KKA") dan menverifikasi bahwa utang KKA lebih besar dari aset, sehingga Likuidator wajib mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.
- KKA dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Mdn tanggal 6 Februari 2024.
- Pada Mei 2024 terdapat Daftar Piutang Tetap dengan total tagihan sebesar Rp2.448.267.595.750,-, dimana terdapat tagihan dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp153.989.814.242,-, KPP Besar Tiga Rp17.897.841.750,-, dan KPP Pratama Lhoksumawe Rp12.084.275.312,-.
- Telah dilakukan lelang sebagian kendaraan dan scrap pada 15 Agustus 2024 dengan nilai penjualan Rp3,1 M, lelang ke-1 atas tanah bangunan pada 10 Des 2024, lelang ke-2 pada 3 Feb 2025, dan lelang ke-3 pada 29 Apr 2025, dimana Tidak Ada Peminat ("TAP").
- PT Kertas Kraft Aceh (Persero) mencatatkan ekuitas negatif.
- Belum ada informasi lanjutan terkait progres penyelesaian piutang negara atas pembubaran PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

3. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)

- Dinyatakan pailit dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby Jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby pada tanggal 2 Juni 2022. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan PP No. 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines.
- Pada tanggal 9 Agustus 2022 terdapat Daftar Piutang Tetap dengan total tagihan sebesar Rp11.019.973.564.730. Dimana terdapat tagihan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari Rp 10.482.177, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Rp 82.836.718, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Rp 1.108.314.359.170, KPP Pratama Balikpapan Barat Rp 3.589.496, KPP Pratama Sidoarjo Utara Rp 145.222.155, dan KPP Pratama Tangerang Barat Rp 100.524.148.239 serta tagihan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 2.917.489.789.947.
- Sampai dengan April 2025 telah dilakukan penjualan sebagian besar aset oleh Kurator melalui lelang berupa pesawat, scrap, mesin, simulator, suku cadang, tanah bangunan, serta saham anak perusahaan yaitu MMF dan MTC dengan nilai total sebesar Rp267,7 miliar. Selain itu terdapat pula pendapatan Kurator dari dana KSO MNA dengan Pemkab Merauke sebesar Rp46,8 miliar. Aset MNA yang belum terjual adalah Aset Biak dan Jayapura.
- Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan pembagian hasil penjualan aset dalam 4 kali pembagian kepada para kreditur antara lain kepada Kemenkeu sebesar Rp 13.583.347.714 serta

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manokwari Rp 10.482.177, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke Rp 82.836.718, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat Rp 26.773.302.720, KPP Pratama Balikpapan Barat Rp 3.589.496, KPP Pratama Sidoarjo Utara Rp 145.222.155, dan KPP Pratama Tangerang Barat Rp 2.402.200.439.

- Tim Kurator PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (Dalam Pailit) telah menyampaikan surat tertanggal 24 Januari 2025 yang isinya menyampaikan:
 - a. Saat ini, progres kepailitan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (Dalam Pailit):
 - 1) Telah berhasil menjual asset-aset berupa tanah dan bangunan, scrap, dan saham PT MNA di PT Meprati Maintenance Facility dan PT Merpati Training Center; dan
 - 2) Terhadap hasil penjualan aset-aset tersebut, Tim Kurator telah melakukan pembagian sebanyak 4 (empat) tahap yaitu pada tanggal 23 Desember 2022, 23 Mei 2023, 23 Juni 2023, dan 14 Juni 2024.
 - b. Tidak ada potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham pemerintah.
 - c. Belum pernah dilakukan penyetoran ke Kas Negara.

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN tahun 2024 karena sudah tidak memiliki nilai investasi pemerintah sebagaimana mencatatkan ekuitas negatif. Selain itu, dinyatakan oleh Tim Kurator bahwa "tidak ada potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham pemerintah."

4. PT Kertas Leces (Persero)

- Dinyatakan pailit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 tanggal 28 Maret 2019. Pada tanggal 20 Februari 2023 sudah diterbitkan PP No. 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces.
- Tim Kurator PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) telah menyampaikan surat nomor 872/PAILIT-KL/AG-RB-FEB/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 yang isinya menyampaikan:
 - a. Sampai saat ini, proses kepailitan masih dalam tahap pemberesan sisa harta pailit oleh Tim Kurator.
 - b. Ada potensi Penerimaan Negara atas hasil pemberesan sisa harta pailit milik dan atas nama PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit), namun demikian masih terdapat kendala dalam proses pemberesan oleh karena 16 sertifikat milik dan atas nama perusahaan masih dikuasai oleh Kementerian Keuangan RI dan sampai saat ini tidak pernah diserahkan kepada Tim Kurator.
 - c. Adapun potensi Penerimaan negara akan diinformasikan apabila sisa harta Perusahaan telah laku terjual oleh Tim Kurator melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
 - d. Telah dilakukan pembagian sebanyak dua kali yakni sebesar Rp1,36 miliar pada tanggal 27 Oktober 2021 berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (dalam Pailit) tertanggal 30 Agustus 2021 dan sebesar Rp10,43 miliar pada tanggal 16 Agustus 2022 berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) tertanggal 1 Desember 2021.
- Total tagihan Leces berdasarkan Daftar Piutang Tetap adalah sebesar Rp3.001 miliar dimana terdapat utang kepada Kementerian Keuangan (yang terdiri dari utang eks Foreign Exchange Loan (SLA), Direktorat Dana Investasi (RDI), dan utang subordinasi) sebesar Rp749,8 miliar dan utang kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Besar Tiga sebesar Rp12,4 miliar.

- Atas utang kepada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga telah dilakukan pembagian sebesar Rp22,5 juta berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (dalam Pailit) tertanggal 30 Agustus 2021 dan sebesar Rp12,3 miliar berdasarkan Daftar Laporan Penerimaan, Pengeluaran dan Pembagian PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) tertanggal 1 Desember 2021.
- Pada tanggal 7 Maret 2025 telah dilaksanakan Rapat Kreditur Leces di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan kesimpulan rapat yaitu mengenai Evaluasi Kinerja Tim Kurator. PT Kertas Leces (Persero) (Dalam Pailit) mencatatkan ekuitas negatif.

5. PT PANN (Persero)

- Dilikuidasi berdasarkan keputusan RUPS LB yang dituangkan melalui Berita Acara Nomor 05,- tanggal 11 Oktober 2023 oleh Notaris Marliansyah, SH. Pada tanggal 17 Oktober 2024, sudah diterbitkan PP No. 43 Tahun 2024 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional.
- Pada tahun 2017, telah dilakukan upaya restrukturisasi SLA, berupa konversi menjadi Penyertaan Modal Negara ("PMN") non-tunai. Pada tahun 2019, Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat No. S-537/MK.05/2019 tanggal 16 Juli 2019 mengenai Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) menyetujui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Konversi utang pokok SLA, sebesar US\$261.304.449,49, menjadi PMN non-tunai; dan
 - b. Penghapusan utang non-pokok SLA, sebesar US\$199.792.520,10, yang mana memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") Republik Indonesia sebelum ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Persetujuan atas PMN non-tunai telah dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ("APBN") tahun fiskal 2020 dan APBN-Perubahan tahun fiskal 2020. Sedangkan, untuk penghapusan utang non-pokok SLA, telah memperoleh persetujuan dari DPR Republik Indonesia. Rancangan Peraturan Pemerintah ("RPP") telah dibahas dalam Panitia Antar Kementerian ("PAK") dan harmonisasi RPP. Namun demikian, mengingat PANN dianggap tidak lagi memiliki kapabilitas untuk mengembangkan usaha kedepannya, maka proses penetapan RPP tidak dilanjutkan.
- Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terkait penetapan pembubaran Perseroan (RUPS Definitif Pembubaran) telah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2025 dan berdasarkan keputusan RUPS tersebut, Likuidator secara resmi ditunjuk. Likuidator kemudian mengumumkan pada surat kabar terkait pembubaran PANN. Pengumuman tersebut juga menginformasikan periode pendaftaran tagihan kepada Likuidator, yaitu dari tanggal 26 Februari 2025 hingga 26 April 2025. Total tagihan yang didaftarkan oleh kreditur kepada Likuidator hingga 26 April 2025 adalah sebesar US\$461.096.969,59 dan Rp213.888.049.227,43. Pada tagihan tersebut, terdapat tagihan Pemerintah, yaitu melalui:
 - a. Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mendaftarkan tagihan sebesar USD461.096.969,59 atau setara dengan

- Rp7.523.258.155.830,44 (asumsi kurs tengah BI Rp16.316, sesuai yang didaftarkan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi Kemenkeu kepada Likuidator);
- b. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran mendaftarkan tagihan sebesar Rp45.776.300.000; dan
 - c. KPP Wajib Pajak Besar Empat (Ditjen Pajak) mendaftarkan tagihan sebesar Rp127.951.449.069.
- Saat ini, proses pembubaran PANN masih ada dalam tahap verifikasi aset dan kewajiban yang sedang dilakukan oleh Likuidator.
- PT PANN (Persero) mencatatkan ekuitas negatif.

6. PT Istaka Karya (Persero)

- Dinyatakan pailit dan harta pailit berada dalam keadaan insolven berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst pada tanggal 12 Juli 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan PP No. 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya.
- Saat ini, penanganan PT Istaka Karya (Persero) (Dalam Pailit) ("ISTAKA") dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan, dimana sedang dilakukan proses pemberesan boedel pailit hingga nantinya melakukan pencabutan status badan hukum ISTAKA pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Nilai Daftar Piutang Tetap ("DPT") ISTAKA sebesar Rp786.276.796.998,59, dimana terdapat tagihan pajak sebesar Rp4.500.000,- yang telah dibayar berdasarkan Pembagian Tahap Pertama hasil pemberesan harta pailit ISTAKA berupa penjualan scrap, piutang tertagih dan penjualan tanah di Pecatu Bali. Berdasarkan surat No. 003/PAILIT-IK/II/2024 tanggal 16 Januari 2024, Kurator telah menyampaikan kepada PPA, bahwa telah melaksanakan Pembagian Tahap Pertama kepada para Kreditur Preferan yaitu pajak sebesar Rp28.400.770,- (didalamnya termasuk Rp4.500.000,-), gaji terutang Rp9.777.369.166,- dan BPJS sebesar Rp427.364.713,-
- PT Istaka Karya (Persero) sudah dihapuskan untuk penyajian ILKPN tahun 2024 karena dianggap sudah tidak memiliki nilai investasi pemerintah sebagaimana adanya surat dari Tim Kurator PT Istaka Karya (Persero) PT Istaka Karya (Persero) (dalam pailit) tanggal 5 Juli 2024 yang menyatakan bahwa "tidak ada potensi penerimaan negara dari porsi kepemilikan saham Pemerintah".
- Progres penjualan aset ISTAKA oleh Kurator sebagai berikut: lelang aset Naragong, Bekasi 6 kali terakhir tanggal 8 Agustus 2024, lelang aset Pandansari, Bogor 5 kali terakhir tanggal 27 Februari 2025, lelang aset Sinarancang, Setupatok, dan Nanggela di Cirebon 1 kali tanggal 20 Desember 2024, lelang aset Kedungbunder, Cirebon 2 kali terakhir tanggal 20 Desember 2024 dan akan dilakukan lelang ke-3 pada tanggal 27 Mei 2025.

Selain itu, pada tanggal 26 dan 27 Februari 2025, serta tanggal 18 Maret 2025, dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RRI, dimana Kreditur BUMN terdaftar pada Daftar Piutang tetap Kreditur PT Istaka Karya (Persero), diminta untuk melepaskan hak tagihnya sehingga hasil penjualan aset boedel pailit dapat diprioritaskan untuk penyelesaian kewajiban pada kreditur UMKM dan penyelesaian pesangon karyawan.

7. PT Industri Sandang Nusantara (Persero)

- Telah dilaksanakan RUPS Pembubaran melalui surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-90/MBU/02/2022 pada tanggal 2 Februari 2022. Pada tanggal 17 Maret 2023 sudah diterbitkan PP No. 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.
- Tim Likuidator PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Likuidasi) telah menyampaikan surat tertanggal 5 Juli 2024 yang isinya menyampaikan:
 - a. Saat ini, progress likuidasi PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (Dalam Likuidasi) masih berlangsung.
 - b. Ada potensi Penerimaan negara dari porsi kepemilikan Saham Pemerintah.
 - c. Belum pernah dilakukan penyetoran ke kas negara.
- Progres penjualan aset ISN, telah dilakukan lelang atas aset patal Secang dan scrap ex Patal Cilacap pada Maret 2025 dengan nilai penjualan sebesar Rp201.27 miliar, penetapan pembagian secara keseluruhan ditargetkan pada April 2025. Untuk tahapan selanjutnya akan diterbitkan daftar pembagian atas penjualan aset serta penjualan aset ISN lainnya termasuk saham ABP.
- Walaupun dalam surat Tim Likuidator dinyatakan bahwa ada potensi Penerimaan Negara, tetapi penerimaan tersebut masih menunggu proses penjualan aset dan pembayaran kepada kreditur.
- PT Industri Sandang Nusantara (Persero) masih tetap dimasukkan dalam ILKPN tahun 2024 karena dianggap masih memiliki nilai investasi pemerintah.

8. PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

Dilikuidasi berdasarkan keputusan RUPS Nomor S-30/MBU/01/2025 perihal Rapat Umum Pemegang Saham Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Asuransi Jiwasraya tanggal 22 Januari 2025 dan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") nomor KEP 9/D.05/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Saat ini PP pembubaran belum diterbitkan dan masih dalam proses. PT Jiwasraya (Persero) masih tetap dimasukkan dalam ILKPN tahun 2024 karena hingga akhir 2024 masih dalam proses persiapan RUPS dan proses penerbitan PP Pembubaran.

9. PT Indah Karya (Persero)

Dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat per tanggal 26 November 2024 dalam Surat PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") Nomor S-92/PPA/DU/0125 tanggal 9 Januari 2025.

PT Indah Karya (Persero) masih tetap dimasukkan dalam ILKPN tahun 2024 karena hingga akhir tahun 2024 belum ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pembubarannya dan saat ini sedang diproses pengajuan Izin Prakarsa Pembubaran kepada Menteri BUMN sebagai tahap awal untuk selanjutnya ditetapkan dalam PP.

D.3.4.6. Integrasi Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan kebandarudaraan untuk menghadirkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang menjangkau wilayah 3TP serta menjaga distribusi logistik dan memperkuat kedaulatan negara, telah dilakukan proses merger antara PT Angkasa Pura I/AP I dan PT Angkasa Pura II/AP II menjadi PT Angkasa Pura Indonesia. Dengan dilakukannya penggabungan ini, seluruh hak dan kewajiban serta kekayaan AP I beralih karena hukum kepada PT Angkasa Pura Indonesia (semula AP II), sehingga kegiatan perusahaan di bandar udara yang telah diselenggarakan beserta aset perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh AP I selanjutnya akan diselenggarakan dan dimiliki/dikuasai oleh PT Angkasa Pura Indonesia (semula AP II). Penggabungan ini telah diresmikan dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum dan berlaku efektif tanggal 09 September 2024 dengan nomor AHU-AH.01.09-0249603.

D.3.4.7. Hibah Saham Seri A Dwiwarna Anak Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) ke Pemerintah Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Akta Notaris Lumassia, S.H. nomor 04, 05, 06, 07, dan 08 tanggal 26 November 2024 perihal Hibah Saham, telah disetujui adanya pelepasan penyertaan modal PIHC di PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang berupa 1 (satu) lembar saham milik PIHC di masing-masing anak perusahaan tersebut yang klasifikasinya diubah menjadi saham istimewa Seri A Dwiwarna kepada Negara Republik Indonesia secara hibah.

Dengan demikian, atas hibah satu lembar saham di masing-masing anak Perusahaan PIHC yang telah dilakukan kepada Pemerintah Negara RI mengakibatkan adanya penambahan entitas (1) PT Pupuk Kalimantan Timur; (2) PT Pupuk Kujang Cikampek; (3) PT Petrokimia Gresik; (4) PT Pupuk Iskandar Muda; dan (5) PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, yang dicatat sebagai PPKNM pada pelaporan periode 31 Desember 2024.

D.3.4.8. Hibah Saham Seri A Dwiwarna Anak Perusahaan Perum Perhutani ke Pemerintah Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Dewi Tenty Septi Artiany, S.H., M.H., M.Kn nomor 22 dan 24 tanggal 26 November 2024 perihal Hibah Saham, telah disetujui pelepasan penyertaan modal Perum Perhutani di PT Inhutani I dan PT Inhutani V berupa 1 (satu) lembar saham seri A milik Perum Perhutani dengan nominal Rp1.000.000,00 di masing-masing anak perusahaan tersebut kepada Negara Republik Indonesia secara hibah. Dengan demikian, atas hibah satu lembar saham tersebut mengakibatkan adanya penambahan entitas PT Inhutani I dan PT Inhutani V yang dicatat sebagai PPKNM pada pelaporan periode 31 Desember 2024.

D.3.4.9. Penambahan PMN berupa Barang Milik Negara (BMN)

Terdapat penambahan PMN berupa Barang Milik Negara (BMN) mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) dengan rincian sebagai berikut:

No	BUMN	PP	Nilai PMPP	Penjelasan
1	PT Brantas Abipraya (Persero)	PP No. 59 Tahun 2023	Rp211.981.785.000	BAST ditandatangani pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Kementerian PUPR dan PT Brantas Abipraya (Persero). Aset dan Ekuitas tersebut baru dicatat di Laporan Keuangan Brantas Abipraya pada periode SMT I / 2024.

No	BUMN	PP	Nilai PMPP	Penjelasan
2	PT Pertamina (Persero)	PP No. 40 Tahun 2024	Rp49.945.989.000	BAST ditandatangani pada tanggal 8 November 2024 oleh Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero). Aset dan Ekuitas tersebut baru dicatat di Laporan Keuangan Pertamina pada periode 2024.
Total			Rp261.928.774.000	

D.3.4.10. Capaian Output BUN

Dalam rangka menyajikan capaian output BUN, Dirjen Perbendaharaan selaku UA-BUN melalui nota dinas nomor ND-5/PB/2025 tanggal 3 Januari 2025, mewajibkan agar setiap UAPBUN/UAKPBUN untuk menyampaikan capaian output dan mengungkapkannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2024 terdapat delapan Satker yang mendapatkan alokasi pembiayaan investasi sebagaimana tercantum dalam dokumen DIPA.

1. BLU BPD LH (999303)

Pada tahun 2023, BLU BPD LH mendapatkan alokasi sebesar Rp1.212.670.000.000 yang merupakan alokasi untuk dana rehabilitasi mangrove. Alokasi tersebut telah dicairkan kepada BLU BPD LH sebesar Rp512.670.000.000 atau 42,28% dari alokasi yang telah dianggarkan dalam DIPA. Berdasarkan dokumen DIPA nomor SP DIPA- 999.03.1.999303/2024, rincian output dari alokasi tersebut adalah berupa Penyaluran Dana Rehabilitasi Mangrove.

Selanjutnya Satker BRGM melakukan pengesahan belanja ke KPPN yang dananya bersumber dari Dana Kelolaan BPD LH sebesar Rp322.114.659.182 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah SP2D	Nominal (Rp)
Belanja Barang	149	317.751.942.922
Belanja Modal	17	4.362.716.260
Jumlah	166	322.114.659.182

Ketentuan proses bisnis pengelolaan dana rehabilitasi mangrove berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove, yang secara substansi mengatur fund flow pembentukan dana cadangan rehabilitasi mangrove dari rekening kas umum negara untuk dikelola oleh Satker BPD LH dan penyaluran atas penggunaan dana cadangan rehabilitasi oleh Satker BPD LH kepada Satker BRGM untuk dipertanggungjawabkan sebagai realisasi anggaran Satker BRGM. Berdasarkan uraian tersebut, dalam pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove melibatkan 2 (dua) Satuan Kerja, yaitu BUN 999.03 BPD LH dan BA K/L BRGM, serta 1 (satu) Satuan Kerja BA K/L BPD LH.

2. Direktorat SMI, DJPb (961671)

Pada tahun 2024, Direktorat SMI mendapatkan alokasi sebesar Rp32.020.000.000.000, yang terdiri atas:

- Penyaluran Dana Investasi Pemerintah Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan pada BP Tapera sebesar Rp17.020.000.000.000.
- Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp15.000.000.000.000.

Dana FLPP

Penyaluran investasi Dana FLPP didasarkan Perjanjian Investasi antara Kementerian Keuangan dan BP Tapera Nomor PI-01/DSMI/2021 dan Nomor 4/PKS/BP-TPR/II/12/2021 tanggal 22 Desember 2021. Sebelumnya saldo Dana FLPP per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.596.006.813.852 dikelola oleh BLU PPDPP dan dicatat sebagai Investasi angka Panjang Non Permanen Lainnya Dana Bergulir. Pengalihan pengelolaan tersebut berdasarkan amanat UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang APBN Tahun 2021 Pasal 34; PP

Nomor 25 Tahun 2020 Pasal 64, PMK Nomor 111/PMK.06/2021 tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kepada BP Tapera dan Penarikan Kembali Dana FLPP oleh Pemerintah; serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-1100/MK.05/2021 tanggal 6 Desember 2021 hal Penunjukan BP Tapera sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).

Nilai pembukaan saldo awal atas pengalihan dana FLPP sebesar Rp60.675.114.000.000 berdasarkan hasil reviu BPKP. Nilai pembukaan saldo tersebut didasarkan pada Berita Acara Serah Terima (BAST) nomor 2250/BAST-Pg.KPA/2021 dan nomor BAST07/PB.4/2021 tanggal 24 Desember 2021, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bergulir FLPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran Investasi Pemerintah FLPP pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pada 2024 telah disalurkan dana FLPP sebesar Rp17.020.000.000.000 atau 100% dari total yang dianggarkan melalui mekanisme Rekening Investasi Bendahara Umum Negara kepada Operator Investasi Pemerintah yaitu BP Tapera. Selain itu terdapat penyeteroran imbal hasil dari dana FLPP pada Rekening Investasi BUN sebesar Rp510.725.086.120. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-18/PB/2022 tentang Tata Kelola Rekening Investasi Bendahara Umum Negara, saldo pendapatan tersebut berdasarkan Nota Dinas Direktur Sistem Manajemen Investasi Nomor ND-3/PB.4/2022 tentang Laporan Pemindahan Dana Dari Rekening Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) telah dipindahbukukan seluruhnya dari RIBUN ke RKUN dilaksanakan dalam rangka realisasi PNBP dari imbal hasil Investasi Pemerintah dan selanjutnya dari RKUN ke RIBUN Imbal Hasil.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan adalah satuan kerja yang berdiri tanggal 28 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/KMK.05/2012 tentang Penetapan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan pada Kementerian Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan ditetapkan sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).

Sesuai peraturan menteri keuangan tersebut, LPDP mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2024, terdapat alokasi investasi untuk dana pengembangan Pendidikan nasional sebesar Rp15.000.000.000.000 dan telah teralisasi seluruhnya kepada BLU LPDP. Rincian investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya BLU LPDP per Triwulan III 2024 dan Audited 2023 sebagai berikut.

Uraian	31-Des-24	31 Des 2023	Kenaikan (Penurunan)
Obligasi Negara - HTM	109.819.905.386.731	103.583.483.689.838	6.236.421.696.893
Obligasi Korporasi - HTM	7.651.899.000.000	2.161.250.000.000	5.490.649.000.000
Total	117.471.804.386.731	105.744.733.689.838	11.727.070.696.893

Total akumulasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan sampai dengan 31 Desember 2024 telah mencapai Rp154.107.700.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Akumulasi 31 Des 2023	Realisasi Pencairan 2024	Akumulasi 31 Des 2024
Dana Abadi Pendidikan (DAP)	111.117.700.000.000	15.000.000.000.000	126.117.700.000.000
Dana Abadi Penelitian (DAPL)	12.990.000.000.000	-	12.990.000.000.000
Dana Abadi Perguruan Tinggi (DAPT)	10.000.000.000.000	-	10.000.000.000.000
Dana Abadi Kebudayaan (DAKB)	5.000.000.000.000	-	5.000.000.000.000
Total	139.107.700.000.000	15.000.000.000.000	154.107.700.000.000

3. Direktorat EAS, DJPPR (970974)

Pada tahun 2024 terdapat alokasi pembiayaan kewajiban penjaminan kepada UAKPA Direktorat EAS sebesar Rp1.458.986.000.000. Pembiayaan Kewajiban Penjaminan merupakan Pengeluaran pembiayaan untuk keperluan pemindahbukuan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah tahun 2024 ke dalam rekening dana cadangan penjaminan pemerintah. Alokasi tersebut telah dicairkan seluruhnya kepada UAKPA Direktorat EAS. Berdasarkan dokumen DIPA nomor SP DIPA- 999.03.1.970974/2024, satuan rincian output yang akan dihasilkan adalah berupa jumlah surat jaminan, jumlah jaminan, dan jumlah perjanjian jaminan.

4. Direktorat KND, DJKN (977191)

Pada tahun 2024, terdapat alokasi pembiayaan investasi pada UAKPA KND DJKN sebesar Rp1.891.000.000.000 yang merupakan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Alokasi tersebut telah dicairkan seluruhnya kepada PT SMF sesuai PP No. 48 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan serta menjaga kesinambungan pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan sumber dana jangka menengah atau jangka panjang sektor perumahan.

5. BLU LMAN (984125)

Pada Tahun Anggaran 2024, LMAN memperoleh alokasi pembiayaan investasi dari APBN sebesar Rp15.000.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2024, alokasi yang telah dicairkan kepada BLU LMAN adalah sebesar Rp7.500.000.000.000. Berdasarkan dokumen DIPA nomor SP DIPA- 999.03.1.984125/2024, rincian output berupa tanah PSN yang dibiayai adalah sebanyak 20.519.341 m².

Sesuai mandat yang diberikan dalam Perpres Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan PMK Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah oleh LMAN, LMAN melakukan pendanaan atas Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pada tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 66 Tahun 2020 yang menggantikan Perpres 106 Tahun 2016 serta diterbitkan pula tata cara pendanaan lahan PSN pada PMK Nomor 139/PMK.06/2020. Berkaitan dengan konteks pelaporan keuangan atas aktivitas pendanaan pengadaan tanah PSN, Direktur Jenderal Perbendaharaan telah menerbitkan kebijakan akuntansi melalui surat nomor S- 941/PB/2020 tanggal 29 Desember 2020 hal Ketentuan Lebih Lanjut Pengesahan Belanja Modal dan Penerimaan Pembiayaan atas

Pengadaan Tanah bagi PSN oleh LMAN dalam PER-20/PB/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2020.

Adapun besaran nilai pendanaan pada 31 Desember 2024 yang disahkan dengan perincian per jenis proyek dan luasan tanah adalah sebagai berikut:

Periode 31 Des 2023	Jumlah PSN	Nominal	Luas Tanah
Kementerian Perhubungan:			
Jalur Kereta Api	4	75.755.189.690	26.341
Kementerian PUPR			
Jalan Tol	39	11.252.687.323.222	11.967.864
Bendungan	16	1.476.741.663.131	18.660.934
Irigasi	2	19.822.077.282	390.859
Air Baku	1	62.790.158.500	178.058
IKN	13	2.106.409.275.212	4.673.178
Jumlah	75	14.994.205.687.037	35.897.234
Telah disahkan	75	14.994.205.687.037	35.897.234

6. PKPPIM, BKF (984393)

Pada tahun 2024, UAKPA PKPPIM BKF mendapatkan alokasi sebesar Rp1.984.501.867.000 dengan output berupa Jumlah Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional yang mendapat penambahan investasi sebanyak enam LKI. Atas alokasi tersebut, UAKPA PKPPIM BKF telah melakukan pembayaran kepada tiga LKI tersebut dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	DIPA TA 2024	Realisasi 31 Des 2024
KPA Satker PKPPIM BKF	(1.984.501.867.000)	(1.984.501.866.764)
Investasi Kepada Islamic Development Bank (IsDB)	(1.594.641.387.000)	(1.594.641.386.764)
Investasi Kepada International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(63.068.000.000)	(63.068.000.000)
Investasi Kepada International Development Association (IDA)	(326.792.480.000)	(326.792.480.000)

7. Kementerian BUMN (986917)

Sesuai dengan DIPA nomor SP DIPA-999.03.1.986917/2024, telah dialokasikan anggaran pembiayaan berupa PMN/Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp34.274.230.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2024, telah direalisasikan Dana Investasi Pemerintah sebesar Rp32.624.999.997.857 dengan rincian sebagai berikut:

- PMN kepada PT Utama Karya (Persero) sebesar (Rp18.604.000.000.000) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka melanjutkan pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera.
- PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar (Rp5.999.999.997.857) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka penyelesaian Proyek Strategis Nasional melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada PT Wijaya Karya Tbk.

- c. PMN kepada PT BPUI sebesar (Rp3.556.000.000.000) sesuai PP No. 16 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka mendukung penguatan industri asuransi Indonesia termasuk penyelesaian polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah direstrukturisasi dan/atau dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG.
- d. PMN kepada PT KAI sebesar (Rp2.000.000.000.000) sesuai PP No. 52 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka mendukung ketersediaan sarana perkeretaapian Kereta Rel Listrik untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang kereta api perkotaan.
- e. PMN kepada PT INKA sebesar (Rp965.000.000.000) sesuai PP No. 51 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana perkeretaapian untuk pasar dalam negeri dan luar negeri melalui investasi fasilitas produksi dan pendukung.
- f. PMN kepada PT Pelni sebesar (Rp1.500.000.000.000) sesuai PP No. 53 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka mendukung konektivitas dan aksesibilitas melalui penyediaan kapal.
- g. PMN kepada PT Pelni sebesar (Rp1.500.000.000.000) sesuai PP No. 53 Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan dalam rangka mendukung konektivitas dan aksesibilitas melalui penyediaan kapal.
- h. PMN kepada PT LEN Industri sebesar (Rp649.229.893.901) sesuai PP No. 54 Tahun 2024 berupa PMN non-tunai yang berasal dari konversi piutang pokok negara berupa aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang ditujukan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung pembangunan bidang pertahanan dan keamanan serta optimalisasi industri pertahanan nasional.

8. Direktorat PRKN, DJPPR (999986)

Pada tahun 2024, terdapat alokasi dana sebesar Rp10.000.000.000.000 yang telah ditetapkan dalam DIPA, yang merupakan penambahan Penyertaan Modal Negara kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. PMN kepada LPEI dilaksanakan sesuai PP No. 50 Tahun 2024. sebesar Rp5.000.000.000.000.

Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan, PMN kepada LPEI disetujui sebesar Rp5.000.000.000.000, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, *good corporate governance*, dan tidak mengulang kesalahan pengelolaan.

D.3.4.11. Pelaksanaan Penyertaan Modal Negara melalui mekanisme Penyertaan Modal Pemerintah Pusat Tahun 2024

UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN Tahun Anggaran 2024 mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan penambahan PMN melalui mekanisme pemindahtanganan BMN (PMPP) kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Perum DAMRI, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, PT Pertamina (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Varuna Tirta Prakasya (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero), PT Sejahtera Eka Graha, PT Danareksa (Persero), dan Badan Bank Tanah.

Pada tahun 2024 hanya PMPP kepada PT Pertamina (Persero) yang telah diterbitkan PP PMPP, yaitu PP Nomor 40 Tahun 2024. Sementara untuk BUMN lain yang belum terbit PP PMPP dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. PMPP kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) telah sampai pada tahap permohonan penetapan RPP pada Setneg.
- b. PMPP kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Perum Perumnas, PT Hutama Karya (Persero), PT Danareksa (Persero), Perum Damri, PT Bio Farma (Persero) dan PT Pertamina (Persero) telah sampai pada tahap harmonisasi pada Kementerian Hukum.
- c. PMPP kepada PT Sejahtera Eka Graha telah sampai pada tahap permohonan Izin Prakarsa.
- d. PMPP kepada Badan Bank Tanah tidak dapat diproses lebih lanjut karena berdasarkan hasil rapat pendalaman PMN yang dilaksanakan tanggal 1-3 Juli 2024, Komisi XI DPR RI memutuskan bahwa Pemerintah tidak dapat melaksanakan PMN pada Badan Bank Tanah tahun 2024.

Selanjutnya, pada bulan Februari 2025 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (UU 1 Tahun 2025) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang didalamnya mengatur bahwa Penambahan PMN (termasuk PMN yang berasal dari Barang Milik Negara) kepada BUMN diajukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan dilakukan dalam rangka menjalankan penugasan pemerintah.

Atas hal tersebut, Kemensetneg dan Kemenkum mengembalikan permohonan penetapan RPP dan permohonan harmonisasi untuk disesuaikan proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan pada UU 1 Tahun 2025.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Keuangan melalui surat nomor S-313/MK/KN/2025 tanggal 5 Mei 2025 menyampaikan kepada Menteri BUMN bahwa pelaksanaan PMN Non Tunai kepada BUMN baik yang masih berproses maupun untuk di masa yang akan datang agar dilaksanakan dan diproses lebih lanjut sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025.

D.3.5. BA 999.04

1. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pinjaman PDAM

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada PDAM diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, RDI, dan RPD pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu.

Skema penyelesaian piutang Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Tertentu sebagai berikut:

- a. Penjadwalan kembali seluruh kewajiban Pokok dan/atau.
- b. Penghapusan seluruh kewajiban Non Pokok.

Pemerintah masih memiliki hak tagih kepada dua PDAM debitur penerusan pinjaman yaitu PDAM Kabupaten Sorong dan PDAM Kabupaten Biak yang saat ini dalam pengurusan PUPN. Pengurusan

Piutang Negara PDAM Kabupaten Sorong dan PDAM Kabupaten Biak diserahkan kepada PUPN sejak tanggal 22 Oktober 2013.

2. Penyelesaian Piutang Negara Melalui Program Restrukturisasi Pemda

Latar belakang kebijakan penyelesaian piutang Negara pada Pemda adalah:

- a. Tunggakan pinjaman Pemda tidak selesai selama bertahun-tahun.
- b. Pemda tidak dapat melakukan investasi infrastruktur melalui skema pinjaman karena masih terdapat tunggakan pinjaman kepada pemerintah.
- c. Membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
- d. Membuka kesempatan Pemda dalam melakukan investasi.

Landasan hukum mekanisme penyelesaian piutang negara pada Pemda diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah.

Skema penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam PMK No.104/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 176/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Pemerintah Daerah, secara umum dilaksanakan dengan:

- a. Penjadwalan kembali.
- b. Perubahan persyaratan dan/atau.
- c. Penghapusan tunggakan non pokok melalui skema debt swap untuk penyediaan sarana dan prasarana pada fungsi pendidikan, kesehatan, dan/atau infrastruktur yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Sampai dengan tahun 2024, terdapat tiga Pemda dalam proses penyelesaian piutang negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. 1 Pemda dalam proses penyelesaian restrukturisasi pelaksanaan *debt swap* yaitu Pemprov Maluku;
- b. 1 Pemda dalam proses penghapusan piutang negara non pokok secara mutlak yaitu Pemkot Makassar;
- c. 1 Pemda dalam proses cicilan melalui potongan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu Pemkab Aceh Timur.

3. Usaha-Usaha Penyelesaian Tunggakan Kredit Program Non Subsidi

a. Proyek Perkebunan

Proyek Perkebunan terdiri dari Proyek PIR dan Proyek UPP Perkebunan. Proyek PIR dimulai tahun 1976 (Repelita II) dan sampai tahun 1992 telah ada di 68 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Sedangkan UPP terdiri dari 4 Proyek, yaitu P3RSU, P3RSB, PRPTE, dan TCSDP yang juga tersebar di 30 provinsi.

Pada tahun 2010 telah dilakukan rekonsiliasi sisa utang Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan pihak perbankan sebagai bank penatausaha, Ditjen Perkebunan sebagai penanggung jawab program, PT Perkebunan Nusantara sebagai perusahaan inti untuk PIR, dan Dinas Perkebunan sebagai pihak yang menerima pelimpahan tugas/pengelolaan UPP setelah UPP ditutup oleh Menteri Pertanian.

Kemudian, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penyebab tunggakan perlu diketahui kondisi dan permasalahan petani/kebun. Untuk itu, telah dilakukan uji petik di 15 lokasi Proyek PIR/UPP Perkebunan yang melibatkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perkebunan, perbankan, dan Dinas Perkebunan Provinsi. Uji petik ini dilakukan dengan melihat kondisi kebun, mewawancarai petani/kelompok tani serta memberikan kuesioner. Petani yang menjadi responden adalah 212 orang untuk PIR dan 104 orang untuk UPP. Berdasarkan uji petik diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Sebagian petani saat ini sudah tidak memelihara kebunnya sesuai dengan aturan, dikarenakan kurangnya biaya untuk pemeliharaan.
- 2) Kondisi kebun sebagian rusak berat karena kurangnya pemeliharaan.
- 3) Hanya sedikit petani yang membayar cicilan kredit.
- 4) Sudah tidak ada petugas penyuluh lapangan di lokasi proyek yang memungut angsuran petani karena ditarik ke instansi lain setelah otonomi daerah.

Kemudian pada November 2010 telah dilakukan inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I/Aceh dengan melibatkan BPKP. Tim telah bertemu dan melakukan wawancara serta memberikan kuesioner kepada kelompok petani/pekebun dan pihak perbankan. Adapun kesimpulan dari inventarisasi di lima lokasi Proyek PIR Perkebunan lingkup PTPN I adalah:

- 1) lahan perkebunan sebagian besar sudah ditinggalkan oleh petani peserta akibat kondisi keamanan yang tidak kondusif ditambah dengan kondisi tanaman yang sudah rusak berat, tidak terpelihara dan sudah menjadi hutan kembali.
- 2) kondisi bangunan kantor, gudang, dan fasilitas lainnya rusak berat, bahkan terdapat bangunan yang hanya tersisa puing-puingnya karena dibakar.
- 3) peralatan pertanian, peralatan berat dan peralatan angkutan sudah tidak ada (dibakar, hilang atau diambil Gerakan Aceh Merdeka (GAM)).
- 4) pada saat inventarisasi sudah tidak ada petugas kebun/dialihkan ke kebun lain.

Upaya penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP tersebut dilanjutkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK. 05/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Peserta eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat dan eks Unit Pelaksana Proyek Perkebunan, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 /PMK.05/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Peraturan Menteri Keuangan tersebut kemudian didukung dengan pedoman teknis pelaksanaan penyelesaian piutang negara yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan dan Unit Pelaksana Proyek Perkebunan. Diharapkan dengan diterbitkannya dua Peraturan Menteri tersebut pelaksanaan penyelesaian piutang negara pada Proyek PIR/UPP lebih optimal.

Tahun 2019 Direktorat SMI menginisiasi untuk pengembangan aplikasi penatausahaan data hutang petani yang dinamai aplikasi Penyelesaian Hutang Petani (PHP), diharapkan pengembangan aplikasi tersebut dapat memudahkan proses penyelesaian hutang petani PIR UPP Perkebunan.

Di tahun 2021 telah diterbitkan KMK Mutlak untuk 330 petani eks proyek Durian Luncuk. Dan di tahun 2022 Direktorat SMI bekerjasama dengan BPKP dalam penyusunan Pedoman Audit Penyelesaian Piutang Negara pada Petani Eks Proyek PIR UPP Perkebunan guna memudahkan BPKP daerah dalam melakukan audit terhadap proyek PIR UPP tersebut.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2017 tentang Sistem Akuntansi Pengelolaan Penerusan Pinjaman:

- 1) Nilai *outstanding piutang* pokok transaksi Aset Lainnya Kredit Program disajikan sebagai Aset Lainnya Kredit Program pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca;
- 2) Transaksi pengesahan atau pelunasan dan/atau cicilan secara kas atas piutang pokok transaksi Aset Lainnya Kredit Program disajikan sebagai penerimaan pembiayaan di LRA dalam pos Pembiayaan, dan mengurangi nilai *outstanding* Aset Lainnya Kredit Program pada pos Piutang Jangka Panjang di Neraca;
- 3) Dalam hal setoran tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutangnya (SPH), disajikan sebagai pendapatan PNBPN lainnya di LRA dan sebagai pendapatan PNBPN Lainnya pada pos kegiatan non-operasional lainnya di LO;

Mulai tahun 2023, sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar yang telah dimutakhirkan dengan KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar dilakukan koreksi untuk pengklasifikasian Penerimaan PIR UPP Non SPH sebagai Penerimaan PNBPN Lainnya dengan akun 425981 (Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman).

b. Proyek Peternakan

Proyek Peternakan terdiri dari Proyek Pembibitan dan Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak yang dimulai sejak tahun 1990 yang berlokasi di Bali dan Nusa Tenggara Barat (Dompu), sedangkan Proyek Redistribusi Ternak dimulai sejak tahun 1978 dan tersebar di seluruh Indonesia. Untuk mengetahui gambaran tentang kondisi terkini, pada tahun 2010 telah dilakukan uji petik di Dompu, NTB oleh Ditjen Peternakan dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Ternak sapi sudah tidak diketahui keberadaannya.
- 2) Kondisi bangun kantor dan fasilitas lainnya sudah rusak dan tidak terurus.
- 3) Peternak/kelompok ternak sudah tidak diketahui keberadaannya.

Di Tahun 2023 Ditjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk Proyek Pengembangan Sapi Bali (P3 Bali) dan Redistribusi ternak, namun belum ada kelanjutannya.

c. Proyek Pengembangan Pendidikan Akuntansi (P2A)

P2A adalah proyek yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah lulusan kursus akuntansi yang dapat bekerja, meningkatkan jumlah lembaga kursus akuntansi yang dapat memperoleh akreditasi, serta memantapkan sistem dan

mekanisme pengujian dan sertifikasi akuntansi. Pada tanggal 29 Juni 2010, dilakukan rapat persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data piutang Pemerintah pada Proyek P2A dengan melibatkan Dit. SMI dan Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Kemendiknas yang merupakan reorganisasi dari Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Peserta rapat sepakat perlunya dibentuk Tim Kerja Penyelesaian Proyek P2A yang melibatkan Direktorat SMI dan Ditjen PNFI.

Menindaklanjuti kesepakatan rapat dimaksud, Dirjen PNFI dan Direktur SMI menunjuk petugas untuk duduk dalam Tim Tindak Lanjut Penyelesaian Proyek P2A yang tugasnya melakukan visitasi dan penelusuran data dalam rangka tindak lanjut P2A. Namun demikian, setelah Ditjen PNFI menyampaikan surat kepada Itjen Kemendiknas perihal Permintaan Data Proyek P2A, pihak Itjen Kemendiknas memberikan jawaban bahwa tidak terdapat data pemeriksaan terhadap Proyek P2A dimaksud di Kemendiknas.

Ditjen PNFI juga telah melakukan rapat koordinasi intern Ditjen PNFI tentang pengumpulan data-data P2A dengan melibatkan pensiunan-pensiunan pegawai Kemendiknas yang pernah terlibat dalam proyek P2A, namun Ditjen PNFI mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran dan pengumpulan data proyek P2A dimaksud. Selanjutnya, Ditjen PNFI melalui Setditjen PNFI menyampaikan surat permintaan data-data lembaga yang pernah menerima bantuan dalam Proyek P2A kepada 33 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi di Indonesia, namun baru dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali yang telah memberikan jawaban atas surat Ditjen PNFI dimaksud.

Ditjen PNFI juga telah menyampaikan surat kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta) serta LPK Jurnal (Garut) perihal permintaan informasi proyek P2A mengingat ketiga lembaga termasuk yang pernah menerima dana bantuan Proyek P2A, namun baru Pimpinan LPK Jurnal yang telah menyampaikan jawaban bahwa kewajibannya telah diselesaikan namun tidak dapat memberikan bukti pembayaran mengingat telah lebih dari 15 tahun.

Pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2010, Tim Direktorat SMI melaksanakan tugas monitoring ke Kabupaten Malang dalam rangka penelusuran data Proyek P2A. Monitoring dilakukan dengan melakukan visitasi dan penelusuran data ke Bank BRI Cabang Malang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang serta melakukan visitasi dan penelusuran ke LKP Ganesha yang pernah mendapatkan bantuan dalam Proyek P2A. Mengingat belum adanya surat tanggapan atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI kepada Pimpinan LP3I dan LPK Wijaya Kusuma (Jakarta), perwakilan dari Ditjen PNFI telah melakukan penelusuran Proyek P2A secara langsung kepada kedua lembaga dimaksud, namun diperoleh informasi bahwa kedua lembaga dimaksud belum memperoleh data yang diminta dan dalam waktu dekat akan memberikan jawaban secara resmi atas surat permintaan data yang telah disampaikan oleh Ditjen PNFI.

Hingga saat ini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) sebagai reorganisasi dari Ditjen PNFI, serta Bank BRI Kantor Cabang Khusus (KCK) masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data proyek P2A dengan berkoordinasi dengan Dit. SMI.

Di tahun 2022 Itjen Kementerian Keuangan melakukan inventarisasi terhadap kredit program lama yang macet termasuk proyek P2A, namun belum ada kelanjutannya.

d. Kredit Listrik Pedesaan (KLP)

KLP adalah program Pemerintah dalam bentuk penyediaan dana untuk kredit biaya penyambungan dan pemasangan instalasi listrik di rumah konsumen, termasuk biaya asuransi melalui PT Askrindo. Berdasarkan temuan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 terkait dengan hak tagih Pemerintah atas KLP yang masih diragukan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realized Value*), maka perlu dilakukan langkah awal penyelesaian piutang Negara pada proyek KLP dengan melakukan rekonsiliasi dan pengumpulan data.

Pada 31 Desember 2010, telah dilakukan rapat antara Direktorat SMI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Bank BRI sebagai persiapan dan koordinasi dalam rangka rekonsiliasi dan pengumpulan data KLP serta menetapkan time line terkait penyelesaian permasalahan KLP dimaksud.

PLN dan Bank BRI mengundang Direktorat SMI guna melakukan verifikasi lapangan dan *sampling* data KLP di PLN Disjaya dan Tangerang (APJ Cisoka) serta Bank BRI Cabang Tangerang. Namun, Bank BRI dan PLN Tangerang mengalami kesulitan dalam melakukan penelusuran atas data-data dimaksud mengingat KLP di wilayah Tangerang dilaksanakan pada tahun 1986-1987 dan pencatatan saat itu dilakukan secara manual. Selanjutnya, telah disepakati bahwa akan dibentuk Tim Koordinasi KLP wilayah Tangerang untuk melakukan penelusuran ke langsung ke lapangan (pelanggan-pelanggan KLP) serta perlu dilakukan penelusuran data hingga ke Kantor Unit Bank BRI. Menindaklanjuti kesepakatan dimaksud, PLN APJ Cisoka telah melakukan uji petik ke pelanggan KLP di Desa Saga dan Keronjo, namun sebagian sudah tidak lagi menjadi pelanggan/sudah dibongkar. Di samping itu, Bank BRI Cabang Tangerang juga telah meminta data KLP kepada seluruh Kantor Unit Bank BRI di Cabang Tangerang, namun data dimaksud tidak dapat ditemukan. Hingga saat ini, Bank BRI dan PLN masih mencoba melakukan penelusuran atas data-data KLP.

4. Usaha-usaha Penyelesaian Tunggakan Pemberian Pinjaman

Bank Beku Operasi (BBO)/Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)/Bank Dalam Likuidasi (BDL)

Status beberapa bank swasta nasional menjadi BBO/BBKU/BDL, diantaranya merupakan bank penerima pinjaman *Two Step Loan* (TSL) dari BI dan BTN. BBO/BBKU/BDL meliputi PT Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), PT Bank Umum Nasional (BUN), PT Bank Asia Pasifik (ASPAC), PT Bank Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO), PT Bank Dagang Bali, PT UNIBANK, PT Bank Andromeda, PT Bank Central Dagang, PT Bank Papan Sejahtera, PT Bank Putra Surya Perkasa, dan BPD Timor Timur.

Langkah awal penyelesaian BBO/BBKU/BDL pada BI setelah pembekuan status tersebut, pihak Kementerian Keuangan, BI, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dan Tim Administrasi BBO/BBKU/BDL telah melakukan beberapa kali rekonsiliasi perhitungan posisi pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL guna mengetahui perkembangan tingkat pengembalian atas pinjaman TSL dari BBO/BBKU/BDL. Berdasarkan Keputusan Ketua BPPN Nomor SK-36/BPPN/0204 tanggal 17 Februari 2004 tentang Penyelesaian Aset dan Kewajiban BBO/BBKU/BDL, disebutkan bahwa penyelesaian kewajiban Bank Beku akan dilakukan dengan cara memperhitungkan hasil penyelesaian aset Bank Beku dengan kewajiban Bank Beku. Terkait dengan penyelesaian beberapa permasalahan di bidang keuangan termasuk di dalamnya permasalahan BBO/BBKU/BDL yang menyalurkan kredit TSL, dibentuk Tim Penyelesaian Beberapa Permasalahan di Bidang Keuangan Kementerian Keuangan dan BI melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI Nomor 209/KMK.06/2005 dan Nomor 7/23/KEP.GBI/2005 tanggal 29 April 2005. Dalam pertemuan tanggal 28 Maret 2005, Tim Penyelesaian

BPPN mengemukakan bahwa berdasarkan hasil likuidasi kelima bank BBO/BBKU/BDL, aset yang tersisa hanya cukup untuk mengurangi kewajiban utang pajak bank beku, utang bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah dialihkan hak dan penagihannya kepada BPPN, serta utang program penjaminan Pemerintah. Sedangkan utang kepada pihak lainnya tidak mampu ditutupi.

Pasal 3 Ayat 3.03 dari sebagian besar Perjanjian Pemberian Pinjaman (SLA) kepada BI yang terkait dengan Pemberian pinjaman kepada bank BBO/BBKU/BDL di atas, menyebutkan bahwa “BI harus memastikan bahwa setiap bank swasta memenuhi seluruh kewajibannya dalam Perjanjian Pinjaman, Perjanjian Pemberian Pinjaman dan Akad Pemberian Pinjaman, dan BI wajib mengikuti serta memantau perkembangan masing-masing Bank Swasta dalam melaksanakan Pinjaman Pemberian, mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah, keadaan atau hal-hal mana meliputi peristiwa yang disebutkan dalam Pasal V Perjanjian Pinjaman”. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun saat ini proses likuidasi bank BBO/BBKU/BDL telah selesai (bank BBO/BBKU/BDL sudah tidak beroperasi lagi dan tidak ada lagi proses BPPN terhadap BBO/BBKU/BDL), kiranya BI masih tetap memiliki kewajiban kepada Pemerintah untuk mengambil segala upaya yang diperlukan untuk mencegah timbulnya keadaan atau hal-hal yang merugikan Pemerintah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (3.03) dari SLA kepada BI terkait dengan penyaluran TSL.

BBO/BBKU/BDL/BDL tidak dapat mengikuti proses restrukturisasi dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam PMK Nomor 211/PMK.05/2021 sehubungan dengan tidak adanya institusi yang akan memenuhi dokumen persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengikuti restrukturisasi. Dalam rangka penyelesaian pinjaman TSL eks BBO/BBKU/BDL telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Permintaan konfirmasi atas tata cara penghapusan pinjaman terhadap entitas yang sudah tidak ada kepada Ditjen Kekayaan Negara (DJKN).
- b. Pembahasan opsi penyelesaian dengan DJKN dan Biro Bantuan Hukum menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dengan tujuan penghapusan piutang setelah piutang diurus secara optimal dan diterbitkan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).
 - 2) Penyelesaian di luar mekanisme PUPN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2005 Bab IV terkait Piutang BUMN maupun Pemerintah Daerah.

Akan disusun tahapan-tahapan penyelesaian sesuai dengan kedua opsi tersebut. Berkaitan dengan tindak lanjut penyelesaian pinjaman BBO/BBKU/BDL, Menteri Keuangan telah menetapkan surat penghentian perhitungan non pokok melalui surat nomor S-626/MK.05/2015 tanggal 18 Agustus 2015. Sesuai dengan surat tersebut, penghentian perhitungan kewajiban non pokok dilakukan pada saat pembubaran/likuidasi entitas berkenaan, yaitu pada tanggal 26 April 2004.

Perkembangan selanjutnya, pada saat rapat pembahasan Penyelesaian Pengelolaan *Two Step Loan* (TSL) dari Bank Indonesia kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Nusa Dua Bali, Kementerian Keuangan menyampaikan pendapat bahwa Kementerian Keuangan tidak dapat menindaklanjuti penyelesaian TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) sepanjang belum mendapatkan kejelasan mengenai konstruksi hukum, proses bisnis, dan data pendukung yang memadai. BI dan Kemenkeu harus memastikan bahwa telah ada dokumen hukum yang menyatakan bahwa debitur-debitur TSL OLA (BBO/BBKU/BDL) telah hapus status badan hukum dan diambil alih oleh Pemerintah.

Pada hari Rabu, 31 Maret 2021 telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian *Two Step Loan* (TSL) Bank Indonesia pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB, melalui fasilitas *video conference* menggunakan aplikasi Zoom dengan peserta perwakilan Biro Hukum, Biro Advokasi, Inspektur III, dan Direktorat SMI. Adapun beberapa poin penting hasil rapat pembahasan dengan para undangan adalah sebagai berikut:

- a. BI tidak dapat mengalihkan pengurusan pengelolaan TSL kepada Pemerintah sebelum Pemerintah memutuskan untuk menerima pengelolaan tersebut dari BI. Sampai dengan saat itu, BI masih harus bertanggung jawab atas pengelolaan TSL sampai ditunjuk instansi/unit yang akan mengelolanya;
- b. Apabila BI ingin mengalihkan pengelolaan TSL, dokumentasi dan data peminjamnya harus *clear* sampai dengan perjanjian juga mungkin harus dialihkan atas nama Pemerintah dalam hal ini Dit. SMI agar debitur juga *clear* pada saat akan melakukan pembayaran dan penutupan perjanjian;
- c. Pentingnya komitmen bersama dari pimpinan untuk mengambil sikap menerima atau menolak baik seluruh atau sebagian atas TSL agar dapat menentukan langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani permasalahan ini;
- d. Pasal 74 UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia belum bisa dijadikan dasar pengalihan TSL karena pemberian mandat melalui surat kuasa Menteri Keuangan untuk melakukan penatausahaan penerusan pinjaman. Maka dari itu, mandat tidak menghilangkan tanggung jawab Pemerintah atas penerusan pinjaman untuk melakukan penatausahaan TSL. Jika BI ingin mengalihkan TSL, maka menjadi tidak tepat, yang mungkin seharusnya adalah mengembalikan tanggung jawab kepada pemerintah;
- e. Karena pengelolaan TSL oleh BI diberikan melalui mandat surat kuasa, maka jika ingin melepaskan tanggung jawab BI dapat dilakukan dengan mencabut surat kuasa tersebut. Namun, jika tidak dicabut, kewenangan atas pengelolaan TSL pada prinsipnya masih di Menteri Keuangan;
- f. Mengenai hal-hal teknis terkait pengalihan pengelolaan TSL BI, sebaiknya dicantumkan dalam PMK mengenai penatausahaan TSL. Namun harus dipikirkan juga dasar hukum pembentukan PMK apakah ada amanat pembuatannya;
- g. Permasalahan pengalihan pengelolaan TSL membutuhkan keputusan dari pimpinan mengingat banyaknya debitur yang sudah tidak ada wujudnya.

Dalam rangka menyelesaikan TSL, Direktorat SMI telah bekerja sama dengan BPPK untuk Menyusun kajian penyelesaian TSL. Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut penyelesaian *Two Step Loan* (TSL) dengan Bank Indonesia. Adapun beberapa poin penting hasil rapat pembahasan dengan para undangan adalah sebagai berikut:

- a. Pihak BI siap mensupport dan menawarkan kolaborasi dengan Kemenkeu bilamana pihak Kemenkeu mengalami hambatan dalam mencapai titik temu atas penyusunan kajian maupun tindak lanjut atas isu dari hasil kajian hukum Kemenkeu;
- b. Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Tim Kajian Akademis dari widyaiswara utama BPPK dan Tim Kajian Hukum untuk memprioritaskan TSL yang paling mudah untuk diselesaikan;
- c. Perlunya kehadiran dan keterlibatan Kementerian BUMN mengingat BUMN yang akan ditunjuk Pemerintah dalam melakukan pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia, penyaluran dan administrasi kredit program, dan mencari sumber-sumber pendanaan untuk kelanjutan pelaksanaan kredit program adalah BUMN yang kondisi keuangannya sehat;
- d. Dokumen dan catatan yang dimiliki Kemenkeu saat ini terbatas/ tidak lengkap dan belum dapat diyakini keakuratan angka yang tersaji, termasuk data yang tercatat dalam sistem DMFAS/SPAN

dan tersaji dalam Laporan Keuangan Kemenkeu karena masih terdapat TSL yang tidak tercatat di KPPN sehingga perlu dilakukan penelusuran kembali bersama antara Bank Indonesia, Kemenkeu, dan KPPN Khusus Investasi.

Pada tanggal 5 Desember 2024 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Progres Penyelesaian TSL BI secara online yang dihadiri oleh Kepala Divisi PTBI (Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri), Plt. Kepala Subdirektorat Investasi Badan Usaha Milik Negara (Direktorat SMI) dan Perwakilan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi. Poin penting dalam diskusi rapat antara lain:

- a. Upaya Direktorat SMI agar piutang TSL termasuk ke dalam piutang yang dapat dihapuskan dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun dalam perjalanannya, terdapat pembatasan kriteria piutang yang perlu dihapuskan. Sehingga tidak semua piutang TSL dapat dimasukkan ke dalam penghapusan PP Nomor 47 Tahun 2024;
- b. Sampai dengan Desember 2024, Direktorat SMI dan Bank Indonesia masih dalam proses konsolidasi kesesuaian data yang ada di sistem dan yang ada di Bank Indonesia;
- c. Penyelesaian TSL secara parsial agar dapat menentukan mekanisme penyelesaian masing-masing pinjaman TSL secara tepat. Penyelesaian saat ini difokuskan kepada BUMN/BUMD/BHL dengan status data lengkap dan debitur jelas (tidak dalam proses hukum atau dibubarkan).

5. Penyelesaian Pinjaman BUMN

Progress Penyelesaian Piutang Negara Tahun 2024

Direktorat Sistem Manajemen Investasi melaksanakan fungsi koordinasi antar unit yang terkait dalam lingkup Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN selaku *Unit in Charge* dalam pelaksanaan program penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT. Upaya perbaikan terus dilakukan agar pelaksanaan program lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program selama tahun 2016. Pemerintah telah menerbitkan aturan hukum baru sebagai landasan pelaksanaan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/PT/Badan Hukum Lainnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL.

Optimalisasi penyelesaian piutang negara dilakukan dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali;
- b. Perubahan persyaratan;
- c. *Debt to Asset Swap*;
- d. PMN; dan/atau
- e. Penghapusan

PMK Nomor 222/PMK.05/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL saat ini telah dicabut dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari

Pemberian Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT/BHL. Sesuai dengan PMK Nomor 211/PMK.05/2021 dimaksud, optimalisasi penyelesaian piutang negara dilakukan dengan cara:

- a. Penjadwalan kembali;
- b. Perubahan persyaratan;
- c. *Debt to Asset Swap*
- d. PMN;
- e. Penghapusan; dan/atau
- f. Keringanan (*discount*) pembayaran.

Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dapat dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara (lebih dari satu skema penyelesaian). Pada optimalisasi penyelesaian piutang negara melalui Perubahan Persyaratan terdapat penambahan cara yaitu dengan konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok. Konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok dimaksud hanya dapat dilakukan kepada BUMN atau Perseroan yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara. Selanjutnya juga terdapat tambahan ketentuan berkenaan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari konversi kewajiban non pokok menjadi kewajiban pokok dilakukan dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan, perbaikan kinerja, dan organisasi BUMN/Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Progres Penyelesaian Piutang Negara pada PTPN XIV dan PTPN XI

1) PTPN XIV

Melalui surat Nomor: S.994/03.N14/X/XI/2019 tanggal 18 November 2019, Direksi PTPN XIV mengajukan mengajukan permohonan penyelesaian utang RDI/SLA dengan skema

- 1) Utang Pokok sebesar Rp84.702.120.539,08 di konversi menjadi PMN Non Tunai dan
- 2) Utang Non Pokok sebesar Rp121.709.486.635,46 dijadwalkan kembali.

Atas pengajuan tersebut, Direktorat SMI telah meneliti kelengkapan berkas persyaratan permohonan penyelesaian utang RDI/SLA dan masih terdapat dokumen persyaratan yang belum disampaikan oleh PTPN XIV. Melalui surat Direktur SMI Nomor S-375/PB.4/2019 tanggal 31 Desember 2019 telah meminta direksi PTPN XIV untuk segera menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung penyelesaian piutang Negara. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, dokumen yang belum diterima Direktorat SMI yaitu rekomendasi dari Kementerian BUMN terkait proses restrukturisasi utang PTPN XIV, belum disampaikan oleh direksi PTPN XIV.

Direktur SMI membatalkan permohonan restrukturisasi utang PTPN XIV melalui surat nomor S-123/PB.4/2021 tanggal 29 Maret 2021 karena dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 17 PMK Nomor 13/PMK.05/2016 tidak dapat dilengkapi dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.

PTPN XIV saat ini telah menjadi bagian dalam Proyek Strategis Nasional PTPN Group (*Supporting Co*). Saat ini pembentukan sedang dalam proses, sehingga penyelesaian piutang negara pada PTPN XIV menunggu proses tersebut selesai agar dapat diketahui piutang negara tersebut akan dibebankan ke mana. Sebagai komitmen, PTPN XIV telah mengirim surat kepada Direktorat SMI

Nomor S-644/05.N14/X/V/2023 perihal Penyelesaian Kewajiban SLA/RDI yang juga ditembuskan ke induk PTPN Group, yaitu PTPN III.

2) PTPN XI

PTPN XI tidak lagi membayar cicilan sejak tahun 2020 karena adanya proses revitalisasi/modernisasi perusahaan sehingga produksi belum optimal. Disamping itu, Direktorat SMI dan PTPN XI tidak memiliki dokumen fisik perjanjian pinjaman RDI No. 15/002/INV/1983. Berdasarkan PMK 211/2021, penyelesaian piutang negara pada BUMN dengan kriteria tertentu (Perjanjian Pinjaman tidak lengkap dan/atau tidak ditemukan namun nilai atau jumlah piutang negara tercatat atau diakui) dilakukan dengan terlebih dahulu membuat Surat Kesepakatan Utang (SKU) yang ditandatangani Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dengan Direktur Utama/Direktur/pengurus BUMN.

Pada bulan Juli 2022, telah dilakukan kesepakatan antara Dit. SMI dan PTPN XI terkait penyelesaian piutang negara dengan terlebih dahulu membuat SKU. Poin-poin kesepakatan pada SKU antara lain:

- Besaran Piutang Negara sebesar Rp3.522.896.325;
- Jangka Waktu Pinjaman 5 tahun sejak tanggal penandatanganan SKU s.d. tanggal 15 Juni 2027;
- Pembayaran pertama akan dilakukan setelah penandatanganan SKU, selanjutnya per semester setiap tanggal 15 Juni dan 15 Desember;
- Tingkat Suku Bunga 0 persen.

Kemudian pada bulan Mei 2023, poin-poin kesepakatan tersebut diperbaharui yaitu jangka waktu pinjaman yang semula 5 tahun menjadi 4 tahun 6 bulan. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya arahan Dirjen Perbendaharaan untuk terlebih dahulu mencari ulang fisik dokumen perjanjian RDI sebelum dilakukan penyusunan perjanjian baru. Namun setelah dilakukan pencarian ulang, dokumen tersebut tetap tidak ditemukan.

SKU yang telah ditandatangani menjadi dasar persetujuan penyelesaian piutang negara oleh Menteri Keuangan. Persetujuan ini kemudian akan menjadi dasar penyusunan perjanjian pinjaman RDI baru antara Kementerian Keuangan dan PTPN XI.

SKU telah ditandatangani oleh Dirjen Perbendaharaan dan Direktur Utama PTPN XI, serta telah diterbitkan surat persetujuan penyelesaian piutang negara oleh Menteri Keuangan. Saat ini perjanjian pinjaman telah diterbitkan dengan Nomor RDI-406/DSMI/2023 tanggal 12 Juli 2023 dan PTPN XI telah mulai membayar angsuran pertamanya pada tanggal 15 Juli 2023 yang dilanjutkan pembayaran untuk angsuran kedua pada tanggal 12 Desember 2023.

Pada tanggal 1 Desember 2023, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) mengumumkan penggabungan 13 (tiga belas) perusahaan di bawah Holding Perkebunan Nusantara, menjadi 2 (dua) *Sub Holding*, yakni Palm Co. dan Supporting Co. Subholding Supporting Co. dibentuk yang diantaranya melalui *merger* PTPN XI ke dalam PTPN I berdasarkan akta penggabungan No. 9 tanggal 1 Desember 2023 sehingga diperlukan novasi atas perjanjian utang PTPN XI menjadi PTPN I.

Pada tanggal 1 Desember 2023 PTPN XI dan PTPN XIV bergabung ke dalam PTPN I, PTPN I ditunjuk sebagai induk *subholding* yang bergerak di bidang pendukung bisnis Perkebunan (SupportingCo) Penggabungan tersebut didasari oleh akta notaris No. 9 tanggal 1 Desember 2023. PTPN I mengajukan surat Permohonan Novasi No. DPAK– DK/X/2024.08.07-1 tanggal 7 Agustus 2024 hal Permohonan Novasi Piutang Negara/Rekening Dana Investasi (RDI) PTPN XI dan PTPN XIV ke PTPN I dan Dit. SMI memverifikasi surat permohonan tersebut dengan mengirimkan surat No. S-221/PB.4/2024 tanggal 6 September 2024. PTPN I kemudian menindaklanjuti dengan mengirimkan surat nomor DPAK-DK/X/2024.11.15-1 tanggal 15 November 2024 hal Permohonan Novasi Piutang Negara/Rekening Dana Investasi (RDI) PTPN XI dan PTPN XIV ke PTPN I, mengajukan permohonan pembaruan utang (novasi). Saat ini Dit. SMI secara paralel sedang memproses permohonan Novasi tersebut.

3) PT Inhutani

Pada 1 Agustus 2022 PT Inhutani II & PT Inhutani III resmi merger berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.09- 0038803 dan No. AHU-AH.01.03-0272910 tanggal 31 Juli 2022. Konsekuensi dari penggabungan tersebut ialah beralihnya kewajiban PT Inhutani II dan PT Inhutani III ke dalam PT Inhutani I. Atas merger tersebut PT Inhutani I mengajukan permohonan novasi melalui Surat Direktur PT Inhutani I No. 376/IV.B/Inh/2023 tanggal 6 Februari 2023. Perjanjian novasi diterbitkan pada 23 Februari 2024 melalui SLA No. 1308/Eks-SLA-523/DSMI/2024 dan SLA No.1307/Eks-SLA- 522/DSMI/2024.

Kemudian PT Inhutani I mengajukan permohonan restrukturisasi melalui Surat No.0012/IX.A/IHT1-DIRUT/2023 tanggal 3 Agustus 2023 dikarenakan pinjaman milik PT Inhutani II berstatus macet dan pinjaman milik PT Inhutani III berstatus kurang lancar. Dua pinjaman tersebut ialah AMA-494/SLA-522/DSMI dan Eks PT Inhutani III AMA-495/SLA-523/DSMI dengan total HTP 13.884.024.612,84. Skema restruk yang diajukan adalah penjadwalan kembali selama 15 tahun dan perubahan tingkat bunga sebesar 0%.

PT Inhutani I telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan restrukturisasi dan sesuai kesepakatan dalam perundingan dengan PT Inhutani I, saat ini telah terbit Surat Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT Inhutani I No. S-79/MK.5/2024 tanggal 14 Oktober 2024. Skema yang disetujui ialah pembayaran di tahun 2024 sebesar 25% dari nilai HTP atau sebesar Rp3.471.006.153,21 dan 75% dari HTP dengan Penjadwalan Kembali diangsur pro rata per tahun dengan tingkat bunga 2% selama 5 tahun mulai tahun 2025 sampai 2029.

Saat ini amandemen perjanjian PT Inhutani I sudah diterbitkan yaitu melalui AMA-513/SLA-1307/DSMI/2024 dan 513/SLA-1307/DSMI/2024 tanggal 13 Desember 2024. PT Inhutani juga telah melakukan pembayarannya yang pertama (25% dari HTP) yaitu pada Bulan Desember 2024 senilai Rp3.471.006.153,22.

4) Progres Penyelesaian Piutang Negara Lainnya

Berikut adalah progress penyelesaian piutang negara kepada beberapa BUMN, diantaranya:

a. PT Jakarta Llyod (Persero)

Pasca PT Jakarta Llyod kembali digugat PKPU sesuai Putusan No. 301/Pdt.Sus- PKPU/2023/PN. Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 November 2023, telah mengabulkan permohonan PKPU atas PT Jakarta Llyod (Persero).Pemerintah telah mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus PT Jakarta Llyod

(Persero) pada tanggal 6 Desember 2023, dengan tagihan sebesar Rp168.361.692.009,78. Pemerintah akan mengikuti proses PKPU untuk mengoptimalkan penyelesaian piutang negara. Berdasarkan putusan pengadilan, Proposal Perdamaian PKPU yang diajukan PT Djakarta Lloyd diterima oleh mayoritas kreditur dengan skema penyelesaian piutang negara dilakukan penjadwalan kembali selama 18 tahun termasuk masa tenggang selama 2 tahun.

Berdasarkan relaas Mahkamah Agung No.513/PAN.03/W.10.U1/HK2.5/ VIII/2024.MIR tanggal 30 Agustus 2024, putusan homologasi PT Djakarta Lloyd (Persero) dimohonkan kasasi oleh PT Asia Mulia Transpasifik. Implikasi dari permohonan kasasi tersebut, putusan homologasi belum dapat ditindaklanjuti melalui proses amandemen perjanjian pinjaman antara pemerintah dengan PT Djakarta Lloyd (Persero).

b. PT PANN

Sesuai Keputusan Presiden No. 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, telah menyetujui dimulainya penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran PT PANN (Persero). Pada tanggal 17 Oktober 2024 telah ditetapkan Pembubaran Perseroan PT PANN melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2024. Untuk pengajuan tagihan piutang pada PT PANN masih menunggu terbentuknya tim likuidator yang dibentuk oleh PT PPA.

c. PT Kertas Kraft Aceh

Telah diterbitkan PP Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Kraft Aceh. Untuk pengajuan tagihan piutang pada PT KKA masih menunggu terbentuknya tim likuidator yang dibentuk oleh PT KKA. Berdasarkan akta berita acara RUPSLB PT KKA (Dalam Likuidasi) yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2023 dilakukan penunjukkan Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H. sebagai likuidator PT KKA. Likuidator melalui surat nomor 002/KKA-LIKUIDASI/VIII/2023 tanggal 2 Agustus 2023 melakukan pemberitahuan pendaftaran pengajuan kreditor.

Direktur Sistem Manajemen Investasi melalui surat nomor S-258/PB.4/2023 tanggal 21 Agustus 2023 mengajukan tagihan atas pinjaman SLA-1207/DP3/2007 PT KKA dengan jumlah kewajiban sebesar USD8.544.534,67. Telah dilakukan verifikasi piutang oleh Likuidator PT KKA pada tanggal 19 Oktober dan 23 Oktober 2023 dimana Likuidator menyetujui kewajiban PT KKA sebesar USD 8.544.534,67.

Pada tanggal 6 Februari 2024, PT KKA mengajukan pailit sesuai dengan putusan Pengadilan Niaga (PN) Medan No. 1/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Mdn tanggal 6 Februari 2024. Hal tersebut menyebabkan perubahan total perhitungan akhir untuk PT KKA kepada pemerintah atas kewajiban pokok, bunga, jasa bank, dan denda atas bunga sebesar USD9.805.145,77 dengan sifat tagihan preferen atau didahulukan. Tagihan atas Piutang Negara tersebut telah disepakati Tim Kurator sesuai dengan hasil Rapat Verifikasi dan Pencocokan Piutang. Namun, terkait dengan sifat tagihan atas piutang negara Tim Kurator telah memberikan Keputusan untuk memasukkan tagihan tersebut sebagai tagihan konkuren.

Atas hal tersebut, Kementerian Keuangan telah mengajukan gugatan perdata berupa permohonan Renvoi Prosedur kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dengan nomor perkara: 21/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN Niaga Mdn. Telah dilakukan beberapa kali sidang gugatan renvoi prosedur pada perkara kepailitan PT Kertas Kraft Aceh, sejak 24 Juni 2024 s.d. Sidang pembacaan putusan pada tanggal 2 Oktober 2024. Sesuai Laporan Bersama Kasubdit Investasi BUMN dan

Kasubdit Hukum kepada Direktur SMI No. ND-510/PB.44/2024 dan ND-469/PB.43/2024 tanggal 3 Oktober 2024 bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan No. 21/Pdt.Sus-Renvoi/2024/PN Niaga Mdn, permohonan Renvoi prosedur ditolak dan sifat tagihan Pemerintah bersifat konkuren (dimana pembayarannya dilakukan setelah pembayaran tagihan kepada kreditur preferen dan separatis). Tagihan pemerintah pada PT KKA telah dimasukkan dalam daftar piutang tetap PT KKA sebesar Rp153.989.814.242,946.

d. PT Kertas Leces

Telah diterbitkan PP Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kertas Leces tanggal 20 Februari 2023. Tim Kurator melalui surat nomor 881/PAILIT-KL/AG-RB-FEB/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, menyampaikan bahwa Tim Kurator telah mencatatkan Tagihan Kemenkeu Sebesar Rp749.817.814.012,54 ke dalam Daftar Piutang Tetap Kreditur Preferen PT Kertas Leces, dan telah dilakukan pembayaran kepada Pemerintah atas penjualan aset benda bergerak PT Kertas Leces senilai Rp11.796.914.354,13, sehingga Sisa Hak Tagih Pemerintah sebesar Rp 738.020.899.657,54. Saat ini sedang dilakukan pemberesan harta pailit berbentuk tanah. Pengajuan tagihan piutang pada PT Kertas Leces akan disampaikan setelah pemberesan aset tanah selesai.

e. PT Kertas Gowa

Penghapusan piutang pada PT Kertas Gowa akan dilakukan setelah Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU) menyampaikan surat keterangan penghapusan status badan hukum PT Kertas Gowa. Direktur SMI sudah menyampaikan surat kepada Ditjen AHU nomor S-106/PB.4/2023 tanggal 13 April 2023 perihal Permohonan Surat Keterangan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan dan Penghapusan Nama Perseroan PT. Kertas Gowa dari Daftar Perseroan.

Melalui surat nomor AHU.2.UM.01.01-3146 tanggal 4 Agustus 2023, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham menyampaikan tanggapan bahwa PT Kertas Gowa tidak tercatat melakukan perubahan atau pembubaran pada Sistem Administrasi Badan Hukum, juga dalam arsip yang tersimpan di Ditjen AHU. Selanjutnya untuk pengumuman berakhirnya status badan hukum perseroan PT Kertas Gowa dalam Berita Negara, Ditjen AHU mengarahkan untuk berkoordinasi dengan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Direktur SMI telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi atas Pengumuman Berakhirnya Status Badan Hukum PT Kertas Gowa pada Berita Negara Republik Indonesia kepada Direktur Umum PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PT PNRI) melalui Surat nomor S-278/PB.4/2023 tanggal 11 September 2023. Pada tanggal 12 Desember 2023, telah dilaksanakan koordinasi dengan PT PNRI terkait Surat Direktur SMI No. S-278/PB.4/2023 tanggal 11 September 2023. Dari hasil koordinasi, PT PNRI menyampaikan bahwa dalam database Berita Negara RI belum ada pengumuman berakhirnya status badan hukum PT Kertas Gowa pada Berita Negara RI. Namun, belum ada surat tanggapan secara resmi dari PT PNRI.

Direktur SMI telah menyampaikan Surat Permohonan Informasi atas Pengumuman Berakhirnya Status Badan Hukum PT Kertas Gowa pada Berita Negara Republik Indonesia kepada Direktur Umum PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PT PNRI) melalui Surat nomor S-278/PB.4/2023 tanggal 11 September 2023. Pada tanggal 12 Desember 2023, telah dilaksanakan koordinasi dengan PT PNRI terkait Surat Direktur SMI No. S-278/PB.4/2023 tanggal 11 September 2023. Dari

hasil koordinasi, PT PNRI menyampaikan bahwa dalam database Berita Negara RI belum ada pengumuman berakhirnya status badan hukum PT Kertas Gowa pada Berita Negara RI. namun belum ada surat tanggapan secara resmi dari PT PNRI.

Pada tanggal 26 November 2024, telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Konfirmasi Status Badan Hukum Usaha PT Kertas Gowa (Dalam Likuidasi) dengan Ketua Tim Kerja Perseroan Terbatas Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sebagaimana dilaporkan dalam ND-617/PB.44/2024.

Menindaklanjuti kegiatan koordinasi tersebut, Direktorat SMI mengirimkan Surat No. S-335/PB.4/2024 Tanggal 21 Desember 2024 tentang Permohonan Konfirmasi Status Badan Hukum PT Kertas Gowa kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

f. PT Perikanan Indonesia (Perindo)

PT Perindo ditetapkan dalam PKPU berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 107/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2024. Kemenkeu telah mengajukan tagihan piutang negara melalui surat S-2/PB.4/PB.43/2024 tanggal 21 Juni 2024 dan telah ditetapkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT) pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan nilai sebesar Rp44.750.398.705,96 yang terbagi atas: Utang RDI PT Perindo sebesar Rp393.096.679,57 dan terkait Utang TSL BI yang masih tercatat atas PT Perikanus sebesar Rp44.357.302.026,39.

Saat ini telah diputuskan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) melalui Nomor:107/PDT.SUS-PKPU/2024/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 10 Oktober 2024. Hasil putusan tersebut antara lain Kemenkeu sebagai Kreditor Preferen atas piutangnya sebesar Rp. 44.750.398.706 akan dibayarkan setelah *Grace Period* 5 (lima) tahun setelah tanggal Efektif dan setelah *grace period* berakhir hingga tahun ke-15 (lima belas) setelah Tanggal Efektif, kewajiban pembayaran pokok Utang Debitor kepada Kreditor *Preferen* akan dilaksanakan dengan mekanisme *balloon payment*, yaitu dengan cara mencicil setiap 6 (enam) bulan dan pada tahun ke-15 (lima belas) setelah Tanggal Efektif, Debitor akan melakukan pelunasan atas seluruh sisa Utang Debitor. Selanjutnya seluruh pembayaran Utang akan dilaksanakan dengan Sisa Kas Hasil Kegiatan Operasi (CFADS) yang disetor ke Rekening Penerimaan Kas.

Direktorat SMI telah mengadakan rapat koordinasi Penyelesaian Piutang Negara pada PT Perindo Pasca Homologasi pada tanggal 18 Desember 2024 untuk menindaklanjuti Putusan Homologasi Nomor: 107/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Sesuai dengan Surat Undangan Direktur SMI No.UND-430/PB.4/2024 tanggal 17 Desember 2024 Dit. SMI telah berkoordinasi dengan PT Perindo agar segera mengajukan permohonan penyelesaian piutang negara.

b. Progres penyelesaian permohonan restrukturisasi pinjaman SLA dan RDI pada yang dititipkelolakan pada PT PPA

Pada klaster titip kelola danareksa-PPA terdapat penyelesaian utang SLA/RDI melalui pengadilan/penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yaitu pada PT Barata dan PT DPS dengan proses sebagai berikut:

1) PT Barata Indonesia

- a) Berdasarkan Putusan sela majelis hakim pengadilan niaga Surabaya tanggal 23 Agustus 2021 dan pengumuman tim pengurus PT Barata Indonesia (Persero) (Dalam PKPU) tanggal 30 Agustus 2021;

- b) Kewajiban dari pinjaman RDI dengan jumlah sampai dengan 23 Agustus 2021 sebesar Rp 76.268.526.518,41;
- c) Progress terakhir pengesahan perjanjian perdamaian/homologasi telah ditentukan oleh Hakim Pemutus tanggal 6 Desember 2021, dengan skema penyelesaian melalui penjadwalan kembali (Pembayaran akan dilakukan sampai dengan 1% (satu persen) dari total kewajiban Perseroan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun dengan tetap tunduk CFADS (*Cash Flow Available for Debt Service*) sejak Triwulan 1 Tahun 2022) dan opsi konversi atas sisa tagihan pada tahun ke-10 setelah tanggal homologasi.
- d) Setelah Perjanjian Perdamaian tersebut di atas disahkan Majelis Hakim, sebagai bentuk pelaksanaan skema homologasi, PT Barata telah mengirimkan laporan terkait CFADS dengan rincian sebagai berikut:

No	Laporan	Nomor Surat Pengantar	Tanggal	Saldo CFADS/ Pembayaran
1	Review LK Tw II Tahun 2022	20 22 294	23 September 2022	Nihil
2	Review LK Tw III Tahun 2022	20 22 370	15 Desember 2022	Nihil
3	Review LK Tw IV Tahun 2022	20 23 121	23 Mei 2023	Nihil
4	Review LK Tw I Tahun 2023	20 23 191	29 Agustus 2023	Nihil
5	Review LK Tw II Tahun 2023	20 24 010	15 Januari 2024	Nihil

- e) Selama tahun 2022 s.d. tahun 2023, PT Barata belum memiliki kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran pinjamannya.
- f) Direktorat SMI telah mengirim surat No. S-319/PB.4/2024 tentang Permintaan Penyampaian Tindak Lanjut Pasca Putusan Homologasi Pinjaman RDI PT Barata pada 12 Desember 2024. Melalui surat tersebut, Direktorat SMI meminta PT Barata untuk melaksanakan pembayaran piutang negara sesuai dengan putusan homologasi yang telah ditetapkan, dan menyampaikan proyeksi CFADS untuk dijadikan dasar amandemen perjanjian.

2) PT Dok dan Perkapalan Surabaya

- a) Hak Direktur Sistem Manajemen Investasi melalui surat nomor S-61/PB/PB.4/2021 tanggal 19 Oktober 2021 mengajukan tagihan atas pinjaman AMA-184/RDI-110/DSMI/2017 dan AMA-185/RDI-134/DSMI/2017 PT DPS dengan jumlah kewajiban sebesar Rp32.840.212.102,98;
- b) Sesuai dengan Proposal Perdamaian PKPU PT DPS berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan PKPU Nomor 78/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Sby tanggal 9 Februari 2023;
- c) Adapun skema penyelesaian kewajiban RDI PT DPS yaitu setiap arus kas yang tersedia dan/atau dana yang telah digunakan untuk operasional dan pembayaran kepada Karyawan dan Pensiunan akan dibayarkan kepada Kementerian Keuangan melalui skema *balloon payment* selama 15 tahun dengan pembayaran mulai tahun ke 5 setelah tanggal homologasi.
- d) PT DPS telah mengajukan Permohonan Amandemen Perjanjian Pasca Putusan Homologasi sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya Nomor: 24/1034-12/DS/II/M-4 tanggal 16 Desember 2024.

c. Progres penyelesaian restrukturisasi pinjaman pada klaster holding BUMN sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2023, Holding Pangan telah terbit PP No. 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia pada tanggal 29 Desember 2023. Pada Tahun 2024, pemerintah telah menutup perjanjian pinjaman sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-19/MK.5/2024 tanggal 23 Februari 2024 dengan rincian perjanjian pinjaman sebagai berikut:

No	No SLA
1	AMA-416/RDI-265/DSMI/2023
2	AMA-417/RDI-302/DSMI/2023
3	AMA-418/RDI-330/DSMI/2023
4	RDI-414/EKS-RDI-297/DSMI/2023
5	RDI-406/EKS-RDI-213/DSMI/2023
6	RDI-419/EKS-RDI-006/DSMI/2023
7	RDI-420/EKS-RDI-299/DSMI/2023
8	RDI-421/EKS-RDI-371/DSMI/2023
9	SLA-1294/EKS-SLA-181/DSMI/2023
10	RDI-413/EKS-RDI-405/DSMI/2023
11	RDI-407/EKS-RDI-218/DSMI/2023
12	RDI-408/EKS-RDI-335/DSMI/2023
13	RDI-409/EKS-RDI-344/DSMI/2023
14	RDI-410/EKS-RDI-402/DSMI/2023
15	RDI-411/EKS-RDI-403/DSMI/2023
16	RDI-412/EKS-RDI-404/DSMI/2023
17	RDI-415/EKS-RDI-401/DSMI/2023
18	SLA-1295/EKS-SLA-1291/DSMI/2023

- 2) Pada Tahun 2023, Holding Industri Pertahanan terbit PP No. 63 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri pada tanggal 27 Desember 2023. Pada Tahun 2024, pemerintah telah menutup perjanjian pinjaman sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-26/MK.5/2024 tanggal 29 Maret 2024 dengan rincian perjanjian pinjaman sebagai berikut.

No	No SLA
1	AMA-1296/SLA-716/DSMI/2023
2	SLA-1305/EKS-SLA-461/DSMI/2023
3	SLA-1306/EKS-SLA-183/DSMI/2023
4	RDI-423/EKS-RDI-172/DSMI/2023
5	RDI-422/EKS-RDI-173/DSMI/2023
6	SLA-1298/EKS-SLA-1275/DSMI/2023
7	SLA-1299/EKS-SLA-1279/DSMI/2023
8	SLA-1302/EKS-SLA-1284/DSMI/2023
9	SLA-1301/EKS-SLA-1285/DSMI/2023
10	SLA-1303/EKS-SLA-1286/DSMI/2023
11	SLA-1304/EKS-SLA-1287/DSMI/2023
12	SLA-1300/EKS-SLA-1288/DSMI/2023
13	SLA-1297/EKS-SIA-1289/DSMI/2023

- 3) Selain penutupan perjanjian pinjaman pada BUMN Holding Pangan dan Industri, telah dilakukan penutupan perjanjian pada beberapa debitur berikut:

No	Debitur	Nomor Perjanjian	Surat Penutupan
1	PT. Telkom	SLA-710/DP3/1993	S-93/MK.5/2023
2	PT. Telkom	SLA-744/DP3/1993	S-40/MK.5/2024
3	BPD Sumsel Babel	AMA-74/KP-029/DSMI/2014	S-33/MK.5/2024
4	BPD Aceh	AMA-69/KP-047/DSMI/2014	S-34/MK.5/2024
5	BPD Kalbar	AMA-78/KP-046/DSMI/2014	S-35/MK.5/2024
6	BPD Sumut	AMA-76/KP-027/DSMI/2014	S-36/MK.5/2024

D.3.6. BA 999.05

1. Kebijakan Penyaluran Transfer ke Daerah Sejak TA 2023

Pada tahun 2023, terdapat kebijakan pengalihan penyaluran transfer ke Daerah dari DJPK kepada DJPb. Sesuai dengan beberapa PMK terkait kebijakan pengelolaan Dana Transfer, KPA Pengelolaan Dana Transfer adalah para Eselon II di unit teknis DJPK, sedangkan KPA Penyalur Transfer Ke Daerah adalah KPPN, yang memiliki 3 (Tiga) Satuan Kerja yaitu KPA Penyalur Dana Transfer Umum, KPA Penyalur Dana Transfer Khusus, dan KPA Penyalur Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Yogyakarta. Oleh karena itu selaku UAKPA BUN Penyalur TKD TA 2023, KPPN menyusun 3 (Tiga) Laporan Keuangan untuk Periode Periode Triwulan III TA 2023, Triwulan III TA 2023, dan – Audited TA 2023.

Dengan berubahnya entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pada KPPN, maka dilakukan Likuidasi pada Satuan Kerja lama yaitu KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Selanjutnya atas hak dan kewajiban pada satker sebelumnya, dilakukan mutasi ke satker baru KPPN selaku KPA Penyalur Transfer Ke Daerah dan Dana Desa. Rincian Piutang sesuai dengan LK TA 2022 Audited adalah sebagai berikut:

- Piutang DAK Nonfisik sebesar Rp235.474.854.444.
- Piutang Dana Desa sebesar Rp6.663.568.678.

Selain itu, dengan beralihnya KPA Penyalur TKD seluruh jenis TKD dari DJPK ke KPPN, maka dilakukan pencatatan seluruh hak dan kewajiban atas pengelolaan TKD. Sehingga dilakukan serah terima catatan Utang dan Piutang yang dibuktikan dengan dokumen Berita Acara Serah Terima Utang dan/atau Piutang antara Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer dengan Direktur Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator KPA Penyalur Transfer Ke Daerah sesuai dengan BAST sebagaimana berikut:

- BAST nomor ND-367/PK.4/2023 tanggal 10 Juli 2023 perihal Serah Terima Utang dan/atau Piutang DAK Nonfisik.
- BAST nomor BA-3/PK.4/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Serah Terima Utang dan/atau Piutang Dana Bagi Hasil (DBH).
- BAST nomor ND-70/PK.7/2023 tanggal 12 Agustus 2023 Perihal Serah Terima Piutang Dana Keistimewaan Yogyakarta.

2. Kebijakan Alokasi Tambahan DAU untuk Gaji ke-13 dan THR Guru ASND

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PP Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan

Penerima Tunjangan Tahun 2024, guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan THR dan Gaji ke-13 paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan KMK Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah.

Sesuai dengan KMK 416 Tahun 2024 dimaksud, ditetapkan perubahan rincian alokasi DAU berupa rincian alokasi tambahan DAU kepada Pemda dalam rangka pemberian dukungan pendanaan THR dan gaji ketiga belas pegawai ASN guru yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.877.820.308.000. Alokasi tambahan DAU tersebut disalurkan secara sekaligus paling cepat pada bulan Oktober Tahun 2024 kepada seluruh Pemda (546 Pemda) sesuai ketentuan peraturan perundangan. Sampai dengan 31 Desember 2024, alokasi tambahan DAU Dukungan Pendanaan THR dan Gaji Ke-13 bagi Guru ASND yang tidak menerima tambahan penghasilan telah tersalur 100%.

3. Kebijakan Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pemberian Dukungan dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemda untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Dalam PMK ini disampaikan bahwa Daerah wajib merealisasikan kewajiban hibah Pilkada Serentak tahun 2024 yang tertuang dalam dokumen NPHD yang bersumber dari APBD. Namun, apabila Daerah tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka dapat dilakukan: a) penarikan dana TDF; b) pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau c) pemotongan penyaluran TKD lainnya dan/atau kelayakan bagi daerah dalam menerima insentif fiskal pada tahun berjalan atau tahun berikutnya, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Kemudian, ditetapkan KMK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana TDF dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya dalam rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Selain PMK Nomor 56 Tahun 2024, KMK ini juga memperhatikan Surat Plt. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.10/4077/SJ tanggal 27 Agustus 2024 hal Permohonan Pelaksanaan *Intercept* terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Kewajiban Pendanaan Pilkada Serentak Tahun 2024. Dalam KMK ini, ditetapkan rincian penarikan dana *Treasury Deposit Facility* dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang tidak ditentukan penggunaannya untuk penyelesaian pemenuhan kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 menurut daerah kabupaten/kota sebesar Rp897.883.686.117 beserta teknis pelaksanaannya.

Nilai tersebut merupakan jumlah kewajiban pendanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang belum dipenuhi masing-masing Daerah dihitung berdasarkan surat permintaan penyelesaian kewajiban pemerintah daerah dari Kemendagri, dan telah dilakukan upaya penagihan penyelesaian secara optimal per Agustus 2024. Sesuai dengan KMK Nomor 19 Tahun 2024, terdapat 66 pemda yang masih memiliki kewajiban hibah pemda terkait dukungan pilkada serentak sebesar

Rp897.883.686.117. Dari 66 pemda tersebut, masih terdapat 6 daerah yang memiliki nilai sisa kewajiban yang cukup material sebesar Rp94.001.063.042 dan belum terselesaikan setelah dilakukan pemotongan melalui penarikan TDF dan pemotongan DAU/DBH. Keenam daerah tersebut adalah Kab. Aceh Timur, Kab. Bone, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Buru, Kab. Keerom, dan Kab. Manokwari. Atas 6 daerah tersebut, terdapat 2 daerah telah menyelesaikan kewajibannya secara langsung kepada KPUD dan Bawaslu Daerah, yaitu Kab. Aceh Timur sebesar Rp9.588.127.055 dan Kab. Timor Tengah Selatan sebesar Rp17.473.621.000. Sehingga, sisa kewajiban hibah pemda menjadi Rp72.317.377.590 (data per 8 Oktober 2024).

Selanjutnya, berdasarkan hasil koordinasi dan assesment di internal KPU dan Bawaslu, telah disampaikan usul revisi anggaran pada DIPA KPU dan Bawaslu TA 2024, untuk penyelesaian sisa kewajiban hibah pilkada atas 4 Pemkab dimaksud, yang ditetapkan dengan Surat Pengesahan Revisi Anggaran (SPRA) Nomor S-609/AG/AG.5/2024 tanggal 11 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran KPU TA 2024 (Revisi ke-7) dan SPRA Nomor S-608/AG/AG.5/2024 tanggal 11 November 2024 hal Pengesahan Revisi Anggaran ke-6 Bawaslu TA 2024, yang menetapkan besaran final sisa kewajiban hibah pilkada pada Rp44.183.087.000,00.

Besaran final penyelesaian sisa kewajiban hibah pilkada pada 4 daerah tersebut merupakan kewajiban pemerintah daerah yang akan diperhitungkan melalui pemotongan penyaluran DAU dan/atau DBH yang tidak ditentukan penggunaannya TA 2025, dengan rincian yang disajikan sesuai dengan tabel berikut.

No.	Daerah	KPUD	Bawaslu Daerah	Total
1.	Kab. Bone	17.882.400.000	7.965.148.000	25.847.548.000
2.	Kab. Buru	2.697.499.000	401.755.000	3.099.254.000
3.	Kab. Keerom	4.122.000.000	6.971.787.000	11.093.787.000
4.	Kab. Manokwari	-	4.142.498.000	4.142.498.000
Total		24.701.899.000	19.481.188.000	44.183.087.000

4. Program Percepatan Penurunan *Stunting*

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah (TKD) untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, terdapat 3 (tiga) jenis TKD yang diamanatkan untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, yaitu (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, (2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan (3) Dana Desa.

a. DAK Fisik

Dukungan DAK Fisik untuk pencegahan *Stunting* pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pada Bidang Kesehatan, Air Minum, dan Sanitasi. Selain itu, program penanggulangan *Stunting* juga diwujudkan dengan konvergensi sumber-sumber pendanaan tersebut pada lokasi prioritasnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Rincian kegiatan penurunan prevalensi *Stunting* dukungan DAK Fisik.

1) DAK Fisik Bidang Air Minum

DAK Fisik Bidang Air Minum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mewujudkan pemenuhan 100% akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target Sustainable Development Goals (SDGs) atau TPB Goal ke 6.1.1 dan

untuk mewujudkan pemenuhan SPM serta untuk mendukung program prioritas nasional, dengan komitmen dan upaya pemerintah daerah. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang terkait dengan pencegahan *Stunting* terdori dari Subbidang Air Minum dan Subbidang Air Minum – Tematik Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu.

Untuk Tahun 2024, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Air Minum yang mendukung penanganan *Stunting* mencapai 94,99% atau dari pagu Rp2.441,6 Milyar telah tersalur Rp2.319,3 Milyar dengan 259 daerah lokasi yang disalurkan.

2) DAK Fisik Bidang Kesehatan

DAK Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Terdapat 2 subbidang yang terkait dengan upaya penurunan *Stunting* tahun 2024, yaitu subbidang Keluarga Berencana dan Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi *Stunting*. Pada tahun 2024, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan mencapai 91,87% atau dari pagu Rp1.617,8 Milyar telah tersalur Rp1.486,2 Milyar dengan 509 daerah lokasi yang disalurkan.

3) DAK Fisik Bidang Sanitasi

DAK Fisik Bidang Sanitasi adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dalam rangka mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan menuju target TPB bidang sanitasi serta pemenuhan SPM air limbah melalui dukungan Pemerintah Daerah dalam peningkatan cakupan layanan sanitasi. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK). Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung prevalensi *Stunting* terdiri dari Subbidang Sanitasi dan Subbidang Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu.

Untuk Tahun 2024, data penyaluran untuk DAK Fisik Bidang Sanitasi yang mendukung penanganan *Stunting* mencapai 97,92% atau dari pagu Rp1.693,7 Milyar telah tersalur Rp1.658,4 Milyar dengan 257 daerah lokasi yang disalurkan.

b. DAK Non Fisik

Dukungan Percepatan Pencegahan *Stunting* melalui DAK Nonfisik Tahun 2024 meliputi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Secara umum total penyaluran untuk keempat DAK Nonfisik terkait *Stunting* adalah sebesar 99,54% atau sebesar Rp9.748,2 Milyar dari pagu sebesar Rp9.793,1 Milyar. Rincian alokasi dan realisasi DAK Nonfisik TA 2024 terkait penanganan *Stunting*.

1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan upaya pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah untuk mencapai target nasional di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. BOK adalah bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Usaha Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif sesuai SPM menuju target SDGs atau TPB. Kegiatan yang didanai BOK meliputi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu (1) upaya kesehatan, (2) penyelenggaraan manajemen kesehatan, serta (3) upaya

pendukung/penunjang untuk keberhasilannya. Upaya kesehatan wajib yang dibiayai BOK diantaranya upaya kesehatan promotif dan preventif yang meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), imunisasi, perbaikan gizi, promosi kesehatan, pengendalian penyakit, penyehatan lingkungan dan upaya kesehatan lainnya. Terkait kegiatan penunjang, BOK juga bisa membiayai kegiatan diantaranya meliputi kegiatan Poskesdes dan Posyandu, pengelolaan administrasi BOK, rapat koordinasi lintas sektor, pendampingan musyawarah masyarakat desa, orientasi kader kesehatan, penyuluhan kesehatan dan studi banding antar Puskesmas.

Tahun 2024, penyaluran BOK *Stunting* telah mencapai 99,45% atau Rp7.057,4 milyar dari pagu sebesar Rp7.096,2 milyar, artinya hampir seluruh daerah sudah mendapatkan penyaluran BOK *Stunting*.

2) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)

Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian prioritas nasional yaitu sasaran Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Tujuan dari BOKB adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan KB dan Kespro; mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan *Stunting* melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.

Per 31 Desember 2024, BOKB untuk *Stunting* sudah tersalurkan sebesar Rp2.212,7 Miliar atau sebesar 99,95% dari alokasi anggaran ke Kabupaten/Kota untuk DAK Non Fisik *Stunting*-BOKB sebesar Rp2.213,9 Miliar.

3) Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)

Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) adalah dana yang ditujukan untuk mendukung keberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri dengan membantu pemerintah daerah dalam menyukseskan program pekarangan pangan lestari. Dukungan program percepatan pencegahan *Stunting* melalui DKPP ini dilakukan dalam bentuk kegiatan pekarangan pangan lestari yang dapat meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga sesuai kebutuhan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta untuk jangka panjang serta dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga melalui penyediaan pangan yang berorientasi pasar.

Pada tahun 2024, DKPP terkait *Stunting* telah disalurkan sebesar 99,30% atau Rp128,4 Miliar dari alokasi sebesar Rp129,3 Miliar.

4) BOP PAUD

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) adalah dana yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan secara bertahap SPM pendidikan dan mendukung pelaksanaan satu tahun pra sekolah. Dukungan program percepatan pencegahan *Stunting* melalui BOP PAUD ini dilakukan dalam bentuk kegiatan 'pelaksanaan kegiatan

pembelajaran dan bermain' dengan sub kegiatan 'pembiayaan diskusi perkembangan anak', dan kegiatan 'penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan' yang meliputi sub kegiatan 'penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang' dan 'penyediaan makanan tambahan'.

Pada tahun 2024, BOP PAUD terkait *Stunting* telah disalurkan sebesar 98,85% atau Rp349,7 Miliar dari alokasi sebesar Rp353,7 Miliar.

c. Dana Desa

Dukungan Dana Desa untuk pencegahan *Stunting* pada Tahun Anggaran 2024 dari 434 daerah penerima Dana Desa dialokasikan sebesar Rp6.832,6 miliar dan terealisasi sebesar Rp6.832,6 miliar atau 100%.

Terkait dana desa untuk kegiatan penanganan *Stunting*, antara lain dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, yang terdiri atas:

- 1) Pelatihan Pengolahan makanan bergizi bagi guru PAUD dan orangtua siswa
- 2) Pendayagunaan Lahan Desa dalam rangka Penyediaan Makanan Sehat dan Bergizi untuk Ibu Hamil Balita dan Anak Sekolah
- 3) Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah.

Sedangkan Kegiatan penanganan *Stunting* melalui pembangunan desa antara lain terdiri dari:

- 1) Pengelolaan Advokasi Konvergensi Pencegahan *Stunting* di Desa melalui Aplikasi Digital (e-HDW)
- 2) Biaya Operasional KPM *Stunting*
- 3) Pembiayaan Pelatihan Guru PAUD tentang konvergensi pencegahan *Stunting*
- 4) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan *Stunting*
- 5) Tindakan Promotif dan Preventif untuk Pencegahan *Stunting* melalui Rumah Desa Sehat
- 6) Kegiatan Intervensi Pencegahan *Stunting* Terintegrasi.

Adapun penggunaan Dana Desa dalam mendukung penurunan dan pencegahan *Stunting* melalui tindakan promotif dan preventif seperti;

- 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
- 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
- 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
- 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran *Stunting*;

- 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran *Stunting*;
- 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada Pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa; dan
- 8) kegiatan pencegahan dan penurunan *Stunting* lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT	Jumlah Kab/ Kota	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Penyaluran	%
	1	2	3	4	5	6
A	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		5.753.109.178.000		5.463.958.217.532	94,97%
	Bidang Air Minum	259	2.441.600.000.000		2.319.286.566.128	94,99%
	Subbidang Air Minum	244	2.375.753.042.000		2.260.368.257.857	95,14%
	Subbidang Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	27	65.846.958.000		58.918.308.271	89,48%
	Bidang Kesehatan	509	1.617.809.178.000		1.486.219.056.153	91,87%
	Subbidang Keluarga Berencana	318	400.000.000.000		377.638.505.657	94,41%
	Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi <i>Stunting</i>	457	1.217.809.178.000		1.108.580.550.496	91,03%
	Bidang Sanitasi	257	1.693.700.000.000		1.658.452.595.251	97,92%
	Subbidang Sanitasi	242	1.643.855.791.000		1.614.084.133.585	98,19%
	Subbidang Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	30	49.844.209.000		44.368.461.666	89,01%
B	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) NON Fisik		9.793.098.944.248		9.748.209.438.742	99,54%
	<i>Stunting</i> -BOK	546	7.096.196.314.448		7.057.440.411.877	99,45%
	<i>Stunting</i> -BOKB	513	2.213.860.351.000		2.212.704.582.000	99,95%
	<i>Stunting</i> -BOP PAUD	509	353.723.203.800		349.655.369.865	98,85%
	<i>Stunting</i> -KPP	235	129.319.075.000		128.409.075.000	99,30%
C	Dana Desa		6.832.632.728.000		6.832.632.728.000	100,00%
	Penanganan <i>Stunting</i>	434	6.832.632.728.000		6.832.632.728.000	100,00%
	TOTAL		22.378.840.850.248		22.044.800.384.274	98,51%

5. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah

Dalam melaksanakan kebijakan pencapaian visi Indonesia Maju 2045 di bidang pendidikan, anggaran pendidikan dalam APBN TA 2024 dialokasikan sebesar Rp668,69 triliun, adapun Realisasi Anggaran Pendidikan TA 2024 sebesar Rp569,08 triliun atau 85,10 persen. Jumlah tersebut dialokasikan melalui BPP, TKD, dan investasi Pemerintah pada pos pembiayaan. Anggaran pendidikan melalui TKD terdiri atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dan DAU yang diperkirakan untuk bidang pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otsus yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan terkait otsus. Anggaran pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat perkiraan, mengingat komponen tersebut sebagian besar bersifat block grant. Komponen terbesar anggaran pendidikan melalui DAU diperkirakan untuk pembayaran gaji tenaga pendidik yang bertugas di daerah.

Kontribusi DBH pada anggaran pendidikan adalah melalui earmarking alokasi Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus yang dimanfaatkan untuk sektor pendidikan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta prioritas daerah. Penggunaan Tambahan DBH SDA Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu paling sedikit 30% dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh. Selanjutnya, alokasi tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus untuk Provinsi Papua Barat

dan Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 digunakan sekurang-kurangnya 35% untuk biaya pendidikan. Selain itu, dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30% untuk bidang pendidikan.

Pada tahun 2023, Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya, antara lain untuk pendidikan. Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang pendidikan tersebut dipergunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan sesuai dengan kegiatan dan subkegiatan prioritas dan pendukung sesuai ketentuan perundang-undangan, termasuk untuk belanja yang terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang pendidikan serta belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan kepada ASND guru dan tenaga kependidikan di daerah. Pada tahun 2024, kebijakan DAU yang Ditentukan Penggunaannya untuk bidang pendidikan akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga memberikan dampak yang lebih baik bagi peningkatan layanan bidang pendidikan di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja penggunaan DAU untuk bidang pendidikan.

Selanjutnya, komponen DAK yang merupakan bagian dari anggaran pendidikan mencakup DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK Nonfisik terkait pendidikan. DAK Fisik Bidang Pendidikan bertujuan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur publik terutama sarana dan prasarana pendidikan berupa pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas. Sedangkan DAK Nonfisik bidang pendidikan antara lain meliputi BOSP (BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan), Tunjangan Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru ASND, serta BOP Museum dan Taman Budaya.

Realisasi anggaran Pendidikan melalui TKD TA 2024 adalah sebesar Rp325.8 Triliun. Alokasi dan realisasi anggaran Pendidikan melalui TKD TA 2024 sebagaimana tersaji pada tabel 60 berikut.

No	Uraian	APBN 2024	DIPA	Realisasi
2	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah	346.558.708.175.000	346.353.735.592.100	340.537.817.833.377
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	212.177.520.091.000	211.972.547.508.650	208.057.038.003.144
2.1.1	Dana Bagi Hasil		516.811.411.650	516.811.411.650
	- Gas Bumi Dalam Rangka Otsus		382.688.268.150	382.688.268.150
	- Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus		134.123.143.500	134.123.143.500
2.1.2	Dana Alokasi Umum		211.455.736.097.000	207.540.226.591.494
	- Non Gaji		28.103.017.904.000	27.957.689.361.000
	DAU Earmarked Pendidikan (Non Gaji)		28.103.017.904.000	27.957.689.361.000
	- Gaji		183.352.718.193.000	179.582.537.230.494
	DAU Earmarked Pendidikan (Gaji)		9.367.672.635.000	9.319.229.787.000
	DAU Blockgrant Untuk Gaji Pendidik		144.924.338.036.000	144.924.338.036.000
	DAU Blockgrant untuk PPPK Guru diangkat TA 2024		12.492.196.724.000	12.492.196.724.000
	DAU Tambahan Komponen THR/G13		5.877.820.308.000	5.877.820.308.000
	DAU Earmarked PPPK Guru 2024		10.690.690.490.000	6.968.952.375.494
2.2	Dana Alokasi Khusus	132,135,766,740,000	132,135,766,740,000	129,532,285,853,696
2.2.1	DAK Fisik	15.820.300.000.000	15.820.300.000.000	15.117.625.243.790
2.2.2	DAK Nonfisik	116.315.466.740.000	116.315.466.740.000	114.414.660.609.906
2.2.2.1.	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	59.493.556.448.000	59.493.556.448.000	58.822.841.659.315
	- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		53.864.082.908.000	53.308.509.500.854

No	Uraian	APBN 2024	DIPA	Realisasi
	- BOP PAUD		4.009.229.010.000	3.963.347.151.955
	- BOP Pendidikan Kesetaraan		1.620.244.530.000	1.550.985.006.506
2.2.2.2.	Tunjangan Guru ASND	56.651.935.292.000	56.651.935.292.000	55.421.843.950.591
	- Tunjangan Profesi Guru ASND		52.872.544.576.000	51.850.462.245.921
	- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND		1.595.777.805.000	1.495.768.803.108
	- Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus		2.183.612.911.000	2.075.612.901.562
2.2.2.3	BOP Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	169.975.000.000
2.3	Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2,245,421,343,450*)	2,245,421,343,450	2.948.493.976.537**)
Jumlah		346.558.708.175.000	346.353.735.592.100	340.537.817.833.377

Catatan:

*) Pagu tematik Pendidikan dari dana otsus berdasarkan proxy karena tidak ada alokasi otsus yang bersifat tematik.

**) Realisasi penyerapan tematik pendidikan T.A. 2024 berdasarkan data yang disampaikan pemda.

***) Pagu alokasi dan penyerapan tematik 2024 baru dapat disajikan setelah laporan tahunan disampaikan oleh seluruh pemda di wilayah aceh dan papua. Sampai dengan saat ini, belum ada pemda yang menyampaikan laporan tahunan.

D.3.7. BA 999.07

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sejalan dengan penetapan undang-undang tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program PEN dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Penetapan peraturan pemerintah tersebut merupakan upaya dukungan Pemerintah terhadap pemulihan perekonomian bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengalami gangguan yang signifikan baik dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya sebagai bagian dari dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Program PEN sebagaimana tercantum dalam peraturan pemerintah tersebut diatas dilaksanakan melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara, Investasi Pemerintah, Penjaminan, Penempatan Dana, dan Belanja Negara. Sesuai dengan Pasal 20 peraturan pemerintah tersebut diatas, Program PEN melalui mekanisme Belanja Negara dapat dilakukan antara lain melalui pemberian subsidi bunga kepada debitur perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program kredit Pemerintah yang memenuhi persyaratan.

Program PEN Pada BA BUN Belanja Subsidi (BA 999 07) Periode Tahun 2024 terdapat pada satker

No	Satuan Kerja		Jenis Subsidi
1	999701	Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko	Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsidi IJP BUMN Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Subsidi IJP UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
2	999704	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Covid-19, maka program pemulihan ekonomi nasional karena dampak Covid-19 juga berakhir.

PENGUNGKAPAN PENTING PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

1. Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak

1. Terdapat pula subsidi PPh Pasal 21 DTP atas IKN yang pada pelaksanaannya di tahun 2024 ini belum ada pemanfaatan yang sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

- 1) Realisasi Belanja Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 yang belum optimal disebabkan beberapa hal antara lain:
 - Kondisi ekonomi yang masih tidak pasti diakibatkan masih belum optimalnya penanganan pandemik covid-19, sehingga menyebabkan Bank Penyalur masih berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada UMKM dan Pelaku Usaha Korporasi. Selain itu, dampak dari pandemik covid 19 yang menyebabkan rendahnya sisi demand mengakibatkan banyak pelaku usaha belum berminat untuk melakukan ekspansi usaha.
 - Sebagai langkah mitigasi, Pemerintah bersama Pihak Penjamin telah beberapa kali melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sosialisasi melalui media daring (webinar) dengan mengundang pihak-pihak terkait lainnya.
- 2) Dalam pelaksanaan penjaminan program PEN bagi UMKM, Korporasi dan BUMN
 - Dalam rangka melaksanakan UMKM, Menteri Keuangan menugaskan PT Jamkrindo dan PT Askindo untuk melakukan penjaminan untuk sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi COVID-19.
 - Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah Pelaku Usaha Korporasi, Menteri menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan Penjaminan Pemerintah bagi pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang kekayaan bersihnya di atas Rp10 miliar dan omzet tahunannya di atas Rp50 miliar yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona COVID-19. Dalam Pelaksanaan Penjaminannya Menteri menugaskan LPEI untuk melakukan penjaminan bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
 - Dalam rangka melaksanakan Penjaminan Pemerintah untuk BUMN, Menteri menugaskan PT PII dan LPEI untuk memberikan Penjaminan kepada BUMN yang terdampak pandemi COVID-19 dan mendapat penugasan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional.

2. Kementerian Pertanian

KPA Subsidi Bunga sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290 / Kpts/Kp.230/M/ 07/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian telah terjadi pergantian KPA semula Ir. Baginda Siagian, M.Sc. menjadi Dr. Drs. Atekan, M.Si. Kemudian terjadi perubahan Pejabat Tinggi Pratama sesuai dengan Pelantikan Pimpinan Tinggi Pratama pada 29 November 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian

Nomor 685/Kpts/KP.230/M/11/2024, maka berdampak terhadap perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kredit Usaha Alsintan dari semula Dr. Drs. Atekan, M.Si menjadi Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M. Sc, dimana KPA definitive terakhir tidak bersedia ditunjuk menjadi KPA Kredit Alsintan sehingga tagihan subsidi bunga/subsidi margin Kredit Alsintan bulan November tidak dapat dibayarkan. Selanjutnya, pada KPA Subsidi Pupuk sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290 / Kpts/Kp.230/M/07/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian telah terjadi pergantian Direktur Pupuk dan Pestisida semula Ir. Tommy Nugraha, M.M.menjadi Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si.

Pada Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian ditetapkan sebagai penanggungjawab kegiatan penyaluran dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan dana Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan, peraturan tersebut adalah : a. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian; b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Taksir Alat dan Mesin Pertanian; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat Dan Mesin Pertanian; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program. Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terkait dengan pengelolaan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan adalah Direktorat Perlindungan dan Penyediaan Lahan selaku KPA dan Direktorat Pembiayaan Pertanian selaku pelaksana pengelolaan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan berpedoman pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), adapun kegiatannya meliputi : sinkronisasi alokasi subsidi alsintan, merumuskan usulan indikasi kebutuhan dana subsidi, serta koordinasi rencana target penyaluran, melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan penyalur, pembayaran subsidi bunga dan pengujian dokumen tagihan subsidi bunga. Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan tahun 2024 digunakan untuk kegiatan pembayaran subsidi bunga/subsidi margin Kredit Alsintan kepada penyalur. Pada bulan Juli 2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan kode satker (979302) memperoleh DIPA awal senilai Rp8.537.187.000,00 untuk memenuhi kebutuhan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan dengan Alokasi Plafon Kredit Sebesar Rp300 Miliar berdasarkan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, selaku Sekretaris Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Nomor PK.KUR/29/D.I.M.EKON/03/2024 hal Proyeksi Kebutuhan Anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alsintan tanggal 1 Maret 2024, dengan target atas subsidi bunga/subsidi margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sebanyak 400 debitur. Pada tanggal 7 Maret 2024 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara Kuasa Pengguna Anggaran Satker Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dengan Direktur Utama BPD BALI, BPD Jateng dan BPD Yogyakarta terkait penyaluran Kredit Alsintan. selanjutnya telah terbit DIPA Revisi pada tanggal 29 Desember 2024 dengan alokasi anggaran senilai Rp100.000.000,00 dengan realisasi belanjanya senilai Rp41.353.431.

Tahun Anggaran 2024 Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga ditetapkan sebagai penanggungjawab kegiatan penyaluran dana subsidi pupuk. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar dalam pelaksanaan dana subsidi pupuk, peraturan tersebut adalah : a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban

Dana Subsidi Pupuk; b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.256/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pencairan Dana Cadangan Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terkait dengan pengelolaan anggaran subsidi pupuk adalah Direktorat Pupuk dan Pesticida. Pelaksanaan pengelolaan anggaran subsidi pupuk berpedoman pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), adapun kegiatannya meliputi: subsidi pupuk, subsidi harga melalui produsen (PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Iskandar Muda dan Pt. Pupuk Kaltim. Anggaran subsidi pupuk digunakan untuk kegiatan penyediaan dan penyaluran subsidi harga pupuk, penggantian biaya produksi pupuk yang harus dibayar oleh pemerintah meliputi pupuk urea, ZA, SP-36, NPK serta pupuk organik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur mengenai kebutuhan dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian Nomor 28 Tahun 2020. Pendistribusian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani dilakukan melalui pola tertutup berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Subsidi Benih:

Sejak tahun 2018, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan BA.999.07 tidak mendapatkan alokasi anggaran lagi (inaktif), namun anggaran dialihkan ke BA.018 (Belanja Sektor) untuk program mandiri benih seribu desa.

3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Deputi Bidang Usaha Mikro KUKM

Pagu anggaran belanja Subsidi IJP KUR dan Subsidi Bunga / Subsidi Marjin KUR TA 2024 didasarkan pada DIPA Nomor DIPA-999.07.1.984620/2024 tanggal 22 Desember 2023 dengan Nama Satker Deputi Bidang Usaha Mikro (Kode 984620) sebesar Rp47.788.860.944.000.

Pada Tahun 2024 capaian *output* atas pembayaran subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR sebagai berikut:

- Target IJP KUR yaitu tersalurkannya IJP KUR kepada 2 (dua) perusahaan penjamin dengan realisasi penyaluran kepada 1 perusahaan penjamin (50%).
- Target subsidi bunga/subsidi marjin KUR yaitu tersalurkannya subsidi bunga/subsidi marjin KUR kepada 4.848.747 debitur atas akad Desember 2023 s.d November 2024 dengan realisasi kepada 4.830.785 debitur.

Dapat disampaikan bahwa sampai dengan 31 Desember 2024 masih terdapat potensi tagihan subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang belum dilakukan penagihan dan/atau belum diverifikasi sebesar Rp7.754.762.377.616 terdiri dari:

- Subsidi IJP KUR sebesar Rp1.745.414.435.798;
- Carry over* Subsidi bunga/subsidi marjin KUR reguler sebesar Rp2.883.013.475.438;
- Carry over* Subsidi bunga/subsidi marjin KUR tambahan sebesar Rp132.555.777.124;
- Potensi kewajiban subsidi KUR TA 2024 sebesar Rp2.993.778.689.256.

Potensi tagihan subsidi IJP KUR dan subsidi bunga/subsidi marjin KUR TA 2024 setelah dilakukan penagihan oleh Penjamin dan Penyalur, sebelum dilakukan pembayaran oleh Kuasa Pengguna Anggaran akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh BPKP.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, bahwa terdapat perubahan nomenklatur Kementerian Koperasi dan UKM menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdapat perubahan nomenklatur untuk urusan pemerintahan di bidang UMKM yang semula pada Kementerian Koperasi dan UKM menjadi pada Kementerian UMKM.

D.3.8. BA 999.08

1. Perbandingan jumlah satker pengguna dana BA 999.08 Tahun 2024 dan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Kementerian Negara/ Lembaga/Pihak Lain	Tahun		Keterangan
		Tahun 2024	Tahun 2023	
1	Kementerian Sekretariat Negara	2	2	
a	Istana Kepresidenan Jakarta	V	V	
b	Sekretariat Wakil Presiden	V	V	
2	Kementerian Keuangan	4	4	
a	Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan	V	V	
b	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	V	V	
c	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua	V	V	
d	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	-		
e	Direktorat Sistem Perbendaharaan, DJPB	-	-	
f	Direktorat Pelaksanaan Anggaran, DJPB	-	-	
g	Dit. PNBPD SDA dan KND - Satker Penyalur Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik	-		
h	Dit. PNBPD SDA dan KND - Satker Dana Kompensasi	V	V	
3	Kementerian Pertanian	1	1	
	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	V	V	
4	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	1	
	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo	V	V	
5	MPP Prakerja	1	1	
	Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja	V	V	
6	BP Batam	1	1	
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	V	V	
7	Otoritas Jasa Keuangan	1	1	
	Otoritas Jasa Keuangan	V	V	
8	SKK Migas	1	1	
	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	V	V	
9	Bapanas	1	1	
	Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan *	V	V	
Total		13	13	

* Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan menyampaikan Laporan Keuangan Likuidasi tanggal 10 September 2024

2. Satker SKK Migas

a. Dana Abandonment and Site Restoration (ASR)

Dana ASR merupakan akumulasi dana yang disimpan di dalam rekening bersama (*escrow account*) yang diawasi oleh SKK MIGAS dan Kontraktor yang dicadangkan untuk pelaksanaan kegiatan pasca operasi (ASR) yaitu kegiatan untuk menghentikan pengoperasian fasilitas produksi dan sarana penunjang lainnya secara permanen dan menghilangkan kemampuannya

untuk dapat dioperasikan kembali, serta melakukan pemulihan lingkungan di wilayah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pencadangan dana ASR dimulai sejak KKKS berproduksi komersial sampai dengan produksi berakhir (umur ekonomis lapangan) dan dilakukan setiap semester dalam mata uang USD ke Rekening Bersama berdasarkan estimasi biaya ASR yang terakhir dibagi dengan jangka waktu pengumpulan.

Menindaklanjuti surat Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perbendaharaan – Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No S-14/PB/PB.6/2022 tanggal 04 Maret 2022, perihal Pengaturan Lebih Lanjut Atas Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Atas Pencadangan Dana Abandonment and Site Restoration (ASR) Yang Ditempatkan Pada Rekening Bersama Antara SKK Migas/BPMA dan KKKS Terkait Kegiatan Hulu Migas. Pencatatan dan pelaporan pada laporan keuangan Dana ASR dilakukan secara periodik dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan. Penyajian atas saldo Dana ASR disajikan pada Neraca SKK Migas dan tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas.

Pengelolaan dan penatausahaan dana ASR pada rekening bersama dilakukan oleh SKK Migas berdasarkan Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas, KKKS dan Bank. Saldo Dana ASR TA 2024 disajikan dengan menggunakan kurs penutupan (JISDOR) per 31 Desember 2024 (1USD = Rp16.157).

b. Dana TTM (Tanah Terkontaminasi Minyak) Wilayah Kerja Rokan

Dana TTM (Tanah Terkontaminasi Minyak) Wilayah Kerja Rokan dari Kegiatan Operasi Kontraktor Sebelumnya, sebelum tahun 2024 merupakan bagian dari Dana ASR WK Rokan yang disimpan dalam rekening bersama Dana ASR WK Rokan Lanjutan. Berdasarkan surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor B-5759/MG.06/DJM/2023, tanggal 5 Juni 2023, yang menyatakan bahwa kasus pemulihan TTM di WK Rokan berbeda dengan pemulihan lokasi yang tertulis pada Permen ESDM nomor 15 tahun 2018, karena pemulihan TTM WK Rokan yang dimaksud bukan merupakan sebab dari kegiatan pasca operasi melainkan dampak kumulatif dari praktik operasi terdahulu ketika peraturan lingkungan hidup belum mengatur hidrokarbon sebagai limbah B3, maka Dana TTM WK Rokan dipisahkan dan dipindahbukukan dari rekening bersama Dana ASR WK Rokan Lanjutan ke rekening baru, yaitu rekening bersama Dana TTM WK Rokan.

Pengelolaan Rekening Bersama Dana TTM WK Rokan diatur dalam Perjanjian Rekening Bersama antara SKK Migas, Himbara (Bank Mandiri, BNI dan BRI) dan PHR yang telah ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal 22 April 2024. Rekening Bersama Dana TTM WK Rokan telah dibuka pada tanggal 23 April 2024 (BRI) dan 24 April 2024 (Bank Mandiri & BNI), senilai US\$220,000,000.00 pada masing-masing rekening. Sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat perolehan jasa giro, PPh dan penggunaan Dana.

c. Dana *Equipment & Services* (Dana E & S)

Dana *Equipment & Services* merupakan dana yang disetorkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ke rekening SKK Migas Dana *Equipment & Services*, sebagai pemenuhan kewajiban *Production Sharing Contract* (PSC) - Bab VIII dalam sejumlah nilai tertentu, yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan khusus atau untuk kegiatan eksplorasi dan produksi industri hulu migas Indonesia atau untuk kegiatan khusus eksplorasi dan produksi industri *Coalbed Methane*. Pemenuhan kewajiban ini tidak diperhitungkan sebagai biaya operasi/non cost recoverable.

Dasar hukum Dana E&S adalah *Production Sharing Contract* ("PSC") Bab VIII Bonus dan Bantuan Pasal 8.2. Berikut ini contoh klausul BAB VIII, terkait Kewajiban *Equipment & Services*, yang dikutip dari salah satu PSC.

"CONTRACTOR shall within thirty (30) days after GOI's request in writing during the first Contract Year provide GOI with equipment and/or services in an amount not exceeding the sum of United States Dollars (US\$), for special purposes/for exploration and production activities in Indonesia's petroleum industry/for exploration and production activities special purposes in Indonesia's Coalbed Methane industry".

Masing-masing PSC kemungkinan memiliki klausul/narasi yang berbeda.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-1/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal Penyampaian Penyampaian Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan atas *Dana Equipment & Services* (Dana E & S), pencatatan dan pelaporan Dana E&S dilakukan secara periodik, dengan menyajikan saldonya pada tanggal pelaporan, dan tidak menyajikan secara transaksional. Saldo Dana E&S TA 2024 disajikan dengan menggunakan kurs penutupan (JISDOR) per 31 Desember 2024 (1 USD = Rp16.157).

3. Satker MPPKP

a. *Going-Concern* Entitas MPPKP

Dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden pada Rapat Terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 terkait keberlanjutan Program Kartu Prakerja serta mempertimbangkan rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terkait Program Kartu Prakerja, telah diputuskan Program Kartu Prakerja akan dialihkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 20 Desember 2024 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah membentuk Tim Transisi lewat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Cipta Kerja Nomor 432 Tahun 2024 tentang Tim Transisi Pengalihan Program Dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kepada Kementerian Ketenagakerjaan ("Kepmenko 423/2024").

Merujuk pada Kepmenko 423/2024, Tim Transisi yang bertugas untuk:

- 1) Memfasilitasi tindak lanjut arahan/kebijakan Presiden guna memperlancar proses transisi;
- 2) Mengambil langkah terkait penyelesaian masalah dan hambatan selama proses transisi;
- 3) Merencanakan dan mengkoordinasikan transisi pengalihan program yang mencakup mitigasi risiko, pengawalan audit, perubahan regulasi dan keberlanjutan Program Kartu Prakerja;
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan transisi pengalihan Program Kartu Prakerja;
- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan transisi pengalihan program; dan
- 6) Melaksanakan tugas terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka transisi program.

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Transisi, pelaksanaan Program Kartu Prakerja di tahun 2025 akan dibagi menjadi dua periode yaitu:

- 1) Semester 1 dengan batas akhir 30 Juni 2025, pelaksanaan Program Kartu Prakerja akan dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja secara business as usual dengan berdasarkan pada aturan yang ada yaitu Perpres 36/2020 dan perubahannya, Permenko

17/2022, dan PMK 25/2020 dan perubahannya. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp800 miliar; dan

2) Semester 2 mulai 1 Juli 2025, pelaksanaan Program Kartu Prakerja akan dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan aturan yang baru.

Sehubungan dengan pelaksanaan Program Kartu Prakerja di Semester 2 tahun 2025 di bawah Kementerian Ketenagakerjaan, Tim Transisi merencanakan penyusunan peraturan dasarnya yaitu Peraturan Presiden telah rampung pada bulan Maret 2025. Selanjutnya, peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan rampung pada bulan April 2025. Sedangkan ketentuan teknis Keputusan Menteri, Juknis, dan SOP selesai pada bulan Mei 2025. Adapun semua instrumen hukum di atas berlaku efektif per 1 Juli 2025.

b. Sampai dengan 31 Desember 2024, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja diketahui memiliki transaksi resiprokal dengan tiga entitas, yaitu:

- 1) Universitas Mataram dengan kode satuan kerja 67752;
- 2) Politeknik Negeri Bali dengan kode satuan kerja 677608; dan
- 3) Universitas Tanjung Pura dengan kode satuan kerja 677517

di mana MPPKP bertindak sebagai pemberi kerja dan dua entitas tersebut sebagai penyedia.

4. Satker Layanan Pos Universal, Kemenkominfo

Dampak Pembentukan Kabinet Merah Putih

Pembentukan Kabinet Merah Putih oleh Presiden Republik Indonesia terpilih periode 2024-2029 berdampak pada pergeseran tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang berimplikasi pada perubahan struktur organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 dan Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, serta kemudian diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Anggaran dan Aset pada Masa Transisi di Lingkungan Kementerian dan Lembaga.

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur yaitu menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja yang mengikuti perubahan nomenklatur tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika yang membawahi Direktorat Pos pada Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai entitas penanggung jawab secara operasional atas kegiatan Pengelolaan Subsidi Operasional LPU yang mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan Belanja Lain-Lain (BA 999.08), mengalami perubahan nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Ekosistem Digital yang membawahi Direktorat Pos dan Penyiaran.

Perubahan Nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika Pengelola Belanja Lain-Lain:

No	Entitas	Semula	Menjadi
1	Kementerian/Lembaga	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Kementerian Komunikasi dan Digital
2	Satuan Kerja	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika	Direktorat Jenderal Ekosistem Digital
3	Unit Kerja	Direktorat Pos	Direktorat Pos dan Penyiaran

Sebagaimana ketentuan dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2/PB/2025 tanggal 1 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024 pada Masa Transisi bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kementerian/Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur menyusun laporan keuangan tahun 2024 dengan menggunakan nomenklatur lama sesuai DIPA TA 2024 dan menandatangani pernyataan tanggung jawab laporan keuangan atas Bagian Anggaran DIPA TA 2024 yang mengalami perubahan nomenklatur. Dalam hal ini, Laporan Keuangan BA 999.08 Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 akan ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Digital.

Subsidi Operasional Layanan Pos Universal (LPU) mulai dianggarkan melalui BA BUN 999.08 pada tahun 2013 melalui mekanisme SABA. Mulai tahun 2014, kegiatan tersebut dianggarkan melalui DIPA BA BUN 999.08. Pada Tahun Anggaran 2024, program pengelolaan Subsidi Operasional LPU dianggarkan melalui DIPA Nomor SP DIPA-999.08.1.984526/2024 tanggal 29 Desember 2023 Bagian Anggaran 999.08 Pengelolaan Belanja Lain-Lain dengan kode satker 984526.

Subsidi Operasional LPU digunakan untuk membiayai Kantor LPU sesuai ketentuan yang terdapat pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 486 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan dan Pengawasan serta Pembayaran Subsidi Operasional Layanan Pos Universal. Dana Subsidi Operasional LPU diberikan berdasarkan metode pelaporan realisasi pendapatan dan biaya penyelenggaraan Layanan Pos Universal sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika dimaksud.

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 617 Tahun 2023 tentang Penetapan Kantor Layanan Pos Universal dalam Rangka Penyelenggaraan Layanan Pos Universal Tahun 2024, jumlah Kantor LPU pada tahun 2024 ini ditetapkan sebanyak 2.400 kantor.

5. Satker BPKBPB Batam

Satker Belanja Lain-Lain Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun mengalami perubahan kode satker, yaitu yang semula 984422 (Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun) menjadi 984423 (Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam). Perubahan kode satker tersebut terjadi berdasarkan ketentuan pada pasal 108 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta mengacu pada Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor S3532/AG/2013 tanggal 30 Desember 2013 perihal Usulan Penetapan dan Surat Kesiadaan Ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (KPA BUN) Pengelolaan Belanja Lainnya (999.08) TA 2014.

Nilai Aset dan Kewajiban yang berada pada satker 984423 sama dengan satker 984422. yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (984423) dari Tahun 2014 hingga kini.

6. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

- a. Pada tahun 2024 terjadi perubahan operator distribusi beras ASN distrik pedalaman Provinsi Papua yang sebelumnya pada tahun 2023 adalah PT Pos Indonesia menjadi PD Irian Bhakti selaku pemenang tender pengadaan distribusi (pemindahan dan pengiriman) beras pegawai negeri sipil (PNS) distrik pedalaman Provinsi Papua Tahun 2024 sesuai dengan Surat Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Nomor 444/01/Pmng-KONS-PBJ/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 hal Surat Pemberitahuan Pemenang dan juga ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Nomor KEP-39/WPB.34/2024 tentang Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Distribusi (Pemindahan dan Pengiriman) Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) Distrik Pedalaman Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024.
- b. Sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat lima kali addendum kontrak dengan nomor ADDENDUM-01/OAB/WPB.34/2024 tanggal 28 Juni 2024, ADDENDUM-02/OAB/WPB.34/2024 tanggal 11 September 2024, ADDENDUM 03/OAB/WPB.34/2024 tanggal 20 November 2024, ADDENDUM- 04/OAB/WPB.34/2024 tanggal 19 Desember, ADDENDUM-05/OAB/WPB.34/2024 tanggal 31 Desember 2024. Addendum kontrak pertama tidak mengubah nilai total kontrak hanya mengurangi nilai tagihan termin I dan dipindahkan ke nilai tagihan termin IV. Addendum kontrak kedua tidak mengubah nilai total kontrak hanya mengurangi nilai tagihan termin II dan dipindahkan ke nilai tagihan termin IV. Addendum kontrak ketiga mengubah nilai total kontrak yang sebelumnya Rp125.581.846.971,60 menjadi Rp105.462.155.550,00 dan mengubah jumlah termin yang sebelumnya 4 termin menjadi 5 termin dengan rincian termin III dan termin IV diubah menjadi termin III, IV, dan V. Addendum kontrak keempat tidak mengubah nilai total kontrak hanya mengurangi nilai tagihan termin IV dan dipindahkan ke nilai tagihan termin V. Addendum kontrak kelima mengubah nilai total kontrak yang sebelumnya Rp105.462.155.550,00 menjadi Rp105.537.180.123,00 dan menambah nilai tagihan termin V
- c. Berdasarkan BAST-05/OAB/WPB.34/2024 sisa pekerjaan yang dimasukkan ke dalam rekening RPATA Penampungan (SPM No.00033T tanggal 23 Desember 2024) sebesar Rp19.048.682.237,00 dan Realisasi pekerjaan yang diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 Rp19.070.294.670,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp21.612.433,00 akan tetapi pekerjaan dan pembayaran telah dilaksanakan 100% sehingga PT. Irian Bhakti Papua menyatakan bahwa selisih tersebut tidak akan ditagihkan kepada OAB Distrik Pedalaman Papua.
- d. Alur pencabutan daftar sanksi hitam PT Pos Indonesia (Persero):
 - 1) Berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Nomor KEP-43/WPB.34/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, menetapkan sanksi daftar hitam kepada PT Pos Indonesia berdasarkan rekomendasi dari APIP/ITJEN atas pelanggaran kontrak yang dilakukan penyedia pada tahun 2023. Pelanggaran kontrak dimaksud adalah Penyedia melakukan pengalihan seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain sehingga dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK.

- 2) Berdasarkan surat permohonan dari PT Pos Indonesia Nomor Pos.1124/HK 000/P00/2024 tanggal 1 April 2024 tentang Permohonan Pencabutan Sanksi Daftar Hitam (Blacklist) PT Pos Indonesia (Persero) dan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP Nomor 10092/D.4.3/04/2024 tanggal 19 April 2024 tentang Perbaikan Surat Tanggapan, dilakukan Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda antara Kanwil DJPb Provinsi Papua dan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor PERJ-001/999292/2024 | 780/REG I/ADM PENJUALAN/4/0524 tanggal 15 Mei 2024 dengan kesepakatan bahwa PT Pos Indonesia diharuskan membayar denda sebesar Rp16.094.173.971 yang akan dibayarkan melalui metode angsuran/cicilan selama 12 bulan secara pro-rata sebesar Rp1.341.181.164. Kanwil DJPb Provinsi Papua akan melakukan pembatalan pengenaan sanksi daftar hitam berdasarkan Surat Keputusan KPA setelah PT Pos Indonesia melakukan pembayaran angsuran pertama sebesar nilai yang telah disepakati.
- 3) Berdasarkan poin 2 di atas, Kanwil DJPb Provinsi Papua menetapkan keputusan nomor KEP-74/WPB.34/2024 tanggal 15 Mei 2024 tentang Pembatalan Sanksi Daftar Hitam.

7. Satker Pengelola Ongkos Angkut Beras Papua Barat pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat

- a. Dalam Neraca Laporan Keuangan Tahun 2024 *UnAudited*, Tunggakan Tagihan atas biaya Ongkos Angkut Beras Tahun 2012 telah bersaldo nihil. Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan tagihan tersebut dengan melakukan pelunasan atau pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tagihan atas biaya Ongkos Angkut Beras Tahun 2012 sebesar Rp2.174.168.000,00 dicatat pertama kali sebagai Utang kepada Pihak Ketiga pada Laporan Keuangan Tahun 2018 *Audited* berdasarkan Putusan Perkara Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.Mnk tanggal 10 September 2015 dan sesuai rekomendasi BPK dalam Nota Kesepakatan Angka Asersi Final Laporan Keuangan UAPBUN Belanja Lain-Lain (BA BUN 999.08) Tahun 2018 Yang Dimasukkan Dalam Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018 (*Audited*) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018 (*Audited*) Nomor NKF-999.08/75/DJA/PB.6/2019 tanggal 16 April 2019. Penyelesaian Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp2.174.168.754,00 tersebut tidak dapat didasarkan pada Akta Perdamaian dan berdasarkan PMK Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, diperlukan audit/reviu untuk penyelesaian tunggakan/utang kepada Pihak Ketiga. Atas penyelesaian Tunggakan atas tagihan biaya Ongkos Angkut Beras Tahun 2012, Kepala Kanwil DJPb selaku KPA satker OAB Provinsi Papua Barat menyampaikan Surat ke BPKP Provinsi Papua Barat Nomor S-464/WPB.33/2024 tanggal 27 Februari 2024 hal Permohonan Audit atas Tujuan Tertentu atas Penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga Tunggakan Tagihan OAB Tahun 2012. Pada tanggal 13 September 2024, BPKP Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan proses Audit dengan Tujuan Tertentu yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Penyelesaian Utang kepada Pihak Ketiga Tunggakan Ongkos Angkut Beras Tahun 2012 Nomor PE.04.03/LHP-278/PW27/4/2024. BPKP Provinsi Papua Barat Merekomendasikan Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat untuk memastikan ketersediaan anggaran dan melakukan pembayaran utang kepada Pihak Ketiga Tunggakan Tagihan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat bulan Desember tahun 2012 serta sisa bulan Juli dan November tahun 2012 sebesar Rp2.174.168.000,00 dengan memperhitungkan PPN yang belum dipotong sebesar

Rp5.225.228,00, sehingga jumlah utang yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebesar Rp2.168.942.772,00 (dua miliar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah). Atas perkembangan proses penyelesaian tagihan, PT Irian Bhakti Papua mengajukan Surat Penagihan melalui Surat Direktur Utama PT Irian Bhakti Papua Nomor 031/000/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 tentang Permohonan Tagihan Ongkos Angkut Pengiriman Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun 2012. Berdasarkan hasil Audit dengan Tujuan Tertentu BPKP Provinsi Papua Barat yang mana memberikan rekomendasi untuk dilakukan pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga atas Tunggakan Tagihan Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat bulan Desember tahun 2012 serta sisa alokasi bulan Juli dan November tahun 2012 serta Surat Direktur Utama PT Irian Bhakti Papua yang meminta pelunasan Tagihan Ongkos Angkut Pengiriman Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat Tahun 2012, Kuasa Pengguna Anggaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat selaku Pengelola Kegiatan OAB melakukan pelunasan tunggakan tersebut melalui SP2D Nomor 240651301015325 tanggal 23 Oktober 2024 dengan nilai belanja sebesar Rp2.174.168.000,00.

- b. Atas kontrak kegiatan OAB ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, hingga menjelang akhir tahun, penyaluran beras ASN Tahun 2024 belum dapat dilakukan seluruhnya yang disebabkan oleh keterlambatan penyampaian DO Beras dari Pemda kepada PT Bulog dan PT Irian Bhakti Papua selaku operator penyaluran beras Tahun 2024 sesuai dengan Surat Direktur Perniagaan PT Irian Bhakti Papua Nomor 039/000/XII/2024 Tanggal 19 Desember 2024 tentang Perpanjangan Distribusi Beras ASN Tahun 2024. Atas permohonan tersebut Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat melalui Surat PPK Nomor S-019/WPB.33/999976/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Perpanjangan Masa Pelaksanaan Kegiatan OAB ASN di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya Tahun 2024. Sesuai dengan kebijakan pemerintah atas Langkah-langkah akhir TA 2024, maka atas kontrak penyaluran beras Tahun 2024 yang belum terbayarkan dilakukan melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). Transaksi RPATA Tahun 2024 dilakukan melalui transaksi Pengisian RPATA sebesar Rp5.775.620.490 dengan Nomor SP2D 240650301000226. Hingga akhir 31 Desember 2024, terdapat progres penyelesaian penyaluran beras Tahun 2024 sesuai dengan BAPP Nomor BAPP-007/WPB/2024 senilai Rp1.782.088.140. Atas pengkinian progres penyelesaian pekerjaan OAB TA 2024 belum dapat dilakukan pembayaran dan diakui dan dicatat sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga, karena telah menggunakan mekanisme RPATA yang mana akan dilakukan pembayaran sekaligus pada saat akhir penyelesaian pekerjaan OAB TA 2024. Atas Sisa pekerjaan yang belum terselesaikan hingga akhir tahun, berpedoman kepada kebijakan akhir tahun pemerintah, maka operator diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya hingga melewati batas waktu selama 90 hari kalender yang termuat dalam Surat Perubahan Perjanjian untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya Ongkos Angkut Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Nomor 01/SPOAB/ADD.1/XII/2024.
- c. Menunjuk Surat Keputusan KPA Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat Nomor KEP-001/WPB.33/999976/2024 tanggal 6 Februari 2024 tentang Tim Pengelola Keuangan, dan Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat untuk Kegiatan Ongkos Angkut Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat (BA

999.08.999976) Tahun Anggaran 2024, terdapat perubahan pengelola keuangan Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat selama tahun 2024 sebagai berikut:

- d. Perubahan Pertama Daftar Pejabat Pengelola Keuangan dan Petugas Sistem Akuntansi Instansi Satker OAB Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- e. Menunjuk Surat Keputusan KPA Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat Nomor KEP-006/WPB.33/999976/2024 tanggal 7 September 2024 tentang Perubahan atas KEP-001/WPB.33/999976/2024 tentang Tim Pengelola Keuangan, dan Petugas Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Satker Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat untuk Kegiatan Ongkos Angkut Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat (BA 999.08.999976) Tahun Anggaran 2024, terdapat perubahan pengelola keuangan Satker Ongkos Angkut Beras Provinsi Papua Barat selama tahun 2024 sebagai berikut:
- f. Perubahan Kedua Daftar Pejabat Pengelola Keuangan dan Petugas Sistem Akuntansi Instansi Satker OAB Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Tahun 2024
- g. Pada tahun 2024 dan sebagaimana telah dilaksanakan di tahun sebelumnya, dalam rangka memperbaiki pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan OAB, operator tidak lagi diberikan uang muka kerja. Selain itu, setiap permohonan tagihan yang disampaikan oleh Operator, PPK tetap melakukan pengujian secara formil atas lampiran dokumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2023, yang meliputi Tanda bukti Pengiriman (*Delivery Order*) beras, Rekapitulasi Berita Acara Penyaluran Beras, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
- h. Guna meningkatkan pengendalian dan kebenaran tagihan yang diajukan oleh Operator, untuk tahun 2024 setiap lampiran tagihan tetap ditambahkan dengan BAPB (Berita Acara Penyerahan Beras) yang merupakan berita acara yang ditandatangani operator, pihak pengangkut beras, dan pejabat/pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Adapun kewajiban melampirkan BAPB tersebut diatur dalam kontrak OAB tahun 2024 dan Peraturan Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Papua Barat Nomor PER-1/WPB.33/999976/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor PER-1/WPB.33/999976/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, yang antara lain menegaskan bahwa terkait dengan pencairan dana, operator harus pula menyampaikan BAPB masing-masing distrik selain persyaratan-persyaratan yang sudah ada di peraturan sebelumnya. Selain untuk penyaluran ke distrik pedalaman, BAPB juga menjadi persyaratan pada pengambilan dalam kota pada Gudang Operator. BAPB untuk pengambilan dalam kota pada Gudang Operator ditandatangani oleh operator dan pejabat/ pegawai (PNS) yang ditunjuk masing-masing distrik sebagai penerima beras. Untuk pengajuan tagihan dan sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian kegiatan OAB, operator tetap diwajibkan untuk menyampaikan tagihan lengkap secara hardcopy kepada Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat, meskipun transportasi udara/darat masih terdapat kendala di beberapa lokasi di Provinsi Papua Barat.
- i. Menindaklanjuti Berita Acara Pembicaraan Hasil Audit (BAPHA) – Audit Tujuan Tertentu tentang Penyaluran Beras dan Pembayaran Tagihan Ongkos Angkut Beras (OAB) ASN (BA BUN 999.08) Tahun 2022 dan 2023 pada Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Inspektorat

Jenderal Kementerian Keuangan, atas audit terdapat temuan terkait Pelaksanaan Pengangkutan Beras ASN Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat oleh PT Pos Indonesia tidak dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian dikarenakan pelaksanaannya dilakukan oleh pihak lain (PT Yasa Artha Trimanunggal) dengan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp5.289.122.680. Atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Menerbitkan surat kepada PT Pos Indonesia surat nomor S- 017/WPB.33/999976/2023 tanggal 22 Desember 2023 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan kepada Direktur Utama PT Pos Indonesia.
- 2) Menerbitkan Surat Bersama antara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat nomor S-486/WPB.33/2024 dan S-380/WPB.34/2024 tanggal 4 Maret 2024 hal Penyampaian Pendapat/Rekomendasi LKPP dan Permintaan Tanggapan atas Rencana Penetapan Daftar Hitam (*Black List*) sebagai penyedia barang/jasa pemerintah kepada PT Pos Indonesia (Persero).
- 3) Menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat Nomor KEP- 27/WPB.33/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 15 Maret 2024 telah menetapkan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Pos Indonesia (Persero).
- 4) Mempertimbangkan berbagai masukan dari beberapa pihak atas pengenaan Sanksi Daftar Hitam kepada PT Pos Indonesia (Persero), KPA Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dapat membatalkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam dengan syarat PT Pos Indonesia (Persero) dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - i. mengganti selisih 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor yang terakhir;
 - ii. Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
 - iii. Jaminan Pelaksanaan dicairkan.
- 5) Membuat Perjanjian Komitmen Pembayaran Denda antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dengan PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: PERJ-001/999976/2024 dan Nomor: 681/Penjualan-KCU Jap/ASN/0524 pada tanggal 13 Mei 2024 untuk membayar Denda kepada Negara sebesar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor yang terakhir yaitu sebesar Rp10.578.245.360 (Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dikurangi nilai yang sudah diperhitungkan dalam pembayaran sebesar Rp5.367.108.610 (Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah) sehingga nilai kekurangan menjadi Rp5.211.136.750 (Lima Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) yang akan dibayarkan melalui metode angsuran/cicilan selama 12 (dua belas) bulan secara pro-rata sebesar Rp434.261.396 (Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) tiap bulan. Pembayaran pertama dilakukan pada bulan Mei 2024 hingga April 2025.

8. Satker Pengelola Dana Kompensasi pada Direktorat Jenderal Anggaran c.q. Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam Dan Kekayaan Negara Dipisahkan

- a. Pelaksanaan pembayaran kompensasi akan dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan administratif pencairan dan dengan mempertimbangkan ketersediaan kas Pemerintah.
- b. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-232/MK.02/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Tahun 2023 dan S-233/MK.02/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (*Gasoline*) RON 90 Tahun 2023, pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pembayaran atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM Tahun 2023 sebesar Rp43.752.935.758.244.
- c. Apabila Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM Tahun 2023 berdasarkan pemeriksaan BPK RI sebesar Rp43.748.221.882.870 dibandingkan dengan realisasi pembayaran sebesar Rp43.752.935.758.244, maka terdapat kelebihan pembayaran atas kompensasi BBM Tahun 2023 sebesar Rp4.713.875.374 dengan rincian:
 - 1) Kelebihan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2023 sebesar Rp3.553.645.877, yang merupakan koreksi berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI sebagaimana disepakati dalam rapat pembahasan Nota Kesepakatan Final (NKF).
 - 2) Kelebihan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Tahun 2023 sebesar Rp1.097.944.133, yang merupakan koreksi berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI sebagaimana disepakati dalam rapat pembahasan NKF.
 - 3) Kelebihan Pembayaran Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2023 sebesar Rp62.285.364, yang merupakan koreksi berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI sebagaimana disepakati dalam rapat pembahasan NKF.
- d. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-234/MK.02/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023, pada Tahun 2024 telah dilaksanakan pembayaran atas Kekurangan Kompensasi Listrik Periode Tahun 2023 pada PT PLN (Persero) sebesar Rp17.835.197.231.014.
- e. Selanjutnya berdasarkan hasil audit BPK RI, Kekurangan Kompensasi Listrik Periode Tahun 2023 pada PT PLN (Persero) adalah sebesar Rp17.816.455.245.435, sehingga terdapat kelebihan pembayaran kompensasi listrik periode tahun 2023 sebesar Rp18.741.985.579.
- f. Terhadap kelebihan pembayaran atas kompensasi BBM dan listrik tahun 2023 sebesar Rp23.455.860.953 (BBM Rp4.713.875.374 dan Listrik Rp18.741.985.579, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Satker ICSID (International Center For Settlement of Invesment *Dispute*) pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan

- a. Temuan Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap LK BA 999.08 sampai dengan 30 September 2024 adalah berdasarkan LHP BPK Nomor: 78/LHP/XV/05/2014 tanggal 26 Mei 2014 terdapat temuan Pembayaran Honorarium Tim Pendukung Penanganan Permohonan Arbitrase Melebihi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2013 Sebesar Rp2.271.660.000 dan Pembayaran Honorarium sekitar Rp1,78 miliar Belum Sepenuhnya Didukung Pelaksanaan Kegiatan. Atas temuan tersebut telah dilakukan pembahasan dengan Tim BPK pada tanggal 22 Juni 2022 dengan data dukung Nota Dinas Inspektur VI Inspektorat Jenderal Kemenkeu Nomor ND- 391/IJ.7/2021 tanggal 28 Agustus 2021 hal Tanggapan atas Permintaan Progres Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK atas Temuan ICSID dan Surat Inspektur VI Inspektorat Jenderal Nomor S-6/IJ/2015 tanggal 16 Januari 2015 hal Tanggapan atas Permintaan Progress Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BA BUN Belanja Lainnya (BA 999.08) Tahun 2013.
- b. Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2024 tanggal 5 September 2024 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelolaan Belanja Lainnya Dalam Rangka Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Atas Penanganan Perkara di ICSID Pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Kode Satuan Kerja: 999355), yang antara lain menetapkan Kepala Bagian Advokasi IV sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Bagian Advokasi I sebagai Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (Plt. KPA).

10. Satker Distribusi dan Cadangan Pangan

- a. Telah dilaksanakan serah terima utang dalam rangka Likuidasi Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan BA BUN (999801) serta dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 47/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi Pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yaitu Berita Acara Serah Terima Nomor: 14/KU.01.01/B.3/08/2024, tanggal 9 Agustus 2024.
- b. Telah disampaikan Laporan Keuangan Likuidasi Satker Distribusi dan Cadangan Pangan BA BUN (999801) tanggal 10 September 2024 melalui surat Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan selaku KPA, Nomor 20/KU.01.01/B.3/09/2024.

D.3.9. BA 999.09

1. Entitas UAP BUN PBL

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Selanjutnya terhadap daftar UBL sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-296/PB/2022 Tentang Perubahan Unit Badan Lainnya yang tercantum dalam daftar Unit Badan Lainnya pada sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, Pada tahun 2022 terdapat penambahan 3 UBL baru, pengurangan 3 UBL, dan penyesuaian 3 UBL dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penambahan 3 UBL Baru, antara lain:
 - 1) Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
 - 2) Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan

- 3) Kantor Staf Presiden
- b. Pengurangan 3 UBL, antara lain:
 - 1) Lembaga Perlindungan Saksi Korban
 - 2) Bapertarum
 - 3) Badan Standarisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan
- c. Penyesuaian 3 UBL, yaitu:
 - 1) Badan Restorasi Gambut menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
 - 2) Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
 - 3) Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal menjadi Badan Pengelola Masjid Istiqlal

Dalam Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023, terhadap 70 UBL tersebut secara garis besar dikelompokkan sebagai berikut:

- a. UBL Satker/ Bagian Satker sebanyak 62 UBL.
- b. UBL Bukan Satker sebanyak 8 UBL.

Untuk SKK MIGAS dan OJK dikategorikan sebagai UBL Satker sekaligus sebagai UBL Bukan Satker.

Terdapat Unit Badan Lainnya yang berstatus tidak aktif/belum aktif/belum mengelola APBN yaitu:

- a. Badan Pertimbangan Kepegawaian
Pada Tahun 2021 Badan Pertimbangan Kepegawaian berganti menjadi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.
- b. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)
Sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan bahwa Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) dinyatakan belum aktif.
- c. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)
Sesuai dengan surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan nomor S-03/D.I.M.EKON/01/2017 tanggal 30 Januari 2020 bahwa pada tahun 2018 tidak ada usulan PTP maupun tambahan PTP sehingga belum ada kegiatan Rapat koordinasi Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (persero) ataupun alokasi Dana.
- d. Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)
Pada tahun 2018 Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU) tidak mendapatkan alokasi Dana.
- e. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)
Pada tahun 2018 Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG) tidak mendapatkan alokasi Dana.
- f. Otorita Asahan
Sesuai dengan PERPRES 73 TAHUN 2018 Otorita Asahan telah dibubarkan dan proses Likuidasinya saat ini masih dalam penyelesaian oleh Kementerian Perekonomian.

g. Komite Nasional Geopark Indonesia

Pada tahun 2020, Komite Nasional Geopark Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

h. Otoritas Nasional Senjata Kimia

Pada tahun 2020, Otoritas Nasional Senjata Kimia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

i. Badan Promosi Pariwisata Indonesia

Pada tahun 2020, Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagai UBL satker/bagian satker belum aktif dan tidak mendapatkan dana APBN.

2. Laporan Keuangan Badan Lainnya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, UAP BUN-PBL menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Ikhtisar laporan Keuangan.

Rincian untuk Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Lainnya diuraikan dalam [Lampiran LDCPL5, LDCPL6, LDCPL7](#).

Dalam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-296/PB/2022, menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut:

- a. Otorita Asahan
- b. Taman Mini Indonesia Indah
- c. Yayasan Gedung Veteran RI
- d. Badan Amil Zakat Nasional
- e. Badan Wakaf Indonesia
- f. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
- g. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)
- h. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

a. Otorita Asahan

Otorita Asahan dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 5 tahun 1976 sebagai Badan yang bertugas mewakili Pemerintah dan bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan dan pengembangan Proyek Asahan.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-1788/A/2000 tanggal 4 Mei 2000 dinyatakan bahwa sejak tahun 2000 Otorita Asahan tidak dibiayai APBN, dan selanjutnya akan disediakan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Pada tanggal 8 Mei 2000 telah ditandatangani perjanjian sehubungan dengan penggantian biaya Otorita Asahan (*the Agreement Concerning the Reimbursement of Expenses of Otorita*) antara PT. Inalum dan Otorita Asahan, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1) PT. Inalum akan mengganti sebagian dari pengeluaran Otorita Asahan atas jasa yang telah diberikan kepada PT. Inalum, kecuali pengeluaran untuk kegiatan pemerintah dan administrasi yang dilakukan Otorita Asahan seperti ijin dan lain-lain.

- 2) PT. Inalum akan membayar kepada Otorita Asahan setiap tahun fiskal dengan basis seimbang sebagaimana dilakukan pada NAA atas imbalan jasanya kepada PT. Inalum. Basis seimbang berarti pembayaran kembali kepada Otorita Asahan merupakan kompensasi atas pengeluaran Otorita Asahan yang terjadi dalam rangka pemberian jasa kepada PT. Inalum seperti halnya kepada NAA. Jumlah pembayaran kembali ke Otorita tersebut tidak melebihi jumlah yang dibayarkan PT. Inalum kepada NAA.

Pada tanggal 26 Maret 2002 dalam *Shareholder Forum* PT. Inalum di Jakarta, telah disepakati bersama bahwa atas penjualan alumunium yang tidak dapat diserap oleh pasar Indonesia, Otorita Asahan dapat melakukan kerjasama dengan PT. Inalum untuk menjual alumunium kepada pihak ketiga di luar negeri.

a) Sifat dan Kedudukan

- I. Berada langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden;
- II. Badan Pembina Proyek Asahan berkedudukan di Jakarta;
- III. Otorita Pengembangan Proyek Asahan berkedudukan di Medan.

b) Tujuan Pendirian

Mewakili Pemerintah untuk mengawasi dan membantu pelaksanaan proyek Asahan baik selama masa konstruksi maupun setelah perusahaan beroperasi sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Induk mengenai Pusat Listrik Tenaga Air dan Peleburan Aluminium Asahan (Proyek Asahan).

c) Tugas Pokok dan Fungsi

- I. Memberikan fasilitas dan jaminan bagi pelaksanaan persetujuan induk secara tepat dan berhasil;
- II. Mengamankan kepentingan-kepentingan Pemerintah dan PERSERO Pengusahaan serta Pengembangan usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium;
- III. Mengawasi pelaksanaan Proyek sesuai dan di dalam batas-batas sebagaimana ditetapkan dalam Persetujuan Induk;
- IV. Memelihara kerjasama dan koordinasi secara terus menerus antara pihak-pihak dalam mencapai tujuan Persetujuan Induk;
- V. Menjamin agar tata cara perijinan dan pemberian jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan dapat berjalan lancar dan tertib;
- VI. Mengembangkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan Proyek Asahan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
- VII. Merencanakan dan mengendalikan pengembangan jangka panjang wilayah Proyek Asahan beserta prasarananya dalam kerjasama dengan instansi yang bersangkutan;
- VIII. Berdasarkan MOU antara PT. Inalum dengan Otorita Asahan tanggal 7 Desember 1999, Otorita Asahan ditugaskan untuk mengelola seluruh upaya pemulihan dan pelestarian lingkungan serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Proyek Asahan dengan mengalokasikan dan memanfaatkan *environmental fund*.

d) Sumber Dana dari APBN

Otorita Asahan telah dibubarkan dengan Peraturan Presiden nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan, berdasarkan pasal 2 dan 3 barang milik negara pada Otorita Asahan diserahkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang kecuali yang telah tercatat pada Kementerian Perindustrian dan seluruh dokumen yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Otorita Asahan diserahkan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan/atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Pimpinan dan karyawan pada Otorita Asahan diberhentikan dengan hormat dan diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibebankan kepada DIPA Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2018.

Proses likuidasi Otorita Asahan sampai dengan tahun 2022 *Audited* belum selesai dilaksanakan. Sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tim Likuidasi Otorita Asahan bahwa tim likuidasi bertugas terhitung 3 September 2018 sampai dengan selesainya pelaksanaan likuidasi atas Otorita Asahan.

b. Yayasan Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah**1) Dasar Hukum**

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1977 tanggal 10 September 1977 dan naskah penyerahan TMII dari Yayasan Harapan Kita kepada Pemerintah Republik Indonesia tanggal 10 April 1975, bahwa :

- a) "Taman Mini Indonesia Indah" yang terletak di Daerah Kelurahan Bambu Apus, Duku, Lubang Buaya, dan Ceger, Kecamatan Kramat Jati dan Pasar Rebo, Jakarta Timur seluas 120 Ha beserta segala bangunan-bangunannya yang berada di atasnya, adalah milik Negara Republik Indonesia;
- b) Penguasaan dan pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut diserahkan kepada Yayasan Harapan Kita;
- c) Yayasan Harapan Kita bertugas dan berkewajiban mengurus serta memelihara TMII dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia serta menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan "Taman Mini Indonesia Indah" tersebut secara berkala kepada Presiden; sesuai Akta Persembahan "Taman Mini Indonesia Indah" kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia no 47 tanggal 7 September 1987, bahwa luas "Taman Mini Indonesia Indah" menjadi +150 Ha.

2) Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Badan Pengawas TMII adalah:

- a) Membantu Yayasan Harapan Kita khususnya di bidang pengawasan, pengelolaan dan pengembangan TMII.
- b) Berkewajiban merencanakan dan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan TMII dengan berkoordinasi dengan Badan Pengelola dan Pengembangan TMII dan membuat laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.

- c) Ketua, Anggota, dan Sekretaris Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh ketua Yayasan Harapan Kita dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- d) Pengurus dan anggota Badan Pengawas bertanggungjawab kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita.

Tugas dan kewajiban Badan Pengelola dan Pengembangan TMII adalah sebagai berikut:

Direktur Utama:

- a) Mengendalikan, memelihara dan mengembangkan TMII yang merupakan kawasan wisata budaya, sebagai wahana pelestarian dan pengembangan budaya bangsa Indonesia untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
- b) Mengendalikan dan mengkoordinasikan secara operasional unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha, serta mengendalikan operasional dan administrasi unit kerja di bawah BPP TMII.
- c) Menyusun rencana dan program kerja dan rencana anggaran dan pendapatan dan belanja TMII dan diajukan kepada Ketua Yayasan Harapan Kita untuk mendapatkan persetujuan.
- d) Membina dan mengkoordinasikan para direktur dalam melaksanakan tugasnya.

Direktur Umum:

- a) Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan administrasi, keuangan, SDM, hukum, teknik dan tata lingkungan.
- b) Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah BUMN, unit usaha dan unit kerja BPP, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.

Direktur Operasi:

- a) Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan yang berkaitan dengan operasional, pembangunan, pemeliharaan dan keamanan

Direktur Budaya:

- a) Mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan seni budaya, wisata, promosi dan informasi, hubungan masyarakat dan keamanan.
- b) Membantu Direktur Utama dalam mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut dengan unit anjungan daerah, unit kerja di bawah Departemen/BUMN, unit usaha dan unit kerja Badan Pengelola dan pengembangan, serta unit kerja lainnya yang berada di lingkungan TMII.
- c) BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.
- d) BPP TMII membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum Yayasan Harapan Kita, tentang hasil pelaksanaan dan pengelolaan TMII.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara, dan dengan ditetapkannya penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh

Kementerian Sekretariat Negara maka pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1977 dinyatakan berakhir. Proses Likuidasi Taman Mini Indonesia sampai dengan penyusunan LKBL Tahun 2023 masih berlangsung.

c. Yayasan Gedung Veteran RI

Tanggal 22 Februari 1977 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1977 yang isinya:

- 1) Seluruh bangunan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha" beserta tanahnya Kaveling 50 di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, adalah milik Negara Republik Indonesia.
- 2) Penguasaan dan pengelolaan Gedung Veteran dimaksud diserahkan kepada Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.
- 3) Tugas dan wewenang:
 - a) Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia bertugas mengurus dan memelihara Gedung dan memanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan para Veteran Republik Indonesia serta masyarakat umumnya.
 - b) Menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil pengelolaan gedung tersebut secara berkala kepada Presiden RI.
- 4) Pelaksanaan administratif dari Keputusan Presiden ini dilaksanakan oleh Menteri Sekretaris Negara bersama-sama Pimpinan Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia.

Pada tahun 1983, Kongres V LVRI di Medan menetapkan YGVRI sebagai anak organisasi LVRI, sebagai salah satu unit pelaksana organik LVRI.

d. Badan Amil Zakat Nasional

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

BAZNAS didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan badan pengelola zakat yang mengedepankan prinsip transparansi, professional dan amanah dalam melaksanakan kegiatannya.

1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- b) Susunan keanggotaan BAZNAS dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004.

2) Visi dan Misi

Visi: "Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional."

Misi:

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c) Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- d) Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- e) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3) Fungsi dan Wewenang

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kewenangan BAZNAS:

- a) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ.
- c) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

4) Sumber Dana

APBN (Kementerian Agama), Penerimaan Zakat, Infaq dan sedekah, amil, hibah dan non syariah.

e. Badan Wakaf Indonesia

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75/M tahun 2007, yang ditetapkan di Jakarta 13 Juli 2007. Jadi BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat.

BWI berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan beralamat di Gedung Bayt Al-Quran Lantai 2, Jalan Pintu Utama Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta 13560.

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri. Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia (Pasal 55, 56, 57, UU No.41/2004).

1) Dasar Hukum

- a) Badan Wakaf Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

2) Visi dan Misi

Visi Badan Wakaf Indonesia adalah “Terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional”.

Sedangkan misinya yaitu “Menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat”.

3) Tugas dan Wewenang

Sesuai Pasal 49 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d) Memberhentikan dan mengganti nazhir;
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;

4) Struktur Organisasi

- a) Terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan;
- b) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia;
- c) Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia;
- d) Masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota;
- e) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan ditetapkan oleh para anggota.

5) Sumber Dana

- a) APBN selama 10 (sepuluh) tahun pertama dan dapat diperpanjang.
- b) Dibebankan kepada Anggaran Kementerian Agama.

f. SKK MIGAS

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 31 Desember 2012 menyatakan bahwa fungsi dan tugas BP MIGAS diambil alih oleh pemerintah c.q. kementerian terkait sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang sebelumnya dilaksanakan oleh BPMIGAS dialihkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, menyatakan bahwa pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh SKK Migas dan berlaku surut mulai 13 November 2012.

1) Visi dan Misi

Visi

Menjadi mitra yang proaktif dan terpercaya dalam mengoptimalkan manfaat industri hulu minyak dan gas bumi bagi bangsa dan seluruh pemangku kepentingan serta menjadi salah satu lokomotif penggerak aktivitas ekonomi Indonesia.

Misi

Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama dengan semangat kemitraan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2) Tugas dan fungsi

Tugas

Melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Fungsi

- a) Memberikan pertimbangan kepada menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran wilayah kerja serta kontrak kerja sama.
- b) Melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama.
- c) Mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu wilayah kerja kepada menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- d) Memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- e) Memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran.
- f) Melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada menteri mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama.
- g) Menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Wewenang

- a) Membina kerjasama dalam rangka terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional kontraktor kontrak kerja sama.
- b) Merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja kontraktor kontrak kerja sama.
- c) Mengawasi kegiatan utama operasional KKKS.
- d) Membina seluruh aset kontraktor kontrak kerja sama yang menjadi milik Negara.
- e) Melakukan koordinasi dengan pihak dan/atau instansi terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu.

g. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas serta wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

1) Visi dan Misi

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi OJK adalah:

- a) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- b) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

2) Tujuan, Fungsi dan Tugas

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel.
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB.

h. Badan Pengelola Keuangan Haji

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, kemudian ditindaklanjuti dengan penunjukan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana melalui Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 Tanggal

7 September 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

1) Dasar Hukum

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
- c) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji;
- d) Keputusan Presiden Nomor 74P Tahun 2017 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji.

2) Tugas dan Fungsi

Badan Pelaksana memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Haji.

Untuk melaksanakan fungsi perencanaan Keuangan Haji Badan Pelaksana bertugas:

- a) merumuskan kebijakan: kemampuan Keuangan Haji, perkembangan ekonomi; dan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji;
- b) menyiapkan rencana strategis; dan
- c) menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan pengelolaan Keuangan Haji.

i. Temuan atas Unit Badan Lainnya

Pada Tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan adanya temuan pada 2 Unit Badan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

1) Taman Mini Indonesia Indah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah, penguasaan dan pengelolaan Taman Mini Indonesia dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun hingga Tahun 2022 proses penyelesaian likuidasi Unit Badan Lainnya Bukan Satker Yayasan Harapan Kita belum selesai sehingga dari BPK menjadikan proses likuidasi TMII sebagai temuan baru pada Tahun 2022. Dari temuan atas penyelesaian likuidasi tersebut BPK merekomendasikan agar Sekretaris Kementerian Setneg selaku Ketua Tim Transisi Pengelolaan dan Serah Terima TMII Kementerian Setneg dan YHK/BPP TMII untuk segera menyelesaikan proses likuidasi YHK/BPP TMII, termasuk atas permasalahan terkait perikatan dengan pihak ketiga, serta menindaklanjutinya dengan pencatatan yang memadai dalam LKBUN.

Selama proses penyelesaian likuidasi telah dilakukan proses inventarisasi yang dilaksanakan oleh Kemensetneg dengan rincian sebagai berikut:

- a) Proses inventarisasi Tahap I telah selesai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/KM.6/2021 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian Sekretariat Negara.
- b) Proses pendataan atas aset-aset inventarisasi tahap 2 telah selesai dilakukan oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara dengan bantuan dari pihak TWC.
- c) Proses penilaian atas aset inventarisasi tahap 2 masih dalam proses. Penilaian dilakukan oleh pihak PT Taman Wisata Candi Borobudur (TWC) dengan bantuan dari pegawai Eks TMII.

- d) Proses pengajuan dan penerbitan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) telah disampaikan ke DJKN guna proses penilaian atas Aset inventarisasi Tahap 2.
- e) Proses inventarisasi tahap 2 untuk aset baru telah diselesaikan oleh pihak Kementerian Sekretariat Negara dengan bantuan dari Pihak TWC.
- f) Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan hasil inventarisasi aset baru tahap 2. Hasil inventarisasi ini telah disampaikan ke DJKN untuk dilakukan proses penilaian.
- g) Menteri Keuangan telah menetapkan KMK Nomor 160/KM.6/2024 tentang Pembentukan Tim Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Negara Taman Mini Indonesia Indah Tahap II Pada Kementerian Sekretariat Negara.
- h) Pada periode penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2024 *UnAudited*, proses likuidasi Yayasan Harapan Kita sebagai pengelola Taman Mini Indonesia Indah telah selesai dilakukan melalui penetapan KMK 99/KM.6/2021 dan KMK 27/KM.6/KNL.0702/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Sekretariat Negara.

2) Otorita Asahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun hingga Tahun 2022 proses penyelesaian likuidasi Unit Badan Lainnya Otorita Asahan (OA) belum selesai sehingga dari BPK menjadikan proses likuidasi OA sebagai temuan baru pada Tahun 2022. Dari temuan atas penyelesaian likuidasi tersebut BPK merekomendasikan agar Sekretaris Kemenko Perekonomian selaku Ketua Tim Likuidasi Otoritas Asahan Kemenko Bidang Perekonomian untuk segera menyelesaikan proses likuidasi Otorita Asahan, serta menindaklanjutinya dengan pencatatan yang memadai dalam LKBUN.

Selama proses penyelesaian likuidasi telah dilakukan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kemenko Perekonomian dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kemenko Perekonomian telah menyelesaikan seluruh pemindahan Aset Barang Milik Negara yang berada di Jakarta dari Kemenko Perekonomian kepada DJKN dengan bukti berupa Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Staf Ahli Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- b) Kemenko Perekonomian melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dhi. DJPb melalui surat undangan dan rapat pembahasan untuk kegiatan rencana site visit Otorita Asahan dengan rincian rapat sebagai berikut :
 - Pada tanggal 27 Oktober 2023 telah dilakukan rapat pembahasan tahap I dalam rangka koordinasi site visit di wilayah Sumatera Utara dengan Surat Undangan Nomor Surat PK-146/ST.M.EKON.2/2023;
 - Pada tanggal 1 November 2023 telah dilakukan rapat pembahasan tahap II dalam rangka koordinasi site visit di wilayah Sumatera Utara dengan Surat Undangan Nomor Surat PK-148/SET.M.EKON.2/10/2023.
 - Pada tanggal 24 November 2023 telah dilakukan rapat pembahasan tahap I dalam rangka koordinasi site visit di wilayah Sumatera Utara dengan Surat Undangan Nomor Surat PK-164/SET.M.EKON.2/11/2023
- c) Sesuai hasil dari Rapat tersebut, Kemenko selaku likuidator Otorita Asahan telah melakukan kegiatan site visit yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 15 Desember 2023 dengan surat Nomor PK-501/SES.M.EKON/12/2023.
- d) Pada tanggal 17 Januari 2024, Kemenko selaku Likuidator OA membuat surat Penutupan Rekening untuk dua rekening OA yang masih memiliki saldo. Namun demikian, uang di rekening tersebut belum

dinihkan/disetor ke negara sehingga KPPN Jakarta 2 selaku KPPN mitra masih belum memproses penutupan rekening tersebut.

e) Hasil dari site visit tahap I telah ditindaklanjuti dengan beberapa surat, antara lain:

- Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang tindak lanjut Alokasi Lahan Eks Otorita Asahan Kepada KSOP Kelas III Kuala Tanjung dan kesediaan menerima aset eks otorita asahan dengan nomor surat R.T/PK/24.SET.M.EKON.2/06/2024 tanggal 24 Juni 2024;
- Surat Biro hukum dan Organisasi Kemenko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Kemenko Ekuin) selaku tim Likuidasi kepada Direktur Perumusan kebijakan kekayaan negara, yang berisi permintaan prioritas penyelesaian aset eks OA kepada KSOP kelas III Kuala Tanjung R.T/PK/22/SET.M.EKON.2/05/2024 tanggal 2 Mei 2024;
- Surat Executive Director 1 PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 Nomor PP.02/20/5/1/PM03/ED1/REG1-24 hal Pernyataan Kesediaan Menerima Aset eks Otorita Asahan lokasi di Kuala Tanjung dan Tanjung Gading;
- Surat Biro hukum dan Organisasi Kemenko Ekuin (selaku tim Likuidasi) Nomor S-244/KN.2/2023 tanggal 20 September 2023 kepada Direktur Perumusan kebijakan kekayaan negara, yang berisi permintaan percepatan penyelesaian aset eks otorita pada PT. Pelindo.

Hingga masa Penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2024 Audited, status temuan pada OA adalah masih dalam proses.

D.3.10. BA 999.99

UAP BUN TK DJPb

A. Satker PFK

1. Saldo akhir utang menurut akrual sama dengan saldo akhir utang menurut kas. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: saldo akhir utang menurut akrual dipengaruhi oleh saldo awal utang menurut akrual ditambah dengan penerimaan PFK Pegawai, dikurangi pengeluaran PFK Pegawai, ditambah/dikurangi saldo akhir piutang (menggambarkan potensi penerimaan kas yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan), serta dipengaruhi oleh koreksi utang.

Sampai dengan Bulan Desember 2024, rincian saldo utang menurut akrual dan utang menurut kas adalah sebagai berikut:

No	Uraian	LK UAKPA (Rp)	Neraca Percobaan Ledger Kas (Rp)
1.	Saldo Awal Utang	932.586.210.358	932.586.210.358
2.	Mutasi Utang / Kas (81-82)	(123.213.797.334)	(123.213.797.334)
	Akun 81*		40.329.542.218.977
	Akun 82		40.452.756.016.311
3.	Saldo Akhir (1+2)	809.372.413.024	809.372.413.024
4.	Koreksi Utang		
5.	Piutang (lih. B.2)		
6.	Saldo Akhir (3+4+5)	809.372.413.024	809.372.413.024

*Tidak termasuk Akun 811921.

2. Penyajian Neraca Percobaan Basis Akrual dan Neraca Percobaan Basis Kas dalam lampiran Laporan Keuangan.

Penyajian dimaksudkan untuk memberikan keyakinan mengenai rincian saldo utang per 31 Desember 2024 dan memberikan informasi mengenai transaksi penerimaan setoran/potongan PFK Pegawai dan transaksi pembayaran pengembalian penerimaan PFK Pegawai.

3. Penerimaan dana PFK untuk BP Tapera tercatat pada laporan keuangan karena sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, akun-akun terkait penerimaan BP Tapera sudah diaktifkan.
4. Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

Dalam rangka menyalurkan hasil penerimaan Dana PFK Pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-4/PB/PB.3/2025 Tanggal 21 Januari 2025 tentang Pembayaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga Lanjutan kepada PT Taspen (Persero), PT Asabri (Persero), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Perum Bulog berdasarkan realisasi penerimaan PFK Sampai Dengan Tanggal 31 Bulan Desember 2024. Penerbitan SKP ini sejalan dengan BAB VI Penetapan SKP-PFK Lanjutan dan Pembayaran Dana PFK Pegawai atas SKP-PFK Lanjutan PMK Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 212/PMK.05/2020 tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga.

Adapun realisasi pembayaran per badan penyelenggara adalah sebagai berikut:

No	Pihak Ketiga	Nilai Utang (Rp)	Tagihan Sesuai SKP-PFK (Rp)	Sisa (Rp)
1	Perum Bulog	12.167.064	12.167.064	-
2	PT Taspen (Persero)	44.610.450.818	44.744.654.059	(134.203.241)
3	PT Asabri (Persero)	252.560.339	252.560.339	-
4	BP Tapera	380.534.360	-	380.534.360

Khusus untuk BPJS Kesehatan, dirinci sebagai berikut:

No	Utang	Nilai Utang (Rp)	Tagihan Sesuai SKP-PFK (Rp)	Selisih (Rp)
5	211111	105.779.858.683	111.370.482.253	(5.590.623.570)
	211112	-	-	-
	211116	-	-	-
	211117	569.427.607.273	563.622.824.006	5.804.783.267
	211119	88.890.431.814	88.305.762.123	584.669.691
	211121	18.802.673	19.386.8888	(175.066.215)

B. Satker Pensiun

1. Pencatatan hak dan kewajiban terkait Program Pensiun PNS dan TNI/Polri dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05.2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Dengan belum ditetapkan Peraturan Pemerintah mengenai Program Pensiun PNS sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

regulasi yang menjadi payung hukum program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela. Dengan belum terbentuknya dana pensiun, pembebanan belanja pensiun masih bersumber dari APBN, sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf (a) UU Nomor 11 Tahun 1969.

Undang-undang tersebut beserta regulasi turunannya mengamanatkan bahwa program Pensiun bagi PNS dan TNI/Polri adalah Program Pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit*). Sedangkan mekanisme pendanaan yang digunakan adalah pay as you go yang dibiayai dari APBN. Implikasi dari Program Pensiun Manfaat Pasti dengan pendanaan Pay As You Go adalah Pemerintah membayarkan manfaat pensiun pada saat pegawai sudah berhak menerima pensiun (sebagai penerima pensiun), yaitu ketika yang bersangkutan memasuki usia pensiun sesuai peraturan perundangan-undangan.

Nilai kewajiban jangka panjang program pensiun per 31 Desember 2024 dihitung oleh Aktuaris Perusahaan PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) yang ditunjuk dengan surat Menteri Keuangan nomor S-743/MK.2/2024 tanggal 19 Agustus 2024. Atas penunjukan tersebut, Aktuaris Perusahaan sudah melakukan perhitungan kewajiban jangka panjang dan telah dilaporkan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Menteri Keuangan. Berikut kami sampaikan besaran nilai kewajiban jangka Panjang program pensiun per 31 Desember 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Anggaran nomor ND-182/AG.9/2025 hal Penyampaian Hasil Perhitungan Kewajiban Jangka Panjang Program Pensiun Pemerintah Tahun 2024 sebesar Rp3.556.364.670.438.740 dengan rincian:

Peserta	PT Taspen (Rp)	PT Asabri (Rp)	Jumlah Kewajiban jangka Panjang Program Pensiun (Rp)
Pegawai aktif	1.261.630.281.893.900	278.597.960.442.684	1.540.228.242.336.580
pensiunan	1.755.996.087.617.490	260.140.340.484.669	2.016.136.428.102.160
Total	3.017.626.369.511.390	538.738.300.927.353	3.556.364.670.438.740

Kewajiban jangka panjang Program Pensiun tahun 2023 tersebut dapat dikelompokkan ke dalam kewajiban terhadap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Pusat sebesar Rp564.112.630.052.529 yang terdiri atas:
 - Pada PT Taspen sebesar Rp285.514.669.609.845;
 - Pada PT Asabri sebesar Rp278.597.960.442.684;
 - b. Kewajiban terhadap pegawai Pemerintah Daerah sebesar Rp976.115.612.284.055;
 - c. Kewajiban terhadap pensiunan sebesar Rp2.016.136.428.102.159.
2. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, terdapat UAKPA BUN TK pengelola belanja/beban pengeluaran untuk keperluan layanan perbankan yang dilaksanakan oleh unit eselon II di DJPb yang menangani pengelolaan pengeluaran keperluan layanan perbankan. Akuntansi dan pelaporan keuangan atas transaksi tersebut dilaksanakan oleh UAKPA BUN TK Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (987361) yang mengelola belanja/beban Jaminan sosial, belanja/beban selisih harga beras Bulog, dan pelaporan akumulasi iuran pensiun.
 3. Berkaitan dengan Akumulasi iuran Pensiun (AIP) atau iuran Dana Pensiun (IDP) pada PT Kereta Api Indonesia / PT KAI (Persero), dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Perubahan Nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) yang semula Rp1.184.350.160.251 menjadi Rp1.150.776.261.331 sesuai Laporan Administratif Dana Belanja Pensiun Eks Pegawai

- Negeri Sipil Dephub pada PT KAI (Persero) untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2024 Audited dan 31 Desember 2023 Audited.
- b. Pada saat ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) dikelola terpisah dari AIP PNS. Dalam hal ini, AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) akan disetorkan ke dalam AIP PNS pada saat program penyesuaian pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) berakhir, yakni pada saat tidak ada lagi penerima pensiun eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero). Hal ini sesuai dengan PMK Nomor 170/PMK.02/2016 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) pasal 9 ayat (4), yang berbunyi “Pada saat program penyesuaian pensiun eks Pegawai Negeri Sipil Departemen Perhubungan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) berakhir, Akumulasi Dana Pensiun Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetorkan ke dalam akumulasi iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil.”
 - c. Sehubungan dengan poin b, maka nilai AIP Eks PNS Dephub pada PT KAI (Persero) tidak masuk ke dalam Neraca Laporan Keuangan UAKPA BUN Satker Direktorat Jenderal Perbendaharaan (kode satker 987361).
4. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-1013/MK.02/2023 tanggal 8 Desember 2023 hal Penyampaian Revisi Perstujuan Metode dan Asumsi Perhitungan Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan Program THT Tahun 2023, metode dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan KMPMD Program THT adalah sebagai berikut:

Uraian	2022	2023
Metode Asumsi:	GPV	GPV
Based on data	31 Desember 2022	31 Desember 2023
Bunga Aktuaria	9,50%	7,50%
Kenaikan gaji	Sesuai hasil studi perusahaan	Sesuai hasil studi perusahaan
Selisih usia pasangan	Data aktual	Data aktual
Selisih usia dengan anak	Data aktual	Data aktual
Batas usia	Data aktual	Data aktual
Laju Kematian	Sesuai studi terkini	TMT 2012/TMA 2016
Inflasi	Data aktual	Data aktual

Berdasarkan persetujuan metode dan asumsi tersebut, PT Asabri (Persero) melakukan perhitungan KMPMD sesuai dengan data peserta pada tanggal 31 Desember 2023. Terdapat selisih perhitungan antara KMPMD dengan suku bunga 7,5% dengan suku bunga 9,5%. Sesuai dengan PMK Nomor 86 Tahun 2023 bahwa kekurangan pendanaan yang disebabkan oleh perubahan metode dan asumsi (dalam hal sesuai S-1031/MK.02/2023) diakui sebagai *Unfunded Past Service Liability* (UPSL).

5. Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Nomor ND-268/PB.1/2025 Hal Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) LK, Kinerja, dan DTT BPK RI s.d Semester II Tahun 2024, terdapat temuan-temuan sebagai berikut:

Tahun	Temuan	Rekomendasi	UIC
2014	Mekanisme Penatausahaan Potongan Pembayaran Belanja Pensiun atas Tunggakan Angsuran Piutang Pensiunan Saat Masih Aktif pada Kementerian/Lembaga Belum Diatur Sehingga Penyajian Pengembalian Belanja Pensiun TAYL Tidak Akurat dan Piutang Kementerian/Lembaga Berpotensi Lebih Catat	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Memisahkan pencatatan setoran penerimaan potongan tunggakan utang pensiunan dengan pengembalian belanja pensiun; b. Berkoordinasi dengan PT Taspen (Persero) untuk mengidentifikasi kementerian/lembaga/satker terkait dengan pensiunan yang memiliki tunggakan utang kepada pemerintah	Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb

Tahun	Temuan	Rekomendasi	UIC
2019	Penyajian Akun-Akun LKBUN Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (<i>Audited</i>) dan Kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) sebagaimana diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Belum Diukur/ Diestimasi	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar: b. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.	Dit. HPP-DJA
2021	Pemerintah Belum Menyajikan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada Neraca BUN	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah agar memerintahkan Tim <i>Task Force</i> Dukungan Percepatan Penyelesaian PSAP Mengenai Imbalan Kerja dan PSAP Mengenai Pendapatan dari Transaksi Non Pertukaran, agar berkoordinasi dengan KSAP untuk memfinalisasi dan menetapkan PSAP Imbalan Kerja, termasuk pengaturan terkait masa transisi selama proses perubahan peraturan perundang-undangan terkait pensiun.	Dit. HPP DJA, Dit. APK DJPb
2022	Pemerintah Belum Menentukan Strategi Antisipasi atas Potensi Kekurangan Pendanaan UPSL Program THT pada PT Taspen (Persero) Tahun 2023 s.d. 2027	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar menetapkan strategi antisipasi atas potensi kekurangan pendanaan UPSL pada program THT di masa depan, beserta mitigasi risikonya, termasuk mempertimbangkan berbagai alternatif bauran kebijakan untuk menyehatkan keuangan program THT di masa depan	Dit HPP, DJA
2023	Pengendalian atas Pengakuan dan Pelaporan <i>Unfunded Past Service Liability Program</i> Tabungan Hari Tua pada PT Asabri (Persero) dan PT Taspen (Persero) Tahun 2023 Kurang Memadai	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN agar memerintahkan Direktur Jenderal Anggaran untuk: a. mengatur kewajiban penggunaan aktuaris independen sebagai pengendalian kunci dalam menetapkan UPSL dengan memberikan perbandingan alternatif metode perhitungan UPSL yang memberikan pilihan paling menguntungkan bagi Pemerintah; b. mengevaluasi kembali penetapan UPSL untuk PT Asabri sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-310/MK.02/2024 tanggal 27 Maret 2024 dengan melakukan <i>financial due diligence</i> atas permohonan UPSL PT Asabri (Persero) tahun 2023 dan menindaklanjuti hasil <i>due diligence</i> tersebut sesuai ketentuan; c. mengkaji dan mengevaluasi kembali PMK Nomor 66/PMK.02/2021 antara lain terkait pengaturan penetapan asumsi bunga aktuarial untuk menjamin terpenuhinya prinsip transparansi dan konsistensi, dan ketepatan ketentuan penyajian laporan keuangan program THT dengan PSAK termutakhir yang relevan, serta menindaklanjutinya sesuai hasil kajian dan evaluasi.	Dit HPP – DJA

UAP BUN TK DJA

A. Satker PNBPN Khusus BUN Pengelola PNBPN Minyak Bumi dan Gas Bumi (984572)

1) Peristiwa Setelah Tanggal Neraca

- a) Atas Utang *Fee* Penjualan MMKBN periode April-Desember 2024 sebesar USD14,068,777 telah diselesaikan seluruhnya pada bulan Januari 2024. Melalui nota dinas nomor ND-6/AG/2025 tanggal 6 Januari 2025, Direktur Jenderal Anggaran telah menyampaikan permintaan pembayaran kepada Ditjen Perbendaharaan, dan telah diterbitkan SP2D nomor 249992804000042 pada tanggal 8 Januari 2025.
- b) Dari total saldo utang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.074.470.588 telah diselesaikan seluruhnya pada bulan Januari 2025.
- c) Dari total saldo utang DMO *Fee* sebesar Rp1.371.471.469.018 telah diselesaikan seluruhnya pada tahun 2025.
- d) Dari total saldo underlifting sebesar USD560,395,909 telah diselesaikan sebesar USD21,628,949.89, yaitu atas tagihan dari PT Pertamina EP.
- e) Atas pembayaran PBB Migas tahun 2024, audit BPK menemukan double payment atas tagihan PBB Migas a.n. Medco E&P Grissik Ltd. sebesar Rp44.773.944.115, yaitu pembayaran dari proses pemindahbukuan DJA serta pembayaran dari Medco E&P Grissik selaku wajib pajak. Berdasarkan penjelasan dari Medco E&P Grissik, amendemen dan pernyataan kembali kontrak bagi hasil untuk wilayah Corridor yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2023 oleh SKK Migas, Medco E&P Grissik, PT PHE Corridor, dan Repsol Corridor S.A. menyatakan bahwa kewajiban pembayaran PBB Migas mulai tahun 2024 merupakan kewajiban kontraktor dan harus dibayarkan sendiri oleh Medco E&P Grissik. Selain itu, audit BPK atas LKBUN tahun 2024 juga menemukan kelebihan pembayaran atas PBB Migas Pertamina EP pada wilayah kerja Pertamina EP Aset 4 Cepu Field sebesar Rp2.639.999.999. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena adanya koreksi atas SPPT PBB Migas yang tidak terinformasikan ke DJA sehingga DJA membayarkan PBB Migas dengan jumlah lebih besar dari seharusnya. Oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan double payment PBB Migas Medco EP Grissik serta kelebihan pembayaran PBB Migas Pertamina EP Cepu ini, pada tahun 2025 Direktorat PNBPN SDA KND berkoordinasi dengan DJP dan DJPB terkait pengembalian lebih bayar atas PBB migas yang telah dibayarkan. Selain itu DJA juga akan memperkuat proses bisnis terkait pembayaran PBB Migas.
- f) Pada Rekening Migas Nomor 600.000411980 terdapat Penerimaan sebesar USD3,405,442,086.25 dan pengeluaran sebesar USD3,028,622,395.31 yang dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2023 (<i>Audited</i>)	
	USD	RpJuta	USD	RpJuta
I. Saldo Awal	94,982,920.40	1.466.441,31	231,869,842.68	3.615.314,59
II. Penerimaan:				
1 Penerimaan PNBPN SDA Migas dan PNBPN Lainnya	3,369,269,619.76	53.610.034,17	2,913,888,068.63	44.321.476,60
2 Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI			248,834.38	3.742,54
3 Penerimaan Lain-lain	36,172,466.49	586.645,22	26,141,048.16	407.692,46
4 Retur/Pengembalian karena Salah Rekening			60,974.00	914,79
5 Selisih Kurs Pembukuan Kredit		3.778.393,57	-	3.146.518,55
Total Penerimaan	3,405,442,086.25	57.975.072,96	2,940,338,925.17	47.880.344,94

URAIAN	31 Desember 2024 (Audited)		31 Desember 2023 (Audited)	
	USD	RpJuta	USD	RpJuta
III. Pengeluaran:				
1 Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. PBB Migas ke DJP	542,513,134.53	8.377.865,78	688,151,896.52	10.634.943,10
b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN & ABT ke Pemda	1,148,722.62	17.989,33	1,129,124.09	17.167,82
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
· Pendapatan dari PNBP SDA Migas	457,721,301.00	7.129.747,70	-	-
· Pendapatan dari PNBP Migas Lainnya	816,346.81	13.125,60	1,724,999.18	26.592,59
Subtotal Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/APBD	1,002,199,504.96	15.538.728,41	691,006,019.80	10.678.703,50
2 Pengeluaran non APBN/APBD:				
· Pembayaran <i>Reimbursement</i> PPN KKKS	580,978,472.56	9.108.883,85	553,746,491.87	8.434.214,80
· Pembayaran <i>DMO Fee</i> KKKS	534,349,149.61	8.498.253,93	590,228,339.36	9.038.475,77
· Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS	872,881,122.06	13.868.266,36	1,166,938,343.88	17.885.297,12
· Pembayaran <i>Fee</i> Penjual Migas	31,557,958.13	487.333,22	74,996,844.17	1.131.670,62
Subtotal Pengeluaran Non APBN/APBD	2,019,766,702.36	31.962.737,36	2,385,910,019.28	36.489.658,32
3 Koreksi Pembukuan Debit oleh BI			248,834.38	3.742,54
4 Retur/Pengembalian karena Salah Rekening			60,974.00	936,07
5 Pengeluaran Lainnya	6,656,187.99	107.131,35	-	-
6 Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit		4.210.002,36	-	2.856.177,78
Total Pengeluaran	3,028,622,395.31	51.818.599,48	3,077,225,847.45	50.029.218,22
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	376,819,690.94	6.156.473,48	(136,886,922.28)	(2.148.873,28)
V. Saldo Akhir (I + IV)	471,802,611.34	7.622.914,79	94,982,920.40	1.466.441,31

2) Ringkasan Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas dari Kontrak Kerja Sama Tahun 2024

Berikut ini adalah ringkasan hasil kegiatan usaha hulu migas dari kontrak kerja sama selama tahun 2024 (periode lifting Januari s.d. Desember) pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS):

Kegiatan Hulu Migas		Jumlah
Lifting Oil	MBBLS	210,835
Lifting Gas	MMSCF	1,933,727
Oil Price	USD/bbls	80
Gas Price	USD/mscf	8
Gross Sales	(USD 000)	32,803,558
FTP LNG	(USD 000)	239,910
Cost of Sales	(USD 000)	1,348,821
Netback/Gros Revenue	(USD 000)	31,214,828
First Trance Petroleum	(USD 000)	3,055,352
Netback after FTP	(USD 000)	28,159,475
Investment Credit	(USD 000)	119,711
Total Cost Recovery	(USD 000)	7,428,241
Total Recoverable	(USD 000)	7,547,952
Equity to be Split	(USD 000)	20,611,523

Kegiatan Hulu Migas		Jumlah
Government Share *)	(USD 000)	12,763,489
Lifting Pemerintah	(USD 000)	12,663,041
Net Over Lifting Pemerintah	(USD 000)	100,448

*) berdasarkan % Split Production Sharing Contract

Keterangan:

MBBLS : 000 Barel

MSCEF : 000 Square Cubic Feet

Data tersebut di atas berasal dari *resume* rekapitulasi dalam Buku II SKK Migas Tahun 2024. Adapun data *resume* rekapitulasi yang berasal dari laporan FQR 2024 final belum tersedia karena masih dalam proses reviu oleh SKK Migas

B. Satuan Kerja PNBP Khusus BUN Pengelola PNBP Setoran Lainnya

- 1) PNBP Setoran Lainnya mencatat penerimaan yang berasal dari sisa surplus BI dan surplus OJK. Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa: Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

Namun demikian dengan disahkannya Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) pada 12 Januari 2023, ketentuan pada Pasal 37 ayat (5) UU No 21 Tahun 2011 tersebut diubah menjadi: Dalam hal terdapat hasil pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran maka dapat digunakan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu Pasal 37A UU P2SK menyatakan bahwa:

- a) Pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Undang-Undang ini, tetap berlaku sampai dengan akhir tahun 2024.
- b) Penggunaan hasil pungutan berdasarkan undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan tetap dapat dilakukan sampai dengan akhir tahun 2024.
- c) Ketentuan mengenai pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mulai berlaku tahun 2025.

Dengan demikian sesuai dengan UU P2SK tersebut, mulai tahun 2025 atas pungutan yang tidak digunakan sampai dengan akhir tahun, dapat digunakan oleh OJK pada tahun anggaran berikutnya.

- 2) Selama periode 01 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 terdapat setoran PNBP dari PT Virama Karya sebesar Rp2.249.850.000. Setoran PT Virama Karya tersebut didasarkan atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disetorkan melalui SIMPONI dengan kode Satker dan Akun 999.99.984672.422132. Atas kesalahan setor dimaksud saat ini sedang dalam proses tindak lanjut. Sesuai hasil rapat pembahasan lanjutan pada tanggal 3 Februari 2025 dengan DJPB akan dibuat surat permintaan pengajuan pengembalian dari PT Virama Karya, dan selanjutnya diproses dengan mekanisme SPMPD kepada Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPB, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran atas Pengembalian Penerimaan Negara.

UAP BUN TK DJPK

A. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok

Sesuai dengan Bab VI tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran

Pajak Rokok, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran Pajak Rokok yang dihitung berdasarkan:

1. Kelebihan pembayaran Pajak Rokok karena kesalahan penghitungan;
2. Pengembalian Cukai Rokok; atau
3. Pajak Rokok yang telah dibayar oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek Pajak Rokok yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok tersebut dilakukan secara tunai atau dengan cara diperhitungkan pada pembayaran Pajak Rokok berikutnya. Atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok oleh Wajib Pajak Rokok, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan dan memeriksa jangka waktu berlaku Tanda Bukti Kelebihan Pembayaran Pajak Rokok. Dalam hal hasil penelitian telah sesuai, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat permintaan kepada Kepala KPPN untuk menerbitkan SKTB dilampiri BPN. Setelah diterbitkannya SKTB oleh Kepala KPPN, Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan surat rekomendasi pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok kepada DJPK dengan dilampiri dokumen permohonan dari Wajib Pajak Rokok, tanda bukti kelebihan pembayaran Pajak Rokok, dan SKTB. Kemudian berdasarkan surat rekomendasi tersebut, DJPK menerbitkan SKP-KP2R. Atas dasar SKP-KP2R yang diterbitkan, pejabat perbendaharaan Pajak Rokok menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok melalui KPPN Jakarta II. Sampai dengan akhir periode Tahun Anggaran 2024, terdapat pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Rokok sebagaimana tabel dibawah ini.

No	Nama Perusahaan	Dokumen Pengembalian			Cara Penyelesaian
		Tanggal	Nomor	Nilai	
1	PT Surya Utama Anugerah	26/03/2024	82005T/999250/2024	21.064.320	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan I Tahun Anggaran 2024
2	PT Intech Surya Abadi	26/03/2024	82006T/999250/2024	234.111.600	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan I Tahun Anggaran 2024
3	CV Asa Sukes Makmur	31/07/2024	82038T/999250/2024	12.297.600	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan III Tahun Anggaran 2024
4	UD Pilar Sejati	09/08/2024	82039T/999250/2024	3.398.400	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan III Tahun Anggaran 2024
5	PR Lancar Nunut Urip	12/08/2024	82041T/999250/2024	6.714.000	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan III Tahun Anggaran 2024
6	PR Ronfigal Bangkit	11/10/2024	82049T/999250/2024	45.091.000	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024
7	PR Dua Tiga	15/10/2024	82056T/999250/2024	99.552.000	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024
8	PR Kasejo	15/10/2024	82057T/999250/2024	57.096.000	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024
9	PT Putra Bintang Sembilan Nusantara	29/10/2024	82060T/999250/2024	17.568.000	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024
10	PT Siyem Mandala Noorhadi Indonesia	12/12/2024	82072T/999250/2024	2.635.200	diperhitungkan dengan penerimaan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024
Jumlah				499.528.120	

B. Penggunaan Satker 999250 untuk Penerimaan dan Penyetoran Pajak Rokok

Perubahan satker 999247 menjadi satker 999250 dilakukan secara bertahap mulai tahun 2015 karena dalam pelaksanaannya penerimaan Pajak Rokok masih menggunakan satker 999247 sedangkan satker 999250 digunakan untuk penyetoran Pajak Rokok.

Penggunaan satker 999250 pada tahun 2016 dioptimalkan dengan membelokkan secara otomatis/tersistem terhadap penerimaan Pajak Rokok dari satker 999247 ke satker 999250 dimulai pada Oktober 2016 sehingga satker 999250 dapat menyajikan semua informasi penerimaan Pajak Rokok.

C. Tindak Lanjut atas Temuan BPK

Tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan tentang adanya perbedaan data penerimaan Pajak Rokok tahun 2015 menurut DJBC (SAC-S) sebesar Rp12.254.041.168.540 dan menurut DJPB (SPAN) sebesar Rp13.953.934.936.936 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp1.699.893.768.396), telah ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan antara DJPK, DJPB, DJBC dan Itjen. Kemudian disepakati akan dilakukan penelusuran perbedaan data tersebut dengan mengacu pada NTPN. Selanjutnya melalui surat DJPK nomor S-17/PK.3/2017 tanggal 14 Februari 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok TA 2015 dan 2016 yang telah ditindaklanjuti dengan surat Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor S-552/BC.04/2017 tanggal 21 Desember 2017 hal Penyampaian hasil Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. DJBC telah mengirimkan surat nomor S-304/BC.04/2017 tanggal 31 Juli 2017 hal Permintaan Penjelasan Data Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC yang menangani Pajak Rokok.
2. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok tahun 2015 kepada beberapa KPPBC secara langsung dengan mendatangi kantor tersebut serta melakukan wawancara dengan pegawai yang menangani Pajak Rokok di kantor tersebut.
3. Didapatkan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a. Dari 124 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 110 NTPN.
 - b. Dari 21 NTPN yang ada pada aplikasi SACS namun tidak ada dalam aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 21 NTPN.
 - c. Dari 24 NTPN yang memiliki nilai setoran yang sama dengan frekuensi penyetoran pada tanggal penyetoran yang sama lebih dari 1 kali telah terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN.
 - d. Dari 13 data pajak rokok yang memiliki NTPN yang sama tetapi nominal penyetorannya berbeda telah terkonfirmasi sebanyak 13 data.
 - e. Dari 6 transaksi pajak rokok yang double dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 1 transaksi.
4. Terdapat kendala dalam pencarian data pajak rokok dikarenakan penelusuran data hanya dari nama penyetor, tidak menyebutkan nama KPPBC-nya. Hal tersebut mengakibatkan data pajak rokok tidak ditemukan.
5. Data pajak rokok yang belum ditemukan masih dalam proses pencarian dan menunggu konfirmasi dari KPPBC terkait.

Pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018 telah dilakukan pembahasan bersama antara DJPK, DJPB, DJBC, dan Itjen Kemenkeu pada tanggal 23 Mei 2018 di Ruang Rapat II, Gedung Papua Lantai 4, DJBC sesuai dengan undangan Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai nomor UND-148/BC.04/2018 tanggal 22 Mei 2018 perihal Undangan Rapat Pembahasan dan Penelaahan Bersama. Pada rapat tersebut telah disimpulkan bahwa dari 17 transaksi pajak rokok yang belum ditemukan sampai akhir tahun 2017, telah ditemukan dokumen sumber dari 6 transaksi tersebut. Sehingga total sisa selisih data tahun 2015 adalah sebanyak 11 transaksi dengan jumlah pajak rokok sebesar Rp22.705.652.400. Untuk transaksi yang belum ditemukan akan dilakukan konfirmasi ke KPPBC/Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nomor ND-69/BC.04/2019 tanggal 25 Januari 2019 hal Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekonsiliasi Data Pajak Rokok Tahun 2015 dapat disampaikan bahwa:

1. DJBC telah melakukan rekonsiliasi Pajak Rokok Tahun 2015 dengan meminta penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) secara langsung (mendatangi kantor tersebut) ataupun tidak langsung.
2. Telah ditemukan hasil rekonsiliasi sebagai berikut:
 - a. Dari 25 NTPN yang ada pada aplikasi SPAN namun tidak ada dalam aplikasi SAC-S telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 24 NTPN dan tersisa 1 NTPN yang belum terkonfirmasi.
 - b. Dari 9 NTPN yang ada pada aplikasi SAC-S namun tidak ada di aplikasi SPAN telah ditemukan dan terkonfirmasi sebanyak 9 NTPN.
 - c. Dari 2 data pajak rokok yang memiliki NTPN berbeda antara aplikasi dan aplikasi SAC-S (indikasi salah input) namun nominal penyetorannya sama, telah terkonfirmasi sebanyak 2 data.
 - d. Dari 5 transaksi pajak rokok yang double entry dan memiliki perbedaan pada detail transaksinya telah terkonfirmasi sebanyak 5 transaksi.
3. Bahwa tersisa 1 transaksi yang belum ditemukan dengan jumlah sebesar Rp21,59 Juta atau sebesar 01% dari jumlah nilai temuan seluruhnya (Rp1,69 Triliun).

Dalam rangka penyelesaian adanya 1 (satu) sisa transaksi yang belum ditemukan tersebut sudah beberapa kali dibahas bersama antara DJPK dengan Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan, namun belum bisa ditemukan penyelesaiannya.

D. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Rokok

Rekonsiliasi dilaksanakan untuk menyesuaikan informasi catatan penerimaan Pajak Rokok yang disediakan oleh SPAN/MPN-DJPB dengan dokumen pendukung pemungutan yang tercatat dalam catatan penerimaan Pajak Rokok yang disediakan oleh SACS-DJBC. Sumber data yang digunakan antara lain berupa rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok yang disampaikan DJPB ke DJPK setiap triwulan serta data pendukung rincian transaksi yang diunduh melalui SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) dan MPN (Modul Penerimaan Negara) dan rekapitulasi data penerimaan Pajak Rokok yang disampaikan DJBC ke DJPK setiap bulan serta data pendukung rincian transaksi yang ditarik dari SACS (Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi).

Berdasarkan data penerimaan Pajak Rokok dari DJPB dan DJBC periode 1 Januari 2024 s.d 31 Desember 2024 yang ditarik pada tanggal 12 Februari 2025, diperoleh rincian rekapitulasi sebagai berikut:

No	Bulan	SACS(DJBC)(RUPIAH)	SPAN/MPN(DJPB)(Rupiah)
1	Januari	1.711.217.328.502	1.711.217.328.502
2	Februari	2.154.536.362.896	2.154.536.362.896
3	Maret	1.321.544.622.578	1.321.544.622.578
4	April	1.900.174.324.801	1.900.174.324.801
5	Mei	622.275.608.149	622.275.608.149
6	Juni	1.986.820.872.727	1.986.820.872.727
7	Juli	1.347.956.083.148	1.347.956.083.148
8	Agustus	2.149.709.399.347	2.149.711.156.147
9	September	1.702.960.068.023	1.703.149.687.223
10	Oktober	1.772.572.021.744	1.773.042.001.744
11	November	1.719.914.934.428	1.720.218.745.228
12	Desember	3.272.323.427.232	3.273.529.654.592
Total		21.662.005.053.575	21.664.176.447.735

Pada tahun 2024 telah dilakukan 2 (dua) kali Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Rokok antara Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu:

1. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Rokok untuk periode Semester I Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Juli 2024, sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BA-3/PK.5/TR.4/2024, telah disepakati bahwa nilai penerimaan Pajak Rokok periode Semester I Tahun Anggaran 2024 yang dimuat dalam SACS dan SPAN telah sesuai dengan dokumen sumbernya yaitu sebesar Rp9.696.569.119.653. Adapun Penerimaan Data transaksi NTPN C570A5PSA1AK2VV4 dengan nilai Rp74.839.680 akan diperhitungkan pada penerimaan Pajak Rokok Triwulan III TA 2024. Sebagai tindak lanjut rekonsiliasi, Direktorat Jenderal DJBC telah menyampaikan nota dinas nomor MOR ND-664/BC.04/2024, tanggal 22 Juli 2024 tentang Tindaklanjut atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Rokok Semester I Tahun Anggaran 2024 yang pada intinya sebagai berikut:
 - a. Terdapat 2 (dua) data penerimaan pajak rokok yang terdapat dalam billing DJBC namun tidak masuk dalam SPAN DJPb, merupakan penerimaan pajak rokok
 - b. Terdapat 7 (tujuh) data penerimaan pajak rokok pada SPAN DJPb namun belum tercatat dalam laporan bulanan penerimaan pajak rokok yang disampaikan oleh DJBC, benar merupakan penerimaan pajak rokok namun terdapat kekurangan pada saat penarikan data dari aplikasi billing yang dikelola oleh DJBC sehingga tidak dilaporkan dalam laporan bulanan penerimaan pajak rokok.
2. Rekonsiliasi Data Penerimaan Pajak Rokok untuk periode Semester II Tahun Anggaran 2024 tanggal 11 Februari 2025, sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Nomor BA-3/PK.5/TR.4/2025, telah disepakati bahwa nilai penerimaan Pajak Rokok periode Semester II Tahun Anggaran 2024 yang dimuat dalam SACS dan SPAN telah sesuai dengan dokumen sumbernya yaitu sebesar Rp11.967.586.200.402. Sebagai tindak lanjut rekonsiliasi, Direktorat Jenderal DJBC telah menyampaikan nota dinas nomor ND-147/BC.04/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Tindaklanjut atas Pelaksanaan Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Rokok Semester II Tahun Anggaran 2024, yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - a. Terdapat 1 (satu) data penerimaan pajak rokok yang terdapat dalam billing DJBC namun tidak masuk dalam SPAN DJPb, yaitu dari Wajib Pajak Putra Stabat Industri, NTPN nomor BF380411ACSJPDCB dengan nilai sebesar Rp53.712.000 merupakan penerimaan pajak rokok
 - b. Terdapat 9 (sembilan) data penerimaan pajak rokok pada SPAN DJPb namun belum tercatat dalam laporan bulanan penerimaan pajak rokok yang disampaikan oleh DJBC dengan nilai total sebesar Rp2.150.266.480. Diakui benar merupakan penerimaan pajak rokok namun terdapat kekurangan pada saat penarikan data dari aplikasi billing yang dikelola oleh DJBC sehingga tidak dilaporkan dalam laporan bulanan penerimaan pajak rokok (bukti terlampir). Terhadap pajak rokok a.n. Karya Niaga Bersama, terdapat anomali dimana pada SPAN DJPb telah menerima NTPN sedangkan pada sistem billing DJBC tidak dapat menerima NTPN atas pajak rokok yang telah dibayar.

E. Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan

Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan yang merupakan amanat dari Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mendukung penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan melalui kontribusi penerimaan yang bersumber dari Pajak Rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Mekanisme pemotongan penerimaan Pajak Rokok untuk disetorkan ke rekening BPJS Kesehatan mengacu kepada ketentuan Pasal 6 PMK Nomor 128/PMK.07/2018 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) atau lebih, tidak dilakukan pemotongan Pajak Rokok;
- b. Apabila anggaran kontribusi Jaminan Kesehatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang tercantum dalam kompilasi berita acara yang diserahkan oleh pemerintah provinsi, kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen), pemotongan Pajak Rokok dilakukan sebesar selisih kurang dari 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); atau
- c. Apabila pemerintah provinsi tidak menyampaikan kompilasi berita acara kesepakatan dikenakan pemotongan Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen).

Berita acara kesepakatan memuat kesepakatan antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan mengenai besaran penerimaan Pajak Rokok yang akan dipotong sebagai bentuk kontribusi daerah dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Berita acara kesepakatan dari daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi dikompilasi oleh pemerintah provinsi untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dalam rangka pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan Program Jaminan Kesehatan, telah dilakukan rekonsiliasi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan untuk mengetahui kecukupan perencanaan dan penganggaran kontribusi program Jaminan Kesehatan Nasional. Hasil kesepakatan tersebut, dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan BPJS Kesehatan. Untuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terdapat selisih kurang anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Daerah yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan, selisih kurang dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Berdasarkan berita acara kesepakatan tersebut, dilakukan pemotongan Pajak Rokok untuk masing-masing pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang kemudian akan disalurkan/disetorkan ke BPJS Kesehatan. Ringkasan besaran pemotongan Pajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan masing-masing Provinsi dengan rincian sebagaimana pada [Lampiran LDCPL8](#).

UAP BUN TK DJKN

A. ABMA/T

1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT CAPAIAN KINERJA PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA PADA TAHUN 2024

Atas peran Tim Penyelesaian dan Tim Asistensi Daerah ABMA/T, sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 19 aset telah diselesaikan status hukum secara tuntas dan 5 aset diselesaikan sebagian status hukumnya.

Sampai dengan 31 Desember 2024, dari total ABMA/T sebanyak 1.020 dalam Lampiran PMK Nomor 129 Tahun 2024, sebanyak 579 aset telah diselesaikan status hukumnya dengan tuntas, sehingga masih terdapat 441 aset yang belum diselesaikan yang terdiri dari 87 aset belum diselesaikan sebagian status hukumnya dan 354 aset belum diselesaikan status hukum seluruhnya.

2. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA DENGAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

Sejak awal pengelolaan ABMA/T sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat 95 Keputusan Menteri Keuangan mengenai penyelesaian ABMA/T dengan cara dilepaskan kepada Pihak Ketiga dengan pembayaran kompensasi.

3. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA PENYELESAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA DENGAN PEMBAYARAN KOMPENSASI

Terhadap mekanisme penyelesaian ABMA/T dengan cara pelepasan penguasaan dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, didahului dengan penilaian dalam rangka mendapatkan Nilai Wajar sebagai dasar perhitungan besaran kompensasi yang akan dibayar oleh Pihak Ketiga. Adapun penetapan persetujuan Menteri atas besaran kompensasi terlebih dahulu dilengkapi dengan surat pernyataan Pihak Ketiga mengenai kesediaan/kesanggupan membayar kompensasi sebagai mitigasi risiko adanya wanprestasi. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang sudah dilakukan penilaian namun belum atau tidak diterbitkan surat persetujuan Menteri.

4. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA DALAM PROSES PENILAIAN

Terhadap mekanisme penyelesaian ABMA/T dengan cara pelepasan penguasaan dari Negara kepada Pihak Ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah, didahului dengan penilaian dalam rangka mendapatkan Nilai Wajar sebagai dasar perhitungan besaran kompensasi yang akan dibayar oleh Pihak Ketiga. Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa yang saat ini dalam proses dilakukan penilaian.

5. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT RAPAT PEMBAHASAN

Sebagai upaya dalam penyelesaian ABMA/T, Tim Penyelesaian melaksanakan agenda rapat rutin pembahasan yang telah dilakukan selama dari awal tahun hingga 31 Desember 2024.

6. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT PENAMBAHAN JUMLAH ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA DALAM LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.06/2021

Sebagaimana Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020, dijelaskan bahwa aset yang dilakukan penyelesaian tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa. Selanjutnya, dalam rangka mengakomodir penyelesaian ABMA/T telah dilakukan perubahan terhadap Lampiran PMK 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan menambahkan lima ABMA/T yang belum diselesaikan secara keseluruhan (penyelesaian sebagian), yakni:

- a. Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor-TK/SD/SMP/SMA/ Akademi Management, berlokasi di Kota Bogor, Jawa Barat.
- b. SDN Waluyo I dan Perumahan/Pertokoan, berlokasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

- c. SDN VII, IX, XIV dan XVI Karawang, Masyarakat, Pemerintah Daerah untuk fasilitas Jalan, berlokasi di Karawang, Jawa Barat.
- d. SMA Negeri Blitar, SD Negeri Sananwetan, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.
- e. SD Negeri Jatituri 1 dan 3, Madrasah Aliyah Negeri, TK Pertiwi, SMP/SMA/SMEA Kodya Blitar, Perkoveri dan Makoramil, berlokasi di Kotamadya Blitar, Jawa Timur.

Atas dasar tersebut, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2020 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa, yang mengakibatkan terjadinya pemutakhiran data ABMA/T yang sebelumnya berjumlah 1.015 aset menjadi 1.020 aset.

7. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA YANG MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN DENGAN CARA PELEPASAN KEPADA PIHAK KETIGA

ABMA/T yang telah diketahui nilainya dan ditetapkan besaran kompensasinya berdasarkan Surat Menteri Keuangan selanjutnya diproses tindak lanjut dengan prosedur pelepasan ABMA/T dengan tahapan meliputi: pemberitahuan/penagihan kompensasi, konfirmasi/klarifikasi penerimaan Negara (bila ada), dan proses penerbitan penetapan keputusan pelepasan ABMA/T (bila memenuhi syarat). Adapun ABMA/T dengan penetapan besaran kompensasi yang masih berlaku (aktif) dan dalam proses tindak lanjut penyelesaian/pelepasan yang dilakukan oleh Direktorat PKN sampai dengan 31 Desember 2024.

8. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT TINDAK LANJUT REKOMENDASI ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS PENGELOLAAN ASET BEKAS MILIK ASING/TIONGHOA

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara dan/atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh BPK-RI terkait pengelolaan ABMA/T, terdapat Temuan Hasil Pemeriksaan atas Aset Bekas Milik Asing/Cina pada DJKN Tahun 2007 yang menyisakan 2 (dua) butir rekomendasi masih berstatus dalam proses tindak lanjut. Tindak lanjut Direktorat PKN atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

9. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA TAHUN 2021 TERKAIT PENGELOLAAN ABMA/T

Sehubungan dengan hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Undang-Undang Bendahara Umum Negara Tahun 2021 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 49.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022, terdapat temuan yang berkaitan dengan Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa dengan dua rekomendasi yang hingga saat ini masih dalam proses tindak lanjut. Tindak lanjut Direktorat PKN atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI.

B. Aset Eks Pertamina

1. PEMANFAATAN BMN OLEH PT PERTAMINA C.Q. PT PERTAMINA EP

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, Menteri Keuangan menanggapi surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 tentang Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, Menteri Keuangan antara lain menyetujui skema sewa atas pemanfaatan aset-aset Eks KKKS Pertamina senilai Rp16,2 Triliun, dengan

mengeluarkan objek sewa berupa lahan dan sumur yang dimanfaatkan langsung oleh PT Pertamina (Persero) sesuai kontrak Wilayah Kerja dengan BP Migas (SKK Migas), sehingga pengakuan beban sewa sementara untuk Barang Milik Negara Eks Aset KKKS Hulu sebesar Rp16,2 Triliun adalah sebesar Rp9,472 Triliun. Untuk itu, perlu dilakukan pemilahan aset-aset eks KKKS Pertamina sebagai objek sewa dalam rangka penghitungan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Negara Eks Aset KKKS.

Menindaklanjuti skema sewa tersebut, melalui surat Nomor: S-155/KN.3/2014 tanggal 5 September 2014 perihal Temuan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun 2013, Direktur KND meminta agar PT Pertamina (Persero) dan/atau Pertamina EP menyelesaikan pelunasan tunggakan hutang sewa BMN Eks Aset Pertamina.

Melalui surat Nomor: SRT-0365/SKKC0000/2014/S4 tanggal 29 September 2014 perihal Sewa BMN Eks Pertamina Rp3,03 Triliun, SKK Migas berkeberatan apabila pengembalian biaya sewa dilakukan dengan mekanisme *cost recovery*.

Menjawab surat dari SKK Migas, Menteri Keuangan kemudian bersurat kepada Kepala SKK Migas melalui surat Nomor: S-837/MK.06/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Piutang Sewa BMN oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP yang pada pokoknya menyampaikan bahwa SKK Migas memperhitungkan Biaya Sewa BMN sebagai biaya operasi PT Pertamina EP yang dapat dikembalikan sesuai ketentuan perundangan.

Pada tanggal 30 Desember 2014, SKK Migas melalui surat Nomor: SRT-1294/SKKO0000/2014/S4 bersurat kepada Menteri Keuangan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa:

Pada prinsipnya SKK Migas menyetujui sewa aset eks Pertamina dapat dibebankan sebagai biaya operasi (*cost recovery*) sepanjang aset tersebut digunakan dalam operasi hulu migas.

Sebagai tindak lanjut, SKK Migas telah meminta konfirmasi kepada PT Pertamina EP melalui surat Nomor: SRT-2498/SKKC2000/2014/S4 tanggal 17 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina atas nilai aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP.

PT Pertamina EP melalui surat Nomor 127/EP4000/2014-S4 tanggal 24 Desember 2014 perihal Sewa Aset Eks Pertamina memberikan konfirmasi bahwa berdasarkan hasil inventarisasi aset eks BMN Pertamina yang telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor 194/C00000/2011-S0 tanggal 29 Maret 2011 perihal Sewa Aset Eks Pertamina, maka nilai aset BMN Eks Pertamina kategori *equipment*, bangunan dan aset lainnya yang saat ini digunakan oleh PT Pertamina EP sebesar Rp6.630.929.353.338.

Berdasarkan hal tersebut, maka SKK Migas meminta agar pengenaan sewa didasarkan pada hasil konfirmasi PT Pertamina EP sebagai Pengguna Barang Aset Eks KKKS Pertamina dengan nilai sebesar Rp6.630.929.353.338.

Berdasarkan hal tersebut, maka SKK Migas meminta agar pengenaan sewa didasarkan pada hasil konfirmasi PT Pertamina EP sebagai Pengguna Barang Aset Eks KKKS Pertamina dengan nilai sebesar Rp6.630.929.353.338.

Hal ini sejalan juga dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan dalam rapat tripartit antara BPK, Kementerian Keuangan dan SKK Migas pada tanggal 13 November 2015 bahwa atas BMN Eks Aset

Pertamina yang dikuasai oleh Pertamina EP dikenakan sewa dan perlu dibuat perjanjian sewa antara Pemerintah (DJKN) dengan PT Pertamina EP.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pertamina EP telah menyelesaikan pembayaran sewa sampai dengan per tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.745.619.185.367 dan melalui surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor: S-21/KN.3/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Draft Perjanjian Sewa Menyewa BMN Eks Pertamina, maka disusun dan ditandatangani perjanjian sewa menyewa Nomor PRJ-3/MK.6/2016 tanggal 20 September 2016 dengan menggunakan dasar perhitungan sewa sebesar Rp6.630.929.353.338.

Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015 kepada Menteri Keuangan, Direktorat KND telah dilakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP.

Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.

Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

Mempertimbangkan prinsip konservatisme dalam akuntansi, yaitu prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana Direktorat KND mengakui segera potensi adanya piutang sewa yang tidak tertagih, maka dasar perhitungan pendapatan PNBPN Lainnya menggunakan nilai Rp6.630.929.353.338.

Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

2. TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TERKAIT ASET EKS PERTAMINA

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2018, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Pengendalian atas Pemanfaatan BMN KKKS dan Pencatatan Aset Eks Pertamina Belum Tertib". BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar melakukan penelusuran dan menetapkan status aset Eks Pertamina yang belum dilakukan IP atau belum dapat ditentukan nilai wajarnya.

- a. Tindak Lanjut telah dilaksanakan dengan kebijakan yang disepakati dengan BPK adalah Menteri Keuangan akan memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menelusuri BMN yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya berdasarkan Laporan Hasil IP tahun 2012 dan mengungkapkan status aset yang belum dilakukan IP dan belum dapat ditentukan nilai wajarnya tetap berstatus BMN sebagaimana ditetapkan dalam KMK nomor 92/KMK.06/2008.
- b. Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan 31 Desember 2024 adalah:
 - 1) Berdasarkan hasil penelusuran, telah terpetakan BMN Eks Pertamina yang menjadi objek IP sejumlah 42.994.
 - 2) Sampai dengan Desember 2024, BMN Eks Pertamina yang telah dilakukan IP adalah 37.795 unit. Sedangkan untuk sisanya 5.194 unit akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan kesiapan PT Pertamina EP selaku penanggung jawab BMN eks Pertamina.

Permasalahan ini kembali menjadi temuan pada pemeriksaan BPK tahun 2020, sehingga upaya penyelesaiannya menjadi satu kesatuan dengan upaya penyelesaian temuan tahun 2020.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2019, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Terdapat perbedaan penghitungan Piutang atas sewa Aset Eks Pertamina antara PT Pertamina EP dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN)".

BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN untuk memerintahkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara agar menyusun perjanjian pemanfaatan BMN Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP sesuai dengan hasil peninjauan lapangan untuk menetapkan nilai BMN Eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina EP serta menyesuaikan nilai piutang yang tercatat berdasarkan perjanjian yang telah disusun.

Atas temuan dan rekomendasi BPK tersebut, progress tindak lanjut yang telah dilakukan oleh DJKN sampai dengan 30 September 2024 adalah:

Adapun progres sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.
- Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.

- PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:
- Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil Physical Check BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.
- Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK dimaksud, PT Pertamina EP menyampaikan Hasil Physical Check Aset (PCA) 2019 sebagai berikut:

Kelas Aset Objek Sewa	Digunakan	Tidak Digunakan	Total
Bangunan	502.296.425.065	98.814.481.867	601.110.906.932
Equipment	4.157.250.251.287	1.731.901.048.120	5.889.161.299.406
Lain-lain	94.463.625.000	46.203.522.000	140.667.147.000
Subtotal Objek Sewa	4.754.010.301.352	1.876.919.051.987	6.630.929.353.338

- Berdasarkan hasil PCA 2019 tersebut, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.
- Menindaklanjuti hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama dengan PT Pertamina EP sebanyak dua kali dan disepakati untuk dilakukan pembahasan lanjutan dengan melibatkan pihak lain yang terkait.
- Terkait dengan koreksi besaran Piutang Sewa BMN eks Pertamina dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp349.267.287.782 pada laporan keuangan, telah dimintakan permintaan pendapat melalui nota dinas Direktur PKNSI Nomor 2755/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Inspektorat IV dan Nomor 2756/KN.5/2021 tanggal 17 November 2021 kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang pada intinya meminta pendapat apakah surat kepada Pertamina EP perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dapat dijadikan dasar untuk dilakukan koreksi piutang.
- Menanggapi permintaan pendapat tersebut, Inspektorat IV berpendapat agar Dit. PKNSI segera melakukan pembahasan dengan PT. Pertamina EP untuk menyepakati hasil proses identifikasi dan verifikasi atas BMN yang dimanfaatkan dan menyusun perjanjian pemanfaatan BMN berdasarkan hasil kesepakatan dengan PT. Pertamina EP. Mengingat Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 16 Akuntansi Piutang Berbasis Akrua mengatur pencatatan piutang pemanfaatan BMN pada neraca berdasarkan naskah perjanjian sewa.
- Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338 dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.

- Telah dilakukan pembahasan draft perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi draft perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.
- Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

Atas rekomendasi ini telah diusulkan selesai pada pembahasan tidak lanjut dengan BPK di awal tahun 2023.

Sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2020, terdapat temuan terkait BMN eks Pertamina, yaitu "Pengelolaan Aset Eks Pertamina Belum Memadai serta Belum Selesaiannya Perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP" dengan rekomendasi BPK kepada Menteri Keuangan, sebagai berikut:

- menyelesaikan inventarisasi dan penilaian atas 8.057 Aset Eks Pertamina dan menyajikan dalam Laporan Keuangan serta melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP sesuai ketentuan.
- memerintahkan Dit. PKNSI melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dit. PNKNL atas penyelesaian, pengukuran dan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina; dan
- melakukan verifikasi dan penilaian bersama dengan PT Pertamina EP untuk menetapkan nilai Aset Eks Pertamina dalam perjanjian pemanfaatan Aset Eks Pertamina dengan PT Pertamina EP dan menyelesaikan perbedaan nilai piutang serta menyesuaikan dampak pengakuan piutang terhadap nilai Investasi Permanen Pemerintah pada PT Pertamina yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Adapun progress tindak lanjut temuan dan rekomendasi BPK tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil penelusuran, BMN Eks Pertamina yang telah dilakukan IP adalah 37.795 unit. Sedangkan untuk sisanya 5.194 unit akan dilakukan inventarisasi dan penilaian secara bertahap, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-

nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia dan kesiapan PT Pertamina EP selaku penanggung jawab BMN eks Pertamina, dengan memprioritaskan objek penilaian berupa tanah dan teknis pelaksanaan IP-nya lebih mudah serta mempertimbangkan anggaran yang tersedia.

- Sehubungan ditetapkan PMK 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, terdapat perubahan tugas unit baru di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, termasuk juga antara lain peralihan tugas kegiatan Penatausahaan BMN pada Pengelola Barang yang dahulu pada Direktorat PKNSI menjadi tugas Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara. Menindaklanjuti hal tersebut telah dilakukan peralihan Tugas Penatausahaan serta pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian BMN eks Pertamina kepada Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara sesuai nota dinas Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Nomor ND-471/KN.4/2022 tanggal 13 Mei 2022.
- Dalam rangka tindak lanjut temuan pengelolaan lebih lanjut terhadap minimal 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total dan atau FUPP, Dir. PKNSI dengan surat Nomor : S-1143/KN.5/2021 tanggal 20 Mei 2021 hal tindak lanjut hasil inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara eks Pertamina, meminta Pertamina untuk segera mengajukan FUPP terhadap 4.330 unit aset sebagai tindak lanjut IP 2012 s.d 2020 (terdiri dari 45 unit aset yang tidak ditemukan dan 4.285 unit aset dalam kondisi rusak total.
- Dalam rangka tindak lanjut temuan perbedaan pencatatan 18 bidang tanah Aset Eks Pertamina, telah dilakukan rekonsiliasi dengan pihak PT Pertamina EP, Kementerian ESDM dan SKK Migas terkait 18 aset tersebut, berdasarkan rekonsiliasi tersebut disepakati bahwa 17 aset merupakan aset eks Pertamina sedangkan 1 aset sisanya akan dilakukan penelitian dokumen terlebih dahulu oleh PT Pertamina EP.
- Terkait dengan sisa 1 aset tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan permintaan konfirmasi kepada pihak PT. Pertamina EP melalui Surat Direktur PKN Nomor S-225/KN.4/2022 tanggal 10 Juli 2022. PT. Pertamina EP telah menjawab surat tersebut melalui surat Nomor 1009/PEP01100/2022-S0 tanggal 15 Agustus 2022 perihal Konfirmasi status Aset Tanah Eks Pertamina yang menyatakan bahwa 1 aset berupa tanah yang tercatat dengan deskripsi "aset tanah pipeline limanggis" pada Aset eks Pertamina dan tercatat dengan deskripsi aset "Cimanggis" pada CALK UAKPA BUN TK KKKS patut diduga merupakan objek yang berbeda.
- Telah dilakukan rapat koordinasi sesuai surat undangan Direktur PKKN Nomor UND-257/KN.2/2023 tanggal 15 September 2023 yang dihadiri perwakilan Direktorat PKN, SKK Migas, PPBMN ESDM, PT Pertamina EP dimana dari hasil rapat tersebut Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara selaku UAKPA BUN TK Aset Eks PT Pertamina, SKK Migas selaku UAKPA BUN TK BMN Hulu Migas, dan PT Pertamina EP untuk melakukan identifikasi terhadap masing-masing aset yang tercatat pada setiap unit dengan melakukan *desk review* dan pemeriksaan fisik serta penelusuran lebih lanjut.
- Melalui surat Direktur PKKN Nomor S-252/KN.2/2023 tanggal 26 September 2023 telah dikonfirmasi bahwa dari 18 aset yang terindikasi double catat, 17 aset tanah telah selesai dilakukan identifikasi yaitu merupakan aset eks PT Pertamina sedangkan 1 aset tanah

dengan deskripsi "aset tanah pipeline limanggis" pada aset eks Pertamina dan tercatat dengan Deskripsi aset "Cimanggis" pada CALK UAKPA BUN TK KKKS perlu dilakukan penelusuran lebih lanjut.

Pada pembahasan tindak lanjut di awal 2023, seluruh rekomendasi ini telah diusulkan selesai.

Progress penyelesaian perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan PT Pertamina EP adalah sebagai berikut:

- Terhadap selisih aset dengan nilai sebesar Rp2.841.878.588.184, sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Transaksi Khusus Tahun Anggaran 2015, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi aset lanjutan berupa penelitian lapangan antara DJKN, PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP sebagaimana Berita Acara Rekonsiliasi BA- 01/KN.3/REKON.PEP/2015 antara DJKN dengan Pertamina EP dengan hasil Jumlah aset bangunan, equipment, dan aset lainnya sebesar Rp8,425 Triliun, digunakan sebanyak Rp6,63 Triliun, dan aset yang tidak digunakan sebesar Rp1,794 Triliun.
- Berdasarkan hasil Rekonsiliasi tahun 2015 di atas, dilakukan pemetaan atas aset Rp 1,794 Triliun dalam rangka verifikasi atas aset yang benar-benar tidak digunakan
- Berdasarkan Berita Acara Pemetaan antara Dit KND dan PT Pertamina EP tahun 2016 s.d. 2020, telah selesai dilaksanakan pemetaan terhadap selisih aset yang memerlukan klarifikasi sebanyak 13.218 unit dengan nilai Rp1,79 triliun dan diperoleh penambahan nilai aset yang menjadi objek sewa sebesar Rp612.413.874.473.
- Berdasarkan hal tersebut telah disampaikan surat kepada Pertamina EP Nomor S-514/KN.5/2021 tanggal 31 Maret 2021 hal Konfirmasi Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina dan Nomor S-2329/KN.5/2021 tanggal 18 November 2021 perihal Penyesuaian Besaran Piutang atas Sewa BMN Eks Pertamina Oleh PT Pertamina EP yang intinya menyampaikan kekurangan sewa yang harus dibayar oleh PT Pertamina setelah adanya pemetaan.
- PT Pertamina menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor 0169/PEP00000/2021-S0 tanggal 20 April 2021 sebagai berikut:
- Pada saat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kegiatan Operasional Perusahaan Dalam Rangka Pengelolaan Hulu Migas Tahun 2017 s.d 2019 pada Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan terkait, BPK RI mengeluarkan rekomendasi agar hasil *Physical Check* BMN Pertamina diteruskan kepada pihak terkait yaitu PT Pertamina (Persero) dan DJKN Kemenkeu. BPK menyampaikan bahwa Pertamina EP berpotensi menanggung biaya pembayaran sewa yang lebih besar dari yang seharusnya karena tidak segera mengajukan pemutahiran daftar BMN aset Eks Pertamina sebagai dasar peninjauan kembali perhitungan biaya sewa BMN.
- Berdasarkan hasil PCA 2019, aset yang digunakan oleh PT Pertamina EP tidak lagi sebesar Rp6.630.929.353.338, melainkan sebesar Rp4.754.010.301.352.

- Sehubungan dengan adanya perbedaan Penghitungan Besaran Dasar Sewa Aset Eks Pertamina telah dilakukan rapat via Zoom antara DJKN dengan Pihak PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 24 April 2022, dimana berkaitan dengan adanya perbedaan besaran tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk kembali kepada angka dasar sewa sesuai kesepakatan semula yaitu sebesar Rp6.630.929.353.338, dan akan dilakukan koordinasi di internal kedua belah pihak.
- Telah dilakukan pembahasan draft perjanjian sewa BMN Eks Pertamina pada 9 September 2022 sesuai undangan dari Direktur Regional 2 PT Pertamina EP melalui surat undangan nomor 1058/PEP00000/2022-S0 tanggal 07 September 2022. Selanjutnya, pada tanggal 30 September 2022 telah dilakukan pembahasan lanjutan draft perjanjian sewa bersama PT Pertamina EP dan masih akan diagendakan pembahasan lanjutan untuk finalisasi *draft* perjanjian tersebut. Sehubungan dengan jangka waktu sewa, telah dimintakan pendapat kepada Direktorat PKN melalui nota dinas Direktur PKN Nomor ND-1505/KN.4/2022 tanggal 20 September 2022 hal Permintaan Pendapat terkait Perjanjian Sewa Barang Milik Negara Eks Aset Pertamina.
- Telah dilakukan penandatanganan perjanjian sewa antara Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor PRJ-1/MK.6/2022 Nomor 001/PEP00000/2022-S0 tanggal 27 Desember 2022. Dengan adanya kesepakatan perjanjian sewa tersebut dimana menggunakan angka dasar sewa sebesar Rp6.630.929.353.338 dengan jangka waktu perjanjian sewa selama 32 (tiga puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal 17 September 2003 dan berakhir tanggal 16 September 2035, maka piutang yang timbul karena adanya selisih pengenaan angka dasar sewa dilakukan koreksi pada tahun 2022 lalu dari semula Rp1.176.715.352.919 menjadi Rp0.

Atas rekomendasi ini, BPK telah menyetujui statusnya telah selesai ditindaklanjuti.

Terkait dengan pengamanan bukti kepemilikan tanah yang disajikan dalam laporan keuangan, mengingat dokumen kepemilikan sampai dengan saat ini disimpan oleh PT Pertamina EP, Direktorat PKN telah meminta dokumen/bukti kepemilikan melalui:

- Surat Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina EP nomor S-628/MK.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Pertamina Berupa Tanah dan telah ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP pada tanggal 1 April 2022.
- Surat Direktur PKN DJKN yang ditujukan kepada SVP Asset Management PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina EP nomor S-371/KN.4/2022 tanggal 23 Agustus 2022 hal Permintaan Progress Penelusuran Dokumen Kepemilikan Aset Eks Pertamina Berupa Tanah.
- Surat Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) nomor S-52/MK.6/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) hal Permintaan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Pertamina Berupa Tanah.

- Surat Dirjen Kekayaan Negara atas nama Menteri Keuangan yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Pertamina EP Nomor S-363/MK.6/2024 tanggal 09 Mei 2024 hal Permintaan Dokumen Kepemilikan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset Eks Pertamina berupa Tanah.

Hingga periode semester 1 tahun 2024, surat tanggapan PT Pertamina (Persero) maupun PT Pertamina (EP) terkait permintaan penyampaian dokumen kepemilikan aset eks Pertamina tsb, belum diterima oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN. Namun demikian, telah dilakukan koordinasi dengan Tim Legal & Land Matter PT Pertamina EP untuk direncanakan akan diadakan rapat koordinasi pembahasan terkait pengelolaan dokumen kepemilikan dengan PT Pertamina Persero dan Pertamina EP serta DJKN pada semester 2 Tahun 2024.

- Telah dilaksanakan rapat pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 yang dihadiri oleh Perwakilan PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP termasuk perwakilan dari regional/field, Direktorat Hukum dan Humas, dan Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara. dengan disepakati hal-hal terkait pengelolaan dokumen kepemilikan aset eks Pertamina sebagai berikut:
 - a. PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP masih melakukan proses pemetaan tanah BMN yang berasal dari aset eks Pertamina, termasuk lokasi penyimpanan dokumen kepemilikannya.
 - b. Penyerahan dokumen kepemilikan bisa dilakukan secara bertahap mempertimbangkan banyaknya dokumen kepemilikan yang dipetakan. Sebagaimana informasi dari PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina EP bahwa 50% identifikasi dokumen yang dilakukan sudah selesai.
 - c. Perlu diskusi bersama antara Direktorat PKN, Direktorat PKKN, SKK Migas, PPBMN dan PT Pertamina (Persero) agar para pihak memiliki pemahaman bersama terkait tata kelola aset BMN yang berasal dari aset eks Pertamina (direncanakan akan diselenggarakan pada bulan September/Oktobre).
 - d. Selanjutnya pelaksanaan penyerahan dokumen kepemilikan dan pelaksanaan sertifikasi tanah eks Pertamina menjadi Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan akan dilaksanakan pada Tahun 2025 dengan melibatkan Kementerian Keuangan, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Terkait dengan rencana pembahasan dengan Direktorat PKN, Direktorat PKKN, SKK Migas, PPBMN dan PT Pertamina (Persero) belum terlaksana karena PT Pertamina EP dan PT Pertamina (Persero) masih menyelesaikan proses pemetaan (mapping) dokumen kepemilikan yang belum selesai. Rencana tersebut, akan dilaksanakan pada tahun 2025.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI ATAS PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA OLEH LMAN

Pada periode pelaporan 2016, Aset eks Pertamina yang diserahkan kepada LMAN masih dicatat oleh UAKPA BUN BA 999.99 pada Direktorat KND. Dengan adanya kebijakan Direktur APK sesuai surat Nomor S-11561/PB.6/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Pengelolaan Aset BUN oleh LMAN, maka pencatatan atas aset BUN kelolaan LMAN berikut segala hak dan kewajiban yang melekat pada aset tersebut

tidak lagi dicatat dan disajikan pada Laporan Keuangan BUN BA 999.99 Transaksi Khusus periode pelaporan 2017. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan koreksi pada Laporan Keuangan 2017 atas pos-pos yang terkait pengelolaan Aset eks Pertamina kelolaan LMAN yang telah diserahkan sebelumnya sebelum periode pelaporan. Selanjutnya, atas transaksi penyerahan aset kepada LMAN yang terjadi pada periode berjalan, diperlakukan sebagai Transfer Keluar.

4. PERALIHAN PENGELOLAAN ASET EKS PERTAMINA KEPADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020, memberikan penugasan pengelolaan BMN eks Pertamina yang sebelumnya dikelola oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, dialihkan kepada Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi.

Berdasarkan surat perintah tersebut, kewenangan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara untuk menandatangani persetujuan/keputusan yang terkait dengan pengelolaan BMN eks Pertamina sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023. Dan tanggung jawab sebagai UAKPA BUN TK pengelola Aset Eks Pertamina sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara.

C. BMN Idle

1. Terdapat aset yang telah ditetapkan sebagai BMN *idle* namun belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dua Bidang Tanah Bangunan Pos Jaga dan empat unit Gedung Pos Jaga Permanen yang terletak di Kabupaten Sumenep, Sampang, dan Bangkalan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 44/KM.6/WKN.10/KNL.05/2021 tanggal 26 Oktober 2021 karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima Antara Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Pratama Madura dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pamekasan.
 - b. Satu unit Bidang Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dan satu unit Bangunan Gedung Kantor Permanen yang terletak di Jl. Pahlawan, Desa Ngawen, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 198/KM.6/WKN.10/KNL.01/2017 karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan c.q. KPP Pratama Gresik Utara dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya.
 - c. Satu Bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan yang terletak di RT. 12, RW. 04, Kel. Kemas, Kec. Krian, Kab. Sidoarjo sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/KM.6/KNL.1002/2023 karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo.
 - d. Satu Bidang Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan yang terletak di RT. 04, RW. 01, Kel. Lengkong, Kec. Puri, Kab. Mojokerto sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 79/KM.6/KNL.1002/2023 karena belum terdapat Berita Acara Serah Terima antara Kementerian Keuangan c.q. KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dengan Kementerian Keuangan c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo.

2. Terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang namun belum dilakukan serah terima antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Satu unit Bangunan Gedung kantor Permanen yang terletak di Jl. Pelajar Pejuang 45 No 8, Kel. Lingkar Selatan, Kec. Lengkong, Kota Bandung ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.
 - b. Satu unit Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya yang terletak di Komplek Taman Mutiara Blok C-IV/18 Bandung Barat ditetapkan status penggunaan pada Kementerian Perhubungan RI.

D. Aset BLBI

1. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LANCAR

a. Aset Kredit eks BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, Aset Kredit adalah aset yang berupa tagihan bank terhadap para debiturnya yang menurut ketentuan perbankan telah masuk dalam kolektibilitas 5 (lima)/macet, kemudian oleh bank dialihkan kepada BPPN dalam bentuk tagihan atas piutang bank.

Aset kredit eks BPPN diklasifikasikan menjadi aset kredit Asset Transfer Kit (ATK), aset kredit Non Asset Transfer Kit (Non ATK), dan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS). Aset kredit ATK adalah aset kredit yang tercatat dalam Bunisys atau Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB). Sedangkan, Aset kredit Non ATK adalah aset kredit yang tidak tercatat dalam Bunisys atau SAPB. SAPB adalah sistem yang memuat informasi status dan kewajiban aset kredit.

Untuk mengetahui nilai aset kredit eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas kasus aset kredit eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Apabila dari hasil inventarisasi dan verifikasi tersebut diketahui debitur telah memenuhi syarat ada dan besarnya piutang negara maka hal tersebut ditindaklanjuti dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Sesuai ketentuan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transaksi Khusus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018, aset kredit ATK diakui sebagai piutang lain-lain sebesar nilai yang tercatat dalam SAPB, sedangkan aset kredit Non ATK dan PKPS diakui sebagai piutang lain-lain setelah ditandatanganinya Pernyataan Bersama (PB)/diterbitkannya Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN). Untuk aset kredit Non ATK dan PKPS yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Aset kredit ATK disajikan di Neraca sebesar nilai yang tercatat pada SAPB sedangkan aset kredit Non ATK yang telah ditandatangani PB/PJPN disajikan di Neraca sebesar nilai dalam dokumen PB/PJPN. Adapun untuk aset kredit Non ATK yang belum ditandatangani PB/diterbitkan PJPN disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Nilai Per 31 Desember 2024
1	Aset Kredit Non ATK Yang Belum diterbitkan PB/PJPN	2.795.548.129.886
2	Aset Kredit Non ATK Yang Masih Dikelola DJKN	441.823.140.899
3	Tagihan PKPS Yang Belum Diterbitkan PB/PJPN	-
Jumlah		3.237.371.270.784

Sedangkan untuk tagihan PKPS yang belum diterbitkan PB/PJPN oleh PUPN c.q. KPKNL yaitu:

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2022
-	-	-
Jumlah		-

Sampai dengan periode Tahun 2024 telah dilakukan penyerahan aset kredit eks BPPN baik ATK maupun Non ATK senilai Rp14.273.957.637.573,60 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Mata Uang	Jumlah Aset Kredit	Nilai Penyerahan	Nilai Dalam Rupiah
1	Rupiah (IDR)	747	4.595.894.868.921,93	4.595.894.868.921,93
2	Dollar Amerika (USD)	69	583.630.152,59	9.429.712.375.396,63
3	Gulden Belanda (NLG)	1	1.800.000	13.740.824.146,68
4	Deutschmark (DEM)	2	2.188.687,22	18.825.543.546,87
5	Euro (EUR)	1	12.826.978,45	215.784.025.561,46
Jumlah		820		14.273.957.637.573,60

Direktorat PKN melakukan penatausahaan barang jaminan atas aset kredit eks BPPN (selain PKPS) dan eks kelolaan PT PPA (Persero) yang telah diserahkan kepada PUPN sampai dengan periode Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Jenis Kepemilikan	Jumlah Aset Kredit
1	AJB	1276
2	BORTOGCH	1322
3	BPK	55
4	BPKB	4200
5	FAKTUR	95
6	GIRIK	254
7	IJAZAH	72
8	KET-KEPALA-DESA	46
9	KWITANSI	59
10	LAIN-LAIN	4908
11	SHGB	2578
12	SHGU	41
13	SHM	5234
14	SHP	85
15	SIPTB	52
16	TASPEN	45
17	(Blank)	88
Grand Total		20.410

b. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) diatur formula penyisihan sebagai berikut:

- Penyisihan piutang tidak tertagih dari piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA (Persero) dihitung dengan cara saldo akhir piutang dikurangi hasil perkalian dari saldo akhir piutang dikalikan tingkat pengembalian (*recovery rate*) piutang eks BPPN selain tagihan PKPS dan piutang eks kelolaan PT PPA;
- Penyisihan piutang tidak tertagih yang berasal dari tagihan PKPS ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan. Ketentuan mengenai penilaian agunan yang diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan Piutang tidak tertagih, dilaksanakan secara penuh paling lambat untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2016.

Hingga saat laporan keuangan ini disusun, penilaian agunan PKPS sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih belum dilakukan secara menyeluruh, pada tahun 2015 penilaian baru dilakukan terhadap sebagian barang jaminan PKPS Obligor atas nama Kaharudin Ongko, Samadikun Hartono dan Trijono Gondokusumo. Sampai tahun 2020 belum dilakukan penilaian pada barang jaminan PKPS yang belum dinilai sebelumnya.

Penyisihan piutang tidak tertagih atas Piutang pada BDL ditetapkan sebesar 100% dari piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Piutang pada PT PPA (Persero) adalah tagihan Kementerian Keuangan (bukan tagihan BBO/BBKU/BPPN) kepada PT PPA (Persero) terkait pelaksanaan perjanjian pengelolaan aset eks BPPN, dengan demikian, maka tagihan tersebut termasuk dalam piutang Pemerintah yang bersifat lancar sehingga penyisihan atas piutang tersebut merupakan ruang lingkup dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014. Besaran penyisihan piutang tidak tertagih atas piutang lancar ditetapkan sebesar 5 000 (lima permil) dari piutang.

c. ASET PROPRTI EKS BANK DALAM LIKUIDASI**1) Penerimaan Pembiayaan Non Tunai dari Penetapan Status Penggunaan Aset Properti**

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.06/2023 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara. Aset Properti yang ditetapkan menjadi Barang Milik Negara terlebih dahulu dilakukan penilaian untuk memperoleh nilai wajar aset properti.

Dalam Pasal 71 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai atau non tunai diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah Republik Indonesia pada Bank Dalam Likuidasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Hasil pengelolaan aset non tunai yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang piutang Pemerintah Republik Indonesia pada Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi terdiri dari:

Ketetapan	Aset Properti Esk BDL	Bank	Nilai	Ket
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 46/KM.6/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Pengelola Barang	7 (tujuh) bidang tanah yang berada di Jalan H. Jaya I RT 02/RW 04 Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	PT Bank Global Internasional, Tbk (DL)	Rp45.694.058.000	Belum bisa diakui karena belum serah terima
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/KM.6/2023 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung	Bidang tanah yang berada di Jl.A.Yani, Ds.Peguyangan, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar berdasarkan SHM No. 1317	PT Bank Dagang Bali (DL)	Rp26.601.228.000	Diakui karena sudah serah terima berdasarkan BA-222/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/KM.6/2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Ombudsman	Bidang tanah yang berada di Jln. A. Yani No.221-223 D 122 Kav F 01 Kel.Merdeka Kec.Sumur Bandung, Kota Bandung (Ruko di Segitiga Mas Kosambi) berdasarkan SHGB No. 200	PT. Sejahtera Bank Umum (DL)	Rp3.637.197.000	Diakui karena sudah serah terima berdasarkan BA-223/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/KM.6/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Aset Properti Eks Bank Dalam Likuidasi Sebagai Barang Milik Negara Pada Kemenkumham	Bidang tanah yang berada di Jalan Pemuda Nomor 7 Kelurahan Aur Kecamatan Medan Baru Kota Medan berdasarkan SHGB 259	PT. Sejahtera Bank Umum (DL)	Rp10.503.746.000	Diakui karena sudah serah terima berdasarkan BA-224/KN/2024 tanggal 19 Agustus 2024

2) Penerimaan dari Pemanfaatan Aset Properti Dalam Bentuk Sewa

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset properti adalah pemanfaatan aset properti dengan cara sewa. Dalam Pasal 65 telah diatur bahwa hasil pengelolaan aset berupa uang tunai berasal dari sewa aset properti, dikenakan biaya pengelolaan aset pada MAP 425149 (Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang) merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Satuan Kerja Kantor Pusat DJKN, Kementerian Keuangan (Bagian Anggaran 015).

d. ASET KREDIT EKS BANK DALAM LIKUIDASI

Penerimaan dari Pengelolaan Aset Kredit yang Telah Diserahkan kepada PUPN

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat PKNSI selaku Penyerah Piutang dengan PUPN (dhi. KPKNL).

Berdasarkan data yang berasal dari Modul MPN G3 NOW selama Periode Tahun 2024, telah tercatat setoran per MAP 711313. Direktorat PKN selaku unit pengelola aset eks BDL telah

melakukan analisa dan pengakuan terhadap penerimaan pada MAP 711313 tersebut dan berdasarkan hasil rekonsiliasi Tahunan dengan KPKNL selaku Anggota PUPN Cabang.

d. ASET SURAT BERHARGA EKS BANK DALAM LIKUIDASI

Penerimaan Pembiayaan dari Dividen Tunai Saham

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur salah satu pengelolaan aset surat berharga adalah permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga obligasi. Direktorat PKNSI selaku pengelola barang atas aset eks Bank Dalam Likuidasi meminta pembayaran atas dividen saham dan/atau bunga obligasi setiap jatuh tempo.

e. DANA FIHAK KETIGA

1) Penjelasan Umum Nasabah Penyimpan Dana

MAP Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi) merupakan pos penerimaan hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3, yang selanjutnya akan disetorkan oleh Pemerintah ke rekening Nomor:

- a) 0019955279 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk: untuk PT Bank Asiatik (Dalam Likuidasi);
- b) 070-0004080201 atas nama Otoritas Jasa Keuangan qq. Nasabah eks Bank Dalam Likuidasi pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk: untuk PT Bank Global Internasional, Tbk (DL) dan PT Bank Dagang Bali (Dalam Likuidasi).

Penyetoran hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah eks Bank Dalam Likuidasi UP3 dimaksud dilaksanakan sesuai ketentuan penyetoran sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor MoU-07/MK.06/2015 – PRJ-39/D.01/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Percepatan Penyelesaian Kewajiban Bank Dalam Likuidasi eks Program Penjaminan kepada Pemerintah.

2) Proporsi Hasil Pengelolaan Aset setelah Diperhitungkan dengan Pembayaran kepada Nasabah Penyimpan Dana yang merupakan Hak Pemerintah

a) PT Bank Global Internasional, Tbk (DL):

- hak Pemerintah sebesar 96,3% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
- hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,7% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)".

b) PT Bank Asiatik (DL)

- hak Pemerintah sebesar 99,93% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
- hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,7% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Global Internasional Tbk., (DL)".

c) PT Bank Dagang Bali (DL)

- hak Pemerintah sebesar 96,40% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 711313 (Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks Bank Dalam Likuidasi).
- hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah sebesar 3,60% ke Rekening Nomor 502.000.000.980, dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) Nomor 817713 (Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi), dan ditambahkan berita "hak Nasabah Penyimpan Dana selain Pemerintah Eks PT Bank Dagang Bali (DL)".

3) Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi

Rincian penerimaan Nasabah Penyimpan Dana atas hasil pengelolaan aset disajikan dalam tabel berikut:

a) Tahun 2017

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	1.874.999
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	16.650.000
BANK DAGANG BALI	-
JUMLAH	18.524.999

b) Tahun 2018

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	480.235
BANK DAGANG BALI	149.327.009
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	20.350.000
JUMLAH	170.157.244

c) Tahun 2019

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	89.678
BANK DAGANG BALI	100.518.124
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	28.318.966
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	122.089.640
JUMLAH	251.016.408

d) Tahun 2020

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	15.273
BANK DAGANG BALI	78.401.540
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	351.500
JUMLAH	78.768.313

e) Tahun 2021

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK DAGANG BALI	85.325.255
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	1.320.120.232
BANK GLOBAL INTERNASIONAL (Non Tunai)	61.420
JUMLAH	1.405.506.907

f) Tahun 2022

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	78.812
BANK DAGANG BALI	82.439.750
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	68.817.026
JUMLAH	151.335.588

g) Tahun 2023

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK ASIATIC	-
BANK DAGANG BALI	265.407.986
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	499.443.808
JUMLAH	764.851.794

h) Tahun 2024

BDL UP3	DPK MAP 817713
BANK DAGANG BALI	280.618.018
BANK GLOBAL INTERNASIONAL	24.705.000
BANK DAGANG BALI (Non Tunai)	957.644.208
JUMLAH	1.262.967.226

4) Pembayaran Nasabah Penimpan Dana

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur mekanisme pembayaran Nasabah Penyimpan Dana (NPD). Pembayaran NPD dilakukan ke rekening pada bank yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan realisasi dana pembayaran NPD pada kas negara pada tahun berjalan.

Dalam Pasal 77 telah diatur bahwa Direktur Jenderal menetapkan keputusan mengenai besaran pembayaran NPD untuk masing-masing BDL berdasarkan realisasi dana pembayaran NPD pada kas negara tahun berjalan. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi dana NPD dan keputusan Direktur Jenderal mengenai besaran pembayaran NPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Direktur PKNSI selaku KPA Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (UAKPA BUN TK BLBI) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP).

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi Oleh Menteri Keuangan, telah diatur mekanisme pembayaran Nasabah Penyimpan Dana (NPD). Pembayaran NPD dilakukan ke rekening pada bank yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan realisasi dana pembayaran NPD pada akhir tahun berjalan.

Dalam Pasal 77 telah diatur bahwa Direktur Jenderal menetapkan keputusan mengenai besaran pembayaran NPD untuk masing-masing BDL berdasarkan realisasi dana pembayaran NPD pada kas negara tahun berjalan. Selanjutnya, berdasarkan data realisasi dana NPD dan keputusan Direktur Jenderal mengenai besaran pembayaran NPD, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini Direktur PKNSI selaku KPA Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus Pengelola Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (UAKPA BUN TK BLBI) menerbitkan Surat Ketetapan Pembayaran (SKP).

a) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2017 s.d. 2019

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 195/KN/2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatik (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2019, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2020 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2020 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2020 sebesar Rp317.609.011. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2020 tanggal Juli 2020 sebesar Rp2.444.912 untuk pembayaran NPD PT Bank Asiatik (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2020 tanggal Juli 2020 sebesar Rp249.845.133 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003A/978706/2021 tanggal Juli 2020 sebesar Rp65.318.966 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2020.

b) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2020

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 153/KN/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatik (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2020, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2021 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp113.566.813. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp15.273 untuk pembayaran NPD PT Bank Asiatik (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp78.401.540 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2020. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003A/978706/2021 tanggal 1 April 2021 sebesar Rp35.1500 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2020.

c) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 127/KN/2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatik (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2021, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2021 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2022 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp1.405.445.487. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp85.325.255 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2021. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp1.320.120.232 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2021.

d) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2022

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 158/KN/2023 tanggal 6 November 2023 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Asiatik (DL), PT Bank Dagang Bali (DL), dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2022, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2022 Nomor SKP-001/KN.5/KPA/2022 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2021 sebesar Rp1.405.445.487.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00001A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp85.325.255 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2021. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00002A/978706/2022 tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp1.320.120.232 untuk pembayaran NPD PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2021.

e) Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2023

Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 103/KN/2023 tanggal 3 September 2024 tentang Besaran Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Untuk PT Bank Dagang Bali (DL) dan PT Bank Global Internasional (DL) Berdasarkan Data Realisasi Dana Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Pada Kas Negara Tahun 2023, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pembayaran Nasabah Penyimpan Dana Tahun 2023 Nomor SKP-001/KN.4/KPA/2024 sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) NPD Tahun 2023 sebesar Rp714.851.794.

Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00003T/978706/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebesar Rp265.407.986 untuk pembayaran NPD PT Bank Dagang Bali (DL) periode tahun 2023. Telah dilakukan pembayaran NPD melalui Surat Perintah Membayar Nomor 00004T/978706/2024 tanggal 18 Desember 2024 sebesar Rp449.443.808 untuk PT Bank Global Internasional (DL) periode tahun 2023.

2. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET LAINNYA

a. ASET PROPERTI EKS BPPN

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.06/2009, aset properti adalah barang tetap berupa tanah dan bangunan yang pada awalnya merupakan jaminan hutang atas kredit di bank, karena debitur tidak mampu melakukan pembayaran hutang dengan uang tunai maka pembayaran dilakukan dengan menggunakan barang jaminan hutang yang berupa fixed asset dengan media peralihan berupa Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Notaris, Akta Perjanjian Jual Beli yang dibuat oleh Notaris, Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT atau Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang atau dapat juga berbentuk akta-akta lainnya yang pada intinya menyerahkan barang jaminan sebagai kompensasi atas pembayaran hutang.

Untuk mengetahui jumlah dan nilai aset properti eks BPPN yang dikelola Kementerian Keuangan c.q. DJKN, pada tahun 2009 dan 2011 telah dilakukan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Selanjutnya dilakukan penilaian atas aset properti hasil inventarisasi tersebut dan melaporkannya di neraca.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain Pemerintah belum menyajikan aset properti eks BPPN sejumlah 843 (delapan ratus empat puluh tiga) aset dengan nilai sebesar Rp1.070.152.309.824. Terhadap permasalahan ini, Direktorat PKNSI telah melakukan penelusuran terhadap selisih data tersebut dan menyampaikan hasil penelusuran kepada Tim Audit Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 9 September 2013. Setelah dilakukan verifikasi oleh BPK, maka sisa aset properti eks BPPN yang masih harus ditelusuri per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Aset Properti Eks BPPN yang perlu ditelusuri	843	1.070.202.309.825
Hasil Penelusuran TA 2013:		
Terjual di BPPN dan PPA	7	36.496.849.932
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	16	13.376.203.837
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	145	482.990.603.126,92
Aset jaminan BDL dan PKPS	25	35.552.445.176,15
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	23	101.446.523.368,23
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	627	400.339.684.384,70

Untuk menindaklanjuti sisa selisih penelusuran data aset properti eks BPPN dalam LHP BPK per 31 Desember 2013, pada tahun 2014, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI telah melakukan upaya sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan surat kepada PT PPA (Persero) dengan nomor S-1509/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait aset properti yang terjual selama periode pengelolaan oleh PT PPA (Persero).
- 2) Menyampaikan surat kepada Notaris/PPAT dengan nomor S-1501 s.d. S-1504/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014 terkait penjualan aset properti yang dilakukan oleh BPPN.

- 3) Menyampaikan surat kepada Kantor Pertanahan Setempat dengan surat nomor S-1799 s.d. S-1927/KN.5/2014 tanggal 25 Juli 2014 terkait permintaan klarifikasi dan konfirmasi kepada pemegang hak atas tanah.
- 4) Menyampaikan surat kepada KPKNL dengan nomor S-2063/KN.5/2014 tanggal 28 Agustus 2014 guna meminta bantuan untuk melakukan peninjauan fisik atas aset-aset properti.

Data dan dokumen yang diperoleh dari upaya-upaya tersebut di atas, telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJKN kepada BPK RI melalui surat Nomor S-1503/KN/2014 tanggal 3 Oktober 2014. Dari hasil verifikasi BPK terhadap data dan dokumen-dokumen tersebut diperoleh keyakinan sebagai berikut:

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2013)	627	400.289.684.383,89
Hasil Penelusuran TA 2014:		
Terjual di BPPN dan PPA	122	50.135.490.148
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	8	59.069.114.858
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	20	5.090.723.763
Aset jaminan BDL dan PKPS	84	94.040.671.431
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	35	69.934.452.664
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2014)	358	122.019.231.519,89

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKBUN tahun 2014 disebutkan bahwa sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebanyak 358 unit senilai Rp122.019.231.519,89.

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	358	122.019.231.519,89
Hasil Penelusuran TA 2015:		
Terjual di BPPN dan PPA	20	6.266.711.166,71
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	-
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	1	133.203.182
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	64	30.341.227.055
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.278.090.117,29

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan selama bulan Januari s.d. Desember 2015 telah berhasil ditemukan dokumen pendukung atas 86 unit aset senilai Rp36.741.141.403,71.

Sehingga sisa aset properti yang masih harus ditelusuri sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebanyak 272 unit senilai Rp85.278.090.117,29

Uraian	Unit	Nilai (Rp)
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2015)	272	85.328.090.117,18
Hasil Penelusuran TA 2016-2023:		
Terjual di BPPN dan PPA	3	912.345.839
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	-	-
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	-	-
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	1	-
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	20	10.800.137.076
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2023)	248	73.615.607.202,18

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode 2023, telah ditemukan 24 aset. Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 248 aset senilai Rp73.615.607.202,18.

Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2024)	224	64.379.831.728
Hasil Penelusuran TA 2024:		
Terjual di BPPN dan PPA	11	5.161.425.218
Terdapat di Modul Kekayaan Negara (MKN) dan daftar aset eks PT PPA	1	50.000.000
Sita Kejaksaaan dan Indikasi Sita	-	-
Aset Sewa yang digunakan Bank (tercatat dengan keterangan sewa)	-	-
Aset jaminan BDL dan PKPS	-	53.138.170.416
Dokumen termasuk dalam aset Hak Tanggungan Bank Indonesia, Penetapan Status Penggunaan	21	702.217.206
Sisa Aset Properti eks BPPN yang perlu ditelusuri (TA 2024)	191	5.328.018.888

Berdasarkan hasil penelusuran aset eks BPPN tersebut selama periode Tahun 2024, telah ditemukan 33 aset.

Dengan demikian, sisa aset properti eks BPPN yang perlu ditelusuri adalah sebanyak 191 aset senilai Rp5.328.018.888.

Selain itu, terdapat aset yang telah ditetapkan status penggunaannya dan dilakukan serahkelola ke LMAN, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan yaitu:

- 1) Aset yang berlokasi di Cilandak KKO Nomor 52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai PSP kepada Badan Siber dan Sandi Negara sesuai KEP-105/KN/2024 tanggal 11 September 2024, dengan nilai Rp34.880.762.000.

- 2) Aset yang berlokasi di Komplek Ruko Segitiga Emas Blok B No.18 Jl. A. Tani No.221-223, Merdeka, Sumurbatu, PSP ke Ombudsman RI sesuai Kepdirjen nomor KEP-142/KN/2024 tanggal 11 Desember 2024, dengan nilai Rp3.137.178.000
- 3) Aset yang berlokasi di Jl. Stasiun Senen No. 60A, Gn. Sahari Selatan, Kemayoran, Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024, dengan nilai Rp62.800.

Aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) per 31 Desember 2023 adalah sejumlah 706 aset, sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 704 aset.

Terjadi perubahan terhadap jumlah aset properti eks BPPN yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) disebabkan oleh:

- 1) Pengurangan 1 (satu) aset yang berlokasi di Sukmajaya, Sukmajaya, Cibeber, *double* catat dengan Aset PPA PRK-003790 yang telah di PSP kepada Kemendikbudristek sesuai Kepdirjen KN No. 90/KN/2023 tanggal 5 Juni 2023 dan BAST No. BA-57/KN/2023 tanggal 6 Juni 2023.
- 2) Pengurangan 1 (satu) aset yang berlokasi di Embong Kaliasin, Surabaya, Jawa Timur, dikarenakan telah laku lelang di masa BPPN pada Kantor Lelang Negara Surabaya sesuai risalah lelang nomor 321/2000 tanggal 28 Juli 2000.
- 3) Perubahan nilai terhadap (dua) aset yang berlokasi di Cilandak KKO Nomor 52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai laporan penilaian KPKNL Jakarta V No. LAP-0011/1/PRO-01/KNL.0705/01.01.00/2024 tanggal 7 Februari 2024 sebelumnya Rp0 menjadi Rp14.037.709.000. Selanjutnya PSP ke Badan Siber dan Sandi Negara sesuai KEP-105/KN/2024 tanggal 11 September 2024 (Belum BAST).

Selain itu, terdapat aset properti eks BPPN, baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang disewa oleh pihak ketiga.

b. Aset Nostro

Dalam rangka penelusuran Aset Nostro, Direktorat PKNSI telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain berupa:

- 1) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Indonesia
DJKN melalui surat Nomor S-1376/KN.5/2014 s.d. S-1381/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta informasi kepada Bank Indonesia dan 5 Bank Dalam Negeri dimaksud, terkait keberadaan rekening nostro eks. BBO/BBKU di bank-bank tersebut. PT Bank Mutiara mengkonfirmasi rekening tersebut serta telah menyetorkannya ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tanggal 18 September 2014 dan PT Bank BCA, Tbk Cabang Solo meminta tambahan data mengenai rekening tersebut. Sedangkan tiga bank lainnya (Citibank, BRI, dan BPR Tri Sejahtera Makmur) tidak memberikan tanggapan.

Menanggapi surat Direktorat PKNSI, DJKN nomor S-2369/KN.5/2014 tanggal 31 Desember 2014, Bank Indonesia melalui surat nomor 16/156/DPTP tanggal 26 November 2014, menyatakan bahwa rekening eks Bank Ficorinvest dan Bank Tata sebesar Rp8.840.515.509 dan Rp1.187.712.121 merupakan koreksi fasilitas diskonto dan koreksi *overdraft* (bukan aset nostro

eks. BBO/BBKU) namun demikian BI masih melakukan penelitian dan penelusuran. Untuk rekening senilai Rp406.733.525.331,33 BI belum menemukan informasi mengenai data dimaksud. Sedangkan untuk rekening Bank Indover, tidak terdapat nama bank eks. BBO/BBKU yang mengklaim dana ke Bank Indover, namun demikian sebagai informasi terdapat tagihan Pemerintah kepada *Trustee* Indover Bank senilai EUR 338.538,20 yang berstatus *dispute*.

Selanjutnya, melalui surat undangan nomor UND-57/KN.5/2017 tanggal 25 Februari, DJKN mengundang Bank Indonesia untuk melakukan rapat pembahasan dana nostro di Bank Indonesia pada tanggal 5 Maret 2014. Dalam rapat tersebut, Bank Indonesia menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam sistem penatausahaan rekening Bank Indonesia, saat ini tidak tercatat rekening atas nama eks. Bank BDNI. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia meminta informasi yang lebih rinci atas rekening dimaksud berupa nomor rekening, nama rekening, nominal dan periode penyimpanan, untuk melakukan pengecekan apakah pernah ada rekening atas nama Bank BDNI di Bank Indonesia dan apabila ada bagaimana proses penutupan rekening tersebut. Sesuai penjelasan Bank Indonesia, penutupan rekening dilakukan setelah rekening tersebut bersaldo nol.
- b) Berdasarkan Dokumen Daftar Klaim dari *Trustee* Indover Bank per tanggal 20 Oktober 2009 yang disampaikan Bank Indonesia, diketahui bahwa terdapat tagihan Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan kepada *Trustee* Indover Bank yang berasal dari dana eks. BBO/BBKU dengan nilai sebesar EUR 338.538,20 yang berstatus *dispute*, dengan *Person in Charge* (PIC) Biro Bantuan Hukum Setjen Kemenkeu, namun berdasarkan Dokumen Daftar Klaim per tanggal 10 September 2010, tagihan Kementerian Keuangan tersebut telah bersaldo nol.
- c) Bank Indonesia saat ini menatausahakan rekening eks. Bank Ficorinvest dan Bank Tata dengan nilai sebesar Rp10.028.227.629,98, namun dikarenakan kedua rekening tersebut dibuka oleh internal Bank Indonesia terkait fasilitas diskonto dan koreksi *overdraft* maka Bank Indonesia masih memerlukan waktu untuk melakukan penelitian dan penelusuran atas dana di kedua rekening tersebut.

2) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Bank Ganesha

Tersimpan dan terkonfirmasi rekening eks BDR di Bank Ganesha sebesar Rp5.841.796.415, namun PT Bank Ganesha juga menyatakan memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083.

Melalui surat Nomor S-2586/KN.5/2014 tanggal 15 Oktober 2014, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan dana eks BPPN yang tersimpan di PT Bank Ganesha ke rekening KUN. Melalui surat Nomor 277/Dir/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014, PT Bank Ganesha menyampaikan bahwa terdapat kewajiban PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415, namun PT Bank Ganesha juga memiliki tagihan kontijensi kepada eks. BDR sebesar Rp51.447.560.083 sehingga secara set off eks BDR masih mempunyai kewajiban membayar kepada PT Bank Ganesha sebesar Rp45.605.763.668.

Melalui surat Nomor S-35/KN.5/2015 tanggal 8 Januari 2015 dan dan S-1157/KN.5/2015 tanggal 15 April 2015, DJKN telah meminta PT Bank Ganesha untuk menyetorkan kewajibannya kepada eks BDR sebesar Rp5.841.796.415 ke Kas Negara karena dana

tersebut tidak dapat dilakukan set off sedangkan tagihan PT Bank Ganesha kepada eks BDR sebesar Rp51.447.560.083 penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme APBN dan harus didukung dengan dokumen yang lengkap.

Melalui surat nomor S-200/KN.5/2015 tanggal 16 Februari 2016, DJKN telah mengundang PT Bank Ganesha untuk melakukan pembahasan, namun PT Bank Ganesha tidak hadir. Atas ketidakhadiran tersebut, melalui surat No.088/DIR/II/16 tanggal 23 Februari 2016, PT Bank Ganesha menyampaikan permintaan waktu untuk memastikan dan melengkapi data.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.05/2005, program penjaminan yang dilaksanakan oleh BPPN dengan memberikan jaminan terhadap pembayaran Bank Umum telah berakhir sejak tanggal 22 September 2005, dengan demikian maka tagihan Bank Ganesha kepada Bank BDR sudah tidak dijamin pemerintah sehingga sehingga set off dengan dana Bank BDR tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui surat nomor S-2369/KN.5/2016 tanggal 23 Desember 2016, DJKN telah meminta kembali Bank Ganesha untuk menyetorkan dana Bank BDR ke Kas Negara, namun sampai dengan tanggal penyajian Laporan Keuangan ini, Bank Ganesha belum menyetorkan dana eks. BDR tersebut ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-772/KN.5/2019 tanggal 5 September 2019 dan S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, DJKN kembali meminta Bank Ganesha untuk menyetorkan dana BDR ke Kas Negara dan menyampaikan bahwa tagihan kontinjensi Bank Ganesha tidak dapat dibayarkan. Sebagai tanggapan atas surat nomor S-624/KN.5/2020 tanggal 21 Juni 2020, telah dilakukan koordinasi dengan Bank Ganesha dan disepakati pencairan dana eks BDR sebesar Rp5.841.796.415 akan dilakukan secara bertahap selama 10 kali pembayaran dengan jangka waktu pembayaran selama 10 tahun.

Pada tanggal 8 Oktober 2020 ditandatangani perjanjian dengan Bank Ganesha untuk kesepakatan pembayaran dana BDR yang dilakukan bertahap selama 10 kali, dimulai sejak tahun 2020 dan berakhir tahun 2029 dengan jumlah pembayaran angsuran masing-masing sebesar Rp584.179.641,50 yang jatuh tempo setiap tanggal 1 Desember.

- a) Pembayaran tahap I pada tanggal 1 Desember 2020. Melalui surat nomor S-1196/KN.5/2020 tanggal 19 November 2020, telah disampaikan surat penagihan pembayaran I kepada Bank Ganesha. Atas perjanjian tersebut telah dilakukan pembayaran tahap I pada tanggal 30 November 2020 sebesar Rp584.179.642 (NTPN EFE9F48VUA3TIN28).
- b) Pembayaran tahap II pada tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp584.179.642 (NTPN 4277E2G4UU94Q4BT).
- c) Pembayaran tahap III pada tanggal 22 November 2022 sebesar Rp584.179.642 (NTPN 3E86D6QR9C4NU3PM).
- d) Pembayaran tahap IV pada tanggal 28 November 2023 sebesar Rp584.179.642 (NTPN 1578F0JUNU9CNA4G)
- e) Pembayaran tahap V pada tanggal 26 November 2024 sebesar Rp584.179.642 (NTPN 25D64522A090N4Q3)

3) Pengelolaan Aset Nostro yang Tersimpan di Clearstream Banking SA

Rekening eks. Bank BIRA di Clearstream Banking SA senilai USD 258.438,50 telah terkonfirmasi sebagai Aset Nostro eks BPPN. Saat ini rekening tersebut masih dalam tahap pengembalian ke Kas Negara.

Melalui surat nomor S-1125/KN.5/2019 tanggal 29 November 2019, DJKN telah meminta Clearstream Banking SA untuk melakukan transfer dan penutupan rekening Bank BIRA pada Clearstream Banking SA, namun belum mendapat balasan dan tindak lanjut dari Clearstream Banking SA.

DJKN kembali menyurati Clearstream Banking SA melalui surat nomor S-725/KN.5/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang kemudian mendapatkan balasan melalui surat elektronik, sehingga komunikasi dengan Clearstream Banking SA dapat dilakukan dua arah. Pihak Clearstream meminta specimen tanda tangan pihak yang berwenang dalam pencairan dana Bank BIRA dan dilegalisasi oleh notaris publik. Sedang dalam proses pembuatan dokumen dimaksud.

Clearstream Banking SA telah mencairkan dana Bank BIRA dan telah tercatat masuk ke Kas Negara pada tanggal 18 Desember 2020 senilai Rp3.655.871.021 (No. Dok. Penerimaan 9186676352FS) sehingga pengelolaan asset nostro Bank BIRA pada Clearstream Banking SA telah selesai.

Terkait Aset Nostro yang tercatat di CaLK LKBUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian BLBI, juga telah melakukan upaya penagihan meski tidak didukung dengan data dan/atau dokumen yang memadai.

c. SURAT BERHARGA EKS BPPN

Pada tanggal 29 s.d. 31 Juli 2013, Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Hasil pemeriksaan fisik surat berharga di Kustodi Citibank yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI adalah sebagai berikut:

- 1) Terdapat kekeliruan pada data surat berharga yang disampaikan oleh pihak DJKN yakni pada kolom jumlah lembar karena berdasarkan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank kolom tersebut tidak menunjukkan jumlah lembar melainkan nilai total coupon atau nilai *principal* dari surat berharga yang bersangkutan.
- 2) Terdapat perbedaan dan kesalahan klasifikasi jenis surat berharga yaitu masukan ke dalam Government Bond namun setelah dilakukan cek fisik dan wawancara dengan pihak Citibank surat berharga tersebut masuk kedalam *Corporate Bond*.
- 3) Sebagian besar surat berharga yang ada tidak mempunyai *principal*, hanya terdapat *Coupon* saja, sehingga tidak diketahui secara pasti tanggal jatuh tempo dari obligasi (*principal*) tersebut serta beberapa *Coupon* yang ada sudah melewati masa jatuh tempo.
- 4) Surat Berharga milik DGS Finance International sudah dihapuskan dari Market Trading Hongkong karena nilainya sudah nihil dan perusahaannya sudah tidak ada lagi.

Penyajian surat berharga eks BPPN telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik BPK RI tersebut di atas yaitu terdapat penyesuaian akun *Government Bond* yang di reclass ke *Corporate Bond* serta pencatatan *Corporate Bonds* Dgs International Finance Co dengan nilai Rp0 karena telah dihapuskan Market Trading Hongkong.

d. ASET SAHAM EKS BPPN

Penyajian nilai aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank didasarkan pada nilai saham yang disajikan pada *Monthly Report* Citibank per 31 Desember 2021.

Pengelolaan aset saham yang disimpan di Kustodi Citibank meliputi pencatatan saham, monitoring melalui *Monthly Report*, serta mencatat atau mengkoordinasikan pembagian dividen. Tim Pemeriksa BPK RI telah melakukan pemeriksaan fisik atas Saham dan Surat Berharga milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disimpan di kustodi Citibank. Pada saat pemeriksaan tersebut berdasarkan informasi dari Citibank, diketahui bahwa sebagian perusahaan yang sahamnya di simpan di di kustodi Citibank telah tidak beroperasi lagi.

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui 14 saham yang disimpan di kustodi Citibank Jakarta berstatus aktif dan saat ini masih diperdagangkan di BEI. Melalui surat Nomor S-1348/KN.5/2014 s.d. S-1353/KN.5/2014 dan Nomor S-1367/KN.5/2014 s.d. S-1375/KN.5/2014 tanggal 16 Juni 2014, Direktorat PKNSI telah meminta konfirmasi kepada para emiten penerbit saham tersebut, atas kepemilikan saham eks. BPPN tersebut. Namun hingga akhir periode penyusunan Laporan Keuangan, hanya 9 emiten dari 15 emiten yang disurati, yang menjawab surat Direktorat PKNSI tersebut. Dari 9 emiten yang memberikan tanggapan hanya 2 emiten yang mengkonfirmasi kepemilikan saham eks. BPPN sedangkan emiten lainnya tidak memberikan penjelasan tentang kepemilikan saham eks. BPPN dan hanya menginformasikan nama Biro Administrasi Efeknya masing-masing. Untuk aset saham eks BPPN yang status emitennya belum diketahui, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat PKNSI melalui surat Nomor S-1233/KN.5/2014 tanggal 28 Mei 2014 telah meminta informasi kepada Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kemenkumhan atas status emiten tersebut, namun belum mendapat tanggapan.

Terkait saham PT Mulia Industrindo, Tbk berdasarkan hasil penelitian dokumen, 5000 lembar saham PT Mulia Industrindo, Tbk yang tersimpan di Kustodi Citibank bukan merupakan aset eks. BPPN (Bank Bira). Berdasarkan Agency Agreement tanggal 15 Desember 1996, diketahui bahwa 3000 lembar saham tersebut merupakan milik Willow Overseas Investment Limited, dan berdasarkan *Placement Agreement* tanggal 4 April 1997, diketahui 2000 saham PT Mulia tersebut merupakan milik Crestlawn Ltd, Saham tersebut telah dikembalikan kepada Ery Yunasri & Partners selaku kuasa Willow Overseas Investment Limited dan Crestlawn Ltd.

Berdasarkan surat PT Datyndo Entricom selaku Biro Adminstrasi Efek emiten nomor DE/X/2014-7152 tanggal 9 Oktober 2014, diketahui saham PT Reksadana Perdana, Tbk dh. PT BDNI Reksadana telah berubah bentuk menjadi unit KIK Reksadana Prima dengan jumlah konversi atas saham 8000 lembar saham milik Kementerian Keuangan adalah menjadi 29.625.788 unit KIK. Saat ini pengkonversian saham milik Kementerian Keuangan menjadi unit KIK Reksadana Prima belum dilakukan.

Pada tahun 2018 dilakukan reklasifikasi aset saham PT Sukarpaja Estetika Padang Golf dari aset saham eks BPPN menjadi aset saham eks kelolaan PT PPA. Reklasifikasi tersebut dilakukan berdasarkan Laporan Keuangan perseroan. Berdasarkan Laporan Keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero). Pinjaman Subordinasi tersebut dapat dikonversi menjadi *Transferable Membership*.

Pada tahun 2020 saham PT Karabha Digdaya telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

e. ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA

Aset Properti eks kelolaan PT PPA adalah aset properti yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara di peradilan (*free and clear*) yang semula diserahkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kemudian dikembalikan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) kepada Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009 dan tidak diserahkan kembali oleh Menteri Keuangan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.06/2015 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Oleh Menteri Keuangan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2016, Pengelolaan Aset Properti eks kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dilakukan dengan cara penjualan melalui lelang, pemanfaatan, penggunaan untuk keperluan pemerintahan melalui Penetapan Status Penggunaan, dan pelepasan hak dengan pemberian kompensasi.

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 mengungkapkan permasalahan antara lain aset properti eks kelolaan PT PPA belum disajikan dengan nilai wajar dan agar penyajian aset properti eks kelolaan PT PPA diseragamkan dengan penyajian aset properti eks BPPN dimana aset properti eks BPPN disajikan sesuai jumlah dokumen yang dikuasai Kementerian Keuangan c.q. DJKN (antara lain Sertifikat, Girik, AJB, dsb) sedangkan aset properti eks kelolaan PT PPA disajikan sesuai kode PRK yang berasal sejak awal penyerahan dari PT PPA kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN, oleh karena itu, dilakukan penilaian terhadap sisa aset properti eks kelolaan PT PPA serta penyajian jumlah aset properti eks kelolaan PT PPA disesuaikan dengan penyajian aset properti eks BPPN.

Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang didukung dengan asli dokumen kepemilikan (sertipikat / *covernote*) disajikan di Neraca sebesar nilai wajar, sedangkan yang tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*) per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 531 aset dengan nilai sebesar Rp1.680.193.044.443 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 520 aset dengan nilai sebesar Rp2.281.800.426.455.

Uraian	Jumlah unit	Nilai (Rp)
Dokumen berupa AJB,APH, Copi Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB	520	2.281.800.426.455

Selain itu terdapat aset yang dilakukan serahkelola ke LMAN, namun belum dilakukan serah terima aset, sehingga belum dilakukan pengurangan, yaitu:

- 1) Aset yang berlokasi di Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 08, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sesuai Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024.
- 2) Aset yang berlokasi di Jalan Karang Anyar 20, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah sesuai Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024.

Perubahan nilai aset yang berlokasi di Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai dengan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II sebelumnya Rp1.202.000.000 menjadi Rp1.006.177.000, selanjutnya serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024.

Terjadi perubahan terhadap jumlah dan nilai aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero) yang dibukukan namun tidak didukung dengan asli dokumen kepemilikan aset yang bersangkutan (sertifikat dan/atau *covernote*).

Selanjutnya, terdapat aset properti eks kelolaan PT PPA (Persero), baik sebagian maupun seluruh tanah dan/bangunan, yang digunakan sementara oleh Kementerian Negara/Lembaga, dipinjam pakai oleh pemerintah daerah, serta disewa oleh pihak ketiga.

f. ASET SAHAM (NON BANK) EKS KELOLAAN PT PPA

Aset saham PT Bina Prima Perdana yang merupakan perusahaan yang termasuk dalam Grup Texmaco tidak lagi masuk dalam draft perjanjian pengelolaan aset kepada PT PPA, sehingga direklasifikasi dari aset saham yang diserahkan kepada PT PPA menjadi aset saham non bank eks kelolaan PT PPA.

Pada tahun 2016, aset saham PT Asia Natural Resources Tbk, PT Jemblo Cable Company Tbk, PT Sukapraja Estetika Padang Golf tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT Asia Natural Resources Tbk di bursa telah di-*suspend* oleh BEI.

Pencatatan kepemilikan pemerintah pada PT. Tuban Petrochemical Industries (TPI) dicatat sebagai Investasi Permanen pada BA 999.03. Kepemilikan pemerintah pada PT. TPI pada dasarnya adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pada saatnya, pemerintah akan melepaskan kepemilikannya kepada pihak yang tepat.

Pengelolaan PMN berupa aset saham pada PT. TPI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, sebagaimana Pasal 4 PP No. 66 Periode Tahun 2020. Pengelolaan aset eks BPPN pada dasarnya dalam rangka *recovery* atas BLBI yang sudah dikeluarkan.

Pada Tahun 2020 saham PT Sejahtera Eka Graha telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.

a. Pengungkapan Penting Terkait Pemanfaatan Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

Penjelasan atas pengalihan Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero) menjadi PMN pada PT. TPI:

1) Kepemilikan saham Pemerintah pada PT TPI

- a) Salah satu aset kredit eks BPPN yang dikelola oleh Menteri Keuangan cq. DJKN adalah piutang kepada TPI dalam bentuk *Multi Years Bond (MYB)* yang diterbitkan oleh TPI, dan Menteri Keuangan sebagai satu-satunya Pemegang Obligasi (*MYB Holder*). TPI merupakan suatu *holding company* yang bergerak di bidang industri petrokimia yang dibentuk pada tahun 2004, sebagai tindak lanjut restrukturisasi yang dilakukan oleh BPPN terhadap utang-utang Grup Silakencana Tirtalestari. Struktur kepemilikan TPI pada saat terbentuk adalah sebesar 70% dimiliki oleh BPPN, dan sebesar 30% dimiliki oleh PT Silakencana Tirtalestari (PT ST). Setelah TPI terbentuk, langkah selanjutnya dari kesepakatan restrukturisasi adalah diterbitkannya *MYB* oleh TPI, dan BPPN adalah sebagai satu-satunya *Bond Holder*.
- b) Berdasarkan Keppres Nomor 15 tahun 2004, Menteri Keuangan kemudian menggantikan kedudukan BPPN sebagai pemegang saham di TPI, dan sekaligus juga sebagai *MYB Holder*. Sampai dengan saat ini, DJKN telah melaksanakan pengelolaan aset kredit dimaksud dengan berpedoman kepada ketentuan pengelolaan aset eks BPPN, dengan tujuan utama untuk mewujudkan *recovery* aset kredit yang pada dasarnya merupakan piutang negara.
- c) Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan petrokimia Indonesia, diambil suatu tindakan strategis dalam konteks pengelolaan aset kredit eks BPPN, yaitu melakukan konversi utang (*MYB*) menjadi saham Menteri Keuangan di TPI dengan melakukan konversi utang TPI, sejalan dengan isi Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan, diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- d) Konversi utang TPI pada dasarnya adalah strategi DJKN dalam pengelolaan aset kredit eks BPPN, sebagaimana Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries, yang berbunyi bahwa pengelolaan penyertaan modal negara berupa aset saham dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan aset eks Badan Khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan.
- e) Mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah (vide. PP71 dan aturan turunannya), maka kepemilikan saham pemerintah pada TPI sebesar Rp2.908.409.694.537 dalam bentuk penyertaan modal negara, dicatatkan menjadi bagian dari investasi pemerintah berupa Investasi Permanen, sehingga DJKN mencatat pada BA 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Sedangkan sisa utang TPI sebesar Rp811.643.881.275 tetap dicatatkan pada BA 999.99 Transaksi Khusus.

- f) Penyertaan Modal Negara pada PT TPI pada saatnya nanti akan diserahkan kepada PT PERTAMINA Persero dengan maksud agar PT TPI dapat lebih berkembang.

2) Mutasi Aset Kredit Eks Kelolaan PT PPA (Persero)

- a) Rincian perubahan nilai pokok MYB per tahun sampai dengan dikonversi
Perubahan nilai pokok MYB disebabkan adanya pembayaran angsuran oleh TPI (tahun 2005 s.d. 2017) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal (Utang Pokok MYB)	Mutasi (Angsuran Pokok)	Saldo Akhir
2004	3.266.000.000.000	0	3.266.000.000.000
2005	3.266.000.000.000	(11.000.000.000)	3.255.000.000.000
2006	3.255.000.000.000	0	3.255.000.000.000
2007	3.255.000.000.000	(50.000.000.000)	3.205.000.000.000
2008	3.205.000.000.000	0	3.205.000.000.000
2009	3.205.000.000.000	(35.000.000.000)	3.170.000.000.000
2010	3.170.000.000.000	(85.000.000.000)	3.085.000.000.000
2011	3.085.000.000.000	(130.000.000.000)	2.955.000.000.000
2012	2.955.000.000.000	(126.765.000.000)	2.828.235.000.000
2013	2.828.235.000.000	(50.215.738.593,06)	2.778.019.261.406,94
2014	2.778.019.261.406,94	(90.526.680.949)	2.687.492.580.457,94
2015	2.687.492.580.457,94	(32.610.184.030)	2.654.882.396.427,94
2016	2.654.882.396.427,94	(36.640.901.891)	2.618.241.494.536,94
2017	2.618.241.494.536,94	0	2.618.241.494.536,94

- b) Dasar penilaian aset yang diserahkan untuk dikelola PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40

- a. Berdasarkan Perjanjian Serah Kelola dari Kemenkeu kepada PT PPA (Persero), Nilai Aset merupakan nilai atas Aset yang diserahtelakan yang ditetapkan oleh Menkeu pada tanggal serahkelola berdasarkan hasil penilaian yang masih berlaku.
- b. Nilai Aset tersebut ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.06/2008, dengan rincian sebagai berikut:

No	Aset Kredit	Nominal	Nilai Aset
1	Multi Years Bond (MYB)	3.266.000.000.000	1.024.000.000.000
2	Mandatory Convertible Bond (MCB)	4.167.000	497.813.000.000
Total Nilai Aset (Saldo Akhir 2008)			1.521.813.000.000

- c. Adapun mutasi Nilai Aset selama diserahtelakan kepada PT PPA (Persero) tahun 2009 s.d. 2017 adalah sebagai berikut:

	Nilai Aset	Keterangan
Saldo Awal (2009)	1.460.570.023.902,64	Selisih sebesar Rp61,2M (1.521.81300-1.460.570.023.902,64), karena pengaruh penurunan Nilai Aset. Awalnya Nilai Aset MYB dihitung dengan nilai pokok 3.266000, namun dinilai ulang menjadi

	Nilai Aset	Keterangan
		3.205000 karena adanya pembayaran tahun 2005 dan 2007.
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)	Angsuran pokok selama tahun 2009 s.d. 2017
Saldo Akhir (2017)	873.811.488.440,40	

- d. Nilai Saldo akhir digunakan sebagai nilai pada saat diserahkan kepada PT PPA, sebagai dasar dalam penghitungan Imbalan Pengelolaan Aset/Imbalan Kinerja kepada PT PPA.
- e. Ketika pengelolaan aset dikembalikan oleh PT PPA kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok. Dengan demikian, hubungan antara Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA sebesar Rp873.811.488.440,40 dengan utang pokok MYB TPI sebesar Rp3.266.000.000.000 yang dikelola oleh DJKN sebagai berikut:

Keterangan	Utang Pokok (DJKN)
Saldo Awal	3.266.000.000.000
Saldo 2009	3.205.000.000.000
Mutasi (2009 s.d. 2017)	(586.758.505.463,06)
Saldo Akhir (2017)	2.618.241.494.536,94

- c) Mutasi saldo dari Rp873.811.488.440,40 menjadi Rp811.643.881.275 dan Perhitungan bunga dan penalti MYB TPI sebesar Rp811.643.881.275
 - a. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, saldo sebesar Rp873.811.488.440,40 merupakan saldo akhir Nilai Aset yang dikelola oleh PT PPA per 31 Desember 2017, yang kemudian dengan pengembalian pengelolaan aset kepada Kemenkeu, maka saldo Aset Kredit menggunakan jumlah utang *as is* TPI dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok.
 - b. Sementara saldo sebesar Rp811.643.881.275 merupakan saldo utang bunga dan penalti (*unconverted portion MYB*) per 31 Desember 2019, dengan keterangan:

Tanggal	Transaksi	Angsuran	Saldo
30/12/2018	Saldo Bunga+Penalti		733.924.166.667
31/03/2019	Saldo Bunga+Penalti		767.787.633.619
30/09/2019	Saldo Bunga+Penalti		836.643.881.275
20/11/2019	Angsuran	(5.000.000.000)	831.643.881.275
19/12/2019	Angsuran	(20.000.000.000)	811.643.881.275

Cat: Pembayaran bunga dan penalti dilakukan 2 kali dalam setahun (setiap tanggal 27 Februari dan 27 Agustus). Dalam periode 30 Desember 2018 s.d. 30 September 2019, TPI tidak melakukan pembayaran angsuran. Atas keterlambatan tersebut, TPI dikenakan penalti yang berakibat meningkatnya saldo utang dari Rp733.924.166.677 menjadi Rp836.643.881.275

3) Penjelasan atas koreksi dan penyerahan aset kredit eks kelolaan PT PPA (Persero) atas nama Grup Texmaco

Aset kredit Grup Texmaco telah diserahkan ke PUPN DKI Jakarta melalui KPKNL Jakarta III dengan Surat Nomor S-840/KN/KN.5/2021 tanggal 22 Oktober 2021 hal Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Grup Texmaco; dengan jumlah hak tagih sebesar

Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.146,21. Atas penyerahan tersebut, KPKNL melakukan penelitian, dan meminta konfirmasi atas selisih *outstanding* sebesar USD 1,21. Setelah dilakukan penelitian kembali, PKNSI menyampaikan konfirmasi atas besaran *outstanding*, dengan surat nomor S-2327/KN.5/2021 tgl. 18 November 2021, yg mengkonfirmasi *outstanding* utang sebesar Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.145. Setelah mendapatkan konfirmasi, PUPN kemudian menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara an. Grup Texmaco, dengan *outstanding* utang sebesar Rp.31.722.860.855.522 dan USD.3.912.137.145.

Terkait pengakuan dan pengukuran Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero), khususnya terkait aset kredit Group Texmaco pada LKBUN TK BLBI Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam PMK No. 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 127/PMK.05/2018, diatur bahwa Aset eks Kelolaan PT PPA (Persero) diakui pada saat berakhirnya perjanjian serahkelola antara PT PPA (Persero) dengan Menteri Keuangan sebagaimana Berita Acara Pengembalian Aset dari PT PPA (Persero) kepada Menteri Keuangan Tahun 2009, diatur pula bahwa aset kredit eks Kelolaan PT PPA (Persero) diukur sebesar nilai yg belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

Outstanding Utang Grup Texmaco sebagaimana diserahkan piutangnya kepada PUPN didasarkan pada Surat Direktur PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) nomor S-590/PPA/ID/0415 tanggal 24 September 2015. Hal tersebut sebagaimana permintaan konfirmasi dari Direktorat PKNSI kepada PT PPA (Persero) melalui surat Nomor: S-1379/KN.5/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan surat nomor S-1309/KN.5/2021 tanggal 10 September 2021.

3. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET BERPERKARA

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.01/2014 tentang Penugasan Kepada Unit-Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset-Aset eks BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, dan eks Pengelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428/KMK.01/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Biro Bantuan Hukum Dalam Penanganan Sisa Tugas Tim Koordinasi Penyelesaian Tugas-Tugas Tim Pembersihan BPPN, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, dan Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat, aset eks BPPN yang terkait perkara hukum di lembaga peradilan penanganannya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan c.q. Biro Bantuan Hukum.

4. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT INVENTARISASI KELENGKAPAN DATA, DOKUMEN KEPEMILIKAN DAN PERALIHAN, SERTA PENGUASAAN FISIK ATAS ASET EKS BLBI

Kementerian Keuangan telah melakukan pemetaan terhadap aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero). Pemetaan atas aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) masih berdasarkan data rekapitulasi aset properti yang disandingkan dengan arsip dokumen penguasaan dan pengalihan yang dimiliki Kementerian Keuangan berdasarkan hasil inventarisasi dan verifikasi

terhadap berkas/dokumen aset properti eks BPPN yang tersimpan di Kustodi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2009 dan 2011, dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pemetaan Aset Properti eks BPPN
 - 1) Terdapat 157 unit aset senilai Rp1.036.802.295.238 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan
 - 2) Terdapat 1.034 unit aset senilai Rp1.814.438.661.413 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
 - 3) Terdapat 191 unit aset senilai Rp466.621.476.964 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
 - 4) Terdapat 704 unit aset yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
- b. Pemetaan Aset Properti eks kelolaan PT PPA (Persero)
 - 1) Terdapat 1.064 unit aset senilai Rp4.060.779.472.497 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.
 - 2) Terdapat 249 unit aset senilai Rp 914.765.733.344 yang dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun tidak dilengkapi dengan dokumen peralihan.
 - 3) Terdapat 26 unit aset senilai Rp 129.272.431.000 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan namun dilengkapi dengan dokumen peralihan.
 - 4) Terdapat 520 unit aset senilai Rp 2.281.800.621.455 yang tidak dilengkapi dengan fisik dokumen kepemilikan dan dokumen peralihan.

Berdasarkan hasil penelusuran lebih lanjut atas data dan dokumentasi yang ada diketahui bahwa:

- a. Aset properti yang ada dokumen sertifikatnya namun masa berlaku sertifikatnya sudah berakhir sebanyak 481 aset.
- b. Aset properti yang tidak bersertifikat (hanya ada bukti Girik, SPH, AJB) sebanyak 777 aset.
- c. Aset properti yang dikuasai/diokupasi oleh pihak ketiga sebanyak 751 aset.

Seluruh aset properti telah dilakukan pengamanan secara yuridis melalui kantor pertanahan. Pada tahun 2022 telah dilakukan pemasangan papan nama pengamanan pada aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) sebanyak 510 bidang, pada tahun 2023 kembali dilakukan pemasangan papan nama pengamanan sebanyak 753 bidang. Selanjutnya pada Tahun 2024 dilakukan pemasangan papan nama pengamanan sebanyak 197 bidang.

Saat ini, Kementerian Keuangan sedang melakukan inventarisasi dan penelusuran atas dokumen kepemilikan atau peralihan dan penguasaan aset Properti, sebagai dasar penyajian aset properti eks BPPN dan eks PT PPA (Persero) tersebut pada Laporan Keuangan selanjutnya. Kegiatan inventarisasi yang dilakukan pada tahun 2020 dan masih berlangsung sampai dengan tahun 2023, belum sepenuhnya selesai dan belum dilakukan revidi oleh APIP, sehingga aset properti yang disajikan pada Neraca belum berdasarkan hasil inventarisasi dokumen. Hasil inventarisasi aset properti akan digunakan setelah kegiatan inventarisasi selesai dan dilakukan revidi oleh APIP.

5. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT PEMANFAATAN ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO)

Aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan optimalisasi dalam bentuk pemanfaatan berupa sewa. Sampai dengan Tahun 2024, jumlah persetujuan sewa yang ditindaklanjuti dengan perjanjian sewa adalah sebanyak 180 persetujuan, dengan total PNPB sebesar Rp38.481.278.851.

6. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT PENGGUNAAN ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA

Terhadap sebagian aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian/Lembaga. Sejak tahun 2009 hingga Tahun 2024, telah dilakukan Penetapan Status Penggunaan sebanyak 444 aset dengan total nilai sebesar Rp6.951.635.373.504.

7. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT SERAH KELOLA ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) KEPADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (Negara). Sejak tahun 2016 hingga tahun 2022, jumlah serah kelola yang telah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima adalah sebanyak 332 aset, dengan total nilai sebesar Rp5.906.202.574. Selanjutnya, sebanyak 19 aset senilai Rp37.951.161.800 di antaranya telah dilakukan penarikan kembali. Rincian atas penetapan status penggunaan aset yang telah dilakukan penarikan kembali.

Pada tahun 2020, Dirjen Kekayaan Negara, melalui surat yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor S-190/KN/2020 tanggal 17 Maret 2020, kembali mengusulkan 16 lokasi untuk tujuan penyediaan rumah ASN, TNI, dan Polri serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sesuai surat Kementerian PUPR Nomor RU.0104-DR/404 tanggal 17 April 2020, Kementerian PUPR sedang melakukan verifikasi lebih lanjut. Rincian atas usul penetapan status penggunaan aset.

8. PENGUNGKAPAN PENTING TERKAIT SERAH KELOLA ASET PROPERTI EKS BPPN DAN EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO) KEPADA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

Salah satu bentuk pengelolaan aset properti eks BPPN dan eks kelolaan PT PPA (Persero) adalah dengan melakukan serah kelola aset properti kepada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Sejak tahun 2016 hingga Tahun 2024 jumlah serah kelola yang telah ditindaklanjuti dengan Berita Acara Serah Terima adalah sebanyak 358 aset, dengan total nilai sebesar Rp929.183.535.966. Selanjutnya, sebanyak 27 aset senilai Rp 47.093.622.800 di antaranya telah dilakukan penarikan kembali. Rincian atas Serah Kelola Kepada LMAN dan penarikan kembali adalah sebagai berikut:

Tahun	Serah Kelola ke LMAN		Penarikan Kembali	
	Jumlah Dokumen	Nilai (Rp)	Jumlah Dokumen	Nilai (Rp)
2016	17	67.486.550.000	-	-
2017	128	195.533.636.000	-	-
2018	12	12.747.928.000	-	-
2019	97	65.066.399.218	-	-

Tahun	Serah Kelola ke LMAN		Penarikan Kembali	
	Jumlah Dokumen	Nilai (Rp)	Jumlah Dokumen	Nilai (Rp)
2020	61	53.853.055.650	10	26.340.090.650
2021	8	18.874.080.000	2	7.739.616.150
2022	9	177.058.608.606	7	3.871.455.000
2023	12	69.116.658.920	-	-
2024	14	269.446.619.572	8	9.142.461.000
TOTAL	358	929.183.535.966	27	47.093.622.800

9. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA TERKAIT ASET EKS BDL

Atas Piutang eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) pada 20 (dua puluh) BDL baik eks Dana Talangan maupun eks Unit Program Penjaminan Pemerintah (UP3) sebesar Rp9.584.827.988.662,36, Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan menguasai dokumen dan fisik atas aset eks BDL berupa aset kredit, aset inventaris, surat berharga dan aset properti eks BDL dengan total Rp12.435.583.853.284,26. Berdasarkan PMK Nomor 170 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan c.q. DJKN mengelola aset Eks BDL tersebut dengan melakukan penjualan aset, pelunasan kredit, sewa, menjadikan sebagai BMN, kemudian hasil pengelolaan menjadi pengurang nilai Piutang BDL.

Aset adalah harta atau kekayaan eks Bank Dalam Likuidasi (BDL). Nilai sisa aset eks BDL yang dikelola Pemerintah per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.435.583.853.284,26. Aset eks BDL terdiri dari aset kredit, aset inventaris, Aset surat berharga, dan aset properti eks BDL.

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023
1	Aset Kredit	10.873.502.849.595,70
2	Aset Inventaris	1.342.300
3	Aset Surat Berharga	1.524.031.350
4	Aset Properti eks BDL	1.560.555.630.038,56
	Jumlah	12.435.583.853.284,26

Rincian lebih lanjut atas Pengungkapan Penting Lainnya Terkait Aset Eks BDL dicatat pada Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan UAKPA BUN TK Aset yang Timbul dari Pemberian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), sebagai berikut:

a. ASET KREDIT EKS BDL

Pengelolaan atas aset kredit meliputi penatausahaan dan penyerahan pengurusan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Untuk pelaporan pengelolaan aset kredit yang telah diserahkan pengurusannya kepada PUPN, dilakukan rekonsiliasi aset kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester antara Direktorat dengan PUPN/Kantor Pelayanan. Sisa aset kredit eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 7.887 debitur dengan saldo akhir sebesar Rp10.886.906.943.189.

Adapun rincian Aset Kredit eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Nilai
1	Aset kredit yang telah diserahkan pengurusan piutang negaranya kepada PUPN	8.314.770.138.754
2	Aset kredit yang ditatausahakan oleh DJKN	2.572.136.804.434,82
	Jumlah	10.886.906.943.188,82

b. ASET INVENTARIS EKS BDL

Aset inventaris adalah aset yang berupa barang selain tanah dan/atau bangunan, termasuk kendaraan bermotor, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset inventaris meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penetapan sebagai Barang Milik Negara (BMN), dan pemusnahan. Sisa aset inventaris eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 54 unit dengan nilai sebesar Rp1.342.300.

Adapun rincian Aset Inventaris eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Nilai
1	Kendaraan Bermotor	-
2	Peralatan dan Mesin	1.342.300
	Jumlah	1.342.300

c. ASET SURAT BERTHARGA EKS BDL

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas surat berharga meliputi penatausahaan, permintaan konfirmasi kepemilikan, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), permintaan pembayaran atas dividen saham atau bunga, pencairan obligasi, dan penjualan. Sisa aset surat berharga eks BDL yang dicatatkan dengan nilai sebesar Rp1.524.031.350.

Adapun rincian Aset Inventaris eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Nilai
1	Obligasi	-
2	Saham	1.524.031.350
	Jumlah	1.524.031.350

d. ASET PROPERTI EKS BDL

Aset properti adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah Aset properti adalah aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau satuan rumah susun/apartemen berikut benda yang melekat dan merupakan satu kesatuan, yang merupakan aset milik BDL. Pengelolaan atas aset properti eks BDL meliputi penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan, lelang, penebusan, penetapan aset properti menjadi Barang Milik Negara (BMN), dan pemanfaatan dalam bentuk sewa. Sisa aset properti eks BDL yang dicatatkan per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 664 aset dengan nilai sebesar Rp1.560.555.630.038,56.

Adapun rincian Aset Properti eks BDL sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo Nilai
1	Aset tetap	193.128.374.000
2	Barang Jaminan Diambil Alih (BJDA)	840.512.390.038,56
3	Aset yang diperoleh berdasarkan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap	224.390.154.000
4	Aset yang berasal dari penyerahan Pemegang Saham kepada BDL untuk menyelesaikan permasalahan permodalan dan likuiditas BDL	302.524.712.000
	Jumlah	1.560.555.630.038,56

10. SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Penyelesaian penagihan dana BLBI yang tidak kunjung selesai selama lebih dari dua puluh tahun menjadi perhatian khusus pemerintah sehingga diperlukan satu kekuatan baru yang dapat mendukung instrumen yang sudah berjalan selama ini, yaitu Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dalam pemulihan hak negara. Bukti keseriusan pemerintah untuk memulihkan hak negara adalah dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keppres Nomor 16 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang diinisiasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

Satgas BLBI dibentuk dengan tujuan utama untuk melakukan penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari pengelolaan eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan Bank Dalam Likuidasi termasuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia maupun aset properti secara efektif dan efisien. Satags BLBI yang terdiri dari berbagai Kementerian dan Lembaga berkomitmen melakukan upaya *extraordinary* untuk mengembalikan hak negara dengan total 110,45 triliun rupiah dimana lebih dari 90% dari nilai tersebut merupakan aset kredit dari obligor/debitur. Sehingga pembentukan Satgas BLBI adalah sebagai katalisator dalam penyelesaian hak negara atas dana BLBI serta memperkuat fungsi PUPN.

Satgas BLBI terdiri dari gabungan Kementerian dan Lembaga bertugas dengan waktu yang terbatas hingga 31 Desember 2023, memiliki struktur keanggotan sebagai berikut:

1. Pengarah (terdiri dari 8 orang Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara)
2. Ketua Pelaksana Satgas (Dirjen Kekayaan Negara)
3. Wakil Ketua Satgas (Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI)
4. Sekretaris (Deputi Bidkor Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam)
5. Anggota Pelaksana (9 orang Pejabat Eselon I antar Kementerian dan Lembaga)
6. Sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN diketuai oleh Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi DJKN
7. Kelompok Kerja (Pokja):
 - a. Tim A, B, dan C. Masing-masing tim terdiri dari gabungan tiga Pokja yaitu Pokja Data dan Bukti, Pokja Pelacakan, dan Pokja Penagihan dan Litigas
 - b. Pokja Tanah
 - c. Pokja Peraturan
 - d. Tim Penegakkan Hukum Bareskrim POLRI.

Dalam pelaksanaan tugasnya, tim Pokja Satgas melakukan telaah dan pendalaman terhadap obligor, debitur, dan aset properti dengan nilai yang signifikan dan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Terkait penanganan penagihan obligor/debitur, mekanisme pemanggilan yang dilakukan adalah sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak antar panggilan berselang 7 hari, dalam hal obligor/debitur tidak memenuhi panggilan, maka akan dilakukan pemanggilan berselang 7 (tujuh) hari melalui media massa nasional.

Untuk tahap awal, Satgas BLBI bertugas untuk menangani sejumlah 8 obligor, 14 debitur, dan 9 unit aset properti prioritas dengan nilai yang besar dan tingkat permasalahan yang kompleks. Saat ini proses pengelolaan hak tagih negara dari dana BLBI sudah memasuki tahap kedua dengan prioritas penanganan kepada 13 obligor, 15 debitur, dan 14 unit aset properti.

Selain upaya penagihan melalui pemanggilan, Satgas juga melakukan serangkaian upaya terkait aset-aset obligor/debitur seperti penguasaan fisik dan pemblokiran aset-aset milik debitur dan obligor yang ditindaklanjuti dengan penyitaan dan pelelangan. Sejak dilantik pada tanggal 4 Juni 2021, Satgas BLBI efektif melaksanakan special mission penanganan hak tagih negara hingga nanti tanggal 31 Desember 2024.

Dengan jangka waktu yang relatif singkat tersebut, Satgas telah berhasil membukukan capaian perolehan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Progres	Nilai (Rp)	Luas (m2)
1	PNBP dari Pembayaran	1.784.959.306.931,58	-
2	PNBP dari Lelang	167.815.189.998,40	-
3	PNBP Penjualan Tanpa Lelang	92.400.000.000	6.933
4	Penguasaan Fisik Aset Properti	9.209.432.947.044	21.038.005,24
5	Sita Aset dan Penyerahan Barang Jaminan	20.080.279.656.485,50	20.434.723,38
6	PSP dan Hibah	5.927.720.848.449	3.826.908,97
7	PMN Nontunai	3.769.371.406.872	670.837
Total		41.031.979.355.780,48	45.977.407,59

E. PENGELOLAAN PIUTANG DALAM RANGKA DANA ANTISIPASI PENANGANAN LUMPUR SIDOARJO

1. Dasar Pembayaran Jual Beli Tanah dan Bangunan Peta Area Terdampak (PAT) 22 Maret 2007

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo pasal 15 ayat (1):

“Dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan, PT Lapindo Brantas membeli tanah dan bangunan masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dengan pembayaran secara bertahap, sesuai dengan peta area terdampak tanggal 22 maret 2007, dengan akta jual beli bukti kepemilikan tanah yang mencantumkan luas tanah dan lokasi yang disahkan oleh Pemerintah”.

Ayat (2):

“Pembayaran bertahap yang dimaksud, seperti yang telah disetujui dan dilaksanakan pada daerah yang termasuk dalam peta area terdampak 4 Desember 2006, 20% (dua puluh perseratus) dibayarkan dimuka dan sisanya dibayarkan paling lambat sebulan sebelum masa kontrak 2 (dua) tahun habis”

PT Lapindo Brantas Inc. (LBI) merupakan badan hukum asing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat melakukan jual beli atas tanah dan bangunan di Indonesia. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dibentuk PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ). Di dalam pelaksanaannya, proses pembayaran pelunasan jual beli tanah dan bangunan di wilayah PAT 22 Maret 2007 yang dilakukan PT MLJ tidak lancar Berdasarkan Peraturan Presiden no. 76 tahun 2015 tentang pemberian dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan milik masyarakat yang terkena luapan

Lumpur Sidoarjo dalam PAT 22 Maret 2007, Pemerintah menyiapkan dana sebagai pelunasan pembayaran langsung kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan dalam PAT 22 Maret 2007. Dana yang telah digunakan tersebut menjadi pinjaman Lapindo Brantas Inc/PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah.

2. Kebijakan Pembayaran Jual Beli Tanah & Bangunan PAT 22-03-2007

Sesuai dengan tata cara pembayaran yang di atur dalam Perpres 14 tahun 2007 tentang UAKPA BUN Tk Pengelola Piutang dalam rangka Dana Antisipasi Penanganan Lumpur Sidoarjo, pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap I sebesar 20% dari nilai jual beli dan tahap II sebesar 80% dari nilai jual beli.

Kebijakan MLJ dalam pelaksanaan pembayaran pembelian tanah dan bangunan milik warga PAT 22 Maret 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Pembayaran tahap I 20%, seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga.
- b. Pembayaran tahap II 80%, dibagi menjadi tiga jenis pembayaran sebagai berikut:
 - 1) 80% seluruhnya dibayar secara tunai kepada warga
 - 2) Program Resettlement dengan formula tanah pekarangan/darat mendapat relokasi dengan perbandingan 1:1 dari luas tanah asal + bangunan seluas tertentu (yang dibangun PT Wahana Artha Raya) + “susuk” (kembali) sebesar nilai sisa dari luas bangunan menurut data Perjanjian Ikatan Jual Beli (PIJB), dengan tidak memperhitungkan uang muka 20%. Warga yang menerima program resettlement, setelah 12 (dua belas) bulan diberikan kesempatan untuk menjual kembali kepada MLJ (buyback) dengan nilai yang sama. Dalam perhitungan selanjutnya, uang muka 20% yang tidak diperhitungkan dalam program resettlement, dianggap pemberian uang kerohiman dalam bentuk bonus yang diberikan MLJ kepada warga.
 - 3) 80% dibayar secara tunai kepada warga dengan memperhitungkan sisa pokok KPR warga yang bersangkutan. Selanjutnya, sisa pokok KPR warga diselesaikan oleh MLJ kepada bank yang terkait.

3. Piutang

Piutang Pokok sebesar Rp773.382.049.559 merupakan penggunaan Dana Antisipasi tahun 2015. Telah dilakukan penagihan pinjaman dari BPLS atas Dana Antisipasi beberapa kali yaitu :

- a. Surat no. PMS.04.02/293/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang peringatan untuk penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi.
- b. Surat no. PMS.04.02/281/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang peringatan II Penagihan Pinjaman atas Dana Antisipasi.
- c. Surat dari kementerian keuangan no. S-1375/KN/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- d. Surat no. PMS.04.02/56/2018 tanggal 27 Maret 2018 tentang Penagihan Kewajiban Terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- e. Surat dari kementerian keuangan no. S-170/MK.6/2018 tanggal 19 April 2018 tentang Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.

- f. Surat dari kementerian keuangan no. S-4946/KN/2018 tanggal 24 September 2018 tentang Pengihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- g. Surat no. KU.01.12/PPLS/222 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- h. Surat dari kementerian keuangan no. S-1893/KN/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Penagihan Kewajiban terkait Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- i. Surat dari kementeria keuangan no. S-527/MK.6/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Peringatan Untuk Penagihan Atas Pinjaman Dana Antisipasi lumpur Sidoarjo.
- j. Surat no. KU 0403-AI/63 tanggal 15 Maret 2021 tentang jumlah piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo sampai dengan 31 Desember 2020.
- k. Surat dari kementerian keuangan no. S-291/MK.6/2021 tanggal 12 Juli 2021 tetang peringatan Penagihan atas Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- l. Surat dari Kementerian Keuangan No S-50/KN.5/2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Penyisihan Piutang Dana Antissipasi Lumpur Sidoarjo (DALs).
- m. Surat dari kementerian keuangan no. S-15/KN/2022 tentang Penagihan Piutang Pemerintah Terhadap Pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALs).
- n. Surat Kantor Jasa Penilai Publik SIH Wiryadi dan Rekan Nomor 016/SK/SIH/XII/2021 Tanggal 6 Desember 2021 tentang Surat Keterangan atas Laporan Penilaian.
- o. Surat no. HM 0503-AI/170 tanggal 21 April 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- p. Surat Kepada DJKN No. HM 0501-AI/93 tanggal 28 Februari 2023 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- q. Surat kepada PT. Lapindo Brantas, Inc/Pt. Minarak Lapindo Jaya No. KU 0403-AI/94 tanggal 28 Februari 2023 tentang Konfirmasi Catatan piutang Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo.
- r. Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-53/KN/2023 tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALs) a.n Lapindo Brantas, Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan Bakrie.
- s. Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALs) diterima oleh PUPN Cabang DKI Jakarta dengan diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Nomor SP3N-246/PUPNC.10.05/2023 tanggal 29 Maret 2023 hal Penerimaan Pengurusan Piutang Negara a.n. Lapindo Brantas Inc, PT Minarak Lapindo Jaya dan Nirwan D. Bakrie;
- t. Melalui PUPN Cabang DKI Jakarta telah dilakukan pemanggilan terhadap LBI/PT MLJ yang terakhir dilakukan sesuai surat pemanggilan nomor S-1531/KNL.0705/2023 tanggal 4 Juli 2023 hal Panggilan terakhir atas nama Lapindo Brantas Inc (LBI), PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) dan Nirwan D. Bakrie, namun demikian pinjaman Dana Antisipasi Lumpur Sidoarjo (DALs) belum dilakukan pelunasan.
- u. Sesuai Surat dan Bukti Bayar Nomor 021/L.DIR/MLJ/LBI/IX/2023 tanggal 15 September 2023 hal Pemberitahuan Pembayaran.

Hasil penilaian kembali jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah seluas 622,34 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00347/2113-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar sebesar (137.276.401.432) rupiah yang kemudian dianggap nol karena nilainya negatif.

- b. Tanah seluas 22,85 Ha sesuai Laporan Penilaian nomor : 00348/2.013-00/PI/0561/1/IXI/2021 tanggal 4 Desember 2021 mempunyai nilai wajar 58.234.000.000 rupiah dan nilai ini yang kemudian digunakan untuk menghitung nilai penyisihan piutang yang dalam pertemuan tripartit antara BUN, DJKN dan PPLS disepakati sudah mencapai kualitas piutang macet.

F. PENGELOLA PIUTANG NEGARA ATAS YAYASAN SUPERSEMAR

Penyusunan laporan keuangan UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan pada tahun 2018 sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Berdasarkan ketentuan tersebut Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar.

- 1) Temuan BPK Tahun 2018 Pengaturan pencatatan dan pengelolaan Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar Rp4.700.985.148.701,56 tidak memadai.

Neraca LKTK Tahun 2018 mencatat Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar Rp4.700.985.148.701,5 dengan nilai penyisihan sebesar Rp4.458.580.389.115. Pencatatan piutang kepada Yayasan Supersemar baru dilakukan berdasarkan putusan MA Tanggal 8 Juli 2015 Nomor 140/PK/Pdt/2015 yaitu sebesar USD3152,183 dan Rp139.438.536.678,56 atau secara total senilai Rp 4,7 Triliun dengan menggunakan kurs tengah Bank Sentral per 31 Desember 2018. Berdasarkan amar putusan ini telah terdapat eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebesar Rp242.404.759.586 (dua ratus empat puluh dua miliar, empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) dan terdapat beberapa objek yang belum dieksekusi terutama tanah/bangunan Gedung Granadi, dan sebidang tanah di Jalan Raya Megamendung No. 6 masih dalam proses di Pengadilan Negeri Cibinong.

CaLK LKTK Tahun 2018 mengungkapkan pencatatan piutang Supersemar merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus. Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN ditetapkan sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola Piutang Kepada Yayasan Supersemar berdasarkan Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara No PRINT-71/KN/2019 tanggal 14 Februari 2019. Selanjutnya Dit PNKSI mencatatkan penyisihan piutang supersemar Tahun 2018 sebesar Rp4,458,580,389,115 dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Piutang Supersemar merupakan piutang BUN dengan Nilai penyisihan piutang Supersemar Tahun 2018 adalah sebesar 100% dengan kategori macet dikurangi nilai agunan berupa aset likuid Rp242,404,759,586 yang berasal dari eksekusi pencairan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang belum diserahterimakan kepada BUN.

Pengujian selanjutnya menunjukkan penyisihan piutang Supersemar Tahun 2018 tersebut belum memiliki dasar hukum yang memadai. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Pasal 2 ayat 1 poin (c) tidak mengatur piutang Supersemar dalam lingkup piutang BUN. Dengan demikian penyisihan 100% atas piutang Supersemar dalam lingkup pengelolaan piutang BUN berdasarkan norma waktu menjadi

tidak memadai. Hasil wawancara selanjutnya dengan DJKN menunjukkan belum terdapat upaya yang memadai dalam rangka penagihan piutang dan optimalisasi atas aset jaminan terkait Supersemar dalam mendukung pengkategorian piutang Supersemar sebagai piutang macet. Kondisi ini terkait dengan tidak adanya dasar hukum yang mengatur kewenangan dari Direktorat PKNSI sebagai Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN TK) dalam rangka melakukan penagihan dan pengelolaan atas aset jaminan piutang Supersemar.

Hasil analisa selanjutnya menunjukkan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan pada Bagian tujuh tentang Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi pada Pasal 1236 sampai dengan Pasal 1255 tidak mengatur lebih lanjut mengenai kewenangan khusus PKNSI dalam pengelolaan terkait piutang supersemar. Dalam peraturan tersebut, objek spesifik yang berada dalam kewenangan Dit PKNSI adalah kekayaan negara aset eks BPPN dan eks likuidasi bank, aset eks UP3, aset nasionalisasi atau eks asing atau cina, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, barang milik negara eks kepabeanaan, barang yang dirampas oleh negara, hak atas bumi, air dan tata ruang angkasa, hak atas kekayaan intelektual dan aset lain-lain lingkup I, II, dan III.

Dengan demikian, penunjukan piutang Supersemar tidak termasuk dalam kewenangan Dit PKNSI. Tidak adanya pengaturan memadai dalam mengatur kewenangan UAKPA dalam melakukan optimalisasi piutang beserta barang sitaan selanjutnya dapat berpotensi dalam ketidakjelasan kewenangan UAKPA dalam melakukan optimalisasi piutang termasuk pengelolaan atas aset sitaan lainnya pada Yayasan Supersemar.

2) Tanggapan:

PMK Nomor 127/PMK.05/2018 mengatur bahwa Pengukuran untuk Penyisihan Piutang Tak Tertagih Piutang kepada Yayasan Supersemar mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Bendahara Umum Negara. Namun demikian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara belum mengatur secara khusus perhitungan penyisihan piutang sebagaimana terjadi pada piutang Supersemar sehingga perhitungan penyisihan dilakukan dengan memperlakukan piutang Supersemar sebagai piutang yang dikelola oleh BUN. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa PMK Nomor 127/PMK.05/2018 memperlakukan piutang Supersemar sebagai aset yang berada dalam pengelolaan DJKN.

PMK Nomor 127/PMK.05/2018 memberikan kewenangan Direktorat PKNSI selaku Unit Eselon II di DJKN yang menangani Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA-BUN TK) Piutang kepada Yayasan Supersemar. Guna menindaklanjuti penugasan tersebut dan mengingat perubahan PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan tidak dapat dilakukan dengan segera, Direktur Jenderal Kekayaan Negara menerbitkan Surat Perintah Nomor PRIN-71/KN/2019 tanggal 14 Februari 2019 kepada Direktorat PKNSI sebagai pelaksana UAKPA-BUN TK Piutang kepada Yayasan Supersemar. Kewenangan yang diberikan dalam surat perintah tersebut memang hanya mengatur kewenangan Direktorat PKNSI sebagai pihak yang menyajikan Piutang Supersemar dalam LKPP, belum mengatur secara khusus kewenangan terkait pengelolaan piutang supersemar dalam rangka optimalisasi

penagihannya. Hal ini dapat dipahami mengingat penyelesaian piutang Supersemar termasuk ke dalam ranah pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kementerian Keuangan tidak terlibat dalam proses perkara sehingga tidak dapat terlibat aktif dalam proses eksekusi tersebut.

Namun demikian dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Umum Negara, Kementerian Keuangan dapat mendorong pihak-pihak yang terkait untuk segera melakukan proses eksekusi dan menyerahkan hasil eksekusi tersebut untuk disetorkan ke kas negara melalui UAKPA-BUN TK Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait hal tersebut, kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai aset yang telah dieksekusi berupa rekening yang telah diblokir dan dicairkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan senilai Rp242.404.759.586 (dua ratus empat puluh dua miliar empat ratus empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah) yang saat ini tersimpan pada rekening penampungan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disetorkan ke kas negara.

Upaya-upaya lain juga akan terus dilakukan melalui kegiatan yang bersifat kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait antara lain Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Pengacara Negara, Sekretariat Negara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Cibinong, dan Kementerian Sekretariat Negara masih terus dilakukan dalam rangka menyelesaikan Piutang kepada Yayasan Supersemar. Terkait dengan aset yang belum dilakukan eksekusi, Direktorat PKN juga terus mendorong agar pihak-pihak tersebut segera melakukan eksekusi atas aset-aset Yayasan Supersemar yang telah dilakukan penyitaan dan melakukan penelusuran atas aset-aset lainnya. Di samping itu, DJKN telah membiayai jasa penilaian oleh KJPP atas aset tanah dan/atau bangunan yang telah disita.

Beberapa bentuk koordinasi terkait penyelesaian piutang yang telah dilakukan antara lain:

1. Telah diadakan rapat koordinasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 30 April 2019 dan 26 Juni 2019, dengan mengundang pihak-pihak terkait pada Kementerian/Lembaga yang terlibat dalam perkara Yayasan Supersemar yaitu Presiden RI c.q. Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal*, Kejaksaan selaku Kuasa Hukum Pemerintah RI, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan internal Kementerian Keuangan.
2. Dalam rangka menindaklanjuti keputusan rapat pada tanggal 26 Juni 2019, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-1862/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN dan Nomor S-1863/KN/2019 tanggal 10 Juli 2019 kepada Menteri Sekretaris Negara yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara.
3. Kejaksaan menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara dengan mengajukan permohonan eksekusi atas sebagian hasil eksekusi sebesar Rp242.404.759.586,77 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta petunjuk kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui surat Nomor W10-U3/1962/Hk.02/8/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang pada intinya berisi mengenai apakah pencairan dapat dilakukan terhadap sebagian hasil eksekusi atau menunggu hasil eksekusi secara keseluruhan.

4. Dalam rangka memperoleh dukungan dari Mahkamah Agung atas penyerahan sebagian hasil eksekusi Supersemar, Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2457/KN/2019 tanggal 25 Oktober 2019 kepada Wakil Mahkamah Agung Bidang Yudikatif yang pada intinya meminta dukungan terkait penyerahan uang hasil eksekusi kasus Yayasan Supersemar ke Rekening Kas Umum Negara. Selain itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara juga telah berkoordinasi langsung dengan Mahkamah Agung terkait rencana penyetoran sebagian hasil eksekusi ke kas negara.
5. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal* beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 28 November 2019. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyetoran uang senilai Rp242.081.000.259 ke Kas Umum Negara. Adapun besaran uang yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sebesar Rp242.404.759.586. Dengan demikian terdapat perbedaan antara uang yang telah disita dengan uang yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp323.759.327.
6. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-2816/KN/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang pada intinya meminta Menteri Sekretaris Negara untuk berkenan menindaklanjuti penyelesaian sisa *outstanding* Piutang Yayasan Supersemar dengan mengeksekusi aset yang telah diletakkan sita berupa:
 - a. Gedung Granadi di Jalan HR Rasuna Said Kav.8-9 Blok X/I, Jakarta Selatan (BA Sita Eksekusi No.72/Eks/Pdt/2015 jo No.904/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel tanggal 23 November 2016);
 - b. Sebidang tanah seluas 8.120 m² (SHM No 263) di Jalan Raya Megamendung No 6 RT 03 RW 03 (BA Sita Eksekusi No 07/Pen.Pdt/PBT/Sita.Eks/2016/PN.Cbi jo. No.72/Eks.Pdt/2015 jo. No 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 1 Desember 2016)
7. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-19/KN/2020 tanggal 29 Januari 2019 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar.
8. Direktorat PKNSI telah menyampaikan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-220/KN/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Nomor S-380/KN/2020 tanggal 08 Juni 2020 kepada Deputy Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada intinya meminta pihak-pihak tersebut untuk menindaklanjuti penyelesaian hak-hak negara dalam Piutang Yayasan Supersemar sekaligus menawarkan bantuan penilaian oleh Penilai DJKN.
9. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mengajukan usulan penilaian aset sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6 melalui surat Nomor B-313/G/Gp.2/06/2020 tanggal 17 Juni 2020 hal Permintaan Tindak Lanjut Penyelesaian Piutang Yayasan Beasiswa Supersemar. Teknis penilaian tersebut telah dibahas bersama Direktorat Penilaian dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Juli 2020 sesuai pelaksanaan Hukum Acara Perdata dengan mempertimbangkan faktor keamanan.
10. Kejaksaan Agung telah menyampaikan surat permohonan penetapan penilai pemerintah kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk dapat melakukan penilaian aset di Jalan Raya Megamendung dalam rangka mendukung pelaksanaan lelang eksekusi (Surat Jamdatun Nomor B-368/G/Gp.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020).

11. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-958/KN.5/2020 tanggal 15 September 2020 yang pada intinya meminta progres tindak lanjut penilaian aset.
12. Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN melalui surat Nomor B-616/G/Gp.2/11/2020 tanggal 04 November 2020 hal Permohonan Bantuan Biaya Appraisal Aset Tanah dan Bangunan Dalam Perkara Yayasan Beasiswa Supersemar menyampaikan permintaan bantuan biaya penilaian aset sitaan oleh KJPP dalam perkara perdata Piutang Yayasan Supersemar.
13. Menindaklanjuti surat tersebut, Direktur PKNSI telah menyampaikan surat Nomor S-1171/KN.5/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada intinya menyampaikan bahwa biaya penilaian aset sitaan Yayasan Supersemar akan dibebankan pada POK Direktorat PKNSI.
14. Direktorat PKNSI menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan ditunjuk sebagai pelaksana penilaian aset yang telah diletakkan sita sebagaimana dimaksud pada poin Nomor 6. Kontrak pelaksanaan penilaian aset dilaksanakan pada mulai tanggal 23 November sampai dengan 14 Desember 2020.
15. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah menyerahkan hasil penilaian aset sitaan sebagaimana dimaksud di atas. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut akan digunakan sebagai dasar permohonan lelang sita pengadilan dari Kejaksaan Agung kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Cibinong.
16. Jamdatun melalui surat Nomor B-260/G/Gp.2/04/2021 tanggal 14 April 2021 meminta agar laporan penilaian Aset Granadi dan Aset Megamendung direvisi mengingat penilaian dilakukan sebelum ada penunjukan dari Ketua Pengadilan Negeri.
17. Menindaklanjuti surat tersebut, telah dilakukan pengambilan sumpah Tim Penilai Aset Granadi pada tanggal 20 Mei 2021 oleh Ketua PN Jaksel dan tanggal 4 Juni 2021 oleh Ketua PN Cibinong.
18. Berdasarkan Surat Direktur PKNSI Nomor S-1320/KN.5/2021 tanggal 15 Juni 2021, telah dimohonkan penilaian ulang berikut penambahan pengguna laporan penilaian (PN Jaksel, PN Cibinong, Jamdatun).
19. Rencana survei (inspeksi) lapangan dalam rangka penilaian dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Juli 2021. Namun demikian, rencana tersebut harus ditunda mengingat daerah Jabodetabek sedang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) guna mencegah penyebaran Covid-19.
20. Tim Penilai KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan inspeksi lapangan terhadap Aset Megamendung pada tanggal 25 Agustus 2021 dan Aset Granadi pada tanggal 26 Agustus dan 6 September 2021. Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKNSI melalui surat Nomor 00194/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 dan 00195/2.0014-00/PI/11/0080/1/XI/2021 tanggal 10 November 2021.
21. Direktorat PKNSI menyampaikan laporan penilaian dimaksud kepada Ketua PN Jakarta Selatan melalui surat Nomor S-2632/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 dan kepada Ketua PN Cibinong melalui surat Nomor S-2631/KN.5/2021 tanggal 26 November 2021 (tembusan Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN).
22. Di samping sitaan berupa uang dan aset tanah-bangunan, terdapat aset finansial yang telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018 dengan rincian:

No	Perusahaan	Jenis	Status	Keterangan
1	Plaza Indonesia Realty (PLIN)	Saham dan Deviden	Listing	Terdapat deviden sebesar Rp3.592.5000 tahun 2012 s.d. 2015
2	PT Granadi	Saham dan Deviden	Non Listing	-
3	PT Wisma Kosgoro	Saham dan Deviden	Non Listing	-
4	PT Indocement Tungal Prakarsa (INTP)	Saham dan Deviden	Listing	-
5	PT Indofood Sukses Makmur (INDF)	Saham dan Deviden	Listing	-
6	PT Bank Muamalat	Saham dan Deviden	Non Listing	-
7	PT Bank Danamon (BDMN)	Saham dan Deviden	Listing	-
8	Timber Dana Jakarta	Saham dan Deviden	Non Listing	-
9	PT Pelita Indonesia Baru	Saham dan Deviden	Non Listing	-
10	PT Tri Megah Sekuritas (TRIM)	Saham	Listing	-
11	PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912	Saham	Non Listing	-
12	Aset Yayasan Supersemar di PT Samuel Internasional	Saham	Non Listing	-
13	Rekening/Giro/Deposito an. Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar di PT BPR Mitra Sejahtera Lestari Bekasi	Rekening/Giro/Deposito	-	

23. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-4/KN/2022 tanggal 17 Januari 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung untuk menyelesaikan *outstanding* piutang Yayasan Supersemar, termasuk dan tidak terbatas pada pengajuan permohonan lelang eksekusi Pengadilan terhadap aset yang telah disita dan telah dilakukan penilaian.

24. Direktorat PKNSI telah melaksanakan rapat dengan Jamdatun, Kejagung dan Kedeputan Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kemsetneg pada tanggal 6 Februari 2022 dengan simpulan:

- Tindak lanjut penyelesaian piutang yang saat ini akan dilakukan adalah mendorong pelaksanaan lelang aset sitaan (aset Granadi dan Megamendung) dan pencairan saham-saham yang telah disita.
- JPN akan menyampaikan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri mengenai selisih uang yang telah dieksekusi dengan uang yang diserahkan/disetor, rencana lelang aset sitaan, dan pencairan saham.

25. Direktorat PKNSI telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-40/KN/2022 tanggal 23 Maret 2022 kepada Kemsetneg dan Kejagung yang pada intinya meminta penjelasan terkait selisih saldo yang dicairkan dengan saldo yang diserahkan serta sita eksekusi rekening lainnya jika ada.

26. Direktorat PKN telah menyampaikan surat Dirjen KN Nomor S-69/KN/2022 tanggal 17 Mei 2022 kepada Ketua PN Jakarta Selatan dan Ketua PN Cibinong untuk dapat mengajukan lelang eksekusi ke KPKNL setempat. Selanjutnya, telah disampaikan pula surat Dirjen KN Nomor S-70/KN/2022 tanggal 17

Mei 2022 kepada Jamdatun dan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum untuk dapat menyampaikan progres tindak lanjut atas hasil penilaian aset yang telah disita tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada upaya mendorong permohonan pelaksanaan lelang sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri.

27. Direktorat PKN telah melakukan beberapa kali koordinasi yaitu pada tanggal 09 September 2022, 12 Juli 2022, dan 14 Juli 2022 guna mendorong pelaksanaan lelang sita eksekusi dan penyeteroran uang sisa hasil eksekusi dengan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal* beserta Jaksa Pengacara Negara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Negeri Cibinong.

28. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyerahkan uang sisa hasil eksekusi kepada perwakilan Kementerian Sekretariat Negara selaku *principal* beserta Jaksa Pengacara Negara pada tanggal 14 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal yang sama, telah dilakukan penyeteroran uang senilai Rp323.759.328 ke Kas Umum Negara.

29. Adapun progres terkait aset sitaan berupa tanah dan/atau bangunan serta aset finansial (aset saham) adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Cibinong telah melaksanakan lelang eksekusi aset berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Raya Megamendung No. 6 RT 03 RW 03 Kampung Citalingkup, Desa Megamendung, Bogor telah dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2022 melalui KPKNL Bogor. Namun demikian, tidak terdapat penawaran atas lelang tersebut (TAP). Lelang ulang akan dilaksanakan setelah terdapat pembaruan penilaian oleh KJPP (laporan penilaian berakhir pada tanggal 25 Agustus 2022).
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memproses permohonan lelang eksekusi aset berupa tanah dan bangunan "Gedung Granadi" di Jl. HR. Rasuna Said Kav 8-9 Blok X/I, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan. Namun demikian, lelang belum dapat dilaksanakan mengingat laporan penilaian telah habis masa berlakunya.
- c. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PMK 213/PMK.06/2020, masa berlaku laporan penilaian atau laporan penaksiran yang digunakan sebagai dasar penetapan Nilai Limit paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penilaian atau penaksiran sampai dengan tanggal pelaksanaan lelang.
- d. Mengingat diperlukan penilaian baru oleh KJPP, pelaksanaan penilaian akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan pertimbangan tidak tersedianya dana.
- e. Pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset finansial (aset saham) akan dilakukan setelah *principal* melakukan pembayaran panjar SKUM yang diestimasikan sebesar Rp19.100.000

30. Terkait aset sitaan berupa saham, Direktur PKN telah menyampaikan surat kepada Direktur Perdata Ditjen AHU Nomor S-594/KN.4/2022 tanggal 02 November 2022 yang pada intinya memohon informasi kepemilikan Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar pada aset yang telah ditetapkan sita eksekusi/pemblokirannya sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018.

31. Direktur Perdata menyampaikan surat Nomor AHU.2.UM.01.01-5288 tanggal 30 Desember 2022 yang pada intinya menyampaikan susunan pengurus dan pemegang saham terhadap perusahaan yang sahamnya disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018. Untuk kategori perusahaan terbuka,

Yayasan Supersemar tidak tercatat sebagai pemegang saham pada perusahaan tersebut. Adapun untuk PT Granadi, PT Wisma Kosgoro, Timber Dana Jakarta, dan PT Pelita Indonesia Baru, Yayasan Supersemar tercatat sebagai pengurus dan/atau pemegang saham perusahaan dimaksud.

32. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat PKN telah menyampaikan surat Nomor S-377/KN.4/2023 tanggal 9 Maret 2023 kepada KSEI mengenai permintaan informasi kepemilikan saham Yayasan Supersemar terhadap saham perusahaan terbuka sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 72/Eks.Pdt/2015 jo. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tgl 03 Januari 2018. Direktur Utama KSEI menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor KSEI-1015/DIR/0423 tanggal 10 April 2023 yang pada intinya untuk memperoleh informasi mengenai kepemilikan saham Yayasan Supersemar diperlukan izin/persetujuan dari OJK.

33. Terkait adanya perbedaan rekening/deposito/giro bank yang belum dieksekusi, Direktorat PKN telah meminta penjelasan kepada Kemsetneg (*principal*) dan Jamdatun (JPN) melalui surat Nomor S-56/KN/2023 tanggal 28 Maret 2023. Jamdatun menindaklanjuti surat tersebut melalui surat Nomor B-304/G/Gp.2/05/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang pada intinya menyampaikan kendala eksekusi aset yang telah disita baik berupa rekening/deposito/giro bank, saham, maupun tanah/bangunan.

34. Selanjutnya, Direktorat PKN telah melakukan rapat bersama Kemsetneg (*principal*) dan Jamdatun (JPN) pada tanggal 30 Agustus 2023 guna meminta dukungan terkait rencana penilaian ulang aset Granadi dan Megamendung. Pengadaan KJPP dalam rangka penilaian ulang tersebut dibebankan pada DIPA Kantor Pusat DJKN POK Direktorat PKN. Proses revisi anggaran untuk pengadaan jasa KJPP telah disetujui dan saat ini dalam proses pengadaan.

35. KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan penilaian atas aset sitaan Yayasan Supersemar berupa Aset Granadi dan Aset Megamendung melalui penilaian terbatas (*desktop valuation*). Laporan penilaian tersebut diserahkan kepada Direktorat PKN melalui surat Nomor 00192/2.0014-00/PI/11/0080/1/XII/2023 dan 00193/2.0014-00/PI/11/0080/1/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023.

36. Berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 282/PAN.PN.W11-U20/HK2.4/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 telah menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan penilaian atas aset sitaan Yayasan Supersemar di Megamendung dan telah dilakukan penilaian dengan Nomor Laporan 00063/2.0014-00/PI/11/0080/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024, dan berdasarkan Surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/4891/HK2.02/02/2024 tanggal 29 Februari 2024 telah menunjuk KJPP Toha, Okky, Heru & Rekan telah melakukan penilaian atas aset sitaan Yayasan Supersemar di Kuningan (Granadi) dan telah dilakukan penilaian dengan Nomor Laporan 00062/2.0014-00/PI/11/0080/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024.

Laporan Penilaian tersebut telah diserahkan kepada Direktorat PKN secara langsung pada 30 Mei 2024, selanjutnya diserahkan kepada JPN untuk diteruskan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai Surat Direktur PKN Nomor S-473/KN.4/2024 tanggal 5 Juli 2024 dan Pengadilan Negeri Cibinong sesuai Surat Direktur PKN Nomor S-482/KN.4/2024 tanggal 10 Juli 2024

37. Berdasarkan Surat Direktur PKN Nomor S-654/KN.4/2024 tanggal 13 Agustus 2024 telah dilakukan penilaian ulang aset eks Yayasan Supersemar berupa Gedung Granadi menindaklanjuti Berita Acara Sumpah KJPP No.72/Eks.Pdt/2015 Jo.904/Pdt.G/2027/PN.Jkt.Sel tanggal 31 Juli 2024.

38. Setelah dilakukan penilaian ulang oleh KJPP, terbit Laporan Penilaian Nomor 00093/2.0014-00/PI/11/0080/1/IX/2024 tanggal 9 September 2024.

39. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31 Oktober 2024 Nomor 2/Eks.Del/2018/PN.Bks. Jo. Nomor 72/Eks.Pdt/2015. Jo. No. 904/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, yang berbunyi:

- a. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, jika berhalangan dapat menunjuk wakilnya yang sah dengan disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat hukum untuk melaksanakan Eksekusi Pencairan terhadap:

Deposito atas nama Yayasan Supersemar dan/atau Supersemar Yayasan dan/atau Beasiswa Yayasan Supersemar terdapat 7 (tujuh) deposito dengan nomor bilyet dan nominal:

- 1) 1270/DB/MSL/XII/11 dengan Nominal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 2) 1616/DB/MSL/XII/14 dengan Nominal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 3) 1664/DB/MSL/XII/14 dengan Nominal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 4) 1536/DB/MSL/XII/13 dengan Nominal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 5) 1570/DB/MSL/XII/14 dengan Nominal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);
- 6) 1492/DB/MSL/XII/13 dengan Nominal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- 7) 1637/DB/MSL/XII/14 dengan Nominal Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

Dengan jumlah total nominal Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah);

yang berada di PT. PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Sejahtera Lestari dengan alamat Plaza Pondok Gede, Blok A No. 3, Jalan Raya Pondok Cabe, Bekasi. Eksekusi pencairan tersebut dalam rangka eksekusi untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 140 PK/Pdt/2015 tanggal 08 Juli 2015;

- b. Memerintahkan pula kepada Jurusita tersebut untuk membuat Berita Acara Eksekusi Pencairan dan sekaligus memindahkan saldo rekena tersebut kepada Rekening Kas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.00001-01-30-000114-6 atas nama RPL-175-PN-JAKSEL, Bank BTN Cabang Kuningan Jakarta, guna diserahkan kepada Pemohon Eksekusi.

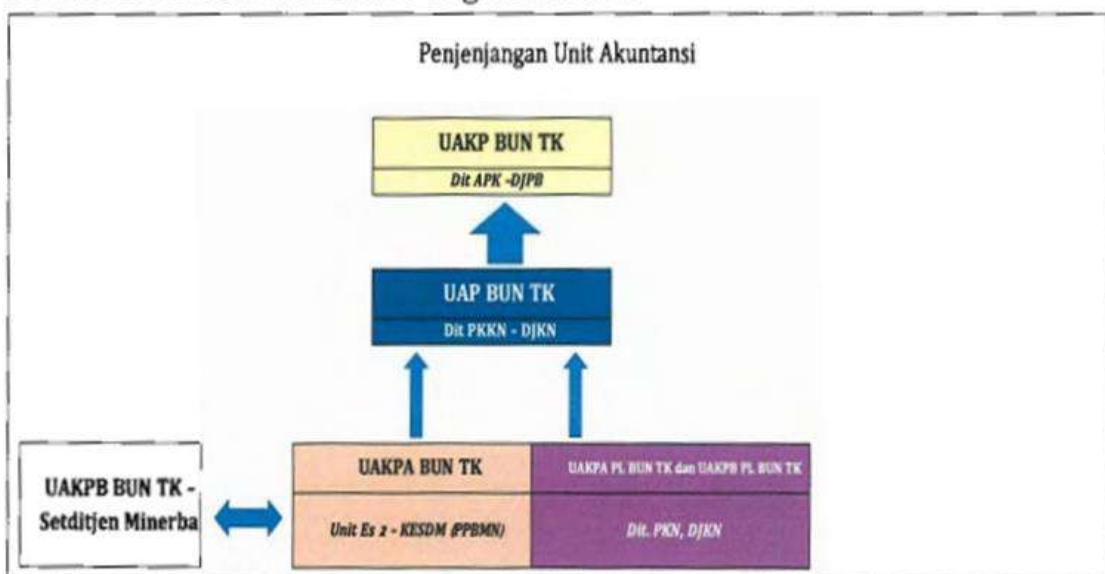
40. Terdapat Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Jalan Tegar Beriman No.5 Cibinong Kab.Bogor, Up. Panitera Nomor S-8916/KNL.0803/2024 tanggal 10 Desember 2024 hal Penetapan Hari & Tanggal Lelang (Nomor Register 4049_2024 Tereksekusi YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR).

G. Aset PKP2B

1. Terdapat kontraktor PKP2B yang asetnya tidak/belum disajikan pada laporan keuangan Bendahara Umum Negara TA 2024 pada PKP2B PT Indominco Mandiri Berdasarkan pasal 15 angka 1 Kontrak (perjanjian) Nomor 097.B.Ji/292/U/90 tanggal 5 Oktober 1990 antara pemerintah (dh. PN Batubara) dengan PT Indominco Mandiri, dinyatakan bahwa “peralatan (termasuk suku cadang) dan perlengkapan lainnya tersebut adalah milik Kontraktor.” Dengan demikian aset PKP2B PT Indominco Mandiri tidak termasuk dalam BMN. Atas status BMN tersebut, BPK meminta untuk dilakukan kajian sesuai LHP BPK Nomor 2/LHP/XV/02/2024 tanggal 12 Februari 2024
2. Pengakhiran Perjanjian PKP2B Generasi I
Terdapat kontraktor PKP2B yang telah berakhir perjanjian PKP2B Generasi I dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2020 PT Arutmin Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 221.K/33/MEM/2020 tanggal 2 November 2020 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

- b. Pada tahun 2021 PT Kendilo Coal Indonesia melalui surat keputusan menteri ESDM nomor 60/1/IUP/PMA/2021 tanggal 14 September 2021 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - c. Pengakhiran perjanjian PKP2B Generasi I PT Tanito Harum didasarkan pada adanya putusan perkara kasasi Tata Usaha Negara dengan Nomor 581.K/TUN/2020 dari Mahkamah Agung dimana hasilnya menolak permintaan dari APBI selaku penggugat untuk membatalkan SK Menteri ESDM Nomor 101.K/30/MEM/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang pembatalan atas SK Menteri ESDM Nomor 07.K/30/MEM/2019 tentang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Perpanjangan Pertama sebagai kelanjutan operasi PKP2B PT Tanito Harum. Sesuai pasal 25 PMK 67/2012 tentang Pengelolaan BMN PKP2B, BMN wajib diserahkan kepada pemerintah apabila perjanjian telah berakhir dan/atau telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan.
 - d. Pada tahun 2021 PT Kaltim Prima Coal melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 90/1/IUP/PMA/2021 tanggal 31 Desember 2021 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - e. Pada tahun 2022 PT Multi Harapan Utama melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 608/1/IUP/PMDN/2022 tanggal 1 April 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - f. Pada tahun 2022 PT Adaro Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 11/1/IUP/PMA/2022 tanggal 13 September 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
 - g. Pada tahun 2022 PT Kideco Jaya Agung melalui Surat Keputusan Menteri BKPM 14/1/IUP/PMA/2022 tanggal 16 Desember 2022 resmi menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
3. Sesuai dengan PMK 188/PMK.05/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset Berupa BMN yang Berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, penjenjangan Unit Akuntansi dan Konsolidasi Pelaporan Keuangan BMN PKP2B diilustrasikan sebagai berikut:

Penjenjangan unit akuntansi yang mencatat dan/atau melaporkan BMN PKP2B diilustrasikan dalam bagan berikut:



Pedoman Akuntansi BMN PKP2B ini mulai diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2022, sehingga pada penyusunan LK TA 2022 ini tidak lagi konsolidasi di Biro Keuangan KESDM.

4. Pengungkapan Lainnya

- a. Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor PKP2B yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:
Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang USD

PKP2B/IUPK	Status	31 Des 2023	Mutasi Kurang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	31 Des 2024
PT Adaro Indonesia	IUPK	637.408	-	-	-	637.408
PT Berau Coal	PKP2B	19.831.037	(4.406.245)	2.066.070	(16.376.155)	1.114.707
PT Multi Harapan Utama	IUPK	-	-	-	-	-
PT Kideco Jaya Agung	IUPK	22.996.638	(4.959.055)	-	(18.015.048)	22.535
PT Arutmin Indonesia	IUPK	83.772.886	(70.616.509)	-	(10.562.502)	2.593.875
PT Kaltim Prima Coal	IUPK	26.800.179	(13.590.810)	-	(53.870)	13.155.499
PT Kedilo Coal Indonesia	IUPK	-	-	-	-	-
		154.038.148	(93.572.619)	2.066.070	(45.007.575)	17.524.024

- 1) Saldo awal BMN sebesar USD154.125.268
- 2) Mutasi kurang sebesar USD93.572.619 dikarenakan terdapat SK penghapusan dengan rincian sebagai berikut:
 - SK Penghapusan dengan Nomor 1190.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, USD1.887.552,00
 - SK Penghapusan dengan Nomor 1065.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 25 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, USD412.422,00
 - SK Penghapusan dengan Nomor 1179.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, USD1.166.154,00
 - SK Penghapusan dengan Nomor 1180.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 30 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT Berau Coal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, USD940.117,00
 - SK Penghapusan dengan Nomor 579.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD1.319.565,00
 - SK Penghapusan dengan Nomor 1087.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya

Pengusahaan Pertambangan Batubara pada PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, USD3.639.490,00

- SK Penghapusan dengan Nomor 269.K/BN.07/SJN.A/2024 19 April 2024 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD39.779.361,00
- SK Penghapusan dengan Nomor 603.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Arutmin Indonesia, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK sebesar USD1.038.833,00
- SK Penghapusan dengan Nomor 1011.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada PT Arutmin Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan, senilai USD29.798.315 atas BMN yang tercatat di BMN
- SK Penghapusan dengan Nomor 1020.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada PT Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, USD90.895,00
- SK Penghapusan dengan Nomor 1162.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 27 Desember 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada PT Kaltim Prima Coal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, USD13.499.915,00

3) Koreksi tambah sebesar USD2.066.070 dengan rincian sebagai berikut

- Koreksi tambah sebesar USD2.066.070,00 dikarenakan terdapat koreksi pencatatan sesuai hasil penelitian administrasi dan fisik BMN Non Tanah yang dituangkan pada BAPAF Nomor 117.BA/SDBK/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 pada PT Berau Coal

4) Koreksi Kurang sebesar USD45.007.574 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Koreksi kurang sebesar USD2.066.070 karena merupakan hasil Inventarisasi dan Penilaian sehingga dikoreksi dari CaLK ke Neraca yang didasarkan pada Berita Acara Inventarisasi nomor 481.a.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 20 November 2024
- Koreksi kurang pada CaLK sebesar USD14.310.084,00 pada PT Berau Coal sesuai hasil Penelitian Administrasi dan Fisik Atas BMN Non Tanah yang dituangkan pada BAPAF Nomor 117.BA/SDBK/VIII/2024 tanggal 21 Agustus 2024 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Koreksi sebesar USD1.692.510 karena merupakan biaya
 - b) Koreksi sebesar USD 8.065.048 karena merupakan biaya kapitalisasi pada BMN Non Tanah yang berada di Neraca
 - c) Koreksi sebesar USD 2.076.766 karena merupakan biaya kapitalisasi pada BMN Tanah yang berada di Neraca, namun tidak mempengaruhi nilai wajar BMN di Neraca karena tahun perolehan biaya kapitalisasi tersebut sebelum dilaksanakan kegiatan Inventarisasi dan Penilaian
 - d) Koreksi sebesar USD409.690 karena merupakan biaya kapitalisasi pada BMN Tanah yang berada di CaLK (berbeda kode aset dengan pencatatan sebelumnya
 - e) Koreksi sebesar USD2.066.070 karena merupakan Koreksi Pendetailan BMN Non Tanah sesuai temuan di lapangan selama proses Penelitian Administrasi dan Fisik

yang akan diajukan Inventarisasi dan Penilaian untuk dapat dilakukan pencatatan pada neraca

- Koreksi kurang dari CaLK ke Neraca sebesar USD16.176.897,00 pada PT Kideco Jaya Agung sesuai dengan Surat Direktur Perumusan Kebijakan dan Kekayaan Negara Nomor S-100/KN.2/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyampaian LHIP BMN PKP2B pada PT Kideco Jaya Agung
- Koreksi pencatatan sebesar USD395.151,00 pada CaLK PT Kideco Jaya Agung yang didasarkan atas Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor 524.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 3 Oktober 2024, dimana BMN dimaksud dilakukan merupakan biaya yang dicatat sebagai aset dan merupakan barang tidak berwujud/tidak ada fisik dan tidak melekat pada aset lainnya
- Koreksi pencatatan sebesar USD1.443.000,00 pada CaLK PT Kideco Jaya Agung yang didasarkan atas Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor 498.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 10 September 2024, dimana BMN dimaksud merupakan biaya yang dicatat sebagai kapitalisasi aset di Neraca
- Koreksi kurang dari CaLK ke Neraca sebesar USD1.918.419,00 pada PT Arutmin Indonesia sesuai Surat Plh. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-155/KN.2/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penyampaian LHIP BMN PKP2B pada PT Arutmin Indonesia
- Koreksi kurang sebesar USD8.644.083,00 pada PT Arutmin Indonesia sesuai Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor 525.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 3 Oktober 2024 dimana merupakan biaya kapitalisasi yang dicatat sebagai aset di CaLK namun aset induknya telah dihapuskan sebelum tahun 2024 sesuai SK Penghapusan Nomor 756.K/BN.09/SJN.A/2021 dan 950.K/BN.07/SJN.A/2022
- Koreksi kurang pada CaLK PT Kaltim Prima Coal sebesar USD53.870,00 yang didasarkan pada Berita Acara Koreksi Pencatatan Nomor 523.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 3 Oktober 2024, dimana atas BMN dimaksud dilakukan penghapusan dari CaLK sesuai hasil reuiu APIP KESDM berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Nomor T-1156/PW.02/IJN.II/2024 tanggal 13 Agustus 2024

5) Saldo Akhir BMN pada CaLK yaitu sebesar USD17.524.025

b. Barang Milik Negara yang berasal dari Kontraktor PKP2B yang diperoleh sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut:

Kontraktor PKP2B yang disajikan dalam mata uang rupiah

PKP2B/IUPK	Status	31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	31 Desember 2024
PT Adaro Indonesia	IUPK	-			30.168.896.587		30.168.896.587
PT Berau Coal	PKP2B	854.307.266	3.116.821.864		2.322.773.743	(5.439.595.607)	854.307.266
PT Multi Harapan Utama	IUPK	-		(44.511.572.501)	44.511.572.501		-
PT Kideco Jaya Agung	IUPK	-		(350.408.204.408)	350.408.204.408		-
PT Arutmin Indonesia	IUPK	-		(14.817.350.088)	14.817.350.088		-
PT Kaltim Prima Coal	IUPK	31.190.970.242	6.693.619.079		92.159.543	(37.976.748.864)	-
PT Kedilo Coal Indonesia	IUPK	-					-
PT Tanito Harum	IUPK	4.540.684.961		(4.136.649.073)		(341.439.700)	62.596.188
Total		36.585.962.469	9.810.440.943	(413.873.776.070)	442.320.956.870	(43.757.784.171)	31.085.800.041

- 1) Saldo awal PT Tanito Harum per 1 Januari 2024 sebesar Rp4.540.684.961
- 2) Mutasi tambah sebesar Rp9.810.440.943 dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
 - Mutasi tambah pada PT Berau Coal berupa Tanah dengan tahun perolehan dibawah tahun 2010 sebesar Rp3.116.821.864 atas 87 (delapan puluh tujuh) line item yang berada di area Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT Berau Coal sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 535.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 8 Oktober 2024;
 - Mutasi tambah pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp6.693.619.079 merupakan Penambahan BMN berupa Tanah disekitaran Jalan Pengalih Sementara MWRD dengan tahun perolehan lebih dari 2011 sesuai BA Penelitian Administrasi dan Verifikasi BA 434.BA/BN.04/SDB/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
- 3) Mutasi kurang sebesar Rp413.873.776.070 dikarenakan terdapat SK penghapusan dengan rincian sebagai berikut:
 - SK Penghapusan dengan Nomor 962.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 1 November 2024 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Multi Harapan Utama, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK atas BMN non tanah sebesar Rp44.511.572.501;
 - SK Penghapusan dengan Nomor 418.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 24 Juni 2024 tentang Penghapusan BMN yang berasal dari PKP2B PT Tanito Harum, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK atas BMN non tanah sebesar Rp4.136.649.073;
 - SK Penghapusan dengan Nomor 1087.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penghapusan BMN Berupa Peralatan dan Mesin yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK atas BMN non tanah sebesar Rp349.964.233.408;
 - SK Penghapusan dengan Nomor 1137.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Penghapusan BMN yang Berasal dari PKP2B PT Kideco Jaya Agung, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK atas BMN non tanah sebesar Rp443.971.000;
 - SK Penghapusan dengan Nomor 1011.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada PT Arutmin Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan, dimana dilakukan penghapusan pada CaLK atas BMN non tanah sebesar Rp14.817.350.088.
- 4) Koreksi tambah sebesar Rp442.320.956.870 dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi tambah sebesar sebesar Rp30.168.896.587 atas pencatatan dari Neraca ke CALK pada PT Adaro Indonesia karena telah diterima PNBPN penjualan lelang atas aset BMN dengan nomor NTPN 12B9255DFA1004B9 tanggal 5 Desember 2024, namun SK Penghapusannya belum terbit;
 - Koreksi tambah pada PT Berau Coal sebesar IDR2.322.773.743 berupa Tanah sesuai Koreksi Pencatatan Berupa Kapitalisasi Hasil Penelitian Administrasi dan Fisik yang dituangkan pada BA Nomor 521.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 4 Oktober 2024, merupakan kapitalisasi BMN atas tanah dengan tahun perolehan dibawah tahun 2010 dengan saldo awal sebesar Rp3.116.821.864,50 atas 87 (delapan puluh tujuh) line item yang berada di area Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT Berau Coal;

- Koreksi tambah dari Neraca ke CALK pada PT Multi Harapan Utama sebesar Rp44.511.572.501,00 karena telah diterima PNPB atas penjualan lelang aset tersebut senilai Rp1.653.750.000,00 sesuai NTPN AC17C48VVF2FADCO tanggal 5 Agustus 2024, saat ini telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor 962.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 1 November 2024 dan telah dilakukan penghapusan pada CALK;
 - Koreksi tambah dari Neraca ke CALK pada PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp349.964.233.408,00 karena telah diterima PNPB atas penjualan lelang aset tersebut sebesar Rp16.165.135.000,00 sesuai NTPN 144C63CIFKDFIAO5 tanggal 18 Juli 2024, saat ini telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor 1087.K/BN.07/SJN.A/2024 tanggal 29 November 2024 dan telah dilakukan penghapusan pada CALK;
 - Koreksi tambah pada Neraca ke CALK PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp443.971.000,00 karena telah diterima PNPB atas penjualan lelang aset tersebut sebesar Rp31.677.000 sesuai NTPN 0C67955DF9065U1N tanggal 17 September 2024, saat ini telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor 1137.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 17 Desember 2024 dan telah dilakukan penghapusan pada CALK;
 - Koreksi tambah dari Neraca ke CALK pada PT Arutmin Indonesia sebesar Rp14.817.350.088 karena telah diterima PNPB atas penjualan lelang aset tersebut sebesar Rp4.190.883.000 sesuai NTPN 144C63CIFKDFIAO5 tanggal 18 Juli 2024, saat ini telah terbit SK Penghapusan dengan Nomor 1011.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 14 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara pada PT Arutmin Indonesia di Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dilakukan penghapusan pada CALK;
 - Koreksi tambah pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp92.159.543,00 dikarenakan kesalahan perhitungan proporsi nilai pembebasan tanah yang terkait dengan koridor Jalan Pengganti Permanen ruas Sangatta – Simpang Perdau (SPRD) dan bidang lainnya diluar koridor Jalan Pengganti Permanen ruas SPRD sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor 531.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 7 Oktober 2024.
- 5) Koreksi kurang sebesar Rp43.757.784.171 dengan rincian sebagai berikut:
- Koreksi kurang BMN sebesar Rp5.439.595.607,00 karena Reklas dari CALK ke Neraca atas BMN Tanah PT Berau Coal hasil inventarisasi dan penilaian yang didasarkan pada Berita Acara Inventarisasi nomor 481.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 20 November 2024;
 - Koreksi kurang BMN sebesar Rp341.439.700,00 karena Reklas dari CALK ke Neraca atas BMN Non Tanah PT Tanito Harum hasil inventarisasi dan penilaian sesuai Berita Acara Inventarisasi (BAI) nomor 492.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 29 November 2024;
 - Koreksi kurang BMN sebesar Rp6.693.619.079,00 karena Reklas dari CALK ke Neraca atas BMN Tanah PT Kaltim Prima Coal hasil inventarisasi dan penilaian yang didasarkan pada Berita Acara Inventarisasi nomor 497.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 5 Desember 2024;
 - Koreksi kurang sebesar Rp31.283.129.785,00 PT Kaltim Prima Coal atas bidang tanah yang terkait dengan koridor Jalan Pengganti Permanen Ruas Sangatta – Simpang Perdau (SPRD) dan bidang lainnya diluar koridor tersebut namun pembebasannya dilakukan secara bersamaan, dengan tahun perolehan 2011 s.d 2023 sesuai Berita

Acara Penelitian Administrasi dan Dokumen Pendukung Nomor 73.BA/SDB.K/V/2024 tanggal 15 Mei 2024.

Sehingga saldo akhir BMN yang disajikan dengan IDR pada CALK per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp31.085.800.041

H. Aset KKKS

KKKS PBMN

1. ASET KKKS PADA PPBMN YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA

a. Harta Benda Modal perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP)

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
123,694.31	795,249.72	123,694.31	795,249.72

- Saldo awal merupakan aset HBM yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2023 (*Audited*).
- Mutasi tambah sebesar USD795,249.72 berasal dari alih terima aset HBM Eks KKKS Eni Bukat Ltd senilai USD137,431.57 dan KKKS Repsol Andaman BV USD657,818.15.
- Mutasi Kurang sebesar USD123,694.31 berasal dari penjualan BMN Eks KKKS Husky Anugerah Ltd senilai USD107,194.31 dan KKKS Star Energy Sentosa USD16,500.00 yang juga telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Penghapusan.

b. Harta Benda Inventaris (HBI) perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP)

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut:

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
6,667.62	-	6,667.62	-

Penjelasan atas mutasi CALK HBI adalah sebagai berikut

- Saldo awal merupakan aset HBI yang telah dilaporkan dalam CaLK LKPP Tahun 2023 (*Audited*).
- Mutasi kurang sebesar USD6,667.62 berasal dari penjualan BMN Eks KKKS Husky Anugerah Ltd yang juga telah ditindaklanjuti dengan penerbitan SK Penghapusan.

KKKS BPMA

2. ASET KKKS PADA BPMA YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2024 tersebut diatas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS per 31 Desember 2024 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset Tanah

Saldo Awal 31 Desember 2023	38.319.948.531
Mutasi Tambah:	-
Mutasi Kurang:	11.838.750
koreksi Hasil IP	11.838.750
Saldo 30 September 2024	38.308.109.781

b. Harta Benda Modal (HBM)**1) Aset sumur yang tidak digunakan**

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di-plug and abandoned. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini disajikan secara off-balance-sheet dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012.

Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2023 adalah senilai USD10,321,967.00 pada KKKS PHE NSB dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Sumur yang Tidak Digunakan

Jumlah KKKS	Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
1	-	10,321,967	-	10,321,967

Mutasi tambah sebesar USD10,321,967 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2024 adalah senilai USD6,056,498 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
-	6,056,498	-	6,056,498

Mutasi tambah sebesar USD6,056,498 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB

3) Aset Subsequence Expenditure (SE)**Mutasi Aset HBM Berupa Aset SE**

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
-	104,296,313	-	104,296,313

Mutasi tambah sebesar USD104,296,313 berasal dari transfer masuk saldo awal UAKPA-PB.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang dilaporkan BPMA pada 31 Desember 2024.

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh SKK Migas pada 31 Desember 2024 serta yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) sebagai berikut:

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
-	292,363,084.23	-	292,363,084.23

Mutasi tambah aset terdiri dari data aset yang tersaji pada CaLK Kertas Kerja perhitungan aset.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas dan belum dilaporkan mutasi penghapusannya oleh KKKS sebagai berikut.

Mutasi Aset HBM Berupa Aset Dalam Proses Penghapusan

Saldo Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
-	1,381,795	-	1,381,795

Mutasi tambah sebesar USD1,381,795 berasal dari penghapusan aset KKKS Eks. PHE NSB.

6) Aset Harta Benda Inventaris

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan oleh BPMA pada laporan 31 Desember 2023 serta belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP).

Mutasi HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP

Nilai Perolehan Awal (USD)	Mutasi Tambah (USD)	Mutasi Kurang (USD)	Saldo Akhir (USD)
45,921.30	-	-	45,921.30

KKKS SKK Migas**3. ASET KKKS PADA SKK MIGAS YANG TIDAK DISAJIKAN PADA NERACA**

Selain aset KKKS yang disajikan pada Neraca LKBUN 31 Desember 2024 tersebut di atas, terdapat aset KKKS yang tidak disajikan dalam Neraca LKBUN TK yang Berasal dari KKKS 31 Desember 2024 karena tidak memenuhi kriteria-kriteria penyajian di neraca dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Aset Tanah

Penjelasan atas mutasi CaLK Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 31 Desember 2023	11.862.259.593.355,30
Mutasi Tambah:	7.890.876.779,77
Koreksi Tambah Sertifikasi/hasil revaluasi	9.572.062,50
Alih Terima	1.212.009.486,31
Pengadaan	1.381.249.820,00
Koreksi Pencatatan	628.739.000,00
Koreksi Tambah Hasil IP	4.659.306.410,96
Mutasi Kurang:	39.965.915.161,65
Koreksi Pencatatan	38.753.905.675,34
Alih Serah	1.212.009.486,31
Saldo Akhir 31 Desember 2024	11.830.184.554.973,50

- 1) Saldo awal yang disajikan sebesar Rp11.862.259.593.355 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 Audited.
- 2) Mutasi tambah Tanah sebesar Rp7.890.876.779,77 terdiri dari:
 - a. Koreksi Tambah Sertifikasi/hasil revaluasi sebesar Rp9.572.062,50 pada KKKS Medco E&P Grissik disebabkan pembenahan catatan dan pemutakhiran data sertifikasi.
 - b. Alih Terima sebesar Rp1.228.278.486,31 merupakan transaksi penyerahan Tanah yang berasal dari KKKS Jadestone Energy (Ogan Komering) kepada KKKS Alih Kelola PT. PHE Ogan Komering sehubungan dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama.
 - c. Pengadaan pada KKKS Exxon Mobil Cepu Ltd. (JTB), Petrogas Basin Ltd dan Medco CBM Sekayu sebesar Rp1.381.249.820.
 - d. Koreksi Pencatatan pada KKKS Seleraya Merangin Dua sebesar Rp.612.470.000.
 - e. Koreksi Tambah Hasil IP pada KKKS PT Pertamina Hulu Rokan sebesar Rp 4.659.306.410,96 berdasarkan Laporan penilaian nomor LAP-0029/1/PRO-1/WKN.03/01.01.01/2022 tanggal 21 Oktober 2022 atas tanah PT Pertamina Hulu Rokan pada line 8404 dan 8405 diketahui pada bagian tengah tanah line tersebut digunakan sebagai jalan umum atau jalan nasional.
- 3) Mutasi kurang Tanah Rp39.965.915.161,65 terdiri dari:
 - a. Koreksi pencatatan nilai perolehan Tanah sebesar Rp38.753.905.675 pada KKKS Medco E&P Grissik Ltd., PT Pertamina Hulu Rokan, dan PT Seleraya Merangin Dua.
 - b. Alih Serah sebesar Rp1.212.009.486 yang berasal dari KKKS Jadestone Energy (Ogan Komering) kepada KKKS Alih Kelola PT. PHE Ogan Komering sehubungan dengan berakhirnya Kontrak Kerja Sama.

b. Aset Harta Benda Modal

1) Aset sumur yang tidak digunakan

Terdapat 2 kategori aset sumur yaitu sumur yang masih digunakan dalam operasi dan sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi yang sudah di plug and abandoned. Sumur yang sudah tidak digunakan dalam operasi ini di off-balance dan disajikan berdasarkan hasil IP yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 s.d 2012. Total aset sumur yang tidak digunakan per 31 Desember 2024 adalah senilai USD27,399,004.91.

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
28,868,861.00	18,078,996.00	19.548,852.09	27,399,004.91

Terdapat mutasi tambah atas aset HBM Berupa Sumur yang Tidak Digunakan selama tahun 2024 sebesar USD18,078,996.00 atas 3 KKKS dan Mutasi kurang sebesar USD19,548,852.00 atas 7 KKKS.

2) Aset Kondisi Rusak Berat

Aset kondisi rusak berat merupakan aset yang sudah tidak digunakan dalam kegiatan operasi hulu migas. Total aset kondisi rusak berat per 31 Desember 2024 adalah sebesar USD185,729,166.00, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
41,487,768	160,611,305	16,369,907	185,729,166

Terdapat mutasi kurang atas aset HBM Berupa Aset Kondisi Rusak Berat sebesar USD16,369,907.00 atas 15 KKKS dan mutasi tambah sebesar USD160,611,305.00 atas 10 KKKS.

3) Aset Subsequence Expenditure (SE)

Aset Subsequence Expenditure (SE) berasal dari kapitalisasi SE yang direklasifikasi ke neraca. Total Aset Subsequence Expenditure per 31 Desember 2024 adalah senilai USD606,220,479.50 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
489,707,715.70	164,004,611.00	47,491,847.20	606,220,479.50

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset SE adalah sebagai berikut Mutasi tambah sebesar USD164,004,611.00 merupakan SE yang aset induknya disajikan di CaLK pada 3 KKKS dan mutasi kurang sebesar USD47,491,847.00 pada 6 KKKS.

4) Aset Perolehan sampai dengan Tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) Posisi Per 31 Desember 2024

Terdapat aset dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) posisi per 31 Desember 2024 dengan total nilai USD5,047,253,919.16 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
5,827,210,645.16	58,492,514	838,449,240	5,047,253,919.16

Penjelasan atas mutasi Aset HBM Berupa Aset Belum di IP adalah sebagai berikut:

- Saldo awal yang disajikan sebesar USD5,827,086,951.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 Audited.
- Mutasi tambah sebesar USD58,492,514.00 merupakan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang baru dilaporkan KKKS dan atau koreksi pembenahan pada 4 KKKS

- c. Mutasi Kurang aset sebesar USD838,449,240.00 berasal dari aset yang telah dilakukan Inventarisasi dan Penilaian pada tahun 2023 - 2024 dan direklasifikasi ke neraca pada 39 KKKS.

5) Aset dalam proses penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM. Pada

31 Desember 2024 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD370,197,336.18 dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
155,457,193.00	237,786,200.18	23,046,057.00	370,197,336.18

- a) Saldo awal yang disajikan sebesar USD155,457,193 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 Audited.
- b) Mutasi tambah sebesar USD237,786,200.18 merupakan reklasifikasi aset yang di off-balance ke CaLK dikarenakan sudah terjual lelang/dihibahkan/dialihstatuskan ke pihak ketiga pada 31 Desember 2021 namun belum diterbitkan Surat Hapus Buku yang diterbitkan oleh SKK Migas kepada KKKS yang bersangkutan atau kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM pada 10 KKKS.
- c) Mutasi kurang aset sebesar USD23,046,057.00 merupakan penghapusan BMN Hulu Migas yang telah terbit Surat Hapus Buku dari SKK Migas pada 10 KKKS.

6) Aset Tidak Ditemukan

Aset tidak ditemukan merupakan aset – aset milik KKKS PT PHR yang tidak ditemukan secara fisik saat proses pengakhiran wilayah kerja berdasarkan Kepmen ESDM no. 557.K/BN.03/SJN.A/2021 tanggal 8 Agustus 2021 tentang Penggunaan BMN HM Eks KKKS PT Chevron Pacific Indonesia kepada KKKS PT PHR.

Pada tahun 2024 rincian aset tidak ditemukan adalah sebagai berikut:

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
45,879,019.00	25,982,000.79	14,224,072.00	57,636,946.79

Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal yang disajikan sebesar USD45,879,019.00 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 Audited.
- b. Terdapat mutasi tambah sebesar USD25,982,000.79 pada tahun 2024 atas KKKS Petrochina Intl Jabung.
- c. Terdapat mutase kurang sebesar USD14,224,072.00 pada tahun 2024 atas KKKS PT PHR

c. Aset Harta Benda Inventaris**1) Aset Perolehan Sampai dengan Tahun 2010 yang Belum Dilakukan Inventarisasi dan Penilaian**

Terdapat aset HBI dengan perolehan sampai dengan tahun 2010 yang belum dilakukan Inventarisasi dan Penilaian (IP) posisi per 31 Desember 2024 sebesar USD4,157,875.85.

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
4,174,813.85	5,263.00	22,201.00	4,157,875.85

Penjelasan atas mutasi Aset HBI perolehan sebelum tahun 2010 yang belum dilakukan IP adalah sebagai berikut:

- Saldo awal yang disajikan sebesar USD4,174,813.85 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 *Audited*.
- Terdapat mutasi tambah sebesar USD5,263.00 pada tahun 2024 atas 2 KKKS.
- Terdapat mutasi kurang sebesar USD22,201.00 pada tahun 2024 atas 8 KKKS, dimana salah satunya KKKS Premier Oil Natuna Sea B.V. sebesar USD1,523.00 karena penghapusan sesuai dengan Salinan Surat Keputusan Menteri ESDM No. 1158.K/BN.09/SJN.A/2024 tanggal 20 Desember 2024.

2) Aset Dalam Proses Penghapusan

Terdapat aset yang sudah terjual, namun belum dapat dihapuskan karena belum diperoleh surat hapus bukunya dari SKK Migas atau surat keputusan penghapusan Kementerian ESDM dan terdapat aset dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusan oleh SKK Migas kepada Kementerian ESDM,

Pada 31 Desember 2024 nilai aset dalam proses penghapusan adalah sebesar USD27,197.87, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 31 Desember 2024
27,198	71,801	-	98,999

Penjelasan atas mutasi Aset Dalam Proses Penghapusan adalah sebagai berikut:

- Saldo awal yang disajikan sebesar USD27,197.87 merupakan saldo BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 *Audited*.
- Terdapat mutasi tambah sebesar USD71,801.00 pada tahun 2024 atas 6 KKKS.

3) Aset tidak Ditemukan

Pada Tahun 2024, terdapat aset tidak ditemukan sebagai berikut:

(Dalam USD)

Saldo Awal 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir 30 September 2024
27,522	-	-	27,522

Penjelasan atas mutasi Aset Tidak Ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Saldo awal yang disajikan sebesar USD27.522,08 merupakan saldo Laporan Keuangan BMN Hulu Migas UAKPA BUN TK Tahun 2023 Audited.
- b. Tidak terdapat mutasi tambah pada tahun 2024.

d. Pengungkapan Lainnya

1) Penjelasan Atas Pengelolaan Dan Pengamanan Bmn Berupa Tanah Di Wilayah Kerja Rokan Oleh KKKS PHR (Alih Kelola Eks PT CPI) Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

PPBMN bersama dengan DJKN, SKK Migas dan KKKS melakukan pengelolaan BMN Tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, selain itu dalam rangka pengamanan BMN Tanah khususnya Eks KKKS PT CPI, telah dilakukan pengamanan secara administratif melalui pencatatan dan sertifikasi BMN Tanah Hulu migas yang saat ini terus berlangsung. Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, diketahui bahwa masih terdapat BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain dengan rincian sebagai berikut:

Kasus Non Litigasi

No	Kasus	Tahun	Status Update
1	Area 361 Ha (Murini)	1994	DJKN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Pemanfaatan BMN untuk periode 2019, Murini sampai sekarang belum merespon, BMN masih dikuasai secara fisik oleh Murini.
2	Ivomas Tunggal	1994	Status terakhir hearing di DPRD Riau pada tahun 2019 terkait laporan kelompok orang yg mengaku sbg masy adat, tidak ada resolusi apapun dlm hearing ini, status quo sampai sekarang.
3	Kelompok Masyarakat Pemilik Tanah (KMPT- Bangko Jaya)	2004	Status terakhir kelompok tsb mengirimkan surat ke Kemen BUMN di 2019, tidak ada perkembangan lebih lanjut.
4	Kelompok Sawit Permai (KTSP)	2004	status terakhir mereka kirim surat ke Menteri BUMN dan Dirut Pertamina di tahun 2019, CPI sekali diundang meeting oleh Tim Kawal BMN Kemen BUMN, status penanganan lebih lanjut tidak ada lagi sejak itu.
5	Candi Pemburu Bypass	2001	update terakhir di 2017 ybs melakukan aksi pemblokiran lokasi, CPI melaporkan ke polres rohil, dan belum ada update hingga kini.
6	PT. INTERNATIONAL PRIMA COAL (PT.IPC)	2011	a) Tahap diskusi internal dan <i>mapping</i> bersama antara Cue Kalimantan dan PT.IPC; b) PT.IPC menyampaikan Surat Permohonan Penggunaan Lahan untuk kegiatan penambangan.

Kasus Litigasi

No	Nama/Lokasi	No. Perkara PN/PT/MA	Status Perkara	Keterangan
1	Sarbini – PN Dumai	16/Pdt.G/2019/ PN Dum	Putusan PN (Inkrah)	putusan PN Dumai menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Inkrah)
2	Yayasan Menara -PN Dumai	44/Pdt.G/2019/ PN Dum 245/PDT/2020/ PT PBR	Putusan PN (Inkrah)	Putusan PT Pekanbaru (banding) menguatkan putusan PN Dumai yg menolak gugatan penggugat utk seluruhnya (Inkrah)
3	Buyung Nahar – PN Bengkalis	0/Pdt.G/2020/P N Bls	Proses Kasasi PN dan PT menang	Menunggu Putusan MA atas Kasasi yg diajukan Buyung Nahar. Di tingkat PN dan PT menolak gugatan penggugat utk seluruhnya.
4	Yulizar – PN Bengkalis	31/Pdt.G/2020/ PN Bls	Putusan PT (Inkrah) PN menang	Putusan Banding yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima.
5	Mastison Isa – PN Pekanbaru	194/Pdt.G/2019 /PN Pbr 152/PDT/2020/ PT PBR	Putusan Kasasi (Inkrah) PN, PT dan Kasasi menang	majelis hakim Kasasi mahkamah agung menguatkan putusan PT dan PN yg menolak gugatan penggugat utk seluruhnya (Inkrah).
6	Syamsuri (Rantau Bais) – PN Rokan Hilir)	10/PDT.PLW/20 15/PN RHL	Putusan Kasasi MA (Belum menerima Relaas Pemberitahuan Putusan)	Putusan Kasasi MA menguatkan putusan PT dan PN yang menyatakan gugatan penggugat syamsuri tidak dapat diterima.

Sebagai salah satu bentuk preventif dalam rangka mitigasi dan pemantauan risiko terhadap BMN Tanah yang bersengketa dengan pihak lain, Kementerian ESDM telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang dan SKK Migas selaku Kuasa Pengguna Barang melalui surat:

1. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor 669/90/SJA.4/2020, tanggal 14 September 2020, hal Pelaporan Sertifikasi dan Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
2. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN kepada Deputi Dukungan Bisnis, SKK Migas Nomor T-135/BN.05/SJA.4/2022, tanggal 22 Februari 2022, hal Penyampaian Bukti Kepemilikan BMN Hulu Migas berupa Tanah;
3. Surat Kepala Pusat Pengelolaan BMN yang ditujukan kepada Direktur PNKNL, Kementerian Keuangan Nomor T-145/BN.10/SJA.4/2022 tanggal 15 Februari 2022, hal Permintaan Pendapat/Masukan Atas Rancangan Roadmap Sertifikasi BMN Hulu Migas Berupa Tanah;
4. Surat Sekretaris Jenderal KESDM kepada Kepala SKK Migas Nomor T-540/BN.05/SJN.A/2021, tanggal 28 April 2021, hal Penyerahan Barang Milik Negara pada WK Rokan.

2) Pengelolaan Dan Pengamanan Bmn Berupa Tanah Pada Kkks Pertamina Hulu Mahakam Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

Sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 1 PMK 140/PMK.06/2020, bahwa Kontraktor, Kuasa Pengguna Barang, Pengguna barang dan Pengelola Barang wajib melakukan Pengaman BMN Hulu Migas yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masing-masing dan sesuai ketentuan pasal 77 ayat 2, Pengamanan BMN Hulu Migas oleh Kontraktor dilakukan sampai dengan Terjadinya penyerahan atau peralihan kepada Pemerintah atau Pihak Lain dan/atau selesainya pelaksanaan pemusnahan yang dibuktikan dengan suatu berita acara. Sehubungan dengan hasil pemeriksaan Tim BPK RI, masih terdapat 3 bidang tanah dalam sengketa dengan pihak lain, yaitu:

1. Sengketa atas BMN Tanah Handil berlokasi di Kelurahan Muara Jawa Ulu seluas 40.800 m² perkara nomor 73/Pdt.G/2019/PN.Trg dengan penggugat a.n. Ramli dkk, 5 (orang) dan tergugat adalah PT PHM, PT Total Fina Elf E&P Balikpapan, BPN Kab. Kutai Kartanegara dan Kelurahan Muara Jawa Ulu. Status terakhir atas perkara ini telah diputus sampai dengan tingkat Banding di bawah perkara No. 79/PDT/2021/PT SMR, dengan amar gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Sengketa atas BMN Tanah Muara Kembang Perkara 45/Pdt.G/2020/PN.Trg, dengan penggugat a.n. M.Nursidiq dkk (4 orang) dan tergugat adalah PT PHM dan SKK Migas, gugatan terkait dengan klaim atas tanah di wilayah Muara Kembang. Status terakhir atas perkara ini gugatan ini telah dicabut oleh Para Penggugat.

3) Permasalahan Hukum BMN Huku Migas

Terdapat 7 permasalahan hukum BMN Hulu Migas sampai dengan 31 Desember 2024 yang terbatas pada:

- Permasalahan hukum dimana SKK Migas menjadi pihak dalam perkara; dan/atau
- Permasalahan hukum yang dilaporkan oleh KKKS

No	Jenis Aset (HBM, HBI, MP, Tanah)	Deskripsi Aset	Permasalahan Hukum	Status Penanganan Permasalahan Hukum
1	Tanah	tanah seluas 7.500 M ² di Desa Malawili	Gugatan Kepemilikan Tanah dengan pihak-pihak: Penggugat : Hasyir Saputra Tergugat I : PT Petrogas Basin Ltd Tergugat II : SKK Migas Tergugat III : Bupati Sorong Tergugat IV : PetroChina International Bermuda Ltd	Majelis Hakim tingkat Kasasi telah memutus perkara pada 27 Maret 2024 dengan amar pada pokoknya: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah objek sengketa seluas 7.500 M ² adalah sah milik Penggugat; 3. Menyatakan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Tanah No.01/KPTS/PPT-SRG/2001 tanggal 21 Mei 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik; 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp26.475.000.000,00
2	Tanah	Tanah seluas 120.000 M ² yang di dalamnya terdapat Sumur Bor	Gugatan Kepemilikan Tanah dengan pihak-pihak: Penggugat : Mesak Moifilit	Majelis Hakim tingkat Kasasi telah memutus perkara pada 29 April 2024 dengan amar pada pokoknya: 1. Menyatakan menurut hukum bahwa Keret Moifilit telah mengalami kerugian secara materiil sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat yang melakukan

No	Jenis Aset (HBM, HBI, MP, Tanah)	Deskripsi Aset	Permasalahan Hukum	Status Penanganan Permasalahan Hukum
		Echo 1, Echo 2, Echo 3 dan Echo 4	Tergugat I : PT Pertamina (Persero) Tergugat II : PT Pertamina EP	eksplorasi serta eksploitasi serta menguasai Tanah Objek Sengketa a quo seluas 12 Ha atau + 120.000 M2, dari tahun 1975 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluh tujuh) tahun, karena Keret Moifilit telah kehilangan kesempatan selama kurun waktu tersebut, untuk memperoleh pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp. 5.146.500.000,00; 2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah Objek Sengketa a quo adalah termasuk daerah penghasil minyak bumi yang disedot dan/atau dikelola oleh Para Tergugat sejak tahun 1975 sampai dengan saat ini atau selama 47 (empat puluh tujuh) tahun lamanya, maka adalah patut dan wajar bagi Keret Moifilit untuk memperoleh kompensasi atas perolehan hasil minyak bumi sebesar 3% dari total rata-rata hasil produksi dalam rupiah sejak tahun 1975 sampai dengan saat ini, yaitu sebesar Rp 47.851.500.000,00; 3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Penggugat uang sejumlah Rp 47.851.500.000,-;
3	HBM/HBI	Pipa	Klaim oleh Lembaga Masyarakat Adat Papua terhadap pipa-pipa yang terletak di gudang INPEX, SAKA, PT Pertamina EONWJ, PT Minarak Lapindo, dan Husky CNOOC Madura Ltd	Terhadap Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, saat ini sedang dilakukan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (<i>Derden Verzet</i>) oleh SKK Migas di Pengadilan Negeri Cibinong
4	Tanah	Tol Dumai	Perwalanan Eksekusi oleh warga	dalam tahap pengadilan Negeri Bengkalis
5	Tanah	tanah dengan luas + 74.340 M2 tanah dengan luas + 357.840 M2 tanah dengan luas + 795.600 M2	Gugatan Kepemilikan Tanah Penggugat : Adie Prajnowira Penggugat I : Andi Wilyanto Penggugat II : Hendry Tergugat : PT Imbang Tata Alam Turut Tergugat I : PT Pertamina (Persero) Turut Tergugat II : SKK Migas	dalam tahap pengadilan Tinggi Pekanbaru
6	Tanah	Tanah dengan luas + 600 Ha	Pembantah : Arwansyah (Ketua Perkumpulan Tani Rantau Bais Terpadu/TRBT) Dkk Terbantah : SKK Migas	Dalam tahap pengadilan Negeri Dumai
7	Tanah	Tanah dengan luas 98.260m2	Penggugat : SARBINI Tergugat : 1. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) – Tergugat I, DII.	Dalam tahap pengadilan Negeri Dumai

I. CATATAN PENTING LAINNYA PENGANTIAN BIAYA DAN MARGIN WAJAR ATAS INVESTASI PEMERINTAH DALAM RANGKA PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**PENGANTIAN BIAYA DAN MARGIN YANG WAJAR**

Pengantian biaya dan margin IP PEN merupakan bagian dari program PC PEN kluster Pembiayaan Korporasi. Realisasi penyaluran pengantian biaya dan margin IP PEN selama Tahun 2024 sebesar Rp6.985.849.410 dari alokasi DIPA sebesar Rp14.484.790.000 dengan capaian Rincian Output adalah 48,23%. Realisasi tersebut merupakan realisasi penyaluran pengantian biaya dan margin periode Oktober 2023 sebesar Rp3.494.341.644 sesuai hasil reu BP KP nomor PE.12.03/S-144/D1/01/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan April 2024 sesuai hasil reu BP KP yang disampaikan melalui surat nomor PE.12.03/S-490/D1/01/2024 tanggal 13 Agustus 2024 dengan nilai sebesar Rp2.529.672.438 serta Oktober 2024 sesuai hasil reu BP KP yang disampaikan melalui surat nomor PE.12.03/S-850/D1/01/2024 tanggal 18 Desember 2024 dengan nilai sebesar Rp961.835.328.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL BUN

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/(defisit) operasional dari suatu entitas pelaporan.

Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak, yang meliputi Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya, Pendapatan Hibah, dan Pendapatan Penyesuaian. Sedangkan Beban Operasional terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Transfer, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih dan Beban Lain-lain.

Terdapat defisit pada Laporan Operasional pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.584.452.178.371.533 dan Rp1.463.681.266.458.881. Defisit pada Laporan Operasional pada tahun 2024 mengalami kenaikan defisit sebesar Rp120.770.911.912.652 atau sebesar 8,25 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Defisit LO selama Tahun 2024 sebesar Rp1.584.452.178.371.533 tersebut berasal dari defisit kegiatan operasional dan surplus kegiatan non operasional. Adapun defisit kegiatan operasional pada Tahun 2024 sebesar Rp1.604.173.509.650.367 yang terdiri dari Pendapatan Operasional sebesar Rp579.642.938.469.245 dan Beban Operasional sebesar Rp2.183.816.448.119.612.

Sedangkan dari kegiatan non operasional pada tahun 2024 mengalami surplus sebesar Rp19.721.331.278.834 yang merupakan rekapitulasi dari defisit penjualan aset non lancar sebesar Rp684.927.964.114, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang sebesar Rp129.960.500.000 dan surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp20.536.219.742.948.

E.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

E.2.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp579.642.938.469.245 dan Rp565.945.322.925.559. Pendapatan Operasional pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp13.697.615.543.686 atau naik 2,42 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Pendapatan Operasional terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Pendapatan Hibah seperti tersebut di bawah ini:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1.	Pendapatan Negara Bukan Pajak	535.426.617.430.135	539.048.066.196.555
2.	Pendapatan Hibah	44.216.321.039.110	26.897.256.729.004
Jumlah		579.642.938.469.245	565.945.322.925.559

Pendapatan Negara Bukan Pajak pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp535.426.617.430.135 dan Rp539.048.066.196.555. PNPB pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.621.448.766.420 atau turun 0,67 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 terutama penurunan pada Pendapatan Sumber Daya Alam. Pendapatan Negara Bukan Pajak pada tahun 2024

sebesar Rp535.426.617.430.135 terdiri dari Pendapatan Sumber Daya Alam, Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, dan PNBP Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1.	Pendapatan Sumber Daya Alam	139.138.205.840.997	145.845.627.194.635
2.	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	2.254.798.245	4.529.734
3.	PNBP Lainnya	396.286.156.790.893	393.202.434.472.186
Jumlah		535.426.617.430.135	539.048.066.196.555

Pendapatan Hibah pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp44.216.321.039.110 dan Rp26.897.256.729.004. Pendapatan Hibah pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.319.064.310.106 atau naik 64,39 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023.

E.2.1.1. Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp139.138.205.840.997 dan Rp145.845.627.194.635. Pendapatan SDA pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.707.421.353.638 atau turun 4,60 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh terkontraksinya realisasi ICP dan *lifting* minyak pada 2024.

Pendapatan Sumber Daya Alam terdiri dari PNBP Sektor Migas dan Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah atas Pertambangan Panas Bumi. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas piutang migas yang diterbitkan oleh SKK Migas. Sementara itu, Pendapatan LO-Setoran Bagian Pemerintah (SBP) Pertambangan Panas Bumi diakui pada saat selesainya perhitungan hak pemerintah atas Bagian Pendapatan Panas Bumi yaitu pada saat selesainya penyusunan kertas kerja perhitungan PNBP sebagai dasar pemindahbukuan PNBP panas bumi dan/atau pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran setoran bagian pemerintah. Adapun Pendapatan Sumber Daya Alam pada tahun 2024 sebesar Rp139.138.205.840.997 merupakan PNBP dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1.	Pendapatan SDA Minyak dan Gas	136.183.556.431.541	142.259.466.286.081
2.	Pendapatan SDA Panas Bumi	2.954.649.409.456	3.586.160.908.554
Jumlah		139.138.205.840.997	145.845.627.194.635

A. Pendapatan SDA Minyak dan Gas Bumi

Pendapatan SDA Minyak dan Gas pada tahun 2024 sebesar Rp136.183.556.431.541 mengalami penurunan sebesar Rp6.075.909.854.540 atau turun 4,27 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp142.259.466.286.081.

Pendapatan Operasional sektor hulu migas yang selanjutnya disebut dengan Pendapatan LO sektor hulu migas merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan LO sektor hulu migas diakui pada saat diterimanya tagihan atas hak negara dari kegiatan usaha hulu migas yang diterbitkan oleh SKK Migas dalam periode Januari s.d. Desember 2024. Pendapatan LO yang berasal dari PNBP SDA Migas (Pendapatan Minyak Bumi dan Pendapatan Gas Bumi) dikoreksi apabila terdapat tagihan PBB Migas dari Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini dilakukan karena PBB Migas di satu sisi merupakan kewajiban Pemerintah sektor hulu migas yang dibayarkan oleh DJA (sebagai pengurang PNBP SDA Migas), namun di sisi lain merupakan pendapatan pajak yang dilaporkan oleh DJP. Apabila tidak dilakukan koreksi, penyajian total pendapatan negara dalam LKPP

akan mengalami distorsi, karena menyajikan angka PBB Migas sebanyak dua kali.

Pendapatan SDA Minyak dan Gas dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1.	Pendapatan Minyak Bumi	99.721.484.550.273	105.109.342.931.994
2.	Pendapatan Gas Bumi	36.462.071.881.268	37.150.123.354.087
Jumlah		136.183.556.431.541	142.259.466.286.081

Pendapatan Minyak Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA minyak bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual akan menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Minyak Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dan BPMA dalam laporan pengiriman minyak bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Minyak Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi, sehingga Pendapatan Minyak Bumi-LO tahun 2024 adalah sebesar **Rp99.721.484.550.273**, yaitu berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA minyak bumi sesuai Kontrak Kerja Sama dikurangi dengan PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Minyak Bumi Rp6.459.486.383.180.

Pendapatan Gas Bumi-LO merupakan nilai *lifting* SDA gas bumi yang menjadi hak pemerintah, yang secara akrual menambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Pendapatan Gas Bumi-LO diakui pada saat ditetapkannya hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama oleh SKK Migas dan BPMA dalam laporan pengiriman gas bumi dan/atau surat tagihan. Pendapatan Gas Bumi-LO akan dikoreksi pada saat adanya pengakuan kewajiban jangka pendek yang berasal dari PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi, sehingga Pendapatan Gas Bumi-LO tahun 2024 adalah sebesar **Rp36.462.071.881.268**, yaitu berasal dari nilai hak negara dari hasil penjualan dan/atau bagi hasil SDA gas bumi sesuai Kontrak Kerja Sama, dikurangi PBB Migas yang dialokasikan sebagai pengurang Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp1.918.379.394.987.

B. Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO)

Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi (Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO) merupakan hak pemerintah yang secara akrual diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Sesuai dengan PMK Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi, Pendapatan PNBPN Panas Bumi LO diakui berdasarkan asas bruto yakni diakui:

- pada saat timbulnya hak atas bagian pemerintah yang harus dibayarkan oleh Pengusaha; dan/atau
- pada saat diterbitkannya surat tagihan atas kekurangan pembayaran SBP; dan/atau
- pada saat dibayarkan Setoran Bagian Pemerintah oleh Pengusaha.

Selain itu, sesuai pengaturan PMK di atas, pengeluaran terkait dengan penyelesaian kewajiban pemerintah akan diakui sebagai:

- beban, yaitu pengeluaran terkait penyelesaian *reimbursement* PPN dan penggantian bonus produksi, atau;
- pengurang pendapatan laporan operasional, yaitu terkait penyelesaian pembayaran PBB panas bumi.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dengan demikian perhitungan pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO tahun 2024 diperoleh dari SBP yang diterima triwulanan di rekening panas bumi dikurangkan dengan jumlah pembayaran PBB panas bumi, sebagai berikut:

PNBP Panas Bumi-LO = Setoran bagian pemerintah – PBB panas bumi

Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO (Pendapatan LO) periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024 sebesar **Rp2.954.649.409.456** menurun sebesar **Rp631.511.499.098** dibandingkan dari realisasi Pendapatan LO pada periode yang sama tahun 2023 sebesar **Rp3.586.160.908.554** atau turun sebesar **17,61 persen**.

Rincian realisasi Pendapatan PNBPN Panas Bumi-LO periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Uraian	Total
a	Pendapatan Setoran Bagian Pemerintah triwulanan (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	2.717.163.877.788
	1) PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang	452.379.465.653
	2) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong	168.345.762.343
	3) PT Pertamina Geothermal Energy Area Ulubelu	219.884.765.918
	4) PT Pertamina Geothermal Energy Area Lumut Balai	27.951.249.479
	5) Star Energy Geothermal Salak, Ltd	794.672.717.484
	6) Star Energy Geothermal Darajat II, Ltd	318.706.362.844
	7) Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd	629.595.413.181
	8) PT Geo Dipa Energi Area Dieng	13.135.817.302
	9) PT Geo Dipa Energi Area Patuha	92.492.323.584
b	Tagihan PBB Panas Bumi TA 2024	(447.695.185.254)
c	Pembayaran SBP TW I TA 2025 (hasil kegiatan usaha Juli s.d. September 2024)	685.180.716.922
d	Pendapatan Panas Bumi LO (a-b+c)	2.954.649.409.456

E.2.1.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan

Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp2.254.798.245** dan **Rp4.529.734** Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan merupakan pendapatan bagian laba BUMN pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) dan BA BUN Pengelola Transaksi Khusus. Pendapatan Bagian Pemerintah dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan sebesar **Rp2.254.798.245** tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp2.250.268.511** atau **49.677,72 persen** bila dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan ini terjadi pada bagian laba Setoran Lainnya. Rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan	19	-
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan	4.948.226	4.529.734
3	Setoran Lainnya	2.249.850.000	-
Jumlah		2.254.798.245	4.529.734

Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) sebesar **Rp4.948.245** merupakan pendapatan bagian laba BUMN yang berasal dari Bagian Pemerintah atas Laba BUMN dengan pencatatan metode biaya. Metode Biaya digunakan untuk penilaian Investasi Pemerintah pada PMN apabila kepemilikan atau saham milik negara sebagai Penyertaan Modal di entitas badan usaha (*investee*) kurang dari 20 persen dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan atau minoritas.

Sementara itu, Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan dari BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar Rp2.249.850.000 berasal dari setoran PNBP KND dari PT Virama Karya yang akan diselesaikan dengan pengembalian pendapatan dan disetorkan ke RKUD DKI Jakarta pada tahun 2025.

E.2.1.3. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp396.286.156.790.893 dan Rp393.202.434.472.186. PNBP Lainnya pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.083.722.318.707 atau naik 0,78 persen.

Diketahui bahwa terdapat kenaikan signifikan yang berasal pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain (999.08) dengan kenaikan sebesar Rp15.698.169.413 yang pada tahun 2024 sebesar Rp22.169.883.137 atau meningkat 242,57 persen dari 2023 sebesar Rp6.471.713.724 yang berasal dari Pendapatan Denda Lainnya pada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat dari Audit Tujuan Tertentu tentang Penyaluran Beras dan Pembayaran Tagihan OAB) ASN Tahun 2022 dan 2023 pada Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Denda lainnya diperoleh dari 8 (delapan) setoran PT POS sehubungan dengan Komitmen Pembayara Denda Atas Pekerjaan OAB Tahun 2023 Nomor: PERJ-001/999976/2024 dan Nomor: 681/Penjualan-KCUJap/ASN/0524 tanggal 13 Mei 2024.

Sementara itu, penurunan paling signifikan berasal dari BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) dengan angka penurunan sebesar Rp6.704.567.948.554 atau turun 15,57 persen yang berasal dari PNBP Pengelolaan Kas Negara yang ada pada UAPBUN Transaksi Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia.

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.01	Pengelola Utang	38.896.471.636.138	38.392.622.225.365
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	319.370.622.455.722	310.097.990.846.992
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	1.654.329.294.874	1.657.913.291.824
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa	-	-
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	8.129.695	313.054.400
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	22.169.883.137	6.471.713.724
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	36.342.555.391.327	43.047.123.339.881
Jumlah		396.286.156.790.893	393.202.434.472.186

- Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (BA BUN 999.01) pada 2024 sebesar Rp38.896.471.636.138 mengalami kenaikan sebesar Rp503.849.410.773 atau 1,31 persen dari 2023 sebesar Rp38.392.622.225.365. PNBP Lainnya tersebut merupakan Pendapatan Premium dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Berikut rincian PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelolaan Utang (999.01):

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	4.600.546.055.800	4.581.314.433.822
2	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing	44.403.755.000	44.282.432.000
3	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)	1.273.420.559.600	2.053.131.628.273
4	Pendapatan Anggaran lain-lain:	32.978.101.265.738	31.713.893.731.270
	- SBN	32.978.101.265.738	31.713.893.731.270
	- Pinjaman	-	-
Jumlah		38.896.471.636.138	38.392.622.225.365

Realisasi Pendapatan merupakan realisasi atas Pendapatan Premium dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Pendapatan Premium merupakan amortisasi dari Penerimaan Premium atas Penerbitan SBN sampai dengan Tahun 2024.

Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Surat Berharga Negara merupakan:

- Kontribusi BI-LO sebesar Rp32.978.101.020.055. Rincian selengkapnya terkait kontribusi BI sebagaimana pada Catatan Penting Lainnya Pos LO.
- *Wire test* dari BoFA dalam rangka Penerbitan *Global Bond* sebesar Rp15.522.
- Pelaksanaan Pengujian Evaluasi Tahunan atas Sistem Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan SUN Ritel 2024 sebesar Rp148.000.
- *DRP Drill* MPN G3 sebesar Rp10.000.
- Percobaan Transfer Dalam Rangka Rencana Penerbitan Sukuk Valas Untuk Pembiayaan (*Prefunding*) Tahun 2025 Rp72.161.

Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Surat Berharga Negara Tahun 2024 meningkat dibanding Tahun 2023 disebabkan karena meningkatnya Kontribusi Bank Indonesia yang diterima oleh Pemerintah.

Selanjutnya, Pendapatan Anggaran Lain-Lain instrumen Pinjaman sebesar Rp0.

- Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi (BA BUN 999.03) sebesar **Rp319.370.622.455.722** mengalami kenaikan sebesar **Rp9.272.631.608.730** atau meningkat **2,99** persen dari 2023 sebesar **Rp310.097.990.846.992**. Peningkatan yang signifikan terjadi pada penyesuaian nilai investasi pada UAIP. Rincian Pendapatan PNBP Lainnya pada BA BUN Pengelola Investasi (999.03) adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi	317.954.581.163.773	308.607.481.035.758
2	Pendapatan Bunga Lainnya	1.279.778.210.363	1.242.329.424.567
3	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	136.263.072.585	132.719.012.880
4	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan UMKM)	-	115.461.373.787
5.	Pendapatan Anggaran Lainnya	9.000	-
Jumlah		319.370.622.455.721*	310.097.990.846.992

* Selisih (Rp1) karena akumulasi pembulatan tahun-tahun sebelumnya pada SPAN

a. Pendapatan Penyesuaian Nilai Investasi

Pendapatan penyesuaian investasi merupakan pendapatan penyesuaian nilai investasi yang berasal dari bagian pemerintah atas pendapatan operasional entitas badan usaha (*investee*) yang menambah nilai investasi pemerintah. Pendapatan Penyesuaian Investasi pada BA BUN 999.03 pada tahun 2024 dan 2023 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	KPA Kementerian BUMN (986917)	224.125.748.484.232	235.905.029.079.745
2	KPA KND DJKN (977191)	10.066.480.172.389	7.885.124.100.945
3	KPA DJPPR dit EAS (970974)	11.336.939	11.283.040
4	UAIP (999244)	83.533.577.410.117	64.688.635.973.193
5	Direktorat SMI DJPB (961671)	99.875.091.668	29.791.828.380
6	Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, modal Awal BP Tapera (987253)	49.803.033.365	54.529.660.743
7	KPA LDKPI (979015)	9.242.399.273	7.289.148.913
8	KPA Badan Bank Tanah (986392)	69.843.235.790	37.069.960.799
Jumlah		317.954.581.163.773	308.607.481.035.758

KPA Kementerian BUMN (986917)

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah **Kementerian BUMN** senilai **Rp224.125.748.484.232** merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terjadi penurunan sebesar **Rp11.779.280.595.513** atau turun **4,99** persen.

Rincian Pendapatan Penyesuaian Investasi pada satuan kerja Kementerian BUMN dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	BUMN Persero	222.733.415.320.832	232.133.739.752.565
2	BUMN Perum	1.392.333.163.400	2.420.905.208.955
3	Non BUMN (minoritas)	-	-
4	PMN Konversi Aset Non Kas		1.350.384.118.225
Jumlah		224.125.748.484.232	235.905.029.079.745

Perum mencatatkan penurunan bagian laba sebesar **Rp1.028.572.045.555** atau mengalami penurunan sebesar **42,49** persen yang sebagian besar dikontribusikan oleh Perum Bulog dikarenakan adanya kenaikan biaya bunga dari kenaikan utang bank karena arus kas operasional tidak mampu menutupi beban operasional.

Sementara Persero juga mencatatkan penurunan bagian laba pemerintah (pendapatan) dibandingkan dengan periode sebelumnya di tahun yang sama sebesar **Rp9.400.324.431.733** atau turun **4,05** persen yang sebagian besar penurunannya dikontribusikan oleh BUMN pada klaster energi dan asuransi. Hal ini dikarenakan adanya dampak pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar pada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero), penurunan penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak, peningkatan beban pokok penjualan akibat penurunan *crack spread* (margin keuntungan dari pengolahan minyak mentah) serta *impairment* Aset Kilang signifikan pada PT Pertamina (Persero), serta belum tercapainya realisasi volume penjaminan dan meningkatnya *loss ratio* Kredit Usaha Rakyat pada anak perusahaan PT BPUI (Persero).

Meskipun secara keseluruhan bagian laba pemerintah turun, terdapat beberapa perusahaan yang berkontribusi meningkatkan bagian laba pemerintah (pendapatan) antara lain:

- PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (laba naik Rp10,12 triliun) yang berasal dari kenaikan penjualan komoditas dan serap laba dari PT Freeport Indonesia;
- PT Pupuk Indonesia (Persero) (laba naik Rp2,22 triliun) yang berasal dari peningkatan volume penjualan produk komersil (non-subsidi), efisiensi beban keuangan, dan pencatatan *gain* atas restrukturisasi pinjaman anak perusahaan (PT Rekind); dan
- PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) (laba naik Rp1,29 triliun) yang berasal dari peningkatan pendapatan berkaitan dengan membaiknya kinerja operasional seperti trafik pesawat, trafik penumpang, trafik kargo dan trafik wisatawan, serta terealisasinya penjualan persediaan lahan PT ITDC.

Disamping itu, terdapat 1 (satu) BUMN yang sebelumnya mencatatkan kerugian pada ILKPN audited 2023, mencatatkan bagian laba pemerintah (pendapatan) positif pada ILKPN audited 2024 yaitu Perum Perumnas yang berasal dari peningkatan penjualan rumah dan rusunami serta penurunan beban keuangan.

Sedangkan Minoritas tidak dicatatkan lagi bagian laba pemerintahnya karena seluruhnya sudah menggunakan metode biaya (*Cost Method*) pasca berubahnya kepemilikan pada PT Perkebunan Nusantara I.

KPA KND DJKN (977191)

Pendapatan yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan (**Direktorat Jenderal Kekayaan Negara**) senilai **Rp10.066.480.172.389** merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian Keuangan dalam Laporan Keuangan (sebagaimana tersaji dalam lampiran Mutasi Lain-lain BUMN/Badan Usaha/Non BUMN di bawah Kementerian Keuangan) berdasarkan Laporan Keuangan yang disampaikan BUMN/Lembaga/Perusahaan. Terjadi kenaikan sebesar **Rp2.181.356.071.444** atau **27,66** persen jika dibandingkan dengan tahun 2023. Rincian pendapatan yang dibukukan BUMN dibawah Kementerian Keuangan sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Persero DJKN	3.958.788.859.540	3.586.499.100.945
2	Badan Usaha Lainnya	6.107.691.312.849	4.298.625.000.000
Jumlah		10.066.480.172.389	7.885.124.100.945

KPA DJPPR Dit. EAS (970974)

Pendapatan yang dibukukan Badan Usaha (**Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Resiko**) adalah senilai Rp11.336.939 yang merupakan bagi hasil dari deposito mudharabah yang diakui pada tanggal laporan yang diinvestasikan kembali dengan menambahkan pada pokok investasi. Adapun deposito dimaksud merupakan setoran modal Pemerintah yang berasal dari APBN yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan telah ditempatkan pada rekening atas nama Perusahaan Penerbit SBSN II, Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV, Perusahaan Penerbit SBSN V pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Thamrin, Jakarta. Terjadi kenaikan sebesar Rp53.899 atau 0,48 persen apabila dibandingkan dengan pendapatan pada Tahun 2023 yang sebesar Rp11.283.040.

UAIP (999244)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada **UAIP** sampai dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp83.533.577.410.117 dan Rp64.688.635.973.193. Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada UAIP bersumber dari kenaikan investasi permanen lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Lembaga Penjamin Simpanan	27.424.045.657.000	25.963.771.556.000
2	Bank Indonesia	52.192.065.688.526	36.309.194.000.000
3	Institut Pertanian Bogor*	102.793.748.899	116.708.278.383
4	Universitas Airlangga	205.727.822.326	7.373.247.632
5	Insitut Teknologi Bandung	75.745.036.837	-
6	Universitas Indonesia	198.226.754.815	193.008.784.676
7	Universitas Gadjah Mada	233.481.815.942	25.445.740.270
8	Universitas Pendidikan Indonesia	196.062.705.073	94.855.931.098
9	Universitas Sumatera Utara	74.097.024.894	4.678.868.611
10	Universitas Padjajaran	42.332.181.424	62.764.593.449

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
11	Universitas Diponegoro	379.280.078.097	422.185.213.764
12	Universitas Hassanudin	162.050.469.257	55.902.163.176
13	Institut Teknologi Sepuluh November	143.280.578.853	228.323.588.307
14	Universitas Negeri Sebelas Maret	116.511.464.695	27.318.007.846
15	Universitas Negeri Malang*	187.731.751.565	73.108.535.103
16	Universitas Andalas*	124.629.593.520	54.502.989.799
17	Universitas Brawijaya	211.435.185.277	63.763.622.242
18	Universitas Negeri Padang*	77.701.820.804	77.738.312.302
19	Universitas Syiah Kuala	58.435.225.382	14.495.090.890
20	Universitas Terbuka	128.336.585.204	99.597.445.931
21	Universitas Negeri Surabaya*	212.022.367.395	87.464.097.977
22	Universitas Negeri Yogyakarta*	282.685.189.529	79.326.412.280
23	Universitas Negeri Semarang*	172.670.692.798	159.271.010.501
24	BPJS Kesehatan	254.516.322.708	-
25	BPJS Ketenagakerjaan**	277.711.649.297	467.838.482.956
Jumlah		83.533.577.410.117	64.688.635.973.193

*) Menggunakan Angka LK Tahun 2024 Unaudited

**) Menggunakan Angka LK Tahun 2024 Draft Audited

Direktorat SMI DJPb (961671)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada **Direktorat SMI DJPb** periode Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp99.875.091.668 dan Rp29.791.828.380. Terjadi kenaikan sebesar Rp70.083.263.288 atau 235,24 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan adanya kenaikan nilai wajar investasi LPDP dalam bentuk aset keuangan (ditempatkan pada obligasi korporasi) yang memenuhi karakteristik *available for sale* dan *held to maturity* diskonto.

Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, Modal Awal BP Tapera (987253)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR modal Awal BP Tapera (987253) periode tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp49.803.033.365 dan Rp54.529.660.743. Terjadi penurunan sebesar Rp4.726.627.378 atau turun 8,67 persen apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan penyesuaian pada modal awal BP Tapera merupakan bagian pemerintah atas laba operasional tahun berjalan yang dibukukan pada Laporan Keuangan BP Tapera periode tahun 2024.

KPA LDKPI (979015)

Pendapatan penyesuaian nilai investasi pada **KPA LDKPI** tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp9.242.399.273 dan Rp7.289.148.913. Apabila dibandingkan dengan TA 2023, nilai pendapatan pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.953.250.360 atau naik 26,80 persen. Pendapatan tersebut berupa pendapatan PNBP lainnya yang merupakan amortisasi atas penempatan dana pada instrumen investasi yang diperoleh dengan nilai diskonto. Pendapatan atas pengelolaan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional dilaporkan sebagai PNBP pada laporan keuangan LDKPI selaku Satker BA 015.

KPA Badan Bank Tanah (986392)

Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi KPA **Badan Bank Tanah** pada 2024 dan 2023 adalah Rp69.843.235.790 dan Rp37.069.960.799, di mana terjadi kenaikan Rp32.773.274.991 atau meningkat 88,41 persen. Nilai pendapatan penyesuaian nilai investasi tersebut merupakan bagian

pemerintah atas keuntungan/surplus operasional yang dibukukan pada Laporan Keuangan Badan Bank Tanah Tahun 2023.

b. Pendapatan Bunga Lainnya

Pendapatan Bunga Lainnya pada 2024 sebesar **Rp1.279.778.210.363** terdiri dari pendapatan UAIP, Bunga DNS, Pendapatan Kementerian BUMN Bunga IP PEN, Pendapatan DJPK hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah dan Penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN daerah di PT Sarana Multi Infrastruktur. Rincian Pendapatan Bunga Lainnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan KBUMN Bunga IP PEN	276.810.323.906	229.496.866.888
2	Pendapatan DJPK, hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah	460.360.142.942	495.076.417.149
3	KPA Direktorat SMI	542.607.743.515	517.756.140.530
Jumlah		1.279.778.210.363	1.242.329.424.567

KPA Kementerian BUMN (986917)

Pendapatan Bunga pada KPA Kementerian BUMN merupakan pendapatan bunga dari Investasi Non Permanen dalam Pemulihan ekonomi Nasional (IP PEN) dengan nilai pendapatan periode Tahun 2024 sebesar Rp276.810.323.906 dan 2023 sebesar Rp229.496.866.888. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023, nilai pendapatan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp47.313.457.018 atau 20,62 persen. Pendapatan bunga periode Tahun 2024 terdiri dari:

- Pendapatan bunga lainnya (Kas) sebesar Rp274.119.966.903 dikurangi pendapatan bunga yang diterima dari PT KAI yang telah diakui pada periode sebelumnya sebesar Rp14.148.684.091; dan
- Pendapatan yang masih harus diterima sebesar Rp16.839.041.094.

Adapun rincian pendapatan bunga **IP PEN** berdasarkan penerima investasi adalah sebagai berikut:

No	Penerima Investasi	Pendapatan Bunga	Pendapatan yang masih harus diterima	Pendapatan yang diakui periode sebelumnya	Pendapatan Bunga Lainnya
1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	157.591.145.834	-	14.148.684.091	143.442.461.743
2	PT Perkebunan Nusantara III	77.528.821.069	13.589.041.094	-	91.117.862.163
3	Perum Perumnas	39.000.000.000	3.250.000.000	-	42.250.000.000
Jumlah		274.119.966.903	16.839.041.094	14.148.684.091	276.810.323.906

KPA DJPK (999302)

Pendapatan bunga pada **KPA DJPK** periode Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp460.360.142.942 dan Rp495.076.417.149. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya, pendapatan bunga pada KPA DJPK menurun sebesar **Rp34.716.274.207** atau turun **7,01** persen.

Pendapatan bunga pada PPA DJPK adalah Pendapatan bunga pinjaman PEN Daerah maupun pendapatan bunga lainnya yang berasal dari imbalan atas saldo dana pinjaman PEN Daerah di rekening khusus yang dibentuk PT Sarana Multi Infrastruktur untuk menampung dana pinjaman PEN

Daerah dan belum di salurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur kepada Pemda sesuai dengan perjanjian.

Sesuai dengan Pasal 14A ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.07/2021, bahwa hasil penempatan dana pengelolaan pinjaman PEN Daerah pada rekening penampungan PT Sarana Multi Infrastruktur setelah dikurangi dengan biaya-biaya penempatan, disetorkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada setiap triwulan. Setoran ke rekening kas negara oleh wajib setor (PT SMI) sebagai PNBPN dengan menggunakan akun pendapatan bunga lainnya (425719).

KPA Direktorat SMI (999244)

Pendapatan bunga pada KPA Direktorat SMI pada periode Tahun 2024 adalah sebesar Rp542.607.743.515 dan Tahun 2023 adalah sebesar Rp517.756.140.530. Pendapatan bunga pada periode Tahun 2024 meningkat sebesar Rp24.851.602.985 atau 4,80 persen apabila dibandingkan dengan periode Tahun 2023. Pendapatan tersebut terdiri dari:

- pendapatan bunga lainnya yang merupakan pemindahan saldo dana dari RIBUN ke RKUN dan dari RKUN ke RIBUN imbal hasil atas imbal hasil Investasi Pemerintah pada BP Tapera dalam rangka realisasi PNBPN Pemerintah sebesar Rp510.725.086.120;
- Imbal hasil pengelolaan Dana Cadangan Pinjaman Pemerintah tahun anggaran 2024 yang dikelola oleh LDKPI setelah dikurangi Jasa Pengelolaan sebesar Rp25.090.183.918;
- Pencatatan nilai pendapatan akrual imbal hasil optimalisasi dana cadangan penjaminan sebesar Rp4.661.062.262; dan
- Pencatatan nilai pendapatan akrual imbal hasil dana FLPP belum diigulirkan BP Tapera sebesar Rp2.131.411.215.

c. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur merupakan pendapatan pada UAKPA Direktorat EAS. IJP Infrastruktur sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PP nomor 62 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN Yang Berlaku di Kementerian Keuangan, mengatur IJP Infrastruktur sebagai PNBPN BA 15 DJPPR, di mana IJP tersebut dibayarkan Badan Usaha Pelaksana Proyek Infrastruktur Skema KPBU yang menerima Jaminan Bersama dari Pemerintah dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang tertuang dalam Surat IJP Pemerintah. Selanjutnya, dengan adanya kebijakan Ditjen Anggaran dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan yang masing-masing disampaikan melalui nota dinas nomor ND-301/AG.7/2020 tanggal 17 Juni 2020 dan ND-800/SJ/2020 tanggal 22 Juni 2020 ditetapkan bahwa klasifikasi PNBPN IJP Infrastruktur diubah yang tadinya merupakan PNBPN K/L BA 15 menjadi PNBPN BUN.

Pada periode tahun 2024 dan 2023 Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur masing-masing sebesar Rp136.263.072.585 dan Rp132.719.012.880. Rincian Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Setoran	Unit Penyeter	Jumlah pada TA 2024 (Audited)
1	16 Jan 2024	PT Jasa Marga Jalanlayang Cikampek	5.168.000.000
2	23 Feb 2024	PT Bhimasena Power Indonesia	62.871.534.330
3	22 Apr 2024	PT Citra Karya Jabar Tol	2.023.000.000
4	28 Ags 2024	PT Bhimasena Power Indonesia	61.201.538.255

No	Tanggal Setoran	Unit Penyeter	Jumlah pada TA 2024 (Audited)
5	1 Okt 2024	PT Waskita Bumi Wira	3.156.000.000
6	29 Nov 2024	PT Wijaya Karya Panimbang	1.843.000.000
Jumlah			136.263.072.585

d. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan UMKM)

Pendapatan imbal jasa penjaminan sampai dengan periode tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp115.461.373.787. Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* untuk pelaku usaha UMKM pada pos Laporan Operasional nilainya berbeda dengan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit* untuk pelaku usaha UMKM pada pos Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan adanya pengakuan akrual atas pendapatan.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (penjaminan UMKM) pada UAKPA Direktorat EAS merupakan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan *Loss Limit*. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 4 sampai dengan 7 PMK nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam pemberian dukungan berupa *loss limit*, PT Jamkrindo dan/atau PT Askrindo dikenakan IJP *loss limit* dan disetor ke kas negara sebagai PNBPNP.

Pelaksanaan lebih lanjut terkait PNBPNP *Loss Limit* diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)) dengan PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero), di mana telah diatur tarif PNBPNP IJP *Loss Limit* ditetapkan sebesar 1 persen per tahun dari plafon pinjaman yang dijamin oleh PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) dan PNBPNP IJP *Loss Limit* diterima Pemerintah maksimal 15 hari kerja setelah Subsidi IJP diterima oleh PT Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero), selanjutnya terdapat addendum atas Perjanjian Kerjasama tersebut di atas, yang diantaranya terdapat penyesuaian tarif PNBPNP IJP *Loss Limit* dari sebesar 1 persen menjadi sebesar 0,8 persen, di mana penyesuaian tarif PNBPNP IJP *Loss Limit* tersebut mulai berlaku untuk sertifikat penjaminan yang diterbitkan pada 1 Februari 2021.

No	Unit Penyeter	TA 2024	TA 2023
1	PT Jamkrindo	-	56.338.399.385
2	PT Askrindo	-	59.122.974.402
Jumlah		-	115.461.373.787

- Pendapatan PNBPNP Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (BA BUN 999.04) pada Tahun 2024 sebesar **Rp1.654.329.294.874** mengalami penurunan sebesar **Rp3.583.996.950** atau turun **0,22 persen**, bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar **Rp1.657.913.291.824**. Penurunan ini utamanya terjadi pada pendapatan denda dan pendapatan lain-lain. Pendapatan PNBPNP Lainnya pada BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman pada Tahun 2024 sebesar **Rp1.654.329.294.874** terdiri dari:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	1.632.706.195.782	1.626.670.021.070
2	Pendapatan Denda	21.285.072.482	29.054.469.222
3	Pendapatan lain-lain	338.026.610	2.188.801.532
Jumlah		1.654.329.294.874	1.657.913.291.824

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing adalah

sebesar Rp1.632.706.195.782 dan Rp1.626.670.021.070. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan terdiri dari Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman, dan Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman dengan rincian terdapat pada rincian berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1.	Pendapatan Bunga dari Piutang Pemberian Pinjaman (425713)	1.590.126.930.226	1.559.846.676.613
2.	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman (425762)	14.142.435	12.013.427
3.	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman (425763)	41.647.586.586	66.811.331.030
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)	917.536.535	-
Jumlah		1.632.706.195.782	1.626.670.021.070

Pendapatan Denda untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp21.285.072.482 dan Rp29.054.469.222. Pendapatan Denda terdiri dari Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman dan Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh Debitur Kredit Pemerintah (KUMK) dengan rincian terdapat pada Tabel di bawah ini:

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023
1.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman (425823)	21.265.522.482	29.054.469.222
2.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK) – (425826)	19.550.000	-
Jumlah		21.285.072.482	29.054.469.222

Pendapatan Lain-Lain untuk periode yang berakhir sampai dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp338.026.610 dan Rp2.188.801.532. Pendapatan Lain-Lain terdiri dari Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman (425981) dan Pendapatan Anggaran Lain-Lain (425999). Pendapatan Lain-Lain sampai dengan periode yang berakhir 31 Desember 2024 berasal dari:

1. Setoran yang diterima oleh rekening pemerintah lainnya yaitu rekening Penampungan pengembalian kredit gudang, rantai jemur, dan kios KUD (GLK-KUD) sebesar Rp27.312.500 dan;
 2. Penerimaan PIR UPP yang tidak teridentifikasi Surat Pengakuan Hutangnya (SPH) sebesar Rp310.714.110.
- Pendapatan PNPB Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) pada 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp8.129.695** dan **Rp313.054.400** mengalami penurunan sebesar **Rp304.924.705** atau turun **97,40 persen**. Pendapatan PNPB Lainnya pada BA BUN Pengelola Belanja Subsidi Tahun 2024 sebesar **Rp8.129.695** terdiri dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan pendapatan denda keterlambatan pada Bank pelaksana yang terlambat menyalurkan SBUM Perumahan pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR.

Rincian PNBP lainnya sebesar **Rp8.129.695** pada Ditjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	23.615	54.667
2	Pendapatan Denda	8.106.080	312.999.733
Jumlah		8.129.695	313.054.400

Pendapatan Denda sebesar Rp8.129.695 berasal dari akun 425811 (pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah) dengan rincian pendapatan jasa giro (425764) dan pendapatan denda sebagai berikut:

Pendapatan pada Akun 425764 Tahun 2024 yang disetor 2024

NO	TGL/BLN BAYAR	NTPN	NTB/NTP	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	12/07/2024	6717C55DF911QJ3U	240712000002	828	Jasa giro Juni 2024 Bank Mega Syariah yang disetor Bulan Juli 2024
2	11/07/2024	C15CE2G4VPQLTCCQ	209115364516	3.919	DKI Syariah yang disetor Bulan Juli 2024
3	04/10/2024	89EFE0NA04UPE8CG	211072416260	4.784	Jasa giro Bank DKI Syariah
4	02/10/2024	778800NA04UPE468	241002000005	1.287	Jasa giro Bank Mega Syariah
5	02/10/2024	7972648VVF8B2DV5	241002906949	7.096	Jasa Giro BPD Sulawesi Tengah
6	31/12/2024	4A0BB3CIFKSI8NQO	241231000001	511	Jasa giro Bank Mega Syariah
JUMLAH				18.425	

**Setara Kas- Saldo Jasa Giro 2024 yang belum disetor tahun 2024
(Akan menjadi pendapatan akun 425764 di 2025)**

No,	Bulan Jasa Giro	Nama Rekening	Nomor Rekening	Jasa Giro	Bank
1	Desember 2024	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	100001000231768	525	MEGA SYARIAH
2	Desember 2024	RPL 019 DJPP UTK DANA SBUM	70122065906	332	DKI SYARIAH
3	Desember 2024	RPL 019 PS DJPP UTK DANA SBUM	10103666778	4.333	BPD SULAWESI TENGAH
Jumlah Jasa Giro pada RPL SBUM per 31 Desember 2024				5.190	

Pendapatan 425811

NO	TGL/BLN BAYAR	NTPN	NTB/NTP	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	25/07/2024	C807D48VVF019POP	1790788070	465	Pendapatan Denda pada BPD DKI Syariah atas keterlambatan penyaluran SBUM
2	24/07/2024	E18B81JNFV8S2QQI	240724641877	24.692	Pendapatan Denda pada BPD Kaltimara atas keterlambatan penyaluran SBUM
3	19/08/2024	122653CIFKGAKBD0	693200687	75.569	Pendapatan Denda pada BTN Syariah atas lebih bayar subsidi yang klaim asuransi Jamkrindo yang telah dibayarkan sesuai BA 135/BA/RKN/VIII/SATKER-DJPI/2024. 15/BA/SHAD/SMFD/VIII/2024

NO	TGL/BLN BAYAR	NTPN	NTB/NTP	NILAI (Rp)	KETERANGAN
4	19/08/2024	45EF71JNFVBHQ9ST	1798400002	2.708.805	Pendapatan Denda pada BTN karena kelebihan pembayaran klaim asuransi Askrindo dan Jamkrindo sesuai BA Rekon 136/BA/RKN/VIII/SATKER-DJPI/2024. 14A/BA/RKN/SMD/SSB/VIII/2024
5	03/01/2024	6FA321JNFUMB4EI4	16160300052	1.863	Pendapatan Denda pada Bank DIY atas keterlambatan Penyaluran SBUM 2023
6	10/01/2024	F99611JNFUMHQNF5	1672100050	4.668.712	Pendapatan Denda pada Bank BTN atas Keterlambatan penyaluran SBUM
7	10/01/2024	6A8802G4VP8U7NA2	142052268687	10.247	Pendapatan Denda pada Bank BPD DKI atas Keterlambatan penyaluran SBUM
8	02/10/2024	FB6F30NA04UPDPGB	863852457286	30.740	denda keterlambatan penyaluran sbum Bank Mandiri sesuai BA Rekon 111/BA/RKN/VII/SATKER-DJPI/2024 dan JRB.CLN/4423/2024 periode april s/d juni 2024
9	16/10/2024	7E3CA1JNFVHI039Q	310145270693	584.055	denda penyaluran Sbum Bank Mandiri sesuai BA Rekon. Tgl 20-9-2024. No 139/BA/RKN/VII/SATKER-DJPI/2024 dan JRB.CLN/4244/2024
10	27/12/2024	CA69F3CIFKSI6DBS	241227027618	932	Penyetoran BJB Syariah atas keterlambatan Penyaluran SBUM 2024 Sesuai Rekonsiliasi September s/d Desember 2024
Jumlah Pendapatan 425915				8.106.080	
Pendapatan Operasional LO				8.129.695	

- Pendapatan PNBPN Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA BUN 999.08) pada Tahun 2024 sebesar **Rp22.169.883.137** mengalami kenaikan sebesar **Rp15.698.169.413** atau naik **242,57 persen** bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar **Rp6.471.713.724**.

No.	URAIAN	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	64.224.899	-
2	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	800.336.015	6.471.063.723
3	Pendapatan Denda Lainnya	21.305.310.723	-
4	Pendapatan Lain-lain	11.500	650.001
Jumlah		22.169.883.137	6.471.713.724

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga sebesar **Rp64.224.899** berasal dari satker Otoritas Jasa Keuangan.

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar **Rp800.336.015** terdapat pada:

- Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat berupa Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar **Rp789.474.375** dari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyaluran beras Tahun 2023.

- b. BP Batam berupa Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp5.937.326
- c. SKK Migas berupa Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp4.924.314.

Pendapatan Denda Lainnya sebesar **Rp21.305.310.723** terdapat pada:

- a. Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat sebesar Rp5.211.136.752 yang berasal dari setoran PT POS sehubungan dengan Komitmen Pembayaran denda atas Pekerjaan OAB tahun 2023 nomor PER-001/999976/2024 dan nomor 681/Penjualan-KCU Jap/ASN/0524 tanggal 13 Mei 2024
- b. Kanwil DJPb Provinsi Papua sebesar Rp16.094.173.971 yang merupakan pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah yang berasal dari klaim bank garansi dikarenakan PT Pos Indonesia melakukan pelanggaran kontrak

Pendapatan anggaran lain-lain sebesar **Rp11.500** pada satker MPPKP yang merupakan *Top Up* E-Channel pada RPL Dana Program tahun anggaran 2024.

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) Tahun 2024 sebesar **Rp36.342.555.391.327** mengalami penurunan sebesar **Rp6.704.567.948.554** atau turun **15,57 persen** bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar **Rp43.047.123.339.881**. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya dari BUN Pengelola Transaksi Khusus dapat dirinci sebagai berikut

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	PNBP Pengelolaan Kas Negara	21.918.558.542.513	28.631.252.780.719
2	PNBP Pengelolaan Dana Pensiun, Akes dll	42.293.485.420	35.476.180.697
3	PNBP Satker TK Suspen Penerimaan	2.747.872.094	14.622.737.040
4	PNBP Lainnya dari Pengelolaan Aset BLBI	4.052.683.065	4.911.990.237
5	PNBP Lainnya dari Pengelolaan aset Eks Pertamina	207.522.112.660	207.651.072.327
6	PNBP Lainnya Pengelolaan BPLS	-	-
7	PNBP Setoran Lainnya dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	45.872.656.283	493.842.411
8	PNBP Satker Migas	13.547.449.175.471	13.446.398.724.911
9	PNBP Pengelola Panas Bumi	-	-
10	PNBP Pengelola BMN PKP2B	394.325.806.582	492.710.936.768
11	PNBP Pengelolaan Aset Lain-Lain	67.756.241.637	31.202.346.243
12	PNBP Pengelola KPPN KPH	3.826.591.542	9.555.480.032
13	PNBP Lainnya Aset Bekas Milik Asing Tionghoa	18.257.475.120	2.141.824.690
14	PNBP Pengelola BMN Idle	39.136.667	7.500.000
15	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS pada SKK Migas	85.589.910.037	170.307.752.548
16	PNBP Lainnya Pengelolaan BMN KKKS pada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)	4.263.702.236	390.171.258
Jumlah		36.342.555.391.327	43.047.123.339.881

E.2.1.4. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp44.216.321.039.110** dan **Rp26.897.256.729.004**. Pendapatan Hibah merupakan pendapatan operasional yang berasal dari Pendapatan-LO BUN Pengelola Hibah (BA 999.02). Pendapatan Hibah pada Tahun 2024 ini mengalami kenaikan sebesar **Rp17.319.064.310.106** atau naik **64,39 persen** bila dibanding dengan tahun 2023.

Dari nilai realisasi pendapatan hibah sebesar **Rp44.216.321.039.110**, sebesar **Rp25.129.370.803.899** atau sekitar **56,83** persen dari total pendapatan hibah merupakan realisasi pendapatan hibah terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.

Nilai realisasi pendapatan hibah tahun 2024 terdiri atas realisasi pengesahan pendapatan hibah sebesar **Rp44.426.521.602.889** dan realisasi pengembalian pendapatan hibah sebesar **Rp210.200.563.779**. Rincian Pendapatan Hibah pada Laporan Operasional berdasarkan akun pendapatan adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	SP3HL (Debit)	SPHL (Kredit)	Netto
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Barang	-	3.202.856.466.557	3.202.856.466.557
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa	-	46.358.566.704	46.358.566.704
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan	-	60.021.516.260	60.021.516.260
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	-	233.933.403.044	233.933.403.044
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah Daerah	198.440.489.745	32.060.496.385.831	31.862.055.896.086
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lainnya	106.855.100	91.292.349.617	91.185.494.517
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral	-	132.463.972.855	132.463.972.855
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral	-	408.007.371.258	408.007.371.258
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Barang	-	1.667.450.649.849	1.667.450.649.849
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Jasa	-	4.912.291.640.244	4.912.291.640.244
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Perorangan	24.853.885	1.279.874.551	1.255.020.666
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Bilateral	753.125.064	255.085.988.635	254.332.863.571
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang Multilateral	10.455.702.985	1.289.140.883.188	1.278.685.180.203
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Langsung Bentuk Uang Lainnya	419.537.000	65.842.534.296	65.422.997.296
Total		210.200.563.779	44.426.521.602.889	44.216.321.039.110

Nilai realisasi pendapatan hibah Tahun 2024 sebesar Rp44.216.321.039.110 terdiri atas realisasi pendapatan hibah (SPHL) sebesar Rp44.426.521.602.889 dan realisasi pengembalian pendapatan hibah (SP3HL) sebesar Rp210.200.563.779.

E.2.2. Beban Operasional

Beban Operasional pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp2.183.816.448.119.612 dan Rp2.090.676.704.024.191. Beban Operasional pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp93.139.744.095.421 atau naik 4,46 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2023. Kenaikan yang signifikan terdapat pada Beban Pegawai dan Beban Hibah. Sementara itu, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih mengalami penurunan signifikan.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasional pada Tahun 2024 sebesar Rp2.183.816.448.119.612 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Pegawai	173.001.346.744.056	155.015.591.372.012
2	Beban Persediaan	1.476.311.019	1.364.078.683
3	Beban Barang dan Jasa	1.578.465.424.841	1.424.429.200.233
4	Beban Pemeliharaan	18.200.253	16.984.662
5	Beban Bunga	524.147.192.364.375	489.648.053.202.050
6	Beban Subsidi	279.267.883.221.775	251.951.604.553.533
7	Beban Hibah	278.430.938.953	219.140.718.777
8	Beban Transfer	902.646.703.693.172	881.390.373.057.804
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	27.839.399.821.259	27.767.138.903.095
10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	12.482.753.654.145	(2.426.602.692.679)
11	Beban Lain-Lain	262.572.777.745.764	285.685.594.646.021
	Jumlah	2.183.816.448.119.612	2.090.676.704.024.191

E.2.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp173.001.346.744.056 dan Rp155.015.591.372.012. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban Pegawai merupakan beban pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) yang seluruhnya merupakan beban pegawai yang terdiri atas beban dana pensiun, asuransi kesehatan dan program THT pada Subdit Pembayaran Program Jaminan Sosial, Perhitungan Pihak Ketiga dan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Direktorat Sistem Perbendaharaan. Beban Pegawai pada Tahun 2024 pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp17.985.755.372.044 atau naik 11,60 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2023 salah satunya karena peningkatan pada Belanja Pensiun dan Uang Tunggu.

Beban Pegawai pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus sebesar Rp173.001.346.744.056 terdiri dari:

1. Total Belanja Pensiun dan Uang Tunggu sebesar Rp157.772.542.550.943 dan Kontribusi APBN sebagai pendanaan bersama dalam pembayaran pensiun Eks PNS Kementerian Perhubungan pada PT KAI Rp615.457.695.321;

2. Belanja Tunjangan Veteran, Tunjangan PKRI dan KNIP, dan Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp2.033.105.786.292;
3. Total Belanja Askes sebesar Rp11.656.172.521.588;
4. Belanja Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai sebesar Rp323.206.362.954
5. Belanja Program Jaminan Kematian Pegawai sebesar Rp600.861.826.958

E.2.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.476.311.019 dan Rp1.364.078.683. Beban Persediaan pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp112.232.336 atau naik 8,23 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan beban persediaan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat. Beban Persediaan pada Tahun 2024 tersebut terdapat BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08).

Rincian Beban Persediaan dari per Satker pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain (999.08) adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023
1	BP BATAM	488.227.701	243.045.350
	Beban Persediaan Konsumsi	489.227.701	240.968.750
	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	550.000	0
	Beban Persediaan bahan baku	-	1.528.600
	Beban Persediaan Lainnya	487.000	548.000
2	SKK MGAS	986.046.318	1.121.033.333
	Beban Persediaan Konsumsi	985.482.044	1.117.090.635
	Beban Persediaan Lainnya	564.274	3.942.698
	Jumlah Beban Persediaan	1.476.311.019	1.364.078.683

Sementara itu, rincian keseluruhan atas beban persediaan adalah sebagai berikut:

No.	Rincian Beban Persediaan	TA 2024	TA 2023
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.474.709.745	1.358.059.385
2	Beban Persediaan bahan baku	-	1.528.600
3	Beban Persediaan Lainnya	1.051.274	4.490.698
4	Beban Persediaan pita, cukai, materai dan leges	550.000	-
5	Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	-	-
	Jumlah	1.476.311.019	1.364.078.683

E.2.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.578.465.424.841 dan Rp1.424.429.200.233. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp154.036.224.608 atau naik 10,81 persen dibandingkan Tahun 2023.

Beban barang dan jasa merupakan beban barang pada BA BUN 999.08 Pengelola Belanja Lain-Lain dan BA BUN 999.99 Pengelolaan Transaksi Khusus.

Beban barang dan jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 pada BA BUN 999.08 adalah sebesar Rp3.595.000 dan Rp0. Beban barang tersebut terdapat pada satker BP Batam. Transaksi tersebut berupa Alat Kantor Lainnya sebesar Rp3.465.000 dan Mesin Penghilang Tinta sebesar Rp130.000 yang berada pada BP Bintan.

Sementara itu, beban barang dan jasa pada BA BUN 999.99 dapat dirinci sebagai berikut:

1. **Beban Penggantian Biaya dan Margin yang Wajar IP PEN**
Beban yang berasal dari beban barang dalam rangka penyaluran penggantian biaya dan margin yang wajar atas pelaksanaan investasi pemerintah PEN selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp3.472.451.250 diperoleh dari saldo realisasi penyaluran penggantian biaya dan margin periode Oktober 2023, April 2024, dan Oktober 2024 dengan nilai sebesar Rp6.985.849.410 dikurang dengan ekuitas awal sebesar Rp4.559.988.950 dan ditambah dengan nilai estimasi atas tagihan penggantian biaya dan margin yang wajar IP PEN berdasarkan tagihan yang disampaikan masing-masing Pelaksana Investasi untuk periode penagihan bulan November dan Desember Tahun 2024 sebesar Rp1.046.590.790.
2. **Beban Operasional keperluan pembayaran Kontribusi dan *Trust Fund***
Jumlah Beban Operasional pada tahun 2024 adalah sebesar Rp237.729.064.350 dengan rincian beban pembayaran kontribusi/trust fund kepada 4 organisasi internasional berdasarkan kurs SPM sebesar Rp175.506.845.950 ditambah dengan tagihan kontribusi/*trust fund* yang belum dibayar kepada ADF sebesar Rp64.651.378.400 yang dihitung berdasarkan kurs saat penyampaian *invoice*, serta dikurangi dengan nilai utang kepada Pandemic Fund FIF yang telah dihapuskan/dibayar sebesar Rp2.429.160.000 yang dihitung berdasarkan kurs SPM (Kurs SPM/Jisdor saat pembayaran 19 Maret 2024).
3. **Beban Kompensasi Penugasan Dukungan *Loss Limit***
Jumlah beban per tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp1.414.519.000 dan Rp1.401.380.000.
4. **Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF)**
Jumlah Beban Kontribusi Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) per tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp236.641.713.603 dan Rp77.736.876.111.
5. **Beban Dukungan Kelayakan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Infrastruktur Air Minum**
Jumlah beban barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp6.879.661.760,- dan Rp26.851.576.322,-.
6. **Beban Barang Satker Pensiun**
Beban barang pada satker Pensiun (987361) sebesar Rp1.092.324.419.878 terdiri atas beban Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) pensiun sebesar Rp764.694.791.784 dan Beban *Fee* Pelayanan Bank/Pos Persepsi serta beban jasa pelayanan perbendaharaan sebesar Rp327.629.628.094.

E.2.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp18.200.253 dan Rp16.984.662. Beban Pemeliharaan pada Tahun 2024 mengalami kenaikan yakni sebesar Rp1.215.591 atau naik 7,16 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya ke kondisi normal untuk tetap dapat dipergunakan.

Rincian perbandingan Beban Pemeliharaan pada tahun 2024 dan 2023 berasal dari BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) yang sebesar Rp18.200.253 dapat dirinci berdasarkan satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	BP Batam	7.301.600	6.612.400
2	SKK Migas	10.898.653	10.372.262
Jumlah		18.200.253	16.984.662

E.2.2.5. Beban Bunga

Beban Bunga pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp524.147.192.364.375** dan **Rp489.648.053.202.050**. Beban Bunga pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp34.499.139.162.325** atau **7,05 persen** bila dibandingkan dengan tahun 2024.

Perbedaan nilai antara beban bunga di LO dan pembayaran bunga utang di LRA dikarenakan adanya pengakuan dan pencatatan kontribusi BI sebagai pendapatan, pengakuan beban bunga atas utang bunga dan beban diskon untuk Surat Berharga Negara tahun 2024.

Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp524.147.192.364.375 terdiri dari Beban Bunga Surat Berharga Negara sebesar Rp483.547.393.243.174 dan Beban Bunga Instrumen Pinjaman sebesar Rp40.599.799.121.201.

Beban Bunga dari BUN Pengelola Utang (999.01) tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

a. Beban Bunga Surat Berharga Negara

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara – Rupiah	337.023.131.570.449	313.700.619.979.947
2	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya Obligasi Negara	231.387.637.000	242.515.144.295
3	Beban Pembayaran Bunga Obligasi Negara-Valas	43.910.593.062.633	42.205.592.083.000
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya Obligasi Negara	82.914.760.737	43.726.664.053
5	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang	76.094.504.215.655	70.675.625.816.608
6	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang	322.740.183.995	307.098.351.120
7	Beban Pembayaran Imbalan SBSN - Jangka Panjang Valas	14.862.652.147.419	12.128.812.944.249
8	Beban Pembayaran Biaya/kewajiban lainnya – Imbalan SBSN Jangka Panjang Valas	25.106.549.436	22.242.447.640
Jumlah		472.553.030.127.324	439.326.233.430.912

b. Beban Diskon Yang Menambah Beban Bunga

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	1.300.860.839.000	1.607.810.744.000
2	Pengembalian Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Perbendaharaan Negara	-	(28.787.225.000)
3	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	4.433.241.879.600	4.817.686.284.036
4	Pengembalian Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara	-	(75.484.174.900)
5	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Obligasi Negara Valas	508.946.497.750	495.683.871.193
6	Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	3.306.778.384.300	2.622.091.708.394

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
7	Pengembalian Beban Pembayaran <i>Discount</i> Surat Berharga Syariah Negara - Jangka Panjang	-	(102.926.757.000)
8	Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah	1.444.535.515.200	359.341.926.000
9	Pengembalian Beban Pembayaran <i>Discount</i> SPN Syariah	-	(59.800.000.000)
Jumlah		10.994.363.115.850	9.635.616.376.723

Nilai beban bunga atas beban diskon termasuk beban diskon atas SBN Jangka Pendek (SPN dan SPNS). Adapun realisasi nilai beban diskon dan pendapatan premium telah menggunakan akun yang telah disediakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Beban Bunga Instrumen Pinjaman

Beban Bunga Instrumen pinjaman tahun 2024 sebesar **Rp40.599.799.121.201** mengalami penurunan sebesar **Rp86.404.273.214** atau turun **0,21 persen** dari tahun 2023 sebesar **Rp40.686.203.394.415**. Rincian beban bunga instrumen pinjaman adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Pembayaran Bunga Pinjaman Dalam Negeri	2.663.444.522.711	1.620.007.929.172
2	Beban Bunga Pinjaman Program	18.005.009.888.822	21.334.657.919.454
3	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	190.079.186.734	169.342.160.634
4	Beban Bunga Pinjaman Proyek	14.786.385.878.614	13.664.992.845.659
5	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	4.954.577.536.857	3.896.869.661.421
6	Beban Pembayaran Biaya Transfer Pinjaman Luar Negeri	302.107.463	332.878.075
Jumlah		40.599.799.121.201	40.686.203.394.415

Beban Bunga Instrumen pinjaman tahun 2024 yang didalamnya termasuk utang *Commitment Fee* dan *Mark Up* terdapat pada tabel berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Program	190.079.186.734	9.889.419.726
	Belanja Biaya/Kewajiban Lainnya Terhadap Pinjaman Program	178.546.624.340	-
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari <i>Commitment Fee</i>	11.532.562.394	9.889.419.726
2	Beban Biaya/kewajiban lainnya Terhadap Pinjaman Proyek	4.954.577.536.857	142.862.748.598
	Pembayaran Beban Biaya/Kewajiban Lainnya terhadap Pinjaman Proyek	4.760.324.912.801	-
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari <i>Commitment Fee</i>	93.198.040.401	50.506.783.151
	Beban Biaya/kewajiban lainnya dari <i>Mark Up</i>	101.054.583.655	92.355.965.447
Total		5.144.656.723.591	152.752.168.324

E.2.2.6. Beban Subsidi

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar **Rp279.267.883.221.775** dan **Rp251.951.604.553.533**. Beban subsidi merupakan beban

pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp27.316.278.668.242** atau naik **10,84 persen** bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar **Rp279.267.883.221.775** dirinci jenis subsidi sebagai berikut:

No	Jenis Subsidi/PSO	TA 2024	TA 2023
1	Minyak Solar	17.613.735.502.761	17.561.498.024.249
2	Minyak Tanah	4.398.198.129.038	4.560.105.170.437
3	Elpiji	84.040.315.895.620	73.719.718.440.748
4	Listrik	77.045.334.864.270	68.636.731.031.486
5	Pupuk	36.788.315.401.696	35.533.530.690.953
6	PPh-DTP	9.097.331.505.886	9.424.842.422.407
7	PT KAI	4.442.674.571.004	3.271.612.480.022
8	PT PELNI	3.112.430.319.763	2.661.813.756.015
9	PSO Lainnya	176.322.920.000	172.000.950.000
10	Bantuan Uang Muka Perumahan	816.130.000.000	933.112.000.000
11	Bunga KPR	4.209.495.602.649	4.020.613.823.221
12	Bunga Kredit Program Lainnya	32.379.267.156.831	29.491.524.841.694
13	Imbalan Jasa Penjamin KUR	-	2.015.271.068
14	Kredit Sektor Peternakan	-	863.768.416
15	Kredit Resi Gudang	4.748.993.980	2.142.819.505
16	Beban Subsidi - Estimasi	3.451.526.637	1.322.719.648
17	Beban Subsidi PPN-DTP	3.565.520.710.856	-
18	Beban Subsidi PPnBM-DTP	1.094.279.326.593	-
19	PPh-DTP - Penanganan Pandemi COVID -19	-	-
20	BM-DTP - Penanganan Pandemi COVID -19	-	-
21	Bunga/Margin Prog PEN-Penanganan Pandemi COVID -19	114.365.781.222	160.295.082.887
22	Imbal Jasa Penjaminan Prog PEN - Penanganan Pandemi COVID-19	365.965.012.969	1.292.306.693.219
23	PPN-DTP - Penanganan Pandemi COVID -19	-	505.554.567.558
Jumlah		279.267.883.221.775	251.951.604.553.533

Beban Subsidi berasal pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (BA BUN 999.07) sebesar **Rp279.267.883.221.775** dirinci jenis menurut Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:

No	Kementerian Negara/Lembaga	TA 2024	TA 2023
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	5.034.698.382.788	4.955.589.381.022
2	Koperasi dan UKM	32.121.363.850.733	29.492.999.274.609
3	Perhubungan	7.555.104.890.767	5.933.426.236.037
4	Perdagangan	4.748.993.980	2.142.819.505
5	Komunikasi dan Informatika	176.322.920.000	172.000.950.000
6	Pertanian	36.788.438.327.934	35.533.530.690.953
7	Keuangan	197.587.205.855.573	175.861.915.201.407
Jumlah		279.267.883.221.775	251.951.604.553.533

Beban Subsidi sampai dengan tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Beban Subsidi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2024 sebesar **Rp5.034.698.382.788**. Terdapat kenaikan sebesar Rp79.109.001.766 atau 1,60 persen dari tahun 2023 sebesar Rp4.955.589.381.022. Beban Subsidi dimaksud terdiri dari:

Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023
Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	5.621.253.502	540.838.153
Beban Subsidi - Estimasi	3.451.526.637	1.322.719.648
Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	816.130.000.000	933.112.000.000
Beban Subsidi Bunga KPR	4.209.495.602.649	4.020.613.823.221
Total	5.034.698.382.788	4.955.589.381.022

- a. Pada Satker Ditjen Cipta Karya Beban Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya sebesar Rp5.621.253.502 adalah sebagai berikut:

No	Bln	PDAM						Total
		Kota Palembang	Kota Bogor	Kota Palopo	Kab. Cilacap	Giri Menang Perpres 46	Kab. Banyumas	
1	Jan	61.175.953	197.731.320	6.780.049	10.076.411	397.973.360	7.063.009	680.800.102
2	Feb	57.229.117	183.341.170	6.342.626	8.281.423	406.136.913	6.054.008	667.385.257
3	Mar	61.175.953	194.059.759	6.780.049	8.852.555	459.680.232	5.882.668	736.431.216
4	Apr	59.202.535	186.065.231	6.561.338	8.566.989	444.851.838	5.121.158	710.369.089
5	Mei	61.175.953	190.388.198	6.780.049	8.852.555	459.680.232	4.702.327	731.579.314
6	Jun	59.202.535	182.512.108	6.561.338	8.566.989	442.380.439	3.978.892	703.202.301
7	Juli	61.175.953	186.716.637	3.807.299	8.811.760	434.142.442	3.521.986	698.176.077
8	Ags	61.175.953	184.880.857	2.591.174	7.587.905	434.142.442	2.931.815	693.310.146
Total		481.513.952	1.505.695.280	46.203.922	69.596.587	3.478.987.898	39.255.863	5.621.253.502

Beban Subsidi – Estimasi sebesar Rp3.451.526.637 dengan rincian sebagai berikut:

No	Bln	PDAM						Total
		Kota Palembang	Kota Bogor	Kota Palopo	Kab. Cilacap	Giri Menang Perpres 46	Kab. Banyumas	
1	Sep 24	249.459.375	177.656.172	2.537.588	7.343.133	360.370.432	2.208.380	799.575.080
2	Okt 24	257.774.687	183.145.076	2.593.188	7.587.905	372.382.780	1.770.512	825.254.148
3	Nov 24	249.459.375	175.505.861	2.537.588	7.343.133	360.370.433	1.142.266	796.358.656
4	Des 24	468.681.250	179.373.516	2.529.598	7.587.905	371.557.277	609.207	1.030.338.753
Total		1.225.374.687	715.680.625	10.197.962	29.862.076	1.464.680.922	5.730.365	3.451.526.637

- b. Pada Satker Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, jumlah Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan dan Bunga Kredit Perumahan untuk periode sampai tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing senilai Rp5.025.625.602.649 dan Rp4.953.725.823.221. Beban subsidi merupakan beban pemerintah dalam pembayaran Subsidi Bunga Kredit Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk dapat mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Jumlah pada tahun 2024 merupakan hasil koreksi karena terdapat kelebihan pembayaran kepada 303 debitur SBK dengan status dihentikan serta 205 debitur yang telah dilunasi klaim asuransinya dari asuradur.

Rincian Beban Subsidi sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023
1	Beban Subsidi Bunga Kredit Perumahan	4.209.495.602.649	4.020.613.823.221
2	Beban Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	816.130.000.000	933.112.000.000
3	Beban Subsidi - Estimasi		
	- Beban Subsidi – Estimasi SBK		
	- Beban Subsidi – Estimasi SBUM		
Jumlah		5.025.625.602.649	4.953.725.823.221

2. Kementerian Koperasi dan UKM

Jumlah Beban Subsidi per tahun 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp32.121.363.850.733 dan Rp29.492.999.274.609. Terjadi kenaikan sebesar Rp2.628.364.576.124 atau sekitar 8,91 persen. Beban subsidi 2024 hanya untuk belanja subsidi bunga/margin KUR tahun berjalan sebesar Rp32.121.363.850.733 dan tidak ada beban subsidi IJP KUR. Jumlah pada 2024 merupakan hasil koreksi penyajian beban subsidi bunga/margin KUR pada Bank Mandiri, BNI, BSI, dan BRI.

3. Kementerian Perhubungan

Jumlah Beban Subsidi per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.555.104.890.767 dan Rp5.933.426.236.037. Terdapat kenaikan sebesar Rp1.621.678.654.730 atau 27,33 persen. Beban subsidi diakui pada saat resume tagihan telah diverifikasi dan divalidasi oleh KPA BUN dan/atau timbulnya kewajiban berdasarkan hasil perhitungan dan rekonsiliasi dengan unit teknis, dan verifikasi oleh KPA BUN. Rincian beban subsidi adalah sebagai berikut:

No	Uraian Jenis Beban	TA 2024	TA 2023
1	Ditjen Perkeretaapian	4.442.674.571.004	3.271.612.480.022
2	Ditjen Perhubungan Laut	3.112.430.319.763	2.661.813.756.015
Jumlah		7.555.104.890.767	5.933.426.236.037

Terdapat perbedaan nilai saldo Beban Subsidi dengan realisasi Belanja Subsidi yang diakibatkan adanya pembayaran atas utang subsidi tahun anggaran yang lalu, dan adanya nilai kekurangan atas pembayaran berdasarkan verifikasi atas pelaksanaan PSO namun belum dilakukan pembayaran kepada operator.

No	Uraian	Nilai
1	Pencatatan beban subsidi atas realisasi pembayaran bulan Januari	204.167.334.878
2	Pencatatan beban subsidi atas realisasi pembayaran bulan Februari	190.574.408.534
3	Pencatatan beban subsidi atas realisasi pembayaran bulan Maret	198.045.515.991
4	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi Triwulan I	64.419.216.924
5	Pencatatan beban subsidi atas realisasi pembayaran bulan April	205.630.442.075
6	Pencatatan beban subsidi atas realisasi pembayaran bulan Mei	208.385.527.840
7	Pencatatan beban subsidi atas realisasi pembayaran bulan Juni	201.035.820.496
8	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi Triwulan II	67.186.511.047
9	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi bulan Juli	214.625.708.238
10	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi bulan Agustus	208.181.331.802
11	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi bulan September	202.226.877.999
12	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi Triwulan III	58.600.088.719
13	Pencatatan beban subsidi atas hasil perhitungan ulang adendum kontrak	26.275.104.057

No	Uraian	Nilai
14	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi bulan Oktober	206.147.990.194
15	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi bulan November	105.036.168.733
16	Pencatatan beban subsidi atas hasil verifikasi bulan Desember	235.715.811.055
17	Pencatatan beban subsidi prasarana LRT Jabodebek bulan Januari	2.862.858.581
18	Pencatatan beban subsidi prasarana LRT Jabodebek bulan Feb s.d Mei	37.688.284.099
19	Pencatatan beban subsidi prasarana LRT Jabodebek bulan Juni s.d Sept	57.012.819.809
20	Pencatatan beban subsidi prasarana LRT Jabodebek bulan Okt s.d Des	15.808.511.434
21	Pencatatan beban subsidi atas cicilan pokok dan bunga kredit investasi Triwulan I sd IV	1.303.484.357.790
22	Pencatatan beban subsidi hasil verifikasi tahunan PSO Perkeretaapian dan PSO Sarana LRT Jabodebek TA 2024	30.573.560.759
23	Pencatatan beban subsidi estimasi atas sisa tagihan dana Subsidi Prasarana LRT Jabodebek TA 2024 yang belum dilakukan verifikasi	398.990.319.950
Total		4.442.674.571.004

Jumlah Beban Subsidi PT. PELNI per tahun 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.112.430.319.763 dan Rp2.661.813.756.015.

4. Kementerian Perdagangan

Jumlah Beban Operasional pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.748.993.980 dan Rp2.142.819.505. Beban subsidi pada 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.606.174.475 dari tahun 2023 atau 121,62 persen. Hal ini dikarenakan penambahan debitor sehingga operator mengajukan tagihan subsidi resi gudang melalui SIKP.

Beban subsidi yang tercatat merupakan tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Skema Subsidi Resi Gudang dari Bank Penyalur SSRG yang telah dibayarkan sebesar Rp3.044.846.912 serta tagihan yang telah dilakukan verifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi sebesar Rp1.978.617.877.

Beban Subsidi Bunga/Margin SSRG sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.044.846.912 dengan rincian sebagai berikut:

Bank Penyalur	Realisasi Pembayaran
PT BPD Jabar Banten	2.653.398.784
PT BSI	107.793.244
PT BRI	133.054.179
PT BPD Jateng	17.263.892
PT BNI	24.749.998
PT BPD Sulselbar	105.592.370
PT Bank Aceh Syariah	2.994.445
Jumlah	3.044.846.912

Utang subsidi dan Belanja Subsidi yang masih harus dibayarkan atas tagihan subsidi bunga/margin SSRG dengan rincian sebagai berikut:

Bank Penyalur	Periode	Hasil Verifikasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	1 Januari -1 Maret 2021	7.895.443
	1 April – 30 Juni 2021	14.935.717
	1 Maret - 30 November 2024	1.365.355.951
PT Bank Daerah Kalimantan Selatan	1 September – 30 November 2024	12.810.373
PT Bank Aceh Syariah	1 April – 30 November 2024	95.041.514

Bank Penyalur	Periode	Hasil Verifikasi
	Desember 2024	22.458.329
PT Bank BPD Jabar Banten	Desember 2024	440.808.557
PT BSI	Desember 2024	38.146.486
PT BPD Sulselbar	Desember 2024	3.996.667

5. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Jumlah Beban Operasional pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk periode yang berakhir tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing adalah sebesar Rp176.322.920.000 dan Rp172.000.950.000. Terdapat kenaikan sebesar Rp4.321.970.000 atau sekitar 2,51 persen. Beban Operasional pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) Kementerian Komunikasi dan Informatika berupa Beban Subsidi yang digunakan untuk pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers. Beban Subsidi yang tercatat merupakan tagihan PSO LKBN ANTARA yang telah dibayarkan serta tagihan yang telah dilakukan verifikasi sesuai dengan Berita Acara Verifikasi untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024. Rincian per produk atas Beban Subsidi PSO LKBN ANTARA untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Produk	Total Produk	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Teks Hardnews	143.000	803.000	114.829.000.000
Teks Artikel	1.700	1.686.000	2.866.200.000
Foto	18.000	924.000	16.632.000.000
TV Features	45	458.866.000	20.648.970.000
TV Hardnews	8.000	1.506.000	12.048.000.000
Infografis	160	25.348.000	4.055.680.000
Photo Story	55	42.594.000	2.342.670.000
Podcast	25	116.016.000	2.900.400.000
JUMLAH	170.985		176.322.920.000

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Produk Berita Teks Hardnews sebanyak 143.000 produk dengan nilai sebesar Rp114.829.000.000 berupa berita langsung atau berita lempang yang memuat fakta atau pernyataan aktual hingga perkembangan terkini atas isu tertentu yang memenuhi kaidah jurnalistik dan mengandung unsur pendidikan, pencerahan, pemberdayaan, dalam kerangka wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+ 1N).
- Produk Berita Teks Artikel sebanyak 1.700 produk dengan nilai sebesar Rp2.866.200.000 berupa tulisan faktual yang memuat analisis, penggambaran latar belakang dan argumentasi/opini penulis dan tulisan kreatif hasil repotase atas isu aktual atau bersifat human interest, liputan mendalam, profil, dan news features.
- Produk Berita Foto sebanyak 18.000 produk dengan nilai sebesar Rp16.632.000.000 berupa berita gambar/visual yang memuat fakta aktual, disertai keterangan tertulis atas gambar dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+ 1N).
- Produk Berita TV berupa program audio visual yang digunakan untuk kepentingan yang lebih luas yaitu mendistribusikan program dan kegiatan baik dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif serta permintaan dan kebutuhan stasiun TV dan mitra dalam bentuk:

- i. Produk Berita TV Features sebanyak 45 produk dengan nilai sebesar Rp20.648.970.000 berupa tayangan dalam bentuk audio visual yang memuat fakta dan memiliki daya tarik insani (human interest), tak terikat waktu (timeless), dilengkapi dengan motion grafis, dan/atau animasi dengan durasi paling kurang 24 menit dengan memuat 5W+1H, memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+ 1N), dan durasi minimal 24 (dua puluh empat) menit terbagi dalam 3 segmen
 - ii. Produk Berita TV Hardnews sebanyak 8.000 produk dengan nilai sebesar Rp12.048.000.000 berupa berita lempang atau berita ringan dalam bentuk audio visual yang memuat fakta atau pernyataan aktual mengenai peristiwa terkini dengan dengan memuat 5W+1H, memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+ 1N), dan durasi minimal 1 (satu) menit.
 - e. Produk Infografis sebanyak 160 produk dengan nilai sebesar Rp4.055.680.000 berupa produk berita yang menampilkan visualisasi data, fakta, pengetahuan, atau penjelasan atas isu tertentu sehingga mudah dipahami oleh pembaca dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+ 1N).
 - f. Produk Photo Story sebanyak 55 produk dengan nilai sebesar Rp2.342.670.000 berupa rangkaian gambar/visual berisi cerita atas fakta yang tak terikat waktu (*timeless*), disertai narasi/tulisan yang menceritakan rangkaian isi foto dengan memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan (educating, enlightening empowering, nasionalism/ 3E+ 1N) dan mengandung human interest.
- Produk Podcasts sebanyak 25 produk dengan nilai sebesar Rp2.900.400.000 berupa tayangan khas audio visual berupa perbincangan topik aktual maupun ringan dengan narasumber kompeten dipandu oleh presenter/host durasi sekurang-kurangnya 24 menit dengan spesifikasi memuat 5W+1H, mengandung isu prioritas/strategi, memuat salah satu atau keseluruhan wawasan kebangsaan 3E+1N.

6. Kementerian Pertanian

Beban Subsidi sampai dengan tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing senilai **Rp36.788.438.327.934** dan **Rp35.533.530.690.953**. Beban Subsidi merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang yang dibayarkan kepada Produsen Pupuk untuk disalurkan kepada Petani dan penyaluran kredit usaha alat pertanian. Terdapat kenaikan sebesar **3,53** persen atau **Rp1.254.907.636.981** dari tahun 2023.

Beban subsidi sampai dengan tahun 2024 senilai **Rp36.788.438.327.934** berada pada Eselon I Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian berupa penyaluran subsidi kredit senilai **Rp122.926.238** dan penyaluran subsidi pupuk senilai **Rp36.788.315.401.696**. Penjelasan beban subsidi per 31 Desember 2024 senilai **Rp36.788.438.327.934** sebagai berikut:

- a. Beban subsidi bunga senilai Rp122.926.238 yang terdiri dari beban penyaluran kredit periode Agustus s.d Oktober 2024 senilai Rp41.353.431 dan tagihan atas penyaluran kredit yang belum dibayarkan pada periode Desember 2024 senilai Rp81.572.807
- b. Beban subsidi pupuk senilai Rp36.788.315.401.696 terdiri dari:

NO	PRODUSEN	Beban Subsidi Audited	Tagihan Sudah Dibayar	Kurang (lebih) Bayar
1	PETROKIMIA GRESIK	16.344.270.487.057	18.139.176.937.837	(1.794.906.450.780)
2	PUSRI PALEMBANG	7.237.082.803.434	7.335.594.258.281	(98.511.454.847)
3	PUPIK ISKANDAR MUDA	4.692.205.757.029	3.775.061.489.045	917.144.267.984

NO	PRODUSEN	Beban Subsidi Audited	Tagihan Sudah Dibayar	Kurang (lebih) Bayar
4	PUPUK KALTIM	5.175.137.128.358	5.223.999.673.147	(48.862.544.789)
5	PUPUK KUJANG	3.339.619.225.818	3.069.671.126.126	269.948.099.692
	JUMLAH	36.788.315.401.696	37.543.503.484.436	(755.188.082.740)

Berdasarkan data di atas maka muncul piutang dan utang subsidi sebagai berikut:

Pendapatan yang masih diterima : 1.942.280.450.416

Utang Subsidi : 1.187.092.367.676

7. Kementerian Keuangan

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir pada tahun 2024 dan tahun 2023 adalah **Rp197.587.205.855.573** dan **Rp175.861.915.201.407**. Terdapat perubahan sebesar **12,35** persen dari tahun sebelumnya atau **Rp21.725.290.654.166**.

Rincian Beban Subsidi tersebut sebagai berikut:

Uraian Kelompok Beban	TA 2024	TA 2023	% Naik (Turun)
Beban Subsidi Energi	183.097.584.391.689	164.478.052.666.920	11,32%
Beban Subsidi Pajak DTP	13.757.131.543.335	9.930.396.989.965	38,54%
Beban Subsidi Kredit Program	252.159.126.358	863.768.416	
Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan	365.965.012.969	1.292.306.693.219	-71,7%
Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah	114.365.781.222	160.295.082.887	-28,65%
Jumlah	197.587.205.855.573	175.861.915.201.407	13,80%

Beban Subsidi Kementerian Keuangan sampai dengan tahun 2024 dapat diuraikan per Eselon I sebagai berikut:

No	Eselon I Kemenkeu	2024	2023
1	DJA	183.097.584.391.689	164.478.052.666.920
2	DJP	13.757.131.543.335	9.930.396.989.965
3	DJPPR	365.965.012.969	1.292.306.693.219
4	DJPb	252.159.126.358	863.768.416
5	DJPK	114.365.781.222	160.295.082.887
	Jumlah	197.587.205.855.573	175.861.915.201.407

Jumlah Beban Subsidi Energi yang ditagihkan DJA sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp183.097.584.391.689. Jumlah Beban Subsidi dimaksud merupakan Beban Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 Kg dengan perhitungan sebagai berikut:

- Beban Subsidi JBT dan LPG Tabung 3 kg atas tagihan tahun anggaran 2024 yang telah diverifikasi sebesar Rp106.052.249.527.419, terdiri atas:
 - Penyaluran Subsidi Minyak Solar 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga Rp15.841.273.096.950
 - Penyaluran Subsidi Minyak Solar 2024 kepada PT AKR Corporindo, Tbk Rp149.699.219.495
 - Penyaluran Subsidi Minyak Tanah 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga Rp3.991.205.883.382

- Penyaluran Subsidi LPG Tabung 3 Kg 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN) Rp76.155.801.671.899
- Kurang bayar subsidi Minyak Solar 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga berdasarkan BA Rekonsiliasi Rp1.607.044.084.266
- Kurang bayar subsidi Minyak Solar 2024 kepada PT AKR Corporindo Tbk berdasarkan BA Rekonsiliasi Rp15.719.102.050
- Kurang bayar subsidi Minyak Tanah 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN) berdasarkan BA Rekonsiliasi Rp406.992.245.656
- Kurang bayar subsidi LPG Tabung 3 Kg 2024 kepada PT Pertamina Patra Niaga (termasuk PPN) berdasarkan BA Rekonsiliasi Rp7.884.514.223.721
- Beban Subsidi Listrik periode Tahun 2024 yang telah diverifikasi sebesar Rp77.045.334.864.270, terdiri atas
 - Penyaluran Subsidi Listrik 2024 sebesar Rp73.229.347.633.936
 - Kurang Bayar Subsidi Listrik 2024 sebesar Rp3.815.987.230.334

Jumlah Beban Subsidi Pajak DTP di DJP sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp13.757.131.543.335. Beban subsidi ini meliputi beban subsidi pada P-DTP reguler sebesar Rp9.097.331.505.886 yang terdiri atas beban subsidi PPh DTP Panas Bumi sebesar Rp3.402.344.594.710, PPh DTP SBN Valas sebesar Rp5.694.917.606.735, dan PPh DTP Penghapusan Piutang PDAM sebesar Rp69.304.441, serta beban subsidi pada P-DTP lainnya sebesar Rp4.659.800.037.449 yang terdiri atas beban subsidi PPN DTP Rumah Tapak dan Rumah Susun sebesar Rp2.789.720.562.138, PPN DTP KBLBB sebesar Rp775.800.148.718, dan PPnBM DTP KBLBB sebesar Rp1.094.279.326.593.

Beban Subsidi Bunga Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Ditjen Perbendaharaan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp252.159.126.358. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp863.768.416, terjadi kenaikan signifikan beban subsidi sebesar Rp251.295.357.942 atau 29.092,91 persen disebabkan pada Tahun 2023 baru mendapat Pagu DIPA dan tidak terdapat tagihan subsidi bunga/margin untuk CPP yang signifikan pada periode tersebut.

Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) di Ditjen PPR sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp365.965.012.969 yang merupakan Beban Subsidi Imbal Jasa Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) - Penanganan Pandemi COVID-19 periode Januari s.d. Desember 2024.

Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah di Ditjen Perimbangan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp114.365.781.222. Subsidi bunga pinjaman daerah merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode Tahun 2024. Jumlah Beban Subsidi Bunga Pinjaman Daerah untuk periode Tahun 2024 sama dengan realisasi Subsidi Bunga Pinjaman Daerah untuk periode Tahun 2024.

E.2.2.7. Beban Hibah

Beban Hibah pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp278.430.938.953** dan **Rp219.140.718.777**. Beban Hibah tersebut mengalami kenaikan sebesar **Rp59.290.220.176** atau naik **27,06** persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan tersebut antara lain disebabkan oleh naiknya beban hibah kepada pemerintah luar negeri. Beban Hibah sebesar tersebut berasal dari BUN Pengelola Hibah (BA 999.02) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	183.941.706.710	69.824.315.937
2	Beban Hibah Kepada Organisasi Internasional	94.227.497.856	149.215.239.063
3	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah	-	-
4	Beban Pembayaran Biaya/Kewajiban Lainnya terkait Pendapatan/Belanja Hibah	261.734.387	101.163.777
Jumlah		278.430.938.953	219.140.718.777

Beban hibah sebesar Rp278.430.938.953 merupakan pemberian hibah kepada pemerintah/lembaga asing yang dikelola oleh LDKPI (Satker 985252) yang terdiri atas realisasi Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri sebesar Rp183.749.085.497 dan Belanja Hibah kepada Organisasi Internasional sebesar Rp94.208.499.883.

Sementara itu, beban pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah berasal dari pembayaran biaya/kewajiban lainnya terkait pendapatan/belanja hibah (*banking commission*) pada Satker 977263 (DEAS) sebesar Rp261.734.387.

E.2.2.8. Beban Transfer ke Daerah

Beban Transfer ke Daerah Tahun 2024 adalah sebesar Rp902.646.703.693.172 sebagaimana terinci dalam Tabel 47 di bawah ini. Beban TKD Tahun 2024 turun sebesar Rp21.256.330.635.368 atau 2,41 persen jika dibandingkan beban TKD Tahun 2023 sebesar Rp881.390.373.057.804.

No.	Uraian	2024	2023
1	Dana Transfer Umum	621.796.001.652.159	606.381.015.067.547
2	Dana Transfer Khusus	183.334.806.576.472	178.617.350.796.551
3	Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus dan Keistimewaan	97.515.895.464.541	96.392.007.193.706
TOTAL		902.646.703.693.172	881.390.373.057.804

Rincian beban Transfer ke Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	2023
Dana Transfer Umum	621.796.001.652.159	606.381.015.067.547
- Dana Bagi Hasil	192.585.390.373.161	208.351.386.473.005
- Dana Alokasi Umum	429.210.611.278.998	398.029.628.594.542
Dana Transfer Khusus	183.334.806.576.472	178.617.350.796.551
- Dana Alokasi Khusus Fisik	50.890.077.113.845	50.334.741.347.305
- Dana Alokasi Khusus Nonfisik	130.237.567.201.933	125.341.735.389.619
- Hibah Ke Daerah	2.207.162.260.694	2.940.874.059.627
Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus, dan Keistimewaan	97.515.895.464.541	96.392.007.193.706
- Otonomi Khusus	18.271.490.935.000	17.241.263.570.000
- Daerah Istimewa Yogyakarta	1.396.134.243.367	Rp1.348.883.261.656
- Dana Desa	70.846.529.689.674	69.895.828.548.550
- Insentif Fiskal	7.001.740.596.500	7.906.031.813.500
TOTAL	902.646.703.693.172	881.390.373.057.804

Penjelasan Dana Transfer Umum

a. Beban Dana Bagi Hasil (DBH)

Beban Transfer DBH merupakan kewajiban yang terutang dan telah terbayar sampai dengan tahun 2024 yaitu sebesar Rp192.585.390.373.161. Jika dibandingkan Beban DBH per tahun 2023, secara nominal nilai Beban Transfer DBH per tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp15.765.996.099.844** atau turun sebesar **7,57** persen. Penurunan ini disebabkan karena pada akhir Desember 2023 terdapat penyaluran tambahan DBH regular dan kurang bayar DBH sampai dengan tahun 2023 pada akhir bulan Desember 2023. Beban Dana Bagi Hasil terdiri atas Hasil Sumber Daya Alam dan Non Sumber Daya Alam.

Beban DBH Non SDA untuk periode tahun anggaran 2024 sebesar Rp57.532.140.868.040. Nilai tersebut berasal dari kewajiban yang telah terbayar untuk masa periode sampai dengan 31 Desember tahun anggaran 2024. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer DBH Pajak 31 Desember 2023, nilai Beban Transfer DBH Pajak per 31 Desember tahun anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp24.509.373.464.078 atau sebesar 29,87 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya beberapa pagu jenis DBH Pajak pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Uraian	Beban DBH TA 2024	Beban DBH TA 2023
Dana Bagi Hasil Non SDA		
DBH PPh Perorangan	31.216.907.809.000	43.004.687.852.753
DBH PBB	18.521.270.630.000	31.206.601.861.089
DBH Cukai	4.969.035.046.540	6.293.477.333.242
DBH Perkebunan Sawit	2.824.927.382.500	1.536.747.285.034
Total	57.532.140.868.040	82.041.514.332.118

Beban DBH SDA untuk periode tahun 2024 sebesar Rp82.437.053.313.222. Nilai tersebut berasal dari kewajiban yang telah terbayar untuk masa periode sampai dengan tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Beban Transfer DBH SDA tahun 2023, nilai Beban Transfer DBH SDA per tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp43.872.818.827.665 atau turun sebesar 34,73 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya beberapa pagu jenis DBH SDA pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Uraian	Beban DBH TA 2024	Beban DBH TA 2023
Dana Bagi Hasil SDA		
DBH Minyak Bumi	8.706.431.546.000	13.103.892.128.124
DBH Gas Bumi	6.186.433.188.000	8.947.826.951.298
DBH Mineral dan batubara	63.841.301.583.000	100.019.301.355.340
DBH Panas Bumi	1.379.387.060.000	2.264.949.259.096
DBH Kehutanan	1.371.801.174.222	1.464.387.764.414
DBH Perikanan	951.698.762.000	509.514.682.615
Total	82.437.053.313.222	126.309.872.140.887

b. Beban Dana Alokasi Umum (DAU)

Beban DAU periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar **Rp429.210.611.278.998** dan **Rp398.029.628.594.542**. Beban DAU per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp31.180.982.684.456** atau **7,83** persen dari periode yang sama Tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya porsi alokasi DAU *Block Grant*. Pada Tahun 2024 DAU untuk THR dan Gaji Ketigabelas bagi Guru ASN Daerah dialokasikan tersendiri. Rincian Beban Dana Alokasi Umum tahun anggaran 2024 tersaji pada Tabel sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	343.527.595.289.000	288.929.877.774.000
Transfer Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	11.682.211.062.523	25.741.997.004.000
Transfer Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.649.654.425.851	1.644.028.375.953
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	37.276.919.147.598	39.993.776.407.340
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	12.083.638.950.842	26.023.518.505.877
Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	17.112.772.095.184	15.696.430.527.372
Transfer Dana Alokasi Umum THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	5.877.820.308.000	
Jumlah	429.210.611.278.998	398.029.628.594.542

Penjelasan Dana Transfer Khusus

a. Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Beban Dana Alokasi Khusus Fisik sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.890.077.113.845, dan Rp50.334.741.347.305. Beban transfer DAK Fisik Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp555.335.766.540 atau turun 1,10 persen.

b. Beban Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

Beban DAK Non Fisik untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp130.237.567.201.933 dan Rp125.341.735.389.619. Beban transfer DAK Non Fisik TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.895.831.812.314 atau 3,91 persen. Hal ini disebabkan oleh adanya penyelesaian piutang DAK Non Fisik s.d. 2023 berdasarkan nota dinas rekomendasi penyaluran DAK Non Fisik TA 2024. Rincian beban DAK Non Fisik TA 2024 tersaji pada Tabel dibawah ini.

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Dana Tunjangan Profesi Guru ASND	51.850.462.245.921	48.578.118.047.897
Dana Tunjangan Khusus Guru ASND	2.075.612.901.562	1.616.962.621.824
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.495.768.803.108	1.249.638.248.206
Dana Bantuan Operasional Kesehatan	11.310.090.376.241	10.598.757.900.097
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.030.614.238.487	2.974.561.728.208
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	235.646.902.491	242.766.765.857
Dana Pelayanan Kepariwisata	122.535.859.602	125.749.412.031
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	162.137.147.943	165.411.039.978
Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	60.811.675.450	62.003.157.725
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	111.780.990.539	109.483.930.186
Dana Fasilitas Penanaman Modal	229.414.189.962	232.772.897.862
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	279.830.380.924	292.704.050.000
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	180.553.253.556	158.141.064.271
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.518.871.103.909	53.365.278.092.392
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	3.967.480.355.070	4.088.407.337.853
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	1.605.956.777.168	1.480.979.095.232
Total Beban DAK Non Fisik	130.237.567.201.933	125.341.735.389.619

c. Beban Hibah Ke Daerah

Beban Hibah Kepada Daerah yang tercatat pada Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada tanggal tahun 2024 dan tahun 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.207.162.260.694 dan Rp2.940.874.059.627. Beban Hibah ke Daerah mengalami penurunan sebesar 24,95 persen atau turun sebesar Rp733.711.798.933. Rincian Beban Hibah kepada Daerah TA 2024 disajikan pada Tabel berikut ini.

Uraian	TA 2024	TA 2023
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	810.103.833.952	1.977.982.930.618
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	101.257.208.226	143.405.713.248
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri	1.295.801.218.516	819.485.415.761
Total Beban Hibah kepada Daerah	2.207.162.260.694	2.940.874.059.627

Penjelasan Beban Dana Desa, Insentif Fiskal, Otsus dan Keistimewaan**a. Beban Dana Otonomi Khusus**

Beban Dana Otonomi Khusus pada Laporan ini merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk masa periode Tahun 2024. Jumlah Beban Dana Otonomi Khusus Tahun 2024 sama dengan jumlah realisasi Transfer Dana Otonomi Khusus Tahun 2024 sebesar Rp18.271.490.935.000. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp17.241.263.570.000, nilai Beban Dana Otonomi Khusus mengalami kenaikan sebesar Rp1.030.227.365.000 atau naik 5,98 persen

Rincian Beban Dana Otonomi Khusus sebagaimana berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	4.276.993.035.000	3.960.000.000.000
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	717.359.936.000	697.537.158.000
Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	770.087.411.000	734.634.275.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	883.469.568.000	871.921.448.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	547.131.349.000	448.666.078.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	665.304.462.000	472.527.485.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	704.887.057.000	560.832.598.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	848.562.171.000	734.493.413.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	825.817.651.000	773.555.973.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	1.079.234.834.000	918.116.766.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	1.073.576.144.000	784.905.913.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	861.274.294.000	826.649.561.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	1.395.865.798.000	981.132.390.000

Uraian	TA 2024	TA 2023
Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	485.551.411.000	665.426.268.000
Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	636.516.027.000	803.970.737.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	630.041.924.000	831.782.835.000
Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	604.812.025.000	628.971.170.000
Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	652.742.113.000	759.925.539.000
Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	612.263.725.000	786.213.963.000
Total Beban Dana Otsus	18.271.490.935.000	17.241.263.570.000

b. Beban Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Beban DK DIY Tahun 2024 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan yang telah terbayar setelah dikurangi dengan lebih salur pada periode tersebut. Total Beban Transfer Dana Keistimewaan TA 2024 adalah sebesar **Rp1.396.134.243.367**. Apabila dibandingkan dengan beban DK DIY TA 2023 yang sebesar **Rp1.348.883.261.656**, nilai Beban Dana Keistimewaan mengalami kenaikan sebesar **Rp47.250.981.711** atau **3,50** persen. Jumlah Beban tersebut terdiri dari nilai SPM penyaluran Transfer DK DIY yang telah terbayarkan (telah diterbitkan SP2D) sampai dengan 31 Desember 2024. Selama periode Tahun 2024 terdapat pengakuan lebih salur DK DIY sebesar **Rp23.865.756.634** dan telah diakui sebagai pengurang Beban DK DIY dalam Laporan Keuangan BA BUN 999.05 TA 2024.

c. Beban Dana Desa

Beban Dana Desa untuk periode tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar **Rp70.846.529.689.674** dan **Rp69.895.828.548.550**. Beban Transfer Dana Desa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar **Rp950.701.141.124** atau **1,36** persen.

d. Insentif fiskal

Beban IF periode tahun 2024 merupakan kewajiban reguler yang terutang dan telah terbayar untuk Tahun 2023. Jumlah Beban IF Tahun 2024 yaitu sebesar **Rp7.001.740.596.500**. Apabila dibandingkan dengan TA 2023 yang sebesar **Rp7.906.031.813.500**, nilai Beban IF mengalami penurunan sebesar **Rp904.291.217.000** atau **11,44** persen.

E.2.2.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar **Rp27.839.399.821.259** dan **Rp27.767.138.903.095**. Beban penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi atas Aset Tak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp72.260.918.164** atau turun **0,26** persen bila dibandingkan dengan Tahun 2023. Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2024 dapat dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	273.297.938.880	808.832.878.745

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	178.798.899.293	162.086.389.831
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	27.387.302.983.086	26.796.219.634.519
Jumlah		27.839.399.821.259	27.767.138.903.095

- Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA 999.03) pada Tahun 2024 yang sebesar Rp273.297.938.880 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp535.534.939.865 atau turun 66,21 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp808.832.878.745. Nilai tersebut merupakan pembebanan penyusutan dan amortisasi aset kelolaan yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan melalui sewa dan kerja sama periode tahunan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pembebanan Penyusutan Properti Investasi	270.908.603.453	797.035.507.448
2	Pembebanan Penyusutan atas Aset Kelolaan Nonklasifikasi Properti Investasi	2.389.335.427	11.797.371.297
Jumlah		273.297.938.880	808.832.878.745

- Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Belanja Lainnya (999.08) pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp178.798.899.293 dan Rp162.086.389.831. Terdapat kenaikan sebesar Rp16.712.509.462 atau sekitar 10,31 persen. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	BP Batam		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.690.914.127	1.658.826.287
	▪ Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	1.411.436.782	1.038.135.543
	▪ Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	151.990.859.553	131.927.342.280
	▪ Beban Penyusutan Irigasi	20.321.000	20.321.000
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.866.667	4.583.847
2	Otoritas Jasa Keuangan		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	252.075.203
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	-	2.480.586.585
3	SKK Migas		
	▪ Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	18.413.312.144	18.391.768.454
	▪ Beban Penyusutan Jaringan	1.609.050	1.609.050
	▪ Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	132.779.896	140.906.235
	▪ Beban Amortisasi Software	4.890.203.452	5.942.203.497
	▪ Beban Amortisasi Lisensi	228.089.700	228.031.850
	▪ Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	17.506.922	-
Jumlah		178.798.899.293	162.086.389.831

- Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) pada Tahun 2024 yang sebesar Rp27.387.302.983.086 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.021.896.073.316 atau turun 3,81 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp26.796.219.634.519. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada BUN Pengelola Transaksi Khusus tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

No	Beban Penyusutan Aset Lainnya	Tahun 2024
1.	PNBP BUN	11.593.861.064
2.	Eks Pertamina	71.598.747.796
3.	PKP2B	567.148.934.086
4.	Atas Aset Lain-lain	6.165.157.745
5.	BMN Idle	488.607.289
6.	KKKS SKK Migas	26.373.538.145.914
7.	KKKS BPMA	356.769.529.192
TOTAL		27.387.302.983.086

Pada UAKPA BUN PNPB BUN, Beban Penyusutan atas peralatan dan mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.524.582.500 dan Beban Amortisasi atas lisensi sebesar Rp5.069.278.564. Pada UAKPA BUN Pengelola BMN Eks Pertamina, Beban penyusutan dan amortisasi 31 Desember 2024 sebesar Rp71.598.747.796 dengan rincian sebagai berikut:

Beban Penyusutan	Tahun 2024
Atas 2 Aset Tanah	-
Atas BMN eks KKS Pertamina	71.598.747.796
TOTAL	71.598.747.796

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Nomor PER-08/KN/2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Aset Eks Pertamina, penyusutan BMN eks Pertamina disajikan dalam Laporan Keuangan UAKPA BUN Transaksi Khusus Pengelola Aset Eks Pertamina menggunakan metode garis lurus dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari BMN setiap semester selama masa manfaat.

Pada UAKPA BUN TK BMN PKP2B, Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp567.148.934.086 dan Rp612.736.199.419, dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Adaro Indonesia Rp70.993.703.364;
- b. PT Arutmin Indonesia Rp100.265.660.456;
- c. PT Kideco Jaya Agung Rp85.165.606.449;
- d. PT Berau Coal Rp55.869.036.390;
- e. PT Kaltim Prima Coal Rp253.794.033.870;
- f. PT Multi Harapan Utama Rp769.843.559;
- g. PT Kendilo Coal Rp29.464.436; dan
- h. PT Tanito Harum Rp261.585.563.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada UAKPA BUN TK Pengelola Aset Lain-lain adalah Rp 6.165.157.745 yang merupakan beban penyusutan aset rampasan TLI.

Pada UAKPA BUN TK Pengelola Aset BMN Idle, nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan penyusutan atas Properti Investasi dan Aset Lainnya untuk periode tahun 2024 sebesar Rp488.607.289 Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada SKK Migas, Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp26.373.538.145.914 dan Rp25.585.774.522.719 yang terdiri dari:

- Penyusutan HBM sebesar Rp26.367.426.419.900; dan
- Penyusutan HBI sebesar Rp6.111.726.011.

Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas pada BPMA, saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp356.769.529.192 dan Rp201.919.721.188 yaitu berasal dari penyusutan Aset tahun berjalan HBM sebesar Rp356.596.744.628 dan penyusutan Aset tahun berjalan HBI sebesar Rp172.784.564.

E.2.2.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp12.482.753.654.145 dan minus Rp2.426.602.692.679. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp14.909.356.346.824 atau naik 614,41 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2023. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Kenaikan terbesar terjadi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99). Beban tersebut merupakan beban penyisihan piutang tak tertagih – piutang jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.03	Pengelola Pemerintah	(10.362.677.871)	(3.249.727.244.519)
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	570.724.537.649	2.288.790.574.086
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	-	6.175.000.000
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	975.469.928	287.969.820.936
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	11.921.416.324.439	(1.759.810.843.182)
Jumlah		12.482.753.654.145	(2.426.602.692.679)

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA 999.03 sebesar minus Rp10.362.677.871 merupakan beban penyisihan piutang tidak tertagih, piutang PNPB dan beban dana bergulir diragukan tertagih lainnya. Perhitungan Beban Penyisihan Piutang Dana Bergulir – Kementerian Negara/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan. Jumlah tersebut merupakan penurunan defisit dari 2023 yang berjumlah minus Rp3.249.727.244.519, menurun Rp3.239.364.566.648 atau turun 99,68 persen.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.03 dapat dirinci berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	KPA Direktorat PNPB DJA (984501)	60.912.409.391	6.650.000.000
2	KPA BLU Set BPJT (984102)	(326.870.726.003)	(3.490.953.428.945)
3	KPA BLU LPMUKP (984848)	803.509.152	15.578.472.498
4	KPA Dit SMI (961671)	231.177.523.204	95.995.937.444
5	KPA BLU LPDB KUMKM	23.614.606.385	123.001.774.484
Jumlah		(10.362.677.871)	(3.249.727.244.519)

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebagai berikut:

1. KPA Direktorat PNBP DJA (984501)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sampai dengan Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp60.912.409.391 dan Rp6.650.000.000. Terdapat kenaikan sebesar Rp54.262.409.391 atau naik 815,98 persen.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih tersebut merupakan beban penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Perum Perumnas, dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Nilai Angsuran Restrukturisasi	Pembayaran	Bagian Lancar	% Penyisihan	Status Piutang	Nilai Penyisihan
2020	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2021	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2022	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2023	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	100%	Macet	6.500.000.000
2024	7.500.000.000	1.000.000.000	6.500.000.000	10%	Kurang Lancar	650.000.000
2025	7.500.000.000		7.500.000.000			
Jumlah Piutang			40.000.000.000	Jumlah Penyisihan 2024		26.650.000.000
Penyisihan 2023						20.150.000.000
Beban penyisihan piutang 2024						6.500.000.000

Terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas dividen interim PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp54.412.409.391 yang berasal dari pengakuan piutang atas dividen interim PT Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp10.882.481.878.260.

2. KPA Set BPJT (984102)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk Tahun 2024 audited dan Tahun 2023 Audited masing-masing sebesar (Rp326.870.726.003) dan (Rp3.490.953.428.945). Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencadangkan investasi non permanen BLU yang tak tertagih. Beban penyisihan piutang bernilai negatif dikarenakan adanya perubahan kualitas dana bergulir yang dilatarbelakangi oleh perjanjian atau restrukturisasi Dana Bergulir antara BUJT dan BPJT.

Adapun rincian beban penyisihan dana bergulir sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut.

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir Diragukan tertagih 2023	Dana Bergulir Diragukan tertagih 2024	Beban Penyisihan
PT. Jasa Marga Surabaya-Mojokerto/ Surabaya –Mojokerto	14.205.829.218	4.580.461.945	(9.625.367.273)
PT. Pemalang Batang Toll Road / Pemalang - Batang	17.373.017.246	3.255.609.606	(14.117.407.640)
PT. Trans Marga Jateng / Semarang – Solo (Bawen – Kartasura)	9.646.505.463	2.973.570.553	(6.672.934.910)
PT. Marga Setiapuritama / Semarang – Batang	17.380.830.821	17.380.830.821	-
PT. Pejagan Pemalang Tol Road / Pejagan – Pemalang	17.600.713.897	-	(17.600.713.897)
PT. Translingkar Kita Jaya / Cinere – Jagorawi	31.399.367.332	-	(31.399.367.332)

BUJT/Ruas Jalan Tol	Dana Bergulir Diragukan tertagih 2023	Dana Bergulir Diragukan tertagih 2024	Beban Penyisihan
PT. Transjabar Tol / Ciawi – Sukabumi	69.192.193.620	-	(69.192.193.620)
PT. Marga Kunciran Cengkareng/ Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran	75.022.562.920	30.380.286.625	(44.642.276.295)
PT. Marga Trans Nusantara / Kunciran – Serpong	54.861.766.703	19.235.300.141	(35.626.466.562)
PT. Citra Waspphutowa / Depok – Antasari	52.544.821.638	-	(52.544.821.638)
PT. MTD-CPP Expressway / Cibitung- Cilincing	28.599.678.962	-	(28.599.678.962)
PT Cimanggis Cibitung Toll Way / Cimanggis-Cibitung	16.849.497.873	-	(16.849.497.873)
Jumlah	404.676.785.693	77.806.059.691	(326.870.726.002)*

*Selisih sebesar Rp1 pada saldo akhir Beban Penyisihan merupakan pembulatan.

3. KPA BLU LPMUKP (984848)

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih berasal dari saldo akhir akun-akun Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada buku besar akrual yang merupakan transaksi perhitungan akuntansi atas penyajian nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih untuk Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited masing-masing sebesar **Rp803.509.152** dan **Rp15.578.472.498**. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 Audited, beban Penyisihan Piutang tak tertagih tersebut mengalami penurunan sebesar **Rp14.774.963.346** atau **94,84** persen. Penurunan tersebut diakibatkan oleh adanya koreksi persentase nilai jaminan pada nilai perhitungan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih.

4. KPA Dit. SMI (961671)

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Pokok Tak Tertagih pada Direktorat SMI untuk Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited masing-masing sebesar Rp231.177.523.204 dan Rp95.995.937.444. Nilai beban penyisihan sebesar Rp231.177.523.204 berasal dari beban penyisihan piutang tak tertagih pada BLU BPDH sebesar Rp183.895.719.715 dan BLU PIP sebesar Rp47.281.803.489 dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Outstanding Awal	Pengurangan Nilai Jaminan	Saldo Setelah Dikurangi Jaminan	Tarif	Penyisihan Akhir
Lancar	697.569.955.980	177.006.712.267	520.563.243.714	0,50%	2.602.816.219
Kurang Lancar	75.480.938.366	33.087.120.000	42.393.818.366	10%	4.239.381.837
Diragukan	14.816.203.251	421.808.000	14.394.395.252	50%	7.197.197.625
Macet	543.562.428.074	112.363.797.561	431.198.630.513	100%	431.198.630.513
Lunas Pokok					-
Total	1.331.429.525.671	322.879.437.828	1.008.550.087.845		445.238.026.194
Dana DNS dalam keadaan macet (tidak menambah beban penyisihan)					(16.085.306.116)
Saldo Penyisihan Tahun 2023 (Audited)					245.257.000.363
Pengakuan Beban Penyisihan Piutang Desember 2024					183.895.719.715

Pada BLU BPDH mulai tahun 2021, sesuai dengan rekomendasi BPK sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BA Investasi Pemerintah (BA 999.03) Tahun 2020 pada UAKPA BUN BPDH yang disampaikan oleh Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan kepada Direktur Utama BLU BPDH sebagai tembusan melalui ND-805/PB.6/2021, dilakukan perhitungan jaminan sebagai pengurang penyisihan piutang. Berdasarkan pendataan yang dilakukan,

Nilai perhitungan jaminan ini akan terus bertambah seiring dengan proses pendataan yang saat ini tengah dilakukan.

Pada BLU PIP, Beban dana penyesihan dana bergulir untuk Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited masing-masing sebesar Rp47.281.803.489 dan Rp0, mengalami peningkatan sebesar Rp47.281.803.489. Adapun rincian beban penyesihan dana bergulir pada BLU PIP adalah sebagai berikut.

No.	Kualitas Piutang	Nilai Outstanding	Penyesihan (%)	Nilai Penyesihan
1	Lancar	8.351.516.162.166	0,5	41.757.580.811
2	Kurang lancar	1.823.908.044	10	182.390.804
3	Diragukan	983.926.072	50	491.963.036
4	Maccet	45.222.663.113	100	45.222.663.113
Jumlah		8.399.546.659.395		87.654.597.764
Saldo penyesihan awal periode				40.372.794.275
Pengakuan beban periode Tahun 2024 Audited				47.281.803.489

5. KPA BLU LPDB KUMKM

Beban Penyesihan Piutang Dana Bergulir periode Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited masing-masing sebesar Rp23.614.606.385 dan Rp123.001.774.484, mengalami penurunan sebesar Rp99.387.168.099 atau 80,80 persen. Beban Penyesihan Piutang Dana Bergulir merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih termasuk dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) atas dasar jumlah piutang dana bergulir. Nilai Beban Penyesihan Piutang Dana Bergulir menurun dikarenakan adanya penurunan nilai dana bergulir diragukan tertagih.

- Perhitungan Beban Penyesihan Piutang Dana Bergulir-Kementerian/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam Bentuk Tagihan. Beban Penyesihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Pemberian Pinjaman (999.04) tahun 2023 sebesar Rp570.724.537.649 mengalami penurunan sebesar Rp1.718.066.036.437 dari 2023 sebesar Rp2.288.790.574.086 atau turun 75,06 persen dari tahun 2023.

Beban Penyesihan Piutang Tak Tertagih pada BA BUN 999.04 dihitung berdasarkan selisih antara akumulasi penyesihan piutang tak tertagih periode Tahun Anggaran Berjalan dan akumulasi penyesihan piutang tak tertagih periode Tahun Anggaran Yang Lalu, dikurangi dengan Penyesihan Piutang Tak Tertagih yang dihapuskan.

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Penyesihan Piutang - Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	419.088.180.946	2.529.951.643.802
2	Beban Penyesihan Piutang - Piutang Bunga Pemberian Pinjaman	170.945.031.603	(218.531.471.032)
3	Beban Penyesihan Piutang - Piutang Denda Penerusan Pinjaman	(8.754.676.730)	8.298.280.186
4	Beban Penyesihan Piutang - Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	(2.170.791.723)	(21.606.440.019)
5	Beban Penyesihan Piutang - Aset Lainnya Kredit Program	(8.383.206.447)	(9.321.438.851)
Jumlah		570.724.537.649	2.288.790.574.086

Beban Penyesihan Piutang Tak Tertagih dari BA BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) sebesar Rp0 merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp6.175.000.000

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA 999.08) merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp975.469.928** dan Rp287.969.820.936, dengan rincian:

Kementerian Negara/ Lembaga	TA 2024	TA 2023
Kementerian Pertanian	0	287.456.616.740
Kementerian Kominfo	0	45.489.439
MPP Kartu Prakerja	978.093.960	553.313.000
Otoritas Jasa Keuangan	75.104	(119.223.400)
Kementerian Keuangan	(5.169.960)	31.993.583
SKK Migas	2.470.824	1.631.574
Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	975.469.928	287.969.820.936

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih terdapat pada MPPKP sebesar Rp978.093.960, Otoritas Jasa Keuangan sebesar Rp75.104, Kementerian Keuangan sebesar minus Rp5.169.960 dan SKK Migas sebesar Rp2.470.824.

Beban Penyisihan Piutang pada Kementerian Pertanian pada tahun 2024 sebesar Rp0, pada tahun 2023 penyisihan piutang tak tertagih dari 50 persen menjadi sebesar 100 persen (berstatus macet), dan pada tahun 2024 tidak ada perubahan nilai piutang sehingga beban penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp0.

Adapun Penurunan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kominfo dikarenakan adanya penghapusan penyisihan piutang atas Piutang yang telah lunas pada tahun 2024.

Dan pada MPPKP terdapat kenaikan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih disebabkan karena adanya pengakuan terhadap piutang yang telah lewat satu tahun sehingga statusnya yang semula kurang lancar menjadi diragukan, dan terdapat pula penghapusan penyisihan piutang yang telah lunas pada tahun 2024, rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
1	Pengembalian atas Biaya Pelatihan yang menjadi Temuan Pemantauan Kita Mahir S-101	226.854.000	63.465.000
2	Pengembalian atas Biaya Pelatihan yang menjadi Temuan Pemantauan ZenPro by Zenius S-102	747.179.160	385.828.000
3	Pengembalian atas Biaya Pelatihan yang menjadi Temuan Pemantauan ZenPRO BY Zenius S-103	4.060.800	70.570.000
4	Tuntutan Perbendaharaan	-	33.000.000
5	Pengembalian atas Biaya Pelanggaran yang menjadi Temuan Pemantauan Bukalapak S-104	-	450.000
Total		978.093.960	553.313.000

Tata cara pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Pasal 4 (3) disebutkan bahwa selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih antara saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal pelaporan menurut daftar perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih

dengan saldo penyisihan piutang tidak tertagih pada neraca percobaan sebelum penyesuaian diakui sebagai pengurang (dikredit ke) beban penyisihan piutang tidak tertagih dan sebagai pengurang (didebet ke) penyisihan piutang tidak tertagih. Pasal 4 (4) menyebutkan bahwa dalam hal selisih penurunan penyisihan piutang tidak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo negatif (kredit), disajikan di dalam Laporan Operasional sebagai beban negatif.

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA 999.99) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar **Rp11.921.416.324.439** dan minus Rp1.759.810.843.182 terdiri dari:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Dana Pensiun & THT	538.960.073	667.995.691
2	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BLBI	11.714.079.497.589	(1.806.366.692.066)
3	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Satker KKKS	1.397.331.718	639.667.902
4	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset Supersemar	220.855.080.513	(47.062.433.591)
5	Beban Penyisihan Piutang pada pengelola PNBPN Migas	-	240.825.470.367
6	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Kas Negara	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang pada Pengelola Aset BPLS	(15.454.545.454)	(148.514.851.485)
Jumlah		11.921.416.324.439	(1.759.810.843.182)

E.2.2.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp262.572.777.745.764** dan **Rp285.685.594.646.021**. Beban Lain-lain pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp23.112.816.900.257** atau turun **8,09 persen** bila dibandingkan dengan Tahun 2023. Penurunan signifikan terjadi pada beban lain-lain BUN Lainnya Dana Kompensasi. Beban Lain-lain bila dirinci berdasarkan pengelola sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	7.315.144.183.326	30.071.958.447.946
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	221.773.148.742.500	227.868.924.522.553
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	33.732.897.089.678	28.126.443.685.484
999.99	Eliminasi Beban Lain-lain	(248.412.269.740)	(381.732.009.962)
Jumlah		262.572.777.745.764	285.685.594.646.021

- **Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (BA BUN 999.03)**

Beban Lain-lain pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah pada Tahun 2024 sebesar **Rp7.315.144.183.326** merupakan Beban Penyesuaian Nilai Investasi. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang bernilai **Rp30.071.958.447.946**, terjadi penurunan sebesar **Rp22.756.814.264.620** atau **75,67** persen jika dibandingkan dengan periode Tahun 2023 Audited. Rincian beban penyesuaian investasi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP	-	553.996.829.070
2	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN	7.315.144.183.326	11.394.338.053.675

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
3	Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN	-	18.117.843.166.212
4	Beban Penyesuaian Nilai Investasi Pemerintah Dit SMI	-	5.780.398.989
Jumlah		7.315.144.183.326	30.071.958.447.946

Beban Penyesuaian nilai investasi UAIP

Beban Penyesuaian nilai investasi pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp553.996.829.070. Terdapat penurunan sebesar 100 persen. Rincian mengenai Beban Lain-Lain yang tercatat pada Laporan Keuangan BUN BA 999.03 lingkup UAIP adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	BPJS Kesehatan	-	404.287.397.420
2	Institut Teknologi Bandung	-	149.709.431.650
Jumlah		-	553.996.829.070

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA Kementerian BUMN

Beban penyesuaian yang dibukukan BUMN/Badan Usaha di bawah Kementerian BUMN pada tahun 2024 audited dan tahun 2023 audited masing-masing sebesar Rp7.315.144.183.326 dan Rp11.394.338.053.675. Beban penyesuaian nilai investasi lingkup KPA Kementerian BUMN terdiri atas:

1. Beban Penyesuaian Nilai Investasi Non Permanen pada tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar minus Rp1.093.750.000 dan Rp3.050.095.695. Nilai tersebut merupakan perubahan penyisihan nilai investasi non permanen dikarenakan adanya penyetoran nilai pokok investasi PEN PT KAI (Persero); dan
2. Bagian pemerintah atas rugi operasional tahun berjalan yang dibukukan/diumumkan perusahaan negara di bawah Kementerian BUMN dalam Laporan Keuangan sebesar Rp7.316.237.933.326 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	BUMN Persero	7.193.258.575.990	11.242.911.042.182
2	BUMN Perum	122.979.357.336	148.376.915.798
3	Non BUMN	-	-
Jumlah		7.316.237.933.326	11.391.287.957.980

Realisasi beban dari bagian rugi pemerintah pada perusahaan negara Tahun 2024 Audited sebesar **Rp7.316.237.933.326** mengalami penurunan sebesar **Rp4.079.193.870.349** atau turun **35,80** persen dibandingkan dengan beban Tahun 2023 Audited yang sebesar **Rp11.391.287.857.980**.

Penurunan bagian rugi pemerintah (beban) ini sebagian besar dikontribusikan oleh penurunan kerugian beberapa Persero pada Klaster Infrastruktur dan Klaster Industri Kesehatan. Pada Klaster Infrastruktur, terdapat 2 BUMN yang mengalami penurunan kerugian yang signifikan yaitu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (semula Rp4,6 triliun menjadi Rp2,1 triliun) disebabkan kenaikan pendapatan lain-lain sebagai imbas dari restrukturisasi pinjaman, serta PT Waskita Karya (semula Rp2,8 triliun menjadi Rp1,9 triliun) disebabkan penurunan beban pokok pendapatan dan beban keuangan. Pada Klaster Industri Kesehatan yaitu PT Bio Farma (Persero) (semula Rp2,3 triliun menjadi Rp663 miliar), penurunan kerugian disebabkan karena pada tahun 2023, terdapat non-recurring expense berkaitan dengan *impairment* produk Covid-19 yang tidak dapat diserap pasar serta adanya kenaikan pendapatan lain-lain pada tahun 2024 yang berasal dari keuntungan kurs dan pembalikan pencadangan kontijensi OWK di Perusahaan anak PT Bio Farma (Persero).

Selain itu, Perum juga mencatatkan perbaikan (penurunan kerugian) sebesar Rp25,40 miliar atau membaik 17,12 persen utamanya dikontribusikan oleh Perum Perumnas yang mencatatkan keuntungan pada tahun 2024 (laba Rp9,57 miliar) setelah sebelumnya mengalami kerugian signifikan pada tahun 2023 (rugi Rp100,97 miliar). Keuntungan Perumnas ini seiring dengan efisiensi beban pokok pendapatan pada rumah tinggal dan ruko serta adanya pencatatan pendapatan lain-lain (revaluasi properti investasi) yang cukup signifikan. Namun demikian, masih terdapat Perum yang membukukan kerugian, yaitu Perum PNRI (2024: -Rp122,98 miliar; 2023: -Rp47,41 miliar).

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN

Beban Penyesuaian nilai investasi KPA DJKN pada Tahun 2024 Audited dan Tahun 2023 Audited masing-masing sebesar Rp0 dan Rp18.117.843.166.212. Pada periode Tahun 2024 Audited seluruh BUMN/Lembaga di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki ekuitas positif tidak membukukan rugi, sehingga nilai beban penyesuaian nilai investasi sebesar nihil.

Namun terdapat satu BUMN yaitu PT BIKA yang masih memiliki ekuitas negatif sebesar (Rp29.474.665.035) dengan rugi bersih sebesar (Rp22.265.328.105). Berdasarkan PMK Nomor 174 Tahun 2023, dalam hal terdapat nilai beban penyesuaian nilai investasi di LO tahun berjalan menyebabkan penyajian nilai outstanding Investasi permanen di Neraca menjadi nilai negatif (saldo buku besar Investasi kredit), maka nilai outstanding negatif tersebut tidak disajikan sebagai Investasi permanen dalam pos Investasi jangka panjang di Neraca tetapi dijelaskan secara memadai di CaLK.

• Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (BA BUN 999.08)

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp221.773.148.742.500 dan Rp227.868.924.522.553. Terdapat penurunan sebesar 2,68 persen dari periode sebelumnya atau turun sebesar Rp6.095.775.780.053. Rincian atas Beban Lain-Lain untuk tahun 2024 dan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN JENIS BEBAN	TA 2024	TA 2023
Beban Cadangan Beras Pemerintah	0	21.907.297.958.895
Beban Ongkos Angkut Beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat	115.546.341.297	110.372.876.508
Beban Lain-Lain BUN Lainnya	216.276.752.618.467	200.888.732.293.042
Beban Lain-Lain	5.380.849.782.736	4.962.521.394.108
Jumlah Beban Lain-Lain	221.773.148.742.500	227.868.924.522.553

Beban ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Papua dan Papua Barat sebesar Rp115.546.341.297 terdapat pada:

1. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua sebesar Rp106.854.376.765;
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 8.691.964.532.

Beban Lain-lain BUN lainnya sebesar Rp216.276.752.618.467, terdiri dari:

Uraian	Pembayaran Trw.I s.d III	Utang			Total Beban (Unaudited)	Koreksi Berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan BPK	Total Beban (Audited)
		Trw.III	Trw.IV	Jumlah			
A. BBM	84.948.115.217.573	16.161.712.873.929	15.035.365.466.813	31.197.078.340.742	116.145.193.558.315	(71.227.319.374)	116.073.966.238.941
1 PPN	84.414.673.528.725	16.161.712.873.929	14.916.810.464.985	31.078.523.338.914	115.493.196.867.639	(71.214.176.339)	115.421.982.691.300
1a. Solar	40.016.400.869.516	16.161.712.873.929	12.511.258.712.398	28.672.971.586.327	68.689.372.455.843	(69.330.649.178)	68.620.041.806.665
1b. Peralite	44.398.272.659.209	-	2.405.551.752.587	2.405.551.752.587	46.803.824.411.796	(1.883.527.161)	46.801.940.884.635

Uraian	Pembayaran Trw.I s.d III	Utang			Total Beban (Unaudited)	Koreksi Berdasarkan BA Hasil Pemeriksaan BPK	Total Beban (Audited)
		Trw.III	Trw.IV	Jumlah			
2. AKR	533.441.688.848	-	118.555.001.828	118.555.001.828	651.996.690.676	(13.143.035)	651.983.547.641
2a. Solar	533.441.688.848	-	118.555.001.828	118.555.001.828	651.996.690.676	(13.143.035)	651.983.547.641
B. Listrik (PLN)	62.751.888.725.755	9.857.681.018.950	27.704.385.115.858	37.562.066.134.808	100.313.954.860.563	(111.168.481.037)	100.202.786.379.526
Jumlah (A+B)	147.700.003.943.328	26.019.393.892.879	42.739.750.582.671	68.759.144.475.550	216.459.148.418.878	(182.395.800.411)	216.276.752.618.467

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Triwulan I Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-625/MK.02/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Triwulan I Tahun 2024 dan Penetapan Final Kompensasi Tahun 2023 sebesar Rp17.941.762.134.289.
2. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Triwulan I Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-625/MK.02/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Triwulan I Tahun 2024 dan Penetapan Final Kompensasi Tahun 2023 sebesar Rp11.945.261.813.715.
3. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Triwulan I Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-626/MK.02/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Periode Triwulan I Tahun 2024 dan Penetapan Final Kompensasi Tahun 2023 sebesar Rp171.574.640.383.
4. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Triwulan I Tahun 2024 dan nilai Final Kompensasi Tahun 2023 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-627/MK.02/2024 tanggal 25 Juli 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Triwulan I Tahun 2024 dan nilai Final Kompensasi Tahun 2023 sebesar Rp23.489.296.982.369
5. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Triwulan II Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1026/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp18.718.389.058.227.
6. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Triwulan II Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1026/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu

(JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp19.309.260.523.037.

7. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Triwulan II Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1025/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Periode Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp174.436.686.117.
8. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Triwulan II Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1021/MK.02/2024 tanggal 6 November 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp23.050.022.106.386.
9. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Triwulan III Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1194/MK.02/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp19.517.962.550.929.
10. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Triwulan III Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1194/MK.02/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Bensin (Gasoline) RON 90 Periode Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp13.143.750.322.457.
11. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Triwulan III Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1195/MK.02/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk akibat Penetapan Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar Periode Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp187.430.362.348.
12. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Triwulan III Tahun 2024 sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-1193/MK.02/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp26.070.250.655.950.
13. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Triwulan IV Tahun 2024 sesuai hasil revidi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (LKBUN BA 999.08) Tingkat UAKPA BUN Belanja Lain-Lain Dana Kompensasi (Kode Satker 999510) Untuk Periode Tahun Anggaran 2024 Unaudited nomor CHR-7/IJ.6/LK/UAKPA/999.08/2025 tanggal: 13 Februari 2025 sebesar Rp12.511.258.712.398.
14. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Triwulan IV Tahun 2024 sesuai hasil revidi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (LKBUN BA 999.08) Tingkat UAKPA BUN Belanja Lain-Lain Dana Kompensasi (Kode Satker

999510) Untuk Periode Tahun Anggaran 2024 Unaudited nomor CHR-7/IJ.6/LK/UAKPA/999.08/2025 tanggal: 13 Februari 2025 sebesar Rp2.405.551.752.587.

15. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Triwulan IV Tahun 2024 sesuai hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (LKBUN BA 999.08) Tingkat UAKPA BUN Belanja Lain-Lain Dana Kompensasi (Kode Satker 999510) Untuk Periode Tahun Anggaran 2024 Unaudited nomor CHR-7/IJ.6/LK/UAKPA/999.08/2025 tanggal: 13 Februari 2025 sebesar Rp118.555.001.828.
16. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Triwulan IV Tahun 2024 sesuai hasil reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (LKBUN BA 999.08) Tingkat UAKPA BUN Belanja Lain-Lain Dana Kompensasi (Kode Satker 999510) Untuk Periode Tahun Anggaran 2024 Unaudited nomor CHR-7/IJ.6/LK/UAKPA/999.08/2025 tanggal: 13 Februari 2025 sebesar Rp27.704.385.115.85

Terdapat koreksi berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lembaga Pemeriksa yang berwenang sehingga beban menjadi Rp216.276.752.618.467, dengan rincian:

1. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (HJE BBM) JBT Minyak Solar Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kompensasi BBM Tahun 2024 pada PT Pertamina Patra Niaga tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp68.620.041.806.665.
2. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT Pertamina Patra Niaga akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBKP Peralite Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kompensasi BBM Tahun 2024 pada PT Pertamina Patra Niaga tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp46.801.940.884.635.
3. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT AKR Corporindo, Tbk. akibat Kebijakan Penetapan HJE BBM JBT Minyak Solar Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kompensasi BBM Tahun 2024 pada PT AKR Corporindo Tbk tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp651.983.547.641.
4. Beban atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kompensasi Listrik Tahun 2024 pada PT PLN (Persero) tanggal 5 Mei 2025 sebesar Rp100.202.786.379.526.

Beban lain-lain sebesar Rp5.380.849.782.736 terdapat pada:

1. Istana Kepresidenan Jakarta sebesar Rp124.296.880.863 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Presiden;
2. Sekretariat Wakil Presiden sebesar Rp36.769.181.005 merupakan beban untuk keperluan dana bantuan kemasyarakatan Wakil Presiden;
3. Ditjen PPI Kemenkominfo sebesar Rp366.844.830.481 merupakan beban yang digunakan untuk bantuan operasional Layanan Pos Universal;
4. BP Batam sebesar Rp31.647.148.752 merupakan beban operasional kegiatan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam/Bintan/Karimun;
5. SKK Migas sebesar Rp1.734.920.183.672 merupakan beban operasional kegiatan SKK Migas.

6. MPPK sebesar Rp3.094.486.232.820 merupakan beban operasional kegiatan MPPKP.

• **Beban Lain-Lain pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA BUN 999.99)**

Sedangkan Beban Lain-lain dari BUN Pengelola Transaksi Khusus (BA BUN 999.99) tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp33.732.897.089.678 dan Rp28.126.443.685.484 mengalami penurunan sebesar Rp5.606.453.404.194 atau turun 19,93 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2023. Beban Lain-lain Pengelola Transaksi Khusus bila dirinci menurut satuan kerja sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Satker Pengelola PNBPN Pengelola Dana Pensiun, Askes, Program THT, Belanja PPN BI RTGS, Belanja Selisih Harga Beras Bulog (987361)		
	Beban Jasa Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	119.748.067.230	121.245.799.637
2	Satker Transaksi Khusus pada PNBPN BUN (999257)		
	Beban pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah	95.346.558.090	39.534.780.432
3	Satker Transaksi Khusus pada KPPN KPH (999928)		
	Beban Karena Rugi Selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	8.908.096.804	77.571.373
	Satker Transaksi Khusus pada KPPN Jakarta III (999931)		
	Belanja karena rugi selisih kurs dalam pengelolaan rekening milik BUN	47.242.671	-
4	Satker Transaksi Khusus Pengelola Kas Negara (999981)		
	Belanja Rugi selisih Kurs Dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	718.164.669.744	546.572.902.378
5	Satker Pengelola Migas (984572)		
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Air Tanah	-	-
	Beban Pihak Ketiga Migas-Pajak Penerangan Jalan Non PLN	-	375.142.063
	Beban Pihak Ketiga Migas-DMO Fee KKKS	8.481.627.613.119	7.446.795.948.188
	Beban Pihak Ketiga Migas-Reimbursement PPN	8.164.044.154.037	9.413.358.823.013
	Beban Pihak Ketiga Migas-Underliftng KKKS	14.637.640.165.940	8.710.632.696.910
	Beban Pihak Ketiga Migas - Fee Penjualan	447.638.193.778	406.481.209.046
5	Satker Pengelola Panas Bumi (984588)		
	Beban pembayaran reimbursement PPN	30.734.471.326	152.398.856.442
	Beban pembayaran penggantian bonus produksi	81.852.764.970	109.575.132.791
	Beban pihak ketiga diestimasi – reimbursement PPN	306.964.375.046	367.101.143.558
	Beban pihak ketiga diestimasi – PBB panas bumi	375.813.805.470	430.561.669.691
	Beban pihak ketiga diestimasi – penggantian bonus produksi	15.954.641.713	-
	Beban diestimasi setoran kepada pemerintah	248.412.269.740	381.732.009.962
Jumlah		23.824.789.899.404	28.126.443.685.484

E.2.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing pada tahun 2024 surplus sebesar Rp19.721.331.278.834 dan tahun 2023 surplus Rp61.050.114.639.751. Surplus/(Defisit) kegiatan non operasional pada Tahun 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp41.328.783.360.917 atau turun 67,07 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2023. Penurunan tersebut berasal dari surplus/(defisit) Selisih Kurs belum terealisasi pada BA BUN Pengelola Utang. Surplus tahun 2024 berasal dari defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus kegiatan non operasional lainnya dan bila dibandingkan dengan tahun 2023 sebagaimana rincian berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	(684.927.964.114)	(548.331.294.499)
2	Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(129.960.500.000)	(431.442.410.900)
3	Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	20.536.219.742.948	62.029.888.345.150
Jumlah		19.721.331.278.834	61.050.114.639.751

E.2.3.1. Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar defisit Rp684.927.964.114 dan defisit Rp548.331.294.499. Defisit Penjualan Aset Non Lancar mengalami kenaikan defisit sebesar Rp136.596.669.615 atau defisitnya naik 24,91 persen bila dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kenaikan defisit ini terjadi utamanya karena kenaikan beban penjualan aset non lancar BA BUN Pengelola Transaksi Khusus yaitu pada satker Pengelola Aset KKKS SKK Migas.

Defisit Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp684.927.964.114 bila dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	64.958.841.329	92.339.321.999
2	Beban Penjualan Aset Non Lancar	749.886.805.443	640.670.616.498
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		(684.927.964.114)	(548.331.294.499)

Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2024 berdasarkan BA BUN dapat dirinci sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.08	Pengelola Belanja Lain-lain	(3.714.739.618)	(9.956.622.675)
999.99	Pengelola Transaksi Khusus	(681.213.224.496)	(538.374.671.824)
Surplus/(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar		(684.927.964.114)	(548.331.294.499)

- Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2024 pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) sebesar Rp3.714.739.618 terdiri dari Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp360.438.000 yang terdiri dari sebesar Rp36.286.000 pada satker SKK Migas dan Rp324.152.000 pada OJK. Sementara itu, Beban Penjualan Aset Non Lancar pada BA BUN Pengelola Belanja Lain-Lain (999.08) sebesar Rp4.075.177.618 terdiri dari:
 - Beban kerugian penjualan asset pada Satker OJK sebesar Rp117.479.832 disebabkan adanya Hibah BMN Peralatan dan Mesin (nilai per unit di atas Rp100juta dan nilai perunit sampai dengan Rp100juta ke DJA) berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor dan yang telah dilakukan serah terima berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor BA-32/AG/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan BA-33/AG/2024 tanggal 24 April 2024. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-51/AG/2024 tanggal 22 April 2024 dan Nomor KEP-55/AG/2024 tanggal 17 Mei 2024, telah dilakukan penghapusan barang dari Daftar Barang di Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada tanggal 21 Mei 2024 dan 24 Juni 2024.
 - Satker DKPBPB Batam sebesar Rp3.957.697.786 merupakan beban penjualan atas koreksi pada Konstruksi dalam pengerjaan yang berada pada BP Bintang sebesar Rp394.495.110 dan pada BP Karimun sebesar Rp3.563.202.676.

- 3) Defisit Penjualan Aset Non Lancar pada Tahun 2024 terdapat pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar Rp681.213.224.496 terdiri dari Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp64.598.403.329 dan Beban Penjualan Aset Non Lancar Rp745.811.627.825 dan dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai	TA 2024
1	Satker DJKN PKP2B (984555)		(131.372.462.016)
	Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	32.733.099.000	
	Beban Penjualan Aset Non Lancar	164.105.561.016	
2	Satker DJKN Pengelola Aset Lain-lain (984594)		(465.031.402)
	Beban Penjualan Aset Non Lancar	465.031.402	
3	Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada PPBMN (999242)		(97.768.840.452)
	Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	11.284.851.770	
	Beban Penjualan Aset Non Lancar	109.053.692.222	
4	Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada SKK Migas (999904)		(373.962.573.680)
	Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	18.435.149.059	
	Beban Penjualan Aset Non Lancar	392.397.722.739	
5	Satker DJKN Pengelola Aset KKKS pada BPMA (999905)		-
	Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar		
6	Satker DJKN Pengelola ABMAT (984608)		(79.641.246.000)
	Beban Penjualan Aset Non Lancar	79.641.246.000	
7	Satker DJKN Pengelola Aset BLBI (978706)		1.943.083.500
	Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	1.943.083.500	
	Beban Penjualan Aset Non Lancar	-	
8	Satker DJKN Pengelola Aset eks Pertamina (984413)		202.220.000
	Pendapatan Penjualan Aset Non Lancar	202.220.000	
	Beban Penjualan Aset Non Lancar		
9	Satker DJKN Pengelola BMN Idle (984614)		(148.374.446)
	Beban Penjualan Aset Non Lancar	148.374.446	
Jumlah			(660.938.926.558)

E.2.3.2. Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar defisit Rp129.960.500.000 dan defisit Rp431.442.410.900. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2024 mengalami penurunan defisit sebesar Rp301.481.910.900 atau turun 69,88 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2023 atas selisih antara *Gain* dan *Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Debtswitch*). Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2023 berasal dari BA BUN Pengelola Utang (999.01) yang merupakan Beban *Pembayaran Loss on Bond Redemption* atas Pembelian Kembali Obligasi Negara (*Debtswitch*) baik dalam rupiah maupun valas. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang pada Tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun 2023 dapat dilihat pada rincian berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
<i>Pendapatan gain on bond redemption</i> atas pembelian kembali obligasi negara jangka panjang	30.359.000.000	105.211.500.000
<i>Belanja loss on bond redemption</i> atas pembelian kembali obligasi negara	(160.319.500.000)	(536.653.910.900)
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	(129.960.500.000)	(431.442.410.900)

E.2.3.3. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar surplus Rp20.536.219.742.948 dan surplus Rp62.029.888.345.150. Surplus/(defisit) ini mengalami penurunan sebesar Rp41.493.668.602.202 atau 66,89 persen bila dibandingkan dengan Tahun 2023. Surplus sebesar Rp20.536.219.742.948 terdiri dari kerugian selisih kurs belum terealisasi sebesar - Rp4.603.822.601.191 dan surplus kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp25.140.042.344.139 Rincian Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.01	Pengelola Utang	(14.792.236.659.517)	29.996.260.087.088
999.02	Pengelola Hibah	404.410.273	-
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.305.558.944.251	(73.266.160.988)
999.04	Pengelola Penerusan Pinjaman	(183.794.680.918)	(58.082.961.244)
999.05	Pengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa	76.857.880.275	335.480.385.568
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	39.684.616.354	19.375.748.690
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	3.956.335.276	34.748.330.594
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	34.085.788.896.954	31.775.372.915.442
Jumlah		20.536.219.742.948	62.029.888.345.150

Surplus/(Defisit) Dari Selisih Kurs Belum Terealisasi

Defisit Dari Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp4.603.822.601.191 apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.01	Pengelola Utang	(14.792.236.659.517)	29.996.279.583.634
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	1.312.810.925.340	(242.329.465.326)
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	(183.794.680.921)	(58.082.961.250)
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	(157.995.900)	33.667.650
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	9.059.555.809.807	(1.164.519.342.900)
Jumlah		(4.603.822.601.191)	28.531.381.481.808

- BA 999.01**

Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Bagian Anggaran BUN Pengelola Utang (999.01) sebesar Rp14.792.236.659.517 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar Rp62.599.298.888.766 yang merupakan pendapatan atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban dengan Beban Selisih Kurs yang belum terealisasi sebesar Rp77.391.535.548.283 yang merupakan beban atas selisih antara nilai neraca dan nilai transaksi kewajiban. Kenaikan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi dan penurunan beban kerugian selisih kurs yang belum terealisasi disebabkan utamanya karena kenaikan nilai tukar Rupiah pada mata uang asing pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2023. Pendapatan dan Beban selisih kurs dapat dirinci antara selisih kurs atas pinjaman dan selisih kurs atas SBN sebagaimana tabel berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	62.599.298.888.766	41.462.813.038.358
Surat Berharga Negara	5.948.610.220.000	18.805.028.581.000
Pinjaman	56.650.688.668.766	22.657.784.457.358
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	77.391.535.548.283	11.466.533.454.724

Uraian	TA 2024	TA 2023
Surat Berharga Negara	54.925.854.609.000	4.856.601.405.000
Pinjaman	22.465.680.939.283	6.609.932.049.724
Jumlah	(14.792.236.659.517)	29.996.279.583.634

• **BA 999.03**

Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.312.810.925.340 dan sebesar **minus Rp242.329.465.326**. Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi terdiri dari Pendapatan selisih kurs belum terealisasi dan Beban Kerugian selisih kurs yang belum terealisasi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	1.313.625.868.264	173.657.754
2	Beban selisih kurs belum terealisasi	(814.942.924)	(242.503.123.080)
Jumlah		1.312.810.925.340	(242.329.465.326)

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional merupakan Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi pada UAKPA BKF. Pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi masing-masing sebesar Rp1.313.625.868.264 dan sebesar Rp173.657.754. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp1.313.625.868.264 berasal dari kenaikan nilai investasi sebesar Rp1.313.566.951.147 dan penurunan nilai kewajiban jangka panjang Pemerintah pada LKI sebesar Rp58.917.117. Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi pada Tahun 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

No.	LKI	Saldo Awal (Rp)	Transaksi Thn Berjalan (Rp)	Selisih Hasil Konfirmasi (Rp)	Saldo Akhir Rupiah (Rp)	Laba/Rugi Selisih Kurs Saldo akhir (-) saldo awal (-) transaksi thn berjalan (-) koreksi
1	Asian Development Bank (ADB)	5.977.449.868.229	-	-	6.071.724.791.356	94.274.923.127
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	3.858.186.337.617	-	-	4.037.613.618.555	179.427.280.938
3	International Development Association (IDA)	1.657.356.424.865	326.792.480.000	(521.370.292)	2.067.947.630.222	84.320.095.649
4	International Finance Corporation (IFC)	4.775.359.895.000	-	-	4.997.440.885.000	222.080.990.000
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	58.634.542.980	-	-	61.361.377.740	2.726.834.760
6	Islamic Development Bank (IsDB)	3.413.928.173.617	1.594.641.386.764	3.024.045.380	5.065.835.782.925*	54.242.177.165
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	31.804.340.000	-	-	33.283.420.000	1.479.080.000
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)	5.100.643.571	-	-	5.181.089.713	80.446.142
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	1.357.999.001.000	63.068.000.000	-	1.485.781.563.000	64.714.562.000
10	Common Fund for Commodities (CFC)	19.703.156.520	-	-	20.382.990.680	679.834.160
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	343.402.219.963	-	-	359.372.347.169	15.970.127.206

No.	LKI	Saldo Awal (Rp)	Transaksi Thn Berjalan (Rp)	Selisih Hasil Konfirmasi (Rp)	Saldo Akhir Rupiah (Rp)	Laba/Rugi Selisih Kurs Saldo akhir (-) saldo awal (-) transaksi thn berjalan (-) koreksi
12	Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)	472.433.400.000	-	-	494.404.200.000	21.970.800.000
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	10.376.551.900.000	-	-	10.859.119.700.000	482.567.800.000
14	ASEAN Infrastructure Fund (AIF)	1.852.680.000.000	-	-	1.938.840.000.000	86.160.000.000
15	International Rubber Consortium Limited (IRCo)	61.756.000.000	-	-	64.628.000.000	2.872.000.000
Total		34.262.345.903.362	1.984.501.866.764	2.502.675.088	37.562.917.396.361	1.313.566.951.147

*Selisih sebesar Rp1 pada saldo akhir Islamic Development Bank (IsDB) merupakan pembulatan pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi.

Sementara itu, terdapat pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi yang berasal dari Kewajiban Pemerintah pada LKI (*Common Fund for Commodities*) pada 2024 sebesar Rp3.759.029.144, sedangkan pada 2023 sebesar Rp3.817.946.261. Sehingga, terdapat pendapatan selisih kurs sebesar Rp58.917.117.

Kurs penutup yang digunakan untuk transaksi dengan mata uang Dolar dan Euro merupakan kurs JISDOR pada sistem SPAN untuk tanggal 31 Desember 2024. Sementara itu, untuk transaksi dengan mata uang Islamic Dinar disetarakan dengan kurs *Special Drawing Right* IMF pada tanggal 31 Desember 2024.

Beban selisih kurs Tahun 2024 dan Tahun 2023 yang belum terealisasi pada UAKPA BKF (*Multilateral Investment and Guarantee Agency*) masing-masing sebesar (Rp814.942.924) dan sebesar (Rp242.503.123.080). Beban kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar (Rp814.942.924) berasal dari kenaikan nilai kewajiban jangka Panjang Pemerintah yang diakibatkan oleh adanya perubahan nilai tukar.

Beban selisih kurs belum terealisasi tersebut berasal dari *Multilateral Investment and Guarantee Agency* (MIGA). Pada 31 Des 2023, beban selisih kurs berjumlah Rp17.523.542.902, sementara pada 31 Des 2024 sebesar Rp18.338.485.826.

- BA 999.04**

Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Pemberian Pinjaman (BA 999.04) pada Tahun 2024 adalah defisit sebesar **Rp183.794.680.921** dan pada tahun 2023 defisit **Rp58.082.961.250**. Terdapat penurunan defisit selisih kurs belum terealisasi sebesar **Rp125.711.719.671** atau 216,43 persen jika dibandingkan dengan Tahun 2023. Penurunan Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi disebabkan nilai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi lebih kecil daripada beban kerugian selisih kurs belum terealisasi. Nilai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi berasal dari jumlah selisih kurs akibat nilai kurs pada saat tanggal dilakukannya pembayaran kembali oleh debitur lebih besar dari pada kurs saat pelaporan. Sedangkan untuk beban kerugian selisih kurs belum terealisasi berlaku sebaliknya. Pendapatan dan beban selisih kurs belum terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Pemberian Pinjaman dapat dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi (491111)	5.391.957.772.443	4.368.565.140.634
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi (596211)	5.575.752.453.364	4.426.648.101.884
Jumlah Suplus (Defisit)		(183.794.680.921)	(58.082.961.250)

- BA 999.08**

Surplus/(Defisit) Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada tahun 2024 dan 2023 adalah pada tahun 2024 defisit sebesar Rp157.995.900 dan pada tahun 2023 surplus sebesar Rp33.667.650. Defisit dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada Tahun 2023 mengalami turun sebesar Rp191.663.550 atau turun 569,28 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Beban Kerugian Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi sebesar Rp157.995.900 pada satker ICSID Sekretariat Jenderal yang merupakan dampak dari nilai selisih antara kurs penutup BI per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.157/USD dibandingkan dengan nilai kurs penutup BI per 31 Desember 2023 sebesar Rp15.439/USD atas Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar USD220.050.:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		33.667.650
2	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	157.995.900	
Jumlah Defisit Selisih Kurs Belum Terealisasi		(157.995.900)	33.667.650

- BA 999.99**

Selanjutnya Surplus/(Defisit) dari Selisih Kurs Belum Terealisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar surplus Rp9.059.555.809.807 dan defisit Rp1.164.519.342.900. Surplus/(Defisit) dari Selisih Kurs Sebelum Realisasi pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp10.224.500.953.307 atau naik 878,00 persen bila dibandingkan dengan tahun 2023. Surplus dari Selisih Kurs Belum Terealisasi terdiri dari Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp11.671.226.760.595 yang merupakan Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice/SPP* ke SP2D dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi sebesar Rp2.611.245.150.188 merupakan Beban Penyesuaian Selisih Kurs *Invoice/SPP* ke SP2D dan *Exotic Currency*. Pendapatan dan Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi dirinci sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024
1	Satker Pengelola TK KPPN KPH	286.900
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	643.575.415.358
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	643.575.128.458
2	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta I	(3.816.397)
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.395.639.088
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.399.455.485
3	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta II	0
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	18.784.718
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	18.784.718
4	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta III	15.254.271
	Pendapatan kerugian selisih kurs belum terealisasi	15.254.272
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1
5	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta IV	1

No	Uraian		TA 2024
	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi	2	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1	
6	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta V		2
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	466.457	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	466.455	
7	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VI		7
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	20	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	13	
8	Satker Pengelola Transaksi Khusus KPPN Jakarta VI		-
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	-	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	
9	Satker Pengelola Kas Negara		6.324.332.209.388
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	6.768.771.380.825	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	444.439.171.437	
10	Satker Pengelola Suspen Penerimaan		6.921.412.246
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	26.740.175.813	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	19.818.763.567	
11	Satker Pengelola BLBI		78.924.002.977
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	79.725.713.267	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	801.710.290	
12	Satker KKKS PBMN		5.033.662.567
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	5.033.662.567	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	
13	Satker KKKS SKK Migas		1.325.919.614.489
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.325.919.614.489	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		
14	Satker KKKS BPMA		66.458.733.870
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	66.458.733.870	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	-	
15	Satker Yayasan Supersemar		220.855.080.513
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	220.855.080.513	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi		
16	Satker Pengelola Migas		1.029.712.240.611
	Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi	2.527.399.171.545	
	Beban kerugian selisih kurs belum terealisasi	1.497.686.930.934	
17	Satker Badan Kebijakan Fiskal		1.387.128.362
	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	4.930.185.562	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	3.543.057.200	
Jumlah			9.059.555.809.807

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp25.140.042.344.139 apabila dirinci berdasarkan Bagian Anggaran BUN adalah sebagai berikut:

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.01	Pengelola Utang	-	(19.496.546)
999.02	Pengelola Hibah	404.410.273	-
999.03	Pengelola Investasi Pemerintah	(7.251.981.089)	169.063.304.338
999.04	Pengelola Pemberian Pinjaman	3	6

BA	Uraian	TA 2024	TA 2023
999.05	Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa	76.857.880.275	335.480.385.568
999.07	Pengelola Belanja Subsidi	39.684.616.354	19.375.748.690
999.08	Pengelola Belanja Lain-Lain	4.114.331.176	34.714.662.944
999.99	Pengelola Belanja Transaksi Khusus	25.026.233.087.147	32.939.892.258.342
Jumlah		25.140.042.344.139	33.498.506.863.342

- **BA 999.01**

Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Utang (999.01) pada 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan defisit Rp19.496.546.

- **BA 999.02**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada BA BUN Pengelola Hibah (999.02) terdiri atas pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp404.410.273**. Surplus tersebut naik **100 persen** atau **Rp404.410.273** jika dibandingkan dengan Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 sebesar **Rp0**.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional berasal dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp404.410.273** yang seluruhnya merupakan Pendapatan PNPB Lainnya berupa penerimaan kembali belanja hibah tahun anggaran yang lalu pada Satker 985252 (LDKPI).

- **BA 999.03**

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2024 pada BA BUN Pengelola Investasi Pemerintah (999.03) adalah sebesar minus **Rp7.251.981.089** dan 2023 sebesar Rp169.063.304.338.

Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya merupakan Pendapatan penyesuaian nilai investasi hasil konfirmasi pada LKI UAKPA BKF (984393). Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada tahun 2024 dan tahun 2023 sebesar Rp3.024.045.380 dan Rp169.063.304.338. Pengakuan pendapatan merupakan pengakuan selisih lebih antara nilai rupiah dalam konfirmasi LKI dengan nilai rupiah tercatat dalam pembukuan pemerintah. Pengakuan pendapatan tersebut merupakan selisih lebih hasil konfirmasi yang berasal dari *Islamic Development Bank* (IsDB).

Sementara itu, Beban dari kegiatan non operasional lainnya pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar (Rp521.370.292) dan (Rp0). Beban dari kegiatan non operasional lainnya pada Tahun 2024 berasal dari selisih kurang hasil konfirmasi atas investasi pada *International Development Association* (IDA).

Beban dari kegiatan non operasional lainnya pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp10.276.026.469 dan Rp0. Nilai tersebut merupakan beban atas penyesuaian piutang mitra yang mengikuti *Crash Program* pada tahun 2024 dan telah dilakukan penyesuaian sesuai nota dinas Direktur APK nomor S-14/PB/PB.6/2024 tanggal 25 Juni 2024 hal Petunjuk Teknis Akuntansi 22: Akuntansi Crash Program Piutang Dana Bergulir.

Beban dari kegiatan non operasional lainnya pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp521.370.292 dan Rp0. Beban dari kegiatan non operasional lainnya pada tahun 2024 Audited berasal dari selisih kurang hasil konfirmasi atas investasi pada *International Development Association* (IDA).

Rincian atas beban dari kegiatan non operasional lainnya pada UAKPA BLU LPDB adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2024
1	Beban penyisihan piutang dana bergulir atas penghapusan piutang <i>crash program</i>	(7.217.187.472)
2	Beban penyisihan piutang dana bergulir atas penghapusan piutang PSBDT	909.091
3	Beban penyisihan piutang dana bergulir atas penghapusan piutang atas uang pengganti kejaksaan	(2.537.468.705)
4	Koreksi atas hasil reviu inspektorat Kementerian Koperasi	(909.091)
Total		(9.754.656.177)

- BA 999.04**

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing adalah sebesar surplus Rp3 dan surplus Rp6. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Pembulatan (597111) berasal dari akumulasi pembulatan ke atas dan pembulatan ke bawah.

- BA 999.05**

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar **Rp76.857.880.275**. Jumlah ini menurun sebesar **Rp258.622.505.293** atau sebesar **77,09** persen apabila dibandingkan dengan pendapatan dari kegiatan non operasional periode tahun 2023 sebesar **Rp335.480.385.568**. Pendapatan kegiatan non operasional dalam Laporan Keuangan ini merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian Pemda (setoran) kepada masing-masing satker. Rincian pendapatan non operasional per 31 Desember 2024 per satker sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Satker Penyalur DTU	1.388.220.000
2.	Satker Penyalur DFDD	55.048.650
3.	Satker Penyalur DTK (DAK Non Fisik)	75.413.691.105
4.	Satker DBH 999204	920.520
TOTAL		76.857.880.275

- BA 999.07**

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Subsidi (999.07) terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional pada Belanja Subsidi untuk Periode yang berakhir pada tahun 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp39.684.616.354 dan Rp19.375.748.690.

Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional pada Belanja Subsidi untuk Periode 31 Desember 2024 sebesar Rp39.684.616.354 terdiri dari Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp35.820.863.503 pada Kementerian Keuangan, di Kementerian PUPR sebesar Rp60.676.563, Kementerian KUKM sebesar Rp3.772.536.288, serta Kementerian Pertanian sebesar Rp30.540.000.

- BA 999.08**

Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Belanja Lain-lain (999.08) pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp4.114.331.176 dan Rp34.714.662.944. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp30.600.331.768** atau turun **88,15 persen** bila dibandingkan dengan tahun 2023. Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional BUN Pengelola Belanja Lain-lain berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar **Rp4.114.331.176**. Secara detail adalah sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1	Kemenko Perekonomian (MMPKP)	3.713.267.023	30.657.694.690
2	Kementerian Kominfo		2.648.829.799
3	BP Batam	136.411.500	627.507.245
4	SKK Migas	192.847.653	780.631.210
5	Kementerian Sekretariat Negara (Istana Kepresidenan)	71.805.000	
Jumlah		4.114.331.176	34.714.662.944

• **BA 999.99**

Selanjutnya Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar **Rp25.026.233.087.147** dan **Rp32.939.892.258.342**. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BUN Pengelola Transaksi Khusus pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar **Rp8.721.057.207.930** atau turun **26,48 persen** bila dibandingkan dengan tahun 2023. Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp34.141.143.005.020** dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar **Rp9.104.704.837.800**.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) dirinci sebagai berikut:

1. Pada UAKPA BUN TK DJPb satker 987361 Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah Rp227.749.096.057.
2. Pada UAKPA TK Aset Lain-Lain, Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya sebesar Rp1.453.432.404 yang merupakan nilai dari penerimaan barang gratifikasi yang diserahkan oleh KPK kepada DJKN pada tahun 2024.
3. Pada UAKPA Pengelolaan BMN Hulu Migas pada SKK MIGAS, saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebesar Rp33.716.767.037.051 dan Rp40.680.166.914.851 yang berasal dari penambahan nilai Aset Lainnya berupa HBM, HBI dan Tanah sebagai berikut:
 - a. HBM sebesar Rp14.584.101.666.990
 - b. HBI sebesar Rp1.334.574.243
 - c. MP sebesar Rp19.131.330.795.818
4. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada BPMA, Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar masing-masing Rp78.170.134.930 dan Rp124.285.453.278 merupakan pengadaan aset MP, Tanah dan HBM pada KKKS PT Medco E&P Malaka, pengadaan aset HBM pada KKKS ONWA Pte Ltd dan Aceh Energy serta pengadaan aset HBI pada KKKS PT Pema Global Energi dan ONWA Pte Ltd.
5. Pada UAKPA BUN BMN PKP2B, Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp117.003.304.577 dan Rp527.156.897.042, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembelian aset baru pada PT Berau Coal sebesar Rp45.340.709.595 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Tahunan TA 2024 nomor 71.BA/BN.10/SJA2.2/2025 tanggal 23 Januari 2025;
 - b. Kapitalisasi BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp50.049.610.781 sesuai Berita Acara Rekonsiliasi Tahunan TA 2024 nomor 69.BA/BN.10/SJA2.2/2025 tanggal 23 Januari 2025;

- c. Penambahan aset sebesar Rp21.612.984.200 atas hasil Inventarisasi Penilaian (IP) BMN Tanah dalam rangka pencatatan yang didasarkan pada Berita Acara Inventarisasi nomor 481.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 20 November 2024 pada PT Berau Coal;

Sedangkan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99) sebesar Rp9.080.482.268.092 berasal dari:

6. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada SKK Migas, Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp9.114.909.917.873 dan Rp8.496.813.809.060 yang berasal dari penambahan nilai Aset Lainnya berupa HBM, HBI dan MP sebagai berikut:
 - a. Penggunaan Material Persediaan *non-capital* dalam operasional hulu migas senilai Rp9.584.111.630.747;
 - b. Pengembalian (*Return*) penggunaan Material Persediaan *non-capital* dalam operasional hulu migas pada tahun berjalan sebesar (Rp503.629.362.655).
7. Pada UAKPA BUN TK Pengelola BMN Hulu Migas/KKKS pada BPMA, Saldo beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar masing-masing Rp34.427.649.798 dan Rp125.661.916.262, merupakan Pemakaian dan Pengembalian *Non Capital* MP.

Pada UAKPA BUN TK MIGAS (984572) Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar minus 17 yang merupakan penyesuaian nilai tukar yang disebabkan adanya perbedaan antara kurs pada saat pencatatan utang-piutang dan kurs pada saat penyelesaian utang-piutang, serta penyesuaian antara kurs awal tahun, kurs tengah rata-rata setahun dan kurs pada tanggal pelaporan

E.2.4. Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah nihil.

E.3. Catatan Penting Lainnya

1. Kontribusi yang dibayarkan oleh Bank Indonesia kepada Pemerintah, diakui serta dicatat oleh Pemerintah sebagai Pendapatan-LO. Bank Indonesia memberikan kontribusi dalam skema burden sharing termasuk yang terjadi saat tanggal penerimaan kontribusi BI terakhir sampai dengan tanggal pelaporan dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
A. Public Goods				
1	Penyesuaian Akrua 2023	(2.436.044.010.000)	-	(2.436.044.010.000)
2	Januari	1.063.218.760.000	-	1.063.218.760.000
3	Februari	2.311.539.140.000	-	2.311.539.140.000
4	Maret	2.984.585.270.000	-	2.984.585.270.000
5	April	1.108.478.470.000	-	1.108.478.470.000
6	Mei	2.291.361.160.000	-	2.291.361.160.000
7	Juni	2.931.325.430.000	-	2.931.325.430.000
8	Juli	1.093.170.890.000	-	1.093.170.890.000
9	Agustus	2.380.368.360.000	-	2.380.368.360.000
10	September	3.187.289.920.000	-	3.187.289.920.000
11	Oktober	1.189.877.760.000	-	1.189.877.760.000
12	November	2.453.153.280.000	-	2.453.153.280.000

No	Tanggal Penerimaan	Kontribusi BI	Beban Pemerintah	Total
13	Desember	3.101.763.440.000	-	3.101.763.440.000
11	Penyesuaian Akrua 2024	2.536.264.580.000	-	2.536.264.580.000
SUBTOTAL PG		26.196.352.450.000	-	26.196.352.450.000
B. Non Public Goods				
1	Penyesuaian Akrua 2023	(24.488.397.350)	(402.442.638.510)	(426.931.035.860)
2	Juni	263.610.395.000	4.757.363.605.000	5.020.974.000.000
3	Desember	45.277.408.000	4.764.264.807.500	4.809.542.215.500
3	Penyesuaian Akrua 2024	11.235.156.175	2.944.521.818.827	2.955.756.975.002
SUBTOTAL NPG		295.634.561.825	12.063.707.592.817	12.359.342.154.642
C. Cluster A				
1	Penyesuaian Akrua 2023	(705.612.371.730)	-	(705.612.371.730)
2	Januari	336.453.795.750	-	336.453.795.750
3	Februari	142.229.566.980	-	142.229.566.980
4	Maret	936.062.000.000	-	936.062.000.000
5	April	502.162.768.080	-	502.162.768.080
6	Mei	140.365.183.860	-	140.365.183.860
7	Juni	919.358.000.000	-	919.358.000.000
8	Juli	494.117.329.940	-	494.117.329.940
9	Agustus	145.817.625.060	-	145.817.625.060
10	September	1.158.161.119.840	-	1.158.161.119.840
11	Oktober	378.245.359.200	-	378.245.359.200
12	November	150.276.314.880	-	150.276.314.880
13	Desember	1.144.199.345.630	-	1.144.199.345.630
11	Penyesuaian Akrua 2024	744.277.970.740	-	744.277.970.740
SUBTOTAL CLUSTER A		6.486.114.008.230	-	6.486.114.008.230
TOTAL PG, NPG DAN CLUSTER A		32.978.101.020.055	12.063.707.592.817	45.041.808.612.872

2. Pada tahun 2024 terdapat pelaksanaan konversi sebanyak 5 loan ADB, satu *loan* dengan mata uang USD dan 4 *loan* dengan mata uang JPY yang dikonversi ke mata uang IDR. Rincian *loan* dimaksud adalah sebagai berikut:

No	LOAN ID LAMA	LOAN ID BARU	CREDITOR REF	NILAI LOAN LAMA	NILAI LOAN BARU	TANGGAL KONVERSI	MTU LAMA	MTU BARU	IDR Fixed Rate	Contractual Spread	Transaction Fee
1	21238000	212380A0	2927-INO	32.633.267	497.265.716.756	15-Oct-24	USD	IDR	-0,77%	0,40%	0,02%
2	212360A0	212360B0	2928-INO	4.970.359.570	595.427.194.366	15-Oct-24	JPY	IDR	-0,77%	0,40%	0,02%
3	212410A0	212410B0	3094-INO	809.844.832	118.343.362.049	1-Dec-24	JPY	IDR	-0,35%	0,40%	0,02%
4	212530A0	212530B0	3454-INO	31.928.750.000	4.497.791.667.181	1-Nov-24	JPY	IDR	-0,45%	0,50%	0,02%
5	212620A0	212620B0	3741-INO	48.790.000.000	7.244.066.666.563	15-Nov-24	JPY	IDR	-0,45%	0,50%	0,02%

3. Realisasi pendapatan hibah tahun 2024 berasal dari 6.063 register hibah, di mana pendapatan hibah sebesar Rp11.776.321.579.162 (26,63% dari total pendapatan hibah) berasal dari register yang diterbitkan pada tahun 2024 (4.661 register) dan Rp32.439.999.459.948 (73,37% dari total pendapatan hibah) berasal dari register yang diterbitkan sebelum tahun 2024 (1.402 register).

Dari keseluruhan register yang diterbitkan pada tahun 2024 dengan nilai komitmen hibah sebesar Rp111.054.288.968.619, masih terdapat nilai hibah yang tidak terealisasi pengesahannya pada tahun 2024 sebesar Rp99.277.967.389.457 mengingat terdapat hibah yang kegiatannya bersifat multiyears dan hibah yang kegiatannya sudah selesai dilaksanakan namun realisasinya tidak sebesar nilai komitmen.

F. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara Akuntansi Pusat (UAPBUN-AP) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan bertindak sebagai konsolidator Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN yang terdiri dari Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Koordinator Kuasa BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Kuasa BUN Pusat (UAKBUN-P) serta Laporan Arus Kas Laporan Keuangan Kuasa BUN Daerah KPPN Khusus.

Konsolidasi Laporan Arus Kas Konsolidasian BUN dilakukan atas seluruh angka realisasi bersih (netto) penerimaan dan pengeluaran kas yang dibukukan oleh KPPN dan Dit PKN selaku Kuasa BUN, baik berasal dari transaksi BA BUN maupun transaksi BA Kementerian Negara/Lembaga.

F.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

F.1.1 Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 adalah sebesar **Rp606.014.272.515.831** yang merupakan saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2023. Apabila dibandingkan dengan Saldo Awal Kas per 1 Januari 2023 sebesar **Rp536.443.156.881.227**, maka mengalami kenaikan sebesar Rp69.571.115.634.604. Rincian Saldo Awal Kas per 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	1 Januari 2024	1 Januari 2023
Kas di BUN Pusat	342.835.699.040.576	394.096.461.571.443
Kas di KPPN	5.128.787.424.755	2.774.997.342.454
Kas pada BLU	92.393.578.520.721	78.971.222.880.967
Kas di K/L dari Hibah	13.992.553.217.607	2.895.708.729.836
Kas Escrow	148.155.907.631.641	52.253.149.048.677
Kas di Rekening Pemerintah Lainnya	3.507.746.680.531	5.451.617.307.850
Saldo Awal Kas	606.014.272.515.831	536.443.156.881.227

F.1.2 Perubahan Kas

Kenaikan (Penurunan) Kas dari berbagai aktivitas Pemerintah pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(154.149.780.567.127)	(34.793.236.369.070)	343,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(414.403.152.941.181)	(391.624.901.747.838)	5,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	614.280.048.971.953	445.794.317.054.009	37,79
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	24.391.505.836.682	88.761.873.212.786	(72,52)
Koreksi:	-	-	-
Akumulasi Koreksi Pembukuan	9.263.322.996.240	(3.566.936.515.283)	(359,63)
Penggunaan SAL	(56.381.000.000.000)	(35.000.000.000.000)	61,09
Kenaikan (Penurunan) Kas Setelah Penyesuaian	23.000.944.296.567	69.571.115.634.604	(66,94)



Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp9.263.322.996.240 terdiri dari:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Koreksi SILPA	2.052.665.074.805
2	Koreksi Selisih Kurs	6.326.893.741.118
3	Koreksi Pembukuan	883.764.180.317
Jumlah Akumulasi Pembukuan		9.263.322.996.240

Penjelasan Akumulasi Koreksi Pembukuan sebesar Rp9.263.322.996.240 terdiri dari:

1. Koreksi SILPA sebesar Rp2.052.665.074.805 terdiri dari:

a. Pengembalian atas Pendapatan Tahun Anggaran yang Lalu yang berasal dari akun:

No	KPPN	Jumlah (Rp)
1	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang Lalu (311212)	(53.367.852.195)
2	Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung (311911)	(22.002.884.698)
Jumlah Pengembalian Pendapatan TAYL		(75.370.736.893)

b. Penyesuaian selisih kurs yang dihasilkan dari transaksi kiriman uang atau pemindahbukuan antar rekening milik BUN yang menggunakan akun SiLPA (311211) sebesar Rp2.128.035.811.698.

2. Koreksi Selisih Kurs sebesar Rp6.326.893.741.118 merupakan saldo selisih kurs belum terealisasi setelah perhitungan selisih kurs terealisasi dan penyesuaian selisih kurs yang selanjutnya disesuaikan sebagai pendapatan/kerugian selisih kurs yang belum terealisasi dari proses revaluasi yaitu pendapatan atas keuntungan selisih kurs yang belum terealisasi sebesar Rp7.436.474.073.826, dan kerugian selisih kurs yang belum terealisasi sebesar minus Rp1.109.580.332.708.

3. Penjelasan Koreksi Pembukuan sebesar Rp883.764.180.317 terdiri dari koreksi Kas Hibah, koreksi Kas BLU dan koreksi kas di BUN dengan rincian berikut:

a. Koreksi Kas Hibah sebesar Rp85.975.723.953 merupakan koreksi atas saldo hibah yang sudah disahkan pada TA 204 di Kuasa BUN (KPPN). Koreksi atas saldo Kas Hibah ini dikarenakan adanya pengesahan hibah luar negeri TAYL dengan nilai neto sebesar Rp108.425.756.794, revaluasi saldo kas hibah sebesar minus Rp13.074.500.841, reklasifikasi kas hibah ke kas BLU sebesar minus Rp6.338.497.000 serta penyesuaian kas hibah senilai minus Rp3.037.035.000.

b. Koreksi Kas BLU sebesar Rp859.144.688.316 merupakan koreksi atas saldo Kas BLU yang sudah disahkan yang dilakukan oleh Kuasa BUN (KPPN) karena adanya perekaman saldo awal BLU baru pada TA 2024, penyesuaian saldo Kas BLU akibat likuidasi, koreksi kas BLU

akibat kekurangan/kelebihan setor PNB TAYL, penyesuaian kas BLU akibat kesalahan pembukuan, penyesuaian kas BLU akibat pengembalian kas hibah yang diterima BLU, serta koreksi kas BLU dalam rangka reklasifikasi investasi jangka pendek ke investasi jangka panjang. Rincian koreksi Kas BLU pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

No.	KPPN	Jumlah (Rp)
1	PADANG (010)	7.671.473.705
2	JAMBI (012)	651.742.254
3	PALEMBANG (014)	(416.369.923)
4	PANGKAL PINANG (015)	3.131.841.919
5	BANDAR LAMPUNG (017)	402.261.158
6	JAKARTA II (019)	839.237.282.469
7	TASIKMALAYA (025)	2.636.106.271
8	SURAKARTA (028)	8.553.806.863
9	SURABAYA I (031)	5.023.904.197
10	PALANGKARAYA (043)	(7.887.349.143)
11	BANJARMASIN (045)	195.253.449
12	JAKARTA III (088)	(977.362.119)
13	BANDUNG II (095)	(8.003.266)
14	BATAM (137)	(2.015.225.541)
15	MAMUJU (178)	2.945.325.023
16	JAKARTA VII (182)	1.000
Jumlah Koreksi Kas BLU		859.144.688.316

Koreksi Kas BLU paling besar terdapat pada KPPN Jakarta II sebesar Rp839.237.282.469 yang merupakan penyesuaian saldo kas BLU pada BLU BPD PKS, LDKPI dan LPDP dalam rangka reklasifikasi Kas pada BLU ke investasi jangka panjang.

Koreksi terbesar kedua yaitu pada KPPN Surakarta yang merupakan penyesuaian penyesuaian saldo awal BLU pada satker Institut Seni Indonesia Surakarta akibat pembentukan BLU baru.

- c. Koreksi Kas BUN sebesar minus Rp61.355.941.239 merupakan pengeluaran kas dari Rekening Khusus dalam rangka pengembalian (refund) penerimaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri TAYL yang menurut Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi Terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri tidak dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan melainkan sebagai koreksi kas.
 - d. Koreksi Lain-Lain sebesar minus Rp290.713 merupakan koreksi pembulatan.
4. Penggunaan Dana SAL pada Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebesar minus Rp56.381.000.000.000 dan Rp35.000.000.000.000. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024, pasal 24 ayat (1) disebutkan bahwa dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, penerbitan SBN, dan/atau pemanfaatan saldo kas BLU sebagai tambahan pembiayaan. Kemudian pada Pasal 8 PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengolaan Saldo Anggaran Lebih dinyatakan bahwa SAL digunakan untuk pemenuhan kebutuhan kas temporer, pemenuhan pembiayaan anggaran dan/atau stabilisasi. Penggunaan SAL dilakukan dengan terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan anggaran sampai dengan akhir

tahun anggaran berikutnya. Penggunaan Dana SAL sebesar minus Rp56.381.000.000.000 merupakan Pembiayaan Lainnya dari APBN tahun 2024 yang seluruhnya bersumber dari Rek Lain BI SAL dalam rangka pemenuhan pembiayaan APBN tahun 2024.

F.1.3 Saldo Akhir Kas dan Bank

Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp629.015.216.812.398 dan Rp606.014.272.515.831. Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp23.000.944.296.567 atau 3,80% dari TA 2023. Saldo Akhir Kas dan Bank merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun anggaran berikutnya.

Adapun rincian Saldo Akhir Kas dan Bank pada TA 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Kas pada BLU	96.973.278.750.758	92.393.578.520.721	4,95
Kas di Kementerian/Lembaga dari Hibah	10.552.112.773.536	13.992.553.217.607	(24,59)
Rekening Kas di KPPN	697.379.362.618	5.128.787.424.755	(86,40)
Rekening Kas di BUN	350.032.352.563.093	342.835.699.040.576	2,10
Rekening Pemerintah Lainnya	9.936.262.585.075	3.507.746.680.531	183,27
Kas Rekening Escrow	160.823.830.777.318	148.155.907.631.641	8,55
Jumlah Saldo Akhir Kas	629.015.216.812.398	606.014.272.515.831	3,80

Sesuai PMK Nomor 147/PMK.05/2021 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih, Kas di Rekening Kas SAL telah dicatat sebagai bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Perlakuan yang sama terhadap Kas di Rekening Khusus yang merupakan bagian dari Rekening Kas BUN di BI. Untuk Laporan Tahun 2024, transaksi keuangan pada Rekening Khusus telah dicatat sesuai Sistem Akuntansi Pusat dan dikonsolidasikan dalam Laporan Arus Kas ini.

Rincian Kas Bendahara Umum Negara (Kas BUN) terdiri dari:

1. Rekening Kas Umum Negara dalam Rupiah;
2. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta USD;
3. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta JPY;
4. Rekening Kas Umum Negara dalam Valuta Euro;
5. Rekening Penempatan dalam Rupiah;
6. Rekening Penempatan dalam Valuta USD;
7. Rekening Penempatan dalam Valuta JPY;
8. Rekening Penempatan dalam Valuta Euro;
9. Rekening Saldo Anggaran Lebih (SAL);
10. Rekening Khusus dalam Rupiah;
11. Rekening Khusus dalam Valuta AUD;
12. Rekening Khusus dalam Valuta EUR;
13. Rekening Khusus dalam Valuta JPY;
14. Rekening Khusus dalam Valuta USD;
15. RPKBUN P SPAN-Gaji;
16. RPKBUN P SPAN-Non Gaji Mandiri;
17. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BTN;
18. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BNI;
19. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BRI;

20. RPKBUN P SPAN-Non Gaji BSI;
21. Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH;
22. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Rupiah;
23. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta USD;
24. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta Euro;
25. Rekening Penerimaan Penyetoran Retur SP2D dalam Valuta JPY;

Rincian Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari:

1. Rekening Retur SPAN Non Gaji;
2. Rekening Retur Gaji;
3. Rekening Dana Investasi dalam Valuta IDR;
4. Rekening Dana Investasi dalam Valuta JPY;
5. Rekening Dana Investasi dalam Valuta AUD;
6. Rekening Dana Investasi dalam Valuta USD;
7. Rekening Dana Investasi dalam Valuta GBP;
8. Rekening Dana Investasi dalam Valuta Euro;
9. Rekening Pembangunan Daerah;
10. Rekening Depkeu k/ Hasil minyak perjanjian karya prodsharing;
11. Rekening Penerimaan Panas Bumi;
12. Rekening Dana Bergulir;
13. Rekening Kelolaan TDR;
14. Rekening Retur SBSN;
15. Rekening Menkeu untuk Penerimaan Hibah Educat Sector Support program ESSP;

Rincian Rekening Dana Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

1. Rekening Pembangunan Hutan;
2. Rekening Cadangan Dana Reboisasi;
3. Rekening Dana Cadangan Alutsista;
4. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta IDR;
5. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta USD;
6. Rekening Menkeu Pengeluaran untuk SBN dalam Valuta Euro;
7. Rekening Lain BI Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah;
8. Rekening Lain BI Pengelolaan Aset BPR;
9. Rekening Lain BI Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah;
10. Rekening Lain BI BUN untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan
11. Rekening Stabilisasi SBN;
12. Rekening Lain BI Dana PFK;
13. Rekening Lain BI Investasi Pemerintah PEN;
14. Rekening Lain BI Investasi BUN;
15. Rekening Lain BI RIBUN Imbal Hasil;
16. Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda;
17. Rekening Lain BI Penampungan Akhir Tahun Anggaran.

F.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas BUN pada TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

F.2.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **minus Rp154.149.780.567.127** dan **minus Rp34.793.236.369.070**. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp119.356.544.198.057 atau minus 343,05% dari TA 2023. Penerimaan negara TA 2024 mengalami kenaikan dari Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah, Pajak Perdagangan Internasional dan Cukai. Namun demikian diiringi dengan arus kas keluar TA 2024 yang mengalami kenaikan terutama berasal dari kenaikan belanja barang dan belanja pegawai. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah pada TA 2024.

Adapun rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Arus Kas Masuk	2.850.105.793.777.310	2.783.382.716.269.797	2,40
Dikurangi Arus Kas Keluar	3.004.255.574.344.437	2.818.175.952.638.867	6,60
Arus Kas Bersih	(154.149.780.567.127)	(34.793.236.369.070)	(343,05)

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas bersih pada TA 2024 sebesar **minus Rp154.149.780.567.127** menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional pemerintah. Lebih rendahnya arus kas masuk dibandingkan dengan arus kas keluar mengindikasikan rendahnya capaian realisasi penerimaan negara yang dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian domestik maupun global serta tingginya belanja pemerintah.

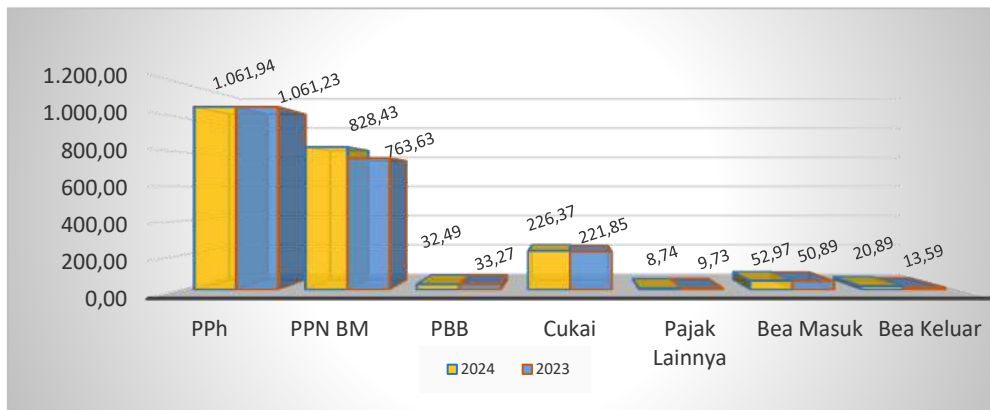
F.2.1.1 Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.231.839.822.879.833** dan **Rp2.154.208.219.467.830**. Penerimaan Perpajakan pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp77.631.603.412.003 atau 3,60% dari TA 2023. Penerimaan Perpajakan terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar **Rp2.157.982.145.917.601** dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar **Rp73.857.676.962.232**. Penerimaan Perpajakan merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan pada TA 2024 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan.

Adapun rincian Penerimaan Perpajakan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pajak Dalam Negeri			
Pajak Penghasilan (PPh)	1.061.940.526.200.605	1.061.234.020.639.596	0,07
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN&PNBM)	828.436.302.857.826	763.632.668.212.526	8,49
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	32.491.020.191.825	33.270.661.547.958	(2,34)
Cukai	226.371.492.151.997	221.851.144.542.725	2,04
Pajak Lainnya	8.742.804.515.348	9.729.790.060.612	(10,14)

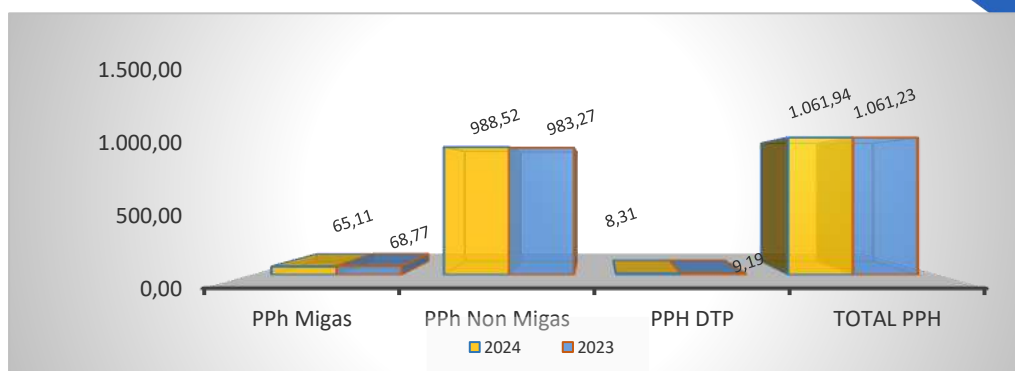
Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Jumlah Penerimaan Pajak Dalam Negeri	2.157.982.145.917.601	2.089.718.285.003.417	3,27
Pajak Perdagangan Internasional			
Bea Masuk	52.965.349.842.955	50.891.762.896.870	4,07
Bea Keluar	20.892.327.119.277	13.598.171.567.543	53,64
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	73.857.676.962.232	64.489.934.464.413	14,53
Penerimaan Perpajakan	2.231.839.822.879.833	2.154.208.219.467.830	3,60



F.2.1.1.1 Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.061.940.526.200.605** dan **Rp1.061.234.020.639.596**. Pajak Penghasilan pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp706.505.561.009 atau 0,07% dari TA 2023. Adapun rincian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
PPh Migas			
PPh Minyak Bumi	20.941.726.775.617	22.904.493.665.260	(8,57)
PPh Gas Alam	44.161.588.482.782	45.867.105.436.853	(3,72)
PPh Panas Bumi	0	0	0
PPh Migas Lainnya	3.039.414.260	1.572.224.727	93,32
Jumlah PPh Migas	65.106.354.672.659	68.773.171.326.840	(5,33)
PPh Non Migas			
PPh Pasal 21	243.563.524.511.774	200.849.556.208.059	21,27
PPh Pasal 22	35.728.588.168.466	33.960.305.154.489	5,21
PPh Pasal 22 Import	73.757.704.583.023	69.528.072.968.512	6,08
PPh Pasal 23	64.531.207.939.817	58.168.982.689.674	10,94
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	14.396.646.388.342	12.263.329.558.127	17,40
PPh Pasal 25/29 Badan	332.645.392.712.765	406.296.468.651.423	(18,13)
PPh Pasal 26	82.848.756.083.600	76.957.876.931.724	7,65
PPh Final	140.871.919.690.518	125.092.090.364.487	12,61
PPh Non Migas Lainnya	178.789.296.200	152.697.346.952	17,09
Jumlah PPh Non Migas	988.522.529.374.505	983.269.379.873.447	0,53
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	8.311.642.153.441	9.191.469.439.309	(9,57)
Jumlah Pajak Penghasilan	1.061.940.526.200.605	1.061.234.020.639.596	0,07



F.2.1.1.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp828.436.302.857.826** dan **Rp763.632.668.212.526**. Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp64.803.634.645.300 atau 8,49% dari TA 2023. Adapun rincian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	536.775.874.578.398	490.565.774.591.166	9,42
PPN dan PPnBM Impor	280.682.900.386.455	262.961.581.020.286	6,74
PPN dan PPnBM Lainnya	10.172.775.265.753	8.011.588.696.807	26,98
PPN Ditanggung Pemerintah	804.752.627.220	2.093.723.904.267	(61,56)
Jumlah PPN dan PPnBM	828.436.302.857.826	763.632.668.212.526	8,49

F.2.1.1.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp32.491.020.191.825** dan **Rp33.270.661.547.958**. Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp779.641.356.133 atau minus 2,34% dari TA 2023. Adapun rincian Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
PBB Perkebunan	3.632.025.365.954	3.241.035.767.076	12,06
PBB Kehutanan	785.632.821.820	627.259.722.024	25,25
PBB Pertambangan	11.473.212.160.957	11.492.310.087.449	(0,17)
PBB Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	15.867.515.938.594	17.192.838.858.870	(7,71)
PBB Pertambangan Panas Bumi	534.003.914.205	618.223.603.408	(13,62)
PBB Lainnya	198.629.990.295	98.993.509.131	100,65
Jumlah Pajak Bumi dan Bangunan	32.491.020.191.825	33.270.661.547.958	(2,34)

F.2.1.1.4 Cukai

Cukai pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp226.371.492.151.997** dan **Rp221.851.144.542.725**. Cukai pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.520.347.609.272 atau 2,04% dari TA 2023. Adapun rincian Cukai adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Cukai Hasil Tembakau	216.852.275.618.197	213.497.773.071.725	1,57
Cukai Ethyl Alkohol	142.764.611.000	127.918.170.000	11,61
Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	9.227.388.671.300	8.103.897.479.000	13,86
Denda Administrasi Cukai	130.071.298.500	104.242.719.000	24,78
Cukai Lainnya	18.991.953.000	17.313.103.000	9,70
Jumlah Cukai	226.371.492.151.997	221.851.144.542.725	2,04

F.2.1.1.5 Pajak Lainnya

Pajak Lainnya pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.742.804.515.348 dan Rp9.729.790.060.612. Pajak Lainnya pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp986.985.545.264 atau minus 10,14% dari TA 2023. Adapun rincian Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pendapatan Pajak Lainnya			
Pendapatan Bea Materai	1.336.551.323.515	1.223.862.796.089	9,21
Pendapatan dari Penjualan Bea Materai	5.466.246.215.122	5.470.840.719.647	(0,08)
Pendapatan PPN Batubara	165.642.195.374	196.395.808.289	(15,66)
Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	2.120.380.574	3.812.341.830	(44,38)
Jumlah Pendapatan Pajak Lainnya	6.970.560.114.585	6.894.911.665.855	1,10
Pendapatan Bunga Penagihan Pajak			
Bunga Penagihan PPh	1.363.830.072.245	2.260.155.446.639	(39,66)
Bunga Penagihan PPN	408.414.328.518	576.930.315.430	(29,21)
Bunga Penagihan PPnBM	0	-2.949.314.751	(100,00)
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	1.772.244.400.763	2.834.136.447.318	(37,47)
Pendapatan Denda Penagihan			
Denda Penagihan PPh	-	729.772.787	(100,00)
Denda Penagihan PPN	-	12.174.652	(100,00)
Jumlah Denda Penagihan	-	741.947.439	(100,00)
Jumlah Pajak Lainnya (Netto)	8.742.804.515.348	9.729.790.060.612	(10,14)

F.2.1.1.6 Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp73.857.676.962.232 dan Rp64.489.934.464.413. Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp9.367.742.497.819 atau sebesar 14,53% dari TA 2023.

Adapun rincian Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Bea Masuk:			
Bea Masuk	48.565.705.533.208	47.031.645.101.860	3,26
Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	-	5.321.000	(100,00)
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	1.236.850.519.582	991.256.259.179	24,78
Bea Masuk dalam Rangka KITE	926.951.114.319	402.746.814.511	130,16
Pendapatan Pabean Lainnya	5.696.741.960	7.792.099.320	(26,89)
Bea Masuk Anti Dumping	357.966.052.000	301.082.959.000	18,89
Bea Masuk Imbalan	-	-	
Bea Masuk Tindakan Pengamanan	1.872.179.881.886	2.157.234.342.000	(13,21)
Jumlah Bea Masuk	52.965.349.842.955	50.891.762.896.870	4,07

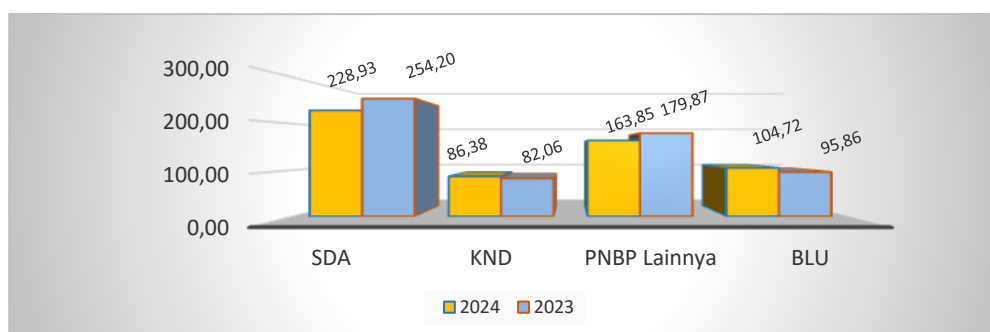
Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Bea Keluar:			
Bea Keluar	20.927.936.260.277	13.597.383.848.543	53,91
Denda Administrasi Bea Keluar	(35.659.410.000)	619.652.000	(5.854,75)
Pendapatan Bunga Bea Keluar	50.269.000	168.067.000	(70,09)
Jumlah Bea Keluar	20.892.327.119.277	13.598.171.567.543	53,64
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	73.857.676.962.232	64.489.934.464.413	14,53

F.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp583.878.607.181.721 dan Rp611.990.337.922.242. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp28.111.730.740.521 atau minus 4,59% dari TA 2023.

Adapun rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan SDA	228.928.767.532.781	254.203.031.073.614	(9,94)
Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	86.384.593.538.563	82.058.743.373.870	5,27
Penerimaan PNBP Lainnya	163.848.513.738.956	179.868.171.315.795	(8,91)
Pendapatan BLU	104.716.732.371.421	95.860.392.158.963	9,24
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak	583.878.607.181.721	611.990.337.922.242	(4,59)

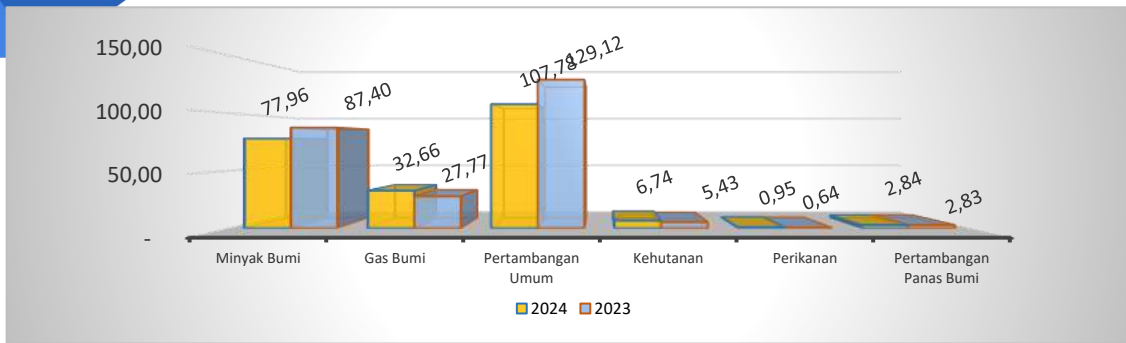


F.2.1.2.1 Pendapatan Sumber Daya Alam

Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp228.928.767.532.781 dan Rp254.203.031.073.614. Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp25.274.263.540.833 atau minus 9,94% dari TA 2023.

Adapun rincian Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pendapatan Minyak Bumi	77.961.123.337.930	87.408.885.465.416	(10,81)
Pendapatan Gas Bumi	32.661.085.038.989	28.769.670.492.312	13,53
Pendapatan Pertambangan Umum	107.777.558.834.527	129.126.791.868.349	(16,53)
Pendapatan Kehutanan	6.739.119.543.721	5.429.603.320.398	24,12
Pendapatan Perikanan	951.819.466.723	636.893.353.269	49,45
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.838.061.310.891	2.831.186.573.870	0,24
Jumlah Pendapatan SDA	228.928.767.532.781	254.203.031.073.614	(9,94)



F.2.1.2.2 Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)

Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp86.384.593.538.563** dan **Rp82.058.743.373.870**. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp4.325.850.164.693 atau 5,27% dari TA 2023. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) berasal dari penerimaan laba yang diperoleh pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara. Kenaikan sebesar 5,27% disebabkan karena kinerja BUMN mengalami peningkatan akibatnya pembagian dividen yang diterima oleh negara secara tunai juga meningkat. Peningkatan kinerja BUMN ini terutama pada sektor perbankan.

Adapun rincian Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	85.572.985.213.463	81.217.243.776.870	5,36
Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian Keuangan	811.608.325.100	841.499.597.000	(3,55)
Jumlah Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	86.384.593.538.563	82.058.743.373.870	5,27

F.2.1.2.3 Pendapatan PNBP Lainnya

Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp163.848.513.738.956** dan **Rp179.868.171.315.795**. Pendapatan PNBP Lainnya pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp16.019.657.576.839 atau minus 8,91% dari TA 2023.

Adapun rincian Pendapatan PNBP Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi	44.894.004.934.622	51.186.655.069.677	(12,29)
Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	27.743.265.311.822	28.028.272.839.161	(1,02)
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Keagamaan	6.693.335.550.852	6.748.502.699.372	(0,82)
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	3.074.841.592.851	3.720.222.791.370	(17,35)
Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika	31.855.957.320.485	30.028.772.290.804	6,08
Pendapatan Jasa Lainnya	2.753.114.727.970	1.308.205.045.864	110,45
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan	30.278.124.149.439	40.503.003.442.795	(25,24)
Pendapatan Denda	4.525.845.781.493	2.261.698.342.186	100,11
Pendapatan Lain-lain	12.030.024.369.422	16.082.838.794.566	(25,20)
Jumlah PNBP Lainnya	163.848.513.738.956	179.868.171.315.795	(8,91)

F.2.1.2.4 Pendapatan Badan Layanan Umum

Pendapatan Badan Layanan Umum pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp104.716.732.371.421** dan **Rp95.860.392.158.963**. Pendapatan Badan Layanan Umum pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp8.856.340.212.458 atau 9,24% dari TA 2023. Adapun rincian Pendapatan Badan Layanan Umum adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pendapatan Jasa Layanan Umum	88.429.003.198.836	86.494.504.584.782	2,24
Pendapatan Hibah BLU	775.438.966.691	419.285.384.531	84,94
Pendapatan Hasil Kerja sama BLU	1.685.792.466.002	1.220.147.435.517	38,16
Pendapatan dari Alokasi APBN	596.713.515.837	820.701.691.766	(27,29)
Pendapatan BLU Lainnya	13.229.784.224.055	6.905.753.062.367	91,58
Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum	104.716.732.371.421	95.860.392.158.963	9,24

F.2.1.3 Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp34.387.363.715.756** dan **Rp17.184.158.879.725**. Penerimaan Hibah tersebut merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya. Penerimaan Hibah tersebut hanya merupakan penerimaan hibah berupa uang secara langsung maupun terencana. Penerimaan Hibah pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.203.204.836.031 atau 100,11% dari TA 2023. Kenaikan penerimaan hibah tersebut guna pengamanatan pilkada tahun 2024 yang diterima oleh TNI dan Polri dan untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Adapun rincian Penerimaan Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Hibah Dalam Negeri Langsung:			
Bentuk Uang-Perorangan	60.021.516.260	0	100,00
Bentuk Uang-Lembaga/Badan Usaha	233.933.403.044	137.278.319.260	70,41
Bentuk Uang-Pemerintah Daerah	31.862.055.896.086	15.221.390.183.638	109,32
Bentuk Uang-Lainnya	91.185.494.517	2.760.643.874	3.203,05
Jumlah Hibah Dalam Negeri	32.247.196.309.907	15.361.429.146.772	109,92
Hibah Luar Negeri Terencana:			
Bilateral	132.463.972.855	181.831.927.857	(27,15)
Multilateral	408.007.371.258	241.343.042.190	69,06
Hibah Luar Negeri Langsung:			
Perorangan	1.255.020.666	1.250.430.211	0,37
Bilateral	254.332.863.571	523.321.750.393	(51,40)
Multilateral	1.278.685.180.203	850.175.319.681	50,40
Lainnya	65.422.997.296	24.807.262.621	163,73
Jumlah Hibah Luar Negeri	2.140.167.405.849	1.822.729.732.953	17,42
Jumlah Hibah	34.387.363.715.756	17.184.158.879.725	100,11

F.2.1.4 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp464.859.258.914.201 dan Rp412.711.324.466.564. Belanja Pegawai pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.147.934.447.637 atau 12,64% dari TA 2023. Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah (di dalam negeri dan di luar negeri) sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan selama periode akuntansi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Adapun rincian Belanja Pegawai sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	94.474.584.839.706	86.439.214.441.661	9,30
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	70.478.736.226.243	65.784.325.265.335	7,14
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	1.627.058.251.782	1.445.968.520.506	12,52
Belanja Gaji Dokter PTT	0	971.858.800	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	20.450.131.425.466	18.571.148.205.747	10,12
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	6.660.298.575.577	1.872.998.267.850	255,60
Belanja Honorarium	1.464.038.800.138	1.517.199.173.983	(3,50)
Belanja Lembur	996.994.057.394	906.265.365.184	10,01
Belanja Tunj.Khusus	95.600.814.345.942	84.744.625.483.910	12,81
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	160.520.141.397.297	140.283.278.472.696	14,43
Belanja Asuransi Kesehatan	12.586.460.994.656	11.145.329.410.892	12,93
Jumlah Belanja Pegawai	464.859.258.914.201	412.711.324.466.564	12,64

Kenaikan Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 terutama berasal dari kenaikan Belanja Pensiun dan Uang Tunggu sebesar Rp20.236.862.924.601 atau 14,43% dan kenaikan Belanja Tunjangan Khusus sebesar Rp10.856.188.862.032 atau 12,81%.

F.2.1.5 Belanja Barang

Belanja Barang pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp523.368.042.639.998 dan Rp432.714.969.865.127. Belanja Barang pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp90.653.072.774.871 atau 20,95% dari TA 2023. Belanja Barang merupakan pengeluaran pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan.

Adapun rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut:

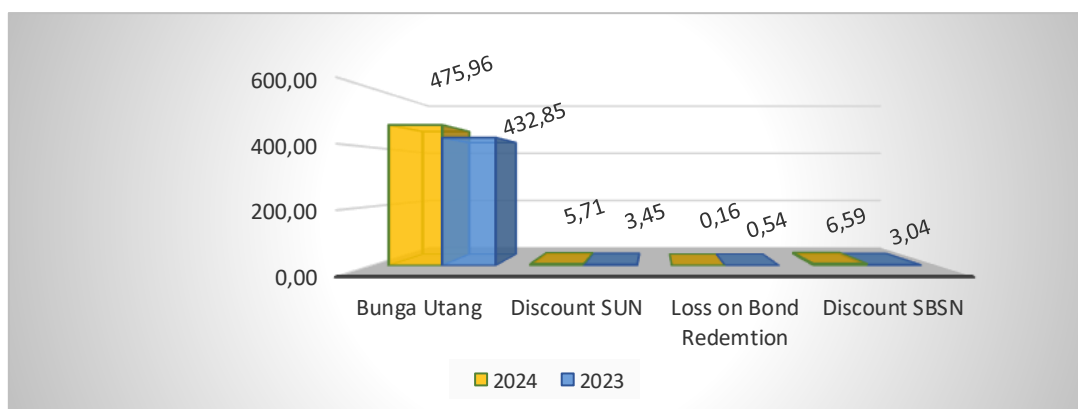
Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Barang	182.795.632.669.970	149.975.847.133.255	21,88
Belanja Jasa	55.343.968.818.268	50.333.964.148.889	9,95
Belanja Pemeliharaan	48.661.531.818.059	48.113.526.685.260	1,14
Belanja Perjalanan Dinas	53.891.864.335.902	48.305.891.764.735	11,56
Belanja Badan Layanan Umum	91.952.233.291.295	70.780.247.933.038	29,91
Belanja Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	90.675.483.082.944	65.188.725.039.787	39,10
Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden	47.328.623.560	16.767.160.163	182,27
Jumlah Belanja Barang	523.368.042.639.998	432.714.969.865.127	20,95

F.2.1.6 Belanja Pembayaran Bunga Utang

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp488.426.422.143.817 dan Rp439.882.584.341.259. Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp48.543.837.802.558 atau 11,04% dari TA 2023. Belanja Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga melalui rekening pengeluaran Bank Indonesia pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.

Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Bunga Utang	475.963.129.426.967	432.848.465.786.637	9,96
Discount SUN	5.710.276.912.350	3.448.731.870.328	65,58
Loss On Bond Redemption	160.319.500.000	536.653.910.900	(70,13)
Discount SBSN	6.592.696.304.500	3.048.732.773.394	116,24
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	488.426.422.143.817	439.882.584.341.259	11,04



F.2.1.6.1 Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp475.963.129.426.967 dan Rp432.848.465.786.637. Pembayaran Bunga Utang pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp43.114.663.640.330 atau 9,96% dari TA 2023. Pembayaran Bunga Utang merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga.

Adapun rincian Pembayaran Bunga Utang adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Pemby.Bunga Utang Dalam Negeri-Jangka Panjang	344.233.666.145.424	320.230.634.610.168	7,50
Belanja Pemb.Imbalan SBSN Dalam Negeri	89.241.671.087.884	82.042.499.639.521	8,77
Belanja Pemb.Bunga Utang Luar Negeri-Jangka Panjang	42.487.792.193.659	30.575.331.536.948	38,96
Jumlah Pembayaran Bunga Utang	475.963.129.426.967	432.848.465.786.637	9,96

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri TA 2024 dan TA 2023 masing-masing sebesar Rp42.487.792.193.659 dan Rp30.575.331.536.948. Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek. Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri mengalami kenaikan sebesar

Rp11.912.460.656.711 atau 38,96% dari TA 2023. Kenaikan tersebut karena adanya kenaikan utang program dan proyek di TA 2024.

Adapun rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Bunga Pinjaman Program	21.708.836.497.880	16.041.674.225.787	35,33
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	20.778.653.588.316	14.533.324.433.086	42,97
Belanja Pembayaran Biaya Transfer	302.107.463	332.878.075	(9,24)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	42.487.792.193.659	30.575.331.536.948	38,96

F.2.1.6.2 Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.710.276.912.350 dan Rp3.448.731.870.328. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.261.545.042.022 atau 65,58% dari TA 2023.

Adapun rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Utang Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara	1.686.875.072.000	1.468.337.011.000	14,88
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara	3.392.865.751.600	1.138.430.387.136	198,03
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	630.536.088.750	841.964.472.192	(25,11)
Jumlah Pembayaran Discount SUN	5.710.276.912.350	3.448.731.870.328	65,58

F.2.1.6.3 Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption*

Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp160.319.500.000 dan Rp536.653.910.900. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp376.334.410.900 atau minus 70,13% dari TA 2023. Belanja Pembayaran *Loss On Bond Redemption* merupakan belanja yang timbul saat pembelian kembali atau pelunasan atas obligasi negara saat jatuh tempo lebih besar dari nilai buku (*carrying amount*).

F.2.1.6.4 Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara

Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.592.696.304.500 dan Rp3.048.732.773.394. Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.543.963.531.106 atau 116,24% dari TA 2023.

Adapun rincian Belanja Pembayaran *Discount* Surat Berharga Syariah Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SBSN - Jangka Panjang	4.435.167.932.300	2.719.227.753.394	63,10
Belanja Pembayaran <i>Discount</i> SPNS	2.157.528.372.200	329.505.020.000	554,78
Jumlah Pembayaran Discount SBSN	6.592.696.304.500	3.048.732.773.394	116,24

F.2.1.7 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp292.692.594.096.846** dan **Rp269.592.086.053.747**. Belanja Subsidi pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar R23.100.508.043.099 atau 8,57% dari TA 2023. Belanja Subsidi merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat.

Adapun rincian Belanja Subsidi sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-BBM	101.797.951.096.583	95.590.003.271.521	6,49
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Lembaga Non Keuangan-Non BBM	132.321.082.328.948	119.346.845.627.560	10,87
Belanja Subsidi Perusahaan Negara Dalam Rangka PSO	7.976.011.636.109	5.092.347.517.157	56,63
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	47.259.787.524.296	45.323.860.034.309	4,27
Belanja Subsidi - Darurat Bencana	3.337.761.510.910	4.239.029.603.200	(21,26)
Jumlah Belanja Subsidi	292.692.594.096.846	269.592.086.053.747	8,57

F.2.1.8 Belanja Hibah

Belanja Hibah pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp278.430.938.953** dan **Rp219.140.718.777**. Belanja Hibah pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp59.290.220.176 atau minus 27,06% dari TA 2023. Belanja Hibah merupakan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri, Kepada Organisasi Internasional, dan Hibah Lainnya.

Adapun rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	183.941.706.710	69.824.315.937	163,44
Hibah Kepada Organisasi Internasional	94.227.497.856	149.215.239.063	(36,85)
Hibah Lainnya (<i>Banking Commission</i>)	261.734.387	101.163.777	158,72
Jumlah Belanja Hibah	278.430.938.953	219.140.718.777	27,06

Kenaikan Belanja Hibah salah satunya karena pada TA 2024 terdapat kenaikan Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri. Adapun realisasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri dengan penerima terbesar antara lain pada pemerintah Palestina dengan tujuan bantuan kemanusiaan bagi orang-orang yang terkena dampak konflik dan pemerintah Turki dengan tujuan pembangunan "Kampung Indonesia" di daerah terdampak gempa bumi Turki.

F.2.1.9 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp154.949.830.442.829** dan **Rp156.601.633.832.214**. Belanja Bantuan Sosial pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.651.803.389.385 atau minus 1,05% dari TA 2023. Belanja Bantuan Sosial merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Rehabilitasi Sosial	1.928.370.449.382	1.281.281.715.566	50,50
Jaminan Sosial	72.999.290.688.788	67.709.313.222.239	7,81
Pemberdayaan Sosial	193.850.657.286	206.932.779.339	(6,32)
Perlindungan Sosial	75.108.852.688.813	82.368.469.578.565	(8,81)
Penanggulangan Kemiskinan	13.438.000.000	20.375.194.249	(34,05)
Penanggulangan Bencana	4.706.027.958.560	5.015.261.342.256	(6,17)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	154.949.830.442.829	156.601.633.832.214	(1,05)

Penurunan Belanja Bantuan Sosial pada TA 2024, didominasi oleh belanja bantuan sosial untuk perlindungan sosial sebesar Rp7.259.616.889.752.

F.2.1.10 Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp216.138.188.685.429 dan Rp225.023.669.152.725. Belanja Lain-lain pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp8.885.480.467.296 atau minus 3,95% dari TA 2023.

Adapun rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Belanja Lain-lain Dana Cadangan	0	12.875.144.605.421	(100,00)
Belanja Lain-lain Jasa Pelayanan BUN	119.748.067.230	121.245.799.637	(1,24)
Belanja Lain-lain BUN	210.371.171.227.940	206.775.576.705.309	1,74
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	0	0	0
Belanja Lain-lain Lainnya	5.647.269.389.156	5.251.702.041.664	7,53
Belanja Penyesuaian Selisih Kurs Invoice	1.103	694	58,93
Jumlah Belanja Lain-lain	216.138.188.685.429	225.023.669.152.725	(3,95)

Penurunan Belanja Lain-lain pada TA 2024 disebabkan karena pada TA 2024 tidak terdapat lagi alokasi belanja untuk belanja cadangan beras pemerintah.

F.2.1.11 Transfer Dana Bagi Hasil Pajak

Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp54.241.430.203.000 dan Rp63.845.997.623.000. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp9.604.567.420.000 atau minus 15,04% dari TA 2023. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak merupakan penyaluran oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah Daerah.

Adapun rincian Transfer Dana Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Bagi Hasil Pajak Penghasilan Perorangan	32.733.740.472.000	41.526.659.300.000	(21,17)
Bagi Hasil PBB	21.507.689.731.000	22.319.338.323.000	(3,64)
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	54.241.430.203.000	63.845.997.623.000	(15,04)

F.2.1.12 Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp93.845.576.439.722 dan Rp135.944.555.602.100. Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam

(SDA) pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp42.098.979.162.378 atau minus 30,97% dari TA 2023.

Adapun rincian Transfer Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Bagi Hasil Minyak Bumi	8.944.481.225.000	16.491.258.147.000	(45,76)
Bagi Hasil Gas Bumi	7.006.411.326.000	11.738.041.628.000	(40,31)
Bagi Hasil Pertambangan Umum	71.110.816.829.000	99.425.415.550.000	(28,48)
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	1.586.280.291.000	2.005.232.650.000	(20,89)
Bagi Hasil Kehutanan	1.420.960.624.222	1.984.193.334.100	(28,39)
Bagi Hasil Perikanan	951.698.762.000	1.095.637.785.000	(13,14)
Bagi Hasil Perkebunan Sawit	2.824.927.382.500	3.204.776.508.000	(11,85)
Jumlah Dana Bagi Hasil SDA	93.845.576.439.722	135.944.555.602.100	(30,97)

F.2.1.13 Transfer Dana Bagi Hasil Cukai

Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp5.087.556.141.540 dan Rp5.876.010.795.530. Transfer Bagi Hasil Cukai pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp788.454.653.990 atau minus 13,42% dari TA 2023.

F.2.1.14 Transfer Dana Alokasi Umum

Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp429.210.611.278.998 dan Rp398.029.628.594.542. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp31.180.982.684.456 atau 7,83% dari TA 2023. Transfer Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan propinsi/kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

F.2.1.15 Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp50.890.077.113.845 dan Rp50.334.741.347.305. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp555.335.766.540 atau 1,10% dari TA 2023. Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik adalah alokasi dari APBN kepada propinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

F.2.1.16 Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Insentif Fiskal (IF)

Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan D.I.Y, dan Insentif Fiskal (IF) pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26.693.231.531.500 dan Rp26.520.021.192.724. Dana Otonomi Khusus pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp173.210.338.776 atau 0,65% dari TA 2023. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah dana yang berasal dari bagian anggaran BUN yang dialokasikan mendanai kewenangan DIY sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Insentif Fiskal merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan kinerja tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja Pemerintah Daerah. Kinerja dapat berupa pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan nasional.

Rincian Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Insentif Fiskal TA 2024 dan TA 2023 sebagai berikut.

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Dana Otonomi Khusus Aceh	4.276.993.035.000	3.960.000.000.000	8,00
Dana Otonomi Khusus Papua	2.370.916.915.000	2.304.092.881.000	2,90
Dana Otonomi Khusus Papua Selatan	1.917.322.868.000	1.482.026.161.000	29,37
Dana Otonomi Khusus Papua Tengah	2.753.614.656.000	2.426.166.152.000	13,50
Dana Otonomi Khusus Papua Pegunungan	3.330.716.236.000	2.592.687.864.000	28,47
Dana Otonomi Khusus Papua Barat	1.752.109.362.000	2.301.179.840.000	(23,86)
Dana Otonomi Khusus Papua Barat Daya	1.869.817.863.000	2.175.110.672.000	(14,04)
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.420.000.000.000	1.372.725.809.224	3,44
Insentif Fiskal	7.001.740.596.500	7.906.031.813.500	(11,44)
Jumlah Transfer Dana Otsus, DIY, IF	26.693.231.531.500	26.520.021.192.724	0,65

F.2.1.17 Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp130.441.233.738.467** dan **Rp128.081.946.376.309**. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.359.287.362.158 atau 1,84% dari TA 2023. Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.

Adapun rincian Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Transfer Lainnya) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus	53.926.075.147.483	51.141.585.255.437	5,44
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	1.495.768.803.108	1.166.575.891.867	28,22
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.303.572.819.195	53.094.401.455.075	0,39
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) dan Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah	14.779.887.962.430	15.705.734.730.625	(5,89)
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Ketenagakerjaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pelayanan Kepariwisata	379.208.852.000	380.997.846.500	(0,47)
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan-Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), Pendidikan Kesetaraan dan Museum dan Taman	5.683.327.134.751	5.731.123.396.805	(0,83)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	129.567.840.718.967	127.220.418.576.309	1,85
Dana Alokasi Khusus Non Fisik II			
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	129.806.000.000	128.562.300.000	0,97

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Dana Fasilitas Penanaman Modal	248.324.714.500	247.386.450.000	0,38
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	297.142.612.500	292.704.050.000	1,52
Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	198.119.692.500	192.875.000.000	2,72
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik II	873.393.019.500	861.527.800.000	1,38
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik	130.441.233.738.467	128.081.946.376.309	1,84

Kenaikan Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2024 terutama berasal kenaikan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG) dan

Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp2.784.489.892.046 atau 5,44%.

F.2.1.18 Dana Desa

Dana Desa pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp70.925.927.774.598 dan Rp69.856.768.617.317. Dana Desa pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp1.069.159.157.281 atau 1,53% dari TA 2023. Dana Desa merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Sejak tahun 2021 Transfer ke Daerah dan Dana Desa dilakukan melalui penyaluran langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran tersebut dilakukan dengan cara pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten/Kota untuk kemudian dana pemotongan tersebut disalurkan ke RKD.

F.2.1.19 Hibah Kepada Daerah

Hibah Kepada Daerah pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.207.162.260.694 dan Rp2.940.874.059.627. Hibah Kepada Daerah pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp733.711.798.933 atau minus 24,95% dari TA 2023. Hibah Kepada Daerah merupakan dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Adapun rincian Hibah Kepada Daerah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	810.103.833.952	1.977.982.930.618	(59,04)
Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	101.257.208.226	143.405.713.248	(29,39)
Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan	1.295.801.218.516	819.485.415.761	58,12
Jumlah Hibah Kepada Daerah	2.207.162.260.694	2.940.874.059.627	(24,95)

F.2.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar minus Rp414.403.152.941.181 dan minus Rp391.624.901.747.838. Arus Kas dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp22.778.251.193.343 atau minus 5,82% dari TA 2023. Penurunan arus kas bersih netto dari Aktivitas Investasi pada TA 2024 terutama berasal dari adanya penurunan arus kas masuk pada penerimaan investasi pemerintah serta kenaikan arus kas

keluar pada belanja modal. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Adapun rincian Arus Kas bersih netto dari Aktivitas Investasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Arus Masuk	24.787.984.406.152	28.445.607.957.179	(12,86)
Dikurangi Arus Keluar	439.191.137.347.333	420.070.509.705.017	4,55
Arus Kas Bersih	(414.403.152.941.181)	(391.624.901.747.838)	(5,82)

F.2.2.1 Pengelolaan dan Penjualan BMN

Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp499.450.401.555** dan **Rp546.960.660.401**. Pengelolaan dan Penjualan BMN pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp47.510.258.846 atau minus 8,69% dari TA 2023. Pengelolaan dan Penjualan BMN merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah tinggal, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan.

Adapun rincian Pengelolaan dan Penjualan BMN adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	10.757.463.169	13.995.886.365	(23,14)
Penjualan Peralatan dan Mesin	240.275.834.546	229.347.995.025	4,76
Penjualan Sewa Beli	4.314.791.972	6.017.182.562	(28,29)
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	6.216.198.000	2.518.000	246.770,45
Tukar Menukar Peralatan dan Mesin	0	201.009.000	(100,00)
Pemindahtanganan BMN Lainnya	220.354.822.100	294.338.894.442	(25,14)
Pendapatan Atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	17.531.291.768	3.057.175.007	473,45
Jumlah Pengelolaan & Penjualan BMN	499.450.401.555	546.960.660.401	(8,69)

F.2.2.2 Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp1.400.109.062.740** dan **Rp1.097.737.606.166**. Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp302.371.456.574 atau 27,54% dari TA 2023. Penjualan Aset Program Restrukturisasi merupakan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN dan Aset Bekas Milik eks Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Adapun rincian Pendapatan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penjualan/Penyelesaian Aset eks BPPN	1.221.059.570.444	1.030.646.856.018	18,48
Penjualan/Penyelesaian Aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	179.049.492.296	67.090.750.148	166,88
Jumlah Penjualan Aset Program Restrukturisasi	1.400.109.062.740	1.097.737.606.166	27,54

F.2.2.3 Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir

Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp3.268.707.260.033** dan **Rp359.653.415.387**. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.909.053.844.646 atau 808,85%. Penerimaan pembiayaan dana bergulir tersebut merupakan angsuran pelunasan pinjaman pokok dana bergulir BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT berdasarkan perjanjian antara para BUJT dengan BPJT.

F.2.2.4 Penerimaan Investasi Pemerintah

Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp19.619.717.681.824** dan **Rp26.441.256.275.225**. Penerimaan Investasi Pemerintah pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp6.821.538.593.401 atau minus 25,80% dari TA 2023. Penerimaan Investasi Pemerintah merupakan Penerimaan Kembali Investasi dan Penerimaan Cicilan Pokok Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah.

Rincian penerimaan investasi pemerintah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan Kembali Investasi			
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Nonpermanen dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	218.750.000.000	3.437.500.000.000	(93,64)
Penerimaan Pembiayaan Investasi Pemerintah Non Permanen atas Transaksi pada Rekening Investasi Pemerintah PEN (RIPPEN)	0	1.847.519.139.000	(100,00)
Jumlah Penerimaan Kembali Investasi	218.750.000.000	5.285.019.139.000	(95,86)
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah			
Penerimaan Pengembalian Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	4.084.647.335.605	2.944.155.651.898	38,74
Penerimaan Pembiayaan atas Pengembalian Dana Cadangan Pemerintah pada BLU	322.114.659.182	4.997.550.000	6.345,45
Penerimaan yang Berasal dari Manajemen Aset Negara	14.994.205.687.037	18.207.083.934.327	(17,65)
Jumlah Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	19.400.967.681.824	21.156.237.136.225	(8,30)
Jumlah	19.619.717.681.824	26.441.256.275.225	(25,80)

F.2.2.5. Belanja Modal

Belanja Modal pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp355.511.133.723.811** dan **Rp303.041.293.068.751**. Belanja Modal pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp52.469.840.655.060 atau 17,31% dari TA 2023. Kenaikan Belanja Modal terbesar terdapat pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar Rp39.706.186.315.374 dibanding dengan TA 2023. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Adapun rincian Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Modal Tanah	18.364.728.983.726	21.762.067.765.333	(15,61)
Peralatan dan Mesin	178.399.691.211.787	138.693.504.896.413	28,63

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Gedung dan Bangunan	49.410.294.553.570	38.664.408.477.682	27,79
Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.974.443.874.034	91.301.385.315.249	0,74
Lainnya	8.624.510.944.381	5.445.554.835.621	58,38
Modal BLU	8.737.464.156.313	7.174.371.778.453	21,79
Jumlah Belanja Modal	355.511.133.723.811	303.041.293.068.751	17,31

F.2.2.6 Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional

Pembiayaan Pengembangan Pendidikan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp15.000.000.000.000 dan Rp20.000.000.000.000. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp5.000.000.000.000 atau minus 25,00% dari TA 2023.

F.2.2.7 Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir

Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp2.225.200.000.000. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.225.200.000.000 atau minus 100,00% dari TA 2023.

F.2.2.8 Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp42.149.731.758.522 dan Rp41.421.985.992.266. Penyertaan Modal Negara pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp727.745.766.256 atau 1,76% dari TA 2023. Penyertaan Modal Negara adalah penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, PMN/Dana Investasi Pemerintah.

Adapun rincian Penyertaan Modal Negara adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	35.165.229.891.758	39.862.353.463.337	(11,78)
Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan	1.984.501.866.764	1.559.632.528.929	27,24
PMN Lainnya	5.000.000.000.000	0	100,00
Jumlah Penyertaan Modal Negara	42.149.731.758.522	41.421.985.992.266	1,76

Kenaikan Penyertaan Modal Negara pada TA 2024 salah disebabkan karena kenaikan Penyertaan Modal Negara Lainnya dan Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan. PMN Lainnya dialokasikan kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk memberikan fasilitas pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, namun dianggap perlu oleh pemerintah untuk mendukung kebijakan ekspor nasional. Sedangkan PMN pada Organisasi/Lembaga Keuangan pada 6 Lembaga Keuangan Internasional dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	TA 2024
1	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	63.068.000.000
2	International Development Association (IDA)	326.792.480.000
3	Islamic Development Bank (IsDB)	1.594.641.386.764
Jumlah Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan		1.984.501.866.764

F.2.2.9 Pengeluaran Investasi Pemerintah

Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp26.530.271.865.000 dan Rp53.382.030.644.000. Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp26.851.758.779.000 atau minus 50,30% dari TA 2023.

Adapun rincian Pengeluaran Investasi Pemerintah adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Investasi pemerintah	17.058.615.865.000	26.827.519.139.000	(36,41)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset Aset Negara	7.500.000.000.000	25.424.000.000.000	(70,50)
Pengeluaran Pembiayaan untuk Pengelolaan Dana Rehabilitasi Mangrove pada BLU BPD LH	512.670.000.000	800.000.000.000	(35,92)
Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah	1.458.986.000.000	330.511.505.000	341,43
Jumlah Pengeluaran Investasi Pemerintah	26.530.271.865.000	53.382.030.644.000	(50,30)

Penurunan Pengeluaran Investasi Pemerintah pada TA 2024 salah satunya disebabkan karena penurunan Pengeluaran Pembiayaan untuk Manajemen Aset-Aset Negara sebesar Rp17.924.000.000.000. Namun demikian terdapat kenaikan Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah sebesar Rp1.128.474.495.000. Investasi Pemerintah dalam Rangka Kewajiban Penjaminan Pemerintah merupakan pengeluaran dukungan penjaminan pada

program PEN dan/atau stabilitas sistem keuangan serta percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Proyek percepatan pembangunan infrastruktur antara lain proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur daerah kepada BUMN, percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera dan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik

F.2.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp614.280.048.971.953 dan Rp445.794.317.054.009. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp168.485.731.917.942 atau 37,79% dari TA 2023. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Adapun rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Arus Masuk	1.335.783.989.462.128	1.072.010.651.415.779	24,61
Dikurangi Arus Keluar	721.503.940.490.175	626.216.334.361.770	15,22
Arus Kas Bersih	614.280.048.971.953	445.794.317.054.009	37,79

F.2.3.1 Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.151.979.645.998.052 dan Rp902.837.385.270.107. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri pada

TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp249.142.260.727.945 atau 27,60% dari TA 2023. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan Pembiayaan DN-Perbankan	56.419.615.865.000	37.225.200.000.000	51,56
Penjualan Surat Berharga Negara-Rupiah	944.123.231.773.300	757.734.589.688.370	24,60
Penjualan Surat Berharga Negara-Valas	131.314.145.000.000	90.373.466.054.058	45,30
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	20.122.653.359.752	17.504.129.527.679	14,96
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	1.151.979.645.998.052	902.837.385.270.107	27,60

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri berasal dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp56.419.615.865.000 dan Rp37.225.200.000.000. Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri Perbankan sebesar Rp19.194.415.865.000 atau 51,56% dari TA 2023.

Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	56.381.000.000.000	35.000.000.000.000	61,09
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pembangunan Hutan	0	2.225.200.000.000	(100,00)
Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU	38.615.865.000	0	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	56.419.615.865.000	37.225.200.000.000	51,56

b. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Rupiah

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam mata uang rupiah. Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp944.123.231.773.300 dan Rp757.734.589.688.370.

Dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara	33.504.000.000.000	34.542.000.000.000	(3,01)
Penerimaan dari Penjualan Obligasi Negara	598.760.180.335.000	450.925.819.706.060	32,78
Penerimaan dari Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Negeri	224.750.751.438.410	224.088.336.686.968	0,30
Penerimaan dari Penjualan Surat Perbendaharaan Negara Syariah	54.213.300.000.000	13.830.000.000.000	292,00
Penerimaan Penerbitan SBSN Dalam Rangka Pembiayaan Proyek	32.894.999.999.890	34.348.433.295.342	(4,23)
Jumlah Penerimaan SBN-Rupiah	944.123.231.773.300	757.734.589.688.370	24,60

Dengan demikian, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan SBN Rupiah sebesar Rp186.388.642.084.930 atau 24,60% dari TA 2023.

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN) – Valas

Penerimaan pembiayaan SBN – Valuta Asing pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp131.314.145.000.000 dan Rp90.373.466.054.058, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerbitan Penjualan Obligasi Luar Negeri-Valas	92.879.895.000.000	58.975.466.054.058	57,49
Penerbitan/Penjualan SBSN Valas-Jangka Panjang	38.434.250.000.000	31.398.000.000.000	22,41
Jumlah Penerimaan SBSN-Valas	131.314.145.000.000	90.373.466.054.058	45,30

Sesuai dengan tabel diatas, terdapat kenaikan Penerimaan Pembiayaan SBN – Valas sebesar Rp40.940.678.945.942 atau 45,30% dari TA 2023, yang berasal dari kenaikan Penerimaan Penerbitan Penjualan

Obligasi Luar Negeri – Valuta Asing sebesar Rp33.904.428.945.942 atau 57,49% serta berasal dari kenaikan Penerbitan/Penjualan SBSN Valas – Jangka Panjang sebesar Rp7.036.250.000.000 atau 22,41%.

d. Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri pada TA 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp20.122.653.359.752 dan Rp17.504.129.527.679, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	18.649.607.994.305	16.672.197.186.598	11,86
Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dari Perusahaan Daerah	1.473.045.365.447	831.932.341.081	77,06
Jumlah Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	20.122.653.359.752	17.504.129.527.679	14,96

F.2.3.2 Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp179.765.350.519.789** dan **Rp162.650.352.798.218**. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp17.114.997.721.571 atau 10,52% dari TA 2023. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari Pinjaman Program/Tunai dan Pinjaman Proyek/Kegiatan. Pinjaman Proyek/Kegiatan merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berdasarkan usulan dari Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah dan BUMN.

Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pinjaman Program / Tunai	60.028.929.576.507	82.990.780.840.684	(27,67)
Pinjaman Proyek / Kegiatan	119.736.420.943.282	79.659.571.957.534	50,31
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	179.765.350.519.789	162.650.352.798.218	10,52

F.2.3.3 Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman

Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp4.023.538.398.833** dan **Rp6.374.398.495.969**. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp2.350.860.097.136 atau minus 36,88% dari TA 2023. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman merupakan penerimaan

Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian pemberian pinjaman kepada Pemda, BUMD, dan BUMN.

Adapun rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Dalam Negeri	268.991.443.728	2.041.258.121.405	(86,82)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman Luar Negeri	3.754.546.955.105	4.333.140.374.564	(13,35)
Jumlah Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	4.023.538.398.833	6.374.398.495.969	(36,88)

F.2.3.4 Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp15.454.545.454** dan **Rp148.514.851.485**. Realisasi penerimaan pembiayaan lain-lain pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp133.060.306.031 atau sebesar minus 89,59% dari TA 2023. Penerimaan Pembiayaan Lain-Lain merupakan Penerimaan Pembiayaan atas Pemberian Pinjaman dalam Rangka Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

F.2.3.5 Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2024 dan TA 2023 sebesar **Rp629.807.306.465.724** dan **Rp542.860.028.458.620**. Realisasi pengeluaran pembiayaan dalam negeri pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp86.947.278.007.104 atau 16,02% dari TA 2023. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri digunakan untuk pembiayaan dalam negeri perbankan dan non perbankan, pelunasan surat berharga negara dalam mata uang rupiah dan valuta asing.

Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Pelunasan SBN-Rupiah	526.536.261.326.963	441.536.249.313.377	19,25
Pelunasan SBN-Valas	98.167.863.026.150	98.378.018.023.089	(0,21)
Pengeluaran Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri	5.103.182.112.611	2.945.761.122.154	73,24
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	629.807.306.465.724	542.860.028.458.620	16,02

F.2.3.6 Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp87.454.196.251.177** dan **Rp81.450.306.790.493**. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.003.889.460.684 atau 7,37% dari TA 2023.

Adapun rincian Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Tunai	47.109.598.460.079	41.620.171.896.141	13,19
Cicilan Pokok Utang LN-Pinjaman Kegiatan	40.344.597.791.098	39.830.134.894.352	1,29
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan LN	87.454.196.251.177	81.450.306.790.493	7,37

F.2.3.7 Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement

Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp4.242.437.773.274** dan **Rp1.905.999.112.657**. Pemberian Pinjaman

yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp2.336.438.660.617 atau 122,58% dari TA 2023. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement merupakan pengeluaran pemerintah atas atas penerusan pinjaman luar negeri yang diberikan untuk Pemda/BUMN/BUMD. Kenaikan ini disebabkan adanya penarikan pinjaman oleh Pemprov. DKI Jakarta untuk Pembiayaan *Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project (Phase 2)*.

F.2.4 Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp24.391.505.836.682 dan Rp88.761.873.212.786. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sampai dengan TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp64.370.367.376.104 atau minus 72,52% dari TA 2023. Penurunan Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terutama berasal dari penurunan transaksi Netto Non Anggaran Pihak Ketiga. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN.

Adapun rincian Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	(215.134.088.039)	620.329.866.094	(134,68)
Transito (Netto)	1.581.530.989.101	14.112.089.380.009	(88,79)
Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga	23.022.929.532.814	74.033.583.845.555	(68,90)
Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	2.179.402.806	(4.129.878.872)	152,77
Arus Kas Bersih	24.391.505.836.682	88.761.873.212.786	(72,52)

F.2.4.1 Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar minus Rp215.134.088.039 dan Rp620.329.866.094. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp835.463.954.133 atau minus 134,68% dari TA 2023. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya dan transitoris Pihak Ketiga.

Adapun rincian Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PFK			
Penerimaan PFK 10% Gaji	29.645.135.369.904	26.362.502.018.784	12,45
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	-	-	-
Penerimaan PFK Beras BULOG	282.505.498.347	281.475.805.508	0,37
Penerimaan PFK 3% Iuran Kesehatan Pemda	9.803.358.930.922	9.599.384.497.952	2,12
Penerimaan PFK Simpanan Peserta TAPERA	(44.232.021)	(4.132.913.455)	98,93
Potongan PFK 1% Kesehatan bagi Anggota Keluarga yang Lain	12.538.453.689	5.834.445.783	114,90
Penerimaan PFK Lain-lain	586.157.850.977	475.468.203.386	23,28
Penerimaan PFK Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	93.742.435.847.373	91.622.390.275.538	2,31

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Jumlah Penerimaan PFK	134.072.087.719.191	128.342.922.333.496	4,46
PENGELUARAN NON ANGGARAN PFK			
Pengeluaran PFK 10% Gaji	24.010.584.471.320	22.022.336.757.752	9,03
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	2.501.393.206.460	2.136.557.552.256	17,08
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	282.493.331.283	281.484.698.786	0,36
Pengembalian Penerimaan PFK 3% Iuran Jaminan Kesehatan	13.094.545.547.212	11.674.123.619.963	12,17
Pengembalian Penerimaan PFK Simpanan Peserta TAPERA	-	-	-
Pengembalian Penerimaan PFK 1% Jaminan Kesehatan anggota keluarga Lain	12.519.651.016	6.382.422.812	96,16
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	551.219.809.020	476.519.434.552	15,68
Pengeluaran PFK Setoran Pajak Rokok dan Piutang Lainnya	93.834.465.790.919	91.125.187.981.281	2,97
Jumlah Pengeluaran PFK	134.287.221.807.230	127.722.592.467.402	5,14
JUMLAH PFK (Netto)	(215.134.088.039)	620.329.866.094	(134,68)

F.2.4.2 Transito (Netto)

Transito pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.581.530.989.101 dan Rp14.112.089.380.009. Transito pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp12.530.558.390.908 atau minus 88,79% dari TA 2023. Transito merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) TA berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima TA berjalan maupun TA yang lalu.

Adapun rincian transito adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan Transito:			
Penerimaan Transito	7.704.307.194.510	8.492.558.276.699	(9,28)
Penerimaan Transito Tambahan Uang Persediaan	43.755.133.894.202	45.089.190.780.727	(2,96)
Penerimaan Escrow	44.856.854.496.729	44.573.170.856.122	0,64
Jumlah Penerimaan Transito	96.316.295.585.441	98.154.919.913.548	(1,87)
Pengeluaran Transito:			
Pengeluaran Transito	7.736.988.486.665	8.436.736.010.724	(8,29)
Pengeluaran Transito Tambahan Uang Persediaan	43.729.731.126.229	45.107.694.556.983	(3,05)
Pengeluaran Escrow	43.268.044.983.446	30.498.399.965.832	41,87
Jumlah Pengeluaran Transito	94.734.764.596.340	84.042.830.533.539	12,72
Jumlah Transito (Netto)	1.581.530.989.101	14.112.089.380.009	(88,79)

F.2.4.3 Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)

Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.022.929.532.814 dan Rp74.033.583.845.555. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp51.010.654.312.741 atau minus 68,90% dari TA 2023. Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga timbul antara lain karena transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya yangmana termasuk penerimaan DBH pada rekening TDF-TKD, Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas dan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas. Adapun rincian Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
PENERIMAAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	21.523.200.280	45.350.255.055	(52,54)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	63.810.630.958.302	85.578.399.047.009	(25,44)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.248.540.286.768.333	1.015.151.541.826.392	22,99
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	43.288.138.641	4.432.932.220.347	(99,02)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	913.587.576.712.203	774.821.766.650.951	17,91
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	11.123.038.319.003	14.797.174.012.904	(24,83)
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	215.365.785.806.611	155.068.282.181.648	38,88
Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	30.644.849.222.042	22.968.090.595.650	33,42
Jumlah Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga	2.483.136.979.125.415	2.072.863.536.789.856	19,79
PENGELUARAN NON ANGGARAN PIHAK KETIGA			
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	21.291.024.677	44.972.698.972	(52,66)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	63.354.669.888.701	85.700.490.333.165	(26,07)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Rekening Pemerintah Lainnya	1.200.232.933.248.118	894.226.796.795.500	34,22
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Migas	42.309.794.012.363	47.446.280.050.848	(10,83)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Non Migas	913.417.729.764.351	773.583.870.244.984	18,08
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dalam Rekening Khusus	11.123.038.319.003	14.793.837.834.010	(24,81)
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Optimalisasi Kas	210.365.785.806.611	160.068.282.181.648	31,42
Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Sistem Perbankan	19.288.807.528.777	22.965.422.805.274	(16,01)
Jumlah Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga	2.460.114.049.592.601	1.998.829.952.944.401	23,08
Jumlah Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	23.022.929.532.814	74.033.583.845.555	(68,90)

F.2.4.4 Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)

Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar **Rp2.179.402.806** dan **minus Rp4.129.878.872**. Kiriman Uang Antar Rekening Bank pada TA 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp6.309.281.678 atau 152,77% dari TA 2023. Kiriman Uang (KU) antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan dan sebaliknya. Pemindahbukuan intern rekening BUN dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2024 dan TA 2023 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun.

Adapun rincian Kiriman Uang Antar Rekening Bank adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2024	TA 2023	%
Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank	23.993.912.119.408.940	21.643.466.376.177.919	10,86
Pengeluaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank	23.993.909.940.006.134	21.643.470.506.056.791	10,86
Jumlah Kiriman Uang (Netto)	2.179.402.806	(4.129.878.872)	152,77

G. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**G.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan Perubahan Ekuitas BUN Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

URAIAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
A. EKUITAS AWAL	(3.328.187.950.388.477)	(3.262.260.267.295.775)
B. SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	(1.584.452.178.371.533)	(1.463.681.266.458.881)
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
1. Koreksi Nilai Persediaan	-	59.355.000
2. Koreksi Nilai Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi	24.873.996.185.564	(4.984.035.702.940)
3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya	1.437.380.985.498	229.322.791.975
4. Koreksi SAL	2.074.667.959.503	1.498.554.940.209
5. Lain-lain	69.599.521.111.279	37.762.853.060.389
Jumlah Koreksi-Koreksi yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	97.985.566.241.844	34.506.754.444.633
D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1.236.867.333.530.144	1.338.745.845.087.589
E. KEUNTUNGAN / (KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI	-	-
F. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L		
1. Mutasi Kas Di Bendahara Pengeluaran	32.325.296.274	(18.216.293.568)
2. Mutasi Kas Lainnya Di K/L Dari Hibah	(3.440.440.444.071)	11.096.844.487.771
3. Mutasi Kas BLU	4.579.700.230.037	13.422.355.639.754
Jumlah Mutasi Ekuitas BUN Di K/L	1.171.585.082.240	24.500.983.833.957
KENAIKAN (PENURUNAN) EKUITAS (B+C+D+E+F)	(248.427.693.517.305)	(65.927.683.092.702)
G. EKUITAS AKHIR (A+B+C+D+E+F)	(3.576.615.643.905.782)	(3.328.187.950.388.477)

G.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**G.2.1. EKUITAS AWAL**

Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 sebesar **minus Rp3.328.187.950.388.477** dan **minus Rp3.262.260.267.295.775**. Rincian nilai Ekuitas awal tersebut adalah:

Kode BA	Uraian BA BUN	Ekuitas Awal 2024	Ekuitas Awal 2023
999.00	Akuntansi Pusat	611.132.486.226.114	536.433.009.418.783
999.01	BA BUN Utang	(8.294.956.193.243.511)	(7.861.967.689.868.840)
999.02	BA BUN Hibah	-	-
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	4.153.239.563.426.996	3.827.718.880.770.840
999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	53.892.237.130.103	60.907.330.544.608
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	(105.810.575.987.129)	(64.787.229.735.828)
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(28.287.401.199.194)	(42.327.401.721.901)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(72.518.435.781.776)	(67.223.517.455.607)
999.09	Badan Lainnya	29.854.766.285.853	29.625.443.493.878
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	337.184.179.970.476	335.898.064.063.777
Jumlah Ekuitas Awal		(3.316.269.373.172.068)	(3.245.723.110.490.290)
Eliminasi		(11.918.577.216.409)	(16.537.156.805.485)
Ekuitas Awal Setelah Eliminasi		(3.328.187.950.388.477)	(3.262.260.267.295.775)

Eliminasi sebesar minus Rp11.918.577.216.409 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Eliminasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar minus Rp16.537.156.805.485;
2. Eliminasi pada pos Surplus/(Defisit) tahun 2023 sebesar Rp381.732.009.962 yang merupakan beban diestimasi setoran kepada pemerintah pada BA BUN Pengelola Transaksi Khusus (999.99);
3. Eliminasi pada pos Koreksi Lain-lain tahun 2023 yang berasal dari mutasi dana sebesar Rp4.236.847.579.114 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Mutasi yang berasal dari eliminasi dana yang dicadangkan untuk menjamin berlangsungnya proyek pembangunan pemerintah sebesar minus Rp330.511.505.000;
 - b. Mutasi Dana Cadangan Investasi Pemerintah PEN sebesar Rp4.847.519.139.589;
 - c. Mutasi pemindahbukuan PNBPN panas bumi dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah sebesar minus Rp196.010.334.104; dan
 - d. Mutasi dana sebesar minus Rp84.149.721.371 yang merupakan dana di Rekening Penampungan-K/L dana pada Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).

G.2.2. SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERSIONAL

Jumlah Surplus/(Defisit) Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar **minus Rp1.584.452.178.371.533** dan **minus Rp1.463.681.266.458.881**. Surplus/(Defisit) Laporan Operasional merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/(defisit) kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Rincian nilai Surplus/(Defisit) Laporan Operasional adalah:

No	Unit		31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Kode	Uraian		
1	999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(500.172.917.887.754)	(421.690.613.300.497)
2	999.02	BA BUN Hibah	43.938.294.510.430	26.678.116.010.227
3	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	313.098.106.903.883	282.393.665.133.566

No	Unit		31 Desember 2024	31 Desember 2023
	Kode	Uraian		
4	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	899.810.076.307	(688.960.243.506)
5	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	(902.569.845.812.897)	(881.054.892.672.236)
6	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(279.228.190.475.726)	(251.938.090.750.443)
7	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(221.932.009.739.198)	(228.289.098.375.022)
8	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	(38.733.838.216.318)	10.526.875.729.068
Jumlah			(1.584.700.590.641.273)	(1.464.062.998.468.843)
Penyesuaian			248.412.269.740	381.732.009.962
Jumlah Akhir			(1.584.452.178.371.533)	(1.463.681.266.458.881)

Eliminasi pada pos Surplus/(Defisit) LO Tahun 2024 Audited berasal dari estimasi beban setoran kepada pemerintah atas PNBPN perusahaan panas bumi pada BA BUN 999.99 DJA sebesar Rp248.412.269.740.

G.2.3. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Jumlah koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp97.985.566.241.844 dan Rp34.506.754.444.633 dengan rincian sebagai berikut:

Koreksi-Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Koreksi Nilai Persediaan	-	59.355.000
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	24.873.996.185.564	(4.984.035.702.940)
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	1.437.380.985.498	229.322.791.975
Koreksi SAL	2.074.667.959.503	1.498.554.940.209
Lain-Lain	70.958.926.411.591	33.526.005.481.275
Total	99.344.971.542.156	30.269.906.865.519
Eliminasi	(1.359.405.300.312)	4.236.847.579.114
Jumlah	97.985.566.241.844	34.506.754.444.633

G.2.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0 dan Rp59.355.000.

G.2.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap/Aset lainnya Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi Per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp24.873.996.185.564 dan minus Rp4.984.035.702.940 dengan rincian sebagai berikut:

BA	31 Desember 2024	31 Desember 2023
999.03	792.365.999.831	50.111.283.576
999.08	(15.473.936.598)	3.438.474.071
999.99	24.097.104.122.331	(5.037.585.460.587)
	24.873.996.185.564	(4.984.035.702.940)

Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp24.873.996.185.564 dapat dirinci sebagai berikut:

BA	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi	Total
999.03		792.365.999.831	792.365.999.831
999.08	(15.473.936.598)		(15.473.936.598)
999.99		24.097.104.122.331	24.097.104.122.331
	(15.473.936.598)	24.889.470.122.162	24.873.996.185.564

1. BA 999.03 sebesar Rp792.365.999.831 merupakan Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi yang menambah ekuitas pada KPA Satker BLU LMAN.

No.	Uraian	Jumlah
1	Koreksi penghentian pengakuan Akumulasi Penyusutan Aset eks PPA berupa 8 unit apartemen di Taman Rasuna sesuai BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024 (KEP-187/KN/2023)	548.547.660
2	Penambahan <i>line item</i> Aset Kilang LNG Badak berdasarkan BAST nomor BA-04/LMAN/2024	21.551.625.000
3	Penambahan nilai PI eks PPA	(45.377.211)
4	Jurnal balik pengakuan Aset eks BPPN berupa 2 unit aset di Yogyakarta sesuai BAST-2/KN.4/2024 tanggal 08 Januari 2024 (KEP-180/KN/2023)	(968.094.195)
5	Jurnal balik pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset eks BPPN	(9.535.926.805)
6	Jurnal balik pengakuan Aset eks BPPN berupa 8 unit aset di Depok, Bekasi, Bogor, dan Curug sesuai BAST-2/KN.4/2024 tanggal 08 Januari 2024 (KEP-180/KN/2023)	(5.932.603.333)
7	Jurnal pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset eks PPA - PI	539.905.000
8	Jurnal pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset HTBI - AL	8.417.733.500
9	Jurnal pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset eks BPPN - AL	1.442.262.000
10	Jurnal pengakuan selisih lebih penilaian wajar Aset eks PPA - AL	846.670.000
11	Jurnal pengakuan Aset lainnya AA Maramis (AHF)	364.779.300
12	Jurnal Penambahan Nilai Aset Properti Investasi Eks BPPN Tahun 2024 karena penilaian wajar aset	21.545.630.751
13	Jurnal pengakuan perolehan Aset eks BPPN tahun 2024	3.625.803.333
14	Pengakuan penambahan PI - Eks Pertamina atas adanya penyerahan aset dari PT Badak sesuai BAST Tahap 2 Tahun 2024	747.134.554.000
15	Tambahan jurnal penambahan nilai PI eks PPA	45.377.211
16	Penambahan nilai karena pembulatan (Eks PPA)	800
17	Reklasifikasi dari AL ke PI	3.274.894.195
18	Jurnal penghentian aset (koreksi pencatatan) berupa <i>Road Intersection at Sand Blasting Shop</i> , PICK-UP/ISUZU P/MHCTBR54B7K138141/E138141/B5-557, dan <i>Replacement of Surge Comparison Tester</i> berdasarkan BA Rekonsiliasi 31-12-2024	(583.224.000)
19	Jurnal penghentian akumulasi penyusutan (koreksi pencatatan) berupa <i>Road Intersection at Sand Blasting Shop</i> , PICK-UP/ISUZU P/MHCTBR54B7K138141/E138141/B5-557, dan <i>Replacement of Surge Comparison Tester</i> berdasarkan BA Rekonsiliasi 31-12-2024	93.442.625
Total Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi		792.365.999.831

2. BA 999.08 (Belanja Lain-Lain) sebesar minus Rp15.473.936.598 berasal dari Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DKPBPB) Batam akibat kesalahan pencatatan.

3. BA 999.99 sebesar Rp24.097.104.122.331 terdapat pada DJKN dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	UAKPABUN TK BLBI	2.878.420.137.273
2.	UAKPABUN TK PKP2B	175.299.207.748
3.	UAKPABUN TK BMN <i>Idle</i>	(5.012.126.872)
4.	UAKPABUN TK KKKS PPBMN	(3.604.238.511)
5.	UAKPABUN TK KKKS SKK Migas	21.796.072.194.998
6.	UAKPABUN TK KKKS BPMA	(761.338.234.305)
7.	UAKPABUN TK KKKS Dit. PKN	17.267.182.000
Total Koreksi Aset Tetap/ Lainnya Non Revaluasi		24.097.104.122.331

- a. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK BLBI per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.878.420.137.273 berupa koreksi perubahan nilai atas
 - 1) Aset Inventaris Eks BPPN;
 - 2) Aset Properti Eks BPPN;
 - 3) Aset Properti Eks PPA;
 - 4) Aset Saham Eks BPPN; dan
 - 5) Aset Saham (non bank) Eks Kelolaan PT PPA.
- b. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK PKP2B per 31 Desember 2024 sebesar Rp175.299.207.748 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Koreksi tambah sebesar Rp512.366.764.961 terdiri atas:
 - a) Koreksi tambah dari CALK ke Neraca sebesar Rp29.376.564.811 atas BMN Tanah PT Kaltim Prima Coal kanan dan kiri sisi jalan SPRD dan sekitarnya tahun perolehan 2011-2023 karena SPPT telah terbit sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN PKP2B PT KPC Semester I Tahun Anggaran 2024 Nomor 290.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 8 Juli 2024;
 - b) Koreksi tambah sebesar Rp1.132.837 pada PT Kaltim Prima Coal atas koreksi kesalahan perhitungan proporsi nilai pembebasan tanah koridor Jalan Ruas SPRD sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN PKP2B PT KPC Semester I Tahun Anggaran 2024 Nomor 290.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 8 Juli 2024;
 - c) Koreksi tambah sebesar Rp896.089.000 karena reklasifikasi pencatatan pada PT Kideco Jaya Agung atas satu paket *Furniture* Apartemen Kemang dengan kode Aset JKT-8-143-10.06.25 pada PT Kideco Jaya Agung menjadi 29 unit BMN;
 - d) Koreksi tambah sebesar Rp38.590.753.793 karena reklasifikasi perbaikan pencatatan pada PT Berau Coal berupa tanah yang semula tercatat 544 bidang menjadi 146 persil sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN yang berasal dari PKP2B PT Berau Coal SM I TA 2024 Nomor 292.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 8 Juli 2024;
 - e) Koreksi tambah atas penambahan BMN Tanah PKP2B PT Berau Coal sebesar Rp27.525.263.810 yang diperoleh sekitar tahun 2010-2014 dan baru dilaporkan pada triwulan III 2024 sesuai Berita Acara Nomor 420.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 11 Oktober 2024;
 - f) Koreksi tambah atas penambahan BMN Tanah PKP2B PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp6.633.038.661 yang diperoleh sekitar tahun 2010 s.d. 2014 dan baru dilaporkan pada triwulan III 2024 sesuai Berita Acara Nomor 434.BA/BN.04/SDB/2024 tanggal 15 Agustus 2024;

- g) Koreksi tambah BMN Non Tanah PT KPC yang diperoleh sebelum tahun 2024 dan baru dilaporkan sesuai Berita Acara Nomor 523.BA/BN.10/SDB/2024 tanggal 3 Oktober 2024 sebesar Rp5.850.065.367;
- h) Koreksi tambah sebesar Rp67.771.812.000 merupakan reklasifikasi atas Tanah dari CALK ke Neraca sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor 386.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 25 September 2024 pada PT Kaltim Prima Coal;
- i) Koreksi tambah sebesar Rp27.702.312.000 merupakan reklasifikasi dari CALK ke Neraca atas penyusutan BMN Non Tanah sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor 481.a.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 20 November 2024 pada PT Berau Coal; dan
- j) Koreksi tambah sebesar Rp1.137.012.000 merupakan reklasifikasi dari CALK ke Neraca atas penyusutan BMN Non Tanah PT Tanito Harum sesuai Berita Acara Inventarisasi (BAI) Nomor 492.8A/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 29 November 2024.
- k) Koreksi tambah sebesar Rp9.793.682 dikarenakan koreksi perhitungan penyusutan pada PT Kendilo Coal Indonesia;
- l) Koreksi tambah karena kesalahan penggunaan akun Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada transaksi yang seharusnya diakui sebagai Koreksi Non Revaluasi, karena transaksi merupakan koreksi atas BMN yang sebelumnya sudah diakui secara *Off Balance* pada CaLK dan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp44.858.279.000.
- m) Koreksi tambah karena kesalahan penggunaan akun Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada transaksi yang seharusnya diakui sebagai Koreksi Non Revaluasi, karena transaksi merupakan koreksi atas BMN yang sebelumnya sudah diakui secara *Off Balance* pada CaLK dan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian pada PT Kideco Jaya Agung sebesar Rp260.188.477.000.
- n) Koreksi tambah karena kesalahan penggunaan akun Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada transaksi yang seharusnya diakui sebagai Koreksi Non Revaluasi karena transaksi merupakan koreksi atas BMN yang sebelumnya sudah diakui secara *Off Balance* pada CaLK dan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp930.170.000.
- o) Koreksi tambah karena kesalahan penggunaan akun Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya pada transaksi yang seharusnya diakui sebagai Koreksi Non Revaluasi karena transaksi merupakan koreksi atas BMN yang sebelumnya sudah diakui secara *Off Balance* pada CaLK dan dilakukan Inventarisasi dan Penilaian pada PT Berau Coal sebesar Rp896.001.000.
- 2) Koreksi kurang sebesar Rp337.067.557.213 terdiri atas:
 - a) Koreksi kurang sebesar Rp896.089.000 karena reklasifikasi pencatatan pada PT Kideco Jaya Agung atas satu paket *Furniture* Apartemen Kemang dengan kode Aset JKT-8-143-10.06.25 pada PT Kideco Jaya Agung menjadi 29 unit BMN;
 - b) Koreksi kurang sebesar Rp38.590.753.793 karena reklasifikasi perbaikan pencatatan pada PT Berau Coal berupa tanah yang semula tercatat 544 bidang menjadi 146 persil sesuai Berita Acara Rekonsiliasi BMN yang berasal dari PKP2B PT Berau Coal SM I TA 2024 Nomor 292.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 8 Juli 2024;
 - c) Koreksi kurang sebesar Rp739.210.000 atas reklasifikasi penyusutan dari CALK ke Neraca sesuai Surat Direktur PKKN Nomor S-155/KN.2/2024 tanggal 12 Juni 2024

hal Penyampaian Laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN PKP2B PT Arutmin Indonesia;

- d) Koreksi kurang sebesar Rp260.188.477.000 merupakan reklasifikasi atas penyusutan dari CALK ke Neraca sesuai hasil Inventarisasi dan Penilaian sebagaimana Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-100/KN.2/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Penyampaian LHIP BMN PKP2B pada PT Kideco Jaya Agung;
 - e) Koreksi kurang atas BMN PT Arutmin Indonesia yang telah dihapuskan, namun terdapat kesalahan nilai buku dan akumulasi penyusutan pada tahun 2023 sebesar Rp739.530.636;
 - f) Koreksi kurang sebesar Rp27.702.312.000 merupakan reklasifikasi dari CALK ke Neraca atas penyusutan BMN Non Tanah sesuai Berita Acara Inventarisasi Nomor 481.a.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 20 November 2024 pada PT Berau Coal;
 - g) Koreksi kurang dikarenakan kesalahan perhitungan penyusutan pada PT Arutmin Indonesia yaitu sebesar Rp2.393.752.161;
 - h) Koreksi kurang dikarenakan kesalahan perhitungan penyusutan pada PT PT Berau Coal yaitu sebesar Rp47.857;
 - i) Koreksi kurang sebesar Rp1.137.012.000 merupakan reklasifikasi dari CALK ke Neraca atas penyusutan BMN Non Tanah PT Tanito Harum sesuai Berita Acara Inventarisasi (BAI) Nomor 492.BA/BN.10/SJA.2.2/2024 tanggal 29 November 2024;
 - j) Koreksi kurang sebesar Rp265.288.752 dikarenakan koreksi perhitungan penyusutan pada PT Adaro Indonesia;
 - k) Koreksi kurang sebesar Rp3.885.556.607 dikarenakan koreksi perhitungan penyusutan pada PT Kaltim Prima Coal;
 - l) Koreksi kurang karena kesalahan penggunaan akun Beban Pelepasan Aset pada transaksi yang seharusnya diakui sebagai Koreksi Non Revaluasi, karena transaksi merupakan koreksi atas saldo awal yang sebelumnya sudah diakui secara *Off Balance* pada CaLK pada PT Kaltim Prima Coal sebesar Rp529.527.406; dan
 - m) Selisih Pembulatan sebesar Rp1.
- c. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK BMN *Idle* per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp5.012.126.872 yang terdiri dari:
- 1) Koreksi tambah sebesar Rp824.350.026 dengan rincian:
 - a) Tanah *Idle* yang diserahkan DJKN dengan nilai buku Rp654.028.000; dan
 - b) Bangunan *Idle* yang diserahkan DJKN dengan nilai buku Rp170.322.026.
 - 2) Koreksi kurang sebesar Rp5.836.476.898 dengan rincian:
 - a) Tanah *Idle* yang diterima DJKN pada tahun 2024 dengan nilai buku Rp3.638.328.000;
 - b) Bangunan *Idle* yang diterima DJKN dengan nilai buku Rp2.128.772.182; dan
 - c) Eliminasi selisih TKTM sebesar Rp69.376.716.
- d. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS PPBMN per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp3.604.238.511. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan dikarenakan hasil revaluasi. Rincian Koreksi Aset Lainnya Non Revaluasi terdiri atas:
- 1) Koreksi tambah karena penambahan akumulasi penyusutan aset HBM sebesar minus Rp3.388.629.974; dan

- 2) Koreksi tambah karena penambahan akumulasi penyusutan aset HBI sebesar minus Rp215.608.537.
- e. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS SKK Migas per 31 Desember 2024 sebesar Rp21.796.072.194.998. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset lainnya yang bukan dikarenakan hasil revaluasi. Rincian Koreksi Aset Tetap Lainnya Non Revaluasi sebagai berikut:
 - 1) Mutasi tambah sebesar Rp41.980.342.519.917 terdiri atas:
 - a) Koreksi tambah pembenahan catatan yang disebabkan ada koreksi atas saldo awal, PIS Tahun sebelumnya, *transfer in*, selisih pembulatan, koreksi tambah nilai perolehan sebesar Rp40.655.542.290.663;
 - b) Koreksi tambah atas pengembalian (*return*) Material Persediaan *Capital* sebesar Rp531.777.860.816; dan
 - c) Koreksi tambah atas pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp789.491.148.167; dan
 - d) Koreksi tambah atas penghapusan pemindahtanganan tahun lalu Rp3.531.220.271.
 - 2) Mutasi kurang sebesar Rp20.184.270.324.919 terdiri atas:
 - a) Koreksi kurang pembenahan pencatatan yang disebabkan ada koreksi atas saldo awal, *transfer out*, selisih pembulatan, koreksi kurang nilai perolehan, dan pemakaian Material Persediaan *Capital* sebesar Rp13.376.812.571.383;
 - b) Penghapusan aset untuk HBM, HBI, Material Persediaan, dan Tanah sebesar Rp283.154.829.610; dan
 - c) Koreksi tambah atas akumulasi penyusutan HBM dan HBI sebesar Rp6.524.302.923.926.
- f. Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS BPMA per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp761.338.234.305 yang terdiri dari:
 - 1) Koreksi tambah sebesar Rp43.671.995.274 dengan rincian:
 - a) Koreksi Saldo Awal - HBM Rp3.705.938.799;
 - b) Koreksi Tambah Saldo Awal – MP Rp19.796.456;
 - c) Pengadaan Aset Tanah Tahun Sebelumnya Rp19.560.019.800;
 - d) Hasil IP Tanah pada KKKS Triangle Pase Rp12.677.000;
 - e) Pengembalian *Capital* – MP Rp259.729.320;
 - f) *Transfer In* - MP pada KKKS Medco E&P Malaka Rp112.417.215;
 - g) PIS Tahun Sebelumnya – HBI Rp19.692.682;
 - h) PIS Tahun Sebelumnya – HBM Rp18.415.521.825;
 - i) Koreksi Mutasi – HBM Rp1.554.048.680;
 - j) Koreksi Perbaikan Kurs – HBM Rp12.153.496; dan
 - k) Selisih pembulatan Rp1.
 - 2) Koreksi kurang sebesar Rp805.010.229.579 dengan rincian:
 - a) Koreksi Saldo Awal MP Rp1.165.819.584;
 - b) Pemakaian *Capital* MP Rp1.776.345.056;
 - c) *Transfer Out Capital* MP dari Medco E&P Malaka ke KKKS Medco E&P Grissik Ltd, PT Medco E&P Lematang, PT Medco E&P Rimau, PT Medco E&P Tarakan dan PT Medco E&P Indonesia Rp25.945.427.179;
 - d) Koreksi saldo awal penyusutan – HBM Rp775.960.529.590;
 - e) Koreksi Penyusutan – HBI Rp151.095.553; dan

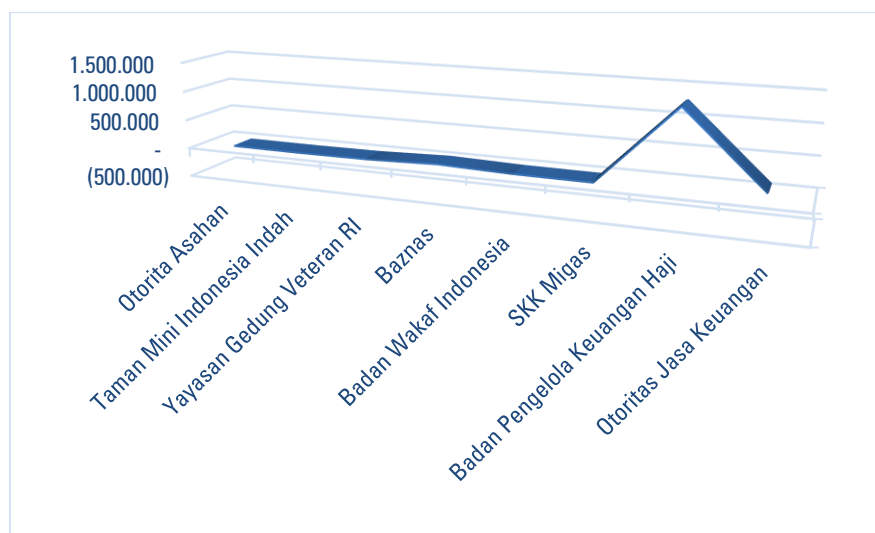
- f) Dalam Proses Penghapusan HBM Rp11.012.617.
- g) Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi pada UAKPABUN TK KKKS Dit. PKN per 31 Desember 2024 sebesar Rp17.267.182.000 yang terdiri dari:

Uraian	Jumlah
Mutasi Tambah	17.267.182.000
Hasil inventarisasi dan penilaian atas aset eks SPE Petroleum Ltd	17.267.182.000
Mutasi Kurang	-
Total Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	17.267.182.000

G.2.3.3. Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya

Mutasi Ekuitas Bersih Badan Lainnya per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp1.437.380.985.498** dan **Rp229.322.791.975** merupakan mutasi saldo Ekuitas pada neraca konsolidasian BUN yang berasal dari penambahan net aset satker Unit Badan Lainnya (UBL). Penambahan net aset satker UBL ini merupakan akumulasi dari kenaikan dan penurunan Ekuitas bersih UBL Bukan Satker tahun 2024 dengan kontra akun Aset Lainnya Pada Unit Badan Lainnya. Rincian penambahan net aset satker UBL adalah sebagai berikut:

No.	UBL	TA 2024	TA 2023
1	Otorita Asahan	-	-
2	Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah	(4.334.012.243)	-
3	Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia "Graha Purna Yudha"	2.304.949.886	4.269.425.631
4	Badan Amil Zakat	39.709.723.945	186.721.883.181
5	Badan Wakaf Indonesia	6.235.834.197	6.189.776.334
6	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	-	-
7	Badan Pengelola Keuangan Haji	1.289.991.896.203	(583.084.554.106)
8	Otoritas Jasa Keuangan	103.472.593.510	615.226.260.935
Jumlah		1.437.380.985.498	229.322.791.975



Penjelasan mutasi Ekuitas adalah sebagai berikut:

1. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otorita Asahan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Mutasi Ekuitas sebesar Rp0 merupakan nilai Aset yang telah dilikuidasi pada periode 2022 *Audited* dan telah dilakukan penyusutan. Pada periode Tahun 2024 *Audited*, proses likuidasi masih berjalan dan telah ditindaklanjuti dengan penyampaian Surat Pernyataan Kesiapan Menerima Aset eks Otorita Asahan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kepada Kementerian Keuangan berdasarkan hasil *site visit* tahap I.
2. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan Harapan Kita/Badan Pengelola dan Pengembangan Taman Mini Indonesia Indah (YHK/BPP TMII) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp4.334.012.243. Mutasi ekuitas pada YHK/BPP TMII berasal dari eliminasi ekuitas bersih akibat penyelesaian proses likudasi. Eliminasi ekuitas bersih pada YHK/BPP TMII dilakukan atas dasar penyelesaian proses likuidasi melalui penetapan KMK No. 99/KM.6/2021 dan KMK No. 27/KM.6/KNL.0702/2024 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementerian Sekretariat Negara.
3. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Yayasan Gedung Veteran Republik Indonesia “Graha Purna Yudha” (YGVRI) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.304.949.886 yang terdiri dari:
 - a. Defisit Laporan operasional YGVRI sebesar Rp945.940.165. Defisit ini berasal dari pendapatan sebesar Rp6.683.540.515 dikurangi dengan beban biaya personalia sebesar Rp1.960.138.265, beban biaya dukungan dana operasional LVRI sebesar Rp4.602.500.000, beban biaya administrasi dan umum sebesar Rp941.622.579, dan beban lain-lain sebesar Rp125.219.836;
 - b. Koreksi penambahan ekuitas sebesar Rp2.677.118 yang berasal dari perbedaan Laporan Keuangan YGVRI pada Tahun anggaran 2023 *Audited* dengan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited*. Hal tersebut dikarenakan Aset Lainnya Tahun Lalu pada Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited* dicatat berdasarkan Laporan Keuangan YGVRI Tahun 2023 *Unaudited*. Penyampaian Laporan Keuangan YGVRI Tahun 2023 *Audited* dilakukan setelah masa penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited* berakhir; dan
 - c. Koreksi pencatatan aktiva bersih awal tahun 2024 pada Laporan Keuangan Non BOT (*Build Operate Transfer*) yang belum dicatat pada periode sebelumnya sebesar Rp3.248.212.933.
4. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Amil Zakat (Baznas) per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp39.709.723.945 yang terdiri dari:
 - a. Surplus laporan operasional pada dana zakat sebesar Rp8.260.983.439;
 - b. Surplus laporan operasional dana infak sebesar Rp72.238.543.699 yang berasal dari surplus tahun 2024 sebesar Rp72.911.548.040 dikurangi koreksi saldo awal dana infak sebesar Rp673.004.341;
 - c. Surplus laporan operasional dana amil sebesar Rp7.443.208.527; dan
 - d. Koreksi penurunan ekuitas sebesar minus Rp48.233.011.720 yang berasal dari perbedaan Laporan Keuangan Baznas pada Tahun anggaran 2023 *Audited* dengan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited*. Hal tersebut dikarenakan Aset Lainnya Tahun Lalu pada Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited* dicatat

berdasarkan Laporan Keuangan Baznas Tahun 2023 *Unaudited*. Penyampaian Laporan Keuangan Baznas Tahun 2023 *Audited* dilakukan setelah masa penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited* berakhir.

5. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.235.834.197 terdiri dari:
 - a. Surplus dana pengelolaan APBN sebesar Rp50.613;
 - b. Surplus dana pengelolaan non APBN sebesar Rp651.436.036;
 - c. Defisit dana pengelolaan non kas sebesar minus Rp100.917.050;
 - d. Defisit dana pengelolaan wakaf sebesar Rp3.281.316.295;
 - e. Surplus dana pengelolaan operasional sebesar Rp2.405.318.501; dan
 - f. Koreksi pengurangan ekuitas Tahun 2023 *audited* sebesar minus Rp1.370.198.

Mutasi Ekuitas yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0. Mutasi Ekuitas sebesar Rp0 merupakan penurunan Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Penjelasan	Jumlah
I. Surplus/(Defisit) Kinerja Bersih	(1.568.317.378.795)
II. Koreksi Ekuitas Tahun Lalu (a - b +c)	1.540.529.729.610
a. Ditambah Mutasi Imbalan pasca kerja SKK Migas terdiri dari selisih imbalan pasca kerja TA 2024 dikurangi imbalan pasca kerja TA 2023	1.652.256.265.477
b. Dikurang Mutasi Ekuitas SKK Migas satker 999.08	111.726.535.867
c. Ditambah Penyesuaian LK 2023 <i>Audited</i> LKBL dengan SKK Migas	-
III. Mutasi Penyesuaian Penyajian Ekuitas Negatif	(27.787.649.185)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas setelah penyesuaian (I + II - III)	-

6. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.289.991.896.203. Mutasi Ekuitas Laporan Keuangan BPKH terdiri dari:
 - a. Surplus/(defisit) sebesar Rp1.290.569.331.839;
 - b. Koreksi aset Neto senilai minus Rp577.435.638; dan
 - c. koreksi penambahan Ekuitas sebesar Rp2 yang berasal dari perbedaan Laporan Keuangan BPKH pada Tahun anggaran 2023 *Audited* dengan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited* Revisi. Hal tersebut dikarenakan Aset Lainnya Tahun Lalu pada BPKH dicatat berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2023 *Audited* namun masih dalam tahap pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Penyampaian Laporan Keuangan BPKH Tahun 2023 *Audited* Revisi dilakukan setelah masa penyusunan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2023 *Audited* berakhir.
7. Mutasi Ekuitas yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp103.472.593.510. Mutasi ekuitas merupakan kenaikan Ekuitas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan setelah penyesuaian. Mutasi Ekuitas sebesar minus Rp102.534.103 merupakan perubahan Ekuitas dari OJK sebagai satker BA 999.08. Dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
a. Mutasi Ekuitas OJK Bukan Satker	103.370.059.407
b. Mutasi Ekuitas OJK Satker 999.08	(102.534.103)
c. Penyesuaian Saldo Audited	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas setelah penyesuaian (a-b+c)	103.472.593.510

G.2.3.4. Koreksi SAL

Koreksi SAL sampai dengan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.074.667.959.503 dan Rp1.498.554.940.209. Koreksi SAL merupakan mutasi transaksi atas akun SILPA 311211 yang merupakan jurnal penyesuaian SILPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016 dan transaksi pada akun koreksi 311212 yang merupakan transaksi pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi transaksi pada akun SILPA (311211) merupakan jurnal penyesuaian SILPA selisih kurs atas rekening milik BUN pada Direktorat PKN dan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan Perdirjen Nomor 19 Tahun 2016;
2. Mutasi transaksi pada akun Koreksi pendapatan tahun anggaran yang lalu (311212) merupakan transaksi pembayaran pengembalian pendapatan negara tahun anggaran yang lalu menggunakan beban SAL, yang ditatausahakan oleh Satker Transaksi Khusus Pengembalian Penerimaan Negara atas Beban SAL (999254) pada Direktorat Sistem Perbendaharaan.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi 2024	Jumlah Mutasi 2023
311211	SILPA	2.128.035.811.698	1.603.949.124.314
311212	Koreksi Pendapatan Tahun Anggaran Yang lalu	(53.367.852.195)	(105.394.184.105)
Jumlah		2.074.667.959.503	1.498.554.940.209

G.2.3.5. Lain-lain

Pos Lain-lain sampai dengan per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah Rp69.599.521.111.279 dan Rp37.762.853.060.389. Nilai Lain-lain sebesar Rp69.599.521.111.279 merupakan nilai koreksi lain-lain sebesar Rp70.958.926.411.591 ditambah eliminasi sebesar minus Rp1.359.405.300.312. Rincian nilai pos lain-lain adalah sebagai berikut:

Unit		31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kode	Uraian		
999.00	Akuntansi Pusat	(54.918.509.819.096)	(34.645.896.571.039)
999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(4.421.635.392.466)	(348.433.807.838)
999.02	BA BUN Hibah	2.628.551.786.158	1.262.041.438.199
999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	69.519.904.203.683	31.588.223.378.734
999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	(9.799.919.288)	(147.939.140.574)
999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	361.495.176.677	8.702.029.740.761
999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(10.521.889.415.919)	(3.592.823.821.542)
999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	12.143.316.695.349	(515.642.586.752)
999.99	BA BUN Transaksi Khusus	56.177.493.096.493	31.224.446.851.326
Jumlah		70.958.926.411.591	33.526.005.481.275
Penyesuaian*		(1.359.405.300.312)	4.236.847.579.114
Lain-lain setelah penyesuaian		69.599.521.111.279	37.762.853.060.389

*) Penyesuaian merupakan eliminasi atas transaksi yang sama yang disajikan pada dua BA BUN yang berbeda

Eliminasi pada pos Koreksi Lain-lain tahun 2024 yang berasal dari mutasi dana sebesar minus Rp1.359.405.300.312 dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi pemindahbukuan PNBPN panas bumi dimana sebelumnya sudah diakui sebagai beban diestimasi setoran kepada pemerintah sebesar minus Rp381.732.009.962;
2. Mutasi dana sebesar Rp7.036.071.650 yang merupakan penyesuaian atas dana di Rekening Penampungan-K/L dana pada Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada BUN BA 999.08;
3. Mutasi dana sebesar minus Rp25.723.362.000 yang merupakan penyesuaian atas dana di Rekening Penampungan-K/L dana pada Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) pada BUN BA 999.99; dan
4. Mutasi sebesar minus Rp958.986.000.000 merupakan eliminasi Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Neraca Tingkat Kuasa BUN Pusat (BA 999.00) untuk menampung dana cadangan penjaminan yang telah disajikan sebagai cadangan penjaminan.

Pos Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas pada prinsipnya berasal dari koreksi dan/atau penyesuaian yang menggunakan akun Ekuitas, koreksi nilai Utang pihak ketiga, reklasifikasi Utang diestimasi, pemotongan atas lebih salur-Piutang PNBPN, dan reklasifikasi Piutang Lain-Lain.

1. Lain-Lain pada BA 999.00

Lain-Lain sebesar **minus Rp54.918.509.819.096** pada BA 999.00 merupakan mutasi transaksi atas akun penggunaan SAL 311112 dan akun ekuitas 391111 pada *ledger* akrual.

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
311112	Penggunaan SAL	(56.381.000.000.000)
391111	Ekuitas	1.462.490.180.904
Jumlah		(54.918.509.819.096)

2. Lain-Lain pada BA 999.01

Lain-Lain sebesar **minus Rp4.421.635.392.466** pada BA 999.01 adalah Koreksi Lain-lain LPE yang merupakan penyesuaian atas nilai utang pinjaman dikarenakan adanya penyesuaian utang yang masih harus dibayar dan penyesuaian pinjaman luar negeri yang mempengaruhi ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Komponen Penyesuaian Ekuitas	Nominal
Utang Pinjaman Luarn Negeri Proyek	158.678.774.784
Utang Pinjaman Luarn Negeri Program	(4.580.314.167.019)
Penyesuaian <i>Mock</i> SBSN Valas	(231)
Total Penyesuaian	(4.421.635.392.466)

3. Lain-Lain pada BA 999.02

Lain-Lain sebesar **Rp2.628.551.786.158** pada BA 999.02 merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan-kesalahan mendasar lain-lain berasal dari Satker 977263 (Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen) sebesar Rp2.628.551.786.158 yang merupakan pengesahan hibah Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).

4. Lain-Lain pada BA 999.03

Lain-Lain sebesar **Rp69.519.904.203.683** pada BA 999.03 merupakan koreksi akibat adanya transaksi yang di jurnal langsung kepada ekuitas. Berikut adalah rincian mutasi lain-lain berdasarkan UAKPA dibawah UAPBUN BA 999.03:

No	Nama UAKPA	Nilai
1	KPA Dit PNPB DJA	97.264.570.618.578
2	BLU LPDB KUMKM	1.791.139.472
3	KPA BLU LMAN	16.490.192.956
4	KPA Kementerian BUMN	(34.340.930.319.709)
5	KPA DJKN	(12.447.320.366.079)
6	KPA Dit SMI	(1.731.723.215.099)
7	UAIP	19.945.769.590.821
8	KPA Badan Bank Tanah	809.800.009.715
9	KPA BLU BPD LH	459.357.063
10	KPA BLU LDKPI	65.322.148
11	KPA Set BPJT	1
12	KPA Modal Awal BP Tapera	931.873.817
Jumlah		69.519.904.203.684 *

*selisih Rp1 karena pembulatan

Adapun penjelasan lebih lanjut atas rincian mutasi lain-lain masing masing KPA adalah sebagai berikut:

a. Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNPB DJA

Mutasi lain-lain pada KPA Dit PNPB DJA pada Tahun 2024 Audited sebesar Rp97.264.570.618.578 yang berasal dari:

- 1) Penambahan ekuitas atas pengakuan piutang bukan pajak dari Bagian Pemerintah dari pembagian dividen secara tunai TB 2023 dengan pencatatan Metode Ekuitas saat pengumuman pembagian dividen tunai sesuai dengan RUPS sebesar Rp86.374.947.551.677;
- 2) Penambahan ekuitas akibat penghapusan penyisihan piutang tidak tertagih atas pembayaran piutang sebelum TB 2023 sebesar Rp7.141.188.641 yang berasal dari PT Inhutani V (TB 1999) sebesar Rp692.788.265 dan PT Perkebunan Nusantara II (TB 1999) sebesar Rp6.448.400.376; dan
- 3) Penambahan ekuitas atas pengakuan piutang bukan pajak dari Bagian Pemerintah dari pembagian dividen interim TB 2024 dengan pencatatan Metode Ekuitas saat pengumuman pembagian dividen interim sebesar Rp10.882.481.878.260.

b. Mutasi Lain-lain KPA BLU LPDB KUMKM

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LPDB KUMKM sebesar Rp1.791.139.472 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain	Jumlah
Mutasi Tambah	
(+) Pengalihan dari Program Kementerian sd 31 Desember 2024	7.063.266.623
(+) Koreksi Pencatatan atas Lebih Bayar Piutang Dana Bergulir	379.661
(+) koreksi beban penyesuaian nilai investasi LO lainnya pada PSBDT (Amanah)	909.091

Rincian Koreksi Lain-lain	Jumlah
Mutasi Kurang	
(-) Mutasi NRB Semester II tahun 2024	(5.246.160.574)
(-) Koreksi pencatatan pembayaran pokok mitra	(27.255.330)
Koreksi Lain-lain	1.791.139.471*

*Selisih Rp1 karena pembulatan

1) Mutasi tambah terdiri dari:

- Pengalihan dari Program Kementerian Desember 2024 sebesar Rp7.063.266.623. Nilai tersebut merupakan pembayaran tunai dari koperasi kepada LPDB-KUMKM yang mendapatkan program dana bergulir Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2000 s.d. 2007;
- Nilai sebesar Rp379.661 merupakan nilai koreksi atas pencatatan lebih bayar pada piutang dana bergulir; dan
- Adanya koreksi hasil reviu laporan keuangan oleh Inspektorat Kementerian Koperasi yaitu penyesuaian dihapusbukukan beban penyesuaian investasi LO lainnya atas nama koperasi Amanah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp909.091.

2) Mutasi kurang terdiri dari:

- Mutasi NRB tahun 2024 sebesar minus Rp5.246.160.574 yang berasal dari Kementerian Koperasi dan UKM dan telah dicatat LPDB-KUMKM pada akun dana bergulir sesuai dengan Surat Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Nomor B-145/SM.UMKM/KU.02.00/2025 tanggal 24 Januari 2025; dan
- Koreksi atas pencatatan pembayaran pokok mitra pada tahun 2024 sebesar minus Rp27.255.330.

c. **Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN**

Mutasi lain-lain pada KPA BLU LMAN sebesar Rp16.490.192.956 merupakan koreksi yang menambah ekuitas, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Koreksi Lain-lain	Jumlah
Retur dana jangka panjang yang mengatribusi pengesahan belanja modal sebelum tahun 2024	6.954.266.151
Selisih tambah dari penilaian wajar Properti Investasi eks BPPN (2 aset di Yogyakarta dan 1 aset di Surabaya)	9.535.926.805
Koreksi Lain-lain	16.490.192.956

d. **Mutasi lain-lain pada KPA Kementerian BUMN**

Mutasi Lain pada KPA Kementerian BUMN pada Tahun 2024 *Audited* adalah sebesar minus Rp34.340.930.319.709 yang terdiri dari mutasi lain-lain pada ILKPN dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Nilai
1	Perusahaan Umum (Perum)	777.507.226.955
2	Perseroan (Persero)	(35.068.443.547.164)
3	Minoritas/Non BUMN	(49.993.999.500)
Jumlah		(34.340.930.319.709)

Selanjutnya Rincian mutasi dari masing masing BUMN Persero, Perum dan Minoritas dapat dirinci sebagai berikut:

1) Perusahaan Umum (Perum)

Rincian mutasi lain-lain sebesar Rp777.507.226.955 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Rp
1	OCI Reval	-
2	OCI Non Reval	367.178.206.678
3	Dividen	(59.386.414.936)
4	Mutasi BPYBDS	
5	PKBL	
6	Selisih dijelaskan terdiri dari	
	a. Selisih karena <i>Treasury Stock</i> /ESOP	
	b. Selisih saldo awal	(10.252.100.689)
	c. Selisih <i>Restatement</i>	(325.715.393.593)
	c. Selisih Pencatatan Dividen	
	d. Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	892.009.996.472
	f. Selisih kurs penjabaran Lap Keuangan	
	g. Penihilan Ekuitas Negatif	-
	h. Selisih karena Komponen LPE Lain	(86.327.066.977)
	i. Selisih karena pembulatan excel	
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i)	469.715.435.213
7	Saldo Akhir (1+2+3+4+5+6)	777.507.226.955

Penjelasan terkait Selisih Pencatatan Tambahan Modal Disetor diakibatkan adanya PMPP kepada Badan Usaha Milik Negara di luar DIPA Kementerian BUMN yaitu Perum LPPNPI/Airnav sebesar Rp892.009.996.472. Selanjutnya, penjelasan terkait Selisih *Restatement* diakibatkan karena Perum Damri menyajikan kembali laporan posisi keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Sehubungan dengan perubahan kebijakan akuntansi terkait aset tetap, dengan besaran penyesuaian pada ekuitas tahun 2023 sebesar Rp325.715.393.593.

2) Perseroan (Persero)

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp35.068.443.547.164 dengan rincian sebagai berikut:

a) Mutasi yang berasal dari ILKPN sebesar minus Rp35.717.673.441.065

No	Uraian	Jumlah Rp
1	OCI Reval	990.122.313.944
2	OCI Non Reval	32.368.455.887.342
3	Dividen	(85.502.805.811.641)
4	Mutasi BPYBDS	-
5	PKBL	
6	Selisih dijelaskan terdiri dari:	
	a. Selisih karena <i>Treasury Stock</i> /(ESOP)	(5.815.751.400)
	b. Selisih saldo awal	(4.165.091.038.961)
	c. Selisih <i>Restatement</i>	(1.962.507.000.000)
	d. Selisih Pencatatan Dividen	(3.911.469.229.791)
	e. Selisih Pencatatan tambahan modal disetor	(468.673.301.100)
	f. Selisih Kurs Penjabaran Lap Keuangan	28.528.576.501.271
	g. Penihilan Ekuitas Negatif	(134.582.350.405)
	h. Selisih karena Komponen LPE Lain	(1.453.883.660.322)
	i. Selisih karena pembulatan excel	-
	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j)	16.426.554.169.291
7	Saldo akhir (1+2+3+4+5+6)	(35.717.673.441.064)

*Selisih Rp1 karena pembulatan

Penjelasan terkait Selisih Pencatatan Tambahan Modal Disetor diakibatkan salah satunya karena adanya PMPP kepada Badan Usaha Milik Negara diluar DIPA Kementerian Badan Usaha Milik Negara yaitu PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebesar Rp388.564.810.000,00. Selanjutnya, penjelasan terkait Selisih *Restatement* diakibatkan karena PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 1 Januari 2023/31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sehubungan dengan kombinasi bisnis entitas sepengendali dari transaksi pengambilalihan saham HIPRO oleh HIN (entitas anak) dari Wika Realty.

b) Mutasi selain dari mutasi lain-lain ILKPN sebesar Rp649.229.893.901

Mutasi ini merupakan nilai PMN kepada PT LEN Industri yang telah diakui realisasinya di tahun 2024 namun belum dicatat sebagai penambah ekuitas PT LEN Industri laporan keuangan ini masih berstatus *unaudited*.

3) Minoritas

Rincian mutasi lain-lain sebesar minus Rp49.993.999.500 berasal dari penyertaan modal negara PT Istaka Karya yang saat ini dalam proses likuidasi. Selain itu terdapat pula aksi korporasi pada perusahaan negara sebagai berikut:

- Proses merger antara PT Angkasa Pura I/"AP I" dan PT Angkasa Pura II/"AP II" menjadi PT Angkasa Pura Indonesia;
- Penerimaan hibah saham Seri A dari PIHC kepada Pemerintah pada PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang.
- Penerimaan hibah saham Seri A dari Perum Perhutani kepada Pemerintah pada PT Inhutani I dan PT Inhutani V.

e. Mutasi Lain-lain pada KPA DJKN

Mutasi Lain pada KPA DJKN periode Tahun 2024 *Audited* sebesar minus Rp12.447.320.366.079 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai (Rp)
1.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMI (Persero):	
	a. Dividen	(520.000.000.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(160.391.988.176)
	c. Selisih karena komponen LPE lain	(1)
	Total	(680.391.988.177)
2.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT PII (Persero):	
	a. Dividen	(167.165.000.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(53.941.163.000)
	Total	(221.106.163.000)
3.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT SMF (Persero)	
	a. Dividen	(97.780.000.000)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(4.236.000.000)
	Total	(102.016.000.000)
4.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT GDE (Persero)	
	a. Dividen	(20.663.325.100)
	b. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	3.805.148.045
	Total	(16.858.177.055)
5.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada PT TPI	
	a. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	181.656.962.153
	Total	181.656.962.153

No	Keterangan	Nilai (Rp)
6.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPEI: a. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(1.362.000.000)
	Total	(1.362.000.000)
7.	Bagian Ekuitas non laba bersih pada LPI: a. Pendapatan/Beban komprehensif lainnya	(11.607.243.000.000)
	Total	(11.607.242.000.000)
	Total	(12.447.320.366.079)

f. Mutasi Lain-lain pada KPA Dit. SMI

Mutasi Lain pada KPA Dit SMI DJPb periode Tahun 2024 Audited adalah sebesar minus Rp1.731.723.215.099 yang berasal dari transaksi pada KPA Dit. SMI yang langsung berpengaruh terhadap ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Koreksi penghapusan Beban selisih kurs Tahun 2023 BLU LPDP	5.780.366.588
2	Koreksi Translasi Amortisasi Diskon Tahun 2023 BLU LPDP	1.386.144
3	Koreksi belanja kerugian selisih Kurs 2024 BLU LPDP	109.808.928.110
4	Realokasi Amortisasi Premium LPDP Tahun 2024	(119.834.824.216)
5	Koreksi saldo awal selisih kurs BLU LPDP	32.401
6	Koreksi pembulatan pada LPDP	(232)
7	Koreksi belanja penyesuaian nilai investasi BPD LH	10.025.896.106
8	Penyesuaian nilai pendapatan imbal hasil optimalisasi dana cadangan penjaminan setelah dilakukan pendetilan SPAN	(25.090.183.918)
9	Imbal hasil pengelolaan Dana Cadangan Pinjaman Pemerintah TA 2024 yang dikelola oleh LDKPI setelah dikurangi Jasa Pengelolaan	25.090.183.918
10	Realokasi BPD PKS	(1.237.505.000.000)
11	Penyaluran Dana Investasi Pemerintah untuk Optimalisasi Dana Cadangan Pinjaman pada LDKPI (RIBUN ke OIP)	(500.000.000.000)
	Jumlah	(1.731.723.215.099)

g. Mutasi Lain-lain pada KPA UAIP

Mutasi Lain pada UAIP periode Tahun 2024 Audited adalah sebesar Rp19.945.769.590.821. Mutasi lain-lain terdiri dari Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN entitas dan Koreksi saldo awal PTNBH. Rincian mutasi lain-lain satker UAIP adalah sebagai berikut:

No	Uraian Mutasi	Nilai
a.	Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya berdasarkan ILKPN Entitas	20.494.452.677.634
b.	Koreksi Ekuitas:	
	Koreksi saldo awal	(357.692.802.158)
	Koreksi ekuitas lainnya	(193.963.581.004)
c.	Hibah	2.973.296.349
	Jumlah	19.945.769.590.821

1) Mutasi dari Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lainnya

Secara keseluruhan, nilai mutasi lain-lain yang berasal dari pendapatan/(beban) komprehensif lainnya yang tercatat pada Laporan Keuangan UAIP pada Periode Tahun 2024 Audited adalah Rp20.494.452.677.634 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Mutasi	Nilai (Rp)
LPS	12.152.314.000
Bank Indonesia	20.643.077.337.791
Institut Pertanian Bogor *	(123.200.985)
Universitas Airlangga	(856.491.270)
Institut Teknologi Bandung	(7.222.473.252)
Universitas Indonesia	(1.801.771.480)
Universitas Gadjah Mada	(2.877.166.147)
Universitas Pendidikan Indonesia	6.595.000
Universitas Sumatera Utara	2.322.083.832
Universitas Padjajaran	(3.767.926.712)
Universitas Diponegoro	1.880.179.945
Institut Teknologi Sepuluh November	13.877.163
Universitas Brawijaya	(202.942.299)
Universitas Negeri Surabaya *	(96.959.776)
BPJS Kesehatan	37.655.580.924
BPJS Ketenagakerjaan **	(185.706.359.100)
Total	20.494.452.677.634

*) menggunakan angka LK Tahun 2024 *Unaudited*

**) menggunakan angka LK Tahun 2024 *Draft Audited*

2) Mutasi dari koreksi Ekuitas

a) Mutasi dari koreksi awal sebagai berikut:

Koreksi Saldo Awal sebesar minus Rp357.692.802.158 berasal dari 15 PTNBH dengan rincian sebagai berikut

No.	Uraian	Saldo Awal LK UAIP (A)	Saldo Awal Seharusnya (B)
1	Bank Indonesia	401.109.298.000.000	401.109.297.864.439
2	Institut Pertanian Bogor *	2.910.480.548.431	2.888.172.956.055
3	Universitas Pendidikan Indonesia	1.142.149.933.752	1.141.479.724.980
4	Universitas Sumatera Utara	1.898.360.166.969	1.898.360.166.970
5	Universitas Padjajaran	1.346.990.132.121	1.346.990.132.122
6	Universitas Diponegoro*	4.086.012.209.150	4.122.244.646.218
7	Universitas Hassanudin	2.492.172.787.826	2.491.504.100.355
8	Institut Teknologi Sepuluh Nopember**	1.879.170.650.603	1.881.574.578.249
9	Universitas Negeri Sebelas Maret	1.706.907.381.088	1.662.853.442.681
10	Universitas Andalas*	1.278.810.808.160	1.454.766.175.940
11	Universitas Negeri Padang*	1.358.228.340.297	1.327.303.673.180
12	Universitas Syiah Kuala	1.528.961.186.361	1.531.465.412.745
13	Universitas Terbuka	3.675.028.228.668	3.259.580.307.012
14	Universitas Negeri Yogyakarta*	1.452.469.064.422	1.421.673.042.153
15	Universitas Negeri Semarang*	1.868.130.629.320	1.838.211.041.908
Total		429.733.170.067.168	429.375.477.265.007
Total Koreksi (B-A)		(357.692.802.161) *** Overstated	

*) berdasarkan LK PTNBH Triwulan III 2024

**) berdasarkan LK PTNBH 2023 *Audited*

***) selisih Rp3 karena pembulatan

Koreksi dilakukan sebagai dampak adanya pembaharuan data laporan keuangan pada PTNBH di atas.

b) Mutasi dari koreksi ekuitas lainnya

Secara keseluruhan, koreksi ekuitas lainnya sebesar minus Rp193.963.581.004 yang tercatat pada Laporan Keuangan UAIP Periode Tahun 2024 Audited adalah sebagai berikut:

Uraian	Nilai Koreksi Ekuitas
Universitas Padjajaran	(359.573.570)
Universitas Andalas*	(178.098.050.425)
Universitas Negeri Padang*	(4.223.459.935)
Universitas Terbuka	(17.132.863.721)
Universitas Syiah Kuala	722.639.393
Universitas Negeri Yogyakarta	5.127.727.254
Total Koreksi Ekuitas	(193.963.581.004)

*) berdasarkan LK Tahun 2024 Unaudited

3) Hibah

Pada tahun 2024, terdapat hibah yang diterima Universitas Negeri Padang senilai Rp2.973.296.349. Hibah tersebut berupa Peralatan dan Mesin (*Mobiler Sekolah Vokasi* serta Peralatan lainnya dalam rangka Program Pendidikan Profesi Guru dan Program Kompetisi Kampus Merdeka).

h. Mutasi lain-lain pada KPA Badan Bank Tanah

Mutasi Lain pada KPA Badan Bank Tanah periode Tahun 2024 Audited sebesar Rp809.800.009.715 merupakan dampak kumulatif perubahan kebijakan dalam pos lain-lain. Nilai tersebut merupakan nilai koreksi ekuitas pada periode 2024.

i. Mutasi lain-lain pada KPA BLU BPD LH

Mutasi Lain pada KPA BLU BPD LH sebesar Rp459.357.063 berasal dari pengembalian dari debitor selama tahun 2024 yang diakui sebagai pokok.

j. Mutasi lain-lain pada KPA BLU LDKPI

Mutasi Lain pada KPA BLU LDKPI sebesar Rp65.322.148. Nilai tersebut merupakan Koreksi SAL dikarenakan adanya reklasifikasi pencatatan dari investasi jangka pendek menjadi investasi jangka panjang. Reklasifikasi tersebut dilakukan atas temuan pemeriksaan BPK RI yang disampaikan melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kementerian Keuangan Tahun 2023 Nomor 33.a/LHP/XV/05/2024. LHP tersebut menyatakan bahwa saldo investasi jangka panjang BLU LDKPI tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Koreksi tersebut sesuai dengan nota dinas Direktur APK nomor ND-727/PB.2024 tanggal 23 Agustus 2024 hal Penyampaian Kebijakan Pencatatan dan Penyajian Investasi SBN pada LDKPI.

k. Mutasi lain-lain pada KPA Modal Awal BP Tapera

Mutasi Lain pada KPA Modal Awal BP Tapera sebesar Rp931.873.817 yang merupakan penghasilan komprehensif lain yang diakui sebagai penambah ekuitas BP Tapera.

5. Lain-Lain pada BA 999.04

Lain-Lain pada BA 999.04 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar minus minus Rp9.799.919.288. Hal tersebut terjadi karena adanya pengembalian atau *refund* sisa

uang muka kegiatan *engineering services* PLTU Indramayu yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) langsung kepada *lender* JICA nomor LA IP-561 sehingga sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2017 tentang Perlakuan Akuntansi terkait Pencatatan Akuntansi terkait Pencatatan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri perlu dilakukan pencatatan pengurangan saldo piutang penerusan pinjaman luar negeri.

No	Debitur	No. SLA	Nilai Valas	Tanggal Valuta	Nilai Rupiah
1	PT. PLN	SLA-1252/DSMI/2013	JPY 92.985.772	12 Januari 2024	Rp9.799.919.288
Total			JPY 92.985.772		Rp9.799.919.288

6. Lain-Lain pada BA 999.05

Lain-Lain pada BA 999.05 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp361.495.176.677 yang terdiri dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi (DKPKA/Lain-lain) pada LPE LK UAKKPA BUN Tahun 2024 *Audited* sebesar Rp357.051.233.975, koreksi saldo utang remunerasi TDF-TKD tahun 2023 sebesar Rp3.701.452.702, dan koreksi atas kurangnya pengakuan utang pokok TDF-TKD tahun 2024 sebesar Rp742.490.000. Rincian koreksi lain-lain pada BA 999.05 adalah sebagai berikut:

- a. Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi pada LKBUN 999.05 TA 2024 antara lain:
 - 1) Nilai dampak kumulatif kebijakan akuntansi (koreksi lainnya) berdasarkan LKTD *unaudited* 2024 sebesar Rp2.523.849.498.408;
 - 2) Penyesuaian (pengakuan) piutang atas kurang salur DAK Non Fisik TA 2024 yang belum diakui pada TA 2023 sebesar Rp844.315.767.538;
 - 3) Penyesuaian (penyelesaian) utang DAK Non Fisik (TPG, TKG, Tamsil ASND) atas kurang salur DAK NF TA 2024 sebesar Rp166.483.090.592;
 - 4) Penyelesaian atas lebih salur DAK Non Fisik (TPG, TKG, Tamsil) berdasarkan data perhitungan alokasi per April 2025 sebesar minus Rp1.098.360.310.984;
 - 5) Penyesuaian (pengakuan) utang Tamsil, TPG, dan TKG ASND atas kurang salur DAK NF TA 2024 sebesar minus Rp182.155.325.370;
 - 6) Pengakuan utang pihak ketiga remunerasi TDF-TKD di bulan Desember 2024 sebesar minus Rp6.161.848.657;
 - 7) Penyesuaian kembali atas saldo awal piutang DAK Non Fisik TA 2024 sebesar minus Rp1.890.177.147.552; dan
 - 8) Penyesuaian pengakuan pokok TDF akhir tahun 2024 karena terdapat kesalahan kode satker sebesar minus Rp742.490.000.
- b. Koreksi yang dilakukan untuk menormalisasi saldo utang remunerasi TDF-TKD tahun 2023 sebagai dampak dari jurnal transaksi penerimaan kas terkait TDF di SPAN pada TA 2024 sebesar Rp3.701.452.702; dan
- c. koreksi atas kurangnya pengakuan utang pokok TDF-TKD pada akhir tahun 2024 dikarenakan terdapat kesalahan pencatatan kode satker (984572 seharusnya 999204) sebesar Rp742.490.000.

7. Lain-Lain pada BA 999.07

Lain-Lain pada BA 999.07 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar minus Rp10.521.889.415.919. Koreksi Lain-Lain tersebut terdapat pada 4 (empat) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu sebagai berikut:

No	Kementerian/Lembaga	Jumlah
1	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	405.355.323
2	KUKM	(9.941.860.415.162)
3	Perdagangan	(274.470.809)
4	Keuangan	(580.159.885.270)
Total		(10.521.889.415.918)*

*) selisih Rp1 karena pembulatan

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jumlah Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2024 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp405.355.323 adalah sebagai berikut:

1) Ditjen Cipta Karya

Koreksi Lainnya sebesar Rp241.355.323 terdapat pada Ditjen Cipta Karya yang merupakan selisih antara utang subsidi estimasi bulan September - Desember 2023 dikurangi dengan nilai real pencairan SP2D di bulan April 2024.

2) Ditjen Pembiayaan Infrastruktur

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024, terdapat Koreksi Lainnya sebesar Rp164.000.000.

b. Kementerian Koperasi dan UKM

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024, Koreksi lain-lain disajikan menjadi sebesar minus Rp9.941.860.415.162. Koreksi ini merupakan pembayaran subsidi bunga/subsidi marjin KUR yang sebelumnya tidak dicatat sebagai utang subsidi tahun 2023 dikarenakan belum selesainya penagihan dari penyalur serta Koreksi Lainnya yang seharusnya dilakukan pada laporan Keuangan TA 2023 (*Audited*) yang mempengaruhi Laporan Keuangan Tahun 2024.

c. Kementerian Perdagangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024, Koreksi lain-lain disajikan menjadi sebesar minus Rp274.470.809.

d. Kementerian Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK Tahun 2024, Koreksi lain-lain disajikan menjadi sebesar minus Rp580.159.885.270. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi atas nilai ekuitas yang disebabkan oleh selain koreksi nilai persediaan, Revaluasi Aset Tetap dan Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi.

8. Lain-Lain pada BA 999.08

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.143.316.695.349. Rincian atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

- Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja sebesar minus Rp2.859.253.692 yang merupakan transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar;
- Satker Dana Kompensasi sebesar Rp18.741.985.579 yang merupakan kelebihan atas pembayaran kompensasi atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023. Sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-234/MK.02/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Kebijakan Pemerintah atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023 sebesar Rp17.835.197.231.014. Akan tetapi, hasil audit BPK RI atas Kekurangan Penerimaan PT PLN (Persero) akibat

- Penetapan Tarif Tenaga Listrik Tahun 2023 adalah sebesar Rp17.816.455.245.435 sehingga terdapat kelebihan bayar kompensasi listrik periode tahun 2023 sebesar Rp18.741.985.579;
- c. Satker DKPBPB Batam sebesar Rp379.952.960. Koreksi atas Reklasifikasi tersebut merupakan Koreksi Pencatatan;
 - d. Satker Ditjen PPI Kominfo sebesar Rp45.489.439, Koreksi Lain-Lain berupa koreksi atas kesalahan pencatatan atas pelunasan piutang lainnya tahun 2023 yang sebelumnya telah diperhitungkan penyisihannya pada laporan keuangan tahun 2023;
 - e. Satker SKK Migas sebesar Rp314.026.826 berupa koreksi piutang *medical* tahun 2023 dan penghapusan penyisihan piutang tak tertagih karena pelunasan piutang.
 - f. Satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan sebesar Rp12.133.730.565.887, koreksi atas pengalihan hutang kepada Satker Badan Pangan Nasional yang merupakan kewajiban jangka pendek utang kepada pihak ketiga dalam rangka pelaksanaan likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada BA BUN satker Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan BAST Nomor:14/KU.01.01/B.3/08/2024; dan
 - g. Koreksi sebesar minus Rp7.036.071.650 merupakan koreksi utang yang belum diterima tagihannya pada transaksi RPATA dengan rincian:
 - 1) Kementerian Keuangan sebesar minus Rp20.180.320.034;
 - 2) MPP Kartu Prakerja sebesar minus Rp3.220.809.137;
 - 3) SKK Migas sebesar Rp15.244.188.771; dan
 - 4) BP Batam sebesar Rp1.120.868.750.

9. Lain-Lain pada BA 999.99

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJPb, UAPBUN TK DJKN, UAPBUN TK DJA dan UAPBUN TK BKF. Jumlah Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp56.177.493.096.493 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	UAPBUN TK DJPb	51.274.375.592.196
2	UAPBUN TK DJKN	2.049.469.265.196
3	UAPBUN TK DJA	2.853.648.239.101
Total		56.177.493.096.493

a. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJPB

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJPb untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp51.274.375.592.196 berasal dari:

No	Uraian	Jumlah
1	UAKPABUN TK PENSIUN	(5.170.963.634.804)
2	UAKPABUN TK PNPB BUN	25.723.362.000
3	UAKPABUN TK KPPN JAK II	38.615.865.000
4	UAKPABUN TK PKN	56.381.000.000.000
Total		51.274.375.592.196

- 1) Adanya perubahan terhadap ekuitas yang diakibatkan oleh Penjurnalan Piutang Tak Tertagih TA 2023 sebesar Rp667.995.571, piutang rampung IJP tahun 2022 sebesar minus Rp144.000, dan penambahan pengakuan Utang Jangka Panjang (UPSL) PT Asabri sebesar minus Rp5.171.631.486.375 dari Satker Pengelola Dana Pensiun, Asuransi Kesehatan dan Program Tunjangan Hari Tua;
- 2) Adanya utang kepada pihak ketiga atas sisa perjanjian kerja pengembangan SPAN *Next Generation* yang diselesaikan melalui Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) sebesar Rp25.723.362.000 pada satuan kerja 999257 PPP BUN;
- 3) Adanya transaksi Pengesahan Penerimaan Pembiayaan penggunaan SAL BLU oleh satker Lembaga Dana Kerja sama pembangunan Internasional (979015) sebesar Rp38.615.865.000 pada satuan kerja 999930 KPPN Jakarta II; dan
- 4) Adanya selisih mutasi atas transaksi Penggunaan SAL Penggunaan SAL (311112) dan transaksi Penggunaan SAL *Earmark* (311113) sebesar Rp56.381.000.000.000 pada satuan kerja 999981 Dit. PKN.

b. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJKN

Koreksi Lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJKN untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.049.469.265.196 berasal dari:

No	Uraian	Jumlah
1	UAKPABUN TK BLBI	1.802.786.821.557
2	UAKPABUN TK Eks Pertamina	165.995.695.821
3	UAKPABUN TK PKP2B	(5.418.895)
4	UAKPABUN TK ABMA/T	77.948.653.000
5	UAKPABUN TK KKKS SKK Midas	1.322.604.651
6	UAKPABUN TK KKKS BPMA	721.909.061
7	UAKPABUN TK KKKS Dit PKN	1
8	UAKPABUN TK Supersemar	699.000.000
Total		2.049.469.265.196

- 1) UAKPA BUN TK BLBI sebesar Rp1.802.786.821.557 yang merupakan hasil dari koreksi
 1. Aset Kredit Eks BPPN;
 2. Aset Kredit Eks PPA;
 3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga;
 4. Utang Pihak Ketiga Lainnya; dan
 5. Pendapatan yang masih Harus Diterima.
- 2) UAKPABUN TK Eks Pertamina sebesar Rp165.995.695.821 yang merupakan hasil dari Inventarisasi dan Penilaian tahun 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp164.590.753.000, dan Koreksi perbaikan perhitungan penyusutan sebesar Rp1.404.942.821.
- 3) UAKPABUN TK PKP2B sebesar minus Rp5.418.895. Koreksi ini berasal dari:

- a) Koreksi tambah atas pengakuan PNBP TAYL sejak 13 Juni 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.263.113 atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal oleh PT PLN (Persero), karena Perjanjian sewa dilakukan pada tahun 2024 namun masa berlaku sewa sejak 13 Juni 2022;
 - b) Koreksi tambah PNBP TAYL sebesar Rp50.720 atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT PLN karena terdapat kesalahan perhitungan nilai sewa harian;
 - c) Koreksi kurang PNBP TAYL sebesar Rp14.732.729 atas pemanfaatan BMN PKP2B PT Kaltim Prima Coal yang dimanfaatkan dalam bentuk sewa oleh PT Petromine Energy Trading sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan 21 Maret 2024 karena terdapat kesalahan perhitungan nilai sewa harian.
- 4) UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T sebesar Rp77.948.653.000 berasal dari nilai ABMA/T yang telah ditetapkan besaran kompensasi hingga tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp76.483.626.000, kenaikan nilai ABMA/T yang telah ditetapkan besaran kompensasi sebelumnya sebesar Rp1.365.027.000, dan koreksi tambah atas pengakuan pendapatan diterima di muka yang telah diterima pada tahun 2017 yang seharusnya diakui di tahun 2022 sebesar Rp100.000.000. Rincian koreksi lain-lain pada UAKPA BUN TK Pengelola ABMA/T sebesar Rp77.948.653.000 adalah sebagai berikut:
- a) ABMA/T Klenteng Sien Co (d.h Tempat Tinggal dan Klenteng) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.6/2024 tanggal 24 Maret 2024 dengan nilai wajar aset sebesar Rp186.176.000;
 - b) ABMA/T SD/SMP/SMA/SMK Laksamana Martadinata (d.h Yayasan Laksamana Martadinata / APNI) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-332/MK.6/2024 tanggal 3 Mei 2024 dengan nilai wajar aset sebesar Rp24.332.483.000;
 - c) ABMA/T Tempat Persemayaman Jenazah (d.h Kantor Seksi Kebudayaan Depdikbud) di Provinsi Jawa Timur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.6/2024 tanggal 17 Mei 2024 dengan nilai wajar aset sebesar Rp800.838.000;
 - d) Kenaikan nilai wajar atas ABMA/T TK Letjen Jamin Ginting Berastagi (d.h TK Letjen Jamin Ginting) di Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-421/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024 dengan nilai wajar aset sebesar Rp1.558.238.000 yang lebih tinggi dari besaran nilai wajar yang ditetapkan sebelumnya melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-540/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.075.620.000. Dengan demikian, diakui sebagai dampak kumulatif yang timbul atas adanya ABMA/T yang telah ditetapkan besaran kompensasinya sebesar Rp482.618.000;
 - e) Kenaikan nilai wajar atas ABMA/T SD Letjen Jamin Ginting Berastagi (d.h SD Letjen Jamin Ginting) di Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-447/MK.6/2024 tanggal 28 Juni 2024 dengan nilai wajar aset sebesar Rp2.180.867.000 yang lebih tinggi dari besaran nilai wajar yang ditetapkan sebelumnya melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-535/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.298.458.000. Dengan demikian, diakui sebagai dampak kumulatif yang timbul atas adanya ABMA/T yang telah ditetapkan besaran kompensasinya sebesar Rp882.409.000;

- f) Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Veronika Lany Thomas di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-599/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024, senilai Rp306.467.000;
- g) Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Elisabeth Susan Setioko di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-600/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024, senilai Rp281.495.000;
- h) Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Michael Bryan Sunur di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-601/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024, senilai Rp281.495.000;
- i) Gereja Kristen Methodist Indonesia Jemaat Imanuel Bogor (dahulu Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor, TK/SD/SMP/SMA/Akademi Management di Provinsi Jawa Barat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.6/2024 tanggal 20 Agustus 2024, senilai Rp3.635.263.000;
- j) Rumah Toko a.n Lim Seng Tjong (d.h Pertokoan) di Jalan Binjai, Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-614/MK.6/2024 tanggal 21 Agustus 2024, senilai Rp296.265.000;
- k) Rumah Toko a.n Silvia (d.h Pertokoan) di Jalan Binjai, Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-615/MK.6/2024 tanggal 21 Agustus 2024, senilai Rp353.792.000;
- l) Rumah Tinggal (d.h Gereja Kristen Akos) di Jawa Timur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, senilai Rp5.430.407.000;
- m) Rumah Toko a.n Antoni (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-623/MK.6/2024 tanggal 28 Agustus 2024, senilai Rp109.761.000;
- n) Rumah Toko a.n Tjin A Tjin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024, senilai Rp209.974.000;
- o) Rumah Toko a.n Tiong Beng (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-630/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024, senilai Rp112.477.000;
- p) Rumah Toko a.n Sjoifjan Salim (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024, senilai Rp88.798.000;
- q) Rumah Toko a.n Jansin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024, senilai Rp247.367.000;
- r) Klenteng Talang/Linthang Konghucu (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-714/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024, senilai Rp13.767.177.000;
- s) Vihara Dewi Welas Asih (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024 senilai Rp14.919.555.000;
- t) Vihara Pemancar Keselamatan (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-719/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024 senilai Rp5.166.021.000;

- u) Gereja Kristen Nasional Injili Jemaat "Sion" Teluk Melano (dahulu Gereja Kristen Nasional Injil (GKNI) di Provinsi Kalimantan Barat melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-720/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024 senilai Rp995.523.000;
 - v) Rumah Toko a.n Ana Ngatimin (d.h Pertokoan) di Kab.Langkat, Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-663/MK.6/2024 tanggal 23 September 2024 senilai Rp93.643.000;
 - w) ABMA/T Rumah Toko a.n Rosmina (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-923/MK.6/2024 tanggal 11 November 2024 senilai Rp195.592.000;
 - x) Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil (d.h TK, SD, SMEA Yayasan A. Yani) di Provinsi Jawa Timur melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-947/MK.6/2024 tanggal 13 November 2024 senilai Rp4.673.057.000; dan
 - y) Koreksi tambah atas pengakuan pendapatan diterima di muka yang telah diterima pada tahun 2017 yang seharusnya diakui di tahun 2022 ehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan hal penetapan kompensasi baru atas aset ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Veteran Palopo senilai Rp100.000.000.
- 5) UAKPA BUN TK KKKS SKK Migas Saldo Koreksi Nilai Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.322.604.651. Rincian koreksi lain-lain sebagai berikut:
- a) Koreksi Pendapatan yang masih Harus Diterima sebesar Rp1.122.635.151; dan
 - b) Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang Rp199.969.500.
- 6) UAKPA BUN TK KKKS BPMA sebesar Rp721.909.061 dengan rincian sebagai berikut:
- a) Koreksi Pendapatan Sewa Tahun 2023 sebesar Rp146.050.122;
 - b) Koreksi Pendapatan Sewa Tahun 2023 sebesar Rp183.107.220; dan
 - c) Koreksi Tahun Sebelumnya sebesar Rp392.751.719.
- 7) UAKPA BUN TK KKKS Dit. PKN sebesar Rp1 merupakan koreksi nilai akibat selisih nilai perolehan dengan dokumen penghapusan aset yang berasal dari KKKS Pan Orient Energy (Citarum) Pte. Ltd.
- 8) UAKPA BUN TK Pengelola Piutang kepada Yayasan Supersemar sebesar Rp699.000.000 akibat adanya kenaikan nilai aset sitaan Yayasan Supersemar yang dinilai ulang per 31 Desember 2024.

c. Koreksi Lain-Lain pada UAPBUN TK DJA

Koreksi lain-lain terdapat pada UAPBUN TK DJA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 sebesar Rp2.853.648.239.101 merupakan beban operasional sektor hulu migas dan panas bumi dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	UAKPABUN TK MIGAS	2.041.354.559.448
2	UAKPABUN TK Panas Bumi	812.293.679.653
Total		2.853.648.239.101

1) Sektor Migas

Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp2.041.354.559.448, seluruhnya berasal dari Koreksi Lain-lain dari Kegiatan Usaha Hulu Migas, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian Koreksi Lain-lain	(D)/K
Koreksi Pendapatan tahun lalu	1.182.254.131.921
-Koreksi Saldo Awal Gas dan Pendapatan Gas	323.294.737.182
-Koreksi Estimasi <i>Overlifting</i>	844.274.193.421
-Koreksi Penyisihan Piutang Jangka Pendek	33.408.219.848
-Lainnya	(18.723.018.531)
Koreksi Beban Tahun lalu	859.100.427.527
-Koreksi Tagihan DMO Fee	136.266.446.300
-Tagihan PDRD sebelum tahun 2024 yang baru ditagihkan tahun 2024	(17.767.408.379)
-Koreksi estimasi beban <i>underlifting</i> tahun sebelumnya	740.601.389.606
Total Koreksi Lainnya	2.041.354.559.448

2) Sektor Panas Bumi

Koreksi lain-lain tersaji sebesar Rp812.293.679.653 dipengaruhi oleh beberapa transaksi sebagai berikut:

No	Uraian	(D)/K
1	Koreksi beban diestimasi setoran kepada pemerintah atas Pemindahbukuan PNBPN Panas Bumi TA 2024 yang telah diakui pada LK TA 2023	381.732.009.962
2	Koreksi atas beban diestimasi pengajuan <i>Reimbursement</i> PPN atas pencadangan sebelum tahun 2024	441.757.030.688
3	Koreksi beban diestimasi pencadangan PBB Panas Bumi yang telah diakui pada LK TA 2023	430.561.669.691
4	Koreksi atas beban pengajuan <i>Reimbursement</i> PPN atas pencadangan sebelum tahun 2024	(441.757.030.688)
Total Koreksi Lain-Lain		812.293.679.653

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBPN atas Kegiatan Usaha Panas Bumi, diatur bahwa atas transaksi pengajuan *reimbursement* PPN yang melewati tahun pencadangan dicatat terlebih dahulu sebagai Beban pada tahun berjalan untuk kemudian dilakukan koreksi pada akhir tahun. Sampai dengan 31 Desember 2024, pengajuan *reimbursement* PPN dari pengusaha yang melewati tahun pencadangan adalah sebesar Rp441.757.030.688. Jumlah tersebut akan dicatat sebagai:

- koreksi lain-lain untuk menyesuaikan pengakuan beban *reimbursement* PPN tahun berjalan; dan
- koreksi pada beban diestimasi *reimbursement* PPN tahun pencadangan terkait.

G.2.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp1.236.867.333.530.144** dan **Rp1.338.745.845.087.589**. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut:

BA	DKEL	DDEL	TK	TM	Total 2024	Total 2023
999.00	5.519.068.399.709.080	(5.461.169.411.602.230)	-	-	57.898.988.106.850	83.345.834.604.204
999.01	5.294.482.680.241.290	(5.413.689.943.934.530)	-	-	(119.207.263.693.240)	(10.949.456.266.335)
999.02	1.044.135.841.694	(47.610.982.138.282)	-	-	(46.566.846.296.588)	(27.940.157.448.426)
999.03	122.400.504.553.266	(148.906.289.888.197)	(5.009.142.461.000)	5.267.911.814.100	(26.247.015.981.831)	11.488.682.860.279
999.04	4.570.007.562.061	(6.097.851.798.225)	-	-	(1.527.844.236.164)	(6.178.194.030.425)
999.05	1.085.456.794.393.030	(181.503.308.858.544)	-	-	903.953.485.534.486	831.329.516.680.174
999.07	292.661.759.797.646	(9.164.502.684)	-	-	292.652.595.294.962	269.570.915.094.692
999.08	218.535.304.214.074	(3.583.225.884.460)	-	126.764.943.865	215.078.843.273.479	223.506.324.806.534
999.99	501.578.714.916.325	(537.595.184.618.376)	(3.441.846.241.637)	290.707.471.878	(39.167.608.471.810)	(35.427.621.213.108)
TOTAL	13.039.798.301.228.466	(11.800.165.363.225.528)	(8.450.988.702.637)	5.685.384.229.843	1.236.867.333.530.144	1.338.745.845.087.589

1. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.00

Transaksi Antar Entitas sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah sebesar Rp57.898.988.106.852. Transaksi Antar Entitas terdiri dari akun Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) yang merupakan penerimaan kas yang bersumber dari pendapatan, penerimaan pembiayaan, dan penerimaan transito dan akun Diterima dari Entitas Lain (DDEL) yang merupakan pengeluaran kas yang bersumber dari belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transito

Akun	Rincian Akun	Jumlah Mutasi
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	5.519.068.399.709.082
313121	Diterima dari Entitas Lain	(5.461.169.411.602.230)
Total		57.898.988.106.852

2. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.01

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp119.207.263.693.243 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp5.294.482.680.241.290 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp5.413.689.943.934.533.

3. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.02

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp46.566.846.296.588 yang berasal dari Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp1.044.135.841.694 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp47.610.982.138.282.

4. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.03

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp26.247.015.981.831 berasal dari selisih antara Diterima Dari Entitas Lain, Ditagihkan ke Entitas Lain, dan Transfer Keluar dengan rincian sebagai berikut:

- Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp122.400.504.553.266;
- Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp148.906.289.888.197;
- Transfer Keluar sebesar minus Rp5.009.142.461.000; dan
- Transfer masuk sebesar Rp5.267.911.814.100.

5. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.04

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp1.527.844.236.164 berasal dari selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp4.570.007.562.061 dan Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp6.097.851.798.225.

6. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.05

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp903.953.485.534.486 berasal dari selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp1.085.456.794.393.030 ditambah saldo Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp181.503.308.858.544.

7. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.07

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp292.652.595.294.963 berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.07 merupakan selisih antara Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp292.661.759.797.647 ditambah saldo Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp9.164.502.684.

8. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.08

Transaksi Antar Entitas sebesar Rp215.078.843.273.479 berasal dari transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar-K/L, antar-BUN, maupun K/L dengan BUN, transfer keluar/masuk dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp218.535.304.214.074;
- b. Diterima dari Entitas Lain (DDEL) sebesar minus Rp3.583.225.884.460; dan
- c. Transfer Masuk sebesar Rp126.764.943.865.

9. Transaksi Antar Entitas pada BA 999.99

Transaksi Antar Entitas sebesar minus Rp39.167.608.471.810 yang berasal dari transaksi pengeluaran dan transaksi penerimaan. Rincian Transaksi Antar Entitas pada BA 999.99 terdiri dari:

- a. UAPBUN TK DJPb sebesar Rp90.296.516.237.422 berasal dari selisih antara DDEL – DKEL atas transaksi pengeluaran dan penerimaan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian:
 - 1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp305.629.511.186.859;
 - 2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp215.332.994.950.437.
- b. UAPBUN TK DJKN sebesar minus Rp5.407.562.252.670 terdiri dari:
 - 1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp790.885.930.259;
 - 2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp3.047.309.413.170;
 - 3) Transfer Keluar sebesar minus Rp3.441.846.241.637;
 - 4) Transfer Masuk sebesar Rp290.707.471.878.
- c. UAPBUN TK DJA sebesar minus Rp124.631.989.181.256 yang terdiri dari:
 - 1) Ditagihkan Ke Entitas Lain sebesar Rp150.841.915.843.426;
 - 2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp275.473.905.024.682.
- d. UAPBUN TK BKF sebesar Rp238.734.433.000 yang terdiri dari:
 - 1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp238.734.433.000;
 - 2) Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp0.
- e. UAPBUN TK DJPK sebesar Rp91.756.398.331 yang terdiri dari:
 - 1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp43.832.731.628.418;
 - 2) Diterima dari Entitas Lain sebesar minus Rp43.740.975.230.087.

- f. UAPBUN TK DJPPR sebesar Rp244.935.894.363 yang terdiri dari:
- 1) Ditagihkan ke Entitas Lain sebesar Rp244.935.894.363;
 - 2) Diterima dari Entitas Lain sebesar Rp0.

G.2.5. KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) SELISIH KURS YANG BELUM TEREALISASI

Nilai Keuntungan/(Kerugian) Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan kerugian selisih kurs dari Bagian Anggaran Transaksi Khusus 999.99 hasil revaluasi aset moneter yang telah direklasifikasi ke beban selisih kurs belum terealisasi.

G.2.6. MUTASI EKUITAS BUN DI K/L

Nilai mutasi Ekuitas BUN di K/L pada tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.171.585.082.240 dan Rp24.500.983.833.957. Mutasi Kas merupakan perubahan Ekuitas yang berasal dari aset yang bukan milik Kuasa BUN, tetapi menurut ketentuan wajib disajikan dalam neraca Kuasa BUN. Rincian mutasi ekuitas BUN di K/L adalah sebagai berikut:

No	Mutasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran	32.325.296.274	(18.216.293.568)
2	Mutasi Kas Lainnya di K/L Dari Hibah	(3.440.440.444.071)	11.096.844.487.771
3	Mutasi Kas BLU	4.579.700.230.037	13.422.355.639.754
Jumlah		1.171.585.082.240	24.500.983.833.957

1. Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.325.296.274 dan minus Rp18.216.293.568 merupakan mutasi transaksi akun kas pada Bendahara Pengeluaran di *ledger* akrual dengan rincian sebagai berikut:

No	Kisaran Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	111611	53.965.337.680	(32.793.960.286)
2	111613	(21.640.041.406)	14.577.666.718
Total		32.325.296.274	(18.216.293.568)

2. Mutasi Kas Lainnya di K/L dari Hibah pada tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar minus Rp3.440.440.444.071 dan Rp11.096.844.487.771 yang merupakan jumlah mutasi transaksi akun kas lainnya di K/L dari hibah dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kisaran Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	111822	(3.440.440.444.071)	11.096.844.487.771
Total		(3.440.440.444.071)	11.096.844.487.771

3. Mutasi Kas BLU pada tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.579.700.230.037 dan Rp13.422.355.639.754 yang merupakan jumlah mutasi akun kas BLU dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kisaran Akun	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	111911	4.579.700.230.037	13.422.355.639.754
Total		4.579.700.230.037	13.422.355.639.754

G.2.7. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 adalah sebesar minus Rp3.576.615.643.905.782 dan minus Rp3.328.187.950.388.477. Ekuitas akhir sebesar minus Rp3.576.615.643.905.782 merupakan seluruh Ekuitas akhir BABUN sebesar minus 3.563.586.073.658.801 ditambah eliminasi sebesar minus Rp13.029.570.246.981. Rincian nilai Ekuitas akhir adalah:

NO	UNIT		31 Desember 2024	31 Desember 2023
	KODE	URAIAN		
1	999.00	Akuntansi Pusat	617.359.217.555.613	611.132.486.226.114
2	999.01	BA BUN Utang Pemerintah	(8.918.758.010.216.970)	(8.294.956.193.243.511)
3	999.02	BA BUN Hibah	-	-
4	999.03	BA BUN Investasi Pemerintah	4.510.402.924.552.560	4.153.239.563.426.996
5	999.04	BA BUN Pemberian Pinjaman	53.254.403.050.958	53.892.237.130.103
6	999.05	BA BUN Transfer ke Daerah	(104.065.441.088.863)	(105.810.575.987.129)
7	999.07	BA BUN Belanja Subsidi	(25.384.885.795.878)	(28.287.401.199.194)
8	999.08	BA BUN Belanja Lain-lain	(67.243.759.488.744)	(72.518.435.781.776)
9	999.09	Badan Lainnya	31.292.147.271.351	29.854.766.285.853
10	999.99	BA BUN Transaksi Khusus	339.557.330.501.172	337.184.179.970.476
JUMLAH			(3.563.586.073.658.801)	(3.316.269.373.172.068)
ELIMINASI			(13.029.570.246.981)	(11.918.577.216.409)
EKUITAS AKHIR			(3.576.615.643.905.782)	(3.328.187.950.388.477)

H. PENUTUP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Demikianlah Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tahun 2024 *Audited* yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 18 Mei 2025
Menteri Keuangan
Selaku Bendahara Umum Negara



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

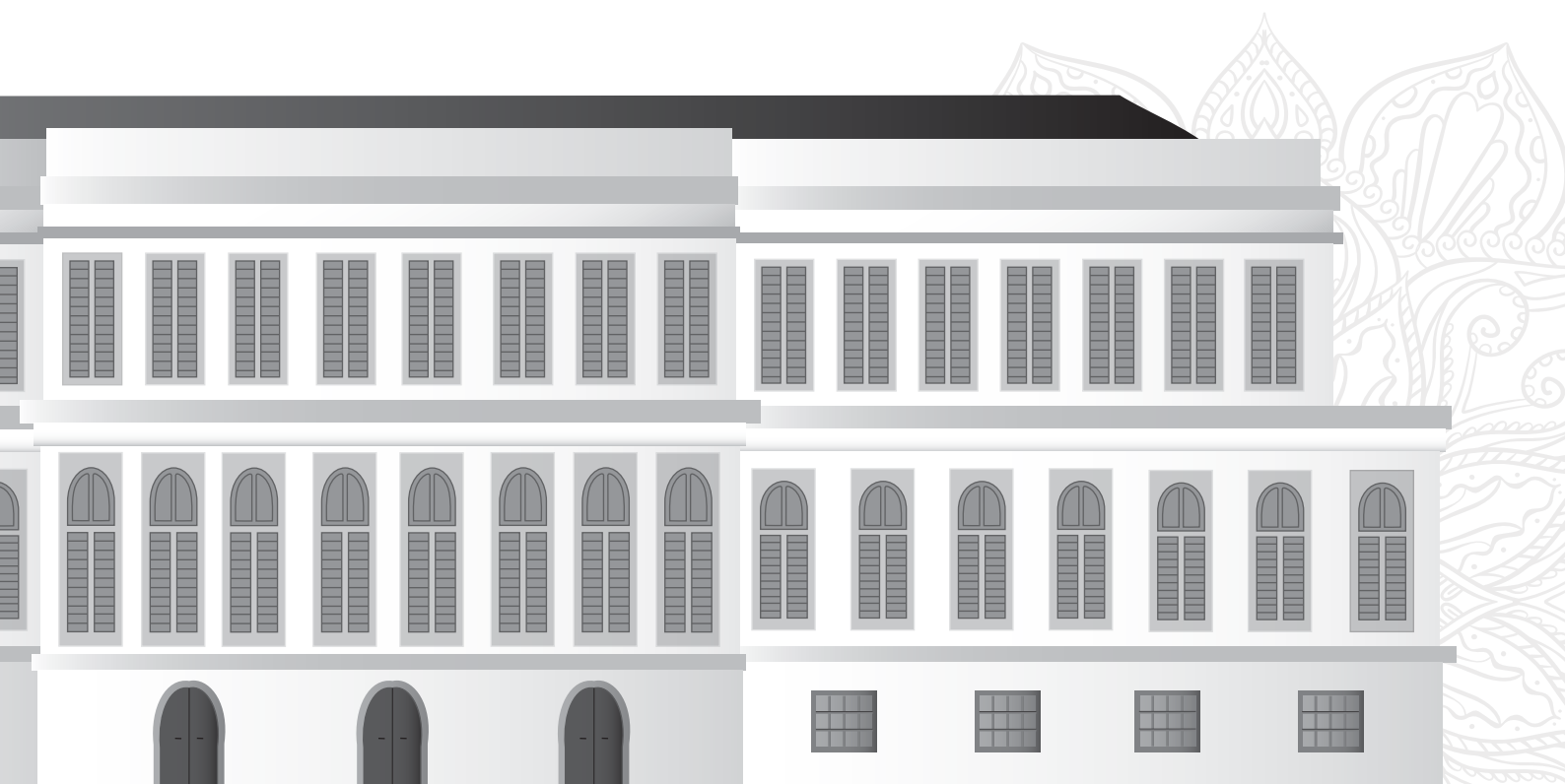


LAMPIRAN

Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara

Tahun 2024

(Audited)



Mei 2025

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Des-24	%	31-Des-23	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	280.774.447.909.000	274.898.283.177.566	97,91%	272.810.959.159.689	2.087.324.017.877
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	247.672.618.999.000	240.510.919.461.810	97,11%	255.626.800.279.964	(15.115.880.818.154)
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	123.816.153.791.000	113.330.835.745.742	91,53%	118.872.894.679.746	(5.542.058.934.004)
4211	Pendapatan Minyak bumi	89.248.050.000.000	77.961.123.337.930	87,35%	87.408.885.465.416	(9.447.762.127.486)
42111	Pendapatan Minyak Bumi	89.248.050.000.000	77.961.123.337.930	87,35%	87.408.885.465.416	(9.447.762.127.486)
421111	Pendapatan Minyak Bumi	89.248.050.000.000	77.961.123.337.930	87,35%	87.408.885.465.416	(9.447.762.127.486)
4212	Pendapatan Gas Bumi	32.240.760.000.000	32.661.085.038.989	101,30%	28.769.670.492.312	3.891.414.546.677
42121	Pendapatan Gas Bumi	32.240.760.000.000	32.661.085.038.989	101,30%	28.769.670.492.312	3.891.414.546.677
421211	Pendapatan Gas Bumi	32.240.760.000.000	32.661.085.038.989	101,30%	28.769.670.492.312	3.891.414.546.677
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.327.343.791.000	2.708.627.368.823	116,38%	2.694.338.722.018	14.288.646.805
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	2.327.343.791.000	2.708.627.368.823	116,38%	2.694.338.722.018	14.288.646.805
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	-	-	-	-	-
421621	Pendapatan Pengusahaan Panas Bumi	2.327.343.791.000	2.708.627.368.823	116,38%	2.694.338.722.018	14.288.646.805
422	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	85.845.465.000.000	86.384.593.538.563	100,63%	82.058.743.373.870	4.325.850.164.693
4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	85.845.465.000.000	86.384.593.538.563	100,63%	82.058.743.373.870	4.325.850.164.693
42213	Pendapatan Bagian Laba BUMN di Bawah Kementerian BUMN	85.169.400.000.000	85.572.985.213.463	100,47%	81.217.243.776.870	4.355.741.436.593
422131	Pendapatan Bagian Laba BUMN Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	46.661.644.000.000	49.590.787.691.195	106,28%	40.839.347.648.527	8.751.440.042.668
422132	Pendapatan Bagian Laba BUMN Non Perbankan di Bawah Kementerian BUMN	38.507.756.000.000	35.982.197.522.268	93,44%	40.377.896.128.343	(4.395.698.606.075)
42214	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga di Bawah Kementerian Keuangan	676.065.000.000	811.608.325.100	120,05%	841.499.597.000	(29.891.271.900)
422142	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Lembaga Non Perbankan di Bawah Kementerian Keuangan	676.065.000.000	811.608.325.100	120,05%	841.499.597.000	(29.891.271.900)
425	Pendapatan PNPB Lainnya	38.011.000.208.000	40.795.490.177.505	107,33%	54.695.162.226.348	(13.899.672.048.843)
4251	Pendapatan Penjualan dan Sewa	6.961.289.467.000	5.688.906.897.694	81,72%	5.754.146.701.830	(65.239.804.136)
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN	253.997.845.000	61.304.693.855	24,14%	83.766.112.697	(22.461.418.842)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	135.177.914.000	60.778.861.949	44,96%	83.766.112.697	(22.987.250.748)
42514	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	793.075.762.000	787.013.828.237	99,24%	1.043.500.873.159	(256.487.044.922)
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	52.944.210.000	50.022.188.329	94,48%	213.724.267.365	(163.702.079.036)
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B	557.031.286.000	440.565.775.779	79,09%	528.386.930.575	(87.821.154.796)
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	2.121.479.000	1.636.254.300	77,13%	637.160.330	999.093.970
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	-	2.285.229.382	-	2.577.149.393	(291.920.011)
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	6.186.732.000	17.531.291.768	283,37%	3.057.175.007	14.474.116.761
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya dari Pengelola Barang	174.792.055.000	274.973.088.679	157,31%	295.118.190.489	(20.145.101.810)
42516	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	5.914.215.860.000	4.840.588.375.602	81,85%	4.626.879.715.974	213.708.659.628
425161	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak	-	-	-	-	-
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	5.817.280.000.000	4.775.446.292.310	82,09%	4.446.262.623.442	329.183.668.868
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	96.935.860.000	65.142.083.292	67,20%	180.617.092.532	(115.475.009.240)
4252	PENDAPATAN ADMINISTRASI DAN PENEGAKAN	196.541.000	161.185.250	82,01%	456.468.837	(295.283.587)
42523	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan serta Gratifikasi	196.541.000	161.185.250	82,01%	456.468.837	(295.283.587)
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	196.541.000	161.185.250	82,01%	456.468.837	(295.283.587)
4256	PENDAPATAN JASA LAINNYA	-	-	-	-	-
42569	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	-	-
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-	-	-

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Des-24	%	31-Des-23	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4257	PENDAPATAN BUNGA, PENGELOLAAN REKENING PERBANKAN, DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	23.302.857.924.000	28.994.741.912.984	124,43%	39.103.559.676.563	(10.108.817.763.579)
42571	Pendapatan Bunga	1.666.412.617.000	2.956.282.826.762	177,40%	2.875.211.148.313	81.071.678.449
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.283.594.681.000	1.686.026.616.379	131,35%	1.619.952.431.808	66.074.184.571
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	382.817.936.000	1.270.254.691.765	331,82%	1.255.258.716.505	14.995.975.260
						-
42572	Pendapatan Gain on Bond Redemption	14.310.500.000	30.359.000.000		105.211.500.000	(74.852.500.000)
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	14.310.500.000	30.359.000.000		105.211.500.000	(74.852.500.000)
						-
42573	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.742.193.035.000	3.895.699.644.400	142,07%	7.122.426.793.095	(3.226.727.148.695)
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.721.083.248.000	3.801.423.044.800	139,70%	6.510.426.214.822	(2.709.003.170.022)
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	21.109.787.000	94.276.599.600	446,60%	612.000.578.273	(517.723.978.673)
						-
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Pemerintah, Selisih Harga SBN, dan Fee Lainnya atas Transaksi Surat Berharga Negara	236.680.218.000	354.464.253.582	149,77%	408.068.053.648	(53.603.800.066)
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	138.989.893.000	136.263.072.585	98,04%	132.719.012.880	3.544.059.705
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	89.187.770.000	198.001.105.712	222,00%	134.699.993.259	63.301.112.453
42574	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	8.502.555.000	8.502.554.683	-	140.422.121.120	(131.919.566.437)
425748	Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	-	11.697.520.602		226.926.389	11.470.594.213
42575	Pendapatan dari Selisih Kurs	17.579.000	401.211.617.324		139.897.111.019	261.314.506.305
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	17.579.000	401.211.617.324		139.897.111.019	261.314.506.305
42576	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan dan Penutupan Rekening	69.032.918.000	99.499.068.910	144,13%	119.508.223.930	(20.009.155.020)
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	44.218.000	88.435.656		88.435.656	-
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	32.804.535.000	56.132.728.050	171,11%	84.502.824.372	(28.370.096.322)
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	36.183.548.000	43.275.041.517	119,60%	34.916.450.292	8.358.591.225
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	617.000	2.863.687	-	513.610	2.350.077
						-
42577	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	18.558.444.571.000	21.257.176.297.940	114,54%	28.333.236.846.558	(7.076.060.548.618)
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	134.352.364.000	209.182.465.754	155,70%	135.698.767.125	73.483.698.629
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	437.881.198.000	615.681.077.970	140,60%	496.523.253.915	119.157.824.055
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	17.653.231.714.000	20.000.988.358.484	113,30%	27.251.700.777.294	(7.250.712.418.810)
425775	Pendapatan dari Penempatan Uang Sebelum Rekonsiliasi	-	-		-	-
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	332.979.295.000	417.427.003.986	125,36%	449.314.048.224	
425777	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional dan/atau Bank	-	13.897.391.746		-	
42579	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	15.766.486.000	49.204.066		-	49.204.066
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	15.766.486.000	49.204.066		-	
						-
4258	PENDAPATAN DENDA	3.155.345.891.000	33.449.201.660	1,06%	8.990.578.863	24.458.622.797
42581	Pendapatan Denda I	885.947.420.000	16.006.912.426	1,81%	5.765.419.356	10.241.493.070
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	885.697.821.000	7.207.158.787	0,81%	387.369.764	6.819.789.023
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	93.000	92.925		14.729.016	(14.636.091)
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	3.780.000	3.780.480		10.000	3.770.480

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Des-24	%	31-Des-23	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	18.000	6.243.793		140.000	6.103.793
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	245.708.000	437.823.739		227.913.125	209.910.614
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	-	8.351.812.702		5.135.257.451	3.216.555.251
425819	Pendapatan Denda terkait Pengusahaan Panas Bumi	-	-		-	-
42582	Pendapatan Denda II	1.627.805.000	3.238.748.754	-	3.225.159.507	
425821	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I	-	-		-	-
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	1.608.255.000	3.219.198.754		3.225.159.507	(5.960.753)
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)	19.550.000	19.550.000		-	19.550.000
42583	Pendapatan Denda III	2.267.770.666.000	14.203.540.480		-	14.203.540.480
425839	Pendapatan Denda Lainnya	2.267.770.666.000	14.203.540.480		-	14.203.540.480
4259	PENDAPATAN LAIN-LAIN	4.591.310.385.000	6.078.230.979.917	132,39%	9.828.008.800.255	(3.749.777.820.338)
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I	4.199.351.863.000	5.607.565.878.814	133,53%	9.478.108.267.995	(3.870.542.389.181)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.935.970.633.000	3.942.551.256	0,20%	2.617.449.782	1.325.101.474
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	2.395.788.000	39.990.676.669	-	20.857.868.202	19.132.808.467
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	24.833.173.000	404.410.273	-	51.494.391.768	(51.089.981.495)
425917	Penerimaan Kembali Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-		-	-
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	49.609.749.000	75.406.193.790	-	725.682.006.818	(650.275.813.028)
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	2.186.542.520.000	5.487.822.046.826	250,98%	8.677.456.551.425	(3.189.634.504.599)
42592	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu II	314.214.682.000	353.212.948.117	-	327.244.663.561	25.968.284.556
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	314.214.682.000	353.212.948.117	-	327.244.663.561	25.968.284.556
42598	Pendapatan Lain-Lain I	131.261.000	46.183.370.393		778.369.517	45.405.000.876
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	92.944.000	310.714.110		284.527.106	26.187.004
425982	Penerimaan Akumulasi Iuran Pensiun	-	-		-	-
425983	Pendapatan Dari Sisa Dana Kampanye	-	-		-	-
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	38.317.000	45.872.656.283		493.842.411	45.378.813.872
42599	Pendapatan Lain-Lain	77.612.579.000	71.268.782.593	91,83%	21.877.499.182	143.414.331.471
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	828.937.000	5.843.228.976	-	3.945.146.763	1.898.082.213
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	76.783.642.000	65.425.553.617	85,21%	17.932.352.419	47.493.201.198
43	Penerimaan Hibah	33.101.828.910.000	34.387.363.715.756	103,88%	17.184.158.879.725	17.203.204.836.031
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri	-	34.387.363.715.756		17.184.158.879.725	17.203.204.836.031
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	-	32.247.196.309.907	-	15.361.429.146.772	16.885.767.163.135
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Perorangan	-	-		-	-
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Perorangan	-	60.021.516.260		-	60.021.516.260
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Lembaga/Badan Usaha	-	233.933.403.044		137.278.319.260	96.655.083.784
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Pemerintah Daerah	-	31.862.055.896.086		15.221.390.183.638	16.640.665.712.448
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Lainnya	-	91.185.494.517		2.760.643.874	88.424.850.643

REALISASI PENDAPATAN BUN DAN HIBAH PER AKUN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

KODE AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	31-Des-24	%	31-Des-23	KENAIKAN (PENURUNAN)
1	2	3	4	5	4	7
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	2.140.167.405.849		1.822.729.732.953	317.437.672.896
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	540.471.344.113		423.174.970.047	117.296.374.066
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Perorangan	-	-		-	-
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Bilateral	-	132.463.972.855		181.831.927.857	(49.367.955.002)
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri – Multilateral	-	408.007.371.258		241.343.042.190	166.664.329.068
		-				
43123	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung Bentuk Uang	-	1.599.696.061.736	-	1.399.554.762.906	200.141.298.830
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Perorangan	-	1.255.020.666		1.250.430.211	4.590.455
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Bilateral	-	254.332.863.571		523.321.750.393	(268.988.886.822)
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung – Multilateral	-	1.278.685.180.203		850.175.319.681	428.509.860.522
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung - Lainnya	-	65.422.997.296		24.807.262.621	40.615.734.675

REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN		86.384.593.538.563
DIVIDEN		85.562.194.164.612
BUMN		85.562.189.226.577
PERBANKAN		49.590.787.691.176
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	17.178.737.880.394
2	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.277.029.672.897
3	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	25.714.901.623.444
4	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	420.118.514.441
PERBANKAN (MINORITAS)		19
1	PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.	19
NON PERBANKAN (MAYORITAS)		35.971.401.535.401
1	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	9.211.235.606.774
2	PT ASDP Indonesia Ferry	30.672.453.485
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	1.213.402.000.000
4	Perum Perhutani	27.706.000.000
5	PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)	101.000.000.000
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	21.235.555.186
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	192.366.060.206
8	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	1.038.470.000.000
9	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	11.214.162.000.000
10	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	147.817.000.000
11	PT Pertamina (Persero)	9.360.000.000.000
12	Perum Jasa Tirta I	3.444.859.750
13	Perum Jasa Tirta II	7.000.000.000
14	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	3.090.004.000.000
15	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	292.886.000.000
16	PT Pos Indonesia (Persero)	20.000.000.000
NON PERBANKAN (MINORITAS)		4.938.035
1	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	149
2	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	128
3	PT Pegadaian (Persero)	385.089
4	PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.989
5	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	3
6	PT Sucofindo (Persero)	296.824
7	PT Surveyor Indonesia (Persero)	2.278.422
8	PT Dahana (Persero)	420.000
9	PT Pindad	4.461
10	PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero)	242.583
11	PT Jasa Raharja	127.386
12	PT Nindya Karya	8.571

**REALISASI PENDAPATAN DARI KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)**

No.	BUMN	Jumlah Pembayaran
1	2	3
13	PT Kawasan Berikat Nusantara	228.289
14	PT Jamkrindo	101.305
15	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	176.125
16	PT Kliring Berjangka	55.732
17	PT Kawasan Industri Medan	53.187
18	PT Kawasan Industri Makassar	557.792
PEMBAYARAN PIUTANG SEBELUM TB 2023		8.141.188.641
1	PT Perkebunan Nusantara II	6.448.400.376
2	PT Inhutani V	692.788.265
3	Perum Perumnas	1.000.000.000
Denda Keterlambatan		400.010.191
1	PT Jasa Raharja	10.191
2	PT Pos Indonesia (Persero)	400.000.000
BUMN di Bawah Kementerian Keuangan		811.608.325.100
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	520.000.000.000
2	PT Sarana Multigriya Finansial	97.780.000.000
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	167.165.000.000
4	PT Geo Dipa Energi (Persero)	20.663.325.100
5	PT Karabha Digjaya	6.000.000.000
Kesalahan Setoran		2.249.850.000
1	PT Virama Karya *)	2.249.850.000
JUMLAH TOTAL		86.384.593.538.563

*) Realisasi Dari Kekayaan Negara Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.249.850.000 berasal dari BA BUN 999.99. Realisasi tersebut merupakan kesalahan setoran yang dilakukan oleh PT Virama Karya yang akan diselesaikan dengan pengembalian pendapatan dan disetorakan ke RKUD DKI Jakarta pada tahun 2025.

REALISASI PNBP LAINNYA PER BA BUN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2024
999.01 (Pengelola Utang)		3.926.058.890.083
425721	Pendapatan Gain on Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Negara Jangka Panjang	30.359.000.000
425731	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	3.801.423.044.800
425733	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Dalam Negeri/Rupiah	94.276.599.600
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	245.683
999.02 (Pengelola Hibah)		404.410.273
425916	Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun Anggaran Yang Lalu	404.410.273,00
999.03 (Pengelola Investasi Pemerintah)		1.415.020.328.033
425719	Pendapatan Bunga Lainnya	1.270.254.691.765
425741	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Infrastruktur	136.263.072.585
425747	Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Loss Limit	8.502.554.683
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	9.000
999.04 (Pengelola Pemberian Pinjaman)		1.746.743.610.602
425713	Pendapatan Bunga dari Piutang dan Pemberian Pinjaman	1.686.026.616.379
425762	Pendapatan Jasa Bank dari Pemberian Pinjaman	88.435.656
425763	Pendapatan Biaya Lain-lain Pemberian Pinjaman	56.132.728.050
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	917.536.535
425823	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pengembalian Pemberian Pinjaman	3.219.198.754
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	27.312.500
425826	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Penyampaian Laporan oleh debitur Kredit Pemerintah (KUMK)	19.550.000
425981	Penerimaan Lainnya dari Piutang Pemberian Pinjaman	310.714.110
425716		1.518.618
999.05 (Pengelola Belanja Transfer Daerah)		5.487.822.046.826
425919	Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah Tahun Anggaran Yang Lalu	5.487.822.046.826
999.07 (Pengelola Belanja Subsidi)		39.998.801.883
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	19.134
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	8.106.080
425915	Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun Anggaran Yang Lalu	39.990.676.669
999.08 (Pengelola Belanja Lain-Lain)		97.218.440.543
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	7.199.052.707
425918	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	75.406.193.790
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	11.500
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	360.438.000
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	49.204.066
425839	Pendapatan Denda Lainnya	14.203.540.480
999.99 (Pengelola Transaksi Khusus)		28.082.223.650.262
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	165.393.906
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	60.778.861.949
425141	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari KKKS	50.022.188.329

REALISASI PNBP LAINNYA PER BA BUN
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(dalam rupiah)

Uraian		Realisasi TA 2024
425142	Pendapatan atas Pengelolaan BMN yang Berasal dari Kontraktor PKP2B dan Pemegang IUPK	440.565.775.779
425143	Pendapatan atas Pemanfaatan Aset Properti	1.636.254.300
425144	Pendapatan Atas Aset Saham dan Surat Berharga Lain	2.285.229.382
425145	Pendapatan Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa	17.531.291.768
425149	Pendapatan atas Pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara dari Pengelola Barang	274.973.088.679
425162	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	4.775.446.292.310
425169	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas	65.142.083.292
425235	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	161.185.250
425744	Pendapatan Bunga Reverse Repo	198.001.105.712
425748	Pendapatan atas Penempatan Uang berprinsip Syariah	11.697.520.602
425751	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam Pengelolaan Rekening Milik BUN	401.211.617.324
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	42.357.485.848
425765	Pendapatan dari Penutupan Rekening	2.863.687
425772	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum	209.182.465.754
425773	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	615.681.077.970
425774	Pendapatan atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	20.000.988.358.484
425776	Pendapatan atas pengelolaan Rekening Khusus (Reksus) Pinjaman dan/atau Hibah	417.427.003.986
425777	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Milik Bendahara Umum Negara pada Bank Operasional dan/atau Bank Penyalur Gaji	13.897.391.746
425814	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA	92.925
425815	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia	3.780.480
425816	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	6.243.793
425817	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi	437.823.739
425818	Pendapatan Denda, Bunga, dan Penalti terkait Kegiatan Usaha Hulu Migas	8.351.812.702
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	3.942.551.256
425921	Penerimaan Kembali Belanja Kontribusi Sosial TAYL	353.212.948.117
425984	Pendapatan dari Surplus Otoritas Jasa Keuangan	45.872.656.283
425998	Pendapatan dari Retur SP2D	5.843.228.976
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	65.397.975.934
Jumlah		40.795.490.178.505

RINCIAN PENDAPATAN HIBAH-LRA TAHUN 2024 BERDASARKAN PEMBERI HIBAH

No.	Nama Pemberi Hibah	Nilai Realisasi Pendapatan Hibah
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	1.355.945.603.870
2	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	1.222.267.713.927
3	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	1.012.537.072.000
4	Global Fund	861.035.877.059
5	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	650.901.917.332
6	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	633.142.101.532
7	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	526.215.052.126
8	Pemerintah Provinsi Banten	394.679.209.875
9	Pemerintah Provinsi Lampung	385.299.970.000
10	International Bank for Reconstruction and Development	367.896.637.059
11	Lainnya (Akumulasi)	26.977.442.560.976
Total		34.387.363.715.756

Rincian Pendapatan Hibah Langsung Uang LRA Tahun 2024 Audited
Per Kementerian/Lembaga Penerima Hibah

KEMENTERIAN/LEMBAGA	Pilkada Serentak	Non-Pilkada Serentak	Total
140 - KEMENTERIAN KEUANGAN		540.471.344.113	540.471.344.113
005 - MAHKAMAH AGUNG		6.144.410.515	6.144.410.515
006 - KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA		163.058.078.349	163.058.078.349
010 - KEMENTERIAN DALAM NEGERI		66.390.932.135	66.390.932.135
012 - KEMENTERIAN PERTAHANAN		1.455.573.326.093	1.455.573.326.093
013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI		32.565.869.285	32.565.869.285
018 - KEMENTERIAN PERTANIAN		20.869.239.016	20.869.239.016
020 - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		14.725.080.106	14.725.080.106
022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		16.901.010.929	16.901.010.929
023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI		10.517.738.772	10.517.738.772
024 - KEMENTERIAN KESEHATAN		1.224.026.158.179	1.224.026.158.179
025 - KEMENTERIAN AGAMA		1.044.255.836.416	1.044.255.836.416
027 - KEMENTERIAN SOSIAL		115.571.049.715	115.571.049.715
029 - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		108.069.271.376	108.069.271.376
032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		28.837.287.125	28.837.287.125
035 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN		6.688.215.433	6.688.215.433
036 - KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN		548.253.916	548.253.916
047 - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		11.329.833.036	11.329.833.036
054 - BADAN PUSAT STATISTIK		1.752.903.416	1.752.903.416
055 - KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL		106.734.467.106	106.734.467.106
056 - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN		28.706.194.227	28.706.194.227
060 - KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA		4.181.859.100.776	4.181.859.100.776
063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		78.797.000	78.797.000
066 - BADAN NARKOTIKA NASIONAL		16.253.265.146	16.253.265.146
067 - KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI		379.713.735	379.713.735
068 - KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL		4.126.283.917	4.126.283.917
074 - KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA		8.664.800.667	8.664.800.667
076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM	19.082.362.771.120	5.972.327.409	19.088.335.098.529
095 - DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)		16.277.000.000	16.277.000.000
103 - BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA		1.255.020.666	1.255.020.666
115 - BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	6.047.008.032.779	1.000.000.000	6.048.008.032.779
116 - LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA		200.000.000	200.000.000
124 - BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL		18.190.103.283	18.190.103.283
Jumlah Pendapatan Hibah Langsung Uang	25.129.370.803.899	9.257.992.911.857	34.387.363.715.756

REALISASI BELANJA SUBSIDI

UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Naik (Turun)	%
Subsidi Minyak Solar	17.115.109.641.445	16.573.537.577.398	541.572.064.047	3,27
Subsidi Minyak Tanah	4.469.228.489.490	4.716.272.138.615	(247.043.649.125)	(5,24)
Subsidi Elpiji	80.213.612.965.648	74.300.193.555.508	5.913.419.410.140	7,96
Subsidi Listrik	75.817.285.111.936	68.702.258.911.876	7.115.026.200.060	10,36
Subsidi PPh DTP	8.311.642.153.441	8.587.136.656.062	(275.494.502.621)	(3,21)
Subsidi PPnBM DTP- KBLBB	138.246.168.593	0	138.246.168.593	100
Subsidi PPN DTP- Rusun dan KBLBB	666.506.458.627	0	666.506.458.627	100
Subsidi Bunga Pinjaman CPP	252.159.126.358	863.768.416	251.295.357.942	29.092,91
Subsidi Kredit Sektor Peternakan	0	41.204.433	(41.204.433)	(100,00)
Subsidi Bunga Alsintan	41.353.431	0	41.353.431	100
Subsidi Pupuk	47.387.402.436.351	42.057.450.059.622	5.329.952.376.729	12,67
Subsidi/PSO PT. PELNI	3.203.970.376.875	2.395.825.002.151	808.145.374.724	33,73
Subsidi/PSO PT. KAI	4.595.718.339.234	2.524.521.565.006	2.071.196.774.228	82,04
Subsidi PSO lainnya	176.322.920.000	172.000.950.000	4.321.970.000	2,51
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	41.519.920.292.932	40.967.533.111.506	3.409.817.898.145	8,32
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat	16.135.205.138	0	16.135.205.138	100
Subsidi Bunga KPR	4.609.436.081.696	3.457.315.411.888	1.152.120.669.808	33,32
Subsidi Bunga Kredit Lainnya	6.702.617.829	963.718.561	5.738.899.268	595,50
Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	852.348.000.000	895.000.000.000	(42.652.000.000)	(4,77)
Subsidi Kredit Resi Gudang	3.044.846.912	2.142.819.505	(42.652.000.000)	(1.990,46)
Total Reguler	289.354.832.585.936	265.353.056.450.547	26.815.652.824.701	10,11
Subsidi Bunga Program PEN (DJPK) - Penanganan Pandemi Covid-19	114.365.781.222	160.320.970.852	(45.955.189.630)	(28,66)
Belanja Subsidi Bunga KUR - Penanganan Pandemi COVID-19	2.857.430.716.719	0	2.857.430.716.719	100
Subsidi PPh-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	0	604.334.469.803	(604.334.469.803)	(100)
Subsidi PPN-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	0	2.028.573.395.855	(2.028.573.395.855)	(100)
Subsidi PPnBM-DTP-Penanganan Pandemi Covid-19	0	65.150.508.412	(65.150.508.412)	(100)
Subsidi IJP Program PEN(DJPPR) - Penanganan Pandemi Covid-19	365.965.012.969	1.380.650.258.278	(1.014.685.245.309)	(73,49)
Total PEN	3.337.761.510.910	4.239.029.603.200	(901.268.092.290)	(21,26)
Jumlah	292.692.594.096.846	269.592.086.053.747	23.100.508.043.099	8,57

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
	TRANSFER KE DAERAH	874.875.475.600.000	863.542.806.482.364	98,70%	11.332.669.117.636
A	Dana Bagi Hasil	153.278.976.730.000	153.174.562.784.262	99,93%	104.413.945.738
A.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	59.338.542.701.000	59.328.986.344.540	99,98%	9.556.356.460
6111	DBH PPh Perorangan	32.733.740.472.000	32.733.740.472.000	100,00%	-
611111	Belanja DBH PPh psl 21	30.927.885.539.000	30.927.885.539.000	100,00%	-
611112	Belanja DBH PPh psl 25/29 OP	1.805.854.933.000	1.805.854.933.000	100,00%	-
6112	DBH PBB	21.507.689.731.000	21.507.689.731.000	100,00%	-
611211	Belanja DBH PBB untuk Propinsi	3.423.456.743.000	3.423.456.743.000	100,00%	-
611212	Belanja DBH PBB untuk Kabupaten/Kota	18.084.232.432.000	18.084.232.432.000	100,00%	-
611213	Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Propinsi	79.000	79.000	-	-
611214	Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	468.000	468.000	-	-
611215	Belanja DBH PBB bagian Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten/Kota	9.000	9.000	-	-
6131	DBH Cukai	5.097.112.498.000	5.087.556.141.540	99,81%	9.556.356.460
613111	Belanja DBH Cukai Hasil Tembakau	5.097.112.498.000	5.087.556.141.540	99,81%	9.556.356.460
A.1.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	93.940.434.029.000	93.845.576.439.722	99,90%	94.857.589.278
6121	DBH SDA Minyak Bumi	8.944.481.225.000	8.944.481.225.000	100,00%	-
612111	Belanja DBH Minyak Bumi 15%	8.557.296.467.000	8.557.296.467.000	100,00%	-

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
612112	Belanja DBH Minyak Bumi 0,5%	-	-	0,00%	-
612113	Tambahan Belanja DBH Minyak Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	387.184.758.000	387.184.758.000	100,00%	-
6122	DBH SDA Gas Bumi	7.006.411.326.000	7.006.411.326.000	100,00%	-
612211	Belanja DBH Gas Bumi 30%	5.903.312.765.000	5.903.312.765.000	100,00%	-
612212	Belanja DBH Gas Bumi 0.5%	-	-	-	-
612213	Tambahan Belanja DBH Gas Bumi dalam rangka Otonomi Khusus	1.103.098.561.000	1.103.098.561.000	100,00%	-
6123	DBH SDA Pertambangan Umum	71.110.816.829.000	71.110.816.829.000	100,00%	-
612311	Belanja DBH Pertambangan Umum - Iuran Tetap	402.439.318.000	402.439.318.000	100,00%	-
612312	Belanja DBH Pertambangan Umum - Royalti	70.708.377.511.000	70.708.377.511.000	100,00%	-
6124	DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	1.586.280.291.000	1.586.280.291.000	100,00%	-
612411	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi Setoran Bagian Pemerintah	1.521.511.410.000	1.521.511.410.000	100,00%	-
612412	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Tetap	19.699.655.000	19.699.655.000	100,00%	-
612413	Belanja DBH Pertambangan Panas Bumi- Iuran Produksi (Royalti)	45.069.226.000	45.069.226.000	100,00%	-
6125	DBH SDA Kehutanan	1.494.254.859.000	1.420.960.624.222	95,09%	73.294.234.778
612511	Belanja DBH Kehutanan - IIUPH/IHPH	56.129.637.000	49.365.946.800	87,95%	6.763.690.200
612512	Belanja DBH Kehutanan - PSDH	651.011.514.000	603.752.461.258	92,74%	47.259.052.742
612513	Belanja DBH Kehutanan - Dana Reboisasi	787.113.708.000	767.842.216.164	97,55%	19.271.491.836
6126	DBH Perikanan	951.698.762.000	951.698.762.000	100,00%	-
612611	Belanja DBH Perikanan	951.698.762.000	951.698.762.000	100,00%	-
6127	DBH Lain-Lain	2.846.490.737.000	2.824.927.382.500	99,24%	21.563.354.500

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
612711	Belanja DBH Perkebunan Sawit	2.846.490.737.000	2.824.927.382.500	99,24%	21.563.354.500
B	Dana Alokasi Umum	433.577.123.851.000	429.210.611.278.998	98,99%	4.366.512.572.002
621111	Belanja Dana Alokasi Umum	343.531.195.289.000	343.527.595.289.000	100,00%	3.600.000.000
621121	Belanja Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	15.676.719.569.000	11.682.211.062.523	-	-
621122	Transfer Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	1.696.000.000.000	1.649.654.425.851	97,27%	46.345.574.149
621123	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	37.470.690.538.000	37.276.919.147.598	99,48%	193.771.390.402
621124	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	17.141.720.743.000	17.112.772.095.184	99,83%	28.948.647.816
621125	Transfer Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	12.182.977.404.000	12.083.638.950.842	99,18%	99.338.453.158
621126	Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	5.877.820.308.000	5.877.820.308.000	100,00%	
C	Dana Alokasi Khusus	189.327.884.084.000	183.538.473.113.006	96,94%	5.789.410.970.994
A.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55%	2.932.386.721.155
631111	Belanja DAK Fisik Reguler	-	-	-	-
631212	Belanja DAK Fisik Penugasan	53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	94,55%	2.932.386.721.155
631311	Belanja DAK Afirmasi	-	-		-
A.2.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	133.106.472.004.000	130.441.233.738.467	98,00%	2.665.238.265.533
654111	Belanja Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (TPG)	52.710.544.576.000	51.850.462.245.921	98,37%	860.082.330.079
654112	Belanja Dana Tunjangan Khusus Guru	2.075.612.911.000	2.075.612.901.562	100,00%	9.438
654211	Belanja Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	1.495.777.805.000	1.495.768.803.108	100,00%	9.001.892
654311	Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.575.943.270.000	53.303.572.819.195	99,49%	272.370.450.805
654711	Belanja Bantuan Operasional Kesehatan	12.878.672.152.000	11.481.642.480.980	89,15%	1.397.029.671.020
654712	Belanja Bantuan Operasional Keluarga Berencana	3.239.300.000.000	3.237.433.806.000	99,94%	1.866.194.000
654812	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	250.000.000.000	247.175.338.000	98,87%	2.824.662.000
654821	Belanja Dana Pelayanan Kepariwisata	133.300.000.000	132.033.514.000	99,05%	1.266.486.000

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
654721	Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS)	65.827.750.000	60.811.675.450	92,38%	5.016.074.550
655211	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	132.000.000.000	129.806.000.000	98,34%	2.194.000.000
654921	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	100,00%	-
655311	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	250.000.000.000	248.324.714.500	99,33%	1.675.285.500
655411	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	300.045.000.000	297.142.612.500	99,03%	2.902.387.500
654811	Belanja PK2UMK	-	-	-	-
654911	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.009.229.010.000	3.962.494.428.245	98,83%	46.734.581.755
654912	Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.620.244.530.000	1.550.857.706.506	95,72%	69.386.823.494
655511	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	200.000.000.000	198.119.692.500	99,06%	1.880.307.500
A.2.2	Hibah Kepada Daerah	2.398.948.245.000	2.207.162.260.694	92,01%	191.785.984.306
671111	Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan	956.998.838.000	810.103.833.952	84,65%	146.895.004.048
671121	Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan	106.439.542.000	101.257.208.226	95,13%	5.182.333.774
671131	Hibah kepada daerah yang Bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri yang Dhibahkan	1.335.509.865.000	1.295.801.218.516	97,03%	39.708.646.484
D	DANA OTONOMI KHUSUS	18.271.490.935.000	18.271.490.935.000	100,00%	-
641111	Belanja Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000	100,00%	-
641211	Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua	717.359.936.000	717.359.936.000	100,00%	-
641212	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua	770.087.411.000	770.087.411.000	100,00%	-
641213	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua	883.469.568.000	883.469.568.000	100,00%	-
641221	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Selatan	547.131.349.000	547.131.349.000	100,00%	-
641222	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Selatan	665.304.462.000	665.304.462.000	100,00%	-

REKAPITULASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN AKUN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
641223	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Selatan	704.887.057.000	704.887.057.000	100,00%	-
641231	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Tengah	848.562.171.000	848.562.171.000	100,00%	-
641232	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Tengah	825.817.651.000	825.817.651.000	100,00%	-
641233	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Tengah	1.079.234.834.000	1.079.234.834.000	100,00%	-
641241	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Pegunungan	1.073.576.144.000	1.073.576.144.000	100,00%	-
641242	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Pegunungan	861.274.294.000	861.274.294.000	100,00%	-
641243	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Pegunungan	1.395.865.798.000	1.395.865.798.000	100,00%	-
641311	Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum Provinsi Papua Barat	485.551.411.000	485.551.411.000	100,00%	-
641312	Belanja Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	636.516.027.000	636.516.027.000	100,00%	-
641313	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat	630.041.924.000	630.041.924.000	100,00%	-
641321	Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum Provinsi Papua Barat Daya	604.812.025.000	604.812.025.000	100,00%	-
641322	Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat Daya	612.263.725.000	612.263.725.000	100,00%	-
641323	Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya Provinsi Papua Barat Daya	652.742.113.000	652.742.113.000	100,00%	-
E	DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	100,00%	-
642111	Belanja Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	100,00%	-
F	DANA DESA	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	99,90%	74.072.225.402
662111	Belanja Dana Desa	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	99,90%	74.072.225.402
G	INSENTIF FISKAL	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500	87,52%	998.259.403.500
643111	Belanja Dana Insentif Daerah (DID)	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500	87,52%	998.259.403.500

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistimewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
1	Provinsi Aceh	299.381.664.000	2.310.752.304.717	347.597.422.745	832.415.031.572	-	-	17.849.482.000	4.276.993.035.000	-	8.084.988.940.034
2	Kab. Aceh Barat	156.012.645.000	600.719.250.955	70.117.977.876	104.540.067.202	16.352.190.000	236.111.096.000	19.463.679.000	-	-	1.203.316.906.033
3	Kab. Aceh Besar	20.959.933.000	812.199.599.962	123.216.956.959	174.092.631.166	-	440.656.207.377	11.580.222.000	-	-	1.582.705.550.464
4	Kab. Aceh Selatan	17.743.530.900	644.348.165.363	118.977.697.409	153.332.166.503	-	196.339.440.000	5.732.107.000	-	-	1.136.473.107.175
5	Kab. Aceh Singkil	25.825.535.400	470.828.466.416	47.392.124.545	87.836.454.401	-	96.528.106.000	2826749000	-	-	731.237.435.762
6	Kab. Aceh Tengah	32.618.311.000	636.054.438.945	103.591.559.567	120.104.233.022	16.166.612.000	222.401.032.860	0	-	-	1.130.936.187.394
7	Kab. Aceh Tenggara	14.984.792.000	600.673.489.240	53.181.665.052	127.377.543.513	-	281.179.293.300	14.041.281.000	-	-	1.091.438.064.105
8	Kab. Aceh Timur	59.678.156.000	873.126.300.179	70.773.532.264	205.645.413.122	-	395.019.867.000	0	-	-	1.604.243.268.565
9	Kab. Aceh Utara	60.387.530.000	1.010.898.431.000	135.183.439.505	339.870.696.588	588.000.000	650.152.946.200	6.164.206.000	-	-	2.203.245.249.293
10	Kab. Bireuen	18.705.584.000	890.725.305.874	107.615.692.097	206.577.244.475	-	462.263.930.000	18388780000	-	-	1.704.276.536.446
11	Kab. Pidie	25.851.546.000	908.491.582.000	107.353.295.284	180.159.831.930	252.000.000	537.067.511.000	5.531.525.000	-	-	1.764.507.291.214
12	Kab. Simeulue	15.311.610.000	454.660.452.931	33.361.821.765	63.328.919.726	-	106.573.474.000	0	-	-	673.236.278.422
13	Kota Banda Aceh	38.241.051.000	585.326.097.067	71.554.314.294	110.812.112.759	-	77.088.372.000	11.429.173.000	-	-	894.451.120.120
14	Kota Sabang	10.223.709.000	361.249.464.321	48.297.861.863	33.800.493.853	390.000.000	15.636.770.000	6.022.870.000	-	-	475.621.169.037
15	Kota Langsa	21.025.531.000	459.362.450.504	65.973.034.603	71.175.374.587	-	58.690.041.871	17.480.018.000	-	-	693.706.450.565
16	Kota Lhokseumawe	20.116.473.000	461.173.597.656	20.389.645.000	79.102.715.904	-	62.402.165.000	5.485.809.000	-	-	648.670.405.560
17	Kab. Gayo Lues	21.489.993.660	455.212.161.006	41.979.116.560	60.296.802.100	-	110.597.264.000	12.257.222.000	-	-	701.832.559.326
18	Kab. Aceh Barat Daya	22.344.192.700	463.139.262.000	43.118.825.916	76.379.767.924	-	118.693.008.000	2.884.498.000	-	-	726.559.554.540
19	Kab. Aceh Jaya	26.784.377.600	444.310.968.000	56.684.297.285	65.008.882.110	14.527.058.000	128.024.164.000	11.799.620.000	-	-	747.139.366.995
20	Kab. Nagan Raya	91.946.729.690	532.830.489.326	57.488.989.689	90.065.030.987	-	172.950.946.900	17.489.344.000	-	-	962.771.530.592
21	Kab. Aceh Tamiang	94.546.082.000	560.981.977.108	132.708.209.809	128.520.411.744	17.861.400.000	176.142.439.000	11.219.863.000	-	-	1.121.980.382.661
22	Kab. Bener Meriah	15.374.289.900	481.863.823.388	85.018.400.912	93.073.368.934	24.781.234.000	173.100.709.000	13.135.467.000	-	-	886.347.293.134
23	Kab. Pidie Jaya	14.714.769.000	440.484.715.685	52.497.099.749	75.166.534.141	-	169.168.059.000	12.630.007.000	-	-	764.661.184.575
24	Kota Subulussalam	16.653.409.900	348.449.716.280	52.831.692.326	56.339.793.356	-	69.058.548.000	0	-	-	543.333.159.862
25	Provinsi Sumatera Utara	502.332.222.000	3.004.383.591.053	386.492.978.070	1.792.672.586.084	-	-	2.905.636.500	-	-	5.688.787.013.707
26	Kab. Asahan	72.469.377.200	947.495.068.000	76.985.618.889	231.392.704.299	35.393.104.000	173.925.275.000	13.120.675.000	-	-	1.550.781.816.388
27	Kab. Dairi	20.672.303.890	647.834.166.080	64.141.894.493	165.667.411.148	-	138.561.076.000	15.166.908.000	-	-	1.050.043.759.611
28	Kab. Deli Serdang	84.469.599.000	1.746.287.560.000	103.164.736.543	590.150.076.339	-	352.469.480.800	22.145.932.000	-	-	2.898.687.384.682
29	Kab. Karo	23.163.656.000	752.945.824.000	101.278.750.464	164.332.197.605	-	205.413.540.000	12716954000	-	-	1.259.850.922.069
30	Kab. Labuhanbatu	65.592.259.000	712.608.189.736	94.082.696.267	167.223.807.120	-	77.359.788.000	3344183500	-	-	1.120.210.923.623
31	Kab. Langkat	127.582.916.700	1.288.887.971.670	61.525.428.029	373.919.333.664	-	245.497.529.000	12.860.338.000	-	-	2.110.273.517.063
32	Kab. Mandailing Natal	69.361.702.000	863.767.339.001	149.977.325.781	274.705.967.591	-	306.474.999.740	17.179.851.000	-	-	1.681.467.185.113
33	Kab. Nias	16.839.127.000	447.099.715.401	102.451.431.031	122.010.506.350	-	151.467.542.000	28.062.697.000	-	-	867.931.018.782
34	Kab. Simalungun	71.553.917.510	1.334.875.047.531	204.755.773.878	344.672.387.437	-	343.668.854.000	0	-	-	2.299.525.980.356
35	Kab. Tapanuli Selatan	168.845.530.960	667.005.701.148	103.143.810.687	142.652.922.138	-	166.715.317.000	17.640.829.000	-	-	1.266.004.110.933
36	Kab. Tapanuli Tengah	32.256.084.000	661.616.467.747	94.650.951.251	163.284.578.108	-	142.095.967.000	0	-	-	1.093.904.048.106
37	Kab. Tapanuli Utara	58.093.008.000	681.275.700.613	92.466.086.003	191.451.590.796	-	199.129.952.200	6.867.270.000	-	-	1.229.283.607.612
38	Kab. Toba Samosir	23.092.308.000	570.252.361.330	197.910.937.628	128.029.365.310	-	177.678.006.000	6.938.526.000	-	-	1.103.901.504.268
39	Kota Binjai	26.104.118.000	583.478.222.479	30.333.114.358	119.594.608.783	-	-	20.872.182.000	-	-	780.382.245.620
40	Kota Medan	212.265.266.000	1.927.311.908.517	30.396.472.723	519.948.710.927	1.304.000.000	-	0	-	-	2.691.226.358.167
41	Kota Pematang Siantar	25.737.529.000	606.686.930.609	17.273.019.319	111.479.341.037	-	-	6.737.985.000	-	-	767.914.804.965
42	Kota Sibolga	15.774.963.000	416.863.636.472	39.617.484.382	48.660.383.562	-	-	6.873.527.000	-	-	527.789.974.416
43	Kota Tanjung Balai	15.629.205.000	420.334.460.000	34.863.740.727	60.747.810.441	-	-	0	-	-	531.575.216.168
44	Kota Tebing Tinggi	15.840.505.000	426.303.042.397	19.985.128.958	71.301.108.853	-	-	0	-	-	533.429.785.208
45	Kota Padang Sidempuan	27.031.829.000	512.258.818.554	43.128.045.094	94.450.740.869	-	33.396.536.000	0	-	-	710.265.969.517
46	Kab. Pakpak Bharat	14.042.658.000	347.190.004.127	88.313.517.493	43.925.895.391	-	41.315.863.400	15.378.725.000	-	-	550.166.663.411
47	Kab. Nias Selatan	28.526.689.000	683.537.602.435	141.097.087.052	209.820.858.039	-	403.004.364.499	20083542000	-	-	1.486.070.143.025
48	Kab. Humbang Hasundutan	18.482.759.000	522.268.938.117	77.128.265.208	131.185.500.056	-	128.998.873.000	14.782.971.000	-	-	892.847.306.381
49	Kab. Serdang Bedagai	52.491.484.000	847.611.361.527	121.669.410.229	223.050.076.834	16.649.533.000	210.727.332.038	12.398.992.000	-	-	1.484.598.189.628

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistimewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
50	Kab. Samosir	15.662.253.000	451.424.590.440	109.114.459.606	96.176.367.459	-	103.519.877.000	18.387.061.000	-	-	794.284.608.505
51	Kab. Batu Bara	36.650.074.000	614.323.329.791	85.717.079.964	161.709.933.292	-	136.017.878.000	12708969000	-	-	1.047.127.264.047
52	Kab. Padang Lawas	44.987.557.000	536.977.028.870	72.270.470.800	135.419.673.395	13.207.680.000	237.180.396.000	5737339500	-	-	1.045.780.145.565
53	Kab. Padang Lawas Utara	54.966.964.750	557.284.595.848	69.577.005.027	134.212.641.474	-	299.951.847.088	13.275.425.000	-	-	1.129.268.479.187
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	86.741.317.000	518.138.303.047	50.365.770.909	104.943.622.539	-	60.527.904.000	0	-	-	820.716.917.495
55	Kab. Labuhanbatu Utara	49.987.152.000	615.462.632.960	65.664.168.805	148.204.807.573	-	89.845.361.000	13805352000	-	-	982.969.474.338
56	Kab. Nias Utara	22.711.392.000	436.829.744.544	155.836.310.041	121.121.438.545	24.532.410.000	110.521.967.400	22.216.995.000	-	-	893.770.257.530
57	Kab. Nias Barat	16.644.997.750	366.333.310.000	135.483.673.956	146.107.222.683	-	94.700.273.627	19425986000	-	-	778.695.464.016
58	Kota Gunungsitoli	16.695.220.750	443.505.382.000	38.994.929.687	81.059.171.322	-	85.506.324.000	18.183.837.000	-	-	683.944.864.759
59	Provinsi Sumatera Barat	159.666.956.000	2.146.789.947.987	217.864.557.320	923.428.944.561	-	-	13.249.284.000	-	-	3.460.999.689.868
60	Kab. Lima Puluh Kota	27.187.870.000	774.792.478.348	43.139.289.223	209.937.722.674	-	84.689.970.000	7.123.654.000	-	-	1.146.870.984.245
61	Kab. Agam	21.282.398.000	860.911.170.294	58.347.668.989	241.778.462.535	738.000.000	97.042.778.000	7.527.067.000	-	-	1.287.627.544.818
62	Kab. Kepulauan Mentawai	15.395.563.000	593.136.045.604	60.558.056.051	86.784.724.912	-	46.496.234.000	20.978.611.000	-	-	823.349.234.567
63	Kab. Padang Pariaman	13.816.414.000	784.480.463.956	53.623.510.594	223.979.068.207	-	103.458.459.000	27.827.229.000	-	-	1.207.185.144.757
64	Kab. Pasaman	14.936.952.000	610.086.223.854	18.781.116.832	158.433.393.997	8.583.193.000	71.637.391.000	6.916.344.000	-	-	889.374.614.483
65	Kab. Pesisir Selatan	26.918.577.710	905.022.519.052	77.657.368.138	256.408.605.205	9.260.695.297	167.649.926.000	0	-	-	1.442.917.691.402
66	Kab. Sijunjung	31.660.960.000	562.304.160.687	28.654.051.202	134.119.587.900	-	62.949.590.000	0	-	-	819.688.349.789
67	Kab. Solok	17.366.927.000	703.524.662.449	96.229.065.307	96.229.065.307	-	81.252.831.000	7.216.752.000	-	-	1.119.501.499.625
68	Kab. Tanah Datar	15.431.384.000	713.269.653.237	83.154.552.139	179.800.977.467	600.000.000	74.085.768.000	22.334.288.000	-	-	1.088.676.622.843
69	Kota Bukit Tinggi	11.505.073.710	449.518.151.028	31.503.797.544	65.858.310.591	-	-	7.154.115.000	-	-	565.539.447.873
70	Kota Padang Panjang	8.404.412.000	375.860.015.308	15.722.870.984	37.626.533.897	-	-	21.772.057.000	-	-	459.385.889.189
71	Kota Padang	77.139.784.000	1.266.301.334.000	19.407.913.008	344.856.402.646	3.732.000.000	-	8278678000	-	-	1.719.716.111.654
72	Kota Payakumbuh	9.509.608.000	453.856.467.847	11.649.788.700	81.164.882.661	1.536.000.000	-	18.975.765.000	-	-	576.692.512.208
73	Kota Sawahlunto	34.230.177.000	381.088.647.217	33.458.550.676	47.948.696.990	-	21.553.195.000	13.892.503.000	-	-	532.172.769.883
74	Kota Solok	14.766.168.000	399.200.128.012	19.799.744.550	44.915.679.233	-	-	15.375.053.000	-	-	494.056.772.795
75	Kota Pariaman	10.925.307.000	417.506.738.000	34.147.923.493	60.968.784.329	-	41.844.428.000	0	-	-	565.393.180.822
76	Kab. Pasaman Barat	38.708.370.000	679.398.015.756	43.857.728.354	182.884.924.173	-	99.809.761.000	7.032.779.000	-	-	1.051.691.578.283
77	Kab. Dharmasraya	34.320.905.000	512.944.707.932	34.827.165.717	132.837.457.681	-	55.320.687.000	20.745.042.000	-	-	790.789.965.330
78	Kab. Solok Selatan	47.065.111.000	477.131.838.892	39.695.274.901	102.709.678.980	-	42.891.662.000	7078872000	-	-	716.572.437.773
79	Provinsi Riau	1.268.469.397.890	1.584.766.821.838	235.324.752.210	816.965.899.649	-	-	5.862.295.000	-	-	3.911.389.166.587
80	Kab. Bengkalis	2.026.649.195.000	394.237.768.555	41.514.492.633	261.241.885.009	-	131.472.054.870	15.131.834.000	-	-	2.870.247.230.067
81	Kab. Indragiri Hilir	265.016.918.000	919.817.829.148	40.813.984.596	277.332.073.136	-	183.427.863.000	2.810.478.500	-	-	1.689.219.146.380
82	Kab. Indragiri Hulu	219.836.303.000	722.080.750.064	64.767.764.271	185.653.739.799	-	155.041.071.998	0	-	-	1.347.379.629.132
83	Kab. Kampar	586.532.670.620	980.519.509.748	106.546.380.763	367.270.442.347	2.238.000.000	234.214.379.400	2.876.155.500	-	-	2.280.197.538.378
84	Kab. Kuantan Singingi	153.341.345.620	664.907.572.978	24.914.813.590	158.866.427.339	-	180.683.852.000	7.154.301.000	-	-	1.189.868.312.527
85	Kab. Pelalawan	352.206.460.000	644.939.341.000	57.615.499.661	184.587.296.414	-	104.036.178.000	13.461.113.000	-	-	1.356.845.888.075
86	Kab. Rokan Hilir	711.005.112.620	630.638.187.855	56.796.838.329	261.947.929.631	-	148.709.668.100	0	-	-	1.809.097.736.535
87	Kab. Rokan Hulu	277.042.979.000	758.207.599.872	53.692.777.429	241.273.979.037	-	139.469.171.377	18.425.595.000	-	-	1.488.112.101.715
88	Kab. Siak	831.744.150.620	449.270.117.091	47.948.341.550	215.569.354.351	-	116.904.655.270	19.908.244.000	-	-	1.681.344.862.882
89	Kota Dumai	367.551.654.620	489.493.057.306	38.187.983.525	136.098.235.941	-	-	33591087000	-	-	1.064.922.018.392
90	Kota Pekanbaru	248.140.464.130	968.243.226.003	78.876.438.132	323.160.718.378	-	-	10.358.708.500	-	-	1.628.779.555.143
91	Kab. Kepulauan Meranti	161.655.366.000	433.071.545.428	143.879.146.253	112.362.776.645	-	97.240.042.000	0	-	-	948.208.876.326
92	Provinsi Jambi	424.333.130.540	1.381.586.769.000	234.122.462.842	434.141.563.759	20.760.997.313	-	5.622.186.000	-	-	2.500.567.129.454
93	Kab. Batanghari	263.532.846.640	628.053.940.679	69.320.124.627	134.148.794.763	-	101.677.831.000	0	-	-	1.197.733.537.709
94	Kab. Bungo	134.955.777.170	611.750.768.409	52.277.917.633	128.991.310.563	28.867.450.516	123.241.092.981	13.660.037.000	-	-	1.093.744.354.272
95	Kab. Kerinci	61.405.234.000	625.662.000.939	35.000.808.738	134.969.003.182	-	215.842.973.030	5.774.567.000	-	-	1.078.654.586.889
96	Kab. Merangin	95.347.560.250	732.006.415.432	86.635.359.106	170.594.186.001	-	174.932.338.000	12.829.287.000	-	-	1.272.345.145.789
97	Kab. Muaro Jambi	240.121.527.000	684.602.060.000	103.749.735.679	169.954.815.602	-	131.843.866.000	20.037.293.000	-	-	1.350.309.297.281
98	Kab. Sarolangun	229.097.777.070	608.126.405.118	39.180.407.447	122.530.840.284	-	129.346.708.610	6.048.373.000	-	-	1.134.330.511.529
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	621.910.788.000	550.052.374.982	69.578.191.171	136.564.423.606	-	100.455.713.000	20.084.947.000	-	-	1.498.646.437.759
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	212.384.496.670	564.187.609.000	96.245.559.678	110.822.422.659	534.000.000	71.208.483.000	6.808.647.000	-	-	1.062.191.218.007

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistimewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
101	Kab. Tebo	153.850.866.000	557.520.304.613	48.167.477.573	136.155.648.743	24.533.453.000	113.934.817.000	12.454.852.000	-	-	1.046.617.418.929
102	Kota Jambi	111.847.634.000	813.729.510.984	46.839.961.290	187.767.067.379	1.458.000.000	-	11.796.475.000	-	-	1.173.438.648.653
103	Kota Sungai Penuh	50.588.187.000	456.377.639.574	29.632.981.639	59.376.747.216	-	50.414.782.000	7.085.261.000	-	-	653.475.598.429
104	Provinsi Sumatera Selatan	2.126.112.045.840	1.806.673.215.634	236.102.516.086	954.913.672.263	-	-	6625541000	-	-	5.130.426.990.823
105	Kab. Lahat	1.392.074.808.010	744.459.327.328	25.413.014.217	189.752.262.965	10.355.475.000	289.277.332.200	11.801.242.000	-	-	2.663.133.461.720
106	Kab. Musi Banyuasin	1.841.244.437.190	491.100.513.274	140.633.056.225	286.282.454.918	7.507.176.000	229.955.545.000	24.672.901.000	-	-	3.021.396.083.607
107	Kab. Musi Rawas	570.463.525.690	647.628.297.606	75.893.878.396	170.144.440.038	13.242.400.000	173.735.014.000	25.620.175.000	-	-	1.676.727.730.730
108	Kab. Muara Enim	1.660.027.313.000	676.353.374.468	62.807.794.258	243.246.667.225	-	223.347.712.000	6.375.586.000	-	-	2.872.158.446.951
109	Kab. Ogan Komering Ilir	220.035.084.690	1.114.998.406.115	74.258.633.500	326.934.616.463	-	297.621.127.000	18.478.838.000	-	-	2.052.326.705.768
110	Kab. Ogan Komering Ulu	255.674.391.000	662.537.753.466	30.864.718.321	152.236.097.964	-	131.706.285.000	0	-	-	1.233.019.245.751
111	Kota Palembang	284.813.671.000	1.440.282.648.332	82.310.765.943	460.119.352.220	5.590.000.000	-	0	-	-	2.273.116.437.495
112	Kota Prabumulih	286.625.992.000	441.113.678.078	19.417.261.151	82.570.232.744	-	10.560.088.000	20.112.860.000	-	-	860.400.111.973
113	Kota Pagar Alam	238.145.195.000	402.957.182.581	23.916.324.605	62.096.288.858	636.000.000	-	6.234.476.000	-	-	733.985.447.044
114	Kota Lubuk Linggau	146.029.690.000	479.923.641.794	24.603.843.506	93.350.393.233	-	-	10.332.043.500	-	-	754.239.612.033
115	Kab. Banyuasin	321.075.539.690	1.078.974.723.811	157.032.179.677	352.696.880.785	22.733.576.000	274.550.458.600	14.490.258.000	-	-	2.221.553.616.563
116	Kab. Ogan Ilir	223.794.607.190	666.987.440.000	87.435.424.491	193.611.169.665	900.000.000	198.567.771.000	26.586.084.000	-	-	1.397.882.496.346
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	152.356.272.500	865.348.315.419	75.032.328.775	236.974.094.394	28.541.351.000	270.231.772.000	12.981.313.000	-	-	1.641.465.447.088
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	179.111.943.000	652.616.468.300	97.118.843.802	138.777.735.120	-	217.285.528.400	0	-	-	1.284.910.518.622
119	Kab. Empat Lawang	212.321.664.500	448.237.312.735	63.272.492.767	89.734.746.482	13.279.634.000	129.517.733.000	9.278.223.000	-	-	965.641.806.484
120	Kab. Penukal Abab Lematang	697.000.884.500	338.085.355.342	22.011.908.389	81.352.831.154	-	63.356.444.000	12963416000	-	-	1.214.770.839.385
121	Kab. Musi Rawas Utara	395.586.966.000	395.160.534.412	102.646.926.502	70.137.487.605	17.371.601.000	82.906.899.000	33353070000	-	-	1.097.163.484.519
122	Provinsi Bengkulu	126.019.554.000	1.325.126.343.472	262.114.688.943	312.643.829.262	34.912.473.000	-	15.676.629.000	-	-	2.076.493.517.677
123	Kab. Bengkulu Selatan	90.740.379.000	556.582.917.000	88.263.268.909	107.798.239.235	-	110.220.296.000	12.365.304.000	-	-	965.970.404.144
124	Kab. Bengkulu Utara	134.552.672.000	667.705.709.683	77.517.550.573	158.378.602.307	600.000.000	179.734.541.000	13.193.711.000	-	-	1.231.682.786.563
125	Kab. Rejang Lebong	33.804.037.000	605.857.429.716	65.947.186.065	124.471.435.800	25.498.275.000	107.287.706.000	8.936.579.000	-	-	971.802.648.581
126	Kota Bengkulu	38.269.446.000	687.701.464.591	74.157.989.389	155.382.234.638	396.000.000	-	6.426.780.000	-	-	962.333.914.618
127	Kab. Kaur	59.723.619.000	439.585.495.494	118.090.890.487	88.853.250.544	552.000.000	144.481.219.600	0	-	-	851.286.475.125
128	Kab. Seluma	100.156.565.000	526.582.235.243	98.722.658.418	116.444.601.071	-	151.226.787.000	5687018000	-	-	998.819.864.732
129	Kab. Mukomuko	46.091.357.000	490.522.271.362	103.240.561.722	97.217.829.197	-	123.118.760.000	0	-	-	860.190.779.281
130	Kab. Lebong	46.848.817.500	411.401.897.871	79.379.997.755	63.643.915.538	-	74.069.530.200	11748284000	-	-	687.092.442.864
131	Kab. Kepahiang	22.499.879.000	443.051.743.781	57.555.414.266	77.750.675.585	28.640.111.000	84.933.646.000	0	-	-	714.431.469.632
132	Kab. Bengkulu Tengah	80.936.298.000	437.082.419.014	35.880.026.336	83.958.683.637	-	109.600.203.752	6.057.622.500	-	-	753.515.253.239
133	Provinsi Lampung	157.226.172.000	2.016.506.597.065	251.303.028.753	887.102.638.450	-	-	27.263.797.000	0	0	3.339.402.233.268
134	Kab. Lampung Barat	16.066.851.000	541.231.171.108	119.832.295.786	139.370.729.918	-	118.449.735.000	20.106.738.000	0	0	955.057.520.812
135	Kab. Lampung Selatan	34.175.876.450	1.134.196.170.156	151.055.180.896	339.681.555.250	-	260.644.885.000	24.260.630.000	0	0	1.944.014.297.752
136	Kab. Lampung Tengah	49.335.233.060	1.479.949.618.885	72.194.042.244	437.945.605.333	1.824.000.000	318.990.551.000	7321371000	0	0	2.367.560.421.522
137	Kab. Lampung Utara	21.015.138.000	969.322.588.778	30.275.504.041	230.089.328.562	-	209.794.103.000	0	0	0	1.460.496.662.381
138	Kab. Lampung Timur	58.711.425.000	1.193.360.241.000	112.366.030.326	338.524.538.758	-	271.562.076.800	0	0	0	1.974.524.311.884
139	Kab. Tanggamus	60.564.027.690	827.753.649.258	81.992.612.094	249.640.261.827	-	265.453.475.654	18.800.460.000	0	0	1.504.204.486.523
140	Kab. Tulang Bawang	29.439.049.000	632.625.385.000	54.741.863.704	171.924.190.550	-	135.119.881.000	21321275000	0	0	1.045.171.644.254
141	Kab. Way Kanan	27.228.290.770	700.943.692.000	98.157.465.494	206.097.311.605	-	200.664.640.000	6.264.838.000	0	0	1.239.356.237.869
142	Kota Bandar Lampung	59.182.911.430	1.151.553.923.976	48.432.906.052	317.665.602.280	-	-	17.507.567.000	0	0	1.594.342.910.738
143	Kota Metro	17.847.617.000	471.611.302.838	27.260.372.197	88.428.708.970	-	-	28.837.763.000	0	0	633.985.764.005
144	Kab. Pesawaran	19.034.781.420	678.999.139.339	71.800.132.162	174.756.412.212	-	147.612.573.000	5.653.936.000	0	0	1.097.856.974.133
145	Kab. Pringsewu	17.244.403.000	653.333.194.996	35.204.268.675	172.558.601.746	-	121.678.991.000	19.301.985.000	0	0	1.019.321.444.417
146	Kab. Mesuji	27.995.201.000	446.477.532.845	153.827.159.036	98.829.928.442	-	92.336.929.909	21.369.597.000	0	0	840.836.348.232
147	Kab. Tulang Bawang Barat	16.911.765.290	490.108.654.000	43.599.698.570	120.248.293.656	-	92.869.598.000	12.992.173.000	0	0	776.730.182.516
148	Kab. Pesisir Barat	18.125.886.000	441.096.423.758	24.015.725.107	84.841.704.002	-	96.753.871.000	22.923.226.000	0	0	687.756.835.867
149	Provinsi DKI Jakarta	16.378.897.124.000	368.173.270.201	0	3.189.704.366.225	576.240.722.024	-	44.090.217.000	-	-	20.557.105.699.450
150	Provinsi Jawa Barat	1.968.045.656.500	3.664.312.930.238	486.211.515.292	4.614.436.779.771	-	-	36.848.779.000	-	-	10.769.855.660.801
151	Kab. Bandung	526.383.405.000	2.391.193.713.000	243.201.633.493	972.430.562.950	10.293.207.000	378.440.062.000	39.677.140.000	-	-	4.561.619.723.443

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistimewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
152	Kab. Bekasi	489.315.568.000	1.395.521.388.000	73.997.163.918	816.156.938.691	-	262.200.705.000	24.121.358.000	-	-	3.061.313.121.609
153	Kab. Bogor	365.683.170.000	2.512.510.342.000	88.111.415.414	1.480.711.135.100	-	607.936.984.700	2.781.583.000	-	-	5.057.734.630.214
154	Kab. Ciamis	60.870.206.000	1.222.245.533.000	132.291.068.568	405.030.048.655	-	269.210.400.000	20.421.137.000	-	-	2.110.068.393.223
155	Kab. Cianjur	115.405.177.000	1.813.491.002.000	153.020.883.218	807.654.530.219	-	457.358.593.000	25.882.522.000	-	-	3.372.812.707.437
156	Kab. Cirebon	85.205.494.750	1.686.411.352.564	176.436.126.862	705.867.496.588	-	472.546.922.200	5.461.110.000	-	-	3.131.928.502.964
157	Kab. Garut	308.117.438.000	1.981.439.010.462	137.349.116.423	930.433.698.253	17.099.210.750	499.383.487.000	40.867.435.000	-	-	3.914.689.395.888
158	Kab. Indramayu	197.867.290.150	1.451.818.236.000	101.051.736.804	517.314.596.898	-	352.757.964.000	0	-	-	2.620.809.823.852
159	Kab. Karawang	442.151.562.440	1.456.054.337.461	130.921.880.175	676.210.763.497	5.610.000.000	356.699.344.000	18.969.890.000	-	-	3.086.617.777.573
160	Kab. Kuningan	58.975.637.000	1.195.755.837.482	141.138.380.294	482.844.723.440	-	354.770.192.000	10.539.334.500	-	-	2.244.024.104.716
161	Kab. Majalengka	80.658.811.000	1.255.452.403.615	168.996.421.083	451.732.829.738	-	333.449.644.000	11.785.482.000	-	-	2.302.075.591.436
162	Kab. Purwakarta	106.758.402.000	867.306.027.531	109.123.075.941	340.462.031.556	1.338.000.000	194.840.786.000	12.757.930.000	-	-	1.632.586.253.028
163	Kab. Subang	191.200.471.000	1.356.909.530.539	146.979.086.789	537.201.826.265	19.945.120.000	283.229.717.000	13.471.894.000	-	-	2.548.937.645.593
164	Kab. Sukabumi	216.568.518.990	1.794.375.618.900	183.357.387.337	714.332.026.368	-	450.110.304.788	5.451.314.000	-	-	3.364.195.170.383
165	Kab. Sumedang	123.285.686.000	1.145.078.496.000	165.994.499.374	458.909.110.001	4.658.979.735	280.685.683.000	20379684000	-	-	2.198.992.138.110
166	Kab. Tasikmalaya	81.961.486.000	1.566.794.628.309	202.373.578.508	610.057.226.779	5.195.352.360	406.854.234.000	15.091.502.000	-	-	2.888.328.007.956
167	Kota Bandung	347.178.948.000	1.746.159.420.105	46.928.199.502	671.671.557.953	4.463.898.000	-	0	-	-	2.816.402.023.560
168	Kota Bekasi	169.771.078.000	1.342.884.952.000	37.622.389.727	619.134.928.658	-	-	5.688.346.000	-	-	2.175.101.694.385
169	Kota Bogor	97.958.579.000	858.600.617.000	44.829.645.150	329.085.258.450	-	-	28047664000	-	-	1.358.521.763.600
170	Kota Cirebon	66.848.174.000	606.158.280.000	28.244.349.486	159.269.475.078	3.936.526.784	-	0	-	-	864.456.805.348
171	Kota Depok	117.072.042.000	1.052.596.757.786	29.719.164.218	450.219.769.448	1.962.000.000	-	27.892.984.000	-	-	1.679.462.717.452
172	Kota Sukabumi	63.548.759.000	515.098.929.142	31.119.020.494	130.801.462.467	-	-	20857154000	-	-	761.425.325.103
173	Kota Tasikmalaya	64.968.899.000	812.061.731.788	42.322.375.329	245.210.177.960	-	-	0	-	-	1.164.563.184.077
174	Kota Cimahi	83.901.723.000	582.607.386.486	15.755.493.734	159.511.598.542	-	-	38.445.593.000	-	-	880.221.794.762
175	Kota Banjar	55.100.050.000	391.671.944.842	29.119.115.904	82.662.494.469	-	18.143.664.000	0	-	-	576.697.269.215
176	Kab. Bandung Barat	94.833.683.000	1.222.075.022.945	157.126.319.747	484.941.469.157	-	246.984.621.850	0	-	-	2.205.961.116.699
177	Kab. Pangandaran	59.610.690.000	551.850.983.825	63.473.106.623	147.416.903.335	-	99.946.557.260	24756756000	-	-	947.054.997.043
178	Provinsi Jawa Tengah	786.723.151.000	3.819.010.791.028	473.940.472.839	3.478.191.296.352	-	-	37.997.568.000	0	0	8.595.863.279.219
179	Kab. Banjarnegara	32.604.408.000	987.112.599.000	92.247.909.045	339.206.605.613	12.377.889.625	287.835.862.000	5.812.214.000	0	0	1.757.197.487.283
180	Kab. Banyumas	43.978.163.000	1.461.885.991.064	159.502.943.840	573.245.228.506	13.411.593.892	358.605.511.000	20.771.888.000	0	0	2.631.401.319.302
181	Kab. Batang	34.458.242.000	849.769.534.054	66.343.023.671	261.717.582.697	480.000.000	227.521.941.000	5.544.353.000	0	0	1.445.834.676.422
182	Kab. Bloro	231.109.998.000	1.016.647.554.651	131.612.252.795	324.597.839.866	-	268.842.253.000	26.113.419.000	0	0	1.998.923.317.312
183	Kab. Boyolali	45.929.824.000	1.036.731.801.508	43.775.264.870	312.562.508.686	-	270.805.632.000	21.405.258.000	0	0	1.731.210.289.064
184	Kab. Brebes	33.815.087.000	1.491.148.723.358	204.793.603.315	523.951.346.618	3.597.162.000	342.334.270.000	11.439.924.500	0	0	2.611.080.116.791
185	Kab. Cilacap	55.845.941.000	1.509.157.093.419	160.552.843.643	590.749.390.439	3.377.957.000	332.740.035.000	8.533.806.500	0	0	2.660.957.067.001
186	Kab. Demak	59.062.189.000	961.884.931.000	166.945.979.977	376.524.208.625	5.610.000.000	265.035.415.000	20.070.251.000	0	0	1.855.132.974.602
187	Kab. Grobogan	53.460.340.000	1.255.940.649.224	106.116.914.227	436.598.775.098	1.224.000.000	316.479.028.000	25.606.807.000	0	0	2.195.426.513.549
188	Kab. Jepara	43.634.788.000	1.090.383.575.992	64.643.902.620	361.658.296.913	750.000.000	214.647.287.000	26.250.541.000	0	0	1.801.968.391.525
189	Kab. Karanganyar	41.655.485.000	1.016.100.904.315	202.719.247.174	332.614.442.129	1.488.000.000	181.573.854.000	32.701.326.000	0	0	1.808.853.258.618
190	Kab. Kebumen	30.012.736.000	1.306.369.023.000	68.388.503.136	476.600.126.035	18.563.009.000	461.258.494.000	20.849.462.000	0	0	2.382.041.353.171
191	Kab. Kendal	50.558.889.000	1.037.379.763.414	74.933.521.059	357.878.909.095	-	267.745.085.620	6.963.191.000	0	0	1.795.459.359.188
192	Kab. Klaten	44.152.396.000	1.260.433.951.508	46.602.446.617	381.628.136.513	-	383.502.807.000	14.737.263.000	0	0	2.131.057.000.638
193	Kab. Kudus	285.805.673.000	831.900.130.163	18.259.327.340	234.446.137.074	-	138.158.391.000	20.349.487.000	0	0	1.528.919.145.577
194	Kab. Magelang	38.861.046.000	1.090.739.282.000	142.710.479.259	362.460.629.761	10.495.547.244	367.113.861.000	10.493.738.500	0	0	2.022.874.583.764
195	Kab. Pati	35.441.538.000	1.239.686.514.000	131.894.544.330	386.047.021.193	-	386.408.463.800	20592451000	0	0	2.200.070.532.323
196	Kab. Pekalongan	26.698.374.000	966.058.393.723	175.116.703.582	312.495.553.239	1.314.000.000	269.854.578.000	2.815.645.500	0	0	1.754.353.248.044
197	Kab. Pemalang	30.722.605.000	1.265.304.393.000	102.178.208.438	470.395.436.832	-	266.151.514.000	5.719.565.000	0	0	2.140.471.722.270
198	Kab. Purbalingga	28.422.252.000	920.284.294.344	72.674.282.379	330.912.374.528	777.424.000	257.444.509.000	0	0	0	1.610.515.136.251
199	Kab. Purworejo	26.732.752.000	1.028.441.374.978	86.119.209.955	86.119.209.955	1.412.500.000	386.689.738.000	7.523.866.000	0	0	1.818.079.376.758
200	Kab. Rembang	62.243.353.000	819.385.956.001	96.272.803.298	223.458.225.119	-	251.373.254.000	20.980.893.000	0	0	1.473.714.484.418
201	Kab. Semarang	42.457.465.000	999.095.996.338	105.286.901.221	340.209.273.678	-	208.741.658.000	26.386.953.000	0	0	1.722.178.247.237
202	Kab. Sragen	26.700.731.000	1.093.111.750.474	72.521.796.541	328.770.561.565	-	216.375.115.000	16.365.948.000	0	0	1.753.845.902.580

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
203	Kab. Sukoharjo	34.956.027.000	934.899.291.114	41.106.536.616	275.723.855.604	-	162.947.477.000	22.460.016.000	0	0	1.472.093.203.334
204	Kab. Tegal	33.487.944.000	1.235.995.119.000	79.999.415.685	459.094.712.946	3.071.648.000	316.239.825.000	12.930.103.000	0	0	2.140.818.767.631
205	Kab. Temanggung	64.269.961.000	843.895.369.956	67.587.633.850	274.152.285.885	-	246.690.892.000	28.501.104.000	0	0	1.525.097.246.691
206	Kab. Wonogiri	37.744.312.000	1.171.361.098.782	73.478.919.244	398.271.310.383	-	261.121.318.000	41.541.588.000	0	0	1.983.518.546.409
207	Kab. Wonosobo	33.367.117.000	877.850.621.000	126.115.328.554	298.088.678.599	10.551.382.835	250.203.172.000	19.550.481.000	0	0	1.615.726.780.988
208	Kota Magelang	26.679.397.000	453.244.643.000	42.314.846.771	71.118.784.716	-	-	16.270.817.000	0	0	609.628.488.487
209	Kota Pekalongan	28.032.958.000	476.430.586.000	33.996.599.527	104.407.117.198	-	-	6.040.112.000	0	0	648.907.372.725
210	Kota Salatiga	25.854.862.000	463.728.380.299	33.113.491.141	87.612.338.193	-	-	33.500.801.000	0	0	643.809.872.633
211	Kota Semarang	184.585.547.000	1.277.400.412.000	14.632.547.321	461.400.265.179	-	-	30.953.583.000	0	0	1.968.972.354.500
212	Kota Surakarta	48.753.160.000	874.825.358.108	61.874.939.100	222.433.238.988	6.000.000.000	-	7.024.757.000	0	0	1.220.911.453.196
213	Kota Tegal	27.376.368.000	495.865.292.000	15.639.770.171	110.620.740.130	-	-	13.119.411.000	0	0	662.621.581.301
214	Provinsi DI Yogyakarta	88.339.035.000	1.337.180.068.000	156.735.319.268	518.508.891.583	-	-	12.089.917.000	-	1.420.000.000.000	3.532.853.230.851
215	Kab. Bantul	27.692.843.000	1.022.019.834.045	116.981.478.484	327.398.762.230	2.590.000.000	127.393.902.000	51.233.491.000	-	-	1.675.310.310.759
216	Kab. Gunung Kidul	16.791.668.000	981.792.404.909	67.163.244.853	328.404.813.854	600.000.000	181.087.303.000	28.474.034.000	-	-	1.604.313.468.616
217	Kab. Kulon Progo	16.821.841.000	729.450.461.000	77.096.321.028	211.247.830.266	936.000.000	105.234.651.000	36.800.569.000	-	-	1.177.587.673.294
218	Kab. Sleman	52.499.702.000	1.047.026.829.000	48.325.090.003	361.736.903.290	8.391.453.273	125.833.460.000	50.116.944.000	-	-	1.693.930.381.566
219	Kota Yogyakarta	44.230.588.000	673.920.861.000	45.033.949.392	165.618.590.212	1.336.000.000	-	53.929.174.000	-	-	984.069.162.604
220	Provinsi Jawa Timur	2.414.171.003.000	4.460.926.689.021	589.874.038.610	3.803.168.742.992	34.389.236.000	-	17.964.673.000	-	-	11.320.494.382.623
221	Kab. Bangkalan	76.050.527.230	1.037.322.907.359	83.238.481.513	357.558.259.468	-	313.026.348.040	6.298.428.000	-	-	1.873.494.951.610
222	Kab. Banyuwangi	168.656.756.000	1.462.844.517.762	57.922.959.174	448.526.938.017	2.849.524.000	230.822.914.000	51.161.561.000	-	-	2.422.785.169.953
223	Kab. Blitar	83.169.689.000	1.173.204.387.075	65.826.202.458	357.811.739.136	-	237.199.256.000	35033727000	-	-	1.952.245.000.669
224	Kab. Bojonegoro	2.686.392.097.000	970.298.067.448	9.897.837.585	353.789.688.003	-	409.159.619.000	21.034.072.000	-	-	4.450.571.381.036
225	Kab. Bondowoso	113.272.530.000	921.645.132.000	43.812.497.652	251.054.093.166	-	225.656.784.000	5.765.570.000	-	-	1.561.206.606.818
226	Kab. Gresik	226.894.379.000	976.604.015.000	98.720.516.184	357.995.932.172	186.000.000	321.507.175.000	36.385.778.000	-	-	2.018.293.795.356
227	Kab. Jember	199.731.231.000	1.832.793.869.706	104.185.840.707	568.807.870.795	-	325.303.772.200	5.700.290.000	-	-	3.036.522.874.408
228	Kab. Jombang	217.811.600.000	1.104.018.395.235	37.313.721.500	368.218.599.532	-	318.763.074.000	32.995.643.000	-	-	2.079.121.033.267
229	Kab. Kediri	137.434.204.000	1.263.604.809.829	87.565.044.605	416.380.424.348	-	384.897.284.000	31.746.494.000	-	-	2.321.628.260.782
230	Kab. Lamongan	231.871.365.000	1.240.024.937.541	172.585.755.986	368.958.187.471	-	422.772.644.000	46.488.968.000	-	-	2.482.701.857.998
231	Kab. Lumajang	82.193.004.000	979.563.765.934	99.973.953.623	302.664.152.279	2.238.000.000	221.147.868.000	23.022.995.000	-	-	1.710.803.738.836
232	Kab. Madiun	201.177.421.000	902.638.863.247	99.812.991.485	218.775.697.129	-	199.518.213.000	42.632.874.000	-	-	1.664.556.059.861
233	Kab. Magetan	77.389.525.000	967.177.613.745	52.451.064.719	230.111.129.131	3.432.558.361	193.589.491.000	35.640.311.000	-	-	1.559.791.692.956
234	Kab. Malang	176.685.711.000	1.828.735.676.763	165.367.528.443	626.934.078.412	7.351.683.000	467.936.472.000	21.476.683.000	-	-	3.294.487.832.618
235	Kab. Mojokerto	94.465.901.000	993.236.711.000	26.148.220.115	323.153.540.113	14.902.529.000	298.426.449.000	54.818.754.000	-	-	1.805.152.104.228
236	Kab. Nganjuk	199.111.212.000	1.134.122.785.119	122.512.276.643	344.385.892.648	-	272.637.178.400	27.221.660.000	-	-	2.099.991.004.810
237	Kab. Ngawi	198.056.912.000	1.077.293.978.868	138.794.944.785	277.694.769.144	900.000.000	237.426.018.000	40.232.711.000	-	-	1.970.399.333.597
238	Kab. Pacitan	75.618.026.000	821.297.336.554	59.458.569.902	225.482.382.489	-	174.505.990.000	36.782.443.000	-	-	1.393.144.747.945
239	Kab. Pamekasan	142.962.714.000	890.544.219.000	42.123.456.342	263.637.703.269	-	204.307.968.000	21.743.982.000	-	-	1.565.320.042.611
240	Kab. Pasuruan	414.556.445.000	1.276.230.892.127	73.259.364.406	441.406.287.685	8.143.557.000	357.246.201.000	13.621.508.000	-	-	2.584.464.255.218
241	Kab. Ponorogo	85.605.367.000	1.112.048.794.300	60.940.988.900	316.686.025.002	-	265.655.564.000	34.026.514.000	-	-	1.874.963.253.202
242	Kab. Probolinggo	141.237.542.000	1.043.467.100.603	61.416.967.828	311.811.848.372	936.000.000	347.071.330.000	6.053.857.000	-	-	1.911.994.645.803
243	Kab. Sampang	80.322.347.000	858.109.749.842	71.573.667.894	294.196.962.649	10.294.510.000	234.858.230.000	19.943.149.000	-	-	1.569.298.616.385
244	Kab. Sidoarjo	180.101.937.000	1.272.254.530.355	111.492.684.206	544.942.859.945	942.000.000	328.647.743.000	0	-	-	2.438.381.754.506
245	Kab. Situbondo	118.672.704.000	817.129.780.000	83.027.376.514	232.357.428.916	-	154.182.331.000	7.545.266.000	-	-	1.412.914.886.430
246	Kab. Sumenep	108.795.527.000	1.191.281.864.380	222.351.196.091	289.640.710.742	7.626.711.109	363.197.008.000	7.013.035.000	-	-	2.189.906.052.322
247	Kab. Trenggalek	78.068.812.000	921.619.169.751	73.092.821.893	232.839.959.348	-	167.763.145.000	40.333.727.000	-	-	1.513.717.634.992
248	Kab. Tuban	524.503.285.000	1.077.477.515.502	167.191.315.693	341.903.930.054	-	310.370.129.400	0	-	-	2.421.446.175.649
249	Kab. Tulungagung	90.972.921.000	1.191.221.124.852	119.746.011.966	361.080.607.329	-	253.629.701.000	28.486.189.000	-	-	2.045.136.555.147
250	Kota Blitar	75.068.490.000	443.238.812.000	62.140.002.027	62.800.101.222	-	-	32.033.190.000	-	-	639.280.595.249
251	Kota Kediri	206.757.788.000	620.332.095.230	18.670.335.386	109.379.826.864	-	-	8.332.992.000	-	-	963.473.037.480
252	Kota Madiun	82.060.734.000	509.310.785.281	29.693.124.361	88.438.051.227	-	-	49.368.525.000	-	-	758.871.219.869
253	Kota Malang	133.703.329.000	873.130.043.000	19.491.399.333	237.106.924.518	-	-	21.046.971.000	-	-	1.284.478.666.851

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
254	Kota Mojokerto	74.941.273.000	413.034.028.236	34.726.487.346	63.699.991.844	-	-	35.132.412.000	-	-	621.534.192.426
255	Kota Pasuruan	74.827.878.000	449.563.102.233	35.752.433.016	78.580.326.035	-	-	11.347.844.000	-	-	650.071.583.284
256	Kota Probolinggo	74.546.006.000	480.885.190.402	4.799.882.050	81.598.175.609	-	-	15.462.511.000	-	-	657.291.765.061
257	Kota Surabaya	490.649.356.000	1.410.856.698.070	6.123.511.688	784.676.964.178	-	-	41.433.041.000	-	-	2.733.739.570.936
258	Kota Batu	74.938.702.000	495.473.685.406	10.578.991.600	74.492.694.736	-	20.937.139.000	16.498.673.000	-	-	692.919.885.742
259	Provinsi Kalimantan Barat	276.444.875.420	1.814.025.052.440	250.645.600.540	602.207.254.887	-	-	19.423.433.000	-	-	2.962.746.216.287
260	Kab. Bengkayang	43.968.773.000	639.198.478.530	88.114.843.743	151.459.423.436	-	111.362.221.000	0	-	-	1.034.103.739.709
261	Kab. Landak	45.870.125.890	728.804.238.239	116.236.192.154	180.478.289.424	600.000.000	155.656.705.000	13.980.418.000	-	-	1.241.625.968.707
262	Kab. Kapuas Hulu	103.416.705.390	997.502.079.545	144.413.509.665	163.307.575.317	-	253.262.296.832	7.042.841.000	-	-	1.668.945.007.749
263	Kab. Ketapang	240.062.577.390	1.177.010.913.356	124.269.374.738	278.616.641.279	-	254.992.739.800	5.910.960.000	-	-	2.080.863.206.563
264	Kab. Mempawah	26.965.426.000	589.440.559.223	111.088.338.241	118.755.407.635	-	61.438.609.400	14.021.544.000	-	-	921.709.884.499
265	Kab. Sambas	39.113.644.390	1.012.809.401.000	248.068.034.847	259.260.542.378	1.126.118.000	189.754.697.000	13.905.612.000	-	-	1.764.038.049.615
266	Kab. Sanggau	139.375.783.390	864.001.600.916	83.435.642.891	210.263.009.904	-	159.922.678.200	13353035000	-	-	1.470.351.750.301
267	Kab. Sintang	125.436.324.000	980.036.044.000	72.498.543.566	271.039.522.858	10.033.402.000	342.238.903.770	7.206.801.000	-	-	1.808.489.541.194
268	Kota Pontianak	57.129.099.000	808.808.396.021	56.544.517.576	185.665.593.693	-	-	0	-	-	1.108.147.606.290
269	Kota Singkawang	24.153.124.000	504.592.959.591	38.631.611.187	92.778.856.637	-	-	13.940.115.000	-	-	674.096.666.415
270	Kab. Sekadai	47.642.799.000	513.025.915.137	36.788.751.398	98.658.470.991	19.376.913.000	88.647.055.000	5.603.174.000	-	-	809.743.078.526
271	Kab. Melawi	45.681.928.000	593.075.418.000	55.989.332.605	139.091.947.513	-	152.945.938.000	12.258.241.000	-	-	999.042.805.118
272	Kab. Kayong Utara	36.207.249.000	478.333.335.137	54.716.868.506	75.648.576.834	-	44.714.733.000	7298490000	-	-	696.919.252.477
273	Kab. Kubu Raya	59.431.742.000	896.881.815.000	99.236.728.176	232.003.203.564	-	125.194.600.900	6.381.677.000	-	-	1.419.129.766.640
274	Provinsi Kalimantan Tengah	2.142.434.739.000	1.590.326.050.894	261.706.897.641	368.430.923.076	-	-	11.042.153.000	-	-	4.373.940.763.611
275	Kab. Barito Selatan	615.764.405.800	559.176.331.907	53.206.175.347	96.336.114.148	-	73.702.409.076	6.719.104.000	-	-	1.404.904.540.278
276	Kab. Barito Utara	2.007.534.596.000	502.638.266.500	61.544.942.007	102.719.218.991	-	77.141.952.000	14.773.352.000	-	-	2.766.352.327.498
277	Kab. Kapuas	1.132.096.598.000	873.966.592.665	68.332.955.705	231.961.745.264	270.000.000	188.985.737.600	-	-	-	2.495.613.629.234
278	Kab. Kotawaringin Barat	221.702.982.000	672.917.918.989	97.519.191.878	133.823.333.167	384.000.000	76.282.329.139	13.409.913.000	-	-	1.216.093.668.173
279	Kab. Kotawaringin Timur	290.234.613.000	853.450.579.955	116.009.948.122	204.596.965.434	5.726.244.000	154.928.308.000	22.835.288.000	-	-	1.647.781.946.511
280	Kota Palangkaraya	169.392.989.000	658.988.233.482	27.974.653.026	127.278.676.339	2.719.227.295	-	5.933.778.000	-	-	992.287.557.142
281	Kab. Katingan	187.772.263.000	672.273.960.026	186.604.733.257	127.614.266.422	-	133.014.020.000	5.890.545.000	-	-	1.313.169.787.705
282	Kab. Seruyan	230.744.485.000	604.397.045.926	39.607.215.093	88.915.321.889	-	96.146.881.000	-	-	-	1.059.810.948.908
283	Kab. Sukamara	170.633.222.410	411.535.177.238	63.882.801.706	42.041.211.437	-	26.854.892.000	13.424.211.000	-	-	728.371.515.791
284	Kab. Lamandau	199.125.596.000	451.449.840.463	26.088.732.372	63.829.219.460	-	69.671.121.000	-	-	-	810.164.509.295
285	Kab. Gunung Mas	297.761.119.000	542.715.331.193	50.967.062.873	115.184.981.739	-	94.916.802.800	11.357.589.000	-	-	1.112.902.886.605
286	Kab. Pulang Pisau	215.010.632.000	563.647.601.000	74.399.342.445	100.670.711.803	-	81.201.257.000	13.925.714.000	-	-	1.048.855.258.248
287	Kab. Murung Raya	1.246.706.585.000	641.248.038.561	55.093.820.847	109.725.278.984	-	112.426.816.640	7.469.957.000	-	-	2.172.670.497.032
288	Kab. Barito Timur	303.111.557.000	489.386.842.111	63.547.299.982	81.679.293.194	-	78.986.908.000	14.664.300.000	-	-	1.031.376.200.287
289	Provinsi Kalimantan Selatan	3.570.958.375.000	1.218.427.651.999	248.109.419.489	448.062.036.351	-	-	14.745.157.000	-	-	5.500.302.639.839
290	Kab. Banjar	916.823.291.000	811.192.115.956	93.702.795.200	233.557.336.621	-	223.773.702.000	38.188.045.000	-	-	2.317.237.285.777
291	Kab. Barito Kuala	449.383.942.000	594.917.264.693	94.752.513.042	169.991.955.515	-	156.599.648.000	19.410.278.000	-	-	1.485.055.601.250
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	672.253.104.000	518.400.709.656	70.905.328.762	122.575.417.950	11.492.179.000	113.785.259.000	42.938.750.000	-	-	1.552.350.748.368
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	521.014.044.000	546.064.341.637	99.851.972.094	115.849.819.462	-	129.129.755.200	11.581.993.000	-	-	1.423.491.925.393
294	Kab. Hulu Sungai Utara	574.126.617.000	498.581.463.551	53.808.692.697	101.916.045.655	-	162.358.091.000	13.568.024.000	-	-	1.404.358.933.903
295	Kab. Kotabaru	1.589.229.169.000	630.563.970.578	83.398.692.170	139.783.760.419	-	169.709.978.000	7.682.390.000	-	-	2.620.367.960.167
296	Kab. Tabalong	1.457.361.875.000	487.938.003.000	32.673.657.742	142.894.757.871	-	102.226.677.000	26.690.342.000	-	-	2.249.785.312.613
297	Kab. Tanah Laut	1.191.441.468.000	549.460.195.059	53.032.996.834	168.854.521.096	-	113.968.710.200	26.374.905.000	-	-	2.103.132.796.189
298	Kab. Tapin	1.052.640.346.000	460.997.729.527	35.998.682.150	99.141.298.347	-	98.137.896.000	26.724.509.000	-	-	1.773.640.461.024
299	Kota Banjarbaru	418.104.310.000	460.317.041.518	38.959.379.800	108.463.776.416	-	-	12.166.247.000	-	-	1.038.010.754.734
300	Kota Banjarmasin	372.428.974.000	818.615.777.440	20.703.148.135	214.532.895.279	270.000.000	-	23.248.394.000	-	-	1.449.799.188.854
301	Kab. Balangan	2.671.715.024.540	387.094.307.000	36.005.560.168	83.824.958.416	420.000.000	114.314.789.590	20.597.049.000	-	-	3.313.971.688.714
302	Kab. Tanah Bumbu	2.395.115.869.000	495.204.478.943	68.853.920.695	149.904.886.863	1.122.000.000	129.806.926.000	24.964.995.500	-	-	3.264.973.077.001
303	Provinsi Kalimantan Timur	6.808.500.824.000	1.009.520.102.500	209.814.629.949	532.134.334.554	-	-	2.665.740.500	-	-	8.562.635.631.503
304	Kab. Berau	2.887.319.507.000	588.991.002.328	80.364.880.846	128.172.797.431	-	95.468.642.000	16.869.131.000	-	-	3.797.185.960.605

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistimewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
305	Kab. Kutai Kartanegara	6.625.947.212.170	608.978.151.168	148.353.976.060	390.009.963.937	-	195.105.755.000	34.790.318.000	-	-	8.003.185.376.335
306	Kab. Kutai Barat	1.774.471.181.170	560.423.275.975	6.286.118.854	86.575.930.660	600.000.000	163.146.305.000	20.542.069.000	-	-	2.612.044.880.659
307	Kab. Kutai Timur	5.232.264.269.000	629.303.786.814	64.753.011.294	193.060.402.358	-	149.383.600.158	-	-	-	6.268.765.069.624
308	Kab. Paser	2.195.737.702.000	428.051.493.630	59.133.587.720	141.494.868.922	4.967.700.000	123.470.778.399	-	-	-	2.952.856.130.671
309	Kota Balikpapan	1.157.095.534.000	581.085.614.028	10.740.075.783	224.958.445.433	-	-	14.953.965.000	-	-	1.988.833.634.244
310	Kota Bontang	1.381.798.107.000	267.889.833.686	14.833.297.689	69.114.135.121	-	-	13.164.686.000	-	-	1.746.800.059.496
311	Kota Samarinda	1.275.031.016.000	841.775.200.055	18.963.828.212	269.682.091.578	-	-	20.758.998.000	-	-	2.426.211.133.845
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.162.548.731.000	309.102.018.496	160.676.842.562	103.706.925.805	526.748.711	29.595.849.000	6.165.287.000	-	-	1.772.322.402.574
313	Kab. Mahakam Ulu	1.226.387.083.000	434.344.822.000	66.605.764.716	23.469.367.977	-	52.247.805.936	-	-	-	1.803.054.843.629
314	Provinsi Sulawesi Utara	133.451.458.000	1.418.410.108.322	302.618.460.629	396.518.898.884	-	-	10.640.199.000	-	-	2.261.639.124.835
315	Kab. Bolaang Mongondow	65.143.740.000	572.634.871.063	35.123.482.574	107.671.423.994	-	156.556.803.000	12.889.356.000	-	-	950.019.676.631
316	Kab. Minahasa	42.209.281.000	685.306.301.233	48.263.647.654	159.019.427.811	-	175.635.782.000	15.261.122.000	-	-	1.125.695.561.698
317	Kab. Sangihe	13.833.579.000	528.221.318.944	143.165.339.886	91.446.365.499	12.053.705.000	107.238.384.078	-	-	-	895.958.692.407
318	Kota Bitung	46.353.535.000	507.854.817.308	56.679.291.833	78.017.875.273	-	-	2.998.696.000	-	-	691.904.215.414
319	Kota Manado	47.088.949.000	798.594.172.763	52.900.196.400	156.710.732.572	-	-	6.709.659.000	-	-	1.062.003.709.735
320	Kab. Kepulauan Talaud	11.918.263.000	497.816.941.054	65.613.272.252	73.199.840.303	22.642.620.000	106.851.671.000	2.955.810.000	-	-	780.998.417.609
321	Kab. Minahasa Selatan	17.112.985.000	550.527.516.585	73.699.191.095	120.455.362.311	25.923.626.550	128.804.209.000	-	-	-	916.522.890.541
322	Kota Tomohon	32.588.873.000	424.328.577.685	70.435.760.476	55.591.479.086	-	-	12.933.346.000	-	-	595.878.036.247
323	Kab. Minahasa Utara	68.196.911.000	508.639.462.544	99.302.597.359	104.836.324.807	-	98.124.709.848	17.372.202.000	-	-	896.472.207.558
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulalan	10.545.544.000	389.774.215.355	20.514.733.428	42.021.149.090	-	61.737.537.000	12.911.110.000	-	-	537.504.288.873
325	Kota Kotamobagu	16.429.342.000	390.882.825.892	13.965.932.366	50.212.433.999	-	13.277.079.000	-	-	-	484.767.613.257
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	14.745.065.000	388.482.366.694	33.863.868.520	45.944.396.851	-	79.257.020.000	25.172.059.000	-	-	587.464.776.065
327	Kab. Minahasa Tenggara	14.301.441.000	416.317.837.000	42.106.940.057	65.936.583.041	-	101.653.484.000	17.440.751.000	-	-	657.757.036.098
328	Kab. Bolaang Mongondow Tengah	15.161.974.000	354.513.867.373	22.213.522.361	42.095.594.445	-	61.949.790.000	-	-	-	495.934.784.179
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	22.787.284.000	364.751.601.275	78.191.816.657	42.927.374.998	-	62.285.601.000	11.740.923.000	-	-	582.684.600.930
330	Provinsi Sulawesi Tengah	624.302.400.000	1.616.772.456.028	324.621.662.908	410.316.501.204	8.551.558.595	-	-	-	-	2.984.564.578.735
331	Kab. Banggai	925.115.821.030	930.786.941.000	70.574.213.807	195.773.588.396	2.658.248.117	228.920.237.000	-	-	-	2.353.829.049.350
332	Kab. Banggai Kepulauan	54.525.944.000	485.140.550.121	101.901.073.587	86.657.439.436	28.849.257.000	112.520.510.000	5.764.023.000	-	-	875.358.797.144
333	Kab. Buol	64.818.010.000	533.221.041.818	81.160.924.874	75.755.403.470	19.412.671.123	90.918.498.000	11.724.714.000	-	-	877.011.263.285
334	Kab. Tolitoli	60.516.124.000	629.319.146.190	108.240.819.508	105.928.694.816	-	93.117.588.000	11.940.300.000	-	-	1.009.062.672.514
335	Kab. Donggala	63.318.335.500	729.528.285.591	128.554.075.706	172.896.406.975	-	142.837.602.296	12.612.699.000	-	-	1.249.747.405.068
336	Kab. Morowali	622.726.103.700	523.674.524.729	45.355.846.055	100.592.621.032	-	106.697.472.900	11.818.826.000	-	-	1.410.865.394.416
337	Kab. Poso	80.943.199.000	735.931.429.579	134.904.579.283	128.321.708.841	24.820.702.295	121.727.441.000	11.360.630.000	-	-	1.238.009.689.998
338	Kota Palu	72.208.742.870	730.059.933.175	83.661.161.656	169.579.931.363	966.000.000	-	12.139.646.000	-	-	1.068.615.415.064
339	Kab. Parigi Moutong	61.111.985.600	859.308.852.000	139.136.225.245	217.897.639.032	2.694.873.250	242.942.205.966	5.698.903.000	-	-	1.528.790.684.093
340	Kab. Tojo Una Una	191.881.565.000	636.414.767.281	113.426.288.327	107.891.677.334	1.032.000.000	113.557.804.000	20.584.497.000	-	-	1.184.788.598.942
341	Kab. Sigi	59.616.361.500	655.819.930.339	144.946.300.321	153.648.324.254	-	154.494.636.326	31.841.897.000	-	-	1.200.367.449.740
342	Kab. Banggai Laut	56.788.236.500	429.516.833.805	51.156.767.547	51.864.970.455	-	51.492.450.000	-	-	-	640.819.258.307
343	Kab. Morowali Utara	389.960.142.000	595.195.257.065	62.110.361.172	83.583.019.795	-	109.581.662.000	12.528.131.000	-	-	1.252.958.573.032
344	Provinsi Sulawesi Selatan	281.202.503.000	2.666.244.873.049	321.344.427.952	1.236.084.743.841	1.826.947.158	-	18.973.164.000	0	0	4.525.676.659.000
345	Kab. Bantaeng	10.753.661.000	516.166.772.106	81.706.137.861	125.956.443.379	1.488.000.000	41.728.099.000	0	-	-	777.799.113.346
346	Kab. Barru	11.926.329.000	532.173.944.769	36.828.889.417	117.455.739.710	-	39.357.327.000	19.602.465.000	0	-	757.344.694.896
347	Kab. Bone	23.345.308.000	1.259.399.247.640	167.134.039.888	386.301.746.157	-	293.484.249.100	14296539000	0	-	2.143.961.129.785
348	Kab. Bulukumba	15.333.357.000	791.083.989.461	147.810.871.064	204.459.962.940	270.000.000	100.691.191.000	7.729.518.000	0	-	1.267.378.889.465
349	Kab. Enrekang	12.092.981.000	589.663.318.510	124.906.767.084	161.227.369.292	22.299.584.000	97.764.883.000	7908088000	0	-	1.015.862.990.886
350	Kab. Gowa	15.210.140.000	1.037.381.425.227	157.638.919.409	292.612.737.454	-	119.769.187.400	13.491.232.000	0	-	1.636.103.641.490
351	Kab. Jeneponto	11.666.299.000	718.649.580.738	119.624.942.930	176.315.186.754	-	83.215.546.000	0	0	-	1.109.471.555.422
352	Kab. Luwu	16.908.472.000	766.966.029.000	118.317.371.759	205.997.602.116	26.051.515.726	180.762.191.006	6885398000	0	-	1.321.888.579.607
353	Kab. Luwu Utara	28.960.621.000	751.716.936.551	41.739.482.598	161.608.758.473	5.321.252.340	154.454.216.000	7.493.177.000	0	-	1.151.294.443.962
354	Kab. Maros	15.233.220.000	769.741.955.543	130.286.597.699	186.750.166.705	1.302.000.000	79.921.451.000	6035415000	0	-	1.189.270.805.947
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	23.268.516.000	787.431.926.000	124.311.905.980	219.194.154.733	-	66.353.379.960	11568556000	0	-	1.232.128.438.673

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistimewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
356	Kota Palopo	14.478.616.000	521.857.620.000	22.949.743.189	94.379.950.373	-	-	0	0	-	653.665.929.562
357	Kab. Luwu Timur	314.948.225.000	585.516.185.860	50.421.525.837	134.213.247.762	11.486.537.363	113.579.278.000	20.916.486.000	0	-	1.231.081.485.822
358	Kab. Pinrang	13.222.222.000	763.332.821.442	128.010.606.521	200.385.191.377	26.220.200.000	70.077.466.000	13.665.508.000	0	-	1.214.914.015.340
359	Kab. Sinjai	12.291.020.000	605.664.962.180	87.345.480.257	149.962.928.702	-	63.399.716.000	0	0	-	918.664.107.139
360	Kab. Kepulauan Selayar	16.077.740.000	620.495.260.651	42.731.502.855	119.289.377.901	-	65.431.087.000	21.356.548.000	0	-	885.381.516.407
361	Kab. Sidenreng Rappang	15.376.675.000	677.702.792.000	70.971.877.699	163.345.658.094	1.314.000.000	61.210.372.000	5.478.445.000	0	-	995.399.819.793
362	Kab. Soppeng	18.973.944.000	641.706.917.360	81.837.623.071	141.735.268.035	-	47.546.271.000	31.250.859.000	0	-	963.050.882.466
363	Kab. Takalar	12.877.696.000	634.554.049.000	74.864.555.022	164.503.967.397	-	78.203.364.000	12.448.276.000	0	-	977.451.907.419
364	Kab. Tana Toraja	12.023.866.000	608.895.750.794	100.507.941.570	164.791.328.943	8.707.527.000	103.095.133.000	0	0	-	998.021.547.307
365	Kab. Wajo	54.586.491.000	771.791.832.501	164.662.171.304	203.984.507.587	13.596.913.000	119.866.580.500	0	0	-	1.328.488.495.892
366	Kota Parepare	13.565.090.000	477.111.307.150	37.007.242.383	82.516.973.423	-	-	0	0	-	610.200.612.956
367	Kota Makassar	106.718.085.000	1.636.174.131.002	31.931.027.120	470.242.623.639	1.800.000.000	-	0	0	-	2.246.865.866.761
368	Kab. Toraja Utara	12.104.484.000	594.870.718.018	145.855.848.815	158.292.632.746	16.663.545.000	100.989.224.000	14112719000	0	-	1.042.889.171.579
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	599.106.234.000	1.697.020.899.325	273.187.941.120	532.537.478.977	787.674.088	-	2.678.885.500	-	-	3.105.319.113.010
370	Kab. Buton	29.785.789.000	445.497.391.296	96.527.584.388	96.125.583.893	21.117.637.000	65.477.021.000	-	-	-	750.744.593.577
371	Kab. Konawe	188.871.947.000	729.723.762.225	72.024.970.829	189.262.501.118	8.570.040.000	220.516.148.000	-	-	-	1.408.969.369.172
372	Kab. Kolaka	527.585.998.000	630.676.354.676	50.296.492.225	121.420.830.839	2.468.308.569	82.561.568.000	26.314.646.000	-	-	1.441.324.198.309
373	Kab. Muna	35.947.043.000	694.107.146.753	99.204.381.158	207.310.791.723	-	106.246.002.000	-	-	-	1.142.815.364.634
374	Kota Kendari	61.677.364.000	731.494.752.380	49.458.128.200	177.668.636.142	-	-	6.828.170.000	-	-	1.027.127.050.722
375	Kota Bau-bau	29.891.246.000	544.316.526.798	59.942.034.754	95.207.043.570	-	-	5.770.331.000	-	-	735.127.182.122
376	Kab. Konawe Selatan	152.962.980.000	736.730.036.300	72.591.677.661	177.275.575.488	-	267.585.881.000	-	-	-	1.407.146.150.449
377	Kab. Bombana	275.425.046.000	507.929.909.000	71.548.170.798	116.278.859.590	-	98.438.427.000	15.208.211.000	-	-	1.084.828.623.388
378	Kab. Wakatobi	30.993.947.000	479.538.094.431	103.531.408.736	85.335.503.721	-	61.950.053.000	5.860.480.000	-	-	767.209.486.888
379	Kab. Kolaka Utara	132.073.145.000	509.355.878.622	65.047.787.850	90.757.402.593	2.792.329.450	106.995.255.000	5.918.102.000	-	-	912.939.900.515
380	Kab. Konawe Utara	550.191.444.000	498.052.424.077	105.726.114.949	77.267.264.121	-	119.706.345.464	26.345.403.000	-	-	1.377.308.995.611
381	Kab. Buton Utara	30.481.735.000	445.269.370.305	89.434.822.970	67.842.674.138	-	61.348.473.000	2.818.935.000	-	-	697.196.010.413
382	Kab. Konawe Kepulauan	51.188.209.000	331.828.914.827	78.102.010.197	34.614.465.414	-	65.912.626.000	11.314.714.000	-	-	572.960.939.438
383	Kab. Kolaka Timur	88.699.321.000	419.771.068.388	81.637.536.175	83.714.154.406	-	92.983.941.000	-	-	-	766.806.020.969
384	Kab. Muna Barat	29.414.801.000	372.901.318.127	56.813.779.428	82.735.286.265	9.063.829.000	66.563.976.000	7.428.219.000	-	-	624.921.208.820
385	Kab. Buton Tengah	72.134.755.940	377.534.539.131	46.239.544.006	77.411.983.324	-	56.273.838.000	7.788.168.000	-	-	637.382.828.401
386	Kab. Buton Selatan	28.603.411.000	383.203.917.550	73.207.486.021	64.379.708.082	-	49.619.862.000	3.094.753.000	-	-	602.109.137.653
387	Provinsi Bali	179.392.132.110	1.367.677.271.075	87.240.500.926	616.318.044.758	-	-	23.157.354.000	-	-	2.273.785.302.869
388	Kab. Badung	92.755.171.610	394.657.252.850	34.735.254.354	233.383.013.035	-	48.336.329.000	48.696.304.000	-	-	852.563.324.849
389	Kab. Bangli	14.102.002.000	561.018.386.000	54.703.224.638	112.897.083.302	5.679.804.000	60.597.348.000	14.491.125.500	-	-	823.488.973.440
390	Kab. Buleleng	22.898.983.000	1.001.384.850.681	60.610.125.474	323.433.703.155	-	132.354.323.000	32.877.739.000	-	-	1.573.559.724.310
391	Kab. Gianyar	22.635.024.000	693.091.676.000	19.899.324.455	184.460.906.689	3.796.099.000	68.766.153.000	32.759.000.000	-	-	1.025.408.183.144
392	Kab. Jembrana	15.743.192.000	594.542.451.824	9.181.499.760	117.135.945.678	-	42.951.213.000	10.809.076.500	-	-	790.363.378.762
393	Kab. Karangasem	16.546.024.000	775.837.883.115	55.595.869.328	225.983.160.888	-	80.146.587.000	12.918.188.000	-	-	1.167.027.712.331
394	Kab. Klungkung	15.960.199.000	553.774.016.732	33.701.513.527	115.567.707.859	-	48.573.365.000	38.739.153.000	-	-	806.315.955.118
395	Kab. Tabanan	20.389.924.910	834.380.834.961	54.219.262.420	188.573.524.390	-	118.815.557.000	25.054.386.000	-	-	1.241.433.489.681
396	Kota Denpasar	92.373.085.000	688.562.370.657	28.031.657.114	253.235.819.518	-	34.828.566.000	57.126.472.000	-	-	1.154.157.970.289
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	304.893.093.000	1.781.174.009.000	358.033.134.458	677.797.693.513	-	-	22.270.193.000	0	0	3.144.168.122.971
398	Kab. Bima	41.658.150.000	1.069.469.209.836	160.918.308.551	259.366.552.372	18.572.830.000	187.145.184.000	6.831.675.000	0	0	1.743.961.909.759
399	Kab. Dompu	41.153.246.000	640.201.785.935	99.891.566.064	128.955.953.026	17.699.148.000	72.986.944.000	9.801.636.500	0	0	1.010.690.279.525
400	Kab. Lombok Barat	44.346.918.000	937.411.375.116	93.529.675.802	268.532.115.227	-	145.048.931.000	13055372000	0	0	1.501.924.387.145
401	Kab. Lombok Tengah	99.311.329.000	1.248.441.289.000	202.489.811.306	372.567.851.744	-	185.021.712.000	23.708.776.000	0	0	2.131.540.769.050
402	Kab. Lombok Timur	106.560.570.000	1.462.200.263.000	252.745.293.433	522.664.988.502	30.144.336.510	287.050.780.000	0	0	0	2.661.366.231.445
403	Kab. Sumbawa	126.969.162.000	966.404.630.460	157.589.834.891	237.542.156.290	32.392.219.871	153.426.511.000	2.874.386.000	0	0	1.677.198.900.512
404	Kota Mataram	108.535.427.000	697.066.251.000	81.611.000.989	160.854.869.345	750.000.000	-	19.674.171.000	0	0	1.068.491.719.334
405	Kota Bima	39.701.395.000	495.227.404.000	51.257.106.179	80.886.128.462	-	-	2.793.929.000	0	0	669.865.962.641
406	Kab. Sumbawa Barat	311.012.984.000	432.375.705.856	103.353.966.287	90.045.963.693	-	51.242.247.500	33.045.333.000	0	0	1.021.076.200.336

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistemewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
407	Kab. Lombok Utara	39.277.732.000	443.912.246.921	84.346.236.414	95.170.785.801	-	63.719.052.000	37.642.194.000	0	0	764.068.247.136
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	47.998.343.000	1.976.058.968.384	480.598.050.758	854.080.143.495	348.712.700	-	11.346.961.000	0	0	3.370.431.179.337
409	Kab. Alor	6.683.621.000	647.024.515.440	100.921.303.346	129.772.301.913	-	135.957.240.000	7.425.593.000	0	0	1.027.784.574.699
410	Kab. Belu	4.160.580.000	530.182.469.628	132.084.012.035	111.119.348.538	-	64.463.162.739	9.107.161.000	0	0	851.116.733.940
411	Kab. Ende	8.101.828.000	664.017.438.608	74.165.484.160	150.410.858.810	-	213.018.003.781	0	0	0	1.109.713.613.359
412	Kab. Flores Timur	6.038.662.000	680.488.339.610	166.392.708.767	146.379.242.434	-	183.768.682.000	5633738000	0	0	1.188.701.372.811
413	Kab. Kupang	7.430.009.000	746.172.527.328	196.064.125.324	180.825.544.624	2.547.813.300	154.041.136.000	2.793.519.500	0	0	1.289.874.675.076
414	Kab. Lembata	5.406.452.000	492.472.730.549	69.862.606.968	83.811.828.873	-	124.526.039.000	21.482.092.000	0	0	797.561.749.390
415	Kab. Manggarai	7.070.606.000	677.515.472.202	114.943.944.920	197.685.797.562	-	129.061.909.000	0	0	0	1.126.277.729.684
416	Kab. Ngada	5.019.897.000	502.389.992.818	212.160.820.557	108.493.603.796	-	153.420.677.000	2867330000	0	0	984.352.321.171
417	Kab. Sikka	7.493.644.000	683.934.251.174	41.923.477.352	177.661.656.149	-	157.479.170.000	5.598.650.000	0	0	1.074.090.848.675
418	Kab. Sumba Barat	4.030.526.000	414.438.815.806	154.120.276.623	62.136.962.567	-	60.247.561.000	13043483000	0	0	708.017.624.996
419	Kab. Sumba Timur	9.077.788.000	664.038.180.415	146.806.092.342	130.689.112.545	-	137.796.964.740	16.125.182.000	0	0	1.104.533.320.042
420	Kab. Timor Tengah Selatan	5.140.981.000	834.715.979.702	116.255.142.430	207.102.193.155	-	238.354.154.749	0	0	0	1.401.568.451.036
421	Kab. Timor Tengah Utara	4.286.929.490	657.039.096.540	78.802.285.730	155.028.627.505	-	168.071.898.600	3.029.107.000	0	0	1.066.257.944.865
422	Kota Kupang	23.053.972.000	734.432.820.813	39.000.602.323	150.741.754.760	-	-	7.645.677.000	0	0	954.874.826.896
423	Kab. Rote Ndao	5.233.442.000	461.709.069.310	104.640.521.396	109.839.736.665	-	108.676.172.000	18.893.033.000	0	0	808.991.974.371
424	Kab. Manggarai Barat	9.283.986.000	587.555.198.679	182.786.139.163	147.863.561.934	-	146.502.192.000	11904277000	0	0	1.085.895.354.776
425	Kab. Nagekeo	4.240.478.000	469.431.474.624	42.151.212.992	87.082.857.117	-	81.444.800.000	0	0	0	684.350.822.733
426	Kab. Sumba Barat Daya	4.291.368.000	574.445.179.602	160.421.804.814	160.706.660.795	-	184.608.937.000	7.109.813.000	0	0	1.091.583.763.211
427	Kab. Sumba Tengah	3.188.750.000	360.608.063.101	112.784.340.291	56.770.195.869	-	65.947.240.000	12.929.007.000	0	0	612.227.596.261
428	Kab. Manggarai Timur	4.697.176.000	578.835.877.278	209.715.773.244	178.453.653.181	-	156.619.814.000	19.587.672.000	0	0	1.147.909.965.703
429	Kab. Sabu Raijua	4.176.448.000	373.274.825.957	68.132.328.326	62.583.738.007	-	62.797.184.980	27149169000	0	0	598.113.694.270
430	Kab. Malaka	3.702.720.000	477.124.685.954	90.632.947.498	105.519.159.076	-	116.826.254.000	0	0	0	793.805.766.528
431	Provinsi Maluku	71.346.220.000	1.626.314.998.231	368.841.468.833	359.201.275.447	-	-	0	0	0	2.425.703.962.511
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	10.858.925.000	568.857.142.265	89.524.932.206	78.669.630.156	-	71.652.155.000	6.871.658.000	0	0	826.434.442.627
433	Kab. Maluku Tengah	20.264.979.000	1.025.343.077.501	110.594.723.594	228.817.979.376	-	175.773.655.400	7620673000	0	0	1.568.415.087.871
434	Kab. Maluku Tenggara	6.831.441.000	494.632.447.427	87.768.910.468	94.364.035.116	-	147.821.639.000	0	0	0	831.418.473.011
435	Kab. Buru	9.651.313.000	513.851.283.366	56.692.948.517	111.931.336.232	12.383.325.000	76.459.177.980	5.808.813.000	0	0	786.778.197.095
436	Kota Ambon	21.365.688.000	680.205.047.979	24.883.037.861	153.355.994.853	-	32.250.601.000	0	0	0	912.060.369.693
437	Kab. Seram Bagian Barat	10.074.305.000	617.346.206.601	55.119.625.931	128.954.392.394	-	94.280.070.464	7.498.253.000	0	0	913.272.853.390
438	Kab. Seram Bagian Timur	26.441.198.000	538.829.091.592	44.809.728.325	113.982.633.907	31.170.344.000	164.054.309.000	11.051.678.000	0	0	930.338.982.824
439	Kab. Kepulauan Aru	10.394.004.000	573.356.493.524	76.190.872.544	98.985.958.416	-	106.272.712.000	21.975.970.000	0	0	887.176.010.484
440	Kota Tual	6.171.809.000	394.788.816.090	40.150.459.885	45.261.613.439	-	23.741.515.000	12.229.352.000	0	0	522.343.565.414
441	Kab. Maluku Barat Daya	21.845.676.000	564.257.179.353	58.440.274.041	67.170.793.287	29.140.514.000	104.090.363.000	22201114000	0	0	867.145.913.681
442	Kab. Buru Selatan	8.524.652.034	426.216.126.710	85.918.450.958	74.102.325.156	-	70.299.735.000	6.659.737.000	0	0	671.721.026.858
443	Provinsi Papua	57.231.987.000	778.046.831.000	139.275.261.124	19.305.256.500	-	-	0	1.088.617.906.000	0	2.082.477.241.624
444	Kab. Biak Numfor	12.983.427.000	635.331.483.942	147.290.458.322	144.781.719.316	-	196.365.566.000	0	0	0	1.297.623.720.580
445	Kab. Jayapura	23.334.206.000	704.297.338.218	106.978.759.549	150.509.938.180	-	123.950.843.000	5693942000	210.116.642.000	0	1.324.881.668.947
446	Kab. Jayawijaya	7.194.717.000	727.935.422.000	128.958.330.739	136.803.183.693	-	278.287.102.000	14515283000	264.713.524.000	0	1.558.407.562.432
447	Kab. Merauke	46.991.660.000	1.235.437.922.249	204.995.484.149	225.693.792.076	-	192.982.790.000	7355237000	324.614.732.000	0	2.238.071.617.474
448	Kab. Mimika	1.766.615.836.000	664.482.347.664	79.031.638.214	184.569.911.387	26.831.068.000	133.026.669.000	0	264.631.525.000	0	3.119.188.995.265
449	Kab. Nabire	112.776.721.000	732.103.901.271	143.155.983.277	166.134.262.911	-	76.033.668.000	27221154000	181.049.771.000	0	1.438.475.461.459
450	Kab. Paniai	145.655.839.000	579.588.342.076	69.616.167.716	139.363.140.841	-	190.682.356.000	9880810500	207.013.838.000	0	1.341.800.494.133
451	Kab. Puncak Jaya	93.715.996.000	741.468.340.167	121.985.766.997	40.349.999.250	-	285.616.643.000	0	190.713.566.000	0	1.473.850.311.414
452	Kab. Kepulauan Yapen	11.548.046.000	567.380.949.842	96.668.972.700	110.261.563.866	10.198.806.000	125.025.520.000	0	155.175.122.000	0	1.076.258.980.408
453	Kota Jayapura	40.860.810.000	734.954.539.184	104.488.576.030	185.981.873.522	-	11.806.700.000	0	181.334.139.000	-	1.259.428.637.736
454	Kab. Sarmi	24.165.714.000	684.266.044.000	77.497.162.932	59.971.879.408	-	91.915.604.000	0	130.392.614.000	-	1.068.309.018.340
455	Kab. Keerom	11.974.171.000	535.017.742.540	97.480.604.765	70.474.632.725	-	81.939.267.000	14.291.609.000	93.474.483.000	-	904.652.510.030
456	Kab. Yahukimo	6.861.965.000	778.130.420.280	258.626.280.760	185.299.534.184	-	455.919.201.000	0	423.098.911.000	-	2.107.936.312.224
457	Kab. Pegunungan Bintang	9.271.003.000	807.664.845.060	172.381.841.676	98.650.032.340	-	245.712.927.000	0	294.493.750.000	-	1.628.174.399.076

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistimewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
458	Kab. Tolikara	4.412.452.000	728.468.113.000	310.824.901.043	80.211.467.032	-	436.983.493.000	0	208.922.666.000	0	1.769.823.092.075
459	Kab. Boven Digoel	22.729.765.000	808.235.717.000	60.981.745.736	76.386.004.432	-	118.860.819.000	5914941500	190.676.859.000	0	1.283.785.851.668
460	Kab. Mappi	11.303.915.000	761.072.010.100	127.465.939.954	108.727.018.385	-	176.489.240.000	0	288.410.633.000	0	1.473.468.756.439
461	Kab. Asmat	61.596.217.000	874.314.263.115	112.775.427.530	120.092.454.282	-	236.283.438.000	7.500.519.000	272.301.999.000	0	1.684.864.317.927
462	Kab. Waropen	8.911.598.000	561.368.396.587	31.298.623.984	48.478.636.252	-	86.428.097.000	0	93.991.695.000	0	830.477.046.823
463	Kab. Supiori	8.241.989.000	448.783.516.229	99.572.823.762	39.960.267.150	20.718.650.000	29.019.793.800	0	98.250.227.000	0	744.547.266.941
464	Kab. Mamberamo Raya	7.703.235.000	716.972.355.580	71.317.411.620	41.396.070.578	6.438.179.000	73.057.115.000	0	158.593.021.000	0	1.075.477.387.778
465	Kab. Mamberamo Tengah	4.903.454.000	626.556.906.000	64.530.397.209	30.927.261.412	-	51.044.987.000	13.455.835.500	136.092.896.000	0	927.511.737.121
466	Kab. Yalimo	5.030.711.000	601.907.099.000	99.806.945.050	43.810.894.781	-	235.699.506.000	0	121.868.995.000	0	1.108.124.150.831
467	Kab. Lanny Jaya	3.810.180.000	639.031.401.000	284.362.459.940	98.695.146.611	-	327.352.090.000	10013336500	256.657.526.000	0	1.619.922.140.051
468	Kab. Nduga	51.042.350.000	585.452.783.500	213.986.695.949	29.522.625.232	-	220.298.678.000	0	195.015.951.000	0	1.295.319.083.681
469	Kab. Dogiyai	144.458.591.000	483.634.471.054	80.124.815.562	63.136.965.948	-	87.968.898.000	0	147.738.200.000	0	1.007.061.941.564
470	Kab. Puncak	141.711.275.000	782.685.935.355	139.262.932.492	31.045.605.513	-	197.804.869.000	2969469000	223.152.257.000	0	1.518.632.343.360
471	Kab. Intan Jaya	143.326.644.000	666.767.182.701	45.120.153.920	24.546.494.701	-	98.076.885.000	7.014.077.000	165.657.066.000	0	1.150.508.503.322
472	Kab. Deiyai	143.950.211.000	486.328.924.886	72.460.426.974	69.509.631.936	-	65.271.473.000	12990889000	126.407.035.000	0	976.918.591.796
473	Provinsi Maluku Utara	675.092.824.454	1.285.451.695.592	302.012.571.682	234.312.822.768	-	-	0	0	0	2.496.869.914.496
474	Kab. Halmahera Tengah	759.810.341.000	435.850.956.076	45.568.526.468	49.691.647.771	-	52.143.105.000	0	0	0	1.343.064.576.315
475	Kota Ternate	63.521.317.000	638.468.083.158	32.621.059.671	106.575.645.540	-	-	8580921000	0	0	849.767.026.369
476	Kab. Halmahera Barat	121.962.975.000	501.798.376.172	103.979.616.369	102.151.052.692	-	137.211.973.000	0	-	-	967.103.993.233
477	Kab. Halmahera Timur	767.539.289.700	465.444.466.377	39.553.798.450	62.242.448.043	12.473.418.000	92.108.906.000	6004651000	-	-	1.445.366.977.570
478	Kab. Halmahera Selatan	422.379.974.000	752.079.853.616	120.854.784.960	167.028.250.503	-	211.241.399.804	12.174.675.000	-	-	1.685.758.937.883
479	Kab. Halmahera Utara	56.274.258.280	481.535.920.204	120.087.114.393	99.445.763.949	5.663.300.000	155.083.833.000	7.208.266.000	-	-	925.298.455.826
480	Kab. Kepulauan Sula	55.236.167.000	484.607.073.720	105.972.325.897	66.719.203.504	15.565.156.000	69.751.092.000	22.530.915.000	-	-	820.381.933.121
481	Kota Tidore Kepulauan	202.751.667.900	548.262.696.566	87.094.031.666	71.609.328.840	14.115.300.000	39.172.976.698	18.318.326.000	-	-	981.324.327.670
482	Kab. Pulau Morotai	52.670.443.000	390.645.373.300	116.301.464.845	47.732.564.190	31.389.532.000	69.053.190.000	12877261000	-	-	720.669.828.335
483	Kab. Pulau Taliabu	82.615.258.900	360.575.628.637	80.910.395.298	62.126.591.567	-	59.796.752.000	15.793.794.000	-	-	661.818.420.402
484	Provinsi Banten	735.553.642.000	1.146.248.432.968	151.638.021.459	1.058.412.724.828	-	-	19.619.982.000	-	-	3.111.472.803.255
485	Kab. Lebak	75.227.395.000	1.158.314.470.908	147.338.695.149	503.222.701.398	24.760.061.697	356.799.183.000	18.835.238.000	-	-	2.284.497.745.152
486	Kab. Pandeglang	63.032.371.000	1.219.876.254.000	153.572.060.300	473.972.886.113	-	339.311.776.000	16.756.298.500	-	-	2.266.521.645.913
487	Kab. Serang	94.810.624.000	1.125.696.401.999	117.577.815.239	491.391.816.248	-	334.511.418.000	26.339.673.000	-	-	2.190.327.748.486
488	Kab. Tangerang	282.181.762.000	1.399.685.929.647	72.582.783.907	801.428.345.616	5.394.000.000	355.324.015.400	12.391.928.500	-	-	2.928.988.765.070
489	Kota Cilegon	128.064.792.000	632.625.423.210	5.752.858.525	163.279.895.301	-	-	12.708.733.000	-	-	942.431.702.036
490	Kota Tangerang	310.029.885.000	1.018.858.749.763	23.492.202.120	463.805.808.715	-	-	19.114.109.000	-	-	1.835.300.754.598
491	Kota Serang	76.976.124.000	652.282.627.000	33.801.367.720	239.518.592.495	-	-	7.500.251.000	-	-	1.010.078.962.215
492	Kota Tangerang Selatan	246.555.637.000	663.369.072.841	22.208.153.615	361.537.545.569	-	-	39.029.223.000	-	-	1.332.699.632.025
493	Provinsi Bangka Belitung	148.693.123.800	1.008.689.936.710	90.816.669.733	184.380.686.320	-	-	0	-	-	1.432.580.416.563
494	Kab. Bangka	90.334.507.000	547.802.621.272	101.694.681.362	129.942.260.044	-	59.475.922.000	22.958.813.000	-	-	952.208.804.678
495	Kab. Belitung	54.078.902.654	485.393.500.051	10.766.768.288	86.275.881.564	-	41.477.591.670	15.976.321.000	-	-	693.968.965.227
496	Kota Pangkal Pinang	47.048.494.000	460.990.961.277	97.222.884.488	91.818.359.165	-	-	6780585000	-	-	703.861.283.930
497	Kab. Bangka Selatan	77.332.063.000	473.245.322.015	46.438.600.088	93.302.083.355	-	47.552.559.000	0	-	-	737.870.627.458
498	Kab. Bangka Tengah	52.535.514.000	453.296.076.272	56.103.664.261	94.478.628.363	600.000.000	51.967.114.000	15.131.070.000	-	-	724.112.066.896
499	Kab. Bangka Barat	119.793.651.000	468.444.230.163	27.199.075.265	93.928.891.943	-	54.949.231.000	7.152.766.000	-	-	771.465.845.371
500	Kab. Belitung Timur	54.919.995.000	449.044.881.195	25.520.279.483	77.900.629.860	-	39.725.596.000	30.100.485.000	-	-	677.211.866.538
501	Provinsi Gorontalo	21.036.149.000	1.022.379.872.000	143.536.467.023	187.329.830.802	915.839.452	-	7682882000	-	-	1.382.881.040.277
502	Kab. Boalemo	9.425.107.000	472.076.343.000	56.293.239.970	89.669.820.161	-	73.077.729.000	0	-	-	700.542.239.131
503	Kab. Gorontalo	9.070.315.000	736.407.550.019	124.048.863.253	196.557.388.014	4.277.924.929	167.837.233.000	13.979.823.000	-	-	1.252.179.097.215
504	Kota Gorontalo	10.978.550.000	535.927.096.754	39.925.008.986	94.415.764.852	-	-	34.701.093.000	-	-	715.947.513.592
505	Kab. Pohuwato	10.058.905.000	537.919.218.950	83.162.274.546	86.781.414.553	15.616.169.782	86.903.437.000	13.487.667.000	-	-	833.929.086.831
506	Kab. Bone Bolango	6.787.905.000	502.110.630.515	77.089.280.867	101.137.799.617	2.700.413.705	123.339.784.000	19538053000	-	-	832.703.866.704
507	Kab. Gorontalo Utara	7.577.657.000	407.752.267.139	64.104.057.802	87.078.609.054	-	95.802.886.000	13.315.487.000	-	-	675.630.963.995
508	Provinsi Kepulauan Riau	302.509.758.980	1.177.916.590.123	157.564.483.366	312.075.070.439	-	-	11.315.088.000	-	-	1.961.380.990.908

LAPORAN REALISASI TRANSFER KE DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Dana Bagi Hasil	Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus			Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan DIY				Total Transfer ke Daerah
				DAK Fisik	DAK Nonfisik	Hibah ke Daerah	Dana Desa	Insentif Fiskal	Otonomi Khusus	Keistimewaan DIY	
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14)
509	Kab. Natuna	221.359.797.910	427.577.646.211	73.848.309.559	62.839.255.969	636.000.000	54.367.721.000	5.699.849.000	-	-	846.328.579.649
510	Kab. Kepulauan Anambas	153.824.285.910	395.427.123.385	77.454.547.851	45.817.576.554	-	39.367.634.000	5.680.723.000	-	-	717.571.890.700
511	Kab. Karimun	82.284.735.410	445.953.309.736	83.656.032.600	127.315.900.957	-	37.748.480.000	22.469.981.000	-	-	799.428.439.703
512	Kota Batam	190.505.241.000	819.536.519.228	27.107.074.819	384.301.494.600	-	-	11.731.657.000	-	-	1.433.181.986.647
513	Kota Tanjung Pinang	61.405.504.910	486.021.975.384	29.419.121.593	94.170.168.445	-	-	7.671.438.000	-	-	678.688.208.332
514	Kab. Lingga	66.202.777.000	484.795.468.272	101.600.873.910	91.792.141.152	-	63.138.573.400	0	-	-	807.529.833.734
515	Kab. Bintan	71.000.869.600	510.827.119.150	52.184.150.389	100.786.764.094	-	31.840.288.600	26415095000	-	-	793.054.286.833
516	Provinsi Papua Barat	1.616.517.869.910	574.755.164.465	73.039.719.402	4.566.472.200	-	-	0	843.890.822.000	-	3.112.770.047.977
517	Kab. Fak Fak	114.490.339.000	713.877.302.514	185.599.668.432	92.457.296.917	-	122.120.775.000	0	109.361.584.000	-	1.337.906.965.863
518	Kab. Manokwari	69.107.533.000	618.791.411.680	94.664.392.102	138.660.815.988	-	137.320.758.000	0	168.227.501.000	-	1.226.772.411.770
519	Kab. Sorong	159.585.548.000	558.340.568.258	150.526.450.029	138.335.126.952	-	178.033.287.000	19229406500	205.593.549.000	-	1.409.643.935.739
520	Kota Sorong	28.184.324.000	581.512.707.084	63.873.683.728	123.553.161.699	-	-	-	172.959.612.000	-	970.083.488.511
521	Kab. Raja Ampat	113.034.280.000	690.471.288.454	107.129.962.228	88.832.125.415	23.697.579.000	97.135.550.000	-	211.318.079.000	-	1.331.618.864.097
522	Kab. Sorong Selatan	45.580.245.700	484.565.561.920	75.786.549.335	94.242.254.969	-	100.808.909.000	-	115.598.196.000	-	916.581.716.924
523	Kab. Teluk Bintuni	1.162.622.641.500	522.064.336.823	53.842.777.804	87.502.370.793	-	107.049.650.000	-	169.165.672.000	-	2.102.247.448.920
524	Kab. Teluk Wondama	82.540.014.000	461.637.561.686	102.174.500.853	41.442.154.402	12.881.688.000	64.374.177.000	14413576000	143.354.426.000	-	922.818.097.941
525	Kab. Kaimana	134.723.433.000	625.533.833.540	75.379.750.776	68.589.636.396	-	88.530.820.000	-	95.976.790.000	-	1.088.734.263.712
526	Kab. Maybrat	36.958.429.000	435.293.391.587	57.728.022.082	52.803.957.020	-	193.682.104.000	-	166.041.191.000	-	942.507.094.689
527	Kab. Tambrauw	40.840.645.000	503.946.286.808	89.592.011.994	46.166.765.595	-	172.219.227.000	9180793000	192.456.387.000	-	1.054.402.116.397
528	Kab. Manokwari Selatan	74.242.457.000	353.624.219.958	121.135.939.450	32.009.614.871	-	50.840.194.000	-	86.476.032.000	-	718.328.457.279
529	Kab. Pegunungan Arfak	71.588.713.000	376.038.173.206	63.292.839.910	36.709.727.278	-	131.086.468.000	-	135.656.535.000	-	814.372.456.394
530	Provinsi Sulawesi Barat	21.282.049.000	1.066.935.225.997	98.773.875.484	203.438.591.400	21.844.276.000	-	-	-	-	1.412.274.017.881
531	Kab. Majene	6.124.096.000	548.935.022.195	41.802.623.094	131.876.063.382	-	55.820.851.000	-	-	-	784.558.655.671
532	Kab. Mamuju	17.072.026.000	657.413.682.000	121.511.271.877	159.785.535.882	-	86.323.445.000	6951678000	-	-	1.049.057.638.759
533	Kab. Polewali Mandar	9.179.002.000	823.062.878.057	72.360.968.912	204.650.938.064	3.582.000.000	142.976.310.500	6186910000	-	-	1.261.999.007.533
534	Kab. Mamasa	5.160.496.000	532.670.626.412	94.359.210.342	130.655.116.551	1.818.000.000	140.959.773.000	0	-	-	905.623.222.305
535	Kab. Pasangkayu	20.433.777.000	496.999.363.000	102.005.217.974	76.780.392.525	-	54.694.684.000	0	-	-	750.913.434.499
536	Kab. Mamuju Tengah	12.098.038.000	369.183.892.749	82.048.913.591	69.740.965.625	-	51.461.215.000	0	-	-	584.533.024.965
537	Provinsi Kalimantan Utara	674.752.570.000	1.153.992.670.001	127.296.730.178	118.099.591.263	-	-	12648494000	-	-	2.086.790.055.442
538	Provinsi Papua Tengah	795.737.807.000	499.566.704.000	129.948.851.873	8.871.760.500	-	-	0	1.247.251.398.000	-	2.681.376.521.373
539	Provinsi Papua Selatan	32.316.526.000	475.062.162.000	138.153.415.619	6.791.991.600	-	-	0	841.318.645.000	-	1.493.642.740.219
540	Provinsi Papua Pegunungan	11.399.023.000	458.836.467.000	95.164.029.850	3.532.214.000	-	-	0	1.429.852.017.000	-	1.998.783.750.850
541	Provinsi Papua Barat Daya	258.287.228.000	600.571.248.000	68.128.220.609	5.999.072.290	-	-	0	805.850.849.000	-	1.738.836.617.899
542	Kab. Bulungan	713.995.097.000	562.443.575.364	48.766.052.965	92.583.291.450	-	75.075.609.000	6.205.499.500	-	-	1.499.069.125.279
543	Kab. Malinau	1.338.138.397.000	834.468.033.864	59.607.098.205	64.846.074.032	-	119.657.216.000	19.578.092.000	-	-	2.436.294.911.101
544	Kab. Nunukan	672.112.799.000	541.706.058.910	94.397.928.174	110.533.182.455	-	187.527.913.000	2.780.794.500	-	-	1.609.058.676.039
545	Kota Tarakan	241.405.303.380	475.029.013.000	21.892.490.518	88.518.520.021	-	-	6.607.594.000	-	-	833.452.920.919
546	Kab. Tana Tidung	432.159.204.000	425.690.872.922	18.201.140.625	24.695.747.678	17.314.145.000	29.801.783.000	14.164.044.000	-	-	962.026.937.225
	Jumlah	153.174.562.784.262	429.210.611.278.998	50.890.077.113.845	130.441.233.738.467	2.207.162.260.694	70.925.927.774.598	7.001.740.596.500	18.271.490.935.000	1.420.000.000.000	863.542.806.482.364

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
1	Provinsi Aceh	125.376.774.000	176.461.671.000	301.838.445.000	122.919.993.000	176.461.671.000	299.381.664.000
2	Kab. Aceh Barat	45.765.496.000	110.271.991.000	156.037.487.000	45.765.496.000	110.247.149.000	156.012.645.000
3	Kab. Aceh Besar	11.156.743.000	9.803.190.000	20.959.933.000	11.156.743.000	9.803.190.000	20.959.933.000
4	Kab. Aceh Selatan	5.452.186.000	12.295.244.000	17.747.430.000	5.452.186.000	12.291.344.900	17.743.530.900
5	Kab. Aceh Singkil	9.592.876.000	16.240.484.000	25.833.360.000	9.592.876.000	16.232.659.400	25.825.535.400
6	Kab. Aceh Tengah	9.521.037.000	23.097.274.000	32.618.311.000	9.521.037.000	23.097.274.000	32.618.311.000
7	Kab. Aceh Tenggara	4.653.786.000	10.331.006.000	14.984.792.000	4.653.786.000	10.331.006.000	14.984.792.000
8	Kab. Aceh Timur	43.786.993.000	15.891.163.000	59.678.156.000	43.786.993.000	15.891.163.000	59.678.156.000
9	Kab. Aceh Utara	40.883.212.000	19.504.318.000	60.387.530.000	40.883.212.000	19.504.318.000	60.387.530.000
10	Kab. Bireuen	7.015.562.000	11.698.437.000	18.713.999.000	7.007.147.000	11.698.437.000	18.705.584.000
11	Kab. Pidie	7.332.473.000	18.319.073.000	25.651.546.000	7.332.473.000	18.319.073.000	25.651.546.000
12	Kab. Simeulue	4.037.506.000	11.274.104.000	15.311.610.000	4.037.506.000	11.274.104.000	15.311.610.000
13	Kota Banda Aceh	31.467.368.000	6.773.683.000	38.241.051.000	31.467.368.000	6.773.683.000	38.241.051.000
14	Kota Sabang	4.144.633.000	6.079.076.000	10.223.709.000	4.144.633.000	6.079.076.000	10.223.709.000
15	Kota Langsa	9.929.036.000	11.113.486.000	21.042.522.000	9.929.036.000	11.096.495.000	21.025.531.000
16	Kota Lhokseumawe	9.498.666.000	10.617.807.000	20.116.473.000	9.498.666.000	10.617.807.000	20.116.473.000
17	Kab. Gayo Lues	6.328.915.000	15.215.609.000	21.544.524.000	6.274.384.660	15.215.609.000	21.489.993.660
18	Kab. Aceh Barat Daya	5.332.897.000	17.016.618.000	22.349.515.000	5.332.897.000	17.011.295.700	22.344.192.700
19	Kab. Aceh Jaya	5.501.816.000	21.290.937.000	26.792.753.000	5.493.440.600	21.290.937.000	26.784.377.600
20	Kab. Nagan Raya	21.096.773.000	70.861.095.000	91.957.868.000	21.096.773.000	70.849.956.690	91.946.729.690
21	Kab. Aceh Tamiang	77.582.081.000	16.964.001.000	94.546.082.000	77.582.081.000	16.964.001.000	94.546.082.000
22	Kab. Bener Meriah	5.291.601.000	10.106.050.000	15.397.651.000	5.291.601.000	10.082.688.900	15.374.289.900
23	Kab. Pidie Jaya	4.536.035.000	10.178.734.000	14.714.769.000	4.536.035.000	10.178.734.000	14.714.769.000
24	Kota Subulussalam	5.373.998.000	11.283.302.000	16.657.300.000	5.373.998.000	11.279.411.900	16.653.409.900
25	Provinsi Sumatera Utara	366.765.985.000	135.566.237.000	502.332.222.000	366.765.985.000	135.566.237.000	502.332.222.000
26	Kab. Asahan	52.660.010.000	19.830.663.000	72.490.673.000	52.660.010.000	19.809.367.200	72.469.377.200
27	Kab. Dairi	9.462.083.000	11.230.178.000	20.692.261.000	9.442.125.890	11.230.178.000	20.672.303.890
28	Kab. Deli Serdang	61.035.260.000	23.434.339.000	84.469.599.000	61.035.260.000	23.434.339.000	84.469.599.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
29	Kab. Karo	11.630.719.000	11.532.937.000	23.163.656.000	11.630.719.000	11.532.937.000	23.163.656.000
30	Kab. Labuhanbatu	35.917.680.000	29.932.083.000	65.849.763.000	35.917.680.000	29.674.579.000	65.592.259.000
31	Kab. Langkat	109.101.554.000	18.566.685.000	127.668.239.000	109.101.554.000	18.481.362.700	127.582.916.700
32	Kab. Mandailing Natal	40.452.908.000	28.908.794.000	69.361.702.000	40.452.908.000	28.908.794.000	69.361.702.000
33	Kab. Nias	8.810.276.000	8.028.851.000	16.839.127.000	8.810.276.000	8.028.851.000	16.839.127.000
34	Kab. Simalungun	51.983.562.000	19.596.956.000	71.580.518.000	51.956.961.510	19.596.956.000	71.553.917.510
35	Kab. Tapanuli Selatan	58.490.845.000	110.363.448.000	168.854.293.000	58.482.082.960	110.363.448.000	168.845.530.960
36	Kab. Tapanuli Tengah	14.231.400.000	18.024.684.000	32.256.084.000	14.231.400.000	18.024.684.000	32.256.084.000
37	Kab. Tapanuli Utara	42.205.204.000	15.887.804.000	58.093.008.000	42.205.204.000	15.887.804.000	58.093.008.000
38	Kab. Toba Samosir	12.809.869.000	10.282.439.000	23.092.308.000	12.809.869.000	10.282.439.000	23.092.308.000
39	Kota Binjai	14.832.001.000	11.272.117.000	26.104.118.000	14.832.001.000	11.272.117.000	26.104.118.000
40	Kota Medan	206.021.513.000	6.243.753.000	212.265.266.000	206.021.513.000	6.243.753.000	212.265.266.000
41	Kota Pematang Siantar	20.068.237.000	5.669.292.000	25.737.529.000	20.068.237.000	5.669.292.000	25.737.529.000
42	Kota Sibolga	10.372.378.000	5.402.585.000	15.774.963.000	10.372.378.000	5.402.585.000	15.774.963.000
43	Kota Tanjung Balai	9.655.220.000	5.973.985.000	15.629.205.000	9.655.220.000	5.973.985.000	15.629.205.000
44	Kota Tebing Tinggi	10.140.277.000	5.700.228.000	15.840.505.000	10.140.277.000	5.700.228.000	15.840.505.000
45	Kota Padang Sidempuan	12.152.585.000	14.879.244.000	27.031.829.000	12.152.585.000	14.879.244.000	27.031.829.000
46	Kab. Pakpak Bharat	6.863.493.000	7.179.165.000	14.042.658.000	6.863.493.000	7.179.165.000	14.042.658.000
47	Kab. Nias Selatan	10.701.844.000	17.824.845.000	28.526.689.000	10.701.844.000	17.824.845.000	28.526.689.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	9.957.531.000	8.525.228.000	18.482.759.000	9.957.531.000	8.525.228.000	18.482.759.000
49	Kab. Serdang Bedagai	38.590.726.000	13.900.758.000	52.491.484.000	38.590.726.000	13.900.758.000	52.491.484.000
50	Kab. Samosir	9.415.811.000	6.246.442.000	15.662.253.000	9.415.811.000	6.246.442.000	15.662.253.000
51	Kab. Batu Bara	23.985.178.000	12.664.896.000	36.650.074.000	23.985.178.000	12.664.896.000	36.650.074.000
52	Kab. Padang Lawas	21.185.827.000	23.801.730.000	44.987.557.000	21.185.827.000	23.801.730.000	44.987.557.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	19.642.615.000	35.332.341.000	54.974.956.000	19.634.623.750	35.332.341.000	54.966.964.750
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	50.547.761.000	36.193.556.000	86.741.317.000	50.547.761.000	36.193.556.000	86.741.317.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	26.882.623.000	23.104.529.000	49.987.152.000	26.882.623.000	23.104.529.000	49.987.152.000
56	Kab. Nias Utara	8.539.360.000	14.172.032.000	22.711.392.000	8.539.360.000	14.172.032.000	22.711.392.000
57	Kab. Nias Barat	8.619.420.000	8.033.569.000	16.652.989.000	8.611.428.750	8.033.569.000	16.644.997.750
58	Kota Gunungsitoli	10.507.752.000	6.195.460.000	16.703.212.000	10.499.760.750	6.195.460.000	16.695.220.750

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
59	Provinsi Sumatera Barat	104.975.502.000	54.691.454.000	159.666.956.000	104.975.502.000	54.691.454.000	159.666.956.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	6.613.906.000	20.573.964.000	27.187.870.000	6.613.906.000	20.573.964.000	27.187.870.000
61	Kab. Agam	10.952.140.000	10.387.097.000	21.339.237.000	10.952.140.000	10.330.258.000	21.282.398.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	5.818.951.000	9.576.612.000	15.395.563.000	5.818.951.000	9.576.612.000	15.395.563.000
63	Kab. Padang Pariaman	6.499.092.000	7.317.322.000	13.816.414.000	6.499.092.000	7.317.322.000	13.816.414.000
64	Kab. Pasaman	5.545.940.000	9.391.012.000	14.936.952.000	5.545.940.000	9.391.012.000	14.936.952.000
65	Kab. Pesisir Selatan	12.894.164.000	14.025.492.000	26.919.656.000	12.893.085.710	14.025.492.000	26.918.577.710
66	Kab. Sijunjung	6.941.404.000	24.719.556.000	31.660.960.000	6.941.404.000	24.719.556.000	31.660.960.000
67	Kab. Solok	6.355.004.000	11.011.923.000	17.366.927.000	6.355.004.000	11.011.923.000	17.366.927.000
68	Kab. Tanah Datar	6.387.419.000	9.043.965.000	15.431.384.000	6.387.419.000	9.043.965.000	15.431.384.000
69	Kota Bukit Tinggi	7.740.310.000	3.765.842.000	11.506.152.000	7.739.231.710	3.765.842.000	11.505.073.710
70	Kota Padang Panjang	4.760.672.000	3.643.740.000	8.404.412.000	4.760.672.000	3.643.740.000	8.404.412.000
71	Kota Padang	69.235.824.000	7.903.960.000	77.139.784.000	69.235.824.000	7.903.960.000	77.139.784.000
72	Kota Payakumbuh	5.891.546.000	3.618.062.000	9.509.608.000	5.891.546.000	3.618.062.000	9.509.608.000
73	Kota Sawahlunto	10.519.670.000	23.710.507.000	34.230.177.000	10.519.670.000	23.710.507.000	34.230.177.000
74	Kota Solok	6.289.986.000	8.476.182.000	14.766.168.000	6.289.986.000	8.476.182.000	14.766.168.000
75	Kota Pariaman	4.939.733.000	5.985.574.000	10.925.307.000	4.939.733.000	5.985.574.000	10.925.307.000
76	Kab. Pasaman Barat	17.876.345.000	20.832.025.000	38.708.370.000	17.876.345.000	20.832.025.000	38.708.370.000
77	Kab. Dharmasraya	12.505.616.000	22.144.863.000	34.650.479.000	12.505.616.000	21.815.289.000	34.320.905.000
78	Kab. Solok Selatan	26.680.578.000	20.521.766.000	47.202.344.000	26.680.578.000	20.384.533.000	47.065.111.000
79	Provinsi Riau	799.173.914.000	469.296.166.000	1.268.470.080.000	799.173.231.890	469.296.166.000	1.268.469.397.890
80	Kab. Bengkalis	1.477.330.112.000	549.319.156.000	2.026.649.268.000	1.477.330.039.000	549.319.156.000	2.026.649.195.000
81	Kab. Indragiri Hilir	78.093.895.000	186.923.096.000	265.016.991.000	78.093.822.000	186.923.096.000	265.016.918.000
82	Kab. Indragiri Hulu	107.370.099.000	112.466.350.000	219.836.449.000	107.369.953.000	112.466.350.000	219.836.303.000
83	Kab. Kampar	304.251.173.000	282.281.502.000	586.532.675.000	304.251.168.620	282.281.502.000	586.532.670.620
84	Kab. Kuantan Singingi	55.751.091.000	97.590.259.000	153.341.350.000	55.751.086.620	97.590.259.000	153.341.345.620
85	Kab. Pelalawan	170.589.439.000	181.617.167.000	352.206.606.000	170.589.293.000	181.617.167.000	352.206.460.000
86	Kab. Rokan Hilir	353.015.410.000	357.989.707.000	711.005.117.000	353.015.405.620	357.989.707.000	711.005.112.620
87	Kab. Rokan Hulu	91.646.181.000	185.396.944.000	277.043.125.000	91.646.035.000	185.396.944.000	277.042.979.000
88	Kab. Siak	511.784.434.000	319.959.794.000	831.744.228.000	511.784.356.620	319.959.794.000	831.744.150.620

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
89	Kota Dumai	77.952.714.000	289.599.018.000	367.551.732.000	77.952.636.620	289.599.018.000	367.551.654.620
90	Kota Pekanbaru	153.986.493.000	94.154.029.000	248.140.522.000	153.986.435.130	94.154.029.000	248.140.464.130
91	Kab. Kepulauan Meranti	87.517.675.000	74.137.837.000	161.655.512.000	87.517.529.000	74.137.837.000	161.655.366.000
92	Provinsi Jambi	150.488.752.000	273.851.761.000	424.340.513.000	150.481.369.540	273.851.761.000	424.333.130.540
93	Kab. Batanghari	75.293.784.000	188.657.380.000	263.951.164.000	75.292.861.170	188.239.985.470	263.532.846.640
94	Kab. Bungo	21.890.916.000	113.065.784.000	134.956.700.000	21.889.993.170	113.065.784.000	134.955.777.170
95	Kab. Kerinci	11.855.084.000	49.550.150.000	61.405.234.000	11.855.084.000	49.550.150.000	61.405.234.000
96	Kab. Merangin	12.571.631.000	82.777.076.000	95.348.707.000	12.570.484.250	82.777.076.000	95.347.560.250
97	Kab. Muaro Jambi	88.580.633.000	154.404.242.000	242.984.875.000	88.549.872.000	151.571.655.000	240.121.527.000
98	Kab. Sarolangun	48.520.816.000	181.985.066.000	230.505.882.000	48.504.512.670	180.593.264.400	229.097.777.070
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	202.434.619.000	425.901.257.000	628.335.876.000	202.403.858.000	419.506.930.000	621.910.788.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	60.263.457.000	152.137.343.000	212.400.800.000	60.247.153.670	152.137.343.000	212.384.496.670
101	Kab. Tebo	30.892.657.000	122.988.970.000	153.881.627.000	30.861.896.000	122.988.970.000	153.850.866.000
102	Kota Jambi	73.262.268.000	38.616.127.000	111.878.395.000	73.231.507.000	38.616.127.000	111.847.634.000
103	Kota Sungai Penuh	10.813.091.000	39.831.050.000	50.644.141.000	10.757.137.000	39.831.050.000	50.588.187.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	706.075.438.000	1.420.038.500.000	2.126.113.938.000	706.073.545.840	1.420.038.500.000	2.126.112.045.840
105	Kab. Lahat	215.009.542.000	1.177.067.838.000	1.392.077.380.000	215.006.970.010	1.177.067.838.000	1.392.074.808.010
106	Kab. Musi Banyuasin	893.164.832.000	948.079.753.000	1.841.244.585.000	893.164.684.190	948.079.753.000	1.841.244.437.190
107	Kab. Musi Rawas	229.577.202.000	340.888.935.000	570.466.137.000	229.574.590.690	340.888.935.000	570.463.525.690
108	Kab. Muara Enim	563.923.339.000	1.099.172.555.000	1.663.095.894.000	563.918.412.000	1.096.108.901.000	1.660.027.313.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	82.608.188.000	137.429.508.000	220.037.696.000	82.605.576.690	137.429.508.000	220.035.084.690
110	Kab. Ogan Komering Ulu	95.777.603.000	159.901.715.000	255.679.318.000	95.772.676.000	159.901.715.000	255.674.391.000
111	Kota Palembang	131.694.173.000	153.124.425.000	284.818.598.000	131.689.246.000	153.124.425.000	284.813.671.000
112	Kota Prabumulih	107.747.380.000	178.883.539.000	286.630.919.000	107.742.453.000	178.883.539.000	286.625.992.000
113	Kota Pagar Alam	32.616.076.000	205.534.046.000	238.150.122.000	32.611.149.000	205.534.046.000	238.145.195.000
114	Kota Lubuk Linggau	33.338.533.000	112.696.084.000	146.034.617.000	33.333.606.000	112.696.084.000	146.029.690.000
115	Kab. Banyuasin	89.962.072.000	231.116.079.000	321.078.151.000	89.959.460.690	231.116.079.000	321.075.539.690
116	Kab. Ogan Ilir	66.081.400.000	157.713.355.000	223.794.755.000	66.081.252.190	157.713.355.000	223.794.607.190
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	37.093.270.000	115.265.466.000	152.358.736.000	37.090.806.500	115.265.466.000	152.356.272.500
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	34.183.288.000	144.935.553.000	179.118.841.000	34.176.390.000	144.935.553.000	179.111.943.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
119	Kab. Empat Lawang	29.108.725.000	183.215.403.000	212.324.128.000	29.106.261.500	183.215.403.000	212.321.664.500
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	481.291.853.000	215.711.495.000	697.003.348.000	481.289.389.500	215.711.495.000	697.000.884.500
121	Kab. Musi Rawas Utara	80.627.791.000	314.964.102.000	395.591.893.000	80.622.864.000	314.964.102.000	395.586.966.000
122	Provinsi Bengkulu	37.066.359.000	88.953.195.000	126.019.554.000	37.066.359.000	88.953.195.000	126.019.554.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	4.129.837.000	86.610.542.000	90.740.379.000	4.129.837.000	86.610.542.000	90.740.379.000
124	Kab. Bengkulu Utara	21.286.261.000	113.266.411.000	134.552.672.000	21.286.261.000	113.266.411.000	134.552.672.000
125	Kab. Rejang Lebong	4.754.076.000	29.049.961.000	33.804.037.000	4.754.076.000	29.049.961.000	33.804.037.000
126	Kota Bengkulu	19.709.935.000	18.559.511.000	38.269.446.000	19.709.935.000	18.559.511.000	38.269.446.000
127	Kab. Kaur	3.797.707.000	55.925.912.000	59.723.619.000	3.797.707.000	55.925.912.000	59.723.619.000
128	Kab. Seluma	7.708.330.000	92.448.235.000	100.156.565.000	7.708.330.000	92.448.235.000	100.156.565.000
129	Kab. Mukomuko	13.369.711.000	32.721.646.000	46.091.357.000	13.369.711.000	32.721.646.000	46.091.357.000
130	Kab. Lebong	4.799.068.000	42.122.728.000	46.921.796.000	4.799.068.000	42.049.749.500	46.848.817.500
131	Kab. Kepahiang	3.854.737.000	18.645.142.000	22.499.879.000	3.854.737.000	18.645.142.000	22.499.879.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	14.867.335.000	66.068.963.000	80.936.298.000	14.867.335.000	66.068.963.000	80.936.298.000
133	Provinsi Lampung	108.354.412.000	48.873.699.000	157.228.111.000	108.354.412.000	48.871.760.000	157.226.172.000
134	Kab. Lampung Barat	6.264.244.000	9.802.607.000	16.066.851.000	6.264.244.000	9.802.607.000	16.066.851.000
135	Kab. Lampung Selatan	22.019.899.000	12.159.907.000	34.179.806.000	22.015.969.450	12.159.907.000	34.175.876.450
136	Kab. Lampung Tengah	35.640.074.000	13.699.602.000	49.339.676.000	35.635.631.060	13.699.602.000	49.335.233.060
137	Kab. Lampung Utara	12.875.085.000	8.140.053.000	21.015.138.000	12.875.085.000	8.140.053.000	21.015.138.000
138	Kab. Lampung Timur	30.535.820.000	28.175.605.000	58.711.425.000	30.535.820.000	28.175.605.000	58.711.425.000
139	Kab. Tanggamus	29.011.685.000	31.557.970.000	60.569.655.000	29.006.057.690	31.557.970.000	60.564.027.690
140	Kab. Tulang Bawang	15.894.111.000	13.544.938.000	29.439.049.000	15.894.111.000	13.544.938.000	29.439.049.000
141	Kab. Way Kanan	14.457.679.000	12.774.984.000	27.232.663.000	14.453.306.770	12.774.984.000	27.228.290.770
142	Kota Bandar Lampung	50.184.495.000	9.002.260.000	59.186.755.000	50.180.651.430	9.002.260.000	59.182.911.430
143	Kota Metro	9.852.211.000	7.995.406.000	17.847.617.000	9.852.211.000	7.995.406.000	17.847.617.000
144	Kab. Pesawaran	8.847.911.000	10.193.236.000	19.041.147.000	8.841.545.420	10.193.236.000	19.034.781.420
145	Kab. Pringsewu	7.707.206.000	9.537.197.000	17.244.403.000	7.707.206.000	9.537.197.000	17.244.403.000
146	Kab. Mesuji	14.897.836.000	13.097.365.000	27.995.201.000	14.897.836.000	13.097.365.000	27.995.201.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	7.744.979.000	9.170.469.000	16.915.448.000	7.741.296.290	9.170.469.000	16.911.765.290
148	Kab. Pesisir Barat	5.740.241.000	12.385.645.000	18.125.886.000	5.740.241.000	12.385.645.000	18.125.886.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
149	Provinsi DKI Jakarta	16.345.264.483.000	33.632.641.000	16.378.897.124.000	16.345.264.483.000	33.632.641.000	16.378.897.124.000
150	Provinsi Jawa Barat	1.602.372.821.000	369.343.693.000	1.971.716.514.000	1.602.372.821.000	365.672.835.500	1.968.045.656.500
151	Kab. Bandung	167.251.923.000	359.131.482.000	526.383.405.000	167.251.923.000	359.131.482.000	526.383.405.000
152	Kab. Bekasi	461.214.573.000	28.100.995.000	489.315.568.000	461.214.573.000	28.100.995.000	489.315.568.000
153	Kab. Bogor	217.466.437.000	148.216.733.000	365.683.170.000	217.466.437.000	148.216.733.000	365.683.170.000
154	Kab. Ciamis	44.010.359.000	17.859.847.000	61.870.206.000	44.010.359.000	16.859.847.000	60.870.206.000
155	Kab. Cianjur	56.879.004.000	58.526.173.000	115.405.177.000	56.879.004.000	58.526.173.000	115.405.177.000
156	Kab. Cirebon	68.209.540.000	17.268.447.000	85.477.987.000	67.937.047.750	17.268.447.000	85.205.494.750
157	Kab. Garut	118.239.169.000	189.878.269.000	308.117.438.000	118.239.169.000	189.878.269.000	308.117.438.000
158	Kab. Indramayu	155.660.792.000	42.422.735.000	198.083.527.000	155.444.555.150	42.422.735.000	197.867.290.150
159	Kab. Karawang	414.852.569.000	31.336.776.000	446.189.345.000	410.814.786.440	31.336.776.000	442.151.562.440
160	Kab. Kuningan	42.105.655.000	16.869.982.000	58.975.637.000	42.105.655.000	16.869.982.000	58.975.637.000
161	Kab. Majalengka	62.019.396.000	18.639.415.000	80.658.811.000	62.019.396.000	18.639.415.000	80.658.811.000
162	Kab. Purwakarta	84.435.267.000	22.323.135.000	106.758.402.000	84.435.267.000	22.323.135.000	106.758.402.000
163	Kab. Subang	140.188.005.000	51.012.466.000	191.200.471.000	140.188.005.000	51.012.466.000	191.200.471.000
164	Kab. Sukabumi	89.379.661.000	127.405.226.000	216.784.887.000	89.163.292.990	127.405.226.000	216.568.518.990
165	Kab. Sumedang	77.530.634.000	45.755.052.000	123.285.686.000	77.530.634.000	45.755.052.000	123.285.686.000
166	Kab. Tasikmalaya	47.118.227.000	34.843.259.000	81.961.486.000	47.118.227.000	34.843.259.000	81.961.486.000
167	Kota Bandung	316.859.081.000	31.319.867.000	348.178.948.000	316.859.081.000	30.319.867.000	347.178.948.000
168	Kota Bekasi	148.288.931.000	21.982.147.000	170.271.078.000	148.288.931.000	21.482.147.000	169.771.078.000
169	Kota Bogor	77.471.306.000	20.487.273.000	97.958.579.000	77.471.306.000	20.487.273.000	97.958.579.000
170	Kota Cirebon	51.228.751.000	15.619.423.000	66.848.174.000	51.228.751.000	15.619.423.000	66.848.174.000
171	Kota Depok	96.876.794.000	20.195.248.000	117.072.042.000	96.876.794.000	20.195.248.000	117.072.042.000
172	Kota Sukabumi	39.182.702.000	24.366.057.000	63.548.759.000	39.182.702.000	24.366.057.000	63.548.759.000
173	Kota Tasikmalaya	48.162.435.000	16.806.464.000	64.968.899.000	48.162.435.000	16.806.464.000	64.968.899.000
174	Kota Cimahi	52.869.784.000	31.031.939.000	83.901.723.000	52.869.784.000	31.031.939.000	83.901.723.000
175	Kota Banjar	38.651.504.000	16.448.546.000	55.100.050.000	38.651.504.000	16.448.546.000	55.100.050.000
176	Kab. Bandung Barat	63.273.066.000	34.471.132.000	97.744.198.000	63.273.066.000	31.560.617.000	94.833.683.000
177	Kab. Pangandaran	39.950.725.000	19.659.965.000	59.610.690.000	39.950.725.000	19.659.965.000	59.610.690.000
178	Provinsi Jawa Tengah	780.113.455.000	6.609.696.000	786.723.151.000	780.113.455.000	6.609.696.000	786.723.151.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
179	Kab. Banjarnegara	31.129.254.000	1.475.154.000	32.604.408.000	31.129.254.000	1.475.154.000	32.604.408.000
180	Kab. Banyumas	42.105.190.000	1.872.973.000	43.978.163.000	42.105.190.000	1.872.973.000	43.978.163.000
181	Kab. Batang	32.455.303.000	2.002.939.000	34.458.242.000	32.455.303.000	2.002.939.000	34.458.242.000
182	Kab. Blora	101.717.192.000	129.392.806.000	231.109.998.000	101.717.192.000	129.392.806.000	231.109.998.000
183	Kab. Boyolali	44.376.515.000	1.553.309.000	45.929.824.000	44.376.515.000	1.553.309.000	45.929.824.000
184	Kab. Brebes	31.864.740.000	1.950.347.000	33.815.087.000	31.864.740.000	1.950.347.000	33.815.087.000
185	Kab. Cilacap	52.492.696.000	3.353.245.000	55.845.941.000	52.492.696.000	3.353.245.000	55.845.941.000
186	Kab. Demak	57.424.634.000	1.637.555.000	59.062.189.000	57.424.634.000	1.637.555.000	59.062.189.000
187	Kab. Grobogan	50.324.970.000	3.135.370.000	53.460.340.000	50.324.970.000	3.135.370.000	53.460.340.000
188	Kab. Jepara	40.659.116.000	2.975.672.000	43.634.788.000	40.659.116.000	2.975.672.000	43.634.788.000
189	Kab. Karanganyar	40.230.412.000	1.425.073.000	41.655.485.000	40.230.412.000	1.425.073.000	41.655.485.000
190	Kab. Kebumen	28.234.319.000	1.778.417.000	30.012.736.000	28.234.319.000	1.778.417.000	30.012.736.000
191	Kab. Kendal	48.518.845.000	2.040.044.000	50.558.889.000	48.518.845.000	2.040.044.000	50.558.889.000
192	Kab. Klaten	42.760.601.000	1.391.795.000	44.152.396.000	42.760.601.000	1.391.795.000	44.152.396.000
193	Kab. Kudus	284.360.294.000	1.445.379.000	285.805.673.000	284.360.294.000	1.445.379.000	285.805.673.000
194	Kab. Magelang	37.350.178.000	1.510.868.000	38.861.046.000	37.350.178.000	1.510.868.000	38.861.046.000
195	Kab. Pati	32.703.336.000	2.738.202.000	35.441.538.000	32.703.336.000	2.738.202.000	35.441.538.000
196	Kab. Pekalongan	25.097.206.000	1.601.168.000	26.698.374.000	25.097.206.000	1.601.168.000	26.698.374.000
197	Kab. Pemalang	28.385.713.000	2.336.892.000	30.722.605.000	28.385.713.000	2.336.892.000	30.722.605.000
198	Kab. Purbalingga	26.886.234.000	1.536.018.000	28.422.252.000	26.886.234.000	1.536.018.000	28.422.252.000
199	Kab. Purworejo	25.212.486.000	1.520.266.000	26.732.752.000	25.212.486.000	1.520.266.000	26.732.752.000
200	Kab. Rembang	58.298.800.000	3.944.553.000	62.243.353.000	58.298.800.000	3.944.553.000	62.243.353.000
201	Kab. Semarang	40.576.533.000	1.880.932.000	42.457.465.000	40.576.533.000	1.880.932.000	42.457.465.000
202	Kab. Sragen	25.154.186.000	1.546.545.000	26.700.731.000	25.154.186.000	1.546.545.000	26.700.731.000
203	Kab. Sukoharjo	33.577.044.000	1.378.983.000	34.956.027.000	33.577.044.000	1.378.983.000	34.956.027.000
204	Kab. Tegal	31.544.113.000	1.943.831.000	33.487.944.000	31.544.113.000	1.943.831.000	33.487.944.000
205	Kab. Temanggung	62.751.797.000	1.518.164.000	64.269.961.000	62.751.797.000	1.518.164.000	64.269.961.000
206	Kab. Wonogiri	36.114.651.000	1.629.661.000	37.744.312.000	36.114.651.000	1.629.661.000	37.744.312.000
207	Kab. Wonosobo	31.852.859.000	1.514.258.000	33.367.117.000	31.852.859.000	1.514.258.000	33.367.117.000
208	Kota Magelang	25.308.720.000	1.370.677.000	26.679.397.000	25.308.720.000	1.370.677.000	26.679.397.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
209	Kota Pekalongan	26.625.499.000	1.407.459.000	28.032.958.000	26.625.499.000	1.407.459.000	28.032.958.000
210	Kota Salatiga	24.500.288.000	1.354.574.000	25.854.862.000	24.500.288.000	1.354.574.000	25.854.862.000
211	Kota Semarang	183.074.999.000	1.510.548.000	184.585.547.000	183.074.999.000	1.510.548.000	184.585.547.000
212	Kota Surakarta	47.412.433.000	1.340.727.000	48.753.160.000	47.412.433.000	1.340.727.000	48.753.160.000
213	Kota Tegal	25.919.279.000	1.457.089.000	27.376.368.000	25.919.279.000	1.457.089.000	27.376.368.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	88.265.698.000	73.337.000	88.339.035.000	88.265.698.000	73.337.000	88.339.035.000
215	Kab. Bantul	26.521.970.000	1.170.873.000	27.692.843.000	26.521.970.000	1.170.873.000	27.692.843.000
216	Kab. Gunung Kidul	15.224.885.000	1.566.783.000	16.791.668.000	15.224.885.000	1.566.783.000	16.791.668.000
217	Kab. Kulon Progo	15.538.844.000	1.282.997.000	16.821.841.000	15.538.844.000	1.282.997.000	16.821.841.000
218	Kab. Sleman	51.388.406.000	1.111.296.000	52.499.702.000	51.388.406.000	1.111.296.000	52.499.702.000
219	Kota Yogyakarta	43.125.615.000	1.104.973.000	44.230.588.000	43.125.615.000	1.104.973.000	44.230.588.000
220	Provinsi Jawa Timur	1.741.686.360.000	672.484.643.000	2.414.171.003.000	1.741.686.360.000	672.484.643.000	2.414.171.003.000
221	Kab. Bangkalan	47.193.607.000	29.650.692.000	76.844.299.000	46.399.835.230	29.650.692.000	76.050.527.230
222	Kab. Banyuwangi	79.743.762.000	88.912.994.000	168.656.756.000	79.743.762.000	88.912.994.000	168.656.756.000
223	Kab. Blitar	52.973.227.000	30.196.462.000	83.169.689.000	52.973.227.000	30.196.462.000	83.169.689.000
224	Kab. Bojonegoro	879.954.573.000	1.806.437.524.000	2.686.392.097.000	879.954.573.000	1.806.437.524.000	2.686.392.097.000
225	Kab. Bondowoso	76.002.576.000	37.269.954.000	113.272.530.000	76.002.576.000	37.269.954.000	113.272.530.000
226	Kab. Gresik	180.262.426.000	46.631.953.000	226.894.379.000	180.262.426.000	46.631.953.000	226.894.379.000
227	Kab. Jember	160.825.416.000	38.905.815.000	199.731.231.000	160.825.416.000	38.905.815.000	199.731.231.000
228	Kab. Jombang	77.253.812.000	140.557.788.000	217.811.600.000	77.253.812.000	140.557.788.000	217.811.600.000
229	Kab. Kediri	108.054.793.000	29.379.411.000	137.434.204.000	108.054.793.000	29.379.411.000	137.434.204.000
230	Kab. Lamongan	85.937.309.000	145.934.056.000	231.871.365.000	85.937.309.000	145.934.056.000	231.871.365.000
231	Kab. Lumajang	51.982.236.000	30.210.768.000	82.193.004.000	51.982.236.000	30.210.768.000	82.193.004.000
232	Kab. Madiun	53.885.763.000	147.291.658.000	201.177.421.000	53.885.763.000	147.291.658.000	201.177.421.000
233	Kab. Magetan	48.152.891.000	29.236.634.000	77.389.525.000	48.152.891.000	29.236.634.000	77.389.525.000
234	Kab. Malang	146.722.319.000	29.963.392.000	176.685.711.000	146.722.319.000	29.963.392.000	176.685.711.000
235	Kab. Mojokerto	63.945.619.000	30.520.282.000	94.465.901.000	63.945.619.000	30.520.282.000	94.465.901.000
236	Kab. Nganjuk	55.155.311.000	143.955.901.000	199.111.212.000	55.155.311.000	143.955.901.000	199.111.212.000
237	Kab. Ngawi	53.275.795.000	144.781.117.000	198.056.912.000	53.275.795.000	144.781.117.000	198.056.912.000
238	Kab. Pacitan	46.053.595.000	29.564.431.000	75.618.026.000	46.053.595.000	29.564.431.000	75.618.026.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
239	Kab. Pamekasan	113.220.325.000	29.742.389.000	142.962.714.000	113.220.325.000	29.742.389.000	142.962.714.000
240	Kab. Pasuruan	385.889.482.000	28.666.963.000	414.556.445.000	385.889.482.000	28.666.963.000	414.556.445.000
241	Kab. Ponorogo	55.156.904.000	30.448.463.000	85.605.367.000	55.156.904.000	30.448.463.000	85.605.367.000
242	Kab. Probolinggo	111.503.283.000	29.734.259.000	141.237.542.000	111.503.283.000	29.734.259.000	141.237.542.000
243	Kab. Sampang	50.611.363.000	29.710.984.000	80.322.347.000	50.611.363.000	29.710.984.000	80.322.347.000
244	Kab. Sidoarjo	150.648.369.000	29.453.568.000	180.101.937.000	150.648.369.000	29.453.568.000	180.101.937.000
245	Kab. Situbondo	80.138.315.000	38.534.389.000	118.672.704.000	80.138.315.000	38.534.389.000	118.672.704.000
246	Kab. Sumenep	72.721.648.000	36.073.879.000	108.795.527.000	72.721.648.000	36.073.879.000	108.795.527.000
247	Kab. Trenggalek	47.495.543.000	30.573.269.000	78.068.812.000	47.495.543.000	30.573.269.000	78.068.812.000
248	Kab. Tuban	96.786.016.000	427.717.269.000	524.503.285.000	96.786.016.000	427.717.269.000	524.503.285.000
249	Kab. Tulungagung	60.850.153.000	30.122.768.000	90.972.921.000	60.850.153.000	30.122.768.000	90.972.921.000
250	Kota Blitar	45.882.068.000	29.186.422.000	75.068.490.000	45.882.068.000	29.186.422.000	75.068.490.000
251	Kota Kediri	177.643.955.000	29.113.833.000	206.757.788.000	177.643.955.000	29.113.833.000	206.757.788.000
252	Kota Madiun	53.604.121.000	28.456.613.000	82.060.734.000	53.604.121.000	28.456.613.000	82.060.734.000
253	Kota Malang	105.370.394.000	28.332.935.000	133.703.329.000	105.370.394.000	28.332.935.000	133.703.329.000
254	Kota Mojokerto	46.574.043.000	28.367.230.000	74.941.273.000	46.574.043.000	28.367.230.000	74.941.273.000
255	Kota Pasuruan	46.459.897.000	28.367.981.000	74.827.878.000	46.459.897.000	28.367.981.000	74.827.878.000
256	Kota Probolinggo	46.091.755.000	28.454.251.000	74.546.006.000	46.091.755.000	28.454.251.000	74.546.006.000
257	Kota Surabaya	460.973.008.000	29.676.348.000	490.649.356.000	460.973.008.000	29.676.348.000	490.649.356.000
258	Kota Batu	43.823.375.000	31.115.327.000	74.938.702.000	43.823.375.000	31.115.327.000	74.938.702.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	125.950.772.000	150.501.057.000	276.451.829.000	125.943.818.420	150.501.057.000	276.444.875.420
260	Kab. Bengkayang	17.912.025.000	26.056.748.000	43.968.773.000	17.912.025.000	26.056.748.000	43.968.773.000
261	Kab. Landak	19.403.615.000	26.684.855.000	46.088.470.000	19.402.946.390	26.467.179.500	45.870.125.890
262	Kab. Kapuas Hulu	22.853.105.000	80.564.269.000	103.417.374.000	22.852.436.390	80.564.269.000	103.416.705.390
263	Kab. Ketapang	122.459.897.000	117.603.349.000	240.063.246.000	122.459.228.390	117.603.349.000	240.062.577.390
264	Kab. Mempawah	11.814.721.000	15.150.705.000	26.965.426.000	11.814.721.000	15.150.705.000	26.965.426.000
265	Kab. Sambas	20.247.580.000	18.866.733.000	39.114.313.000	20.246.911.390	18.866.733.000	39.113.644.390
266	Kab. Sanggau	39.390.421.000	99.986.031.000	139.376.452.000	39.389.752.390	99.986.031.000	139.375.783.390
267	Kab. Sintang	35.974.492.000	89.461.832.000	125.436.324.000	35.974.492.000	89.461.832.000	125.436.324.000
268	Kota Pontianak	41.707.576.000	15.421.523.000	57.129.099.000	41.707.576.000	15.421.523.000	57.129.099.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
269	Kota Singkawang	11.824.831.000	12.328.293.000	24.153.124.000	11.824.831.000	12.328.293.000	24.153.124.000
270	Kab. Sekadau	18.087.848.000	29.554.951.000	47.642.799.000	18.087.848.000	29.554.951.000	47.642.799.000
271	Kab. Melawi	15.278.769.000	30.403.159.000	45.681.928.000	15.278.769.000	30.403.159.000	45.681.928.000
272	Kab. Kayong Utara	13.571.629.000	22.635.620.000	36.207.249.000	13.571.629.000	22.635.620.000	36.207.249.000
273	Kab. Kubu Raya	30.692.972.000	28.738.770.000	59.431.742.000	30.692.972.000	28.738.770.000	59.431.742.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	266.225.623.000	1.876.209.159.000	2.142.434.782.000	266.225.580.000	1.876.209.159.000	2.142.434.739.000
275	Kab. Barito Selatan	64.206.231.000	554.205.792.000	618.412.023.000	64.206.228.000	551.558.177.800	615.764.405.800
276	Kab. Barito Utara	286.025.067.000	1.721.509.532.000	2.007.534.599.000	286.025.064.000	1.721.509.532.000	2.007.534.596.000
277	Kab. Kapuas	208.820.757.000	923.275.844.000	1.132.096.601.000	208.820.754.000	923.275.844.000	1.132.096.598.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	57.085.142.000	164.617.843.000	221.702.985.000	57.085.139.000	164.617.843.000	221.702.982.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	107.808.539.000	182.426.077.000	290.234.616.000	107.808.536.000	182.426.077.000	290.234.613.000
280	Kota Palangkaraya	29.530.998.000	142.434.677.000	171.965.675.000	29.530.944.000	139.862.045.000	169.392.989.000
281	Kab. Katingan	32.760.831.000	155.011.435.000	187.772.266.000	32.760.828.000	155.011.435.000	187.772.263.000
282	Kab. Seruyan	69.140.694.000	161.603.794.000	230.744.488.000	69.140.691.000	161.603.794.000	230.744.485.000
283	Kab. Sukamara	22.549.673.000	148.083.551.000	170.633.224.000	22.549.671.410	148.083.551.000	170.633.222.410
284	Kab. Lamandau	35.564.756.000	163.560.843.000	199.125.599.000	35.564.753.000	163.560.843.000	199.125.596.000
285	Kab. Gunung Mas	30.527.671.000	267.233.451.000	297.761.122.000	30.527.668.000	267.233.451.000	297.761.119.000
286	Kab. Pulang Pisau	26.577.605.000	188.433.030.000	215.010.635.000	26.577.602.000	188.433.030.000	215.010.632.000
287	Kab. Murung Raya	183.577.772.000	1.074.679.034.000	1.258.256.806.000	183.577.769.000	1.063.128.816.000	1.246.706.585.000
288	Kab. Barito Timur	32.443.654.000	270.667.906.000	303.111.560.000	32.443.651.000	270.667.906.000	303.111.557.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	455.694.783.000	3.115.267.259.000	3.570.962.042.000	455.691.116.000	3.115.267.259.000	3.570.958.375.000
290	Kab. Banjar	69.977.968.000	846.845.705.000	916.823.673.000	69.977.586.000	846.845.705.000	916.823.291.000
291	Kab. Barito Kuala	29.780.328.000	419.603.996.000	449.384.324.000	29.779.946.000	419.603.996.000	449.383.942.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	57.320.460.000	614.933.026.000	672.253.486.000	57.320.078.000	614.933.026.000	672.253.104.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	23.193.940.000	497.820.486.000	521.014.426.000	23.193.558.000	497.820.486.000	521.014.044.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	25.954.543.000	548.172.456.000	574.126.999.000	25.954.161.000	548.172.456.000	574.126.617.000
295	Kab. Kotabaru	52.244.849.000	1.536.984.511.000	1.589.229.360.000	52.244.658.000	1.536.984.511.000	1.589.229.169.000
296	Kab. Tabalong	238.312.131.000	1.219.050.126.000	1.457.362.257.000	238.311.749.000	1.219.050.126.000	1.457.361.875.000
297	Kab. Tanah Laut	113.755.990.000	1.077.685.860.000	1.191.441.850.000	113.755.608.000	1.077.685.860.000	1.191.441.468.000
298	Kab. Tapin	173.737.510.000	878.903.218.000	1.052.640.728.000	173.737.128.000	878.903.218.000	1.052.640.346.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
299	Kota Banjarbaru	43.513.606.000	374.591.086.000	418.104.692.000	43.513.224.000	374.591.086.000	418.104.310.000
300	Kota Banjarmasin	69.387.177.000	303.047.298.000	372.434.475.000	69.381.676.000	303.047.298.000	372.428.974.000
301	Kab. Balangan	535.920.792.000	2.135.794.435.000	2.671.715.227.000	535.920.589.540	2.135.794.435.000	2.671.715.024.540
302	Kab. Tanah Bumbu	443.286.752.000	1.951.829.499.000	2.395.116.251.000	443.286.370.000	1.951.829.499.000	2.395.115.869.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	768.785.059.000	6.039.719.811.000	6.808.504.870.000	768.781.013.000	6.039.719.811.000	6.808.500.824.000
304	Kab. Berau	148.710.651.000	2.738.609.417.000	2.887.320.068.000	148.710.090.000	2.738.609.417.000	2.887.319.507.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	798.715.310.000	5.827.231.919.000	6.625.947.229.000	798.715.293.170	5.827.231.919.000	6.625.947.212.170
306	Kab. Kutai Barat	144.957.118.000	1.629.514.080.000	1.774.471.198.000	144.957.101.170	1.629.514.080.000	1.774.471.181.170
307	Kab. Kutai Timur	928.126.806.000	4.304.138.024.000	5.232.264.830.000	928.126.245.000	4.304.138.024.000	5.232.264.269.000
308	Kab. Paser	316.625.796.000	1.879.112.467.000	2.195.738.263.000	316.625.235.000	1.879.112.467.000	2.195.737.702.000
309	Kota Balikpapan	176.531.697.000	980.564.639.000	1.157.096.336.000	176.530.895.000	980.564.639.000	1.157.095.534.000
310	Kota Bontang	158.315.488.000	1.223.483.180.000	1.381.798.668.000	158.314.927.000	1.223.483.180.000	1.381.798.107.000
311	Kota Samarinda	163.702.193.000	1.111.334.645.000	1.275.036.838.000	163.696.371.000	1.111.334.645.000	1.275.031.016.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	106.658.935.000	1.055.890.357.000	1.162.549.292.000	106.658.374.000	1.055.890.357.000	1.162.548.731.000
313	Kab. Mahakam Ulu	49.793.614.000	1.176.594.030.000	1.226.387.644.000	49.793.053.000	1.176.594.030.000	1.226.387.083.000
314	Provinsi Sulawesi Utara	65.009.154.000	68.442.304.000	133.451.458.000	65.009.154.000	68.442.304.000	133.451.458.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	10.822.187.000	54.321.553.000	65.143.740.000	10.822.187.000	54.321.553.000	65.143.740.000
316	Kab. Minahasa	13.051.093.000	29.158.188.000	42.209.281.000	13.051.093.000	29.158.188.000	42.209.281.000
317	Kab. Sangihe	4.443.809.000	9.389.770.000	13.833.579.000	4.443.809.000	9.389.770.000	13.833.579.000
318	Kota Bitung	11.275.291.000	35.078.244.000	46.353.535.000	11.275.291.000	35.078.244.000	46.353.535.000
319	Kota Manado	35.471.490.000	11.617.459.000	47.088.949.000	35.471.490.000	11.617.459.000	47.088.949.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	3.492.009.000	8.426.254.000	11.918.263.000	3.492.009.000	8.426.254.000	11.918.263.000
321	Kab. Minahasa Selatan	5.390.525.000	11.722.460.000	17.112.985.000	5.390.525.000	11.722.460.000	17.112.985.000
322	Kota Tomohon	10.213.350.000	22.375.523.000	32.588.873.000	10.213.350.000	22.375.523.000	32.588.873.000
323	Kab. Minahasa Utara	19.474.128.000	48.722.783.000	68.196.911.000	19.474.128.000	48.722.783.000	68.196.911.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2.977.265.000	7.568.279.000	10.545.544.000	2.977.265.000	7.568.279.000	10.545.544.000
325	Kota Kotamobagu	6.616.319.000	9.813.585.000	16.429.904.000	6.616.319.000	9.813.023.000	16.429.342.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.634.280.000	11.110.785.000	14.745.065.000	3.634.280.000	11.110.785.000	14.745.065.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	3.639.095.000	10.662.346.000	14.301.441.000	3.639.095.000	10.662.346.000	14.301.441.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.552.280.000	11.609.694.000	15.161.974.000	3.552.280.000	11.609.694.000	15.161.974.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9.602.505.000	13.184.779.000	22.787.284.000	9.602.505.000	13.184.779.000	22.787.284.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	174.283.904.000	450.018.496.000	624.302.400.000	174.283.904.000	450.018.496.000	624.302.400.000
331	Kab. Banggai	273.139.667.000	651.994.415.000	925.134.082.000	273.139.667.000	651.976.154.030	925.115.821.030
332	Kab. Banggai Kepulauan	8.601.279.000	45.924.665.000	54.525.944.000	8.601.279.000	45.924.665.000	54.525.944.000
333	Kab. Buol	12.975.836.000	52.060.755.000	65.036.591.000	12.960.186.000	51.857.824.000	64.818.010.000
334	Kab. Tolitoli	10.338.802.000	50.177.322.000	60.516.124.000	10.338.802.000	50.177.322.000	60.516.124.000
335	Kab. Donggala	12.018.904.000	51.307.726.000	63.326.630.000	12.010.609.500	51.307.726.000	63.318.335.500
336	Kab. Morowali	129.550.645.000	493.341.183.000	622.891.828.000	129.542.820.000	493.183.283.700	622.726.103.700
337	Kab. Poso	9.825.858.000	71.125.166.000	80.951.024.000	9.818.033.000	71.125.166.000	80.943.199.000
338	Kota Palu	26.938.589.000	45.274.398.000	72.212.987.000	26.934.344.870	45.274.398.000	72.208.742.870
339	Kab. Parigi Moutong	12.002.415.000	49.111.895.000	61.114.310.000	12.000.090.600	49.111.895.000	61.111.985.600
340	Kab. Tojo Una Una	8.412.333.000	183.477.057.000	191.889.390.000	8.404.508.000	183.477.057.000	191.881.565.000
341	Kab. Sigi	10.496.234.000	49.120.597.000	59.616.831.000	10.495.764.500	49.120.597.000	59.616.361.500
342	Kab. Banggai Laut	7.941.590.000	48.847.116.000	56.788.706.000	7.941.120.500	48.847.116.000	56.788.236.500
343	Kab. Morowali Utara	21.543.195.000	368.424.772.000	389.967.967.000	21.535.370.000	368.424.772.000	389.960.142.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	178.988.613.000	102.213.890.000	281.202.503.000	178.988.613.000	102.213.890.000	281.202.503.000
345	Kab. Bantaeng	6.529.435.000	4.224.226.000	10.753.661.000	6.529.435.000	4.224.226.000	10.753.661.000
346	Kab. Barru	6.213.957.000	5.712.372.000	11.926.329.000	6.213.957.000	5.712.372.000	11.926.329.000
347	Kab. Bone	14.758.120.000	8.587.188.000	23.345.308.000	14.758.120.000	8.587.188.000	23.345.308.000
348	Kab. Bulukumba	10.727.280.000	4.606.077.000	15.333.357.000	10.727.280.000	4.606.077.000	15.333.357.000
349	Kab. Enrekang	5.674.364.000	6.418.617.000	12.092.981.000	5.674.364.000	6.418.617.000	12.092.981.000
350	Kab. Gowa	11.058.078.000	4.152.062.000	15.210.140.000	11.058.078.000	4.152.062.000	15.210.140.000
351	Kab. Jeneponto	7.284.141.000	4.382.158.000	11.666.299.000	7.284.141.000	4.382.158.000	11.666.299.000
352	Kab. Luwu	7.057.953.000	9.850.519.000	16.908.472.000	7.057.953.000	9.850.519.000	16.908.472.000
353	Kab. Luwu Utara	7.150.983.000	21.809.638.000	28.960.621.000	7.150.983.000	21.809.638.000	28.960.621.000
354	Kab. Maros	10.955.828.000	4.277.392.000	15.233.220.000	10.955.828.000	4.277.392.000	15.233.220.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	11.382.252.000	11.917.271.000	23.299.523.000	11.382.252.000	11.886.264.000	23.268.516.000
356	Kota Palopo	8.234.638.000	6.243.978.000	14.478.616.000	8.234.638.000	6.243.978.000	14.478.616.000
357	Kab. Luwu Timur	48.206.857.000	267.014.507.000	315.221.364.000	48.206.857.000	266.741.368.000	314.948.225.000
358	Kab. Pinrang	6.463.878.000	6.758.344.000	13.222.222.000	6.463.878.000	6.758.344.000	13.222.222.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
359	Kab. Sinjai	7.741.329.000	4.549.691.000	12.291.020.000	7.741.329.000	4.549.691.000	12.291.020.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	5.669.649.000	10.408.091.000	16.077.740.000	5.669.649.000	10.408.091.000	16.077.740.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	6.451.930.000	8.937.589.000	15.389.519.000	6.451.930.000	8.924.745.000	15.376.675.000
362	Kab. Soppeng	9.199.797.000	9.774.147.000	18.973.944.000	9.199.797.000	9.774.147.000	18.973.944.000
363	Kab. Takalar	8.248.586.000	4.629.110.000	12.877.696.000	8.248.586.000	4.629.110.000	12.877.696.000
364	Kab. Tana Toraja	6.624.960.000	5.398.906.000	12.023.866.000	6.624.960.000	5.398.906.000	12.023.866.000
365	Kab. Wajo	24.849.912.000	29.736.579.000	54.586.491.000	24.849.912.000	29.736.579.000	54.586.491.000
366	Kota Parepare	8.459.896.000	5.105.194.000	13.565.090.000	8.459.896.000	5.105.194.000	13.565.090.000
367	Kota Makassar	101.881.349.000	4.836.736.000	106.718.085.000	101.881.349.000	4.836.736.000	106.718.085.000
368	Kab. Toraja Utara	6.423.159.000	5.681.325.000	12.104.484.000	6.423.159.000	5.681.325.000	12.104.484.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	68.940.763.000	530.165.480.000	599.106.243.000	68.940.754.000	530.165.480.000	599.106.234.000
370	Kab. Buton	3.777.170.000	26.008.621.000	29.785.791.000	3.777.168.000	26.008.621.000	29.785.789.000
371	Kab. Konawe	9.494.484.000	179.502.805.000	188.997.289.000	9.494.482.000	179.377.465.000	188.871.947.000
372	Kab. Kolaka	36.107.562.000	491.478.438.000	527.586.000.000	36.107.560.000	491.478.438.000	527.585.998.000
373	Kab. Muna	4.415.335.000	31.635.823.000	36.051.158.000	4.415.333.000	31.531.710.000	35.947.043.000
374	Kota Kendari	25.284.262.000	36.393.135.000	61.677.397.000	25.284.229.000	36.393.135.000	61.677.364.000
375	Kota Bau-bau	5.364.495.000	24.526.753.000	29.891.248.000	5.364.493.000	24.526.753.000	29.891.246.000
376	Kab. Konawe Selatan	20.639.116.000	132.323.866.000	152.962.982.000	20.639.114.000	132.323.866.000	152.962.980.000
377	Kab. Bombana	20.109.666.000	255.315.382.000	275.425.048.000	20.109.664.000	255.315.382.000	275.425.046.000
378	Kab. Wakatobi	4.032.871.000	26.961.078.000	30.993.949.000	4.032.869.000	26.961.078.000	30.993.947.000
379	Kab. Kolaka Utara	8.096.042.000	123.977.105.000	132.073.147.000	8.096.040.000	123.977.105.000	132.073.145.000
380	Kab. Konawe Utara	54.782.787.000	495.679.874.000	550.462.661.000	54.782.785.000	495.408.659.000	550.191.444.000
381	Kab. Buton Utara	3.209.651.000	27.351.148.000	30.560.799.000	3.209.649.000	27.272.086.000	30.481.735.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	3.651.851.000	47.536.360.000	51.188.211.000	3.651.849.000	47.536.360.000	51.188.209.000
383	Kab. Kolaka Timur	4.987.100.000	83.712.222.000	88.699.322.000	4.987.099.000	83.712.222.000	88.699.321.000
384	Kab. Muna Barat	3.200.881.000	26.213.922.000	29.414.803.000	3.200.879.000	26.213.922.000	29.414.801.000
385	Kab. Buton Tengah	7.237.590.000	64.897.167.000	72.134.757.000	7.237.588.940	64.897.167.000	72.134.755.940
386	Kab. Buton Selatan	3.154.370.000	25.474.499.000	28.628.869.000	3.154.368.000	25.449.043.000	28.603.411.000
387	Provinsi Bali	179.401.949.000	11.743.000	179.413.692.000	179.380.389.110	11.743.000	179.392.132.110
388	Kab. Badung	91.318.896.000	1.443.590.000	92.762.486.000	91.311.581.610	1.443.590.000	92.755.171.610

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
389	Kab. Bangli	12.979.740.000	1.122.262.000	14.102.002.000	12.979.740.000	1.122.262.000	14.102.002.000
390	Kab. Buleleng	21.045.231.000	1.853.752.000	22.898.983.000	21.045.231.000	1.853.752.000	22.898.983.000
391	Kab. Gianyar	21.478.063.000	1.156.961.000	22.635.024.000	21.478.063.000	1.156.961.000	22.635.024.000
392	Kab. Jembrana	14.243.224.000	1.499.968.000	15.743.192.000	14.243.224.000	1.499.968.000	15.743.192.000
393	Kab. Karangasem	14.994.513.000	1.551.511.000	16.546.024.000	14.994.513.000	1.551.511.000	16.546.024.000
394	Kab. Klungkung	14.356.493.000	1.603.706.000	15.960.199.000	14.356.493.000	1.603.706.000	15.960.199.000
395	Kab. Tabanan	19.155.079.000	1.238.797.000	20.393.876.000	19.151.127.910	1.238.797.000	20.389.924.910
396	Kota Denpasar	91.227.758.000	1.145.327.000	92.373.085.000	91.227.758.000	1.145.327.000	92.373.085.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	195.389.183.000	109.503.910.000	304.893.093.000	195.389.183.000	109.503.910.000	304.893.093.000
398	Kab. Bima	23.873.306.000	17.867.964.000	41.741.270.000	23.873.306.000	17.784.844.000	41.658.150.000
399	Kab. Dompu	24.747.667.000	16.405.579.000	41.153.246.000	24.747.667.000	16.405.579.000	41.153.246.000
400	Kab. Lombok Barat	28.423.273.000	15.923.645.000	44.346.918.000	28.423.273.000	15.923.645.000	44.346.918.000
401	Kab. Lombok Tengah	83.732.393.000	15.616.621.000	99.349.014.000	83.732.393.000	15.578.936.000	99.311.329.000
402	Kab. Lombok Timur	90.747.258.000	15.813.312.000	106.560.570.000	90.747.258.000	15.813.312.000	106.560.570.000
403	Kab. Sumbawa	28.854.890.000	98.114.272.000	126.969.162.000	28.854.890.000	98.114.272.000	126.969.162.000
404	Kota Mataram	93.896.033.000	14.639.394.000	108.535.427.000	93.896.033.000	14.639.394.000	108.535.427.000
405	Kota Bima	24.994.944.000	14.706.451.000	39.701.395.000	24.994.944.000	14.706.451.000	39.701.395.000
406	Kab. Sumbawa Barat	87.367.687.000	223.866.836.000	311.234.523.000	87.367.687.000	223.645.297.000	311.012.984.000
407	Kab. Lombok Utara	23.431.510.000	15.846.222.000	39.277.732.000	23.431.510.000	15.846.222.000	39.277.732.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	46.687.742.000	1.310.601.000	47.998.343.000	46.687.742.000	1.310.601.000	47.998.343.000
409	Kab. Alor	2.750.068.000	3.933.553.000	6.683.621.000	2.750.068.000	3.933.553.000	6.683.621.000
410	Kab. Belu	2.863.422.000	1.297.158.000	4.160.580.000	2.863.422.000	1.297.158.000	4.160.580.000
411	Kab. Ende	4.978.574.000	3.123.254.000	8.101.828.000	4.978.574.000	3.123.254.000	8.101.828.000
412	Kab. Flores Timur	3.089.755.000	2.948.907.000	6.038.662.000	3.089.755.000	2.948.907.000	6.038.662.000
413	Kab. Kupang	3.822.684.000	3.607.325.000	7.430.009.000	3.822.684.000	3.607.325.000	7.430.009.000
414	Kab. Lembata	2.300.172.000	3.106.280.000	5.406.452.000	2.300.172.000	3.106.280.000	5.406.452.000
415	Kab. Manggarai	4.478.916.000	2.591.690.000	7.070.606.000	4.478.916.000	2.591.690.000	7.070.606.000
416	Kab. Ngada	3.134.666.000	1.885.231.000	5.019.897.000	3.134.666.000	1.885.231.000	5.019.897.000
417	Kab. Sikka	4.501.912.000	2.991.732.000	7.493.644.000	4.501.912.000	2.991.732.000	7.493.644.000
418	Kab. Sumba Barat	2.619.244.000	1.411.282.000	4.030.526.000	2.619.244.000	1.411.282.000	4.030.526.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
419	Kab. Sumba Timur	5.868.842.000	3.208.946.000	9.077.788.000	5.868.842.000	3.208.946.000	9.077.788.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	3.495.518.000	1.645.463.000	5.140.981.000	3.495.518.000	1.645.463.000	5.140.981.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	2.802.866.000	1.487.217.000	4.290.083.000	2.799.712.490	1.487.217.000	4.286.929.490
422	Kota Kupang	21.829.594.000	1.224.378.000	23.053.972.000	21.829.594.000	1.224.378.000	23.053.972.000
423	Kab. Rote Ndao	2.388.170.000	2.845.272.000	5.233.442.000	2.388.170.000	2.845.272.000	5.233.442.000
424	Kab. Manggarai Barat	5.520.929.000	3.763.057.000	9.283.986.000	5.520.929.000	3.763.057.000	9.283.986.000
425	Kab. Nagekeo	2.407.791.000	1.832.687.000	4.240.478.000	2.407.791.000	1.832.687.000	4.240.478.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	2.618.989.000	1.672.379.000	4.291.368.000	2.618.989.000	1.672.379.000	4.291.368.000
427	Kab. Sumba Tengah	1.654.678.000	1.534.072.000	3.188.750.000	1.654.678.000	1.534.072.000	3.188.750.000
428	Kab. Manggarai Timur	2.829.957.000	1.867.219.000	4.697.176.000	2.829.957.000	1.867.219.000	4.697.176.000
429	Kab. Sabu Raijua	2.060.815.000	2.115.633.000	4.176.448.000	2.060.815.000	2.115.633.000	4.176.448.000
430	Kab. Malaka	2.326.109.000	1.376.611.000	3.702.720.000	2.326.109.000	1.376.611.000	3.702.720.000
431	Provinsi Maluku	25.927.074.000	45.419.146.000	71.346.220.000	25.927.074.000	45.419.146.000	71.346.220.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	2.323.050.000	8.535.875.000	10.858.925.000	2.323.050.000	8.535.875.000	10.858.925.000
433	Kab. Maluku Tengah	8.094.363.000	12.170.616.000	20.264.979.000	8.094.363.000	12.170.616.000	20.264.979.000
434	Kab. Maluku Tenggara	2.791.092.000	4.040.349.000	6.831.441.000	2.791.092.000	4.040.349.000	6.831.441.000
435	Kab. Buru	4.274.179.000	5.377.134.000	9.651.313.000	4.274.179.000	5.377.134.000	9.651.313.000
436	Kota Ambon	18.056.807.000	3.308.881.000	21.365.688.000	18.056.807.000	3.308.881.000	21.365.688.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	3.346.061.000	6.728.244.000	10.074.305.000	3.346.061.000	6.728.244.000	10.074.305.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	15.718.529.000	10.722.669.000	26.441.198.000	15.718.529.000	10.722.669.000	26.441.198.000
439	Kab. Kepulauan Aru	2.703.521.000	7.690.483.000	10.394.004.000	2.703.521.000	7.690.483.000	10.394.004.000
440	Kota Tual	2.481.706.000	3.690.103.000	6.171.809.000	2.481.706.000	3.690.103.000	6.171.809.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	3.799.480.000	18.046.196.000	21.845.676.000	3.799.480.000	18.046.196.000	21.845.676.000
442	Kab. Buru Selatan	2.078.060.000	6.841.847.000	8.919.907.000	2.078.060.000	6.446.592.034	8.524.652.034
443	Provinsi Papua	38.277.370.000	20.569.853.000	58.847.223.000	38.277.370.000	18.954.617.000	57.231.987.000
444	Kab. Biak Numfor	7.214.815.000	5.768.612.000	12.983.427.000	7.214.815.000	5.768.612.000	12.983.427.000
445	Kab. Jayapura	12.379.848.000	10.954.358.000	23.334.206.000	12.379.848.000	10.954.358.000	23.334.206.000
446	Kab. Jayawijaya	4.963.141.000	2.231.576.000	7.194.717.000	4.963.141.000	2.231.576.000	7.194.717.000
447	Kab. Merauke	29.845.443.000	17.146.217.000	46.991.660.000	29.845.443.000	17.146.217.000	46.991.660.000
448	Kab. Mimika	608.867.259.000	1.159.375.258.000	1.768.242.517.000	608.867.259.000	1.157.748.577.000	1.766.615.836.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
449	Kab. Nabire	25.031.280.000	87.745.441.000	112.776.721.000	25.031.280.000	87.745.441.000	112.776.721.000
450	Kab. Paniai	18.735.436.000	127.920.403.000	146.655.839.000	18.735.436.000	126.920.403.000	145.655.839.000
451	Kab. Puncak Jaya	15.945.263.000	77.770.733.000	93.715.996.000	15.945.263.000	77.770.733.000	93.715.996.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	5.513.352.000	6.034.694.000	11.548.046.000	5.513.352.000	6.034.694.000	11.548.046.000
453	Kota Jayapura	36.026.191.000	4.834.619.000	40.860.810.000	36.026.191.000	4.834.619.000	40.860.810.000
454	Kab. Sarmi	7.428.492.000	16.737.222.000	24.165.714.000	7.428.492.000	16.737.222.000	24.165.714.000
455	Kab. Keerom	7.298.730.000	9.915.506.000	17.214.236.000	7.298.730.000	4.675.441.000	11.974.171.000
456	Kab. Yahukimo	3.302.876.000	3.559.089.000	6.861.965.000	3.302.876.000	3.559.089.000	6.861.965.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	2.752.774.000	6.518.229.000	9.271.003.000	2.752.774.000	6.518.229.000	9.271.003.000
458	Kab. Tolikara	2.101.402.000	2.311.050.000	4.412.452.000	2.101.402.000	2.311.050.000	4.412.452.000
459	Kab. Boven Digoel	12.767.963.000	9.961.802.000	22.729.765.000	12.767.963.000	9.961.802.000	22.729.765.000
460	Kab. Mappi	4.955.042.000	6.348.873.000	11.303.915.000	4.955.042.000	6.348.873.000	11.303.915.000
461	Kab. Asmat	5.287.460.000	56.308.757.000	61.596.217.000	5.287.460.000	56.308.757.000	61.596.217.000
462	Kab. Waropen	3.943.945.000	5.618.163.000	9.562.108.000	3.943.945.000	4.967.653.000	8.911.598.000
463	Kab. Supiori	4.068.151.000	4.173.838.000	8.241.989.000	4.068.151.000	4.173.838.000	8.241.989.000
464	Kab. Mamberamo Raya	4.252.466.000	4.798.607.000	9.051.073.000	4.252.466.000	3.450.769.000	7.703.235.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	1.679.172.000	3.224.282.000	4.903.454.000	1.679.172.000	3.224.282.000	4.903.454.000
466	Kab. Yalimo	1.669.858.000	3.360.853.000	5.030.711.000	1.669.858.000	3.360.853.000	5.030.711.000
467	Kab. Lanny Jaya	1.533.878.000	2.276.302.000	3.810.180.000	1.533.878.000	2.276.302.000	3.810.180.000
468	Kab. Nduga	1.570.067.000	49.472.283.000	51.042.350.000	1.570.067.000	49.472.283.000	51.042.350.000
469	Kab. Dogiyai	18.712.144.000	125.746.447.000	144.458.591.000	18.712.144.000	125.746.447.000	144.458.591.000
470	Kab. Puncak	16.672.199.000	125.039.076.000	141.711.275.000	16.672.199.000	125.039.076.000	141.711.275.000
471	Kab. Intan Jaya	18.372.315.000	124.954.329.000	143.326.644.000	18.372.315.000	124.954.329.000	143.326.644.000
472	Kab. Deiyai	19.211.925.000	124.738.286.000	143.950.211.000	19.211.925.000	124.738.286.000	143.950.211.000
473	Provinsi Maluku Utara	104.337.946.000	572.421.425.000	676.759.371.000	104.337.910.000	570.754.914.454	675.092.824.454
474	Kab. Halmahera Tengah	95.633.028.000	665.177.318.000	760.810.346.000	95.633.023.000	664.177.318.000	759.810.341.000
475	Kota Ternate	18.674.349.000	44.846.973.000	63.521.322.000	18.674.344.000	44.846.973.000	63.521.317.000
476	Kab. Halmahera Barat	7.542.827.000	114.420.153.000	121.962.980.000	7.542.822.000	114.420.153.000	121.962.975.000
477	Kab. Halmahera Timur	126.028.627.000	641.969.230.000	767.997.857.000	126.028.622.000	641.510.667.700	767.539.289.700
478	Kab. Halmahera Selatan	56.457.449.000	365.922.579.000	422.380.028.000	56.457.395.000	365.922.579.000	422.379.974.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
479	Kab. Halmahera Utara	10.239.107.000	46.050.913.000	56.290.020.000	10.239.102.000	46.035.156.280	56.274.258.280
480	Kab. Kepulauan Sula	10.097.246.000	45.138.926.000	55.236.172.000	10.097.241.000	45.138.926.000	55.236.167.000
481	Kota Tidore Kepulauan	12.894.477.000	190.360.050.000	203.254.527.000	12.894.472.000	189.857.195.900	202.751.667.900
482	Kab. Pulau Morotai	6.829.491.000	45.981.481.000	52.810.972.000	6.829.486.000	45.840.957.000	52.670.443.000
483	Kab. Pulau Taliabu	12.403.877.000	70.355.170.000	82.759.047.000	12.403.872.000	70.211.386.900	82.615.258.900
484	Provinsi Banten	733.135.532.000	2.670.731.000	735.806.263.000	732.882.911.000	2.670.731.000	735.553.642.000
485	Kab. Lebak	58.768.435.000	16.504.070.000	75.272.505.000	58.723.325.000	16.504.070.000	75.227.395.000
486	Kab. Pandeglang	56.472.459.000	6.605.022.000	63.077.481.000	56.427.349.000	6.605.022.000	63.032.371.000
487	Kab. Serang	91.072.747.000	3.782.987.000	94.855.734.000	91.027.637.000	3.782.987.000	94.810.624.000
488	Kab. Tangerang	277.167.180.000	5.712.569.000	282.879.749.000	276.969.193.000	5.212.569.000	282.181.762.000
489	Kota Cilegon	126.676.141.000	1.433.761.000	128.109.902.000	126.631.031.000	1.433.761.000	128.064.792.000
490	Kota Tangerang	308.892.376.000	1.205.814.000	310.098.190.000	308.824.071.000	1.205.814.000	310.029.885.000
491	Kota Serang	75.747.069.000	1.274.165.000	77.021.234.000	75.701.959.000	1.274.165.000	76.976.124.000
492	Kota Tangerang Selatan	241.708.912.000	5.549.582.000	247.258.494.000	241.506.055.000	5.049.582.000	246.555.637.000
493	Provinsi Bangka Belitung	50.564.454.000	98.174.993.000	148.739.447.000	50.564.454.000	98.128.669.800	148.693.123.800
494	Kab. Bangka	26.197.110.000	64.137.397.000	90.334.507.000	26.197.110.000	64.137.397.000	90.334.507.000
495	Kab. Belitung	17.090.498.000	36.989.527.000	54.080.025.000	17.090.498.000	36.988.404.654	54.078.902.654
496	Kota Pangkal Pinang	22.729.949.000	24.318.545.000	47.048.494.000	22.729.949.000	24.318.545.000	47.048.494.000
497	Kab. Bangka Selatan	19.509.052.000	57.823.011.000	77.332.063.000	19.509.052.000	57.823.011.000	77.332.063.000
498	Kab. Bangka Tengah	11.398.598.000	41.136.916.000	52.535.514.000	11.398.598.000	41.136.916.000	52.535.514.000
499	Kab. Bangka Barat	23.397.131.000	96.396.520.000	119.793.651.000	23.397.131.000	96.396.520.000	119.793.651.000
500	Kab. Belitung Timur	16.138.971.000	38.781.024.000	54.919.995.000	16.138.971.000	38.781.024.000	54.919.995.000
501	Provinsi Gorontalo	16.827.849.000	4.208.456.000	21.036.305.000	16.827.693.000	4.208.456.000	21.036.149.000
502	Kab. Boalemo	4.149.181.000	5.275.964.000	9.425.145.000	4.149.143.000	5.275.964.000	9.425.107.000
503	Kab. Gorontalo	6.510.454.000	2.560.092.000	9.070.546.000	6.510.223.000	2.560.092.000	9.070.315.000
504	Kota Gorontalo	9.754.024.000	1.224.564.000	10.978.588.000	9.753.986.000	1.224.564.000	10.978.550.000
505	Kab. Pohuwato	4.705.049.000	5.353.894.000	10.058.943.000	4.705.011.000	5.353.894.000	10.058.905.000
506	Kab. Bone Bolango	4.462.171.000	2.325.772.000	6.787.943.000	4.462.133.000	2.325.772.000	6.787.905.000
507	Kab. Gorontalo Utara	4.013.920.000	3.625.975.000	7.639.895.000	4.013.882.000	3.563.775.000	7.577.657.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	172.418.806.000	130.092.451.000	302.511.257.000	172.417.307.980	130.092.451.000	302.509.758.980

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
509	Kab. Natuna	96.412.193.000	124.947.917.000	221.360.110.000	96.411.880.910	124.947.917.000	221.359.797.910
510	Kab. Kepulauan Anambas	67.969.451.000	85.855.147.000	153.824.598.000	67.969.138.910	85.855.147.000	153.824.285.910
511	Kab. Karimun	30.993.272.000	51.363.697.000	82.356.969.000	30.987.758.410	51.296.977.000	82.284.735.410
512	Kota Batam	152.021.503.000	38.483.738.000	190.505.241.000	152.021.503.000	38.483.738.000	190.505.241.000
513	Kota Tanjung Pinang	24.286.835.000	37.118.982.000	61.405.817.000	24.286.522.910	37.118.982.000	61.405.504.910
514	Kab. Lingga	18.220.751.000	47.982.026.000	66.202.777.000	18.220.751.000	47.982.026.000	66.202.777.000
515	Kab. Bintan	26.620.639.000	44.389.577.000	71.010.216.000	26.620.639.000	44.380.230.600	71.000.869.600
516	Provinsi Papua Barat	172.990.786.000	1.450.702.160.000	1.623.692.946.000	172.990.786.000	1.443.527.083.910	1.616.517.869.910
517	Kab. Fak Fak	48.517.255.000	65.973.084.000	114.490.339.000	48.517.255.000	65.973.084.000	114.490.339.000
518	Kab. Manokwari	32.017.352.000	37.090.181.000	69.107.533.000	32.017.352.000	37.090.181.000	69.107.533.000
519	Kab. Sorong	93.576.209.000	68.105.807.000	161.682.016.000	93.576.209.000	66.009.339.000	159.585.548.000
520	Kota Sorong	15.523.612.000	13.160.712.000	28.684.324.000	15.523.612.000	12.660.712.000	28.184.324.000
521	Kab. Raja Ampat	26.021.936.000	87.512.344.000	113.534.280.000	26.021.936.000	87.012.344.000	113.034.280.000
522	Kab. Sorong Selatan	6.473.023.000	39.765.684.000	46.238.707.000	6.473.023.000	39.107.222.700	45.580.245.700
523	Kab. Teluk Bintuni	764.898.655.000	409.344.627.000	1.174.243.282.000	764.898.655.000	397.723.986.500	1.162.622.641.500
524	Kab. Teluk Wondama	17.907.784.000	64.632.230.000	82.540.014.000	17.907.784.000	64.632.230.000	82.540.014.000
525	Kab. Kaimana	20.286.072.000	114.437.361.000	134.723.433.000	20.286.072.000	114.437.361.000	134.723.433.000
526	Kab. Maybrat	5.547.217.000	32.293.113.000	37.840.330.000	5.547.217.000	31.411.212.000	36.958.429.000
527	Kab. Tambrauw	5.511.178.000	36.315.624.000	41.826.802.000	5.511.178.000	35.329.467.000	40.840.645.000
528	Kab. Manokwari Selatan	16.270.485.000	57.971.972.000	74.242.457.000	16.270.485.000	57.971.972.000	74.242.457.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	16.911.896.000	54.676.817.000	71.588.713.000	16.911.896.000	54.676.817.000	71.588.713.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	12.738.024.000	8.544.025.000	21.282.049.000	12.738.024.000	8.544.025.000	21.282.049.000
531	Kab. Majene	2.684.535.000	3.439.561.000	6.124.096.000	2.684.535.000	3.439.561.000	6.124.096.000
532	Kab. Mamuju	8.323.363.000	8.915.017.000	17.238.380.000	8.323.363.000	8.748.663.000	17.072.026.000
533	Kab. Polewali Mandar	3.879.966.000	5.299.036.000	9.179.002.000	3.879.966.000	5.299.036.000	9.179.002.000
534	Kab. Mamasa	2.213.878.000	2.946.618.000	5.160.496.000	2.213.878.000	2.946.618.000	5.160.496.000
535	Kab. Pasangkayu	8.213.679.000	12.248.295.000	20.461.974.000	8.213.679.000	12.220.098.000	20.433.777.000
536	Kab. Mamuju Tengah	2.884.498.000	9.213.540.000	12.098.038.000	2.884.498.000	9.213.540.000	12.098.038.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	75.671.595.000	599.081.078.000	674.752.673.000	75.671.492.000	599.081.078.000	674.752.570.000
538	Provinsi Papua Tengah	234.100.807.000	561.637.000.000	795.737.807.000	234.100.807.000	561.637.000.000	795.737.807.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Tahun 2024					
		Pagu		Total Pagu	Realisasi		Total Realisasi
		DBH Pajak	DBH SDA		DBH Pajak	DBH SDA	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)	(8)	(9)	(8)=(6)+(7)
539	Provinsi Papua Selatan	16.088.425.000	16.228.101.000	32.316.526.000	16.088.425.000	16.228.101.000	32.316.526.000
540	Provinsi Papua Pegunungan	7.660.553.000	14.120.113.000	21.780.666.000	7.660.553.000	3.738.470.000	11.399.023.000
541	Provinsi Papua Barat Daya	36.200.978.000	222.086.250.000	258.287.228.000	36.200.978.000	222.086.250.000	258.287.228.000
542	Kab. Bulungan	82.770.141.000	631.224.988.000	713.995.129.000	82.770.109.000	631.224.988.000	713.995.097.000
543	Kab. Malinau	33.686.636.000	1.304.451.793.000	1.338.138.429.000	33.686.604.000	1.304.451.793.000	1.338.138.397.000
544	Kab. Nunukan	56.024.989.000	616.087.842.000	672.112.831.000	56.024.957.000	616.087.842.000	672.112.799.000
545	Kota Tarakan	101.832.790.000	139.572.518.000	241.405.308.000	101.832.785.380	139.572.518.000	241.405.303.380
546	Kab. Tana Tidung	37.200.465.000	394.958.771.000	432.159.236.000	37.200.433.000	394.958.771.000	432.159.204.000
Jumlah		59.338.542.701.000	93.940.434.029.000	153.278.976.730.000	59.328.986.344.540	93.845.576.439.722	153.174.562.784.262

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
1	BANDA ACEH	Provinsi Aceh	125.376.774.000	73.856.001.000	46.483.977.000	2.580.015.000	122.919.993.000
2	MEULABOH	Kab. Aceh Barat	45.765.496.000	6.344.166.000	38.218.575.000	1.202.755.000	45.765.496.000
3	BANDA ACEH	Kab. Aceh Besar	11.156.743.000	7.015.672.000	2.877.330.000	1.263.741.000	11.156.743.000
4	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Selatan	5.452.186.000	3.098.315.000	2.066.720.000	287.151.000	5.452.186.000
5	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Singkil	9.592.876.000	2.858.359.000	6.447.753.000	286.764.000	9.592.876.000
6	TAKENGON	Kab. Aceh Tengah	9.521.037.000	3.737.870.000	2.410.842.000	3.372.325.000	9.521.037.000
7	KUTACANE	Kab. Aceh Tenggara	4.653.786.000	2.549.947.000	1.816.080.000	287.759.000	4.653.786.000
8	L A N G S A	Kab. Aceh Timur	43.786.993.000	4.872.716.000	38.582.078.000	332.199.000	43.786.993.000
9	LHOKSEUMAWE	Kab. Aceh Utara	40.883.212.000	7.876.756.000	32.651.359.000	355.097.000	40.883.212.000
10	LHOKSEUMAWE	Kab. Bireuen	7.015.562.000	4.426.686.000	2.301.321.000	279.140.000	7.007.147.000
11	BANDA ACEH	Kab. Pidie	7.332.473.000	4.925.128.000	1.881.386.000	525.959.000	7.332.473.000
12	MEULABOH	Kab. Simeulue	4.037.506.000	2.281.745.000	1.475.461.000	280.300.000	4.037.506.000
13	BANDA ACEH	Kota Banda Aceh	31.467.368.000	29.320.543.000	1.859.152.000	287.673.000	31.467.368.000
14	BANDA ACEH	Kota Sabang	4.144.633.000	2.434.118.000	1.423.364.000	287.151.000	4.144.633.000
15	L A N G S A	Kota Langsa	9.929.036.000	7.057.798.000	2.585.056.000	286.182.000	9.929.036.000
16	LHOKSEUMAWE	Kota Lhokseumawe	9.498.666.000	6.824.029.000	2.337.123.000	337.514.000	9.498.666.000
17	KUTACANE	Kab. Gayo Lues	6.328.915.000	2.416.982.000	2.046.034.000	1.811.368.660	6.274.384.660
18	TAPAKTUAN	Kab. Aceh Barat Daya	5.332.897.000	2.701.375.000	2.344.952.000	286.570.000	5.332.897.000
19	MEULABOH	Kab. Aceh Jaya	5.501.816.000	2.788.284.000	2.427.350.000	277.806.600	5.493.440.600
20	MEULABOH	Kab. Nagan Raya	21.096.773.000	5.332.343.000	15.467.903.000	296.527.000	21.096.773.000
21	L A N G S A	Kab. Aceh Tamiang	77.582.081.000	5.328.965.000	71.965.965.000	287.151.000	77.582.081.000
22	TAKENGON	Kab. Bener Meriah	5.291.601.000	2.865.217.000	2.081.442.000	344.942.000	5.291.601.000
23	BANDA ACEH	Kab. Pidie Jaya	4.536.035.000	2.529.168.000	1.488.192.000	518.675.000	4.536.035.000
24	TAPAKTUAN	Kota Subulussalam	5.373.998.000	2.389.540.000	2.698.276.000	286.182.000	5.373.998.000
25	M E D A N I	Provinsi Sumatera Utara	366.765.985.000	268.269.015.000	91.487.409.000	7.009.561.000	366.765.985.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
26	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Asahan	52.660.010.000	12.465.642.000	39.920.557.000	273.811.000	52.660.010.000
27	SIDIKALANG	Kab. Dairi	9.462.083.000	5.722.404.000	3.054.789.000	664.932.890	9.442.125.890
28	TEBING TINGGI	Kab. Deli Serdang	61.035.260.000	38.913.990.000	21.844.569.000	276.701.000	61.035.260.000
29	SIDIKALANG	Kab. Karo	11.630.719.000	7.339.910.000	3.006.939.000	1.283.870.000	11.630.719.000
30	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu	35.917.680.000	10.036.859.000	25.607.010.000	273.811.000	35.917.680.000
31	M E D A N II	Kab. Langkat	109.101.554.000	13.055.170.000	95.772.573.000	273.811.000	109.101.554.000
32	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Mandailing Natal	40.452.908.000	8.581.178.000	31.593.451.000	278.279.000	40.452.908.000
33	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias	8.810.276.000	5.769.417.000	2.767.048.000	273.811.000	8.810.276.000
34	PEMATANG SIANTAR	Kab. Simalungun	51.983.562.000	16.055.772.000	35.016.682.000	884.507.510	51.956.961.510
35	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Tapanuli Selatan	58.490.845.000	11.738.597.000	46.452.744.000	290.741.960	58.482.082.960
36	SIBOLGA	Kab. Tapanuli Tengah	14.231.400.000	7.356.489.000	6.601.100.000	273.811.000	14.231.400.000
37	BALIGE	Kab. Tapanuli Utara	42.205.204.000	7.847.995.000	32.498.216.000	1.858.993.000	42.205.204.000
38	BALIGE	Kab. Toba Samosir	12.809.869.000	9.470.900.000	3.065.158.000	273.811.000	12.809.869.000
39	M E D A N II	Kota Binjai	14.832.001.000	9.685.517.000	4.872.673.000	273.811.000	14.832.001.000
40	M E D A N I	Kota Medan	206.021.513.000	201.192.941.000	4.554.755.000	273.817.000	206.021.513.000
41	PEMATANG SIANTAR	Kota Pematang Siantar	20.068.237.000	11.610.804.000	2.039.567.000	6.417.866.000	20.068.237.000
42	SIBOLGA	Kota Sibolga	10.372.378.000	7.530.501.000	2.568.066.000	273.811.000	10.372.378.000
43	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kota Tanjung Balai	9.655.220.000	6.775.078.000	2.606.331.000	273.811.000	9.655.220.000
44	TEBING TINGGI	Kota Tebing Tinggi	10.140.277.000	7.429.996.000	2.436.470.000	273.811.000	10.140.277.000
45	PADANG SIDEMPUAN	Kota Padang Sidempuan	12.152.585.000	8.878.827.000	2.999.947.000	273.811.000	12.152.585.000
46	SIDIKALANG	Kab. Pakpak Bharat	6.863.493.000	4.339.657.000	2.243.238.000	280.598.000	6.863.493.000
47	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Selatan	10.701.844.000	6.195.264.000	4.232.769.000	273.811.000	10.701.844.000
48	BALIGE	Kab. Humbang Hasundutan	9.957.531.000	6.206.048.000	3.131.578.000	619.905.000	9.957.531.000
49	TEBING TINGGI	Kab. Serdang Bedagai	38.590.726.000	10.756.372.000	27.560.543.000	273.811.000	38.590.726.000
50	BALIGE	Kab. Samosir	9.415.811.000	5.860.831.000	3.281.169.000	273.811.000	9.415.811.000
51	TANJUNG BALAI ASAHAN	Kab. Batu Bara	23.985.178.000	13.601.344.000	10.110.023.000	273.811.000	23.985.178.000
52	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas	21.185.827.000	6.118.919.000	14.726.178.000	340.730.000	21.185.827.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
53	PADANG SIDEMPUAN	Kab. Padang Lawas Utara	19.642.615.000	6.047.385.000	13.321.419.000	265.819.750	19.634.623.750
54	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Selatan	50.547.761.000	8.762.580.000	41.511.731.000	273.450.000	50.547.761.000
55	RANTAU PRAPAT	Kab. Labuhanbatu Utara	26.882.623.000	6.840.333.000	19.768.479.000	273.811.000	26.882.623.000
56	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Utara	8.539.360.000	5.510.097.000	2.755.452.000	273.811.000	8.539.360.000
57	GUNUNG SITOLI	Kab. Nias Barat	8.619.420.000	5.584.667.000	2.760.942.000	265.819.750	8.611.428.750
58	GUNUNG SITOLI	Kota Gunungsitoli	10.507.752.000	7383915000	2.850.026.000	265.819.750	10.499.760.750
59	P A D A N G	Provinsi Sumatera Barat	104.975.502.000	88.529.635.000	15.907.933.000	537.934.000	104.975.502.000
60	BUKITTINGGI	Kab. Lima Puluh Kota	6.613.906.000	4.361.978.000	1.943.127.000	308.801.000	6.613.906.000
61	BUKITTINGGI	Kab. Agam	10.952.140.000	6465024000	4.255.011.000	232.105.000	10.952.140.000
62	P A D A N G	Kab. Kepulauan Mentawai	5.818.951.000	3.301.009.000	2.480.650.000	37.292.000	5.818.951.000
63	P A D A N G	Kab. Padang Pariaman	6.499.092.000	5.387.725.000	1.074.075.000	37.292.000	6.499.092.000
64	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman	5.545.940.000	4.361.858.000	1.127.211.000	56.871.000	5.545.940.000
65	P A I N A N	Kab. Pesisir Selatan	12.894.164.000	5.645.109.000	7.212.832.000	35.144.710	12.893.085.710
66	SIJUNJUNG	Kab. Sijunjung	6.941.404.000	3.765.876.000	3.138.236.000	37.292.000	6.941.404.000
67	S O L O K	Kab. Solok	6.355.004.000	4.477.487.000	1.776.194.000	101.323.000	6.355.004.000
68	BUKITTINGGI	Kab. Tanah Datar	6.387.419.000	5.073.004.000	1.092.235.000	222.180.000	6.387.419.000
69	BUKITTINGGI	Kota Bukit Tinggi	7.740.310.000	6.955.108.000	747.846.000	36.277.710	7.739.231.710
70	BUKITTINGGI	Kota Padang Panjang	4.760.672.000	3.920.811.000	802.569.000	37.292.000	4.760.672.000
71	P A D A N G	Kota Padang	69.235.824.000	63.658.378.000	5.540.154.000	37.292.000	69.235.824.000
72	BUKITTINGGI	Kota Payakumbuh	5.891.546.000	5.019.293.000	834.727.000	37.526.000	5.891.546.000
73	SIJUNJUNG	Kota Sawahlunto	10.519.670.000	3.794.839.000	6.652.730.000	72.101.000	10.519.670.000
74	S O L O K	Kota Solok	6.289.986.000	5.413.929.000	838.701.000	37.356.000	6.289.986.000
75	P A D A N G	Kota Pariaman	4.939.733.000	4.077.875.000	824.502.000	37.356.000	4.939.733.000
76	LUBUK SIKAPING	Kab. Pasaman Barat	17.876.345.000	4.965.215.000	12.873.774.000	37.356.000	17.876.345.000
77	SIJUNJUNG	Kab. Dharmasraya	12.505.616.000	3.942.014.000	8.526.246.000	37.356.000	12.505.616.000
78	S O L O K	Kab. Solok Selatan	26.680.578.000	5.283.012.000	21.360.274.000	37.292.000	26.680.578.000
79	PEKANBARU	Provinsi Riau	799.173.914.000	188.671.191.000	610.501.426.000	614.890	799.173.231.890

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
80	D U M A I	Kab. Bengkalis	1.477.330.112.000	35.860.523.000	1.441.469.442.000	74.000	1.477.330.039.000
81	R E N G A T	Kab. Indragiri Hilir	78.093.895.000	14.320.691.000	63.773.057.000	74.000	78.093.822.000
82	R E N G A T	Kab. Indragiri Hulu	107.370.099.000	13.699.292.000	93.670.661.000	0	107.369.953.000
83	PEKANBARU	Kab. Kampar	304.251.173.000	15.554.807.000	288.696.219.000	142.620	304.251.168.620
84	R E N G A T	Kab. Kuantan Singingi	55.751.091.000	11.267.581.000	44.483.363.000	142.620	55.751.086.620
85	PEKANBARU	Kab. Pelalawan	170.589.439.000	27.332.065.000	143.257.227.000	1.000	170.589.293.000
86	D U M A I	Kab. Rokan Hilir	353.015.410.000	12.834.450.000	340.180.813.000	142.620	353.015.405.620
87	PEKANBARU	Kab. Rokan Hulu	91.646.181.000	12.554.226.000	79.091.808.000	1.000	91.646.035.000
88	PEKANBARU	Kab. Siak	511.784.434.000	25.917.154.000	485.867.133.000	69.620	511.784.356.620
89	D U M A I	Kota Dumai	77.952.714.000	29250403000	48.702.164.000	69.620	77.952.636.620
90	PEKANBARU	Kota Pekanbaru	153.986.493.000	1,0506E+11	48.924.085.000	1.872.130	153.986.435.130
91	D U M A I	Kab. Kepulauan Meranti	87.517.675.000	9.956.574.000	77.560.954.000	1.000	87.517.529.000
92	J A M B I	Provinsi Jambi	150.488.752.000	52741955000	97.487.979.000	251.435.540	150.481.369.540
93	J A M B I	Kab. Batanghari	75.293.784.000	5.448.808.000	69.812.706.000	31.347.170	75.292.861.170
94	MUARA BUNGO	Kab. Bungo	21.890.916.000	8.067.292.000	13.791.354.000	31.347.170	21.889.993.170
95	SUNGAI PENUH	Kab. Kerinci	11.855.084.000	3.622.198.000	7.878.459.000	354.427.000	11.855.084.000
96	B A N G K O	Kab. Merangin	12.571.631.000	4.687.843.000	7.843.596.000	39.045.250	12.570.484.250
97	J A M B I	Kab. Muaro Jambi	88.580.633.000	7.335.341.000	81.214.530.000	1.000	88.549.872.000
98	B A N G K O	Kab. Sarolangun	48.520.816.000	5.691.793.000	42.798.261.000	14.458.670	48.504.512.670
99	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Barat	202.434.619.000	6.161.540.000	196.242.077.000	241.000	202.403.858.000
100	KUALA TUNGKAL	Kab. Tanjung Jabung Timur	60.263.457.000	6.593.837.000	53.638.859.000	14.457.670	60.247.153.670
101	MUARA BUNGO	Kab. Tebo	30.892.657.000	4.649.549.000	26.212.346.000	1.000	30.861.896.000
102	J A M B I	Kota Jambi	73.262.268.000	38.357.738.000	34.873.769.000	0	73.231.507.000
103	SUNGAI PENUH	Kota Sungai Penuh	10.813.091.000	4.724.904.000	6.032.233.000	0	10.757.137.000
104	PALEMBANG	Provinsi Sumatera Selatan	706.075.438.000	182.133.709.000	523.878.657.000	61.179.840	706.073.545.840
105	L A H A T	Kab. Lahat	215.009.542.000	14.997.010.000	199.924.321.000	85.639.010	215.006.970.010
106	S E K A Y U	Kab. Musi Banyuasin	893.164.832.000	23.354.728.000	869.805.008.000	4.948.190	893.164.684.190

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
107	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas	229.577.202.000	9.162.368.000	220.409.819.000	2.403.690	229.574.590.690
108	L A H A T	Kab. Muara Enim	563.923.339.000	42.543.591.000	521.374.821.000	0	563.918.412.000
109	PALEMBANG	Kab. Ogan Komering Ilir	82.608.188.000	13.157.028.000	69.446.233.000	2.315.690	82.605.576.690
110	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu	95.777.603.000	10.365.673.000	85.407.003.000	0	95.772.676.000
111	PALEMBANG	Kota Palembang	131.694.173.000	109.469.262.000	22.219.983.000	1.000	131.689.246.000
112	PALEMBANG	Kota Prabumulih	107.747.380.000	16.125.548.000	91.616.904.000	1.000	107.742.453.000
113	L A H A T	Kota Pagar Alam	32.616.076.000	7.231.091.000	25.380.057.000	1.000	32.611.149.000
114	LUBUK LINGGAU	Kota Lubuk Linggau	33.338.533.000	10.016.908.000	23.316.698.000	0	33.333.606.000
115	S E K A Y U	Kab. Banyuasin	89.962.072.000	14.618.407.000	75.338.737.000	2.316.690	89.959.460.690
116	PALEMBANG	Kab. Ogan Ilir	66.081.400.000	7664774000	58.411.530.000	4.948.190	66.081.252.190
117	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	37.093.270.000	8.687.972.000	28.400.371.000	2.463.500	37.090.806.500
118	BATURAJA	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	34.183.288.000	7.783.719.000	26.385.520.000	7.151.000	34.176.390.000
119	L A H A T	Kab. Empat Lawang	29.108.725.000	6458228000	22.645.569.000	2.464.500	29.106.261.500
120	L A H A T	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	481.291.853.000	9.869.394.000	471.417.531.000	2.464.500	481.289.389.500
121	LUBUK LINGGAU	Kab. Musi Rawas Utara	80.627.791.000	8.497.056.000	72.125.807.000	1.000	80.622.864.000
122	B E N G K U L U	Provinsi Bengkulu	37.066.359.000	26668092000	10.398.267.000	0	37.066.359.000
123	M A N N A	Kab. Bengkulu Selatan	4.129.837.000	2.902.851.000	1.226.986.000	0	4.129.837.000
124	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Utara	21.286.261.000	4199139000	17.087.122.000	0	21.286.261.000
125	C U R U P	Kab. Rejang Lebong	4.754.076.000	3.509.724.000	1.244.352.000	0	4.754.076.000
126	B E N G K U L U	Kota Bengkulu	19.709.935.000	18.560.273.000	1.149.662.000	0	19.709.935.000
127	M A N N A	Kab. Kaur	3.797.707.000	1.982.054.000	1.815.653.000	0	3.797.707.000
128	M A N N A	Kab. Seluma	7.708.330.000	2.782.511.000	4.925.819.000	0	7.708.330.000
129	MUKOMUKO	Kab. Mukomuko	13.369.711.000	3.233.270.000	10.136.441.000	0	13.369.711.000
130	C U R U P	Kab. Lebong	4.799.068.000	1.849.760.000	2.949.308.000	0	4.799.068.000
131	C U R U P	Kab. Kepahiang	3.854.737.000	2650256000	1.204.481.000	0	3.854.737.000
132	B E N G K U L U	Kab. Bengkulu Tengah	14.867.335.000	2.727.965.000	12.139.370.000	0	14.867.335.000
133	BANDAR LAMPUNG	Provinsi Lampung	108.354.412.000	82.587.096.000	24.402.414.000	1.364.902.000	108.354.412.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
134	LIWA	Kab. Lampung Barat	6.264.244.000	4253936000	1.882.433.000	127875000	6.264.244.000
135	BANDAR LAMPUNG	Kab. Lampung Selatan	22.019.899.000	13.288.192.000	8.600.722.000	127.055.450	22.015.969.450
136	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Tengah	35.640.074.000	12.721.166.000	22.770.810.000	143.655.060	35.635.631.060
137	KOTABUMI	Kab. Lampung Utara	12.875.085.000	6618349000	6.129.814.000	126.922.000	12.875.085.000
138	METRO LAMPUNG	Kab. Lampung Timur	30.535.820.000	6.690.393.000	22.228.823.000	1.616.604.000	30.535.820.000
139	BANDAR LAMPUNG	Kab. Tanggamus	29.011.685.000	5.685.448.000	23.135.848.000	184.761.690	29.006.057.690
140	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang	15.894.111.000	5.800.990.000	9.972.180.000	120.941.000	15.894.111.000
141	KOTABUMI	Kab. Way Kanan	14.457.679.000	5.990.483.000	8.317.219.000	145.604.770	14.453.306.770
142	BANDAR LAMPUNG	Kota Bandar Lampung	50.184.495.000	48.073.097.000	1.973.516.000	134.038.430	50.180.651.430
143	METRO LAMPUNG	Kota Metro	9.852.211.000	8.318.437.000	1.414.300.000	119.474.000	9.852.211.000
144	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pesawaran	8.847.911.000	4.832.323.000	3.797.416.000	211.806.420	8.841.545.420
145	BANDAR LAMPUNG	Kab. Pringsewu	7.707.206.000	5.806.270.000	1.688.985.000	211.951.000	7.707.206.000
146	KOTABUMI	Kab. Mesuji	14.897.836.000	4.176.676.000	10.576.477.000	144.683.000	14.897.836.000
147	KOTABUMI	Kab. Tulang Bawang Barat	7.744.979.000	4.190.279.000	3.428.193.000	122.824.290	7.741.296.290
148	LIWA	Kab. Pesisir Barat	5.740.241.000	3.622.908.000	1.989.664.000	127.669.000	5.740.241.000
149	JAKARTA I	Provinsi DKI Jakarta	16.345.264.483.000	16.305.563.356.000	38.368.711.000	1.332.416.000	16.345.264.483.000
150	BANDUNG I	Provinsi Jawa Barat	1.602.372.821.000	1,33471E+12	114.197.623.000	153.460.812.000	1.602.372.821.000
151	BANDUNG II	Kab. Bandung	167.251.923.000	69.267.243.000	74.705.803.000	23.278.877.000	167.251.923.000
152	B E K A S I	Kab. Bekasi	461.214.573.000	414.514.832.000	39.285.536.000	7.414.205.000	461.214.573.000
153	B O G O R	Kab. Bogor	217.466.437.000	161.387.248.000	48.530.279.000	7.548.910.000	217.466.437.000
154	TASIKMALAYA	Kab. Ciamis	44.010.359.000	31.156.950.000	5.329.209.000	7.524.200.000	44.010.359.000
155	SUKABUMI	Kab. Cianjur	56.879.004.000	38.950.154.000	10.182.867.000	7.745.983.000	56.879.004.000
156	C I R E B O N	Kab. Cirebon	68.209.540.000	49.540.697.000	9.368.248.000	9.028.102.750	67.937.047.750
157	G A R U T	Kab. Garut	118.239.169.000	37.988.414.000	41.519.909.000	38.730.846.000	118.239.169.000
158	C I R E B O N	Kab. Indramayu	155.660.792.000	46.515.414.000	101.767.455.000	7.161.686.150	155.444.555.150
159	KARAWANG	Kab. Karawang	414.852.569.000	231.028.394.000	46.478.891.000	133.307.501.440	410.814.786.440
160	KUNINGAN	Kab. Kuningan	42.105.655.000	29.665.718.000	4.127.089.000	8.312.848.000	42.105.655.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
161	KUNINGAN	Kab. Majalengka	62.019.396.000	30.229.977.000	11.880.515.000	19.908.904.000	62.019.396.000
162	PURWAKARTA	Kab. Purwakarta	84.435.267.000	69994971000	7.062.373.000	7.377.923.000	84.435.267.000
163	PURWAKARTA	Kab. Subang	140.188.005.000	46.187.474.000	86.375.279.000	7.625.252.000	140.188.005.000
164	SUKABUMI	Kab. Sukabumi	89.379.661.000	45734423000	36.262.777.000	7.166.092.990	89.163.292.990
165	SUMEDANG	Kab. Sumedang	77.530.634.000	39.208.288.000	4.904.384.000	33.417.962.000	77.530.634.000
166	TASIKMALAYA	Kab. Tasikmalaya	47.118.227.000	32.248.171.000	7.412.930.000	7.457.126.000	47.118.227.000
167	BANDUNG II	Kota Bandung	316.859.081.000	304.480.008.000	4.457.812.000	7.921.261.000	316.859.081.000
168	B E K A S I	Kota Bekasi	148.288.931.000	130.253.238.000	10.528.848.000	7.506.845.000	148.288.931.000
169	B O G O R	Kota Bogor	77.471.306.000	66.498.351.000	3.582.925.000	7.390.030.000	77.471.306.000
170	C I R E B O N	Kota Cirebon	51.228.751.000	40.445.493.000	3.325.612.000	7.457.646.000	51.228.751.000
171	B O G O R	Kota Depok	96.876.794.000	85.297.607.000	4.072.094.000	7.507.093.000	96.876.794.000
172	SUKABUMI	Kota Sukabumi	39.182.702.000	29.059.719.000	2.745.020.000	7.377.963.000	39.182.702.000
173	TASIKMALAYA	Kota Tasikmalaya	48.162.435.000	37.246.561.000	3.546.966.000	7.368.908.000	48.162.435.000
174	BANDUNG I	Kota Cimahi	52.869.784.000	42.119.961.000	3.366.453.000	7.383.370.000	52.869.784.000
175	TASIKMALAYA	Kota Banjar	38.651.504.000	27.809.646.000	3.457.549.000	7.384.309.000	38.651.504.000
176	BANDUNG I	Kab. Bandung Barat	63.273.066.000	47.477.558.000	6.912.681.000	8.882.827.000	63.273.066.000
177	TASIKMALAYA	Kab. Pangandaran	39.950.725.000	27.596.275.000	4.732.656.000	7.621.794.000	39.950.725.000
178	SEMARANG I	Provinsi Jawa Tengah	780.113.455.000	445.534.180.000	36.904.295.000	297.674.980.000	780.113.455.000
179	BANJARNEGARA	Kab. Banjarnegara	31.129.254.000	12.578.784.000	6.732.180.000	11.818.290.000	31.129.254.000
180	PURWOKERTO	Kab. Banyumas	42.105.190.000	26.400.085.000	4.602.652.000	11.102.453.000	42.105.190.000
181	PEKALONGAN	Kab. Batang	32.455.303.000	15.610.348.000	4.318.309.000	12.526.646.000	32.455.303.000
182	PURWODADI	Kab. Blora	101.717.192.000	12.086.626.000	73.037.298.000	16.593.268.000	101.717.192.000
183	K L A T E N	Kab. Boyolali	44.376.515.000	14.848.403.000	2.876.106.000	26.652.006.000	44.376.515.000
184	T E G A L	Kab. Brebes	31.864.740.000	14.552.767.000	5.787.644.000	11.524.329.000	31.864.740.000
185	CILACAP	Kab. Cilacap	52.492.696.000	31.452.905.000	9.794.456.000	11.245.335.000	52.492.696.000
186	K U D U S	Kab. Demak	57.424.634.000	13.763.317.000	1.860.661.000	41.800.656.000	57.424.634.000
187	PURWODADI	Kab. Grobogan	50.324.970.000	12.578.786.000	12.268.896.000	25.477.288.000	50.324.970.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
188	K U D U S	Kab. Jepara	40.659.116.000	22.676.907.000	4.771.052.000	13.211.157.000	40.659.116.000
189	S R A G E N	Kab. Karanganyar	40.230.412.000	17.973.208.000	2.775.442.000	19.481.762.000	40.230.412.000
190	PURWOREJO	Kab. Kebumen	28.234.319.000	12.342.400.000	2.718.347.000	13.173.572.000	28.234.319.000
191	SEMARANG II	Kab. Kendal	48.518.845.000	14.975.750.000	5.649.904.000	27.893.191.000	48.518.845.000
192	K L A T E N	Kab. Klaten	42.760.601.000	16.998.339.000	1.679.509.000	24082753000	42.760.601.000
193	K U D U S	Kab. Kudus	284.360.294.000	65.554.003.000	1.435.504.000	217.370.787.000	284.360.294.000
194	MAGELANG	Kab. Magelang	37.350.178.000	12.807.744.000	1.950.107.000	22592327000	37.350.178.000
195	P A T I	Kab. Pati	32.703.336.000	15.597.971.000	4.478.988.000	12626377000	32.703.336.000
196	PEKALONGAN	Kab. Pekalongan	25.097.206.000	10.371.718.000	3.686.619.000	11038869000	25.097.206.000
197	T E G A L	Kab. Pemalang	28.385.713.000	11.506.927.000	4.792.885.000	12.085.901.000	28.385.713.000
198	PURWOKERTO	Kab. Purbalingga	26.886.234.000	12.448.719.000	1.755.654.000	12681861000	26.886.234.000
199	PURWOREJO	Kab. Purworejo	25.212.486.000	10.688.028.000	1.997.726.000	12526732000	25.212.486.000
200	P A T I	Kab. Rembang	58.298.800.000	12.252.775.000	4.740.373.000	41.305.652.000	58.298.800.000
201	SEMARANG II	Kab. Semarang	40.576.533.000	21.844.856.000	4.930.749.000	13.800.928.000	40.576.533.000
202	S R A G E N	Kab. Sragen	25.154.186.000	12.275.154.000	1.800.837.000	11.078.195.000	25.154.186.000
203	SURAKARTA	Kab. Sukoharjo	33.577.044.000	20.697.169.000	1.639.758.000	11.240.117.000	33.577.044.000
204	T E G A L	Kab. Tegal	31.544.113.000	15.147.843.000	3.430.461.000	12965809000	31.544.113.000
205	MAGELANG	Kab. Temanggung	62.751.797.000	11.551.833.000	1.745.664.000	49.454.300.000	62.751.797.000
206	SURAKARTA	Kab. Wonogiri	36.114.651.000	11.751.504.000	2.257.638.000	22.105.509.000	36.114.651.000
207	BANJARNEGARA	Kab. Wonosobo	31.852.859.000	10.167.427.000	4.035.401.000	17.650.031.000	31.852.859.000
208	MAGELANG	Kota Magelang	25.308.720.000	13.461.043.000	855.877.000	10.991.800.000	25.308.720.000
209	PEKALONGAN	Kota Pekalongan	26.625.499.000	12.969.333.000	1.263.650.000	12.392.516.000	26.625.499.000
210	SEMARANG II	Kota Salatiga	24.500.288.000	12.593.823.000	960.510.000	10945955000	24.500.288.000
211	SEMARANG I	Kota Semarang	183.074.999.000	166.428.636.000	2.896.621.000	13749742000	183.074.999.000
212	SURAKARTA	Kota Surakarta	47.412.433.000	33806452000	1.129.834.000	12476147000	47.412.433.000
213	T E G A L	Kota Tegal	25.919.279.000	14.078.802.000	896.543.000	10943934000	25.919.279.000
214	YOGYAKARTA	Provinsi DI Yogyakarta	88.265.698.000	83.646.383.000	689.525.000	3.929.790.000	88.265.698.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
215	YOGYAKARTA	Kab. Bantul	26.521.970.000	22.432.049.000	827.659.000	3.262.262.000	26.521.970.000
216	WONOSARI	Kab. Gunung Kidul	15.224.885.000	12.676.590.000	770.849.000	1777446000	15.224.885.000
217	W A T E S	Kab. Kulon Progo	15.538.844.000	13.190.955.000	600.633.000	1747256000	15.538.844.000
218	YOGYAKARTA	Kab. Sleman	51.388.406.000	47.700.943.000	912.865.000	2.774.598.000	51.388.406.000
219	YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	43.125.615.000	41.453.626.000	428.116.000	1.243.873.000	43.125.615.000
220	SURABAYA II	Provinsi Jawa Timur	1.741.686.360.000	777.413.910.000	210.022.941.000	754.249.509.000	1.741.686.360.000
221	PAMEKASAN	Kab. Bangkalan	47.193.607.000	14.224.847.000	5.908.610.000	26.266.378.230	46.399.835.230
222	BANYUWANGI	Kab. Banyuwangi	79.743.762.000	24.060.820.000	26.332.760.000	29.350.182.000	79.743.762.000
223	B L I T A R	Kab. Blitar	52.973.227.000	14.525.165.000	8.292.047.000	30.156.015.000	52.973.227.000
224	BOJONEGORO	Kab. Bojonegoro	879.954.573.000	23.660.316.000	773.085.639.000	83.208.618.000	879.954.573.000
225	BONDOWOSO	Kab. Bondowoso	76.002.576.000	12.155.256.000	6.742.085.000	57105235000	76.002.576.000
226	SURABAYA I	Kab. Gresik	180.262.426.000	100.984.410.000	52.290.710.000	26.987.306.000	180.262.426.000
227	J E M B E R	Kab. Jember	160.825.416.000	28.614.166.000	14.050.036.000	1,18161E+11	160.825.416.000
228	MOJOKERTO	Kab. Jombang	77.253.812.000	17.005.821.000	5.546.932.000	54701059000	77.253.812.000
229	K E D I R I	Kab. Kediri	108.054.793.000	18469272000	8.933.802.000	80651719000	108.054.793.000
230	BOJONEGORO	Kab. Lamongan	85.937.309.000	17.442.050.000	8.149.162.000	60346097000	85.937.309.000
231	J E M B E R	Kab. Lumajang	51.982.236.000	14.689.484.000	8.647.379.000	28645373000	51.982.236.000
232	M A D I U N	Kab. Madiun	53.885.763.000	14.852.504.000	8.099.969.000	30.933.290.000	53.885.763.000
233	M A D I U N	Kab. Magetan	48.152.891.000	15.141.033.000	4.607.805.000	28.404.053.000	48.152.891.000
234	M A L A N G	Kab. Malang	146.722.319.000	31.120.737.000	15.206.988.000	1,00395E+11	146.722.319.000
235	MOJOKERTO	Kab. Mojokerto	63.945.619.000	27.496.920.000	5.614.894.000	30.833.805.000	63.945.619.000
236	K E D I R I	Kab. Nganjuk	55.155.311.000	16.380.015.000	6.599.962.000	32.175.334.000	55.155.311.000
237	M A D I U N	Kab. Ngawi	53.275.795.000	15.224.092.000	8.333.057.000	29718646000	53.275.795.000
238	PACITAN	Kab. Pacitan	46.053.595.000	13.970.489.000	4.457.656.000	27.625.450.000	46.053.595.000
239	PAMEKASAN	Kab. Pamekasan	113.220.325.000	15.347.089.000	4.334.405.000	93.538.831.000	113.220.325.000
240	M A L A N G	Kab. Pasuruan	385.889.482.000	53.360.712.000	6.119.646.000	326.409.124.000	385.889.482.000
241	M A D I U N	Kab. Ponorogo	55.156.904.000	16.630.312.000	7.003.079.000	31.523.513.000	55.156.904.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
242	BONDOWOSO	Kab. Probolinggo	111.503.283.000	19.382.850.000	5.839.631.000	86.280.802.000	111.503.283.000
243	PAMEKASAN	Kab. Sampang	50.611.363.000	12.138.514.000	4.553.601.000	33.919.248.000	50.611.363.000
244	SIDOARJO	Kab. Sidoarjo	150.648.369.000	107.518.293.000	11.967.402.000	31.162.674.000	150.648.369.000
245	BONDOWOSO	Kab. Situbondo	80.138.315.000	13.138.475.000	6.230.841.000	60.768.999.000	80.138.315.000
246	PAMEKASAN	Kab. Sumenep	72.721.648.000	14.604.889.000	9.482.830.000	48.633.929.000	72.721.648.000
247	K E D I R I	Kab. Trenggalek	47.495.543.000	13.747.933.000	6.244.386.000	27.503.224.000	47.495.543.000
248	T U B A N	Kab. Tuban	96.786.016.000	25376245000	37.771.032.000	33.638.739.000	96.786.016.000
249	B L I T A R	Kab. Tulungagung	60.850.153.000	18.958.629.000	6.249.099.000	35.642.425.000	60.850.153.000
250	B L I T A R	Kota Blitar	45.882.068.000	14634032000	3.962.805.000	27.285.231.000	45.882.068.000
251	K E D I R I	Kota Kediri	177.643.955.000	35.131.167.000	3.952.400.000	138.560.388.000	177.643.955.000
252	M A D I U N	Kota Madiun	53.604.121.000	22.638.763.000	3.953.812.000	27.011.546.000	53.604.121.000
253	M A L A N G	Kota Malang	105.370.394.000	50.600.557.000	4.096.492.000	50.673.345.000	105.370.394.000
254	MOJOKERTO	Kota Mojokerto	46.574.043.000	14.896.097.000	3.709.296.000	27.968.650.000	46.574.043.000
255	M A L A N G	Kota Pasuruan	46.459.897.000	15552040000	3.873.939.000	27.033.918.000	46.459.897.000
256	BONDOWOSO	Kota Probolinggo	46.091.755.000	15256072000	3.756.182.000	27.079.501.000	46.091.755.000
257	SURABAYA II	Kota Surabaya	460.973.008.000	412.720.298.000	5.707.576.000	42.545.134.000	460.973.008.000
258	M A L A N G	Kota Batu	43.823.375.000	13.015.908.000	4.224.794.000	26.582.673.000	43.823.375.000
259	PONTIANAK	Provinsi Kalimantan Barat	125.950.772.000	76.311.917.000	49.397.515.000	234.386.420	125.943.818.420
260	SINGKAWANG	Kab. Bengkayang	17.912.025.000	5.111.652.000	12.469.945.000	330.428.000	17.912.025.000
261	SANGGAU	Kab. Landak	19.403.615.000	4828160000	14.552.292.000	22.494.390	19.402.946.390
262	PUTUSSIBAU	Kab. Kapuas Hulu	22.853.105.000	6.305.663.000	16.524.277.000	22.496.390	22.852.436.390
263	KETAPANG	Kab. Ketapang	122.459.897.000	16.778.329.000	105.658.404.000	22495390	122.459.228.390
264	PONTIANAK	Kab. Mempawah	11.814.721.000	5.969.493.000	5.789.506.000	55722000	11.814.721.000
265	SINGKAWANG	Kab. Sambas	20.247.580.000	6812113000	13.412.304.000	22494390	20.246.911.390
266	SANGGAU	Kab. Sanggau	39.390.421.000	8702721000	30.664.536.000	22495390	39.389.752.390
267	S I N T A N G	Kab. Sintang	35.974.492.000	8.500.288.000	27.451.031.000	23173000	35.974.492.000
268	PONTIANAK	Kota Pontianak	41.707.576.000	38.954.946.000	2.729.450.000	23180000	41.707.576.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
269	SINGKAWANG	Kota Singkawang	11.824.831.000	8.653.452.000	3.148.173.000	23206000	11.824.831.000
270	SANGGAU	Kab. Sekadau	18.087.848.000	6.082.793.000	11.981.849.000	23206000	18.087.848.000
271	S I N T A N G	Kab. Melawi	15.278.769.000	4.941.620.000	10.313.985.000	23164000	15.278.769.000
272	KETAPANG	Kab. Kayong Utara	13.571.629.000	4.624.881.000	8.923.479.000	23269000	13.571.629.000
273	PONTIANAK	Kab. Kubu Raya	30.692.972.000	13.093.740.000	17.576.043.000	23189000	30.692.972.000
274	PALANGKARAYA	Provinsi Kalimantan Tengah	266.225.623.000	71.102.676.000	195.122.903.000	1000	266.225.580.000
275	B U N T O K	Kab. Barito Selatan	64.206.231.000	5624876000	58.581.351.000	1000	64.206.228.000
276	B U N T O K	Kab. Barito Utara	286.025.067.000	8243572000	277.781.491.000	1000	286.025.064.000
277	PALANGKARAYA	Kab. Kapuas	208.820.757.000	7608524000	201.212.229.000	1000	208.820.754.000
278	PANGKALAN BUN	Kab. Kotawaringin Barat	57.085.142.000	15.498.941.000	41.586.197.000	1000	57.085.139.000
279	S A M P I T	Kab. Kotawaringin Timur	107.808.539.000	20.972.079.000	86.836.456.000	1000	107.808.536.000
280	PALANGKARAYA	Kota Palangkaraya	29.530.998.000	19.764.240.000	9.766.703.000	1000	29.530.944.000
281	S A M P I T	Kab. Katingan	32.760.831.000	5.383.740.000	27.377.087.000	1000	32.760.828.000
282	S A M P I T	Kab. Seruyan	69.140.694.000	7.121.011.000	62.019.679.000	1000	69.140.691.000
283	PANGKALAN BUN	Kab. Sukamara	22.549.673.000	4.741.900.000	17.807.769.000	2410	22.549.671.410
284	PANGKALAN BUN	Kab. Lamandau	35.564.756.000	4.829.823.000	30.734.929.000	1000	35.564.753.000
285	PALANGKARAYA	Kab. Gunung Mas	30.527.671.000	5.033.970.000	25.493.697.000	1000	30.527.668.000
286	PALANGKARAYA	Kab. Pulang Pisau	26.577.605.000	5.047.046.000	21.530.555.000	1000	26.577.602.000
287	B U N T O K	Kab. Murung Raya	183.577.772.000	8.552.804.000	175.024.964.000	1000	183.577.769.000
288	B U N T O K	Kab. Barito Timur	32.443.654.000	8.527.561.000	23.916.089.000	1000	32.443.651.000
289	BANJARMASIN	Provinsi Kalimantan Selatan	455.694.783.000	131.176.965.000	324.514.150.000	1.000	455.691.116.000
290	BANJARMASIN	Kab. Banjar	69.977.968.000	14.002.982.000	55.974.603.000	1000	69.977.586.000
291	BANJARMASIN	Kab. Barito Kuala	29.780.328.000	7.934.544.000	21.845.401.000	1000	29.779.946.000
292	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Selatan	57.320.460.000	7618363000	49.701.715.000	0	57.320.078.000
293	BARABAI	Kab. Hulu Sungai Tengah	23.193.940.000	7335299000	15.858.258.000	1000	23.193.558.000
294	T A N J U N G	Kab. Hulu Sungai Utara	25.954.543.000	7.542.227.000	18.411.933.000	1000	25.954.161.000
295	KOTABARU	Kab. Kotabaru	52.244.849.000	15125567000	37.118.899.000	192.000	52.244.658.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
296	T A N J U N G	Kab. Tabalong	238.312.131.000	16266976000	222.044.772.000	1000	238.311.749.000
297	PELAIHARI	Kab. Tanah Laut	113.755.990.000	16.123.565.000	97.632.043.000	0	113.755.608.000
298	BARABAI	Kab. Tapin	173.737.510.000	9.702.128.000	164.034.999.000	1.000	173.737.128.000
299	BANJARMASIN	Kota Banjarbaru	43.513.606.000	25375091000	18.138.133.000	0	43.513.224.000
300	BANJARMASIN	Kota Banjarmasin	69.387.177.000	50.972.524.000	18.409.152.000	0	69.381.676.000
301	T A N J U N G	Kab. Balangan	535.920.792.000	13266415000	522.653.994.000	180540	535.920.589.540
302	KOTABARU	Kab. Tanah Bumbu	443.286.752.000	26539727000	416.746.642.000	1000	443.286.370.000
303	SAMARINDA	Provinsi Kalimantan Timur	768.785.059.000	326.046.300.000	442.734.712.000	1000	768.781.013.000
304	TANJUNG REDEP	Kab. Berau	148.710.651.000	50.826.166.000	97.883.923.000	1000	148.710.090.000
305	SAMARINDA	Kab. Kutai Kartanegara	798.715.310.000	74.205.209.000	724.509.539.000	545170	798.715.293.170
306	SAMARINDA	Kab. Kutai Barat	144.957.118.000	32.903.058.000	112.053.487.000	556170	144.957.101.170
307	SAMARINDA	Kab. Kutai Timur	928.126.806.000	67.339.230.000	860.787.014.000	1000	928.126.245.000
308	BALIKPAPAN	Kab. Paser	316.625.796.000	32.721.703.000	283.903.531.000	1000	316.625.235.000
309	BALIKPAPAN	Kota Balikpapan	176.531.697.000	147.405.059.000	29.125.835.000	1000	176.530.895.000
310	SAMARINDA	Kota Bontang	158.315.488.000	59.355.829.000	98.959.097.000	1000	158.314.927.000
311	SAMARINDA	Kota Samarinda	163.702.193.000	68.040.288.000	95.656.083.000	0	163.696.371.000
312	BALIKPAPAN	Kab. Penajam Paser Utara	106.658.935.000	27817539000	78.840.834.000	1000	106.658.374.000
313	SAMARINDA	Kab. Mahakam Ulu	49.793.614.000	16.926.707.000	32.866.345.000	1000	49.793.053.000
314	M A N A D O	Provinsi Sulawesi Utara	65.009.154.000	54.645.773.000	10.363.381.000	0	65.009.154.000
315	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow	10.822.187.000	3.336.755.000	7.485.432.000	0	10.822.187.000
316	M A N A D O	Kab. Minahasa	13.051.093.000	6.012.377.000	7.038.716.000	0	13.051.093.000
317	T A H U N A	Kab. Sangihe	4.443.809.000	3.480.328.000	963.481.000	0	4.443.809.000
318	BITUNG	Kota Bitung	11.275.291.000	6.750.329.000	4.524.962.000	0	11.275.291.000
319	M A N A D O	Kota Manado	35.471.490.000	34.540.040.000	931.450.000	0	35.471.490.000
320	BITUNG	Kab. Kepulauan Talaud	3.492.009.000	2644039000	847.970.000	0	3.492.009.000
321	M A N A D O	Kab. Minahasa Selatan	5.390.525.000	3.893.235.000	1.497.290.000	0	5.390.525.000
322	M A N A D O	Kota Tomohon	10.213.350.000	3.987.338.000	6.226.012.000	0	10.213.350.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
323	BITUNG	Kab. Minahasa Utara	19.474.128.000	7.444.789.000	12.029.339.000	0	19.474.128.000
324	T A H U N A	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	2.977.265.000	2.238.486.000	738.779.000	0	2.977.265.000
325	KOTAMOBAGU	Kota Kotamobagu	6.616.319.000	5.874.405.000	741.914.000	0	6.616.319.000
326	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Utara	3.634.280.000	2.692.627.000	941.653.000	0	3.634.280.000
327	M A N A D O	Kab. Minahasa Tenggara	3.639.095.000	2.742.390.000	896.705.000	0	3.639.095.000
328	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.552.280.000	2559937000	992.343.000	0	3.552.280.000
329	KOTAMOBAGU	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	9.602.505.000	2.384.352.000	7.218.153.000	0	9.602.505.000
330	P A L U	Provinsi Sulawesi Tengah	174.283.904.000	98.227.152.000	75.901.663.000	155.089.000	174.283.904.000
331	L U W U K	Kab. Banggai	273.139.667.000	14.800.633.000	258.298.615.000	40.419.000	273.139.667.000
332	L U W U K	Kab. Banggai Kepulauan	8.601.279.000	4.369.674.000	4.215.449.000	16.156.000	8.601.279.000
333	TOLI - TOLI	Kab. Buol	12.975.836.000	5.496.594.000	7.463.592.000	0	12.960.186.000
334	TOLI - TOLI	Kab. Tolitoli	10.338.802.000	5470473000	4.852.173.000	16.156.000	10.338.802.000
335	P A L U	Kab. Donggala	12.018.904.000	5.317.112.000	6.686.141.000	7.356.500	12.010.609.500
336	P O S O	Kab. Morowali	129.550.645.000	68.658.975.000	60.876.019.000	7.826.000	129.542.820.000
337	P O S O	Kab. Poso	9.825.858.000	5.523.754.000	4.286.207.000	8.072.000	9.818.033.000
338	P A L U	Kota Palu	26.938.589.000	21.746.764.000	5.050.253.000	137.327.870	26.934.344.870
339	P A L U	Kab. Parigi Moutong	12.002.415.000	6.581.369.000	5.338.491.000	80.230.600	12.000.090.600
340	P O S O	Kab. Tojo Una Una	8.412.333.000	4335784000	4.060.393.000	8.331.000	8.404.508.000
341	P A L U	Kab. Sigi	10.496.234.000	5.412.463.000	5.068.121.000	15.180.500	10.495.764.500
342	L U W U K	Kab. Banggai Laut	7.941.590.000	4.038.154.000	3.887.280.000	15.686.500	7.941.120.500
343	P O S O	Kab. Morowali Utara	21.543.195.000	6.141.573.000	15.385.971.000	7.826.000	21.535.370.000
344	MAKASSAR II	Provinsi Sulawesi Selatan	178.988.613.000	160.118.527.000	14.034.069.000	4.836.017.000	178.988.613.000
345	BANTAENG	Kab. Bantaeng	6.529.435.000	5.462.548.000	712.462.000	354.425.000	6.529.435.000
346	PARE - PARE	Kab. Barru	6.213.957.000	5.242.809.000	668.103.000	303.045.000	6.213.957.000
347	WATAMPONE	Kab. Bone	14.758.120.000	9151141000	4.355.844.000	1.251.135.000	14.758.120.000
348	BANTAENG	Kab. Bulukumba	10.727.280.000	6.896.232.000	2.729.086.000	1.101.962.000	10.727.280.000
349	PARE - PARE	Kab. Enrekang	5.674.364.000	4418677000	922.131.000	333.556.000	5.674.364.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
350	MAKASSAR II	Kab. Gowa	11.058.078.000	9.051.712.000	1.655.354.000	351.012.000	11.058.078.000
351	BANTAENG	Kab. Jeneponto	7.284.141.000	6.079.076.000	915.076.000	289.989.000	7.284.141.000
352	P A L O P O	Kab. Luwu	7.057.953.000	5.816.965.000	967.592.000	273.396.000	7.057.953.000
353	P A L O P O	Kab. Luwu Utara	7.150.983.000	5431985000	1.456.171.000	262.827.000	7.150.983.000
354	MAKASSAR I	Kab. Maros	10.955.828.000	8864807000	843.563.000	1.247.458.000	10.955.828.000
355	MAKASSAR I	Kab. Pangkajene Kepulauan	11.382.252.000	9.621.757.000	1.497.668.000	262.827.000	11.382.252.000
356	P A L O P O	Kota Palopo	8.234.638.000	7358845000	612.966.000	262.827.000	8.234.638.000
357	P A L O P O	Kab. Luwu Timur	48.206.857.000	19.496.567.000	28.447.463.000	262.827.000	48.206.857.000
358	PARE - PARE	Kab. Pinrang	6.463.878.000	5381846000	819.205.000	262.827.000	6.463.878.000
359	SINJAI	Kab. Sinjai	7.741.329.000	5314106000	783.892.000	1643331000	7.741.329.000
360	BENTENG	Kab. Kepulauan Selayar	5.669.649.000	4.622.387.000	784.435.000	262827000	5.669.649.000
361	PARE - PARE	Kab. Sidenreng Rappang	6.451.930.000	5.323.569.000	865.534.000	262827000	6.451.930.000
362	WATAMPONE	Kab. Soppeng	9.199.797.000	5428921000	1.135.724.000	2635152000	9.199.797.000
363	MAKASSAR II	Kab. Takalar	8.248.586.000	5.610.936.000	2.295.655.000	341995000	8.248.586.000
364	M A K A L E	Kab. Tana Toraja	6.624.960.000	5.437.420.000	924.713.000	262827000	6.624.960.000
365	WATAMPONE	Kab. Wajo	24.849.912.000	7.253.457.000	17.316.700.000	279755000	24.849.912.000
366	PARE - PARE	Kota Parepare	8.459.896.000	7637299000	558.354.000	264243000	8.459.896.000
367	MAKASSAR I	Kota Makassar	101.881.349.000	1,00278E+11	1.340.342.000	262827000	101.881.349.000
368	M A K A L E	Kab. Toraja Utara	6.423.159.000	5283002000	877.330.000	262827000	6.423.159.000
369	K E N D A R I	Provinsi Sulawesi Tenggara	68.940.763.000	43.444.047.000	25.496.697.000	10000	68.940.754.000
370	B A U - B A U	Kab. Buton	3.777.170.000	2.174.904.000	1.602.264.000	0	3.777.168.000
371	K E N D A R I	Kab. Konawe	9.494.484.000	4.510.178.000	4.984.303.000	1000	9.494.482.000
372	K O L A K A	Kab. Kolaka	36.107.562.000	12163922000	23.943.637.000	1000	36.107.560.000
373	R A H A	Kab. Muna	4.415.335.000	3001723000	1.413.610.000	0	4.415.333.000
374	K E N D A R I	Kota Kendari	25.284.262.000	23583312000	1.700.917.000	0	25.284.229.000
375	B A U - B A U	Kota Bau-bau	5.364.495.000	4.132.676.000	1.231.817.000	0	5.364.493.000
376	K E N D A R I	Kab. Konawe Selatan	20.639.116.000	3563871000	17.075.242.000	1000	20.639.114.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
377	K E N D A R I	Kab. Bombana	20.109.666.000	4.742.764.000	15.366.899.000	1000	20.109.664.000
378	B A U - B A U	Kab. Wakatobi	4.032.871.000	2.346.334.000	1.686.535.000	0	4.032.869.000
379	K O L A K A	Kab. Kolaka Utara	8.096.042.000	2.790.453.000	5.305.586.000	1000	8.096.040.000
380	K E N D A R I	Kab. Konawe Utara	54.782.787.000	2.842.104.000	51.940.680.000	1000	54.782.785.000
381	B A U - B A U	Kab. Buton Utara	3.209.651.000	1.763.890.000	1.445.759.000	0	3.209.649.000
382	K E N D A R I	Kab. Konawe Kepulauan	3.651.851.000	1.751.859.000	1.899.990.000	0	3.651.849.000
383	K O L A K A	Kab. Kolaka Timur	4.987.100.000	2.533.149.000	2.453.948.000	2000	4.987.099.000
384	R A H A	Kab. Muna Barat	3.200.881.000	1.879.964.000	1.320.915.000	0	3.200.879.000
385	B A U - B A U	Kab. Buton Tengah	7.237.590.000	2028675000	5.208.912.000	1940	7.237.588.940
386	B A U - B A U	Kab. Buton Selatan	3.154.370.000	1650142000	1.504.226.000	0	3.154.368.000
387	D E N P A S A R	Provinsi Bali	179.401.949.000	177.552.244.000	1.092.236.000	735909110	179.380.389.110
388	D E N P A S A R	Kab. Badung	91.318.896.000	90.536.668.000	521.347.000	253.566.610	91.311.581.610
389	AMLAPURA	Kab. Bangli	12.979.740.000	12.417.818.000	419.033.000	142.889.000	12.979.740.000
390	SINGARAJA	Kab. Buleleng	21.045.231.000	20.015.607.000	830.596.000	199.028.000	21.045.231.000
391	D E N P A S A R	Kab. Gianyar	21.478.063.000	20.646.306.000	470.662.000	361.095.000	21.478.063.000
392	SINGARAJA	Kab. Jembrana	14.243.224.000	13060000000	901.967.000	281.257.000	14.243.224.000
393	AMLAPURA	Kab. Karangasem	14.994.513.000	14.167.560.000	656.014.000	170.939.000	14.994.513.000
394	AMLAPURA	Kab. Klungkung	14.356.493.000	13.875.271.000	362.557.000	118.665.000	14.356.493.000
395	D E N P A S A R	Kab. Tabanan	19.155.079.000	18.184.670.000	832.086.000	134.371.910	19.151.127.910
396	D E N P A S A R	Kota Denpasar	91.227.758.000	90.213.992.000	598.932.000	414.834.000	91.227.758.000
397	M A T A R A M	Provinsi Nusa Tenggara Barat	195.389.183.000	56.357.009.000	13.133.069.000	125.899.105.000	195.389.183.000
398	B I M A	Kab. Bima	23.873.306.000	4.382.905.000	1.968.295.000	17.522.106.000	23.873.306.000
399	B I M A	Kab. Dompu	24.747.667.000	4.438.305.000	1.738.936.000	18.570.426.000	24.747.667.000
400	M A T A R A M	Kab. Lombok Barat	28.423.273.000	6.661.499.000	1.764.241.000	19.997.533.000	28.423.273.000
401	M A T A R A M	Kab. Lombok Tengah	83.732.393.000	7.802.672.000	1.970.127.000	73.959.594.000	83.732.393.000
402	S E L O N G	Kab. Lombok Timur	90.747.258.000	7.679.048.000	2.299.178.000	80.769.032.000	90.747.258.000
403	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa	28.854.890.000	6.243.998.000	4.458.929.000	18.151.963.000	28.854.890.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
404	M A T A R A M	Kota Mataram	93.896.033.000	27.765.338.000	1.453.022.000	64.677.673.000	93.896.033.000
405	B I M A	Kota Bima	24.994.944.000	6.155.246.000	1.351.495.000	17.488.203.000	24.994.944.000
406	SUMBAWA BESAR	Kab. Sumbawa Barat	87.367.687.000	18.206.049.000	51.652.637.000	17.509.001.000	87.367.687.000
407	M A T A R A M	Kab. Lombok Utara	23.431.510.000	4.419.621.000	1.434.880.000	17.577.009.000	23.431.510.000
408	K U P A N G	Provinsi Nusa Tenggara Timur	46.687.742.000	41.783.484.000	3.284.621.000	1.619.637.000	46.687.742.000
409	K U P A N G	Kab. Alor	2.750.068.000	2.048.346.000	587.264.000	114.458.000	2.750.068.000
410	ATAMBUA	Kab. Belu	2.863.422.000	2.339.135.000	418.031.000	106.256.000	2.863.422.000
411	E N D E	Kab. Ende	4.978.574.000	2.999.559.000	1.882.092.000	96.923.000	4.978.574.000
412	LARANTUKA	Kab. Flores Timur	3.089.755.000	2.160.792.000	561.180.000	367.783.000	3.089.755.000
413	K U P A N G	Kab. Kupang	3.822.684.000	2.506.361.000	1.192.590.000	123.733.000	3.822.684.000
414	LARANTUKA	Kab. Lembata	2.300.172.000	1.708.452.000	474.223.000	117.497.000	2.300.172.000
415	R U T E N G	Kab. Manggarai	4.478.916.000	2.800.784.000	1.415.176.000	262.956.000	4.478.916.000
416	R U T E N G	Kab. Ngada	3.134.666.000	2391517000	642.100.000	101.049.000	3.134.666.000
417	E N D E	Kab. Sikka	4.501.912.000	3.808.395.000	535.538.000	157.979.000	4.501.912.000
418	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat	2.619.244.000	2.042.022.000	469.412.000	107.810.000	2.619.244.000
419	WAINGAPU	Kab. Sumba Timur	5.868.842.000	3.444.202.000	2.284.187.000	140.453.000	5.868.842.000
420	K U P A N G	Kab. Timor Tengah Selatan	3.495.518.000	2.414.834.000	894.834.000	185.850.000	3.495.518.000
421	ATAMBUA	Kab. Timor Tengah Utara	2.802.866.000	2.056.555.000	637.181.000	105.976.490	2.799.712.490
422	K U P A N G	Kota Kupang	21.829.594.000	21227572000	505.615.000	96.407.000	21.829.594.000
423	K U P A N G	Kab. Rote Ndao	2.388.170.000	1806025000	469.958.000	112.187.000	2.388.170.000
424	R U T E N G	Kab. Manggarai Barat	5.520.929.000	3.439.360.000	584.238.000	1.497.331.000	5.520.929.000
425	E N D E	Kab. Nagekeo	2.407.791.000	1.793.909.000	512.031.000	101.851.000	2.407.791.000
426	WAINGAPU	Kab. Sumba Barat Daya	2.618.989.000	1.748.934.000	679.377.000	190.678.000	2.618.989.000
427	WAINGAPU	Kab. Sumba Tengah	1.654.678.000	1.088.532.000	465.512.000	100.634.000	1.654.678.000
428	R U T E N G	Kab. Manggarai Timur	2.829.957.000	2.104.230.000	607.011.000	118.716.000	2.829.957.000
429	K U P A N G	Kab. Sabu Raijua	2.060.815.000	1.527.660.000	422.743.000	110.412.000	2.060.815.000
430	ATAMBUA	Kab. Malaka	2.326.109.000	1.731.666.000	462.998.000	131.445.000	2.326.109.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
431	A M B O N	Provinsi Maluku	25.927.074.000	21147141000	4.779.933.000	0	25.927.074.000
432	SAUMLAKI	Kab. Kepulauan Tanimbar	2.323.050.000	1487705000	835.345.000	0	2.323.050.000
433	M A S O H I	Kab. Maluku Tengah	8.094.363.000	3.499.914.000	4.594.449.000	0	8.094.363.000
434	T U A L	Kab. Maluku Tenggara	2.791.092.000	2.174.995.000	616.097.000	0	2.791.092.000
435	A M B O N	Kab. Buru	4.274.179.000	1875108000	2.399.071.000	0	4.274.179.000
436	A M B O N	Kota Ambon	18.056.807.000	17435352000	621.455.000	0	18.056.807.000
437	M A S O H I	Kab. Seram Bagian Barat	3.346.061.000	2.110.713.000	1.235.348.000	0	3.346.061.000
438	M A S O H I	Kab. Seram Bagian Timur	15.718.529.000	1879267000	13.839.262.000	0	15.718.529.000
439	T U A L	Kab. Kepulauan Aru	2.703.521.000	1715161000	988.360.000	0	2.703.521.000
440	T U A L	Kota Tual	2.481.706.000	1.711.324.000	770.382.000	0	2.481.706.000
441	SAUMLAKI	Kab. Maluku Barat Daya	3.799.480.000	2.963.435.000	836.045.000	0	3.799.480.000
442	A M B O N	Kab. Buru Selatan	2.078.060.000	1.217.016.000	861.044.000	0	2.078.060.000
443	JAYAPURA	Provinsi Papua	38.277.370.000	32.838.834.000	5.438.536.000	0	38.277.370.000
444	B I A K	Kab. Biak Numfor	7.214.815.000	5.691.755.000	1.523.060.000	0	7.214.815.000
445	JAYAPURA	Kab. Jayapura	12.379.848.000	5.601.236.000	6.778.612.000	0	12.379.848.000
446	W A M E N A	Kab. Jayawijaya	4.963.141.000	3.556.696.000	1.406.445.000	0	4.963.141.000
447	MERAUKE	Kab. Merauke	29.845.443.000	8.783.952.000	21.061.491.000	0	29.845.443.000
448	T I M I K A	Kab. Mimika	608.867.259.000	140.847.183.000	468.020.076.000	0	608.867.259.000
449	N A B I R E	Kab. Nabire	25.031.280.000	10738813000	14.292.467.000	0	25.031.280.000
450	N A B I R E	Kab. Paniai	18.735.436.000	8.997.503.000	9.737.933.000	0	18.735.436.000
451	W A M E N A	Kab. Puncak Jaya	15.945.263.000	7.671.751.000	8.273.512.000	0	15.945.263.000
452	S E R U I	Kab. Kepulauan Yapen	5.513.352.000	3.819.371.000	1.693.981.000	0	5.513.352.000
453	JAYAPURA	Kota Jayapura	36.026.191.000	34.534.265.000	1.491.926.000	0	36.026.191.000
454	JAYAPURA	Kab. Sarmi	7.428.492.000	2.644.923.000	4.783.569.000	0	7.428.492.000
455	JAYAPURA	Kab. Keerom	7.298.730.000	2.356.661.000	4.942.069.000	0	7.298.730.000
456	W A M E N A	Kab. Yahukimo	3.302.876.000	1.388.624.000	1.914.252.000	0	3.302.876.000
457	JAYAPURA	Kab. Pegunungan Bintang	2.752.774.000	1.253.072.000	1.499.702.000	0	2.752.774.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
458	W A M E N A	Kab. Tolikara	2.101.402.000	1132609000	968.793.000	0	2.101.402.000
459	MERAUKE	Kab. Boven Digoel	12.767.963.000	3.122.221.000	9.645.742.000	0	12.767.963.000
460	MERAUKE	Kab. Mappi	4.955.042.000	1.937.319.000	3.017.723.000	0	4.955.042.000
461	MERAUKE	Kab. Asmat	5.287.460.000	2.396.737.000	2.890.723.000	0	5.287.460.000
462	S E R U I	Kab. Waropen	3.943.945.000	2.194.222.000	1.749.723.000	0	3.943.945.000
463	B I A K	Kab. Supiori	4.068.151.000	2.634.685.000	1.433.466.000	0	4.068.151.000
464	JAYAPURA	Kab. Mamberamo Raya	4.252.466.000	2.060.940.000	2.191.526.000	0	4.252.466.000
465	W A M E N A	Kab. Mamberamo Tengah	1.679.172.000	799.066.000	880.106.000	0	1.679.172.000
466	W A M E N A	Kab. Yalimo	1.669.858.000	872.098.000	797.760.000	0	1.669.858.000
467	W A M E N A	Kab. Lanny Jaya	1.533.878.000	748.901.000	784.977.000	0	1.533.878.000
468	W A M E N A	Kab. Nduga	1.570.067.000	531.646.000	1.038.421.000	0	1.570.067.000
469	N A B I R E	Kab. Dogiyai	18.712.144.000	8.727.104.000	9.985.040.000	0	18.712.144.000
470	T I M I K A	Kab. Puncak	16.672.199.000	7.932.309.000	8.739.890.000	0	16.672.199.000
471	N A B I R E	Kab. Intan Jaya	18.372.315.000	8.766.567.000	9.605.748.000	0	18.372.315.000
472	N A B I R E	Kab. Deiyai	19.211.925.000	8.710.621.000	10.501.304.000	0	19.211.925.000
473	T E R N A T E	Provinsi Maluku Utara	104.337.946.000	58.706.933.000	45.630.977.000	0	104.337.910.000
474	T E R N A T E	Kab. Halmahera Tengah	95.633.028.000	40.338.587.000	55.294.436.000	0	95.633.023.000
475	T E R N A T E	Kota Ternate	18.674.349.000	15.186.293.000	3.488.051.000	0	18.674.344.000
476	T E R N A T E	Kab. Halmahera Barat	7.542.827.000	3.850.916.000	3.691.906.000	0	7.542.822.000
477	TOBELO	Kab. Halmahera Timur	126.028.627.000	5.266.665.000	120.761.957.000	0	126.028.622.000
478	T E R N A T E	Kab. Halmahera Selatan	56.457.449.000	16.326.079.000	40.131.316.000	0	56.457.395.000
479	TOBELO	Kab. Halmahera Utara	10.239.107.000	6.119.877.000	4.119.225.000	0	10.239.102.000
480	T E R N A T E	Kab. Kepulauan Sula	10.097.246.000	4.371.989.000	5.725.252.000	0	10.097.241.000
481	T E R N A T E	Kota Tidore Kepulauan	12.894.477.000	7.882.279.000	5.012.193.000	0	12.894.472.000
482	TOBELO	Kab. Pulau Morotai	6.829.491.000	3.443.329.000	3.386.157.000	0	6.829.486.000
483	T E R N A T E	Kab. Pulau Taliabu	12.403.877.000	4.289.300.000	8.114.572.000	0	12.403.872.000
484	S E R A N G	Provinsi Banten	733.135.532.000	729.574.788.000	3.308.122.000	1000	732.882.911.000

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
485	RANGKASBITUNG	Kab. Lebak	58.768.435.000	53.771.056.000	4.952.268.000	1000	58.723.325.000
486	RANGKASBITUNG	Kab. Pandeglang	56.472.459.000	53.292.559.000	3.134.790.000	0	56.427.349.000
487	S E R A N G	Kab. Serang	91.072.747.000	88.729.217.000	2.298.419.000	1000	91.027.637.000
488	TANGERANG	Kab. Tangerang	277.167.180.000	274.620.028.000	2.349.164.000	1.000	276.969.193.000
489	S E R A N G	Kota Cilegon	126.676.141.000	125.856.722.000	774.309.000	0	126.631.031.000
490	TANGERANG	Kota Tangerang	308.892.376.000	307.269.747.000	1.554.323.000	1.000	308.824.071.000
491	S E R A N G	Kota Serang	75.747.069.000	74.843.209.000	858.750.000	0	75.701.959.000
492	TANGERANG	Kota Tangerang Selatan	241.708.912.000	240.268.592.000	1.237.462.000	1.000	241.506.055.000
493	PANGKAL PINANG	Provinsi Bangka Belitung	50.564.454.000	35.724.566.000	14.839.888.000	0	50.564.454.000
494	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka	26.197.110.000	9.114.911.000	17.082.199.000	0	26.197.110.000
495	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung	17.090.498.000	6314600000	10.775.898.000	0	17.090.498.000
496	PANGKAL PINANG	Kota Pangkal Pinang	22.729.949.000	20931988000	1.797.961.000	0	22.729.949.000
497	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Selatan	19.509.052.000	3.971.200.000	15.537.852.000	0	19.509.052.000
498	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Tengah	11.398.598.000	5.525.227.000	5.873.371.000	0	11.398.598.000
499	PANGKAL PINANG	Kab. Bangka Barat	23.397.131.000	8.293.794.000	15.103.337.000	0	23.397.131.000
500	TANJUNG PANDAN	Kab. Belitung Timur	16.138.971.000	5.331.914.000	10.807.057.000	0	16.138.971.000
501	GORONTALO	Provinsi Gorontalo	16.827.849.000	15.229.527.000	1.598.166.000	0	16.827.693.000
502	MARISA	Kab. Boalemo	4.149.181.000	2377545000	1.771.598.000	0	4.149.143.000
503	GORONTALO	Kab. Gorontalo	6.510.454.000	4732840000	1.777.383.000	0	6.510.223.000
504	GORONTALO	Kota Gorontalo	9.754.024.000	9.331.394.000	422.592.000	0	9.753.986.000
505	MARISA	Kab. Pohuwato	4.705.049.000	2801836000	1.903.175.000	0	4.705.011.000
506	GORONTALO	Kab. Bone Bolango	4.462.171.000	3.868.885.000	593.248.000	0	4.462.133.000
507	GORONTALO	Kab. Gorontalo Utara	4.013.920.000	2192520000	1.821.362.000	0	4.013.882.000
508	TANJUNG PINANG	Provinsi Kepulauan Riau	172.418.806.000	1,45772E+11	26.596.023.000	49547980	172.417.307.980
509	TANJUNG PINANG	Kab. Natuna	96.412.193.000	14616723000	81.784.835.000	10322910	96.411.880.910
510	TANJUNG PINANG	Kab. Kepulauan Anambas	67.969.451.000	19.665.344.000	48.293.652.000	10142910	67.969.138.910
511	B A T A M	Kab. Karimun	30.993.272.000	27.515.082.000	3.467.735.000	4941410	30.987.758.410

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
512	B A T A M	Kota Batam	152.021.503.000	147.858.643.000	4.086.291.000	76569000	152.021.503.000
513	TANJUNG PINANG	Kota Tanjung Pinang	24.286.835.000	21.539.023.000	2.737.177.000	10322910	24.286.522.910
514	TANJUNG PINANG	Kab. Lingga	18.220.751.000	13.087.839.000	5.122.457.000	10455000	18.220.751.000
515	TANJUNG PINANG	Kab. Bintan	26.620.639.000	21.610.372.000	4.999.615.000	10652000	26.620.639.000
516	MANOKWARI	Provinsi Papua Barat	172.990.786.000	25.137.213.000	147.853.573.000	0	172.990.786.000
517	FAK - FAK	Kab. Fak Fak	48.517.255.000	3988632000	44.528.623.000	0	48.517.255.000
518	MANOKWARI	Kab. Manokwari	32.017.352.000	10.836.455.000	21.180.897.000	0	32.017.352.000
519	S O R O N G	Kab. Sorong	93.576.209.000	5223579000	88.352.630.000	0	93.576.209.000
520	S O R O N G	Kota Sorong	15.523.612.000	8.325.880.000	7.197.732.000	0	15.523.612.000
521	S O R O N G	Kab. Raja Ampat	26.021.936.000	2480869000	23.541.067.000	0	26.021.936.000
522	S O R O N G	Kab. Sorong Selatan	6.473.023.000	1.625.383.000	4.847.640.000	0	6.473.023.000
523	MANOKWARI	Kab. Teluk Bintuni	764.898.655.000	21.995.564.000	742.903.091.000	0	764.898.655.000
524	MANOKWARI	Kab. Teluk Wondama	17.907.784.000	2.284.899.000	15.622.885.000	0	17.907.784.000
525	FAK - FAK	Kab. Kaimana	20.286.072.000	2.630.834.000	17.655.238.000	0	20.286.072.000
526	S O R O N G	Kab. Maybrat	5.547.217.000	1.217.145.000	4.330.072.000	0	5.547.217.000
527	S O R O N G	Kab. Tambrauw	5.511.178.000	1257279000	4.253.899.000	0	5.511.178.000
528	MANOKWARI	Kab. Manokwari Selatan	16.270.485.000	2.135.477.000	14.135.008.000	0	16.270.485.000
529	MANOKWARI	Kab. Pegunungan Arfak	16.911.896.000	2.428.479.000	14.483.417.000	0	16.911.896.000
530	MAMUJU	Provinsi Sulawesi Barat	12.738.024.000	10.282.421.000	2.455.603.000	0	12.738.024.000
531	M A J E N E	Kab. Majene	2.684.535.000	2109238000	575.297.000	0	2.684.535.000
532	MAMUJU	Kab. Mamuju	8.323.363.000	6.366.194.000	1.957.169.000	0	8.323.363.000
533	M A J E N E	Kab. Polewali Mandar	3.879.966.000	3.136.008.000	743.958.000	0	3.879.966.000
534	M A J E N E	Kab. Mamasa	2.213.878.000	1484812000	729.066.000	0	2.213.878.000
535	MAMUJU	Kab. Pasangkayu	8.213.679.000	2158190000	6.055.489.000	0	8.213.679.000
536	MAMUJU	Kab. Mamuju Tengah	2.884.498.000	1389427000	1.495.071.000	0	2.884.498.000
537	TANJUNG SELOR	Provinsi Kalimantan Utara	75.671.595.000	23264527000	52.406.964.000	1000	75.671.492.000
538	MERAUKE	Provinsi Papua Tengah	234.100.807.000	1,27029E+11	107.071.914.000	0	234.100.807.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL PAJAK
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	KPPN	Daerah	Total Pagu	Realisasi			
				PPh Perorangan	PBB	CHT	Total
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)+(8)
539	N A B I R E	Provinsi Papua Selatan	16.088.425.000	7996285000	8.092.140.000	0	16.088.425.000
540	W A M E N A	Provinsi Papua Pegunungan	7.660.553.000	5299598000	2.360.955.000	0	7.660.553.000
541	S O R O N G	Provinsi Papua Barat Daya	36.200.978.000	10.983.122.000	25.217.856.000	0	36.200.978.000
542	TANJUNG SELOR	Kab. Bulungan	82.770.141.000	11.924.749.000	70.845.359.000	1000	82.770.109.000
543	TANJUNG SELOR	Kab. Malinau	33.686.636.000	4.962.441.000	28.724.162.000	1000	33.686.604.000
544	NUNUKAN	Kab. Nunukan	56.024.989.000	5.128.617.000	50.896.339.000	1000	56.024.957.000
545	T A R A K A N	Kota Tarakan	101.832.790.000	13039786000	88.792.850.000	149380	101.832.785.380
546	T A R A K A N	Kab. Tana Tidung	37.200.465.000	3.689.657.000	33.510.775.000	1000	37.200.433.000
Jumlah			59.338.542.701.000	32.733.740.472.000	21.507.689.731.000	5.087.556.141.540	59.328.986.344.540

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
1	Provinsi Aceh	176.461.671.000	28.851.724.000	43.533.890.000,00	73.603.197.000	172.153.000	929.944.000	0	29.370.763.000	176.461.671.000
2	Kab. Aceh Barat	110.271.991.000	85.257.000	163.360.000,00	101.340.520.000	9.016.000	2.000	1.384.982.000	7.264.012.000	110.247.149.000
3	Kab. Aceh Besar	9.803.190.000	85.257.000	163.135.000,00	3.873.919.000	339.514.000	11.610.000	2.337.350.000	2.992.405.000	9.803.190.000
4	Kab. Aceh Selatan	12.295.244.000	88.810.000	170.371.000,00	4.580.137.000	9.408.000	9.098.900	2.138.728.000	5.294.792.000	12.291.344.900
5	Kab. Aceh Singkil	16.240.484.000	85.257.000	160.461.000,00	3.846.225.000	8.983.000	3.664.400	3.088.830.000	9.039.239.000	16.232.659.400
6	Kab. Aceh Tengah	23.097.274.000	88.810.000	161.853.000,00	17.981.285.000	9.363.000	114.275.000	1.167.186.000	3.574.502.000	23.097.274.000
7	Kab. Aceh Tenggara	10.331.006.000	123.472.000	194.382.000,00	4.021.401.000	9.416.000	35.510.000	1.167.186.000	4.779.639.000	10.331.006.000
8	Kab. Aceh Timur	15.891.163.000	462.361.000	981.932.000,00	3.936.302.000	9.204.000	76.811.000	1.769.841.000	8.654.712.000	15.891.163.000
9	Kab. Aceh Utara	19.504.318.000	81.705.000	7.201.639.000,00	3.686.960.000	8.620.000	31.934.000	1.344.278.000	7.149.182.000	19.504.318.000
10	Kab. Bireuen	11.698.437.000	87.033.000	1.008.117.000,00	3.936.621.000	9.205.000	17.932.000	1.510.189.000	5.129.340.000	11.698.437.000
11	Kab. Pidie	18.319.073.000	88.810.000	169.864.000,00	13.291.748.000	52.395.000	20.346.000	1.472.129.000	3.223.781.000	18.319.073.000
12	Kab. Simeulue	11.274.104.000	88.810.000	170.023.000,00	4.019.984.000	9.401.000	26.535.000	3.866.884.000	3.092.467.000	11.274.104.000
13	Kota Banda Aceh	6.773.683.000	85.257.000	161.584.000,00	3.835.465.000	50.299.000	10.490.000	1.188.906.000	1.441.682.000	6.773.683.000
14	Kota Sabang	6.079.076.000	88.810.000	169.923.000,00	4.016.930.000	9.398.000	6.948.000	1.787.067.000	0	6.079.076.000
15	Kota Langsa	11.113.486.000	462.361.000	158.616.000,00	3.920.351.000	9.210.000	1.000	1.206.864.000	5.339.092.000	11.096.495.000
16	Kota Lhokseumawe	10.617.807.000	83.481.000	964.014.000,00	3.764.605.000	8.816.000	9.085.000	1.198.244.000	4.589.562.000	10.617.807.000
17	Kab. Gayo Lues	15.215.609.000	506.459.000	192.500.000,00	8.739.902.000	9.419.000	69.696.000	1.167.186.000	4.530.447.000	15.215.609.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	17.016.618.000	87.033.000	166.504.000,00	9.998.626.000	9.210.000	12.419.700	1.388.827.000	5.348.676.000	17.011.295.700
19	Kab. Aceh Jaya	21.290.937.000	88.810.000	170.343.000,00	13.187.555.000	52.395.000	29.572.000	1.953.176.000	5.809.086.000	21.290.937.000
20	Kab. Nagan Raya	70.861.095.000	88.810.000	169.929.000,00	58.653.581.000	9.399.000	18.482.690	1.566.716.000	10.343.039.000	70.849.956.690
21	Kab. Aceh Tamiang	16.964.001.000	3.373.842.000	188.650.000,00	3.949.072.000	9.200.000	39.919.000	1.409.345.000	7.993.973.000	16.964.001.000
22	Kab. Bener Meriah	10.106.050.000	88.810.000	985.499.000,00	4.017.648.000	9.395.000	11.167.900	1.167.186.000	3.802.983.000	10.082.688.900
23	Kab. Pidie Jaya	10.178.734.000	87.033.000	166.232.000,00	3.925.096.000	9.222.000	7.165.000	1.294.592.000	4.689.394.000	10.178.734.000
24	Kota Subulussalam	11.283.302.000	81.705.000	156.944.000,00	3.743.222.000	8.643.000	9.131.900	1.073.811.000	6.205.955.000	11.279.411.900
25	Provinsi Sumatera Utara	135.566.237.000	3.897.867.000	122.588.000,00	49.815.465.000	3.414.012.000	12.188.150.000	0	66.128.155.000	135.566.237.000
26	Kab. Asahan	19.830.663.000	226.786.000	6.241.000,00	1.816.381.000	78.405.000	120.832.200	1.418.894.000	16.141.828.000	19.809.367.200
27	Kab. Dairi	11.230.178.000	217.337.000	5.981.000,00	2.199.876.000	75.909.000	136.722.000	1.073.811.000	7.520.542.000	11.230.178.000
28	Kab. Deli Serdang	23.434.339.000	11.736.700.000	34.919.000,00	1.778.226.000	76.620.000	114.888.000	1.302.836.000	8.390.150.000	23.434.339.000
29	Kab. Karo	11.532.937.000	1.162.033.000	35.662.000,00	1.824.178.000	78.647.000	305.348.000	1.120.498.000	7.006.571.000	11.532.937.000
30	Kab. Labuhanbatu	29.932.083.000	17.196.432.000	5.982.000,00	1.748.525.000	75.278.000	6.167.000	1.296.587.000	9.345.608.000	29.674.579.000
31	Kab. Langkat	18.566.685.000	1.969.932.000	411.831.000,00	1.869.158.000	80.341.000	36.567.700	1.562.179.000	12.551.354.000	18.481.362.700
32	Kab. Mandailing Natal	28.908.794.000	236.235.000	6.501.000,00	9.002.721.000	8.585.946.000	536.803.000	2.110.616.000	8.429.972.000	28.908.794.000
33	Kab. Nias	8.028.851.000	217.337.000	5.981.000,00	1762150000	75.680.000	222.266.000	1.546.662.000	4.198.775.000	8.028.851.000
34	Kab. Simalungun	19.596.956.000	1.081.726.000	5.981.000,00	1.751.257.000	75.361.000	376.326.000	1.073.811.000	15.232.494.000	19.596.956.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	110.363.448.000	236.235.000	6.501.000,00	96.686.040.000	720.414.000	1.057.967.000	1.250.272.000	10.406.019.000	110.363.448.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	18.024.684.000	231.511.000	6.371.000,00	7.146.915.000	79.053.000	153.595.000	2.659.456.000	7.747.783.000	18.024.684.000
37	Kab. Tapanuli Utara	15.887.804.000	236.235.000	6.501.000,00	7.132.617.000	81.962.000	325.688.000	1.167.186.000	6.937.615.000	15.887.804.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
38	Kab. Toba Samosir	10.282.439.000	226.786.000	6.241.000,00	1.824.420.000	78.662.000	275.923.000	1.120.498.000	6.749.909.000	10.282.439.000
39	Kota Binjai	11.272.117.000	1.165.161.000	35.662.000,00	1.804.354.000	78.033.000	78.296.000	1.120.498.000	6.990.113.000	11.272.117.000
40	Kota Medan	6.243.753.000	1.105.243.000	6.112.000,00	1.777.365.000	76.744.000	80.536.000	1.125.152.000	2.072.601.000	6.243.753.000
41	Kota Pematang Siantar	5.669.292.000	217.337.000	5.981.000,00	1.743.479.000	75.241.000	95.014.000	1.073.811.000	2.458.429.000	5.669.292.000
42	Kota Sibolga	5.402.585.000	222.062.000	6.111.000,00	1.779.342.000	76.804.000	79.146.000	1.110.414.000	2.128.706.000	5.402.585.000
43	Kota Tanjung Balai	5.973.985.000	217.337.000	5.981.000,00	1.744.294.000	75.154.000	75.300.000	1.073.811.000	2.782.108.000	5.973.985.000
44	Kota Tebing Tinggi	5.700.228.000	222.062.000	6.111.000,00	1.774.020.000	76.649.000	75.426.000	1.097.155.000	2.448.805.000	5.700.228.000
45	Kota Padang Sidempuan	14.879.244.000	222.062.000	6.111.000,00	6.483.022.000	76.613.000	81.269.000	1.097.155.000	6.913.012.000	14.879.244.000
46	Kab. Pakpak Bharat	7.179.165.000	222.062.000	6.111.000,00	1.879.792.000	77.878.000	168.014.000	1.097.155.000	3.728.153.000	7.179.165.000
47	Kab. Nias Selatan	17.824.845.000	217.337.000	5.981.000,00	1.763.818.000	75.870.000	658.947.000	4.568.330.000	10.534.562.000	17.824.845.000
48	Kab. Humbang Hasundutan	8.525.228.000	217.337.000	5.981.000,00	1.762.238.000	75.686.000	195.263.000	1.073.811.000	5.194.912.000	8.525.228.000
49	Kab. Serdang Bedagai	13.900.758.000	1.105.242.000	6.111.000,00	1.766.915.000	76.420.000	95.239.000	1.532.707.000	9.318.124.000	13.900.758.000
50	Kab. Samosir	6.246.442.000	231.511.000	6.371.000,00	1858466000	80.159.000	329.558.000	1.143.842.000	2.596.535.000	6.246.442.000
51	Kab. Batu Bara	12.664.896.000	217.337.000	5.981.000,00	1.738.853.000	74.971.000	94.724.000	1.593.193.000	8.939.837.000	12.664.896.000
52	Kab. Padang Lawas	23.801.730.000	768.988.000	6.371.000,00	6.760.019.000	706.114.000	1.339.110.000	1.143.842.000	13.077.286.000	23.801.730.000
53	Kab. Padang Lawas Utara	35.332.341.000	17.499.822.000	5.981.000,00	6.370.427.000	75.519.000	729.986.000	1.073.811.000	9.576.795.000	35.332.341.000
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	36.193.556.000	18.238.123.000	6.372.000,00	1.819.856.000	78.904.000	1.089.037.000	1.143.842.000	13.817.422.000	36.193.556.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	23.104.529.000	217.337.000	5.981.000,00	6.369.412.000	75.616.000	392.023.000	1.162.764.000	14.881.396.000	23.104.529.000
56	Kab. Nias Utara	14.172.032.000	217.337.000	5.981.000,00	1.757.446.000	75.547.000	74.868.000	2.170.755.000	9.870.098.000	14.172.032.000
57	Kab. Nias Barat	8.033.569.000	217.337.000	5.981.000,00	1.749.975.000	75.442.000	221.794.000	1.564.265.000	4.198.775.000	8.033.569.000
58	Kota Gunungsitoli	6.195.460.000	226.786.000	6.241.000,00	1.784.240.000	77.411.000	75.303.000	1.257.677.000	2.767.802.000	6.195.460.000
59	Provinsi Sumatera Barat	54.691.454.000	0	-	10.377.708.000	3.607.659.000	12.392.936.000	0	28.313.151.000	54.691.454.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	20.573.964.000	10.839.990.000	1.242.433.000,00	814847000	146.101.000	327.597.000	1.143.842.000	6.059.154.000	20.573.964.000
61	Kab. Agam	10.387.097.000	0	-	742379000	146.479.000	1.134.000	1.382.062.000	8.058.204.000	10.330.258.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	9.576.612.000	0	-	646533000	138.951.000	2.567.424.000	6.223.704.000	0	9.576.612.000
63	Kab. Padang Pariaman	7.317.322.000	0	-	691840000	151.158.000	60.421.000	1.425.506.000	4.988.397.000	7.317.322.000
64	Kab. Pasaman	9.391.012.000	338.096.000	-	757.681.000	789.315.000	282.760.000	1.167.186.000	6.055.974.000	9.391.012.000
65	Kab. Pesisir Selatan	14.025.492.000	0	-	768420000	825.047.000	81.062.000	3.101.006.000	9.249.957.000	14.025.492.000
66	Kab. Sijunjung	24.719.556.000	10514466000	1.248.873.000,00	5.369.182.000	154.460.000	505.632.000	1.143.842.000	5.783.101.000	24.719.556.000
67	Kab. Solok	11.011.923.000	0	-	3.707.081.000	998.050.000	77.785.000	1.143.842.000	5.085.165.000	11.011.923.000
68	Kab. Tanah Datar	9.043.965.000	0	-	2.895.674.000	151.306.000	64.921.000	1.120.498.000	4.811.566.000	9.043.965.000
69	Kota Bukit Tinggi	3.765.842.000	0	-	628.379.000	135.517.000	54.640.000	1.073.811.000	1.873.495.000	3.765.842.000
70	Kota Padang Panjang	3.643.740.000	0	-	661.676.000	143.103.000	58.056.000	1.120.498.000	1.660.407.000	3.643.740.000
71	Kota Padang	7.903.960.000	0	-	728079000	154.682.000	71.478.000	1.926.322.000	5.023.399.000	7.903.960.000
72	Kota Payakumbuh	3.618.062.000	0	-	642.039.000	138.922.000	56.545.000	1.097.155.000	1.683.401.000	3.618.062.000
73	Kota Sawahlunto	23.710.507.000	0	-	17.600.767.000	150.573.000	71.410.000	1.120.498.000	4.767.259.000	23.710.507.000
74	Kota Solok	8.476.182.000	0	-	687.294.000	150.561.000	61.364.000	1.120.498.000	6.456.465.000	8.476.182.000
75	Kota Pariaman	5.985.574.000	0	-	628.379.000	135.980.000	54.937.000	1.208.750.000	3.957.528.000	5.985.574.000
76	Kab. Pasaman Barat	20.832.025.000	0	-	1.170.680.000	772.142.000	117.323.000	1.752.890.000	17.018.990.000	20.832.025.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
77	Kab. Dharmasraya	22.144.863.000	414.168.000	-	9.823.321.000	775.544.000	3.561.000	1.097.155.000	9.701.540.000	21.815.289.000
78	Kab. Solok Selatan	20.521.766.000	0	-	898.609.000	8.972.047.000	1.000	1.143.842.000	9.370.034.000	20.384.533.000
79	Provinsi Riau	469.296.166.000	307.908.300.000	20.292.447.000,00	40.392.287.000	0	27.268.378.000	0	73.434.754.000	469.296.166.000
80	Kab. Bengkalis	549.319.156.000	510.283.397.000	3.271.874.000,00	4.390.514.000	0	8.953.108.000	2.845.064.000	19.575.199.000	549.319.156.000
81	Kab. Indragiri Hilir	186.923.096.000	50.091.233.000	28.283.304.000,00	59.836.663.000	0	8.040.140.000	2.337.369.000	38.334.387.000	186.923.096.000
82	Kab. Indragiri Hulu	112.466.350.000	44.345.546.000	7.029.476.000,00	30.466.051.000	0	5.361.563.000	1.143.842.000	24.119.872.000	112.466.350.000
83	Kab. Kampar	282.281.502.000	212.973.227.000	24.118.515.000,00	4.915.737.000	0	6.812.630.000	1.143.842.000	32.317.551.000	282.281.502.000
84	Kab. Kuantan Singingi	97.590.259.000	53.683.914.000	8.118.159.000,00	13.728.830.000	0	5.899.828.000	1.143.842.000	15.015.686.000	97.590.259.000
85	Kab. Pelalawan	181.617.167.000	67.592.242.000	53.811.425.000,00	11.536.540.000	0	17.118.418.000	1.636.979.000	29.921.563.000	181.617.167.000
86	Kab. Rokan Hilir	357.989.707.000	310.252.803.000	3.119.406.000,00	4.194.742.000	0	3.634.835.000	2.078.144.000	34.709.777.000	357.989.707.000
87	Kab. Rokan Hulu	185.396.944.000	139.552.148.000	4.246.840.000,00	4.408.952.000	0	4.710.908.000	1.120.498.000	31.357.598.000	185.396.944.000
88	Kab. Siak	319.959.794.000	269.389.403.000	8.118.192.000,00	4.378.916.000	0	11.203.873.000	1.332.579.000	25.536.831.000	319.959.794.000
89	Kota Dumai	289.599.018.000	262.051.536.000	3.191.108.000,00	4.291.913.000	0	3.783.613.000	1.456.042.000	14.824.806.000	289.599.018.000
90	Kota Pekanbaru	94.154.029.000	65.705.453.000	7.791.669.000,00	4.186.513.000	0	3.688.854.000	1.097.155.000	11.684.385.000	94.154.029.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	74.137.837.000	58.675.068.000	3.655.986.000,00	4.430.357.000	0	4.953.510.000	2.422.916.000	0	74.137.837.000
92	Provinsi Jambi	273.851.761.000	42.856.806.000	85.899.040.000,00	98.132.406.000	0	13.104.157.000	0	33.859.352.000	273.851.761.000
93	Kab. Batanghari	188.657.380.000	26.881.398.000	72.322.228.000,00	70.166.868.000	0	3.648.857.470	1.120.498.000	14.100.136.000	188.239.985.470
94	Kab. Bungo	113.065.784.000	8.146.623.000	14.692.673.000,00	75.226.846.000	0	680.040.000	1.143.842.000	13.175.760.000	113.065.784.000
95	Kab. Kerinci	49.550.150.000	8.264.631.000	14.978.382.000,00	17.474.335.000	671.324.000	632.067.000	1.167.186.000	6.362.225.000	49.550.150.000
96	Kab. Merangin	82.777.076.000	9.217.644.000	14.245.989.000,00	45.362.513.000	0	1.018.390.000	1.143.842.000	11.788.698.000	82.777.076.000
97	Kab. Muaro Jambi	154.404.242.000	32.977.942.000	73.397.342.000,00	29.775.546.000	0	2.090.000	1.097.155.000	14.321.580.000	151.571.655.000
98	Kab. Sarolangun	181.985.066.000	19.611.304.000	48.550.017.000,00	99.953.443.000	0	598.112.400	1.120.498.000	10.759.890.000	180.593.264.400
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	425.901.257.000	114.541.825.000	261.693.055.000,00	22.950.148.000	0	1.000	1.376.539.000	18.945.362.000	419.506.930.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	152.137.343.000	42.665.344.000	66.331.318.000,00	18.597.793.000	0	2.691.470.000	1.946.805.000	19.904.613.000	152.137.343.000
101	Kab. Tebo	122.988.970.000	19.257.626.000	37.996.181.000,00	48.848.893.000	0	3.220.270.000	1.167.186.000	12.498.814.000	122.988.970.000
102	Kota Jambi	38.616.127.000	8.437.031.000	13.617.005.000,00	10.394.977.000	0	626.957.000	1.073.811.000	4.466.346.000	38.616.127.000
103	Kota Sungai Penuh	39.831.050.000	8.324.520.000	15.052.311.000,00	11.326.455.000	0	597.477.000	1.167.186.000	3.363.101.000	39.831.050.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.420.038.500.000	55.819.903.000	185.925.385.000,00	1.115.466.775.000	4.870.518.000	12.713.485.000	0	45.242.434.000	1.420.038.500.000
105	Kab. Lahat	1.177.067.838.000	6.227.777.000	29.303.301.000,00	1.127.512.426.000	1.444.632.000	1.258.472.000	1.120.498.000	10.200.732.000	1.177.067.838.000
106	Kab. Musi Banyuasin	948.079.753.000	151.307.448.000	554.261.942.000,00	213.061.409.000	223.473.000	4.494.346.000	1.143.842.000	23.587.293.000	948.079.753.000
107	Kab. Musi Rawas	340.888.935.000	23.994.149.000	106.200.656.000,00	193.736.622.000	515.567.000	2.209.557.000	1.143.842.000	13.088.542.000	340.888.935.000
108	Kab. Muara Enim	1.099.172.555.000	15.213.311.000	38.110.254.000,00	1.020.898.737.000	9.283.764.000	1.000	1.120.498.000	11.482.336.000	1.096.108.901.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	137.429.508.000	5.147.264.000	17.548.367.000,00	82.192.406.000	223.698.000	9.239.194.000	2.766.735.000	20.311.844.000	137.429.508.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	159.901.715.000	11.417.526.000	21.007.836.000,00	114.527.476.000	1.696.697.000	758.561.000	1.143.842.000	9.349.777.000	159.901.715.000
111	Kota Palembang	153.124.425.000	19.363.280.000	17.527.389.000,00	108.128.298.000	425.876.000	712.372.000	1.097.155.000	5.870.055.000	153.124.425.000
112	Kota Prabumulih	178.883.539.000	10.900.198.000	49.894.982.000,00	108.290.245.000	425.650.000	632.072.000	1.097.155.000	7.643.237.000	178.883.539.000
113	Kota Pagar Alam	205.534.046.000	5.201.279.000	18.722.073.000,00	174.494.507.000	1.120.165.000	708.754.000	1.120.498.000	4.166.770.000	205.534.046.000
114	Kota Lubuk Linggau	112.696.084.000	5.242.648.000	19.761.557.000,00	79.778.570.000	229.534.000	618.616.000	1.120.498.000	5.944.661.000	112.696.084.000
115	Kab. Banyuasin	231.116.079.000	20.141.516.000	56.481.605.000,00	131.964.308.000	435.277.000	3.091.528.000	2.258.494.000	16.743.351.000	231.116.079.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
116	Kab. Ogan Ilir	157.713.355.000	8.237.167.000	31.715.331.000,00	108.343.393.000	537.590.000	1.311.029.000	1.097.155.000	6.471.690.000	157.713.355.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timu	115.265.466.000	5.615.945.000	17.514.588.000,00	80.588.095.000	348.661.000	1.198.257.000	1.120.498.000	8.879.422.000	115.265.466.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selat	144.935.553.000	5.955.951.000	18.554.276.000,00	112.791.256.000	873.282.000	775.027.000	1.143.842.000	4.841.919.000	144.935.553.000
119	Kab. Empat Lawang	183.215.403.000	5.403.645.000	20.869.856.000,00	146.656.059.000	316.373.000	679.275.000	1.143.842.000	8.146.353.000	183.215.403.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang	215.711.495.000	19.359.147.000	54.929.568.000,00	129.546.508.000	435.622.000	1.047.138.000	1.120.498.000	9.273.014.000	215.711.495.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	314.964.102.000	29.413.064.000	54.573.482.000,00	218.472.780.000	223.873.000	983.519.000	1.143.842.000	10.153.542.000	314.964.102.000
122	Provinsi Bengkulu	88.953.195.000	0	-	68.609.617.000	209.604.000	936.705.000	0	19.197.269.000	88.953.195.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	86.610.542.000	49.662.000	646.429.000,00	78.405.218.000	146.153.000	55.829.000	1.319.355.000	5.987.896.000	86.610.542.000
124	Kab. Bengkulu Utara	113.266.411.000	0	-	99.423.388.000	34.883.000	95.360.000	2.478.045.000	11.234.735.000	113.266.411.000
125	Kab. Rejang Lebong	29.049.961.000	426.583.000	2.650.796.000,00	19.440.086.000	192.934.000	82.190.000	1.143.842.000	5.113.530.000	29.049.961.000
126	Kota Bengkulu	18.559.511.000	0	-	11.782.686.000	26.239.000	9.342.000	1.328.405.000	5.412.839.000	18.559.511.000
127	Kab. Kaur	55.925.912.000	325.789.000	716.613.000,00	45.843.467.000	398.819.000	155.114.000	1.560.890.000	6.925.220.000	55.925.912.000
128	Kab. Seluma	92.448.235.000	48.821.000	631.094.000,00	81.653.600.000	82.628.000	62.971.000	1.428.526.000	8.540.595.000	92.448.235.000
129	Kab. Mukomuko	32.721.646.000	0	-	16.055.628.000	27.901.000	51.864.000	1.674.238.000	14.912.015.000	32.721.646.000
130	Kab. Lebong	42.122.728.000	1.840.276.000	2.652.050.000,00	32.576.597.000	36.028.000	31.278.500	1.143.842.000	3.769.678.000	42.049.749.500
131	Kab. Kepahiang	18.645.142.000	0	-	12.190.440.000	225.552.000	10.561.000	1.097.155.000	5.121.434.000	18.645.142.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	66.068.963.000	0	-	56.884.343.000	57.308.000	24.826.000	1.138.399.000	7.964.087.000	66.068.963.000
133	Provinsi Lampung	48.873.699.000	21.448.303.000	-	228.747.000	9.135.881.000	686.604.000	0	17.372.225.000	48.871.760.000
134	Kab. Lampung Barat	9.802.607.000	2.904.459.000	-	113.350.000	1.856.837.000	151.449.000	1.097.155.000	3.679.357.000	9.802.607.000
135	Kab. Lampung Selatan	12.159.907.000	4.915.292.000	-	15.078.000	526.075.000	47.879.000	2.465.953.000	4.189.630.000	12.159.907.000
136	Kab. Lampung Tengah	13.699.602.000	4.810.711.000	-	7.391.000	1.753.833.000	48.769.000	1.073.811.000	6.005.087.000	13.699.602.000
137	Kab. Lampung Utara	8.140.053.000	2.904.459.000	-	228.000	452.978.000	146.175.000	1.097.155.000	3.539.058.000	8.140.053.000
138	Kab. Lampung Timur	28.175.605.000	20.764.267.000	-	707.000	467.199.000	48.475.000	1.961.394.000	4.933.563.000	28.175.605.000
139	Kab. Tanggamus	31.557.970.000	2.904.459.000	-	185.516.000	22.643.849.000	55.344.000	2.128.118.000	3.640.684.000	31.557.970.000
140	Kab. Tulang Bawang	13.544.938.000	4.915.292.000	-	3.783.000	450.096.000	670.798.000	1.451.856.000	6.053.113.000	13.544.938.000
141	Kab. Way Kanan	12.774.984.000	2.966.256.000	-	76.100.000	476.538.000	1.824.590.000	1.120.498.000	6.311.002.000	12.774.984.000
142	Kota Bandar Lampung	9.002.260.000	2.842.662.000	-	1.375.000	447.688.000	46.107.000	1.107.643.000	4.556.785.000	9.002.260.000
143	Kota Metro	7.995.406.000	4.810.711.000	-	0	440.540.000	46.335.000	1.073.811.000	1.624.009.000	7.995.406.000
144	Kab. Pesawaran	10.193.236.000	2.966.256.000	-	7.679.000	1.826.848.000	50.197.000	1.657.483.000	3.684.773.000	10.193.236.000
145	Kab. Pringsewu	9.537.197.000	2.904.459.000	-	1.160.000	1.781.607.000	48.139.000	1.097.155.000	3.704.677.000	9.537.197.000
146	Kab. Mesuji	13.097.365.000	2.966.256.000	-	15.723.000	459.692.000	850.507.000	1.120.498.000	7.684.689.000	13.097.365.000
147	Kab. Tulang Bawang Barat	9.170.469.000	2.904.459.000	-	0	450.084.000	754.929.000	1.097.155.000	3.963.842.000	9.170.469.000
148	Kab. Pesisir Barat	12.385.645.000	3.028.053.000	-	2.706.000	1.874.602.000	52.066.000	2.353.639.000	5.074.579.000	12.385.645.000
149	Provinsi DKI Jakarta	33.632.641.000	28.496.277.000	-	0	0	0	5.136.364.000	0	33.632.641.000
150	Provinsi Jawa Barat	369.343.693.000	49.457.052.000	24.996.918.000,00	13.516.480.000	273.227.106.000	804.422.000	0	3.670.857.500	365.672.835.500
151	Kab. Bandung	359.131.482.000	3.596.810.000	2.654.852.000,00	664.768.000	350.015.053.000	92.170.000	1.073.811.000	1.034.018.000	359.131.482.000
152	Kab. Bekasi	28.100.995.000	4.723.672.000	8.524.800.000,00	1.412.277.000	11.115.120.000	34.874.000	1.290.252.000	1.000.000.000	28.100.995.000
153	Kab. Bogor	148.216.733.000	4.134.207.000	3.222.287.000,00	23.734.778.000	112.851.278.000	113.253.000	1.097.155.000	3.063.775.000	148.216.733.000
154	Kab. Ciamis	17.859.847.000	3.594.060.000	1.845.009.000,00	688.208.000	9.171.650.000	463.765.000	1.097.155.000	0	16.859.847.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
155	Kab. Cianjur	58.526.173.000	3.657.709.000	1.858.199.000,00	1.990.220.000	46.247.980.000	416.971.000	1.492.140.000	2.862.954.000	58.526.173.000
156	Kab. Cirebon	17.268.447.000	4.318.221.000	2.076.214.000,00	678.990.000	8.743.829.000	77.785.000	1.373.408.000	0	17.268.447.000
157	Kab. Garut	189.878.269.000	3.658.122.000	1.845.647.000,00	789.597.000	178.951.678.000	92.698.000	1.497.508.000	3.043.019.000	189.878.269.000
158	Kab. Indramayu	42.422.735.000	22.769.641.000	7.155.909.000,00	667.472.000	8.805.311.000	98.425.000	1.925.977.000	1.000.000.000	42.422.735.000
159	Kab. Karawang	31.336.776.000	7.980.711.000	8.216.183.000,00	1.414.765.000	11.210.585.000	50.094.000	1.464.438.000	1.000.000.000	31.336.776.000
160	Kab. Kuningan	16.869.982.000	3.669.120.000	1.876.897.000,00	699.879.000	9.328.391.000	175.197.000	1.120.498.000	0	16.869.982.000
161	Kab. Majalengka	18.639.415.000	4.455.989.000	2.348.668.000,00	677.515.000	8.959.393.000	100.695.000	1.097.155.000	1.000.000.000	18.639.415.000
162	Kab. Purwakarta	22.323.135.000	4.088.433.000	3.204.736.000,00	1.423.309.000	11.430.678.000	102.168.000	1.073.811.000	1.000.000.000	22.323.135.000
163	Kab. Subang	51.012.466.000	7.240.988.000	14.455.064.000,00	668.435.000	23.594.229.000	69.653.000	1.287.427.000	3.696.670.000	51.012.466.000
164	Kab. Sukabumi	127.405.226.000	3.578.556.000	1.811.077.000,00	5.477.414.000	111.400.555.000	209.655.000	1.724.263.000	3.203.706.000	127.405.226.000
165	Kab. Sumedang	45.755.052.000	4.603.453.000	3.027.370.000,00	682.117.000	35.244.106.000	100.851.000	1.097.155.000	1.000.000.000	45.755.052.000
166	Kab. Tasikmalaya	34.843.259.000	3.652.372.000	1.859.165.000,00	689.731.000	24.256.128.000	186.465.000	1.367.115.000	2.832.283.000	34.843.259.000
167	Kota Bandung	31.319.867.000	3.483.834.000	1.766.269.000,00	659.902.000	23.297.204.000	38.847.000	1.073.811.000	0	30.319.867.000
168	Kota Bekasi	21.982.147.000	3.675.239.000	3.711.270.000,00	1.406.063.000	11.082.486.000	33.278.000	1.073.811.000	500.000.000	21.482.147.000
169	Kota Bogor	20.487.273.000	3560692000	1.805.424.000,00	1.448.455.000	11.540.845.000	34.702.000	1.097.155.000	1.000.000.000	20.487.273.000
170	Kota Cirebon	15.619.423.000	3468358000	1.755.812.000,00	653.260.000	8.603.287.000	33.440.000	1.105.266.000	0	15.619.423.000
171	Kota Depok	20.195.248.000	3.488.357.000	1.958.002.000,00	1.413.944.000	11.227.390.000	33.744.000	1.073.811.000	1.000.000.000	20.195.248.000
172	Kota Sukabumi	24.366.057.000	3.492.903.000	1.772.395.000,00	1.027.574.000	15.952.744.000	46.630.000	1.073.811.000	1.000.000.000	24.366.057.000
173	Kota Tasikmalaya	16.806.464.000	3485559000	1.767.434.000,00	662.124.000	8.738.866.000	78.670.000	1.073.811.000	1.000.000.000	16.806.464.000
174	Kota Cimahi	31.031.939.000	3455075000	1.746.837.000,00	647.573.000	23.070.526.000	38.117.000	1.073.811.000	1.000.000.000	31.031.939.000
175	Kota Banjar	16.448.546.000	3572324000	1.813.283.000,00	679.714.000	9.015.480.000	270.590.000	1.097.155.000	0	16.448.546.000
176	Kab. Bandung Barat	34.471.132.000	3596810000	2.653.753.000,00	668.701.000	23.450.708.000	116.834.000	1.073.811.000	0	31.560.617.000
177	Kab. Pangandaran	19.659.965.000	3575774000	1.815.614.000,00	683.098.000	9.042.674.000	276.020.000	1.435.181.000	2.831.604.000	19.659.965.000
178	Provinsi Jawa Tengah	6.609.696.000	416.266.000	1.744.962.000,00	139.036.000	433.690.000	3.875.742.000	0	0	6.609.696.000
179	Kab. Banjarnegara	1.475.154.000	50120000	86.397.000,00	3.341.000	32.604.000	205.537.000	1.097.155.000	0	1.475.154.000
180	Kab. Banyumas	1.872.973.000	52819000	88.530.000,00	40.018.000	218.418.000	352.690.000	1.120.498.000	0	1.872.973.000
181	Kab. Batang	2.002.939.000	49.332.000	86.279.000,00	572.000	18.714.000	576.594.000	1.271.448.000	0	2.002.939.000
182	Kab. Blora	129.392.806.000	1,18999E+11	6.060.865.000,00	1.384.000	16.860.000	3.170.851.000	1.143.842.000	0	129.392.806.000
183	Kab. Boyolali	1.553.309.000	50040000	86.385.000,00	12.704.000	43.975.000	263.050.000	1.097.155.000	0	1.553.309.000
184	Kab. Brebes	1.950.347.000	51617000	84.897.000,00	894.000	96.671.000	405.283.000	1.310.985.000	0	1.950.347.000
185	Kab. Cilacap	3.353.245.000	221362000	88.562.000,00	18.099.000	31.370.000	412.955.000	1.580.897.000	1.000.000.000	3.353.245.000
186	Kab. Demak	1.637.555.000	52066000	85.013.000,00	4.000	32.611.000	208.935.000	1.258.926.000	0	1.637.555.000
187	Kab. Grobogan	3.135.370.000	126537000	512.805.000,00	13.636.000	34.287.000	1.327.607.000	1.120.498.000	0	3.135.370.000
188	Kab. Jepara	2.975.672.000	46522000	84.131.000,00	1.145.000	15.682.000	292.725.000	2.535.467.000	0	2.975.672.000
189	Kab. Karanganyar	1.425.073.000	52.837.000	86.806.000,00	613.000	16.427.000	171.235.000	1.097.155.000	0	1.425.073.000
190	Kab. Kebumen	1.778.417.000	53.855.000	88.638.000,00	933.000	27.353.000	180.938.000	1.426.700.000	0	1.778.417.000
191	Kab. Kendal	2.040.044.000	47.538.000	84.331.000,00	773.000	63.358.000	532.491.000	1.311.553.000	0	2.040.044.000
192	Kab. Klaten	1.391.795.000	51.444.000	86.645.000,00	3.328.000	16.328.000	136.895.000	1.097.155.000	0	1.391.795.000
193	Kab. Kudus	1.445.379.000	49.417.000	84.614.000,00	479.000	15.733.000	221.325.000	1.073.811.000	0	1.445.379.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
194	Kab. Magelang	1.510.868.000	52.757.000	86.794.000,00	4.543.000	128.232.000	141.387.000	1.097.155.000	0	1.510.868.000
195	Kab. Pati	2.738.202.000	118.989.000	491.438.000,00	3.692.000	15.729.000	792.757.000	1.315.597.000	0	2.738.202.000
196	Kab. Pekalongan	1.601.168.000	48.827.000	86.203.000,00	559.000	19.185.000	298.255.000	1.148.139.000	0	1.601.168.000
197	Kab. Pemalang	2.336.892.000	52.868.000	86.763.000,00	4.772.000	40.897.000	874.493.000	1.277.099.000	0	2.336.892.000
198	Kab. Purbalingga	1.536.018.000	53.884.000	88.738.000,00	1.081.000	44.338.000	227.479.000	1.120.498.000	0	1.536.018.000
199	Kab. Purworejo	1.520.266.000	54.099.000	87.044.000,00	1.670.000	20.540.000	153.308.000	1.203.605.000	0	1.520.266.000
200	Kab. Rembang	3.944.553.000	762.388.000	524.183.000,00	10.230.000	16.483.000	1.133.648.000	1.497.621.000	0	3.944.553.000
201	Kab. Semarang	1.880.932.000	52.411.000	86.790.000,00	1.477.000	390.560.000	252.539.000	1.097.155.000	0	1.880.932.000
202	Kab. Sragen	1.546.545.000	52.313.000	86.775.000,00	1.780.000	16.359.000	292.163.000	1.097.155.000	0	1.546.545.000
203	Kab. Sukoharjo	1.378.983.000	50.668.000	86.528.000,00	968.000	16.302.000	127.362.000	1.097.155.000	0	1.378.983.000
204	Kab. Tegal	1.943.831.000	53.373.000	86.887.000,00	5.431.000	38.560.000	553.139.000	1.206.441.000	0	1.943.831.000
205	Kab. Temanggung	1.518.164.000	54.790.000	87.052.000,00	4.000	73.616.000	205.547.000	1.097.155.000	0	1.518.164.000
206	Kab. Wonogiri	1.629.661.000	52.575.000	90.122.000,00	101.078.000	31.018.000	174.734.000	1.180.134.000	0	1.629.661.000
207	Kab. Wonosobo	1.514.258.000	52.850.000	86.760.000,00	512.000	29.556.000	247.425.000	1.097.155.000	0	1.514.258.000
208	Kota Magelang	1.370.677.000	52.245.000	86.765.000,00	4.000	20.388.000	114.120.000	1.097.155.000	0	1.370.677.000
209	Kota Pekalongan	1.407.459.000	46.608.000	84.191.000,00	4.000	15.662.000	156.530.000	1.104.464.000	0	1.407.459.000
210	Kota Salatiga	1.354.574.000	47.926.000	84.390.000,00	4.000	36.362.000	112.081.000	1.073.811.000	0	1.354.574.000
211	Kota Semarang	1.510.548.000	46.977.000	84.247.000,00	4.000	34.523.000	188.571.000	1.156.226.000	0	1.510.548.000
212	Kota Surakarta	1.340.727.000	50.557.000	84.786.000,00	4.000	16.037.000	115.532.000	1.073.811.000	0	1.340.727.000
213	Kota Tegal	1.457.089.000	50.816.000	86.550.000,00	4.000	21.092.000	170.076.000	1.128.551.000	0	1.457.089.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	73.337.000	0	-	20.682.000	96.000	52.559.000	0	0	73.337.000
215	Kab. Bantul	1.170.873.000	0	-	599.000	86.000	23.300.000	1.146.888.000	0	1.170.873.000
216	Kab. Gunung Kidul	1.566.783.000	0	-	1.629.000	98.000	97.490.000	1.467.566.000	0	1.566.783.000
217	Kab. Kulon Progo	1.282.997.000	0	-	30.919.000	6.156.000	15.263.000	1.230.659.000	0	1.282.997.000
218	Kab. Sleman	1.111.296.000	0	-	1.314.000	6.316.000	29.855.000	1.073.811.000	0	1.111.296.000
219	Kota Yogyakarta	1.104.973.000	0	-	0	75.000	31.087.000	1.073.811.000	0	1.104.973.000
220	Provinsi Jawa Timur	672.484.643.000	565.954.033.000	74.484.747.000,00	27.743.174.000	456.579.000	3.846.110.000	0	0	672.484.643.000
221	Kab. Bangkalan	29.650.692.000	23.209.599.000	3.796.733.000,00	934.795.000	15.320.000	118.684.000	1.575.561.000	0	29.650.692.000
222	Kab. Banyuwangi	88.912.994.000	24.238.309.000	3.962.179.000,00	56.433.836.000	197.763.000	1.696.959.000	2.383.948.000	0	88.912.994.000
223	Kab. Blitar	30.196.462.000	23.581.019.000	3.885.754.000,00	965.178.000	16.475.000	403.943.000	1.344.093.000	0	30.196.462.000
224	Kab. Bojonegoro	1.806.437.524.000	1.798.244.145.000	4.714.861.000,00	985.333.000	19.439.000	1.329.904.000	1.143.842.000	0	1.806.437.524.000
225	Kab. Bondowoso	37.269.954.000	23.642.651.000	3.874.398.000,00	7.756.903.000	343.061.000	532.443.000	1.120.498.000	0	37.269.954.000
226	Kab. Gresik	46.631.953.000	28.664.178.000	15.037.023.000,00	923.281.000	17.565.000	162.366.000	1.827.540.000	0	46.631.953.000
227	Kab. Jember	38.905.815.000	24.151.341.000	3.909.486.000,00	7.827.574.000	62.631.000	1.069.817.000	1.884.966.000	0	38.905.815.000
228	Kab. Jombang	140.557.788.000	134.378.886.000	3.774.085.000,00	939.795.000	18.676.000	349.191.000	1.097.155.000	0	140.557.788.000
229	Kab. Kediri	29.379.411.000	23.193.790.000	3.796.676.000,00	947.541.000	16.160.000	328.089.000	1.097.155.000	0	29.379.411.000
230	Kab. Lamongan	145.934.056.000	138.495.497.000	4.535.414.000,00	958.786.000	18.322.000	605.742.000	1.320.295.000	0	145.934.056.000
231	Kab. Lumajang	30.210.768.000	23.615.380.000	3.872.530.000,00	964.071.000	16.467.000	423.869.000	1.318.451.000	0	30.210.768.000
232	Kab. Madiun	147.291.658.000	140.097.135.000	3.940.667.000,00	985.524.000	84.152.000	1.040.338.000	1.143.842.000	0	147.291.658.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
233	Kab. Magetan	29.236.634.000	23.121.505.000	3.807.301.000,00	947.431.000	32.436.000	230.806.000	1.097.155.000	0	29.236.634.000
234	Kab. Malang	29.963.392.000	23.226.117.000	3.814.469.000,00	950.141.000	42.284.000	367.715.000	1.562.666.000	0	29.963.392.000
235	Kab. Mojokerto	30.520.282.000	23.620.903.000	4.564.120.000,00	956337000	77.733.000	204.034.000	1.097.155.000	0	30.520.282.000
236	Kab. Nganjuk	143.955.901.000	137.238.009.000	3.872.363.000,00	989.239.000	33.151.000	702.641.000	1.120.498.000	0	143.955.901.000
237	Kab. Ngawi	144.781.117.000	137.339.952.000	4.270.962.000,00	964.159.000	19.046.000	1.066.500.000	1.120.498.000	0	144.781.117.000
238	Kab. Pacitan	29.564.431.000	23.128.865.000	3.776.650.000,00	1.002.180.000	29.005.000	191.554.000	1.436.177.000	0	29.564.431.000
239	Kab. Pamekasan	29.742.389.000	23.170.686.000	4.135.218.000,00	938.791.000	15.370.000	117.083.000	1.365.241.000	0	29.742.389.000
240	Kab. Pasuruan	28.666.963.000	22.548.465.000	3.772.208.000,00	939.339.000	62.307.000	146.109.000	1.198.535.000	0	28.666.963.000
241	Kab. Ponorogo	30.448.463.000	23.691.810.000	3.893.345.000,00	968.679.000	280.535.000	493.596.000	1.120.498.000	0	30.448.463.000
242	Kab. Probolinggo	29.734.259.000	23.132.487.000	3.776.898.000,00	938.660.000	47.360.000	358.824.000	1.480.030.000	0	29.734.259.000
243	Kab. Sampang	29.710.984.000	23.203.772.000	3.803.334.000,00	940155000	15.404.000	116.171.000	1.632.148.000	0	29.710.984.000
244	Kab. Sidoarjo	29.453.568.000	22.298.283.000	4.883.177.000,00	916377000	20.014.000	108.046.000	1.227.671.000	0	29.453.568.000
245	Kab. Situbondo	38.534.389.000	24.315.397.000	3.920.726.000,00	7.841.157.000	63.876.000	397.854.000	1.995.379.000	0	38.534.389.000
246	Kab. Sumenep	36.073.879.000	23.303.239.000	4.611.778.000,00	952.109.000	15.433.000	118.492.000	7.072.828.000	0	36.073.879.000
247	Kab. Trenggalek	30.573.269.000	23.699.480.000	3.893.870.000,00	1234270000	29.851.000	213.500.000	1.502.298.000	0	30.573.269.000
248	Kab. Tuban	427.717.269.000	4,17389E+11	6.584.870.000,00	1.014.660.000	15.759.000	1.261.247.000	1.451.540.000	0	427.717.269.000
249	Kab. Tulungagung	30.122.768.000	23645905000	3.859.043.000,00	957.737.000	29.637.000	270.471.000	1.359.975.000	0	30.122.768.000
250	Kota Blitar	29.186.422.000	23197199000	3.796.909.000,00	942.916.000	15.453.000	136.790.000	1.097.155.000	0	29.186.422.000
251	Kota Kediri	29.113.833.000	23150326000	3.793.698.000,00	943.196.000	15.430.000	114.028.000	1.097.155.000	0	29.113.833.000
252	Kota Madiun	28.456.613.000	22577892000	3.707.509.000,00	917.523.000	18.224.000	161.654.000	1.073.811.000	0	28.456.613.000
253	Kota Malang	28.332.935.000	22515892000	3.703.261.000,00	914.896.000	15.723.000	109.352.000	1.073.811.000	0	28.332.935.000
254	Kota Mojokerto	28.367.230.000	22551046000	3.705.670.000,00	916.386.000	17.550.000	102.767.000	1.073.811.000	0	28.367.230.000
255	Kota Pasuruan	28.367.981.000	22525479000	3.703.918.000,00	915.302.000	17.499.000	102.044.000	1.103.739.000	0	28.367.981.000
256	Kota Probolinggo	28.454.251.000	22608786000	3.709.625.000,00	918.833.000	15.077.000	108.905.000	1.093.025.000	0	28.454.251.000
257	Kota Surabaya	29.676.348.000	23040569000	4.422.816.000,00	912.358.000	15.000.000	102.868.000	1.182.737.000	0	29.676.348.000
258	Kota Batu	31.115.327.000	24780933000	3.984.013.000,00	991.146.000	63.346.000	128.703.000	1.167.186.000	0	31.115.327.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	150.501.057.000	0	-	66.017.750.000	0	26.477.780.000	0	58.005.527.000	150.501.057.000
260	Kab. Bengkayang	26.056.748.000	0	-	8.184.309.000	0	251.703.000	1.760.011.000	15.860.725.000	26.056.748.000
261	Kab. Landak	26.684.855.000	0	-	11.299.716.000	0	93.291.500	1.120.498.000	13.953.674.000	26.467.179.500
262	Kab. Kapuas Hulu	80.564.269.000	0	-	63.907.836.000	0	2.041.790.000	1.167.186.000	13.447.457.000	80.564.269.000
263	Kab. Ketapang	117.603.349.000	0	-	65.840.772.000	0	5.447.597.000	3.640.950.000	42.674.030.000	117.603.349.000
264	Kab. Mempawah	15.150.705.000	0	-	5.030.631.000	0	368.202.000	1.923.234.000	7.828.638.000	15.150.705.000
265	Kab. Sambas	18.866.733.000	0	-	4.681.186.000	0	285.969.000	2.112.291.000	11.787.287.000	18.866.733.000
266	Kab. Sanggau	99.986.031.000	0	-	72.694.534.000	0	652.229.000	1.120.498.000	25.518.770.000	99.986.031.000
267	Kab. Sintang	89.461.832.000	0	-	68.030.454.000	0	2.185.692.000	1.143.842.000	18.101.844.000	89.461.832.000
268	Kota Pontianak	15.421.523.000	0	-	4.443.582.000	0	368.399.000	1.073.811.000	9.535.731.000	15.421.523.000
269	Kota Singkawang	12.328.293.000	0	-	4.571.769.000	0	240.197.000	1.199.714.000	6.316.613.000	12.328.293.000
270	Kab. Sekadau	29.554.951.000	0	-	10.387.997.000	0	483.080.000	1.120.498.000	17.563.376.000	29.554.951.000
271	Kab. Melawi	30.403.159.000	0	-	14.833.539.000	0	2.443.607.000	1.167.186.000	11.958.827.000	30.403.159.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
272	Kab. Kayong Utara	22.635.620.000	0	-	7.673.487.000	0	554.224.000	5.030.942.000	9.376.967.000	22.635.620.000
273	Kab. Kubu Raya	28.738.770.000	0	-	10.628.481.000	0	1.693.897.000	2.309.892.000	14.106.500.000	28.738.770.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	1.876.209.159.000	5229000	-	1.539.965.404.000	0	283.218.684.000	0	53.019.842.000	1.876.209.159.000
275	Kab. Barito Selatan	554.205.792.000	193744000	-	543.552.120.000	0	1.268.771.800	1.143.842.000	5.399.700.000	551.558.177.800
276	Kab. Barito Utara	1.721.509.532.000	197.698.000	-	1.701.746.628.000	0	9.253.328.000	1.167.186.000	9.144.692.000	1.721.509.532.000
277	Kab. Kapuas	923.275.844.000	1841000	-	898.512.446.000	0	7.777.545.000	1.283.087.000	15.700.925.000	923.275.844.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	164.617.843.000	762.000	-	133.168.155.000	0	4.574.423.000	1.915.781.000	24.958.722.000	164.617.843.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	182.426.077.000	745.000	-	129.786.746.000	0	10.019.378.000	1.556.824.000	41.062.384.000	182.426.077.000
280	Kota Palangkaraya	142.434.677.000	761.000	-	131.429.124.000	0	1.000	1.143.842.000	7.288.317.000	139.862.045.000
281	Kab. Katingan	155.011.435.000	747.000	-	129.655.457.000	0	10.817.691.000	1.551.238.000	12.986.302.000	155.011.435.000
282	Kab. Seruyan	161.603.794.000	731.000	-	124.975.289.000	0	12.638.371.000	1.849.194.000	22.140.209.000	161.603.794.000
283	Kab. Sukamara	148.083.551.000	746.000	-	131.919.015.000	0	2.573.730.000	1.547.328.000	12.042.732.000	148.083.551.000
284	Kab. Lamandau	163.560.843.000	762.000	-	139.597.759.000	0	6.583.238.000	1.167.186.000	16.211.898.000	163.560.843.000
285	Kab. Gunung Mas	267.233.451.000	731.000	-	248.761.274.000	0	8.087.713.000	1.143.842.000	9.239.891.000	267.233.451.000
286	Kab. Pulang Pisau	188.433.030.000	746.000	-	171.092.536.000	0	3.031.742.000	1.715.233.000	12.592.773.000	188.433.030.000
287	Kab. Murung Raya	1.074.679.034.000	1.880.000	-	1.055.363.883.000	0	11.000	1.167.186.000	6.595.856.000	1.063.128.816.000
288	Kab. Barito Timur	270.667.906.000	189.791.000	-	259.885.952.000	0	1.678.360.000	1.120.498.000	7.793.305.000	270.667.906.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	3.115.267.259.000	774.978.000	-	3.080.644.468.000	0	10.630.631.000	0	23.217.182.000	3.115.267.259.000
290	Kab. Banjar	846.845.705.000	116.795.000	-	839.132.596.000	0	248.490.000	1.144.569.000	6.203.255.000	846.845.705.000
291	Kab. Barito Kuala	419.603.996.000	114.362.000	-	410.255.281.000	0	462.247.000	1.184.795.000	7.587.311.000	419.603.996.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	614.933.026.000	116.795.000	-	608.623.043.000	0	144.861.000	1.120.498.000	4.927.829.000	614.933.026.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	497.820.486.000	119.228.000	-	493.514.395.000	0	148.144.000	1.143.842.000	2.894.877.000	497.820.486.000
294	Kab. Hulu Sungai Utara	548.172.456.000	300.198.000	-	542.275.047.000	0	113.567.000	1.097.155.000	4.386.489.000	548.172.456.000
295	Kab. Kotabaru	1.536.984.511.000	119.228.000	-	1.515.841.030.000	0	1.196.909.000	5.164.042.000	14.663.302.000	1.536.984.511.000
296	Kab. Tabalong	1.219.050.126.000	2.637.902.000	-	1.207.452.433.000	0	1.658.591.000	1.143.842.000	6.157.358.000	1.219.050.126.000
297	Kab. Tanah Laut	1.077.685.860.000	116.795.000	-	1.068.880.805.000	0	203.969.000	2.054.083.000	6.430.208.000	1.077.685.860.000
298	Kab. Tapin	878.903.218.000	116.795.000	-	869.917.825.000	0	83.171.000	1.120.498.000	7.664.929.000	878.903.218.000
299	Kota Banjarbaru	374.591.086.000	114.362.000	-	369.144.673.000	0	80.668.000	1.097.155.000	4.154.228.000	374.591.086.000
300	Kota Banjarmasin	303.047.298.000	111.929.000	-	296.805.142.000	0	73.026.000	1.097.155.000	4.960.046.000	303.047.298.000
301	Kab. Balangan	2.135.794.435.000	306.585.000	-	2.129.005.478.000	0	345.418.000	1.120.498.000	5.016.456.000	2.135.794.435.000
302	Kab. Tanah Bumbu	1.951.829.499.000	119.228.000	-	1.936.062.239.000	0	806.996.000	1.619.079.000	13.221.957.000	1.951.829.499.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	6.039.719.811.000	77562527000	255.921.349.000,00	5.453.833.940.000	0	214.064.391.000	0	38.337.604.000	6.039.719.811.000
304	Kab. Berau	2.738.609.417.000	14432964000	51.583.814.000,00	2.631.977.445.000	0	17.846.821.000	4.617.478.000	18.150.895.000	2.738.609.417.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	5.827.231.919.000	1,26561E+11	237.455.426.000,00	5.432.988.640.000	0	10.269.065.000	2.527.707.000	17.429.743.000	5.827.231.919.000
306	Kab. Kutai Barat	1.629.514.080.000	20477074000	62.268.892.000,00	1.517.684.839.000	0	12.176.823.000	1.167.186.000	15.739.266.000	1.629.514.080.000
307	Kab. Kutai Timur	4.304.138.024.000	21642322000	61.165.905.000,00	4.174.063.017.000	0	11.296.313.000	2.886.644.000	33.083.823.000	4.304.138.024.000
308	Kab. Paser	1.879.112.467.000	13447323000	50.443.131.000,00	1.788.956.498.000	0	5.351.531.000	1.975.949.000	18.938.035.000	1.879.112.467.000
309	Kota Balikpapan	980.564.639.000	45652979000	60.812.647.000,00	863.887.121.000	0	2.694.190.000	1.376.753.000	6.140.949.000	980.564.639.000
310	Kota Bontang	1.223.483.180.000	19342034000	59.847.271.000,00	1.133.424.144.000	0	3.233.587.000	1.321.545.000	6.314.599.000	1.223.483.180.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
311	Kota Samarinda	1.111.334.645.000	19287316000	57.366.048.000,00	1.020.882.368.000	0	2.244.605.000	1.074.331.000	10.479.977.000	1.111.334.645.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	1.055.890.357.000	18425036000	59.609.917.000,00	960.467.865.000	0	5.618.204.000	1.445.357.000	10.323.978.000	1.055.890.357.000
313	Kab. Mahakam Ulu	1.176.594.030.000	20870269000	62.526.211.000,00	1.074.697.935.000	0	9.616.536.000	1.167.186.000	7.715.893.000	1.176.594.030.000
314	Provinsi Sulawesi Utara	68.442.304.000	0	-	55.391.397.000	12.711.311.000	339.596.000	0	0	68.442.304.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	54.321.553.000	0	-	51.929.389.000	783.439.000	15.917.000	1.592.808.000	0	54.321.553.000
316	Kab. Minahasa	29.158.188.000	0	-	8.691.970.000	19.022.095.000	582.000	1.443.541.000	0	29.158.188.000
317	Kab. Sangihe	9.389.770.000	0	-	4.520.951.000	671.494.000	1.653.000	4.195.672.000	0	9.389.770.000
318	Kota Bitung	35.078.244.000	0	-	32.826.645.000	750.030.000	393.000	1.501.176.000	0	35.078.244.000
319	Kota Manado	11.617.459.000	0	-	8.431.757.000	1.792.630.000	414.000	1.392.658.000	0	11.617.459.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	8.426.254.000	0	-	4.547.549.000	678.280.000	1.687.000	3.198.738.000	0	8.426.254.000
321	Kab. Minahasa Selatan	11.722.460.000	0	-	8.378.745.000	1.856.545.000	1.200.000	1.485.970.000	0	11.722.460.000
322	Kota Tomohon	22.375.523.000	0	-	4.563.845.000	16.712.888.000	1.635.000	1.097.155.000	0	22.375.523.000
323	Kab. Minahasa Utara	48.722.783.000	0	-	44.353.080.000	2.320.897.000	405.000	2.048.401.000	0	48.722.783.000
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang	7.568.279.000	0	-	4.539.220.000	676.155.000	1.676.000	2.351.228.000	0	7.568.279.000
325	Kota Kotamobagu	9.813.585.000	0	-	7.990.412.000	701.777.000	336.000	1.120.498.000	0	9.813.023.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	11.110.785.000	0	-	8.625.917.000	734.823.000	11.706.000	1.738.339.000	0	11.110.785.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	10.662.346.000	0	-	7.680.718.000	1.613.089.000	6.273.000	1.362.266.000	0	10.662.346.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Tenggara	11.609.694.000	0	-	9.233.081.000	829.154.000	11.413.000	1.536.046.000	0	11.609.694.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	13.184.779.000	0	-	10.522.599.000	738.623.000	40.757.000	1.882.800.000	0	13.184.779.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	450.018.496.000	13.379.733.000	133.450.743.000,00	282.487.726.000	0	6.811.768.000	0	13.888.526.000	450.018.496.000
331	Kab. Banggai	651.994.415.000	45.542.547.000	494.429.927.000,00	98.753.763.000	0	155.655.030	4.960.481.000	8.133.781.000	651.976.154.030
332	Kab. Banggai Kepulauan	45.924.665.000	2.039.001.000	15.530.172.000,00	24.886.910.000	0	43.765.000	3.424.817.000	0	45.924.665.000
333	Kab. Buol	52.060.755.000	2.081.378.000	15.794.731.000,00	25.613.230.000	0	3.578.000	2.082.168.000	6.282.739.000	51.857.824.000
334	Kab. Tolitoli	50.177.322.000	2.038.730.000	15.527.565.000,00	24.895.982.000	0	196.784.000	2.767.480.000	4.750.781.000	50.177.322.000
335	Kab. Donggala	51.307.726.000	2.080.994.000	15.850.787.000,00	25.394.709.000	0	108.298.000	3.272.775.000	4.600.163.000	51.307.726.000
336	Kab. Morowali	493.341.183.000	2.081.143.000	15.852.223.000,00	462.650.837.000	0	368.433.700	4.336.963.000	7.893.684.000	493.183.283.700
337	Kab. Poso	71.125.166.000	2.081.162.000	15.852.407.000,00	46.910.459.000	0	128.256.000	1.535.575.000	4.617.307.000	71.125.166.000
338	Kota Palu	45.274.398.000	2.039.293.000	15.532.986.000,00	24.669.719.000	0	69.784.000	1.219.667.000	1.742.949.000	45.274.398.000
339	Kab. Parigi Moutong	49.111.895.000	1.997.927.000	15.278.165.000,00	24.421.318.000	0	217.830.000	3.463.892.000	3.732.763.000	49.111.895.000
340	Kab. Tojo Una Una	183.477.057.000	12.093.219.000	115.875.575.000,00	47.998.527.000	0	130.203.000	4.434.568.000	2.944.965.000	183.477.057.000
341	Kab. Sigi	49.120.597.000	2.081.145.000	15.852.246.000,00	25.380.586.000	0	74.619.000	1.167.186.000	4.564.815.000	49.120.597.000
342	Kab. Banggai Laut	48.847.116.000	2.080.645.000	15.787.668.000,00	25.338.685.000	0	44.658.000	5.595.460.000	0	48.847.116.000
343	Kab. Morowali Utara	368.424.772.000	12.093.219.000	115.449.592.000,00	231.020.365.000	0	333.397.000	2.002.581.000	7.525.618.000	368.424.772.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	102.213.890.000	822.000	7.266.422.000,00	85.379.500.000	0	1.418.016.000	0	8.149.130.000	102.213.890.000
345	Kab. Bantaeng	4.224.226.000	69.000	552.405.000,00	2.431.002.000	0	13.802.000	1.226.948.000	0	4.224.226.000
346	Kab. Barru	5.712.372.000	72.000	572.328.000,00	2.578.600.000	0	16.549.000	1.544.823.000	1.000.000.000	5.712.372.000
347	Kab. Bone	8.587.188.000	366.000	3.163.629.000,00	2.642.157.000	0	28.411.000	1.752.625.000	1.000.000.000	8.587.188.000
348	Kab. Bulukumba	4.606.077.000	68.000	539.583.000,00	2.383.637.000	0	11.136.000	1.671.653.000	0	4.606.077.000
349	Kab. Enrekang	6.418.617.000	71.000	562.604.000,00	2.484.844.000	0	16.201.000	1.143.842.000	2.211.055.000	6.418.617.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
350	Kab. Gowa	4.152.062.000	68.000	537.553.000,00	2.421.713.000	0	72.230.000	1.120.498.000	0	4.152.062.000
351	Kab. Jeneponto	4.382.158.000	68.000	540.143.000,00	2.379.553.000	0	13.075.000	1.449.319.000	0	4.382.158.000
352	Kab. Luwu	9.850.519.000	369.000	3.187.926.000,00	2.763.000.000	0	16.437.000	1.671.452.000	2.211.335.000	9.850.519.000
353	Kab. Luwu Utara	21.809.638.000	73.000	576.564.000,00	12.751.962.000	0	45.517.000	1.459.222.000	6.976.300.000	21.809.638.000
354	Kab. Maros	4.277.392.000	70.000	552.429.000,00	2.457.008.000	0	52.953.000	1.214.932.000	0	4.277.392.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	11.917.271.000	70.000	551.670.000,00	2.512.758.000	0	2.000	8.821.764.000	0	11.886.264.000
356	Kota Palopo	6.243.978.000	68.000	539.909.000,00	2.345.505.000	0	11.180.000	1.098.486.000	2.248.830.000	6.243.978.000
357	Kab. Luwu Timur	267.014.507.000	73.000	577.456.000,00	258.696.554.000	0	1.172.000	1.636.870.000	5.829.243.000	266.741.368.000
358	Kab. Pinrang	6.758.344.000	69000	550.225.000,00	2.439.870.000	0	14.961.000	1.511.469.000	2.241.750.000	6.758.344.000
359	Kab. Sinjai	4.549.691.000	71000	562.389.000,00	2.481.505.000	0	17.078.000	1.488.648.000	0	4.549.691.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	10.408.091.000	69000	545.180.000,00	2.417.421.000	0	10.896.000	7.434.525.000	0	10.408.091.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	8.937.589.000	366000	3.163.506.000,00	2.426.558.000	0	494.000	1.120.498.000	2.213.323.000	8.924.745.000
362	Kab. Soppeng	9.774.147.000	366000	3.164.967.000,00	2.429.943.000	0	16.728.000	1.120.498.000	3.041.645.000	9.774.147.000
363	Kab. Takalar	4.629.110.000	67000	530.133.000,00	2.337.399.000	0	42.922.000	1.718.589.000	0	4.629.110.000
364	Kab. Tana Toraja	5.398.906.000	71000	561.748.000,00	2.615.453.000	0	34.382.000	1.143.842.000	1.043.410.000	5.398.906.000
365	Kab. Wajo	29.736.579.000	2570000	23.427.203.000,00	2.375.182.000	0	12.793.000	1.559.680.000	2.359.151.000	29.736.579.000
366	Kota Parepare	5.105.194.000	69000	545.939.000,00	2.418.478.000	0	11.298.000	1.129.410.000	1.000.000.000	5.105.194.000
367	Kota Makassar	4.836.736.000	68000	533.702.000,00	2.367.258.000	0	192.096.000	1.743.612.000	0	4.836.736.000
368	Kab. Toraja Utara	5.681.325.000	71000	562.570.000,00	2.529.639.000	0	20.476.000	1.143.842.000	1.424.727.000	5.681.325.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	530.165.480.000	0	-	514.036.933.000	0	6.874.271.000	0	9.254.276.000	530.165.480.000
370	Kab. Buton	26.008.621.000	0	-	23.094.575.000	0	84.410.000	1.829.636.000	1.000.000.000	26.008.621.000
371	Kab. Konawe	179.502.805.000	0	-	173.574.152.000	0	292.462.000	1.603.159.000	3.907.692.000	179.377.465.000
372	Kab. Kolaka	491.478.438.000	0	-	485.355.673.000	0	299.459.000	2.285.631.000	3.537.675.000	491.478.438.000
373	Kab. Muna	31.635.823.000	0	-	26.545.752.000	0	1.000	1.835.281.000	3.150.676.000	31.531.710.000
374	Kota Kendari	36.393.135.000	0	-	30.380.101.000	0	55.143.000	1.124.379.000	4.833.512.000	36.393.135.000
375	Kota Bau-bau	24.526.753.000	0	-	23.291.107.000	0	39.523.000	1.196.123.000	0	24.526.753.000
376	Kab. Konawe Selatan	132.323.866.000	0	-	127.394.345.000	0	84.915.000	2.087.376.000	2.757.230.000	132.323.866.000
377	Kab. Bombana	255.315.382.000	0	-	248.082.238.000	0	163.502.000	2.982.936.000	4.086.706.000	255.315.382.000
378	Kab. Wakatobi	26.961.078.000	0	-	23.269.792.000	0	34.953.000	3.656.333.000	0	26.961.078.000
379	Kab. Kolaka Utara	123.977.105.000	0	-	120.319.791.000	0	124.460.000	1.890.494.000	1.642.360.000	123.977.105.000
380	Kab. Konawe Utara	495.679.874.000	0	-	487.627.128.000	0	13.751.000	1.949.795.000	5.817.985.000	495.408.659.000
381	Kab. Buton Utara	27.351.148.000	0	-	24.119.740.000	0	3.029.000	2.149.317.000	1.000.000.000	27.272.086.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	47.536.360.000	0	-	45.662.483.000	0	49.452.000	1.824.425.000	0	47.536.360.000
383	Kab. Kolaka Timur	83.712.222.000	0	-	79.115.052.000	0	182.980.000	1.167.186.000	3.247.004.000	83.712.222.000
384	Kab. Muna Barat	26.213.922.000	0	-	22.006.892.000	0	38.741.000	1.852.775.000	2.315.514.000	26.213.922.000
385	Kab. Buton Tengah	64.897.167.000	0	-	61.849.816.000	0	53.227.000	1.810.511.000	1.183.613.000	64.897.167.000
386	Kab. Buton Selatan	25.474.499.000	0	-	23.469.456.000	0	2.112.000	1.977.475.000	0	25.449.043.000
387	Provinsi Bali	11.743.000	0	-	2.659.000	0	9.084.000	0	0	11.743.000
388	Kab. Badung	1.443.590.000	0	-	0	0	1.562.000	1.442.028.000	0	1.443.590.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
389	Kab. Bangli	1.122.262.000	0	-	0	0	1.764.000	1.120.498.000	0	1.122.262.000
390	Kab. Buleleng	1.853.752.000	0	-	0	0	5.417.000	1.848.335.000	0	1.853.752.000
391	Kab. Gianyar	1.156.961.000	0	-	0	0	1.222.000	1.155.739.000	0	1.156.961.000
392	Kab. Jembrana	1.499.968.000	0	-	0	0	14.100.000	1.485.868.000	0	1.499.968.000
393	Kab. Karangasem	1.551.511.000	0	-	4.250.000	0	1.715.000	1.545.546.000	0	1.551.511.000
394	Kab. Klungkung	1.603.706.000	0	-	0	0	1.227.000	1.602.479.000	0	1.603.706.000
395	Kab. Tabanan	1.238.797.000	0	-	0	0	2.268.000	1.236.529.000	0	1.238.797.000
396	Kota Denpasar	1.145.327.000	0	-	0	0	1.208.000	1.144.119.000	0	1.145.327.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	109.503.910.000	0	-	1.06354E+11	0	3.150.041.000	0	0	109.503.910.000
398	Kab. Bima	17.867.964.000	0	-	14.073.318.000	0	1.000	3.711.525.000	0	17.784.844.000
399	Kab. Dompu	16.405.579.000	0	-	14.179.436.000	0	260.825.000	1.965.318.000	0	16.405.579.000
400	Kab. Lombok Barat	15.923.645.000	0	-	14.173.468.000	0	36.494.000	1.713.683.000	0	15.923.645.000
401	Kab. Lombok Tengah	15.616.621.000	0	-	14.202.375.000	0	1.000	1.376.560.000	0	15.578.936.000
402	Kab. Lombok Timur	15.813.312.000	0	-	13.896.214.000	0	35.212.000	1.881.886.000	0	15.813.312.000
403	Kab. Sumbawa	98.114.272.000	0	-	93.713.868.000	0	306.982.000	4.093.422.000	0	98.114.272.000
404	Kota Mataram	14.639.394.000	0	-	13.502.229.000	0	27.952.000	1.109.213.000	0	14.639.394.000
405	Kota Bima	14.706.451.000	0	-	13.579.900.000	0	27.534.000	1.099.017.000	0	14.706.451.000
406	Kab. Sumbawa Barat	223.866.836.000	0	-	221.699.680.000	0	1.000	1.945.616.000	0	223.645.297.000
407	Kab. Lombok Utara	15.846.222.000	0	-	14.220.468.000	0	32.813.000	1.592.941.000	0	15.846.222.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.310.601.000	0	-	273.382.000	1.029.008.000	8.211.000	0	0	1.310.601.000
409	Kab. Alor	3.933.553.000	0	-	12.471.000	225.186.000	84.000	3.695.812.000	0	3.933.553.000
410	Kab. Belu	1.297.158.000	0	-	18.377.000	38.038.000	86.000	1.240.657.000	0	1.297.158.000
411	Kab. Ende	3.123.254.000	0	-	1.743.000	956.907.000	83.000	2.164.521.000	0	3.123.254.000
412	Kab. Flores Timur	2.948.907.000	0	-	1.419.000	154.724.000	83.000	2.792.681.000	0	2.948.907.000
413	Kab. Kupang	3.607.325.000	0	-	354.868.000	39.793.000	199.000	3.212.465.000	0	3.607.325.000
414	Kab. Lembata	3.106.280.000	0	-	1.435.000	446.537.000	83.000	2.658.225.000	0	3.106.280.000
415	Kab. Manggarai	2.591.690.000	0	-	24.036.000	960.854.000	1.109.000	1.605.691.000	0	2.591.690.000
416	Kab. Ngada	1.885.231.000	0	-	1.495.000	249.317.000	88.000	1.634.331.000	0	1.885.231.000
417	Kab. Sikka	2.991.732.000	0	-	1.689.000	220.799.000	84.000	2.769.160.000	0	2.991.732.000
418	Kab. Sumba Barat	1.411.282.000	0	-	1.392.000	36.734.000	1.021.000	1.372.135.000	0	1.411.282.000
419	Kab. Sumba Timur	3.208.946.000	0	-	1.401.000	37.177.000	82.000	3.170.286.000	0	3.208.946.000
420	Kab. Timor Tengah Selatan	1.645.463.000	0	-	19.935.000	38.309.000	105.000	1.587.114.000	0	1.645.463.000
421	Kab. Timor Tengah Utara	1.487.217.000	0	-	47.464.000	39.706.000	107.000	1.399.940.000	0	1.487.217.000
422	Kota Kupang	1.224.378.000	0	-	8.076.000	37.596.000	99.000	1.178.607.000	0	1.224.378.000
423	Kab. Rote Ndao	2.845.272.000	0	-	1.433.000	38.079.000	84.000	2.805.676.000	0	2.845.272.000
424	Kab. Manggarai Barat	3.763.057.000	0	-	2.592.000	163.311.000	2.082.000	3.595.072.000	0	3.763.057.000
425	Kab. Nagekeo	1.832.687.000	0	-	4.389.000	192.051.000	86.000	1.636.161.000	0	1.832.687.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	1.672.379.000	0	-	1.396.000	36.939.000	322.000	1.633.722.000	0	1.672.379.000
427	Kab. Sumba Tengah	1.534.072.000	0	-	1.446.000	38.057.000	336.000	1.494.233.000	0	1.534.072.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
428	Kab. Manggarai Timur	1.867.219.000	0	-	1.496.000	169.351.000	83.000	1.696.289.000	0	1.867.219.000
429	Kab. Sabu Raijua	2.115.633.000	0	-	51.369.000	36.374.000	82.000	2.027.808.000	0	2.115.633.000
430	Kab. Malaka	1.376.611.000	0	-	978.000	36.752.000	83.000	1.338.798.000	0	1.376.611.000
431	Provinsi Maluku	45.419.146.000	587169000	-	4.054.601.000	0	39.410.619.000	0	1.366.757.000	45.419.146.000
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	8.535.875.000	106758000	-	408.006.000	0	991.798.000	7.029.313.000	0	8.535.875.000
433	Kab. Maluku Tengah	12.170.616.000	987512000	-	555207000	0	1.513.824.000	6.509.329.000	2.604.744.000	12.170.616.000
434	Kab. Maluku Tenggara	4.040.349.000	98217000	-	376424000	0	276.966.000	3.288.742.000	0	4.040.349.000
435	Kab. Buru	5.377.134.000	98217000	-	455208000	0	2.733.364.000	2.090.345.000	0	5.377.134.000
436	Kota Ambon	3.308.881.000	102488000	-	390.289.000	0	398.160.000	1.417.944.000	1.000.000.000	3.308.881.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	6.728.244.000	104623000	-	772.124.000	0	456.396.000	4.395.101.000	1.000.000.000	6.728.244.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	10.722.669.000	1853852000	-	454784000	0	1.310.940.000	4.994.764.000	2.108.329.000	10.722.669.000
439	Kab. Kepulauan Aru	7.690.483.000	98217000	-	373253000	0	433.387.000	6.785.626.000	0	7.690.483.000
440	Kota Tual	3.690.103.000	98217000	-	375802000	0	276.966.000	2.939.118.000	0	3.690.103.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	18.046.196.000	98217000	-	9244226000	0	277.376.000	8.426.377.000	0	18.046.196.000
442	Kab. Buru Selatan	6.841.847.000	98217000	-	378.154.000	0	3.369.079.034	2.601.142.000	0	6.446.592.034
443	Provinsi Papua	20.569.853.000	0	-	3.675.633.000	0	13.663.748.000	0	1.615.236.000	18.954.617.000
444	Kab. Biak Numfor	5.768.612.000	0	-	1.180.273.000	0	460.723.000	4.127.616.000	0	5.768.612.000
445	Kab. Jayapura	10.954.358.000	0	-	1.154.914.000	0	2.486.001.000	1.703.355.000	5.610.088.000	10.954.358.000
446	Kab. Jayawijaya	2.231.576.000	0	-	1.126.327.000	0	8.094.000	1.097.155.000	0	2.231.576.000
447	Kab. Merauke	17.146.217.000	0	-	1.129.792.000	0	1.506.615.000	5.597.309.000	8.912.501.000	17.146.217.000
448	Kab. Mimika	1.159.375.258.000	0	-	1.150.413.229.000	0	2.532.815.000	3.175.852.000	1.626.681.000	1.157.748.577.000
449	Kab. Nabire	87.745.441.000	0	-	78.366.898.000	0	3.674.220.000	3.275.331.000	2.428.992.000	87.745.441.000
450	Kab. Paniai	127.920.403.000	0	-	125.244.445.000	0	578.803.000	1.097.155.000	0	126.920.403.000
451	Kab. Puncak Jaya	77.770.733.000	0	-	76.439.199.000	0	257.723.000	1.073.811.000	0	77.770.733.000
452	Kab. Kepulauan Yapen	6.034.694.000	0	-	1.188.227.000	0	432.553.000	4.413.914.000	0	6.034.694.000
453	Kota Jayapura	4.834.619.000	0	-	1.122.468.000	0	813.152.000	1.476.905.000	1.422.094.000	4.834.619.000
454	Kab. Sarmi	16.737.222.000	0	-	1.682.168.000	0	11.160.436.000	2.894.618.000	1.000.000.000	16.737.222.000
455	Kab. Keerom	9.915.506.000	0	-	1.446.656.000	0	2.154.974.000	1.073.811.000	0	4.675.441.000
456	Kab. Yahukimo	3.559.089.000	0	-	1.222.721.000	0	239.213.000	1.097.155.000	1.000.000.000	3.559.089.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	6.518.229.000	0	-	3.702.028.000	0	541.310.000	1.167.186.000	1.107.705.000	6.518.229.000
458	Kab. Tolikara	2.311.050.000	0	-	1.204.868.000	0	9.027.000	1.097.155.000	0	2.311.050.000
459	Kab. Boven Digoel	9.961.802.000	0	-	1.202.088.000	0	2.256.838.000	1.097.155.000	5.405.721.000	9.961.802.000
460	Kab. Mappi	6.348.873.000	0	-	1.191.928.000	0	873.013.000	1.696.364.000	2.587.568.000	6.348.873.000
461	Kab. Asmat	56.308.757.000	0	-	51.496.693.000	0	912.375.000	2.529.387.000	1.370.302.000	56.308.757.000
462	Kab. Waropen	5.618.163.000	0	-	1.307.422.000	0	2.000	2.660.229.000	1.000.000.000	4.967.653.000
463	Kab. Supiori	4.173.838.000	0	-	1.216.421.000	0	423.864.000	2.533.553.000	0	4.173.838.000
464	Kab. Mamberamo Raya	4.798.607.000	0	-	1.198.060.000	0	1.000	2.252.708.000	0	3.450.769.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	3.224.282.000	0	-	1.190.342.000	0	960.129.000	1.073.811.000	0	3.224.282.000
466	Kab. Yalimo	3.360.853.000	0	-	1.209.018.000	0	54.680.000	1.097.155.000	1.000.000.000	3.360.853.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
467	Kab. Lanny Jaya	2.276.302.000	0	-	1.171.048.000	0	8.099.000	1.097.155.000	0	2.276.302.000
468	Kab. Nduga	49.472.283.000	0	-	47.274.870.000	0	123.602.000	1.073.811.000	1.000.000.000	49.472.283.000
469	Kab. Dogiyai	125.746.447.000	0	-	1.22622E+11	0	1.050.213.000	1.073.811.000	1.000.000.000	125.746.447.000
470	Kab. Puncak	125.039.076.000	0	-	122.609.435.000	0	355.830.000	1.073.811.000	1.000.000.000	125.039.076.000
471	Kab. Intan Jaya	124.954.329.000	0	-	122.313.922.000	0	566.596.000	1.073.811.000	1.000.000.000	124.954.329.000
472	Kab. Deiyai	124.738.286.000	0	-	122.309.675.000	0	354.800.000	1.073.811.000	1.000.000.000	124.738.286.000
473	Provinsi Maluku Utara	572.421.425.000	0	-	551.147.894.000	209.596.000	18.397.424.454	0	1.000.000.000	570.754.914.454
474	Kab. Halmahera Tengah	665.177.318.000	0	-	659.124.155.000	105.194.000	974.606.000	3.973.363.000	0	664.177.318.000
475	Kota Ternate	44.846.973.000	0	-	42.545.996.000	27.056.000	155.989.000	2.117.932.000	0	44.846.973.000
476	Kab. Halmahera Barat	114.420.153.000	0	-	111.881.959.000	27.196.000	224.767.000	2.286.231.000	0	114.420.153.000
477	Kab. Halmahera Timur	641.969.230.000	0	-	637.432.971.000	27.209.000	196.528.700	3.853.959.000	0	641.510.667.700
478	Kab. Halmahera Selatan	365.922.579.000	0	-	345.622.876.000	437.714.000	5.284.807.000	12.365.466.000	2.211.716.000	365.922.579.000
479	Kab. Halmahera Utara	46.050.913.000	0	-	42.726.475.000	27.053.000	134.308.280	3.147.320.000	0	46.035.156.280
480	Kab. Kepulauan Sula	45.138.926.000	0	-	41.567.320.000	25.441.000	140.657.000	3.405.508.000	0	45.138.926.000
481	Kota Tidore Kepulauan	190.360.050.000	0	-	186.457.869.000	105.727.000	216.998.900	2.076.601.000	1.000.000.000	189.857.195.900
482	Kab. Pulau Morotai	45.981.481.000	0	-	42.961.099.000	27.206.000	375.000	2.852.277.000	0	45.840.957.000
483	Kab. Pulau Taliabu	70.355.170.000	0	-	66.622.871.000	27.015.000	335.494.900	3.226.006.000	0	70.211.386.900
484	Provinsi Banten	2.670.731.000	0	-	163.551.000	434.950.000	259.795.000	0	1.812.435.000	2.670.731.000
485	Kab. Lebak	16.504.070.000	0	-	1.070.993.000	10.121.079.000	261.760.000	1.484.554.000	3.565.684.000	16.504.070.000
486	Kab. Pandeglang	6.605.022.000	0	-	109.004.000	353.039.000	452.251.000	3.104.246.000	2.586.482.000	6.605.022.000
487	Kab. Serang	3.782.987.000	0	-	55926000	702.273.000	142.696.000	1.882.092.000	1.000.000.000	3.782.987.000
488	Kab. Tangerang	5.712.569.000	0	-	771.163.000	2.705.943.000	43.696.000	1.191.767.000	500.000.000	5.212.569.000
489	Kota Cilegon	1.433.761.000	0	-	2.890.000	147.691.000	31.791.000	1.251.389.000	0	1.433.761.000
490	Kota Tangerang	1.205.814.000	0	-	1.000	100.218.000	31.784.000	1.073.811.000	0	1.205.814.000
491	Kota Serang	1.274.165.000	0	-	4.924.000	151.137.000	31.791.000	1.086.313.000	0	1.274.165.000
492	Kota Tangerang Selatan	5.549.582.000	0	-	772.862.000	2.670.067.000	32.842.000	1.073.811.000	500.000.000	5.049.582.000
493	Provinsi Bangka Belitung	98.174.993.000	1.299.169.000	-	82.777.376.000	0	130.881.800	0	13.921.243.000	98.128.669.800
494	Kab. Bangka	64.137.397.000	381.798.000	-	52.003.059.000	0	17.218.000	2.055.258.000	9.680.064.000	64.137.397.000
495	Kab. Belitung	36.989.527.000	389.752.000	-	26.083.846.000	0	9.567.654	3.740.902.000	6.764.337.000	36.988.404.654
496	Kota Pangkal Pinang	24.318.545.000	373.844.000	-	17.180.774.000	0	5.490.000	1.128.573.000	5.629.864.000	24.318.545.000
497	Kab. Bangka Selatan	57.823.011.000	381.798.000	-	46.455.761.000	0	17.642.000	3.006.736.000	7.961.074.000	57.823.011.000
498	Kab. Bangka Tengah	41.136.916.000	381.798.000	-	30842264000	0	13.322.000	2.742.751.000	7.156.781.000	41.136.916.000
499	Kab. Bangka Barat	96.396.520.000	389.752.000	-	84443241000	0	6.585.000	2.459.932.000	9.097.010.000	96.396.520.000
500	Kab. Belitung Timur	38.781.024.000	389.752.000	-	26443328000	0	11.857.000	4.252.966.000	7.683.121.000	38.781.024.000
501	Provinsi Gorontalo	4.208.456.000	0	-	161.766.000	0	2.290.702.000	0	1.755.988.000	4.208.456.000
502	Kab. Boalemo	5.275.964.000	0	-	6876000	0	128.912.000	1.670.639.000	3.469.537.000	5.275.964.000
503	Kab. Gorontalo	2.560.092.000	0	-	108572000	0	64.241.000	1.387.279.000	1.000.000.000	2.560.092.000
504	Kota Gorontalo	1.224.564.000	0	-	28.000	0	61.020.000	1.163.516.000	0	1.224.564.000
505	Kab. Pohuwato	5.353.894.000	0	-	134.767.000	0	562.031.000	2.071.352.000	2.585.744.000	5.353.894.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
506	Kab. Bone Bolango	2.325.772.000	0	-	834.630.000	0	23.251.000	1.467.891.000	0	2.325.772.000
507	Kab. Gorontalo Utara	3.625.975.000	0	-	81.617.000	0	15.231.000	2.125.048.000	1.341.879.000	3.563.775.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	130.092.451.000	13495053000	108.952.868.000,00	4.067.860.000	0	1.761.038.000	0	1.815.632.000	130.092.451.000
509	Kab. Natuna	124.947.917.000	32167733000	85.076.819.000,00	418545000	0	24.372.000	7.260.448.000	0	124.947.917.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	85.855.147.000	19440604000	60.200.363.000,00	339.946.000	0	24.833.000	5.849.401.000	0	85.855.147.000
511	Kab. Karimun	51.363.697.000	4.277.326.000	30.542.362.000,00	8.999.686.000	0	621.000	3.524.170.000	3.952.812.000	51.296.977.000
512	Kota Batam	38.483.738.000	4.279.551.000	30.542.363.000,00	337.666.000	0	44.980.000	3.279.178.000	0	38.483.738.000
513	Kota Tanjung Pinang	37.118.982.000	4.179.814.000	29.906.062.000,00	454.187.000	0	101.840.000	1.242.018.000	1.235.061.000	37.118.982.000
514	Kab. Lingga	47.982.026.000	4.452.107.000	31.814.960.000,00	4.173.369.000	0	206.183.000	7.335.407.000	0	47.982.026.000
515	Kab. Bintan	44.389.577.000	4.352.833.000	31.178.661.000,00	379.831.000	0	27.380.600	5.862.028.000	2.579.497.000	44.380.230.600
516	Provinsi Papua Barat	1.450.702.160.000	206.358.593.000	1.153.687.424.000,00	2.534.623.000	0	78.821.294.910	0	2.125.149.000	1.443.527.083.910
517	Kab. Fak Fak	65.973.084.000	3456703000	46.412.713.000,00	392684000	0	10.290.741.000	4.420.243.000	1.000.000.000	65.973.084.000
518	Kab. Manokwari	37.090.181.000	2117339000	26.521.551.000,00	424049000	0	1.849.015.000	1.988.542.000	4.189.685.000	37.090.181.000
519	Kab. Sorong	68.105.807.000	23530345000	5.231.187.000,00	30684205000	0	1.000	3.361.115.000	3.202.486.000	66.009.339.000
520	Kota Sorong	13.160.712.000	3235423000	844.124.000,00	6297394000	0	367.401.000	1.416.370.000	500.000.000	12.660.712.000
521	Kab. Raja Ampat	87.512.344.000	3041298000	793.477.000,00	66.656.032.000	0	357.897.000	15.663.640.000	500.000.000	87.012.344.000
522	Kab. Sorong Selatan	39.765.684.000	4605060000	20.735.287.000,00	6.284.280.000	0	282.199.700	2.072.013.000	5.128.383.000	39.107.222.700
523	Kab. Teluk Bintuni	409.344.627.000	24277789000	361.488.728.000,00	1.225.488.000	0	4.980.277.500	3.051.141.000	2.700.563.000	397.723.986.500
524	Kab. Teluk Wondama	64.632.230.000	3461113000	46.412.713.000,00	3.954.993.000	0	5.695.365.000	4.108.046.000	1.000.000.000	64.632.230.000
525	Kab. Kaimana	114.437.361.000	3252314000	43.627.952.000,00	51.310.109.000	0	10.465.011.000	4.781.975.000	1.000.000.000	114.437.361.000
526	Kab. Maybrat	32.293.113.000	4236655000	19.076.464.000,00	5.816.202.000	0	1.000	1.073.811.000	1.208.079.000	31.411.212.000
527	Kab. Tambrauw	36.315.624.000	4605060000	20.735.287.000,00	6.285.570.000	0	1.000	2.569.760.000	1.133.789.000	35.329.467.000
528	Kab. Manokwari Selatan	57.971.972.000	3456703000	46.412.714.000,00	393.710.000	0	5.085.636.000	1.623.209.000	1.000.000.000	57.971.972.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	54.676.817.000	3459606000	46.412.714.000,00	407.779.000	0	2.229.532.000	1.167.186.000	1.000.000.000	54.676.817.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	8.544.025.000	0	-	316.091.000	0	583.783.000	0	7.644.151.000	8.544.025.000
531	Kab. Majene	3.439.561.000	0	-	81.821.000	0	29.567.000	1.742.782.000	1.585.391.000	3.439.561.000
532	Kab. Mamuju	8.915.017.000	0	-	523491000	0	1.000	3.661.811.000	4.563.360.000	8.748.663.000
533	Kab. Polewali Mandar	5.299.036.000	0	-	136938000	0	17.945.000	1.434.503.000	3.709.650.000	5.299.036.000
534	Kab. Mamasa	2.946.618.000	0	-	81635000	0	39.157.000	1.143.842.000	1.681.984.000	2.946.618.000
535	Kab. Pasangkayu	12.248.295.000	0	-	58128000	0	1.000	1.884.618.000	10.277.351.000	12.220.098.000
536	Kab. Mamuju Tengah	9.213.540.000	0	-	84251000	0	89.933.000	1.519.879.000	7.519.477.000	9.213.540.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	599.081.078.000	2777165000	541.079.000,00	510.602.098.000	0	75.964.314.000	0	9.196.422.000	599.081.078.000
538	Provinsi Papua Tengah	561.637.000.000	0	-	5,26315E+11	0	33.576.609.000	0	1.745.084.000	561.637.000.000
539	Provinsi Papua Selatan	16.228.101.000	0	-	4.900.346.000	0	7.175.574.000	0	4.152.181.000	16.228.101.000
540	Provinsi Papua Pegunungan	14.120.113.000	0	-	3.702.487.000	0	35.983.000	0	0	3.738.470.000
541	Provinsi Papua Barat Daya	222.086.250.000	166.183.058.000	15.515.220.000,00	30.784.589.000	0	7.078.041.000	0	2.525.342.000	222.086.250.000
542	Kab. Bulungan	631.224.988.000	5.078.157.000	823.341.000,00	605.484.814.000	0	9.426.177.000	2.670.454.000	7.742.045.000	631.224.988.000
543	Kab. Malinau	1.304.451.793.000	8.466.688.000	11.632.075.000,00	1.259.848.125.000	0	13.543.292.000	1.167.186.000	9.794.427.000	1.304.451.793.000
544	Kab. Nunukan	616.087.842.000	2.050.432.000	286.578.000,00	594.690.442.000	0	4.126.030.000	1.951.918.000	12.982.442.000	616.087.842.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Pagu	Realisasi							
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Minerba	Panas Bumi	Kehutanan	Perikanan	Hasil Sawit	Total
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)=(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)
545	Kota Tarakan	139.572.518.000	6.988.215.000	1.791.475.000,00	123.649.994.000	0	1.281.537.000	1.424.364.000	4.436.933.000	139.572.518.000
546	Kab. Tana Tidung	394.958.771.000	1.899.281.000	307.689.000,00	380.517.404.000	0	5.030.299.000	1.578.376.000	5.625.722.000	394.958.771.000
umla		93.940.434.029.000	8.944.481.225.000	7.006.411.326.000,00	71.110.816.829.000	1.586.280.291.000	1.420.960.624.222	951.698.762.000	2.824.927.382.500	93.845.576.439.722

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No		Daerah		DAU Block Grant		Formasi PPPK		DAU Specific Grant				DAU THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah		Pagu		Realisasi			
								Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum		Pagu		Realisasi	
(1)	(4)	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	(17)+(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)+(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
1	Provinsi Aceh	1.819.803.956.000	1.819.803.956.000	98.450.304.000	75.634.958.717	226.421.030.000	226.421.030.000	41.187.010.000	41.187.010.000	0	0	23.846.273.000	23.846.273.000	123.859.077.000	123.859.077.000	2.333.567.650.000	2.310.752.304.717		
2	Kab. Aceh Barat	472.750.549.000	472.750.549.000	16.996.977.000	15.324.891.955	63.513.911.000	63.513.911.000	31.594.492.000	31.594.492.000	0	0	17.535.407.000	17.535.407.000	0	0	602.391.336.000	600.719.250.955		
3	Kab. Aceh Besar	655.814.643.000	655.814.643.000	4.062.375.000	2.555.017.962	74.512.082.000	74.512.082.000	44.604.335.000	44.604.335.000	0	0	21.647.988.000	21.647.988.000	13.065.534.000	13.065.534.000	813.706.957.000	812.199.599.962		
4	Kab. Aceh Selatan	481.451.501.000	481.451.501.000	6.824.790.000	5.982.367.363	70.561.182.000	70.561.182.000	42.635.523.000	42.635.523.000	0	0	43.717.592.000	43.717.592.000	0	0	645.190.588.000	644.348.165.363		
5	Kab. Aceh Singkil	342.334.038.000	342.334.038.000	24.439.248.000	22.187.496.416	56.313.899.000	56.313.899.000	28.588.767.000	28.588.767.000	0	0	15.724.946.000	15.724.946.000	5.679.350.000	5.679.350.000	473.080.218.000	470.828.466.416		
6	Kab. Aceh Tengah	500.427.736.000	500.427.736.000	17.289.468.000	13.857.316.945	61.703.699.000	61.703.699.000	32.336.706.000	32.336.706.000	0	0	18.983.329.000	18.983.329.000	9.545.452.000	9.545.452.000	640.286.590.000	639.054.439.945		
7	Kab. Aceh Tenggara	439.608.790.000	439.608.790.000	9.554.706.000	6.494.070.249	74.005.116.000	74.005.116.000	27.376.623.000	27.376.623.000	0	0	44.244.837.000	44.244.837.000	8.942.053.000	8.942.053.000	603.734.125.000	600.673.489.249		
8	Kab. Aceh Timur	639.941.809.000	639.941.809.000	38.576.313.000	27.077.392.179	101.353.957.000	101.353.957.000	42.624.136.000	42.624.136.000	0	0	46.822.684.000	46.822.684.000	13.506.422.000	13.506.422.000	894.625.721.000	873.126.300.179		
9	Kab. Aceh Utara	762.827.263.000	762.827.263.000	10.724.670.000	10.724.670.000	120.438.845.000	120.438.845.000	50.724.907.000	50.724.907.000	0	0	40.627.054.000	40.627.054.000	25.555.692.000	25.555.692.000	1.010.898.431.000	1.010.898.431.000		
10	Kab. Bireuen	722.181.350.000	722.181.350.000	18.654.426.000	18.565.559.874	97.741.728.000	97.741.728.000	31.613.111.000	31.613.111.000	0	0	20.623.557.000	20.623.557.000	0	0	890.814.172.000	889.725.305.874		
11	Kab. Pidie	698.658.468.000	698.658.468.000	9.457.209.000	9.457.209.000	88.899.614.000	88.899.614.000	67.861.398.000	67.861.398.000	0	0	28.716.041.000	28.716.041.000	14.898.852.000	14.898.852.000	908.491.582.000	908.491.582.000		
12	Kab. Simeulue	348.634.156.000	348.634.156.000	8.222.247.000	4.910.653.931	41.299.762.000	41.299.762.000	29.109.492.000	29.109.492.000	0	0	27.019.646.000	27.019.646.000	3.686.743.000	3.686.743.000	457.972.046.000	454.660.452.931		
13	Kota Banda Aceh	524.515.664.000	524.515.664.000	11.732.139.000	8.146.224.067	32.318.056.000	32.318.056.000	20.346.153.000	20.346.153.000	0	0	0	0	0	0	588.912.012.000	585.328.097.067		
14	Kota Sabang	330.506.468.000	330.506.468.000	2.599.920.000	1.468.067.321	10.899.469.000	10.899.469.000	12.672.686.000	12.672.686.000	0	0	5.201.235.000	5.201.235.000	501.539.000	501.539.000	362.381.317.000	361.249.464.321		
15	Kota Langsa	359.542.316.000	359.542.316.000	21.741.831.000	18.240.320.504	46.050.723.000	46.050.723.000	23.907.568.000	23.907.568.000	0	0	6.413.027.000	6.413.027.000	5.208.496.000	5.208.496.000	462.863.961.000	459.362.450.504		
16	Kota Lhokseumawe	389.086.444.000	389.086.444.000	7.507.269.000	6.808.204.656	38.412.003.000	38.412.003.000	16.446.054.000	16.446.054.000	0	0	4.303.514.000	4.303.514.000	6.117.378.000	6.117.378.000	461.872.662.000	461.173.597.656		
17	Kab. Gayo Lues	319.383.837.000	319.383.837.000	11.309.652.000	6.676.917.006	49.380.059.000	49.380.059.000	26.511.451.000	26.511.451.000	0	0	53.259.897.000	53.259.897.000	0	0	459.844.896.000	455.212.161.006		
18	Kab. Aceh Barat Daya	333.556.671.000	333.556.671.000	17.029.476.000	17.029.476.000	50.563.751.000	50.563.751.000	29.367.292.000	29.367.292.000	0	0	26.255.738.000	26.255.738.000	6.366.334.000	6.366.334.000	463.139.262.000	463.139.262.000		
19	Kab. Aceh Jaya	327.893.874.000	327.893.874.000	16.022.007.000	16.022.007.000	40.550.524.000	40.550.524.000	26.273.628.000	26.273.628.000	0	0	27.183.536.000	27.183.536.000	6.587.399.000	6.587.399.000	444.310.968.000	444.310.968.000		
20	Kab. Nagan Raya	414.537.597.000	414.537.597.000	27.591.651.000	14.262.355.326	56.753.563.000	56.753.563.000	25.282.183.000	25.282.183.000	0	0	21.994.791.000	21.994.791.000	0	0	546.159.785.000	532.830.488.326		
21	Kab. Aceh Tamiang	431.321.180.000	431.321.180.000	25.414.218.000	19.099.048.108	50.206.519.000	50.206.519.000	27.864.631.000	27.864.631.000	0	0	21.690.659.000	21.690.659.000	10.799.940.000	10.799.940.000	567.297.147.000	560.981.977.108		
22	Kab. Bener Meriah	351.367.151.000	351.367.151.000	26.779.176.000	17.777.515.388	48.229.562.000	48.229.562.000	20.340.498.000	20.340.498.000	0	0	37.933.551.000	37.933.551.000	6.215.546.000	6.215.546.000	490.865.484.000	489.853.382.388		
23	Kab. Pidie Jaya	360.831.278.000	360.831.278.000	1.592.451.000	1.248.577.685	29.905.018.000	29.905.018.000	23.781.882.000	23.781.882.000	0	0	18.850.150.000	18.850.150.000	5.888.010.000	5.888.010.000	440.828.589.000	440.484.715.685		
24	Kota Subulussalam	259.155.528.000	259.155.528.000	5.199.940.000	5.103.801.281	41.480.120.000	41.480.120.000	20.607.276.000	20.607.276.000	0	0	18.032.121.000	18.032.121.000	4.070.870.000	4.070.870.000	348.545.755.000	348.449.716.280		
25	Provinsi Sumatera Utara	2.353.404.911.000	2.353.404.911.000	68.926.768.000	45.195.062.053	408.544.265.000	408.544.265.000	69.295.323.000	69.295.323.000	0	0	19.791.378.000	14.936.033.000	129.994.068.000	129.994.068.000	3.033.060.622.000	3.034.380.591.053		
26	Kab. Aceh	720.883.971.000	720.883.971.000	16.899.480.000	11.149.371.000	110.149.371.000	110.149.371.000	54.620.516.000	54.620.516.000	5.400.000.000	5.400.000.000	23.723.021.000	23.723.021.000	18.018.703.000	18.018.703.000	947.495.062.000	947.495.062.000		
27	Kab. Dairi	531.582.373.000	531.582.373.000	45.108.612.000	29.387.329.000	29.387.329.000	29.387.329.000	28.722.548.000	28.722.548.000	1.600.000.000	1.600.000.000	23.537.878.000	23.537.878.000	17.272.028.000	17.272.028.000	663.325.769.000	647.834.168.000		
28	Kab. Deli Serdang	1.391.943.031.000	1.391.943.031.000	17.931.947.000	17.931.947.000	220.653.714.000	220.653.714.000	65.793.506.000	65.793.506.000	2.800.000.000	2.800.000.000	6.180.777.000	6.180.777.000	39.034.585.000	39.034.585.000	1.746.287.560.000	1.746.287.560.000		
29	Kab. Deli Serdang	587.581.104.000	587.581.104.000	12.999.600.000	12.999.600.000	94.122.727.000	94.122.727.000	25.800.051.000	25.800.051.000	2.000.000.000	2.000.000.000	18.805.061.000	18.805.061.000	11.637.281.000	11.637.281.000	752.945.824.000	752.945.824.000		
30	Kab. Labuhanbatu	556.168.160.000	556.168.160.000	8.709.732.000	6.749.572.736	87.312.475.000	87.312.475.000	38.631.288.000	38.631.288.000	4.600.000.000	4.600.000.000	13.849.130.000	13.849.130.000	11.297.564.000	11.297.564.000	714.568.349.000	712.608.189.736		
31	Kab. Langkat	996.027.378.000	996.027.378.000	31.296.537.000	15.222.047.000	152.222.047.000	152.222.047.000	74.082.586.000	74.082.586.000	7.400.000.000	7.400.000.000	17.271.768.000	17.271.768.000	29.602.166.000	29.602.166.000	1.307.902.482.000	1.288.887.197.600		
32	Kab. Mandailing Natal	605.146.922.000	605.146.922.000	49.008.492.000	2														

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		Formasi PPPK		DAU Specific Grant								DAU THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum		Pagu	Realisasi		
						(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
77	Kab. Dharmasraya	422.691.705,000	422.691.705,000	20.734.362,000	13.679.463.932	33.343.800,000	33.343.800,000	16.365.536,000	16.365.536,000	0	0	26.864.203,000	26.864.203,000	9.508.177,000	9.508.177,000	519.999.606,000	512.944.733.932
78	Kab. Solok Selatan	346.793.511,000	346.793.511,000	1.624.950,000	1.184.312.892	50.103.946,000	50.103.946,000	22.358.356,000	22.358.356,000	0	0	47.183.536,000	47.183.536,000	9.508.177,000	9.508.177,000	477.572.476,000	477.173.838.892
79	Provinsi Riau	1.278.010.685,000	1.278.010.685,000	97.612.552,000	63.742.507.838	186.128.975,000	186.128.975,000	14.472.679,000	14.472.679,000	0	0	42.411.995,000	42.411.995,000	0	0	1.618.636.866,000	1.584.766.821.838
80	Kab. Bengkalis	303.893.774,000	303.893.774,000	53.298.360,000	22.061.273.555	45.166.025,000	45.166.025,000	13.140.355,000	13.140.355,000	3.800.000,000	3.800.000,000	6.236.341,000	6.236.341,000	0	0	425.534.855,000	394.237.768.555
81	Kab. Indragiri Hilir	734.313.562,000	734.313.562,000	77.987.600,000	34.524.739.581	114.289.972,000	66.278.074.594	55.635.661,000	53.265.351.973	7.800.000,000	7.800.000,000	31.488.136,000	31.616.101,000	0	0	1.021.515.531,000	915.817.829.148
82	Kab. Indragiri Hulu	527.877.241,000	527.877.241,000	79.037.568,000	44.671.528.064	91.721.869,000	91.721.869,000	22.996.875,000	22.996.875,000	3.200.000,000	3.200.000,000	31.813.237,000	31.813.237,000	0	0	756.446.730,000	722.080.750.064
83	Kab. Kampar	699.515.679,000	699.515.679,000	157.425.156,000	140.237.567.749	90.362.164,000	90.362.164,000	30.590.500,000	30.590.500,000	1.600.000,000	1.600.000,000	16.258.399,000	16.213.399,000	0	0	997.752.098,000	969.519.509.748
84	Kab. Kuantan Singingi	502.986.036,000	502.986.036,000	33.343.974,000	24.338.304.978	76.256.349,000	76.256.349,000	30.633.669,000	30.633.669,000	2.200.000,000	2.200.000,000	26.493.214,000	26.493.214,000	0	0	673.913.242,000	664.907.572.978
85	Kab. Pelalawan	492.949.822,000	492.949.822,000	9.749.700,000	9.749.700,000	92.929.076,000	21.801.613,000	21.801.613,000	2.800.000,000	2.800.000,000	2.800.000,000	22.052.190,000	22.052.190,000	2.656.940,000	2.656.940,000	644.939.341,000	644.939.341,000
86	Kab. Rokan Hilir	484.448.831,000	484.448.831,000	36.951.363,000	15.147.827.855	79.458.968,000	79.458.968,000	20.179.628,000	20.179.628,000	5.000.000,000	5.000.000,000	22.242.562,000	22.242.562,000	4.160.371,000	4.160.371,000	632.441.723,000	630.638.187.855
87	Kab. Rokan Hulu	554.496.478,000	554.496.478,000	103.574.313,000	57.447.728.872	100.181.384,000	23.292.563,000	23.292.563,000	1.200.000,000	1.200.000,000	1.200.000,000	21.599.446,000	21.599.446,000	0	0	804.334.184,000	758.207.598.872
88	Kab. Siak	375.178.705,000	375.178.705,000	42.833.682,000	12.667.408.091	26.886.106,000	26.886.106,000	13.130.125,000	13.130.125,000	1.800.000,000	1.800.000,000	19.607.773,000	19.607.773,000	0	0	479.436.391,000	449.270.117.091
89	Kota Dumai	400.249.895,000	400.249.895,000	45.011.115,000	22.984.967.306	29.236.762,000	15.928.249,000	15.928.249,000	7.200.000,000	7.200.000,000	7.200.000,000	13.893.184,000	13.893.184,000	0	0	511.519.205,000	489.453.057.306
90	Kota Pekanbaru	877.551.186,000	877.551.186,000	22.976.793,000	18.480.209.003	32.070.317,000	32.070.317,000	18.366.675,000	18.366.675,000	16.600.000,000	16.600.000,000	5.174.839,000	5.174.839,000	0	0	972.739.810,000	968.243.226.003
91	Kab. Kepulauan Meranti	344.269.530,000	344.269.530,000	7.312.275,000	3.815.490.423	37.940.729,000	37.940.729,000	22.581.696,000	22.581.696,000	1.000.000,000	857.809.370	24.418.138,000	23.606.290.635	0	0	437.522.368,000	433.071.545.428
92	Provinsi Jambi	1.131.739.867,000	1.131.739.867,000	55.609.400,000	55.609.400,000	153.450.531,000	13.726.228,000	13.726.228,000	0	0	27.060.743,000	27.060.743,000	0	0	1.381.586.769,000	1.381.586.769,000	
93	Kab. Batanghari	454.111.656,000	454.111.656,000	35.716.401,000	29.056.632.679	78.231.198,000	20.559.452,000	20.559.452,000	2.800.000,000	2.800.000,000	2.800.000,000	33.159.952,000	33.159.952,000	11.135.050,000	11.135.050,000	635.713.709,000	629.053.940.679
94	Kab. Bungo	481.414.758,000	481.414.758,000	12.219.624,000	81.144.942,000	66.835.616.587	34.888.140,000	30.349.749.822	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	18.595.083,000	18.531.020,000	0	0	630.662.547,000	611.750.768.409
95	Kab. Kerinci	471.290.731,000	471.290.731,000	27.201.663,000	21.853.207.939	55.198.742,000	30.958.407,000	30.958.407,000	400.000,000	400.000,000	400.000,000	35.884.663,000	35.884.663,000	10.076.250,000	10.076.250,000	631.014.456,000	625.662.000.939
96	Kab. Merangin	536.778.464,000	536.778.464,000	45.106.612,000	37.556.649.432	90.855.979,000	24.521.157,000	24.521.157,000	2.000.000,000	2.000.000,000	2.000.000,000	27.941.996,000	27.941.996,000	10.350.170,000	10.350.170,000	739.556.378,000	732.006.415.432
97	Kab. Muaro Jambi	530.526.260,000	530.526.260,000	13.714.578,000	13.714.578,000	78.068.613,000	24.505.101,000	24.505.101,000	1.000.000,000	1.000.000,000	1.000.000,000	22.592.182,000	22.592.182,000	14.195.326,000	14.195.326,000	684.002.060,000	684.002.060,000
98	Kab. Sarolangun	419.612.703,000	419.612.703,000	58.043.214,000	43.459.751.118	78.608.706,000	27.710.102,000	27.710.102,000	1.800.000,000	1.800.000,000	1.800.000,000	26.282.634,000	26.282.634,000	10.652.509,000	10.652.509,000	622.709.888,000	608.126.405.118
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	380.885.943,000	380.885.943,000	71.367.804,000	51.045.025.982	62.507.767,000	26.347.821,000	26.347.821,000	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	24.975.960,000	24.975.960,000	289.958,000	289.958,000	570.375.153,000	550.052.734.982
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	430.682.506,000	430.682.506,000	7.984.754,000	7.984.754,000	49.287.250,000	36.988.871,000	36.988.871,000	4.000.000,000	4.000.000,000	4.000.000,000	22.384.156,000	22.384.156,000	13.150.072,000	13.150.072,000	564.187.609,000	564.187.609,000
101	Kab. Tebo	430.063.460,000	430.063.460,000	12.837.106,000	12.837.106,000	72.094.132,000	56.855.963.720	28.311.962,000	13.103.962,000	1.400.000,000	1.400.000,000	18.191.649,000	18.191.649,000	8.860.443,000	8.860.443,000	574.552.751,000	557.520.394.413
102	Kota Jambi	637.384.496,000	637.384.496,000	95.157.072,000	85.179.217.290	47.543.501,000	47.542.688.567	14.319.411,000	14.319.411,000	13.600.000,000	13.599.801.187	2.838.700,000	2.838.700,000	12.867.897,000	12.867.897,000	823.711.077,000	813.729.510.984
103	Kota Sungai Penuh	374.982.435,000	374.982.435,000	34.473.970,000	21.565.022.574	30.756.248,000	15.805.206,000	15.805.206,000	800.000,000	800.000,000	800.000,000	7.432.666,000	7.432.666,000	5.036.062,000	5.036.062,000	466.286.587,000	456.377.639.574
104	Provinsi Sumatera Selatan	1.469.776.263,000	1.469.776.263,000	45.729.704,000	35.952.452.634	207.474.049,000	16.928.930,000	16.928.930,000	0	0	10.337.985,000	10.337.985,000	66.205.536,000	66.205.536,000	1.816.450.467,000	1.806.673.215.634	
105	Kab. Lahat	537.175.925,000	537.175.925,000	77.542.614,000	55.168.716.328	58.428.866,000	48.601.829,000	48.601.829,000	3.600.000,000	3.600.000,000	3.600.000,000	27.410.877,000	27.410.877,000	14.273.114,000	14.273.114,000	767.033.225,000	749.459.327.328
106	Kab. Musi Banyuasin	338.787.763,000	338.787.763,000	105.231.762,000	55.448.156.274	63.346.751,000	22.405.130,000	22.405.130,000	2.600.000,000	2.600.000,000	2.600.000,000	8.512.713,000	8.512.713,000	0	0	540.884.119,000	491.100.512.274
107	Kab. Muara Rawas	484.269.357,000	484.269.357,000	12.219.624,000	7.767.261,000	66.835.616.587	34.888.140,000	30.349.749.822	2.400.000,000	2.400.000,000	2.400.000,000	18.595.083,000	18.531.020,000	0	0	630.662.547,000	611.750.768.409
108	Kab. Muara Enim	526.243.957,000	526.243.957,000	32.1.09													

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kekulturhan		Bidang Pekerjaan Umum		DAU THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
155	Kab. Cianjur	1.261.200.120.000	1.261.200.120.000	51.153.426.000	51.153.426.000	313.587.295.000	313.587.295.000	11.708.891.000	11.708.891.000	1.200.000.000	1.200.000.000	33.408.922.000	33.408.922.000	41.232.348.000	41.232.348.000	1.813.491.002.000	1.813.491.002.000
156	Kab. Cirebon	1.237.704.304.000	1.237.704.304.000	130.548.483.000	130.490.831.564	236.008.686.000	236.008.686.000	69.512.792.000	69.512.792.000	2.400.000.000	2.400.000.000	10.294.939.000	10.294.939.000	0	0	1.686.469.204.000	1.686.411.352.564
157	Kab. Garut	1.504.783.568.000	1.504.783.568.000	62.008.092.000	62.005.810.462	252.253.834.000	252.253.834.000	78.578.178.000	78.578.178.000	4.200.000.000	4.200.000.000	20.390.686.000	20.390.686.000	59.226.934.000	59.226.934.000	1.981.441.292.000	1.981.439.010.462
158	Kab. Indramayu	1.089.012.010.000	1.089.012.010.000	57.848.220.000	57.848.220.000	229.420.189.000	229.420.189.000	63.386.754.000	63.386.754.000	1.600.000.000	1.600.000.000	7.749.296.000	7.749.296.000	2.801.767.000	2.801.767.000	1.451.818.236.000	1.451.818.236.000
159	Kab. Karawang	1.167.110.204.000	1.167.110.204.000	59.830.659.000	57.809.636.461	172.721.598.000	172.721.598.000	29.756.610.000	29.756.610.000	2.400.000.000	2.400.000.000	26.456.289.000	26.456.289.000	0	0	1.458.275.360.000	1.458.054.337.461
160	Kab. Kuningan	1.101.093.089.000	1.101.093.089.000	1.072.467.000	1.069.791.482	46.440.714.000	46.440.714.000	25.126.846.000	25.126.846.000	3.000.000.000	3.000.000.000	18.025.595.000	18.025.595.000	0	0	1.195.758.513.000	1.195.758.537.482
161	Kab. Majalengka	1.006.433.411.000	1.006.433.411.000	16.704.486.000	10.982.544.615	133.379.140.000	133.379.140.000	51.081.560.000	51.081.560.000	2.600.000.000	2.600.000.000	10.063.774.000	10.063.774.000	40.891.874.000	40.891.874.000	1.261.174.245.000	1.255.452.403.615
162	Kab. Purwakarta	709.464.741.000	709.464.741.000	54.043.614.000	37.122.294.531	68.404.298.000	68.404.298.000	35.842.964.000	35.842.964.000	1.800.000.000	1.800.000.000	14.671.730.000	14.671.730.000	0	0	875.227.547.000	867.306.027.531
163	Kab. Subang	1.059.090.304.000	1.059.090.304.000	9.164.718.000	8.880.426.539	21.921.457.000	21.921.457.000	27.614.968.000	27.614.968.000	1.600.000.000	1.600.000.000	10.146.577.000	10.146.577.000	38.855.798.000	38.855.798.000	1.357.193.822.000	1.356.909.530.539
164	Kab. Sukabumi	1.328.578.266.000	1.328.578.266.000	28.456.825.000	20.973.438.900	296.854.501.000	296.854.501.000	77.698.118.000	77.698.118.000	1.000.000.000	1.000.000.000	30.774.496.000	30.774.496.000	38.496.799.000	38.496.799.000	1.801.838.805.000	1.794.375.618.900
165	Kab. Sumedang	897.049.997.000	897.049.997.000	25.511.715.000	25.511.715.000	88.154.857.000	88.154.857.000	23.988.964.000	23.988.964.000	1.400.000.000	1.400.000.000	8.972.963.000	8.972.963.000	0	0	1.145.078.496.000	1.145.078.496.000
166	Kab. Tasikmalaya	1.200.115.116.000	1.200.115.116.000	82.254.969.000	69.081.571.309	112.410.119.000	112.410.119.000	96.715.262.000	96.715.262.000	0	0	37.422.126.000	37.422.126.000	51.050.434.000	51.050.434.000	1.579.968.026.000	1.566.794.628.309
167	Kota Bandung	1.567.110.138.000	1.567.110.138.000	35.293.914.000	27.562.302.105	66.573.993.000	66.573.993.000	38.146.251.000	38.146.251.000	30.200.000.000	30.200.000.000	16.566.736.000	16.566.736.000	0	0	1.753.891.032.000	1.746.159.420.105
168	Kota Bekasi	1.225.277.882.000	1.225.277.882.000	20.311.875.000	20.311.875.000	56.072.496.000	56.068.851.000	30.026.344.000	30.026.344.000	11.200.000.000	11.200.000.000	0	0	0	0	1.342.888.597.000	1.342.884.952.000
169	Kota Bogor	746.216.401.000	746.216.401.000	36.138.888.000	36.138.888.000	31.725.202.000	31.725.202.000	17.761.219.000	17.761.219.000	13.600.000.000	13.600.000.000	13.158.907.000	13.158.907.000	0	0	858.600.617.000	858.600.617.000
170	Kota Cirebon	537.215.913.000	537.215.913.000	23.621.767.000	23.621.767.000	25.748.178.000	25.748.178.000	11.966.179.000	11.966.179.000	4.400.000.000	4.400.000.000	2.282.245.000	2.282.245.000	723.998.000	723.998.000	606.158.280.000	606.158.280.000
171	Kota Depok	872.846.311.000	872.846.311.000	3.217.401.000	3.170.580.936	41.041.009.000	41.041.009.000	22.940.254.000	22.940.254.000	12.600.000.000	12.598.602.850	0	0	0	0	1.052.644.975.000	1.052.596.757.786
172	Kota Sukabumi	437.895.895.000	437.895.895.000	2.209.332.000	2.153.977.142	43.127.036.000	43.127.036.000	11.105.413.000	11.105.413.000	6.600.000.000	6.600.000.000	6.165.895.000	6.165.895.000	8.050.713.000	8.050.713.000	515.154.884.000	515.098.929.142
173	Kota Tasikmalaya	717.209.197.000	717.209.197.000	2.989.908.000	2.957.927.788	30.940.838.000	30.940.838.000	17.195.518.000	17.195.518.000	13.800.000.000	13.800.000.000	11.909.335.000	11.909.335.000	18.048.916.000	18.048.916.000	812.093.712.000	812.061.731.788
174	Kota Cimahi	529.585.300.000	529.585.300.000	13.617.081.000	13.091.631.486	22.673.706.000	22.673.706.000	12.884.035.000	12.884.035.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1.372.714.000	1.372.714.000	0	0	583.132.836.000	582.607.388.486
175	Kota Banjar	341.558.627.000	341.558.627.000	9.359.712.000	6.961.293.842	14.227.983.000	14.227.983.000	15.349.248.000	15.349.248.000	1.800.000.000	1.800.000.000	5.038.018.000	5.038.018.000	6.736.775.000	6.736.775.000	394.070.363.000	391.671.944.842
176	Kab. Bandung Barat	1.032.225.371.000	1.032.225.371.000	8.352.243.000	8.352.243.000	145.359.276.000	145.359.276.000	27.174.387.000	27.174.387.000	0	0	9.003.422.000	9.003.422.000	0	0	1.222.114.699.000	1.222.075.022.945
177	Kab. Pangandaran	462.107.095.000	462.107.095.000	17.841.951.000	15.671.533.073	35.624.889.000	35.624.889.000	23.127.744.000	23.127.744.000	0	0	15.319.718.000	15.319.718.000	0	0	554.021.397.000	551.850.983.825
178	Provinsi Jawa Tengah	3.550.426.222.000	3.550.426.222.000	63.553.900.000	62.181.181.028	187.324.934.000	187.324.934.000	0	0	0	0	19.078.454.000	19.078.454.000	0	0	3.620.363.210.000	3.619.010.791.028
179	Kab. Banjarnegara	851.184.986.000	851.184.986.000	20.181.879.000	20.181.879.000	32.081.899.000	32.081.899.000	20.885.945.000	20.885.945.000	2.400.000.000	2.400.000.000	32.238.472.000	32.238.472.000	28.139.418.000	28.139.418.000	987.112.589.000	987.112.589.000
180	Kab. Banyumas	1.275.059.350.000	1.275.059.350.000	20.181.879.000	15.980.986.064	48.635.569.000	48.635.569.000	30.291.257.000	30.291.257.000	6.000.000.000	6.000.000.000	26.551.886.000	26.551.886.000	57.387.053.000	57.387.053.000	1.466.106.974.000	1.461.885.991.064
181	Kab. Batang	728.393.318.000	728.393.318.000	51.608.412.000	39.311.457.054	28.508.291.000	28.508.291.000	17.242.126.000	17.242.126.000	1.800.000.000	1.800.000.000	13.167.558.000	13.167.558.000	21.326.784.000	21.326.784.000	862.066.489.000	849.768.534.054
182	Kab. Blera	843.103.447.000	843.103.447.000	67.337.928.000	62.395.242.851	31.178.849.000	31.178.849.000	18.891.636.000	18.891.636.000	4.800.000.000	4.800.000.000	28.861.967.000	28.861.967.000	27.396.413.000	27.396.413.000	1.021.590.240.000	1.016.647.554.651
183	Kab. Boyolali	940.179.174.000	940.179.174.000	4.874.850.000	4.416.317.508	33.348.870.000	33.348.870.000	23.171.119.000	23.171.119.000	1.200.000.000	1.200.000.000	8.259.559.000	8.259.559.000	26.156.762.000	26.156.762.000	1.037.190.334.000	1.036.731.801.508
184	Kab. Brebes	1.133.676.120.000	1.133.676.120.000	83.034.945.000	63.818.711.358	147.873.830.000	147.873.830.000	95.908.607.000	95.908.607.000	1.000.000.000	1.000.000.000	12.808.974.000	12.808.974.000	36.062.481.000	36.062.481.000	1.510.364.957.000	1.491.147.732.358
185	Kab. Cilacap	1.309.641.206.000	1.309.641.206.000	25.186.725.000	23.704.502.419	48.986.268.000	48.986.268.000	31.332.154.000	31.332.								

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant				DAU Specific Grant												DAU THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah				Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kekurangan		Bidang Pekerjaan Umum		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi						
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)					(15)	(16)	(17)	(18)		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)						
233	Kab. Magetan	834.238.235.000	834.238.235.000	52.063.398.000	47.566.044.745	27.440.729.000	27.440.729.000	20.548.436.000	20.548.436.000	5.600.000.000	5.600.000.000	9.032.097.000	9.032.097.000	22.752.072.000	22.752.072.000	971.674.967.000	971.674.967.000						
234	Kab. Malang	1.603.118.568.000	1.603.118.568.000	90.542.214.000	64.037.564.763	62.103.700.000	62.103.700.000	38.856.367.000	38.856.367.000	2.400.000.000	2.400.000.000	27.848.747.000	27.848.747.000	30.371.730.000	30.371.730.000	1.855.240.326.000	1.828.735.676.763						
235	Kab. Mojokerto	882.703.770.000	882.703.770.000	19.174.010.000	19.174.010.000	31.742.072.000	31.742.072.000	21.172.222.000	21.172.222.000	1.000.000.000	1.000.000.000	11.186.690.000	11.186.690.000	26.257.547.000	26.257.547.000	993.236.711.000	993.236.711.000						
236	Kab. Nganjuk	951.885.350.000	951.885.350.000	65.940.471.000	52.442.131.119	35.131.977.000	35.131.977.000	45.067.063.000	45.067.063.000	4.000.000.000	4.000.000.000	13.186.466.000	13.186.466.000	32.429.616.000	32.429.616.000	1.147.620.943.000	1.134.122.785.119						
237	Kab. Ngawi	970.909.561.000	970.909.561.000	20.536.865.000	15.130.863.668	31.189.999.000	31.189.999.000	23.597.909.000	23.597.909.000	800.000.000	800.000.000	11.260.594.000	11.260.594.000	24.405.052.000	24.405.052.000	1.082.799.960.000	1.077.293.986.668						
238	Kab. Pacitan	689.833.551.000	689.833.551.000	14.852.043.000	13.256.534.554	23.930.800.000	23.930.800.000	33.142.493.000	33.142.493.000	1.000.000.000	1.000.000.000	38.254.546.000	38.254.546.000	21.879.412.000	21.879.412.000	822.892.945.000	821.291.336.554						
239	Kab. Pamekasan	642.998.747.000	642.998.747.000	14.819.544.000	14.819.544.000	120.456.953.000	120.456.953.000	75.359.081.000	75.359.081.000	2.200.000.000	2.200.000.000	12.731.416.000	12.731.416.000	21.978.478.000	21.978.478.000	890.544.219.000	890.544.219.000						
240	Kab. Pasuruan	1.036.061.337.000	1.036.061.337.000	86.674.833.000	58.136.442.127	80.811.602.000	80.811.602.000	50.999.871.000	50.999.871.000	4.800.000.000	4.800.000.000	13.998.206.000	13.998.206.000	32.423.434.000	32.423.434.000	1.306.799.283.000	1.276.230.892.127						
241	Kab. Ponorogo	981.828.139.000	981.828.139.000	29.639.098.000	28.831.191.300	29.672.218.000	29.672.218.000	24.000.565.000	24.000.565.000	5.200.000.000	5.200.000.000	13.061.211.000	13.061.211.000	29.455.470.000	29.455.470.000	1.112.856.691.000	1.112.856.691.000						
242	Kab. Probolinggo	816.428.423.000	816.428.423.000	40.038.768.000	28.960.181.803	67.278.892.000	67.278.892.000	88.752.963.000	88.752.963.000	1.000.000.000	1.000.000.000	17.199.865.000	17.199.865.000	23.847.376.000	23.847.376.000	1.054.545.687.000	1.043.467.100.603						
243	Kab. Sampang	624.331.325.000	624.331.325.000	16.931.979.000	16.931.917.842	127.644.520.000	127.644.520.000	53.908.933.000	53.908.933.000	1.200.000.000	1.200.000.000	12.953.612.000	12.953.612.000	21.139.442.000	21.139.442.000	858.109.811.000	858.109.749.844						
244	Kab. Sidoarjo	1.183.954.125.000	1.183.954.125.000	4.192.371.000	3.828.118.355	43.974.922.000	43.974.922.000	27.112.233.000	27.112.233.000	5.600.000.000	5.600.000.000	7.785.132.000	7.785.132.000	0	0	1.272.618.783.000	1.272.254.530.355						
245	Kab. Situbondo	611.715.285.000	611.715.285.000	0	0	107.430.991.000	107.430.991.000	48.409.065.000	48.409.065.000	800.000.000	800.000.000	28.709.507.000	28.709.507.000	20.064.932.000	20.064.932.000	817.129.780.000	817.129.780.000						
246	Kab. Sumenep	945.005.081.000	945.005.081.000	10.107.189.000	10.010.328.269	120.257.368.000	120.257.368.000	51.364.129.000	51.364.129.000	800.000.000	800.000.000	40.215.302.000	40.215.302.000	23.629.706.000	23.629.706.000	1.191.378.775.000	1.191.281.864.380						
247	Kab. Trenggalek	810.155.824.000	810.155.824.000	20.311.875.000	15.069.602.751	26.092.348.000	26.092.348.000	19.035.049.000	19.035.049.000	1.000.000.000	1.000.000.000	27.680.544.000	27.680.544.000	22.585.802.000	22.585.802.000	926.861.442.000	926.861.169.751						
248	Kab. Tuban	932.406.161.000	932.406.161.000	40.321.259.000	25.257.727.502	33.639.068.000	33.639.068.000	47.103.454.000	47.103.454.000	3.400.000.000	3.400.000.000	8.175.252.000	8.175.252.000	27.495.853.000	27.495.853.000	1.092.551.047.000	1.097.471.515.902						
249	Kab. Tulungagung	1.063.990.401.000	1.063.990.401.000	11.569.644.000	11.555.669.852	35.553.968.000	35.553.968.000	23.137.261.000	23.137.261.000	2.800.000.000	2.800.000.000	20.975.196.000	20.975.196.000	33.208.629.000	33.208.629.000	1.191.235.099.000	1.191.221.124.852						
250	Kota Blitar	398.418.242.000	398.418.242.000	10.627.173.000	17.018.024.000	7.816.704.000	7.816.704.000	4.200.000.000	4.200.000.000	0	0	5.158.669.000	5.158.669.000	443.238.812.000	443.238.812.000	1.177.613.745	1.177.613.745						
251	Kota Kediri	552.265.316.000	552.265.316.000	10.139.688.000	9.325.797.230	25.673.586.000	25.673.586.000	11.952.955.000	11.952.955.000	9.200.000.000	9.200.000.000	6.766.134.000	6.766.134.000	5.148.307.000	5.148.307.000	621.145.986.000	620.322.095.230						
252	Kab. Madiun	471.940.090.000	471.940.090.000	6.727.293.000	5.384.920.281	17.226.408.000	17.226.408.000	9.359.367.000	9.359.367.000	5.400.000.000	5.400.000.000	0	0	0	0	510.653.158.000	509.310.785.281						
253	Kab. Malang	775.989.615.000	775.989.615.000	8.807.229.000	8.807.229.000	31.595.981.000	31.595.981.000	16.476.642.000	16.476.642.000	11.400.000.000	11.400.000.000	13.301.365.000	13.301.365.000	15.559.211.000	15.559.211.000	873.130.043.000	873.130.043.000						
254	Kab. Mojokerto	370.823.379.000	370.823.379.000	4.842.351.000	4.580.579.236	18.410.815.000	18.410.815.000	6.011.363.000	6.011.363.000	3.600.000.000	3.600.000.000	3.220.260.000	3.220.260.000	4.657.632.000	4.657.632.000	413.295.800.000	413.028.026.236						
255	Kab. Pasuruan	390.429.094.000	390.429.094.000	9.717.201.000	6.977.770.233	19.204.343.000	19.204.343.000	18.056.945.000	18.056.945.000	6.800.000.000	6.800.000.000	2.249.019.000	2.249.019.000	5.845.931.000	5.845.931.000	452.302.533.000	449.565.102.233						
256	Kab. Probolinggo	419.368.928.000	419.368.928.000	7.377.273.000	7.127.560.402	17.980.766.000	17.980.766.000	19.395.883.000	19.395.883.000	5.800.000.000	5.800.000.000	4.577.507.000	4.577.507.000	6.616.546.000	6.616.546.000	481.134.903.000	480.885.190.402						
257	Kota Surabaya	1.172.550.033.000	1.172.550.033.000	144.913.041.000	126.364.538.070	52.241.170.000	52.241.170.000	28.298.294.000	28.298.294.000	30.600.000.000	30.600.000.000	0	0	802.663.000	802.663.000	1.429.405.201.000	1.410.896.689.000						
258	Kota Batu	447.711.545.000	447.711.545.000	9.847.197.000	7.524.858.408	18.082.770.000	18.082.770.000	10.180.947.000	10.180.947.000	1.000.000.000	1.000.000.000	4.671.482.000	4.671.482.000	6.302.083.000	6.302.083.000	497.796.024.000	497.796.024.000						
259	Provinsi Kalimantan Barat	1.430.593.478.000	1.430.593.478.000	169.717.000.000	80.856.421.440	204.992.940.000	204.992.940.000	19.156.268.000	19.156.268.000	0	0	46.866.768.000	46.866.768.000	31.559.177.000	31.559.177.000	1.902.865.621.000	1.874.025.052.440						
260	Kab. Bengkayang	480.764.564.000	480.764.564.000	40.688.748.000	34.760.923.530	75.686.822.000	75.686.822.000	11.759.296.000	11.759.296.000	400.000.000	400.000.000	27.643.604.000	27.643.604.000	8.383.269.000	8.383.269.000	645.326.303.000	639.478.530.000						
261	Kab. Landak	556.588.624.000	556.588.624.000	34.933.942.000	29.911.299.239	93.492.353.000	93.492.353.000	14.917.130.000	14.917.130.000	0	0	25.727.804.000	25.727.804.000	8.167.028.000	8.167.028.000	733.276.881.000	728.804.238.239						
262	Kab. Kapuas Hulu	374.241.994.000	374.241.994.000	62.073.090.000	54.196.575.356	116.229.017.000	116.229.017.000	18.641.161.000	18.641.161.000	800.000.000	800.000.000	54.904.066.000	54.904.066.000	9.489.266.000	9.489.266.000	1.005.378.594.000	997.502.074.545						

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum		DAU THR dan Gaji Ketua Belas bagi Guru		Pagu		Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	(17)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)	
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
311	Kota Samarinda	730.154.327.000	730.154.327.000	30.321.567.000	29.035.907.055	49.190.233.000	49.190.233.000	18.241.753.000	18.241.753.000	11.800.000.000	11.800.000.000	3.352.980.000	3.352.980.000	0	0	843.060.860.000	841.775.20.055	
312	Kab. Penajam Paser Utara	254.918.836.000	254.918.836.000	19.954.386.000	9.828.490.496	17.960.917.000	17.960.917.000	11.118.200.000	11.118.200.000	4.800.000.000	4.800.000.000	10.475.575.000	10.475.575.000	0	0	319.227.914.000	320.018.046.96	
313	Kab. Mahakam Ulu	324.626.711.000	324.626.711.000	8.222.247.000	1.598.400.000	45.608.508.000	45.608.508.000	6.426.893.000	6.426.893.000	0	0	89.981.919.000	89.981.919.000	0	0	474.866.278.000	434.344.822.000	
314	Provinsi Sulawesi Utara	1.147.173.627.000	1.147.173.627.000	83.775.200.000	39.799.209.322	168.943.519.000	168.943.519.000	14.958.689.000	14.958.689.000	0	0	15.210.779.000	15.210.779.000	31.784.285.000	31.784.285.000	1.462.386.099.000	1.418.410.108.322	
315	Kab. Bolaang Mongondow	435.679.925.000	435.679.925.000	33.701.463.000	15.226.821.063	61.310.644.000	61.310.644.000	36.359.796.000	36.359.796.000	400.000.000	400.000.000	13.028.143.000	13.028.143.000	10.629.542.000	10.629.542.000	591.109.513.000	572.634.871.063	
316	Kab. Minahasa	541.083.484.000	541.083.484.000	22.304.322.000	10.485.882.233	70.396.280.000	70.396.280.000	30.145.193.000	30.145.193.000	8.800.000.000	8.800.000.000	10.615.734.000	10.615.734.000	13.965.746.000	13.965.746.000	686.854.741.000	684.751.601.275	
317	Kab. Sangihe	418.184.471.000	418.184.471.000	22.814.298.000	7.383.439.944	54.691.294.000	54.691.294.000	21.811.553.000	21.811.553.000	4.400.000.000	4.400.000.000	15.391.557.000	15.391.557.000	6.359.094.000	6.359.094.000	529.152.717.000	527.231.318.944	
318	Kota Bitung	405.407.885.000	405.407.885.000	13.844.574.000	5.648.617.308	51.161.597.000	51.161.597.000	21.943.079.000	21.943.079.000	13.800.000.000	13.800.000.000	4.598.526.000	4.598.526.000	5.294.113.000	5.294.113.000	516.050.774.000	507.854.817.308	
319	Kota Manado	630.387.304.000	630.387.304.000	29.979.096.000	11.094.698.763	87.816.630.000	87.816.630.000	35.878.396.000	35.878.396.000	17.400.000.000	17.400.000.000	4.127.475.000	4.127.475.000	11.889.759.000	11.889.759.000	798.594.172.763	798.594.172.763	
320	Kab. Kepulauan Talaud	387.465.136.000	387.465.136.000	18.784.422.000	8.019.492.054	63.043.544.000	63.043.544.000	20.374.724.000	20.374.724.000	2.200.000.000	2.200.000.000	11.051.802.000	11.051.802.000	5.302.243.000	5.302.243.000	497.816.941.054	497.816.941.054	
321	Kab. Minahasa Selatan	426.074.290.000	426.074.290.000	9.879.696.000	7.342.090.585	56.826.812.000	56.826.812.000	35.857.137.000	35.857.137.000	2.000.000.000	2.000.000.000	11.924.491.000	11.924.491.000	10.502.696.000	10.502.696.000	553.065.122.000	550.527.516.585	
322	Kota Tomohon	357.458.956.000	357.458.956.000	9.002.223.000	8.622.110.685	33.639.543.000	33.639.543.000	8.345.384.000	8.345.384.000	8.800.000.000	8.800.000.000	7.363.792.000	7.363.792.000	98.792.000	98.792.000	424.708.690.000	424.328.977.685	
323	Kab. Minahasa Utara	406.674.893.000	406.674.893.000	22.911.795.000	7.917.153.544	59.689.553.000	59.689.553.000	21.835.077.000	21.835.077.000	1.200.000.000	1.200.000.000	6.938.786.000	6.938.786.000	4.384.000.000	4.384.000.000	523.634.104.000	508.639.482.544	
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	313.879.333.000	313.879.333.000	9.197.217.000	3.479.814.355	40.837.671.000	40.837.671.000	16.268.281.000	16.268.281.000	2.000.000.000	2.000.000.000	10.620.856.000	10.620.856.000	2.688.260.000	2.688.260.000	395.491.618.000	389.774.215.355	
325	Kota Kotabombu	310.284.787.000	310.284.787.000	12.869.604.000	9.238.979.892	40.587.972.000	40.587.972.000	16.742.170.000	16.742.170.000	3.600.000.000	3.600.000.000	6.466.933.000	6.466.933.000	3.961.984.000	3.961.984.000	394.513.450.000	390.882.825.892	
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	290.629.975.000	290.629.975.000	16.379.496.000	11.510.902.694	42.761.107.000	42.761.107.000	22.159.390.000	22.159.390.000	200.000.000	200.000.000	18.035.751.000	18.035.751.000	3.185.241.000	3.185.241.000	393.350.960.000	388.482.366.694	
327	Kab. Minahasa Tenggara	330.986.121.000	330.986.121.000	0	0	45.952.811.000	45.952.811.000	15.747.170.000	15.747.170.000	1.800.000.000	1.800.000.000	16.478.517.000	16.478.517.000	5.353.218.000	5.353.218.000	416.317.837.000	416.317.837.000	
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	270.348.834.000	270.348.834.000	6.597.297.000	6.324.253.373	33.742.216.000	33.742.216.000	21.077.583.000	21.077.583.000	0	0	23.020.981.000	23.020.981.000	0	0	354.786.911.000	354.513.867.373	
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	251.882.282.000	251.882.282.000	14.819.544.000	11.080.571.275	37.883.611.000	37.883.611.000	25.247.886.000	25.247.886.000	0	0	35.497.063.000	35.497.063.000	3.160.186.000	3.160.186.000	368.490.574.000	364.751.601.275	
330	Provinsi Sulawesi Tengah	1.234.075.054.000	1.234.075.054.000	112.374.320.000	57.468.716.028	184.058.488.000	184.058.488.000	32.579.126.000	32.579.126.000	0	0	75.507.358.000	75.507.358.000	33.083.714.000	33.083.714.000	1.671.678.060.000	1.616.772.458.028	
331	Kab. Banggai	674.592.228.000	674.592.228.000	64.835.505.000	64.835.505.000	102.728.254.000	102.728.254.000	35.173.114.000	35.173.114.000	9.200.000.000	9.200.000.000	29.851.600.000	29.851.600.000	14.406.240.000	14.406.240.000	530.786.941.000	530.786.941.000	
332	Kab. Banggai Kepulauan	316.577.973.000	316.577.973.000	40.883.742.000	30.583.457.121	55.170.428.000	55.170.428.000	33.522.120.000	33.522.120.000	600.000.000	600.000.000	42.584.818.000	42.584.818.000	6.101.754.000	6.101.754.000	495.440.835.000	485.140.550.121	
333	Kab. Buol	371.384.638.000	371.384.638.000	28.489.124.000	22.540.962.818	59.038.959.000	59.038.959.000	27.384.490.000	27.384.490.000	1.400.000.000	1.400.000.000	45.700.118.000	45.700.118.000	5.771.874.000	5.771.874.000	539.149.203.000	533.221.041.818	
334	Kab. Tolitoli	452.298.973.000	452.298.973.000	17.238.490.000	12.895.625.190	71.238.090.000	71.238.090.000	49.801.602.000	49.801.602.000	1.200.000.000	1.200.000.000	34.186.705.000	34.186.705.000	7.698.151.000	7.698.151.000	633.947.991.000	629.318.146.190	
335	Kab. Donggala	492.338.299.000	492.338.299.000	72.342.774.000	48.610.330.591	89.420.942.000	89.420.942.000	52.975.750.000	52.975.750.000	1.800.000.000	1.800.000.000	31.473.380.000	31.473.380.000	12.955.584.000	12.955.584.000	753.260.729.000	729.528.285.991	
336	Kab. Morowali	361.492.257.000	361.492.257.000	49.788.468.000	34.764.807.729	64.761.101.000	64.761.101.000	28.052.579.000	28.052.579.000	1.400.000.000	1.400.000.000	26.740.546.000	26.740.546.000	6.463.434.000	6.463.434.000	538.698.385.000	523.674.524.729	
337	Kab. Poso	569.871.104.000	569.871.104.000	10.724.670.000	10.329.541.579	74.902.888.000	74.902.888.000	28.564.961.000	28.564.961.000	5.600.000.000	5.600.000.000	7.536.973.000	7.536.973.000	9.126.362.000	9.126.362.000	736.326.558.000	735.931.423.579	
338	Kota Palu	576.072.726.000	576.072.726.000	26.356.869.000	24.276.498.175	83.924.410.000	83.924.410.000	28.985.715.000	28.985.715.000	9.200.000.000	9.200.000.000	11.540.152.000	11.540.152.000	16.060.434.000	16.060.434.000	732.140.126.000	730.059.933.175	
339	Kab. Parigi Moutong	608.346.464.000	608.346.464.000	15.664.518.000	15.664.518.000	118.366.340.000	118.366.340.000	65.897.120.000	65.897.120.000	1.000.000.000	1.000.000.000	32.896.952.000	32.896.952.000	17.147.458.000	17.147.458.000	859.308.852.000	859.308.852.000	
340	Kab. Tojo Una Una	409.558.768.000	409.558.768.000	71.530.299.000	57.906.343.281	67.691.714.000	67.691.714.000	41.687.825.000	41.687.825.000	2.400.000.000	2.400.000.000	51.343.903.000	51.343.903.000	5.826.214.000	5.826.214.000	650.038.723.000	638.414.781.281	
341	Kab. Sigi	472.524.102.000	472.524.102.000	35.618.904.000	25.867.262.339	72.323												

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant				DAU Specific Grant										DAU THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah				Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kecelakaan		Bidang Pekerjaan Umum		Pagu	Realisasi						
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi								
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)				
389	Kab. Bangli	490.786.796.000	490.786.796.000	584.982.000	0	22.226.780.000	22.226.780.000	18.661.347.000	18.661.347.000	800.000.000	800.000.000	38.081.952.000	28.561.463.000	0	0	571.123.857.000	561.018.386.000				
390	Kab. Buleleng	810.521.352.000	810.521.352.000	41.371.227.000	22.846.393.681	84.955.616.000	84.955.616.000	38.798.884.000	38.798.884.000	3.800.000.000	3.800.000.000	13.508.673.000	13.508.673.000	26.953.932.000	26.953.932.000	1.019.909.684.000	1.001.384.850.681				
391	Kab. Gianyar	659.570.007.000	659.570.007.000	0	0	10.612.507.000	10.612.507.000	13.639.958.000	13.639.958.000	1.200.000.000	1.200.000.000	8.089.204.000	8.089.204.000	0	0	693.081.676.000	693.091.676.000				
392	Kab. Jembrana	486.128.593.000	486.128.593.000	40.916.241.000	33.141.851.624	14.766.336.000	14.766.336.000	9.680.995.000	9.680.995.000	2.000.000.000	2.000.000.000	36.778.597.000	36.778.597.000	12.046.077.000	12.046.077.000	602.316.841.000	594.542.851.624				
393	Kab. Karangasem	627.192.195.000	627.192.195.000	39.973.770.000	29.989.674.115	72.309.805.000	72.309.805.000	27.686.227.000	27.686.227.000	600.000.000	600.000.000	18.140.862.000	18.140.862.000	0	0	785.902.579.000	775.837.883.115				
394	Kab. Klungkung	461.885.064.000	461.885.064.000	28.966.617.000	21.171.300.732	17.521.517.000	17.521.517.000	20.060.656.000	20.060.656.000	1.200.000.000	1.200.000.000	11.935.479.000	11.935.479.000	0	0	561.299.333.000	553.774.016.732				
395	Kab. Tabanan	733.672.486.000	733.672.486.000	60.968.124.000	42.633.480.961	25.267.344.000	25.267.344.000	15.638.231.000	15.638.231.000	0	0	16.558.679.000	16.558.679.000	610.614.000	610.614.000	834.380.934.961	827.115.478.000				
396	Kota Denpasar	595.399.447.000	595.399.447.000	42.216.201.000	40.316.713.657	30.731.021.000	30.731.021.000	12.943.312.000	12.943.312.000	3.200.000.000	3.200.000.000	5.248.930.000	5.248.930.000	1.322.947.000	1.322.947.000	690.461.858.000	688.562.370.657				
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.496.379.022.000	1.496.379.022.000	58.671.528.000	58.671.528.000	116.938.449.000	116.938.449.000	45.260.025.000	45.260.025.000	0	0	11.897.823.000	11.897.823.000	52.027.162.000	52.027.162.000	1.761.174.009.000	1.761.174.009.000				
398	Kab. Bima	780.986.738.000	780.986.738.000	97.009.515.000	86.472.780.000	86.472.780.000	86.472.780.000	72.319.906.000	72.319.906.000	0	0	13.213.335.000	13.213.335.000	19.473.123.000	19.473.123.000	1.069.475.397.000	1.069.469.208.836				
399	Kab. Dompu	479.370.682.000	479.370.682.000	53.765.845.000	39.665.688.935	58.233.009.000	58.233.009.000	43.057.391.000	43.057.391.000	1.800.000.000	1.800.000.000	10.308.021.000	10.308.021.000	7.766.994.000	7.766.994.000	654.321.942.000	640.201.785.935				
400	Kab. Lombok Barat	728.019.888.000	728.019.888.000	36.873.810.000	36.354.701.116	76.330.286.000	76.330.286.000	70.587.317.000	70.587.317.000	600.000.000	600.000.000	4.291.084.000	4.291.084.000	21.227.948.000	21.227.948.000	939.730.315.000	937.411.375.116				
401	Kab. Lombok Tengah	980.773.396.000	980.773.396.000	28.956.609.000	28.956.609.000	108.198.288.000	108.198.288.000	94.850.184.000	94.850.184.000	2.400.000.000	2.400.000.000	5.521.002.000	5.521.002.000	27.741.810.000	27.741.810.000	1.248.441.289.000	1.248.441.289.000				
402	Kab. Lombok Timur	1.154.390.988.000	1.154.390.988.000	25.771.707.000	25.771.707.000	127.263.150.000	127.263.150.000	108.512.873.000	108.512.873.000	3.000.000.000	3.000.000.000	6.176.191.000	6.176.191.000	37.085.354.000	37.085.354.000	1.462.200.263.000	1.462.200.263.000				
403	Kab. Sumbawa	785.070.924.000	785.070.924.000	32.969.004.000	26.307.577.460	68.460.292.000	68.460.292.000	51.825.580.000	51.825.580.000	1.600.000.000	1.600.000.000	14.826.551.000	14.826.551.000	18.313.706.000	18.313.706.000	972.466.057.000	966.040.630.460				
404	Kota Mataram	600.420.786.000	600.420.786.000	18.264.438.000	18.264.438.000	30.823.813.000	30.823.813.000	26.240.013.000	26.240.013.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1.681.432.000	1.681.432.000	9.635.769.000	9.635.769.000	697.066.251.000	697.066.251.000				
405	Kota Bima	419.790.761.000	419.790.761.000	20.831.859.000	20.831.859.000	19.710.880.000	19.710.880.000	17.519.713.000	17.519.713.000	8.200.000.000	8.200.000.000	2.228.421.000	2.228.421.000	6.945.770.000	6.945.770.000	495.227.404.000	495.227.404.000				
406	Kab. Sumbawa Barat	350.396.602.000	350.396.602.000	27.664.341.000	21.537.915.000	21.537.915.000	21.537.915.000	21.537.915.000	21.537.915.000	1.400.000.000	1.400.000.000	5.210.869.000	5.210.869.000	0	0	438.065.944.000	432.375.705.856				
407	Kab. Lombok Utara	360.312.525.000	360.312.525.000	2.632.419.000	2.574.321.921	39.199.554.000	39.199.554.000	34.567.002.000	34.567.002.000	0	0	4.133.192.000	4.133.192.000	3.135.652.000	3.135.652.000	443.970.344.000	443.972.246.921				
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.658.080.793.000	1.658.080.793.000	43.823.096.000	35.641.200.384	192.629.872.000	192.629.872.000	46.260.799.000	46.260.799.000	0	0	43.446.304.000	43.446.304.000	0	0	1.984.240.866.000	1.976.058.966.384				
409	Kab. Alor	488.463.141.000	488.463.141.000	37.211.355.000	20.641.024.440	66.545.266.000	66.545.266.000	43.035.581.000	43.035.581.000	3.400.000.000	3.400.000.000	19.877.005.000	19.877.005.000	5.062.498.000	5.062.498.000	663.594.846.000	647.024.515.440				
410	Kab. Belu	408.699.416.000	408.699.416.000	14.917.041.000	11.384.802.628	56.600.270.000	56.600.270.000	37.871.031.000	37.871.031.000	2.400.000.000	2.400.000.000	6.872.117.000	6.872.117.000	6.354.833.000	6.354.833.000	533.714.708.000	530.182.468.628				
411	Kab. Ende	502.079.965.000	502.079.965.000	32.401.503.000	25.975.030.608	67.538.650.000	67.538.650.000	47.488.501.000	47.488.501.000	4.600.000.000	4.600.000.000	16.336.292.000	16.336.292.000	0	0	670.443.911.000	664.071.438.608				
412	Kab. Flores Timur	529.432.771.000	529.432.771.000	65.999.200.000	25.399.891.610	64.368.215.000	64.368.215.000	47.736.249.000	47.736.249.000	4.200.000.000	4.200.000.000	9.361.213.000	9.361.213.000	0	0	681.097.948.000	680.489.339.610				
413	Kab. Kupang	559.265.904.000	559.265.904.000	48.975.963.000	43.562.369.328	76.156.053.000	76.156.053.000	52.616.433.000	52.616.433.000	3.400.000.000	3.400.000.000	11.156.068.000	11.156.068.000	0	0	751.586.451.000	745.172.527.328				
414	Kab. Lembata	393.066.290.000	393.066.290.000	17.224.470.000	13.527.154.549	33.557.241.000	33.557.241.000	33.618.404.000	33.618.404.000	1.400.000.000	1.400.000.000	15.903.841.000	15.903.841.000	0	0	494.770.046.000	482.472.730.549				
415	Kab. Manggarai	510.758.665.000	510.758.665.000	15.989.508.000	11.243.644.202	72.472.296.000	72.472.296.000	42.694.287.000	42.694.287.000	5.200.000.000	5.200.000.000	23.072.684.000	23.072.684.000	12.073.916.000	12.073.916.000	677.515.472.202	677.515.472.202				
416	Kab. Ngada	396.391.802.000	396.391.802.000	25.739.208.000	15.539.311.818	32.777.956.000	32.777.956.000	24.317.305.000	24.317.305.000	3.200.000.000	3.200.000.000	23.356.420.000	23.356.420.000	6.807.198.000	6.807.198.000	512.589.889.000	508.392.992.812				
417	Kab. Sikka	540.629.062.000	540.629.062.000	19.921.887.000	11.763.636.174	69.294.295.000	69.294.295.000	35.765.289.000	35.765.289.000	2.600.000.000	2.600.000.000	14.197.105.000	14.197.105.000	9.684.964.000	9.684.964.000	692.092.502.000	683.934.251.174				
418	Kab. Sumba Barat	307.509.967.000	307.509.967.000	18.524.430.000	10.669.756.806	46.122.598.000	46.122.598.000	28.616.010.000	28.616.010.000	2.200.000.000	2.200.000.000	13.237.562.000	13.237.562.000	6.082.922.000	6.082.922.000	472.293.489.000	474.438.815.806				
419	Kab. Sumba Timur	481.434.156.000	481.434.156.000	40.071.267.000	23.625.367.415	69.682.512.000	69.682.512.000	45.023.476.000	45.023.476.000	3.200.000.000	3.200.000.000	32.985.452.000	32.985.452.000	8.087.217.000	8.087.217.000	680.484.080.000	664.038.180.416				
420	Kab. Timor Tengah Selatan	611.573.842.000	611.573.842.000	27.033.300.702	10.033.857.000	59.087.595.000	59.087.595.000														

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant				DAU Specific Grant												DAU THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kekurangan		Bidang Pekerjaan Umum		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi				
				Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi					Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)				
467	Kab. Lanny Jaya	523.968.561.000	523.968.561.000	8.807.229.000	0	51.640.650.000	51.640.650.000	53.476.360.000	53.476.360.000	200.000.000	200.000.000	9.745.830.000	9.745.830.000	0	0	647.838.630.000	639.031.401.000				
468	Kab. Nduga	494.786.922.000	494.786.922.000	0	0	21.458.250.000	18.240.362.500	50.312.820.000	42.765.897.000	0	0	34.893.650.000	29.659.602.000	0	0	601.452.642.000	585.452.783.500				
469	Kab. Dogiyai	379.109.176.000	379.109.176.000	13.162.095.000	1.926.381.054	55.070.728.000	55.070.728.000	36.395.786.000	36.395.786.000	0	0	11.132.498.000	11.132.498.000	0	0	494.870.283.000	483.634.471.054				
470	Kab. Puncak	669.980.981.000	669.980.981.000	8.222.247.000	1.907.945.355	13.089.724.000	13.089.724.000	72.854.624.000	72.854.624.000	0	0	25.322.661.000	25.322.661.000	0	0	769.000.237.000	762.685.935.355				
471	Kab. Intan Jaya	560.884.638.000	560.884.638.000	8.287.245.000	1.323.302.701	18.271.122.000	18.271.122.000	58.682.267.000	58.682.267.000	0	0	27.665.853.000	27.665.853.000	0	0	673.731.125.000	666.787.182.701				
472	Kab. Deiyai	370.330.105.000	370.330.105.000	4.874.850.000	1.838.815.898	63.812.447.000	63.812.447.000	33.386.007.000	33.386.007.000	0	0	16.961.750.000	16.961.750.000	0	0	489.365.159.000	486.328.924.898				
473	Provinsi Maluku Utara	1.052.171.585.000	1.052.171.585.000	67.049.048.000	28.725.311.889	103.022.690.000	103.022.690.000	19.875.707.000	19.875.707.000	0	0	83.248.457.000	81.656.401.603	0	0	1.325.367.487.000	1.285.451.695.592				
474	Kab. Halmahera Tengah	339.475.247.000	339.475.247.000	19.694.394.000	8.053.301.076	33.112.092.000	33.112.092.000	33.277.816.000	33.277.816.000	0	0	22.004.519.000	21.932.590.000	0	0	447.564.068.000	435.850.956.076				
475	Kota Ternate	535.771.440.000	535.771.440.000	12.278.622.000	12.278.815.158	47.267.429.000	47.267.429.000	24.518.304.000	24.518.304.000	15.600.000.000	15.600.000.000	3.032.095.000	3.032.095.000	0	0	638.473.990.000	638.468.083.158				
476	Kab. Halmahera Barat	392.685.823.000	392.685.823.000	32.466.501.000	13.718.688.172	43.935.818.000	43.935.809.000	35.729.875.000	35.729.875.000	0	0	15.728.177.000	15.728.177.000	0	0	520.546.198.000	501.798.376.172				
477	Kab. Halmahera Timur	349.379.155.000	349.379.155.000	22.521.807.000	7.082.968.377	41.396.914.000	41.396.914.000	22.731.000.000	22.731.000.000	0	0	44.854.429.000	44.854.429.000	0	0	480.893.305.000	465.446.466.377				
478	Kab. Halmahera Selatan	555.667.603.000	555.667.603.000	43.126.173.000	27.983.156.616	82.544.489.000	82.544.489.000	51.135.566.000	51.135.566.000	0	0	30.247.934.000	30.247.934.000	4.501.105.000	4.501.105.000	767.222.870.000	752.079.853.616				
479	Kab. Halmahera Utara	383.019.465.000	383.019.465.000	33.278.976.000	11.707.835.204	53.257.511.000	53.257.511.000	27.193.505.000	27.193.505.000	0	0	6.357.504.000	6.357.504.000	0	0	503.106.961.000	481.539.529.204				
480	Kab. Kepulauan Sula	375.456.921.000	375.456.921.000	6.499.800.000	3.552.528.720	48.329.625.000	48.329.625.000	34.335.875.000	34.335.875.000	0	0	22.932.124.000	22.932.124.000	0	0	487.554.345.000	484.607.073.720				
481	Kota Tidore Kepulauan	438.835.266.000	438.835.266.000	13.779.576.000	3.944.779.566	47.382.338.000	47.382.338.000	30.185.587.000	30.185.587.000	8.000.000.000	8.000.000.000	9.839.878.000	9.839.878.000	4.674.848.000	4.674.848.000	552.697.493.000	546.262.696.566				
482	Kab. Pulau Morotai	300.474.002.000	300.474.002.000	25.934.202.000	10.477.435.300	41.387.315.000	41.387.315.000	28.172.011.000	28.172.011.000	0	0	10.134.610.000	10.134.610.000	0	0	406.102.140.000	399.645.378.300				
483	Kab. Pulau Taliabu	257.074.776.000	257.074.776.000	8.157.249.000	5.186.927.637	51.617.859.000	51.617.859.000	21.761.765.000	21.761.765.000	0	0	24.934.301.000	24.934.301.000	0	0	363.545.950.000	360.575.628.637				
484	Provinsi Banten	984.894.795.000	984.894.795.000	14.444.000.000	14.443.947.968	134.395.612.000	134.395.612.000	12.514.078.000	12.514.078.000	0	0	0	0	0	0	1.146.248.485.000	1.146.248.485.000				
485	Kab. Lebak	811.615.764.000	811.615.764.000	32.239.008.000	21.860.158.908	172.170.323.000	172.170.323.000	92.534.173.000	92.534.173.000	1.000.000.000	1.000.000.000	22.647.949.000	22.647.949.000	36.486.103.000	36.486.103.000	1.168.693.320.000	1.158.314.470.908				
486	Kab. Pandeglang	882.440.889.000	882.440.889.000	20.279.376.000	10.574.250.000	190.574.250.000	190.574.250.000	101.191.226.000	101.191.226.000	2.600.000.000	2.600.000.000	22.790.513.000	22.790.513.000	0	0	1.219.876.254.000	1.219.876.254.000				
487	Kab. Serang	818.766.262.000	818.766.262.000	17.029.476.000	17.029.475.999	187.286.515.000	187.286.515.000	95.513.917.000	95.513.917.000	0	0	4.903.076.000	4.903.076.000	2.197.156.000	2.197.156.000	1.125.696.402.000	1.125.696.401.999				
488	Kab. Tangerang	1.043.097.420.000	1.043.097.420.000	19.304.406.000	15.468.397.647	239.938.915.000	239.938.915.000	90.323.651.000	90.323.651.000	5.600.000.000	5.600.000.000	5.257.546.000	5.257.546.000	0	0	1.403.521.938.000	1.399.685.928.647				
489	Kota Cilegon	523.115.816.000	523.115.816.000	8.007.229.000	3.842.647.210	39.736.441.000	39.736.441.000	50.705.618.000	50.705.618.000	8.600.000.000	8.600.000.000	6.625.501.000	6.625.501.000	0	0	637.590.805.000	632.625.423.210				
490	Kota Tangerang	839.008.827.000	839.008.827.000	53.525.863.000	51.784.044.763	36.349.942.000	36.349.942.000	42.758.660.000	42.758.660.000	20.800.000.000	20.800.000.000	1.702.532.000	1.702.532.000	26.956.744.000	26.956.744.000	1.020.600.558.000	1.018.858.749.763				
491	Kota Serang	483.807.022.000	483.807.022.000	11.277.153.000	11.277.153.000	91.111.844.000	91.111.844.000	40.654.127.000	40.654.127.000	13.400.000.000	13.400.000.000	2.232.481.000	2.232.481.000	0	0	652.262.627.000	652.262.627.000				
492	Kota Tangerang Selatan	587.055.181.000	587.055.181.000	43.813.658.000	23.045.407.841	26.868.857.000	26.868.857.000	13.467.415.000	13.467.415.000	10.800.000.000	10.800.000.000	2.132.212.000	2.132.212.000	0	0	683.937.323.000	683.389.072.841				
493	Provinsi Bangka Belitung	885.754.534.000	885.754.534.000	16.810.600.000	13.730.778.710	81.667.402.000	81.667.402.000	9.135.649.000	9.135.649.000	0	0	18.401.573.000	18.401.573.000	0	0	1.011.569.759.000	1.008.689.936.710				
494	Kab. Bangka	445.423.674.000	445.423.674.000	35.326.413.000	34.187.846.272	34.958.170.000	34.958.170.000	18.814.478.000	18.814.478.000	3.800.000.000	3.800.000.000	10.305.773.000	10.305.773.000	312.680.000	312.680.000	548.941.188.000	547.802.621.272				
495	Kab. Belitung	432.330.119.000	432.330.119.000	5.622.327.000	5.566.303.051	14.942.282.000	14.942.282.000	1.403.066.000	1.403.066.000	1.400.000.000	1.400.000.000	14.103.730.000	14.103.730.000	0	0	485.449.524.000	485.393.500.051				
496	Kota Pangkal Pinang	417.400.301.000	417.400.301.000	8.352.243.000	7.991.374.277	15.339.568.000	15.339.568.000	8.317.148.000	8.317.148.000	8.400.000.000	8.400.000.000	3.542.570.000	3.542.570.000	0	0	461.351.830.000	460.990.961.277				
497	Kab. Bangka Selatan	404.777.836.000	404.777.836.000	19.369.404.000	16.234.353.015	15.713.302.000	15.713.302.000	23.906.366.000	23.906.366.000	600.000.000	600.000.000	12.013.465.000	12.013.465.000	0	0	476.380.373.000	473.245.322.015				
498	Kab. Bangka Tengah	389.348.952.000	389.348.952.000	12.382.119.000	7.988.091.272	31.766.896.000	31.766.896.000	16.064.379.000	16.064.379.000	1.400.000.000	1.400.000.000	6.727.758.000	6.727.758.000	0	0	457.690.104.000	453.296.076.272				
499	Kab. Bangka Barat	382.100.311.000	382.100.311.000	26.101.395.000	16.758.040.163	30.980.788.000	30.980.788.000	15.097.914.000	15.097.914.000	1.200.000.000	1.200.000.000	12.208.177.000	12.208.177.000	0	0	477.599.965.000	469.444.236.166				
500	Kab. Belitung Timur	400.207.316.000	400.207.316.000	7.864.758.000	6.548.283.195	13.883.052.000	13.883.052.000	7.620.618.000	7.620.618.000	0	0	20.785.612.000	20.785.612.000	0	0	450.361.356.000	449.044.881.195				
501	Provinsi Gorontalo	834.487.292.000	834.487.292.000	51.984.000	51.984.000	126.049.532.000	126.049.532.000	21.570.965.000	21.570.965.000	0	0	24.138.468.000	24.138.468.000	15.613.631.000	15.613.631.000	1.022.379.872.000	1.022.379.872.000				
502	Kab. Boalemo	370.664.564.000	370.664.564																		

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAU Block Grant		DAU Specific Grant										DAU THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru		Pagu	Realisasi
				Formasi PPPK		Bidang Pendidikan		Bidang Kesehatan		Kelurahan		Bidang Pekerjaan Umum		ASN Daerah			
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(17)=(5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)	(18)=(6)+(8)+(10)+(12)+(14)+(16)
545	Kota Tarakan	417.667.106.000	417.667.106.000	24.796.737.000	24.796.737.000	14.836.688.000	14.836.688.000	9.916.402.000	9.916.402.000	4.000.000.000	4.000.000.000	3.237.467.000	3.237.467.000	574.613.000	574.613.000	475.029.013.000	475.029.013.000
546	Kab. Tana Tidung	349.264.548.000	349.264.548.000	8.417.241.000	5.756.624.922	25.678.444.000	25.678.444.000	13.513.380.000	13.513.380.000	0	0	41.970.503.000	31.477.876.000	0	0	438.844.116.000	425.690.872.922
Jumlah		343.527.595.289.000	343.527.595.289.000	15.676.719.569.000	11.682.211.062.523	37.470.690.538.000	37.276.919.147.598	17.141.720.743.000	17.112.772.095.184	1.899.600.000.000	1.649.654.425.851	12.182.977.404.000	12.083.638.950.842	5.877.820.308.000	5.877.820.308.000	433.577.123.851.000	429.210.611.278.998

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
1	Provinsi Aceh	368.055.557.000	347.597.422.745	855.594.505.000	832.415.031.572	-	-	1.223.650.062.000	1.180.012.454.317
2	Kab. Aceh Barat	70.849.404.000	70.117.977.876	106.711.537.000	104.540.067.202	16.352.190.000	16.352.190.000	193.913.131.000	191.010.235.078
3	Kab. Aceh Besar	128.069.712.000	123.216.956.959	177.084.788.000	174.092.631.166	-	-	305.154.500.000	297.309.588.125
4	Kab. Aceh Selatan	121.104.288.000	118.977.697.409	155.852.028.000	153.332.166.503	-	-	276.956.316.000	272.309.863.912
5	Kab. Aceh Singkil	48.096.873.000	47.392.124.545	88.586.935.000	87.836.454.401	-	-	136.683.808.000	135.228.578.946
6	Kab. Aceh Tengah	105.470.243.000	103.591.559.567	122.977.587.000	120.104.233.022	16.166.612.000	16.166.612.000	244.614.442.000	239.862.404.589
7	Kab. Aceh Tenggara	53.680.707.000	53.181.665.052	127.549.020.000	127.377.543.513	-	-	181.229.727.000	180.559.208.565
8	Kab. Aceh Timur	71.899.713.000	70.773.532.264	208.823.550.000	205.645.413.122	300.000.000	-	281.023.263.000	276.418.945.386
9	Kab. Aceh Utara	136.447.606.000	135.183.439.505	344.247.859.000	339.870.696.588	600.000.000	588.000.000	481.295.465.000	475.642.136.093
10	Kab. Bireuen	125.168.502.000	107.615.692.097	212.606.207.000	206.577.244.475	-	-	337.774.709.000	314.192.936.572
11	Kab. Pidie	109.403.737.000	107.353.295.284	184.799.180.000	180.159.831.930	600.000.000	252.000.000	294.802.917.000	287.765.127.214
12	Kab. Simeulue	35.769.787.000	33.361.821.765	65.325.210.000	63.328.919.726	-	-	101.094.997.000	96.690.741.491
13	Kota Banda Aceh	74.830.377.000	71.554.314.294	111.525.664.000	110.812.112.759	-	-	186.356.041.000	182.366.427.053
14	Kota Sabang	50.209.791.000	48.297.861.863	34.520.194.000	33.800.493.853	750.000.000	390.000.000	85.479.985.000	82.488.355.716
15	Kota Langsa	66.186.608.000	65.973.034.603	71.752.077.000	71.175.374.587	-	-	137.938.685.000	137.148.409.190
16	Kota Lhokseumawe	20.409.944.000	20.389.645.000	80.606.093.000	79.102.715.904	-	-	101.016.037.000	99.492.360.904
17	Kab. Gayo Lues	42.201.981.000	41.979.116.560	60.348.472.000	60.296.802.100	-	-	102.550.453.000	102.275.918.660
18	Kab. Aceh Barat Daya	43.705.881.000	43.118.825.916	77.778.168.000	76.379.767.924	-	-	121.484.049.000	119.498.593.840
19	Kab. Aceh Jaya	57.176.837.000	56.684.297.285	67.259.113.000	65.008.882.110	14.527.058.000	14.527.058.000	138.963.008.000	136.220.237.395
20	Kab. Nagan Raya	58.426.601.000	57.488.989.689	91.591.846.000	90.065.030.987	-	-	150.018.447.000	147.554.020.676
21	Kab. Aceh Tamiang	134.862.335.000	132.708.209.809	132.285.246.000	128.520.411.744	17.861.400.000	17.861.400.000	285.008.981.000	279.090.021.553
22	Kab. Bener Meriah	86.357.740.000	85.018.400.912	97.301.559.000	93.073.368.934	24.781.234.000	24.781.234.000	208.440.533.000	202.873.003.846
23	Kab. Pidie Jaya	53.100.089.000	52.497.099.749	76.351.893.000	75.166.534.141	-	-	129.451.982.000	127.663.633.890
24	Kota Subulussalam	53.349.664.000	52.831.692.326	57.483.314.000	56.339.793.356	-	-	110.832.978.000	109.171.485.682
25	Provinsi Sumatera Utara	408.289.492.000	386.492.978.070	1.843.684.548.000	1.792.672.586.084	-	-	2.251.974.040.000	2.179.165.564.154
26	Kab. Asahan	77.664.046.000	76.985.618.889	235.828.790.000	231.392.704.299	35.393.104.000	35.393.104.000	348.885.940.000	343.771.427.188
27	Kab. Dairi	83.783.162.000	64.141.894.493	169.174.913.000	165.667.411.148	-	-	252.958.075.000	229.809.305.641
28	Kab. Deli Serdang	109.540.357.000	103.164.736.543	604.183.898.000	590.150.076.339	-	-	713.724.255.000	693.314.812.882
29	Kab. Karo	107.748.631.000	101.278.750.464	168.643.306.000	164.332.197.605	-	-	276.391.937.000	265.610.948.069
30	Kab. Labuhanbatu	97.016.159.000	94.082.696.267	169.454.377.000	167.223.807.120	-	-	266.470.536.000	261.306.503.387
31	Kab. Langkat	65.946.735.000	61.525.428.029	390.011.793.000	373.919.333.664	-	-	455.958.528.000	435.444.761.693
32	Kab. Mandailing Natal	163.948.090.000	149.977.325.781	276.682.995.000	274.705.967.591	-	-	440.631.085.000	424.683.293.372
33	Kab. Nias	103.802.130.000	102.451.431.031	125.834.123.000	122.010.506.350	-	-	229.636.253.000	224.461.937.381
34	Kab. Simalungun	216.876.342.000	204.755.773.878	362.537.750.000	344.672.387.437	-	-	579.414.092.000	549.428.161.315
35	Kab. Tapanuli Selatan	107.598.937.000	103.143.810.687	144.309.540.000	142.652.922.138	-	-	251.908.477.000	245.796.732.825

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
36	Kab. Tapanuli Tengah	100.258.444.000	94.650.951.251	165.140.119.000	163.284.578.108	-	-	265.398.563.000	257.935.529.359
37	Kab. Tapanuli Utara	97.318.689.000	92.466.086.003	191.947.180.000	191.451.590.796	-	-	289.265.869.000	283.917.676.799
38	Kab. Toba Samosir	212.588.756.000	197.910.937.628	132.591.892.000	128.029.365.310	-	-	345.180.648.000	325.940.302.938
39	Kota Binjai	31.188.777.000	30.333.114.358	121.601.946.000	119.594.608.783	-	-	152.790.723.000	149.927.723.141
40	Kota Medan	32.700.499.000	30.396.472.723	543.079.305.000	519.948.710.927	3.280.000.000	1.304.000.000	579.059.804.000	551.649.183.650
41	Kota Pematang Siantar	18.160.256.000	17.273.019.319	117.046.815.000	111.479.341.037	-	-	135.207.071.000	128.752.360.356
42	Kota Sibolga	42.856.064.000	39.617.484.382	49.624.679.000	48.660.363.562	-	-	92.480.743.000	88.277.847.944
43	Kota Tanjung Balai	36.658.011.000	34.863.740.727	63.466.223.000	60.747.810.441	-	-	100.124.234.000	95.611.551.168
44	Kota Tebing Tinggi	23.425.050.000	19.985.128.958	74.087.929.000	71.301.108.853	-	-	97.512.979.000	91.286.237.811
45	Kota Padang Sidempuan	45.480.678.000	43.128.045.094	96.318.519.000	94.450.740.869	-	-	141.799.197.000	137.578.785.963
46	Kab. Pakpak Bharat	91.400.155.000	88.313.517.493	44.944.134.000	43.925.895.391	-	-	136.344.289.000	132.239.412.884
47	Kab. Nias Selatan	142.406.720.000	141.097.087.052	211.016.291.000	209.820.858.039	-	-	353.423.011.000	350.917.945.091
48	Kab. Humbang Hasundutan	82.871.854.000	77.128.265.208	132.115.215.000	131.185.500.056	-	-	214.987.069.000	208.313.765.264
49	Kab. Serdang Bedagai	124.659.400.000	121.669.410.229	224.694.560.000	223.050.076.834	16.649.533.000	16.649.533.000	366.003.493.000	361.369.020.063
50	Kab. Samosir	116.808.023.000	109.114.459.606	99.701.263.000	96.176.367.459	-	-	216.509.286.000	205.290.827.065
51	Kab. Batu Bara	89.435.039.000	85.717.079.964	163.309.464.000	161.709.933.292	-	-	252.744.503.000	247.427.013.256
52	Kab. Padang Lawas	73.218.701.000	72.270.470.800	136.489.395.000	135.419.673.395	13.207.680.000	13.207.680.000	222.915.776.000	220.897.824.195
53	Kab. Padang Lawas Utara	76.500.053.000	69.577.005.027	135.119.056.000	134.212.641.474	-	-	211.619.109.000	203.789.646.501
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	51.830.803.000	50.365.770.909	113.145.780.000	104.943.622.539	-	-	164.976.583.000	155.309.393.448
55	Kab. Labuhanbatu Utara	68.064.858.000	65.664.168.805	154.354.936.000	148.204.807.573	-	-	222.419.794.000	213.868.976.378
56	Kab. Nias Utara	156.578.655.000	155.836.310.041	122.916.313.000	121.121.438.545	24.532.410.000	24.532.410.000	304.027.378.000	301.490.158.586
57	Kab. Nias Barat	149.211.975.000	135.483.673.956	146.975.924.000	146.107.222.683	-	-	296.187.899.000	281.590.896.639
58	Kota Gunungsitoli	39.570.476.000	38.994.929.687	82.534.205.000	81.059.171.322	-	-	122.104.681.000	120.054.101.009
59	Provinsi Sumatera Barat	253.614.707.000	217.864.557.320	941.365.979.000	923.428.944.561	-	-	1.194.980.686.000	1.141.293.501.881
60	Kab. Lima Puluh Kota	43.708.799.000	43.139.289.223	215.452.105.000	209.937.722.674	-	-	259.160.904.000	253.077.011.897
61	Kab. Agam	61.526.687.000	58.347.668.989	247.635.191.000	241.778.462.535	750.000.000	738.000.000	309.911.878.000	300.864.131.524
62	Kab. Kepulauan Mentawai	71.705.967.000	60.558.056.051	91.192.677.000	86.784.724.912	-	-	162.898.644.000	147.342.780.963
63	Kab. Padang Pariaman	57.490.986.000	53.623.510.594	232.809.478.000	223.979.068.207	-	-	290.300.464.000	277.602.578.801
64	Kab. Pasaman	20.817.599.000	18.781.116.832	162.503.485.000	158.433.393.997	8.583.193.000	8.583.193.000	191.904.277.000	185.797.703.829
65	Kab. Pesisir Selatan	80.109.482.000	77.657.368.138	272.336.997.000	256.408.605.205	9.339.123.000	9.260.695.297	361.785.602.000	343.326.668.640
66	Kab. Sijunjung	30.682.442.000	28.654.051.202	136.688.525.000	134.119.587.900	-	-	167.370.967.000	162.773.639.102
67	Kab. Solok	107.593.239.000	96.229.065.307	219.931.451.000	213.911.261.869	-	-	327.524.690.000	310.140.327.176
68	Kab. Tanah Datar	87.081.346.000	83.154.552.139	184.197.511.000	179.800.977.467	750.000.000	600.000.000	272.028.857.000	263.555.529.606
69	Kota Bukit Tinggi	33.259.729.000	31.503.797.544	68.045.627.000	65.858.310.591	-	-	101.305.356.000	97.362.108.135
70	Kota Padang Panjang	20.948.997.000	15.722.870.984	38.812.198.000	37.626.533.897	-	-	59.761.195.000	53.349.404.881
71	Kota Padang	23.245.625.000	19.407.913.008	348.253.602.000	344.856.402.646	3.732.000.000	3.732.000.000	375.231.227.000	367.996.315.654
72	Kota Payakumbuh	12.839.606.000	11.649.788.700	83.439.571.000	81.164.882.661	1.536.000.000	1.536.000.000	97.815.177.000	94.350.671.361

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
73	Kota Sawahlunto	35.173.088.000	33.458.550.676	49.484.090.000	47.949.696.990	-	-	84.657.178.000	81.408.247.666
74	Kota Solok	20.780.770.000	19.799.744.550	46.552.278.000	44.915.679.233	-	-	67.333.048.000	64.715.423.783
75	Kota Pariaman	40.767.944.000	34.147.923.493	62.068.558.000	60.968.784.329	2.424.000.000	-	105.260.502.000	95.116.707.822
76	Kab. Pasaman Barat	48.146.114.000	43.857.728.354	190.402.226.000	182.884.924.173	-	-	238.548.340.000	226.742.652.527
77	Kab. Dharmasraya	36.038.894.000	34.621.165.717	135.759.022.000	132.837.457.681	-	-	171.797.916.000	167.458.623.398
78	Kab. Solok Selatan	41.016.907.000	39.695.274.901	105.856.929.000	102.709.678.980	-	-	146.873.836.000	142.404.953.881
79	Provinsi Riau	255.616.230.000	235.324.752.210	847.544.001.000	816.965.899.649	-	-	1.103.160.231.000	1.052.290.651.859
80	Kab. Bengkalis	42.274.072.000	41.514.492.633	262.003.715.000	261.241.885.009	-	-	304.277.787.000	302.756.377.642
81	Kab. Indragiri Hilir	56.957.661.000	40.813.984.596	293.418.902.000	277.332.073.136	-	-	350.376.563.000	318.146.057.732
82	Kab. Indragiri Hulu	66.934.793.000	64.767.764.271	190.673.813.000	185.653.739.799	-	-	257.608.606.000	250.421.504.070
83	Kab. Kampar	111.743.262.000	106.546.380.763	375.073.928.000	367.270.442.347	2.238.000.000	2.238.000.000	489.055.190.000	476.054.823.110
84	Kab. Kuantan Singingi	27.022.916.000	24.914.813.590	164.248.118.000	158.866.427.339	-	-	191.271.034.000	183.781.240.929
85	Kab. Pelalawan	71.555.876.000	57.615.499.661	190.444.718.000	184.587.296.414	-	-	262.000.594.000	242.202.796.075
86	Kab. Rokan Hilir	77.855.209.000	56.796.838.329	267.647.566.000	261.947.929.631	-	-	345.502.775.000	318.744.767.960
87	Kab. Rokan Hulu	56.692.312.000	53.692.777.429	247.181.503.000	241.273.979.037	-	-	303.873.815.000	294.966.756.466
88	Kab. Siak	50.481.245.000	47.948.341.550	218.349.035.000	215.569.354.351	-	-	268.830.280.000	263.517.695.901
89	Kota Dumai	39.358.553.000	38.187.983.525	138.181.678.000	136.098.235.941	-	-	177.540.231.000	174.286.219.466
90	Kota Pekanbaru	81.999.381.000	78.876.438.132	325.083.859.000	323.160.718.378	800.000.000	-	407.883.240.000	402.037.156.510
91	Kab. Kepulauan Meranti	150.463.081.000	143.879.146.253	113.341.314.000	112.362.776.645	-	-	263.804.395.000	256.241.922.898
92	Provinsi Jambi	235.795.381.000	234.122.462.842	435.018.901.000	434.141.583.759	23.406.257.000	20.760.997.313	694.220.539.000	689.025.043.914
93	Kab. Batanghari	71.281.465.000	69.320.124.627	138.444.994.000	134.148.794.763	750.000.000	-	210.476.459.000	203.468.919.390
94	Kab. Bungo	54.403.562.000	52.277.917.633	133.666.970.000	128.991.310.563	28.996.977.000	28.867.450.516	217.067.509.000	210.136.678.712
95	Kab. Kerinci	37.418.737.000	35.000.808.738	137.027.014.000	134.969.003.182	-	-	174.445.751.000	169.969.811.920
96	Kab. Merangin	88.275.705.000	86.635.359.106	175.757.075.000	170.594.186.001	-	-	264.032.780.000	257.229.545.107
97	Kab. Muaro Jambi	106.644.640.000	103.749.735.679	174.805.847.000	169.954.815.602	-	-	281.450.487.000	273.704.551.281
98	Kab. Sarolangun	39.952.011.000	39.180.407.447	125.015.240.000	122.530.840.284	-	-	164.967.251.000	161.711.247.731
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	72.778.615.000	69.578.191.171	139.431.775.000	136.564.423.606	-	-	212.210.390.000	206.142.614.777
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	99.222.943.000	96.245.559.678	113.893.282.000	110.822.422.659	540.000.000	534.000.000	213.656.225.000	207.601.982.337
101	Kab. Tebo	48.522.354.000	48.167.477.573	139.193.297.000	136.155.648.743	24.533.453.000	24.533.453.000	212.249.104.000	208.856.579.316
102	Kota Jambi	47.923.695.000	46.839.961.290	190.668.137.000	187.767.067.379	1.488.000.000	1.458.000.000	240.079.832.000	236.065.028.669
103	Kota Sungai Penuh	30.011.433.000	29.632.981.639	60.854.929.000	59.376.747.216	-	-	90.866.362.000	89.009.728.855
104	Provinsi Sumatera Selatan	242.024.199.000	236.102.516.086	964.499.778.000	954.913.672.263	-	-	1.206.523.977.000	1.191.016.188.349
105	Kab. Lahat	26.790.247.000	25.413.014.217	191.105.440.000	189.752.262.965	10.355.475.000	10.355.475.000	228.251.162.000	225.520.752.182
106	Kab. Musi Banyuasin	145.016.141.000	140.633.056.225	292.015.434.000	286.282.454.918	7.507.176.000	7.507.176.000	444.538.751.000	434.422.687.143
107	Kab. Musi Rawas	76.341.057.000	75.893.878.396	172.732.551.000	170.144.440.038	13.242.400.000	13.242.400.000	262.316.008.000	259.280.718.434
108	Kab. Muara Enim	66.526.502.000	62.807.794.258	245.641.854.000	243.246.667.225	-	-	312.168.356.000	306.054.461.483
109	Kab. Ogan Komering Ilir	75.815.973.000	74.258.633.500	334.934.769.000	326.934.616.463	-	-	410.750.742.000	401.193.249.963

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
110	Kab. Ogan Komering Ulu	31.348.527.000	30.864.718.321	155.518.712.000	152.236.097.964	600.000.000	-	187.467.239.000	183.100.816.285
111	Kota Palembang	83.185.195.000	82.310.765.943	464.539.042.000	460.119.352.220	5.590.000.000	5.590.000.000	553.314.237.000	548.020.118.163
112	Kota Prabumulih	20.565.477.000	19.417.261.151	85.884.289.000	82.570.232.744	-	-	106.449.766.000	101.987.493.895
113	Kota Pagar Alam	24.712.586.000	23.916.324.605	64.191.076.000	62.096.268.858	1.128.000.000	636.000.000	90.031.662.000	86.648.593.463
114	Kota Lubuk Linggau	25.499.539.000	24.603.843.506	95.595.741.000	93.350.393.233	-	-	121.095.280.000	117.954.236.739
115	Kab. Banyuasin	159.591.473.000	157.032.179.677	354.616.072.000	352.696.880.785	22.733.576.000	22.733.576.000	536.941.121.000	532.462.636.462
116	Kab. Ogan Ilir	88.954.321.000	87.435.424.491	198.202.092.000	193.611.169.665	1.128.000.000	900.000.000	288.284.413.000	281.946.594.156
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	75.759.656.000	75.032.328.775	241.485.166.000	236.974.094.394	28.541.351.000	28.541.351.000	345.786.173.000	340.547.774.169
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	98.836.634.000	97.118.843.802	140.044.797.000	138.777.735.120	-	-	238.881.431.000	235.896.578.922
119	Kab. Empat Lawang	63.622.855.000	63.272.492.767	91.670.198.000	89.734.746.482	13.279.634.000	13.279.634.000	168.572.687.000	166.286.873.249
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	22.227.091.000	22.011.908.389	82.854.801.000	81.352.831.154	-	-	105.081.892.000	103.364.739.543
121	Kab. Musi Rawas Utara	103.256.298.000	102.646.926.502	71.310.746.000	70.137.487.605	17.371.601.000	17.371.601.000	191.938.645.000	190.156.015.107
122	Provinsi Bengkulu	265.373.635.000	262.114.688.943	312.920.010.000	312.643.829.262	34.912.473.000	34.912.473.000	613.206.118.000	609.670.991.205
123	Kab. Bengkulu Selatan	89.040.301.000	88.263.268.909	109.892.554.000	107.798.239.235	-	-	198.932.855.000	196.061.508.144
124	Kab. Bengkulu Utara	81.304.178.000	77.517.550.573	166.200.625.000	158.378.602.307	600.000.000	600.000.000	248.104.803.000	236.496.152.880
125	Kab. Rejang Lebong	68.308.408.000	65.947.186.065	134.728.297.000	124.471.435.800	25.516.275.000	25.498.275.000	228.552.980.000	215.916.896.865
126	Kota Bengkulu	76.172.405.000	74.157.989.389	161.722.277.000	155.382.234.638	600.000.000	396.000.000	238.494.682.000	229.936.224.027
127	Kab. Kaur	125.142.224.000	118.090.890.487	90.448.122.000	88.853.250.544	600.000.000	552.000.000	216.190.346.000	207.496.141.031
128	Kab. Seluma	100.915.942.000	98.722.658.418	117.286.729.000	116.444.601.071	-	-	218.202.671.000	215.167.259.489
129	Kab. Mukomuko	106.463.612.000	103.240.561.722	104.494.141.000	97.217.829.197	-	-	210.957.753.000	200.458.390.919
130	Kab. Lebong	81.981.964.000	79.379.997.755	65.824.774.000	63.643.915.538	-	-	147.806.738.000	143.023.913.293
131	Kab. Kepahiang	58.135.325.000	57.555.414.266	80.281.780.000	77.750.675.585	28.640.111.000	28.640.111.000	167.057.216.000	163.946.200.851
132	Kab. Bengkulu Tengah	36.397.194.000	35.880.026.336	86.847.454.000	83.958.683.637	-	-	123.244.648.000	119.838.709.973
133	Provinsi Lampung	267.357.679.000	251.303.028.753	887.564.330.000	887.102.638.450	-	-	1.154.922.009.000	1.138.405.667.203
134	Kab. Lampung Barat	121.519.087.000	119.832.295.786	139.681.716.000	139.370.729.918	-	-	261.200.803.000	259.203.025.704
135	Kab. Lampung Selatan	153.331.432.000	151.055.180.896	340.988.524.000	339.681.555.250	-	-	494.319.956.000	490.736.736.146
136	Kab. Lampung Tengah	74.347.449.000	72.194.042.244	455.067.909.000	437.945.605.333	1.866.000.000	1.824.000.000	531.281.358.000	511.963.647.577
137	Kab. Lampung Utara	32.737.197.000	30.275.504.041	238.448.982.000	230.089.328.562	-	-	271.186.179.000	260.364.832.603
138	Kab. Lampung Timur	115.686.990.000	112.366.030.326	355.041.437.000	338.524.538.758	-	-	470.728.427.000	450.890.569.084
139	Kab. Tanggamus	85.437.972.000	81.992.612.094	251.168.447.000	249.640.261.827	-	-	336.606.419.000	331.632.873.921
140	Kab. Tulang Bawang	56.152.153.000	54.741.863.704	173.900.996.000	171.924.190.550	-	-	230.053.149.000	226.666.054.254
141	Kab. Way Kanan	98.546.149.000	98.157.465.494	209.036.583.000	206.097.311.605	-	-	307.582.732.000	304.254.777.099
142	Kota Bandar Lampung	53.672.071.000	48.432.906.052	321.534.308.000	317.665.602.280	-	-	375.206.379.000	366.098.508.332
143	Kota Metro	28.828.654.000	27.260.372.197	89.879.131.000	88.428.708.970	-	-	118.707.785.000	115.689.081.167
144	Kab. Pesawaran	72.474.480.000	71.800.132.162	175.566.262.000	174.756.412.212	-	-	248.040.742.000	246.556.544.374
145	Kab. Pringsewu	36.183.111.000	35.204.268.675	175.176.639.000	172.558.601.746	-	-	211.359.750.000	207.762.870.421
146	Kab. Mesuji	188.503.511.000	153.827.159.036	101.606.585.000	98.829.928.442	-	-	290.110.096.000	252.657.087.478

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
147	Kab. Tulang Bawang Barat	44.016.548.000	43.599.698.570	124.461.685.000	120.248.293.656	-	-	168.478.233.000	163.847.992.226
148	Kab. Pesisir Barat	24.788.550.000	24.015.725.107	86.387.000.000	84.841.704.002	-	-	111.175.550.000	108.857.429.109
149	Provinsi DKI Jakarta	-	-	3.269.609.005.000	3.189.704.366.225	690.727.000.000	576.240.722.024	3.960.336.005.000	3.765.945.088.249
150	Provinsi Jawa Barat	500.743.038.000	486.211.515.292	4.635.127.413.000	4.614.436.779.771	-	-	5.135.870.451.000	5.100.648.295.063
151	Kab. Bandung	256.302.314.000	243.201.633.493	1.000.546.111.000	972.430.562.950	10.293.207.000	10.293.207.000	1.267.141.632.000	1.225.925.403.443
152	Kab. Bekasi	77.386.323.000	73.997.163.918	831.906.828.000	816.156.938.691	-	-	909.293.151.000	890.154.102.609
153	Kab. Bogor	91.436.067.000	88.111.415.414	1.519.953.030.000	1.480.711.135.100	-	-	1.611.389.097.000	1.568.822.550.514
154	Kab. Ciamis	133.777.620.000	132.291.068.568	420.071.006.000	405.030.048.655	-	-	553.848.626.000	537.321.117.223
155	Kab. Cianjur	157.432.558.000	153.020.883.218	810.605.361.000	807.654.530.219	-	-	968.037.919.000	960.675.413.437
156	Kab. Cirebon	184.158.667.000	176.436.126.862	727.840.811.000	705.867.496.588	-	-	911.999.478.000	882.303.623.450
157	Kab. Garut	143.254.457.000	137.349.116.423	944.732.733.000	930.433.698.253	18.484.339.000	17.099.210.750	1.106.471.529.000	1.084.882.025.426
158	Kab. Indramayu	104.905.420.000	101.051.736.804	538.582.537.000	517.314.596.898	-	-	643.487.957.000	618.366.333.702
159	Kab. Karawang	139.961.936.000	130.921.880.175	700.570.306.000	676.210.763.497	5.610.000.000	5.610.000.000	846.142.242.000	812.742.643.672
160	Kab. Kuningan	141.871.141.000	141.138.380.294	502.322.322.000	482.844.723.440	-	-	644.193.463.000	623.983.103.734
161	Kab. Majalengka	175.224.990.000	168.996.421.083	464.792.710.000	451.732.829.738	-	-	640.017.700.000	620.729.250.821
162	Kab. Purwakarta	114.822.710.000	109.123.075.941	341.038.656.000	340.462.031.556	1.404.000.000	1.338.000.000	457.265.366.000	450.923.107.497
163	Kab. Subang	152.485.833.000	146.979.086.789	556.820.939.000	537.201.826.265	23.678.745.000	19.945.120.000	732.985.517.000	704.126.033.054
164	Kab. Sukabumi	197.486.303.000	183.357.387.337	742.156.543.000	714.332.026.368	-	-	939.642.846.000	897.689.413.705
165	Kab. Sumedang	172.522.056.000	165.994.499.374	471.276.665.000	458.909.110.001	4.881.561.000	4.658.979.735	648.680.282.000	629.562.589.110
166	Kab. Tasikmalaya	210.035.030.000	202.373.578.508	624.376.864.000	610.057.226.779	6.854.293.000	5.195.352.360	841.266.187.000	817.626.157.647
167	Kota Bandung	54.599.958.000	46.928.199.502	693.425.892.000	671.671.557.953	4.616.000.000	4.463.898.000	752.641.850.000	723.063.655.455
168	Kota Bekasi	46.953.117.000	37.622.389.727	624.276.121.000	619.134.928.658	-	-	671.229.238.000	656.757.318.385
169	Kota Bogor	48.097.310.000	44.829.645.150	333.241.785.000	329.085.258.450	-	-	381.339.095.000	373.914.903.600
170	Kota Cirebon	29.427.211.000	28.244.349.486	159.925.842.000	159.269.475.078	3.943.134.000	3.936.526.784	193.296.187.000	191.450.351.348
171	Kota Depok	30.411.531.000	29.719.164.218	463.853.914.000	450.219.769.448	3.216.000.000	1.962.000.000	497.481.445.000	481.900.933.666
172	Kota Sukabumi	34.308.949.000	31.119.020.494	132.425.491.000	130.801.462.467	-	-	166.734.440.000	161.920.482.961
173	Kota Tasikmalaya	43.753.986.000	42.322.375.329	255.697.437.000	245.210.177.960	-	-	299.451.423.000	287.532.553.289
174	Kota Cimahi	16.129.141.000	15.755.493.734	163.710.388.000	159.511.598.542	-	-	179.839.529.000	175.267.092.276
175	Kota Banjar	31.503.197.000	29.119.115.904	83.925.173.000	82.662.494.469	-	-	115.428.370.000	111.781.610.373
176	Kab. Bandung Barat	163.197.475.000	157.126.319.747	500.843.659.000	484.941.469.157	-	-	664.041.134.000	642.067.788.904
177	Kab. Pangandaran	64.756.443.000	63.473.106.623	148.061.392.000	147.416.903.335	-	-	212.817.835.000	210.890.009.958
178	Provinsi Jawa Tengah	484.598.612.000	473.940.472.839	3.497.725.899.000	3.478.191.296.352	-	-	3.982.324.511.000	3.952.131.769.191
179	Kab. Banjarnegara	104.544.641.000	92.247.909.045	351.323.705.000	339.206.605.613	14.345.780.000	12.377.889.625	470.214.126.000	443.832.404.283
180	Kab. Banyumas	167.651.863.000	159.502.943.840	593.119.477.000	573.245.228.506	13.815.394.000	13.411.593.892	774.586.734.000	746.159.766.238
181	Kab. Batang	69.640.107.000	66.343.023.671	266.710.766.000	261.717.582.697	480.000.000	480.000.000	336.830.873.000	328.540.606.368
182	Kab. Blora	137.319.861.000	131.612.252.795	325.203.866.000	324.597.839.866	-	-	462.523.727.000	456.210.092.661
183	Kab. Boyolali	49.340.342.000	43.775.264.870	316.301.844.000	312.562.508.686	-	-	365.642.186.000	356.337.773.556

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
184	Kab. Brebes	207.949.163.000	204.793.603.315	525.211.882.000	523.951.346.618	3.597.162.000	3.597.162.000	736.758.207.000	732.342.111.933
185	Kab. Cilacap	175.390.882.000	160.552.843.643	591.529.327.000	590.749.390.439	3.432.000.000	3.377.957.000	770.352.209.000	754.680.191.082
186	Kab. Demak	173.574.695.000	166.945.979.977	377.897.057.000	376.524.208.625	5.610.000.000	5.610.000.000	557.081.752.000	549.080.188.602
187	Kab. Grobogan	109.222.782.000	106.116.914.227	438.428.377.000	436.598.775.098	1.428.000.000	1.224.000.000	549.079.159.000	543.939.689.325
188	Kab. Jepara	67.598.438.000	64.643.902.620	364.364.074.000	361.658.296.913	750.000.000	750.000.000	432.712.512.000	427.052.199.533
189	Kab. Karanganyar	231.183.266.000	202.719.247.174	347.082.581.000	332.614.442.129	1.488.000.000	1.488.000.000	579.753.847.000	536.821.689.303
190	Kab. Kebumen	69.644.209.000	68.388.503.136	478.606.886.000	476.600.126.035	18.563.009.000	18.563.009.000	566.814.104.000	563.551.638.171
191	Kab. Kendal	80.020.835.000	74.933.521.059	360.212.378.000	357.878.909.095	-	-	440.233.213.000	432.812.430.154
192	Kab. Klaten	54.499.517.000	46.602.446.617	389.475.501.000	381.628.136.513	-	-	443.975.018.000	428.230.583.130
193	Kab. Kudus	19.773.795.000	18.259.327.340	247.490.700.000	234.446.137.074	-	-	267.264.495.000	252.705.464.414
194	Kab. Magelang	146.743.396.000	142.710.479.259	374.856.759.000	362.460.629.761	11.157.251.000	10.495.547.244	532.757.406.000	515.666.656.264
195	Kab. Pati	136.025.036.000	131.894.544.330	398.292.222.000	386.047.021.193	-	-	534.317.258.000	517.941.565.523
196	Kab. Pekalongan	178.634.811.000	175.116.703.582	313.924.421.000	312.495.553.239	1.314.000.000	1.314.000.000	493.873.232.000	488.926.256.821
197	Kab. Pemalang	130.931.821.000	102.178.208.438	472.571.506.000	470.395.436.832	-	-	603.503.327.000	572.573.645.270
198	Kab. Purbalingga	78.302.361.000	72.674.282.379	334.891.339.000	330.912.374.528	1.839.925.000	777.424.000	415.033.625.000	404.364.080.907
199	Kab. Purworejo	89.521.868.000	86.119.209.955	294.346.024.000	281.159.935.825	1.412.500.000	1.412.500.000	385.280.392.000	368.691.645.780
200	Kab. Rembang	104.156.565.000	96.272.803.298	225.680.020.000	223.458.225.119	-	-	329.836.585.000	319.731.028.417
201	Kab. Semarang	117.856.563.000	105.286.901.221	353.394.043.000	340.209.273.678	-	-	471.250.606.000	445.496.174.899
202	Kab. Sragen	75.399.385.000	72.521.796.541	330.396.115.000	328.770.561.565	-	-	405.795.500.000	401.292.358.106
203	Kab. Sukoharjo	47.577.831.000	41.106.536.616	287.519.837.000	275.723.855.604	-	-	335.097.668.000	316.830.392.220
204	Kab. Tegal	84.793.950.000	79.999.415.685	471.455.268.000	459.094.712.946	3.071.648.000	3.071.648.000	559.320.866.000	542.165.776.631
205	Kab. Temanggung	71.224.680.000	67.587.633.850	278.682.133.000	274.152.285.885	-	-	349.906.813.000	341.739.919.735
206	Kab. Wonogiri	80.212.580.000	73.478.919.244	410.894.878.000	398.271.310.383	-	-	491.107.458.000	471.750.229.627
207	Kab. Wonosobo	128.165.157.000	126.115.328.554	302.856.721.000	298.088.678.599	10.573.414.000	10.551.382.835	441.595.292.000	434.755.389.988
208	Kota Magelang	44.218.140.000	42.314.846.771	72.006.957.000	71.118.784.716	-	-	116.225.097.000	113.433.631.487
209	Kota Pekalongan	37.831.362.000	33.996.599.527	105.964.519.000	104.407.117.198	-	-	143.795.881.000	138.403.716.725
210	Kota Salatiga	36.243.185.000	33.113.491.141	88.677.375.000	87.612.338.193	-	-	124.920.560.000	120.725.829.334
211	Kota Semarang	15.532.786.000	14.632.547.321	462.935.882.000	461.400.265.179	-	-	478.468.668.000	476.032.812.500
212	Kota Surakarta	73.859.970.000	61.874.939.100	223.285.309.000	222.433.238.988	6.560.000.000	6.000.000.000	303.705.279.000	290.308.178.088
213	Kota Tegal	18.156.647.000	15.639.770.171	112.136.280.000	110.620.740.130	-	-	130.292.927.000	126.260.510.301
214	Provinsi DI Yogyakarta	169.350.207.000	156.735.319.268	519.944.769.000	518.508.891.583	-	-	689.294.976.000	675.244.210.851
215	Kab. Bantul	125.075.667.000	116.981.478.484	328.051.248.000	327.398.762.230	2.590.000.000	2.590.000.000	455.716.915.000	446.970.240.714
216	Kab. Gunung Kidul	71.683.256.000	67.163.244.853	333.713.886.000	328.404.813.854	600.000.000	600.000.000	405.997.142.000	396.168.058.707
217	Kab. Kulon Progo	84.638.004.000	77.096.321.028	213.174.042.000	211.247.830.266	936.000.000	936.000.000	298.748.046.000	289.280.151.294
218	Kab. Sleman	51.762.480.000	48.325.090.003	362.954.666.000	361.736.903.290	8.519.308.000	8.391.453.273	423.236.454.000	418.453.446.566
219	Kota Yogyakarta	50.147.893.000	45.033.949.392	167.396.648.000	165.618.590.212	1.760.000.000	1.336.000.000	219.304.541.000	211.988.539.604
220	Provinsi Jawa Timur	622.624.440.000	589.874.038.610	3.804.682.799.000	3.803.168.742.992	34.389.236.000	34.389.236.000	4.461.696.475.000	4.427.432.017.602

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
221	Kab. Bangkalan	85.351.072.000	83.238.481.513	359.363.384.000	357.558.259.468	-	-	444.714.456.000	440.796.740.981
222	Kab. Banyuwangi	63.041.570.000	57.922.959.174	465.528.846.000	448.526.938.017	2.849.524.000	2.849.524.000	531.419.940.000	509.299.421.191
223	Kab. Blitar	75.958.907.000	65.826.202.458	368.052.060.000	357.811.739.136	-	-	444.010.967.000	423.637.941.594
224	Kab. Bojonegoro	14.146.788.000	9.897.837.585	374.177.521.000	353.789.688.003	-	-	388.324.309.000	363.687.525.588
225	Kab. Bondowoso	51.867.281.000	43.812.497.652	256.594.213.000	251.054.093.166	-	-	308.461.494.000	294.866.590.818
226	Kab. Gresik	102.267.487.000	98.720.516.184	367.245.498.000	357.995.932.172	270.000.000	186.000.000	469.782.985.000	456.902.448.356
227	Kab. Jember	125.885.996.000	104.185.840.707	586.531.075.000	568.807.870.795	-	-	712.417.071.000	672.993.711.502
228	Kab. Jombang	40.362.653.000	37.313.721.500	372.269.086.000	368.218.599.532	-	-	412.631.739.000	405.532.321.032
229	Kab. Kediri	97.632.457.000	87.565.044.605	427.637.853.000	416.380.424.348	-	-	525.270.310.000	503.945.468.953
230	Kab. Lamongan	181.625.855.000	172.585.755.986	380.123.361.000	368.958.187.471	-	-	561.749.216.000	541.543.943.457
231	Kab. Lumajang	117.226.430.000	99.973.953.623	313.323.953.000	302.664.152.279	2.238.000.000	2.238.000.000	432.788.383.000	404.876.105.902
232	Kab. Madiun	101.637.247.000	99.812.991.485	222.236.841.000	218.775.697.129	-	-	323.874.088.000	318.588.688.614
233	Kab. Magetan	54.931.774.000	52.451.064.719	242.381.478.000	230.111.129.131	3.615.000.000	3.432.558.361	300.928.252.000	285.994.752.211
234	Kab. Malang	180.400.084.000	165.367.528.443	642.247.244.000	626.934.078.412	9.793.273.000	7.351.683.000	832.440.601.000	799.653.289.855
235	Kab. Mojokerto	27.444.617.000	26.148.220.115	326.500.013.000	323.153.540.113	14.902.529.000	14.902.529.000	368.847.159.000	364.204.289.228
236	Kab. Nganjuk	126.757.071.000	122.512.276.643	346.287.455.000	344.385.892.648	-	-	473.044.526.000	466.898.169.291
237	Kab. Ngawi	142.049.830.000	138.794.944.785	289.226.647.000	277.694.769.144	900.000.000	900.000.000	432.176.477.000	417.389.713.929
238	Kab. Pacitan	69.375.283.000	59.458.569.902	228.706.740.000	225.482.382.489	-	-	298.082.023.000	284.940.952.391
239	Kab. Pamekasan	45.171.881.000	42.123.456.342	281.069.360.000	263.637.703.269	-	-	326.241.241.000	305.761.159.611
240	Kab. Pasuruan	146.445.018.000	73.259.364.406	457.855.867.000	441.406.287.685	8.143.557.000	8.143.557.000	612.444.442.000	522.809.209.091
241	Kab. Ponorogo	62.011.608.000	60.940.988.900	319.138.351.000	316.686.025.002	-	-	381.149.959.000	377.627.013.902
242	Kab. Probolinggo	68.044.880.000	61.416.967.828	317.250.946.000	311.811.848.372	936.000.000	936.000.000	386.231.826.000	374.164.816.200
243	Kab. Sampang	73.519.150.000	71.573.667.894	300.418.729.000	294.196.962.649	10.294.510.000	10.294.510.000	384.232.389.000	376.065.140.543
244	Kab. Sidoarjo	119.898.022.000	111.492.684.206	555.738.987.000	544.942.859.945	1.074.000.000	942.000.000	676.711.009.000	657.377.544.151
245	Kab. Situbondo	85.021.770.000	83.027.376.514	247.311.497.000	232.357.428.916	-	-	332.333.267.000	315.384.805.430
246	Kab. Sumenep	227.411.069.000	222.351.196.091	311.252.754.000	289.640.710.742	10.575.356.000	7.626.711.109	549.239.179.000	519.618.617.942
247	Kab. Trenggalek	74.946.791.000	73.092.821.893	239.098.099.000	232.839.959.348	-	-	314.044.890.000	305.932.781.241
248	Kab. Tuban	172.506.518.000	167.191.315.693	355.928.258.000	341.903.930.054	-	-	528.434.776.000	509.095.245.747
249	Kab. Tulungagung	128.135.773.000	119.746.011.966	379.440.532.000	361.080.607.329	-	-	507.576.305.000	480.826.619.295
250	Kota Blitar	30.349.577.000	26.140.002.027	64.498.154.000	62.800.101.222	-	-	94.847.731.000	88.940.103.249
251	Kota Kediri	22.742.921.000	18.670.335.386	110.024.484.000	109.379.826.864	-	-	132.767.405.000	128.050.162.250
252	Kota Madiun	34.637.942.000	29.693.124.361	89.224.315.000	88.438.051.227	-	-	123.862.257.000	118.131.175.588
253	Kota Malang	21.447.213.000	19.491.399.333	239.568.796.000	237.106.924.518	-	-	261.016.009.000	256.598.323.851
254	Kota Mojokerto	36.390.309.000	34.726.487.346	65.514.299.000	63.699.991.844	-	-	101.904.608.000	98.426.479.190
255	Kota Pasuruan	42.862.810.000	35.752.433.016	80.173.487.000	78.580.326.035	-	-	123.036.297.000	114.332.759.051
256	Kota Probolinggo	4.926.320.000	4.799.882.050	82.679.138.000	81.598.175.609	-	-	87.605.458.000	86.398.057.659
257	Kota Surabaya	6.765.509.000	6.123.511.688	795.446.078.000	784.676.964.178	-	-	802.211.587.000	790.800.475.866

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
258	Kota Batu	11.109.757.000	10.578.991.600	75.318.778.000	74.492.694.736	-	-	86.428.535.000	85.071.686.336
259	Provinsi Kalimantan Barat	273.034.644.000	250.645.600.540	603.825.701.000	602.207.254.887	-	-	876.860.345.000	852.852.855.427
260	Kab. Bengkayang	90.611.655.000	88.114.843.743	155.485.685.000	151.459.423.436	-	-	246.097.340.000	239.574.267.179
261	Kab. Landak	117.337.488.000	116.236.192.154	181.348.517.000	180.478.289.424	600.000.000	600.000.000	299.286.005.000	297.314.481.578
262	Kab. Kapuas Hulu	150.723.940.000	144.413.509.665	167.448.225.000	163.307.575.317	-	-	318.172.165.000	307.721.084.982
263	Kab. Ketapang	130.460.104.000	124.269.374.738	296.040.057.000	278.616.641.279	-	-	426.500.161.000	402.886.016.017
264	Kab. Mempawah	112.231.258.000	111.088.338.241	121.776.163.000	118.755.407.635	-	-	234.007.421.000	229.843.745.876
265	Kab. Sambas	252.257.794.000	248.068.034.847	272.273.351.000	259.260.542.378	1.128.000.000	1.126.118.000	525.659.145.000	508.454.695.225
266	Kab. Sanggau	89.272.717.000	83.435.642.891	214.863.824.000	210.263.009.904	-	-	304.136.541.000	293.698.652.795
267	Kab. Sintang	81.537.108.000	72.498.543.566	275.694.738.000	271.039.522.858	10.033.402.000	10.033.402.000	367.265.248.000	353.571.468.424
268	Kota Pontianak	61.345.288.000	56.544.517.576	189.514.371.000	185.665.593.693	-	-	250.859.659.000	242.210.111.269
269	Kota Singkawang	40.719.316.000	38.631.611.187	95.514.446.000	92.778.856.637	-	-	136.233.762.000	131.410.467.824
270	Kab. Sekadau	37.369.967.000	36.788.751.398	104.013.611.000	98.658.470.991	19.376.913.000	19.376.913.000	160.760.491.000	154.824.135.389
271	Kab. Melawi	56.553.852.000	55.989.332.605	141.954.076.000	139.091.947.513	-	-	198.507.928.000	195.081.280.118
272	Kab. Kayong Utara	55.707.182.000	54.716.868.506	76.316.985.000	75.648.576.834	-	-	132.024.167.000	130.365.445.340
273	Kab. Kubu Raya	116.552.550.000	99.236.728.176	235.118.228.000	232.003.203.564	-	-	351.670.778.000	331.239.931.740
274	Provinsi Kalimantan Tengah	267.896.143.000	261.706.897.641	368.678.301.000	368.430.923.076	-	-	636.574.444.000	630.137.820.717
275	Kab. Barito Selatan	61.047.802.000	53.206.175.347	99.678.184.000	96.336.114.148	-	-	160.725.986.000	149.542.289.495
276	Kab. Barito Utara	62.261.701.000	61.544.942.007	111.000.995.000	102.719.218.991	-	-	173.262.696.000	164.264.160.998
277	Kab. Kapuas	70.892.139.000	68.332.955.705	236.568.632.000	231.961.745.264	510.000.000	270.000.000	307.970.771.000	300.564.700.969
278	Kab. Kotawaringin Barat	99.543.502.000	97.519.191.878	137.198.420.000	133.823.333.167	498.000.000	384.000.000	237.239.922.000	231.726.525.045
279	Kab. Kotawaringin Timur	125.360.163.000	116.009.948.122	209.546.926.000	204.596.965.434	5.726.244.000	5.726.244.000	340.633.333.000	326.333.157.556
280	Kota Palangkaraya	28.827.376.000	27.974.653.026	131.055.549.000	127.278.676.339	2.946.750.000	2.719.227.295	162.829.675.000	157.972.556.660
281	Kab. Katingan	187.726.478.000	186.604.733.257	131.294.310.000	127.614.266.422	-	-	319.020.788.000	314.218.999.679
282	Kab. Seruyan	43.363.868.000	39.607.215.093	92.943.983.000	88.915.321.889	-	-	136.307.851.000	128.522.536.982
283	Kab. Sukamara	67.058.848.000	63.882.801.706	42.719.680.000	42.041.211.437	-	-	109.778.528.000	105.924.013.143
284	Kab. Lamandau	27.692.821.000	26.088.732.372	68.553.450.000	63.829.219.460	-	-	96.246.271.000	89.917.951.832
285	Kab. Gunung Mas	51.582.256.000	50.967.062.873	118.448.535.000	115.184.981.739	-	-	170.030.791.000	166.152.044.612
286	Kab. Pulang Pisau	78.179.813.000	74.399.342.445	102.154.593.000	100.670.711.803	-	-	180.334.406.000	175.070.054.248
287	Kab. Murung Raya	57.072.315.000	55.093.820.847	112.729.357.000	109.725.278.984	-	-	169.801.672.000	164.819.099.831
288	Kab. Barito Timur	65.259.717.000	63.547.299.982	82.770.434.000	81.679.293.194	-	-	148.030.151.000	145.226.593.176
289	Provinsi Kalimantan Selatan	256.003.229.000	248.109.419.489	449.983.220.000	448.062.036.351	-	-	705.986.449.000	696.171.455.840
290	Kab. Banjar	96.310.599.000	93.702.795.200	238.392.421.000	233.557.336.621	-	-	334.703.020.000	327.260.131.821
291	Kab. Barito Kuala	95.927.421.000	94.752.513.042	176.948.004.000	169.991.955.515	-	-	272.875.425.000	264.744.468.557
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	72.494.799.000	70.905.328.762	124.496.023.000	122.575.417.950	11.492.179.000	11.492.179.000	208.483.001.000	204.972.925.712
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	100.383.433.000	99.851.972.094	124.229.229.000	115.849.819.462	-	-	224.612.662.000	215.701.791.556
294	Kab. Hulu Sungai Utara	57.730.994.000	53.808.692.697	104.706.616.000	101.916.045.655	-	-	162.437.610.000	155.724.738.352

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
295	Kab. Kotabaru	92.901.854.000	83.398.692.170	147.876.854.000	139.783.760.419	-	-	240.778.708.000	223.182.452.589
296	Kab. Tabalong	33.012.287.000	32.673.657.742	145.621.546.000	142.894.757.871	-	-	178.633.833.000	175.568.415.613
297	Kab. Tanah Laut	56.526.551.000	53.032.996.834	174.193.504.000	168.854.521.096	-	-	230.720.055.000	221.887.517.930
298	Kab. Tapin	36.584.807.000	35.998.682.150	101.125.472.000	99.141.298.347	-	-	137.710.279.000	135.139.980.497
299	Kota Banjarbaru	40.055.504.000	38.959.379.800	111.282.215.000	108.463.776.416	-	-	151.337.719.000	147.423.156.216
300	Kota Banjarmasin	21.286.014.000	20.703.148.135	217.097.858.000	214.532.895.279	750.000.000	270.000.000	239.133.872.000	235.506.043.414
301	Kab. Balangan	36.594.434.000	36.005.560.168	86.782.802.000	83.824.958.416	1.128.000.000	420.000.000	124.505.236.000	120.250.518.584
302	Kab. Tanah Bumbu	70.139.482.000	68.853.920.695	151.700.610.000	149.904.886.863	1.128.000.000	1.122.000.000	222.968.092.000	219.880.807.558
303	Provinsi Kalimantan Timur	215.371.296.000	209.814.629.949	536.675.172.000	532.134.334.554	-	-	752.046.468.000	741.948.964.503
304	Kab. Berau	82.281.122.000	80.364.880.846	132.605.382.000	128.172.797.431	-	-	214.886.504.000	208.537.678.277
305	Kab. Kutai Kartanegara	160.753.615.000	148.353.976.060	399.946.347.000	390.009.963.937	-	-	560.699.962.000	538.363.939.997
306	Kab. Kutai Barat	14.917.408.000	6.286.118.854	93.378.372.000	86.575.930.660	600.000.000	600.000.000	108.895.780.000	93.462.049.514
307	Kab. Kutai Timur	65.590.182.000	64.753.011.294	199.712.690.000	193.060.402.358	-	-	265.302.872.000	257.813.413.652
308	Kab. Paser	61.899.040.000	59.133.587.720	149.561.666.000	141.494.868.922	4.967.700.000	4.967.700.000	216.428.406.000	205.596.156.642
309	Kota Balikpapan	12.162.621.000	10.740.075.783	233.294.670.000	224.958.445.433	-	-	245.457.291.000	235.698.521.216
310	Kota Bontang	17.021.146.000	14.833.297.689	71.927.155.000	69.114.135.121	-	-	88.948.301.000	83.947.432.810
311	Kota Samarinda	19.620.025.000	18.963.828.212	279.923.304.000	269.682.091.578	-	-	299.543.329.000	288.645.919.790
312	Kab. Penajam Paser Utara	165.388.570.000	160.676.842.562	106.996.774.000	103.706.925.805	1.330.024.000	526.748.711	273.715.368.000	264.910.517.078
313	Kab. Mahakam Ulu	69.006.517.000	66.605.764.716	25.261.430.000	23.469.367.977	-	-	94.267.947.000	90.075.132.693
314	Provinsi Sulawesi Utara	309.431.592.000	302.618.460.629	407.152.934.000	396.518.898.884	-	-	716.584.526.000	699.137.359.513
315	Kab. Bolaang Mongondow	35.628.907.000	35.123.482.574	113.268.478.000	107.671.423.994	-	-	148.897.385.000	142.794.906.568
316	Kab. Minahasa	51.237.563.000	48.263.647.654	162.518.781.000	159.019.427.811	-	-	213.756.344.000	207.283.075.465
317	Kab. Sangihe	154.103.799.000	143.165.339.886	94.825.408.000	91.446.365.499	12.053.705.000	12.053.705.000	260.982.912.000	246.665.410.385
318	Kota Bitung	57.473.250.000	56.679.291.833	81.485.666.000	78.017.875.273	-	-	138.958.916.000	134.697.167.106
319	Kota Manado	56.953.149.000	52.900.196.400	157.652.564.000	156.710.732.572	-	-	214.605.713.000	209.610.928.972
320	Kab. Kepulauan Talaud	66.314.332.000	65.613.272.252	80.346.396.000	73.199.840.303	22.642.620.000	22.642.620.000	169.303.348.000	161.455.732.555
321	Kab. Minahasa Selatan	77.081.535.000	73.699.191.095	123.065.077.000	120.455.362.311	27.578.533.000	25.923.626.550	227.725.145.000	220.078.179.956
322	Kota Tomohon	71.479.445.000	70.435.760.476	57.072.519.000	55.591.479.086	-	-	128.551.964.000	126.027.239.562
323	Kab. Minahasa Utara	99.911.355.000	99.302.597.359	105.944.832.000	104.836.324.807	-	-	205.856.187.000	204.138.922.166
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	21.353.242.000	20.514.733.428	44.624.852.000	42.021.149.090	-	-	65.978.094.000	62.535.882.518
325	Kota Kotamobagu	16.623.551.000	13.965.932.366	51.707.814.000	50.212.433.999	-	-	68.331.365.000	64.178.366.365
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	34.831.961.000	33.863.868.520	49.643.586.000	45.944.396.851	-	-	84.475.547.000	79.808.265.371
327	Kab. Minahasa Tenggara	46.660.227.000	42.106.940.057	68.967.607.000	65.936.583.041	-	-	115.627.834.000	108.043.523.098
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	22.619.853.000	22.213.522.361	43.389.583.000	42.095.594.445	-	-	66.009.436.000	64.309.116.806
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	82.223.995.000	78.191.816.657	44.301.792.000	42.927.374.998	-	-	126.525.787.000	121.119.191.655
330	Provinsi Sulawesi Tengah	333.475.956.000	324.621.662.908	410.564.820.000	410.316.501.204	8.556.863.000	8.551.558.595	752.597.639.000	743.489.722.707
331	Kab. Banggai	73.105.367.000	70.574.213.807	196.984.727.000	195.773.588.396	3.351.583.000	2.658.248.117	273.441.677.000	269.006.050.320

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
332	Kab. Banggai Kepulauan	107.206.913.000	101.901.073.587	87.896.912.000	86.657.439.436	28.849.257.000	28.849.257.000	223.953.082.000	217.407.770.023
333	Kab. Buol	82.280.860.000	81.160.924.874	78.596.194.000	75.755.403.470	19.519.969.000	19.412.671.123	180.397.023.000	176.328.999.467
334	Kab. Tolitoli	109.666.226.000	108.240.819.508	111.053.069.000	105.928.694.816	-	-	220.719.295.000	214.169.514.324
335	Kab. Donggala	157.228.978.000	128.554.075.706	176.692.430.000	172.896.406.975	-	-	333.921.408.000	301.450.482.681
336	Kab. Morowali	46.765.869.000	45.355.846.055	102.021.103.000	100.592.621.032	-	-	148.786.972.000	145.948.467.087
337	Kab. Poso	135.986.953.000	134.904.579.283	131.448.833.000	128.321.708.841	25.146.769.000	24.820.702.295	292.582.555.000	288.046.990.419
338	Kota Palu	84.840.340.000	83.661.161.656	172.090.524.000	169.579.931.363	1.866.000.000	966.000.000	258.796.864.000	254.207.093.019
339	Kab. Parigi Moutong	146.523.073.000	139.136.225.245	223.970.814.000	217.897.639.032	3.307.769.000	2.694.873.250	373.801.656.000	359.728.737.527
340	Kab. Tojo Una Una	114.618.211.000	113.426.288.327	110.019.438.000	107.891.677.334	1.032.000.000	1.032.000.000	225.669.649.000	222.349.965.661
341	Kab. Sigi	146.845.079.000	144.946.300.321	157.605.870.000	153.648.324.254	-	-	304.450.949.000	298.594.624.575
342	Kab. Banggai Laut	53.041.061.000	51.156.767.547	52.836.496.000	51.864.970.455	-	-	105.877.557.000	103.021.738.002
343	Kab. Morowali Utara	63.782.277.000	62.110.361.172	86.452.344.000	83.583.019.795	-	-	150.234.621.000	145.693.380.967
344	Provinsi Sulawesi Selatan	335.138.944.000	321.344.427.952	1.238.588.550.000	1.236.084.743.841	1.858.037.000	1.826.947.158	1.575.585.531.000	1.559.256.118.951
345	Kab. Bantaeng	83.625.902.000	81.706.137.861	126.716.419.000	125.956.443.379	1.488.000.000	1.488.000.000	211.830.321.000	209.150.581.240
346	Kab. Barru	37.962.264.000	36.828.889.417	120.422.608.000	117.455.739.710	-	-	158.384.872.000	154.284.629.127
347	Kab. Bone	173.818.620.000	167.134.039.888	390.120.831.000	386.301.746.157	696.000.000	-	564.635.451.000	553.435.786.045
348	Kab. Bulukumba	149.476.401.000	147.810.871.064	206.879.175.000	204.459.962.940	420.000.000	270.000.000	356.775.576.000	352.540.834.004
349	Kab. Enrekang	137.843.429.000	124.906.767.084	163.544.179.000	161.227.369.292	22.299.584.000	22.299.584.000	323.687.192.000	308.433.720.376
350	Kab. Gowa	159.290.995.000	157.638.919.409	296.825.508.000	292.612.737.454	-	-	456.116.503.000	450.251.656.863
351	Kab. Jeneponto	124.147.588.000	119.624.942.930	178.668.419.000	176.315.186.754	-	-	302.816.007.000	295.940.129.684
352	Kab. Luwu	120.810.587.000	118.317.371.759	208.427.576.000	205.997.602.116	26.536.853.000	26.051.515.726	355.775.016.000	350.366.489.601
353	Kab. Luwu Utara	45.993.769.000	41.739.482.598	165.294.307.000	161.608.758.473	5.709.553.000	5.321.252.340	216.997.629.000	208.669.493.411
354	Kab. Maros	133.305.709.000	130.286.597.699	189.143.777.000	186.750.166.705	1.314.000.000	1.302.000.000	323.763.486.000	318.338.764.404
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	127.570.584.000	124.311.905.980	220.903.611.000	219.194.154.733	-	-	348.474.195.000	343.506.060.713
356	Kota Palopo	23.447.814.000	22.949.743.189	96.569.684.000	94.379.950.373	-	-	120.017.498.000	117.329.693.562
357	Kab. Luwu Timur	53.238.342.000	50.421.525.837	138.613.065.000	134.213.247.762	11.689.795.000	11.486.537.363	203.541.202.000	196.121.310.962
358	Kab. Pinrang	130.092.424.000	128.010.606.521	201.842.248.000	200.385.191.377	26.220.200.000	26.220.200.000	358.154.872.000	354.615.997.898
359	Kab. Sinjai	89.213.630.000	87.345.480.257	156.488.309.000	149.962.928.702	-	-	245.701.939.000	237.308.408.959
360	Kab. Kepulauan Selayar	44.244.896.000	42.731.502.855	119.843.040.000	119.289.377.901	-	-	164.087.936.000	162.020.880.756
361	Kab. Sidenreng Rappang	71.844.966.000	70.971.877.699	168.008.450.000	163.345.658.094	1.314.000.000	1.314.000.000	241.167.416.000	235.631.535.793
362	Kab. Soppeng	83.510.480.000	81.837.623.071	143.930.021.000	141.735.268.035	-	-	227.440.501.000	223.572.891.106
363	Kab. Takalar	79.349.210.000	74.864.555.022	165.747.928.000	164.503.967.397	-	-	245.097.138.000	239.368.522.419
364	Kab. Tana Toraja	103.104.361.000	100.507.941.570	169.170.070.000	164.791.328.943	8.707.527.000	8.707.527.000	280.981.958.000	274.006.797.513
365	Kab. Wajo	169.604.171.000	164.662.171.304	210.476.876.000	203.984.507.587	13.596.913.000	13.596.913.000	393.677.960.000	382.243.591.891
366	Kota Parepare	38.686.654.000	37.007.242.383	83.806.780.000	82.516.973.423	-	-	122.493.434.000	119.524.215.806
367	Kota Makassar	47.127.126.000	31.931.027.120	477.037.511.000	470.242.623.639	2.960.000.000	1.800.000.000	527.124.637.000	503.973.650.759
368	Kab. Toraja Utara	152.748.662.000	145.855.848.815	165.437.665.000	158.292.632.746	16.663.545.000	16.663.545.000	334.849.872.000	320.812.026.561

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	279.582.916.000	273.187.941.120	533.010.219.000	532.537.478.977	922.180.000	787.674.088	813.515.315.000	806.513.094.185
370	Kab. Buton	97.108.382.000	96.527.584.388	86.679.570.000	86.125.583.893	21.117.637.000	21.117.637.000	204.905.589.000	203.770.805.281
371	Kab. Konawe	73.061.946.000	72.024.970.829	191.353.106.000	189.262.501.118	8.570.040.000	8.570.040.000	272.985.092.000	269.857.511.947
372	Kab. Kolaka	51.318.538.000	50.296.492.225	124.586.352.000	121.420.830.839	2.551.143.000	2.468.308.569	178.456.033.000	174.185.631.633
373	Kab. Muna	100.402.719.000	99.204.381.158	209.779.305.000	207.310.791.723	-	-	310.182.024.000	306.515.172.881
374	Kota Kendari	52.731.252.000	49.458.128.200	178.301.374.000	177.668.636.142	-	-	231.032.626.000	227.126.764.342
375	Kota Bau-bau	60.522.368.000	59.942.034.754	98.125.595.000	95.207.043.570	-	-	158.647.963.000	155.149.078.324
376	Kab. Konawe Selatan	75.936.097.000	72.591.677.661	185.122.415.000	177.275.575.488	-	-	261.058.512.000	249.867.253.149
377	Kab. Bombana	72.514.205.000	71.548.170.798	120.506.441.000	116.278.859.590	-	-	193.020.646.000	187.827.030.388
378	Kab. Wakatobi	106.172.421.000	103.531.408.736	91.080.654.000	85.335.503.721	-	-	197.253.075.000	188.866.912.457
379	Kab. Kolaka Utara	66.676.500.000	65.047.787.850	92.708.409.000	90.757.402.593	2.945.334.000	2.792.329.450	162.330.243.000	158.597.519.893
380	Kab. Konawe Utara	107.844.343.000	105.726.114.949	77.637.612.000	77.287.264.121	-	-	185.481.955.000	183.013.379.070
381	Kab. Buton Utara	90.549.739.000	89.434.822.970	69.016.070.000	67.842.674.138	-	-	159.565.809.000	157.277.497.108
382	Kab. Konawe Kepulauan	78.917.626.000	78.102.010.197	35.264.332.000	34.614.465.414	-	-	114.181.958.000	112.716.475.611
383	Kab. Kolaka Timur	82.589.760.000	81.637.536.175	85.587.525.000	83.714.154.406	-	-	168.177.285.000	165.351.690.581
384	Kab. Muna Barat	58.702.937.000	56.813.779.428	83.565.769.000	82.735.286.265	9.063.829.000	9.063.829.000	151.332.535.000	148.612.894.693
385	Kab. Buton Tengah	47.618.836.000	46.239.544.006	78.876.516.000	77.411.983.324	-	-	126.495.352.000	123.651.527.330
386	Kab. Buton Selatan	75.755.172.000	73.207.486.021	65.684.997.000	64.379.708.082	-	-	141.440.169.000	137.587.194.103
387	Provinsi Bali	108.245.814.000	87.240.500.926	621.457.861.000	616.318.044.758	-	-	729.703.675.000	703.558.545.684
388	Kab. Badung	38.872.272.000	34.735.254.354	235.572.679.000	233.383.013.035	3.936.000.000	-	278.380.951.000	268.118.267.389
389	Kab. Bangli	61.838.838.000	54.703.224.638	117.057.667.000	112.897.083.302	5.679.804.000	5.679.804.000	184.576.309.000	173.280.111.940
390	Kab. Buleleng	65.473.589.000	60.610.125.474	325.773.240.000	323.433.703.155	-	-	391.246.829.000	384.043.828.629
391	Kab. Gianyar	22.463.808.000	19.899.324.455	186.185.575.000	184.460.906.689	3.796.099.000	3.796.099.000	212.445.482.000	208.156.330.144
392	Kab. Jembrana	10.064.756.000	9.181.499.760	119.661.900.000	117.135.945.678	-	-	129.726.656.000	126.317.445.438
393	Kab. Karangasem	66.443.527.000	55.595.869.328	229.118.019.000	225.983.160.888	-	-	295.561.546.000	281.579.030.216
394	Kab. Klungkung	36.521.183.000	33.701.513.527	117.588.716.000	115.567.707.859	-	-	154.109.899.000	149.269.221.386
395	Kab. Tabanan	55.317.359.000	54.219.262.420	192.398.860.000	188.573.524.390	-	-	247.716.219.000	242.792.786.810
396	Kota Denpasar	29.992.511.000	28.031.657.114	256.239.947.000	253.235.819.518	-	-	286.232.458.000	281.267.476.632
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	371.613.306.000	358.033.134.458	678.210.669.000	677.797.693.513	-	-	1.049.823.975.000	1.035.830.827.971
398	Kab. Bima	165.673.037.000	160.918.308.551	260.415.485.000	259.366.552.372	19.448.830.000	18.572.830.000	445.537.352.000	438.857.690.923
399	Kab. Dompu	106.273.090.000	99.891.566.064	129.586.116.000	128.955.953.026	17.699.148.000	17.699.148.000	253.558.354.000	246.546.667.090
400	Kab. Lombok Barat	97.246.347.000	93.529.675.802	272.462.590.000	268.532.115.227	-	-	369.708.937.000	362.061.791.029
401	Kab. Lombok Tengah	206.665.442.000	202.489.811.306	380.336.091.000	372.567.851.744	-	-	587.001.533.000	575.057.663.050
402	Kab. Lombok Timur	256.198.467.000	252.745.293.433	526.388.328.000	522.664.988.502	34.040.960.000	30.144.336.510	816.627.755.000	805.554.618.445
403	Kab. Sumbawa	168.725.754.000	157.589.834.891	244.029.515.000	237.542.156.290	35.128.699.000	32.392.219.871	447.883.968.000	427.524.211.052
404	Kota Mataram	87.923.970.000	81.611.000.989	162.405.831.000	160.854.869.345	750.000.000	750.000.000	251.079.801.000	243.215.870.334
405	Kota Bima	56.209.507.000	51.257.106.179	83.361.342.000	80.886.128.462	-	-	139.570.849.000	132.143.234.641

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
406	Kab. Sumbawa Barat	105.770.537.000	103.353.966.287	92.435.150.000	90.045.963.693	-	-	198.205.687.000	193.399.929.980
407	Kab. Lombok Utara	85.034.026.000	84.346.236.414	96.367.145.000	95.170.785.801	-	-	181.401.171.000	179.517.022.215
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	510.764.222.000	480.598.050.758	855.049.119.000	854.080.143.495	562.464.000	348.712.700	1.366.375.805.000	1.335.026.906.953
409	Kab. Alor	101.759.399.000	100.921.303.346	139.248.704.000	129.772.301.913	-	-	241.008.103.000	230.693.605.259
410	Kab. Belu	136.241.183.000	132.084.012.035	114.641.733.000	111.119.348.538	-	-	250.882.916.000	243.203.360.573
411	Kab. Ende	93.745.456.000	74.165.484.160	158.553.503.000	150.410.858.810	-	-	252.298.959.000	224.576.342.970
412	Kab. Flores Timur	169.940.830.000	166.392.708.767	148.875.349.000	146.379.242.434	-	-	318.816.179.000	312.771.951.201
413	Kab. Kupang	204.607.472.000	196.064.125.324	188.090.098.000	180.825.544.624	2.995.791.000	2.547.813.300	395.693.361.000	379.437.483.248
414	Kab. Lembata	72.083.450.000	69.862.606.968	86.552.298.000	83.811.828.873	-	-	158.635.748.000	153.674.435.841
415	Kab. Manggarai	122.929.209.000	114.943.944.920	199.601.952.000	197.685.797.562	-	-	322.531.161.000	312.629.742.482
416	Kab. Ngada	214.077.251.000	212.160.820.557	112.471.267.000	108.493.603.796	-	-	326.548.518.000	320.654.424.353
417	Kab. Sikka	44.303.056.000	41.923.477.352	182.206.617.000	177.661.656.149	-	-	226.509.673.000	219.585.133.501
418	Kab. Sumba Barat	155.427.000.000	154.120.276.623	64.270.885.000	62.136.962.567	-	-	219.697.885.000	216.257.239.190
419	Kab. Sumba Timur	147.667.561.000	146.806.092.342	141.102.840.000	130.689.112.545	-	-	288.770.401.000	277.495.204.887
420	Kab. Timor Tengah Selatan	122.565.351.000	116.255.142.430	223.145.109.000	207.102.193.155	-	-	345.710.460.000	323.357.335.585
421	Kab. Timor Tengah Utara	86.834.832.000	78.802.285.730	158.036.015.000	155.028.627.505	-	-	244.870.847.000	233.830.913.235
422	Kota Kupang	39.902.905.000	39.000.602.323	155.192.521.000	150.741.754.760	-	-	195.095.426.000	189.742.357.083
423	Kab. Rote Ndao	105.907.904.000	104.640.521.396	113.023.132.000	109.839.736.665	-	-	218.931.036.000	214.480.258.061
424	Kab. Manggarai Barat	185.332.080.000	182.786.139.163	153.314.917.000	147.863.561.934	-	-	338.646.997.000	330.649.701.097
425	Kab. Nagekeo	47.707.555.000	42.151.212.992	89.416.167.000	87.082.857.117	-	-	137.123.722.000	129.234.070.109
426	Kab. Sumba Barat Daya	165.443.436.000	160.421.804.814	166.345.793.000	160.706.660.795	-	-	331.789.229.000	321.128.465.609
427	Kab. Sumba Tengah	114.667.073.000	112.784.340.291	58.017.399.000	56.770.195.869	-	-	172.684.472.000	169.554.536.160
428	Kab. Manggarai Timur	215.631.153.000	209.715.773.244	186.730.038.000	178.453.653.181	-	-	402.361.191.000	388.169.426.425
429	Kab. Sabu Raijua	70.390.004.000	68.132.328.326	64.243.353.000	62.583.738.007	-	-	134.633.357.000	130.716.066.333
430	Kab. Malaka	91.847.971.000	90.632.947.498	110.458.811.000	105.519.159.076	-	-	202.306.782.000	196.152.106.574
431	Provinsi Maluku	379.160.798.000	368.841.468.833	361.518.750.000	359.201.275.447	-	-	740.679.548.000	728.042.744.280
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	93.616.723.000	89.524.932.206	80.177.778.000	78.669.630.156	-	-	173.794.501.000	168.194.562.362
433	Kab. Maluku Tengah	116.650.022.000	110.594.723.594	240.547.081.000	228.817.979.376	-	-	357.197.103.000	339.412.702.970
434	Kab. Maluku Tenggara	91.146.001.000	87.768.910.468	95.589.353.000	94.364.035.116	-	-	186.735.354.000	182.132.945.584
435	Kab. Buru	83.729.621.000	56.692.948.517	113.053.902.000	111.931.336.232	12.383.325.000	12.383.325.000	209.166.848.000	181.007.609.749
436	Kota Ambon	27.123.628.000	24.883.037.861	161.383.189.000	153.355.994.853	2.238.000.000	-	190.744.817.000	178.239.032.714
437	Kab. Seram Bagian Barat	57.629.656.000	55.119.625.931	134.002.371.000	128.954.392.394	936.000.000	-	192.568.027.000	184.074.018.325
438	Kab. Seram Bagian Timur	45.287.236.000	44.809.728.325	116.296.675.000	113.982.633.907	31.170.344.000	31.170.344.000	192.754.255.000	189.962.706.232
439	Kab. Kepulauan Aru	83.189.569.000	76.190.872.544	111.102.208.000	98.985.958.416	-	-	194.291.777.000	175.176.830.960
440	Kota Tual	41.613.548.000	40.150.459.885	46.644.214.000	45.261.613.439	-	-	88.257.762.000	85.412.073.324
441	Kab. Maluku Barat Daya	59.493.960.000	58.440.274.041	73.833.117.000	67.170.793.287	29.140.514.000	29.140.514.000	162.467.591.000	154.751.581.328
442	Kab. Buru Selatan	103.878.921.000	85.918.450.958	74.222.833.000	74.102.325.156	-	-	178.101.754.000	160.020.776.114

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
443	Provinsi Papua	147.455.984.000	139.275.261.124	21.413.376.000	19.305.256.500	-	-	168.869.360.000	158.580.517.624
444	Kab. Biak Numfor	149.929.186.000	147.290.458.322	146.091.320.000	144.781.719.316	-	-	296.020.506.000	292.072.177.638
445	Kab. Jayapura	146.691.209.000	106.978.759.549	152.136.603.000	150.509.938.180	-	-	298.827.812.000	257.488.697.729
446	Kab. Jayawijaya	138.876.395.000	128.958.330.739	140.095.637.000	136.803.183.693	-	-	278.972.032.000	265.761.514.432
447	Kab. Merauke	221.978.676.000	204.995.484.149	230.388.039.000	225.693.792.076	-	-	452.366.715.000	430.689.276.225
448	Kab. Mimika	100.207.732.000	79.031.638.214	186.499.989.000	184.569.911.387	26.831.068.000	26.831.068.000	313.538.789.000	290.432.617.601
449	Kab. Nabire	145.991.046.000	143.155.983.277	168.331.827.000	166.134.262.911	-	-	314.322.873.000	309.290.246.188
450	Kab. Paniai	71.072.419.000	69.616.167.716	140.213.883.000	139.363.140.841	-	-	211.286.302.000	208.979.308.557
451	Kab. Puncak Jaya	123.835.601.000	121.985.766.997	40.830.058.000	40.349.999.250	-	-	164.665.659.000	162.335.766.247
452	Kab. Kepulauan Yapen	99.203.249.000	96.668.972.700	111.160.871.000	110.261.563.866	10.198.806.000	10.198.806.000	220.562.926.000	217.129.342.566
453	Kota Jayapura	109.968.763.000	104.488.576.030	187.735.567.000	185.981.873.522	-	-	297.704.330.000	290.470.449.552
454	Kab. Sarmi	79.808.158.000	77.497.162.932	60.567.820.000	59.971.879.408	-	-	140.375.978.000	137.469.042.340
455	Kab. Keerom	99.052.334.000	97.480.604.765	76.167.410.000	70.474.632.725	-	-	175.219.744.000	167.955.237.490
456	Kab. Yahukimo	263.774.708.000	258.626.280.760	185.740.115.000	185.299.534.184	-	-	449.514.823.000	443.925.814.944
457	Kab. Pegunungan Bintang	173.166.406.000	172.381.841.676	98.928.993.000	98.650.032.340	-	-	272.095.399.000	271.031.874.016
458	Kab. Tolikara	312.729.536.000	310.824.901.043	83.295.636.000	80.211.467.032	-	-	396.025.172.000	391.036.368.075
459	Kab. Boven Digoel	62.610.968.000	60.981.745.736	85.135.134.000	76.386.004.432	-	-	147.746.102.000	137.367.750.168
460	Kab. Mappi	131.057.089.000	127.465.939.954	117.418.161.000	108.727.018.385	-	-	248.475.250.000	236.192.958.339
461	Kab. Asmat	116.624.227.000	112.775.427.530	125.390.805.000	120.092.454.282	-	-	242.015.032.000	232.867.881.812
462	Kab. Waropen	87.213.957.000	31.298.623.984	48.817.764.000	48.478.636.252	-	-	136.031.721.000	79.777.260.236
463	Kab. Supiori	103.278.156.000	99.572.823.762	40.260.424.000	39.960.267.150	20.718.650.000	20.718.650.000	164.257.230.000	160.251.740.912
464	Kab. Mamberamo Raya	75.245.528.000	71.317.411.620	42.589.418.000	41.396.070.578	6.438.179.000	6.438.179.000	124.273.125.000	119.151.661.198
465	Kab. Mamberamo Tengah	65.021.323.000	64.530.397.209	31.156.626.000	30.927.261.412	-	-	96.177.949.000	95.457.658.621
466	Kab. Yalimo	102.015.810.000	99.806.945.050	45.218.646.000	43.810.894.781	-	-	147.234.456.000	143.617.839.831
467	Kab. Lanny Jaya	295.148.150.000	284.362.459.940	100.780.268.000	98.695.146.611	-	-	395.928.418.000	383.057.606.551
468	Kab. Nduga	216.066.083.000	213.986.695.949	29.889.557.000	29.522.625.232	-	-	245.955.640.000	243.509.321.181
469	Kab. Dogiyai	91.907.213.000	80.124.815.562	63.700.116.000	63.136.965.948	-	-	155.607.329.000	143.261.781.510
470	Kab. Puncak	160.492.579.000	139.262.932.492	32.329.200.000	31.045.605.513	-	-	192.821.779.000	170.308.538.005
471	Kab. Intan Jaya	49.392.862.000	45.120.153.920	24.994.148.000	24.546.494.701	-	-	74.387.010.000	69.666.648.621
472	Kab. Deiyai	72.553.333.000	72.460.426.974	69.756.796.000	69.509.631.936	-	-	142.310.129.000	141.970.058.910
473	Provinsi Maluku Utara	315.707.513.000	302.012.571.682	234.399.569.000	234.312.822.768	-	-	550.107.082.000	536.325.394.450
474	Kab. Halmahera Tengah	56.233.066.000	45.568.526.468	50.728.116.000	49.691.647.771	-	-	106.961.182.000	95.260.174.239
475	Kota Ternate	37.403.905.000	32.621.059.671	108.527.342.000	106.575.645.540	-	-	145.931.247.000	139.196.705.211
476	Kab. Halmahera Barat	120.350.193.000	103.979.616.369	102.991.406.000	102.151.052.692	-	-	223.341.599.000	206.130.669.061
477	Kab. Halmahera Timur	41.069.697.000	39.553.798.450	63.959.108.000	62.242.448.043	12.473.418.000	12.473.418.000	117.502.223.000	114.269.664.493
478	Kab. Halmahera Selatan	121.403.335.000	120.854.784.960	169.819.407.000	167.028.250.503	-	-	291.222.742.000	287.883.035.463
479	Kab. Halmahera Utara	125.202.774.000	120.087.114.393	102.922.856.000	99.445.763.949	7.937.300.000	5.663.300.000	236.062.930.000	225.196.178.342

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
480	Kab. Kepulauan Sula	131.274.370.000	105.972.325.897	66.903.667.000	66.719.203.504	15.565.156.000	15.565.156.000	213.743.193.000	188.256.685.401
481	Kota Tidore Kepulauan	90.165.892.000	87.094.031.666	73.021.387.000	71.609.328.840	14.115.300.000	14.115.300.000	177.302.579.000	172.818.660.506
482	Kab. Pulau Morotai	116.681.165.000	116.301.464.845	48.454.601.000	47.732.564.190	31.389.532.000	31.389.532.000	196.525.298.000	195.423.561.035
483	Kab. Pulau Taliabu	90.917.058.000	80.910.395.298	62.202.384.000	62.126.591.567	-	-	153.119.442.000	143.036.986.865
484	Provinsi Banten	154.790.185.000	151.638.021.459	1.072.426.649.000	1.058.412.724.828	-	-	1.227.216.834.000	1.210.050.746.287
485	Kab. Lebak	151.442.745.000	147.338.695.149	507.339.800.000	503.222.701.398	26.556.299.000	24.760.061.697	685.338.844.000	675.321.458.244
486	Kab. Pandeglang	167.151.873.000	153.572.060.300	485.904.645.000	473.972.886.113	-	-	653.056.518.000	627.544.946.413
487	Kab. Serang	122.155.411.000	117.577.815.239	502.152.792.000	491.391.816.248	-	-	624.308.203.000	608.969.631.487
488	Kab. Tangerang	78.862.626.000	72.582.783.907	816.176.824.000	801.428.345.616	5.610.000.000	5.394.000.000	900.649.450.000	879.405.129.523
489	Kota Cilegon	6.270.078.000	5.752.858.525	163.611.237.000	163.279.895.301	-	-	169.881.315.000	169.032.753.826
490	Kota Tangerang	25.649.809.000	23.492.202.120	466.307.735.000	463.805.808.715	-	-	491.957.544.000	487.298.010.835
491	Kota Serang	34.298.224.000	33.801.367.720	240.531.818.000	239.518.592.495	-	-	274.830.042.000	273.319.960.215
492	Kota Tangerang Selatan	22.665.551.000	22.208.153.615	363.804.475.000	361.537.545.569	-	-	386.470.026.000	383.745.699.184
493	Provinsi Bangka Belitung	101.146.298.000	90.816.669.733	185.143.932.000	184.380.686.320	-	-	286.290.230.000	275.197.356.053
494	Kab. Bangka	103.188.726.000	101.694.681.362	134.684.276.000	129.942.260.044	-	-	237.873.002.000	231.636.941.406
495	Kab. Belitung	11.226.341.000	10.766.768.288	87.917.492.000	86.275.881.564	-	-	99.143.833.000	97.042.649.852
496	Kota Pangkal Pinang	98.990.926.000	97.222.884.488	94.081.507.000	91.818.359.165	-	-	193.072.433.000	189.041.243.653
497	Kab. Bangka Selatan	59.857.988.000	46.438.600.088	95.251.083.000	93.302.083.355	-	-	155.109.071.000	139.740.683.443
498	Kab. Bangka Tengah	60.128.306.000	56.103.664.261	96.774.232.000	94.478.628.363	600.000.000	600.000.000	157.502.538.000	151.182.292.624
499	Kab. Bangka Barat	28.616.482.000	27.199.075.265	96.518.517.000	93.926.891.943	-	-	125.134.999.000	121.125.967.208
500	Kab. Belitung Timur	30.611.208.000	25.520.279.483	78.783.909.000	77.900.629.860	-	-	109.395.117.000	103.420.909.343
501	Provinsi Gorontalo	167.802.393.000	143.536.467.023	187.928.534.000	187.329.830.802	1.103.138.000	915.839.452	356.834.065.000	331.782.137.277
502	Kab. Boalemo	81.145.321.000	56.293.239.970	91.814.562.000	89.669.820.161	-	-	172.959.883.000	145.963.060.131
503	Kab. Gorontalo	126.334.781.000	124.048.863.253	202.656.841.000	196.557.388.014	6.599.982.000	4.277.924.929	335.591.604.000	324.884.176.196
504	Kota Gorontalo	40.831.661.000	39.925.008.986	97.816.941.000	94.415.764.852	-	-	138.648.602.000	134.340.773.838
505	Kab. Pohuwato	85.841.697.000	83.162.274.546	90.631.537.000	86.781.414.553	15.696.111.000	15.616.169.782	192.169.345.000	185.559.858.881
506	Kab. Bone Bolango	80.049.707.000	77.089.280.867	106.996.578.000	101.137.799.617	4.851.146.000	2.700.413.705	191.897.431.000	180.927.494.189
507	Kab. Gorontalo Utara	66.621.571.000	64.104.057.802	89.019.188.000	87.078.609.054	-	-	155.640.759.000	151.182.666.856
508	Provinsi Kepulauan Riau	160.607.688.000	157.564.483.366	313.825.400.000	312.075.070.439	-	-	474.433.088.000	469.639.553.805
509	Kab. Natuna	83.292.763.000	73.848.309.559	64.681.830.000	62.839.255.969	636.000.000	636.000.000	148.610.593.000	137.323.565.528
510	Kab. Kepulauan Anambas	85.130.560.000	77.454.547.851	47.446.887.000	45.817.576.554	-	-	132.577.447.000	123.272.124.405
511	Kab. Karimun	87.307.874.000	83.656.032.600	130.310.412.000	127.315.900.957	-	-	217.618.286.000	210.971.933.557
512	Kota Batam	32.795.260.000	27.107.074.819	393.345.103.000	384.301.494.600	-	-	426.140.363.000	411.408.569.419
513	Kota Tanjung Pinang	29.845.347.000	29.419.121.593	96.430.671.000	94.170.168.445	-	-	126.276.018.000	123.589.290.038
514	Kab. Lingga	116.111.004.000	101.600.873.910	95.353.823.000	91.792.141.152	-	-	211.464.827.000	193.393.015.062
515	Kab. Bintan	53.270.446.000	52.184.150.389	103.919.939.000	100.786.764.094	-	-	157.190.385.000	152.970.914.483
516	Provinsi Papua Barat	92.092.794.000	73.039.719.402	5.726.852.000	4.566.472.200	-	-	97.819.646.000	77.606.191.602

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	DAK FISIK		DAK NONFISIK		HIBAH		Pagu	Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)+(8)+(10)	(13)=(7)+(9)+(11)
517	Kab. Fak Fak	196.456.244.000	185.599.668.432	93.575.852.000	92.457.296.917	-	-	290.032.096.000	278.056.965.349
518	Kab. Manokwari	111.283.740.000	94.664.392.102	143.872.100.000	138.660.815.988	-	-	255.155.840.000	233.325.208.090
519	Kab. Sorong	155.846.205.000	150.526.450.029	141.393.634.000	138.335.126.952	-	-	297.239.839.000	288.861.576.981
520	Kota Sorong	68.664.143.000	63.873.683.728	126.615.169.000	123.553.161.699	-	-	195.279.312.000	187.426.845.427
521	Kab. Raja Ampat	116.247.389.000	107.129.962.228	89.016.571.000	88.832.125.415	23.697.579.000	23.697.579.000	228.961.539.000	219.659.666.643
522	Kab. Sorong Selatan	76.119.091.000	75.786.549.335	95.546.442.000	94.242.254.969	-	-	171.665.533.000	170.028.804.304
523	Kab. Teluk Bintuni	56.154.687.000	53.842.777.804	93.007.154.000	87.502.370.793	-	-	149.161.841.000	141.345.148.597
524	Kab. Teluk Wondama	104.214.286.000	102.174.500.853	44.268.017.000	41.442.154.402	12.881.688.000	12.881.688.000	161.363.991.000	156.498.343.255
525	Kab. Kaimana	80.780.120.000	75.379.750.776	70.383.829.000	68.589.636.396	-	-	151.163.949.000	143.969.387.172
526	Kab. Maybrat	58.437.448.000	57.728.022.082	53.148.171.000	52.803.957.020	-	-	111.585.619.000	110.531.979.102
527	Kab. Tambrau	176.765.866.000	89.592.011.994	46.861.258.000	46.166.765.595	-	-	223.627.124.000	135.758.777.589
528	Kab. Manokwari Selatan	122.965.062.000	121.135.939.450	33.025.775.000	32.009.614.871	-	-	155.990.837.000	153.145.554.321
529	Kab. Pegunungan Arfak	64.258.106.000	63.292.839.910	37.676.454.000	36.709.727.278	-	-	101.934.560.000	100.002.567.188
530	Provinsi Sulawesi Barat	99.799.974.000	98.773.875.484	203.908.229.000	203.438.591.400	21.844.276.000	21.844.276.000	325.552.479.000	324.056.742.884
531	Kab. Majene	42.377.088.000	41.802.623.094	133.250.874.000	131.876.063.382	-	-	175.627.962.000	173.678.686.476
532	Kab. Mamuju	138.375.687.000	121.511.271.877	163.695.776.000	159.785.535.882	-	-	302.071.463.000	281.296.807.759
533	Kab. Polewali Mandar	74.786.730.000	72.360.968.912	207.258.227.000	204.650.938.064	3.732.000.000	3.582.000.000	285.776.957.000	280.593.906.976
534	Kab. Mamasa	95.841.055.000	94.359.210.342	131.763.737.000	130.655.116.551	1.866.000.000	1.818.000.000	229.470.792.000	226.832.326.893
535	Kab. Pasangkayu	103.477.705.000	102.005.217.974	79.644.586.000	76.780.392.525	-	-	183.122.291.000	178.785.610.499
536	Kab. Mamuju Tengah	82.474.072.000	82.048.913.591	71.939.301.000	69.740.965.625	-	-	154.413.373.000	151.789.879.216
537	Provinsi Kalimantan Utara	132.379.441.000	127.296.730.178	118.509.321.000	118.099.591.263	-	-	250.888.762.000	245.396.321.441
538	Provinsi Papua Tengah	154.228.879.000	129.948.851.873	10.996.475.000	8.871.760.500	-	-	165.225.354.000	138.820.612.373
539	Provinsi Papua Selatan	144.923.465.000	138.153.415.619	6.802.926.000	6.791.991.600	-	-	151.726.391.000	144.945.407.219
540	Provinsi Papua Pegunungan	99.790.281.000	95.164.029.850	3.532.214.000	3.532.214.000	-	-	103.322.495.000	98.696.243.850
541	Provinsi Papua Barat Daya	100.758.051.000	68.128.220.609	7.191.455.000	5.999.072.290	-	-	107.949.506.000	74.127.292.899
542	Kab. Bulungan	50.109.561.000	48.766.052.965	95.263.839.000	92.583.291.450	-	-	145.373.400.000	141.349.344.415
543	Kab. Malinau	61.041.492.000	59.607.098.205	69.753.159.000	64.846.074.032	-	-	130.794.651.000	124.453.172.237
544	Kab. Nunukan	97.721.978.000	94.397.928.174	114.717.466.000	110.533.182.455	-	-	212.439.444.000	204.931.110.629
545	Kota Tarakan	22.676.898.000	21.892.490.518	93.506.932.000	88.518.520.021	-	-	116.183.830.000	110.411.010.539
546	Kab. Tana Tidung	19.052.548.000	18.201.140.625	25.454.895.000	24.695.747.678	17.314.145.000	17.314.145.000	61.821.588.000	60.211.033.303
Blokir Anggaran				-	-	11.009.093.000		11.009.093.000	-
Jumlah		53.822.463.835.000	50.890.077.113.845	133.106.472.004.000	130.441.233.738.467	2.398.948.245.000	2.207.162.260.694	189.327.884.084.000	183.538.473.113.006

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND IsDB ISFD		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	Provinsi Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kab. Aceh Barat	16.352.190.000	16.352.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.352.190.000	16.352.190.000
3	Kab. Aceh Besar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kab. Aceh Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kab. Aceh Singkil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kab. Aceh Tengah	16.166.612.000	16.166.612.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.166.612.000	16.166.612.000
7	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kab. Aceh Timur	300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000.000	-
9	Kab. Aceh Utara	600.000.000	588.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	588.000.000
10	Kab. Bireuen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kab. Pidie	600.000.000	252.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	252.000.000
12	Kab. Simeulue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kota Sabang	750.000.000	390.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000.000	390.000.000
15	Kota Langsa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Kota Lhokseumawe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kab. Gayo Lues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kab. Aceh Jaya	14.527.058.000	14.527.058.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.527.058.000	14.527.058.000
20	Kab. Nagan Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kab. Aceh Tamiang	17.861.400.000	17.861.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.861.400.000	17.861.400.000
22	Kab. Bener Meriah	24.781.234.000	24.781.234.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.781.234.000	24.781.234.000
23	Kab. Pidie Jaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kota Subulussalam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Provinsi Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Kab. Asahan	35.393.104.000	35.393.104.000	-	-	-																	

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND IsDB ISFD		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
(1)	(5)	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	(27)	(28)
77	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	Kab. Kampar	2.238.000.000	2.238.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.238.000.000	2.238.000.000
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	Kab. Siak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Kota Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	Kota Pekanbaru	800.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.000.000	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Provinsi Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Kab. Batanghari	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.406.257.000	20.760.997.313	-	-	-	-	23.406.257.000	20.760.997.313
94	Kab. Bungo	28.996.977.000	28.867.450.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.996.977.000	28.867.450.516
95	Kab. Kerinci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	Kab. Merangin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	Kab. Muaro Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Kab. Sarolangun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	540.000.000	534.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.000.000	534.000.000
101	Kab. Tebo	24.533.453.000	24.533.453.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.533.453.000	24.533.453.000
102	Kota Jambi	1.488.000.000	1.458.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.488.000.000	1.458.000.000
103	Kota Sungai Penu																						

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND IsDB ISFD		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah	
(1)	(2)	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	(27)	(28)	
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	
155	Kab. Cianjur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
156	Kab. Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
157	Kab. Garut	-	-	12.710.116.000	12.402.487.750	-	-	4.696.723.000	4.696.723.000	12.710.116.000	12.402.487.750	-	-	1.077.500.000	-	-	-	-	-	-	-	18.484.339.000	17.099.210.750	
158	Kab. Indramayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
159	Kab. Karawang	5.610.000.000	5.610.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.610.000.000	5.610.000.000	
160	Kab. Kuningan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
161	Kab. Majalengka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
162	Kab. Purwakarta	1.404.000.000	1.338.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.404.000.000	1.338.000.000	
163	Kab. Subang	-	-	3.158.155.000	2.418.125.000	-	-	17.868.090.000	17.526.995.000	3.158.155.000	2.418.125.000	-	-	2.652.500.000	-	-	-	-	-	-	-	23.678.745.000	19.945.120.000	
164	Kab. Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165	Kab. Sumedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.881.561.000	4.658.979.735	4.881.561.000	4.658.979.735
166	Kab. Tasikmalaya	-	-	1.110.714.000	1.110.714.000	-	-	4.161.079.000	4.084.638.360	1.110.714.000	1.110.714.000	-	-	1.562.500.000	-	-	-	-	-	-	-	6.854.293.000	5.195.352.360	
167	Kota Bandung	4.616.000.000	4.463.898.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.616.000.000	4.463.898.000	
168	Kota Bekasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
169	Kota Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
170	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.943.134.000	3.936.526.784	3.943.134.000	3.936.526.784
171	Kota Depok	3.216.000.000	1.962.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.216.000.000	1.962.000.000	
172	Kota Sukabumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
173	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
174	Kota Cimahi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
175	Kota Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
176	Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
177	Kab. Pangandaran	-	-	-	-</																			

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		UPLAND IsdB		UPLAND IFAD		UPLAND IsdB ISFD		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
233	Kab. Magetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.615.000.000	3.432.558.361	3.615.000.000	3.432.558.361
234	Kab. Malang	-	-	1.669.548.000	1.512.915.400	-	-	6.023.725.000	5.838.767.600	1.669.548.000	1.512.915.400	2.100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9.793.273.000	7.351.683.000	
235	Kab. Mojokerto	14.902.529.000	14.902.529.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.902.529.000	14.902.529.000
236	Kab. Nganjuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	Kab. Ngawi	900.000.000	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900.000.000	900.000.000
238	Kab. Pacitan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	Kab. Pamekasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Kab. Pasuruan	8.143.557.000	8.143.557.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.143.557.000	8.143.557.000
241	Kab. Ponorogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	Kab. Probolinggo	936.000.000	936.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	936.000.000	936.000.000
243	Kab. Sampang	10.294.510.000	10.294.510.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.294.510.000	10.294.510.000
244	Kab. Sidoarjo	1.074.000.000	942.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.074.000.000	942.000.000
245	Kab. Situbondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	Kab. Sumenep	-	-	7.812.091.000	7.088.446.109	-	-	538.265.000	538.265.000	7.812.091.000	7.088.446.109	2.225.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.575.356.000	7.626.711.109
247	Kab. Trenggalek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	Kab. Tuban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	Kab. Tulungagung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Kota Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	Kota Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	Kota Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	Kota Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	Kota Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	Kota Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	Kota Batu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Kab. Bengkayang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	Kab. Landak	600.000.000	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	600.000.000
262	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	Kab. Ketapang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	Kab. Mempawah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	Kab. Sambas	1.128.000.000	1.126.118.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128.000.000	1.126.118.000
266	Kab. Sanggau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	Kab. Simang	10.033.402.000	10.033.402.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.033.402.000	10.033.402.000
268	Kota Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Kota Singkawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	Kab. Sekadai	19.376.913.000	19.376.913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.376.913.000	19.376.913.000
271	Kab. Melawi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	Kab. Kayong Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	Kab. Kubu Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	Kab. Barito Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	Kab. Kapuas	510.000.000	270.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.000.000	270.000.000
278	Kab. Kotawaringin Barat	498.000.000	384.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	498.000.000	384.000.000
279	Kab. Kotawaringin Timur	5.726.244.000	5.726.244.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.726.244.000	5.726.244.000
280	Kota Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.946.750.000	2.719.227.295	2.946.750.000	2.719.227.295
281	Kab. Kaligang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	Kab. Sengau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	Kab. Sukamara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	Kab. Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	Kab. Banjar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	Kab. Barito Kuala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	11.492.179.000	11.492.179.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.492.179.000	11.492.179.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	Kab. Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	Kab. Tabalong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	Kab. Tanah Laut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	Kab. Tapin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	Kota Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	Kota Banjarmasin	750.000.000	270.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.000.000	270.000.000
301	Kab. Balangan	1.128.000.000	420.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128.000.000	420.000.000
302	Kab. Tanah Bumbu	1.128.000.000	1.122.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.128.000.000	1.122.000.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	Kab. Berau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	Kab. Kutai Barat	600.000.000	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000.000	600.000.000
307	Kab. Kutai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	Kab. Paser	4.967.700.000	4.967.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.967.700.000	4.967.700.000
309	Kota Balikpapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	Kota Bontang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

[illegible]

[illegible]

LAPORAN REALISASI ANGGARAN HIBAH KEPADA DAERAH
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

No	Daerah	Hibah Jalan/Sanitasi Air Limbah		IPDMIP-IFAD		READSI		UPLAND IsDB		UPLAND IFAD		UPLAND IsDB ISFD		PCSP		Bio CF ISFL		MRT		Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah		Total Pagu Hibah	Total Realisasi Hibah
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)			(27)	(28)
545	Kota Tarakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	Kab. Tana Tidung	17.314.145.000	17.314.145.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.314.145.000	17.314.145.000
Blokir Anggaran																		11.009.093.000				11.009.093.000	
Jumlah		1.324.500.772.000	1.295.801.218.516	84.180.405.000	79.793.885.455	49.365.113.000	43.381.003.471	105.163.820.000	102.188.223.002	84.180.405.000	79.793.885.455	27.562.500.000	8.500.000.000	4.790.000.000	4.790.000.000	23.406.257.000	20.760.997.313	690.727.000.000	576.240.722.024	76.243.285.000	75.706.210.913	2.398.948.245.000	2.207.162.260.894

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
		-	-	17.849.482.000	17.849.482.000	-	-	-	-	-	-	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000	-	-	4.294.842.517.000	4.294.842.517.000
1	Provinsi Aceh																
2	Kab. Aceh Barat	236.111.096.000	236.111.096.000	19.463.679.000	19.463.679.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.574.775.000	255.574.775.000
3	Kab. Aceh Besar	440.931.838.000	440.656.207.377	11.580.222.000	11.580.222.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	452.512.060.000	452.236.429.377
4	Kab. Aceh Selatan	196.339.440.000	196.339.440.000	5.732.107.000	5.732.107.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202.071.547.000	202.071.547.000
5	Kab. Aceh Singkil	96.528.106.000	96.528.106.000	5.653.498.000	2.826.749.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.181.604.000	99.354.855.000
6	Kab. Aceh Tengah	222.523.597.000	222.401.032.860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222.523.597.000	222.401.032.860
7	Kab. Aceh Tenggara	281.372.115.000	281.179.293.300	14.041.281.000	14.041.281.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295.413.396.000	295.220.574.300
8	Kab. Aceh Timur	395.019.867.000	395.019.867.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	395.019.867.000	395.019.867.000
9	Kab. Aceh Utara	650.152.994.000	650.152.946.200	6.164.206.000	6.164.206.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	656.317.200.000	656.317.152.200
10	Kab. Bireuen	462.263.930.000	462.263.930.000	18.388.780.000	18.388.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.652.710.000	480.652.710.000
11	Kab. Pidie	538.343.872.000	537.067.511.000	5.531.525.000	5.531.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	543.875.397.000	542.599.036.000
12	Kab. Simeulue	106.573.474.000	106.573.474.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.573.474.000	106.573.474.000
13	Kota Banda Aceh	77.088.372.000	77.088.372.000	11.429.173.000	11.429.173.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.517.545.000	88.517.545.000
14	Kota Sabang	15.636.770.000	15.636.770.000	6.022.870.000	6.022.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.659.640.000	21.659.640.000
15	Kota Langsa	58.843.788.000	58.690.041.871	17.480.018.000	17.480.018.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.323.806.000	76.170.059.871
16	Kota Lhokseumawe	62.402.165.000	62.402.165.000	5.485.809.000	5.485.809.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.887.974.000	67.887.974.000
17	Kab. Gayo Lues	110.597.264.000	110.597.264.000	12.257.222.000	12.257.222.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.854.486.000	122.854.486.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	118.693.008.000	118.693.008.000	5.768.996.000	2.884.498.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.462.004.000	121.577.506.000
19	Kab. Aceh Jaya	128.024.164.000	128.024.164.000	11.799.620.000	11.799.620.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.823.784.000	139.823.784.000
20	Kab. Nagan Raya	172.968.346.000	172.950.946.900	17.489.344.000	17.489.344.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.457.690.000	190.440.290.900
21	Kab. Aceh Tamiang	177.156.461.000	176.142.439.000	11.219.863.000	11.219.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.376.324.000	187.362.302.000
22	Kab. Bener Meriah	173.100.709.000	173.100.709.000	13.135.467.000	13.135.467.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.236.176.000	186.236.176.000
23	Kab. Pidie Jaya	169.168.059.000	169.168.059.000	12.630.007.000	12.630.007.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.798.066.000	181.798.066.000
24	Kota Subulussalam	69.058.548.000	69.058.548.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.058.548.000	69.058.548.000
25	Provinsi Sumatera Utara	-	-	5.811.273.000	2.905.636.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.811.273.000	2.905.636.500
26	Kab. Asahan	174.975.735.000	173.925.275.000	13.120.675.000	13.120.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.096.410.000	187.045.950.000
27	Kab. Deli	136.561.076.000	136.561.076.000	15.166.908.000	15.166.908.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.727.984.000	151.727.984.000
28	Kab. Deli Serdang	352.699.966.000	352.469.480.800	22.145.932.000	22.145.932.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374.845.898.000	374.615.412.800
29	Kab. Karo	205.413.540.000	205.413.540.000	12.716.954.000	12.716.954.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.130.494.000	218.130.494.000
30	Kab. Labuhanbatu	77.360.136.000	77.359.788.000	18.223.741.000	3.344.183.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.583.877.000	80.703.971.500
31	Kab. Langkat	246.338.929.000	245.497.529.000	18.595.711.000	12.880.338.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.934.640.000	258.357.867.000
32	Kab. Mandailing Natal	307.414.328.000	306.474.999.740	17.179.851.000	17.179.851.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.594.179.000	323.654.850.740
33	Kab. Nias	151.467.542.000	151.467.542.000	28.062.697.000	28.062.697.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.530.239.000	179.530.239.000
34	Kab. Simalungun	343.668.854.000	343.668.854.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343.668.854.000	343.668.854.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	167.475.022.000	166.715.317.000	20.918.167.000	17.640.829.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188.393.189.000	184.356.146.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	142.095.967.000	142.095.967.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.095.967.000	142.095.967.000
37	Kab. Tapanuli Utara	199.823.835.000	199.129.952.200	6.867.270.000	6.867.270.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.691.105.000	205.997.222.200
38	Kab. Toba Samosir	177.678.006.000	177.678.006.000	6.938.526.000	6.938.526.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184.616.532.000	184.616.532.000
39	Kota Binjai	-	-	20.872.182.000	20.872.182.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.872.182.000	20.872.182.000
40	Kota Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kota Pematang Siantar	-	-	6.737.985.000	6.737.985.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.737.985.000	6.737.985.000
42	Kota Sibolga	-	-	6.873.527.000	6.873.527.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.873.527.000	6.873.527.000
43	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kota Padang Sidempuan	33.396.536.000	33.396.536.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.396.536.000	33.396.536.000
46	Kab. Pakpak Bharat	41.373.926.000	41.315.863.400	15.378.725.000	15.378.725.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.752.651.000	56.694.588.400
47	Kab. Nias Selatan	404.618.789.000	403.004.364.499	20.083.542.000	20.083.542.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.702.331.000	423.087.906.499
48	Kab. Humbang Hasundutan	128.998.873.000	128.998.873.000	14.782.971.000	14.782.971.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.781.844.000	143.781.844.000
49	Kab. Serdang Bedagai	210.790.409.000	210.727.332.038	12.398.992.000	12.398.992.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.189.401.000	223.126.324.038
50	Kab. Samosir	103.519.877.000	103.519.877.000	18.387.061.000	18.387.061.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.906.938.000	121.906.938.000
51	Kab. Batu Bara	136.017.878.000	136.017.878.000	12.708.969.000	12.708.969.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.726.847.000	148.726.847.000
52	Kab. Padang Lawas	237.180.396.000	237.180.396.000	11.474.679.000	5.737.339.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.655.075.000	242.917.735.500
53	Kab. Padang Lawas Utara	300.688.811.000	299.951.847.088	19.388.447.000	13.275.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.077.258.000	313.227.272.088
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	60.527.904.000	60.527.904.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.527.904.000	60.527.904.000
55	Kab. Labuhanbatu Utara	89.845.361.000	89.845.361.000	13.805.352.000	13.805.352.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.650.713.000	103.650.713.000
56	Kab. Nias Utara	110.928.711.000	110.521.967.400	22.216.995.000	22.216.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.145.706.000	132.738.962.400
57	Kab. Nias Barat	96.413.580.000	94.700.273.627	22.904.780.000	19.425.986.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.318.360.000	114.126.259.627
58	Kota Gunungsitoli	85.506.324.000	85.506.324.000	18.183.837.000	18.183.837.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.690.161.000	103.690.161.000
59	Provinsi Sumatera Barat	-	-	13.249.284.000	13.249.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.249.284.000	13.249.284.000
60	Kab. Lima Puluh Kota	84.689.970.000	84.689.970.000	7.123.654.000	7.123.654.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.813.624.000	91.813.624.000
61	Kab. Agam	97.042.778.000	97.042.778.000	7.527.067.000	7.527.067.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.569.845.000	104.569.845.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	46.496.234.000	46.496.234.000	20.978.611.000	20.978.611.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.474.845.000	67.474.845.000
63	Kab. Padang Pariaman	103.458.459.000	103.458.459.000	27.827.229.000	27.827.229.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.285.688.000	131.285.688.000
64	Kab. Pasaman	71.637.391.000	71.637.391.000	6.916.344.000	6.916.344.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.553.735.000	78.553.735.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
65	Kab. Pesisir Selatan	167.649.926.000	167.649.926.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.649.926.000	167.649.926.000
66	Kab. Sijunjung	62.949.590.000	62.949.590.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.949.590.000	62.949.590.000
67	Kab. Solok	81.252.831.000	81.252.831.000	7.216.752.000	7.216.752.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.469.583.000	88.469.583.000
68	Kab. Tanah Datar	74.085.768.000	74.085.768.000	22.334.288.000	22.334.288.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.420.056.000	96.420.056.000
69	Kota Bukit Tinggi	-	-	7.154.115.000	7.154.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.154.115.000	7.154.115.000
70	Kota Padang Panjang	-	-	21.772.057.000	21.772.057.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.772.057.000	21.772.057.000
71	Kota Padang	-	-	8.278.678.000	8.278.678.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.278.678.000	8.278.678.000
72	Kota Payakumbuh	-	-	18.975.765.000	18.975.765.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.975.765.000	18.975.765.000
73	Kota Sawahlunto	21.553.195.000	21.553.195.000	13.892.503.000	13.892.503.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.445.698.000	35.445.698.000
74	Kota Solok	-	-	15.375.053.000	15.375.053.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.375.053.000	15.375.053.000
75	Kota Pariaman	41.844.428.000	41.844.428.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.844.428.000	41.844.428.000
76	Kab. Pasaman Barat	99.809.761.000	99.809.761.000	7.032.779.000	7.032.779.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.842.540.000	106.842.540.000
77	Kab. Dharmasraya	55.320.687.000	55.320.687.000	20.745.042.000	20.745.042.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.065.729.000	76.065.729.000
78	Kab. Solok Selatan	42.891.662.000	42.891.662.000	7.078.872.000	7.078.872.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.970.534.000	49.970.534.000
79	Provinsi Riau	-	-	5.862.295.000	5.862.295.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.862.295.000	5.862.295.000
80	Kab. Bengkalis	131.920.501.000	131.472.054.870	15.131.834.000	15.131.834.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.052.335.000	146.603.888.870
81	Kab. Indragiri Hilir	183.427.863.000	183.427.863.000	13.356.212.000	2.810.478.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196.784.075.000	186.238.341.500
82	Kab. Indragiri Hulu	155.192.663.000	155.041.071.998	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.192.663.000	155.041.071.998
83	Kab. Kampar	234.396.785.000	234.214.379.400	28.109.186.000	2.876.155.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262.505.971.000	237.090.534.900
84	Kab. Kuantan Singingi	180.683.852.000	180.683.852.000	7.154.301.000	7.154.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.838.153.000	187.838.153.000
85	Kab. Pelalawan	104.036.178.000	104.036.178.000	13.461.113.000	13.461.113.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117.497.291.000	117.497.291.000
86	Kab. Rokan Hilir	149.063.440.000	148.709.668.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.063.440.000	148.709.668.100
87	Kab. Rokan Hulu	141.163.044.000	139.469.171.377	18.425.595.000	18.425.595.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.588.639.000	157.894.766.377
88	Kab. Siak	116.946.377.000	116.904.655.270	19.908.244.000	19.908.244.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.854.621.000	136.812.899.270
89	Kota Dumai	-	-	33.591.087.000	33.591.087.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.591.087.000	33.591.087.000
90	Kota Pekanbaru	-	-	13.579.229.000	10.358.708.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.579.229.000	10.358.708.500
91	Kab. Kepulauan Meranti	97.240.042.000	97.240.042.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.240.042.000	97.240.042.000
92	Provinsi Jambi	-	-	5.622.186.000	5.622.186.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.622.186.000	5.622.186.000
93	Kab. Batanghari	101.677.831.000	101.677.831.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.677.831.000	101.677.831.000
94	Kab. Bungo	123.244.825.000	123.241.092.981	13.660.037.000	13.660.037.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.904.862.000	136.901.129.981
95	Kab. Kerinci	217.807.174.000	215.842.973.030	11.549.134.000	5.774.567.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.356.308.000	221.617.540.030
96	Kab. Merangin	174.932.338.000	174.932.338.000	12.829.287.000	12.829.287.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.761.625.000	187.761.625.000
97	Kab. Muaro Jambi	131.843.866.000	131.843.866.000	20.037.293.000	20.037.293.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.881.159.000	151.881.159.000
98	Kab. Sarolangun	130.555.728.000	129.346.708.610	6.048.373.000	6.048.373.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.604.101.000	135.395.081.610
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	100.455.713.000	100.455.713.000	20.084.947.000	20.084.947.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.540.660.000	120.540.660.000
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	71.208.483.000	71.208.483.000	6.808.647.000	6.808.647.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.017.130.000	78.017.130.000
101	Kab. Tebo	113.934.817.000	113.934.817.000	12.454.852.000	12.454.852.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.389.669.000	126.389.669.000
102	Kota Jambi	-	-	11.796.475.000	11.796.475.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.796.475.000	11.796.475.000
103	Kota Sungai Penuh	50.414.782.000	50.414.782.000	7.085.261.000	7.085.261.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.500.043.000	57.500.043.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	6.625.541.000	6.625.541.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.625.541.000	6.625.541.000
105	Kab. Lahat	289.604.004.000	289.277.332.200	11.801.242.000	11.801.242.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.405.246.000	301.078.574.200
106	Kab. Musi Banyuasin	229.955.545.000	229.955.545.000	24.672.901.000	24.672.901.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.628.446.000	254.628.446.000
107	Kab. Musi Rawas	173.735.014.000	173.735.014.000	25.620.175.000	25.620.175.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.355.189.000	199.355.189.000
108	Kab. Muara Enim	223.347.712.000	223.347.712.000	6.375.586.000	6.375.586.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.723.298.000	229.723.298.000
109	Kab. Ogan Komering Ilir	298.997.406.000	297.621.127.000	18.478.838.000	18.478.838.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317.476.244.000	316.099.965.000
110	Kab. Ogan Komering Ulu	131.706.285.000	131.706.285.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.706.285.000	131.706.285.000
111	Kota Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	Kota Prabumulih	10.560.088.000	10.560.088.000	20.112.860.000	20.112.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.672.948.000	30.672.948.000
113	Kota Pagar Alam	-	-	6.234.476.000	6.234.476.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.234.476.000	6.234.476.000
114	Kota Lubuk Linggau	-	-	13.372.032.000	10.332.043.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.372.032.000	10.332.043.500
115	Kab. Banyuasin	275.047.675.000	274.550.458.600	14.490.258.000	14.490.258.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.537.933.000	289.040.716.600
116	Kab. Ogan Ilir	198.567.771.000	198.567.771.000	26.586.084.000	26.586.084.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.153.855.000	225.153.855.000
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	270.231.772.000	270.231.772.000	12.981.313.000	12.981.313.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.213.085.000	283.213.085.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	217.332.948.000	217.285.528.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.332.948.000	217.285.528.400
119	Kab. Empat Lawang	129.517.733.000	129.517.733.000	12.843.788.000	9.278.223.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.361.521.000	138.795.956.000
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	63.356.444.000	63.356.444.000	12.963.416.000	12.963.416.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.319.860.000	76.319.860.000
121	Kab. Musi Rawas Utara	82.906.899.000	82.906.899.000	33.353.070.000	33.353.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.259.969.000	116.259.969.000
122	Provinsi Bengkulu	-	-	24.828.092.000	15.676.629.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.828.092.000	15.676.629.000
123	Kab. Bengkulu Selatan	110.220.296.000	110.220.296.000	12.365.304.000	12.365.304.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.585.600.000	122.585.600.000
124	Kab. Bengkulu Utara	179.734.541.000	179.734.541.000	13.193.711.000	13.193.711.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.928.252.000	192.928.252.000
125	Kab. Rejang Lebong	107.287.706.000	107.287.706.000	12.258.740.000	8.936.579.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.546.446.000	116.224.285.000
126	Kota Bengkulu	-	-	6.426.780.000	6.426.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.426.780.000	6.426.780.000
127	Kab. Kaur	144.802.956.000	144.481.219.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.802.956.000	144.481.219.600
128	Kab. Seluma	151.226.787.000	151.226.787.000	5.687.018.000	5.687.018.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.913.805.000	156.913.805.000
129	Kab. Mukomuko	123.118.760.000	123.118.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.118.760.000	123.118.760.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
130	Kab. Lebong	74.561.277.000	74.069.530.200	11.748.284.000	11.748.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86.309.561.000	85.817.814.200
131	Kab. Kepahiang	85.620.657.000	84.933.646.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.620.657.000	84.933.646.000
132	Kab. Bengkulu Tengah	110.120.845.000	109.600.203.752	12.115.245.000	6.057.622.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.236.090.000	115.567.826.252
133	Provinsi Lampung	-	-	27.263.797.000	27.263.797.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.263.797.000	27.263.797.000
134	Kab. Lampung Barat	118.449.735.000	118.449.735.000	20.106.738.000	20.106.738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.556.473.000	138.556.473.000
135	Kab. Lampung Selatan	260.644.885.000	260.644.885.000	24.260.630.000	24.260.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284.905.515.000	284.905.515.000
136	Kab. Lampung Tengah	318.990.551.000	318.990.551.000	7.321.371.000	7.321.371.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	326.311.922.000	326.311.922.000
137	Kab. Lampung Utara	209.794.103.000	209.794.103.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.794.103.000	209.794.103.000
138	Kab. Lampung Timur	272.698.701.000	271.562.076.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.698.701.000	271.562.076.800
139	Kab. Tanggamus	268.274.256.000	265.453.475.654	18.800.460.000	18.800.460.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.074.716.000	284.253.935.654
140	Kab. Tulang Bawang	135.119.881.000	135.119.881.000	21.321.275.000	21.321.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.441.156.000	156.441.156.000
141	Kab. Way Kanan	200.664.640.000	200.664.640.000	6.264.838.000	6.264.838.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.929.478.000	206.929.478.000
142	Kota Bandar Lampung	-	-	17.507.567.000	17.507.567.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.507.567.000	17.507.567.000
143	Kota Metro	-	-	28.837.763.000	28.837.763.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.837.763.000	28.837.763.000
144	Kab. Pesawaran	147.612.573.000	147.612.573.000	5.653.936.000	5.653.936.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153.266.509.000	153.266.509.000
145	Kab. Pringsewu	121.678.991.000	121.678.991.000	19.301.985.000	19.301.985.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.980.976.000	140.980.976.000
146	Kab. Mesuji	92.336.930.000	92.336.929.909	21.369.597.000	21.369.597.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.706.527.000	113.706.526.909
147	Kab. Tulang Bawang Barat	92.869.598.000	92.869.598.000	12.992.173.000	12.992.173.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.861.771.000	105.861.771.000
148	Kab. Pesisir Barat	96.753.871.000	96.753.871.000	22.923.226.000	22.923.226.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.677.097.000	119.677.097.000
149	Provinsi DKI Jakarta	-	-	644.090.217.000	44.090.217.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.090.217.000	44.090.217.000
150	Provinsi Jawa Barat	-	-	36.848.779.000	36.848.779.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.848.779.000	36.848.779.000
151	Kab. Bandung	379.199.994.000	378.440.062.000	39.677.140.000	39.677.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	418.877.134.000	418.117.202.000
152	Kab. Bekasi	262.200.705.000	262.200.705.000	24.121.358.000	24.121.358.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286.322.063.000	286.322.063.000
153	Kab. Bogor	610.669.540.000	607.936.984.700	5.563.166.000	2.781.583.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	616.232.706.000	610.718.567.700
154	Kab. Ciamis	269.210.400.000	269.210.400.000	20.421.137.000	20.421.137.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.631.537.000	289.631.537.000
155	Kab. Cianjur	457.358.593.000	457.358.593.000	25.882.522.000	25.882.522.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.241.115.000	483.241.115.000
156	Kab. Cirebon	472.961.187.000	472.546.922.200	5.461.110.000	5.461.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478.422.297.000	478.008.032.200
157	Kab. Garut	499.383.487.000	499.383.487.000	40.867.435.000	40.867.435.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.250.922.000	540.250.922.000
158	Kab. Indramayu	352.757.964.000	352.757.964.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352.757.964.000	352.757.964.000
159	Kab. Karawang	356.699.344.000	356.699.344.000	18.969.890.000	18.969.890.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.669.234.000	375.669.234.000
160	Kab. Kuningan	354.770.192.000	354.770.192.000	13.319.623.000	10.539.334.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.089.815.000	365.309.526.500
161	Kab. Majalengka	333.449.644.000	333.449.644.000	11.785.482.000	11.785.482.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345.235.126.000	345.235.126.000
162	Kab. Purwakarta	194.840.786.000	194.840.786.000	12.757.930.000	12.757.930.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.598.716.000	207.598.716.000
163	Kab. Subang	284.586.243.000	283.229.717.000	13.471.894.000	13.471.894.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298.058.137.000	296.701.611.000
164	Kab. Sukabumi	450.202.529.000	450.110.304.788	5.451.314.000	5.451.314.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455.653.843.000	455.561.68.788
165	Kab. Sumedang	280.909.604.000	280.685.683.000	20.379.684.000	20.379.684.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	301.289.288.000	301.065.367.000
166	Kab. Tasikmalaya	406.854.234.000	406.854.234.000	15.091.502.000	15.091.502.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	421.945.736.000	421.945.736.000
167	Kota Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	Kota Bekasi	-	-	11.376.692.000	5.688.346.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.376.692.000	5.688.346.000
169	Kota Bogor	-	-	28.047.664.000	28.047.664.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.047.664.000	28.047.664.000
170	Kota Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	Kota Depok	-	-	27.892.984.000	27.892.984.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.892.984.000	27.892.984.000
172	Kota Sukabumi	-	-	20.857.154.000	20.857.154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.857.154.000	20.857.154.000
173	Kota Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	Kota Cimahi	-	-	38.445.593.000	38.445.593.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.445.593.000	38.445.593.000
175	Kota Banjar	18.143.664.000	18.143.664.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.143.664.000	18.143.664.000
176	Kab. Bandung Barat	246.984.622.000	246.984.621.850	5.447.329.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252.431.951.000	246.984.621.850
177	Kab. Pangandaran	99.946.657.000	99.946.557.260	24.756.756.000	24.756.756.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.703.413.000	124.703.313.260
178	Provinsi Jawa Tengah	-	-	37.997.568.000	37.997.568.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.997.568.000	37.997.568.000
179	Kab. Banjarnegara	287.835.862.000	287.835.862.000	11.624.428.000	5.812.214.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.460.290.000	293.648.076.000
180	Kab. Banyumas	358.605.511.000	358.605.511.000	20.771.888.000	20.771.888.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379.377.399.000	379.377.399.000
181	Kab. Batang	227.521.941.000	227.521.941.000	5.544.353.000	5.544.353.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	233.066.294.000	233.066.294.000
182	Kab. Blora	268.842.253.000	268.842.253.000	26.113.419.000	26.113.419.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.955.672.000	294.955.672.000
183	Kab. Boyolali	270.805.632.000	270.805.632.000	21.405.258.000	21.405.258.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	292.210.890.000	292.210.890.000
184	Kab. Brebes	342.339.270.000	342.334.270.000	22.879.849.000	11.439.924.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.219.119.000	353.774.194.500
185	Kab. Cilacap	332.740.035.000	332.740.035.000	17.067.613.000	8.533.806.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349.807.648.000	341.273.841.500
186	Kab. Demak	265.035.415.000	265.035.415.000	20.070.251.000	20.070.251.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285.105.666.000	285.105.666.000
187	Kab. Grobogan	316.479.028.000	316.479.028.000	25.606.807.000	25.606.807.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342.085.835.000	342.085.835.000
188	Kab. Jepara	214.647.287.000	214.647.287.000	26.250.541.000	26.250.541.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.897.828.000	240.897.828.000
189	Kab. Karanganyar	181.573.854.000	181.573.854.000	32.701.326.000	32.701.326.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.275.180.000	214.275.180.000
190	Kab. Kebumen	463.030.927.000	461.258.494.000	26.603.268.000	20.849.462.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.634.195.000	482.107.956.000
191	Kab. Kendal	267.821.912.000	267.745.085.620	6.963.191.000	6.963.191.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.785.103.000	274.708.276.620
192	Kab. Klaten	383.502.807.000	383.502.807.000	14.737.263.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.240.070.000	398.240.070.000
193	Kab. Kudus	138.158.391.000	138.158.391.000	20.349.487.000	20.349.487.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.507.878.000	158.507.878.000
194	Kab. Magelang	367.113.861.000	367.113.861.000	13.342.410.000	10.493.738.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.456.271.000	377.607.599.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
195	Kab. Pati	386.975.552.000	386.408.463.800	26.509.222.000	20.592.451.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.484.774.000	407.000.914.800
196	Kab. Pekalongan	269.854.578.000	269.854.578.000	5.631.291.000	2.815.645.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.485.869.000	272.670.223.500
197	Kab. Pemalang	266.151.514.000	266.151.514.000	5.719.565.000	5.719.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	271.871.079.000	271.871.079.000
198	Kab. Purbalingga	257.444.509.000	257.444.509.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257.444.509.000	257.444.509.000
199	Kab. Purworejo	386.689.738.000	386.689.738.000	7.523.866.000	7.523.866.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394.213.604.000	394.213.604.000
200	Kab. Rembang	251.373.254.000	251.373.254.000	20.980.893.000	20.980.893.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.354.147.000	272.354.147.000
201	Kab. Semarang	209.220.909.000	208.741.658.000	26.386.953.000	26.386.953.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.607.862.000	235.128.611.000
202	Kab. Sragen	216.375.115.000	216.375.115.000	16.365.948.000	16.365.948.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.741.063.000	232.741.063.000
203	Kab. Sukoharjo	162.961.837.000	162.947.477.000	22.460.016.000	22.460.016.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.421.853.000	185.407.493.000
204	Kab. Tegal	316.239.825.000	316.239.825.000	12.930.103.000	12.930.103.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329.169.928.000	329.169.928.000
205	Kab. Temanggung	246.690.892.000	246.690.892.000	28.501.104.000	28.501.104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.191.996.000	275.191.996.000
206	Kab. Wonogiri	261.121.318.000	261.121.318.000	41.541.588.000	41.541.588.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.662.906.000	302.662.906.000
207	Kab. Wonosobo	250.681.274.000	250.203.172.000	19.550.481.000	19.550.481.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270.231.755.000	269.753.653.000
208	Kota Magelang	-	-	16.270.817.000	16.270.817.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.270.817.000	16.270.817.000
209	Kota Pekalongan	-	-	6.040.112.000	6.040.112.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.040.112.000	6.040.112.000
210	Kota Salatiga	-	-	33.500.801.000	33.500.801.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.500.801.000	33.500.801.000
211	Kota Semarang	-	-	36.610.609.000	30.953.583.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.610.609.000	30.953.583.000
212	Kota Surakarta	-	-	7.024.757.000	7.024.757.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.024.757.000	7.024.757.000
213	Kota Tegal	-	-	13.119.411.000	13.119.411.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.119.411.000	13.119.411.000
214	Provinsi DI Yogyakarta	-	-	12.089.917.000	12.089.917.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.432.089.917.000	1.420.000.000.000	1.432.089.917.000	1.432.089.917.000
215	Kab. Bantul	127.393.902.000	127.393.902.000	51.233.491.000	51.233.491.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.627.393.000	178.627.393.000
216	Kab. Gunung Kidul	181.087.303.000	181.087.303.000	28.474.034.000	28.474.034.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.561.337.000	209.561.337.000
217	Kab. Kulon Progo	105.234.651.000	105.234.651.000	36.800.569.000	36.800.569.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.035.220.000	142.035.220.000
218	Kab. Sleman	125.833.460.000	125.833.460.000	50.116.944.000	50.116.944.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.950.404.000	175.950.404.000
219	Kota Yogyakarta	-	-	53.929.174.000	53.929.174.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.929.174.000	53.929.174.000
220	Provinsi Jawa Timur	-	-	17.964.673.000	17.964.673.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.964.673.000	17.964.673.000
221	Kab. Bangkalan	313.026.364.000	313.026.348.040	6.298.428.000	6.298.428.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	319.324.792.000	319.324.776.040
222	Kab. Banyuwangi	232.528.178.000	230.822.914.000	51.161.561.000	51.161.561.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.889.739.000	281.984.475.000
223	Kab. Blitar	237.199.256.000	237.199.256.000	35.033.727.000	35.033.727.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.232.983.000	272.232.983.000
224	Kab. Bojonegoro	409.953.033.000	409.159.619.000	21.034.072.000	21.034.072.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	430.987.105.000	430.193.691.000
225	Kab. Bondowoso	226.154.083.000	225.656.784.000	5.765.570.000	5.765.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231.919.653.000	231.422.354.000
226	Kab. Gresik	321.507.175.000	321.507.175.000	36.385.778.000	36.385.778.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	357.892.953.000	357.892.953.000
227	Kab. Jember	326.477.607.000	325.303.772.200	5.700.290.000	5.700.290.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332.177.897.000	331.004.062.200
228	Kab. Jombang	318.763.074.000	318.763.074.000	32.995.643.000	32.995.643.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.758.717.000	351.758.717.000
229	Kab. Kediri	384.897.284.000	384.897.284.000	31.746.494.000	31.746.494.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416.643.778.000	416.643.778.000
230	Kab. Lamongan	422.772.644.000	422.772.644.000	46.488.968.000	46.488.968.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469.261.612.000	469.261.612.000
231	Kab. Lumajang	221.147.868.000	221.147.868.000	23.022.995.000	23.022.995.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.170.863.000	244.170.863.000
232	Kab. Madiun	199.518.213.000	199.518.213.000	42.632.874.000	42.632.874.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.151.087.000	242.151.087.000
233	Kab. Magetan	193.589.491.000	193.589.491.000	35.640.311.000	35.640.311.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.229.802.000	229.229.802.000
234	Kab. Malang	467.936.472.000	467.936.472.000	21.476.683.000	21.476.683.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	489.413.155.000	489.413.155.000
235	Kab. Mojokerto	298.426.449.000	298.426.449.000	54.818.754.000	54.818.754.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.245.203.000	353.245.203.000
236	Kab. Nganjuk	273.446.902.000	272.637.178.400	27.221.660.000	27.221.660.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.668.562.000	299.858.838.400
237	Kab. Ngawi	237.426.018.000	237.426.018.000	40.232.711.000	40.232.711.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	277.658.729.000	277.658.729.000
238	Kab. Pacitan	174.505.990.000	174.505.990.000	36.782.443.000	36.782.443.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.288.433.000	211.288.433.000
239	Kab. Pamekasan	204.307.968.000	204.307.968.000	21.743.982.000	21.743.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.051.950.000	226.051.950.000
240	Kab. Pasuruan	358.011.200.000	357.246.201.000	13.621.508.000	13.621.508.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371.632.708.000	370.867.709.000
241	Kab. Ponorogo	265.671.564.000	265.655.564.000	34.026.514.000	34.026.514.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299.698.078.000	299.682.078.000
242	Kab. Probolinggo	347.071.330.000	347.071.330.000	6.053.857.000	6.053.857.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.125.187.000	353.125.187.000
243	Kab. Sampang	234.858.230.000	234.858.230.000	19.943.149.000	19.943.149.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.801.379.000	254.801.379.000
244	Kab. Sidoarjo	328.647.743.000	328.647.743.000	26.707.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355.355.593.000	328.647.743.000
245	Kab. Situbondo	154.433.771.000	154.182.331.000	19.325.430.000	7.545.266.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.759.201.000	161.727.597.000
246	Kab. Sumenep	363.197.008.000	363.197.008.000	7.013.035.000	7.013.035.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370.210.043.000	370.210.043.000
247	Kab. Trenggalek	167.763.145.000	167.763.145.000	40.333.727.000	40.333.727.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.096.872.000	208.096.872.000
248	Kab. Tuban	310.798.786.000	310.370.129.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310.798.786.000	310.370.129.400
249	Kab. Tulungagung	254.023.673.000	253.629.701.000	28.486.189.000	28.486.189.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282.509.862.000	282.115.890.000
250	Kota Blitar	-	-	32.033.190.000	32.033.190.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.033.190.000	32.033.190.000
251	Kota Kediri	-	-	8.332.992.000	8.332.992.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.332.992.000	8.332.992.000
252	Kota Madiun	-	-	49.368.525.000	49.368.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.368.525.000	49.368.525.000
253	Kota Malang	-	-	21.046.971.000	21.046.971.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.046.971.000	21.046.971.000
254	Kota Mojokerto	-	-	35.132.412.000	35.132.412.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.132.412.000	35.132.412.000
255	Kota Pasuruan	-	-	11.347.844.000	11.347.844.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.347.844.000	11.347.844.000
256	Kota Probolinggo	-	-	15.462.511.000	15.462.511.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.462.511.000	15.462.511.000
257	Kota Surabaya	-	-	41.433.041.000	41.433.041.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.433.041.000	41.433.041.000
258	Kota Batu	20.937.139.000	20.937.139.000	19.268.204.000	16.498.673.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.205.343.000	37.435.812.000
259	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	19.423.433.000	19.423.433.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.423.433.000	19.423.433.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
260	Kab. Bengkulu	111.362.221.000	111.362.221.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.362.221.000	111.362.221.000
261	Kab. Landak	155.656.705.000	155.656.705.000	19.580.925.000	13.980.418.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.237.630.000	169.637.123.000
262	Kab. Kapuas Hulu	253.472.853.000	253.262.296.832	7.042.841.000	7.042.841.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.515.694.000	260.305.137.832
263	Kab. Ketapang	255.430.833.000	254.992.739.800	5.910.960.000	5.910.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.341.793.000	260.903.699.800
264	Kab. Mempawah	61.831.907.000	61.438.609.400	14.021.544.000	14.021.544.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.853.451.000	75.460.153.400
265	Kab. Sambas	189.754.697.000	189.754.697.000	13.905.612.000	13.905.612.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.660.309.000	203.660.309.000
266	Kab. Sanggau	160.578.465.000	159.922.678.200	13.353.035.000	13.353.035.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173.931.500.000	173.275.713.200
267	Kab. Sintang	344.774.597.000	342.238.903.770	7.206.801.000	7.206.801.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.981.398.000	349.445.704.770
268	Kota Pontianak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	Kota Singkawang	-	-	13.940.115.000	13.940.115.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.940.115.000	13.940.115.000
270	Kab. Sekadau	88.647.055.000	88.647.055.000	5.603.174.000	5.603.174.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.250.229.000	94.250.229.000
271	Kab. Melawi	152.945.938.000	152.945.938.000	12.258.241.000	12.258.241.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.204.179.000	165.204.179.000
272	Kab. Kayong Utara	44.714.733.000	44.714.733.000	7.298.490.000	7.298.490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.013.223.000	52.013.223.000
273	Kab. Kubu Raya	125.495.325.000	125.194.600.900	6.381.677.000	6.381.677.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.877.002.000	131.576.277.900
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	11.042.153.000	11.042.153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.042.153.000	11.042.153.000
275	Kab. Barito Selatan	74.204.898.000	73.702.409.076	6.719.104.000	6.719.104.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.924.002.000	80.421.513.076
276	Kab. Barito Utara	77.759.919.000	77.141.952.000	14.773.352.000	14.773.352.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.533.271.000	91.915.304.000
277	Kab. Kapuas	189.368.780.000	188.985.737.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.368.780.000	188.985.737.600
278	Kab. Kotawaringin Barat	76.404.934.000	76.282.329.139	13.409.913.000	13.409.913.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.814.847.000	89.692.242.139
279	Kab. Kotawaringin Timur	154.928.308.000	154.928.308.000	22.835.288.000	22.835.288.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.763.596.000	177.763.596.000
280	Kota Palangkaraya	-	-	5.933.778.000	5.933.778.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.933.778.000	5.933.778.000
281	Kab. Katingan	133.014.020.000	133.014.020.000	5.890.545.000	5.890.545.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138.904.565.000	138.904.565.000
282	Kab. Seruyan	96.146.881.000	96.146.881.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.146.881.000	96.146.881.000
283	Kab. Sukamara	26.854.892.000	26.854.892.000	13.424.211.000	13.424.211.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.279.103.000	40.279.103.000
284	Kab. Lamandau	69.671.121.000	69.671.121.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.671.121.000	69.671.121.000
285	Kab. Gunung Mas	95.811.635.000	94.916.802.800	11.357.589.000	11.357.589.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.169.224.000	106.274.391.800
286	Kab. Pulang Pisau	81.201.257.000	81.201.257.000	13.925.714.000	13.925.714.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.126.971.000	95.126.971.000
287	Kab. Murung Raya	112.439.684.000	112.426.816.640	7.469.957.000	7.469.957.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.909.641.000	119.896.773.640
288	Kab. Barito Timur	78.986.908.000	78.986.908.000	14.664.300.000	14.664.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.651.208.000	93.651.208.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	14.745.157.000	14.745.157.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.745.157.000	14.745.157.000
290	Kab. Banjar	223.773.702.000	223.773.702.000	38.188.045.000	38.188.045.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261.961.747.000	261.961.747.000
291	Kab. Barito Kuae	156.599.648.000	156.599.648.000	19.410.278.000	19.410.278.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.009.926.000	176.009.926.000
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	113.785.259.000	113.785.259.000	42.938.750.000	42.938.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.724.009.000	156.724.009.000
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	129.247.279.000	129.129.755.200	11.581.993.000	11.581.993.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.829.272.000	140.711.748.200
294	Kab. Hulu Sungai Utara	162.358.091.000	162.358.091.000	13.568.024.000	13.568.024.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175.926.115.000	175.926.115.000
295	Kab. Kotabaru	169.709.978.000	169.709.978.000	7.682.390.000	7.682.390.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177.392.368.000	177.392.368.000
296	Kab. Tabalong	102.226.677.000	102.226.677.000	29.575.891.000	26.690.342.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.802.568.000	128.917.019.000
297	Kab. Tanah Laut	114.336.814.000	113.968.710.200	26.374.905.000	26.374.905.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.711.719.000	140.343.615.200
298	Kab. Tapin	98.137.896.000	98.137.896.000	26.724.509.000	26.724.509.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.862.405.000	124.862.405.000
299	Kota Banjarbaru	-	-	12.166.247.000	12.166.247.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.166.247.000	12.166.247.000
300	Kota Banjarmasin	-	-	23.248.394.000	23.248.394.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.248.394.000	23.248.394.000
301	Kab. Balangan	114.421.503.000	114.314.789.590	20.597.049.000	20.597.049.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135.018.552.000	134.911.838.590
302	Kab. Tanah Bumbu	129.806.926.000	129.806.926.000	27.806.864.000	24.964.995.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.613.790.000	154.771.921.500
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	-	26.831.941.000	2.665.740.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.831.941.000	2.665.740.500
304	Kab. Berau	95.468.642.000	95.468.642.000	19.765.709.000	16.869.131.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.234.351.000	112.337.773.000
305	Kab. Kutai Kartanegara	195.105.755.000	195.105.755.000	34.790.318.000	34.790.318.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.896.073.000	229.896.073.000
306	Kab. Kutai Barat	163.146.305.000	163.146.305.000	20.542.069.000	20.542.069.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.688.374.000	183.688.374.000
307	Kab. Kutai Timur	150.199.304.000	149.383.600.158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.199.304.000	149.383.600.158
308	Kab. Paser	123.475.801.000	123.470.778.399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.475.801.000	123.470.778.399
309	Kota Balikpapan	-	-	22.816.518.000	14.953.965.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.816.518.000	14.953.965.000
310	Kota Bontang	-	-	13.164.686.000	13.164.686.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.164.686.000	13.164.686.000
311	Kota Samarinda	-	-	20.758.998.000	20.758.998.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.758.998.000	20.758.998.000
312	Kab. Penajam Paser Utara	29.595.849.000	29.595.849.000	6.165.287.000	6.165.287.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.761.136.000	35.761.136.000
313	Kab. Mahakam Ulu	53.010.758.000	52.247.805.936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.010.758.000	52.247.805.936
314	Provinsi Sulawesi Utara	-	-	13.900.219.000	10.640.199.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.900.219.000	10.640.199.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	156.556.803.000	156.556.803.000	12.889.356.000	12.889.356.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169.446.159.000	169.446.159.000
316	Kab. Minahasa	175.635.782.000	175.635.782.000	15.261.122.000	15.261.122.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.896.904.000	190.896.904.000
317	Kab. Sangihe	107.667.448.000	107.238.384.078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.667.448.000	107.238.384.078
318	Kota Bitung	-	-	5.997.392.000	2.998.696.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.997.392.000	2.998.696.000
319	Kota Manado	-	-	6.709.659.000	6.709.659.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.709.659.000	6.709.659.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	106.851.671.000	106.851.671.000	5.911.620.000	2.955.810.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.763.291.000	109.807.481.000
321	Kab. Minahasa Selatan	128.804.209.000	128.804.209.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.804.209.000	128.804.209.000
322	Kota Tomohon	-	-	12.933.346.000	12.933.346.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.933.346.000	12.933.346.000
323	Kab. Minahasa Utara	98.798.596.000	98.124.709.848	17.372.202.000	17.372.202.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.170.798.000	115.496.911.848
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	61.737.537.000	61.737.537.000	12.911.110.000	12.911.110.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.648.647.000	74.648.647.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
325	Kota Kotamobagu	13.277.079.000	13.277.079.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.277.079.000	13.277.079.000
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	79.257.020.000	79.257.020.000	25.172.059.000	25.172.059.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.429.079.000	104.429.079.000
327	Kab. Minahasa Tenggara	101.653.484.000	101.653.484.000	17.440.751.000	17.440.751.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.094.235.000	119.094.235.000
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	61.949.790.000	61.949.790.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.949.790.000	61.949.790.000
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	62.390.667.000	62.285.601.000	11.740.923.000	11.740.923.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.131.590.000	74.026.524.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	Kab. Banggai	228.920.237.000	228.920.237.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228.920.237.000	228.920.237.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	112.520.510.000	112.520.510.000	5.764.023.000	5.764.023.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.284.533.000	118.284.533.000
333	Kab. Buol	90.918.498.000	90.918.498.000	11.724.714.000	11.724.714.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102.643.212.000	102.643.212.000
334	Kab. Tolitoli	93.117.588.000	93.117.588.000	11.940.300.000	11.940.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.057.888.000	105.057.888.000
335	Kab. Donggala	142.967.654.000	142.837.602.296	12.612.699.000	12.612.699.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.580.353.000	155.450.301.296
336	Kab. Morowali	106.710.411.000	106.697.472.900	11.818.826.000	11.818.826.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.529.237.000	118.516.298.900
337	Kab. Poso	121.727.441.000	121.727.441.000	11.360.630.000	11.360.630.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.088.071.000	133.088.071.000
338	Kota Palu	-	-	12.139.646.000	12.139.646.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.139.646.000	12.139.646.000
339	Kab. Parigi Moutong	242.948.623.000	242.942.205.966	5.698.903.000	5.698.903.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248.647.526.000	248.641.108.966
340	Kab. Tojo Una Una	113.557.804.000	113.557.804.000	20.584.497.000	20.584.497.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.142.301.000	134.142.301.000
341	Kab. Sigi	154.589.017.000	154.494.636.326	34.727.332.000	31.841.897.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.316.349.000	186.336.533.326
342	Kab. Banggai Laut	51.492.450.000	51.492.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.492.450.000	51.492.450.000
343	Kab. Morowali Utara	109.581.662.000	109.581.662.000	12.528.131.000	12.528.131.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.109.793.000	122.109.793.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	-	-	18.973.164.000	18.973.164.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.973.164.000	18.973.164.000
345	Kab. Bantaeng	41.728.099.000	41.728.099.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.728.099.000	41.728.099.000
346	Kab. Barru	39.357.327.000	39.357.327.000	19.602.465.000	19.602.465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.959.792.000	58.959.792.000
347	Kab. Bone	293.845.971.000	293.484.249.100	14.296.539.000	14.296.539.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.142.510.000	307.780.788.100
348	Kab. Bulukumba	100.691.191.000	100.691.191.000	7.729.518.000	7.729.518.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.420.709.000	108.420.709.000
349	Kab. Enrekang	97.764.883.000	97.764.883.000	7.908.088.000	7.908.088.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.672.971.000	105.672.971.000
350	Kab. Gowa	119.787.155.000	119.769.187.400	13.491.232.000	13.491.232.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.278.387.000	133.260.419.400
351	Kab. Jeneponto	83.215.546.000	83.215.546.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.215.546.000	83.215.546.000
352	Kab. Luwu	180.762.197.000	180.762.191.006	6.885.398.000	6.885.398.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.647.595.000	187.647.589.006
353	Kab. Luwu Utara	154.454.216.000	154.454.216.000	7.493.177.000	7.493.177.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.947.393.000	161.947.393.000
354	Kab. Maros	79.921.451.000	79.921.451.000	6.035.415.000	6.035.415.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.956.866.000	85.956.866.000
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	66.353.380.000	66.353.379.960	11.568.556.000	11.568.556.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.921.936.000	77.921.935.960
356	Kota Palopo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
357	Kab. Luwu Timur	113.579.278.000	113.579.278.000	20.916.486.000	20.916.486.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.495.764.000	134.495.764.000
358	Kab. Pinrang	70.077.466.000	70.077.466.000	13.665.508.000	13.665.508.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.742.974.000	83.742.974.000
359	Kab. Sinjai	63.399.716.000	63.399.716.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.399.716.000	63.399.716.000
360	Kab. Kepulauan Selayar	67.830.496.000	65.431.087.000	21.356.548.000	21.356.548.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.187.044.000	86.787.635.000
361	Kab. Sidenreng Rappang	61.210.372.000	61.210.372.000	5.478.445.000	5.478.445.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.688.817.000	66.688.817.000
362	Kab. Soppeng	47.546.271.000	47.546.271.000	31.250.859.000	31.250.859.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.797.130.000	78.797.130.000
363	Kab. Takalar	78.203.364.000	78.203.364.000	12.448.276.000	12.448.276.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.651.640.000	90.651.640.000
364	Kab. Tana Toraja	103.095.133.000	103.095.133.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.095.133.000	103.095.133.000
365	Kab. Wajo	119.866.581.000	119.866.580.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.866.581.000	119.866.580.500
366	Kota Parepare	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	Kota Makassar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
368	Kab. Toraja Utara	100.989.224.000	100.989.224.000	14.112.719.000	14.112.719.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115.101.943.000	115.101.943.000
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	5.357.771.000	2.678.885.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.357.771.000	2.678.885.500
370	Kab. Buton	66.061.581.000	65.477.021.000	6.213.587.000	6.213.587.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.275.168.000	71.690.608.000
371	Kab. Konawe	220.516.148.000	220.516.148.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.516.148.000	220.516.148.000
372	Kab. Kolaka	82.561.568.000	82.561.568.000	26.314.646.000	26.314.646.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.876.214.000	108.876.214.000
373	Kab. Muna	106.246.002.000	106.246.002.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.246.002.000	106.246.002.000
374	Kota Kendari	-	-	6.828.170.000	6.828.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.828.170.000	6.828.170.000
375	Kota Bau-bau	-	-	5.770.331.000	5.770.331.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.770.331.000	5.770.331.000
376	Kab. Konawe Selatan	267.585.881.000	267.585.881.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.585.881.000	267.585.881.000
377	Kab. Bombana	98.438.427.000	98.438.427.000	15.208.211.000	15.208.211.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.646.638.000	113.646.638.000
378	Kab. Wakatobi	61.950.053.000	61.950.053.000	5.860.480.000	5.860.480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.810.533.000	67.810.533.000
379	Kab. Kolaka Utara	106.995.255.000	106.995.255.000	5.918.102.000	5.918.102.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.913.357.000	112.913.357.000
380	Kab. Konawe Utara	119.707.457.000	119.706.345.464	26.345.403.000	26.345.403.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.052.860.000	146.051.748.464
381	Kab. Buton Utara	61.348.473.000	61.348.473.000	5.637.870.000	2.818.935.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.986.343.000	64.167.408.000
382	Kab. Konawe Kepulauan	65.912.626.000	65.912.626.000	11.314.714.000	11.314.714.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.227.340.000	77.227.340.000
383	Kab. Kolaka Timur	92.983.941.000	92.983.941.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.983.941.000	92.983.941.000
384	Kab. Muna Barat	66.563.976.000	66.563.976.000	7.428.219.000	7.428.219.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.992.195.000	73.992.195.000
385	Kab. Buton Tengah	56.273.838.000	56.273.838.000	7.788.168.000	7.788.168.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.062.006.000	64.062.006.000
386	Kab. Buton Selatan	49.619.862.000	49.619.862.000	6.189.506.000	3.094.753.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.809.368.000	52.714.615.000
387	Provinsi Bali	-	-	23.157.354.000	23.157.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.157.354.000	23.157.354.000
388	Kab. Badung	48.336.329.000	48.336.329.000	48.696.304.000	48.696.304.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.032.633.000	97.032.633.000
389	Kab. Bangli	60.597.348.000	60.597.348.000	28.982.251.000	14.491.125.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.579.599.000	75.088.473.500

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
390	Kab. Buleleng	132.354.323.000	132.354.323.000	32.877.739.000	32.877.739.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.232.062.000	165.232.062.000
391	Kab. Gianyar	68.766.153.000	68.766.153.000	35.928.387.000	32.759.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104.694.540.000	101.525.153.000
392	Kab. Jembrana	42.951.213.000	42.951.213.000	13.898.217.000	10.809.076.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.849.430.000	53.760.289.500
393	Kab. Karangasem	80.146.587.000	80.146.587.000	12.918.188.000	12.918.188.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.064.775.000	93.064.775.000
394	Kab. Klungkung	48.573.365.000	48.573.365.000	38.739.153.000	38.739.153.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.312.518.000	87.312.518.000
395	Kab. Tabanan	118.815.557.000	118.815.557.000	25.054.386.000	25.054.386.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.869.943.000	143.869.943.000
396	Kota Denpasar	34.828.566.000	34.828.566.000	57.126.472.000	57.126.472.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.955.038.000	91.955.038.000
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	22.270.193.000	22.270.193.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.270.193.000	22.270.193.000
398	Kab. Bima	187.145.184.000	187.145.184.000	6.831.675.000	6.831.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.976.859.000	193.976.859.000
399	Kab. Dompu	72.987.042.000	72.986.944.000	12.768.160.000	9.801.636.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.755.202.000	82.788.580.500
400	Kab. Lombok Barat	145.048.931.000	145.048.931.000	13.055.372.000	13.055.372.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.104.303.000	158.104.303.000
401	Kab. Lombok Tengah	185.021.712.000	185.021.712.000	23.708.776.000	23.708.776.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208.730.488.000	208.730.488.000
402	Kab. Lombok Timur	287.050.780.000	287.050.780.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287.050.780.000	287.050.780.000
403	Kab. Sumbawa	153.426.511.000	153.426.511.000	5.748.772.000	2.874.386.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.175.283.000	156.300.897.000
404	Kota Mataram	-	-	19.674.171.000	19.674.171.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.674.171.000	19.674.171.000
405	Kota Bima	-	-	5.587.858.000	2.793.929.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.587.858.000	2.793.929.000
406	Kab. Sumbawa Barat	51.496.260.000	51.242.247.500	33.045.333.000	33.045.333.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.541.593.000	84.287.580.500
407	Kab. Lombok Utara	63.719.052.000	63.719.052.000	37.642.194.000	37.642.194.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.361.246.000	101.361.246.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	11.346.961.000	11.346.961.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.346.961.000	11.346.961.000
409	Kab. Alor	135.957.240.000	135.957.240.000	7.425.593.000	7.425.593.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.382.833.000	143.382.833.000
410	Kab. Belu	64.467.061.000	64.463.162.739	9.107.161.000	9.107.161.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.574.222.000	73.570.323.739
411	Kab. Ende	213.885.306.000	213.018.003.781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213.885.306.000	213.018.003.781
412	Kab. Flores Timur	183.768.682.000	183.768.682.000	5.633.738.000	5.633.738.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.402.420.000	189.402.420.000
413	Kab. Kupang	154.041.136.000	154.041.136.000	5.587.039.000	2.793.519.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.628.175.000	156.834.655.500
414	Kab. Lembata	124.526.039.000	124.526.039.000	21.482.092.000	21.482.092.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.008.131.000	146.008.131.000
415	Kab. Manggarai	129.061.909.000	129.061.909.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.061.909.000	129.061.909.000
416	Kab. Ngada	153.420.677.000	153.420.677.000	5.734.660.000	2.867.330.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.155.337.000	156.288.007.000
417	Kab. Sikka	157.479.215.000	157.479.170.000	5.598.650.000	5.598.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163.077.865.000	163.077.820.000
418	Kab. Sumba Barat	60.247.561.000	60.247.561.000	13.043.483.000	13.043.483.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.291.044.000	73.291.044.000
419	Kab. Sumba Timur	138.203.230.000	137.796.964.740	16.125.182.000	16.125.182.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.328.412.000	153.922.146.740
420	Kab. Timor Tengah Selatan	251.681.524.000	238.354.154.749	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251.681.524.000	238.354.154.749
421	Kab. Timor Tengah Utara	168.082.888.000	168.071.898.600	6.058.214.000	3.029.107.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174.141.102.000	171.101.005.600
422	Kota Kupang	-	-	7.645.677.000	7.645.677.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.645.677.000	7.645.677.000
423	Kab. Rote Ndao	108.676.172.000	108.676.172.000	18.893.033.000	18.893.033.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.569.205.000	127.569.205.000
424	Kab. Manggarai Barat	146.502.192.000	146.502.192.000	11.904.277.000	11.904.277.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.406.469.000	158.406.469.000
425	Kab. Nagekeo	81.444.800.000	81.444.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.444.800.000	81.444.800.000
426	Kab. Sumba Barat Daya	184.608.937.000	184.608.937.000	7.109.813.000	7.109.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191.718.750.000	191.718.750.000
427	Kab. Sumba Tengah	65.947.240.000	65.947.240.000	12.929.007.000	12.929.007.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.876.247.000	78.876.247.000
428	Kab. Manggarai Timur	156.619.814.000	156.619.814.000	19.587.672.000	19.587.672.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176.207.486.000	176.207.486.000
429	Kab. Sabu Raijua	62.867.892.000	62.797.184.980	27.149.169.000	27.149.169.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.017.061.000	89.946.353.980
430	Kab. Malaka	116.826.254.000	116.826.254.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116.826.254.000	116.826.254.000
431	Provinsi Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	71.652.155.000	71.652.155.000	6.871.658.000	6.871.658.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.523.813.000	78.523.813.000
433	Kab. Maluku Tengah	176.050.504.000	175.773.655.400	7.620.673.000	7.620.673.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.671.177.000	183.394.328.400
434	Kab. Maluku Tenggara	147.821.639.000	147.821.639.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147.821.639.000	147.821.639.000
435	Kab. Buru	76.775.208.000	76.459.177.980	5.808.813.000	5.808.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.584.021.000	82.267.990.980
436	Kota Ambon	32.250.601.000	32.250.601.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.250.601.000	32.250.601.000
437	Kab. Seram Bagian Barat	94.347.648.000	94.280.070.464	7.498.253.000	7.498.253.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.845.901.000	101.778.323.464
438	Kab. Seram Bagian Timur	164.054.309.000	164.054.309.000	22.103.356.000	11.051.678.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.157.665.000	175.105.987.000
439	Kab. Kepulauan Aru	106.272.712.000	106.272.712.000	21.975.970.000	21.975.970.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.248.682.000	128.248.682.000
440	Kota Tual	23.741.515.000	23.741.515.000	12.229.352.000	12.229.352.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.970.867.000	35.970.867.000
441	Kab. Maluku Barat Daya	104.090.363.000	104.090.363.000	22.201.114.000	22.201.114.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.291.477.000	126.291.477.000
442	Kab. Buru Selatan	70.299.735.000	70.299.735.000	6.659.737.000	6.659.737.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.959.472.000	76.959.472.000
443	Provinsi Papua	-	-	-	-	215.207.981.000	215.207.981.000	265.040.870.000	265.040.870.000	608.369.055.000	608.369.055.000	-	-	-	-	1.088.617.906.000	1.088.617.906.000
444	Kab. Biak Numfor	196.365.566.000															

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)**

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
455	Kab. Keerom	81.939.267.000	81.939.267.000	14.291.609.000	14.291.609.000	35.366.124.000	35.366.124.000	45.427.920.000	45.427.920.000	12.680.439.000	12.680.439.000	-	-	-	-	189.705.359.000	189.705.359.000
456	Kab. Yahukimo	455.919.201.000	455.919.201.000	-	-	169.134.368.000	169.134.368.000	215.273.265.000	215.273.265.000	38.691.278.000	38.691.278.000	-	-	-	-	879.018.112.000	879.018.112.000
457	Kab. Pegunungan Bintang	245.712.927.000	245.712.927.000	-	-	106.218.798.000	106.218.798.000	154.700.385.000	154.700.385.000	33.574.567.000	33.574.567.000	-	-	-	-	540.206.677.000	540.206.677.000
458	Kab. Tolikara	436.983.493.000	436.983.493.000	-	-	95.449.162.000	95.449.162.000	98.618.982.000	98.618.982.000	14.854.522.000	14.854.522.000	-	-	-	-	645.906.159.000	645.906.159.000
459	Kab. Boven Digoel	118.860.819.000	118.860.819.000	11.829.883.000	5.914.941.500	87.439.950.000	87.439.950.000	88.016.965.000	88.016.965.000	15.219.944.000	15.219.944.000	-	-	-	-	321.367.561.000	315.452.619.500
460	Kab. Mappi	176.489.240.000	176.489.240.000	-	-	79.895.981.000	79.895.981.000	132.642.194.000	132.642.194.000	75.872.458.000	75.872.458.000	-	-	-	-	464.899.873.000	464.899.873.000
461	Kab. Asmat	236.283.436.000	236.283.436.000	7.500.519.000	7.500.519.000	103.800.272.000	103.800.272.000	146.650.979.000	146.650.979.000	21.850.748.000	21.850.748.000	-	-	-	-	516.085.956.000	516.085.956.000
462	Kab. Waropen	86.428.097.000	86.428.097.000	-	-	31.537.142.000	31.537.142.000	50.046.024.000	50.046.024.000	12.408.529.000	12.408.529.000	-	-	-	-	180.419.792.000	180.419.792.000
463	Kab. Supiori	29.350.353.000	29.019.793.800	-	-	36.733.563.000	36.733.563.000	49.181.745.000	49.181.745.000	12.334.919.000	12.334.919.000	-	-	-	-	127.270.580.000	127.270.580.000
464	Kab. Mamberamo Raya	73.057.115.000	73.057.115.000	-	-	48.054.708.000	48.054.708.000	72.639.280.000	72.639.280.000	37.899.033.000	37.899.033.000	-	-	-	-	231.650.136.000	231.650.136.000
465	Kab. Mamberamo Tengah	51.044.987.000	51.044.987.000	19.900.261.000	13.455.835.500	47.119.004.000	47.119.004.000	70.143.627.000	70.143.627.000	18.830.265.000	18.830.265.000	-	-	-	-	207.038.144.000	200.593.718.500
466	Kab. Yalimo	235.703.106.000	235.699.506.000	-	-	49.216.090.000	49.216.090.000	64.457.670.000	64.457.670.000	8.195.235.000	8.195.235.000	-	-	-	-	357.572.101.000	357.568.501.000
467	Kab. Lanny Jaya	327.352.090.000	327.352.090.000	12.904.009.000	10.013.336.500	105.944.867.000	105.944.867.000	134.846.026.000	134.846.026.000	15.866.633.000	15.866.633.000	-	-	-	-	594.022.952.000	594.022.952.000
468	Kab. Nduga	220.298.678.000	220.298.678.000	-	-	69.760.848.000	69.760.848.000	96.018.404.000	96.018.404.000	29.236.699.000	29.236.699.000	-	-	-	-	415.314.629.000	415.314.629.000
469	Kab. Dogiyai	87.968.898.000	87.968.898.000	-	-	63.268.728.000	63.268.728.000	70.896.034.000	70.896.034.000	13.573.438.000	13.573.438.000	-	-	-	-	235.707.098.000	235.707.098.000
470	Kab. Puncak	197.804.869.000	197.804.869.000	5.938.938.000	2.969.469.000	66.083.737.000	66.083.737.000	126.181.476.000	126.181.476.000	30.887.044.000	30.887.044.000	-	-	-	-	426.896.064.000	423.926.595.000
471	Kab. Intan Jaya	96.076.885.000	98.076.885.000	7.014.077.000	7.014.077.000	71.987.753.000	71.987.753.000	75.453.728.000	75.453.728.000	18.215.585.000	18.215.585.000	-	-	-	-	270.748.028.000	270.748.028.000
472	Kab. Deiyai	65.271.473.000	65.271.473.000	12.990.889.000	12.990.889.000	44.782.482.000	44.782.482.000	74.244.781.000	74.244.781.000	7.379.772.000	7.379.772.000	-	-	-	-	204.669.397.000	204.669.397.000
473	Provinsi Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	Kab. Halmahera Tengah	52.143.105.000	52.143.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.143.105.000	52.143.105.000
475	Kota Ternate	-	-	8.580.921.000	8.580.921.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.580.921.000	8.580.921.000
476	Kab. Halmahera Barat	137.211.973.000	137.211.973.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.211.973.000	137.211.973.000
477	Kab. Halmahera Timur	92.108.906.000	92.108.906.000	6.004.651.000	6.004.651.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.113.557.000	98.113.557.000
478	Kab. Halmahera Selatan	211.249.534.000	211.241.399.804	12.174.675.000	12.174.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.424.209.000	223.416.074.804
479	Kab. Halmahera Utara	155.083.833.000	155.083.833.000	7.208.266.000	7.208.266.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.292.099.000	162.292.099.000
480	Kab. Kepulauan Sula	69.751.110.000	69.751.092.000	22.530.915.000	22.530.915.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.282.025.000	92.282.007.000
481	Kota Tidore Kepulauan	39.252.807.000	39.172.976.698	18.318.326.000	18.318.326.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.571.133.000	57.491.302.698
482	Kab. Pulau Morotai	69.053.190.000	69.053.190.000	12.877.261.000	12.877.261.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.930.451.000	81.930.451.000
483	Kab. Pulau Taliabu	59.796.752.000	59.796.752.000	15.793.794.000	15.793.794.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.590.546.000	75.590.546.000
484	Provinsi Banten	-	-	19.619.982.000	19.619.982.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.619.982.000	19.619.982.000
485	Kab. Lebak	356.799.183.000	356.799.183.000	18.835.238.000	18.835.238.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375.634.421.000	375.634.421.000
486	Kab. Pandeglang	339.311.776.000	339.311.776.000	26.174.162.000	16.756.298.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.485.938.000	356.068.074.500
487	Kab. Serang	334.511.418.000	334.511.418.000	26.339.673.000	26.339.673.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	360.851.091.000	360.851.091.000
488	Kab. Tangerang	356.125.971.000	355.324.015.400	24.783.857.000	12.391.928.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.909.828.000	367.715.943.900
489	Kota Cilegon	-	-	12.708.733.000	12.708.733.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.708.733.000	12.708.733.000
490	Kota Tangerang	-	-	19.114.109.000	19.114.109.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.114.109.000	19.114.109.000
491	Kota Serang	-	-	7.500.251.000	7.500.251.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.251.000	7.500.251.000
492	Kota Tangerang Selatan	-	-	39.029.223.000	39.029.223.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.029.223.000	39.029.223.000
493	Provinsi Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	Kab. Bangka	59.475.922.000	59.475.922.000	22.958.813.000	22.958.813.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.434.735.000	82.434.735.000
495	Kab. Belitung	41.717.027.000	41.477.591.670	15.976.321.000	15.976.321.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.693.348.000	57.453.912.670
496	Kota Pangkal Pinang	-	-	6.780.585.000	6.780.585.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.780.585.000	6.780.585.000
497	Kab. Bangka Selatan	47.552.559.000	47.552.559.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.552.559.000	47.552.559.000
498	Kab. Bangka Tengah	51.967.114.000	51.967.114.000	15.131.070.000	15.131.070.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.098.184.000	67.098.184.000
499	Kab. Bangka Barat	54.949.231.000	54.949.231.000	7.152.766.000	7.152.766.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.101.997.000	62.101.997.000
500	Kab. Belitung Timur	39.725.596.000	39.725.596.000	30.100.485.000	30.100.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.826.081.000	69.826.081.000
501	Provinsi Gorontalo	-	-	7.682.882.000	7.682.882.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.682.882.000	7.682.882.000
502	Kab. Boalemo	73.077.729.000	73.077.729.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.077.729.000	73.077.729.000
503	Kab. Gorontalo	167.837.233.000	167.837.233.000	13.979.823.000	13.979.823.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.817.056.000	181.817.056.000
504	Kota Gorontalo	-	-	34.701.093.000	34.701.093.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.701.093.000	34.701.093.000
505	Kab. Pohuwato	86.903.437.000	86.903.437.000	13.487.667.000	13.487.667.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.391.104.000	100.391.104.000
506	Kab. Bone Bolango	123.339.784.000	123.339.784.000	19.538.053.000	19.538.053.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.877.837.000	142.877.837.000
507	Kab. Gorontalo Utara	95.802.886.000	95.802.886.000	13.315.487.000	13.315.487.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.118.373.000	109.118.373.000
508	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	14.318.554.000	11.315.088.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.318.554.000	11.315.088.000
509	Kab. Natuna	54.367.721.000	54.367.721.000	5.699.849.000	5.699.849.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.067.570.000	60.067.570.000
510	Kab. Kepulauan Anambas	39.367.634.000	39.367.634.000	5.680.723.000	5.680.723.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.048.357.000	45.048.357.000
511	Kab. Karimun	37.748.480.000	37.748.480.000	22.469.981.000	22.469.981.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.218.461.000	60.218.461.000
512	Kota Batam	-	-	11.731.657.000	11.731.657.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.731.657.000	11.731.657.000
513	Kota Tanjung Pinang	-	-	7.671.438.000	7.671.438.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.671.438.000	7.671.438.000
514	Kab. Lingga	63.533.321.000	63.138.573.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.533.321.000	63.138.573.400
515	Kab. Bintan	32.036.641.000	31.840.288.900	26.415.095.000	26.415.095.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.451.736.000	58.255.383.600
516	Provinsi Papua Barat	-	-	-	-	145.665.423.000	145.665.423.000	189.012.577.000	189.012.577.000	509.212.822.000	509.212.822.000	-	-	-			

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA, INSENTIF FISKAL, OTONOMI KHUSUS, DAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA
UNTUK PERIODE 1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024
(Dalam Rupiah)

	Daerah	Dana Desa		Insentif Fiskal		Otonomi Khusus Reguler		Otonomi Khusus Spesifik		Otonomi Khusus Tambahan		Otonomi Khusus Aceh		Dana Keistimewaan DIY		Total Pagu	Total Realisasi
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi		
520	Kota Sorong	-	-	-	-	76.577.100.000	76.577.100.000	83.929.833.000	83.929.833.000	12.452.679.000	12.452.679.000	-	-	-	-	172.959.612.000	172.959.612.000
521	Kab. Raja Ampat	97.135.550.000	97.135.550.000	-	-	93.430.163.000	93.430.163.000	81.904.806.000	81.904.806.000	35.983.110.000	35.983.110.000	-	-	-	-	308.453.629.000	308.453.629.000
522	Kab. Sorong Selatan	100.808.909.000	100.808.909.000	-	-	38.452.059.000	38.452.059.000	46.541.463.000	46.541.463.000	30.604.674.000	30.604.674.000	-	-	-	-	216.407.105.000	216.407.105.000
523	Kab. Teluk Bintuni	107.049.650.000	107.049.650.000	-	-	75.550.754.000	75.550.754.000	75.398.493.000	75.398.493.000	18.216.425.000	18.216.425.000	-	-	-	-	276.215.322.000	276.215.322.000
524	Kab. Teluk Wondama	64.374.177.000	64.374.177.000	14.413.576.000	14.413.576.000	53.640.808.000	53.640.808.000	71.807.128.000	71.807.128.000	17.906.490.000	17.906.490.000	-	-	-	-	222.142.179.000	222.142.179.000
525	Kab. Kaiwana	88.530.820.000	88.530.820.000	-	-	28.144.982.000	28.144.982.000	43.683.722.000	43.683.722.000	24.148.086.000	24.148.086.000	-	-	-	-	184.507.610.000	184.507.610.000
526	Kab. Maybrat	193.682.104.000	193.682.104.000	-	-	67.023.879.000	67.023.879.000	62.168.957.000	62.168.957.000	36.848.355.000	36.848.355.000	-	-	-	-	359.723.295.000	359.723.295.000
527	Kab. Tambrauw	172.219.227.000	172.219.227.000	9.180.793.000	9.180.793.000	66.248.545.000	66.248.545.000	90.265.408.000	90.265.408.000	35.942.434.000	35.942.434.000	-	-	-	-	373.856.407.000	373.856.407.000
528	Kab. Manokwari Selatan	50.840.194.000	50.840.194.000	-	-	27.995.218.000	27.995.218.000	49.841.348.000	49.841.348.000	8.639.466.000	8.639.466.000	-	-	-	-	137.316.226.000	137.316.226.000
529	Kab. Pegunungan Arfak	131.086.468.000	131.086.468.000	-	-	52.672.520.000	52.672.520.000	61.006.451.000	61.006.451.000	21.977.564.000	21.977.564.000	-	-	-	-	266.743.003.000	266.743.003.000
530	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Kab. Majene	55.820.851.000	55.820.851.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.820.851.000	55.820.851.000
532	Kab. Mamuju	86.323.445.000	86.323.445.000	6.951.678.000	6.951.678.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.275.123.000	93.275.123.000
533	Kab. Polewali Mandar	142.976.314.000	142.976.310.500	6.186.910.000	6.186.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.163.224.000	149.163.220.500
534	Kab. Mamasa	140.959.773.000	140.959.773.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.959.773.000	140.959.773.000
535	Kab. Pasangkayu	54.694.684.000	54.694.684.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.694.684.000	54.694.684.000
536	Kab. Mamuju Tengah	51.461.215.000	51.461.215.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.461.215.000	51.461.215.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	-	12.648.494.000	12.648.494.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.648.494.000	12.648.494.000
538	Provinsi Papua Tengah	-	-	-	-	254.568.651.000	254.568.651.000	323.770.450.000	323.770.450.000	668.912.297.000	668.912.297.000	-	-	-	-	1.247.251.398.000	1.247.251.398.000
539	Provinsi Papua Selatan	-	-	-	-	164.139.405.000	164.139.405.000	211.466.117.000	211.466.117.000	465.713.123.000	465.713.123.000	-	-	-	-	841.318.645.000	841.318.645.000
540	Provinsi Papua Pegunungan	-	-	-	-	322.072.843.000	322.072.843.000	418.759.739.000	418.759.739.000	689.019.435.000	689.019.435.000	-	-	-	-	1.429.852.017.000	1.429.852.017.000
541	Provinsi Papua Barat Daya	-	-	-	-	181.443.608.000	181.443.608.000	195.822.634.000	195.822.634.000	428.584.607.000	428.584.607.000	-	-	-	-	805.850.849.000	805.850.849.000
542	Kab. Bulungan	75.075.609.000	75.075.609.000	12.410.999.000	6.205.499.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.486.608.000	81.281.108.500
543	Kab. Malinau	119.657.216.000	119.657.216.000	19.578.092.000	19.578.092.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.235.308.000	139.235.308.000
544	Kab. Nunukan	187.527.913.000	187.527.913.000	5.561.589.000	2.780.794.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.089.502.000	190.308.707.500
545	Kota Tarakan	-	-	6.607.594.000	6.607.594.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.607.594.000	6.607.594.000
546	Kab. Tana Tidung	29.801.783.000	29.801.783.000	14.164.044.000	14.164.044.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.965.827.000	43.965.827.000
	Jumlah	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500	4.276.993.036.000	4.276.993.036.000	5.346.241.294.000	5.346.241.294.000	4.371.263.570.000	4.371.263.570.000	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	98.691.490.935.000	97.619.159.306.098

Bagian Anggaran BUN 999.01
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pinjaman Pemerintah
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	Program Pengelolaan Utang Negara								
4088	Pengelolaan Pembayaran Kewajiban Utang								
001	Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	454.599.065.168.000	445.938.629.950.158	98,09%	100	100	Persen	100,00%	Realisasi capaian output dihitung dari tagihan yang disampaikan
002	Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri	42.720.537.423.000	42.487.792.193.659	99,46%	100	100	Persen	100,00%	
003	Pembiayaan Utang Dalam Negeri	694.447.750.410.000	629.807.306.465.724	90,69%	100	100	Persen	100,00%	
004	Pembiayaan Utang Luar Negeri	85.477.360.000.000	87.454.196.251.177	102,31%	100	100	Persen	100,00%	

Bagian Anggaran BUN 999.02
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pelayanan Umum Lainnya
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07	Program Pengelolaan Hibah Negara	371.444.876.012	278.430.938.969						
4850	Pengelolaan Banking Commission								
002	Pembayaran Tagihan Banking Commission	399.771.000	261.734.387	65,47%	100	100	Persen	100,00%	Output kegiatan Pengelolaan Pembayaran Tagihan Banking Commission
4849	Pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing	371.045.105.012	278.169.204.582						
9BB.031	Pemberian Hibah kepada Gambia Revitalisasi Agricultural Rural Farmers Training Center (ARFTC) di Kota Jenoi	814.200.000	-	0,00%	100	70	Persen	70	Dalam proses finishing
9BB.402	Pemberian Hibah Kepada Aga Khan Development Network (AKDN) -Dukungan Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana Perempuan Afghanistan	3.173.027.000	-	0,00%	100	100	Persen	100	Menunggu kedatangan mahasiswa
9BB.403	Pemberian Hibah Kepada Negara Kawasan Afrika (Kenya, Tanzania, Madagaskar, Nigeria, Sudan, Zimbabwe, Mesir, Chad, Ethiopia, dan Senegal) - Dukungan pelatihan manajemen inseminasi buatan	7.788.982.000	5.188.673.893	66,62%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.057	Bantuan Vaksin Polio yang Kegiatan Imunisasinya Dilaksanakan oleh UNICEF	17.205.000.000	15.000.000.000	87,18%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.058	Dukungan Rehabilitasi Fisik untuk Penyandang Disabilitas di Myanmar dan Afghanistan	16.300.000.000	16.287.081.750	99,92%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.059	Bantuan dan Perlindungan untuk Orang-Orang yang Terkena Dampak Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Wilayah Pendudukan (Palestina)	32.600.000.000	32.574.081.750	99,92%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan

Bagian Anggaran BUN 999.02
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pelayanan Umum Lainnya
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9BB.060	Pemberian Hibah kepada Papua Nugini terkait Modernisasi ICU dan Mortuary Room di Rumah Sakit Port Moresby General Hospital	26.894.669.000	4.898.877.200	18,22%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.061	Pemberian Hibah kepada MSG terkait Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Diplomat Muda	1.134.040.000	914.677.539	80,66%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.062	Pemberian Hibah kepada Tanzania untuk Program Eksekutif Pengembangan Sistem Electronic Single Window (ESW)	1.595.851.000	851.984.705	53,39%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.063	Pemberian Hibah kepada Tanzania untuk Revitalisasi Farmer's Agriculture and Rural Training Center (FARTC)	8.881.382.000	-	0,00%	100	75	Persen	75	Proses bidding kontraktor
9BB.064	Pemberian Hibah kepada Negara Kawasan Afrika untuk Pelatihan di Bidang Perikanan	4.707.006.000	2.619.993.576	55,66%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.065	Pemberian Hibah Timor Leste Financial Management Reform Program: Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah dan Swasta	3.068.096.000	2.645.029.372	86,21%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.066	Pemberian Hibah kepada Timor Leste untuk Program Pengembangan Eksekutif: Pelatihan Sistem Manajemen Keuangan	708.993.000	447.908.886	63,18%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.067	Pemberian Hibah kepada Turki untuk Pembangunan Kampung Indonesia di Daerah terdampak Gempa Bumi Turki	54.735.750.000	53.730.480.750	98,16%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.068	Dukungan Penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria melalui The Global Fund Tahap II	23.445.000.000	23.310.078.125	99,42%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.070	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Diversifikasi Pengolahan Produk Kelapa bagi Negara-Negara di Kawasan Karibia	4.899.776.000	2.883.357.965	58,85%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan

Bagian Anggaran BUN 999.02
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pelayanan Umum Lainnya
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9BB.073	Peningkatan Kapasitas Negara Anggota OACPS di Sektor Ekonomi Kreatif	11.653.493.000	5.380.993.608	46,17%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.074	Pelatihan Peningkatan Kompetensi di Bidang Energi Surya untuk Negara-negara Kawasan Afrika (Kerjasama Triangular Indonesia - Turki)	1.876.713.000	1.675.262.623	89,27%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.075	Dukungan Keketuaan Laos pada Proses Keuangan ASEAN (ASEAN Finance Process)	5.410.040.000	4.644.209.567	85,84%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.076	The Indonesian AID Scholarship (TIAS) di Kawasan Asia, Pasifik, Afrika	41.553.032.000	17.380.048.543	41,83%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.077	Pemberian Hibah kepada Pemerintah Laos selaku Ketua ASEAN 2024 untuk Penyelenggaraan KTT ASEAN 2024	15.680.000.000	15.130.458.490	96,50%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.078	Knowledge Sharing Teknologi Irigasi dengan Mekong River Commission (MRC)	1.011.172.000	807.569.467	79,86%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.079	Pemberian Hibah Vaksin dari Pemerintah RI kepada Myanmar	8.799.867.000	5.269.681.483	59,88%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.080	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Vanuatu di Bidang Keperawatan	1.358.880.000	1.228.358.556	90,39%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.081	Pengiriman Tenaga Ahli Indonesia ke Kepulauan Solomon pada Sektor Peternakan Ayam Broiler di Kepulauan Solomon	3.440.648.000	2.732.398.570	79,42%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan

Bagian Anggaran BUN 999.02
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pelayanan Umum Lainnya
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9BB.082	Pengiriman Tenaga Ahli Indonesia ke Kepulauan Solomon untuk Kegiatan Studi Lapang Peningkatan Kapasitas Budi Daya Tilapia dan Rumput Laut di Kepulauan Solomon	1.757.839.000	1.266.374.642	72,04%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.083	Dukungan Pengelolaan Sampah Bencana untuk Vanuatu	6.021.098.000	6.020.624.510	99,99%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.084	Peningkatan Kapasitas Administrasi Kepabeanan dan Cukai di Kawasan Asia Pasifik	2.271.427.000	1.415.986.541	62,34%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.085	West Sepik Integrated Development Program Phase I (carry over) – Papua Nugini	8.114.438.000	5.001.631.813	61,64%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.086	Peningkatan Kapasitas Personel Pelayanan Penerbangan Guinea	1.881.231.000	1.731.520.653	92,04%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.087	Pendidikan dan Latihan Sekolah Staf Dinas Luar Negeri (Sesdilu) Internasional bagi Pejabat Mid-Career Kementerian Luar Negeri Negara-Negara Kawasan Karibia	5.198.531.000	1.923.917.016	37,01%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.089	Pelatihan Peningkatan Kapasitas untuk Pengelolaan Komoditas Berkelanjutan Berbasis Pertanian Rakyat untuk Negara se-haluan	6.314.924.000	5.374.873.208	85,11%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan
9BB.090	Dukungan Pada Rencana Tanggap Darurat/Emergency Response Plan oleh ILO di Wilayah Pendudukan Palestina	8.150.000.000	8.122.990.050	99,67%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan

Bagian Anggaran BUN 999.02
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pelayanan Umum Lainnya
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9BB.091	Bantuan dan Perlindungan Bagi Rakyat Palestina yang Terdampak Konflik Bersenjata dan Kekerasan di Jalur Gaza melalui UNRWA	32.600.000.000	31.710.079.715	97,27%	100	100	Persen	100	Kegiatan telah selesai dan dilakukan pengesahan

Bagian Anggaran BUN 999.03
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pinjaman Pemerintah
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
999.03.08	Program Investasi Pemerintah								
4063	Pengelolaan Investasi Pemerintah								
9CC	Investasi Pemerintah Lainnya								
002	Rumah yang Dibiayai	17.020.000.000.000	17.020.000.000.000	100%	200.000	200.000	Unit Rumah	100%	-
4063	Pengelolaan Investasi Pemerintah								
9CA	Investasi kepada Badan Layanan Umum								
004	Penyaluran Dana Rehabilitasi Mangrove	1.212.670.000.000	512.670.000.000	42%	100	42	Persen	42%	
4098	Pengelolaan PMN kepada BUMN								
9CB	Investasi kepada BUMN dan Lembaga/Badan Lainnya								
001	Serapan Anggaran PMN kepada PT Utama Karya (Persero)	19.604.000.000.000	18.604.000.000.000	95%	100	95	Persen	95%	
003	Serapan Anggaran PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	1.891.000.000.000	1.891.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%	
004	Serapan Anggaran PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	3.556.000.000.000	3.556.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%	
014	Serapan Anggaran PMN kepada PT Len Industri (Persero)	649.230.000.000	649.230.000.000	100%	100	100	Persen	100%	
017	Serapan Anggaran PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero)	6.000.000.000.000	5.999.999.997.857	100%	100	100	Persen	100%	
018	Serapan Anggaran PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.000.000.000.000	2.000.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%	
019	Serapan Anggaran PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero)	965.000.000.000	965.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%	
020	Serapan Anggaran PMN kepada PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero)	1.500.000.000.000	1.500.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%	

Bagian Anggaran BUN 999.03
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pinjaman Pemerintah
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4103	Pengelolaan Investasi kepada OI/LKI/BUI								
9CC	Investasi Pemerintah Lainnya								
002	Tambahan Investasi kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional	1.984.501.867.000	1.984.501.866.764	100%	3	3	Organisasi/LKI/BUI	100%	
4105	Pengelolaan Dana Dalam Rangka Pemberian Bantuan Internasional								
9CA	Investasi kepada Badan Layanan Umum								
006	Penempatan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional	38.615.865.000	38.615.865.000	100%	100	100	Persen	100%	
4860	Pembiayaan Investasi untuk Pendanaan Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional								
9CA	Investasi kepada Badan Layanan Umum								
007	Tanah PSN yang Dibiayai	15.000.000.000.000	7.500.000.000.000	50%	20.519.341	35.897.233,86	m2	175%	
4904	Pengelolaan PMN kepada Lembaga/Badan Lainnya								
9CB	Investasi kepada BUMN dan Lembaga/Badan Lainnya								
009	Serapan Anggaran PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	10.000.000.000.000	5.000.000.000.000	50%	100	50	Persen	50%	
5294	Pengelolaan Kewajiban Penjaminan Pemerintah								
9CD	Kewajiban Penjaminan								
005	Jaminan pada Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha melalui Badan Usaha Penjamin Infrastruktur	681.543.000.000	681.543.000.000	100%	7	7	Perjanjian Jaminan	100%	
006	Jaminan pada Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	55.492.000.000	55.492.000.000	100%	10	10	Surat Jaminan	100%	

Bagian Anggaran BUN 999.03
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pinjaman Pemerintah
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5294.9CD.007	Jaminan pada Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	25.444.000.000	25.444.000.000	100%	11	11	Surat Jaminan	100%	
5294.9CD.008	Jaminan dalam rangka Percepatan PembangunanPembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW	61.507.000.000	61.507.000.000	100%	3	3	Jaminan	100%	
5294.9CD.010	Jaminan pada BUMN dalam rangka PelaksanaanProgram PEN	635.000.000.000	635.000.000.000	100%	7	7	Jumlah Jaminan	100%	
5295	Pengelolaan Dana Pembangunan Pendidikan Nasional								
5295.9CA	Investasi kepada Badan Layanan Umum								
5295.9CA.008	Penyaluran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	15.000.000.000.000	15.000.000.000.000	100%	100	100	Persen	100%	-

Bagian Anggaran BUN 999.04
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pemberian Pinjaman
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09	Program Pemberian Pinjaman								
4065	Pengelolaan Pemberian Pinjaman								
001	Alokasi Penerusan Pinjaman kepada BUMN	2.749.800.959.000	1.441.133.235.516	52,41%	6	5	Proyek	83,33%	
002	Alokasi Penerusan Pinjaman kepada Pemda	3.743.070.000.000	2.801.304.537.758	74,84%	1	1	Proyek	100%	

Bagian Anggaran BUN 999.05
Fungsi: 01 Pelayanan Umum
Subfungsi: 01.06 Pembangunan Daerah

per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Capaian Output DIPA				Capaian Output Riil				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	Satu-an	%	Anggaran	Realisasi	Satu-an	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah												
4092	Kegiatan: Pengelolaan Transfer Dana Alokasi Umum	433.577.123.851.000	429.210.611.278.998	98,99%	433.577.123.851.000	429.210.611.278.998	Daerah	98,99%	3.444	3.372	Daerah	97,91%	
004	Alokasi DAU yang tidak ditentukan penggunaannya yang disalurkan	343.527.595.289.000	343.527.595.289.000	100,00%	343.527.595.289.000	343.527.595.289.000	Daerah	100,00%	546	546	Daerah	100,00%	
007	Alokasi DAU Dukungan Penggajian PPPK Daerah yang disalurkan	15.676.719.569.000	11.682.211.062.523	74,52%	15.676.719.569.000	11.682.211.062.523	Daerah	74,52%	523	455	Daerah	87,00%	
008	Alokasi DAU Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disalurkan	1.699.600.000.000	1.649.654.425.851	97,06%	1.699.600.000.000	1.649.654.425.851	Daerah	97,06%	411	407	Daerah	99,03%	
009	Alokasi DAU Dukungan Bidang Pendidikan yang disalurkan	37.470.690.538.000	37.276.919.147.598	99,48%	37.470.690.538.000	37.276.919.147.598	Daerah	99,48%	544	544	Daerah	100,00%	
010	Alokasi DAU Dukungan Bidang Kesehatan yang disalurkan	17.141.720.743.000	17.112.772.095.184	99,83%	17.141.720.743.000	17.112.772.095.184	Daerah	99,83%	535	535	Daerah	100,00%	
011	Alokasi DAU Dukungan Bidang Pekerjaan Umum yang disalurkan	12.182.977.404.000	12.083.638.950.842	99,18%	12.182.977.404.000	12.083.638.950.842	Daerah	99,18%	535	535	Daerah	100,00%	
012	Alokasi DAU Tambahan THR Bagi ASN Guru Daerah Yang Disalurkan	5.877.820.308.000	5.877.820.308.000	100,00%	5.877.820.308.000	5.877.820.308.000	Daerah	100,00%	350	350	Daerah	100,00%	
4068	Kegiatan: Pengelolaan Transfer Dana Bagi Hasil	153.278.976.730.000	153.174.562.784.262	99,93%	153.278.976.730.000	153.174.562.784.262	Daerah	99,93%					
	Transfer DBH PPh Pasal 21	30.927.885.539.000	30.927.885.539.000	100,00%	30.927.885.539.000	30.927.885.539.000	Daerah	100,00%	546	546	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH PPh Pasal 25/29	1.805.854.933.000	1.805.854.933.000	100,00%	1.805.854.933.000	1.805.854.933.000	Daerah	100,00%	545	545	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH PBB Provinsi	3.423.456.752.000	3.423.456.752.000	100,00%	3.423.456.752.000	3.423.456.752.000	Daerah	100,00%	38	38	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH Biaya Upah Pungut PBB untuk Provinsi	79.000	79.000	100,00%	79.000	79.000	Daerah	100,00%	38	38	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH PBB Kabupaten/Kota	18.084.232.432.000	18.084.232.432.000	100,00%	18.084.232.432.000	18.084.232.432.000	Daerah	100,00%	508	508	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH Biaya Upah Pungut PBB untuk Kabupaten/Kota	468.000	468.000	100,00%	468.000	468.000	Daerah	100,00%	508	508	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH CHT	5.097.112.498.000	5.087.556.141.540	99,81%	5.097.112.498.000	5.087.556.141.540	Daerah	99,81%	444	345	Daerah	77,70%	
	Transfer DBH Perkebunan Sawit	2.846.490.737.000	2.824.927.382.500	99,24%	2.846.490.737.000	2.824.927.382.500	Daerah	99,24%	349	343	Daerah	98,28%	
	Transfer DBH Minyak Bumi	8.944.481.225.000	8.944.481.225.000	100,00%	8.944.481.225.000	8.944.481.225.000	Daerah	100,00%	346	346	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH Gas Bumi	7.006.411.326.000	7.006.411.326.000	100,00%	7.006.411.326.000	7.006.411.326.000	Daerah	100,00%	290	290	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH Landrent	402.439.318.000	402.439.318.000	100,00%	402.439.318.000	402.439.318.000	Daerah	100,00%	376	376	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH Royalti	70.708.377.511.000	70.708.377.511.000	100,00%	70.708.377.511.000	70.708.377.511.000	Daerah	100,00%	465	465	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH Iuran Produksi	45.069.226.000	45.069.226.000	100,00%	45.069.226.000	45.069.226.000	Daerah	100,00%	99	99	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH Iuran Tetap	19.699.655.000	19.699.655.000	100,00%	19.699.655.000	19.699.655.000	Daerah	100,00%	288	288	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH Setoran Bagian Pemerintah	1.521.511.410.000	1.521.511.410.000	100,00%	1.521.511.410.000	1.521.511.410.000	Daerah	100,00%	92	92	Daerah	100,00%	
	Transfer DBH DR	787.113.708.000	767.842.216.164	97,55%	787.113.708.000	767.842.216.164	Daerah	97,55%	31	29	Daerah	93,55%	
	Transfer DBH IIUPH	56.129.637.000	49.365.946.800	87,95%	56.129.637.000	49.365.946.800	Daerah	87,95%	22	21	Daerah	95,45%	
	Transfer DBH PSDH	651.011.514.000	603.752.461.258	92,74%	651.011.514.000	603.752.461.258	Daerah	92,74%	512	479	Daerah	93,55%	
	Transfer DBH Perikanan	951.698.762.000	951.698.762.000	100,00%	951.698.762.000	951.698.762.000	Daerah	100,00%	509	509	Daerah	100,00%	

Kode	Kegiatan	Belanja			Capaian Output DIPA				Capaian Output Riel				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	Satu-an	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	Program Pengelolaan Transfer ke Daerah												
4093	Kegiatan: Pengelolaan Dana Transfer Khusus												
001	Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disalurkan	52.104.027.020.000	52.051.511.455.000	99,90%	52.104.027.020.000	52.051.511.455.000		99,90%	43.692.520	43.672.980	Peserta Didik	99,96%	
015	Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Kinerja yang disalurkan	1.471.916.250.000	1.462.400.000.000	99,35%	1.471.916.250.000	1.462.400.000.000		99,35%	46.985	46.734	Satuan Pendidikan	99,47%	
002	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler yang disalurkan	3.930.389.010.000	3.888.551.920.000	98,94%	3.930.389.010.000	3.888.551.920.000		98,94%	6.234.963	6.202.158	Peserta didik	99,47%	
029	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kinerja yang disalurkan	78.840.000.000	78.195.000.000	99,18%	78.840.000.000	78.195.000.000		99,18%	3.644	3.611	Satuan Pendidikan	99,09%	
003	Alokasi Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah yang disalurkan	52.872.544.576.000	51.850.462.245.921	98,07%	52.872.544.576.000	51.850.462.245.921		98,07%	1.100.755	1.095.474	guru	99,52%	
004	Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah yang disalurkan	1.595.777.805.000	1.495.768.803.108	93,73%	1.595.777.805.000	1.495.768.803.108		93,73%	494.693	435.622	guru	88,06%	
005	Alokasi Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah yang disalurkan	2.183.612.911.000	2.075.612.901.562	95,05%	2.183.612.911.000	2.075.612.901.562		95,05%	50.869	45.228	guru	88,91%	
006	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas yang disalurkan	4.396.953.848.000	4.375.097.720.000	99,50%	4.396.953.848.000	4.375.097.720.000		99,50%	545	545	Dinas Kesehatan	100,00%	
031	Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas yang disalurkan	8.481.718.304.000	8.385.034.927.891	98,86%	8.481.718.304.000	8.385.034.927.891		98,86%	10.074	10.072	Puskesmas	99,98%	
007	Alokasi Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana yang disalurkan	3.239.300.000.000	3.237.433.806.000	99,94%	3.239.300.000.000	3.237.433.806.000		99,94%	6.229	4.648	Balai Penyuluhan KB	74,62%	
008	Alokasi Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil yang disalurkan	250.000.000.000	117.229.341.582	46,89%	250.000.000.000	117.229.341.582		46,89%	58.731	35.723	Peserta Pelatihan	60,82%	
010	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler yang disalurkan	1.566.289.530.000	1.551.518.195.000	99,06%	1.566.289.530.000	1.551.518.195.000		99,06%	890.657	886.761	Peserta didik	99,56%	
030	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kinerja yang disalurkan	53.955.000.000	53.595.000.000	99,33%	53.955.000.000	53.595.000.000		99,33%	1.199	1.191	Satuan Pendidikan	99,33%	
011	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum yang disalurkan	120.300.000.000	120.300.000.000	100,00%	120.300.000.000	120.300.000.000		100,00%	109	109	museum	100,00%	
016	Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Taman Budaya yang disalurkan	49.675.000.000	49.675.000.000	100,00%	49.675.000.000	49.675.000.000		100,00%	28	28	taman budaya	100,00%	
012	Alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan yang disalurkan	133.300.000.000	132.033.514.000	99,05%	133.300.000.000	132.033.514.000		99,05%	26.320	16.331	Peserta Pelatihan	62,05%	
013	Alokasi Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah yang disalurkan	65.827.750.000	60.811.675.450	92,38%	65.827.750.000	60.811.675.450		92,38%	1	1	PSEL	100,00%	
019	Alokasi Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang disalurkan	132.000.000.000	129.806.000.000	98,34%	132.000.000.000	129.806.000.000		98,34%	305	305	Pemda	100,00%	
020	Alokasi Dana Fasilitas Penanaman Modal yang disalurkan	250.000.000.000	248.324.714.500	99,33%	250.000.000.000	248.324.714.500		99,33%	114.134	107.352	Pelaku Usaha	94,06%	
021	Alokasi Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang disalurkan	300.045.000.000	297.142.612.500	99,03%	300.045.000.000	297.142.612.500		99,03%	1.989	1.812	kelompok	91,10%	
022	Alokasi Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Menengah yang disalurkan	200.000.000.000	198.119.692.500	99,06%	200.000.000.000	198.119.692.500		99,06%	99	98	sentra	98,99%	
6949	Pengelolaan Hibah Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah												
005	Pembayaran Tagihan Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang	4.790.000.000	4.790.000.000	100%	4.790.000.000	4.790.000.000		100%	100	100	Pembangunan IPALD dan stasiun pompa (%)	100%	
6950	Pengelolaan Hibah Pembangunan Infrastruktur Pasca Bencana												
006	Pembayaran Tagihan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	-	1.174.500.772.000	-	1.185.509.865.000	1.174.500.772.000		99%					Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi tidak dibayarkan berdasarkan progress pekerjaan, tetapi menggunakan mekanisme pembayaran di awal. Sehingga pada tahun 2024 sudah ada realisasi anggaran tetapi capaian outputnya belum ada
6952	Pengelolaan Hibah Transportasi												
010	Pembayaran Tagihan Hibah Mass Rapid Transit (MRT) Project	95.417.000.000	576.240.722.024	604%	690.727.000.000	576.240.722.024		83%	35	44	Lanjutan Pembangunan jalur MRT Jakarta Fase 2A (%)	126%	
6954	Pengelolaan Hibah Sanitasi (Rupiah Murni)												
012	Pembayaran Tagihan Hibah Sanitasi/Air Limbah Setempat (Rupiah Murni)	150.000.000.000	121.300.446.516	81%	150.000.000.000	121.300.446.516		81%	19.167	16.496	Tangki Septik pada Rumah Terlayani (RT)	86%	
6956	Pengelolaan Hibah Sumber Daya Alam												
001	Pembayaran Tagihan Hibah Bio Carbon Fund Initiative forSusta	23.406.257.000	20.760.997.313	89%	23.406.257.000	20.760.997.313		89%	4	4	Kesatuan Pengelolaan Hutan (KH	100%	
6957	Pengelolaan Hibah Air Minum												
015	Pembayaran Tagihan Hibah Air Minum Berbasis KinerjaBantuan	6.142.133.000	75.706.210.913	1233%	78.243.285.000	75.706.210.913		97%	17	17	Peningkatan kinerja tata kelola, efisiensi operasi dan keuangan, serta kualitas pelayanan pada PDAM (PDAM)	100%	
6959	Pengelolaan Hibah Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian												

Bagian Anggaran BUN 999.05
Fungsi: 01 Pelayanan Umum
Subfungsi: 01.06 Pembangunan Daerah
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Capaian Output DIPA				Capaian Output Riiil				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	Satu-an	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
017	Pembayaran Tagihan Hibah Rural Empowerment andAgricultura	32.771.675.000	43.381.003.471	132%	49.365.113.000	43.381.003.471		88%	45.775	25.533	Sekolah lapang lanjutan (Petani)	56%	
018	Pembayaran Tagihan Hibah The Development ofIntegrated Farm	201.416.902.000	190.482.108.457	95%	216.906.725.000	190.482.108.457		88%	100	104	Pembangunan jalan usaha tani (km)	104%	
4081	Pengelolaan Transfer DAK Fisik												
001	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang PAUD yang disalurkan	422.733.486.000	402.342.369.074	95%	422.733.486.000	402.342.369.074		95%	1.531	1.528	Satuan pendidikan	100%	
9EC.002	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SD yang disalurkan	5.285.378.584.000	5.037.884.728.605	95%	5.285.378.584.000	5.037.884.728.605		95%	5.143	5.129	Satuan pendidikan	100%	
9EC.003	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMP yang disalurkan	3.790.202.177.000	3.609.885.643.580	95%	3.790.202.177.000	3.609.885.643.580		95%	3.263	3.253	Satuan pendidikan	100%	
9EC.004	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMA yang disalurkan	2.152.302.975.000	2.101.466.653.733	98%	2.152.302.975.000	2.101.466.653.733		95%	1.078	1.077	Satuan pendidikan	100%	
9EC.005	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SMK yang disalurkan	3.144.755.691.000	3.029.960.234.536	96%	3.144.755.691.000	3.029.960.234.536		95%	845	845	Satuan pendidikan	100%	
9EC.006	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SLB yang disalurkan	375.983.727.000	330.679.419.821	88%	375.983.727.000	330.679.419.821		95%	443	437	Satuan pendidikan	99%	
9EC.007	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang SKB yang disalurkan	123.943.360.000	113.524.223.282	92%	123.943.360.000	113.524.223.282		95%	323	310	Satuan pendidikan	96%	
9EC.008	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah yang disalurkan	525.000.000.000	491.452.039.159	94%	525.000.000.000	491.452.039.159		95%	47	46	Unit gedung baru perpustakaan	100%	
9ED.001	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting yang disalurkan	1.217.809.178.000	1.108.580.550.496	91%	1.217.809.178.000	1.108.580.550.496		95%	38	37	Unit Gedung Unit Transfusi Darah	97%	
9ED.004	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan yang disalurkan	11.782.190.822.000	11.010.705.214.419	93%	11.782.190.822.000	11.010.705.214.419		95%	48	44	Unit Puskesmas di Kec. tanpa Puskesmas	92%	
9ED.005	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan Subbidang Keluarga Berencana yang disalurkan	400.000.000.000	377.638.505.657	94%	400.000.000.000	377.638.505.657		95%	1.400	1.396	Unit Rehab/Kelengkapan Balai PKK	99,71%	
9EF.001	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Mendukung Konektivitas Daerah yang disalurkan	5.596.963.835.000	5.406.220.574.651	97%	5.596.963.835.000	5.406.220.574.651		95%	2.400	2.182	penanganan jalan (km)		
9EF.002	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Pengembangan Food Estate yang disalurkan	1.100.000.000.000	1.063.832.608.726	97%	1.100.000.000.000	1.063.832.608.726		95%	525	450	penanganan jalan (km)		
9EF.003	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan	1.000.000.000.000	944.926.915.357	94%	1.000.000.000.000	944.926.915.357		95%	650	552	penanganan jalan (km)		
9EF.004	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi Perairan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afimasi yang disalurkan	400.000.000.000	348.006.240.634	87%	400.000.000.000	348.006.240.634		95%	68	67	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pelabuhan (Paket)		
9EF.005	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Transportasi Perdesaan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afimasi yang disalurkan	750.000.000.000	707.527.853.146	94%	750.000.000.000	707.527.853.146		95%	279	272	Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa Strategis (Kilometer)		
9EF.006	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afimasi yang disalurkan	1.500.000.000.000	1.435.406.706.860	96%	1.500.000.000.000	1.435.406.706.860		95%	604	600	penanganan jalan (km)		
9EF.007	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) yang disalurkan	3.008.265.122.000	2.875.609.024.994	96%	3.008.265.122.000	2.875.609.024.994		95%	1.457	1.353	penanganan jalan (km)		
9EG.001	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tematik Pengembangan Food Estate yang disalurkan	385.096.297.000	338.296.208.192	88%	385.096.297.000	338.296.208.192		95%					
9EG.002	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Tematik Pengembangan Food Estate yang disalurkan	1.385.318.384.000	1.288.965.600.692	93%	1.385.318.384.000	1.288.965.600.692		95%					
9EG.003	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) yang disalurkan	303.581.616.000	270.076.008.268	89%	303.581.616.000	270.076.008.268		95%	1.318	1.254	Paket, Perahu/kapal penangkap ikan	95%	
9EG.004	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan Tematik Pengembangan Food Estate yang disalurkan	31.869.256.000	29.402.396.409	92%	31.869.256.000	29.402.396.409		95%	119	44	Hektar, Penanaman hutan rakyat	37%	
9EG.005	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan	137.630.744.000	132.605.872.545	96%	137.630.744.000	132.605.872.545		95%	45	25	unit, penyediaan alat angkut sampah Arm Roll	56%	
9EG.006	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) yang disalurkan	2.077.503.703.000	1.972.205.693.092	95%	2.077.503.703.000	1.972.205.693.092		95%					
9EG.007	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewan) yang disalurkan	1.309.900.000.000	1.236.188.298.833	94%	1.309.900.000.000	1.236.188.298.833		95%					
9EH.001	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Mendukung Peningkatan Kualitas SDM yang disalurkan	2.375.753.042.000	2.260.368.257.857	95%	2.375.753.042.000	2.260.368.257.857		95%	65216; 277735	65216; 265111	meter, SR	100%, 95%	

Bagian Anggaran BUN 999.05
Fungsi: 01 Pelayanan Umum
Subfungsi: 01.06 Pembangunan Daerah
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Capaian Output DIPA				Capaian Output Rill				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	Satu-an	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9EH.002	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan	100.000.000.000	93.121.285.595	93%	100.000.000.000	93.121.285.595		95%	14	14	PLUT	100%	
9EH.003	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan	400.000.000.000	355.295.984.662	89%	400.000.000.000	355.295.984.662		95%	57	57	Sentra IKM	100%	
9EH.004	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Pariwisata Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan	450.000.000.000	402.845.647.941	90%	450.000.000.000	402.845.647.941		95%					
9EH.005	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu yang disalurkan	312.734.878.000	240.733.176.587	77%	312.734.878.000	240.733.176.587		95%					
9EH.006	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Mendukung Peningkatan Kualitas SDM yang disalurkan	1.643.855.791.000	1.614.084.133.585	98%	1.643.855.791.000	1.614.084.133.585		95%	13224; 132125	12699; 131312	SR; Unit	95%; 99%	
9EH.007	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Perdagangan Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas yang disalurkan	130.000.000.000	69.499.769.000	53%	130.000.000.000	69.499.769.000		95%					
9EH.009	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu yang disalurkan	65.846.958.000	58.918.308.271	89%	65.846.958.000	58.918.308.271		95%	4.984	4.022	SR	81%	
9EH.010	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu yang disalurkan	49.844.209.000	44.368.461.666	89%	49.844.209.000	44.368.461.666		95%	3130; 416	2782; 184	SR; Unit	88%; 44%	
9EH.011	Alokasi DAK Fisik Penugasan Bidang Infrastruktur Energi Terbarukan Tematik Peningkatan Konektivitas dan Elektrifikasi di Daerah Afirmasi yang disalurkan	88.000.000.000	87.452.503.920	99%	88.000.000.000	87.452.503.920		95%	635	588	PLTS Terpusat Off Grid (kiloWatt	93%	

Bagian Anggaran BUN 999.05
Fungsi: 01 Pelayanan Umum
Subfungsi: 01.06 Pembangunan Daerah
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Capaian Output DIPA				Capaian Output Riil				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	Satu-an	%	Anggaran	Realisasi	Satu-an	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
999.05.10	Program Pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah												
4067	Pengelolaan Transfer Dana Otonomi Khusus	18.271.490.935.000	18.271.490.935.000	100%	18.271.490.935.000	18.271.490.935.000		100%					Dana Otsu per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar 100%
9EA.001	Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Bersifat Umum yang disalurkan	4.276.993.036.000	4.276.993.036.000	100%	4.276.993.036.000	4.276.993.036.000		100%	72	72	Daerah	100%	Wilayah Papua terdiri dari 48 Daerah, Prov. Aceh terdiri dari 24 Daerah
9EA.002	Alokasi Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya yang disalurkan	5.346.241.294.000	5.346.241.294.000	100%	5.346.241.294.000	5.346.241.294.000		100%	72	72	Daerah	100%	angka Capaian Output menunggu penyampaian laporan tahunan dari Pemda. Sampai dengan saat ini, belum ada Pemda di wilayah Papua maupun Aceh yang menyampaikan Laporan Tahunan
9EA.003	Alokasi Dana Otonomi Khusus Aceh yang disalurkan	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000	100%	4.276.993.035.000	4.276.993.035.000		100%	72	72	Daerah	100%	
9EA.004	Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang disalurkan	4.371.263.570.000	4.371.263.570.000	100%	4.371.263.570.000	4.371.263.570.000		100%	72	72	Daerah	100%	
5323	Pengelolaan Dana Desa												
9.EJ.001	Alokasi Dana Desa yang disalurkan ke Desa	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598	99,90%	71.000.000.000.000	70.925.927.774.598		99,90%	75259	75218	Desa	99,90%	Dana Desa per 31 Desember 2024 terealisasi sebesar 99,9% . Jumlah Desa penerima Dana Desa TA 2024 sebanyak 75.259 Desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota.
5869	Pengelolaan Transfer Insentif Fiskal	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500	87,50%	8.000.000.000.000	7.001.740.596.500		87,50%	433	431		99,50%	Output Dana Insentif Fiskal TA 2024 diantaranya sebagai berikut: - bantuan ternak ke masyarakat 61 ribu kambing/sapi/unggas - Pemberian beasiswa/bantuan pendidikan untuk 63.39 siswa/penerima - pembangunan/rehab/peningkatan jalan untuk 1,524 km jalan - pembangunan/rehab/peningkatan/penggantian jembatan untuk 1.74 km - bantuan alat/modal untuk 8.27 ribu UMKM - 2 daerah tidak disalurkan (kab. Sidoarjo, dan Kab. Bandung Barat) karena kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi
9.EB.006	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun sebelumnya yang disalurkan	4.000.000.000.000	3.895.391.511.500	97,40%	4.000.000.000.000	3.895.391.511.500		97,40%	312	308		98,70%	
9.EK.008	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan periode I yang disalurkan	300.000.000.000	290.953.960.500	97,00%	300.000.000.000	290.953.960.500		97,00%	50	50		100,00%	
9.EK.009	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan periode II yang disalurkan	300.000.000.000	-	0,00%	300.000.000.000	-		0,00%	0	0			IF Kinerja Tahun Berjalan kategori penanganan inflasi periode 2 tidak dialokasikan
9.EK.010	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan periode III yang disalurkan	300.000.000.000	-	0,00%	300.000.000.000	-		0,00%	0	0			IF Kinerja Tahun Berjalan kategori penanganan inflasi periode 3 tidak dialokasikan
9.EK.006	Alokasi Insentif Fiskal Kinerja tahun berjalan yang disalurkan	3.100.000.000.000	2.815.395.124.500	90,80%	3.100.000.000.000	2.815.395.124.500		90,80%	322	317		98,40%	
5322	Pengelolaan Transfer Dana Keistimewaan												
9.EA.006	Alokasi Dana Keistimewaan yang disalurkan	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000	100,00%	1.420.000.000.000	1.420.000.000.000		100,00%	1	1		100,00%	

Bagian Anggaran BUN 999.05
per 31 Desember 2024

No.	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT1	Jumlah Kabupaten/ Kota	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Penyaluran	Persentase
	1	2	3	4	5	6
A	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		5.753.109.178.000		5.463.958.217.532	94,97%
	Bidang Air Minum	259	2.441.600.000.000		2.319.286.566.128	94,99%
	Subbidang Air Minum	244	2.375.753.042.000		2.260.368.257.857	95,14%
	Subbidang Air Minum - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	27	65.846.958.000		58.918.308.271	89,48%
	Bidang Kesehatan	509	1.617.809.178.000		1.486.219.056.153	91,87%
	Subbidang Keluarga Berencana	318	400.000.000.000		377.638.505.657	94,41%
	Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting	457	1.217.809.178.000		1.108.580.550.496	91,03%
	Bidang Sanitasi	257	1.693.700.000.000		1.658.452.595.251	97,92%
	Subbidang Sanitasi	242	1.643.855.791.000		1.614.084.133.585	98,19%
	Subbidang Sanitasi - Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu	30	49.844.209.000		44.368.461.666	89,01%
B	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) NON Fisik		9.793.098.944.248		9.748.209.438.742	99,39%
	Stunting-BOK	546	7.096.196.314.448		7.057.440.411.877	99,45%
	Stunting-BOKB	513	2.213.860.351.000		2.212.704.582.000	99,95%
	Stunting-BOP PAUD	509	353.723.203.800		349.655.369.865	98,85%
	Stunting-KPP	235	129.319.075.000		128.409.075.000	99,30%
C	Dana Desa					
	Penanganan Stunting	434	6.832.632.728.000		6.832.632.728.000	100,00%
	TOTAL		22.378.840.850.248		22.044.800.384.274	98,51%

Keterangan

- Kolom 1

Nama Program/Kegiatan /Output atas Jenis Bidang DAK Stunting Tahun 2024, mengacu pada Peraturan Kementerian Keuangan tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian DAK terkait Stunting Tahun 2024
- Kolom 2

Data realisasi penyerapan DAK Stunting sampai 31 Desember 2024 di daerah masih berproses sesuai dengan mekanisme pelaporan DAK (seperti UP) yang akan melewati tahun berjalan (N+1), sehingga diusulkan bahwa realisasi adalah Realisasi Penyaluran .

Bagian Anggaran BUN 999.05
per 31 Desember 2024

Belanja Mandatory Spending
Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBN 2024	DIPA	Realisasi
2	Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah			
2.1	DAU dan DBH yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	212.177.581.336.249	211.972.547.508.650	208.057.038.003.144
2.1.1	Dana Bagi Hasil	721.845.239.249	516.811.411.650	516.811.411.650
2.1.1.1	Gas Bumi Dalam Rangka Otsus	571.347.592.519	382.688.268.150	382.688.268.150
2.1.1.2	Minyak Bumi Dalam Rangka Otsus	150.497.646.730	134.123.143.500	134.123.143.500
2.1.2	Dana Alokasi Umum	211.455.736.097.000	211.455.736.097.000	207.540.226.591.494
2.1.2.1	Non Gaji	28.103.017.904.000	28.103.017.904.000	27.957.689.361.000
2.1.2.1.1	DAU <i>Earmarked</i> Pendidikan (Non Gaji)	28.103.017.904.000	28.103.017.904.000	27.957.689.361.000
2.1.2.2	Gaji	183.352.718.193.000	183.352.718.193.000	179.582.537.230.494
2.1.2.2.1	DAU <i>Earmarked</i> Pendidikan (Gaji)	9.367.672.635.000	9.367.672.635.000	9.319.229.787.000
2.1.2.2.2	DAU <i>Blockgrant</i> Untuk Gaji Pendidik	144.924.338.036.000	144.924.338.036.000	144.924.338.036.000
2.1.2.2.3	DAU <i>Blockgrant</i> Untuk PPPK Guru diangkat 2023	12.492.196.724.000	12.492.196.724.000	12.492.196.724.000
2.1.2.2.4	DAU Tambahan Komponen THR/G13	5.877.820.308.000	5.877.820.308.000	5.877.820.308.000
2.1.2.2.5	DAU <i>Earmarked</i> PPPK Guru	10.690.690.490.000	10.690.690.490.000	6.968.952.375.494
2.2	Dana Alokasi Khusus	132.135.766.740.000	132.135.766.740.000	129.532.285.853.696
2.2.1	DAK Fisik	15.820.300.000.000	15.820.300.000.000	15.117.625.243.790
2.2.2	DAK Nonfisik	116.315.466.740.000	116.315.466.740.000	114.414.660.609.906
2.2.2.1	Tunjangan Profesi Guru ASND	52.872.544.576.000	52.872.544.576.000	51.850.462.245.921
2.2.2.2	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASND	1.595.777.805.000	1.595.777.805.000	1.495.768.803.108
2.2.2.3	Tunjangan Khusus Guru ASND di Daerah Khusus	2.183.612.911.000	2.183.612.911.000	2.075.612.901.562
2.2.2.4	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	53.864.082.908.000	53.864.082.908.000	53.308.509.500.854
2.2.2.5	BOP PAUD	4.009.229.010.000	4.009.229.010.000	3.963.347.151.955
2.2.2.6	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.620.244.530.000	1.620.244.530.000	1.550.985.006.506

Bagian Anggaran BUN 999.05
per 31 Desember 2024

Belanja *Mandatory Spending*
Realisasi Anggaran Pendidikan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	APBN 2024	DIPA	Realisasi
2.2.2.7	BOP Museum dan Taman Budaya	169.975.000.000	169.975.000.000	169.975.000.000
2.3	Dana Otonomi Khusus yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan	2.245.421.343.450	2.245.421.343.450	3.064.565.775.764
	JUMLAH	346.558.769.419.699	346.353.735.592.100	340.653.889.632.604

Bagian Anggaran BUN 999.07
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Program Pengelolaan Subsidi	297.889.378.638.006	292.692.594.096.854						
4861	Pengelolaan Subsidi Pajak								
002	Subsidi PPh DTP SBN Valas	5.343.473.153.000	5.343.473.153.000	100,00%	1	1	Wajib Pajak	100%	
003	Subsidi PPh DTP Penghapusan Utang PDAM	129.621.000	69.304.441	53,47%	1	1	Wajib Pajak	100%	
001	Subsidi PPh DTP Panas Bumi	2.968.099.696.000	2.968.099.696.000	100,00%	9	9	Wajib Pajak	100%	
001	Subsidi PPN DTP Rumah Tapak & Rumah Susun	509.300.000.000	509.300.000.000	100%	13.861	11.560	Wajib Pajak	83,40%	
001	Subsidi PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik	698.145.796.000	157.206.458.627	22,52%	14.238	14.238	Wajib Pajak	100,00%	
001	Subsidi PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Listrik	419.308.170.000	138.246.168.593	32,97%	4.366	2.785	Wajib Pajak	63,79%	
4862	Pengelolaan Subsidi Kredit Program								
006	Subsidi IJP Pelaku Usaha Korporasi dan IJP Loss Limit Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	72.674.265.000	69.194.265.000	95,21%	2	2	Penjamin	100%	
005	Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG)	3.776.650.000	3.044.846.912	80,62%	515	534	Debitur	103,69%	
008	Subsidi Bunga Pinjaman Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	264.320.400.000	252.159.126.358	95,40%	2	2	Debitur	100,00%	
4863	Pengelolaan Subsidi IJP KUR dan Bunga KUR								
001	Subsidi IJP UMKM Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	296.771.247.000	296.770.747.969	100,00%	2	2	Penjamin	100%	
004	Subsidi Bunga KUR	45.103.593.952.000	44.377.351.009.651	98,39%	4.848.747	4.830.785	Debitur	99,63%	
005	Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	100.000.000	41.353.431	41,35%	12	9	Debitur	42,70%	
002	Subsidi IJP KUR	86.317.792.000	16.135.205.138	18,69%	2	1	Penjamin	50,0%	
4865	Pengelolaan Subsidi Pupuk								
001	Subsidi Pupuk	49.874.456.743.000	47.387.402.436.351	95,01%	7.276.806	6.808.295	Ton	97,96%	

Bagian Anggaran BUN 999.07
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4867	Pengelolaan Subsidi Energi								
002	Subsidi Minyak Solar	17.265.281.389.000	17.115.109.641.445	99,13%	17.968.000	16.143.103	Kilo Liter	84,97%	
003	Subsidi Minyak Tanah	4.570.931.591.000	4.469.228.489.490	97,78%	524.000	459.987	Kilo Liter	87,78%	setelah diperhitungkan berapa yg kurang bayar dengan SPM terakhir
004	Subsidi LPG Tabung 3 Kg	80.860.111.414.000	80.213.612.965.648	99,20%	8.030.000	7.868.951	Metrik Ton	97,99%	
001	Subsidi Listrik	75.831.219.659.000	75.817.285.111.936	99,98%	68,31	68,46	TeraWattHour	99,83%	
4868	Pengelolaan Subsidi PSO Perkeretaapian								
001	Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Antarkota	216.434.654.000	204.271.529.071	94,38%	11.043.826	11.041.726	Penumpang	99,98%	
002	Subsidi PSO Kereta Api Kelas Ekonomi Perkotaan	2.497.804.696.000	2.433.839.583.652	97,44%	376.880.058	379.924.964	Penumpang	100,81%	
003	Subsidi PSO Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek	2.000.000.000.000	1.957.607.226.511	97,88%	21.430.325	21.205.106	Penumpang	98,95%	
4869	Pengelolaan Subsidi PSO Angkutan Laut								
001	Subsidi PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi	3.203.971.154.000	3.203.970.376.875	100,00%	3.970.047	3.970.047	Penumpang	100,00%	
4870	Pengelolaan Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers								
001	Subsidi PSO untuk Informasi Publik Bidang Pers	176.350.160.000	176.322.920.000	99,98%	170.985	170.985	Berita	100,00%	
4871	Pengelolaan Subsidi Bunga untuk Air Bersih								
001	Subsidi Bunga Air Bersih	7.985.907.000	6.702.617.829	83,93%	7	7	PDAM	100,0%	
4873	Pengelolaan Subsidi Perumahan								
001	Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan	895.000.000.000	852.348.000.000	95,23%	199.959	199.959	Unit	100,00%	
002	Subsidi Bunga Kredit Perumahan	4.609.438.646.000	4.609.436.081.696	100,00%	732.927	732.927	Unit	100,00%	

Bagian Anggaran BUN 999.07
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Pelayanan Umum Pemerintahan Lainnya
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6454	Pengelolaan Subsidi Bunga Pinjaman Daerah								
001	Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (PEN)	114.381.883.000	114.365.781.222	99,99%	29	29	Pemda	100,00%	

Bagian Anggaran BUN 999.08
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal serta urusan Luar Negeri
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Program Pengelolaan Belanja Lainnya	217.097.510.520.006	215.042.260.698.515						
4096	Pengelolaan Bantuan Kemasyarakatan								
001	Bantuan Kemasyarakatan Presiden	143.456.406.000	122.384.246.006	85,3%	1	1	Layanan	100	
002	Bantuan Kemasyarakatan Wakil Presiden	36.984.191.000	36.769.181.005	99,4%	1	1	Layanan	100	
4886	Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun								
001	Layanan Dukungan Manajemen Pengelolaan Kawasan Bintan dan Karimun	7.649.221.000	5.042.190.171	65,9%	1	1	Layanan	66	
002	Pengusahaan Kawasan Sekretariat Dewan Kawasan PBPB Bintan dan Karimun	4.860.833.000	3.952.796.543	81,3%	1	1	Layanan	83	
003	Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kab Bintan	6.546.231.000	5.454.926.951	83,3%	1	1	Layanan	84	
004	Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kab.Bintan	80.103.769.000	78.941.961.561	98,5%	1	1	Layanan	99	
005	Layanan Dukungan Manajemen BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	5.874.001.000	4.674.417.875	79,6%	1	1	Layanan	80,1	
006	Pengusahaan Kawasan BP Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang	71.375.999.000	66.775.278.139	93,6%	1	1	Layanan	94,5	
007	Layanan Dukungan Manejemen BP Kawasan Karimun	8.811.800.000	6.083.712.616	69,0%	1	1	Layanan	70	
008	Pengusahaan Kawasan BP Kawasan Karimun	69.688.200.000	67.933.596.111	97,5%	1	1	Layanan	100	
4893	Pengelolaan Bantuan Operasional Layanan Pos Universal								
001	Layanan Pos Universal	369.802.535.000	366.844.830.481	99,2%	2.400	2.400	KPC LPU	100	

Bagian Anggaran BUN 999.08
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal serta urusan Luar Negeri
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4967	Pengelolaan Dana Cadangan Kartu Prakerja								
002	Pelatihan Program Kartu Prakerja	4.824.960.000.000	2.923.797.725.800	60,6%	1.334.399	1.419.298	Peserta	107	Pada akhir tahun menggunakan sisa dana yang tidak terserap untuk membuka batch pelatihan baru
003	Layanan Dukungan Manajemen Program Kartu Prakerja	175.040.000.000	170.689.555.407	97,5%	1	1	Layanan	100	
4887	Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS Provinsi Papua								
001	Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua	151.452.988.000	106.854.376.765	70,6%	25	25	Kabupaten	100	
4966	Pengelolaan Dana Cadangan Pembayaran Kompensasi Tarif Listrik dan HJE BBM								
001	Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Harga Jual Eceran BBM	128.701.050.982.000	128.701.050.975.817	100,0%	44.057.882	44.057.882	Kilo Liter	100	
002	Penyelesaian Utang Kompensasi atas Kekurangan Penerimaan Badan Usaha Akibat Kebijakan Penetapan Tarif Tenaga Listrik	80.587.085.959.000	80.587.085.956.769	100,0%	204,41	204,41	Terawatt Hour	100	
4982	Pengelolaan Dana Operasional SKK Migas								
001	Layanan Dukungan Manajemen Pengawasan dan Pengembangan Industri Hulu Migas	1.541.284.370.000	1.773.065.305.608	97,2%	1	1	Layanan	100	
002	Layanan Industri Hulu Migas	283.267.154.000			4	4	Layanan	100	

Bagian Anggaran BUN 999.08
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal serta urusan Luar Negeri
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4888	Pengelolaan Ongkos Angkut Beras PNS di Provinsi Papua Barat								
001	Ongkos angkut beras PNS Distrik Pedalaman Provinsi Papua Barat	24.663.081.000	14.859.664.882	60,25%	12	12	Kabupaten	100	
4070	Pengelolaan Dan Penyusunan Laporan Keuangan Belanja Lain-lain								
001	Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Atas Penanganan Perkara di ICSID	3.552.800.000		0,00%	1		Perkara	0	

Bagian Anggaran BUN 999.99
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal serta urusan Luar Negeri
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Program Pengelolaan Transaksi Khusus								
4899	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial								
001	Manfaat Pensiun dan Cicilan UPSL Program THT yang disalurkan (Peserta)	163.007.715.368.000	160.520.141.397.297	98,47%	51.201.864	50.456.584	Peserta	98,54%	Jumlah peserta total dalam setahun
002	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja yang disalurkan (Peserta)	334.466.769.000	326.922.812.119	97,74%	23.366.016	22.935.993	Peserta	98,16%	Jumlah peserta total dalam setahun
003	Iuran Asuransi Kesehatan yang disalurkan (Peserta)	11.121.894.000.000	11.113.617.931.370	99,93%	50.723.508	55.557.429	Peserta	109,53%	Jumlah peserta total dalam setahun
004	Iuran Jamkesmas dan Jamkestama yang disalurkan (Peserta)	563.609.264.000	544.082.757.684	96,54%	91.992	82.800	Peserta	90,01%	Jumlah peserta total dalam setahun
005	Iuran Jaminan Kematian Kerja yang disalurkan (Peserta)	617.787.517.000	601.837.493.483	97,42%	23.366.016	22.935.993	Peserta	98,16%	Jumlah peserta total dalam setahun
4899	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Kontribusi Sosial								
007	Biaya Operasional Penyelenggaraan yang disalurkan (Peserta)	861.190.529.000	764.694.791.784	88,80%	3.605.796	3.611.639	Peserta	100,16%	Rata-rata peserta total dalam setahun
4900	Pengelolaan Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog								
001	Alokasi Selisih Harga Beras Bulog yang disalurkan	121.245.804.000	119.748.067.230	98,76%	37.462.244	34.978.974	Kg	93,37%	Jumlah peserta total dalam setahun
001	Alokasi PPN BI RTGS/SWIFT yang disalurkan (Transaksi)	289.405.000	268.234.420	92,68%	12	21	Transaksi	175,00%	Jumlah peserta total dalam setahun
002	Alokasi Bunga Negatif yang disalurkan (Transaksi)	31.000.000	6.986.168	22,54%	12	4	Transaksi	33,33%	Jumlah peserta total dalam setahun
003	Alokasi Jasa Pelayanan Bank/Pos Persepsi/Lainnya yang disalurkan (Transaksi)	344.551.236.000	319.552.359.000	92,74%	127.701.732	104.389.690	Transaksi	81,74%	Jumlah peserta total dalam setahun
004	Alokasi PPN Atas Transaksi RTGS BO yang disalurkan (Transaksi)	271.512.000	153.712.680	56,61%	48	48	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
005	Alokasi Fee Bank Kustodian yang disalurkan (Transaksi)	458.640.000	458.551.356	99,98%	12	12	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun

Bagian Anggaran BUN 999.99
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal serta urusan Luar Negeri
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
006	Alokasi Biaya Swift atas Layanan BO Valas (Transaksi)	2.019.628.000	1.643.188.500	81,36%	24	24	Transaksi	100%	Jumlah peserta total dalam setahun
6987	Pengelolaan Dana PNBPN BUN Dalam Rangka Peningkatan Kinerja dan Pengawasan BUN								
001	PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM IT DAN INFRASTRUKTUR	213.557.638.000	187.978.939.608	88,02%	3	3	Modul Aplikasi	100%	belum ada kegiatan
001	PENGEMBANGAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAS NEGARA	36.583.889.000	12.748.937.526	34,85%	65	65	Peraturan	100%	Central mapper
001	PENGEMBANGAN APLIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	4.497.854.000	2.976.562.123	66,18%	3	3	Aplikasi	100%	Kegiatan periode berikutnya
001	PENGAWASAN DAN MONITORING KEGIATAN BUN	21.232.116.000	13.571.403.797	63,92%	1	1	Rekomendasi	100%	kegiatan periode berikutnya
001	PENGEMBANGAN KUALITAS SDM	76.111.179.000	31.784.066.316	41,76%	2.000	2.000	Pegawai	100%	Pengembangan Kapasitas Treasury Management dan Data Analytics
6615	Pengelolaan Dukungan Investasi Pemerintah								
100	Penyaluran Penggantian Biaya dan Margin Investasi Pemerintah (PEN)	14.484.790.000	6.985.849.410	48,23%	48,32	48,32	%	48,23%	Penggantian biaya dan margin telah disalurkan kepada 2 BUMN dan 1 Lembaga
4094	Pengelolaan Pembayaran Kontribusi dan Trust Fund ke Lembaga Internasional								
002	Trust Fund Kepada Organisasi Internasional (OI)	240.165.961.000	238.734.433.000	99,40%	5	5	Organisasi Internasional	100%	Seluruh Komitmen Kontribusi/Trust Fund Telah Dibayar

Bagian Anggaran BUN 999.99
Fungsi : Pelayanan Umum
Subfungsi : Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Keuangan dan Fiskal serta urusan Luar Negeri
per 31 Desember 2024

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4901	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Fasilitas Penyiapan Proyek								
002	Alokasi Dana Dukungan Fasilitas Penyiapan Proyek KPBU (PDF)	242.670.816.000	236.641.713.603	97,52%	22	22	Proyek	100%	
4897	Pengelolaan Transaksi Khusus untuk Dana Dukungan Kelayakan Proyek Kerja Sama								
1	Alokasi Dana Dukungan Kelayakan Proyek KPBU (VGF)	6.879.662.000	6.879.661.760	100,00%	1	1	Proyek	100%	
4939	Pengelolaan Dukungan Loss Limit Atas Penjaminan Program PEN								
1	Alokasi Dana Kompensasi Penugasan Dukungan Loss Limit dalam rangka PEN	1.414.519.000	1.414.519.000	100,00%	100	100	%	100%	

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM RUPIAH

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2023 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2024	Selisih antara Saldo 31 Desember 2024 dengan Rekening Koran	Keterangan
Kas di Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah	3.397.837.721.385	1.412.484.191.184	(1.985.353.530.201)	1.298.254.191.184	114.230.000.000	Kelebihan pemindahbukuan RKUN atas transaksi PMN akhir tahun anggaran ke RPgL <i>in transit</i>
Kas di Rekening Investasi Pemerintah BUN (Imbal Hasil)	807.354.110.895	1.318.079.197.015	510.725.086.120	1.318.079.197.015	-	
Kas di Rekening SAL	121.859.042.325.583	157.278.533.057.481	35.419.490.731.898	157.278.533.057.481	-	
Kas di Rekening Penempatan dalam Rupiah	6.336.895.305.865	-	(6.336.895.305.865)	-	-	pembulatan
Kas di Rekening Antara Reksus	9	-	(9)	-	-	pembulatan
Kas di Rekening Khusus dalam Rupiah	4.698.022.677.388	6.134.714.082.349	1.436.691.404.961	6.134.714.082.350	(1)	pembulatan
Kas di Rekening Penampungan Pendapatan Jasa Giro RPH	2.711.147.196.694	2.874.137.905.125	162.990.708.431	2.874.137.905.125	-	
Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Non Gaji	1.182.832.010.487	2.399.943.739.619	1.217.111.729.132	2.399.943.739.619	-	
Kas di Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN - Gaji	8.602.239.471.956	9.506.048.384.323	903.808.912.367	9.506.048.384.323	-	
Total	149.595.370.820.262	180.923.940.557.096	31.328.569.736.834	180.809.710.557.097	114.229.999.999	

REKENING PEMERINTAH DI BANK INDONESIA DAN BANK UMUM DALAM VALUTA ASING

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2023 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2024	Selisih antara Saldo 31 Desember 2024 dengan Rekening Koran	Keterangan
Kas di Rekening KUN dalam Valuta USD	756.926.477.074	537.263.479.023	(219.662.998.051)	537.263.479.023	0,08	pembulatan
Kas di Rekening Khusus dalam Valuta Asing	1.311.842.424.130	1.303.761.590.408	(8.080.833.722)	1.303.761.590.406	1,58	pembulatan
Kas di Rekening Penempatan dalam Valuta USD	39.874.716.757.070	3.672.424.884.520	(36.202.291.872.550)	3.672.424.884.520	0,03	pembulatan
Kas di Rekening KUN Dalam Valuta Yen	6.099.000.486.364	21.666.604.858	(6.077.333.881.506)	21.666.604.858	0,23	pembulatan
Kas di rekening Penempatan Dalam Valuta Yen	-	5.977.775.835.318	5.977.775.835.318	5.977.775.835.318	0,01	pembulatan
Kas di Rekening KUN dalam Valuta Euro	15.262.144.761	23.223.159.124	7.961.014.363	23.223.159.124	0,40	pembulatan
Kas di Rekening Penempatan Dalam Valuta Euro	15.255.402.886.248	21.602.777.733.225	6.347.374.846.977	21.602.777.733.225	(0,39)	pembulatan
Kas di Rekening SAL dalam Valuta USD	129.927.177.044.667	135.969.518.719.521	6.042.341.674.854	135.969.518.719.521	-	
Total	193.240.328.220.314	169.108.412.005.997	(24.131.916.214.317)	169.108.412.005.995	1,94	

REKENING PEMERINTAH LAINNYA

Nama Rekening	Saldo 31 Desember 2023 (Rupiah)	Saldo 31 Desember 2024 (Rupiah)	Kenaikan (Penurunan)	Saldo Rekening Koran 31 Desember 2024	Selisih antara Saldo 31 Desember 2024 dengan Rekening Koran	Keterangan
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Investasi	(9)	-	9	-	-	Pembulatan
Kas di Rekening Penerimaan - Dana Pembangunan Daerah	27	-	(27)	-	-	Pembulatan
Kas di Rekening Penerimaan Migas - RPL	1.466.441.303.733	7.622.914.791.421	6.156.473.487.688	7.622.914.791.420	1	Pembulatan
Kas di Rekening Penerimaan Panas Bumi pada Kuasa BUN Pusat	1.912.870.273.103	2.082.717.172.958	169.846.899.855	2.082.717.172.953	5	Pembulatan
Kas di Rekening Dana Bergulir	40.878.954	-	(40.878.954)	-	-	Pembulatan
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Non Gaji	127.419.028.658	229.354.385.423	101.935.356.765	229.354.385.410	13	Pembulatan
Kas di Rekening Retur Kuasa BUN Pusat SPAN-Gaji	-	2.690.900	2.690.900	2.690.900	-	
Kas di Rekening Retur Surat Berharga Syariah Negara	975.196.065	1.273.544.373	298.348.308	1.273.544.373	-	
Total	3.507.746.680.531	9.936.262.585.075	6.428.515.904.544	9.936.262.585.056	19	

RINCIAN KAS DI KPPN

Kode KPPN	Nama KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
901	Penerimaan Negara	5.128.787.424.755	(4.431.408.062.137)	697.379.362.618
Jumlah		5.128.787.424.755	(4.431.408.062.137)	697.379.362.618

RINCIAN KAS DI KPPN

No.	Segmen Bank	Nama Bank	Saldo Kas SPAN (Rupiah)
1	I0054	BANK INDONESIA	-
2	M9002	PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	80.790.550.067
3	M9003	PT POS INDONESIA (PERSERO)	1.011.426.643
4	M9004	PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	164.504.684.406
5	M9005	PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK	57.816.466.081
6	M9008	CITIBANK N.A. INDONESIA	-
7	M9009	PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN TBK	5.160.299.009
8	M9010	PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG	18.455.202.296
9	M9011	THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. CABANG JAKARTA	-
10	M9012	PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK	40.693.981
11	M9013	PT BANK CENTRAL ASIA TBK	24.631.475.927
12	M9019	PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR	1.916.167.305
13	M9020	PT BPD SUMATERA BARAT	21.670.691.772
14	M9021	PT BPD SULAWESI UTARA GORONTALO	11.330.978.562
15	M9022	PT BPD SUMATERA UTARA	38.573.593.792
16	M9023	PT BANK PAN INDONESIA TBK	-
17	M9025	PT BPD JAWA TIMUR TBK	3.293.674.712
18	M9027	PT BANK DBS INDONESIA	-
19	M9028	DEUTSCHE BANK AG JAKARTA	-
20	M9030	PT BANK PERMATA TBK	8.911.353.122
21	M9031	PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	761.538.060
22	M9032	PT BPD BALI	206.957.860
23	M9033	PT BANK MIZUHO INDONESIA	-
24	M9036	PT BANK UOB INDONESIA	237.892.045
25	M9038	PT BPD KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA	23.546.424.696
26	M9040	PT BANK HSBC INDONESIA (d/h: BANK EKONOMI RAHARJA)	128.420.832
27	M9041	PT BANK DANAMON INDONESIA TBK	18.912.557
28	M9042	PT BPD BENGKULU	2.039.508.578
29	M9044	PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK	1.954.799
30	M9046	PT BANK ANZ INDONESIA	-
31	M9047	PT BANK DKI	4.358.145.173
32	M9048	PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT	25.487.405.312
33	M9049	STANDARD CHARTERED BANK	-
34	M9050	PT BPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	14.692.061
35	M9051	BANK OF AMERICA N.A. JAKARTA	-
36	M9052	PT BANK KEB HANA INDONESIA	450.000
37	M9061	PT BPD SULAWESI TENGAH	5.884.706.525
38	M9062	PT BANK SINARMAS TBK	114.062.468
39	M9063	PT BPD KALIMANTAN TENGAH	3.452.267.593
40	M9065	JP MORGAN CHASE BANK N.A.	-
41	M9066	PT BANK OCBC NISP TBK	5.499.788.476
42	M9067	PT BANK ICBC INDONESIA	-
43	M9068	PT BPD MALUKU DAN MALUKU UTARA	9.543.622.232
44	M9069	PT BPD KALIMANTAN BARAT	6.384.282.872

RINCIAN KAS DI KPPN

No.	Segmen Bank	Nama Bank	Saldo Kas SPAN (Rupiah)
45	M9072	PT BPD PAPUA	33.424.351.015
46	M9073	PT BANK MASPION INDONESIA	-
47	M9074	PT BANK COMMONWEALTH	-
48	M9075	PT BANK MNC INTERNATIONAL Tbk	-
49	M9076	PT BPD SULAWESI TENGGARA	12.085.623.742
50	M9077	PT BANK RESONA PERDANIA	-
51	M9078	PT BANK BUMI ARTA TBK	-
52	M9079	PT BANK QNB INDONESIA TBK	-
53	M9080	PT BANK CIMB NIAGA	1.680.975.486
54	M9081	PT BPD JAMBI	2.460.884.749
55	M9082	PT BANK CTBC INDONESIA	-
56	M9083	PT BANK BUKOPIN TBK	-
57	M9085	PT BANK MEGA TBK	-
58	M9086	PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK	706.937.251
59	M9088	PT BANK MESTIKA DHARMA TBK	-
60	M9089	PT BANK GANESHA TBK	-
61	M9090	PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 TBK	-
62	M9091	PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL TBK	-
63	M9094	PT BANK SHINHAN INDONESIA (d/h: PT BANK METRO EXPRESS)	6.500.000
64	M9095	PT BANK ACEH SYARIAH	12.868.047.349
65	M9096	PT BANK MEGA SYARIAH	5.014.827
66	M9097	PT BANK SYARIAH BUKOPIN INDONESIA	-
67	M9098	PT BPD LAMPUNG	5.954.690.642
68	M9099	PT BPD BANTEN TBK	22.782.865.614
69	M9101	PT BANK JTRUST INDONESIA TBK	-
70	M9102	PT BANK INDEX SELINDO	-
71	M9103	PT BANK HIBANK INDONESIA	-
72	M9104	PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	187.379.216
73	M9105	PT BANK JASA JAKARTA	-
74	M9106	PT Bank NTB SYARIAH	5.864.353.720
75	M9108	PT BPD JAWA TENGAH	11.451.641.103
76	M9109	PT BANK MANDIRI TASPEN	-
77	M9110	PT BANK MULTIARTA SENTOSA	-
78	M9111	PT TOKOPEDIA	2.861.750.012
79	M9112	PT FINNET INDONESIA	70.877.688
80	M9113	PT BUKALAPAK.COM	15.919.686
81	M9114	PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA	-
82	M9115	PT MITRA PAJAKKU	828.200
83	M9116	PT BANK NATIONALNOBU TBK	-
84	M9117	PT ACHILLES ADVANCED SYSTEMS	2.317.834
85	M9118	PT INDOMARCO PRISMATAMA	-
86	M9119	PT ESPAY DEBIT INDONESIA KOE	125.684.953
87	M9120	PT BIMASAKTI MULTI SINERGI	(57.440.253)
88	M9121	PT NEBULA SURYA CORPORA	-

RINCIAN KAS DI KPPN

No.	Segmen Bank	Nama Bank	Saldo Kas SPAN (Rupiah)
89	M9122	PT BPD KALIMANTAN SELATAN	10.752.161.513
90	M9123	PT BANK SYARIAH INDONESIA	10.496.580.855
91	M9124	PT. BANK CCB INDONESIA TBK	950.326.261
92	M9126	PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL	-
93	M9127	PT BPD RIAU KEPRI SYARIAH	16.225.793.415
94	M9128	PT NUSA SATU INTI ARTHA (DOKU)	-
95	M9129	PT VISIONET INTERNASIONAL(OVO)	5.687.492
96	M9130	PT SHOPEE INTERNATIONAL INDONESIA	247.803.226
97	M9131	BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL	-
98	M9133	BANK PANIN DUBAI SYARIAH	-
100	I0205	BANK INDONESIA (USD)	7
101	M9034	BANK MANDIRI (USD)	15.024.601.888
102	M9035	BANK RAKYAT INDONESIA (USD)	1.404.545.732
103	M9006	BANK NEGARA INDONESIA (USD)	3.984.369.581
SALDO AKHIR			697.379.362.618

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	TA 2024		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	170.642.163	(141.520.163)	29.122.000
003	MEULABOH	1.000.000	(1.000.000)	-
004	MEDAN I	-	2.331.000	2.331.000
005	PEMATANG SIANTAR	141.280.000	(141.280.000)	-
006	PADANG SIDEMPUAN	-	1.000.000	1.000.000
007	GUNUNG SITOLI	24.000.000	(24.000.000)	-
008	PEKANBARU	25.464.933	(464.933)	25.000.000
010	PADANG	83.850.183	(76.465.183)	7.385.000
011	BUKITTINGGI	12.880.000	(12.880.000)	-
012	JAMBI	48.548.000	96.805.597	145.353.597
014	PALEMBANG	656.462.268	(515.025.268)	141.437.000
017	BANDAR LAMPUNG	7.367.000	(7.367.000)	-
018	JAKARTA I	146.983.408.481	(8.490.872.617)	138.492.535.864
019	JAKARTA II	1.421.246.728	(323.913.213)	1.097.333.515
020	SERANG	171.491.708	(159.119.708)	12.372.000
022	BANDUNG I	845.823.281	(843.333.781)	2.489.500
023	BOGOR	98.000.000	(98.000.000)	-
024	CIREBON	600.000	(600.000)	-
025	TASIKMALAYA	19.386.000	(19.386.000)	-
031	SURABAYA I	34.751.084	92.248.916	127.000.000
032	MALANG	-	47.485.638	47.485.638
037	DENPASAR	205.600.000	121.509.319	327.109.319
039	KUPANG	740.451.064	141.828.574	882.279.638
042	PONTIANAK	238.853.909	(219.291.909)	19.562.000
043	PALANGKARAYA	56.793.001	2.574.000	59.367.001
045	BANJARMASIN	98.509.135	(98.509.135)	-
046	SAMARINDA	419.063.697	(410.731.265)	8.332.432
047	BALIKPAPAN	88.110.898	(85.970.898)	2.140.000
049	MANADO	79.333.351	119.213.333	198.546.684
050	GORONTALO	106.224.464	(83.261.464)	22.963.000
051	PALU	127.175.000	139.829.117	267.004.117
052	POSO	9.000.000	(9.000.000)	-
057	PARE PARE	2.463.054	(2.463.054)	-
060	KENDARI	41.290.400	17.160.600	58.451.000
061	AMBON	2.061.862.000	(1.478.412.834)	583.449.166
062	TERNATE	38.552.000	445.387.500	483.939.500
063	JAYAPURA	1.836.897.490	(1.733.170.321)	103.727.169
065	MANOKWARI	3.691.112.898	(2.997.302.367)	693.810.531
066	SORONG	-	258.962.660	258.962.660
067	FAK FAK	18.000.000	28.892.000	46.892.000
068	MERAUKE	1.670.559.593	(1.654.258.970)	16.300.623
076	TANJUNG BALAI ASAHAN	4.900.000	(4.900.000)	-
078	MUARA BUNGO	14.471.000	(14.471.000)	-
079	SINTANG	21.530.900	(21.530.900)	-
081	KOTABARU	3.874.900	(3.874.900)	-
082	TOLI TOLI	2.675.000	(2.675.000)	-
083	TAHUNA	15.000.000	(15.000.000)	-
084	TUAL	15.121.000	(15.121.000)	-
085	NABIRE	-	14.994.163	14.994.163
088	JAKARTA III	6.428.377.272	2.640.063.342	9.068.440.614
095	BANDUNG II	42.117.370	(42.117.370)	-
097	PATI	763.322.450	(763.322.450)	-

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	TA 2024		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
100	BANYUWANGI	16.497	(16.497)	-
107	TANJUNG PANDAN	43.592.200	(43.592.200)	-
111	RUTENG	-	12.207.000	12.207.000
112	TOBELO	16.200.000	(16.200.000)	-
113	WAMENA	793.940.218	14.136.905.437	14.930.845.655
121	MANNA	-	4.153.000	4.153.000
123	MEDAN II	40.022.000	(31.122.451)	8.899.549
124	TEBING TINGGI	1.152.000	(1.152.000)	-
127	TANGERANG	-	190.087.154	190.087.154
133	JAKARTA IV	2.499.117.885	5.584.135.994	8.083.253.879
135	SURABAYA II	2.363.000	2.532.037.824	2.534.400.824
136	MAKASSAR II	-	23.078.000	23.078.000
138	SERUI	4.712.500	(4.712.500)	-
139	JAKARTA V	5.331.295.551	(1.130.337.083)	4.200.958.468
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	2.786.620	(2.786.620)	-
143	KUALA TUNGKAL	-	13.477.000	13.477.000
146	CURUP	228.512	(228.512)	-
148	KLATEN	8.515.000	(8.515.000)	-
153	TANJUNG REDEP	70.477.363	(70.477.363)	-
157	RAHA	2.333.468	(2.333.468)	-
159	BANGKO	5.000.000	(5.000.000)	-
160	SEKAYU	-	9.287.720	9.287.720
161	RANGKASBITUNG	9.725.000	(9.725.000)	-
165	SIDOARJO	-	10.000.000	10.000.000
170	MAKALE	5.056.000	(5.056.000)	-
173	MASOHI	1.735.118.107	(1.735.118.107)	-
175	JAKARTA VI	14.018.554.824	31.579.497.199	45.598.052.023
178	MAMUJU	1.102.683.368	(1.102.683.368)	-
179	BITUNG	30.770.000	(30.770.000)	-
182	JAKARTA VII	2.327.819.487	(1.157.481.422)	1.170.338.065
185	TANJUNG SELOR	71.935.519	(71.935.519)	-
JUMLAH		197.710.858.794	32.325.296.274	230.036.155.068

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Nama BA	Tahun 2024		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
MAHKAMAH AGUNG	34.246.000	(32.086.000)	2.160.000
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	809.689.245	(149.058.741)	660.630.504
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	27.282.699.334	(21.450.041.178)	5.832.658.156
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	56.709.120	55.890.183	112.599.303
KEMENTERIAN LUAR NEGERI	118.552.365.738	13.926.798.536	132.479.164.274
KEMENTERIAN PERTAHANAN	203.204.090	(83.947.080)	119.257.010
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.512.182.871	(774.055.955)	3.738.126.916
KEMENTERIAN KEUANGAN	1.328.016.161	330.401.032	1.658.417.193
KEMENTERIAN PERTANIAN	324.945.830	(274.945.830)	50.000.000
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	14.059.477	604.400.725	618.460.202
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	791.843.042	(791.843.042)	-
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	611.935.296	1.085.621.896	1.697.557.192
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	5.872.433.714	3.188.747.463	9.061.181.177
KEMENTERIAN KESEHATAN	30.770.000	3.512.589.616	3.543.359.616
KEMENTERIAN AGAMA	1.957.122.295	4.699.677.775	6.656.800.070
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	1.690.830.173	(1.427.455.189)	263.374.984
KEMENTERIAN SOSIAL	326.698.189	(308.550.699)	18.147.490
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	114.179.247	780.461.655	894.640.902
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	206.500	215.376.779	215.583.279
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	63.587.201	301.216.943	364.804.144
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	425.456.798	(249.387.124)	176.069.674
KEMENTERIAN PARIWISATA	1.812.991.510	(1.422.758.594)	390.232.916
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	25.000	(25.000)	-
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	222.559.093	(222.559.093)	-
BADAN PUSAT STATISTIK	-	6.230.000	6.230.000
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	84.294.315	(84.294.315)	-
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	48.563.090	(48.563.090)	-
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	14.950.000	(14.950.000)	-
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	900.944.283	(436.925.659)	464.018.624
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	-	495.957	495.957

RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Nama BA	Tahun 2024		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	678.341.646	(573.865.956)	104.475.690
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	83.656.568	(83.656.568)	-
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	18.000.000	(18.000.000)	-
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA / BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	240.250	(240.250)	-
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	24.120.000	95.975.000	120.095.000
KOMISI PEMILIHAN UMUM	5.343.810.336	(5.236.927.701)	106.882.635
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	74.859.775	74.859.775
KEMENTERIAN PERDAGANGAN	4.574.131.600	(2.991.034.590)	1.583.097.010
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	500.000.000	-	500.000.000
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	-	41.477.233.276	41.477.233.276
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA / BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	439.981.345	(439.981.345)	-
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	449.000	(449.000)	-
SEKRETARIAT KABINET	800.803.521	(800.803.521)	-
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	17.135.840.164	(372.542.403)	16.763.297.761
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI	-	282.244.338	282.244.338
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	23.976.752	(23.976.752)	-
Jumlah	197.710.858.794	32.325.296.274	230.036.155.068

RINCIAN KAS HIBAH PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	TA 2024		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	142.672.495.274	(63.931.055.865)	78.741.439.409
002	LANGSA	32.430.641.258	(26.793.339.735)	5.637.301.523
003	MEULABOH	38.964.024.760	(22.183.465.474)	16.780.559.286
004	MEDAN I	180.904.269.700	(29.970.234.938)	150.934.034.762
005	PEMATANG SIANTAR	34.181.480.000	(8.918.520.213)	25.262.959.787
006	PADANG SIDEMPUAN	57.408.187.920	(8.531.599.494)	48.876.588.426
007	GUNUNG SITOLI	4.050.000.000	32.477.433.015	36.527.433.015
008	PEKANBARU	170.783.117.767	(9.985.765.938)	160.797.351.829
009	TANJUNG PINANG	124.948.016.400	(12.020.090.505)	112.927.925.895
010	PADANG	147.469.802.235	(38.262.998.847)	109.206.803.388
011	BUKITTINGGI	34.633.766.400	(13.914.285.608)	20.719.480.792
012	JAMBI	148.098.666.960	(40.654.023.063)	107.444.643.897
013	SUNGAI PENUH	15.800.000.000	(11.792.351.527)	4.007.648.473
014	PALEMBANG	320.987.183.908	(18.118.319.867)	302.868.864.041
015	PANGKAL PINANG	110.599.248.173	(20.944.466.393)	89.654.781.780
016	BENGKULU	57.613.059.000	(3.341.346.761)	54.271.712.239
017	BANDAR LAMPUNG	154.905.427.780	53.061.339.440	207.966.767.220
019	JAKARTA II	-	174.204.200	174.204.200
020	SERANG	356.690.706.400	(92.835.896.027)	263.854.810.373
021	PURWAKARTA	16.921.615.900	(6.248.507.500)	10.673.108.400
022	BANDUNG I	521.958.371.313	(247.403.501.084)	274.554.870.229
023	BOGOR	78.008.266.484	(21.851.387.120)	56.156.879.364
024	CIREBON	60.097.832.640	(29.160.300.215)	30.937.532.425
025	TASIKMALAYA	41.178.047.790	207.115.883	41.385.163.673
026	SEMARANG I	213.550.462.000	(81.961.512.228)	131.588.949.772
027	PURWOREJO	32.927.700.000	(27.014.296.012)	5.913.403.988
028	SURAKARTA	37.383.668.000	(24.904.226.487)	12.479.441.513
029	PURWOKERTO	35.439.292.400	(23.114.067.556)	12.325.224.844
030	YOGYAKARTA	99.045.951.950	(60.747.779.334)	38.298.172.616
031	SURABAYA I	880.081.862.911	(510.628.008.998)	369.453.853.913
032	MALANG	112.050.525.585	(52.344.464.375)	59.706.061.210
033	MADIUN	85.639.959.000	(36.206.281.255)	49.433.677.745
034	KEDIRI	92.568.166.824	(33.053.949.964)	59.514.216.860
035	BONDOWOSO	60.622.870.000	(22.130.840.430)	38.492.029.570
036	PAMEKASAN	89.599.997.000	(43.806.875.642)	45.793.121.358
037	DENPASAR	197.644.771.200	(15.969.473.326)	181.675.297.874
038	MATARAM	118.433.273.499	(57.563.077.661)	60.870.195.838
039	KUPANG	190.016.190.400	92.343.731.910	282.359.922.310
040	ENDE	1.500.000.000	13.495.408.971	14.995.408.971
041	WAINGAPU	20.872.187.060	(7.367.092.857)	13.505.094.203
042	PONTIANAK	213.428.991.560	(20.844.428.382)	192.584.563.178
043	PALANGKARAYA	122.085.138.439	(40.203.725.161)	81.881.413.278
044	SAMPIT	43.076.174.580	(34.741.873.982)	8.334.300.598
045	BANJARMASIN	221.646.479.216	(94.859.476.286)	126.787.002.930
046	SAMARINDA	367.339.556.445	(66.087.399.662)	301.252.156.783
047	BALIKPAPAN	138.451.029.911	(41.636.551.450)	96.814.478.461
048	TARAKAN	12.620.798.700	(4.848.597.618)	7.772.201.082
049	MANADO	25.856.583.200	36.037.830.248	61.894.413.448
050	GORONTALO	89.709.706.333	(46.514.200.611)	43.195.505.722
051	PALU	82.405.280.900	36.775.246.688	119.180.527.588
052	POSO	53.566.577.971	(30.209.270.091)	23.357.307.880
053	LUWUK	26.000.000.000	3.062.923.582	29.062.923.582

RINCIAN KAS HIBAH PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	TA 2024		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
054	MAKASSAR I	311.172.099.131	(10.142.633.976)	301.029.465.155
055	WATAMPONE	50.576.110.800	(31.440.815.687)	19.135.295.113
056	BANTAENG	29.228.400.000	(16.607.288.533)	12.621.111.467
057	PARE PARE	46.962.769.920	(20.877.152.320)	26.085.617.600
058	PALOPO	12.197.224.020	4.695.625.217	16.892.849.237
059	MAJENE	-	20.049.723.218	20.049.723.218
060	KENDARI	299.833.252.002	(100.741.654.788)	199.091.597.214
061	AMBON	67.760.542.560	62.806.016.467	130.566.559.027
062	TERNATE	29.132.377.157	65.369.724.316	94.502.101.473
063	JAYAPURA	93.663.384.889	112.680.253.751	206.343.638.640
064	BIAK	7.910.578.300	6.087.203.921	13.997.782.221
065	MANOKWARI	157.022.556.846	88.826.352.634	245.848.909.480
066	SORONG	17.599.970.000	13.391.903.346	30.991.873.346
067	FAK FAK	35.098.006.800	(18.496.208.948)	16.601.797.852
068	MERAUKE	49.066.376.000	(7.820.536.603)	41.245.839.397
070	LUBUK LINGGAU	42.247.000.000	(21.555.101.265)	20.691.898.735
071	BIMA	17.924.525.000	(9.152.498.625)	8.772.026.375
072	PEKALONGAN	23.550.000.000	(10.684.175.816)	12.865.824.184
073	BOJONEGORO	32.354.911.769	7.875.893.244	40.230.805.013
074	TAPAKTUAN	22.687.419.336	(9.307.500.053)	13.379.919.283
075	RANTAU PRAPAT	24.944.687.200	(91.524.493)	24.853.162.707
076	TANJUNG BALAI ASAHAN	20.000.000.000	1.197.124.927	21.197.124.927
077	SIJUNJUNG	20.496.492.400	(9.467.782.056)	11.028.710.344
078	MUARA BUNGO	22.204.543.600	(14.219.830.795)	7.984.712.805
079	SINTANG	31.239.493.103	(23.738.308.222)	7.501.184.881
080	BUNTOK	42.179.020.220	(25.830.122.286)	16.348.897.934
081	KOTABARU	27.459.349.600	(6.182.469.580)	21.276.880.020
082	TOLI TOLI	-	5.761.238.441	5.761.238.441
083	TAHUNA	1.000.000.000	2.613.644.294	3.613.644.294
084	TUAL	-	7.556.717.822	7.556.717.822
085	NABIRE	60.746.830.000	(25.560.564.434)	35.186.265.566
086	KARAWANG	35.436.722.188	(27.623.184.649)	7.813.537.539
087	SUMEDANG	600.000.000	2.055.855.815	2.655.855.815
089	LHOKSEUMAWE	42.800.000.000	(24.473.737.149)	18.326.262.851
090	SOLOK	20.976.759.888	(13.206.696.075)	7.770.063.813
091	LUBUK SIKAPING	19.977.770.280	(10.539.217.495)	9.438.552.785
092	RENGAT	31.577.278.257	(2.632.858.022)	28.944.420.235
093	SINGKAWANG	21.428.092.000	1.579.724.170	23.007.816.170
094	KETAPANG	37.560.528.030	(15.361.350.476)	22.199.177.554
095	BANDUNG II	222.680.299.018	(78.273.728.643)	144.406.570.375
096	GARUT	1.500.000.000	7.654.325.976	9.154.325.976
097	PATI	27.400.000.000	(21.061.653.760)	6.338.346.240
098	MOJOKERTO	59.870.712.060	(21.354.642.851)	38.516.069.209
099	PACITAN	14.800.000.000	(6.872.865.131)	7.927.134.869
100	BANYUWANGI	36.078.316.700	(5.780.553.190)	30.297.763.510
101	SUMBAWA BESAR	4.596.420.000	3.678.913.103	8.275.333.103
102	PANGKALAN BUN	26.288.576.800	(15.541.668.362)	10.746.908.438
103	BAU BAU	56.789.248.000	(15.154.500.724)	41.634.747.276
104	SAUMLAKI	-	8.607.616.584	8.607.616.584
105	KUTACANE	10.517.280.000	1.305.320.140	11.822.600.140
106	SIBOLGA	8.562.708.000	2.307.623.744	10.870.331.744
107	TANJUNG PANDAN	19.796.427.200	(8.447.600.375)	11.348.826.825

RINCIAN KAS HIBAH PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	TA 2024		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
109	BATURAJA	52.544.738.400	(36.958.955.469)	15.585.782.931
110	BARABAI	38.401.672.560	(8.226.276.144)	30.175.396.416
111	RUTENG	11.578.605.200	16.324.455.801	27.903.061.001
112	TOBELO	1.700.000.000	10.537.305.607	12.237.305.607
113	WAMENA	45.883.520.680	16.409.760.671	62.293.281.351
115	MAGELANG	40.644.774.000	(23.574.006.554)	17.070.767.446
116	KOTABUMI	59.576.044.970	(27.783.579.543)	31.792.465.427
117	PUTUSSIBAU	21.715.256.000	(7.925.157.689)	13.790.098.311
118	TEGAL	51.932.687.000	(22.950.229.760)	28.982.457.240
119	SIDIKALANG	34.207.069.460	(10.530.857.698)	23.676.211.762
120	DUMAI	55.134.681.940	(4.044.893.850)	51.089.788.090
121	MANNA	19.600.400.000	(6.792.287.270)	12.808.112.730
122	TAKENGON	16.052.914.232	(15.040.406.803)	1.012.507.429
123	MEDAN II	315.142.643.067	68.690.620.086	383.833.263.153
124	TEBING TINGGI	45.987.748.162	8.928.321.422	54.916.069.584
125	BALIGE	22.227.951.600	7.595.934.657	29.823.886.257
126	METRO LAMPUNG	30.843.169.412	(1.934.099.318)	28.909.070.094
127	TANGERANG	81.727.466.900	(53.205.031.302)	28.522.435.598
128	SUKABUMI	54.036.341.600	(7.747.158.900)	46.289.182.700
129	KUDUS	51.040.967.000	(20.289.667.132)	30.751.299.868
130	CILACAP	13.160.000.000	(3.909.377.280)	9.250.622.720
131	JEMBER	62.182.317.347	(23.909.131.223)	38.273.186.124
132	SINGARAJA	28.020.535.080	(4.638.884.590)	23.381.650.490
133	JAKARTA IV	390.390.923.420	75.864.286.509	466.255.209.929
134	SEMARANG II	397.248.102.400	(158.962.874.067)	238.285.228.333
135	SURABAYA II	-	9.734.576.650	9.734.576.650
136	MAKASSAR II	-	9.628.333.000	9.628.333.000
137	BATAM	15.660.320.000	(3.385.844.639)	12.274.475.361
138	SERUI	-	5.537.115.834	5.537.115.834
139	JAKARTA V	218.738.887.404	(218.738.887.404)	-
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	1.458.464.405.271	(471.199.151.099)	987.265.254.172
141	TIMIKA	67.345.390.600	(43.806.276.634)	23.539.113.966
142	PAINAN	500.000.000	4.260.949.982	4.760.949.982
143	KUALA TUNGKAL	37.057.806.277	(24.627.561.425)	12.430.244.852
144	LAHAT	71.016.795.468	(33.361.460.247)	37.655.335.221
145	LIWA	8.961.042.771	(2.344.896.529)	6.616.146.242
146	CURUP	14.412.084.446	(2.624.416.938)	11.787.667.508
147	KUNINGAN	28.600.000.000	(17.832.388.772)	10.767.611.228
148	KLATEN	30.800.000.000	(18.036.943.809)	12.763.056.191
149	WONOSARI	15.214.177.000	(10.393.304.073)	4.820.872.927
150	BLITAR	41.298.062.800	(4.482.139.055)	36.815.923.745
151	TANJUNG	37.078.339.960	(9.374.894.166)	27.703.445.794
152	NUNUKAN	13.600.000.000	(8.659.204.201)	4.940.795.799
153	TANJUNG REDEP	15.166.352.340	(5.164.562.643)	10.001.789.697
154	AMLAPURA	35.095.097.000	(497.969.416)	34.597.127.584
155	BENTENG	6.400.000.000	275.021.334	6.675.021.334
156	KOLAKA	46.634.944.018	(16.936.571.441)	29.698.372.577
157	RAHA	34.894.935.600	(12.516.996.740)	22.377.938.860
158	KOTAMOBAGU	10.703.814.000	5.587.440.754	16.291.254.754
159	BANGKO	24.535.600.000	(10.038.351.431)	14.497.248.569
160	SEKAYU	61.807.950.641	(16.874.329.602)	44.933.621.039
161	RANGKASBITUNG	39.259.276.000	(27.276.254.156)	11.983.021.844

RINCIAN KAS HIBAH PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	TA 2024		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
162	SRAGEN	29.600.000.000	(16.725.899.277)	12.874.100.723
163	PURWODADI	34.298.082.800	(15.605.762.036)	18.692.320.764
164	BANJARNEGARA	27.346.497.200	(14.507.411.994)	12.839.085.206
165	SIDOARJO	43.200.000.000	(21.214.973.407)	21.985.026.593
166	TUBAN	29.717.779.200	(17.170.616.079)	12.547.163.121
167	SANGGAU	35.003.928.508	(10.203.952.010)	24.799.976.498
168	PELAIHARI	31.611.062.000	(18.881.714.513)	12.729.347.487
169	SELONG	-	603.490.056	603.490.056
170	MAKALE	20.993.762.800	(12.965.566.505)	8.028.196.295
171	BEKASI	83.296.000.000	(11.694.219.995)	71.601.780.005
172	ATAMBUA	15.490.504.959	(3.629.148.477)	11.861.356.482
173	MASOHI	7.637.487.000	5.925.844.618	13.563.331.618
174	LARANTUKA	22.284.839.980	(8.754.006.353)	13.530.833.627
175	JAKARTA VI	91.442.828.753	(17.086.375.268)	74.356.453.485
176	WATES	12.960.000.000	(3.853.518.645)	9.106.481.355
177	SINJAI	-	6.230.270.239	6.230.270.239
178	MAMUJU	16.000.000.000	13.011.024.410	29.011.024.410
179	BITUNG	5.000.000.000	10.761.748.026	15.761.748.026
180	MARISA	16.002.634.780	(8.027.765.607)	7.974.869.173
181	MUKOMUKO	10.200.000.000	(6.942.250.403)	3.257.749.597
182	JAKARTA VII	276.357.192.061	(56.537.188.285)	219.820.003.776
185	TANJUNG SELOR	99.522.323.320	(37.827.980.004)	61.694.343.316
Jumlah		13.992.553.217.607	(3.440.440.444.071)	10.552.112.773.536

RINCIAN KAS HIBAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Nama BA	Tahun 2024		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
BADAN NARKOTIKA NASIONAL	6.353.800	43.646.200	50.000.000
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	78.147.892.439	(6.746.894.352)	71.400.998.087
BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	2.526.531.180.649	(453.417.960.259)	2.073.113.220.390
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5.934.532.493	2.302.634.835	8.237.167.328
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	200.000.000.000	(149.551.459.588)	50.448.540.412
KEMENTERIAN AGAMA	7.039.600.000	(7.039.600.000)	-
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN	20.301.389.077	(14.789.119.631)	5.512.269.446
KEMENTERIAN DALAM NEGERI	231.332.699.525	(169.102.497.549)	62.230.201.976
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	570.000	(570.000)	-
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	8.802.735.562	(7.707.511.610)	1.095.223.952
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	481.490.774.994	(244.337.855.975)	237.152.919.019
KEMENTERIAN KESEHATAN	637.170.421.437	(64.081.961.021)	573.088.460.416
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	50.629.000	(45.496.000)	5.133.000
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	12.674.155.185	732.897.714	13.407.052.899
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	9.015.464.482	(3.192.944.332)	5.822.520.150
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5.948.258.696	(1.943.044.062)	4.005.214.634
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2.779.090.402	984.538.861	3.763.629.263
KEMENTERIAN PERTAHANAN	6.168.434.000	4.656.451.000	10.824.885.000

RINCIAN KAS HIBAH PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Nama BA	Tahun 2024		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
KEMENTERIAN PERTANIAN	2.197.485.245	5.384.901.644	7.582.386.889
KEMENTERIAN SOSIAL	276.357.192.061	(56.537.188.285)	219.820.003.776
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	72.292.618.181	185.737.085.720	258.029.703.901
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.174.795.065	24.702.112	2.199.497.177
KOMISI PEMILIHAN UMUM	9.405.390.620.027	(2.461.066.874.206)	6.944.323.745.821
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	746.325.287	(746.325.287)	-
Jumlah	13.992.553.217.607	(3.440.440.444.071)	10.552.112.773.536

RINCIAN KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	TA 2024		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	115.159.990.118	21.280.913.130	136.440.903.248
004	MEDAN I	528.484.043.381	(6.745.311.897)	521.738.731.484
006	PADANG SIDEMPUAN	889.623.386	1.461.604.179	2.351.227.565
008	PEKANBARU	134.356.355.165	(2.033.950.905)	132.322.404.260
009	TANJUNG PINANG	7.047.917.654	(215.585.745)	6.832.331.909
010	PADANG	122.966.120.172	(15.824.534.941)	107.141.585.231
011	BUKITTINGGI	151.444.830.402	35.335.196.058	186.780.026.460
012	JAMBI	166.792.966.738	(4.171.635.131)	162.621.331.607
014	PALEMBANG	654.395.704.589	37.212.296.337	691.608.000.926
015	PANGKAL PINANG	-	9.296.837.957	9.296.837.957
016	BENGKULU	148.562.280.982	(42.692.187.802)	105.870.093.180
017	BANDAR LAMPUNG	292.257.175.816	(18.239.435.336)	274.017.740.480
018	JAKARTA I	7.389.289.885.057	406.595.278.315	7.795.885.163.372
019	JAKARTA II	65.523.366.529.287	3.535.341.634.114	69.058.708.163.401
020	SERANG	225.799.770.814	26.578.292.754	252.378.063.568
022	BANDUNG I	963.892.078.615	9.281.740.149	973.173.818.764
023	BOGOR	141.403.091.149	(10.112.579.779)	131.290.511.370
024	CIREBON	67.093.919.877	7.309.717.616	74.403.637.493
025	TASIKMALAYA	42.803.621.402	24.645.248.741	67.448.870.143
026	SEMARANG I	129.907.500.064	5.886.793.842	135.794.293.906
028	SURAKARTA	518.437.357.784	93.966.336.031	612.403.693.815
029	PURWOKERTO	98.732.491.916	(540.628.848)	98.191.863.068
030	YOGYAKARTA	972.953.918.812	221.488.773.315	1.194.442.692.127
031	SURABAYA I	153.625.684.174	50.553.202.065	204.178.886.239
032	MALANG	503.218.090.225	(97.272.528.729)	405.945.561.496
033	MADIUN	5.886.991.731	826.304.847	6.713.296.578
034	KEDIRI	83.772.981.463	(16.495.435.828)	67.277.545.635
035	BONDOWOSO	29.582.589.742	49.399.980.699	78.982.570.441
036	PAMEKASAN	43.117.492.279	26.291.337.071	69.408.829.350
037	DENPASAR	486.488.010.603	(215.607.101.226)	270.880.909.377
038	MATARAM	186.819.692.430	23.909.260.044	210.728.952.474
039	KUPANG	141.727.561.131	(29.653.074.203)	112.074.486.928
042	PONTIANAK	224.327.391.672	(11.589.793.959)	212.737.597.713
043	PALANGKARAYA	44.117.865.783	(9.533.110.468)	34.584.755.315
045	BANJARMASIN	251.496.195.753	10.408.248.016	261.904.443.769
046	SAMARINDA	198.185.920.830	(58.462.021.689)	139.723.899.141
047	BALIKPAPAN	35.252.966.803	(985.851.469)	34.267.115.334
048	TARAKAN	13.174.993.960	7.788.442.338	20.963.436.298
049	MANADO	241.565.861.745	21.549.515	241.587.411.260
050	GORONTALO	14.789.006.307	(531.214.039)	14.257.792.268
051	PALU	169.252.447.378	23.527.394.802	192.779.842.180
054	MAKASSAR I	449.340.065.349	59.984.355.773	509.324.421.122
058	PALOPO	467.282.841	(442.277.153)	25.005.688
060	KENDARI	92.951.252.371	1.595.412.036	94.546.664.407
061	AMBON	25.752.247.363	35.262.245.913	61.014.493.276
062	TERNATE	76.078.328.255	33.480.317.288	109.558.645.543
063	JAYAPURA	95.234.213.029	28.816.867.448	124.051.080.477
065	MANOKWARI	4.038.109.710	986.239.210	5.024.348.920
066	SORONG	26.626.067.762	9.669.764.351	36.295.832.113
068	MERAUKE	-	3.523.722.833	3.523.722.833
072	PEKALONGAN	5.251.910.261	7.227.341.275	12.479.251.536
073	BOJONEGORO	3.228.473.831	4.404.994.563	7.633.468.394

RINCIAN KAS PADA BADAN LAYANAN UMUM PER KPPN

Kode KPPN	KPPN	TA 2024		
		Neraca Lajur		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
086	KARAWANG	297.398.540.239	(18.452.636.237)	278.945.904.002
088	JAKARTA III	1.051.737.547.385	178.903.128.784	1.230.640.676.169
089	LHOKSEUMAWE	31.854.154.633	35.814.453.263	67.668.607.896
095	BANDUNG II	125.780.420.757	(12.165.618.598)	113.614.802.159
096	GARUT	5.654.666.859	(5.111.986.356)	542.680.503
098	MOJOKERTO	5.637.718.773	(1.076.991.367)	4.560.727.406
100	BANYUWANGI	5.488.568.496	1.086.436.171	6.575.004.667
111	RUTENG	59.272.500	133.377.213	192.649.713
115	MAGELANG	155.039.268.435	(1.319.117.561)	153.720.150.874
118	TEGAL	30.507.067.350	5.970.602.024	36.477.669.374
123	MEDAN II	181.414.887.879	5.737.787.001	187.152.674.880
124	TEBING TINGGI	13.474.852.069	(1.616.151.378)	11.858.700.691
127	TANGERANG	81.159.342.860	(15.087.544.148)	66.071.798.712
128	SUKABUMI	3.902.090.288	1.190.070.324	5.092.160.612
129	KUDUS	1.639.456.096	420.585.544	2.060.041.640
131	JEMBER	284.123.405.348	38.136.434.894	322.259.840.242
132	SINGARAJA	25.866.169.913	(5.398.972.464)	20.467.197.449
133	JAKARTA IV	1.056.451.496.965	231.889.045.869	1.288.340.542.834
134	SEMARANG II	788.251.775.229	32.710.724.353	820.962.499.582
135	SURABAYA II	539.063.434.508	(69.023.642.104)	470.039.792.404
136	MAKASSAR II	333.511.951.386	(117.619.088.741)	215.892.862.645
137	BATAM	686.833.006.675	240.410.319.007	927.243.325.682
139	JAKARTA V	-	16.748.700.068	16.748.700.068
141	TIMIKA	7.184.492.306	4.672.322.269	11.856.814.575
148	KLATEN	271.437.093.273	(38.889.179.588)	232.547.913.685
150	BLITAR	244.564.761.961	12.566.353.738	257.131.115.699
153	TANJUNG REDEP	1.239.279.687	3.017.827.285	4.257.106.972
163	PURWODADI	160.728.802.972	(2.280.114.813)	158.448.688.159
165	SIDOARJO	31.361.904.930	(12.448.941.675)	18.912.963.255
171	BEKASI	64.726.948.546	13.058.741.062	77.785.689.608
175	JAKARTA VI	1.423.269.346.156	135.323.313.047	1.558.592.659.203
178	MAMUJU	-	3.948.736.572	3.948.736.572
182	JAKARTA VII	2.482.809.928.286	(353.758.126.899)	2.129.051.801.387
Jumlah		92.393.578.520.721	4.579.700.230.037	96.973.278.750.758

RINCIAN KAS BLU PER KEMENTERIAN/LEMBAGA

Nama BA	Tahun 2024		
	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	-	13.186.465.952	13.186.465.952
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	854.705.264.574	143.867.149.715	998.572.414.289
KEMENTERIAN PERTAHANAN	595.114.867.451	(18.017.055.421)	577.097.812.030
KEMENTERIAN KEUANGAN	65.437.847.737.894	3.495.805.221.533	68.933.652.959.427
KEMENTERIAN PERTANIAN	157.465.102.153	(24.662.705.594)	132.802.396.559
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	146.398.361.360	45.054.920.155	191.453.281.515
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	277.485.737.882	42.901.477.541	320.387.215.423
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	1.279.743.607.765	244.717.602.204	1.524.461.209.969
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	4.341.321.553.993	591.934.134.777	4.933.255.688.770
KEMENTERIAN KESEHATAN	6.618.779.398.351	(345.247.938.271)	6.273.531.460.080
KEMENTERIAN AGAMA	2.456.476.841.908	(14.111.171.273)	2.442.365.670.635
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	141.729.421.970	92.377.774.420	234.107.196.390
KEMENTERIAN PARIWISATA	1.274.407.201	809.180.729	2.083.587.930
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.301.700.029.797	107.089.128.867	1.408.789.158.664
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	6.513.489.713.722	264.780.733.324	6.778.270.447.046
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	1.403.989.019.945	(267.634.767.113)	1.136.354.252.832
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	199.654.656.112	7.925.010.080	207.579.666.192
BADAN PENGUSAHA KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	654.557.041.955	200.677.441.524	855.234.483.479
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	5.945.830.464	4.147.553.112	10.093.383.576
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL	5.899.926.224	(5.899.926.224)	-
Jumlah	92.393.578.520.721	4.579.700.230.037	96.973.278.750.758

UANG MUKA REKENING KHUSUS

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)
1	ADB	189.391.819	5.565.010.548	(5.375.618.729)
2	IFAD	1.338.906.116	237.160.000	1.101.746.116
3	JBIC/OECF	-	-	-
4	BANK DUNIA	46.045.990.247	34.143.459.515	11.902.530.732
5	IDB	44.160.000	342.708.000	(298.548.000)
6	AUSTRALIA	-	-	-
7	UNI EROPA	17.997.299	-	17.997.299
8	KFW	348.423.530	4.191.208.272	(3.842.784.742)
9	SBSN	-	-	-
JUMLAH		47.984.869.011	44.479.546.335	3.505.322.676

RINCIAN PIUTANG DIVIDEN DAN DENDA
PER 31 DESEMBER 2024

Total Piutang	Jumlah	Total Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Total <i>Net Realizable Value</i>
Piutang Jangka Pendek (Lacar pada PT BRI dan Macet pada 5 PT)	10.924.917.871.783	96.848.402.914	10.828.069.468.869
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang (Lacar, kurang lancar, dan macet pada Perum Perumnas)	40.000.000.000	26.650.000.000	13.350.000.000
Piutang Jangka Panjang (Kurang lancar pada Perum Perumnas)	17.225.637.648	1.722.563.765	15.503.073.883
Jumlah	10.982.143.509.431	125.220.966.679	10.856.922.542.752

Lancar

No	Nama BUMN	Tahun Buku	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (5%)	<i>Net Realizable Value</i>	Keterangan
1	Perum Perumnas		7.500.000.000	-	7.500.000.000	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Jatuh Tempo Akhir 2025
2	PT BRI		10.882.481.878.260	54.412.409.391	10.828.069.468.869	Piutang Dividen Interim
Jumlah			10.889.981.878.260	54.412.409.391	10.835.569.468.869	

Kurang Lancar

No	Nama BUMN	Tahun Buku	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (10%)	<i>Net Realizable Value</i>	Keterangan
1	Perum Perumnas	1991-1997	17.225.637.648	1.722.563.765	15.503.073.883	Piutang Jangka Panjang
2	Perum Perumnas	1991-1997	6.500.000.000	650.000.000	5.850.000.000	Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Jatuh Tempo Akhir 2024
Jumlah			23.725.637.648	2.372.563.765	21.353.073.883	

Diragukan

No	Nama BUMN	Tahun Buku	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (50%)	<i>Net Realizable Value</i>	Keterangan
					-	
Jumlah			-	-	-	

Macet						
No	Nama BUMN	Tahun Buku	Jumlah	Penyisihan Piutang tak Tertagih (100%)	Net Realizable Value	Keterangan
1	PT Balai Pustaka	2004	196.749.800	196.749.800	-	Telah diserahkan ke PUPNC Telah diserahkan ke PUPNC Akan ditempuh proses PPNT0 (Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal)
2	PT Perkebunan Nusantara II	1999	-	-	-	
3	PT Inhutani V	1999	-	-	-	
4	PT Istaka karya	2003	8.391.154.934	8.391.154.934	-	
5	PT Industri Sandang Nusantara	1980-2001	33.132.436.990	33.132.436.990	-	
6	PT Kertas Gowa (telah dilikuidasi)	1972-1980	715.651.799	715.651.799	-	
7	Perum Perumnas	1991-1997	26.000.000.000	26.000.000.000	-	- Utang Jangka Panjang Lainnya - Pengurangan piutang akibat reklasifikasi piutang jangka panjang menjadi bagian lancar atas piutang jangka panjang yang jatuh tempo di akhir tahun 2022 sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-63/MK.02/2019
Jumlah			68.435.993.523	68.435.993.523	-	

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
1	Provinsi Aceh	202.984.546.000	9.326.083.437	-	-	212.310.629.437
2	Kab. Aceh Barat	-	2.388.531.992	-	-	2.388.531.992
3	Kab. Aceh Besar	4.856.054.000	4.474.464.287	-	29.094.120	9.359.612.407
4	Kab. Aceh Selatan	5.918.898.000	10.593.972.688	-	-	16.512.870.688
5	Kab. Aceh Singkil	8.259.623.000	629.632.745	-	66.641.114	8.955.896.859
6	Kab. Aceh Tengah	7.010.438.000	6.757.948.962	-	205.092	13.768.592.054
7	Kab. Aceh Tenggara	4.899.586.000	80.639.361	-	-	4.980.225.361
8	Kab. Aceh Timur	17.660.769.000	7.643.384.687	-	-	25.304.153.687
9	Kab. Aceh Utara	15.111.737.000	7.211.517.361	-	-	22.323.254.361
10	Kab. Bireuen	6.559.240.000	6.852.060.826	-	71.642.500	13.482.943.326
11	Kab. Pidie	5.746.624.000	5.384.469.669	-	-	11.131.093.669
12	Kab. Simeulue	5.660.541.000	1.840.497.429	-	-	7.501.038.429
13	Kota Banda Aceh	1.748.802.000	2.507.248.506	-	-	4.256.050.506
14	Kota Sabang	2.466.601.000	1.754.643.607	-	-	4.221.244.607
15	Kota Langsa	5.198.778.000	522.102.252	-	-	5.720.880.252
16	Kota Lhokseumawe	18.143.657.000	2.381.346.780	-	-	20.525.003.780
17	Kab. Gayo Lues	4.210.714.000	1.021.484.773	-	-	5.232.198.773
18	Kab. Aceh Barat Daya	4.230.222.000	3.304.467.827	-	-	7.534.689.827
19	Kab. Aceh Jaya	5.526.634.000	2.553.964.070	-	-	8.080.598.070
20	Kab. Nagan Raya	3.334.313.000	2.326.011.385	-	-	5.660.324.385
21	Kab. Aceh Tamiang	22.067.638.000	3.354.628.263	-	-	25.422.266.263
22	Kab. Bener Meriah	4.500.653.000	3.411.628.659	-	-	7.912.281.659
23	Kab. Pidie Jaya	4.124.070.000	3.353.525.364	-	-	7.477.595.364
24	Kota Subulussalam	4.261.218.000	1.803.723.959	-	-	6.064.941.959
25	Provinsi Sumatera Utara	86.774.862.000	2.771.566.466	-	-	89.546.428.466
26	Kab. Asahan	18.131.158.000	5.675.252.018	-	-	23.806.410.018
27	Kab. Dairi	13.449.425.000	5.618.562.359	-	9.148.945	19.077.136.304
28	Kab. Deli Serdang	8.064.174.000	6.378.423.366	-	336.470.880	14.779.068.246
29	Kab. Karo	10.576.921.000	4.485.458.809	-	-	15.062.379.809
30	Kab. Labuhanbatu	9.666.782.000	3.666.595.960	-	-	13.333.377.960
31	Kab. Langkat	55.211.951.000	2.635.171.362	-	-	57.847.122.362
32	Kab. Mandailing Natal	27.300.663.000	3.070.841.007	-	-	30.371.504.007
33	Kab. Nias	6.458.741.000	8.936.958.964	-	-	15.395.699.964
34	Kab. Simalungun	11.584.323.000	11.102.151.944	-	-	22.686.474.944
35	Kab. Tapanuli Selatan	157.897.895.000	800.241.296	-	-	158.698.136.296
36	Kab. Tapanuli Tengah	11.461.193.000	11.913.739.897	-	-	23.374.932.897
37	Kab. Tapanuli Utara	8.599.902.000	2.617.008.330	-	-	11.216.910.330
38	Kab. Toba Samosir	8.952.086.000	4.069.314.102	-	-	13.021.400.102
39	Kota Binjai	9.017.193.000	1.862.386.935	-	-	10.879.579.935
40	Kota Medan	-	14.113.640.859	-	-	14.113.640.859
41	Kota Pematang Siantar	8.063.155.000	3.767.826.126	-	-	11.830.981.126
42	Kota Sibolga	5.357.060.000	933.886.500	-	-	6.290.946.500

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
43	Kota Tanjung Balai	8.371.543.000	790.872.812	-	-	9.162.415.812
44	Kota Tebing Tinggi	5.060.381.000	3.327.586.028	-	-	8.387.967.028
45	Kota Padang Sidempuan	10.696.968.000	2.376.860.548	-	-	13.073.828.548
46	Kab. Pakpak Bharat	8.300.112.000	2.095.272.232	-	135.119.940	10.530.504.172
47	Kab. Nias Selatan	17.266.249.000	1.597.032.349	-	309.202.148	19.172.483.497
48	Kab. Humbang Hasundutan	11.771.559.000	3.603.091.003	-	-	15.374.650.003
49	Kab. Serdang Bedagai	8.137.839.000	2.576.409.916	-	-	10.714.248.916
50	Kab. Samosir	5.619.496.000	905.941.329	-	-	6.525.437.329
51	Kab. Batu Bara	8.138.761.000	6.411.285.318	-	-	14.550.046.318
52	Kab. Padang Lawas	12.133.573.000	2.152.649.433	-	-	14.286.222.433
53	Kab. Padang Lawas Utara	10.831.280.000	1.469.447.278	-	176.380.600	12.477.107.878
54	Kab. Labuhanbatu Selatan	13.917.301.000	8.849.475.043	-	-	22.766.776.043
55	Kab. Labuhanbatu Utara	17.211.000.000	4.928.248.617	-	-	22.139.248.617
56	Kab. Nias Utara	10.899.500.000	4.773.403.345	-	272.470.480	15.945.373.825
57	Kab. Nias Barat	6.559.049.000	795.146.161	-	1.468.081.891	8.822.277.052
58	Kota Gunungsitoli	5.822.009.000	856.519.776	-	-	6.678.528.776
59	Provinsi Sumatera Barat	27.064.718.000	11.827.343.676	-	-	38.892.061.676
60	Kab. Lima Puluh Kota	7.750.939.000	4.561.271.470	-	-	12.312.210.470
61	Kab. Agam	6.664.822.000	5.239.756.750	-	-	11.904.578.750
62	Kab. Kepulauan Mentawai	10.897.205.000	4.544.249.940	-	-	15.441.454.940
63	Kab. Padang Pariaman	5.176.247.000	9.567.374.245	-	-	14.743.621.245
64	Kab. Pasaman	5.451.452.000	3.041.883.271	-	-	8.493.335.271
65	Kab. Pesisir Selatan	10.052.862.000	8.990.415.462	-	-	19.043.277.462
66	Kab. Sijunjung	9.219.722.000	2.281.421.011	-	-	11.501.143.011
67	Kab. Solok	7.450.903.000	8.013.518.989	-	-	15.464.421.989
68	Kab. Tanah Datar	5.537.766.000	3.294.754.433	-	-	8.832.520.433
69	Kota Bukit Tinggi	1.916.925.000	2.247.290.726	-	-	4.164.215.726
70	Kota Padang Panjang	1.654.528.000	1.914.741.068	-	-	3.569.269.068
71	Kota Padang	8.824.229.000	6.147.852.665	-	-	14.972.081.665
72	Kota Payakumbuh	2.077.418.000	2.998.932.280	-	-	5.076.350.280
73	Kota Sawahlunto	8.627.232.000	2.999.788.455	-	-	11.627.020.455
74	Kota Solok	5.171.258.000	1.636.885.188	-	-	6.808.143.188
75	Kota Pariaman	5.970.318.000	1.877.300.379	-	-	7.847.618.379
76	Kab. Pasaman Barat	12.875.820.000	5.466.683.511	-	-	18.342.503.511
77	Kab. Dharmasraya	5.449.385.000	2.311.338.219	-	-	7.760.723.219
78	Kab. Solok Selatan	9.639.496.000	3.309.169.970	-	-	12.948.665.970
79	Provinsi Riau	9.718.892.000	1.972.829.366	-	-	11.691.721.366
80	Kab. Bengkalis	1.311.108.000	6.466.157.717	-	580.603.040	8.357.868.757
81	Kab. Indragiri Hilir	21.898.352.000	10.591.996.629	-	-	32.490.348.629
82	Kab. Indragiri Hulu	20.970.401.000	3.677.937.145	-	136.984.310	24.785.322.455
83	Kab. Kampar	37.912.508.000	10.165.844.585	-	-	48.078.352.585
84	Kab. Kuantan Singingi	21.385.198.000	8.359.177.008	-	-	29.744.375.008

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
85	Kab. Pelalawan	2.337.695.000	4.749.833.952	-	-	7.087.528.952
86	Kab. Rokan Hilir	24.403.000	3.112.581.385	-	68.854.100	3.205.838.485
87	Kab. Rokan Hulu	20.232.015.000	61.902.250	-	-	20.293.917.250
88	Kab. Siak	7.881.085.000	3.700.037.147	-	-	11.581.122.147
89	Kota Dumai	-	3.139.418.661	-	-	3.139.418.661
90	Kota Pekanbaru	-	5.457.524.065	-	-	5.457.524.065
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	3.164.153.533	-	190.401.600	3.354.555.133
92	Provinsi Jambi	-	71.324.864	-	-	71.324.864
93	Kab. Batanghari	554.630.000	2.803.891.679	-	-	3.358.521.679
94	Kab. Bungo	13.910.755.000	5.085.788.234	-	-	18.996.543.234
95	Kab. Kerinci	-	3.583.261.881	-	463.623.935	4.046.885.816
96	Kab. Merangin	-	7.194.387.377	-	-	7.194.387.377
97	Kab. Muaro Jambi	5.305.566.000	8.415.065.708	-	-	13.720.631.708
98	Kab. Sarolangun	4.978.150.000	2.854.759.386	-	213.740.212	8.046.649.598
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	-	3.092.173.126	-	-	3.092.173.126
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	-	6.158.431.959	-	-	6.158.431.959
101	Kab. Tebo	275.331.000	8.767.844.344	-	-	9.043.175.344
102	Kota Jambi	-	4.863.934.723	-	-	4.863.934.723
103	Kota Sungai Penuh	-	2.440.639.239	-	-	2.440.639.239
104	Provinsi Sumatera Selatan	-	1.582.934.811	-	-	1.582.934.811
105	Kab. Lahat	-	9.261.610.387	-	913.493.735	10.175.104.122
106	Kab. Musi Banyuasin	-	10.403.043.964	-	-	10.403.043.964
107	Kab. Musi Rawas	-	4.864.117.457	-	-	4.864.117.457
108	Kab. Muara Enim	-	8.246.445.054	-	482.096.900	8.728.541.954
109	Kab. Ogan Komering Ilir	9.631.524.000	11.768.952.750	-	301.794.600	21.702.271.350
110	Kab. Ogan Komering Ulu	7.917.613.000	7.686.367.227	-	-	15.603.980.227
111	Kota Palembang	-	5.765.323.235	-	-	5.765.323.235
112	Kota Prabumulih	11.849.267.000	2.976.052.221	-	-	14.825.319.221
113	Kota Pagar Alam	-	2.024.140.926	-	-	2.024.140.926
114	Kota Lubuk Linggau	4.699.615.000	1.906.319.317	-	-	6.605.934.317
115	Kab. Banyuasin	3.428.302.000	6.327.441.982	-	2.416	9.755.746.398
116	Kab. Ogan Ilir	16.729.273.000	3.914.788.521	-	-	20.644.061.521
117	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	8.053.852.000	5.295.873.686	-	-	13.349.725.686
118	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	4.150.410.000	3.982.688.790	-	-	8.133.098.790
119	Kab. Empat Lawang	-	3.349.756.178	-	-	3.349.756.178
120	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	-	2.861.621.651	-	-	2.861.621.651
121	Kab. Musi Rawas Utara	-	944.908.648	-	-	944.908.648
122	Provinsi Bengkulu	21.921.290.000	1.292.505.376	-	-	23.213.795.376
123	Kab. Bengkulu Selatan	-	7.086.955.204	-	-	7.086.955.204
124	Kab. Bengkulu Utara	23.231.350.000	4.933.807.871	-	-	28.165.157.871
125	Kab. Rejang Lebong	4.953.079.000	7.534.569.987	-	-	12.487.648.987
126	Kota Bengkulu	3.188.891.000	7.367.836.709	-	-	10.556.727.709

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
127	Kab. Kaur	102.459.000	6.222.353.409	-	-	6.324.812.409
128	Kab. Seluma	-	4.853.505.278	-	-	4.853.505.278
129	Kab. Mukomuko	10.785.851.000	5.404.023.893	-	-	16.189.874.893
130	Kab. Lebong	840.436.000	4.307.220.741	-	-	5.147.656.741
131	Kab. Kepahiang	5.206.655.000	3.116.221.791	-	403.519.435	8.726.396.226
132	Kab. Bengkulu Tengah	30.693.702.000	5.852.736.258	-	-	36.546.438.258
133	Provinsi Lampung	37.211.367.000	1.584.393.526	-	-	38.795.760.526
134	Kab. Lampung Barat	7.845.967.000	3.197.022.539	-	-	11.042.989.539
135	Kab. Lampung Selatan	7.893.541.000	1.004.494.580	-	-	8.898.035.580
136	Kab. Lampung Tengah	10.566.187.000	8.241.433.262	-	-	18.807.620.262
137	Kab. Lampung Utara	9.415.215.000	9.274.139.865	-	-	18.689.354.865
138	Kab. Lampung Timur	6.321.558.000	12.201.923.666	-	558.904.900	19.082.386.566
139	Kab. Tanggamus	36.021.632.000	3.441.745.968	-	931.712.445	40.395.090.413
140	Kab. Tulang Bawang	7.439.088.000	4.044.907.982	-	-	11.483.995.982
141	Kab. Way Kanan	8.896.933.000	5.702.011.158	-	-	14.598.944.158
142	Kota Bandar Lampung	5.368.170.000	10.381.919.358	-	-	15.750.089.358
143	Kota Metro	3.565.988.000	3.621.535.914	-	-	7.187.523.914
144	Kab. Pesawaran	8.152.563.000	4.365.284.714	-	-	12.517.847.714
145	Kab. Pringsewu	7.427.459.000	5.378.809.819	-	-	12.806.268.819
146	Kab. Mesuji	9.956.480.000	3.405.861.558	-	-	13.362.341.558
147	Kab. Tulang Bawang Barat	6.840.528.000	7.182.880.455	-	-	14.023.408.455
148	Kab. Pesisir Barat	8.530.356.000	1.644.287.383	-	-	10.174.643.383
149	Provinsi DKI Jakarta	-	29.210.836.204	-	-	29.210.836.204
150	Provinsi Jawa Barat	-	22.692.445.835	-	-	22.692.445.835
151	Kab. Bandung	-	17.865.932.899	-	538.236.093	18.404.168.992
152	Kab. Bekasi	-	9.490.610.926	-	90.963.930	9.581.574.856
153	Kab. Bogor	-	20.282.490.549	-	390.784.800	20.673.275.349
154	Kab. Ciamis	507.346.000	10.554.866.375	-	-	11.062.212.375
155	Kab. Cianjur	-	8.330.011.913	-	-	8.330.011.913
156	Kab. Cirebon	4.748.383.000	8.130.218.206	-	-	12.878.601.206
157	Kab. Garut	-	9.385.236.511	-	-	9.385.236.511
158	Kab. Indramayu	21.999.906.000	13.497.732.772	-	-	35.497.638.772
159	Kab. Karawang	-	17.320.028.859	-	-	17.320.028.859
160	Kab. Kuningan	-	25.631.116.460	-	-	25.631.116.460
161	Kab. Majalengka	2.367.299.000	5.213.983.161	-	-	7.581.282.161
162	Kab. Purwakarta	-	6.705.656.855	-	-	6.705.656.855
163	Kab. Subang	5.640.928.000	13.486.579.726	-	286.984.000	19.414.491.726
164	Kab. Sukabumi	-	7.016.086.915	-	-	7.016.086.915
165	Kab. Sumedang	-	9.884.833.250	-	-	9.884.833.250
166	Kab. Tasikmalaya	-	5.886.338.851	-	-	5.886.338.851
167	Kota Bandung	13.111.448.000	9.559.717.931	-	-	22.671.165.931
168	Kota Bekasi	-	9.470.654.995	-	-	9.470.654.995

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
169	Kota Bogor	-	3.508.011.769	-	-	3.508.011.769
170	Kota Cirebon	-	1.952.030.696	-	-	1.952.030.696
171	Kota Depok	-	5.446.726.893	-	-	5.446.726.893
172	Kota Sukabumi	-	1.756.143.110	-	-	1.756.143.110
173	Kota Tasikmalaya	-	5.420.177.727	-	-	5.420.177.727
174	Kota Cimahi	-	2.968.561.334	-	-	2.968.561.334
175	Kota Banjar	51.340.000	1.019.333.777	-	-	1.070.673.777
176	Kab. Bandung Barat	986.724.000	8.902.389.466	-	-	9.889.113.466
177	Kab. Pangandaran	-	3.247.884.850	-	-	3.247.884.850
178	Provinsi Jawa Tengah	15.433.855.000	8.942.077.908	-	-	24.375.932.908
179	Kab. Banjarnegara	3.720.260.000	8.897.309.674	-	-	12.617.569.674
180	Kab. Banyumas	7.876.398.000	4.094.409.067	-	-	11.970.807.067
181	Kab. Batang	11.272.343.000	1.541.090.911	-	31.872.783	12.845.306.694
182	Kab. Blora	46.839.018.000	1.756.369.770	-	93.928.322	48.689.316.092
183	Kab. Boyolali	4.445.351.000	3.670.090.268	-	-	8.115.441.268
184	Kab. Brebes	8.091.938.000	2.188.824.062	-	-	10.280.762.062
185	Kab. Cilacap	17.574.125.000	1.110.437.681	-	-	18.684.562.681
186	Kab. Demak	3.271.894.000	10.528.111.592	-	-	13.800.005.592
187	Kab. Grobogan	13.285.397.000	2.755.185.260	-	-	16.040.582.260
188	Kab. Jepara	8.744.815.000	5.351.613.278	-	-	14.096.428.278
189	Kab. Karanganyar	3.857.779.000	1.635.919.183	-	-	5.493.698.183
190	Kab. Kebumen	5.686.117.000	3.673.493.608	-	-	9.359.610.608
191	Kab. Kendal	7.828.661.000	2.593.970.144	-	-	10.422.631.144
192	Kab. Klaten	4.235.190.000	6.117.796.727	-	16.707.274	10.369.694.001
193	Kab. Kudus	24.635.906.000	7.568.370.668	-	-	32.204.276.668
194	Kab. Magelang	4.228.495.000	6.693.308.699	-	184.875.113	11.106.678.812
195	Kab. Pati	6.937.390.000	7.939.171.528	-	-	14.876.561.528
196	Kab. Pekalongan	5.383.256.000	5.591.087.539	-	-	10.974.343.539
197	Kab. Pemalang	6.624.195.000	3.322.727.393	-	-	9.946.922.393
198	Kab. Purbalingga	2.803.686.000	4.151.961.533	-	-	6.955.647.533
199	Kab. Purworejo	3.557.096.000	4.634.104.375	-	200	8.191.200.575
200	Kab. Rembang	10.423.862.000	1.274.251.777	-	131.525.099	11.829.638.876
201	Kab. Semarang	6.443.026.000	3.473.311.296	-	386.334.650	10.302.671.946
202	Kab. Sragen	4.616.185.000	4.605.401.932	-	-	9.221.586.932
203	Kab. Sukoharjo	1.875.197.000	4.411.133.620	-	-	6.286.330.620
204	Kab. Tegal	4.434.277.000	7.875.593.247	-	-	12.309.870.247
205	Kab. Temanggung	3.754.923.000	3.960.495.340	-	127.853.842	7.843.272.182
206	Kab. Wonogiri	4.967.706.000	1.670.579.942	-	-	6.638.285.942
207	Kab. Wonosobo	4.461.920.000	3.726.243.879	-	-	8.188.163.879
208	Kota Magelang	783.197.000	1.101.923.762	-	-	1.885.120.762
209	Kota Pekalongan	2.101.960.000	2.513.279.322	-	-	4.615.239.322
210	Kota Salatiga	1.049.039.000	1.370.381.295	-	-	2.419.420.295

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
211	Kota Semarang	-	3.782.313.044	-	-	3.782.313.044
212	Kota Surakarta	5.735.748.000	2.387.960.839	-	-	8.123.708.839
213	Kota Tegal	1.381.808.000	1.269.152.484	-	-	2.650.960.484
214	Provinsi DI Yogyakarta	1.281.544.000	728.337.060	23.865.756.633	-	25.875.637.693
215	Kab. Bantul	1.205.359.000	3.366.308.922	-	-	4.571.667.922
216	Kab. Gunung Kidul	1.896.430.000	4.872.586.316	-	-	6.769.016.316
217	Kab. Kulon Progo	1.070.008.000	4.616.813.943	-	-	5.686.821.943
218	Kab. Sleman	3.546.413.000	4.975.048.706	-	-	8.521.461.706
219	Kota Yogyakarta	3.205.961.000	4.384.239.699	-	-	7.590.200.699
220	Provinsi Jawa Timur	34.192.212.000	38.793.764.574	-	-	72.985.976.574
221	Kab. Bangkalan	1.322.035.000	9.515.913.590	-	7.779.459	10.845.728.049
222	Kab. Banyuwangi	97.015.798.000	9.181.752.116	-	394.594.200	106.592.144.316
223	Kab. Blitar	1.169.755.000	3.545.220.863	-	-	4.714.975.863
224	Kab. Bojonegoro	140.196.124.000	4.425.308.730	-	-	144.621.432.730
225	Kab. Bondowoso	2.083.214.000	10.337.194.737	-	8.865.539	12.429.274.276
226	Kab. Gresik	-	5.753.237.404	-	-	5.753.237.404
227	Kab. Jember	-	13.333.309.075	-	-	13.333.309.075
228	Kab. Jombang	13.610.285.000	3.008.391.407	-	-	16.618.676.407
229	Kab. Kediri	-	14.405.490.990	-	-	14.405.490.990
230	Kab. Lamongan	11.430.443.000	4.492.624.511	-	-	15.923.067.511
231	Kab. Lumajang	183.205.000	6.374.171.327	-	10.089.000	6.567.465.327
232	Kab. Madiun	11.870.658.000	7.228.554.739	-	-	19.099.212.739
233	Kab. Magetan	48.125.000	2.628.742.660	-	-	2.676.867.660
234	Kab. Malang	1.779.133.000	3.358.631.878	-	-	5.137.764.878
235	Kab. Mojokerto	721.629.000	7.105.002.003	-	-	7.826.631.003
236	Kab. Nganjuk	15.649.566.000	2.827.802.018	-	-	18.477.368.018
237	Kab. Ngawi	17.729.486.000	3.820.226.124	-	-	21.549.712.124
238	Kab. Pacitan	2.658.347.000	4.028.131.260	-	-	6.686.478.260
239	Kab. Pamekasan	1.952.751.000	5.402.849.241	-	-	7.355.600.241
240	Kab. Pasuruan	-	9.639.518.278	-	-	9.639.518.278
241	Kab. Ponorogo	2.393.588.000	5.381.713.257	-	132.927.535	7.908.228.792
242	Kab. Probolinggo	1.976.108.000	6.299.786.697	-	-	8.275.894.697
243	Kab. Sampang	1.277.020.000	3.256.362.293	-	-	4.533.382.293
244	Kab. Sidoarjo	18.128.399.000	28.560.135.418	-	-	46.688.534.418
245	Kab. Situbondo	21.305.000	6.797.873.718	-	101.065.300	6.920.244.018
246	Kab. Sumenep	7.098.444.000	7.947.373.004	-	-	15.045.817.004
247	Kab. Trenggalek	4.510.935.000	5.219.254.895	-	-	9.730.189.895
248	Kab. Tuban	53.706.064.000	4.535.278.557	-	-	58.241.342.557
249	Kab. Tulungagung	3.437.224.000	12.115.047.871	-	-	15.552.271.871
250	Kota Blitar	-	685.057.322	-	-	685.057.322
251	Kota Kediri	23.571.802.000	2.982.976.170	-	-	26.554.778.170
252	Kota Madiun	-	635.304.296	-	-	635.304.296

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
253	Kota Malang	-	5.950.328.274		-	5.950.328.274
254	Kota Mojokerto	-	1.090.844.261		-	1.090.844.261
255	Kota Pasuruan	-	1.344.253.301		-	1.344.253.301
256	Kota Probolinggo	-	1.896.915.739		-	1.896.915.739
257	Kota Surabaya	-	8.795.747.267		-	8.795.747.267
258	Kota Batu	-	1.088.336.359		-	1.088.336.359
259	Provinsi Kalimantan Barat	140.005.757.000	1.265.017.636		-	141.270.774.636
260	Kab. Bengkayang	26.402.619.000	4.758.045.072		-	31.160.664.072
261	Kab. Landak	25.030.049.000	779.816.857		-	25.809.865.857
262	Kab. Kapuas Hulu	5.763.561.000	3.544.028.637		158.178.260	9.465.767.897
263	Kab. Ketapang	118.025.113.000	6.268.226.572		-	124.293.339.572
264	Kab. Mempawah	13.587.959.000	6.537.640.176		-	20.125.599.176
265	Kab. Sambas	16.581.620.000	7.304.611.456		21.210.499	23.907.441.955
266	Kab. Sanggau	131.693.873.000	8.511.887.828		465.333.800	140.671.094.628
267	Kab. Sintang	14.717.973.000	11.026.664.683		867.878.990	26.612.516.673
268	Kota Pontianak	13.455.474.000	6.933.969.346		-	20.389.443.346
269	Kota Singkawang	11.454.590.000	2.215.880.631		-	13.670.470.631
270	Kab. Sekadau	27.627.996.000	4.649.664.618		-	32.277.660.618
271	Kab. Melawi	9.136.701.000	3.220.652.687		-	12.357.353.687
272	Kab. Kayong Utara	19.914.242.000	899.144.973		-	20.813.386.973
273	Kab. Kubu Raya	28.353.702.000	5.257.276.905		-	33.610.978.905
274	Provinsi Kalimantan Tengah	-	1.810.941.929		-	1.810.941.929
275	Kab. Barito Selatan	-	2.414.206.717		262.535.200	2.676.741.917
276	Kab. Barito Utara	-	8.381.777.733		183.094.160	8.564.871.893
277	Kab. Kapuas	-	5.698.170.488		-	5.698.170.488
278	Kab. Kotawaringin Barat	13.615.713.000	4.703.527.388		-	18.319.240.388
279	Kab. Kotawaringin Timur	87.111.242.000	5.427.292.013		-	92.538.534.013
280	Kota Palangkaraya	-	3.298.770.415		-	3.298.770.415
281	Kab. Katingan	12.175.619.000	4.409.339.679		-	16.584.958.679
282	Kab. Seruyan	6.034.618.000	978.597.893		-	7.013.215.893
283	Kab. Sukamara	-	3.047.265.119		-	3.047.265.119
284	Kab. Lamandau	5.074.313.000	4.342.327.646		-	9.416.640.646
285	Kab. Gunung Mas	2.548.312.000	2.616.719.826		1.213.231.731	6.378.263.557
286	Kab. Pulang Pisau	-	5.525.022.610		-	5.525.022.610
287	Kab. Murung Raya	-	2.051.531.483		-	2.051.531.483
288	Kab. Barito Timur	-	1.761.157.541		-	1.761.157.541
289	Provinsi Kalimantan Selatan	-	4.379.354.184		-	4.379.354.184
290	Kab. Banjar	-	4.456.797.108		-	4.456.797.108
291	Kab. Barito Kuala	-	5.499.715.495		-	5.499.715.495
292	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	6.219.657.736		-	6.219.657.736
293	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	10.483.239.425		-	10.483.239.425
294	Kab. Hulu Sungai Utara	-	4.204.000.102		-	4.204.000.102

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
295	Kab. Kotabaru	-	11.321.196.885		-	11.321.196.885
296	Kab. Tabalong	-	2.801.521.711		-	2.801.521.711
297	Kab. Tanah Laut	108.968.497.000	7.712.303.945		85.453.295	116.766.254.240
298	Kab. Tapin	-	2.713.300.593		-	2.713.300.593
299	Kota Banjarbaru	-	1.997.855.782		-	1.997.855.782
300	Kota Banjarmasin	-	6.497.608.599		-	6.497.608.599
301	Kab. Balangan	-	4.765.665.620		-	4.765.665.620
302	Kab. Tanah Bumbu	-	2.396.434.017		-	2.396.434.017
303	Provinsi Kalimantan Timur	-	2.249.125.610		-	2.249.125.610
304	Kab. Berau	-	3.364.288.240		-	3.364.288.240
305	Kab. Kutai Kartanegara	-	8.379.045.306		301.446.100	8.680.491.406
306	Kab. Kutai Barat	-	5.164.307.690		-	5.164.307.690
307	Kab. Kutai Timur	-	4.948.641.572		1.550.234.061	6.498.875.633
308	Kab. Paser	-	3.529.293.744		459.062.850	3.988.356.594
309	Kota Balikpapan	-	3.938.202.428		-	3.938.202.428
310	Kota Bontang	-	2.657.882.811		-	2.657.882.811
311	Kota Samarinda	-	5.654.177.289		-	5.654.177.289
312	Kab. Penajam Paser Utara	-	2.775.852.512		-	2.775.852.512
313	Kab. Mahakam Ulu	-	933.715.015		1.950.468.580	2.884.183.595
314	Provinsi Sulawesi Utara	83.542.698.000	-		-	83.542.698.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	17.909.825.000	4.546.603.242		-	22.456.428.242
316	Kab. Minahasa	11.784.283.000	4.363.490.168		-	16.147.773.168
317	Kab. Sangihe	14.484.792.000	6.622.937.169		-	21.107.729.169
318	Kota Bitung	165.597.769.000	1.072.381.020		-	166.670.150.020
319	Kota Manado	13.332.015.000	6.886.760.453		-	20.218.775.453
320	Kab. Kepulauan Talaud	11.775.421.000	4.640.056.860		-	16.415.477.860
321	Kab. Minahasa Selatan	10.326.115.000	6.362.983.487		-	16.689.098.487
322	Kota Tomohon	6.857.139.000	2.021.669.136		-	8.878.808.136
323	Kab. Minahasa Utara	54.740.427.000	872.745.970		63.300.765	55.676.473.735
324	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Bi	11.089.533.000	3.721.039.940		-	14.810.572.940
325	Kota Kotamobagu	10.353.308.000	1.419.086.730		1.446.351.057	13.218.745.787
326	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.840.401.000	2.483.451.627		-	13.323.852.627
327	Kab. Minahasa Tenggara	8.665.060.000	2.658.058.310		-	11.323.118.310
328	Kab. Bolaang Mongondow Timur	15.976.001.000	2.847.038.436		-	18.823.039.436
329	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	32.407.725.000	2.078.772.095		-	34.486.497.095
330	Provinsi Sulawesi Tengah	-	4.143.998.682		-	4.143.998.682
331	Kab. Banggai	-	7.311.832.749		-	7.311.832.749
332	Kab. Banggai Kepulauan	906.154.000	3.064.353.803		-	3.970.507.803
333	Kab. Buol	4.029.978.000	3.040.872.533		480.257.000	7.551.107.533
334	Kab. Tolitoli	4.186.055.000	3.964.465.222		-	8.150.520.222
335	Kab. Donggala	5.898.072.000	4.707.442.800		-	10.605.514.800
336	Kab. Morowali	-	1.495.407.256		-	1.495.407.256

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
337	Kab. Poso	3.412.835.000	7.857.241.314		-	11.270.076.314
338	Kota Palu	-	1.419.208.550		-	1.419.208.550
339	Kab. Parigi Moutong	3.446.520.000	4.359.500.082		-	7.806.020.082
340	Kab. Tojo Una Una	-	4.074.523.246		-	4.074.523.246
341	Kab. Sigi	1.011.895.000	4.461.451.327		-	5.473.346.327
342	Kab. Banggai Laut	1.267.997.000	1.120.765.859		-	2.388.762.859
343	Kab. Morowali Utara	-	834.213.820		-	834.213.820
344	Provinsi Sulawesi Selatan	8.852.063.000	7.112.316.018		-	15.964.379.018
345	Kab. Bantaeng	980.633.000	769.768.768		363.727.672	2.114.129.440
346	Kab. Barru	1.966.055.000	4.641.234.810		-	6.607.289.810
347	Kab. Bone	3.929.045.000	12.446.998.649		165.936.700	16.541.980.349
348	Kab. Bulukumba	6.114.201.000	2.634.506.170		-	8.748.707.170
349	Kab. Enrekang	3.357.351.000	4.089.569.593		-	7.446.920.593
350	Kab. Gowa	1.996.408.000	3.367.728.336		-	5.364.136.336
351	Kab. Jeneponto	2.674.361.000	6.255.598.307		-	8.929.959.307
352	Kab. Luwu	4.119.760.000	7.142.183.212		-	11.261.943.212
353	Kab. Luwu Utara	8.174.048.000	7.178.444.673		-	15.352.492.673
354	Kab. Maros	8.442.650.000	4.797.991.045		-	13.240.641.045
355	Kab. Pangkajene Kepulauan	13.280.330.000	3.851.975.862		286.986.393	17.419.292.255
356	Kota Palopo	2.324.622.000	2.318.035.398		-	4.642.657.398
357	Kab. Luwu Timur	-	6.066.399.059		-	6.066.399.059
358	Kab. Pinrang	3.590.998.000	6.843.695.863		-	10.434.693.863
359	Kab. Sinjai	1.681.058.000	5.401.518.064		-	7.082.576.064
360	Kab. Kepulauan Selayar	6.066.407.000	4.150.848.272		475.902.064	10.693.157.336
361	Kab. Sidenreng Rappang	3.056.812.000	1.444.420.131		-	4.501.232.131
362	Kab. Soppeng	3.194.741.000	5.312.985.350		-	8.507.726.350
363	Kab. Takalar	2.379.640.000	4.287.156.813		-	6.666.796.813
364	Kab. Tana Toraja	1.929.912.000	3.540.852.836		-	5.470.764.836
365	Kab. Wajo	26.090.580.000	7.331.894.471		-	33.422.474.471
366	Kota Parepare	1.271.732.000	1.945.457.117		-	3.217.189.117
367	Kota Makassar	2.045.414.000	10.187.825.541		-	12.233.239.541
368	Kab. Toraja Utara	2.615.971.000	6.774.454.948		-	9.390.425.948
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	3.679.853.912		-	3.679.853.912
370	Kab. Buton	282.903.000	2.657.175.703		-	2.940.078.703
371	Kab. Konawe	-	2.659.608.356		-	2.659.608.356
372	Kab. Kolaka	-	4.646.556.201		-	4.646.556.201
373	Kab. Muna	616.192.000	3.801.473.310		-	4.417.665.310
374	Kota Kendari	812.548.000	2.436.588.489		-	3.249.136.489
375	Kota Bau-bau	-	4.502.384.952		-	4.502.384.952
376	Kab. Konawe Selatan	8.146.447.000	5.256.742.214		-	13.403.189.214
377	Kab. Bombana	-	5.521.580.109		-	5.521.580.109
378	Kab. Wakatobi	-	3.285.668.528		38.427.988	3.324.096.516

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
379	Kab. Kolaka Utara	-	1.862.089.553		-	1.862.089.553
380	Kab. Konawe Utara	-	1.206.063.357		-	1.206.063.357
381	Kab. Buton Utara	-	426.489.409		226.747.093	653.236.502
382	Kab. Konawe Kepulauan	-	1.635.315.825		-	1.635.315.825
383	Kab. Kolaka Timur	-	1.569.618.011		-	1.569.618.011
384	Kab. Muna Barat	376.149.000	2.454.907.810		-	2.831.056.810
385	Kab. Buton Tengah	-	2.848.650.333		2.959.736.539	5.808.386.872
386	Kab. Buton Selatan	-	2.981.034.718		-	2.981.034.718
387	Provinsi Bali	-	1.912.097.025		-	1.912.097.025
388	Kab. Badung	679.311.000	6.241.288.958		-	6.920.599.958
389	Kab. Bangli	1.187.203.000	6.525.223.763		-	7.712.426.763
390	Kab. Buleleng	2.367.225.000	6.876.676.661		-	9.243.901.661
391	Kab. Gianyar	674.392.000	8.434.952.014		-	9.109.344.014
392	Kab. Jembrana	1.558.406.000	2.386.828.299		-	3.945.234.299
393	Kab. Karangasem	2.145.741.000	4.246.441.206		-	6.392.182.206
394	Kab. Klungkung	903.650.000	4.828.104.193		-	5.731.754.193
395	Kab. Tabanan	1.140.895.000	5.924.893.544		-	7.065.788.544
396	Kota Denpasar	-	7.194.665.438		-	7.194.665.438
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	767.429.000	3.056.904.010		-	3.824.333.010
398	Kab. Bima	6.172.348.000	1.909.993.188		-	8.082.341.188
399	Kab. Dompu	2.067.011.000	494.112.085		-	2.561.123.085
400	Kab. Lombok Barat	795.537.000	4.862.714.497		7.151.955	5.665.403.452
401	Kab. Lombok Tengah	2.694.640.000	12.845.626.548		-	15.540.266.548
402	Kab. Lombok Timur	-	4.736.327.286		-	4.736.327.286
403	Kab. Sumbawa	3.817.279.000	9.322.126.711		-	13.139.405.711
404	Kota Mataram	2.259.213.000	4.127.543.020		-	6.386.756.020
405	Kota Bima	427.316.000	2.152.109.560		-	2.579.425.560
406	Kab. Sumbawa Barat	-	1.945.754.773		-	1.945.754.773
407	Kab. Lombok Utara	-	1.709.220.538		-	1.709.220.538
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	8.007.570.000	2.179.176.865		-	10.186.746.865
409	Kab. Alor	4.136.351.000	7.867.209.835		228.718.060	12.232.278.895
410	Kab. Belu	3.375.500.000	7.603.473.343		-	10.978.973.343
411	Kab. Ende	5.086.867.000	11.495.658.261		218.613.387	16.801.138.648
412	Kab. Flores Timur	3.647.871.000	5.886.261.440		-	9.534.132.440
413	Kab. Kupang	5.417.253.000	7.335.667.602		-	12.752.920.602
414	Kab. Lembata	3.188.964.000	3.386.853.603		-	6.575.817.603
415	Kab. Manggarai	2.525.034.000	7.658.273.928		-	10.183.307.928
416	Kab. Ngada	2.306.732.000	5.842.203.881		-	8.148.935.881
417	Kab. Sikka	3.331.431.000	6.900.232.527		-	10.231.663.527
418	Kab. Sumba Barat	2.275.381.000	4.370.849.785		-	6.646.230.785
419	Kab. Sumba Timur	4.751.294.000	6.078.460.699		-	10.829.754.699
420	Kab. Timor Tengah Selatan	5.436.552.000	11.945.988.289		30.918.050	17.413.458.339

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
421	Kab. Timor Tengah Utara	4.302.238.000	9.222.368.103		-	13.524.606.103
422	Kota Kupang	1.306.497.000	3.539.734.948		-	4.846.231.948
423	Kab. Rote Ndao	3.170.223.000	3.946.918.867		-	7.117.141.867
424	Kab. Manggarai Barat	3.132.877.000	4.411.585.337		-	7.544.462.337
425	Kab. Nagekeo	2.430.989.000	2.940.080.513		-	5.371.069.513
426	Kab. Sumba Barat Daya	2.920.937.000	7.439.793.322		-	10.360.730.322
427	Kab. Sumba Tengah	2.600.171.000	1.582.475.324		-	4.182.646.324
428	Kab. Manggarai Timur	2.455.090.000	6.842.302.652		-	9.297.392.652
429	Kab. Sabu Raijua	2.436.970.000	1.680.490.442		-	4.117.460.442
430	Kab. Malaka	2.400.207.000	3.264.436.934		-	5.664.643.934
431	Provinsi Maluku	47.560.677.000	1.675.069.978		-	49.235.746.978
432	Kab. Kepulauan Tanimbar	12.278.111.000	2.610.073.635		-	14.888.184.635
433	Kab. Maluku Tengah	23.957.633.000	10.422.162.731		157.250.400	34.537.046.131
434	Kab. Maluku Tenggara	6.964.081.000	1.339.263.582		-	8.303.344.582
435	Kab. Buru	10.414.871.000	2.318.062.882		-	12.732.933.882
436	Kota Ambon	5.437.636.000	6.748.893.768		-	12.186.529.768
437	Kab. Seram Bagian Barat	12.062.440.000	360.289.000		-	12.422.729.000
438	Kab. Seram Bagian Timur	45.927.560.000	2.519.951.945		-	48.447.511.945
439	Kab. Kepulauan Aru	10.241.265.000	7.210.300.117		-	17.451.565.117
440	Kota Tual	5.815.616.000	2.025.657.037		-	7.841.273.037
441	Kab. Maluku Barat Daya	13.154.098.000	3.795.457.519		-	16.949.555.519
442	Kab. Buru Selatan	15.258.610.000	158.332.573		-	15.416.942.573
443	Provinsi Papua	330.895.024.000	-		-	330.895.024.000
444	Kab. Biak Numfor	24.298.911.000	3.972.879.590		-	28.271.790.590
445	Kab. Jayapura	26.473.184.000	4.817.848.792		-	31.291.032.792
446	Kab. Jayawijaya	24.079.802.000	2.061.024.160		-	26.140.826.160
447	Kab. Merauke	33.405.637.000	5.970.810.490		1.259.655.537	40.636.103.027
448	Kab. Mimika	782.397.913.000	441.310.884		-	782.839.223.884
449	Kab. Nabire	31.926.485.000	4.137.320.174		-	36.063.805.174
450	Kab. Paniai	25.495.431.000	-		-	25.495.431.000
451	Kab. Puncak Jaya	28.258.249.000	6.206.920		-	28.264.455.920
452	Kab. Kepulauan Yapen	21.561.138.000	4.943.438.801		-	26.504.576.801
453	Kota Jayapura	34.158.399.000	695.111.777		-	34.853.510.777
454	Kab. Sarmi	30.684.362.000	667.412.094		-	31.351.774.094
455	Kab. Keerom	33.191.454.000	2.176.517.863		-	35.367.971.863
456	Kab. Yahukimo	28.832.771.000	502.091.500		-	29.334.862.500
457	Kab. Pegunungan Bintang	30.418.240.000	1.567.947.255		-	31.986.187.255
458	Kab. Tolikara	19.901.535.000	5.766.641.012		-	25.668.176.012
459	Kab. Boven Digoel	26.932.310.000	1.917.375.845		-	28.849.685.845
460	Kab. Mappi	23.806.054.000	6.483.374.413		-	30.289.428.413
461	Kab. Asmat	20.430.383.000	7.322.288.454		-	27.752.671.454
462	Kab. Waropen	27.061.187.000	101.715.213		-	27.162.902.213

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
463	Kab. Supiori	21.263.549.000	8.314.000		-	21.271.863.000
464	Kab. Mamberamo Raya	52.183.170.000	17.985.697		-	52.201.155.697
465	Kab. Mamberamo Tengah	20.489.924.000	7.145.935.517		-	27.635.859.517
466	Kab. Yalimo	18.756.157.000	1.538.082.224		-	20.294.239.224
467	Kab. Lanny Jaya	19.177.852.000	177.701.804		-	19.355.553.804
468	Kab. Nduga	14.428.504.000	45.924.100		-	14.474.428.100
469	Kab. Dogiyai	17.670.179.000	977.086.508		5.460.422.200	24.107.687.708
470	Kab. Puncak	15.738.954.000	156.458.958		-	15.895.412.958
471	Kab. Intan Jaya	17.750.497.000	209.687.975		-	17.960.184.975
472	Kab. Deiyai	16.768.611.000	15.220.300		-	16.783.831.300
473	Provinsi Maluku Utara	-	-		-	-
474	Kab. Halmahera Tengah	-	2.331.282.075		-	2.331.282.075
475	Kota Ternate	1.376.582.000	1.322.500.662		-	2.699.082.662
476	Kab. Halmahera Barat	-	2.569.581.378		-	2.569.581.378
477	Kab. Halmahera Timur	-	2.372.672.222		-	2.372.672.222
478	Kab. Halmahera Selatan	-	5.819.690.672		-	5.819.690.672
479	Kab. Halmahera Utara	49.793.118.000	1.462.686.927		-	51.255.804.927
480	Kab. Kepulauan Sula	-	935.143.511		-	935.143.511
481	Kota Tidore Kepulauan	-	1.932.567.505		151.126.025	2.083.693.530
482	Kab. Pulau Morotai	-	913.136.505		13.299.200	926.435.705
483	Kab. Pulau Taliabu	-	2.125.102.560		-	2.125.102.560
484	Provinsi Banten	-	2.909.526.553		-	2.909.526.553
485	Kab. Lebak	3.212.406.000	7.370.424.071		-	10.582.830.071
486	Kab. Pandeglang	18.200.059.000	3.324.192.117		-	21.524.251.117
487	Kab. Serang	1.452.589.000	5.112.489.809		343.567.078	6.908.645.887
488	Kab. Tangerang	-	5.817.365.654		-	5.817.365.654
489	Kota Cilegon	-	1.579.700.734		-	1.579.700.734
490	Kota Tangerang	-	4.633.267.974		-	4.633.267.974
491	Kota Serang	-	4.770.286.314		-	4.770.286.314
492	Kota Tangerang Selatan	-	3.818.964.441		-	3.818.964.441
493	Provinsi Bangka Belitung	250.384.288.000	686.609.009		-	251.070.897.009
494	Kab. Bangka	174.079.048.000	3.855.772.320		-	177.934.820.320
495	Kab. Belitung	94.234.844.000	2.435.110.868		-	96.669.954.868
496	Kota Pangkal Pinang	54.425.190.000	1.682.640.188		-	56.107.830.188
497	Kab. Bangka Selatan	64.313.738.000	2.364.436.990		-	66.678.174.990
498	Kab. Bangka Tengah	117.554.604.000	2.282.364.959		-	119.836.968.959
499	Kab. Bangka Barat	44.716.616.000	3.477.217.355		243.862.765	48.437.696.120
500	Kab. Belitung Timur	114.286.785.000	3.049.883.719		57.785.222	117.394.453.941
501	Provinsi Gorontalo	3.028.740.000	3.019.311.244		-	6.048.051.244
502	Kab. Boalemo	4.481.368.000	3.168.722.148		-	7.650.090.148
503	Kab. Gorontalo	2.888.815.000	6.472.940.698		46.222.958.068	55.584.713.766
504	Kota Gorontalo	1.960.132.000	4.326.755.656		-	6.286.887.656

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
505	Kab. Pohuwato	5.377.802.000	4.113.186.696		-	9.490.988.696
506	Kab. Bone Bolango	3.047.508.000	6.601.326.068		-	9.648.834.068
507	Kab. Gorontalo Utara	4.681.885.000	4.537.832.208		-	9.219.717.208
508	Provinsi Kepulauan Riau	56.681.351.000	1.735.953.199		-	58.417.304.199
509	Kab. Natuna	4.125.457.000	4.185.630.181		-	8.311.087.181
510	Kab. Kepulauan Anambas	14.457.199.000	944.942.295		439.219.813	15.841.361.108
511	Kab. Karimun	23.223.833.000	2.153.743.386		-	25.377.576.386
512	Kota Batam	9.014.514.000	4.100.764.282		-	13.115.278.282
513	Kota Tanjung Pinang	17.756.680.000	2.758.673.420		-	20.515.353.420
514	Kab. Lingga	16.599.993.000	5.757.398.759		-	22.357.391.759
515	Kab. Bintan	22.219.123.000	4.601.506.573		69.157.726	26.889.787.299
516	Provinsi Papua Barat	887.118.470.000	331.960.492		-	887.450.430.492
517	Kab. Fak Fak	50.191.330.000	4.883.769.789		160	55.075.099.949
518	Kab. Manokwari	27.510.246.000	1.588.738.368		-	29.098.984.368
519	Kab. Sorong	44.006.379.000	2.187.073.939		-	46.193.452.939
520	Kota Sorong	21.822.586.000	2.365.734.777		-	24.188.320.777
521	Kab. Raja Ampat	17.571.059.000	2.512.321.156		-	20.083.380.156
522	Kab. Sorong Selatan	46.366.176.000	1.178.428.463		-	47.544.604.463
523	Kab. Teluk Bintuni	431.139.214.000	2.994.001.658		-	434.133.215.658
524	Kab. Teluk Wondama	41.110.174.000	971.253.922		-	42.081.427.922
525	Kab. Kaimana	55.589.239.000	3.353.118.368		-	58.942.357.368
526	Kab. Maybrat	41.310.229.000	544.424.874		-	41.854.653.874
527	Kab. Tambrauw	41.732.385.000	2.150.000		-	41.734.535.000
528	Kab. Manokwari Selatan	45.463.040.000	189.525.488		-	45.652.565.488
529	Kab. Pegunungan Arfak	42.005.839.000	61.372.284		-	42.067.211.284
530	Provinsi Sulawesi Barat	5.909.856.000	1.115.030.171		-	7.024.886.171
531	Kab. Majene	3.380.634.000	4.418.021.930		-	7.798.655.930
532	Kab. Mamuju	5.849.759.000	6.447.910.313		-	12.297.669.313
533	Kab. Polewali Mandar	5.492.282.000	3.433.152.108		-	8.925.434.108
534	Kab. Mamasa	4.112.820.000	212.017.500		-	4.324.837.500
535	Kab. Pasangkayu	10.078.829.000	2.243.870.574		-	12.322.699.574
536	Kab. Mamuju Tengah	8.651.301.000	1.814.515.748		-	10.465.816.748
537	Provinsi Kalimantan Utara	-	1.191.540.351		-	1.191.540.351
538	Kab. Bulungan	-	3.582.728.743		992.402.791	4.575.131.534
539	Kab. Malinau	-	3.268.190.183		-	3.268.190.183
540	Kab. Nunukan	-	5.853.012.553		-	5.853.012.553
541	Kota Tarakan	5.989.927.000	2.066.797.773		-	8.056.724.773
542	Kab. Tana Tidung	122.840.770.000	2.531.740.094		-	125.372.510.094
543	Provinsi Papua Selatan	4.538.790.000	103.214.000		-	4.642.004.000
544	Provinsi Papua Tengah	2.835.288.000	-		-	2.835.288.000
545	Provinsi Papua Pegunungan	2.923.290.000	-		-	2.923.290.000
546	Provinsi Papua Barat Daya	576.427.296.000	66.801.498		-	576.494.097.498

RINCIAN PIUTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Piutang TKD			Piutang TKD Lainnya	Total Piutang Transfer ke Daerah dan Dana Desa
		Dana Bagi Hasil	DAK Non Fisik	Dana Keistimewaan DIY	Dana Desa	
		9.795.347.278.000	2.497.771.161.333	23.865.756.633	80.977.185.711	12.397.961.381.677

RINCIAN ASET KREDIT EKS BPPN

Uraian	Debitur di PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS)	Dikelola Kantor Pusat (debitur ATK)	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi	Saldo 31 Desember 2023 (Audited)
JUMLAH	49.747.446.548.535	33.787.431.802.566	18.142.859.416.330	101.677.737.767.431	-1.416.696.498.634	103.094.434.266.065

1. Aset Kredit Yang Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN *

a Asset Transfer Kit (ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2023 (Audited)	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1.739.162.264	28.099.644.697.025	142.220.062	3.444.454.040.940	1.596.942.202	24.655.190.656.084
Dollar Australia (AUD)	1.219.499	12.259.485.080	1.211.777	12.178.007.814	7.721	81.477.265
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	16.249.812.858	-	(1.236.062.927)	1.785.135	17.485.875.785
Dollar Singapura (SGD)	412.424	4.903.806.936	-	73.968.291	412.424	4.829.838.645
Euro (EUR)	64.285.968	1.081.461.624.790	13.185.666	208.344.485.589	51.100.302	873.117.139.201
Gulden Belanda (NLG)	195.945	1.495.806.650	-	(23.444.515)	195.945	1.519.251.165
Italian Lira (ITL)	777.963.520	6.759.090.194	-	(105.938.553)	777.963.520	6.865.028.746
Mark Jerman (DEM)	1.562.424	13.438.866.692	-	(210.633.983)	1.562.424	13.649.500.674
Poundsterling (GBP)	349.627	7.096.166.287	-	214.404.955	349.627	6.881.761.332
Rupiah (IDR)	16.798.979.239.996	16.798.979.239.996	2.541.596.951.404	2.541.596.951.404	14.257.382.288.592	14.257.382.288.592
Yen Jepang (JPY)	5.708.440.804	590.412.615.430	-	(32.983.370.963)	5.708.440.804	623.395.986.392
Jumlah	16.807.274.617.604	46.632.701.211.936	2.541.753.568.909	6.172.302.408.053	14.265.521.048.695	40.460.398.803.883

b Non Asset Transfer Kit (Non ATK) telah PB/PJPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2023 (Audited)	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	99.114.607	1.601.394.703.683	8.590.956	203.800.055.586	90.523.651	1.397.594.648.098
Dollar Australia (AUD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Singapura (SGD)	1.539.000	18.299.017.800	-	-	-	-
Euro (EUR)	-	-	-	-	-	-
Gulden Belanda (NLG)	-	-	-	-	-	-
Italian Lira (ITL)	-	-	-	-	-	-
Mark Jerman (DEM)	230.000	1.978.297.756	-	-	230.000	2.009.304.592
Poundsterling (GBP)	-	-	-	-	-	-
Rupiah (IDR)	1.493.073.317.359	1.493.073.317.359	73.997.177.967	73.997.177.967	1.419.076.139.392	1.419.076.139.392
Yen Jepang (JPY)	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.493.174.200.966	3.114.745.336.598	74.005.768.923	277.797.233.553	1.419.166.893.043	2.818.680.092.082

*Aset kredit Non ATK telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN

a+b Total

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2023 (Audited)	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi
Dollar Amerika (USD)	1.838.276.871	29.701.039.400.708	150.811.018	3.648.254.096.526	1.687.465.853	26.052.785.304.182
Dollar Australia (AUD)	1.219.499	12.259.485.080	1.211.777	12.178.007.814	7.721	81.477.265
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	1.785.135	16.249.812.858	-	(1.236.062.927)	1.785.135	17.485.875.785
Dollar Singapura (SGD)	1.951.424	23.202.824.736	-	73.968.291	412.424	4.829.838.645
Euro (EUR)	64.285.968	1.081.461.624.790	13.185.666	208.344.485.589	51.100.302	873.117.139.201
Gulden Belanda (NLG)	195.945	1.495.806.650	-	(23.444.515)	195.945	1.519.251.165
Italian Lira (ITL)	777.963.520	6.759.090.194	-	(105.938.553)	777.963.520	6.865.028.746
Mark Jerman (DEM)	1.792.424	15.417.164.448	-	(210.633.983)	1.792.424	15.658.805.266
Poundsterling (GBP)	349.627	7.096.166.287	-	214.404.955	349.627	6.881.761.332
Rupiah (IDR)	18.292.052.557.355	18.292.052.557.355	2.615.594.129.371	2.615.594.129.371	15.676.458.427.984	15.676.458.427.984
Yen Jepang (JPY)	5.708.440.804	590.412.615.430	-	(32.983.370.963)	5.708.440.804	623.395.986.392
Jumlah	18.300.448.818.570	49.747.446.548.535	2.615.759.337.832	6.450.099.641.606	15.684.687.941.738	43.279.078.895.965

2. Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2024	Mutasi	Saldo 31 Desember 2023 (Audited)	KPKNL
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	-	-	-	KPKNL Jakarta I
Setiawan Harjono, Hendarawan Harjon	Bank Aspac (BBKU)	3.545.548.399.548	- 1.409.090.910	3.546.957.490.458	KPKNL Jakarta I
Hindarto Tantular/Anton Tantular	Bank Central Dagang (BBKU)	1.469.211.618.969	- 909.090.909	1.470.120.709.878	KPKNL Jakarta I
Sjamsul Nursalim	Bank Dewa Rutji (BBKU)	-	-	-	KPKNL Jakarta I
Kaharudin Ongko	Bank Arya Panduarta (BBKU)	359.435.826.604	-	359.435.826.604	KPKNL Jakarta I
Sujanto Gondokusumo	Bank Dharmala (BBKU)	800.549.777.850	- 21.704.545.455	822.254.323.305	KPKNL Jakarta I
Kwan Benny Ahadi	Bank Orient (BBKU)	142.512.244.912	-	142.512.244.912	KPKNL Jakarta I
Andri Tedjadharna PT Centris Mekar Lestari Prasetyo Utomo Paul Banuara	Bank Centris (BBKU), PT	4.542.284.242.763	-	4.542.284.242.763	KPKNL Jakarta I
Baringin Marulam Hasiholan Panggabe	Bank Namura	168.780.363.636	- 1.363.636.364	170.144.000.000	KPKNL Jakarta II
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	4.893.525.874.669	-	4.893.525.874.669	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	66.770.254.545	- 3.689.745.455	70.460.000.000	KPKNL Jakarta II
Santoso Sumali	Bank Bahari	401.640.027.273	-	401.640.027.273	KPKNL Jakarta II
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	509.986.363.636	-	509.986.363.636	KPKNL Jakarta II
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000	-	136.430.000.000	KPKNL Jakarta II
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.694.000.000	- 100.000.000	596.794.000.000	KPKNL Jakarta II
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000	-	4.308.730.000.000	KPKNL Jakarta II
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.675.636.364	-	577.675.636.364	KPKNL Jakarta V
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000	-	155.727.000.000	KPKNL Jakarta V
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000	-	790.557.000.000	KPKNL Jakarta V
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	106.292.363.636	- 198.000.000.000	304.292.363.636	KPKNL Jakarta V
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182	-	188.483.118.182	KPKNL Jakarta V
Samadikun Hartono	Bank Modern	2.301.633.133.695	-	2.301.633.133.695	KPKNL Jakarta V
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	7.724.964.556.283	- 2.229.028.818	7.727.193.585.101	KPKNL Jakarta V
Jumlah		33.787.431.802.566	(229.405.137.911)	34.016.836.940.477	

3. a) Dikelola Kantor Pusat (Debitur ATK)

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2023 (Audited)	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi
Rupiah (IDR)	4.540.309.100.921	4.540.309.100.921	(3.136.820.852.200)	(3.136.820.852.200)	7.677.129.953.121	7.677.129.953.121
Dollar Amerika (USD)	625.817.199	10.111.328.478.103	(308.083.037)	(4.307.157.258.708)	933.900.236	14.418.485.736.811
Dollar Australia (AUD)	121.006	1.216.460.007	(1.362.937)	(14.442.937.537)	1.483.943	15.659.397.544
Dollar Hongkong (HKD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Selandia Baru (NZD)	-	-	-	-	-	-
Dollar Singapura (SGD)	-	-	(984.813)	(11.532.999.312)	984.813	11.532.999.312
Euro (EUR)	77.700	1.307.121.459	(11.481.139)	(196.191.131.700)	11.558.839	197.498.253.159
Gulden Belanda (NLG)	-	-	-	-	-	-
Poundsterling (GBP)	-	-	-	-	-	-
Yen Jepang (JPY)	998.413.744	103.263.936.714	(11.240.949)	(6.996.413.689)	1.009.654.693	110.260.350.404
Krona Swedia (SEK)	-	-	-	-	-	-
Krone Denmark (DKK)	-	-	-	-	-	-
Mark Jerman (DEM)	-	-	-	-	-	-
Franc Perancis (FRF)	-	-	-	-	-	-
Ringgit Malaysia (MYR)	-	-	(173.080)	(582.301.698)	173.080	582.301.698
Italian Lira (ITL)	-	-	-	-	-	-
Koreksi BPK ATK Hasil Inven		707.275.017.557				707.275.017.557
Jumlah		15.464.700.114.762	(3.137.154.178.156)	(7.673.723.894.844)	7.679.087.708.725	23.138.424.009.606

b) ATK Lainnya

	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 nilai konversi	Mutasi Mata Uang	Mutasi konversi	Saldo 31 Desember 2023 (Audited)	Saldo 31 Desember 2023 nilai konversi
Koreksi ATK yang tercatat non ATK	Rupiah	271.003.330.924	271.003.330.924	-		271.003.330.924	271.003.330.924
Koreksi ATK sesuai LHP BPK TA 2012	Rupiah	1.980.529.395.026	1.980.529.395.026	-		1.980.529.395.026	1.980.529.395.026
	Dollar Amerika	26.403.989	426.609.244.618	-	18.958.063.851	26.403.989	407.651.180.767
Eraska Tristi	Rupiah	-	-	(893.182.300)		893.182.300	893.182.300
PT Teratai Mahkota	Rupiah	17.331.000	17.331.000	-		17.331.000	17.331.000
Total		2.251.576.460.939	2.678.159.301.568	(893.182.300)	18.958.063.851	2.252.469.643.239	2.660.094.420.018

Catatan		Kurs Penutup JISDOR	
Kurs Mata Uang Asing		31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Dollar Amerika (USD)	16.157,00	15.439,00
2	Dollar Australia (AUD)	10.053	10.553
3	Dollar Hongkong (HKD)	2.081	1.976
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	9.103	9.795
5	Dollar Singapura (SGD)	11.890	11.711
6	Euro (EUR)	16.823	17.086
7	Gulden Belanda (NLG)	7.634	7.753
8	Poundsterling (GBP)	20.296	19.683
9	Rupiah (IDR)	1	1
10	Yen Jepang (JPY)	103	109
11	Deutschmark (DEM)	8.601	8.736
12	Krona Swedia (SEK)	1.469	1.546
13	Krone Denmark (DKK)	2.256	2.292
14	Franc Perancis (FRF) **)	2.565	2.605
15	Ringgit Malaysia (MYR)	3.612	3.364
16	Italian Lira (ITL) ***)	9	9

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total (31 Desember 2024)	Mutasi	Grand Total (31 Desember 2023)
TOTAL	98.867.673.004.271	1.922.101.357.860	100.789.774.362.132	2.139.530.500.148	98.650.243.861.984

1. Debitur Yang Telah Diserahkan Pengurusan Piutang Negeranya kepada PUPN

Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 (Nilai Konversi)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 (Nilai Konversi)
Dollar Amerika	4.012.653.675	64.832.445.423.010	(5.952.934)	2.789.177.997.087	4.018.606.608	62.043.267.425.924
Dollar Singapore	79.397	944.051.560	-	14.239.933	79.397	929.811.627
Rupiah	34.013.153.574.654	34.013.153.574.654	(24.943.178.709)	(24.943.178.709)	34.038.096.753.363	34.038.096.753.363
Yen Jepang	141.216.723	14.605.763.175	-	(815.950.223)	141.216.723	15.421.713.397
Deutchmark	758.513	6.524.191.872	758.513	6.524.191.872	-	-
Jumlah		98.867.673.004.271		2.769.957.299.960		96.097.715.704.312

2. Debitur Dikelola Kantor Pusat DJKN c.q. Direktorat PKN

(dalam rupiah)

Nama Debitur	Bank Asal	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 (Nilai Konversi)	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2023 (Nilai Konversi)
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0,00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0,00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0,00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0,00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	BBD (Mandiri)	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0,00
Dirgantara Indonesia PT (Demand Loan Normal Biasa)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	-	-	(55.151.171.715)	55.151.171.715
Dirgantara Indonesia PT (Kredit Investasi -Non KUK)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	-
Dirgantara Indonesia PT (Demand Loan Normal Biasa)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	-	-	(616.943.787.670)	616.943.787.670
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	Mandiri	Rupiah (IDR)	-	-	-	0,00
Dirgantara Indonesia PT (Komitmen Bank Garansi)	Mandiri	Dollar Amerika (USD)	-	-	-	0,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	91.489.249.097	91.489.249.097	-	91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	1.212.685.353.878	1.212.685.353.878	-	1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	-	0,00
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	-	0,00
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	Rupiah (IDR)	-	-	-	0,00
PT Tuban Petrochemical Industries*	MCB & MYB	Rupiah (IDR)	407.229.911.873	407.229.911.873	(71.781.102.019)	479.011.013.892,00
Jumlah		Rupiah (IDR)	1.711.404.514.848	1.711.404.514.848	(743.876.061.404)	2.455.280.576.252
		Dollar Amerika (USD)	-	-	(43.532.286)	43.532.286

*Piutang yang tidak terkonversi berupa denda dan penalti MYB Tuban Petro selama 10 tahun

3. Group Texmaco (dalam perkara)*

No.	Debitur	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 (Nilai Konversi)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 (Nilai Konversi)
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
3	Texmaco Jaya, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
4	Wastra Indah, PT	Rupiah	-	-	-	-	-	-
5	PT Bina Prima Perdana	Rupiah	-	-	-	-	-	-
		Dollar Amerika	-	-	-	-	-	-
Jumlah				-		-		-

* telah dilakukan penyerahan ke PUPN

4. Debitur eks kelolaan PT PPA sesuai LHP BPK tahun anggaran 2013

No	Nama debitur	Mata uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2023
1	PT Citra Makmur Asia	Rupiah	24.561.586.875	24.561.586.875
2	Abdul Hadi	Rupiah	4.911.933	4.911.933
3	Faridah	Rupiah	2.528.941	2.528.941
4	Haryanto	Rupiah	59.267	59.267
5	Zainal Abidin	Rupiah	252.041	252.041
Jumlah			24.569.339.058	24.569.339.058

5. Debitur Dikembalikan ke Kantor Pusat

NO	Mata Uang	Saldo 31 Desember 2024	Saldo 31 Desember 2024 (Nilai Konversi)	Mutasi Mata Uang	Mutasi Konversi	Saldo 31 Desember 2023	Saldo 31 Desember 2023 (Nilai Konversi)
1	Rupiah (IDR)	71.578.010.895	71.578.010.895	16.926.920.499	16.926.920.499	54.651.090.396	54.651.090.396
2	Dollar Amerika (USD)	7.089.775	114.549.493.059	5.922.138	96.522.341.093	1.167.637	18.027.151.966
JUMLAH			186.127.503.954		113.449.261.592		72.678.242.362

Catatan		Kurs Penutup JISDOR	
No.	Kurs Mata Uang Asing	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Dollar Amerika (USD)	16.157,00	15.439,00
2	Dollar Australia (AUD)	10.052,89	10.552,56
3	Dollar Hongkong (HKD)	2.081,10	1.976,08
4	Dollar Selandia Baru (NZD)	9.102,85	9.795,27
5	Dollar Singapura (SGD)	11.890,20	11.710,85
6	Euro (EUR)	16.822,67	17.086,34
7	Gulden Belanda (NLG)	7.633,79	7.753,44
8	Poundsterling (GBP)	20.296,42	19.683,18
9	Rupiah (IDR)	1,00	1,00
10	Yen Jepang (JPY)	103,43	109,21
11	Deutschmark (DEM)	8.601,29	8.736,11
12	Krona Swedia (SEK)	1.468,90	1.545,96
13	Krone Denmark (DKK)	2.255,71	2.292,35
14	Franc Perancis (FRF **)	2.564,60	2.604,80
15	Ringgit Malaysia (MYR)	3.611,71	3.364,35
16	Italian Lira (ITL) ***)	8,69	8,82

HAK TAGIH PEMERINTAH KEPADA BANK DALAM LIKUIDASI (PIUTANG EKS BDL)

No	Asal Bank BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980					Total Pengembalian s.d. 2024	Saldo Hak Tagih 2024
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2023	Pengembalian Periode Semester I 2024	Pengembalian Periode Triwulan III 2024	Pengembalian Periode Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = Jumlah 4 s.d. 8	11 = 3 - 9
BDL eks Dana Talangan									
1	PT. Bank Anrico	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	63.649.241.724,78	6.183.050,00		6.183.050,00	73.188.382.114,85	136.892.346.260,88
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	58.508.260.652,21	30.984.153,00	97.635.473,00	128.619.626,00	242.191.888.278,21	8.863.119.721,79
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	108.390.325.380,52	147.057.584,00	73.369.619,00	220.427.203,00	694.338.809.082,52	3.171.843.503.769,55
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	10.211.869.007,00	258.691.594,00		258.691.594,00	35.568.749.438,19	166.233.417.497,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	54.060.305.415,83	43.068.182,00	574.034.092,00	617.102.274,00	101.549.609.760,83	100.263.004.530,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	10.099.486.567,00			-	41.285.486.567,00	295.477.723.299,98
7	PT. Bank Pasific	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	318.506.781.070,96	1.227.272.730,00	1.818.181.816,00	3.045.454.546,00	653.575.311.884,76	1.479.791.122.954,87
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	460.805.430.458,15	9.930.173.075,00	120.660.095.299,00	130.590.268.374,00	1.448.782.916.225,80	238.566.599.146,73
9	PT. South East Asia Bank	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	102.264.315.664,79		10.125.038.710,00	10.125.038.710,00	211.692.073.755,68	687.706.949.550,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	28.025.558.872,00			-	34.995.693.472,00	75.110.303.658,87
11	PT. Astria Raya Bank	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	154.446.336.765,42	28.724.776.638,00	98.460.926.218,00	127.185.702.856,00	413.581.643.221,42	165.336.617.477,35
12	PT. Bank Pinaesaan	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	50.268.546.351,52	935.891.619,00	25.438.363,00	961.329.982,00	69.686.556.433,83	611.397.934.485,95
13	PT. Bank Jakarta	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	90.034.069.938,00			-	210.993.999.999,67	0,33
14	PT. Bank Industri	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	85.523.065.535,00	199.881.717,00	320.818.182,00	520.699.899,00	365.167.765.434,00	146.302.463.892,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00			-	2.500.000.000,00	6.054.789.642,67
Total BDL Eks Dana Talangan		11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	1.594.793.593.403,18	41.503.980.342,00	232.155.537.772,00	273.659.518.114,00	4.599.098.885.668,56	7.289.839.895.889,72

No	Asal Bank BDL	Jumlah Hak Tagih Atau Saldo Awal	Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000980					Total Pengembalian s.d. 2024	Saldo Hak Tagih 2024
			Pengembalian s.d Desember 2006	Pengembalian Periode Tahun 2007 s.d. 2023	Pengembalian Periode Semester I 2024	Pengembalian Periode Triwulan III 2024	Pengembalian Periode Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	10 = Jumlah 4 s.d. 9	11 = 3 - 10
BDL eks Dana Penjaminan									
1	PT Bank Asiatic	886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	84.731.677.428,00		9.084.546,00	9.084.546,00	89.740.761.974,00	796.838.462.469,83
2	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.911.477,24	-	517.855.871.478,00	5.837.812.099,00	29.114.653.592,00	34.952.465.691,00	552.808.337.169,00	778.708.574.308,24
3	PT Bank Global Internasional	804.234.270.395,51	-	379.856.849.432,42		836.531.730,00	4.688.531.730,00	384.545.381.162,42	419.688.889.233,09
4	PT Bank Ratu	71.817.985.352,00	-	71.817.985.352,00			-	71.817.985.352,00	0,00
5	PT Bank Prasadha Utama	227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	16.898.914.545,52		1.482.063.215,00	1.482.063.215,00	22.380.977.760,52	204.753.581.383,48
Total BDL Eks Dana Penjaminan		3.321.282.950.812,58	9.000.000.000,00	1.071.161.298.235,94	5.837.812.099,00	31.442.333.083,00	41.132.145.182,00	1.121.293.443.417,94	2.199.989.507.394,64

TOTAL SALDO PIUTANG BDL		15.210.221.732.370,90	TOTAL PIUTANG EKS BANK DALAM LIKUIDASI		47.341.792.441,00	263.597.870.855,00	314.791.663.296,00	5.720.392.329.086,50	9.489.829.403.284,36

PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
PER 31 DESEMBER 2024

No	Uraian	Formula Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih			Keterangan
			Saldo 31 Desember 2024	Nilai Agunan/ <i>Recovery Rate</i>	Jumlah Penyisihan	
1	Aset kredit eks BPPN					Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/KMK.6/2014
	a. Selain Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	Saldo piutang 31 Desember 2024 - (Saldo piutang 31 Desember 2024 x <i>Recovery Rate</i>)	67.890.305.964.863		75.449.324.468.614	
	b. Tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2024 - nilai agunan)	33.787.431.802.566	5.749.644.429.724	28.037.787.372.842	
2	Aset kredit eks kelolaan PT PPA	Saldo piutang 31 Desember 2024 - (Saldo piutang 31 Desember 2024 x <i>Recovery Rate</i>)	100.789.774.362.132		99.564.950.535.018	
3	Aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA	Saldo piutang 31 Desember 2024 - (Saldo piutang 31 Desember 2024 x <i>Recovery Rate</i>)	-	-	-	
4	Piutang eks BDL	100% x (Saldo piutang 31 Desember 2024 - nilai agunan)	9.489.829.403.284	949.304.297.559	8.540.525.105.725	Peraturan Menteri Keuangan No.69/PMK.06/2014
5	Piutang pada PT PPA	5% x (saldo piutang 31 Desember 2024)	-	-	-	
Jumlah			211.957.341.532.845	6.698.948.727.284	211.592.587.482.199	

ASET INVENTARIS EKS BPPN

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2023		Mutasi Tahun 2024		Saldo 31 Desember 2024	
		Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar	Jumlah	Nilai Wajar
1	Aset Inventaris	10.238	5.298.590.721	(179)	(88.973.924)	10.059	5.209.616.797
	a. Digunakan Instansi	9.676	5.157.887.353	(179)	(88.904.676)	9.497	5.068.982.677
	b. Tidak Digunakan (<i>idle</i>)	562	140.703.368	0	(69.248)	562	140.634.120

ASET INVENTARIS EKS BPPN YANG DIPERGUNAKAN INSTANSI PEMERINTAH

No.	Instansi Yang Menggunakan	Saldo Per 31 Desember 2023		Mutasi Tahun 2024		Saldo Per 31 Desember 2024	
		Jumlah Aset (unit)	Nilai	Jumlah Aset (unit)	Nilai	Jumlah Aset (unit)	Nilai
1	Kantor Pusat DJKN	1.629	459.420.000	(8)	(8.837.000)	1.621	450.583.000
2	KPKNL Jakarta IV	17	5.200.000	-	-	17	5.200.000
3	KPKNL Pekalongan	76	32.452.700	(76)	(32.452.700)	-	-
4	KPKNL Tangerang	16	3.994.684	(15)	(3.925.436)	1	69.248
5	Komisi Hukum Nasional	239	49.532.000	-	-	239	49.532.000
6	POLRI	18	33.700.000	-	-	18	33.700.000
7	Menko Perekonomian	-	-	-	-	-	-
8	TU Menteri Depkeu	-	-	-	-	-	-
9	KPK	2	1.519.950	-	-	2	1.519.950
10	TIMTAS TIPIKOR	167	51.056.622	-	-	167	51.056.622
11	DJAPK	133	86.748.000	-	-	133	86.748.000
12	Biro Umum, Depkeu	135	24.205.697	(4)	(8.613.000)	131	15.592.697
13	Bapeki/BKF	425	176.375.000	-	-	425	176.375.000
14	Biro Hukum, Depkeu	240	128.865.000	-	-	240	128.865.000
15	Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan	68	69.719.582	-	-	68	69.719.582
16	KPPN Sidoarjo	3	2.400.000	-	-	3	2.400.000
17	KPPN Pamekasan	98	12.244.749	-	-	98	12.244.749
18	KPPN Tuban	85	20.245.886	-	-	85	20.245.886
19	KPPN Pacitan	12	4.800.000	-	-	12	4.800.000
20	KPPN Bondowoso	126	7.425.000	-	-	126	7.425.000
21	Depkumham	230	61.152.532	-	-	230	61.152.532
22	Kanwil DJPBN Denpasar	202	11.770.000	-	-	202	11.770.000
23	Hibah melalui Menkominfo	-	-	-	-	-	-
24	Biro Perlengkapan, Setjen Depkeu	23	7.116.414	-	-	23	7.116.414
25	Gudang Ciledug, Biro Umum Setjen	1.465	440.788.055	-	-	1.465	440.788.055
26	Gudang Jati Uwung, Biro Umum Setjen	3.959	3.411.977.907	-	-	3.959	3.411.977.907
27	Gedung D lantai 20 eks LPS (Gd.A Lt.2) DJPK	135	15.563.068	-	-	135	15.563.068
28	Jl. Raden Intan, Lampung (Kanwil V DJKN)	86	3.367.967	-	-	86	3.367.967
29	Jl. Diponegoro 30A, Medan (Kanwil II DJKN)	1	4.099.613	(1)	(4.099.613)	-	-
30	Kanwil XI DJKN, GKN II, Jl. Dinoyo Surabaya	75	30.976.927	(75)	(30.976.927)	-	-
31	Jl. A Yani No.68 GKN, (KPPN Balikpapan)	11	1.170.000	-	-	11	1.170.000
JUMLAH		9.676	5.157.887.353	(179)	(88.904.676)	9.497	5.068.982.677

ASET INVENTARIS EKS BPPN YANG TIDAK DIGUNAKAN (/IDLE)

No.	Lokasi Aset	Saldo Per 31 Desember 2024	
		Jumlah Aset (unit)	Nilai Wajar (Rp)
1	Gedung Pondok Indah	0	0
2	Gudang Cut Mutia	0	0
3	Gudang Tabrani	0	0
4	Gudang Aspac	0	0
5	Gudang Semanan Blok A-5	0	0
6	Gudang Semanan Blok A-10	0	0
7	Gudang Semanan Blok A-11	0	0
8	Gudang Semanan Blok A-15	0	0
9	Gudang Semanan Blok A-8	0	0
10	Gudang Semanan Blok B-6	0	0
11	Gudang Semanan Blok B-8	0	0
12	Gudang Semanan Blok B-9	0	0
13	Gudang Balindo	0	0
14	Tim TKAAG Gedung PAIK	0	0
15	Gedung Danahutama	5	13.000.000
16	Jl. Ikan Bawal, Lampung	0	0
17	Jl. A Yani 102A, Medan (eks Unibank)	0	0
18	Jl. Pemuda No.18, Medan (eks Pesona)	0	0
19	Jl. Industri, Tanjung Morawa, Medan	0	0
20	Jl. Kol. Sugiono 3 FGH, Medan (eks Dharmala)	0	0
21	Jl. Yos Sudarso 60 AA BB, Medan (eks Unibank)	0	0
22	Jl. Jend. Gatot Subroto 285 Medan (eks Unibank)	0	0
23	Jl. Pusat Pasar 98 Medan (eks Unibank)	0	0
24	Jl. Canaya Raya Blok D/3, Medan (eks Unibank)	3	159.174
25	Tanjung Morawa, Medan (eks Pabrik Rotan)	0	0
26	Jl. Yos Sudarso 219 Medan (eks BUN)	0	0
27	Jl. Jend. Gatot Subroto 81 Medan (eks Dharmala)	0	0
28	Jl. Pemuda, Semarang	0	0
29	Jl. Raya Darmo Surabaya (eks BUS)	340	92.939.886
30	Jl. Wijaya Kusuma Sby (eks Bank Papan)	214	34.535.060
31	Jl. A Yani, Bandung	0	0
32	Jl. Tanjungpura, Pontianak	0	0
33	Jl. Diponegoro No.148, Denpasar	0	0
34	Jl. Selaparang, Lombok	0	0
35	Jl. Sultan Hasanudin, Makassar	0	0
36	Jl. Sam Ratulangi, Manado	0	0
37	Jl. Jend. Sudirman, Pekanbaru	0	0
38	Jl. Imam Bonjol Blok A, Batam	0	0
39	Eks TL Bank Prasadha (Lantai 2 & 7 Gd. PAIK)	0	0
Jumlah		562	140.634.120

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Neraca (Temuan BPK)	Jl Ir H Juanda No 36, Medan	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Medan No LAP-0318/1/PRO-06/KNL0201/050000/2023 tanggal 14 November 2023	1	15.405.920.000	-	13.863.430.000	1	29.269.350.000
2	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Jalan Bintaran Kulon No. 6A, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Penyerahkelolaan ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 180/KN/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan BAST No. BA-2/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	1	565.182.344	(1)	(565.182.344)	-	-
3	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Jalan Sultan agung No. 6, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Penyerahkelolaan ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 180/KN/2023 tanggal 18 Desember 2023 dan BAST No. BA-2/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	1	402.911.851	(1)	(402.911.851)	-	-
4	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Perumahan T.Kebun Jeruk Blok T, Kelurahan Srengseng (d/h Desa Meruya Udik), Kecamatan Kembangan (d/h Kecamatan Kebon), Jakarta Barat	PSP kepada Kementerian Pertahanan sesuai Kepdirjen Nomor 29/KN/2024 tanggal 23 Februari 2024 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024.	1	602.227.045.000	(1)	(602.227.045.000)	-	-
5	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Anjasmoro, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	PSP kepada Kejaksaan RI sesuai Kepdirjen KN No. KEP-169/KN/2023 tanggal 24 November 2023 dan BA-56/KN/2024 tanggal 27 Maret 2024	1	71.635.123.000	(1)	(71.635.123.000)	-	-
7	Neraca (Covernote)	Jalan Basuki Rahmat No. 49-51, Embong Kaliasin, Surabaya	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Surabaya nomor LAP-0101/1/PRO-01/KNL.1001/01.01.00/2024 tanggal 6 Mei 2024. selanjutnya dilakukan serah kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 106/KN/2024 tanggal 11 September 2024 dan BAST nomor BA-15/KN.4/2024 tanggal 23 September 2024	1	195.776.000.000	(1)	(195.776.000.000)	-	-
8	Neraca (Covernote)	Jalan Basuki Rahmat No. 49-51, Embong Kaliasin, Surabaya		1		(1)		-	-
9	Neraca (Covernote)	Jalan Basuki Rahmat No. 49-51, Embong Kaliasin, Surabaya		1		(1)		-	-

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
10	Neraca (Covernote)	Jalan Basuki Rahmat No. 49-51, Embong Kaliasin, Surabaya		1		(1)		-	-
11	Neraca (Sinar Bonana)	Jalan K.H Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	Penambahan 117 (seratus tujuh belas) aset sesuai dengan dokumen APHAT dan perubahan nilai aset. Selanjutnya PSP kepada Kementerian Pertahanan sesuai Kepdirjen Nomor 65/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024.	40	92.595.052.673	(40)	(92.595.052.673)	-	-
12	Neraca (Sinar Bonana)	Jalan K.H Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	perubahan nilai, pemecahan dari nilai sebelumnya	1	44.983.894.101	-	-	1	44.983.894.101
13	Neraca (Sinar Bonana)	Jalan K.H Mas Mansyur, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat	perubahan nilai, pemecahan dari nilai sebelumnya	1	1.629.453.225	-	-	1	1.629.453.225
14	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Cilandak KKO Nomor 52, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	PSP kepada Badan Siber dan Sandi Negara sesuai KEP-105/KN/2024 tanggal 11 September 2024 (Belum BAST).	2	34.880.762.000	-	-	2	34.880.762.000
17	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Komplek Ruko Kota Grogol Permai Blok A 5-6, Jalan Latumenten No.19, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	PSP kepada Badan Intelijen Negara (BIN) sesuai Kepdirjen No. 129/KN/2023 tanggal 10 September 2023 dan BAST nomor BAST tanggal 5 Juli 2024	1	4.580.857.000	(1)	(4.580.857.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
18	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	27 bidang tanah yang terletak di Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang Provinsi Banten	PSP kepada Kemenhan sesuai Kepdirjen KN No. KEP-186/KN/2023 tanggal 28 Desember 2023 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024.	27	143.754.254.000	(27)	(143.754.254.000)	-	-
19	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Denpasar nomor LAP-0175/1/PRO-01/KNL.1401/01.01.00/2024 tanggal 9 Juli 2024	1	10.840.750.000	-	465.566.000	1	11.306.316.000
20	Neraca (BJDA Verifikasi 2009)	Jl. Cimuncang, Cibeunying Kidul, Bandung	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Bandung nomor LAP-0186/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2024 tanggal 25 Juni 2024	1	26.981.105.700	-	5.722.772.300	1	32.703.878.000
21	Neraca (Temuan BPK)	Kelurahan Pakowa, Kecamatan Sario, Kota Manado	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Manado nomor LAP-0322/1/PRO-01/KNL.1601/01.03.00/2024 tanggal 5 Agustus 2024	1	390.488.000	-	340.604.000	1	731.092.000
22	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0467/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	118.437.678.000	-	(9.792.656.000)	1	108.645.022.000
23	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Sirojul Huda	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0468/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	2.106.000.000	-	(57.492.000)	1	2.048.508.000
24	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0469/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	473.000.000	-	(2.269.000)	1	470.731.000
25	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0470/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	295.200.000	-	(24.782.000)	1	270.418.000
26	Neraca (Temuan BPK)	Kampung Pasir, Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0471/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	422.600.000	-	11.935.000	1	434.535.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
27	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0472/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.128.200.000	-	19.750.000	1	1.147.950.000
28	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0473/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	632.900.000	-	6.001.000	1	638.901.000
29	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0474/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	139.000.000	-	(29.015.000)	1	109.985.000
30	Neraca (Temuan BPK)	Kampung Pasir, Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0475/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	135.400.000	-	3.954.000	1	139.354.000
31	Neraca (Temuan BPK)	Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0476/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	537.300.000	-	1.313.612.000	1	1.850.912.000
32	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0477/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	118.800.000	-	(11.855.000)	1	106.945.000
33	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0478/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	228.600.000	-	(24.126.000)	1	204.474.000
34	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0479/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	912.400.000	-	(526.259.000)	1	386.141.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
35	Neraca (Temuan BPK)	Kampung Pasir, Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0480/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	112.500.000	-	(11.224.000)	1	101.276.000
36	Neraca (Temuan BPK)	Prumahan Kemang Bogor Raya, Jalan Batu Krisolit	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0481/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	819.000.000	-	2.933.377.000	1	3.752.377.000
37	Neraca (Temuan BPK)	Kampung Banteng. Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0482/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	936.900.000	-	(253.284.000)	1	683.616.000
38	Neraca (Temuan BPK)	Kampung Banteng. Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0483/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.447.200.000	-	(451.502.000)	1	995.698.000
39	Neraca (Temuan BPK)	Kampung Banteng. Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0484/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	522.900.000	-	357.572.000	1	880.472.000
40	Neraca (Temuan BPK)	Prumahan Kemang Bogor Raya, Jalan Batu Jamrud	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0485/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	545.400.000	-	1.809.549.000	1	2.354.949.000
41	Neraca (Temuan BPK)	Prumahan Kemang Bogor Raya, Jalan Batu Merah D	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0486/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	722.700.000	-	2.589.325.000	1	3.312.025.000
42	Neraca (Temuan BPK)	Prumahan Kemang Bogor Raya, Jalan Batu Merah D	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0487/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.104.300.000	-	3.701.560.000	1	4.805.860.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
43	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya, Kelurahan Tanah Ba	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0488/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	16.573.600.000	-	122.144.939.000	1	138.718.539.000
44	Neraca (Temuan BPK)	Kampung Pasir, Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0489/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	5.554.800.000	-	(1.014.609.000)	1	4.540.191.000
45	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0490/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	12.840.300.000	-	33.580.435.000	1	46.420.735.000
46	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Kampung Pasir, Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0491/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	2.487.600.000	-	(622.827.000)	1	1.864.773.000
47	Neraca (Temuan BPK)	Jalan Danau Bogor Raya, Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0492/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	4.488.300.000	-	24.705.264.000	1	29.193.564.000
48	Neraca (Temuan BPK)	Kampung Pasir, Kelurahan Katulampa	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0493/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	62.950.500.000	-	144.311.142.000	1	207.261.642.000
49	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH XII Nomor 9	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0494/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	403.800.000	-	874.504.000	1	1.278.304.000
50	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH VII Nomor 2	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0495/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	369.800.000	-	800.979.000	1	1.170.779.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
51	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I1 No.5	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0496/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.363.200.000	-	3.248.594.000	1	4.611.794.000
52	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH VII Nomor 5	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0497/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	369.800.000	-	800.979.000	1	1.170.779.000
53	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I1 No.8	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0498/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.363.200.000	-	3.248.594.000	1	4.611.794.000
54	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I6 Nomor 21	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0499/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	817.500.000	-	1.769.248.000	1	2.586.748.000
55	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH XII Nomor 12	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0500/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	345.800.000	-	749.074.000	1	1.094.874.000
56	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 Nomor 26	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0501/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	587.700.000	-	1.272.324.000	1	1.860.024.000
57	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 No. 12	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0502/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	631.600.000	-	1.367.486.000	1	1.999.086.000
58	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I6 Nomor 17	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0503/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	517.700.000	-	1.121.053.000	1	1.638.753.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
59	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH XII Nomor 12	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0504/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	433.800.000	-	939.370.000	1	1.373.170.000
60	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH XII Nomor 8	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0505/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	321.800.000	-	697.163.000	1	1.018.963.000
61	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 Nomor 24	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0506/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	587.700.000	-	1.272.324.000	1	1.860.024.000
62	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I6 Nomor 20	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0507/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	503.700.000	-	1.109.762.000	1	1.613.462.000
63	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I1 No. 12	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0508/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.341.200.000	-	3.196.486.000	1	4.537.686.000
64	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I 6 Nomor 23	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0509/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	503.700.000	-	1.090.793.000	1	1.594.493.000
65	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH XII Nomor 11	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0510/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	323.800.000	-	701.489.000	1	1.025.289.000
66	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I6 Nomor 18	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0511/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	284.500.000	-	1.335.285.000	1	1.619.785.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
67	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 No. 19	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0512/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	579.700.000	-	1.255.038.000	1	1.834.738.000
68	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 No. 20	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0513/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	581.700.000	-	1.259.359.000	1	1.841.059.000
69	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I6 Nomor 19	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0514/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	505.700.000	-	1.095.116.000	1	1.600.816.000
70	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 No. 18	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0515/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	563.700.000	-	1.220.464.000	1	1.784.164.000
71	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 No. 3A	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0516/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	595.700.000	-	1.289.609.000	1	1.885.309.000
72	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 Nomor 25	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0517/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	581.700.000	-	1.259.359.000	1	1.841.059.000
73	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH XII Nomor 10	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0518/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	375.800.000	-	813.955.000	1	1.189.755.000
74	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 Nomor 23	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0519/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	581.700.000	-	1.259.359.000	1	1.841.059.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
75	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok TH XII Nomor 12	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0520/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	333.800.000	-	723.119.000	1	1.056.919.000
76	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 No. 22	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0521/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	581.700.000	-	1.259.359.000	1	1.841.059.000
77	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok I3 No. 17	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0522/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	551.700.000	-	1.194.533.000	1	1.746.233.000
78	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0523/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	51.343.700.000	-	300.452.944.000	1	351.796.644.000
79	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok N Nomor 13	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0524/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.890.000.000	-	5.188.882.000	1	7.078.882.000
80	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok K Nomor 28	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0525/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	2.743.400.000	-	4.649.495.000	1	7.392.895.000
81	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok K Nomor 18	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0526/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.207.800.000	-	3.215.918.000	1	4.423.718.000
82	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok N Nomor 15	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0527/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	2.014.200.000	-	5.525.596.000	1	7.539.796.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
83	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok N Sport Club	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0528/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	27.448.900.000	-	83.381.294.000	1	110.830.194.000
84	Neraca (Temuan BPK)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok A6	update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0529/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024 Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	10.592.100.000	-	32.387.396.000	1	42.979.496.000
85	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	GRAHA BINTARO, ALAMAT HASIL CEK FISIK 2010 : BLOK GR19/03, GR03/86, GR24/10, GR24/20, E10/1, E10/03, E10/07, E10/17, E10/17, E10/19, E1023, E10/25, E10/27, G04/07, E10/1, E10/03, E10/07, F03/16, HE03/18, HE03/19, HE04/01, HE04/02, HE05/01, HE05/02, HF01/14, HF02/01, HF01/02, HF02/28, HF02/29, GR21/81, PONDOK KACANG BARAT	Pemecahan menjadi 03.01.02.00000739-A, 03.01.02.00000739-B, 03.01.02.00000739-C, dan 03.01.02.00000739-D	29	2.062.992.484	(29)	(2.062.992.484)	-	-
86	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	GRAHA BINTARO, ALAMAT BLOK GR24/10, GR24/20, E10/1, E10/03, E10/07, E10/17, E10/19, E1023, E10/25, E10/27, E10/1, E10/03, E10/07, F03/16, HE03/18, HE03/19, HE04/01, HE04/02, HE05/01, HE05/02, HF01/14, HF02/01, HF01/02, HF02/28, HF02/29, GR21/81, PONDOK KACANG BARAT	Pemecahan menjadi dari 03.01.02.00000739. Perubahan nilai berdasarkan laporan penilaian KPKNL Tangerang II. Selanjutnya PSP 3 (tiga) bidang aset ke Kementerian keuangan sesuai Kepdirjen nomor KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024	-	-	26	33.859.507.000	26	33.859.507.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
87	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Blok G 04 No 07 Paku Jaya Serpong Tangerang Jawa Barat	Pemecahan menjadi dari 03.01.02.00000739 dengan penyesuaian nilai	-	-	1	60.563.153	1	60.563.153
88	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Blok E 10 No 17 Paku Jaya Serpong Tangerang Jawa Barat	Pemecahan menjadi dari 03.01.02.00000739 dengan penyesuaian nilai	-	-	1	43.740.055	1	43.740.055
89	Neraca (BJDA Verifikasi 2011)	Blok GR.03 No 86 Pondok Aren Pondok Kacang Barat Tangerang Jawa Barat	Pemecahan menjadi dari 03.01.02.00000739 dengan penyesuaian nilai	-	-	1	62.485.793	1	62.485.793
90	Neraca (Temuan BPK)	Komplek Ruko Segitiga Emas Blok B No.18 Jl. A. Tani No.221-223, Merdeka, Sumurbatu	PSP ke Ombudsman RI sesuai Kepdirjen nomor KEP-142/KN/2024 tanggal 11 Desember 2024 (Belum BAST)	1	3.137.178.000	-	-	1	3.137.178.000
91	Neraca (Temuan BPK)	Jl. Stasiun Senen No. 60A, Gn. Sahari Selatan, KEMAYORAN	Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 (Belum BAST)	1	628.000.000	-	-	1	628.000.000
92	Neraca (Covernote)	Kalimo'ok, Sumenep, -	Laku terjual pada masa PPAP 4.3 dan RL nomor 115/94-95 tanggal 11 Juli 1994	2	542.314.376	(2)	(542.314.376)	-	-
Jumlah				180	1.603.835.661.755	(78)	(262.030.247.427)	102	1.341.805.414.328

JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS BPPN

No.	KOREKSI	Saldo Per 31 Desember 2023		Mutasi Tahun 2024		Saldo Per 31 Desember 2024	
		Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	BJDA (Verifikasi 2011)	904	1.935.898.414.136	(31)	(719.101.380.678)	873	1.216.797.033.458
2	Temuan BPK	364	879.302.478.869	(1)	740.261.728.000	363	1.619.564.206.869
3	BJDA (verifikasi 2009)	62	224.200.145.000	-	5.722.772.300	62	229.922.917.300
4	Settlement	-	-	-	-	-	-
5	Apartemen Menara 7 Gading	-	-	-	-	-	-
	Sinar Bonana	42	139.208.400.000	(40)	(92.595.052.673)	2	46.613.347.327
6	Griya Potensa	2	295.000.000	-	-	2	295.000.000
7	Covernote	86	400.988.243.037	(6)	(196.318.314.376)	80	204.669.928.661
Jumlah		1.460	3.579.892.681.043	(78)	(262.030.247.427)	1.382	3.317.862.433.615

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
1	BIRA	RUMAH	JAWA BARAT	BOGOR	JL. CENDERAWASIH RT 4 RW 06 NO. 32 DS. CIPAYUNG	1.670	471	SHM	571.512.000	1
2	DAGANG INDUSTRI	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	KEL.KALI SARI KEC. PASAR REBO JAKTIM (JL. KAMPUNG KALI SARI RT 007/02)	955	300	SHM	418.000.000	1
3	BUN	GEDUNG	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. SIDODADI, DS. GEDONG JOHOR	3.978	1.400	SHGB	10.799.498.000	1
4	DANAMON	RUMAH	LAMPUNG	PRINGSEWU	JL. WISMA RINI PRINGSEWU LAMPUNG SELATAN	1.263	1.200	SHM	71.850.000	1
5	DANAMON	RUMAH	LAMPUNG	PRINGSEWU	JL. SUDIRMAN NO.21/40 PRINGSEWU LAMPUNG SELATAN	1.046	1.000	SHM	71.500.000	2
6	BDNI	TANAH	JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. TANAH JAJAR TUNGGAL KEC. KARANG PILANG	3.705	-	SHM	-	1
7	PESONA	RUMAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. PEKUBURAN KEL PETISAH TENGAH KEC.MEDAN BARAT, MEDAN	524	-	SHGB	1.323.006.485	1
8	DANAMON	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. SUKARNO HATTA GG. H AKWIN KEL KOPO	362	-	SHM	40.000.000	1
9	SUBENTRA	RUKO	JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. INDUSTRI RAYA NO. 3 (D/A. JL. GUNUNG SAHARI RAYA NO. 8 BLOK B 10, GUNUNG SAHARI UTARA	68	-	HGB	2.871.000.000	1
10	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	4.255	-	SHM	-	1
11	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	3.560	-	SHM	640.800.000	1
12	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	DS TEGAL LEGA , TELUK JAMBE - KARAWANG	1.075	-	SHM	193.500.000	1
13	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	5.145	-	SHM	874.650.000	1
14	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	4.715	-	SHM	848.700.000	1
15	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	3.695	-	SHM	665.100.000	1
16	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	1.875	-	SHM	337.500.000	1
17	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	4.100	-	SHM	738.000.000	1
18	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	15.150	-	SHM	3.030.000.000	1
19	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	1.940	-	SHM	-	1
20	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	840	-	SHM	160.200.000	1
21	TATA	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	TEGALEGA KEC. TELUK JAMBE KARAWANG	2.210	-	SHM	-	1
22	PESONA	PABRIK	BANDUNG	BANDUNG	JL. LEUWI GAJAH NO.153, DS BATUJAJAR CIMAHI BANDUNG	14.370	5.597	SHM	5.000.000.000	3
23	BUN	RUMAH	JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. VETERAN NO. 28 RT 003/06, KEL. BINTARO, KEC. KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN	881	322	SHM	50.000.000	1
26	PESONA	RUMAH	MAKASSAR	MAKASSAR	JL. URIP SUMOHARJO NO. 55B DESA PANAİKANG KEC. PANKUKANG, UJUNG PANDANG	412	-	SHM	204.464.067	1
27	DUTA	HOTEL	DENPASAR	DENPASAR	JL. LEGIAN NO. 188 KUTA BADUNG BALI	2.400	3.713	SHM	3.394.654.801	1
28	PAPAN	TANAH	BANDAR LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	JL. KELAPA KEL SEPANG JAYA KEC KEDATON BANDAR LAMPUNG (JL. KAVLINGAN)	400	-	SHM	75.700.000	1
29	ASPAC	TANAH	JAKARTA	KARAWANG	JL. RAYA PANGKALAN KM 14 DESA WANAJAYA RT06/03	199.105	-	OTHER	37.638.209.236	37
32	ASPAC	RUMAH	JAWA BARAT	CIREBON	PERUM. PILANG PERDANA ESTATE CEREBO	120	45	SHGB	16.828.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
34	BUN	TANAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	DESA SIBAGANDING	10.202	-	SHM	58.750.000	1
35	TIARA	PABRIK	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. PERSATUAN NO. 68, MELONG	1.129	800	SHM	340.925.000	2
36	BALI	PABRIK	BANTEN	TANGERANG	JL. GEMBOR RAYA DESA PASIR JAYA, JATI UWUNG	23.125	5.016	HGB & SHM	91.548.928.000	2
37	DUTA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	JL. DAAN MOGOT NO. 50	650		n/a	-	1
40	BDNI	RUMAH	JAWA TENGAH	SEMARANG	JL. TEUKU UMAR NO.27, KEL. KARANGREJO KEC. SEMARANG SELATAN	4.871	NA	SHM	-	1
42	BDNI	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. KH MOH. MANSYUR NO.240 B TAMBORA	113	200	HGB	5.059.300.000	1
43	BDNI	TANAH	JAWA TENGAH	REMBANG	DESA TANJUNGAN KRAGAN	10.880	-	AJB	1.455.200.000	7
44	DAGANG INDUSTRI	TANAH	JAWA BARAT	BANDUNG	PERUMAHAN VILA BUKIT MAS TAHAP II JL. BOJONG KONENG DS. CIBEUNYING KEC. CIMENYAN	15.887	-	HGB	1.500.933.521	1
45	BUN	TANAH	JAWA BARAT	SUMEDANG	BLOK KARYA BHAKTI DESA SUKAJADI WADO, SUMEDANG	23.157	-	SHM	2.227.060.000	4
46	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	4.240	-	SHM	212.000.000	1
47	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	7.115	-	SHM	355.750.000	1
48	BDNI	TANAH	BANTEN	SERANG	DESA SAWAH LUHUR, KEC. KASEMEN	20.450	-	SHM	2.045.000.000	1
49	TATA	TANAH	BANTEN	PANDEGLANG	BLOK CIKUJANG, DS. TANJUNG JAYA, KEC. PANIMBANGAN	19.400	-	SHM	4.609.949.317	1
50	TATA	TANAH	BANTEN	PANDEGLANG	BLOK CIKUJANG, DS. TANJUNG JAYA, KEC. PANIMBANGAN	19.500	-	SHM	253.500.000	1
51	DHARMALA	RUKO	JAWA BARAT	BEKASI	KOMP. RUKO BUMI SATRIA KENCANA KAV. C-3 KAYURINGIN JAYA BEKASI, JA-BAR	170	191	SHGB	300.000.000	1
52	SERVITIA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	JL. KEMBANG INDAH III G3 NO. 1, KEL. PURI INDAH	200	-	HGB	325.954.417	1
53	BIRA	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. MUNDINGLAYA NO. 11 RT 005/04 BANDUNG DS. BALUBUR	442	400	SHM	698.513.966	1
54	NIAGA	GEDUNG	JAWA TIMUR	MALANG	TOKO "OEN", JL. BASUKI RAHMAT 5	1.350	842	HGB	934.850.000	1
55	DAGANG INDUSTRI	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	JL. RAYA KALIBATA NO. 4 C RT 009 / 05 KEL. CAWANG KEC. KRAMAT JATI	154	172	SHM	396.000.000	1
56	LAUTAN BERLIAN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. DR. SUSILO IV NO. 19 KEL. GROGOL, KEC. PETAMBURAN	275	200	HGB	407.574.066	1
57	BDNI	RUMAH	JAWA BARAT	BANDUNG	JL. VANDEVENTER NO. 5 KEBON PISANG, SUMUR BATU	220	86	SHM	5.678.200.000	1
58	UNIBANK	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	JL. PLUIT UTARA IV NO.10 BLOK J KAV.18 RT/RW 003/05, PLUIT	220	-	HGB	105.416.667	1
59	SERVITIA	RUKO	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. PANCUR BATU NO.1A DAN 1, MEDAN	214	571	SHGB	194.029.316	1
60	BDNI	TANAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL. AP. PETTARANI PANAKUKKANG MAKASSAR	3.966	-	HGB	1.939.734.672	1
61	DANAMON	TANAH	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	JL. PALEMBANG-SEKAYU KM-14 PALEMBANG	6.160		SHM	41.130.000	1
62	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM, NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK A NO. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	6.999.177.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
63	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK B-3;4;5;6;7;8;11;12;13; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.540.654.000	1
64	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK D-7;8;9;10; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.189.122.000	1
65	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK E-4;5;6;7;8; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.631.934.000	1
66	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK F-2;3;4;5;6;7;8;9;10;11, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.662.719.000	1
67	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK H-11;12;13;16;17;18; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	3.202.654.000	1
68	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I - 11;12;13;14;15;25; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	2.833.695.000	1
69	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK J -3 S/D J-20, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	7.662.222.000	1
70	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK K-4 & K-5; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	1.158.240.000	1
71	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK L-5;8;9;11;12;13;14, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	5.606.446.000	1
72	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL.NUSA INDAH BLOK H25, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	931.366.000	1
73	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL.NUSA INDAH BLOK H26, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	595.881.000	1
74	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI, JL NUSA INDAH BLOK H-27, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	548.043.000	1
75	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK H-2, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	614.675.000	1
76	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK H-5, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	118	-	SHGB	669.670.000	1
77	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM. NAGA ASRI, JL. NUSA INDAH BLOK I-1, KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	684.017.000	1
78	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I - 2;3;4;5;6;7; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	4.390.978.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
79	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK I - 17;18;19;20;21;22;23;24; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	4.057.737.000	1
80	PAPAN	GEDUNG	JAWA TENGAH	SLEMAN	PERUM NAGA ASRI JL.NUSA INDAH BLOK K-3; KEL. NOGOTIRTO, KEC. GAMPING, KAB. SLEMAN, D.I. YOGYAKARTA	44.200	-	SHGB	881.485.000	1
81	MASHILL	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. HOS COKROAMINOTO NO. 67 A, JAKARTA PUSAT	272	102	HGB	892.200.000	1
82	DEWARUTJI	GEDUNG	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. S. PARMAN, JAKARTA	2.945	7.080	HGB	24.215.002.546	2
83	BALI	GEDUNG	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL.PINANGSIA TIMUR NO.22 B	162	356	HGB	779.440.000	1
84	BALI	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL.SWADARMA RAYA NO.34 SRENGSENG	145	209	SHM	168.225.000	1
86	TIARA	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. FACHRUDIN NO. 55, TANAH ABANG	85	480	HGB	1.700.000.000	1
87	UNIBANK	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. CILANDAK KKO NO.52	1.935	-	SHM	34.880.762.000	2
88	BCA	TANAH	JAWA TIMUR	MALANG	LINGKUNGAN III, KEC. KLOJEN, MALANG	5.680		SHM	184.528.079	1
89	BNN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. PENGAIRAN (ADHI KARYA) NO. 24 KEDOYA SELATAN - KEBON JERUK	593	200	SHM	437.915.200	1
90	SERVITIA	RUKO	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL.PANCUR BATU NO.1 A SIDODADI MEDAN TIMUR	115	243	HGB	1.253.827.000	1
91	DHARMALA	PABRIK	BANTEN	TANGERANG	DESA KUTA JAYA, KEC. PASAR KEMIS, KAB. TANGERANG	46.540	-	SHM	10.473.230.000	9
92	CENTRAL DAGANG	RUKO	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	KOMPL. RUKO KOTA GROGOL PERMAI BLOK B/10, JL. LATUMENTEN NO. 19	74	-	HGB	345.000.000	1
93	BNN	TANAH	SUMATERA BARAT	PARIAMAN	KASANG TENGAH, BATANG ANAI, PD. PARIAMAN	24.965		SHM	87.377.500	1
94	BNN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. MESJID ASSURUR GG. P1 (P - SATU) NO. 36 RT. 01 / 01, KEBUN JERUK	190	54	SHM	31.643.816	1
95	HASTIN	RUKO	BANTEN	TANGERANG	JL. PASAR KEMIS	23.775	99	HGB	285.000.000	1
96	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL.SYEH YUSUF BLOK A1 NO 9	1.449	-	SHM	-	1
97	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	BLOK A4 NO 4	233	63	SHM	-	1
98	PAPAN	RUMAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	BLOK D8 NO 10	108	63	SHM	46.503.967	1
100	MASHILL	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA BARAT	JL. POS PENGUM BEN RAYA RT.06/03, KEL. SRENGSENG, KEMBANGAN	4.950	-	SHM	2.741.910.463	1
101	NIAGA	TANAH	JAWA BARAT	BANDUNG	DESA BOJONG MALAKA DAN ANDIR	167.427		SHM	2.021.000.000	17
102	POS NUSANTARA	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. KRAMAT BATU NO. 7 RT. 02 / 05 - FATMAWATI, CILANDAK, GANDARIA SELATAN	298	150	SHM	108.665.000	1
103	CENTRAL DAGANG	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA UTARA	MUARA BARU, PENJARINGAN	13.970	-	HGB	21.833.236.934	1
104	SUBENTRA	TANAH	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. TEUKU CIK DITIRO NO. 108 MADRAS HULU	3.295	-	HGB	3.707.827.258	2
105	UPPINDO	TANAH	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	JL. URIP SUMAHARJO, KEL. PAMPANG, KEC. PANAKUKKANG, UJUNG PANDANG	6.504	-	SHM	1.449.090.945	1
106	ASPAC	TANAH	BALI	BADUNG	JL.BATUBELIG, GEROBOKAN KUTA BADUNG	10.600	-	SHM	263.940.000.000	1
107	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D11, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
108	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D12, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
109	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D16, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
110	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D17, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
111	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D15, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
112	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D18, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
113	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D19, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
114	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D20, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
115	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D21, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
116	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D51, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
117	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D52, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
118	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D53, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
119	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D55, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
120	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D56, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
121	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D57, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
122	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D58, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
123	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D59, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
124	BAHARI		JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. HR. MUHAMAD D60, SURABAYA	68	-	SHGB	-	1
125	BUN	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	JL. PEGANGSAAN II NO. 98 - KEL. PEGANGSAAN, JAKARTA	1.673	-	GIRIK	996.550.000	2
126	BUN	RUMAH	JAWA TIMUR	SIDOARJO	JL. HANGTUAH RAYA NO. 31, SIDOKLUMPUK, SIDOARJO	1.639	-	SHGB	528.819.000	1
127	ASPAC	RUMAH	JAWA TIMUR	SURABAYA	JL. PATEMON BARAT NO. 95A, KEL. KUPANG KRAJAN, KEC. SAWAHAN, SURABAYA	234	294	SHGB	82.600.000	1
128	BNN	RUMAH	BALI	BADUNG	JL. DAHLIA NO. 22, KEL. TONJA	590	134	SHM	275.691.100	1
129	NIAGA	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA SELATAN	JL. INTAN UJUNG, CILANDAK	900	278	HM	548.000.000	1
130	UPPINDO	RUMAH	DKI JAKARTA	JAKARTA PUSAT	JL. CIMAHI NO. 10, MENTENG, JAKARTA PUSAT	691	445	HGB	1.500.000.000	1
131	BUN	GEDUNG	SUMATERA UTARA	MEDAN	JL. INDUSTRI NO. 71, DS. T. MORAWA	63.517	50.884	SHGB dan SHM	53.989.450.000	9
132	BUN	RUMAH	JAWA TENGAH	SLEMAN	JL. PALAGAN REJODANI, DS. SARIHARDJO, KEC. NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA	1.496	NA	SHM	168.000.000	1
134	LAUTAN BERLIAN	TANAH	DKI JAKARTA	JAKARTA TIMUR	Billy dan Moon Park Kampung Tipar Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur	64.551	Surat Penyerahan Hak (SPH)		82.237.974.000	41
135	LAUTAN BERLIAN	TANAH	LAMPUNG	LAMPUNG TENGAH	Desa Gunung Sugih Besar Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah	145.030		SHM	1.740.360.000	2
136	BIRA	TANAH	BANTEN	TANGERANG	Desa Bojong dan Budi Mulya Tangerang	858.408		Girik	37.000.000.000	583
137	BIRA	GEDUNG	BANTEN	TANGERANG	Plaza Shinta, Jalan Teuku Umar, Cimone Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten	34.753	19.208	SHM dan SHGB	343.241.566.000	2
138	BNN		BALI	GIANYAR	Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali	5.150		SHM	11.306.316.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2011)

No.	Bank	Kategori	Provinsi	Kota	Alamat Objek	Luas Tanah	Luas Bangunan	Jenis Sertifikat	Nilai	Dok.
139	Bank Nasional Komersil (d/h Bank Pertiagaan)	Tanah	Jawa Timur	Surabaya	Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Prov Jawa Timur	111		SHM	75.000.000	1
140	Bank Umum Nasional	Tanah	Jakarta	Jakarta Utara	Jalan Pluit Karang Molek IX Nomor 11 Blok B.II Kaveling Nomor 11, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta	187		SHGB	275.000.000	1
141	Bank Pertiagaan	Tanah	Sulawesi Selatan	Makassar	Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan	1.099		SHM	71.435.000	1
142	PT. Overseas Express Bank	Gedung	SUMATERA UTARA	MEDAN	Jl. Pemuda No. 18, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	782	2.205	SHGB	20.197.032.452	2
143	PT Continental Bank (Bank Dana Asia)	Ruko	SUMATERA UTARA	MEDAN	Jalan Medan-Binjai, Kelurahan Lalang, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara	60	180	SHGB	1.225.133.000	1
144	PT. Bank Dagang Nasional Indonesia	Villa	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	Jl. Sirna Galih No. 3 RT 2 RW 1, Desa Megamendung, Kecamatan Cisarua, Bogor, Jawa Barat. MEGAMENDUNG	2.093	141	SHGB	2.145.338.667	1
145	JAYA	TANAH	BANTEN	KOTA TANGERANG	GRAHA BINTARO, ALAMAT BLOK GR24/10, GR24/20, E10/1, E10/03, E10/07, E10/17, E10/19, E1023, E10/25, E10/27, E10/1, E10/03, E10/07, F03/16, HE03/18, HE03/19, HE04/01, HE04/02, HE05/01, HE05/02, HF01/14, HF02/01, HF01/02, HF02/28, HF02/29, GR21/81, PONDOK KACANG BARAT	3.945	-	SHGB	33.859.507.000	26
146	JAYA	TANAH	BANTEN	KOTA TANGERANG	GRAHA BINTARO Blok G 04 No 07 Paku Jaya Serpong Tangerang Jawa Barat	126	-	SHGB	60.563.153	1
147	JAYA	TANAH	BANTEN	KOTA TANGERANG	GRAHA BINTARO Blok E 10 No 17 Paku Jaya Serpong Tangerang Jawa Barat	91	-	SHGB	43.740.055	1
148	JAYA	TANAH	BANTEN	KOTA TANGERANG	GRAHA BINTARO Blok GR.03 No 86 Pondok Aren Pondok Kacang Barat Tangerang Jawa Barat	130	-	SHGB	62.485.793	1
Jumlah						1.182.220	73.063	-	1.216.797.033.458	873

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
1	03.01.02.00000843	Meunasah Blang	ACEH UTARA	DISTA ACEH	SHM	1	1.508	-	39.800.000
2	03.01.02.00000845	Polonia	MEDAN	SUMATERA UTARA	SHGB	1	876	-	29.269.350.000
3	03.01.02.00000846	Jl. Kebon Sirih	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	SHM	1	972	-	503.200.000
4	03.01.02.00000847	Jalan HM.Saleh	PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	SHM	1	117.845	-	57.737.900.000
5	03.01.02.00000848	Jalan Kartini,Pringsewu	LAMPUNG SELATAN	LAMPUNG	SHM	1	679	-	631.700.000
6	03.01.02.00000849	Lemb. 3 Kt. E/5, Tanjungkarang, Tanjungkarang-Telukbetung, Telukbetung Utara, Sumur Batu	BANDAR LAMPUNG	LAMPUNG	SHM	1	12.544	-	9.865.000.000
7	03.01.02.00000850	Jl. Haji Salim RT/RW 008/06	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	500	-	1.185.600.000
8	03.01.02.00000851	Guntur	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	330	-	3.203.700.000
9	03.01.02.00000852	Gg. Buntut (Kp.Rambutan)	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	Hak Pakai	1	119	-	181.200.000
10	03.01.02.00000853	Jalan H Murtadho Gang VI	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHM	1	225	-	691.800.000
11	03.01.02.00000854	Kalideres Village Kav Blok C 6 persil No.18	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	189	-	674.600.000
12	03.01.02.00000855	Komp.Kali Deres Permai Blok G 1 No.12	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	299	-	1.067.200.000
13	03.01.02.00000856	Komp.Kalideres Permai Blok C 8 No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	430	-	1.534.700.000
14	03.01.02.00000857	Komp.Kalideres Permai Blok G 1 No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	299	-	1.067.200.000
15	03.01.02.00000858	Kalideres Permai Village PT Duta Anggada Blok B 4	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.033	-	2.069.200.000
16	03.01.02.00000859	Kalideres Permai Village PT Duta Anggada Blok B 4	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	913	-	2.327.600.000
17	03.01.02.00000860	Kalideres Village Blok C 6 Kav No.11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	236	-	842.300.000
18	03.01.02.00000861	Kalideres Village Blok C 8 Kav No.12	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	256	-	913.700.000
19	03.01.02.00000862	Kalideres Village Blok H.5 No.8	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	-	638.908.000
20	03.01.02.00000863	Komp Kali Deres Permai Blok G4 Kav.No.7	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	145	-	773.460.000
21	03.01.02.00000864	Komp Kali Deres Permai Blok H 3 Kav.No.10	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	-	781.100.000
22	03.01.02.00000865	Komp Kalideres Permai	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	237	-	820.000.000
23	03.01.02.00000866	Komp Kalideres Permai	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.281	-	3.499.000.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
24	03.01.02.00000867	Komp Kalideres Village Blok H 3 Kav No.6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	165	-	588.900.000
25	03.01.02.00000868	Komp Kalideres Village Blok H 5 Kav No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	143	-	510.400.000
26	03.01.02.00000869	Komp Kalideres Village Blok H.3 Kav No.1	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	-	638.900.000
27	03.01.02.00000870	Komp Kalideres Village Blok H.5 Kav. No 9	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	179	-	809.540.000
28	03.01.02.00000871	Komp Perum Kalideres Permai Blok G 2 No.11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	150	-	677.600.000
29	03.01.02.00000872	-	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	150	-	227.500.000
30	03.01.02.00000873	Jalan Semanan	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	1.203	-	1.563.900.000
31	03.01.02.00000874	Jalan Daan Mogot II No. 23	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	88	-	1.237.500.000
32	03.01.02.00000875	Tomang Barat Blok P Kaveling Nomor 460	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	180	-	753.423.000
33	03.01.02.00000876	Meruya Udik	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	4.924	-	738.600.000
34	03.01.02.00000877	Jln.Utan Jati-Perumahan Citra 2 blok. I/6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	8.295	-	20.768.600.000
35	03.01.02.00000878	Perumahan Citra 2 Blok. I/6	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.015	-	2.541.300.000
36	03.01.02.00000879	PEGADUNGAN RT.005/011	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	600	-	604.800.000
37	03.01.02.00000880	Perkavelingan Dep.Hankam.Blok.L.1.Kav.no.18	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	272	-	686.900.000
38	03.01.02.00000881	Jalan Nuh no 43 Rt 005/05	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	Hak Pakai	1	400	-	1.200.000.000
39	03.01.02.00000882	Kemanggis Pulo RT 02/RW 11	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	305	-	1.235.790.000
40	03.01.02.00000883	Kampung Malaka RT 009/05	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHM	1	1.625	-	896.900.000
41	03.01.02.00000884	-	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	67	-	1.389.000.000
42	03.01.02.00000885	Jalan Bumi Asih V Blok A No.6 Kav.22 Perum. Bumi Karang Indah	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	180	134	1.028.380.000
43	03.01.02.00000886	-	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.560	-	17.670.600.000
44	03.01.02.00000887	-	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	4.727	-	41.156.300.000
45	03.01.02.00000888	Jl. Swadarma Raya No.58	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHM	1	1.320	-	4.279.800.000
46	03.01.02.00000889	Jalan Komp. Tanjung Barat Indah Blok. O Kav. No.11	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	210	-	1.236.580.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
47	03.01.02.00000890	Gang Eddy III/9 Rt 014/06	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	Girik	1	215	-	1.843.600.000
48	03.01.02.00000891	Jl. Tebet Dalam I.J RT 004/01	JAKARTA SELATAN	DKI JAKARTA	SHGB	1	140	-	1.312.400.000
49	03.01.02.00000892	Komplek Perumahan Bukit Permai Cibubur Jalan O. RT/RW 004/11	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	300	-	1.014.000.000
50	03.01.02.00000893	Kel. Pondok Kelapa Blok C2 No. 4	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	220	-	1.070.300.000
51	03.01.02.00000894	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	312	-	2.841.200.000
52	03.01.02.00000895	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	212	-	
53	03.01.02.00000896	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	316	-	
54	03.01.02.00000897	PERKAV PERMATA TIMUR JLN. CURUG RT 002/08	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	128	-	
55	03.01.02.00000898	Jl. Mundu III No. 3 RT. 012/04	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	722	-	1.467.100.000
56	03.01.02.00000899	Komp. Pertamina Blok U, Kav. No. 475 dan No. 476 Jl. Jl. Mundu II No. 4, RT. 0012/04 Blok H, Persil 474+476	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	362	-	2.073.100.000
57	03.01.02.00000900	Jl Ir.H.Juanda II, No.5.A	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	304	-	1.517.000.000
58	03.01.02.00000901	Jl. Stasiun Senen No. 60A	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	115	-	628.000.000
59	03.01.02.00000902	JalanPatrice Lumuba	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	123	-	2.658.000.000
60	03.01.02.00000903	JALAN BAMBU BETUNG I NO. 10	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	150	-	414.200.000
61	03.01.02.00000904	Perumahan Citra Garden 2 Blok I.1 No.16	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	90	-	1.050.000.000
62	03.01.02.00000905	-	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHM	1	2.715	-	4.472.900.000
63	03.01.02.00000906	Jl. Madu No.4A RT 005/03	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	382	-	2.727.150.000
64	03.01.02.00000907	Jl. Pinangsia I No.14 Rt 012/Rw 05	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SHGB	1	32	-	432.400.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
65	03.01.02.00000908	Jalan Kelapa Molek VII Blok NI No.17	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	90	-	595.900.000
66	03.01.02.00000909	Jl Pademangan Timur No. 7 Blok C Rt 0014/01	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	141	-	934.180.000
67	03.01.02.00000910	Desa Sunter Jaya	JAKARTA UTARA	DKI JAKARTA	SHGB	1	78	-	1.735.100.000
68	03.01.02.00000911	Pasar Regional Jatinegara	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	9	487.100.000
69	03.01.02.00000912	Rusun Taman Kemayoran Condominium Lt.VIII Blok.C Blok A.I	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHMSRS	1	-	90	516.000.000
70	03.01.02.00000913	Tower Bougenville	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SHMSRS	1	-	90	508.700.000
71	03.01.02.00000914	Pasar Regional Tanah Abang Blok A, Lantai L01, Los CKS, No. 016	JAKARTA PUSAT	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	4	960.300.000
72	03.01.02.00000915	Blok C lantai dasar Pasar Grogol	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	Lainnya (Non Tanah dan/atau Bangunan)	1	-	-	36.000.000
73	03.01.02.00000916	Jl. Taman Sari VIII/90 RT/RW 006/06	JAKARTA BARAT	DKI JAKARTA	SIPTB	1	-	4	750.000.000
74	03.01.02.00000917	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	7.259.700.000
75	03.01.02.00000918	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
76	03.01.02.00000919	Blok : Pematang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
77	03.01.02.00000920	Blok Pematang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
78	03.01.02.00000921	Blok Pematang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
79	03.01.02.00000922	Blok Pematang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
80	03.01.02.00000923	Blok Pematang Jenggot	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
81	03.01.02.00000924	Desa Sorongan	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
82	03.01.02.00000925	Sorongan Rt.000 rw.00	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	20.000	-	
83	03.01.02.00000926	Pagelaran	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	157	-	2.200.000
84	03.01.02.00000927	Pagelaran	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	10.490	-	743.200.000
85	03.01.02.00000928	Pandeglang	PANDEGLANG	BANTEN	SHM	1	14.293	-	644.400.000
86	03.01.02.00000929	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	10.830	-	315.400.000
87	03.01.02.00000930	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	14.665	-	
88	03.01.02.00000931	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	2.405	-	
89	03.01.02.00000932	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	6.840	-	
90	03.01.02.00000933	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	3.154	-	

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
91	03.01.02.00000934	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	4.405	-	
92	03.01.02.00000935	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	4.750	-	
93	03.01.02.00000936	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	3.265	-	
94	03.01.02.00000937	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	8.280	-	
95	03.01.02.00000938	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	9.105	-	
96	03.01.02.00000939	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	19.320	-	
97	03.01.02.00000940	Cimangeunteung	LEBAK	BANTEN	SHM	1	12.250	-	
98	03.01.02.00000941	-	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	1.560	-	278.000.000
99	03.01.02.00000942	Cipayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	280		268.200.000
100	03.01.02.00000943	RT VIII/5	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	8.112	-	9.543.700.000
101	03.01.02.00000944	KEDAUNG	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	58		52.700.000
102	03.01.02.00000945	Desa Wanakerta	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	5.955	-	483.000.000
103	03.01.02.00000946	desa Wanakerta	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	4.014	-	311.500.000
104	03.01.02.00000947	pengarengan	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	3.585	-	170.100.000
105	03.01.02.00000948	Gaga	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	2.130	-	962.800.000
106	03.01.02.00000949	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	1.840	-	4.404.100.000
107	03.01.02.00000950	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	5.210	-	
108	03.01.02.00000951	Kiarapayung	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHM	1	2.685	-	
109	03.01.02.00000952	Desa Karang Suraga	SERANG	BANTEN	SHGB	1	110.387	-	5.640.800.000
110	03.01.02.00000953	Desa Karang Suraga	SERANG	BANTEN	SHGB	1	1.810	-	294.600.000
111	03.01.02.00000954	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	5.901	-	11.840.500.000
112	03.01.02.00000955	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	3.515	-	
113	03.01.02.00000956	Desa Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	173.366	-	
114	03.01.02.00000957	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	20.187	-	
115	03.01.02.00000958	Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	110.187	-	
116	03.01.02.00000959	Desa Bulakan	SERANG	BANTEN	SHGB	1	39.678	-	

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
117	03.01.02.00000960	-	SERANG	BANTEN	SHM	1	14.400	-	2.162.900.000
118	03.01.02.00000961	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	92	-	379.100.000
119	03.01.02.00000962	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	84	-	519.100.000
120	03.01.02.00000963	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	87	-	537.700.000
121	03.01.02.00000964	Pulomerak, Ramanuju	SERANG	BANTEN	SHM	1	91	-	562.400.000
122	03.01.02.00000965	Blok E.3/2	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	315	-	489.500.000
123	03.01.02.00000966	Blok F.1/52	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	149	-	378.300.000
124	03.01.02.00000967	Blok F.1/52	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	92	-	
125	03.01.02.00000968	Blok F.1/71	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	380	-	771.200.000
126	03.01.02.00000969	Blok F.1/71	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	130	-	
127	03.01.02.00000970	Kroncong	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	15.070	-	3.621.900.000
128	03.01.02.00000971	Kroncong	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	445	-	
129	03.01.02.00000972	Jalan Gading Golf Timur No.89	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	1.025	-	4.117.200.000
130	03.01.02.00000973	Pondok Kacang Timur	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	91	-	284.100.000
131	03.01.02.00000974	Perumahan Villa Bintaro Regency Blok G No.15	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	153	-	306.400.000
132	03.01.02.00000975	Blok DC 8/2	KAB. TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	137	-	695.800.000
133	03.01.02.00000976	-	SERANG	BANTEN	SHGB	1	235	-	9.500.000
134	03.01.02.00000977	Batujaya	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHM	1	130	-	168.200.000
135	03.01.02.00000978	Blok: A.5/12	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHGB	1	144	70	258.400.000
136	03.01.02.00000979	Bojong Rt.01 Rw.01	KOTA TANGERANG	BANTEN	SHM	1	410	249	662.800.000
137	03.01.02.00000980	Kp. Pulo 004/08	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	2.000	-	236.000.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
138	03.01.02.00000981	Kalisuren	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	3.640	-	364.000.000
139	03.01.02.00000982	Blok 07 desa karadenan	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	1.550	-	145.500.000
140	03.01.02.00000983	Desa Karadenan Blok 007 Rt.01/ Rw.07	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	7.687	-	8.156.500.000
141	03.01.02.00000984	Blok Ciherang	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.460	-	292.000.000
142	03.01.02.00000985	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.624	-	158.700.000
143	03.01.02.00000986	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	660	-	69.100.000
144	03.01.02.00000987	Cilember	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	3.410	-	347.000.000
145	03.01.02.00000988	-	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.145	-	684.000.000
146	03.01.02.00000989	Cibuluh	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	Girik	1	4.460	-	437.500.000
147	03.01.02.00000990	Kapling Blok K/18	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	671	-	4.423.718.000
148	03.01.02.00000991	Desa Bedahan, Kec. Sawangan	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.435	-	215.250.000
149	03.01.02.00000992	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	1.600	-	948.600.000
150	03.01.02.00000993	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	3.830	-	
151	03.01.02.00000994	-	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	2.010	-	
152	03.01.02.00000995	Blok Cipanggulan	SUKABUMI	JAWA BARAT	SHM	1	11.230	-	1.048.600.000
153	03.01.02.00000996	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	953.485	-	27.343.000.000
154	03.01.02.00000997	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	551.585	-	
155	03.01.02.00000998	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.344.025	-	
156	03.01.02.00000999	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.026.720	-	
157	03.01.02.00001000	Kertajadi	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	652.490	-	
158	03.01.02.00001001	Cipendawa	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	104	-	136.700.000
159	03.01.02.00001002	Kav C-6 Nomor 10	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	114	-	133.300.000
160	03.01.02.00001003	VILLA YASMIN	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	56	-	78.500.000
161	03.01.02.00001004	VILLA YASMIN	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	10	-	13.500.000
162	03.01.02.00001005	Blok Gunung Batu	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	10.000	-	37.000.000
163	03.01.02.00001006	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.210	-	1.209.000.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
164	03.01.02.00001007	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.500		
165	03.01.02.00001008	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.480		
166	03.01.02.00001009	Desa Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	405		
167	03.01.02.00001010	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.730		
168	03.01.02.00001011	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	650		
169	03.01.02.00001012	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.400		
170	03.01.02.00001013	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.050		
171	03.01.02.00001014	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.910		
172	03.01.02.00001015	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.870		
173	03.01.02.00001016	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.200		
174	03.01.02.00001017	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.350		
175	03.01.02.00001018	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.120		
176	03.01.02.00001019	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	950		
177	03.01.02.00001020	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.520		
178	03.01.02.00001021	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.540		
179	03.01.02.00001022	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	10.800		
180	03.01.02.00001023	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.315		
181	03.01.02.00001024	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.325		
182	03.01.02.00001025	Desa Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.290		
183	03.01.02.00001026	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	300		
184	03.01.02.00001027	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	550		
185	03.01.02.00001028	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.100		
186	03.01.02.00001029	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.560		
187	03.01.02.00001030	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.420		
188	03.01.02.00001031	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	800		
189	03.01.02.00001032	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.410		
190	03.01.02.00001033	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	980		
191	03.01.02.00001034	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	565		
192	03.01.02.00001035	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	480		
193	03.01.02.00001036	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	720		
194	03.01.02.00001037	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.180		
195	03.01.02.00001038	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.830		
196	03.01.02.00001039	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.340		
197	03.01.02.00001040	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.730		
198	03.01.02.00001041	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.760		

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
199	03.01.02.00001042	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.070		
200	03.01.02.00001043	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.650		
201	03.01.02.00001044	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.070		
202	03.01.02.00001045	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.430		
203	03.01.02.00001046	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	3.240		
204	03.01.02.00001047	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	4.030		
205	03.01.02.00001048	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.340		
206	03.01.02.00001049	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.010		
207	03.01.02.00001050	Taringgultonggoh	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	2.440		
208	03.01.02.00001051	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.010		
209	03.01.02.00001052	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.800	-	465.000.000
210	03.01.02.00001053	Sukadami	PURWAKARTA	JAWA BARAT	SHM	1	1.155		-
211	03.01.02.00001054	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	2.495	-	3.712.000.000
212	03.01.02.00001055	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	34.450		
213	03.01.02.00001056	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	8.390		
214	03.01.02.00001057	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	16.800		
215	03.01.02.00001058	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	1.560		
216	03.01.02.00001059	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.280		
217	03.01.02.00001060	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	17.260		
218	03.01.02.00001061	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	5.320		
219	03.01.02.00001062	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	8.560		
220	03.01.02.00001063	Desa Lemah Mulya	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.810		
221	03.01.02.00001064	Desa Benge	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	2.395		
222	03.01.02.00001065	Klari	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	899	-	
223	03.01.02.00001066	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	3.445		
224	03.01.02.00001067	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	890		
225	03.01.02.00001068	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	2.180		
226	03.01.02.00001069	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	900		
227	03.01.02.00001070	Babakan	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	795		
228	03.01.02.00001071	Klari	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	5.990		
229	03.01.02.00001072	Sumur Kondang	KARAWANG	JAWA BARAT	Girik	1	2.740		
230	03.01.02.00001073	Kampung Jatimulya	KARAWANG	JAWA BARAT	SHM	1	7.830	-	861.000.000
231	03.01.02.00001074	Pahlawan Setia	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	8.700	-	1.679.000.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
232	03.01.02.00001075	Desa Telajung	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	4.655	-	1.282.000.000
233	03.01.02.00001076	cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	978	-	1.350.000.000
234	03.01.02.00001077	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	1.004		
235	03.01.02.00001078	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	2.477		
236	03.01.02.00001079	Cikaragem	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	747		
237	03.01.02.00001080	KAYURINGIN JAYA	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	136	-	186.000.000
238	03.01.02.00001082	Katulampa Blok N No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.050	-	7.078.882.000
239	03.01.02.00001083	Katulampa Blok N No.15	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.119	-	7.539.796.000
240	03.01.02.00001084	Blok I.1 No.5	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	682	-	4.611.794.000
241	03.01.02.00001085	Blok I.1 no.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	671	-	4.537.686.000
242	03.01.02.00001086	Blok I.1 No.8	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	682	-	4.611.794.000
243	03.01.02.00001087	Blok I.3 No.17	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	276	-	1.746.233.000
244	03.01.02.00001088	Blok I.3 No.18	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	282	-	1.784.164.000
245	03.01.02.00001089	Blok I.3 No.19	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	290	-	1.834.738.000
246	03.01.02.00001090	Blok I.3 No.20	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	-	1.841.059.000
247	03.01.02.00001091	Blok I.3 No.22	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	-	1.841.059.000
248	03.01.02.00001092	Blok I.3 No.23	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	-	1.841.059.000
249	03.01.02.00001093	Blok I.3 No.23A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	294	-	1.860.024.000
250	03.01.02.00001094	Blok I.3 No.25	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	291	-	1.841.059.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
251	03.01.02.00001095	Blok I.3 No.26	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	294	-	1.860.024.000
252	03.01.02.00001096	TH XII No.10	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	188	-	1.189.755.000
253	03.01.02.00001097	TH XII No.11	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	162	-	1.025.289.000
254	03.01.02.00001098	TH XII No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	167	-	1.056.919.000
255	03.01.02.00001099	TH XII No.12 A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	173	-	1.094.874.000
256	03.01.02.00001100	TH XII No.12 B	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	217	-	1.373.170.000
257	03.01.02.00001101	TH XII No.8	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	161	-	1.018.963.000
258	03.01.02.00001102	-	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	340	-	34.000.000
259	03.01.02.00001103	Perumahan Taman Raflesia C-3	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	SHGB	1	155	-	305.700.000
260	03.01.02.00001104	-	KOTA BANDUNG	JAWA BARAT	SHM	1	295	-	590.000.000
261	03.01.02.00001105	Bantar Gebang	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	111	-	222.480.000
262	03.01.02.00001106	Jakasetia	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	120	-	319.720.000
263	03.01.02.00001107	Kav. No.G-11	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	250	-	573.680.000
264	03.01.02.00001108	Kav. No.G-7	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	233	-	514.960.000
265	03.01.02.00001109	Jati Kramat	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	11.781	-	9.223.000.000
266	03.01.02.00001110	Jatimekar	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	400	-	427.000.000
267	03.01.02.00001111	Kampung Jatiasih	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	600	-	682.000.000
268	03.01.02.00001112	Jatimekar	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	955	-	1.009.000.000
269	03.01.02.00001113	Margahayu	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	900	-	666.000.000
270	03.01.02.00001114	Pengasinan	DEPOK	JAWA BARAT	SHM	1	495	-	67.600.000
271	03.01.02.00001115	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	-	379.700.000
272	03.01.02.00001116	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	-	379.700.000
273	03.01.02.00001117	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	-	379.700.000
274	03.01.02.00001118	-	LEBAK	BANTEN (d/h. JAWA BARAT)	SHGB	1	14.150	-	379.700.000
275	03.01.02.00001119	Kopo	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	185	-	59.500.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
276	03.01.02.00001120	-	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	1.015	-	1.770.580.000
277	03.01.02.00001121	Perumahan Citra Indah Blok D-10, Kav No. 15	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	135	88	145.820.000
278	03.01.02.00001122	Kapling Blok K/28	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	1.097	-	7.392.895.000
279	03.01.02.00001123	Tanah Baru	KABUPATEN BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	25.020	-	138.718.539.000
280	03.01.02.00001124	KOMPLEK GREEN HILL BLOK D 2 NO. 3	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	638	-	336.200.000
281	03.01.02.00001125	Rengasdengklok Selatan	KARAWANG	JAWA BARAT	SHGB	1	50	-	104.000.000
282	03.01.02.00001126	No. Kav A.9-6	KABUPATEN BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	85	-	335.000.000
283	03.01.02.00001127	-	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	518	-	733.000.000
284	03.01.02.00001128	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	1.864.773.000
285	03.01.02.00001129	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	3.991.500.000
286	03.01.02.00001130	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	46.420.735.000
287	03.01.02.00001131	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	4.540.191.000
288	03.01.02.00001132	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	101.276.000
289	03.01.02.00001133	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	386.141.000
290	03.01.02.00001134	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	204.474.000
291	03.01.02.00001135	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	106.945.000
292	03.01.02.00001136	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	1.850.912.000
293	03.01.02.00001137	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	139.354.000
294	03.01.02.00001138	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	514.800.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
295	03.01.02.00001139	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	109.985.000
296	03.01.02.00001140	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	632.900.000
297	03.01.02.00001141	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	638.901.000
298	03.01.02.00001142	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	1.147.950.000
299	03.01.02.00001143	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	434.535.000
300	03.01.02.00001144	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	270.418.000
301	03.01.02.00001145	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	470.731.000
302	03.01.02.00001146	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	2.048.508.000
303	03.01.02.00001147	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	33.885	-	108.645.022.000
304	03.01.02.00001148	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	207.261.642.000
305	03.01.02.00001149	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	29.193.564.000
306	03.01.02.00001150	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	2.943.000.000
307	03.01.02.00001151	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	3.752.377.000
308	03.01.02.00001152	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	683.616.000
309	03.01.02.00001153	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	995.698.000
310	03.01.02.00001155	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	880.472.000
311	03.01.02.00001156	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	2.354.949.000
312	03.01.02.00001157	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	3.312.025.000
313	03.01.02.00001158	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	4.805.860.000

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
314	03.01.02.00001159	Katulampa	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	-	-	926.100.000
315	03.01.02.00001160	Katulampa Blok A/6	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	7.846	-	42.979.496.000
316	03.01.02.00001161	Katulampa Blok C.3 No.3	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	18.107	-	110.830.194.000
317	03.01.02.00001162	Blok I.6 No.17	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	259	-	1.638.753.000
318	03.01.02.00001163	Blok I.3 No.12	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	316	-	1.999.086.000
319	03.01.02.00001164	Blok I.3 No.3A	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	298	-	1.885.309.000
320	03.01.02.00001166	Blok I.6 No.18	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	256	-	1.619.785.000
321	03.01.02.00001167	Blok I.6 No.19	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	235	-	1.600.816.000
322	03.01.02.00001168	Blok I.6 No.20	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	255	-	1.613.462.000
323	03.01.02.00001169	Blok I.6 No.21	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	409	-	2.586.748.000
324	03.01.02.00001170	Blok I.6 No.23	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	252	-	1.594.493.000
325	03.01.02.00001171	Blok. TH. VII No.5	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	185	-	1.170.779.000
326	03.01.02.00001172	Blok. TH. VIII No.2	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	185	-	1.170.779.000
327	03.01.02.00001173	Cihampar	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	129.130	-	351.796.644.000
328	03.01.02.00001174	TH XII No.9	KOTA BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	202	-	1.278.304.000
329	03.01.02.00001176	Jakasetia	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	173	-	493.000.000
330	03.01.02.00001177	Kav. No. L - 3	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHGB	1	175	-	416.000.000
331	03.01.02.00001178	Bojong Rawa Lumbu Nomor 149	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	390	105	465.000.000
332	03.01.02.00001179	Desa/Kelurahan Bojong Rawalumbu	KOTA BEKASI	JAWA BARAT	SHM	1	105	-	

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
333	03.01.02.00001180	-	DEPOK	JAWA BARAT	SHGB	1	34.100	-	32.705.300.000
334	03.01.02.00001182	Jatingaleh	KAB. SEMARANG	JAWA TENGAH	SHM	1	4.871	-	2.472.032.500
335	03.01.02.00001183	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	-	43.500.000
336	03.01.02.00001184	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	-	
337	03.01.02.00001185	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	6.700	-	
338	03.01.02.00001186	-	MALANG (KAB)	JAWA TIMUR	SHM	1	1.470	-	
339	03.01.02.00001187	-	PASURUAN	JAWA TIMUR	SHM	1	2.515	-	679.100.000
340	03.01.02.00001188	Benoa	BADUNG	B A L I	SHM	1	33.150	-	2.984.000.000
341	03.01.02.00001189	Benoa	BADUNG	B A L I	SHM	1	53.100	-	4.779.000.000
342	03.01.02.00001190	Aikmel	LOMBOK TIMUR	NUSA TENGGARA BARAT	SHM	1	3.856	-	11.600.000
343	03.01.02.00001191	Kuala Mandor A	PONTIANAK (KAB)	KALIMANTAN BARAT	SHM	1	120.020	-	512.820.000
344	03.01.02.00001192	Kuala Mandor B	PONTIANAK (KAB)	KALIMANTAN BARAT	SHM	1	170.940	-	2.558.800.000
345	03.01.02.00001193	RT .1 Gunung Ulin	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	5.566	-	43.100.000
346	03.01.02.00001194	Pematang Panjang	BANJAR	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	19.998	-	329.100.000
347	03.01.02.00001195	-	KOTA BARU	KALIMANTAN SELATAN	SHM	1	300	-	176.820.000
348	03.01.02.00001196	Jalan Gunung Lokon No. 8, Kel. Wanea, Kec. Wanea	MANADO	SULAWESI UTARA	SHM	1	315	-	731.092.000
349	03.01.02.00001197	SUKA SARI PLAZA JL. SILIWANGI NO. 31 RUKO NO. 8 SUKASARI	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	77	220	231.937.036
350	03.01.02.00001198	JL. RAYA TAMAN CIMANGGU PERIKANAN BOGOR RT 01/05	BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	261	1.025	127.459.550
351	03.01.02.00001199	KOMP TMN YASMIN, JL. SEROJA I NO 4	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	162	96	125.000.000
352	03.01.02.00001200	PERUM BUKIT CIMANGGU BLOK M I NO. 18	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	380	250	340.806.526
353	03.01.02.00001201	TAMAN BARANANGSIANG INDAH BLOK P3 NO. 2	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	1	140	138	119.249.490
354	03.01.02.00001202	PERUM PAKUAN 2 JL. DAHLIA II NO. 11	BOGOR	JAWA BARAT	SHM	1	126	174	320.272.500

TEMUAN BPK

No.	No. Register	Alamat	Kab/Kota	Provinsi	Dok.	Jumlah Dok.	Luas Tanah	Luas Bangunan	Nilai Wajar
355	03.01.02.00001203	VILLA GREEN APPLE GARDEN T-3	CIANJUR	JAWA BARAT	SHGB	1	225	116	211.493.267
356	03.01.02.00001204	PERUM ARCO JL. RAYA ARCO NO. 11 BLOK B24	DEPOK	JAWA BARAT	SHM	1	775	174	118.000.000
357	03.01.02.00001205	Kompek Ruko Merdeka Mall No.3 dan 3A Jl. Merdeka	BOGOR	JAWA BARAT	SHGB	2	170		3.250.000.000
358	03.01.02.00001206	Komplek Ruko Segitiga Emas Blok B No.18 Jl. A. Tani No.221-223	Bandung	JAWA BARAT	SHGB	1	120		3.137.178.000
359	03.01.02.00001207	Komplek Ruko Depok Mall Blok B3 No.32 Jl. Margonda Raya	DEPOK	JAWA BARAT	SHGB	1	71		2.556.000.000
360	03.01.02.00001208	JL.PENEGAK RT 0010/02 PAL MERIAM MATRAMAN JAKARTA TIMUR	JAKARTA TIMUR	DKI JAKARTA	SHGB	1	1.498		16.938.800.000
361	03.01.02.00001209		Bekasi	JAWA BARAT	SHM	1	7.900		
362	03.01.02.00001210		Bekasi	JAWA BARAT	SHM	1	2.010		
Jumlah						363			1.619.564.206.869

BJDA (VERIFIKASI 2009)

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
1	03.01.02.00001211	Jl. Semangka Raya, Grogol Petamburan, Jakbar	357	192	1.925.687.000	1
2	03.01.02.00001212	Jl. Lingkar Luar Komp. Greenhill Permata	83	648	688.972.000	1
3	03.01.02.00001213	Jl. Letjen S. Parman Tanjung Duren Grogol	3.196		19.120.163.000	1
4	03.01.02.00001214	Menteng Jakpus	1.041	205	12.726.398.000	1
5	03.01.02.00001215	Jl. KH. Agus Salim Kebon Sirih Menteng	746		7.341.648.000	1
6	03.01.02.00001216	Kalideres Jakarta Barat	143		200.343.000	1
7	03.01.02.00001217	Kalideres Jakarta Barat	195		267.150.000	1
8	03.01.02.00001218	Kalideres Jakarta Barat	87		116.928.000	1
9	03.01.02.00001219	Kalideres Jakarta Barat	240		354.960.000	1
10	03.01.02.00001220	Kalideres Jakarta Barat	87		116.928.000	1
11	03.01.02.00001221	Kalideres Jakarta Barat	179		245.588.000	1
12	03.01.02.00001222	Kalideres Jakarta Barat	165		226.380.000	1
13	03.01.02.00001223	Kalideres Jakarta Barat	145		207.205.000	1
14	03.01.02.00001224	Kalideres Jakarta Barat	143		204.490.000	1
15	03.01.02.00001225	Kalideres Jakarta Barat	240		354.960.000	1
16	03.01.02.00001226	Jl. Jenderal A. Yani No. 74 Kesawan Medan	443	440	5.657.918.000	1
17	03.01.02.00001227	Petisah Tengah, Medan Petisah, Medan, Sumut	581	581	3.705.980.000	1
18	03.01.02.00001228	Melawai, Kebayoran Baru, Jaksel	379	300	5.730.910.000	1
19	03.01.02.00001229	Jl. Palatahan, Melawai, Kebayoran Baru	379	550	6.612.462.000	1
20	03.01.02.00001230	Bukit Duri, Tebet, Jaksel	286	201	2.442.551.000	1
21	03.01.02.00001231	Jl. Iskandar Muda Jaksel	283	280	14.005.658.000	1
22	03.01.02.00001232	Pejagalan Penjaringan Jakut	74	74	532.892.000	1
23	03.01.02.00001233	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	45.150		146.573.000	1
24	03.01.02.00001234	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	15.960		50.820.000	1
25	03.01.02.00001235	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	40.310		130.861.000	1
26	03.01.02.00001236	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	14.550		44.437.000	1
27	03.01.02.00001237	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	15.180		46.361.000	1
28	03.01.02.00001238	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	18.180		58.057.000	1
29	03.01.02.00001239	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	28.940		93.346.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2009)

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
30	03.01.02.00001240	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	65.690		213.253.000	1
31	03.01.02.00001241	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	22.230		117.962.000	1
32	03.01.02.00001242	Desa Tambak Sumur, Batu Jaya, Karawang	9.340		28.525.000	1
33	03.01.02.00001243	Kalideres Jakarta Barat	143		166.566.000	1
34	03.01.02.00001244	Kalideres Jakarta Barat	179		212.222.000	1
35	03.01.02.00001245	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000	1
36	03.01.02.00001246	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000	1
37	03.01.02.00001247	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000	1
38	03.01.02.00001248	Kalideres Jakarta Barat	768		998.400.000	1
39	03.01.02.00001249	Kalideres Jakarta Barat	318		386.529.000	1
40	03.01.02.00001250	Kalideres Jakarta Barat	258		309.239.000	1
41	03.01.02.00001251	Kalideres Jakarta Barat	254		304.444.000	1
42	03.01.02.00001252	Kalideres Jakarta Barat	151	160	395.204.000	1
43	03.01.02.00001253	Kalideres Jakarta Barat	250		319.150.000	1
44	03.01.02.00001254	Kalideres Jakarta Barat	471		624.546.000	1
45	03.01.02.00001255	Kalideres Jakarta Barat	220		266.552.000	1
46	03.01.02.00001256	Kalideres Jakarta Barat	240		300.144.000	1
47	03.01.02.00001257	Kalideres Jakarta Barat	240		300.144.000	1
48	03.01.02.00001258	Kalideres Jakarta Barat	87		96.361.000	1
49	03.01.02.00001259	Kreo Ciledug Tangerang	525	351	650.337.000	1
50	03.01.02.00001260	Jl. Yos Sudarso, Panjang Utara, Bandar Lampung	41.605	11014	71.571.961.000	1
51	03.01.02.00001261	Desa Sukorejo, Sidoarjo, Jatim	406	200	236.699.000	1
52	03.01.02.00001262	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya	2.197		23.259.138.000	4
53	03.01.02.00001263	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya				
54	03.01.02.00001264	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya				
55	03.01.02.00001265	Desa Bongkaran, Pabean, Cantian, Surabaya				
56	03.01.02.00001267	Cijayanti, Citeureup, Bogor	2.280		8.252.117.000	1
57	03.01.02.00001268	Jl. Brigjen Slamet Riyadi, Pasar Kliwon, Solo	553		2.516.297.300	1
58	03.01.02.00001269	Desa Margajaya, Bekasi Selatan, Bekasi	114	114	971.740.000	1
59	03.01.02.00001270	Komp. Puri Jatisampurna, Kel. Jatiraden, Bekasi	145		72.500.000	1
60	03.01.02.00001271	Jl. Cimuncang, Cibeunying Kidul, Bandung	5.840	1003	32.703.878.000	1

BJDA (VERIFIKASI 2009)

No	No. Register	Alamat pada Bukti Kepemilikan	Luas (m2)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah dok. kepemilikan
			Tanah	Bangunan		
61	03.01.02.00001272	Jl. Jend. Sudirman, Palembang	54	54	403.982.000	1
62	03.01.02.00001273	Jl. Jend. Sudirman, Palembang	80	80	599.318.000	1
Jumlah			342.641	16.447	229.922.917.300	62

GRIYA POTENSA

No.	No. Register	Jenis Properti	Jenis Hak	Nomor Hak	Luas		Nilai
					Tanah	Bangunan	
1	03.01.02.00001316	Tanah	HGB	05538	96 m2	-	131.000.000
2	03.01.02.00001317	Tanah	HGB	06354 dan 05531	120 m2	-	164.000.000
	Jumlah						295.000.000

SINAR BONANA

No.	No. Register	Kab/Kota	Provinsi	Nomor Dok.	Luas Tanah	Nilai Wajar
1	03.01.02.00001313	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	19	4.914	44.983.894.101
2	03.01.02.00001315	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	366	178	1.629.453.225
	Jumlah				5.092	46.613.347.327

COVERNOTE

No.	No. Register	Kabupaten	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
1	03.01.02.00001318	JAKARTA UTARA	66	Hak Pakai	20	1	01/02/1978	0
2	03.01.02.00001319	JAKARTA UTARA	66	Hak Pakai	40	1	31/08/1993	0
4	03.01.02.00001321	SEMARANG	0	SHGB	2227	1		125.000.000
5	03.01.02.00001328	JAKARTA PUSAT	1410	SHGB	615/Petojo Selatan	1	30/06/2000	76.843.616.000
6	03.01.02.00001329	SIDOARJO	774	SHM (Sertifikat Hak Milik)	182	1		120.981.413
7	03.01.02.00001330	KOTA MAGELANG	105	SHGB	1776	1	02/09/1997	37.327.391
8	03.01.02.00001331	SURABAYA	216	SHGB	2191	1	24/10/1994	308.452.153
9	03.01.02.00001332	MAGELANG	0	SHGB	113	1		0
10	03.01.02.00001333		663	SHM (Sertifikat Hak Milik)	669	1		0
11	03.01.02.00001334		243	SHM (Sertifikat Hak Milik)	687	1		0
12	03.01.02.00001335		133	SHM (Sertifikat Hak Milik)	666	1		0
13	03.01.02.00001336		681	SHM (Sertifikat Hak Milik)	847	1		0
14	03.01.02.00001337	JAKARTA BARAT	138	SHGB	1073	1		3.354.748.000
17	03.01.02.00001338	PASURUAN	45	SHM (Sertifikat Hak Milik)	271	1	30/12/1997	0
18	03.01.02.00001339	JAKARTA UTARA	167	SHGB	4785	1		0
19	03.01.02.00001340	JAKARTA BARAT	1806	SHM (Sertifikat Hak Milik)	624/Kapuk	1		0
20	03.01.02.00001341	KAB. TANGERANG	0	SHGB		1		635.255.000
21	03.01.02.00001342	KOTA BEKASI	1690	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1394	1		0
22	03.01.02.00001343	KOTA BEKASI	500	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1395	1		0
23	03.01.02.00001344	KOTA BOGOR	170	SHGB	5/Curug	1		174.490.000
24	03.01.02.00001345	KAB. TANGERANG	195	SHGB	350 / Jalupang	1		677.246.250
25	03.01.02.00001346	KAB. TANGERANG	155	SHGB	514 / Jalupang	1		
26	03.01.02.00001347	KAB. TANGERANG	250	SHGB	1009 / Lengkong Gudang	1		125.188.000
27	03.01.02.00001348	KAB. TANGERANG	90	SHGB	2048 / Kutajaya	1		23.530.500
28	03.01.02.00001349	DEPOK	232	SHGB	127 / Depok	1		258.461.891
29	03.01.02.00001350	KOTA BEKASI	201	SHGB	6062 / Jatibening	1		175.000.000
30	03.01.02.00001351	KOTA BOGOR	85	SHGB	35 / Kedung Waringin	1		7.260.000
31	03.01.02.00001352	KOTA BOGOR	321	SHGB	437 / Baranangsiang	1		0
32	03.01.02.00001353	KOTA TANGERANG	102	SHGB	288 / Bugel	1		54.667.890
33	03.01.02.00001354	DEPOK	70	SHGB	3654 / Sukmajaya	1		104.058.173
34	03.01.02.00001355	KABUPATEN BOGOR	1322	SHM (Sertifikat Hak Milik)	85 / Tugujaya	1		40.000.000
35	03.01.02.00001356	KOTA BEKASI	240	SHU	2760 / Jakasetia	1		27.053.750
36	03.01.02.00001357	KABUPATEN BOGOR	2013060	SHGU	3/CIKOPOMAYAK	1		20.130.600.000
37	03.01.02.00001358	KAB. TANGERANG	328	SHGB	749	1		0
38	03.01.02.00001359	KAB. TANGERANG	1505	SHGB	746	1		0
39	03.01.02.00001360	KAB. TANGERANG	2470	SHGB	1025	1		0
40	03.01.02.00001361	KAB. TANGERANG	1662	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1024	1		0
41	03.01.02.00001362	KAB. TANGERANG	2915	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1023	1		0

COVERNOTE

No.	No. Register	Kabupaten	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
42	03.01.02.00001363	KAB. TANGERANG	2830	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1022	1		0
43	03.01.02.00001364	KAB. TANGERANG	7060	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1021	1		0
44	03.01.02.00001365	KAB. TANGERANG	1470	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1020	1		0
45	03.01.02.00001366	KAB. TANGERANG	665	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1019	1		0
46	03.01.02.00001367	KAB. TANGERANG	1890	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1018	1		0
47	03.01.02.00001368	KAB. TANGERANG	2880	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1017	1		0
48	03.01.02.00001369-B	KAB. TANGERANG	300000	SHU	1	0		46.516.380.000
49	03.01.02.00001369-C	KAB. TANGERANG	2291955	SHU	1	1		22.919.550.000
50	03.01.02.00001370	KABUPATEN BOGOR	1211	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.207.288.000
51	03.01.02.00001372	KABUPATEN BOGOR	883	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		1.789.630.000
52	03.01.02.00001374	KABUPATEN BOGOR	1004	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.034.868.000
53	03.01.02.00001376	KABUPATEN BOGOR	1646	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		3.302.459.000
54b	03.01.02.00001378	KABUPATEN BOGOR	1470	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.979.338.000
54b	03.01.02.00001380	KABUPATEN BOGOR	1220	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.472.648.000
55	03.01.02.00001382	KABUPATEN BOGOR	877	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		1.783.879.000
57	03.01.02.00001383	KABUPATEN BOGOR	946	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		1.923.511.000
59	03.01.02.00001385	KABUPATEN BOGOR	1187	SHGB	PPJB Asli kav pecahan SHGB No.12 Luwinutug dan SHGB 13 Tangkil	1		2.405.765.000
61	03.01.02.00001388	KABUPATEN BANDUNG	0	Girik	Persil No.44 S.II Kohir No.1254	1		0
63	03.01.02.00001389	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1041/Cigugur	1		0
65	03.01.02.00001390	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1071/Cigugur	1		0

COVERNOTE

No.	No. Register	Kabupaten	Luas Tanah	Kepemilikan	Nomor	Jumlah Dokumen	Tanggal Sertifikat	Nilai
67	03.01.02.00001391	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1072/Cigugur	1		0
68	03.01.02.00001392	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1073/Cigugur	1		0
70	03.01.02.00001393	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	731	1		0
73	03.01.02.00001394	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1096/Cigugur	1		0
74	03.01.02.00001395	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	645/Cigugur	1		0
75	03.01.02.00001396	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	536/Cigugur	1		0
76	03.01.02.00001397	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	760/Cigugur	1		0
77	03.01.02.00001398	KABUPATEN BANDUNG	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1095/Cigugur	1		0
78	03.01.02.00001399	JAKARTA SELATAN	889	SHM (Sertifikat Hak Milik)	314	1	08/05/1991	0
79	03.01.02.00001400	KAB. SEMARANG	721	SHM (Sertifikat Hak Milik)	52	1		0
80	03.01.02.00001401	KAB. SEMARANG	478	SHGB	245	1		0
81	03.01.02.00001402	KAB. SEMARANG	294	SHGB	161	1		0
82	03.01.02.00001403	KAB. SEMARANG	244	SHGB	244	1		0
83	03.01.02.00001404	JAKARTA UTARA	193	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1730	1	25/07/1983	0
84	03.01.02.00001405	JAKARTA UTARA	194	SHM (Sertifikat Hak Milik)	1661	1	23/05/1983	0
85	03.01.02.00001406	GRESIK	13740	SHGB	30	1	10/04/1990	799.582.250
86	03.01.02.00001407	GRESIK	5055	SHGB	38	1	24/01/1984	
87	03.01.02.00001408	MAKASSAR	0	SHGB	209	1	11/01/1985	0
88	03.01.02.00001409	SIDOARJO	0	SHM (Sertifikat Hak Milik)	329	1		0
89	03.01.02.00001410	JAKARTA BARAT	141	SHGB	1249	1	20/11/1986	1.098.900.000
90	03.01.02.00001411	JAKARTA BARAT	387	SHGB	114/Mangga Besar	1		8.525.055.000
91	03.01.02.00001412	SIDOARJO	1478	SHM (Sertifikat Hak Milik)	286	1		0
92	03.01.02.00001413	JAKARTA TIMUR	0	SHGB	609/Ujung Menteng	1		688.139.000
Jumlah						80		204.669.928.661

ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2024
Rekening Nostro tercatat dalam Neraca						
1	Bank Dewa Rutji	Bank Ganesha	Bank dalam negeri	Rp3.505.077.847,50	(Rp584.179.642)	Rp2.920.898.205,50
2	BIRA	ClearStream Banking SA sebesar USD258.438,5	Bank luar negeri	0		-
3	Bank Bahari	Coutts Bank Hongkong Branch sebesar USD350.526,24	Bank luar negeri	0		-
Total				Rp3.505.077.847,50	(Rp584.179.642)	Rp2.920.898.206
Rekening Nostro tercatat dalam CaLK						
1	Bank Central Dagang BSKU	Bank CIC, Jakarta	Bank dalam negeri	Rp2.044.748,60		Rp2.044.748,60
3	BUN	BRI Cut Mutiah		Rp83.311.328,35		Rp83.311.328,35
4	BUN	Citibank		Rp8.776.916.074,45		Rp8.776.916.074,45
5	BDNI	BPR Tri Sejahtera Makmur, Jkt		Rp97.686.237,95		Rp97.686.237,95
6	BDNI	Bank Ganesha, Jkt		Rp706.429.119,47		Rp706.429.119,47
7	Bank Dewa Rutji	Bank Ganesha, Jkt		Rp196.059.779,49		Rp196.059.779,49
8	Bank Kharisma BSKU	Bank Aspac	telah dikuidasi (BBO/BSKU)	Rp287.761,43		Rp287.761,43
9	Bank Budi Internasional BSKU	Bank Astria (dalam likuidasi)		Rp6.601.373,85		Rp6.601.373,85
10	Bank Aken BSKU	Bank Central Dagang		Rp625.069,88		Rp625.069,88
11	SANHO	Bank Central Dagang		Rp2.994.990,16		Rp2.994.990,16
14	HOKINDO	Bank Modern		Rp6.207.877,95		Rp6.207.877,95
15	SURYA	Bank Umum Majapahit		Rp122.086.331,08		Rp122.086.331,08
16	SANHO	Bank Umum Servitia		Rp4.887.591,05		Rp4.887.591,05
17	BDNI	BDNI Finance, Hongkong		Rp1.020.060.447,69		Rp1.020.060.447,69
18	HOKINDO	Bank Pelita		Rp6.017.122,84		Rp6.017.122,84
19	ARYA PANDUARTA	Bank Bahari		Rp11.739.033,84		Rp11.739.033,84
20	Bank Kharisma BSKU	Indover Bank	Bank Indover	Rp141.402.439,43		Rp141.402.439,43
21	Bank Hastin Internasional BSKU	Indover Bank		Rp361.433.693,83		Rp361.433.693,83
22	BUS	Indover Bank		Rp2.864.035,05		Rp2.864.035,05
23	BDI	Indover Bank		Rp268.237.424,51		Rp268.237.424,51
24	Bank Sahid Gajah Perkasa BSKU	Indover Bank		Rp109.652.042,65		Rp109.652.042,65
25	BUN	Indover Bank		Rp925.492.300,93		Rp925.492.300,93
26	BUN	Indover Bank		Rp531.317.595,65		Rp531.317.595,65
27	Bank BIRA BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp24.530.231,65		Rp24.530.231,65
28	Bank Modern BBO	Indover Bank, Amsterdam		Rp32.416.251,32		Rp32.416.251,32
29	Bank Asia Pasific BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp16.993.382,21		Rp16.993.382,21
30	Bank Unibank BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp45.288.112,29		Rp45.288.112,29
31	Bank Unibank BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp24.849.497,60		Rp24.849.497,60
32	Bank Mashill Utama BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp354.542.691,02		Rp354.542.691,02
33	Bank Central Dagang BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp92.060.251,91		Rp92.060.251,91
34	Bank Ficorinvent BSKU	Indover Bank, Amsterdam		Rp77.574.756,22		Rp77.574.756,22
35	DHARMALA	Indover Bank, Amsterdam		Rp1.139.267,42		Rp1.139.267,42
36	BDNI	Indover Bank, Amsterdam		Rp11.664.932,40		Rp11.664.932,40
37	BAHARI	Indover Bank, Amsterdam		Rp108.150.696,65		Rp108.150.696,65
38	PESONA	Indover Bank, Amsterdam		Rp120.045.719,99		Rp120.045.719,99
39	Mashil Utama	Indover Bank, Amsterdam		Rp341.740.942,42		Rp341.740.942,42
40	Bank Modern BBO	Indover Bank, Hamburg		Rp195.403.134,60		Rp195.403.134,60
41	Bank Asia Pasific BSKU	Indover Bank, Hamburg		Rp956.004.466,45		Rp956.004.466,45
42	Bank Unibank BSKU	Indover Bank, Hamburg		Rp2.996.775,68		Rp2.996.775,68
43	BAHARI	Indover Bank, Hamburg		Rp254.274.894,54		Rp254.274.894,54

ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2024
44	PESONA	Indover Bank, Hamburg	Bank Indover	Rp27.358.123,38		Rp27.358.123,38
45	BDNI	Indover Ing Bank		Rp122.424.186,80		Rp122.424.186,80
46	BDNI	Bank Indonesia	Bank Indonesia	Rp406.733.525.331,33		Rp406.733.525.331,33
47	BDNI	Rekening Nostro (Unidentified)		Rp2.359.921.197,78		Rp2.359.921.197,78
48	BDNI	Keppel Bank, Singapore	Bank luar negeri	Rp2.257.377.867,88		Rp2.257.377.867,88
49	BDNI	Indovina Bank (Khusus Deviden)		Rp1.758.722.655,31		Rp1.758.722.655,31
50	BDNI	American Express Bank, NY		Rp1.834.239.834,61		Rp1.834.239.834,61
51	BDNI	ANZ Banking Group Bank		Rp666.429.511,70		Rp666.429.511,70
52	PESONA	Banca Comerciale		Rp61.815.826,61		Rp61.815.826,61
53	DHARMALA	Banco Ambrosiano (BAVE)		Rp44.241.246,97		Rp44.241.246,97
54	BDNI	Bank Boston, NA Singapore		Rp2.270.531,95		Rp2.270.531,95
55	SURYA	Bank Brussel Lambert		Rp378.699.549,31		Rp378.699.549,31
56	SURYA	Bank Credit Suisse		Rp234.342.412,12		Rp234.342.412,12
57	Bank Yama BBU	Bank Mashill		Rp58.834.913,90		Rp58.834.913,90
58	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Hongkong		Rp65.028.723,58		Rp65.028.723,58
59	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Kuala Lumpur		Rp41.766.481,92		Rp41.766.481,92
60	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, New York		Rp6.616.463.903,03		Rp6.616.463.903,03
61	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Singapore		Rp266.632.029,06		Rp266.632.029,06
62	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Tokyo		Rp339.690.834,35		Rp339.690.834,35
63	ARYA PANDUARTA	Bank of Nova Scotia, Toronto		Rp357.108.818,21		Rp357.108.818,21
64	HOKINDO	Bank Pacific		Rp6.463.800,47		Rp6.463.800,47
65	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp208.766.445,27		Rp208.766.445,27
66	BDNI	Banque Worms, Singapore		Rp327.222.390,61		Rp327.222.390,61
67	BDNI	BBMB, Kuala Lumpur		Rp1.675.910,59		Rp1.675.910,59
68	BUN	BCCI London		Rp1.312.775.083,50		Rp1.312.775.083,50
69	BUN	BNP Singapore		Rp490.837.088,12		Rp490.837.088,12
70	BDNI	Chase Manhattan Bank, Singapore		Rp4.122.298,55		Rp4.122.298,55
71	BUN	Chemical Bank		Rp909.494.195,25		Rp909.494.195,25
72	BUN	National Australia Bank		Rp980.037.418,44		Rp980.037.418,44
73	BUN	National Australia Bank (Draft)		Rp103.609.247,09		Rp103.609.247,09
74	BUN	National Westminster		Rp1.708.457.513,38		Rp1.708.457.513,38
75	Bank Ficorinvent BBU	National Westminster Bank, London		Rp1.332.284.084,60		Rp1.332.284.084,60
76	BDNI	Security Pacific Nat'l Bank Singapore		Rp25.528.725,87		Rp25.528.725,87
77	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, New York		Rp72.226.080,57		Rp72.226.080,57
78	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Sidney		Rp566.327.485,65		Rp566.327.485,65
79	Bank Modern BBO	Standard Chartered Bank, Tokyo		Rp456.068.074,81		Rp456.068.074,81
80	BDNI	Sumitomo Bank Ltd, Tokyo		Rp1.550.878.033,20		Rp1.550.878.033,20
81	BUN	Summa Hanlebank		Rp219.893.772,84		Rp219.893.772,84
82	BUN	Swiss Bank Corporation		Rp457.663.217,47		Rp457.663.217,47
83	BDNI	The Dai Ichi Kangyo Bank, NY		Rp449.662.818,68		Rp449.662.818,68
84	Bank Modern BBO	UBOC, New York		Rp25.317.208,51		Rp25.317.208,51
85	BUN	UMBC Kuala Lumpur		Rp230.472.902,02		Rp230.472.902,02
86	Bank Central Dagang BBU	Union Bank of California		Rp124.810.097,58		Rp124.810.097,58
87	Bank Metropolitan BBU	Union Bank of California		Rp22.488.860,17		Rp22.488.860,17
88	Bank Central Dagang BBU	Union Bank of Switzerland, Zurich		Rp93.484.495,37		Rp93.484.495,37
89	Bank Modern BBO	United Bank of Swiss, Switzerland		Rp51.007.390,52		Rp51.007.390,52
90	BDNI	United Pacific Bank, LA		Rp1.926.555.302,27		Rp1.926.555.302,27

ASET NOSTRO

No	Eks. Bank Asal	Bank Penyimpan	Status Bank Penyimpan	Nilai per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai per 31 Desember 2024
91	PESONA	Westpac Bank Sidney	Bank luar negeri	Rp7.752.795,93		Rp7.752.795,93
92	Masih dalam penelusuran			Rp508.554.149,20		Rp508.554.149,20
Total				Rp454.445.361.290,83		Rp454.445.361.290,83

SURAT BERHARGA NON SAHAM EKS BPPN

No.	Nama Aset	Nominal	Mata Uang	Nilai Konversi Rupiah per 31 Desember 2023	mutasi	Nilai Konversi Rupiah per 30 September 2024
a. Corporate Bonds						
1	DGS International Finance Co.	0,01	USD	-	-	-
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	102	USD	70.782.959.435	3.291.804.189	74.074.763.624
3	TPE International Finance Co. Bv	1	USD	3.859.750.000	179.500.000	4.039.250.000
4	Ciputra Surya	38.750.000	IDR	38.750.000	-	38.750.000
5	Jakarta International Hotel	800.000.000	IDR	800.000.000	-	800.000.000
6	Mulia Glass	38.125.000	IDR	38.125.000	-	38.125.000
7	Mulia Keramik	38.125.000	IDR	38.125.000	-	38.125.000
8	Polysindo Eka Perkasa	2	USD	972.657.000	45.234.000	1.017.891.000
9	TPE International Finance Co. Bv	1	USD	308.780.000	14.360.000	323.140.000
10	Bank Papan	100	IDR	500.000.000	-	500.000.000
11	Polysindo Eka Perkasa	2	USD	1.296.876.000	60.312.000	1.357.188.000
12	Polysindo Eka Perkasa	88	USD	2.478.692.544	115.273.091	2.593.965.634
Total				81.114.714.978	3.706.483.280	84.821.198.258
b. Medium Term Notes						
1	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	94	USD	2.639.103.908	122.733.118	2.761.837.026
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	90	USD	277.902.000.000	12.924.000.000	290.826.000.000
3	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	90	USD	13.347.077.256	620.713.872	13.967.791.128
4	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	90	USD	13.420.443.384	624.125.808	14.044.569.192
5	Hutama Karya	100	USD	15.439.000.000	718.000.000	16.157.000.000
6	Hutama Karya	100	USD	15.439.000.000	718.000.000	16.157.000.000
7	Hutama Karya	100	USD	15.439.000.000	718.000.000	16.157.000.000
8	Hutama Karya	100	USD	77.195.000.000	3.590.000.000	80.785.000.000
Total				430.820.624.548	20.035.572.798	450.856.197.346
c. Non-Convertible Debentures						
1	Polysindo Eka Perkasa	100	IDR	5.000.000.000	-	5.000.000.000
Total				5.000.000.000	-	5.000.000.000
Total (a+b+c)				516.935.339.526	23.742.056.077	540.677.395.604

Catatan:	
Kurs JISDOR	31 Desember 2024
1 Dollar Amerika	15.144,00

ASET SAHAM EKS BPPN

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian
1	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	32.137.300	35	1.928.238.000	(803.432.500)	1.124.805.500	Aktif	Nilai saham berdasarkan harga penutupan tanggal 31 Desember 2024 pada situs BEI (https://www.idx.co.id/)
2	PT Apac Citra Centertex, Tbk (PT Asia Pacific Investama, Tbk) (MYTX)	Manufaktur Textile	Sertifikat	37.459.700	35	2.247.582.000	(936.492.500)	1.311.089.500	Aktif	Nilai saham berdasarkan harga penutupan tanggal 31 Desember 2024 pada situs BEI (https://www.idx.co.id/)
3	PT Aster Dharma Ind.	-	Scripless	40.000	850	34.000.000	-	34.000.000	Status Emiten Tidak Diketahui. Saham delisted	1. Nilai berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 30 Desember 2022.
4	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	46.250	75	3.468.750	-	3.468.750	BBO	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.
5	PT Bank Dagang Nasional Indonesia	-	Sertifikat	363	75	27.225	-	27.225	BBO	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.
6	PT Bank Ficorinvest	-	Sertifikat	400	50	20.000	-	20.000	BBKU	1. Nilai per tanggal 28 Februari 2007 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.
7	PT Bank PDFCI	-	Sertifikat	250	350	87.500	-	87.500	BTO	1. Nilai per tanggal 28 April 2006 berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022.
8	PT Bank Surya	-	Sertifikat	800	300	240.000	-	240.000	BBO	
9	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scripless	11.304.425	26	135.653.100	158.261.950	293.915.050	Aktif	
10	PT Citatah Tbk (CTTH)	Penggalian batu alam, pengolahan, desain dan distribusi bahan bangunan	Scripless	41.421.439	26	497.057.268	579.900.146	1.076.957.414	Aktif	
11	PT Gajah Tunggal, Tbk (GJTL)	Manufaktur Ban	Sertifikat	200	1.120	207.000	17.000	224.000	Aktif	
12	PT Holcim Indonesia, Tbk (PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk) (SMCB)	Manufaktur Semen	Sertifikat	13.898.500	750	18.693.482.500	(8.269.607.500)	10.423.875.000	Aktif	
13	PT Langgeng Makmur Industri, Tbk (LMPI)	Manufaktur Plastik	Scripless	57.901.002	136	6.427.011.222	1.447.525.050	7.874.536.272	Aktif	
14	PT Star Pacipic, Tbk (dlh. PT Lippo E-Net) (LPLI)	Investasi dan bisnis media	Sertifikat	100	254	23.400	2.000	25.400	Aktif	

ASET SAHAM EKS BPPN

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian
15	PT Merck, Tbk. (MERK)	Farmasi dan Kimia	Sertifikat	100	3.600	409.000	(49.000)	360.000	Aktif	
17	PT Multi Sarana R. Agung	-	Sertifikat	94.600	675	63.855.000	-	63.855.000	Status Emiten Tidak Diketahui. Saham delisted	
18	PT Perdana Inti Investama	-	Sertifikat	49.251.500	50	2.462.575.000	-	2.462.575.000	Status Emiten Tidak Diketahui	
19	PT Prima Alloy Steel Universal, Tbk (PRAS)	Manufaktur velg Kendaraan (Industri Otomotif)	Sertifikat	2.500	97	242.500	-	242.500	Aktif	
20	PT Sreeya Sewu Indonesia (PT Sierad Produce, Tbk (SIPD)	Peternakan	Scripless	1.918.865	825	1.870.893.375	(287.829.750)	1.583.063.625	Aktif	
21	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Sertifikat	700	2.170	7.105.000	(5.586.000)	1.519.000	Aktif	
22	PT Sucaco, Tbk (PT Supreme Cable Manufacturing, Tbk) (SCCO)	Manufaktur Kabel	Scripless	348.000	2.170	3.532.200.000	(2.777.040.000)	755.160.000	Aktif	
23	PT Trias Sentosa, Tbk (TRST)	Manufaktur polypropylene dan polyester film	Sertifikat	100	600	47.400	12.600	60.000	Aktif	
Total						37.904.425.240	(10.894.318.504)	27.010.106.736		

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian
1	PT Karabha Digdaya	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga golf	100,00%	10.000	0	-	-	-	Aktif	Telah diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020
2	PT Aqua Golden Mississippi	Consumer Goods	0,00%	312	312.000	312.000	-	312.000	Aktif	Nilai nominal saham berdasarkan surat Presiden Direktur PT Aqua GM No. 106/PD/AGM/XI/2021 tanggal 30 November 2021

ASET SAHAM EKS BPPN

No.	Nama Emiten	Core Business	Persentase Kepemilikan	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian
3	PT Kabelindo Murni, Tbk (KBLM)	Manufaktur Kabel	6,24%	69.882.400	290	18.728.483.200	1.537.412.800	20.265.896.000	Aktif	Nilai saham berdasarkan harga penutupan tanggal 31 Desember 2024 pada situs BEI (https://www.idx.co.id/)
4	PT Permadani Khatulistiwa Nusantara	Perhotelan		1.218	0	-	-	-	Aktif	
5	PT Sarana Maluku Ventura		0,00%	-	0	-	-	-	-	Pada laporan TW 3 tercatat Nilai nominal saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura No 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Setelah ditelusuri, lembar saham merupakan saham yang berasal dari BDL. Saham SMV yang berasal dari eks BPPN hanya sejumlah 63.106, tercatat pada data saham eks PPA
Total						18.728.795.200	1.537.412.800	20.266.208.000		
Total Aset Saham Eks BPPN						56.633.220.440	(9.356.905.704)	47.276.314.736		

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
1	Neraca (BS)	Kompleks Perumahan Bangun Rekso Asri Blok CK, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Batu Ampar, Kec Balikpapan Utara, Kota Balikpapan	PSP kepada BPOM sesuai Kepdirjen KN No. KEP-155/KN/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan BAST nomor BAST-232/KN/2023 tanggal 20 November 2023	1	8.673.500.000	(1)	(8.673.500.000)	-	-
2	Neraca (BS)	Perumahan Taman Bumiyagara, Komplek Bumi Rinjani, RT/RW 01/21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	PSP pada Kementerian Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 143/KN/2023 tanggal 22 September 2023 dan BAST no. 231/KN/2023 tanggal 20 November 2023. koreksi karena nilai sudah dikurangi pada semester sebelumnya namun unit belum berkurang	4	-	(4)	-	-	-
4	Neraca (BS)	JALAN SICANANG, DESA BELAWAN SICANANG	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Medan No.LAP-0361/1/PRO-01/KNL.0201/01.01.00/2023 tanggal 15 Desember 2023	1	6.536.500.000	-	33.035.699.000	1	39.572.199.000
5	Neraca (AT)	Jl. Wijaya Kusuma No. 53 - 55, Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya - Jawa Timur	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Surakarta No. LAP-0084/1/PRO-01/KNL.0902/01.01.00/2023 tanggal 25 September 2023. Selanjutnya PSP kepada Kementerian Pertahananr sesuai Kepdirjen Nomor KEP-23/KN/2024 tanggal 18 Februari 2024 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024	1	25.676.470.000	(1)	(25.676.470.000)	-	-
6	Neraca (BS)	Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Surakarta No. LAP-0084/1/PRO-01/KNL.0902/01.01.00/2023 tanggal 25 September 2023. Selanjutnya PSP kepada Kementerian Pertahanan sesuai Kepdirjen Nomor KEP-23/KN/2024 tanggal 18 Februari 2024 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024	1	14.917.000.000	(1)	(14.917.000.000)	-	-
7	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah Cluster Telaga Bukit Menteng Blok A15/21 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor - Jawa Barat	Serah Kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan BAST nomor BA-1/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	1	231.400.000	(1)	(231.400.000)	-	-
8	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok A15/22 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Bogor - Jawa Barat	Serah Kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan BAST nomor BA-1/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	1	460.900.000	(1)	(460.900.000)	-	-
9	Neraca (BT)	Komplek Ruko Cibening Permai, Jalan KH. Noer Ali (Kalimalang) No. 24 - 25, Kel. Jakasampurna, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi	Serah Kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan BAST nomor BA-1/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	2	2.774.400.000	(2)	(2.774.400.000)	-	-
10	Neraca (AT)	Perumahan Kemang Pratama Raya Blok MM No. 10 dan 11, Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi, 17116	Serah Kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan BAST nomor BA-1/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	2	1.170.500.000	(2)	(1.170.500.000)	-	-
11	Neraca (BS)	Ruko Niaga jaya Jalan Proklamasi Blok C No. 26, Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Prop. Jawa Barat	Serah Kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan BAST nomor BA-1/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	1	202.903.333	(1)	(202.903.333)	-	-
12	Neraca (BS)	Jalan Proklamasi Blok B No. 23-24, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Prop. Jawa Barat	Serah Kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan BAST nomor BA-1/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	2	444.000.000	(2)	(444.000.000)	-	-
13	Neraca (Covernote BD)	CONDOMINIUM GOLF KARAWACI FAIRWAY TOWER, JL. JEND. SUDIRMAN BLVD 2890, LT. 6 UNIT 6 H, KELAPA DUA - CURUG	Serah Kelola ke LMAN sesuai Kepdirjen KN No. KEP-183/KN/2023 tanggal 21 Desember 2023 dan BAST nomor BA-1/KN.4/2024 tanggal 8 Januari 2024	1	648.500.000	(1)	(648.500.000)	-	-
14	Neraca (AT)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok A5, Kel Cempaka Putih, Kec Ciputat, Tangerang, Banten	Dinaikkan ke Neraca karena telah ditemukan dokumen kepemilikan asli berupa SHGB nomor 451/Cempaka Putih an PT Kharisma Bank			1	2.242.000.000	1	2.242.000.000
15	Neraca (AT)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B17, Kel Cempaka Putih, Kec Ciputat, Tangerang, Banten	Dinaikkan ke Neraca karena telah ditemukan dokumen kepemilikan asli berupa SHGB nomor 435/Cempaka Putih an PT Kharisma Bank			1	1.774.000.000	1	1.774.000.000
16	Neraca (AT)	KOMPLEK RUKO CIPUTAT MEGA MAL BLOK B N018, JL IR H JUANDA N034 - CIPUTAT	Dinaikkan ke Neraca karena telah ditemukan dokumen kepemilikan asli berupa SHGB nomor 452/Cempaka Putih an PT Kharisma Bank			1	1.774.000.000	1	1.774.000.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
17	Neraca (AT)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok B19, Kel Cempaka Putih, Kec Ciputat, Tangerang, Banten	Dinaikkan ke Neraca karena telah ditemukan dokumen kepemilikan asli berupa SHGB nomor 453/Cempaka Putih an PT Kharisma Bank			1	1.774.000.000	1	1.774.000.000
18	Neraca (BS)	KOMPLEKS PERGUDANGAN PAYA RUMPUT, JL PULAU NIAS, KAWASAN INDUSTRI MEDAN (KIM), TITI PAPAN - MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Medan No LAP-0363/1/PRO-06/KNL0201/010000/2023 tanggal 15 Desember 2023	3	16.762.200.000	-	58.946.586.000	3	75.708.786.000
19	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C6/23, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	653.700.000	-	320.394.000	1	974.094.000
20	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C6/34, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	698.100.000	-	341.610.000	1	1.039.710.000
21	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C6/35, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	662.400.000	-	331.984.000	1	994.384.000
22	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C8/5, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	212.100.000	-	107.965.000	1	320.065.000
23	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C8/18, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	2	311.400.000	-	154.293.000	2	465.693.000
24	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C8/19, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	364.500.000	-	180.194.000	1	544.694.000
25	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D1/62, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	241.100.000	-	123.224.000	1	364.324.000
26	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D1/71, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	195.700.000	-	82.486.000	1	278.186.000
27	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D1/75, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	184.200.000	-	111.577.000	1	295.777.000
28	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D1/108, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	313.400.000	-	198.056.000	1	511.456.000
29	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D8/5, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	364.500.000	-	195.746.000	1	560.246.000
30	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D8/6, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	321.100.000	-	172.755.000	1	493.855.000
31	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D8/7, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	292.200.000	-	157.349.000	1	449.549.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
32	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D8/15, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	452.200.000	-	242.051.000	1	694.251.000
33	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D9/12 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	324.000.000	-	170.389.000	1	494.389.000
34	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D9/17 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	2	293.100.000	-	149.582.000	2	442.682.000
35	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D9/20, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	323.000.000	-	169.925.000	1	492.925.000
36	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D9/22, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	463.800.000	-	227.892.000	1	691.692.000
37	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D10/54, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	337.500.000	-	166.742.000	1	504.242.000
38	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok D10/78 Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	267.100.000	-	132.383.000	1	399.483.000
39	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok E1/55, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	130.200.000	-	69.006.000	1	199.206.000
40	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Bukit Bunga Blok E5/17, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	231.400.000	-	122.217.000	1	353.617.000
41	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C8/22, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	427.100.000	-	248.662.000	1	675.762.000
42	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C8/23, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	467.600.000	-	223.339.000	1	690.939.000
43	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C8/24, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	301.800.000	-	435.908.000	1	737.708.000
44	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C9/16, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	512.000.000	-	244.124.000	1	756.124.000
45	Neraca (AT)	Perumahan Citra Indah, Cluster Telaga Bukit Menteng Blok C9/17, Desa Sukamaju, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor	Perubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Inventarisasi dan Penilaian oleh KPKNL Bogor sesuai ND Kepala Kanwil Jawa Barat nomor ND-519/WKN.08/2024 tanggal 30 April 2024	1	592.000.000	-	281.588.000	1	873.588.000
46	Neraca (AT)	Jalan Mayor Zn Lorong Abadi RT 03 RW 02, Kel. Sungai Selincih, Kec. Kalidoni, Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenatrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	1.589.800.000	-	10.191.958.000	1	11.781.758.000
47	Neraca (BS)	Jalan H. Faqih Usman Lorong Bakti RT 34 RW VII Kel. Satu Ulu, Kec. Seberang Ulu Satu, Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenatrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	135.800.000	-	114.048.000	1	249.848.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
48	Neraca (BS)	Jl. Kapt.Abdullah No.16 RT 22 RW.1 Kel. Talang Putri Kec. Plaju Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	617.200.000	-	983.858.000	1	1.601.058.000
49	Neraca (BS)	Jalan Jaya 7 Lorong Iematang No. 997 RT 18 RW IV, Kel. Enam belas Ulu, Kec. Seberang Ulu Dua Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	93.700.000	-	223.360.000	1	317.060.000
50	Neraca (BS)	Jl. Di Panjaitan No. 1630 Rt 32/10, 16 Ulu - Seberang Ulu II	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	603.200.000	-	1.558.465.000	1	2.161.665.000
51	Neraca (BS)	Jalan Kapten M. Nur Gg. Taman Sari II RT 03 RW 03, Kel. Sukaraya, Kec. Baturaja Timur Kab Ogan Komering Ulu	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	44.600.000	-	204.950.000	1	249.550.000
52	Neraca (BS)	Jalan Merdeka Lorong Terusan RT 01 LK 1 Kel. Terukis Rahayu Kec. Martapura, Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	2	108.000.000	-	536.392.000	2	644.392.000
53	Neraca (BS)	JL. SUKARELA, LORONG MATARAM RT/RW 16/05, Kel. Sukarami, Kec. Sukarami, Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	505.000.000	-	4.843.895.000	1	5.348.895.000
54	Neraca (AT)	Perumahan Banten Indah Blok B6 No. 483 RT 07 RW II, Kel. Enam belas Ulu, Kec. Seberang Ulu Dua, Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	301.560.000	-	(61.432.000)	1	240.128.000
55	Neraca (BS)	Komplek Garuda Putra II, Jl. Gatra I No. 39 RT 26 RW IX, Kel. Delapan Ilir, Kec. Ilir Timur Tiga, Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	193.200.000	-	203.861.000	1	397.061.000
56	Neraca (BS)	Jl. Lorong Manggis I Gg Hijrah RT/RW 20/04, Kec. Sungai Selincah, Kec. Kalidoni, Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	682.600.000	-	(78.803.000)	1	603.797.000
57	Neraca (BS)	Jl. Demang Lebardaun, Lorong Sempurna II No. 2373 RT/RW 42/12, Kel. Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat Satu	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	1.245.200.000	-	10.452.009.000	1	11.697.209.000
58	Neraca (BS)	Jl. Soak Simpur No. 105 Rt/Rw 80/12, Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Kota Palembang	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	1.179.500.000	-	8.497.732.000	1	9.677.232.000
59	Neraca (BS)	Desa Lorok RT 04 Dusun 02 Kec. Inderalaya Utara Kab. Ogan Ilir	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Palembang sesuai ND Kepala Kanwil DJKN SJB nomor ND-1644/WKN.04/2023 tanggal 20 Desember 2023	1	437.000.000	-	(243.810.000)	1	193.190.000
60	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-3 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	96.222.000	1	228.222.000
61	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-1 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	228.800.000	-	172.258.000	1	401.058.000
62	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok G-1 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	224.400.000	-	172.105.000	1	396.505.000
63	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok F-29 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	98.201.000	1	230.201.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
64	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok F-38 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	98.201.000	1	230.201.000
65	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok F-1 Desa Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	280.500.000	-	156.822.000	1	437.322.000
66	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok J-7 Desa Bulu Sidokare, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	98.201.000	1	230.201.000
67	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok B-1 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	2	209.000.000	-	160.294.000	2	369.294.000
68	Neraca (BS)	Jl. Mongonsidi, Desa Sidoklompok, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	441.300.000	-	1.636.668.000	1	2.077.968.000
69	Neraca (BS)	Jl. Raya Bibis Timur No. 3, Desa Tambak Kemerakan, Kecamatan Krian, Propinsi Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	86.500.000	-	731.687.000	1	818.187.000
70	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-7A Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	225.500.000	-	169.741.000	1	395.241.000
71	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-7B Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	207.900.000	-	156.493.000	1	364.393.000
72	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-6B Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	98.165.000	1	230.165.000
73	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-6A Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	98.165.000	1	230.165.000
74	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-6 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	98.165.000	1	230.165.000
75	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-4 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	98.165.000	1	230.165.000
76	Neraca (BS)	komplek perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok H-12 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	223.300.000	-	171.213.000	1	394.513.000
77	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok G-5 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	132.000.000	-	98.165.000	1	230.165.000
78	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok B-19 Desa Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Sidoarjo - Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	194.700.000	-	143.321.000	1	338.021.000
79	Neraca (BS)	Komplek Perumahan Bumi Citra Fajar Sekawan Molek II Blok B-31	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	206.000.000	-	194.343.000	1	400.343.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
80	Neraca (BS)	Jl. Kepodang , Desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo , Propinsi Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	515.140.000	-	1.261.633.000	1	1.776.773.000
81	Neraca (AT)	Jl. Sekuti Indah Blok-5, Kelurahan Lumbungrejo, Kecamatan Prigen, Pasuruan	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	324.190.000	-	66.945.000	1	391.135.000
82	Neraca (BS)	Desa Randugong Kelurahan Randugong, Kecamatan Kejayan, Pasuruan	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	8	1.041.750.000	-	2.911.400.000	8	3.953.150.000
83	Neraca (BS)	Jl.Gajahmada, Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	3.517.800.000	-	6.227.231.000	1	9.745.031.000
84	Neraca (BS)	Jl. Dukuh, Desa Seduri, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Sidoarjo sesuai ND Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur nomor ND-183/WKN.10/2024 tanggal 2 Februari 2024	1	184.400.000	-	445.802.000	1	630.202.000
85	Neraca (BS)	Jalan Bojong Indah Raya No.39, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	3	4.268.409.960	-	9.711.856.040	3	13.980.266.000
86	Neraca (AT)	Perum Interkota Blok C2 Nomor 9- 10, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	1.210.129.895	-	649.605.105	1	1.859.735.000
87	Neraca (BS)	Perumahan Taman Meruya Ilir Blok J-4 No. 14, Jl. Jamrud 4, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	687.800.000	-	798.879.000	1	1.486.679.000
88	Neraca (BS)	Komplek Kejaksaan Agung Blok H Nomor 10, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	1.656.150.000	-	1.581.545.000	1	3.237.695.000
89	Neraca (BS)	Masuk dari Jalan Saidi Ke Dalam 1 Km, Jalan Gotong Royong II, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	1.607.760.000	-	3.288.809.000	1	4.896.569.000
90	Neraca (BS)	Jalan Genteng Ijo No. 80, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	2	20.378.000.000	-	20.060.742.000	2	40.438.742.000
91	Neraca (BS)	Jalan Intercon Taman Kebon Jeruk Blok Q8/3, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	889.000.000	-	2.549.130.000	1	3.438.130.000
92	Neraca (AT)	Ruko Bona Indah Gaden Blok 42/D Kav. 11 Plaza Bona Lebak Bulus, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	2	3.370.000.000	-	1.995.561.000	2	5.365.561.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
93	Neraca (BS)	Jalan Kemandoran VII, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	2	12.368.400.000	-	22.466.396.000	2	34.834.796.000
94	Neraca (BS)	Komp. DKI Blok BB No. 8, RT. 008/04, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	378.278.569	-	1.109.167.431	1	1.487.446.000
95	Neraca (BS)	Jalan Kebon Kacang XVIII No. 4 RT/RW 003/04, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	1.158.200.000	-	3.481.330.000	1	4.639.530.000
96	Neraca (BS)	Jalan Mampang Prapatan II, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	2	2.853.800.000	-	4.897.546.000	2	7.751.346.000
97	Neraca (BS)	Jalan Pancoran Barat I No. 15, RT 003 RW 06, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	2.175.350.000	-	6.305.426.000	1	8.480.776.000
98	Neraca (BS)	Jalan Zeni IV Nomor 41, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	2	4.102.100.000	-	1.820.097.000	2	5.922.197.000
99	Neraca (BS)	Jalan Patra Tomang I No.11 Kel. Duri Kapa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	2.919.000.000	-	2.058.963.000	1	4.977.963.000
100	Neraca (BS)	Perumahan Bojong Indah Jalan Bawang Merah I No.20 Blok F 4/5 RT.08 RW.07, Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	291.460.000	-	877.044.000	1	1.168.504.000
101	Neraca (BS)	Jalan Utama Selatan No.1A-1B RT.03 RW.03 Kel. Cengkareng Barat, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	544.485.600	-	1.600.814.400	1	2.145.300.000
102	Neraca (BS)	Jalan Kebon Jeruk XV No.3, Kel. Maphar, Kec. Taman Sari, Jakarta Barat	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	2	741.891.369	-	2.569.929.631	2	3.311.821.000
103	Neraca (BS)	Jalan Srengseng Inpres No.52 RT.02 RW.04 Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	645.030.568	-	1.002.713.432	1	1.647.744.000
104	Neraca (BS)	Jalan Musyawarah 2 RT.15 RW.02, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	847.527.542	-	1.305.660.458	1	2.153.188.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
105	Neraca (BS)	Jalan Villa Cinere Mas RT.03 RW.03 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	3.278.000.000	-	20.177.017.000	1	23.455.017.000
106	Neraca (BS)	Jalan Garuda No.20 RT.06 RW.06 Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	1.143.510.000	-	940.847.000	1	2.084.357.000
107	Neraca (BS)	Jalan Tangkas IX Blok B 13 Kel. Petukangan Selatan, Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	701.000.000	-	362.299.000	1	1.063.299.000
108	Neraca (BS)	Jalan Mesjid Darussalam No.37 RT.04 RW.05 Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	1.077.570.000	-	2.359.969.000	1	3.437.539.000
109	Neraca (BS)	Jalan Bangka IX No. 62 RT.07 RW.10 Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	2.941.000.000	-	4.508.745.000	1	7.449.745.000
110	Neraca (AT)	Jalan Batu Kecubung No. 10 Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	946.729.000	-	1.476.006.000	1	2.422.735.000
111	Neraca (BS)	Perumahan Menteng Metropolitan Blok E3 No. 12, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	855.600.000	-	1.199.629.000	1	2.055.229.000
112	Neraca (BS)	Perumahan Menteng Metropolitan Blok E3 No. 4, Kel. Ujung Menteng, Kec. Cakung, Jakarta Timur	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	701.914.000	-	1.207.865.000	1	1.909.779.000
113	Neraca (BS)	Jalan Gading Mas Barat Raya No.15 RT.05 RW.11, Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara	Perrubahan nilai sesuai penyampaian laporan hasil Invenstrisasi dan Penilaian oleh KPKNL Jakarta III sesuai ND Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta nomor ND-260/WKN.07/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan ND-360/WKN.07/2024 tanggal 8 Februari 2024	1	3.264.000.000	-	118.647.000	1	3.382.647.000
114	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 14 lantai 14 No. H Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024. Selanjutnya PSP kepada Kepolisian Negara RI sesuai Kepdirjen Nomor 71/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 (Belum BAST)	-	-	1	1.087.394.000	1	1.087.394.000
115	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 19 No. H Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024. Selanjutnya PSP kepada Kepolisian Negara RI sesuai Kepdirjen Nomor 71/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 (Belum BAST)	-	-	1	1.087.394.000	1	1.087.394.000
116	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 21 No. D Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024	-	-	1	1.129.085.000	1	1.129.085.000
117	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 22 No. H Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024	-	-	1	1.129.085.000	1	1.129.085.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
118	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai dasar bawah No. G Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan.	Penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024. Selanjutnya PSP kepada Kepolisian Negara RI sesuai Kepdirjen Nomor 71/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 (Belum BAST)	-	-	1	1.322.338.000	1	1.322.338.000
119	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 27 No. B Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024	-	-	1	1.129.085.000	1	1.129.085.000
120	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 28 No. C Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024. Selanjutnya PSP kepada Kepolisian Negara RI sesuai Kepdirjen Nomor 71/KN.2024 tanggal 21 Juni 2024 (Belum BAST)	-	-	1	1.129.085.000	1	1.129.085.000
121	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 9 lantai 29 No. B Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024	-	-	1	1.129.085.000	1	1.129.085.000
122	Neraca (AT)	DI DESA NEGERI KATON DAN DESA GEDONG HARTA, KEC SELAGAI LINGGA (DHL KEC PADANG RATU), KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Metro No LAP-0194/1/PRO-01/KNL0503/010000/2024 tanggal 3 April 2024	1	30.936.450.000	-	44.766.257.000	1	75.702.707.000
123	Neraca (BS)	JL SAMANHUDI, BHAKTI KARYA - BINJAI SELATAN	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Medan No LAP-0087/1/PRO-06/KNL0201/010100/2024 tanggal 17 April 2024	1	1.005.600.000	-	804.296.000	1	1.809.896.000
124	Neraca (BT)	JI Dadali No 7 Perumahan P & K, Kelurahan Penangcangan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Propinsi Banten	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Serang No LAP-0087/1/PRO-06/KNL0201/010100/2024 tanggal 17 April 2024. Selanjutnya PSP kepada Kementerian Agama sesuai Kepdirjen Nomor 56/KN/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan BAST nomor BA-221/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024	1	208.320.000	(1)	(208.320.000)	-	-
125	Neraca (BS)	JL. KETIMUN, KOMP. RUKO PANGKEP, KEL. MAPPASALE, KEC. PANGKAJENE, KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN, PROVINSI SULAWESI SELATAN	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Makassar No LAP-0118/1/PRO-06/KNL.1502/06.00.00/2024 tanggal 24 April 2024	1	82.500.000	-	101.204.600.000	1	101.287.100.000
126	Neraca (BS)	Komplek P & K, Jl Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Dangdeur, Kec. Subang, Kab. Subang, Jawa Barat	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Purwakarta No. LAP-0058/1/PRO-01/KNL.0804/01.00.00/2024 tanggal 30 April 2024.	1	20.800.000	-	248.069.000	1	268.869.000
127	Neraca (BS)	Perumahan Citra Damai Blok B No. 07, Palembang	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Palembang No LAP-0153/1/PRO-01/KNL.0402/01.03.01/2024 tanggal 02 Mei 2024	2	363.400.000	-	(11.831.000)	2	351.569.000
128	Neraca (BS)	Komplek Yaktapena II, Jalan Yaktapena II No. IIB. RT 12 RW IV Kel. Enam belas Ulu, Kec. Seberang Ulu Dua, Kota Palembang	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Palembang No LAP-0152/1/PRO-01/KNL.0402/01.03.01/2024 tanggal 02 Mei 2024	1	125.960.000	-	898.567.000	1	1.024.527.000
129	Neraca (BT)	KOMPLEKS PU, LORONG DAMAI II No. 625 RT/RW 011/004, SEKIP JAYA - KEMUNING	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Palembang No LAP-0154/1/PRO-01/KNL.0402/01.03.01/2024 tanggal 02 Mei 2024	1	197.600.000	-	700.523.000	1	898.123.000
130	Neraca (BS)	JALAN PEJATEN RAYA NO. 48 RT/RW. 013/02, KELURAHAN JATIPADANG, KECAMATAN PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Jakarta III No LAP-0106/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024 tanggal 08 Mei 2024	1	4.580.300.000	-	4.536.854.000	1	9.117.154.000
131	Neraca (BS)	Jalan Warung Silah No 100 RT 003 RW 04, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Jakarta III No LAP-0108/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024 tanggal 08 Mei 2024	1	709.800.000	-	2.576.169.000	1	3.285.969.000
132	Neraca (BS)	PERUMAHAN CITRA GARDEN I EXTENSION BLOK AD 4 NO. 12 RT/RW 08/12, KALIDERES	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Jakarta III No LAP-0109/1/PRO-01/KNL.0703/01.01.00/2024 tanggal 08 Mei 2024	1	1.300.311.123	-	1.720.083.877	1	3.020.395.000
133	Neraca (BS)	Jalan Raya Pangalengan, Desa Margamukti, Kec. Pangalengan Kab. Bandung	Laku lelang pada KPKNL Bandung berdasarkan Salinan Risalah Lelang nomor 682/30/2024 tanggal 2 April 2024	1	728.000.000	(1)	(728.000.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
134	Neraca (BS)	JL. BANDA ACEH - MEDAN (LHOKSEUMAWE - BIREUN), DESA MEURIA PALOH, KEC.MUARA DUA, LHOKSEUMAWE (D.H. ACEH UTARA)	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Lhoksemawe No. LAP-0058/1/PRO-06/KNL.0102/06.00.00/2024 tanggal 08 Mei 2024	1	1.158.400.000	-	(694.974.000)	1	463.426.000
135	Neraca (BS)	JL. Lorong DS. Bangka Jaya, Kec. Dewantara dan JL. Stasiun Ds. Keude Cunda, Kec. Muara Dua, Lhokseumawe	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Lhoksemawe No. LAP-0057/1/PRO-06/KNL.0102/06.00.00/2024 dan LAP-0059/1/PRO-06/KNL.0102/06.00.00/2024 tanggal 08 Mei 2024	2	610.562.042	-	553.478.958	2	1.164.041.000
136	Neraca (BS)	KOMPLEK SOLO BARU BLOK IF 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20, DESA MADEGONDO, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH.	Iaku lelang pada KPKNL Surakarta sesuai Risalah Lelang nomor 500/2013 tanggal 28 Maret 2013	12	1.728.300.000	(12)	(1.728.300.000)	-	-
137	Neraca (BS)	PERUM SOLOBARU KAV IG 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Iaku lelang pada KPKNL Surakarta sesuai Risalah Lelang nomor 500/2013 tanggal 28 Maret 2013	7	-	(7)	-	-	-
138	Neraca (AT)	Jalan KI Hajar Dewantara, Desa Karangasih (d/h Waluja), Kec. Cikarang, Kab. Bekasi, Jawa Barat	PSP kepada Kementerian Keuangan c.q. DJBC sesuai Kepdirjen Nomor 57/KN/2024 tanggal 3 Juni 2024 dan BAST nomor BA-218/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024	4	33.261.111.000	(4)	(33.261.111.000)	-	-
139	Neraca (BS)	JL. PLUMPANG SEMPER, GG. WALANG BARU DALAM BLOK V NO. 3 B, KEL. TUGU UTARA, KEC. KOJA, JAKARTA UTARA	PSP kepada Kementerian Pertahanan sesuai Kepdirjen Nomor 174/KN/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024.	1	26.131.909.000	(1)	(26.131.909.000)	-	-
140	Neraca (BS)	Jalan Cipedes Tengah No. 80 Kel. Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Bandung No. LAP-0160/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2024 tanggal 22 Mei 2024	1	917.000.000	-	1.130.094.000	1	2.047.094.000
141	Neraca (BS)	Jalan Sersan Sodik No. 6, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Bandung No. LAP-0161/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2024 tanggal 22 Mei 2024	2	950.240.000	-	2.731.694.000	2	3.681.934.000
142	Neraca (BS)	JL. CIPTO MANGUNKUSUMO GG. DANAU RANAU IV NO. 10 RT/RW 011/04, SUMUR BATU - TELUK BETUNG UTARA	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor LAP-0063/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024 Tanggal 22 Mei 2024	1	220.024.390	-	137.902.610	1	357.927.000
143	Neraca (BS)	JL. JOHAR/JL. PELITA (TPA DARUSSALAM), DESA PRINGSEWU UTARA, KEC. PRINGSEWU, KAB. PIRINGSEWU, PROVINSI LAMPUNG.	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Bandar Lampung Nomor LAP-0064/1/PRO-01/KNL.0502/01.01.00/2024 Tanggal 22 Mei 2024	1	241.675.841	-	122.621.159	1	364.297.000
144	Neraca (BS)	JL. T. AMIR HAMZAH NO. 484, JATIMAKMUR - BINJAI UTARA	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Medan Nomor LAP-0099/1/PRO-06/KNL.0201/01.01.00/2024 Tanggal 3 Mei 2024. Selanjutnya PSP ke Badan Pusat Statistik sesuai KEP-129/KN/2024 tanggal 19 November 2024 (Belum BAST)	1	2.224.800.000	-	2.859.118.000	1	5.083.918.000
145	Neraca (AT)	JALAN GATOT SUBROTO NO. 285, KELURAHAN PETISAH TENGAH, MEDAN BARAT, MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA.	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Medan Nomor LAP-0100/1/PRO-06/KNL.0201/01.01.00/2024 Tanggal 3 Mei 2024	1	1.603.800.000	-	490.266.000	1	2.094.066.000
146	Neraca (BS)	Jl. Sapan 499 KM 5, Bojong Emas - Majalaya, Bandung (Sekarang:RT/RW 04/04)	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Bandung Nomor LAP-0168a/1/PRO-01/KNL.0801/01.01.00/2024 Tanggal 30 Mei 2024	3	1.451.800.000	-	4.169.484.000	3	5.621.284.000
147	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 14 lantai 14 No. H Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Koreksi pengurangan nilai pada transaksi penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024	-	-	-	(45.000)	-	(45.000)
148	Neraca (AT)	Apartemen Taman Rasuna Tower 15 lantai 19 No. H Kel. Menteng Atas, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan	Koreksi pengurangan nilai pada transaksi penarikan kembali dari LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 187/KN/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan BAST No. BAST-1/LMAN/2024 tanggal 10 Januari 2024	-	-	-	(45.000)	-	(45.000)
149	Neraca (BT)	JL. SWADHARMA RAYA RT/RW 03/02, KP. BARU GANG II, ULUJAMI - KEBAYORAN LAMA	PSP kepada Kemenhan sesuai Kepdirjen KN No. KEP-175/KN/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024.	1	12.291.227.000	(1)	(12.291.227.000)	-	-
150	Neraca (BS)	JL. SELAPARANG NO. 50-52, DESA CAKRA TIMUR, CAKRANEGARA, KAB. LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.	Penetapan Status Penggunaan kepada BAWASLU sesuai Kepdirjen KN No. 136/KN/2023 tanggal 10 September 2023 dan BAST nomor BA-216/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024.	1	11.842.134.000	(1)	(11.842.134.000)	-	-

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
151	Neraca (AT)	JL. KALI BARU TIMUR VI, KEL. KALIBARU, KEC. CILINCING, JAKARTA UTARA	PSP kepada Kemenhan sesuai Kepdirjen KN No. KEP-173/KN/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024.	1	101.298.215.000	(1)	(101.298.215.000)	-	-
152	Neraca (BS)	JALAN LIMO 1 RT 001 RW 01, KEL. GROGOL UTARA, KEC. KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SELATAN	PSP kepada Kemenhan sesuai Kepdirjen KN No. KEP-172/KN/2023 tanggal 1 Desember 2023 dan BAST nomor BA-220/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024	1	28.083.704.000	(1)	(28.083.704.000)	-	-
153	Neraca (AT)	Komplek Gading Tutuka Jl. Raya Gading Boulevard Blok E1A-12 Desa Cingcin, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung	PSP kepada BPS sesuai Kepdirjen KN No. KEP-164/KN/2023 tanggal 20 November 2023 dan BA-219/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024.	1	645.275.000	(1)	(645.275.000)	-	-
154	Neraca (Covernote BD)	JL. LINTAS DENPASAR SABA-BAY	PSP kepada KKP sesuai Kepdirjen KN No. 135/KN/2023 tanggal 10 September 2023 dan BAST nomor BA-217/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024	1	137.848.653.000	(1)	(137.848.653.000)	-	-
155	Neraca (BS)	JL.GEDUNG HIJAU RAYA KAV.1/TH-1 NO.63, JAKARTA SELATAN	PSP kepada BIN sesuai Kepdirjen KN No. 134/KN/2023 tanggal 10 September 2023 dan BA-215/KN/2024 nomor BAST tanggal 5 Juli 2024	1	81.264.032.000	(1)	(81.264.032.000)	-	-
156	Neraca (AT)	Jalan Majapahit No. 18, 20, dan 22 Blok B No. 4, 5, 6 Kelurahan Gambir Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat	PSP kepada Badan Intelijen Negara sesuai Kepdirjen No. 106/KN/2023 tanggal 18 Juli 2023 dan BAST nomor BA-215/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024	1	25.507.029.000	(1)	(25.507.029.000)	-	-
157	Neraca (BS)	Jalan Soekarno - Hatta Km. 11, Kel. Karang Joang, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	PSP kepada Badan Intelijen Negara sesuai Kepdirjen No. 137/KN/2023 tanggal 10 September 2023 dan BAST nomor BA-215/KN/2024 tanggal 5 Juli 2024	1	1.196.041.000	(1)	(1.196.041.000)	-	-
158	Neraca (BT)	Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Daerah TK II Bangli	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Denpasar Nomor LAP-0053/1/PRO-01/KNL.1402/01.03.01/2024 Tanggal 5 Juli 2024	1	185.400.000	-	730.615.000	1	916.015.000
159	Neraca (BS)	Kampung Kadu Bali, RT 12/RW003, Kelurahan Cibungur, Kec. Leuwidamar, Kab. Lebak Propinsi Banten	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Serang Nomor LAP-0155/1/PRO-01/KNL.0601/01.03.01/2024 Tanggal 26 Juli 2024	1	106.785.000	-	15.959.659.000	1	16.066.444.000
160	Neraca (AT)	Jl. Datar Laga Rt.23/05, Kel. Kemuning, Kec. Banjarbaru Kota, Kab. Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LAP-0280/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024 tanggal 26 Agustus 2024	1	119.200.000	-	682.703.000	1	801.903.000
161	Neraca (BS)	Jl Desa Pematang Panjang, Desa Pematang Panjang, Kec Sungai Tabuk, Kab Banjar	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LAP-0270/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024	1	463.400.000	-	164.437.000	1	627.837.000
162	Neraca (BS)	Jl Desa (Handil Semangat), Desa Pematang Panjang, Kec Sungai Tabuk, Kab Banjar	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LAP-0269/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024 tanggal 25 Agustus 2024	1	126.400.000	-	3.499.712.000	1	3.626.112.000
163	Neraca (BS)	Desa Pematang Panjang, Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LAP-0270/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan koreksi jumlah dokumen	3	2.090.900.000	(1)	3.587.039.000	2	5.677.939.000
164	Neraca (BS)	Desa Pematang Panjang, Kec. Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Banjarmasin Nomor LAP-0270/1/PRO-01/KNL.1203/01.01.00/2024 tanggal 15 Agustus 2024	2	-	-	4.845.159.000	2	4.845.159.000
165	Neraca (BS)	Perum Solo Baru Kav. JB 1 s/d JB 67 (Nomor Ganjil), Kab. Sukoharjo	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Surakarta nomor LAP-0082/1/PRO-01/KNL.0902/01.00.00/2024 dan LAP-0083/1/PRO-01/KNL.0902/01.00.00/2024 tanggal 19 Juli 2024	2	-	-	60.621.646.000	2	60.621.646.000
166	Neraca (AT)	Jl. Subak Praya Timur No. 17A, Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Kab. Lombok Tengah Propinsi NTB	Perubahan nilai sesuai laporan penilaian KPKNL Mataram nomor LAP-0079/1/PRO-05/KNL.1403/05.00.00/2024 tanggal 23 Agustus 2024	1	303.600.000	-	290.514.000	1	594.114.000
167	Neraca (AT)	Jl. Surya Kencana No.157, 157A, 157B, dan 157C, Kelurahan Babakan Pasar Kecamatan Bogor Timur	Koreksi pengurangan nilai. Serahkelola LMAN sesuai Kepdirjen KN No. 106/KN/2024 tanggal 11 September 2024 dan BAST nomor BA-127/PNY/KN.42/2024 tanggal 16 Oktober 2024	4	16.721.412.216	(4)	(16.721.412.216)	-	-
168	Neraca (BS)	Blok F-08 No. 01, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0065/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	402.700.000	-	1.100.264.000	1	1.502.964.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
169	Neraca (BS)	Blok F-08 No. 21, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0066/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	292.900.000	-	800.165.000	1	1.093.065.000
170	Neraca (BS)	Blok F-08 No. 25, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0067/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	402.700.000	-	1.100.264.000	1	1.502.964.000
171	Neraca (BS)	Blok GR 26 No. 37, Parigi Baru, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0040/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	462.700.000	-	1.064.066.000	1	1.526.766.000
172	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 04, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0083/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	162.500.000	-	376.685.000	1	539.185.000
173	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 46, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0098/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	316.000.000	-	732.415.000	1	1.048.415.000
174	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 49, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0099/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	316.000.000	-	732.415.000	1	1.048.415.000
175	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 50, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0100/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	316.000.000	-	732.415.000	1	1.048.415.000
176	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 51, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0101/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	316.000.000	-	732.415.000	1	1.048.415.000
177	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 52, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0102/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	316.000.000	-	732.415.000	1	1.048.415.000
178	Neraca (BS)	Blok GR 20 No. 54, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0103/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	316.000.000	-	732.278.000	1	1.048.278.000
179	Neraca (BS)	Blok GR 21 No. 25, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0105/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	435.600.000	-	350.711.000	1	786.311.000
180	Neraca (BS)	Blok GR 21 No. 12, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0106/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
181	Neraca (BS)	Blok GR 21 No. 14, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0107/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
182	Neraca (BS)	337/PONDOK KACANG BARAT, luas 164 m2, terletak di GRAHA RAYA BINTARO Blok GR 10 NO.28 (D/H GRAHA BINTARO, BINTARO JAYA), Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0081/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	370.200.000	-	832.627.000	1	1.202.827.000
183	Neraca (BS)	338/PONDOK KACANG BARAT, luas 164 m2, terletak di GRAHA RAYA BINTARO Blok GR 10 NO.30 (D/H GRAHA BINTARO, BINTARO JAYA), Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan.	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0082/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	370.200.000	-	832.627.000	1	1.202.827.000
184	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU I BLOK A-3, NO. 17, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0104/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
185	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU I BLOK A-3 NO. 18, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0076/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	89.000.000	-	592.529.000	1	681.529.000
186	Neraca (BS)	JL. JOMBANG BARU UTAMA BLOK C-4 NO. 23, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0070/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	126.000.000	-	329.905.000	1	455.905.000
187	Neraca (BS)	JL. JOMBANG BARU UTAMA BLOK C-4 NO.24, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0071/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	107.000.000	-	372.347.000	1	479.347.000
188	Neraca (BS)	JL. JOMBANG BARU VII BLOK C-4 NO.32, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0079/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	123.000.000	-	367.975.000	1	490.975.000
189	Neraca (BS)	JL. JOMBANG BARU VII BLOK C-4 NO. 33, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0080/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	107.000.000	-	383.975.000	1	490.975.000
190	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU IV BLOK D-4 NO. 9, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0077/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	94.000.000	-	461.326.000	1	555.326.000
191	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU IV BLOK D-4 NO. 10, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0078/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	89.000.000	-	500.965.000	1	589.965.000
192	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU IV BLOK D-4 NO. 11, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0073/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	211.200.000	-	378.765.000	1	589.965.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
193	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU V BLOK D-5 NO. 9, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0074/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	257.600.000	-	390.268.000	1	647.868.000
194	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU I BLOK A-3, NO. 17, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0072/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	2	150.000.000	-	531.529.000	2	681.529.000
195	Neraca (BS)	JL. TAMAN JOMBANG BARU V BLOK D-6 NO. 6, PERUMAHAN VILLA JOMBANG BARU, DESA JOMBANG, KEC. CIPUTAT, KAB. TANGERANG SELATAN, PROPINSI BANTEN	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0075/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024 Selanjutnya PSP kepada Kementerian Keuangan sesuai KEP-139/KN/2024 tanggal 10 Desember 2024 (Belum BAST)	1	89.000.000	-	558.868.000	1	647.868.000
196	Neraca (BS)	Blok F-09 No. 01, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0068/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	300.200.000	-	820.192.000	1	1.120.392.000
197	Neraca (BS)	Blok F-09 No. 02, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0069/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	300.200.000	-	820.192.000	1	1.120.392.000
198	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 08, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0084/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	162.500.000	-	376.685.000	1	539.185.000
199	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 09, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0085/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	162.500.000	-	376.685.000	1	539.185.000
200	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 10, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0086/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	162.500.000	-	376.685.000	1	539.185.000
201	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 11, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0087/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	162.500.000	-	376.685.000	1	539.185.000
202	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 15, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0088/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
203	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 16, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0089/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
204	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 17, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0090/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
205	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 18, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0091/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
206	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 19, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0092/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
207	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 20, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0093/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	353.200.000	-	752.323.000	1	1.105.523.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
208	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 21, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0094/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	325.000.000	-	780.523.000	1	1.105.523.000
209	Neraca (BS)	Blok GR 19 No.23, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0095/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
210	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 24, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0096/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
211	Neraca (BS)	Blok GR 19 No. 25, Pondok Kacang Barat, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0097/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	237.000.000	-	549.311.000	1	786.311.000
212	Neraca (BS)	Blok F-04 No. 01, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0061/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	468.600.000	-	1.280.304.000	1	1.748.904.000
213	Neraca (BS)	Blok F-07 No. 23, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0062/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	292.900.000	-	800.165.000	1	1.093.065.000
214	Neraca (BS)	Blok F-07 No. 24, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0063/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	402.700.000	-	1.100.264.000	1	1.502.964.000
215	Neraca (BS)	Blok F-07 No. 25, Pakujaya, Perumahan GRAHA RAYA BINTARO, Kec. Pondok Aren, Kab. Tangerang Selatan	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang Nomor LAP-0064/1/PRO-1/KNL.0603/01.01.00/2024	1	402.700.000	-	1.100.264.000	1	1.502.964.000
216	Neraca (BS)	DI DESA SUKAHARJA, KEC. CIJERUK, KAB. BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian Kanwil DJKN Jawa Barat sebanyak 24 Laporan	24	2.977.777.000	-	1.851.293.000	24	4.829.070.000
217	Neraca (BS)	DI DESA TAJURHALANG, KEC. CIJERUK, KAB. BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian Kanwil DJKN Jawa Barat sebanyak 7 Laporan	7	4.754.163.000	-	1.649.100.000	7	6.403.263.000
218	Neraca (BS)	Jalan Komplek Perumahan Universitas Tirtayasa, Rt 01/ Rw 007 Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Serang Nomor LAP-0353/1/PRO-01/KNL.0601/01.01.00/2024. Selanjutnya Hibah ke Pemerintah Kota Serang sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen-144/KN/2024 tanggal 18 Desember 2024 (Belum BAST)	1	1.178.500.000	-	5.755.816.000	1	6.934.316.000
219	Neraca (BS)	Jalan Sentul Nyapah, Blok I Bidang IV, Desa Pematang, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Banten	Perubahan Nilai Berdasarkan Laporan Penilaian KPKNL Serang Nomor LAP-0355/1/PRO-01/KNL.0601/01.01.00/2024	8	848.500.000	-	624.434.000	8	1.472.934.000
220	Neraca (BS)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok H 1 Nomor 3A	Update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0463/1/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024. Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.163.790.000	-	2.710.796.000	1	3.874.586.000
221	Neraca (BS)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok H 1 Nomor 1	Update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0464/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024. Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.383.810.000	-	3.220.177.000	1	4.603.987.000
222	Neraca (BS)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok H1 Nomor 2	Update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0465/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024. Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	1.221.690.000	-	2.845.026.000	1	4.066.716.000

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CalK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
223	Neraca (BS)	Perumahan Danau Bogor Raya Blok H 1 Nomor 3	Update dokumen menjadi SHP. Perubahan Nilai Sesuai Laporan Penilaian KPKNL Bogor Nomor Lap-0466/11/PRO-01/KNL.0803/01.03.03/2024. Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-345/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada PT SEG (Belum BAST)	1	2.460.750.000	-	5.694.897.000	1	8.155.647.000
224	Neraca (AT)	Dusun Anasmoro Desa jarak Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang propinsi Jawa Timur	Laku lelang pada KPKNL Malang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 1013/10.03/2024-01 tanggal 31 Oktober 2024	9	545.916.500	(9)	(545.916.500)	-	-
225	Neraca (BS)	Jalan Darma Bakti Nomor 87 RT 07/RW 08, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah	Serahkan LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 (Belum BAST)	1	853.576.000	-	-	1	853.576.000
226	Neraca (BS)	Jalan Karang Anyar 20, Kelurahan Brumbungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	Serahkan LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 (Belum BAST)	1	5.947.750.000	-	-	1	5.947.750.000
227	Neraca (Covernote BD)	Komplek Ruko Ciputat Mega Mall Blok F 26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten	Perubahan nilai sesuai dengan Laporan Penilaian KPKNL Tangerang II, selanjutnya serahkan LMAN sesuai Kepdirjen nomor Kepdirjen KN No. 150/KN/2024 tanggal 27 Desember 2024 (Belum BAST)	1	1.202.000.000	-	(195.823.000)	1	1.006.177.000
228	Neraca (BS)	Perumahan Taman Bumiyaga, Komplek Bumi Rinjani , RT/RW 01/21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	koreksi penambahan unit, karena kesalahan kategori 1 aset pada baris nomor 2 yaitu PRK-B001599 harusnya BT	-		1	-	1	-
229	Neraca (BT)	Perumahan Taman Bumiyaga, Komplek Bumi Rinjani , RT/RW 01/21, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat	koreksi pengurangan unit, karena kesalahan kategori 1 aset pada baris nomor 2 yaitu PRK-B001599 harusnya BT	1	-	(1)	-	-	-
230	Neraca (AT)	Sebagian Aset: Blok A, C, dan H Perumahan Lippo Karawaci, Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten	Update dokumen menjadi SHP dan penambahan jumlah dokumen akibat pemecahan dari SHGB 4779 dan SHGB 4791. Selanjutnya telah terbit KMK Nomor KEP-153/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada HK (Belum BAST)	39	1.163.703.301.394	5	-	44	1.163.703.301.394
231	Neraca (BS)	Perumahan Taman Sasana Patra, Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Update dokumen menjadi SHP. Selanjutnya telah terbit KMK NOMOR KEP-153/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada HK (Belum BAST)	1	74.813.336.000	-	-	1	74.813.336.000
232	Neraca (BT)	Perumahan Taman Sasana Patra, Jalan Tegal Binangun, Kelurahan Plaju Darat, Kecamatan Sebrang Ulu II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	Update dokumen menjadi SHP. Selanjutnya telah terbit KMK NOMOR KEP-153/KN/2024 tentang Pemindahtanganan Melalui PMPP pada HK (Belum BAST)	1	47.893.246.000	-	-	1	47.893.246.000
233	Neraca (BS)	JL. RAYA SEKAMPUNG DUSUN V RT/RW 08, SUMBER GEDE - SEKAMPUNG	Update dokumen menjadi SHP	1	159.331.300	-	-	1	159.331.300
234	Neraca (BS)	JL. KEMBANG HARAPAN GG. SELIANGGURI NO. 28 RT/RW 02/05, CINTA RAJA - SAIL	Update dokumen menjadi SHP	1	601.202.400	-	-	1	601.202.400

DAFTAR PERUBAHAN TERHADAP JUMLAH DAN NILAI ASET PROPERTI EKS PPA AKIBAT PERUBAHAN NILAI, PENYERAHKELOLAAN KE LMAN, DAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAANNYA

No.	Neraca/CaLK	Alamat	Uraian	31 Desember 2023		Mutasi		31 Desember 2024	
				Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
235	Neraca (BS)	JL. BANYU URIP (JL. KALI CINTA) RT/RW 03, KOTA BUMI ILIR - KOTA BUMI	Update dokumen menjadi SHP dan penambahan jumlah dokumen karena dipecah menjadi 3 bidang	1	75.840.000	2	-	3	75.840.000
236	Neraca (AT)	SEBIDANG TANAH SERTIFIKAT SHGB NO. 151, LUAS 180M2, BERIKUT BANGUNAN RUKO DI ATASNYA, TERLETAK DI JL. JEND SUDIRMAN NO. 69 / 10 - 11, PEKANBARU, PROVINSI RIAU.	Update dokumen menjadi SHP	1	1.722.988.000	-	-	1	1.722.988.000
237	Neraca (BS)	DUSUN KENANGA NO.24 RT/RW 03/01 BANJAREJO KEC. BATANG HARI LAMPUNG TIMUR	Update dokumen menjadi SHP	1	14.495.000	-	-	1	14.495.000
Jumlah				363	2.040.187.943.042	(47)	69.321.737.052	316	2.109.509.680.094

ASET PROPERTI EKS KELOLAAN PT PPA (PERSERO)

Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang disajikan dalam Neraca			Saldo Per 31 Desember 2023		Mutasi Tahun 2024		Saldo Per 31 Desember 2024	
	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai	Unit	Nilai
AT	624	2.267.395.841.927,00	215	1.955.673.644.427	(8)	(122.901.943.611)	207	1.832.771.700.816
BS	1162	1.780.494.999.019,00	889	1.883.248.306.017	(32)	344.759.465.663	857	2.228.007.771.680
BT	323	865.910.243.344,00	254	928.608.542.344	(5)	(13.842.809.000)	249	914.765.733.344
BD (Dokumen berupa Covernote)	37	123.953.401.452,00	28	267.965.407.000	(2)	(138.692.976.000)	26	129.272.431.000
JUMLAH	2.146	5.037.754.485.742	1.386	5.035.495.899.789	(47)	69.321.737.052	1.339	5.104.817.636.841
Nilai Aset properti Eks Kelolaan PT PPA (Persero) yang diungkap dalam CaLK								
BD (Dokumen berupa AJB, APHT, Copy Dokumen Kepemilikan, PPJB, Risalah Lelang, IMB)	666	2.204.710.941.833,00	531	1.680.193.044.443	(11)	601.607.577.012	520	2.281.800.621.455
JUMLAH	666	2.204.710.941.833	531	1.680.193.044.443	(11)	601.607.577.012	520	2.281.800.621.455
JUMLAH TOTAL	(51)	(74.809.146.000,00)	1.917	6.715.688.944.232	(58)	670.929.314.064	1.859	7.386.618.258.296

SURAT BERHARGA EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Emiten	Total <i>Nominal Value</i> Per 31 Desember 2023	Mutasi	Total <i>Nominal Value</i> Per 31 Desember 2024
1.	Dharmala Intiutama (0016060906)	339.658.000.000	15.796.000.000	355.454.000.000
2.	Ometraco Multi Artha (0016060794)	237.082.403.636	11.025.660.069	248.108.063.706
3.	Ongko Intl Fin (290304)	463.170.000.000	21.540.000.000	484.710.000.000
4.	Ongko Intl Fin CO BV (0016037876)	23.158.500.000	1.077.000.000	24.235.500.000
5.	Pacific Intl CP (0016062464)	30.878.000.000	1.436.000.000	32.314.000.000
6.	Pacific Intl CP (0016062504)	30.878.000.000	1.436.000.000	32.314.000.000
7.	Indonesia Bermuda	15.439.000.000	718.000.000	16.157.000.000
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007408)	4.934.713	0	4.934.713
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL (ID4000007507)	4.934.713	0	4.934.713
Total		1.140.273.773.062	53.028.660.069	1.193.302.433.132

*Nilai disajikan sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 dan Lampiran B Pengembalian Aset tanggal 27 Februari 2009

*Nilai nominal berdasarkan kurs Kurs Penutup JISDOR per 31 Desember 2024

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	-	Intan	-	0	n/a	223.500	-	223.500	Dicabut ijin usahanya tahun 2007	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-425/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan tidak tercatat sebagai badan hukum 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan asuransi telah dicabut melalui KEP-056/KM.10/2007 tanggal 5 April 2007 karena sanksi
2	PT Bunas Multifinance	-	BUN	750.000		0	75.000.000	-	75.000.000	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-017/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2006 karena sanksi
3	PT Danaloka Pratama	-	BDNI	380		0	141.550.000	-	141.550.000	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melaluiSurat Nomor S-426/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021.tidak tercatat sebagai lembaga pembiayaan yang berizin di industri keuangan non bank OJK
4	PT Pama Indonesia Ltd	-	BDNI	1.500		0	28.310.000	-	28.310.000	Tidak Diketahui	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-427/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021.tidak tercatat sebagai lembaga pembiayaan yang berizin di industri keuangan non bank OJK
5	PT Pama Ventura Indonesia	-	BDNI	200		0	234.871	-	234.871	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-447/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-131/KM.12/2006 tanggal 24 November 2006 karena sanksi
6	PT Servitia Finance	-	BUS	24.750		1	1.500.000.000	-	1.500.000.000	Dicabut ijin usahanya tahun 2006	Sesuai Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-024/KM.12/2006 tanggal 12 Juli 2006 karena sanksi
7	PT Aplikanusa Lintasarta	-	19 Bank	400		0	400.540.829	-	400.540.829	Aktif	Sesuai Surat Yayasan Perbanas Nomor 13/Keu/YP/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021	Jalan MH. Thamrin Kav. 3, Kebon Sirih, Menteng, Gedung Menara Thamrin Lt. 19, RT.10/RW.10, Kb. Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, 10250	Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-448/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih aktif beroperasi

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
8	PT Bhakti Sarana Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	450		0	385.154.000	-	385.154.000	Dicabut ijin usahanya tahun 2013	Sesuai KMK No. 153/KMK.06/2007	-	1. Permintaan Informasi kepada Ditjen AHU , Kemenkumham melalui Surat Nomor S-449/KN.5/2015 tanggal 13 Februari 2015 dengan tanggapan Perseroan masih tercatat sebagai badan hukum, namun alamat perseroan tidak diketahui, 2. Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan Modal Ventura telah dicabut melalui KEP-119/D.05/2013 tanggal 24 Oktober 2013 karena sanksi
9	PT Dbs Securities Indonesia	-	BDNI	330		0	-	-	-	Telah Likuidasi Tahun 2012	-	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021.telah berubah nama menjadi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
10	PT Sarana Jambi Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	208.179		0	208.179.000	-	208.179.000	Aktif	nilai berdasar surat Direktur Utama SJV no: 04/DIR/SJV/XII/2021 tgl 6-12-21	Jalan Kapten Pattimura No. 119 Jambi - 36129, Phone : (0741) 668388, 668389, Fax : (0741) 668 390	-
11	PT Sarana Kalbar Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI-BNN	551.793		0	551.793.000	-	551.793.000	Aktif	Nilai berdasarkan surat Dirut PT Sarana Kalbar Ventura No. 003/SKV/01/2023 tanggal 10 Januari 2023	Jalan M Sohor No. 9 AB, Pontianak 78121, Phone : (0561) 736 613, Fax (0561) 746 883	-
12	PT Sarana Kalsel Ventura	Jasa Modal Ventura	BDNI	210.437		0	193.066.000	17.371.000	210.437.000	Aktif	Nilai saham berdasarkan surat Dirut PT Sarana Kalsel Ventura No. 018/SKV-L/Kopr/I/2025 tanggal 31 Januari 2025	Jalan Pramuka No.4, Banjarmasin. Phone (0511) 327 3208, 327 3209, Fax (0511) 325 4252	1. saham per 31 des 2020 tercatat 207.861.000 (207.861 lembar) sesuai surat 180/SKV-L/Kopr/XI/2020 tanggal 5 Nop 2020, ada pembagian dividen saham sebanyak 14.795 lembar saham. 2. Sesuai Surat Kalsel Ventura Nomor 051/SKV-L/Korp/III/2021 tanggal 15 Maret 2021, tambahan dividen saham Kemenkeu (14.795 lembar) belum dicatatkan pada sistem AHU karena data belum terverifikasi (belum menyerahkan NPWP an Menkeu), sehingga jumlah saham masih tercatat sebanyak 193.066 lembar
13	PT Sarana Maluku Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	63.106		0	63.106.000	-	63.106.000	Aktif	Nilai nominal berdasar surat Direktur Utama PT Sarana Maluku Ventura Nomor 052/SMV/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020. Dikonfirmasi melalui email per tanggal 27-7-2021 mengenai aset saham per 30 Juni 2021	Jalan Jend Sudirman, hative kecil, Kompleks Pondok Permai (Aster) RT.004/RW.05,Kecamatan Sirimau Kota Ambon 97128	
14	PT Sarana Bersama Pengembangan Indonesia	-	20 Bank	1.115		0	-	-	-	Likuidasi	Nilai Buku saham per 31-12-2019 berdasarkan Laporan Keuangan PT SBPI Tahun 2018 (unaudited).	Setiabudi 2 Building, Suite 502A Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan, 12920Phone : (021) 521 0715, 521 0732, 521 0799, Fax : (021) 521 0755	Telah dilikuidasi dengan nilai likuidasi sebesar Rp3.365.184.715 yang diterima oleh DJKN pada November 2020. Nilai mutasi dicatat sebesar Rp4.038.531.683,85 sehingga terdapat selisih Rp673.346.969 yang dicatat sebagai dampak kumulatif pengurang ekuitas

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (Perta Life)	Jasa Asuransi	BUN HASAN	4.500		0	4.500.000.000	-	4.500.000.000	Aktif	Sesuai surat Dirut PT Perta Life Insurance (d.h. PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri) No. S0005/PLI/DIR/0124 tanggal 02 Januari 2024	Tamansari Parama Boutique Office Lantai 11, Jalan KH Wahid Hasyim No. 84-88, Jakarta 10430	
16	PT Asuransi Putra Mandiri	Jasa Asuransi	BUN HASAN	1.800.000		0	335.020.000	-	335.020.000	Dicabut ijin usahanya tahun 2011, berdasarkan surat Keputusan Ketua Bapepem-LK atas nama Menteri Keuangan Nomor : KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011	Sesuai Ralat KMK No. 155/KMK.06/2007	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.11/2011 tanggal 11 Juli 2011 karena sanksi
17	PT Sarana Sulut Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	61.553		0	61.553.000	-	61.553.000	Aktif	Nilai buku saham dan pasar berdasarkan surat Direktur PT Sarana Sulut Ventura Nomor 002/SSV/I/2022 tanggal 10 Januari 2022	Kompleks Pasar Segar Blok RC-17 Paal Dua Jalan Yos Sudarso Manado	-
18	PT Sarana Sumbang Ventura	Jasa Modal Ventura	BNN	1.056.056		0	1.056.056.000	-	1.056.056.000	Aktif	Berdasar Surat dirut SSV No. 05/SSBV-DIR/VII/2022 tgl 12 Juli 2022. surat 07/DIR-SSBV/II/2022 tgl 25-2-2022, kenaikan lembar saham akibat dividen saham per 30-11-2020	Gedung Rangkiang Ventura. Jalan Khatib Sulaiman No.9 Kav. 5 s/d 7 Padang - Sumatera Barat.	-
19	PT Sarana Papua Ventura (d.h PT Sarana Irian Ventura)	Jasa Modal Ventura	BNN	82.471		0	82.471.000	-	82.471.000	Aktif	Nilai per 30-6-21 berdasar surat Dirut SPV No.44/ADM-SPV/VII/2021 tgl 27-7-2021	JLAbe Tasangkapura No. 58, RT001/ RW.011, Kelurahan Ardiapura, Japsel, Jayapura- Papua. Telp: 0967-5162490	-
20	PT SMBC Indonesia Finance	-	BDNI	3.750.000		0	3.750.000.000	-	3.750.000.000	Dicabut ijin usahanya tahun 2010	Sesuai Lampiran Surat Menteri Keuangan No. S-171/MK.6/2007 tanggal 29 Juni 2007	-	Surat Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB OJK No: 1169/NB.111/2021 tgl 5 April 2021. Izin usaha sebagai Perusahaan pembiayaan telah dicabut melalui KEP-546/KM.10/2010 tanggal 20 September 2010 karena sanksi
21	PT Asia Natural Resources Tbk	Perdagangan hasil tambang	-	22.006.500		0	1.100.325.000	-	1.100.325.000	Aktif (Delisting dari BEI)	berdasarkan Monthly Report Citibank per tanggal 31 Mei 2022		Pada tahun 2016, aset saham PT Asia tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini perdagangan saham PT ASIA di bursa telah di-suspend oleh BEI. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
22	PT Jembo Cable Company Tbk (JECCJ.K)	Manufaktur kabel	-	654.500	610	0	2.061.675.000	(1.662.430.000)	399.245.000	Aktif	Nilai saham berdasarkan harga penutupan tanggal 31 Desember 2024 pada situs BEI (https://www.idx.co.id/)		Pada tahun 2016, aset saham PT Jembo Cable tidak diserahkan kembali kepada PT PPA dan dicatat sebagai aset saham eks kelolaan PT PPA yang dikelola oleh DJKN. Saat ini saham dimaksud tersimpan di kustodi Citibank Jakarta.
23	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	Jasa Sarana Olahraga terutama Golf	-	57	65.000.000	13.87%	1.425.000.000	2.280.000.000	3.705.000.000	Aktif	Nilai buku saham berdasarkan surat Direktur Utama PT Sukapraja Estetika Padang Golf Nomor 005/SEPG/DIR/OSW/II/2025 tanggal 03 Februari 2025	Jl. Raya Otonomi, Pasar Kemis Tangerang 15560	Aset saham PT SEPG direklasifikasi dari akun aset saham eks BPPN ke aset saham eks kelolaan PT PPA. Berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun buku 2015, diketahui terdapat pencatatan Pinjaman Subordinasi perseroan kepada Kementerian Keuangan cq. DJKN dh. PT PPA (Persero).

ASET SAHAM EKS KELOLAAN PT PPA

No.	Nama Emiten	Core Business	Bank Asal	Jumlah Lembar	Nilai Per Lembar Saham 31 Desember 2024	Persentase Kepemilikan	Nilai Per 31 Desember 2023	Mutasi	Nilai Per 31 Desember 2024	Status Emiten	Keterangan Nilai Penyajian	Alamat Emiten	Keterangan
24	PT Bima Prima Perdana (Grup Texmaco)	-	-			1	-	-	-	Tidak Aktif			
25	PT Sejahtera Eka Graha	Pengembangan dan pengelolaan sarana permukiman dan penyediaan sarana olahraga	-	273.000		1	-	-	-	Aktif	Berdasarkan Lampiran A-1 Perjanjian Pengelolaan Aset Tahun 2017	Kawasan Bogor Raya, Bogor	Teleh diserahkan pengelolaannya kepada Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan BA 999.03 Aset Investasi sesuai Surat Perintah Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor PRIN-25.1/KN/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan Berita Acara Serah Terima tentang Pengelolaan Aset Saham Nomor BA-1/KN.2/2020 tanggal 23 Januari 2020.
Total							17.919.257.200	634.941.000	18.554.198.200 *				

* Selisih Rp1 karena pembulatan

**DAFTAR ABMA/T YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN/DILUNASI KOMPENSASINYA
SEJAK AWAL PENGURUSAN PELEPASAN ABMA/T**

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Perumahan di Jl. Pelita RT.006/09 DKI Jakarta	Rp1.047.674.100,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-517/MK.6/2019 tanggal 25 Juli 2019. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.047.674.100,00
2	ABMA/T SMA Muhammadiyah 3 Genteng Jawa Timur	Rp2.663.674.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-468/MK.6/2012 Tanggal 10 Agustus 2012. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp1.331.837.000,00
3	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional SD Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1.298.458.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-535/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp649.229.000,00
4	ABMA/T Yayasan Perguruan Nasional TK Swasta Letjen Jamin Ginting's Berastagi (dh. TK Letjen Jamin Ginting) Sumatera Utara	Rp1.075.620.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-540/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp537.810.000,00
5	ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo (dh. Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI)	Rp5.965.472.000,00	Surat Menteri Keuangan S-512/MK.6/2022 tanggal 07 Oktober 2022. Besaran Kompensasi 35%+10% sebesar Rp2.296.706.720,00
6	ABMA/T Home Industry Atas Nama Iwan Jakarta Pusat DKI Jakarta	Rp2.334.060.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-410/MK.6/2016 Tanggal 15 Desember 2016. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp2.334.060.000,00
7	ABMA/T Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen (dh. Kantor DPD Golkar) Kebumen Jawa Tengah	Rp4.116.771.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.6/2017 tanggal 9 Februari 2017. Besaran kompensasi sebesar 100% senilai Rp4.116.771.000,00
8	ABMA/T Rumah Nyoman Sidharta Suryanata Grogol Petamburan Provinsi DKI Jakarta	Rp1.469.468.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.6/2017 tanggal 14 November 2017. Besaran Kompensasi sebesar 100% senilai Rp1.469.468.000,00
9	SD Al Wasliyah dan SMA Teladan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	Rp743.560.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK.6/2018 tanggal 16 Mei 2018. Besaran kompensasi sebesar 50% senilai Rp371.780.000,00

**DAFTAR ABMA/T YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN/DILUNASI KOMPENSASINYA
SEJAK AWAL PENGURUSAN PELEPASAN ABMA/T**

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset	Keterangan
10	ABMA/T Yayasan Pendidikan Angkatan 45	Rp4.144.299.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-496/MK.6/2019 tanggal 22 Juli 2019 kompensasi 50% senilai Rp2.072.149.500,00
11	ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rp4.373.822.000,00	Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur Sulawesi Selatan u.p. Sekretaris Daerah Nomor S-4514/A/2001 tanggal 12 November 2001 Surat Kepala Kanwil XXIII Ditjen Anggaran Makasar Nomor S-1349/W.A.23/ BD.05/2002 tanggal 19 Juni 2002 Besaran Kompensasi senilai Rp2.186.911.000,00
12	ABMA/T Rumah Tinggal di Jalan Sumatera Nomor 27 (d.h 13-15), Bandung	Rp7.503.853.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-243/MK.6/2020 tanggal 22 Juni 2020 Kompensasi 100% senilai Rp7.503.853.000
13	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Sudjanto (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp167.368.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-627/MK.6/2022 tanggal 13 Desember 2022 kompensasi 100% senilai Rp167.368.000,00
14	ABMA/T Rumah Tinggal a.n Suherman Khouw (d.h Rumah Tinggal Penampungan)	Rp15.953.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-612/MK.6/2022 tanggal 27 November 2022 kompensasi 100% senilai Rp15.953.000,00
15	ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.h ABMA/T SMA Pagatan)	Rp120.453.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-360/MK.6/2023 tanggal 14 Mei 2023 dan S-368/MK.6/2023 tanggal 05 Juni 2023 Kompensasi 100%+10% senilai Rp132.498.300,00
16	ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan)	Rp113.357.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-432/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023. Kompensasi 100%+10% senilai Rp124.692.700,00
17	ABMA/T Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan)	Rp113.357.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-433/MK.6/2023 tanggal 4 Juli 2023. Kompensasi 100%+10% senilai Rp124.692.700,00
Jumlah		Rp37.267.219.100,00	

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITETAPKAN BESARAN KOMPENSASINYA PADA TAHUN 2024

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset	Keterangan
1	ABMA/T Klenteng Sien Co (d.h Tempat Tinggal dan Klenteng) di Provinsi Sumatera Utara	Rp186.176.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.6/2024 tanggal 24 Maret 2024, kompensasi 0% senilai Rp0,00.
2	ABMA/T SD/SMP/SMA/SMK Laksamana Martadinata (d.h Yayasan Laksamana Martadinata / APNI) di Provinsi Sumatera Utara	Rp24.332.483.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-332/MK.6/2024 tanggal 3 Mei 2024, kompensasi 20% senilai Rp4.866.496.600,00.
3	ABMA/T Tempat Persemayaman Jenazah (d.h Kantor Seksi Kebudayaan Depdikbud) di Provinsi Jawa Timur	Rp800.838.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.6/2024 tanggal 17 Mei 2024, kompensasi 50% senilai Rp400.419.000,00.
4	Kenaikan nilai wajar atas ABMA/T TK Letjen Jamin Ginting Berastagi (d.h TK Letjen Jamin Ginting) di Sumatera Utara	Rp482.618.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-421/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024 ditetapkan dengan nilai wajar aset sebesar Rp1.558.238.000,00 yang lebih tinggi dari besaran nilai wajar yang ditetapkan sebelumnya melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-540/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.075.620.000,00. Sehingga diakui sebagai dampak kumulatif yang timbul atas adanya ABMA/T yang telah ditetapkan besaran kompensasinya sebesar Rp482.618.000,00;
5	Kenaikan nilai wajar atas ABMA/T SD Letjen Jamin Ginting Berastagi (d.h SD Letjen Jamin Ginting) di Sumatera Utara	Rp882.409.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-447/MK.6/2024 tanggal 28 Juni 2024 ditetapkan dengan nilai wajar aset sebesar Rp2.180.867.000,00 yang lebih tinggi dari besaran nilai wajar yang ditetapkan sebelumnya melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-535/MK.6/2013 Tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp1.298.458.000,00. Sehingga diakui sebagai dampak kumulatif yang timbul atas adanya ABMA/T yang telah ditetapkan besaran kompensasinya sebesar Rp882.409.000,00.
6	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Veronika Lany Thomas di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp306.467.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-599/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024, kompensasi 100% senilai Rp306.467.000,00.
7	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Elisabeth Susan Setioko di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp281.495.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-600/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024, kompensasi 100% senilai Rp281.495.000,00.
8	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Michael Bryan Sunur di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp281.495.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-601/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024, kompensasi 100% senilai Rp281.495.000,00.
9	Gereja Kristen Methodist Indonesia Jemaat Imanuel Bogor (dahulu Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor, TK/SD/SMP/SMA/Akademi Management di Provinsi Jawa Barat	Rp3.635.263.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-611/MK.6/2024 tanggal 20 Agustus 2024, kompensasi 0% senilai Rp0,00.
10	Rumah Toko a.n Lim Seng Tjong (d.h Pertokoan) di Jalan Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Rp296.265.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-614/MK.6/2024 tanggal 21 Agustus 2024, kompensasi 100% senilai Rp296.265.000,00.
11	Rumah Toko a.n Silvia (d.h Pertokoan) di Jalan Binjai, Sumatera Utara	Rp353.792.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-615/MK.6/2024 tanggal 21 Agustus 2024, kompensasi 100% senilai Rp353.792.000,00.

DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITETAPKAN BESARAN KOMPENSASINYA PADA TAHUN 2024

No.	Nama Aset	Nilai Wajar Aset	Keterangan
12	Rumah Tinggal (d.h Gereja Kristen Akos) di Jawa Timur	Rp5.430.407.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.6/2024 tanggal 23 Agustus 2024, kompensasi 100% senilai Rp5.430.407.000,00.
13	Rumah Toko a.n Antoni (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp109.761.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-623/MK.6/2024 tanggal 28 Agustus 2024, kompensasi 100% senilai Rp109.761.000,00.
14	Rumah Toko a.n Tjin A Tjin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp209.974.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024, kompensasi 100% senilai Rp209.974.000,00.
15	Rumah Toko a.n Tjong Beng (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp112.477.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-630/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024, kompensasi 100% senilai Rp112.477.000,00.
16	Rumah Toko a.n Sjoftan Salim (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp88.798.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024, kompensasi 100% senilai Rp88.798.000,00.
17	Rumah Toko a.n Jansin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp247.367.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024, kompensasi 100% senilai Rp247.367.000,00.
18	Klenteng Talang/Linthang Konghucu (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat	Rp13.767.177.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-714/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024, kompensasi 0% senilai Rp0,00.
19	Vihara Dewi Welas Asih (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat	Rp14.919.555.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024, kompensasi 0% senilai Rp0,00.
20	Vihara Pemancar Keselamatan (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat	Rp5.166.021.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-719/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024, kompensasi 0% senilai Rp0,00.
21	Gereja Kristen Nasional Injili Jemaat "Sion" Teluk Melano (dahulu Gereja Kristen Nasional Injil (GKNI) di Provinsi Kalimantan Barat	Rp995.523.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-720/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024, kompensasi 0% senilai Rp0,00.
22	Rumah Toko a.n Ana Ngatimin (d.h Pertokoan) di Kab.Langkat, Sumatera Utara	Rp93.643.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-663/MK.6/2024 tanggal 23 September 2024, kompensasi 100% senilai Rp93.643.000,00
23	ABMA/T Rumah Toko a.n Rosmina (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp195.592.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-923/MK.6/2024 tanggal 11 November 2024, kompensasi 100% senilai 195.592.000,00
24	Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil (d.h TK, SD, SMEA Yayasan A. Yani) di Provinsi Jawa Timur	Rp4.673.057.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-947/MK.6/2024 tanggal 13 November 2024, kompensasi 50% senilai Rp2.336.528.500,00
Total		Rp77.848.653.000,00	

**DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK PENYELESAIAN DAN/ATAU
KOREKSI PENETAPAN KEMBALI PADA TAHUN 2024**

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	Klenteng Sien Co (d.h tempat Tinggal dan Klenteng) di Jalan Veteran (d.h Jalan Sukaramai I No. 30) Dusun I, Desa Bagan Asahan Pekan (d.h Desa Bagan Asahan), Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara	186.176.000,00	KMK-89/KM.6/2024 tanggal 3 Mei 2024. Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
2.	SD/SMP/SMA/SMK Laksamana Martadinata (dahulu Yayasan Laksamana Martadinata/APNI) Luas di Jalan Pertempuran (dahulu Jalan Pertempuran P. Brayan) Nomor 125 Kelurahan Pulo Brayan Kota Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara	24.332.483.000,00	KMK-134/KM.6/2024 tanggal 4 Juli 2024. Besaran kompensasi sebesar 20% dari nilai wajar aset
3.	Tempat Persemayaman Jenazah (dahulu Kantor Seksi Kebudayaan Depdikbud) di Jalan DR. Sutomo Nomor 17 (dahulu Jalan Dr. Sutomo Nomor 9) Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur	800.838.000,00	KMK-135/KM.6/2024 tanggal 4 Juli 2024 Besaran kompensasi sebesar 50% dari nilai wajar aset
4.	TK Letjen Jamin Ginting Berastagi (dahulu TK Letjen Jamin Ginting) di Jalan Udara Nomor 4 Kelurahan Gundaling II (dahulu Desa Gundaling II) Kecamatan Berastagi (dahulu Kecamatan Kabanjahe) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara	1.558.238.000,00	KMK-185/KM.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Besaran kompensasi sebesar 35% dari nilai wajar aset
5.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) di Jalan Raya Waiwerang Sagu RT 002/RW 001, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	306.467.000,00	KMK-209/KM.6/2024 tanggal 2 September 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
6.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) di Jalan Raya Waiwerang Sagu RT 002/RW 001, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	281.495.000,00	KMK-217/KM.6/2024 tanggal 3 September 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
7.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) di Jalan Raya Waiwerang Sagu RT 002/RW 001, Kelurahan Waiwerang Kota, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur	281.495.000,00	KMK-231/KM.6/2024 tanggal 11 September 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
8.	Gereja Kristen Methodist Indonesia Jemaat Imanuel Bogor (dahulu Kantor Dispenda Kodya Dati II Bogor, TK/SD/SMP/SMA/Akademi Management) di Jalan Kampung Cincau Nomor 41 (dahulu Jalan Suryakencana Nomor 162 (Gedung Dalem)), Kelurahan Gudang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat	3.635.263.000,00	KMK-239/KM.6/2024 tanggal 17 September 2024 Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset

**DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK PENYELESAIAN DAN/ATAU
KOREKSI PENETAPAN KEMBALI PADA TAHUN 2024**

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
9.	Rumah Tinggal (dh. Gereja Kristen Akos) di Jalan Ranggolawe Nomor 4 (dh. Jalan Randu Gede), Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Provinsi Jawa Timur	5.430.407.000,00	KMK-243/KM.6/2024 tanggal 23 September 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
10.	Rumah Toko a.n Lim Seng Tjong (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	296.265.000,00	KMK-258/KM.6/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
11.	Rumah Toko a.n Silvia (d.h Pertokoan) di Jalan Binjai, Sumatera Utara	353.792.000,00	KMK-259/KM.6/2024 tanggal 4 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
12.	Gereja Kristen Nasional Injili Jemaat "Sion" Teluk Melano (dahulu Gereja Kristen Nasional Injil (GKNI) di Provinsi Kalimantan Barat	995.523.000,00	KMK-263/KM.6/2024 tanggal 7 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
13.	Rumah Toko a.n Antoni (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	109.761.000,00	KMK-265/KM.6/2024 tanggal 8 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
14.	Rumah Toko a.n Jansin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	247.367.000,00	KMK-271/KM.6/2024 tanggal 11 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
15.	Vihara Pemancar Keselamatan (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat	995.523.000,00	KMK-275/KM.6/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
16.	Klenteng Talang/Linthang Konghucu (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat	13.767.177.000,00	KMK-276/KM.6/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
17.	Vihara Dewi Welas Asih (dahulu Kasus Khongdjoe Kwan/Pra Bhapuri) di Provinsi Jawa Barat	14.919.555.000,00	KMK-277/KM.6/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 0% dari nilai wajar aset
18.	Sekolah Tinggi Sospol Veteran (skrg Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo) RI di Sulawesi Selatan	5.965.472.000,00	KMK-294/KM.6/2024 tanggal 30 Oktober 2024 Besaran kompensasi sebesar 35%+10% dari nilai wajar aset
19.	Rumah Toko a.n Tjin A Tjin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	209.974.000,00	KMK-302/KM.6/2024 tanggal 4 November 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
20.	Rumah Toko a.n Sjojfan Salim (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	88.798.000,00	KMK-303/KM.6/2024 tanggal 4 November 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
21.	Rumah Toko a.n Tiong Beng (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	112.477.000,00	KMK-304/KM.6/2024 tanggal 4 November Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset

**DAFTAR ABMA/T YANG TELAH DITERBITKAN KMK PENYELESAIAN DAN/ATAU
KOREKSI PENETAPAN KEMBALI PADA TAHUN 2024**

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
22.	Rumah Toko a.n Ana Ngatimin (d.h Pertokoan) di Kab.Langkat, Sumatera Utara	93.643.000,00	KMK-318/KM.6/2024 tanggal 19 November 2024 Besaran kompensasi sebesar 100% dari nilai wajar aset
23.	Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil (d.h TK, SD, SMEA Yayasan A. Yani) di Provinsi Jawa Timur	4.673.057.000,00	KMK-351/KM.6/2024 tanggal 18 Desember 2024 Besaran kompensasi sebesar 50% dari nilai wajar aset
TOTAL		Rp79.641.246.000,00	

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN /DLE YANG DIHAPUS, DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2024

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Mamuju	Polewali Mandar	Jl. Pange Kel. Wattang Kec. Polewali	323	01/01/1993	67.000.000	-	67.000.000	Penetapan Status Penggunaan ke Bawaslu
2	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Mamuju	Majene	Jl. Abd. Syukur Rahim Banggae	629	01/01/1992	96.000.000	-	96.000.000	Penetapan Status Penggunaan ke Bawaslu
3	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Passo - Batu, Gong	1300	01/04/1982	273.650.000	-	273.650.000	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
4	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	2100	31/12/1981	273.650.000	-	273.650.000	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
5	2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Pembangunan II No.1-2	400	01/01/1978	228.000.000	-	228.000.000	Penyerahan Kepada Kemenkes
6	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	KPKNL Jakarta III	Jakarta Pusat	Jl. Cideng Timur No.54	472	01/01/1974	3.068.000.000	-	3.068.000.000	Penyerahan kepada KPU
7	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Palembang	Kota Palembang	Grand Hill 7 Blok A.4, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang	222	10/04/2012	404.173.611	-	404.173.611	Penyerahan kepada Kemenkeu c.q. Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, & Bangka Belitung
8	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	KPKNL Palembang	Kota Palembang	Grand Hill 7 Blok A.8, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang	102	10/04/2012	185.701.389	-	185.701.389	Penyerahan kepada Kemenkeu c.q. KPKNL Palembang
9	2010307999	Tanah Untuk Jalan Lainnya	KPKNL Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Mesjid Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe	64	01/01/1994	79.717.000	-	79.717.000	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi BMN eks BMN Idle Tahun 2024 pada KPKNL Lhokseumawe
10	2010307999	Tanah Untuk Jalan Lainnya	KPKNL Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Mesjid Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe	82	01/01/1994	102.138.000	-	102.138.000	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi BMN eks BMN Idle Tahun 2024 pada KPKNL Lhokseumawe
11	2010202003	Tanah Lapangan Parkir Sirtu (Pasir Batu)	KPKNL Lhokseumawe	Kota Lhokseumawe	Jl. Medan-Banda Aceh, Desa Mesjid Punteut, Kec. Blang Mangat, Kota Lhokseumawe	122	01/01/1994	160.473.000	-	160.473.000	Koreksi Pencatatan Hasil Inventarisasi BMN eks BMN Idle Tahun 2024 pada KPKNL Lhokseumawe
TOTAL TANAH						5.816		4.938.503.000	-	4.938.503.000	
1	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Semarang	Kab. Blora	Kawedanan Randublatung No.2	100	30/12/1983	71.000.000	41.673.906	29.326.094	Penghapusan
2	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Semarang	Kab. Magelang	Desa Srumbung, Kec. Srumbung	90	30/12/1985	103.210.000	55.733.400	47.476.600	Hibah ke Pemerintah Desa Srumbung
3	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Cendrawasih No.4	50	01/01/1979	19.382.000	14.143.622	5.238.378	Penghapusan
4	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Cendrawasih No.5	50	01/01/1979	15.471.000	11.289.649	4.181.351	Penghapusan

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN /DLE YANG DIHAPUS, DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2024**

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Cendrawasih No.6	50	01/01/1979	15.471.000	11.289.649	4.181.351	Penghapusan
6	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Cendrawasih No.7	50	01/01/1979	20.886.000	15.241.135	5.644.865	Penghapusan
7	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Cendrawasih No.8	50	01/01/1979	19.890.000	14.514.324	5.375.676	Penghapusan
8	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Cendrawasih No.9	50	01/01/1979	65.774.000	47.997.243	17.776.757	Penghapusan
9	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Pembangunan II No.1	50	01/01/1978	41.729.000	32.190.943	9.538.057	Penghapusan
10	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Banjarmasin	Banjarmasin	Jl. Pembangunan II No.2	50	01/01/1978	30.029.000	23.165.229	6.863.771	Penghapusan
11	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Mamuju	Polewali Mandar	Jl. Pange Kel. Wattang Kec. Polewali	48	01/01/2006	174.979.281	62.992.541	111.986.740	Penetapan Status Penggunaan ke Bawaslu
12	4010202013	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	KPKNL Mamuju	Polewali Mandar	Jl. Pange Kel. Wattang Kec. Polewali	48	01/01/2006	77.520.134	27.907.248	49.612.886	Penetapan Status Penggunaan ke Bawaslu
13	4010101002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	KPKNL Mamuju	Majene	Jl. Abd. Syukur Rahim Kec. Banggae	79	01/01/2006	26.555.288	9.559.904	16.995.384	Penetapan Status Penggunaan ke Bawaslu
14	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1982	3.941.000	2.418.341	1.522.659	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
15	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1981	20.246.900	13.015.864	7.231.036	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
16	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1981	3.354.000	2.156.143	1.197.857	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
17	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1981	3.354.000	2.156.143	1.197.857	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
18	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1982	3.440.000	2.110.909	1.329.091	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
19	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1982	3.440.000	2.110.909	1.329.091	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
20	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1982	3.440.000	2.110.909	1.329.091	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
21	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1981	3.397.000	2.183.786	1.213.214	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
22	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	KPKNL Ambon	Kota Ambon	Jl. Batu Gong, Passo, Teluk Ambon Baguala	50	31/12/1982	9.900.000	6.075.000	3.825.000	Penetapan Status Penggunaan ke Bakamla
23	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	KPKNL Jakarta III	Jakarta Pusat	Jl. Cideng Timur No.54	1200	01/01/2009	3.060.546.084	948.769.286	2.111.776.798	Penyerahan kepada KPU
24	4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	KPKNL Palembang	Kota Palembang	Grand Hill 7 Blok A.4, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang	125	10/04/2012	961.752.717	240.438.200	721.314.517	Penyerahan kepada Kemenkeu c.q. Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, & Bangka Belitung
25	4010202004	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	KPKNL Palembang	Kota Palembang	Grand Hill 7 Blok A.8, Kel. Demang Lebar Daun, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang	105	10/04/2012	807.872.283	201.968.075	605.904.208	Penyerahan kepada Kemenkeu c.q. KPKNL Palembang

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN */DLE* YANG DIHAPUS, DISERAHKAN KEPADA PENGGUNA BARANG ATAU PEMDA
PERIODE TAHUN 2024

No	Jenis BMN		KPKNL	Lokasi Aset		Luas (M2)	Perolehan Aset		Akm Penyusutan	Nilai Buku	Ket.
	Kode Barang	Uraian Barang		Kab./Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
26	4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	KPKNL Pekalongan	Kab. Kendal	Jl. Raya Barat 03/03, Desa Penaruban, Kec. Weleri, Kab. Kendal	150	01/01/2002	7.000.000	2.361.436	4.638.564	Penghapusan
27	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	KPKNL Pamekasan	Kab. Pamekasan	Desa Montok, Kec. Larangan, Kab. Pamekasan	70	01/01/1988	16.567.169	8.434.188	8.132.981	Penghapusan
TOTAL BANGUNAN						2.865		5.590.147.856	1.804.007.981	3.786.139.875	
TOTAL						8.681		10.528.650.856	1.804.007.981	8.724.642.875	

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA EKS BMN *IDLE* YANG DITERIMA PENGELOLA BARANG
PERIODE TAHUN 2024**

No	Pengelola Barang	Berita Acara Serah Terima				Identitas Aset					Ket.
		Nomor	Tanggal	Kode Barang	Uraian Barang	Lokasi Aset		Luas	Perolehan Aset		
						Kabupaten/ Kota	Alamat		Tanggal	Nilai (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	KPKNL Jember	BA-10/SJ.7/2023	22/05/2023	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Kab. Probolinggo	Jl. Raya Condong, Kel. Pajarakan, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo	200	01/01/1985	141.344.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
2	KPKNL Sidoarjo	BA-9/SJ.7/2023	22/05/2023	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Kab. Sidoarjo	RT. 10, RW. 02, Kel. Kemanten, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo	244	01/01/1989	223.992.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
3	KPKNL Sidoarjo	BA-9/SJ.7/2023	22/05/2023	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Kab. Sidoarjo	RT. 26, RW. 11, Kel. KKrembug, Kec. krembug, Kab. Sidoarjo	295	01/01/1989	142.743.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
4	KPKNL Sidoarjo	BA-9/SJ.7/2023	22/05/2023	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Kab. Sidoarjo	RT. 01, RW. 02, Kel. Watutulis, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo	256	01/01/1989	119.730.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
5	KPKNL Sidoarjo	BA-9/SJ.7/2023	22/05/2023	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	Kab. Sidoarjo	RT. 15, RW. 03, Kel. Gempol, Kec. Gedek, Kab. Mojokerto	217	01/01/1989	145.646.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
6	KPKNL Manado	BAST-9/KNL.1602/2024	21/03/2024	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Kab. Bolaang Mongondow	Jl. Pelabuhan, Desa Buroko, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow	200	01/01/1990	21.917.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
TOTAL TANAH						-		1.412		795.372.000	
1	KPKNL Jember	BA-10/SJ.7/2023	22/05/2023	4010202007	Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen	Kab. Probolinggo	Jl. Raya Condong, Kel. Pajarakan, Kec. Pajarakan, Kab. Probolinggo	70	01/01/1985	60.729.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
2	KPKNL Sidoarjo	BA-9/SJ.7/2023	22/05/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Sidoarjo	RT. 26, RW. 11, Kel. KKrembug, Kec. krembug, Kab. Sidoarjo	56	01/01/1992	33.758.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
3	KPKNL Sidoarjo	BA-9/SJ.7/2023	22/05/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Sidoarjo	RT. 10, RW. 02, Kel. Kemanten, Kec. Tulangan, Kab. Sidoarjo	56	01/01/1992	33.758.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
4	KPKNL Sidoarjo	BA-9/SJ.7/2023	22/05/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Sidoarjo	RT. 01, RW. 02, Kel. Watutulis, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo	56	01/01/1992	33.758.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
5	KPKNL Sidoarjo	BA-9/SJ.7/2023	22/05/2023	4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Kab. Sidoarjo	RT. 15, RW. 03, Kel. Gempol, Kec. Gedek, Kab. Mojokerto	56	01/01/1992	33.758.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
6	KPKNL Manado	BAST-9/KNL.1602/2024	21/03/2024	4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kab. Bolaang Mongondow	Jl. Pelabuhan, Desa Buroko, Kec. Kaidipang, Kab. Bolaang Mongondow	70	01/01/1990	136.793.000	Penyerahan dari Kementerian Keuangan
TOTAL BANGUNAN						-		364		332.554.000	
TOTAL						-		1.776		1.127.926.000	

RINCIAN UTANG PAJAK ROKOK
TAHUN 2024

No	Daerah	Utang PR RKUD (Penerimaan Desember 2024)	Utang BPJS (Penerimaan Desember 2024)	Utang per Pemda periode TW I s.d. Des 2024 yang Belum Disalurkan di TA 2024	Total Utang Pajak Rokok TA 2024 per Pemda
1	Provinsi Aceh	57.318.104.237	6.854.577.553	-	64.172.681.790
2	Provinsi Sumatera Utara	172.468.537.521	8.169.112.967	-	180.637.650.488
3	Provinsi Sumatera Barat	66.869.245.059	-	-	66.869.245.059
4	Provinsi Riau	75.605.892.417	4.087.028.624	-	79.692.921.041
5	Provinsi Kepulauan Riau	25.219.633.776	-	-	25.219.633.776
6	Provinsi Jambi	43.569.993.312	129.578.395	-	43.699.571.707
7	Provinsi Sumatera Selatan	95.029.661.413	8.334.410.243	-	103.364.071.656
8	Provinsi Bangka Belitung	17.620.162.095	-	-	17.620.162.095
9	Provinsi Bengkulu	24.382.575.595	-	26.017.182.393	50.399.757.988
10	Provinsi Lampung	96.660.203.864	8.910.904.903	-	105.571.108.767
11	Provinsi DKI Jakarta	133.119.683.267	-	-	133.119.683.267
12	Provinsi Jawa Barat	569.913.914.953	11.484.360.218	-	581.398.275.171
13	Provinsi Banten	145.208.829.583	-	-	145.208.829.583
14	Provinsi Jawa Tengah	445.078.768.676	-	-	445.078.768.676
15	Provinsi DI Yogyakarta	43.514.558.287	-	-	43.514.558.287
16	Provinsi Jawa Timur	465.016.537.538	21.367.160.366	-	486.383.697.904
17	Provinsi Kalimantan Barat	64.807.931.672	-	-	64.807.931.672
18	Provinsi Kalimantan Tengah	30.825.051.373	1.152.410.150	-	31.977.461.523
19	Provinsi Kalimantan Selatan	49.326.935.204	-	-	49.326.935.204
20	Provinsi Kalimantan Timur	46.570.182.466	-	-	46.570.182.466
21	Provinsi Kalimantan Utara	8.616.910.617	-	-	8.616.910.617
22	Provinsi Sulawesi Utara	26.993.852.752	4.391.131.881	-	31.384.984.633
23	Provinsi Gorontalo	14.376.604.157	-	-	14.376.604.157
24	Provinsi Sulawesi Tengah	35.492.416.407	1.142.727.183	-	36.635.143.590
25	Provinsi Sulawesi Selatan	107.970.111.215	1.679.068.638	-	109.649.179.853
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	17.093.727.079	-	-	17.093.727.079
27	Provinsi Sulawesi Barat	31.356.968.783	621.208.165	128.974.854.622	160.953.031.570
28	Provinsi Bali	50.751.450.577	-	-	50.751.450.577
29	Provinsi Nusa Tenggara Barat	61.907.218.698	3.501.235.456	-	65.408.454.154
30	Provinsi Nusa Tenggara Timur	65.367.674.968	-	-	65.367.674.968
31	Provinsi Maluku	17.829.822.471	4.464.605.461	-	22.294.427.932
32	Provinsi Maluku Utara	13.802.621.743	2.086.870.283	64.085.733.449	79.975.225.475
33	Provinsi Papua	10.144.207.909	2.488.789.900	-	12.632.997.809
34	Provinsi Papua Barat	6.593.796.198	-	-	6.593.796.198
35	Provinsi Papua Selatan	5.209.536.581	968.645.001	-	6.178.181.582
36	Provinsi Papua Tengah	15.852.618.353	-	-	15.852.618.353
37	Provinsi Papua Pegunungan	17.140.769.160	-	-	17.140.769.160
38	Provinsi Papua Barat Daya	4.578.160.191	2.542.035.838	18.909.512.650	26.029.708.679
Total		3.179.204.870.167	94.375.861.225	237.987.283.114	3.511.568.014.506

UTANG RETUR KPPN

Kode	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
001	BANDA ACEH	(942.398.217)	917.065.242	(25.332.975)
002	LANGSA	-	(39.553.153)	(39.553.153)
003	MEULABOH	(281.563.678)	281.563.678	-
004	MEDAN I	(212.946.917)	(715.973.259)	(928.920.176)
006	PADANG SIDEMPUAN	(30.837.050)	30.837.050	-
008	PEKANBARU	-	(174.954.742)	(174.954.742)
009	TANJUNG PINANG	(14.446.136)	(827.470.261)	(841.916.397)
010	PADANG	(62.008.944)	(404.463.983)	(466.472.927)
012	JAMBI	-	(28.891.559)	(28.891.559)
014	PALEMBANG	(6.100.364.584)	5.858.309.399	(242.055.185)
015	PANGKAL PINANG	(971.678.565)	971.678.565	-
016	BENGKULU	(351.500)	351.500	-
017	BANDAR LAMPUNG	(209.331.984)	136.692.091	(72.639.893)
018	JAKARTA I	(2.182.126.526)	1.004.849.843	(1.177.276.683)
019	JAKARTA II	(74.415.095.839)	74.040.468.969	(374.626.870)
020	SERANG	(18.849.551)	(294.266.577)	(313.116.128)
021	PURWAKARTA	-	(8.160.200)	(8.160.200)
022	BANDUNG I	(717.632.440)	532.400.839	(185.231.601)
023	BOGOR	(817.347.140)	797.944.503	(19.402.637)
024	CIREBON	(104.149.865)	102.749.865	(1.400.000)
025	TASIKMALAYA	(94.439.248)	94.439.248	-
026	SEMARANG I	-	(59.778.711)	(59.778.711)
028	SURAKARTA	(106.380.000)	80.379.550	(26.000.450)
030	YOGYAKARTA	-	(7.362.570)	(7.362.570)
031	SURABAYA I	(330.856.686)	315.085.417	(15.771.269)
032	MALANG	(183.065.842)	179.284.842	(3.781.000)
034	KEDIRI	(2.084.295.495)	2.081.334.620	(2.960.875)
035	BONDOWOSO	-	(13.770.000)	(13.770.000)
037	DENPASAR	(66.956.498)	(53.939.084)	(120.895.582)
038	MATARAM	(163.997.000)	163.997.000	-
041	WAINGAPU	(457.581.307)	457.581.307	-
042	PONTIANAK	(222.763.518)	213.731.018	(9.032.500)
043	PALANGKARAYA	(84.405.000)	27.722.637	(56.682.363)
046	SAMARINDA	(146.777.969)	(6.805.943)	(153.583.912)
047	BALIKPAPAN	-	(155.484.600)	(155.484.600)
049	MANADO	(356.552.337)	327.912.468	(28.639.869)
050	GORONTALO	(42.497.643)	40.688.043	(1.809.600)
051	PALU	-	(557.844.789)	(557.844.789)
052	POSO	-	(75.665.270)	(75.665.270)
053	LUWUK	-	(3.781.081)	(3.781.081)
054	MAKASSAR I	(381.077.461)	379.274.261	(1.803.200)
055	WATAMPONE	(2.000.000)	(3.385.000)	(5.385.000)
057	PARE PARE	(460.000)	460.000	-
059	MAJENE	(26.081.081)	26.081.081	-

UTANG RETUR KPPN

Kode	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
060	KENDARI	(419.158.438)	210.449.970	(208.708.468)
061	AMBON	(8.392.250)	(2.710.250)	(11.102.500)
062	TERNATE	(187.513.076)	174.725.376	(12.787.700)
063	JAYAPURA	(127.745.475)	113.975.475	(13.770.000)
064	BIAK	-	(13.770.000)	(13.770.000)
065	MANOKWARI	(99.383.545)	(279.074.200)	(378.457.745)
066	SORONG	(117.903.080)	107.797.540	(10.105.540)
067	FAK FAK	-	(32.130.000)	(32.130.000)
068	MERAUKE	-	(7.050.000)	(7.050.000)
070	LUBUK LINGGAU	-	(4.896.000)	(4.896.000)
071	BIMA	-	(41.321.061)	(41.321.061)
072	PEKALONGAN	-	(41.310.000)	(41.310.000)
074	TAPAKTUAN	(23.048.067)	(57.605.491)	(80.653.558)
075	RANTAU PRAPAT	(20.000.000)	19.883.000	(117.000)
083	TAHUNA	(29.580.000)	29.580.000	-
084	TUAL	-	(485.081.441)	(485.081.441)
088	JAKARTA III	(1.262.385.892)	(1.209.073.968)	(2.471.459.860)
089	LHOKSEUMAWE	(24.817.280)	(98.508.215)	(123.325.495)
093	SINGKAWANG	-	(16.158.652)	(16.158.652)
095	BANDUNG II	(111.137.877)	78.177.798	(32.960.079)
098	MOJOKERTO	-	(15.405.400)	(15.405.400)
099	PACITAN	(1.161.000)	1.161.000	-
103	BAU BAU	(5.000.000)	(19.420.000)	(24.420.000)
110	BARABAI	-	(13.770.000)	(13.770.000)
113	WAMENA	-	(44.550.000)	(44.550.000)
116	KOTABUMI	(40.397.235)	25.007.235	(15.390.000)
120	DUMAI	-	(64.089.552)	(64.089.552)
121	MANNA	(2.850.000)	(10.920.000)	(13.770.000)
123	MEDAN II	-	(16.900.000)	(16.900.000)
124	TEBING TINGGI	-	(6.912.000)	(6.912.000)
126	METRO LAMPUNG	(10.029.500)	(7.015.925)	(17.045.425)
127	TANGERANG	(51.089.357)	(84.350.504)	(135.439.861)
133	JAKARTA IV	(243.284.685)	(1.296.299.532)	(1.539.584.217)
134	SEMARANG II	(6.152.580)	(200.980.374.357)	(200.986.526.937)
135	SURABAYA II	(1.530.000)	1.530.000	-
136	MAKASSAR II	-	(842.832.183)	(842.832.183)
137	BATAM	(34.130.250)	34.130.250	-
139	JAKARTA V	(7.175.064.685)	(1.345.299.934)	(8.520.364.619)
140	KHUSUS PINJAMAN DAN HIB	(8.822.934.000)	2.420.739.776	(6.402.194.224)
141	TIMIKA	-	(18.360.000)	(18.360.000)
147	KUNINGAN	(2.940.915)	2.940.915	-
156	KOLAKA	(13.501.599)	13.501.599	-
158	KOTAMOBAGU		(9.847.700)	(9.847.700)
161	RANGKASBITUNG	-	(5.700.000)	(5.700.000)
164	BANJARNEGARA	(76.548.000)	76.548.000	-
165	SIDOARJO	-	(2.910.000)	(2.910.000)

UTANG RETUR KPPN

Kode	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
169	SELONG	-	(15.000.000)	(15.000.000)
175	JAKARTA VI	(1.084.406.762)	67.799.302	(1.016.607.460)
178	MAMUJU	(79.185.640)	(93.227.388)	(172.413.028)
180	MARISA	-	(54.533.330)	(54.533.330)
182	JAKARTA VII	(16.506.476.597)	16.013.173.108	(493.303.489)
185	TANJUNG SELOR	-	(5.940.350)	(5.940.350)
999	DIREKTORAT PENGELOLAAN	-	(349.458.943.372)	(349.458.943.372)
Jumlah		(128.419.063.806)	(451.678.838.207)	(580.097.902.013)

REKLASIFIKASI KELEBIHAN SETORAN UANG PERSEDIAAN

Kode	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Keterangan
019	JAKARTA II	(304.357.324)	(362.346.452)	(666.703.776)	Utang yang berasal dari penerimaan reklasifikasi kelebihan setoran uang persediaan yang belum diterbitkan SPM pengembalian pendapatannya pada satker pengembalian penerimaan negara atas beban SAL
Jumlah		(304.357.324)	(362.346.452)	(666.703.776)	

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA LAINNYA PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

No.	Bank	Jumlah	Keterangan
1	RPgL BU SKN RTGS IN TRANSIT BRI (90611)	1.500.000.000.000	Penyaluran SP2D PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan no SP2D 240191301077112 tgl 31 Des 2024 sebesar Rp1,5Triliun yang tidak dapat disalurkan sampai dengan tanggal 31 desember 2024 akibat keterbatasan sistem perbankan, atas dana tersebut ditampung dalam rekening transit milik BUN untuk kemudian disalurkan tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam PER-18/PB/2024
2	RPgL BU SKN RTGS IN TRANSIT BMRI (90612)	2.391.000.000.000	Penyaluran SP2D PMN kepada: - Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan no SP2D 240191302073178 sebesar Rp5 Miliar - PT Sarana Multigriya Finansial dengan no SP2D 240191302073177 tgl 31 Des 2024 sebesar Rp1,891Triliun yang tidak dapat disalurkan sampai dengan tanggal 31 desember 2024 akibat keterbatasan sistem perbankan, atas dana tersebut ditampung dalam rekening transit milik BUN untuk kemudian disalurkan tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam PER-18/PB/2024
3	RPgL BU SKN RTGS IN TRANSIT BTN (90614)	3.000.000.000.000	Penyaluran SP2D PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan no SP2D 240191304025509 tgl 31 Des 2024 sebesar Rp3Triliun yang tidak dapat disalurkan sampai dengan tanggal 31 desember 2024 akibat keterbatasan sistem perbankan, atas dana tersebut ditampung dalam rekening transit milik BUN untuk kemudian disalurkan tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam PER-18/PB/2024
4	Transito 019 Nihil LAK DTP (30198)	4.465.000.000.000	Penyaluran SP2D PMN kepada : - PT Industri Kereta Api dengan no SP2D 240190302000045 tgl 31 Des 2024 sebesar Rp965Miliar - PT Kereta Api Indonesia dengan no SP2D 240190302000044 tgl 31 Des 2024 sebesar Rp2Triliun - PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan no SP2D 240190302000044 tgl 31 Des 2024 sebesar Rp1,5Triliun yang tidak dapat disalurkan sampai dengan tanggal 31 desember 2024 akibat keterbatasan sistem perbankan, atas dana tersebut ditampung dalam rekening transit milik BUN untuk kemudian disalurkan tanggal 2 Januari 2025 sebagaimana diatur dalam PER-18/PB/2024
Jumlah		11.356.000.000.000	

UTANG JANGKA PENDEK SEMENTARA KARENA KESALAHAN SISTEM PERBANKAN

Kode	KPPN	Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir	Keterangan
999	DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA	(46.018.590)	39.931.750	(6.086.840)	Anomali sistem BRI yang menyebabkan double pembukuan pada rekening retur RPKBUN P SPAN BRI atas SP2D nomor 2405114010000180000001 yang belum terselesaikan sampai dengan 31 Desember 2024 sesuai surat BRI nomor B.121.e-INS/FPC/02/2025 tanggal 6 Februari 2025
Jumlah		(46.018.590)	39.931.750	(6.086.840)	

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
1	Provinsi Aceh	3.689.872.000
2	Kab. Aceh Barat	3.266.062.000
3	Kab. Aceh Besar	270.432.000
4	Kab. Aceh Selatan	162.281.000
5	Kab. Aceh Singkil	225.543.000
6	Kab. Aceh Tengah	304.456.000
7	Kab. Aceh Tenggara	176.775.000
8	Kab. Aceh Timur	770.306.000
9	Kab. Aceh Utara	1.136.400.000
10	Kab. Bireuen	146.910.000
11	Kab. Pidie	210.117.000
12	Kab. Simeulue	142.891.000
13	Kota Banda Aceh	187.744.000
14	Kota Sabang	146.012.000
15	Kota Langsa	315.132.000
16	Kota Lhokseumawe	172.527.000
17	Kab. Gayo Lues	366.110.000
18	Kab. Aceh Barat Daya	313.967.000
19	Kab. Aceh Jaya	339.637.000
20	Kab. Nagan Raya	2.084.678.000
21	Kab. Aceh Tamiang	1.582.473.000
22	Kab. Bener Meriah	253.725.000
23	Kab. Pidie Jaya	107.546.000
24	Kota Subulussalam	131.860.000
25	Provinsi Sumatera Utara	2.218.209.000
26	Kab. Asahan	919.895.000
27	Kab. Dairi	178.795.000
28	Kab. Deli Serdang	950.120.000
29	Kab. Karo	73.268.000
30	Kab. Labuhanbatu	580.588.000
31	Kab. Langkat	1.465.773.000
32	Kab. Mandailing Natal	1.449.478.000
33	Kab. Nias	477.703.000
34	Kab. Simalungun	955.020.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	1.420.791.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	649.764.000
37	Kab. Tapanuli Utara	865.269.000
38	Kab. Toba	396.208.000
39	Kota Binjai	466.125.000
40	Kota Medan	1.586.340.000
41	Kota Sibolga	375.151.000
42	Kota Tanjung Balai	358.130.000
43	Kota Tebing Tinggi	324.905.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
44	Kota Padang Sidempuan	474.382.000
45	Kab. Pakpak Bharat	118.497.000
46	Kab. Nias Selatan	501.029.000
47	Kab. Humbang Hasundutan	430.791.000
48	Kab. Serdang Bedagai	750.624.000
49	Kab. Samosir	446.910.000
50	Kab. Batu Bara	742.490.000
51	Kab. Padang Lawas	546.229.000
52	Kab. Padang Lawas Utara	547.563.000
53	Kab. Labuhanbatu Selatan	1.039.921.000
54	Kab. Labuhanbatu Utara	433.036.000
55	Kab. Nias Utara	381.598.000
56	Kab. Nias Barat	430.767.000
57	Kota Gunungsitoli	458.208.000
58	Kab. Limapuluh Kota	189.534.000
59	Kab. Agam	132.384.000
60	Kab. Kepulauan Mentawai	62.742.000
61	Kab. Padang Pariaman	88.243.000
62	Kab. Pasaman	86.854.000
63	Kab. Pesisir Selatan	161.876.000
64	Kab. Sijunjung	179.821.000
65	Kab. Solok	67.416.000
66	Kab. Tanah Datar	34.301.000
67	Kota Bukit Tinggi	28.536.000
68	Kota Padang Panjang	61.018.000
69	Kota Padang	116.661.000
70	Kota Payakumbuh	54.537.000
71	Kota Sawahlunto	378.271.000
72	Kota Solok	38.224.000
73	Kota Pariaman	31.303.000
74	Kab. Pasaman Barat	276.809.000
75	Kab. Dharmasraya	1.156.963.000
76	Kab. Solok Selatan	430.188.000
77	Provinsi Riau	18.777.892.000
78	Kab. Bengkalis	42.575.934.000
79	Kab. Indragiri Hilir	5.659.138.000
80	Kab. Indragiri Hulu	4.980.447.000
81	Kab. Kampar	9.207.786.000
82	Kab. Kuantan Singingi	3.797.877.000
83	Kab. Pelalawan	5.305.178.000
84	Kab. Rokan Hilir	13.849.185.000
85	Kab. Rokan Hulu	4.971.568.000
86	Kab. Siak	13.494.607.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
87	Kota Dumai	8.327.130.000
88	Kota Pekanbaru	5.218.974.000
89	Kab. Kepulauan Meranti	3.470.635.000
90	Provinsi Jambi	16.603.683.000
91	Kab. Batang Hari	7.288.623.000
92	Kab. Bungo	5.548.480.000
93	Kab. Kerinci	3.400.298.000
94	Kab. Merangin	5.564.440.000
95	Kab. Muaro Jambi	8.267.323.000
96	Kab. Sarolangun	7.276.436.000
97	Kab. Tanjung Jabung Barat	73.564.154.000
98	Kab. Tanjung Jabung Timur	14.830.895.000
99	Kab. Tebo	3.448.496.000
100	Kota Jambi	2.602.130.000
101	Kota Sungai Penuh	3.891.870.000
102	Provinsi Sumatera Selatan	76.377.561.000
103	Kab. Lahat	133.375.282.000
104	Kab. Musi Banyuasin	48.910.244.000
105	Kab. Musi Rawas	32.309.734.000
106	Kab. Muara Enim	90.824.473.000
107	Kab. Ogan Komering Ilir	7.552.827.000
108	Kab. Ogan Komering Ulu	7.531.655.000
109	Kota Palembang	18.598.431.000
110	Kota Prabumulih	7.849.497.000
111	Kota Pagar Alam	22.259.236.000
112	Kota Lubuk Linggau	5.098.111.000
113	Kab. Banyuasin	10.504.535.000
114	Kab. Ogan Ilir	6.129.687.000
115	Kab. OKU Timur	5.421.178.000
116	Kab. OKU Selatan	6.499.093.000
117	Kab. Empat Lawang	15.243.009.000
118	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	41.021.181.000
119	Kab. Musi Rawas Utara	22.870.875.000
120	Provinsi Bengkulu	2.116.245.000
121	Kab. Bengkulu Selatan	8.108.448.000
122	Kab. Bengkulu Utara	2.323.223.000
123	Kab. Rejang Lebong	787.128.000
124	Kota Bengkulu	515.309.000
125	Kab. Kaur	3.232.477.000
126	Kab. Seluma	6.830.769.000
127	Kab. Mukomuko	836.755.000
128	Kab. Lebong	2.955.301.000
129	Kab. Kepahiang	577.290.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
130	Kab. Bengkulu Tengah	2.096.647.000
131	Provinsi Lampung	1.166.540.000
132	Kab. Lampung Barat	151.861.000
133	Kab. Lampung Selatan	461.847.000
134	Kab. Lampung Tengah	1.034.498.000
135	Kab. Lampung Utara	313.538.000
136	Kab. Lampung Timur	1.177.313.000
137	Kab. Tanggamus	364.579.000
138	Kab. Tulang Bawang	299.084.000
139	Kab. Way Kanan	351.994.000
140	Kota Bandar Lampung	302.103.000
141	Kota Metro	170.020.000
142	Kab. Pesawaran	185.008.000
143	Kab. Pringsewu	141.617.000
144	Kab. Mesuji	274.654.000
145	Kab. Tulang Bawang Barat	197.835.000
146	Kab. Pesisir Barat	143.890.000
147	Provinsi DKI Jakarta	3.978.745.231.361
148	Provinsi Jawa Barat	78.232.594.000
149	Kab. Bandung	36.107.540.000
150	Kab. Bekasi	21.182.627.000
151	Kab. Bogor	33.338.195.000
152	Kab. Ciamis	1.430.902.000
153	Kab. Cianjur	4.050.337.000
154	Kab. Cirebon	1.324.259.000
155	Kab. Garut	27.258.676.000
156	Kab. Indramayu	3.397.204.000
157	Kab. Karawang	10.603.918.000
158	Kab. Kuningan	1.610.149.000
159	Kab. Majalengka	958.218.000
160	Kab. Purwakarta	3.314.153.000
161	Kab. Subang	3.079.001.000
162	Kab. Sukabumi	18.887.336.000
163	Kab. Sumedang	1.853.695.000
164	Kab. Tasikmalaya	2.053.086.000
165	Kota Bandung	2.105.315.000
166	Kota Bekasi	9.345.097.000
167	Kota Bogor	7.169.764.000
168	Kota Cirebon	3.124.452.000
169	Kota Depok	6.913.750.000
170	Kota Sukabumi	2.931.352.000
171	Kota Tasikmalaya	3.278.373.000
172	Kota Cimahi	4.011.219.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
173	Kota Banjar	1.332.083.000
174	Kab. Bandung Barat	1.747.923.000
175	Kab. Pangandaran	2.009.976.000
176	Kab. Blora	92.512.000
177	Kab. Cilacap	174.119.000
178	Kab. Pemasang	24.701.000
179	Kab. Semarang	74.766.000
180	Kota Semarang	5.272.358.000
181	Provinsi DI Yogyakarta	171.809.000
182	Kab. Bantul	19.118.000
183	Kab. Gunung Kidul	106.294.000
184	Kab. Kulon Progo	154.858.000
185	Kab. Sleman	59.372.000
186	Kota Yogyakarta	64.300.000
187	Provinsi Jawa Timur	7.802.933.000
188	Kab. Bangkalan	386.504.000
189	Kab. Banyuwangi	3.261.707.000
190	Kab. Blitar	415.481.000
191	Kab. Bojonegoro	1.279.765.680.483
192	Kab. Bondowoso	77.408.000
193	Kab. Gresik	23.772.449.000
194	Kab. Jember	1.564.664.000
195	Kab. Kediri	735.646.000
196	Kab. Lumajang	381.248.000
197	Kab. Madiun	206.358.000
198	Kab. Magetan	469.624.000
199	Kab. Mojokerto	567.666.000
200	Kab. Nganjuk	96.933.000
201	Kab. Ngawi	94.444.000
202	Kab. Pacitan	456.015.000
203	Kab. Pasuruan	957.654.000
204	Kab. Ponorogo	450.730.000
205	Kab. Sampang	183.076.000
206	Kab. Sidoarjo	638.777.000
207	Kab. Situbondo	131.512.000
208	Kab. Trenggalek	432.908.000
209	Kab. Tuban	631.249.000
210	Kab. Tulungagung	389.234.000
211	Kota Blitar	2.715.088.000
212	Kota Madiun	2.203.501.000
213	Kota Malang	2.152.808.000
214	Kota Mojokerto	2.337.511.000
215	Kota Pasuruan	1.319.585.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
216	Kota Probolinggo	614.321.000
217	Kota Surabaya	10.105.132.000
218	Kota Batu	2.151.754.000
219	Provinsi Kalimantan Barat	272.864.000
220	Kab. Bengkayang	369.386.000
221	Kab. Landak	358.449.000
222	Kab. Kapuas Hulu	3.879.488.000
223	Kab. Ketapang	7.321.976.553
224	Kab. Mempawah	389.018.000
225	Kab. Sambas	379.360.000
226	Kab. Sanggau	44.111.398.959
227	Kab. Sintang	3.243.292.000
228	Kota Pontianak	57.980.000
229	Kota Singkawang	307.295.000
230	Kab. Sekadau	448.131.000
231	Kab. Melawi	2.125.175.000
232	Kab. Kayong Utara	512.635.000
233	Kab. Kubu Raya	623.173.000
234	Provinsi Kalimantan Tengah	129.012.318.000
235	Kab. Barito Selatan	81.576.902.000
236	Kab. Barito Utara	1.488.960.792.789
237	Kab. Kapuas	360.951.437.097
238	Kab. Kotawaringin Barat	4.193.544.000
239	Kab. Kotawaringin Timur	4.410.885.000
240	Kota Palangkaraya	59.445.152.930
241	Kab. Katingan	2.511.509.000
242	Kab. Seruyan	3.507.583.000
243	Kab. Sukamara	4.284.790.000
244	Kab. Lamandau	3.730.507.000
245	Kab. Gunung Mas	4.911.203.000
246	Kab. Pulang Pisau	4.633.352.000
247	Kab. Murung Raya	957.357.505.335
248	Kab. Barito Timur	107.949.871.798
249	Provinsi Kalimantan Selatan	329.465.667.000
250	Kab. Banjar	160.126.886.239
251	Kab. Barito Kuala	32.998.100.000
252	Kab. Hulu Sungai Selatan	90.002.220.000
253	Kab. Hulu Sungai Tengah	220.286.987.287
254	Kab. Hulu Sungai Utara	70.480.699.000
255	Kab. Kotabaru	197.069.169.000
256	Kab. Tabalong	170.351.295.000
257	Kab. Tanah Laut	41.509.610.000
258	Kab. Tapin	180.256.997.014

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
259	Kota Banjarbaru	49.488.325.000
260	Kota Banjarmasin	42.508.142.000
261	Kab. Balangan	371.190.177.000
262	Kab. Tanah Bumbu	243.090.143.000
263	Provinsi Kalimantan Timur	579.917.835.000
264	Kab. Berau	264.778.067.000
265	Kab. Kutai Kartanegara	693.394.593.000
266	Kab. Kutai Barat	1.346.701.107.942
267	Kab. Kutai Timur	506.226.071.000
268	Kab. Paser	232.144.492.000
269	Kota Balikpapan	409.032.884.244
270	Kota Bontang	472.955.102.011
271	Kota Samarinda	134.664.022.000
272	Kab. Penajam Paser Utara	91.387.941.000
273	Kab. Mahakam Ulu	995.632.342.554
274	Provinsi Sulawesi Utara	3.125.838.000
275	Kab. Bolaang Mongondow	3.275.531.000
276	Kab. Minahasa	595.130.000
277	Kab. Kepulauan Sangihe	343.958.000
278	Kota Bitung	1.916.066.000
279	Kota Manado	561.960.000
280	Kab. Kepulauan Talaud	356.428.000
281	Kab. Minahasa Selatan	580.223.000
282	Kota Tomohon	429.549.000
283	Kab. Minahasa Utara	2.823.796.000
284	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	344.161.000
285	Kota Kotamobagu	596.231.000
286	Kab. Bolaang Mongondow Utara	612.175.000
287	Kab. Minahasa Tenggara	493.349.000
288	Kab. Bolaang Mongondow Timur	578.798.000
289	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	506.742.000
290	Provinsi Sulawesi Tengah	54.262.820.000
291	Kab. Banggai	82.550.416.000
292	Kab. Banggai Kepulauan	1.957.386.000
293	Kab. Buol	8.199.006.372
294	Kab. Toli-toli	1.990.560.000
295	Kab. Donggala	2.151.598.000
296	Kab. Morowali	60.394.436.000
297	Kab. Poso	4.468.095.492
298	Kota Palu	5.857.016.000
299	Kab. Parigi Moutong	2.130.305.000
300	Kab. Tojo Una-Una	17.785.422.000
301	Kab. Sigi	2.186.385.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
302	Kab. Banggai Laut	1.870.933.000
303	Kab. Morowali Utara	50.615.809.000
304	Provinsi Sulawesi Selatan	2.920.063.000
305	Kab. Bantaeng	194.743.000
306	Kab. Barru	167.299.000
307	Kab. Bone	487.670.000
308	Kab. Bulukumba	225.681.000
309	Kab. Enrekang	138.069.000
310	Kab. Gowa	224.979.000
311	Kab. Jeneponto	191.468.000
312	Kab. Luwu	333.956.000
313	Kab. Luwu Utara	364.265.000
314	Kab. Maros	239.380.000
315	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	324.179.000
316	Kota Palopo	127.596.000
317	Kab. Luwu Timur	21.763.723.000
318	Kab. Pinrang	141.455.000
319	Kab. Sinjai	143.508.000
320	Kab. Kepulauan Selayar	169.577.000
321	Kab. Sidenreng Rappang	302.775.000
322	Kab. Soppeng	304.750.000
323	Kab. Takalar	161.097.000
324	Kab. Tana Toraja	209.273.000
325	Kab. Wajo	1.594.124.000
326	Kota Pare-pare	156.560.000
327	Kota Makassar	185.937.000
328	Kab. Toraja Utara	194.759.000
329	Provinsi Sulawesi Tenggara	338.354.338.132
330	Kab. Buton	1.000.352.000
331	Kab. Konawe	13.458.352.000
332	Kab. Kolaka	44.782.264.000
333	Kab. Muna	1.121.755.000
334	Kota Kendari	1.167.128.000
335	Kota Bau-bau	2.064.605.000
336	Kab. Konawe Selatan	1.048.391.000
337	Kab. Bombana	28.541.975.000
338	Kab. Wakatobi	5.090.446.584
339	Kab. Kolaka Utara	17.371.451.000
340	Kab. Konawe Utara	20.653.494.000
341	Kab. Buton Utara	2.601.625.000
342	Kab. Konawe Kepulauan	8.156.865.000
343	Kab. Kolaka Timur	7.996.475.000
344	Kab. Muna Barat	903.758.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
345	Kab. Buton Tengah	10.060.046.000
346	Kab. Buton Selatan	14.026.102.773
347	Provinsi Bali	7.804.246.000
348	Kab. Badung	2.898.080.000
349	Kab. Bangli	360.213.000
350	Kab. Buleleng	374.804.000
351	Kab. Gianyar	659.013.000
352	Kab. Jembrana	355.321.000
353	Kab. Karangasem	359.957.000
354	Kab. Klungkung	387.428.000
355	Kab. Tabanan	405.446.000
356	Kota Denpasar	2.896.502.000
357	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2.504.246.000
358	Kab. Bima	501.010.000
359	Kab. Dompu	446.430.000
360	Kab. Lombok Barat	492.658.000
361	Kab. Sumbawa	1.966.437.000
362	Kota Bima	462.847.000
363	Kab. Sumbawa Barat	397.885.338.508
364	Kab. Lombok Utara	614.361.000
365	Provinsi Nusa Tenggara Timur	158.200.000
366	Kab. Alor	44.043.000
367	Kab. Belu	17.274.000
368	Kab. Ende	51.954.000
369	Kab. Kupang	71.128.000
370	Kab. Lembata	51.240.000
371	Kab. Manggarai	18.526.000
372	Kab. Ngada	74.294.000
373	Kab. Sikka	29.201.000
374	Kab. Sumba Barat	32.036.000
375	Kab. Sumba Timur	35.987.000
376	Kab. Timor Tengah Selatan	70.484.000
377	Kab. Timor Tengah Utara	18.564.000
378	Kota Kupang	91.224.000
379	Kab. Rote Ndao	15.564.000
380	Kab. Manggarai Barat	96.143.000
381	Kab. Nagekeo	34.327.000
382	Kab. Sumba Barat Daya	17.983.000
383	Kab. Sumba Tengah	8.794.000
384	Kab. Manggarai Timur	41.297.000
385	Kab. Sabu Raijua	34.909.000
386	Kab. Malaka	20.908.000
387	Provinsi Maluku	228.819.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
388	Kab. Kepulauan Tanimbar	28.656.000
389	Kab. Maluku Tengah	153.561.000
390	Kab. Maluku Tenggara	50.959.000
391	Kab. Buru	321.179.000
392	Kota Ambon	104.836.000
393	Kab. Seram Bagian Barat	184.693.000
394	Kab. Seram Bagian Timur	123.670.000
395	Kab. Kepulauan Aru	61.950.000
396	Kota Tual	103.947.000
397	Kab. Maluku Barat Daya	183.486.000
398	Kab. Buru Selatan	32.133.000
399	Provinsi Papua	1.250.006.000
400	Kab. Biak Numfor	671.791.000
401	Kab. Jayapura	858.283.000
402	Kab. Jayawijaya	680.757.000
403	Kab. Merauke	1.184.286.000
404	Kab. Mimika	12.328.622.000
405	Kab. Nabire	760.915.000
406	Kab. Paniai	966.961.000
407	Kab. Puncak Jaya	345.318.000
408	Kab. Kepulauan Yapen	703.863.000
409	Kota Jayapura	487.422.000
410	Kab. Sarmi	545.899.000
411	Kab. Keerom	439.564.000
412	Kab. Yahukimo	557.614.000
413	Kab. Pegunungan Bintang	353.336.000
414	Kab. Tolikara	344.796.000
415	Kab. Boven Digoel	766.433.000
416	Kab. Mappi	426.059.000
417	Kab. Asmat	871.505.000
418	Kab. Waropen	370.608.000
419	Kab. Supiori	561.345.000
420	Kab. Mamberamo Raya	350.449.000
421	Kab. Mamberamo Tengah	343.009.000
422	Kab. Yalimo	360.366.000
423	Kab. Lanny Jaya	338.963.000
424	Kab. Nduga	580.061.000
425	Kab. Dogiyai	6.348.122.260
426	Kab. Puncak	829.360.000
427	Kab. Intan Jaya	829.485.000
428	Kab. Deiyai	874.699.000
429	Provinsi Maluku Utara	88.104.512.000
430	Kab. Halmahera Tengah	238.531.280.164

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
431	Kota Ternate	2.545.172.000
432	Kab. Halmahera Barat	20.797.696.000
433	Kab. Halmahera Timur	145.723.242.000
434	Kab. Halmahera Selatan	49.041.324.000
435	Kab. Halmahera Utara	2.403.513.000
436	Kab. Kepulauan Sula	13.391.541.198
437	Kota Tidore Kepulauan	31.729.906.000
438	Kab. Pulau Morotai	7.506.785.000
439	Kab. Pulau Taliabu	8.153.264.000
440	Provinsi Banten	33.266.820.000
441	Kab. Lebak	2.093.687.000
442	Kab. Pandeglang	1.521.404.000
443	Kab. Serang	1.518.535.000
444	Kab. Tangerang	12.958.904.000
445	Kota Cilegon	6.659.284.000
446	Kota Tangerang	13.850.356.000
447	Kota Serang	2.908.594.000
448	Kota Tangerang Selatan	14.056.632.000
449	Provinsi Bangka Belitung	168.465.000
450	Kab. Bangka	237.444.000
451	Kab. Belitung	225.005.000
452	Kota Pangkal Pinang	31.911.000
453	Kab. Bangka Selatan	182.269.000
454	Kab. Bangka Tengah	162.390.000
455	Kab. Bangka Barat	2.597.742.000
456	Kab. Belitung Timur	212.451.000
457	Kab. Boalemo	80.313.000
458	Kab. Gorontalo	57.406.000
459	Kota Gorontalo	46.261.000
460	Kab. Pohuwato	176.203.000
461	Kab. Bone Bolango	172.442.000
462	Kab. Gorontalo Utara	180.102.000
463	Provinsi Kepulauan Riau	3.138.890.000
464	Kab. Natuna	6.093.164.000
465	Kab. Kepulauan Anambas	3.916.735.000
466	Kab. Karimun	887.784.000
467	Kota Batam	2.474.761.000
468	Kota Tanjung Pinang	703.916.000
469	Kab. Lingga	1.332.442.000
470	Kab. Bintan	3.342.201.549
471	Provinsi Papua Barat	124.848.355.176
472	Kab. Fak Fak	2.043.502.000
473	Kab. Manokwari	1.544.161.000

RINCIAN UTANG PIHAK KETIGA TDF

No.	Nama Daerah	Sisa DanaTDF (UPK-TDF)
474	Kab. Sorong	3.348.646.000
475	Kota Sorong	1.318.649.000
476	Kab. Raja Ampat	7.694.183.858
477	Kab. Sorong Selatan	354.726.000
478	Kab. Teluk Bintuni	15.900.760.000
479	Kab. Teluk Wondama	1.228.517.000
480	Kab. Kaimana	1.589.983.000
481	Kab. Maybrat	322.986.000
482	Kab. Tambrauw	341.161.000
483	Kab. Manokwari Selatan	7.056.886.847
484	Kab. Pegunungan Arfak	340.157.000
485	Provinsi Sulawesi Barat	260.508.000
486	Kab. Majene	29.242.000
487	Kab. Mamuju	294.872.000
488	Kab. Polewali Mandar	29.505.000
489	Kab. Mamasa	48.230.000
490	Kab. Pasangkayu	106.324.000
491	Kab. Mamuju Tengah	54.419.000
492	Provinsi Kalimantan Utara	14.583.854.000
493	Kab. Bulungan	90.913.659.000
494	Kab. Malinau	149.078.303.000
495	Kab. Nunukan	223.089.327.569
496	Kota Tarakan	3.935.791.000
497	Kab. Tana Tidung	3.709.941.000
498	Provinsi Papua Selatan	62.338.183.277
499	Provinsi Papua Tengah	12.589.255.811
500	Provinsi Papua Pegunungan	17.334.398.274
501	Provinsi Papua Barat Daya	1.902.017.000
TOTAL		20.558.040.446.440

RINCIAN UTANG JANGKA PENDEK - TRANSAKSI KHUSUS BKF

No.	Organisasi Internasional	Mata Uang	Sisa utang jangka pendek lain-lain 31 Desember 2023		Transaksi TA 2024				Selisih Konfirmasi Pembayaran (Bank Charges)		Penyesuaian Saldo Utang (Jurnal Manual)		Saldo Utang jangka pendek lain-lain 31 Desember 2024 (Setelah Revaluasi)	
					Penambahan Utang		Pengurangan Utang						Valas	IDR
			Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR	Valas	IDR		
1	ISFD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	OFID	USD	-	-	380.000,00	6.116.100.000	380.000,00	6.116.100.000	-	-	-	-	-	-
3	AMRO	USD	51,30	792.021	-	-	-	-	-	-	-	-	51,30	828.854
4	OECD BEPS Project	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	GFTEI	EUR	0,31	5.297	-	-	-	-	-	-	-	-	0,31	5.215
6	AMTF	USD	55,00	849.145	15.000,00	241.425.000	15.000,00	241.425.000	10,00	160.950	-	-	65,00	1.050.205
7	USAID Trust Fund	IDR	-	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000	10.000.000.000,00	10.000.000.000	-	-	-	-	-	-
8	GGGI	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Fasilitas KSS	USD	19,50	301.061	-	-	-	-	-	-	-	-	19,50	315.062
10	GCF	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	APTERR	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	AAHTF	USD	17,50	270.183	-	-	-	-	-	-	-	-	17,50	282.748
13	APTCF	USD	295,00	4.554.505	-	-	-	-	-	-	-	-	295,00	4.766.315
14	GIH	USD	20,00	308.780	-	-	-	-	-	-	-	-	20,00	323.140
15	ASEAN ICT Fund	USD	60,00	926.340	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00	969.420
16	TCF IAEA	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	ATHPC Fund	USD	10,00	154.390	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	161.570
18	ADF	USD	-	-	3.943.600,00	62.561.270.400	3.943.600,00	62.821.548.000	-	-	-	-	-	-
19	SOMTC Polri	USD	10,00	154.390	-	-	-	-	-	-	-	-	10,00	161.570
20	Pandemic Fund FIF	USD	155.000,00	2.393.045.000	10.155.000,00	159.149.160.000	10.155.000,00	159.555.360.000	-	-	-	-	-	-
Jumlah				2.401.361.110		238.067.955.400		238.734.433.000		160.950		-		8.864.098

Kurs Jisdor 31 Desember 2023	
EUR	17.086,34
USD	15.439,00

Kurs Jisdor 31 Desember 2024	
EUR	16.822,67
USD	16.157,00

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
1	Provinsi Aceh	49.816.093.000	972.659.191	50.788.752.191
2	Kab. Aceh Barat	39.185.253.000	366.749.158	39.552.002.158
3	Kab. Aceh Barat Daya	4.186.740.000	292250000	4.478.990.000
4	Kab. Aceh Besar	3.682.996.000	0	3.682.996.000
5	Kab. Aceh Jaya	4.516.126.000	0	4.516.126.000
6	Kab. Aceh Selatan	2.218.099.000	0	2.218.099.000
7	Kab. Aceh Singkil	3.037.243.000	0	3.037.243.000
8	Kab. Aceh Tamiang	20.720.883.000	0	20.720.883.000
9	Kab. Aceh Tengah	5.501.191.000	0	5.501.191.000
10	Kab. Aceh Tenggara	2.396.216.000	0	2.396.216.000
11	Kab. Aceh Timur	10.140.137.000	0	10.140.137.000
12	Kab. Aceh Utara	14.916.077.000	0	14.916.077.000
13	Kab. Bener Meriah	3.417.065.000	0	3.417.065.000
14	Kab. Bireuen	2.005.898.000	0	2.005.898.000
15	Kab. Gayo Lues	5.398.044.000	0	5.398.044.000
16	Kab. Nagan Raya	27.258.179.000	0	27.258.179.000
17	Kab. Pidie	2.902.044.000	0	2.902.044.000
18	Kab. Pidie Jaya	1.599.138.000	11.999.001	1.611.137.001
19	Kab. Simeulue	1.876.222.000	0	1.876.222.000
20	Kota Banda Aceh	2.556.629.000	203000000	2.759.629.000
21	Kota Langsa	4.196.867.000	0	4.196.867.000
22	Kota Lhokseumawe	2.385.007.000	157889000	2.542.896.000
23	Kota Sabang	2.006.134.000	0	2.006.134.000
24	Kota Subulussalam	1.809.142.000	0	1.809.142.000
25	Provinsi Sumatera Utara	41.898.195.000	0	41.898.195.000
26	Kab. Asahan	12.081.604.000	456695000	12.538.299.000
27	Kab. Batu Bara	9.770.298.000	666.500.000	10.436.798.000
28	Kab. Dairi	2.585.441.000	0	2.585.441.000
29	Kab. Deli Serdang	12.477.559.000	0	12.477.559.000
30	Kab. Humbang Hasundutan	5.878.068.000	544.372.050	6.422.440.050
31	Kab. Karo	1.366.344.000	0	1.366.344.000
32	Kab. Labuhanbatu	7.660.978.000	0	7.660.978.000
33	Kab. Labuhanbatu Selatan	13.640.630.000	0	13.640.630.000
34	Kab. Labuhanbatu Utara	5.738.612.000	0	5.738.612.000
35	Kab. Langkat	19.193.503.000	0	19.193.503.000
36	Kab. Mandailing Natal	18.982.019.000	0	18.982.019.000
37	Kab. Nias	6.320.561.000	0	6.320.561.000
38	Kab. Nias Barat	5.709.053.000	1.480.386.640	7.189.439.640
39	Kab. Nias Selatan	6.624.459.000	0	6.624.459.000
40	Kab. Nias Utara	5.068.470.000	0	5.068.470.000
41	Kab. Padang Lawas	7.244.502.000	231575000	7.476.077.000
42	Kab. Padang Lawas Utara	7.230.721.000	51095450	7.281.816.450
43	Kab. Pakpak Bharat	1.643.039.000	165.902.000	1.808.941.000
44	Kab. Samosir	5.919.383.000	307.423.169	6.226.806.169
45	Kab. Serdang Bedagai	9.876.274.000	0	9.876.274.000
46	Kab. Simalungun	12.760.551.000	0	12.760.551.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
47	Kab. Tapanuli Selatan	18.607.446.000	0	18.607.446.000
48	Kab. Tapanuli Tengah	8.562.233.000	0	8.562.233.000
49	Kab. Tapanuli Utara	11.918.656.000	0	11.918.656.000
50	Kab. Toba Samosir	5.258.800.000	0	5.258.800.000
51	Kota Binjai	6.169.727.000	543.612.500	6.713.339.500
52	Kota Gunungsitoli	6.066.572.000	152.674.000	6.219.246.000
53	Kota Medan	10.969.028.000	81.880.000	11.050.908.000
54	Kota Padang Sidempuan	6.277.288.000	4.879.132	6.282.167.132
55	Kota Pematang Siantar	1.626.697.000	0	1.626.697.000
56	Kota Sibolga	4.984.481.000	1.232.423.177	6.216.904.177
57	Kota Tanjung Balai	4.762.721.000	0	4.762.721.000
58	Kota Tebing Tinggi	4.329.859.000	0	4.329.859.000
59	Provinsi Sumatera Barat	6.441.442.000	15108400	6.456.550.400
60	Kab. Agam	1.821.245.000	0	1.821.245.000
61	Kab. Dharmasraya	15.091.731.000	0	15.091.731.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	834.992.000	0	834.992.000
63	Kab. Lima Puluh Kota	2.624.942.000	645.000.000	3.269.942.000
64	Kab. Padang Pariaman	1.167.232.000	716936011	1.884.168.011
65	Kab. Pasaman	1.165.244.000	0	1.165.244.000
66	Kab. Pasaman Barat	3.624.757.000	476.574.378	4.101.331.378
67	Kab. Pesisir Selatan	2.112.615.000	271000000	2.383.615.000
68	Kab. Sijunjung	2.360.334.000	0	2.360.334.000
69	Kab. Solok	913.706.000	182.000.000	1.095.706.000
70	Kab. Solok Selatan	5.622.202.000	0	5.622.202.000
71	Kab. Tanah Datar	576.311.000	1235794980	1.812.105.980
72	Kota Bukit Tinggi	390.170.000	0	390.170.000
73	Kota Padang	1.537.460.000	149001	1.537.609.001
74	Kota Padang Panjang	812.531.000	24.749.731	837.280.731
75	Kota Pariaman	426.225.000	0	426.225.000
76	Kota Payakumbuh	731.136.000	0	731.136.000
77	Kota Sawahlunto	4.963.363.000	623399050	5.586.762.050
78	Kota Solok	516.394.000	290250000	806.644.000
79	Provinsi Riau	284.654.391.000	8.293.332.600	292.947.723.600
80	Kab. Bengkalis	554.695.095.000	0	554.695.095.000
81	Kab. Indragiri Hilir	73.729.357.000	0	73.729.357.000
82	Kab. Indragiri Hulu	64.887.096.000	0	64.887.096.000
83	Kab. Kampar	119.962.460.000	955.000.000	120.917.460.000
84	Kab. Kepulauan Meranti	39.456.378.000	624488617	40.080.866.617
85	Kab. Kuantan Singingi	49.480.147.000	24.584.600	49.504.731.600
86	Kab. Pelalawan	69.117.825.000	0	69.117.825.000
87	Kab. Rokan Hilir	180.432.328.000	0	180.432.328.000
88	Kab. Rokan Hulu	64.771.444.000	231249639	65.002.693.639
89	Kab. Siak	175.812.757.000	91000000	175.903.757.000
90	Kota Dumai	82.156.485.000	0	82.156.485.000
91	Kota Pekanbaru	42.965.475.000	0	42.965.475.000
92	Provinsi Jambi	143.331.793.000	0	143.331.793.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
93	Kab. Batanghari	94.978.535.000	0	94.978.535.000
94	Kab. Bungo	72.307.319.000	0	72.307.319.000
95	Kab. Kerinci	30.204.281.000	0	30.204.281.000
96	Kab. Merangin	57.524.339.000	0	57.524.339.000
97	Kab. Muaro Jambi	107.709.753.000	0	107.709.753.000
98	Kab. Sarolangun	94.800.109.000	798101600	95.598.210.600
99	Kab. Tanjung Jabung Barat	287.193.606.000	3.557.220.330	290.750.826.330
100	Kab. Tanjung Jabung Timur	98.553.776.000	216808000	98.770.584.000
101	Kab. Tebo	44.928.286.000	121500000	45.049.786.000
102	Kota Jambi	25.936.698.000	0	25.936.698.000
103	Kota Sungai Penuh	23.714.875.000	0	23.714.875.000
104	Provinsi Sumatera Selatan	751.604.197.000	0	751.604.197.000
105	Kab. Banyuasin	136.856.986.000	0	136.856.986.000
106	Kab. Empat Lawang	89.504.669.000	0	89.504.669.000
107	Kab. Lahat	493.478.955.000	0	493.478.955.000
108	Kab. Muara Enim	635.749.107.000	1.985.500.000	637.734.607.000
109	Kab. Musi Banyuasin	558.436.605.000	0	558.436.605.000
110	Kab. Musi Rawas	181.156.706.000	0	181.156.706.000
111	Kab. Musi Rawas Utara	185.711.501.000	3143606662	188.855.107.662
112	Kab. Ogan Ilir	79.862.031.000	134249814	79.996.280.814
113	Kab. Ogan Komering Ilir	98.401.016.000	0	98.401.016.000
114	Kab. Ogan Komering Ulu	98.125.195.000	0	98.125.195.000
115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	84.675.876.000	1.490.505.402	86.166.381.402
116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	70.629.111.000	0	70.629.111.000
117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	197.463.237.000	1309750000	198.772.987.000
118	Kota Lubuk Linggau	66.420.080.000	3336855	66.423.416.855
119	Kota Pagar Alam	107.973.000.000	1899000550	109.872.000.550
120	Kota Palembang	87.440.308.000	386126580	87.826.434.580
121	Kota Prabumulih	102.266.145.000	0	102.266.145.000
122	Provinsi Bengkulu	27.571.224.000	1366012240	28.937.236.240
123	Kab. Bengkulu Selatan	51.325.627.000	0	51.325.627.000
124	Kab. Bengkulu Tengah	27.315.888.000	0	27.315.888.000
125	Kab. Bengkulu Utara	30.267.800.000	0	30.267.800.000
126	Kab. Kaur	42.113.889.000	0	42.113.889.000
127	Kab. Kepahiang	7.521.130.000	0	7.521.130.000
128	Kab. Lebong	38.502.731.000	841184050	39.343.915.050
129	Kab. Mukomuko	10.901.540.000	0	10.901.540.000
130	Kab. Rejang Lebong	10.254.991.000	0	10.254.991.000
131	Kab. Seluma	52.875.804.000	0	52.875.804.000
132	Kota Bengkulu	6.713.621.000	84787001	6.798.408.001
133	Provinsi Lampung	15.731.992.000	827.100.168	16.559.092.168
134	Kab. Lampung Barat	2.000.176.000	0	2.000.176.000
135	Kab. Lampung Selatan	6.017.088.000	0	6.017.088.000
136	Kab. Lampung Tengah	13.477.797.000	0	13.477.797.000
137	Kab. Lampung Timur	15.407.447.000	0	15.407.447.000
138	Kab. Lampung Utara	4.091.312.000	157.999.629	4.249.311.629

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
139	Kab. Mesuji	3.752.450.000	775760050	4.528.210.050
140	Kab. Pesawaran	2.488.315.000	0	2.488.315.000
141	Kab. Pesisir Barat	1.882.567.000	405.124.000	2.287.691.000
142	Kab. Pringsewu	1.923.932.000	1.178.839.462	3.102.771.462
143	Kab. Tanggamus	4.786.483.000	0	4.786.483.000
144	Kab. Tulang Bawang	3.896.560.000	0	3.896.560.000
145	Kab. Tulang Bawang Barat	2.626.314.000	256.750.000	2.883.064.000
146	Kab. Way Kanan	4.641.073.000	1.101.315.709	5.742.388.709
147	Kota Bandar Lampung	4.063.111.000	728.249.208	4.791.360.208
148	Kota Metro	2.215.073.000	0	2.215.073.000
149	Provinsi DKI Jakarta	2.370.741.523.000	1272750000	2.372.014.273.000
150	Provinsi Jawa Barat	336.797.903.000	3.515.800.000	340.313.703.000
151	Kab. Bandung	121.864.984.000	2.232.499.050	124.097.483.050
152	Kab. Bandung Barat	25.370.738.000	1.114.250.000	26.484.988.000
153	Kab. Bekasi	89.460.446.000	0	89.460.446.000
154	Kab. Bogor	123.656.292.000	5688504500	129.344.796.500
155	Kab. Ciamis	20.885.298.000	0	20.885.298.000
156	Kab. Cianjur	39.722.254.000	0	39.722.254.000
157	Kab. Cirebon	20.086.854.000	0	20.086.854.000
158	Kab. Garut	113.677.575.000	0	113.677.575.000
159	Kab. Indramayu	46.475.208.000	0	46.475.208.000
160	Kab. Karawang	80.421.154.000	2567750000	82.988.904.000
161	Kab. Kuningan	18.142.973.000	4.976.499.950	23.119.472.950
162	Kab. Majalengka	21.216.291.000	0	21.216.291.000
163	Kab. Pangandaran	19.929.236.000	0	19.929.236.000
164	Kab. Purwakarta	26.575.188.000	0	26.575.188.000
165	Kab. Subang	42.365.201.000	0	42.365.201.000
166	Kab. Sukabumi	86.999.585.000	0	86.999.585.000
167	Kab. Sumedang	31.212.412.000	2479499000	33.691.911.000
168	Kab. Tasikmalaya	27.757.072.000	228.685.000	27.985.757.000
169	Kota Bandung	29.750.414.000	3672566680	33.422.980.680
170	Kota Banjar	19.572.702.000	0	19.572.702.000
171	Kota Bekasi	36.710.165.000	43.500.000	36.753.665.000
172	Kota Bogor	26.188.255.000	223.500.000	26.411.755.000
173	Kota Cimahi	22.759.049.000	849759000	23.608.808.000
174	Kota Cirebon	18.016.538.000	2090241244	20.106.779.244
175	Kota Depok	25.247.493.000	168283100	25.415.776.100
176	Kota Sukabumi	19.450.501.000	400.750.000	19.851.251.000
177	Kota Tasikmalaya	20.418.649.000	0	20.418.649.000
178	Provinsi Jawa Tengah	53.079.604.000	6542768300	59.622.372.300
179	Kab. Banjarnegara	2.864.544.000	0	2.864.544.000
180	Kab. Banyumas	2.770.664.000	0	2.770.664.000
181	Kab. Batang	1.375.934.000	0	1.375.934.000
182	Kab. Blora	6.981.803.000	907971866	7.889.774.866
183	Kab. Boyolali	3.810.763.000	0	3.810.763.000
184	Kab. Brebes	2.281.299.000	1.470.524.718	3.751.823.718

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
185	Kab. Cilacap	5.708.573.000	0	5.708.573.000
186	Kab. Demak	4.411.982.000	0	4.411.982.000
187	Kab. Grobogan	4.100.103.000	0	4.100.103.000
188	Kab. Jepara	1.507.787.000	2.856.563.690	4.364.350.690
189	Kab. Karanganyar	3.379.942.000	0	3.379.942.000
190	Kab. Kebumen	1.305.034.000	0	1.305.034.000
191	Kab. Kendal	4.176.956.000	0	4.176.956.000
192	Kab. Klaten	3.416.807.000	442632000	3.859.439.000
193	Kab. Kudus	25.269.205.000	0	25.269.205.000
194	Kab. Magelang	3.519.220.000	0	3.519.220.000
195	Kab. Pati	2.487.493.000	798249405	3.285.742.405
196	Kab. Pekalongan	3.221.197.000	0	3.221.197.000
197	Kab. Pemalang	3.960.865.000	0	3.960.865.000
198	Kab. Purbalingga	2.095.900.000	0	2.095.900.000
199	Kab. Purworejo	1.994.866.000	0	1.994.866.000
200	Kab. Rembang	6.770.585.000	0	6.770.585.000
201	Kab. Semarang	5.176.996.000	0	5.176.996.000
202	Kab. Sragen	1.239.075.000	295960000	1.535.035.000
203	Kab. Sukoharjo	2.058.660.000	0	2.058.660.000
204	Kab. Tegal	3.067.983.000	11.087.940	3.079.070.940
205	Kab. Temanggung	4.743.898.000	2.443.457.782	7.187.355.782
206	Kab. Wonogiri	2.838.953.000	0	2.838.953.000
207	Kab. Wonosobo	2.746.140.000	0	2.746.140.000
208	Kota Magelang	1.906.329.000	1108424100	3.014.753.100
209	Kota Pekalongan	2.496.966.000	536.682.000	3.033.648.000
210	Kota Salatiga	2.090.116.000	912092241	3.002.208.241
211	Kota Semarang	21.212.239.000	210.545.000	21.422.784.000
212	Kota Surakarta	1.703.802.000	0	1.703.802.000
213	Kota Tegal	2.592.969.000	72.607.200	2.665.576.200
214	Provinsi DI Yogyakarta	3.373.089.000	893198242	4.266.287.242
215	Kab. Bantul	1.502.502.000	1.594.603.000	3.097.105.000
216	Kab. gunung kidul	1.927.068.000	116.749.615	2.043.817.615
217	Kab. Kulon Progo	2372169000	608.880.000	2.981.049.000
218	Kab. Sleman	1.381.322.000	999579286	2.380.901.286
219	Kota Yogyakarta	1180722000	0	1.180.722.000
220	Provinsi Jawa Timur	303.245.253.000	0	303.245.253.000
221	Kab. Bangkalan	12.866.758.000	498879000	13.365.637.000
222	Kab. Banyuwangi	51.541.706.000	0	51.541.706.000
223	Kab. Blitar	14.710.130.000	11178691152	25.888.821.152
224	Kab. Bojonegoro	514.863.524.000	7216541024	522.080.065.024
225	Kab. Bondowoso	19.463.319.000	0	19.463.319.000
226	Kab. Gresik	83.645.633.000	0	83.645.633.000
227	Kab. Jember	25.920.723.000	0	25.920.723.000
228	Kab. Jombang	9.175.216.000	0	9.175.216.000
229	Kab. Kediri	17.630.600.000	0	17.630.600.000
230	Kab. Lamongan	13.997.910.000	0	13.997.910.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
231	Kab. Lumajang	14.096.831.000	0	14.096.831.000
232	Kab. Madiun	11.275.030.000	0	11.275.030.000
233	Kab. Magetan	14.310.971.000	0	14.310.971.000
234	Kab. Malang	23.779.132.000	0	23.779.132.000
235	Kab. Mojokerto	15.864.424.000	1.807.404.269	17.671.828.269
236	Kab. Nganjuk	11.302.642.000	5326815900	16.629.457.900
237	Kab. Ngawi	11.644.275.000	0	11.644.275.000
238	Kab. Pacitan	14.562.210.000	877.500.000	15.439.710.000
239	Kab. Pamekasan	18.503.304.000	0	18.503.304.000
240	Kab. Pasuruan	42.746.340.000	6.354.718.028	49.101.058.028
241	Kab. Ponorogo	15.605.917.000	803750000	16.409.667.000
242	Kab. Probolinggo	19.596.610.000	0	19.596.610.000
243	Kab. Sampang	13.130.569.000	0	13.130.569.000
244	Kab. Sidoarjo	18.942.507.000	1.271.693.505	20.214.200.505
245	Kab. Situbondo	20.422.912.000	0	20.422.912.000
246	Kab. Sumenep	15.828.013.000	0	15.828.013.000
247	Kab. Trenggalek	14.104.559.000	0	14.104.559.000
248	Kab. Tuban	19.436.608.000	1.399.241.000	20.835.849.000
249	Kab. Tulungagung	16.058.145.000	521151262	16.579.296.262
250	Kota Batu	14.420.075.000	582788816	15.002.863.816
251	Kota Blitar	13.430.246.000	258750000	13.688.996.000
252	Kota Kediri	22.701.681.000	107.749.715	22.809.430.715
253	Kota Madiun	15.185.879.000	0	15.185.879.000
254	Kota Malang	17.120.514.000	0	17.120.514.000
255	Kota Mojokerto	12.283.833.000	0	12.283.833.000
256	Kota Pasuruan	12.880.018.000	86.525.000	12.966.543.000
257	Kota Probolinggo	14.021.040.000	5334741698	19.355.781.698
258	Kota Surabaya	38.760.549.000	51.249.500	38.811.798.500
259	Provinsi Kalimantan Barat	28.983.768.000	3730612990	32.714.380.990
260	Kab. Bengkayang	5.011.816.000	0	5.011.816.000
261	Kab. Kapuas Hulu	50.554.828.000	0	50.554.828.000
262	Kab. Kayong Utara	6.691.583.000	0	6.691.583.000
263	Kab. Ketapang	37.082.076.000	0	37.082.076.000
264	Kab. Kubu Raya	8.130.337.000	586.698.500	8.717.035.500
265	Kab. Landak	4.681.404.000	0	4.681.404.000
266	Kab. Melawi	27.698.989.000	437.750.000	28.136.739.000
267	Kab. Mempawah	5.080.237.000	0	5.080.237.000
268	Kab. Sambas	4.953.837.000	0	4.953.837.000
269	Kab. Sanggau	13.839.767.000	330.662.500	14.170.429.500
270	Kab. Sekadau	5.850.372.000	629.989.686	6.480.361.686
271	Kab. Sintang	42.266.236.000	0	42.266.236.000
272	Kota Pontianak	766.990.000	399856650	1.166.846.650
273	Kota Singkawang	4.015.527.000	0	4.015.527.000
274	Provinsi Kalimantan Tengah	625.019.009.000	737063500	625.756.072.500
275	Kab. Barito Selatan	303.878.337.000	0	303.878.337.000
276	Kab. Barito Timur	184.866.436.000	0	184.866.436.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
277	Kab. Barito Utara	1.092.979.682.000	0	1.092.979.682.000
278	Kab. Gunung Mas	63.984.972.000	430611370	64.415.583.370
279	Kab. Kapuas	177.023.722.000	0	177.023.722.000
280	Kab. Katingan	32.720.853.000	0	32.720.853.000
281	Kab. Kotawaringin Barat	54.635.041.000	0	54.635.041.000
282	Kab. Kotawaringin Timur	57.466.651.000	86.382.000	57.553.033.000
283	Kab. Lamandau	48.602.420.000	189.961.020	48.792.381.020
284	Kab. Murung Raya	402.917.354.000	0	402.917.354.000
285	Kab. Pulang Pisau	44.539.109.000	0	44.539.109.000
286	Kab. Seruyan	45.698.092.000	0	45.698.092.000
287	Kab. Sukamara	44.544.914.000	0	44.544.914.000
288	Kota Palangkaraya	34.930.784.000	0	34.930.784.000
289	Provinsi Kalimantan Selatan	1.399.241.985.000	120824231	1.399.362.809.231
290	Kab. Balangan	1.223.130.370.000	2713927300	1.225.844.297.300
291	Kab. Banjar	401.296.610.000	171.250.000	401.467.860.000
292	Kab. Barito Kuala	207.862.048.000	0	207.862.048.000
293	Kab. Hulu Sungai Selatan	337.522.145.000	478355600	338.000.500.600
294	Kab. Hulu Sungai Tengah	215.324.003.000	0	215.324.003.000
295	Kab. Hulu Sungai Utara	266.833.103.000	304.429.500	267.137.532.500
296	Kab. Kotabaru	691.441.885.000	0	691.441.885.000
297	Kab. Tabalong	695.763.836.000	498.064.550	696.261.900.550
298	Kab. Tanah Bumbu	832.357.023.000	164.811.200	832.521.834.200
299	Kab. Tanah Laut	540.802.594.000	128.750.000	540.931.344.000
300	Kab. Tapin	526.293.500.000	0	526.293.500.000
301	Kota Banjarbaru	195.684.506.000	103749050	195.788.255.050
302	Kota Banjarmasin	150.641.655.000	0	150.641.655.000
303	Provinsi Kalimantan Timur	2.106.676.040.000	3.071.315.831	2.109.747.355.831
304	Kab. Berau	941.071.374.000	0	941.071.374.000
305	Kab. Kutai Barat	299.592.746.000	0	299.592.746.000
306	Kab. Kutai Kartanegara	2.310.936.584.000	607031052	2.311.543.615.052
307	Kab. Kutai Timur	1.739.265.599.000	0	1.739.265.599.000
308	Kab. Mahakam Ulu	415.034.546.000	0	415.034.546.000
309	Kab. Paser	805.236.003.000	0	805.236.003.000
310	Kab. Penajam Paser Utara	365.326.236.000	82.787.449	365.409.023.449
311	Kota Balikpapan	341.390.827.000	259.118.000	341.649.945.000
312	Kota Bontang	435.256.857.000	65.750.000	435.322.607.000
313	Kota Samarinda	468.534.937.000	0	468.534.937.000
314	Provinsi Sulawesi Utara	44.248.074.000	0	44.248.074.000
315	Kab. Bolaang Mongondow	42.674.816.000	0	42.674.816.000
316	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	6.602.019.000	0	6.602.019.000
317	Kab. Bolaang Mongondow Timur	7.540.788.000	21.040.000	7.561.828.000
318	Kab. Bolaang Mongondow Utara	7.975.640.000	0	7.975.640.000
319	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	4.483.845.000	0	4.483.845.000
320	Kab. Kepulauan Talaud	4.643.679.000	0	4.643.679.000
321	Kab. Minahasa	7.753.552.000	0	7.753.552.000
322	Kab. Minahasa Selatan	7.559.342.000	0	7.559.342.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
323	Kab. Minahasa Tenggara	6.427.513.000	0	6.427.513.000
324	Kab. Minahasa Utara	36.789.439.000	0	36.789.439.000
325	Kab. Sangihe	4.481.196.000	286.060.000	4.767.256.000
326	Kota Bitung	24.963.219.000	0	24.963.219.000
327	Kota Kotamobagu	7.767.900.000	0	7.767.900.000
328	Kota Manado	7.321.413.000	0	7.321.413.000
329	Kota Tomohon	5.596.315.000	0	5.596.315.000
330	Provinsi Sulawesi Tengah	268.593.560.000	0	268.593.560.000
331	Kab. Banggai	386.295.777.000	0	386.295.777.000
332	Kab. Banggai Kepulauan	25.508.128.000	0	25.508.128.000
333	Kab. Banggai Laut	24.381.782.000	0	24.381.782.000
334	Kab. Buol	28.825.082.000	0	28.825.082.000
335	Kab. Donggala	28.031.812.000	1.184.858.300	29.216.670.300
336	Kab. Morowali	220.832.471.000	0	220.832.471.000
337	Kab. Morowali Utara	207.751.559.000	599.823.700	208.351.382.700
338	Kab. Parigi Moutong	27.820.514.000	0	27.820.514.000
339	Kab. Poso	34.862.318.000	0	34.862.318.000
340	Kab. Sigi	28.485.033.000	0	28.485.033.000
341	Kab. Tojo Una Una	91.767.440.000	0	91.767.440.000
342	Kab. Tolitoli	25.940.343.000	0	25.940.343.000
343	Kota Palu	27.066.161.000	1.500.000	27.067.661.000
344	Provinsi Sulawesi Selatan	39.468.983.000	3.639.295.800	43.108.278.800
345	Kab. Bantaeng	2.645.847.000	0	2.645.847.000
346	Kab. Barru	2.268.215.000	0	2.268.215.000
347	Kab. Bone	6.715.547.000	0	6.715.547.000
348	Kab. Bulukumba	3.096.530.000	0	3.096.530.000
349	Kab. Enrekang	1.895.806.000	0	1.895.806.000
350	Kab. Gowa	3.026.834.000	0	3.026.834.000
351	Kab. Jeneponto	2.583.588.000	23748500	2.607.336.500
352	Kab. Kepulauan Selayar	2.286.771.000	0	2.286.771.000
353	Kab. Luwu	4.430.912.000	1133969741	5.564.881.741
354	Kab. Luwu Timur	97.206.626.000	0	97.206.626.000
355	Kab. Luwu Utara	4.823.228.000	946.365.001	5.769.593.001
356	Kab. Maros	3.388.436.000	0	3.388.436.000
357	Kab. Pangkajene Kepulauan	4.300.983.000	0	4.300.983.000
358	Kab. Pinrang	1.920.401.000	413.500.000	2.333.901.000
359	Kab. Sidenreng Rappang	4.022.124.000	0	4.022.124.000
360	Kab. Sinjai	2.347.281.000	0	2.347.281.000
361	Kab. Soppeng	5.052.622.000	0	5.052.622.000
362	Kab. Takalar	2.176.296.000	1.204.534.000	3.380.830.000
363	Kab. Tana Toraja	2.803.946.000	0	2.803.946.000
364	Kab. Toraja Utara	2.614.851.000	0	2.614.851.000
365	Kab. Wajo	20.851.971.000	136.266.001	20.988.237.001
366	Kota Makassar	2.499.906.000	0	2.499.906.000
367	Kota Palopo	1.739.828.000	96.085.735	1.835.913.735
368	Kota Parepare	2.113.047.000	0	2.113.047.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
369	Provinsi Sulawesi Tenggara	172.131.367.000	813.936.703	172.945.303.703
370	Kab. Bombana	127.092.107.000	0	127.092.107.000
371	Kab. Buton	13.032.950.000	0	13.032.950.000
372	Kab. Buton Selatan	12.002.841.000	0	12.002.841.000
373	Kab. Buton Tengah	37.708.074.000	0	37.708.074.000
374	Kab. Buton Utara	12.821.438.000	0	12.821.438.000
375	Kab. Kolaka	156.976.223.000	0	156.976.223.000
376	Kab. Kolaka Timur	35.528.047.000	0	35.528.047.000
377	Kab. Kolaka Utara	69.513.789.000	0	69.513.789.000
378	Kab. Konawe	77.133.172.000	0	77.133.172.000
379	Kab. Konawe Kepulauan	30.280.824.000	156.774.194	30.437.598.194
380	Kab. Konawe Selatan	13.658.824.000	0	13.658.824.000
381	Kab. Konawe Utara	85.597.457.000	0	85.597.457.000
382	Kab. Muna	14.614.625.000	107.000.000	14.721.625.000
383	Kab. Muna Barat	11.774.490.000	0	11.774.490.000
384	Kab. Wakatobi	14.053.020.000	0	14.053.020.000
385	Kota Bau-bau	12.030.205.000	0	12.030.205.000
386	Kota Kendari	15.205.779.000	128690160	15.334.469.160
387	Provinsi Bali	52.839.491.000	1736712375	54.576.203.375
388	Kab. Badung	37.979.630.000	869371000	38.849.001.000
389	Kab. Bangli	4783875000	71500000	4.855.375.000
390	Kab. Buleleng	5101376000	0	5.101.376.000
391	Kab. Gianyar	8.776.205.000	5000000	8.781.205.000
392	Kab. Jembrana	4.783.848.000	3.045.474.817	7.829.322.817
393	Kab. Karangasem	4802801000	498.183.400	5.300.984.400
394	Kab. Klungkung	5130596000	274.500.000	5.405.096.000
395	Kab. Tabanan	5368546000	2938371448	8.306.917.448
396	Kota Denpasar	14.567.324.000	318.999.550	14.886.323.550
397	Provinsi Nusa Tenggara Barat	77.594.434.000	5.282.783.376	82.877.217.376
398	Kab. Bima	12.784.905.000	0	12.784.905.000
399	Kab. Dompu	12.540.878.000	0	12.540.878.000
400	Kab. Lombok Barat	13.368.395.000	1.017.750.000	14.386.145.000
401	Kab. Lombok Tengah	17.399.228.000	737.250.000	18.136.478.000
402	Kab. Lombok Timur	17.615.330.000	0	17.615.330.000
403	Kab. Lombok Utara	13.263.608.000	1548891068	14.812.499.068
404	Kab. Sumbawa	32.144.989.000	0	32.144.989.000
405	Kab. Sumbawa Barat	199.021.470.000	0	199.021.470.000
406	Kota Bima	12276356000	1205225000	13.481.581.000
407	Kota Mataram	17.673.217.000	386.707.000	18.059.924.000
408	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2.889.286.000	0	2.889.286.000
409	Kab. Alor	630.977.000	1019749377	1.650.726.377
410	Kab. Belu	285.666.000	0	285.666.000
411	Kab. Ende	727.759.000	0	727.759.000
412	Kab. Flores Timur	268.799.000	0	268.799.000
413	Kab. Kupang	997.760.000	0	997.760.000
414	Kab. Lembata	730.111.000	0	730.111.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
415	Kab. Malaka	344.792.000	0	344.792.000
416	Kab. Manggarai	474.554.000	394.213.000	868.767.000
417	Kab. Manggarai Barat	1.348.740.000	0	1.348.740.000
418	Kab. Manggarai Timur	609.889.000	0	609.889.000
419	Kab. Nagekeo	497.268.000	0	497.268.000
420	Kab. Ngada	1.018.264.000	0	1.018.264.000
421	Kab. Rote Ndao	265.220.000	0	265.220.000
422	Kab. Sabu Raijua	509.723.000	1.080.435.736	1.590.158.736
423	Kab. Sikka	519.186.000	706.344.698	1.225.530.698
424	Kab. Sumba Barat	473.261.000	0	473.261.000
425	Kab. Sumba Barat Daya	438.654.000	828.856.500	1.267.510.500
426	Kab. Sumba Tengah	161.750.000	427.700.000	589.450.000
427	Kab. Sumba Timur	554.656.000	0	554.656.000
428	Kab. Timor Tengah Selatan	990.407.000	0	990.407.000
429	Kab. Timor Tengah Utara	294.134.000	93.894.300	388.028.300
430	Kota Kupang	1.232.660.000	370.940.682	1.603.600.682
431	Provinsi Maluku	2.981.134.000	567118000	3.548.252.000
432	Kab. Buru	4.184.432.000	0	4.184.432.000
433	Kab. Buru Selatan	418.632.000	0	418.632.000
434	Kab. Kepulauan Aru	807.097.000	0	807.097.000
435	Kab. Maluku Barat Daya	2.390.516.000	0	2.390.516.000
436	Kab. Maluku Tengah	2.000.628.000	0	2.000.628.000
437	Kab. Maluku Tenggara	663905000	0	663.905.000
438	Kab. Kepulauan Tanimbar	373.327.000	0	373.327.000
439	Kab. Seram Bagian Barat	2.406.232.000	0	2.406.232.000
440	Kab. Seram Bagian Timur	1.611.209.000	154374640	1.765.583.640
441	Kota Ambon	1365838000	0	1.365.838.000
442	Kota Tual	1.354.254.000	0	1.354.254.000
443	Provinsi Papua	16.285.528.000	0	16.285.528.000
444	Kab. Asmat	11.354.276.000	0	11.354.276.000
445	Kab. Biak Numfor	8.752.334.000	21.892.000	8.774.226.000
446	Kab. Boven Digoel	9.985.363.000	0	9.985.363.000
447	Kab. Deiyai	11.395.885.000	0	11.395.885.000
448	Kab. Dogiyai	12.608.216.000	0	12.608.216.000
449	Kab. Intan Jaya	10.806.827.000	0	10.806.827.000
450	Kab. Jayapura	11.182.026.000	0	11.182.026.000
451	Kab. Jayawijaya	8.869.141.000	0	8.869.141.000
452	Kab. Keerom	5.726.785.000	0	5.726.785.000
453	Kab. Kepulauan Yapen	9.170.180.000	0	9.170.180.000
454	Kab. Lanny Jaya	4.416.119.000	0	4.416.119.000
455	Kab. Mamberamo Raya	4.565.774.000	0	4.565.774.000
456	Kab. Mamberamo Tengah	4.468.844.000	0	4.468.844.000
457	Kab. Mappi	5.550.851.000	0	5.550.851.000
458	Kab. Merauke	15.429.315.000	0	15.429.315.000
459	Kab. Mimika	160.621.854.000	0	160.621.854.000
460	Kab. Nabire	9.913.454.000	0	9.913.454.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
461	Kab. Nduga	7.557.238.000	0	7.557.238.000
462	Kab. Paniai	12.597.919.000	0	12.597.919.000
463	Kab. Pegunungan Bintang	4.603.379.000	0	4.603.379.000
464	Kab. Puncak	10.805.197.000	0	10.805.197.000
465	Kab. Puncak Jaya	4.498.925.000	0	4.498.925.000
466	Kab. Sarmi	7.112.166.000	0	7.112.166.000
467	Kab. Supiori	7.313.399.000	0	7.313.399.000
468	Kab. Tolikara	4.492.114.000	0	4.492.114.000
469	Kab. Waropen	4.828.407.000	0	4.828.407.000
470	Kab. Yahukimo	7.264.794.000	0	7.264.794.000
471	Kab. Yalimo	4.694.972.000	0	4.694.972.000
472	Kota Jayapura	6.350.294.000	0	6.350.294.000
473	Provinsi Maluku Utara	321.361.749.000	0	321.361.749.000
474	Kab. Halmahera Barat	82.921.629.000	190.500.000	83.112.129.000
475	Kab. Halmahera Selatan	192.321.062.000	0	192.321.062.000
476	Kab. Halmahera Tengah	234.579.683.000	0	234.579.683.000
477	Kab. Halmahera Timur	488.039.228.000	0	488.039.228.000
478	Kab. Halmahera Utara	31.313.851.000	0	31.313.851.000
479	Kab. Kepulauan Sula	36.544.508.000	0	36.544.508.000
480	Kab. Pulau Morotai	31.042.397.000	80.250.799	31.122.647.799
481	Kab. Pulau Taliabu	34.759.960.000	173.749.500	34.933.709.500
482	Kota Ternate	33.159.439.000	0	33.159.439.000
483	Kota Tidore Kepulauan	110.517.768.000	0	110.517.768.000
484	Provinsi Banten	121.781.183.000	78802667	121.859.985.667
485	Kab. Lebak	27.277.302.000	4452500000	31.729.802.000
486	Kab. Pandeglang	19.821.399.000	0	19.821.399.000
487	Kab. Serang	19.784.002.000	3.235.394.175	23.019.396.175
488	Kab. Tangerang	44.821.249.000	0	44.821.249.000
489	Kota Cilegon	27.137.675.000	497550375	27.635.225.375
490	Kota Serang	16.563.926.000	994713000	17.558.639.000
491	Kota Tangerang	48.321.662.000	0	48.321.662.000
492	Kota Tangerang Selatan	48.109.723.000	0	48.109.723.000
493	Provinsi Bangka Belitung	3.380.351.000	823309120	4.203.660.120
494	Kab. Bangka	3.093.493.000	567.687.000	3.661.180.000
495	Kab. Bangka Barat	33.844.333.000	0	33.844.333.000
496	Kab. Bangka Selatan	2.374.640.000	306.017.000	2.680.657.000
497	Kab. Bangka Tengah	2.115.668.000	550.254.000	2.665.922.000
498	Kab. Belitung	2.931.429.000	121954948	3.053.383.948
499	Kab. Belitung Timur	2.767.887.000	609.999.500	3.377.886.500
500	Kota Pangkal Pinang	415.726.000	0	415.726.000
501	Provinsi Gorontalo	7.737.975.000	955899766	8.693.874.766
502	Kab. Boalemo	1.046.332.000	0	1.046.332.000
503	Kab. Bone Bolango	2.246.636.000	377.619.298	2.624.255.298
504	Kab. Gorontalo	747.894.000	25.687.500	773.581.500
505	Kab. Gorontalo Utara	2.346.416.000	0	2.346.416.000
506	Kab. Pohuwato	2.295.631.000	45000000	2.340.631.000

RINCIAN UTANG TRANSFER KE DAERAH

No.	Nama Daerah	Utang Transfer ke Daerah		Total Utang Transfer ke Daerah
		DBH	DAK Nonfisik	
507	Kota Gorontalo	602.703.000	80198124	682.901.124
508	Provinsi Kepulauan Riau	53.335.608.000	0	53.335.608.000
509	Kab. Bintan	16.317.339.000	0	16.317.339.000
510	Kab. Karimun	11.567.031.000	0	11.567.031.000
511	Kab. Kepulauan Anambas	51.029.323.000	0	51.029.323.000
512	Kab. Lingga	17.360.216.000	303.499.167	17.663.715.167
513	Kab. Natuna	79.387.012.000	161.999.907	79.549.011.907
514	Kota Batam	32.263.809.000	245.750.000	32.509.559.000
515	Kota Tanjung Pinang	9.173.892.000	245249001	9.419.141.001
516	Provinsi Papua Barat	38.073.731.000	0	38.073.731.000
517	Kab. Fak Fak	26.623.474.000	0	26.623.474.000
518	Kab. Kaimana	20.714.875.000	0	20.714.875.000
519	Kab. Manokwari	20.117.894.000	669.500.000	20.787.394.000
520	Kab. Manokwari Selatan	4.445.022.000	85.492.340	4.530.514.340
521	Kab. Maybrat	4.207.959.000	0	4.207.959.000
522	Kab. Pegunungan Arfak	4.431.684.000	601.000.000	5.032.684.000
523	Kab. Raja Ampat	44.114.051.000	0	44.114.051.000
524	Kab. Sorong	43.627.377.000	0	43.627.377.000
525	Kab. Sorong Selatan	4.621.475.000	0	4.621.475.000
526	Kab. Tambrauw	4.444.754.000	0	4.444.754.000
527	Kab. Teluk Bintuni	207.160.977.000	0	207.160.977.000
528	Kab. Teluk Wondama	16.005.565.000	0	16.005.565.000
529	Kota Sorong	17.179.828.000	216.395.400	17.396.223.400
530	Provinsi Sulawesi Barat	3.394.004.000	148.923.879	3.542.927.879
531	Kab. Majene	380.963.000	2.317.750.000	2.698.713.000
532	Kab. Mamasa	628.345.000	0	628.345.000
533	Kab. Mamuju	3.841.695.000	0	3.841.695.000
534	Kab. Mamuju Tengah	708.978.000	0	708.978.000
535	Kab. Pasangkayu	1.385.224.000	0	1.385.224.000
536	Kab. Polewali Mandar	384383000	419250000	803.633.000
537	Provinsi Kalimantan Utara	164.799.761.000	44.291.630	164.844.052.630
538	Kab. Bulungan	357.428.000.000	0	357.428.000.000
539	Kab. Malinau	532.014.664.000	0	532.014.664.000
540	Kab. Nunukan	297.890.390.000	0	297.890.390.000
541	Kab. Tana Tidung	48.334.473.000	0	48.334.473.000
542	Kota Tarakan	51.276.936.000	60080260	51.337.016.260
543	Provinsi Papua Barat Daya	24.780.182.000	268965398	25.049.147.398
544	Provinsi Papua Selatan	23.642.309.000	348981112	23.991.290.112
545	Provinsi Papua Tengah	12.174.661.000	0	12.174.661.000
546	Provinsi Papua Pegunungan	10.755.346.000	82668820	10.838.014.820
Total		43.011.107.391.000	216.631.334.030	43.227.738.725.030

UTANG SBN JANGKA PENDEK DAN BAGIAN LANCAR SBN JANGKA PANJANG RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/ Discount(-)	Book Value
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			557.305.090.000.000		(2.168.665.627.000)	555.136.424.373.000
A.SURAT UTANG NEGARA			332.471.192.000.000		(814.971.635.000)	331.656.220.365.000
Zero Coupon			26.400.000.000.000		(811.138.136.000)	25.588.861.864.000
1	SPN12250116	16/01/2025	1.100.000.000.000		(2.943.769.000)	1.097.056.231.000
2	SPN12250213	13/02/2025	3.250.000.000.000		(23.863.855.000)	3.226.136.145.000
3	SPN12250314	14/03/2025	3.400.000.000.000		(41.299.852.000)	3.358.700.148.000
4	SPN12250502	02/05/2025	2.600.000.000.000		(55.509.526.000)	2.544.490.474.000
5	SPN12250529	29/05/2025	400.000.000.000		(10.391.235.000)	389.608.765.000
6	SPN12250612	12/06/2025	1.000.000.000.000		(28.513.469.000)	971.486.531.000
7	SPN12250710	10/07/2025	1.000.000.000.000		(33.111.836.000)	966.888.164.000
8	SPN12250807	07/08/2025	3.200.000.000.000		(117.370.821.000)	3.082.629.179.000
9	SPN12251002	02/10/2025	4.000.000.000.000		(171.406.880.000)	3.828.593.120.000
10	SPN12251030	30/10/2025	3.300.000.000.000		(158.739.619.000)	3.141.260.381.000
11	SPN12251127	27/11/2025	3.150.000.000.000		(167.987.274.000)	2.982.012.726.000
Fixed Coupon			202.502.506.000.000		(3.833.499.000)	202.498.672.501.000
1	FR0040	15/09/2025	22.137.590.000.000	11,00000	63.511.683.000	22.201.101.683.000
2	FR0081	15/06/2025	142.281.400.000.000	6,50000	(67.345.182.000)	142.214.054.818.000
3	ORI021	15/02/2025	25.065.802.000.000	4,90000	-	25.065.802.000.000
4	ORI022	15/10/2025	13.017.714.000.000	5,95000	-	13.017.714.000.000
Variable Coupon			103.568.686.000.000		-	103.568.686.000.000
1	VR0033	25/04/2025	3.568.686.000.000	6,04000	-	3.568.686.000.000
2	VR0034	10/08/2025	20.525.000.000.000	6,56618	-	20.525.000.000.000
3	VR0038	28/08/2025	4.245.000.000.000	6,56618	-	4.245.000.000.000
4	VR0042	28/09/2025	21.100.000.000.000	6,70287	-	21.100.000.000.000
5	VR0046	12/10/2025	11.550.000.000.000	6,55895	-	11.550.000.000.000
6	VR0050	26/10/2025	5.717.500.000.000	6,56618	-	5.717.500.000.000
7	VR0054	16/11/2025	4.370.000.000.000	6,56618	-	4.370.000.000.000
8	VR0058	23/11/2025	6.750.000.000.000	6,56618	-	6.750.000.000.000
9	VR0062	14/12/2025	25.742.500.000.000	6,70287	-	25.742.500.000.000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			224.833.898.000.000		(1.353.693.992.000)	223.480.204.008.000
Zero Return			36.018.300.000.000		(755.519.539.000)	35.262.780.461.000
1	SPNS01042025	01/04/2025	4.834.000.000.000		(75.300.710.000)	4.758.699.290.000
2	SPNS02022025	02/02/2025	4.075.600.000.000		(23.589.060.000)	4.052.010.940.000
3	SPNS03032025	03/03/2025	3.450.000.000.000		(37.973.716.000)	3.412.026.284.000
4	SPNS04082025	04/08/2025	6.750.000.000.000		(239.750.020.000)	6.510.249.980.000
5	SPNS07072025	07/07/2025	5.850.000.000.000		(179.746.660.000)	5.670.253.340.000
6	SPNS09062025	09/06/2025	1.600.000.000.000		(43.279.591.000)	1.556.720.409.000
7	SPNS20012025	20/01/2025	3.708.700.000.000		(13.019.108.000)	3.695.680.892.000
8	SPNS29052025	29/05/2025	5.750.000.000.000		(142.860.674.000)	5.607.139.326.000
Fixed Coupon			188.815.598.000.000		(598.174.453.000)	188.217.423.547.000
1	IFR0007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000	13.807.000	1.547.013.807.000
2	PBS017	15/10/2025	63.086.476.000.000	6,12500	(207.558.836.000)	62.878.917.164.000
3	PBS036	15/08/2025	78.797.600.000.000	5,37500	(390.629.424.000)	78.406.970.576.000
4	SR-016	10/03/2025	18.409.546.000.000	4,95000	-	18.409.546.000.000
5	SR-017	10/09/2025	26.974.976.000.000	5,90000	-	26.974.976.000.000
II. SBN YANG TIDAK DIPERDAGANGKAN			59.492.440.940.462		(93.884.000)	59.492.347.056.462
A.SURAT UTANG NEGARA			31.032.632.940.462		-	31.032.632.940.462
			14.477.713.940.462		-	14.477.713.940.462
1	SRBI01	01/02/2025	429.544.188.836	0,10000	-	429.544.188.836
2	SRBI01	01/08/2025	451.021.398.278	0,10000	-	451.021.398.278
3	SU002	01/04/2025	1.221.564.197.515	0,10000	-	1.221.564.197.515

UTANG SBN JANGKA PENDEK DAN BAGIAN LANCAR SBN JANGKA PANJANG RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Unamortized Premium (+)/ Discount(-)	Book Value
4	SU004	01/06/2025	3.086.793.007.311	0,10000	-	3.086.793.007.311
5	SU004	01/12/2025	3.241.132.657.677	0,10000	-	3.241.132.657.677
6	SU007	01/02/2025	2.950.077.312.607	0,10000	-	2.950.077.312.607
7	SU007	01/08/2025	3.097.581.178.238	0,10000	-	3.097.581.178.238
Fixed Coupon			-			-
1	FRNT0001	29/08/2023	-	8,00000	-	-
Variable Coupon			16.554.919.000.000		-	16.554.919.000.000
1	SBR012T2	10/02/2025	16.554.919.000.000	6,65000	-	16.554.919.000.000
B.SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA			28.459.808.000.000		(93.884.000)	28.459.714.116.000
			-		-	-
Fixed Coupon			350.849.000.000		(93.884.000)	350.755.116.000
1	SW001	10/03/2025	50.849.000.000	5,00000	(93.884.000)	50.755.116.000
2	SW005	13/01/2025	300.000.000.000	6,25000	-	300.000.000.000
Variable Coupon			26.108.959.000.000		-	26.108.959.000.000
1	ST010T2	10/06/2025	11.593.770.000.000	6,50000	-	11.593.770.000.000
2	ST011T2	10/11/2025	14.402.626.000.000	6,30000	-	14.402.626.000.000
3	SWR004	10/09/2025	112.563.000.000	6,35000	-	112.563.000.000
			2.000.000.000.000			2.000.000.000.000
	SDHI2025A	08/07/2025	2.000.000.000.000	8,30000	-	2.000.000.000.000
Total (I + II)			616.797.530.940.462		(2.168.759.511.000)	614.628.771.429.462

BAGIAN LANCAR SBN JANGKA PANJANG VALAS

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Issued Principle Outstanding	Tingkat Bunga (%)	Accrued Indexation	Indexed Principal Outstanding	Unamortized Premium (+)/ Discount(-)	Nilai Buku
I. SBN YANG DIPERDAGANGKAN			117.161.750.238.640		15.476.185.261.360	132.637.935.500.000	(18.042.401.000)	132.619.893.099.000
A.SURAT UTANG NEGARA			77.808.400.238.640		7.974.235.261.360	85.782.635.500.000	(18.042.401.000)	85.764.593.099.000
Denominasi Euro			35.442.870.000.000		2.408.137.500.000	37.851.007.500.000	(17.413.451.000)	37.833.594.049.000
1	RIEUR0425	24-04-2025	16.969.820.000.000	1,75000	(147.150.000.000)	16.822.670.000.000	(1.482.885.000)	16.821.187.115.000
2	RIEUR0725	30-07-2025	18.473.050.000.000	3,37500	2.555.287.500.000	21.028.337.500.000	(15.930.566.000)	21.012.406.934.000
Denominasi US Dollars			25.186.343.568.640		7.127.656.431.360	32.314.000.000.000	(628.950.000)	32.313.371.050.000
1	RI0125	15-01-2025	25.186.343.568.640	4,12500	7.127.656.431.360	32.314.000.000.000	(628.950.000)	32.313.371.050.000
Denominasi Yen			17.179.186.670.000		(1.561.558.670.000)	15.617.628.000.000	-	15.617.628.000.000
1	RIJPY0525	30-05-2025	449.390.550.000	1,07000	(87.392.550.000)	361.998.000.000	-	361.998.000.000
2	RIJPY0625	09-06-2025	7.378.885.360.000	0,96000	(325.095.760.000)	7.053.789.600.000	-	7.053.789.600.000
3	RIJPY0725	08-07-2025	3.271.100.760.000	1,35000	(757.800.360.000)	2.513.300.400.000	-	2.513.300.400.000
4	RIJPY0825	13-08-2025	6.079.810.000.000	0,91000	(391.270.000.000)	5.688.540.000.000	-	5.688.540.000.000
B.SURAT BERTAGAS SYARIAH NEGARA			39.353.350.000.000		7.501.950.000.000	46.855.300.000.000	-	46.855.300.000.000
Denominasi US Dollars			39.353.350.000.000		7.501.950.000.000	46.855.300.000.000	-	46.855.300.000.000
1	USDPBS003	02-09-2025	2.232.600.000.000	3,70000	190.950.000.000	2.423.550.000.000	-	2.423.550.000.000
2	SNI0625	23-06-2025	10.698.750.000.000	2,30000	1.419.000.000.000	12.117.750.000.000	-	12.117.750.000.000
3	SNI25	28-05-2025	26.422.000.000.000	4,32500	5.892.000.000.000	32.314.000.000.000	-	32.314.000.000.000
Total			117.161.750.238.640		15.476.185.261.360	132.637.935.500.000	(18.042.401.000)	132.619.893.099.000

OUTSTANDING UTANG PDN

Creditor Name	CU Base	Jml Loan	Outstanding Base	Bagian Lancar IDR *)	Utang Jangka Panjang IDR *)	Total Posisi Utang IDR *)
BANK DKI	IDR	16	2.472.449.856.528	99.607.957.800	2.372.841.898.728	2.472.449.856.528
BANK MANDIRI	IDR	246	36.628.901.961.933	5.474.384.167.304	31.154.517.794.629	36.628.901.961.933
PT. BNI (PERSERO)	IDR	108	8.151.409.220.520	1.064.743.197.746	7.086.666.022.774	8.151.409.220.520
PT. BTN (PERSERO)	IDR	41	4.001.322.030.590	342.061.485.800	3.659.260.544.790	4.001.322.030.590
Total		411	51.254.083.069.571	6.980.796.808.650	44.273.286.260.921	51.254.083.069.571

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 16.157,-

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM BAGIAN LANCAR OBLIGASI NEGARA RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	<i>Unamortized Discount</i>	<i>Unamortized Premium</i>
1	FR0040	15-Sep-2025	(654.822.000)	64.166.505.000
2	FR0081	15-Jun-2025	(155.219.261.000)	87.874.079.000
Total			(155.874.083.000)	152.040.584.000

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM BAGIAN LANCAR OBLIGASI NEGARA VALAS

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0125	15-Jan-2025	(628.950.000)	-
2	RIEUR0425	24-Apr-2025	(1.482.885.000)	-
3	RIEUR0725	30-Jul-2025	(15.930.566.000)	-
Total			(18.042.401.000)	-

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM BAGIAN LANCAR SBSN RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0007	15-Jan-2025	(60.714.000)	74.521.000
2	PBS017	15-Oct-2025	(320.628.879.000)	113.070.043.000
3	PBS036	15-Aug-2025	(390.629.424.000)	-
4	SW001	10-Mar-2025	(93.884.000)	-
Total			(711.412.901.000)	113.144.564.000

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PENGELOLAAN ASET YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN BLBI

No.	Penyewa	Sisa Bulan	Pendapatan Diterima Dimuka
1	Dewi Sulastri	3	10.100.000
2	William Tanoto	2	6.200.000
3	Ng Deni	2	12.500.000
4	Dra. Hj. Srijati Pohan M.Psi (Perpanjangan)	2	11.666.667
5	Milyardi Salim	2	1.470.000
6	Milyardi Salim	2	1.200.000
7	Denny Sumantri	5	13.750.000
8	Faidul Wahab	6	22.200.000
9	Kuswinarti	8	18.666.667
10	Jonathan Wijaya	10	22.916.667
11	Ketua Jemaat GMAHK Di Indonesia (Jemaat Koinonia)	9	9.375.000
12	Ricky Wijaya (PT Siap Kirim)	9	22.500.000
13	Firman	9	16.200.000
14	Jonathan Wijaya	9	18.000.000
15	Syafrudin Mr	10	6.375.000
16	H. Mohammad Suman	12	8.000.000
17	Syahrul	12	21.600.000
18	Karina Santoso (Dir CV. Tirtamas Kreasitama P.)	13	43.376.667
19	Iting Sarwati	17	27.874.333
20	Wahid Asngari	79	16.458.333
21	H. Samsul, S.E.	60	56.250.000
22	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama Pariwara)	22	33.617.833
23	Karina Santoso (CV. Tirtamas Kreasitama P.)	22	16.809.833
24	Dede Ajat	20	8.850.000
25	Narsan	82	9.020.000
26	Bank Nagari Payakumbuh	23	31.289.583
27	Yorni Wahid	23	3.833.333
28	Ricky Wijaya	75	29.427.273
29	Ricky Wijaya	76	28.399.818
30	Ricky Wijaya	75	29.427.273
31	PT Indomarco Prismatama Makassar	29	351.175.500
32	Ridho Azhari	29	6.061.000
33	Ricky Wijaya	74	27.652.455
34	Ahmad Kosasih	15	18.981.818
35	Dra. Hj. Srijati Pohan, M.Psi.	26	56.227.167
36	Buyung	7	12.009.667
37	Suliono	31	73.625.000
38	LB LIA Payakumbuh	7	47.497.917
39	Abdul Basid SP	35	77.200.083
40	Soim	3	5.214.500
41	Agus Ari Wibowo	2	6.255.583
42	Syafrudin	2	439.833

RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA PENGELOLAAN ASET YANG TIMBUL DARI PEMBERIAN BLBI

No.	Penyewa	Sisa Bulan	Pendapatan Diterima Dimuka
43	Ahmad Zakkyuddin	2	6.381.833
44	PT Multi Garment Indonesia	3	5.214.500
45	Yuliana Lingga	99	6.707.250
46	Sari Setiyawati	8	2.861.667
47	Nana Dudu	18	7.456.500
48	Yayasan Indonesia Raya	8	26.646.667
49	Kusmantono, S. PD	14	4.365.667
50	PT Geotronix Pratama Indonesia	25	257.550.694
51	Robbie Irawan	2	864.208
52	Sugiyanto (Ketua RW 11)	26	5.025.258
53	Samsul Roman	3	1.253.750
54	Ni Wayan Alit	12	19.892.000
55	Ahmad Kosasih	6	11.109.500
56	Lilis Sondari Maryuti	16	1.625.333
57	PT Atra Widiya Agung	16	15.881.739
58	Yayasan Dian Didaktika	114	581.400.000
59	Dahlan	6	37.831.000
60	Milyardi Salim	54	106.240.500
61	William Tanoto	5	35.160.833
62	Kino	9	11.234.250
63	Wibowo	22	4.625.500
64	Tsjoe Eng Siong	12	17.940.000
65	Abu Bakar Siddiq	12	3.904.000
66	William Wijaya	24	30.468.000
67	Yayasan Syalom Probolinggo u.p Tjandra Imam S.	23	110.858.083
68	Syarif Chanafi	12	55.050.000
69	ST. Rohmah	24	8.462.000
70	Hariato	20	2.000.000
71	Herlina	9	750.000
Jumlah			2.618.455.537

SALDO AWAL KEWAJIBAN JANGKA PENDEK ABMA/T TAHUN 2024

No.	Nama Aset	Nilai Kewajiban	Keterangan
1.	ABMA/T Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik Veteran Palopo	Rp100.000.000,00	-
2.	ABMA/T Rumah Sakit Bersalin Sentosa di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp2.186.911.000,00	Pembayaran secara bertahap sebanyak 99 kali selama 11 tahun sejak tahun 2002 s.d. 2011
3.	ABMA/T Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp1.244.049.469,00	Pembayaran berkala selama 2 tahun dengan pembayaran setiap bulan Rp95.696.113,00. Sampai dengan Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran sebanyak 13 kali.
4.	ABMA/T Rumah Tinggal Suriansyah (d.H SMA Pagatan) di Kalimantan Selatan	Rp38.645.341,00	Pembayaran berkala selama 2 tahun dengan pembayaran setiap bulan Rp5.520.763,00. Sampai dengan Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran sebanyak 7 kali.
5.	ABMA/T Rumah Tinggal Prawirawidjajaa /Subianto (d.H SMA Pagatan) di Kalimantan Selatan	Rp25.977.645,00	Pembayaran berkala selama 2 tahun dengan pembayaran setiap bulan Rp5.195.529,00. Sampai dengan Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 kali.
6.	ABMA/T Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.H SMA Pagatan) di Kalimantan Selatan	Rp25.977.645,00	Pembayaran berkala selama 2 tahun dengan pembayaran setiap bulan Rp5.195.529,00. Sampai dengan Tahun 2023 telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 kali.
TOTAL		Rp3.621.561.100,00	

DAFTAR PEMBAYARAN/PELUNASAN KOMPENSASI ABMA/T TAHUN 2024

No.	Nama Aset	Nilai Pembayaran	Keterangan
1.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-Enam
2.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran Berkala Ke-Enam
3.	Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp191.392.226,00	Pembayaran Berkala Ke-empat belas dan Ke-lima belas
4.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-Tujuh
5.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-Tujuh
6.	Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp95.696.113,00	Pembayaran Berkala Ke-Enam belas
7.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran berkala Ke-delapan
8.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-delapan
9.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-delapan
10.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran Berkala ke-sembilan
11.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-sembilan
12.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-sembilan
13.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran berkala ke-sepuluh
14.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-sepuluh
15.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-sepuluh
16.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran berkala ke-sebelas
17.	Tempat Persemayaman Jenazah (d.h sebagian Kantor Seksi Kebudayaan Depdikbud) di Provinsi Jawa Timur	Rp400.419.000,00	-
18.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-sebelas
19.	SD.SMP/SMA/SMK Laksamana Martadinata (d.h Yayasan Laksamana Martadinata / APNI) di Provinsi Sumatera Utara	Rp4.866.496.600,00	-
20.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-sebelas
21.	Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp95.696.113,00	Pembayaran berkala ke-tujuh belas
22.	Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp95.696.113,00	Pembayaran berkala ke-delapan belas

DAFTAR PEMBAYARAN/PELUNASAN KOMPENSASI ABMA/T TAHUN 2024

No.	Nama Aset	Nilai Pembayaran	Keterangan
23.	TK Letjen Jamin Ginting Berastagi (d.h TK Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	Rp545.383.300,00 -	
24.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran Berkala ke-dua belas
25.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-dua belas
26.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-dua belas
27.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran Berkala ke-tiga belas
28.	SD Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	Rp57.247.759,00	Pembayaran Berkala Pertama
29.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-tiga belas
30.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-tiga belas
31.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Veronika Lany Thomas di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp306.467.000,00 -	
32.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Elisabeth Susan Setioko di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp281.495.000,00 -	
33.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Michael Bryan Sunur di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp281.495.000,00 -	
34.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran Berkala ke-empat belas
35.	SD Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	Rp57.247.759,00	Pembayaran Berkala ke-dua
36.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-empat belas
37.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-empat belas
38.	Rumah Tinggal (d.h Gereja Kristen Akos) di Provinsi Jawa Timur	Rp5.430.407.000,00 -	
39.	Rumah Toko a.n Lim Seng Tjong (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp296.265.000,00 -	
40.	Rumah Toko a.n Silvia (d.h Pertokoan) di Jalan Binjai, Provinsi Sumatera Utara	Rp353.792.000,00 -	
41.	Rumah Toko a.n Sjoftan Salim (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp88.798.000,00 -	
42.	Rumah Toko a.n Antoni (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp109.761.000,00 -	
43.	Rumah Toko a.n Tjin A Tjin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp209.974.000,00 -	

DAFTAR PEMBAYARAN/PELUNASAN KOMPENSASI ABMA/T TAHUN 2024

No.	Nama Aset	Nilai Pembayaran	Keterangan
44.	Rumah Toko a.n Tiong Beng (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp112.477.000,00	-
45.	Rumah Toko a.n Jansin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp247.367.000,00	-
46.	SD Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	Rp57.247.759,00	Pembayaran Berkala ke-tiga
47.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-lima belas
48.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-lima belas
49.	Rumah Tokko a.n Ana Ngatimin (d.h Pertokoan) di Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara	Rp93.643.000,00	-
50.	Sekolah Tinggi Sospol Veteran RI di Provinsi Sulawesi Selatan	Rp574.176.686,00	Pembayaran berkala ke-sembilan belas s.d dua puluh empat
51.	SD Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	Rp57.247.759,00	Pembayaran Berkala ke-empat
52.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran Berkala ke-lima belas
53.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-enam belas
54.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-enam belas
55.	Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil (d.h TK, SD, SMEA, Yayasan A. Yani) di Provinsi Jawa Timur	Rp2.336.528.500,00	-
56.	SD Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	Rp57.247.759,00	Pembayaran Berkala ke-lima
57.	Rumah Tinggal Suriansyah (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.520.763,00	Pembayaran Berkala ke-enam belas
58.	Rumah Tinggal S. Prawirawidjaja / Subianto (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-tujuh belas
59.	Rumah Tinggal SJ Asthary PK (d.h SMA Pagatan) di Provinsi Kalimantan Selatan	Rp5.195.529,00	Pembayaran berkala Ke-tujuh belas
60.	SD Letjen Jamin Ginting Berastagi (dh. SD Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	Rp57.247.759,00	Pembayaran Berkala ke-enam
Total		Rp17.531.291.768,00	

DAFTAR KOMPENSASI ATAS ABMA/T YANG DISELESAIKAN/DITERBITKAN KMK PELEPASAN

No.	Nama Aset	Nilai Aset	Keterangan
1.	SD.SMP/SMA/SMK Laksamana Martadinata (d.h Yayasan Laksamana Martadinata / APNI) di Provinsi Sumatera Utara	Rp4.866.496.600,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-332/MK.6/2024 tanggal 3 Mei 2024
2.	Tempat Persemayaman Jenazah (d.h sebagian Kantor Seksi Kebudayaan Depdikbud) di Provinsi Jawa Timur	Rp400.419.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.6/2024 tanggal 17 Mei 2024
3.	TK Letjen Jamin Ginting Berastagi (d.h TK Letjen Jamin Ginting) di Provinsi Sumatera Utara	Rp545.383.300,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-461/MK.6/2024 tanggal 9 Juni 2024
4.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Veronika Lany Thomas di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp306.467.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-599/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024
5.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Elisabeth Susan Setioko di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp281.495.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-600/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024
6.	Rumah Toko/Ruko (dahulu Rumah Tinggal) atas nama Michael Bryan Sunur di Kel. Waiwerang, Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp281.495.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-601/MK.6/2024 tanggal 12 Agustus 2024
7.	Rumah Tinggal (d.h Gereja Kristen Akos) di Provinsi Jawa Timur	Rp5.430.407.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-619/MK.6/2024 tanggal 23 Agustus 2024
8.	Rumah Toko a.n Lim Seng Tjong (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp296.265.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-614/MK.6/2024 tanggal 21 Agustus 2024
9.	Rumah Toko a.n Silvia (d.h Pertokoan) di Jalan Binjai, Sumatera Utara	Rp353.792.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-615/MK.6/2024 tanggal 21 Agustus 2024
10.	Rumah Toko a.n Antoni (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp109.761.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-623/MK.6/2024 tanggal 28 Agustus 2024
11.	Rumah Toko a.n Jansin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp247.367.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-632/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024
12.	Sekolah Tinggi Sospol Veteran (skrg Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Veteran Palopo) RI di Sulawesi Selatan	Rp2.296.706.720,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-512/MK.6/2022 tanggal 07 Oktobr 2022
13.	Rumah Toko a.n Tjin A Tjin (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp209.974.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024
14.	Rumah Toko a.n Sjoftjan Salim (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp88.798.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024
15.	Rumah Toko a.n Tiong Beng (d.h Pertokoan) di Provinsi Sumatera Utara	Rp112.477.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-630/MK.6/2024 tanggal 3 September 2024
16.	Rumah Toko a.n Ana Ngatimin (d.h Pertokoan) di Kab.Langkat, Sumatera Utara	Rp93.643.000,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-663/MK.6/2024 tanggal 23 September 2024
17.	Rumah Sakit Islam Masyithoh Bangil (d.h TK, SD, SMEA Yayasan A. Yani) di Provinsi Jawa Timur	Rp2.336.528.500,00	Surat Menteri Keuangan Nomor S-947/MK.6/2024 tanggal 13 November 2024
Total		Rp18.257.475.120,00	

KLASIFIKASI UTANG PEMERINTAH BERDASARKAN JATUH TEMPO (UMUR UTANG)

(Dalam Rupiah)

Maturity Profile	JML PDN	Outstanding PDN	JML PLN	Outstanding PLN	Total Outstanding Pinjaman	JML SBN Rupiah	Outstanding SBN Rupiah	JML SBN Valas	Outstanding SBN Valas	Total Outstanding SBN
0-5 Tahun	364	42.149.441.679.034	566	208.972.320.234.075	251.121.761.913.109	151	2.922.702.767.353.350	46	591.812.524.991.000	3.514.515.292.344.350
6-10 Tahun	47	9.104.641.390.537	228	451.482.373.515.540	460.587.014.906.077	31	1.627.211.937.000.000	31	330.459.032.843.000	1.957.670.969.843.000
11-15 Tahun			129	282.557.140.698.072	282.557.140.698.072	15	732.292.041.000.000	5	80.523.769.897.000	812.815.810.897.000
16-20 Tahun			44	24.254.145.554.077	24.254.145.554.077	11	505.288.428.479.819	6	94.971.310.000.000	600.259.738.479.819
21-25 Tahun			31	24.706.522.298.859	24.706.522.298.859	5	271.370.418.000.000	7	153.491.500.000.000	424.861.918.000.000
26-30 Tahun			15	15.307.969.519.971	15.307.969.519.971	2	118.815.385.000.000	12	163.185.700.000.000	282.001.085.000.000
Lebih Dari 30 Tahun			11	28.633.583.709.290	28.633.583.709.290	1	7.750.000.000.000	3	39.584.650.000.000	47.334.650.000.000
Total	411	51.254.083.069.571	923	943.011.834.447.687	1.087.168.138.599.450	197	5.282.206.745.353.350	82	1.002.795.327.731.000	7.639.459.464.564.170

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM OBLIGASI NEGARA RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	<i>Unamortized Discount</i>	<i>Unamortized Premium</i>
1	FR0037	15-Sep-2026	(13.263.485.000)	-
2	FR0042	15-Jul-2027	(30.822.240.000)	14.528.231.000
3	FR0045	15-May-2037	(26.453.359.000)	441.699.018.000
4	FR0047	15-Feb-2028	(290.655.310.000)	11.103.253.000
5	FR0050	15-Jul-2038	(325.683.724.000)	98.717.349.000
6	FR0052	15-Aug-2030	(143.972.949.000)	54.131.962.000
7	FR0054	15-Jul-2031	(199.943.301.000)	205.660.930.000
8	FR0056	15-Sep-2026	(175.707.777.000)	465.399.363.000
9	FR0057	15-May-2041	(20.914.550.000)	855.919.879.000
10	FR0058	15-Jun-2032	(24.173.111.000)	2.192.620.570.000
11	FR0059	15-May-2027	(308.938.305.000)	342.117.129.000
12	FR0062	15-Apr-2042	(293.019.963.000)	81.779.354.000
13	FR0064	15-May-2028	(1.765.045.229.000)	99.240.424.000
14	FR0065	15-May-2033	(2.497.389.280.000)	497.405.585.000
15	FR0067	15-Feb-2044	(298.676.546.000)	795.175.300.000
16	FR0068	15-Mar-2034	(1.351.623.436.000)	1.028.536.653.000
17	FR0071	15-Mar-2029	(79.872.130.000)	1.239.764.848.000
18	FR0072	15-May-2036	(434.997.489.000)	1.830.981.959.000
19	FR0073	15-May-2031	(101.231.884.000)	1.915.532.014.000
20	FR0074	15-Aug-2032	(251.175.723.000)	439.775.002.000
21	FR0075	15-May-2038	(1.357.350.708.000)	875.568.202.000
22	FR0076	15-May-2048	(2.376.538.720.000)	355.671.108.000
23	FR0078	15-May-2029	(115.088.193.000)	1.183.708.560.000
24	FR0079	15-Apr-2039	(152.807.079.000)	1.011.222.432.000
25	FR0080	15-Jun-2035	(616.717.577.000)	1.336.122.804.000
26	FR0082	15-Sep-2030	(1.980.323.379.000)	714.810.017.000
27	FR0083	15-Apr-2040	(567.204.290.000)	3.241.701.573.000
28	FR0084	15-Feb-2026	(41.735.006.000)	-
29	FR0085	15-Apr-2031	(97.869.374.000)	-
30	FR0086	15-Apr-2026	(89.904.069.000)	188.878.874.000
31	FR0087	15-Feb-2031	(671.638.933.000)	1.053.918.910.000
32	FR0088	15-Jun-2036	(546.017.497.000)	19.081.043.000
33	FR0089	15-Aug-2051	(842.379.682.000)	427.647.213.000
34	FR0090	15-Apr-2027	(823.132.226.000)	31.769.495.000

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM OBLIGASI NEGARA RUPIAH

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
35	FR0091	15-Apr-2032	(3.278.668.160.000)	548.955.053.000
36	FR0092	15-Jun-2042	(501.559.046.000)	1.529.795.022.000
37	FR0093	15-Jul-2037	(463.763.118.000)	-
38	FR0094	15-Jan-2028	(108.735.312.000)	-
39	FR0095	15-Aug-2028	(664.891.228.000)	251.869.993.000
40	FR0096	15-Feb-2033	(566.158.624.000)	2.031.735.088.000
41	FR0097	15-Jun-2043	(118.320.540.000)	1.727.879.540.000
42	FR0098	15-Jun-2038	(139.906.450.000)	2.686.098.841.000
43	FR0099	15-Jan-2029	(5.428.189.000)	9.130.343.000
44	FR0100	15-Feb-2034	(2.203.502.600.000)	101.402.899.000
45	FR0101	15-Apr-2029	(290.270.167.000)	777.039.528.000
46	FR0102	15-Jul-2054	(528.588.288.000)	16.685.271.000
47	FR0103	15-Jul-2035	(360.454.605.000)	438.041.737.000
48	FR0104	15-Jul-2030	(96.599.756.000)	171.813.591.000
49	FR0105	15-Jul-2064	(151.926.741.000)	-
50	FRSDG001	15-Oct-2030	(11.082.275.000)	349.478.940.000
Total			(28.402.121.623.000)	33.690.114.900.000

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM OBLIGASI NEGARA VALAS

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	RI0035	12-Oct-2035	-	400.410.375.000
2	RI0037	17-Feb-2037	(83.578.910.000)	-
3	RI0038	17-Jan-2038	(183.710.060.000)	-
4	RI0126	8-Jan-2026	(11.685.794.000)	-
5	RI0127	8-Jan-2027	(13.780.843.000)	-
6	RI0128	11-Jan-2028	(21.553.216.000)	-
7	RI0128A	11-Jan-2028	(103.864.060.000)	-
8	RI0133	11-Jan-2033	(303.367.093.000)	-
9	RI0142	17-Jan-2042	(168.693.103.000)	122.137.275.000
10	RI0144	15-Jan-2044	(194.073.301.000)	-
11	RI0145	15-Jan-2045	(190.983.476.000)	-
12	RI0146	8-Jan-2046	(85.088.383.000)	-
13	RI0147	8-Jan-2047	(111.638.238.000)	-
14	RI0148	11-Jan-2048	(151.291.975.000)	-
15	RI0153	11-Jan-2053	(155.332.720.000)	-
16	RI0229	11-Feb-2029	(18.577.141.000)	-
17	RI0230	14-Feb-2030	(21.885.227.000)	-
18	RI0234	10-Feb-2034	(108.432.573.000)	-
19	RI0249	11-Feb-2049	(53.711.192.000)	-
20	RI0250	14-Feb-2050	(84.187.346.000)	-
21	RI0254	10-Feb-2054	(205.273.871.000)	-
22	RI0329	10-Mar-2029	(72.259.904.000)	-
23	RI0331	12-Mar-2031	(50.094.385.000)	-
24	RI0332	31-Mar-2032	(43.357.273.000)	-
25	RI0351	12-Mar-2051	(244.512.504.000)	-
26	RI0352	31-Mar-2052	(81.415.477.000)	-
27	RI0371	12-Mar-2071	(79.228.344.000)	-
28	RI0428	24-Apr-2028	(11.234.153.000)	-
29	RI0443	15-Apr-2043	(176.500.789.000)	-
30	RI0470	15-Apr-2070	(140.987.406.000)	-
31	RI0727	18-Jul-2027	(13.919.874.000)	-
32	RI0731	28-Jul-2031	(40.719.480.000)	-
33	RI0747	18-Jul-2047	(79.141.493.000)	-
34	RI0927	20-Sep-2027	(67.879.027.000)	-
35	RI0929	18-Sep-2029	(21.605.360.000)	-
36	RI0932	20-Sep-2032	(191.038.673.000)	-
37	RI0934	10-Sep-2034	(67.667.310.000)	-
38	RI0952	20-Sep-2052	(100.556.736.000)	-

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM OBLIGASI NEGARA VALAS

No.	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
39	RI0954	10-Sep-2054	(75.026.422.000)	-
40	RI0961	23-Sep-2061	(150.951.197.000)	-
41	RI1030	15-Oct-2030	(61.002.085.000)	-
42	RI1049	30-Oct-2049	(103.875.290.000)	-
43	RI1050	15-Oct-2050	(186.258.336.000)	-
44	RIEUR0227	14-Feb-2027	(16.485.922.000)	-
45	RIEUR0333	12-Mar-2033	(97.228.551.000)	-
46	RIEUR0334	23-Mar-2034	(35.853.542.000)	-
47	RIEUR0628	14-Jun-2028	(95.235.418.000)	-
48	RIEUR0729	28-Jul-2029	(25.307.359.000)	-
49	RIEUR0926	18-Sep-2026	(7.305.292.000)	-
50	RIEUR0932	10-Sep-2032	(61.234.361.000)	-
51	RIEUR1031	30-Oct-2031	(11.717.777.000)	-
52	USD00003	15-Jan-2032	(191.215.155.000)	-
Total			(4.871.523.417.000)	522.547.650.000

UNAMORTIZED DISCOUNT / PREMIUM SBSN RUPIAH

No	Seri	Tanggal Jatuh Tempo	Unamortized Discount	Unamortized Premium
1	IFR0006	15-Mar-30	(2.512.645.000)	6.790.645.000,00
2	IFR0010	15-Feb-36	(10.349.150.000)	173.779.973.000,00
3	PBS003	15-Jan-27	(732.292.748.000)	47.011.715.000,00
4	PBS004	15-Feb-37	(3.214.583.708.000)	0,00
5	PBS005	15-Apr-43	(3.654.353.144.000)	0
6	PBS007	15-Sep-40	(10.410.359.000)	372.305.449.000,00
7	PBS012	15-Nov-31	(33.937.254.000)	1.585.565.174.000,00
8	PBS015	15-Jul-47	(729.284.373.000)	333.434.149.000,00
9	PBS018	15-May-28	(23.747.549.000)	173.038.892.000,00
10	PBS020	15-Oct-27	(7.515.334.000)	1.422.758.000,00
11	PBS021	15-Nov-26	(1.035.192.000)	105.701.783.000,00
12	PBS022	15-Apr-34	(15.051.890.000)	412.456.983.000,00
13	PBS023	15-May-30	(2.626.705.000)	68.468.752.000,00
14	PBS024	15-May-32	(11.605.840.000)	5.588.242.000,00
15	PBS025	15-May-33	(16.318.985.000)	1.370.823.246.000,00
16	PBS028	15-Oct-46	(95.919.140.000)	3.208.715.481.000,00
17	PBS029	15-Mar-34	(2.024.398.240.000)	21.698.693.000,00
18	PBS030	15-Jul-28	(723.899.634.000)	17.225.959.000,00
19	PBS032	15-Jul-26	(1.469.652.588.000)	3.138.736.000,00
20	PBS033	15-Jun-47	(1.453.979.478.000)	75.069.665.000,00
21	PBS034	15-Jun-39	(514.583.128.000)	16.413.725.000,00
22	PBS035	15-Mar-42	(53.698.843.000)	4.770.424.000,00
23	PBS037	15-Mar-36	(297.054.206.000)	332.805.970.000,00
24	PBS038	15-Dec-49	(900.743.432.000)	1.948.156.000,00
25	PBS039	15-Jul-41	(298.778.127.000)	0,00
26	PBSG001	15-Sep-29	(61.298.056.000)	169.531.843.000,00
27	SW002	30-Jun-27	(1.070.949.000)	0,00
28	SW006	03-Jul-28	(599.155.000)	0,00
Total			(16.361.299.852.000)	8.507.706.413.000

DAFTAR SERI SBN YANG DITERBITKAN SEBAGAI PEMBIAYAAN SBN DITANGGUHKAN

No.	Seri	Tanggal	Amt	AccInt	AmtNet	Disc - Prem	TotCash	Saldo Akhir Neraca	Selisih Kurs	Metode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (7)	(7)	(8) = (5) + (6)	(9)	(10)	(11)
1	SNI0530	25/11/2024	17.502.100.000.000	-	17.502.100.000.000	-	17.502.100.000.000	17.772.700.000.000	(270.600.000.000)	Bookbuilding
2	SNI1134	25/11/2024	14.319.900.000.000	-	14.319.900.000.000	-	14.319.900.000.000	14.541.300.000.000	(221.400.000.000)	Bookbuilding
3	SNI1154	25/11/2024	11.933.250.000.000	-	11.933.250.000.000	-	11.933.250.000.000	12.117.750.000.000	(184.500.000.000)	Bookbuilding
4	PBS030	05/12/2024	1.100.000.000.000	25.111.900.000	1.067.867.529.500	(32.132.470.500)	1.092.979.429.500	1.092.979.429.500	-	Lelang/Auction
5	PBS032	05/12/2024	450.000.000.000	8.524.800.000	436.634.215.000	(13.365.785.000)	445.159.015.000	445.159.015.000	-	Lelang/Auction
6	PBS034	05/12/2024	100.000.000.000	3.072.400.000	96.098.500.000	(3.901.500.000)	99.170.900.000	99.170.900.000	-	Lelang/Auction
7	PBS038	05/12/2024	1.300.000.000.000	42.246.100.000	1.265.956.416.800	(34.043.583.200)	1.308.202.516.800	1.308.202.516.800	-	Lelang/Auction
8	SPNS01092025	05/12/2024	3.050.000.000.000	-	2.914.189.600.000	(135.810.400.000)	2.914.189.600.000	2.914.189.600.000	-	Lelang/Auction
9	SPNS09062025	05/12/2024	2.000.000.000.000	-	1.937.788.000.000	(62.212.000.000)	1.937.788.000.000	1.937.788.000.000	-	Lelang/Auction
10	FR0097	12/12/2024	1.150.000.000.000	40.297.150.000	1.152.933.686.000	2.933.686.000	1.193.230.836.000	1.193.230.836.000	-	Lelang/Auction
11	FR0098	12/12/2024	2.600.000.000.000	91.106.600.000	2.608.071.255.000	8.071.255.000	2.699.177.855.000	2.699.177.855.000	-	Lelang/Auction
12	FR0102	12/12/2024	300.000.000.000	8.406.900.000	291.385.539.400	(8.614.460.600)	299.792.439.400	299.792.439.400	-	Lelang/Auction
13	FR0103	12/12/2024	11.150.000.000.000	306.781.100.000	10.924.094.876.300	(225.905.123.700)	11.230.875.976.300	11.230.875.976.300	-	Lelang/Auction
14	FR0104	12/12/2024	6.700.000.000.000	177.516.500.000	6.586.050.741.800	(113.949.258.200)	6.763.567.241.800	6.763.567.241.800	-	Lelang/Auction
15	FR0105	12/12/2024	100.000.000.000	2.802.300.000	96.733.745.000	(3.266.255.000)	99.536.045.000	99.536.045.000	-	Lelang/Auction
16	PBS003	19/12/2024	100.000.000.000	2.559.800.000	98.301.252.500	(1.698.747.500)	100.861.052.500	100.861.052.500	-	Lelang/Auction
17	PBS030	19/12/2024	300.000.000.000	7.519.500.000	290.396.646.000	(9.603.354.000)	297.916.146.000	297.916.146.000	-	Lelang/Auction
18	PBS038	19/12/2024	3.550.000.000.000	2.680.250.000	3.433.059.321.000	(116.940.679.000)	3.435.739.571.000	3.435.739.571.000	-	Lelang/Auction
19	SPNS01092025	19/12/2024	3.150.000.000.000	-	3.015.082.350.000	(134.917.650.000)	3.015.082.350.000	3.015.082.350.000	-	Lelang/Auction
20	FR0065	24/12/2024	5.000.000.000.000	35.685.000.000	4.872.770.000.000	(127.230.000.000)	4.908.455.000.000	4.908.455.000.000	-	Private Placement
TOTAL			85.855.250.000.000	754.310.300.000	84.842.663.674.300	(1.012.586.325.700)	85.596.973.974.300	86.273.473.974.300	(676.500.000.000)	

OUTSTANDING UTANG PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR

Creditor Name	CU Base	Jml Loan	Outstanding Base	Bagian Lancar IDR ^{*)}	Utang Jangka Panjang IDR ^{*)}	Total Posisi Utang IDR ^{*)}
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7] = [5] + [6]
ADB	EUR	12	2.695.070.531	8.306.712.139.624	37.031.570.022.880	45.338.282.162.504
	IDR	2	11.741.858.333.744	1.159.975.003.555	10.581.883.330.190	11.741.858.333.744
	JPY	15	606.566.958.344	5.004.501.815.888	57.731.505.551.715	62.736.007.367.603
	USD	12	1.729.390.449	1.214.696.572.011	26.727.064.920.076	27.941.761.492.087
AFD	EUR	13	1.243.874.725	2.172.721.775.724	18.752.572.250.685	20.925.294.026.408
	USD	2	15.000.000	242.355.000.000	-	242.355.000.000
AIIB	EUR	2	939.800.000	-	15.809.945.266.000	15.809.945.266.000
	USD	3	1.381.650.000	1.274.787.300.000	21.048.531.750.000	22.323.319.050.000
AUSTRALIA	AUD	1	1.100.000.000	1.370.848.636.327	9.687.330.363.673	11.058.179.000.000
EXIM BANK KOREA	USD	2	160.000.000	-	2.585.120.000.000	2.585.120.000.000
IBRD	EUR	6	2.593.028.643	769.928.452.003	42.851.736.708.556	43.621.665.160.559
	JPY	3	157.021.648.000	1.458.153.527.950	14.782.281.481.394	16.240.435.009.344
	USD	43	12.183.256.605	13.748.500.191.746	183.096.376.769.746	196.844.876.961.492
IDA	SDR	1	2.338.108	-	49.265.876.232	49.265.876.232
JICA	JPY	28	294.351.531.000	3.284.327.904.156	27.159.862.244.112	30.444.190.148.268
KfW	EUR	14	3.001.514.993	5.810.848.574.109	44.682.647.654.024	50.493.496.228.132
	USD	5	246.770.177	1.682.236.426.709	2.304.829.315.324	3.987.065.742.034
Total		164	12.827.090.165.319	47.500.593.319.801	514.882.523.504.606	562.383.116.824.407

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 16.157,-

OUTSTANDING UTANG PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR

<i>Creditor Name</i>	<i>CU Base</i>	<i>Jml Loan</i>	<i>Outstanding Base</i>	<i>Bagian Lancar IDR ^{*)}</i>	<i>Utang Jangka Panjang IDR ^{*)}</i>	<i>Total Posisi Utang IDR ^{*)}</i>
ABN AMRO ROTTERDAM	EUR	1	-	-	-	-
ADB	EUR	1	199.648	-	3.358.607.037	3.358.607.037
	IDR	3	1.211.036.273.171	174.899.792.678	1.036.136.480.493	1.211.036.273.171
	JPY	9	33.774.376.785	160.168.314.925	3.333.047.927.194	3.493.216.242.119
	SDR	16	50.703.466	417.319.724.775	651.044.387.279	1.068.364.112.054
	USD	32	1.914.827.417	3.437.401.903.685	27.500.464.677.469	30.937.866.581.155
AFD	EUR	4	24.287.510	61.086.954.713	347.493.809.625	408.580.764.338
	USD	5	34.110.411	135.798.907.004	415.323.010.745	551.121.917.749
AIIB	USD	4	565.992.507	673.771.059.174	8.470.969.884.018	9.144.740.943.193
AUSTRALIA	AUD	2	410.450.936	98.021.839.479	4.028.196.273.039	4.126.218.112.518
B A W A G	EUR	2	2.063.126	27.395.127.451	7.312.152.997	34.707.280.448
BANCO SANTANDER	USD	1	18.956.887	-	306.286.423.582	306.286.423.582
BANK MANDIRI SIN	USD	18	875.110.717	1.518.970.950.068	12.620.192.897.231	14.139.163.847.298
BBVA	EUR	2	18.397.755	3.086.467.041	306.412.901.635	309.499.368.676
BBVAIT	EUR	3	-	-	-	-
BELGIUM	EUR	2	810.810	1.515.553.331	12.124.428.162	13.639.981.492
BLG	EUR	1	7.530.000	42.224.901.700	84.449.803.400	126.674.705.100
BNI LONDON	EUR	1	5.104.143	-	85.865.312.481	85.865.312.481
	USD	7	374.165.413	308.078.545.581	5.737.312.029.028	6.045.390.574.610
BNI New York	USD	7	388.137.043	1.399.362.284.266	4.871.767.925.302	6.271.130.209.568
BNI SEOUL	USD	2	9.562.394	102.999.732.700	51.499.866.512	154.499.599.212
BNP PARIBAS, PARIS	CHF	1	13.193.113	235.941.284.172	-	235.941.284.172
	EUR	9	2.777.093.805	-	46.718.132.646.952	46.718.132.646.952
BNPP SINGAPORE	USD	3	68.774.734	377.320.778.133	733.872.593.450	1.111.193.371.583
BPIFAE	EUR	29	277.808.836	538.323.775.565	4.135.162.600.089	4.673.486.375.654
BRI-CAYMAN ISLAND	EUR	1	84.102.863	-	1.414.834.714.510	1.414.834.714.510
	USD	8	284.310.516	69.719.474.625	4.523.885.534.487	4.593.605.009.112
CA CIB LONDON BRANCH	USD	1	-	-	-	-
CASA OF FRANCE	EUR	1	237.160.000	-	3.989.664.417.200	3.989.664.417.200
	USD	2	104.537.487	480.338.662.900	1.208.673.516.660	1.689.012.179.559
Ceska Sporitelna	EUR	1	107.695.621	405.610.720.435	1.406.117.163.850	1.811.727.884.285
CIDA	CAD	15	29.194.629	51.598.674.525	276.710.105.064	328.308.779.589
CITIBANK LONDON	EUR	3	-	-	-	-
COMMERZBANK GERMANY	EUR	3	205.922.604	289.195.867.708	3.174.972.152.159	3.464.168.019.866
CREDIT AGRICOLE CIB	EUR	6	338.250.977	1.569.943.833.950	4.120.340.728.962	5.690.284.562.912
	USD	1	42.500.000	457.781.666.774	228.890.832.741	686.672.499.515
CZECH EXPORT BANK	USD	1	78.284.898	210.808.182.831	1.054.040.914.155	1.264.849.096.986

OUTSTANDING UTANG PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR

<i>Creditor Name</i>	<i>CU Base</i>	<i>Jml Loan</i>	<i>Outstanding Base</i>	<i>Bagian Lancar IDR ^{*)}</i>	<i>Utang Jangka Panjang IDR ^{*)}</i>	<i>Total Posisi Utang IDR ^{*)}</i>
DEUTSCHE BANK MADRID	EUR	1	2.107.533	11.818.109.715	23.636.218.757	35.454.328.472
DZ BANK AG HONG KONG	EUR	1	18.213.750	56.684.722.557	249.719.183.156	306.403.905.713
	USD	1	5.307.568	34.301.753.056	51.452.629.745	85.754.382.800
EDC	USD	1	-	-	-	-
EFIC	USD	1	-	-	-	-
EKSFIN EXPORT FINANA	USD	1	60.996.000	164.252.062.000	821.260.310.000	985.512.372.000
ERSTE BANK, VIENNA	EUR	3	111.107.424	218.072.326.052	1.651.051.198.413	1.869.123.524.465
EXIM BANK KOREA	KRW	16	363.695.108.160	221.623.234.847	3.764.475.150.586	3.986.098.385.434
	USD	7	316.481.451	1.193.799.087.918	3.919.591.717.214	5.113.390.805.132
EXIM BANK OF CHINA	CNY	1	77.504.174	171.553.939.309	-	171.553.939.309
	USD	19	1.436.160.113	3.005.865.562.820	20.198.173.383.568	23.204.038.946.387
EXIMBANK HUNGARY	USD	1	32.276.309	33.644.408.419	487.843.922.072	521.488.330.491
HSBC SINGAPORE	USD	1	36.963.000	149.302.797.750	447.908.393.250	597.211.191.000
IBRD	EUR	2	7.674.735	-	129.109.534.242	129.109.534.242
	USD	64	5.277.506.471	6.416.820.664.196	78.851.851.383.049	85.268.672.047.245
ICO	EUR	9	71.745.797	51.447.136.834	1.155.508.725.947	1.206.955.862.781
	USD	12	17.908.098	117.878.922.910	171.462.222.777	289.341.145.687
IDA	SDR	31	49.749.017	1.013.003.402.583	35.249.687.700	1.048.253.090.283
	USD	14	5.000.155	67.098.961.424	13.688.547.920	80.787.509.344
IDB	ACU	21	38.458.680	216.861.999.913	593.494.311.426	810.356.311.339
	EUR	3	39.650.864	-	667.033.405.502	667.033.405.502
	USD	35	1.274.116.352	2.548.096.116.715	18.037.801.780.787	20.585.897.897.503
IFAD	EUR	5	95.618.165	74.358.581.808	1.534.194.250.124	1.608.552.831.931
	SDR	8	81.949.838	132.854.448.783	1.593.896.656.601	1.726.751.105.384
	USD	2	82.595.100	131.789.417.600	1.202.699.613.100	1.334.489.030.700
ING BANK AMSTERDAM	EUR	3	100.775.880	817.589.997.370	877.729.377.680	1.695.319.375.050
JAICAF	JPY	2	2.476.705.000	109.841.053.140	146.319.591.600	256.160.644.740
JBIC	JPY	1	53.063.635	5.488.265.641	-	5.488.265.641
JICA	JPY	157	911.240.536.919	5.399.186.921.080	88.848.599.331.378	94.247.786.252.458
KDB SINGAPORE	USD	4	64.038.656	68.662.100.118	966.010.461.804	1.034.672.561.922
KfW	EUR	43	415.948.973	567.910.609.754	6.429.461.695.995	6.997.372.305.749
MUFG SINGAPORE	EUR	1	65.856.938	-	1.107.889.535.857	1.107.889.535.857
	USD	5	193.750.221	731.949.328.798	2.398.472.985.275	3.130.422.314.073
NIB	EUR	3	5.033.259	10.900.504.731	73.772.349.105	84.672.853.836
PT BNI TOKYO BRANCH	USD	6	184.827.957	714.700.133.047	2.271.565.168.686	2.986.265.301.734
PT MANDIRI CAYMAN IS	EUR	5	116.261.720	257.539.096.164	1.698.293.453.029	1.955.832.549.192
	USD	20	1.269.528.372	3.215.868.449.426	17.295.901.451.969	20.511.769.901.395

OUTSTANDING UTANG PROYEK PINJAMAN LUAR NEGERI PER KREDITOR

<i>Creditor Name</i>	<i>CU Base</i>	<i>Jml Loan</i>	<i>Outstanding Base</i>	<i>Bagian Lancar IDR ^{*)}</i>	<i>Utang Jangka Panjang IDR ^{*)}</i>	<i>Total Posisi Utang IDR ^{*)}</i>
PT MANDIRI HONGKONG	EUR	1	10.059.338	48.349.979.996	120.874.950.494	169.224.930.490
	USD	12	553.715.560	1.451.270.431.381	7.495.111.876.386	8.946.382.307.767
PT. BNI-HONG KONG	USD	11	813.639.373	997.979.201.417	12.147.992.144.751	13.145.971.346.168
PT. BNI-SINGAPORE	USD	3	2.760.338	44.598.775.896	-	44.598.775.896
RAIFFEISEN BANK INTL	EUR	4	12.599.493	-	211.957.112.906	211.957.112.906
RUSIA FED.	USD	7	108.818.292	278.090.414.399	1.480.086.729.446	1.758.177.143.844
SFD	SAR	5	323.295.069	162.658.189.730	1.227.675.488.926	1.390.333.678.656
SOCIETE GENERALE	EUR	1	52.964.310	100.898.552.549	790.102.556.358	891.001.108.908
UBS, ZURICH	CHF	1	12.780.549	57.140.778.753	171.422.336.259	228.563.115.012
UNICREDIT BANK AUSTR	EUR	24	171.151.473	234.138.440.208	2.645.086.315.300	2.879.224.755.508
UNICREDIT CZECH	EUR	1	73.329.294	246.718.904.205	986.875.615.978	1.233.594.520.183
US EXIM	USD	2	11.179.352	47.817.819.992	132.806.963.486	180.624.783.478
USAID	USD	67	26.092.682	167.429.650.465	254.149.818.910	421.579.469.375
USDA	USD	3	17.365.985	51.339.636.896	229.242.577.902	280.582.214.798
Total		860	2.545.370.167.616	45.067.879.872.553	428.463.058.832.923 **	473.530.938.705.476

*) Konversi Kurs Neraca; USD 1 = Rp 16.157,-

**) Selisih Rp1 karena pembulatan

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

No.	BUMN	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Lab a Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	EBIT	Beban Bunga	Lab a Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Lab a Rugi Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Lab a Rugi Komprehensif	Lab a Rugi Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali	Lab a Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali
		1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)	13	14
1	Perum Perhutani	5.325.716	4.959.846	365.870	204.405	101.454	468.821	71.729	397.092	94.313	302.779	29.209	331.988	304.263	333.473
2	Perum Bulog	60.291.369	58.774.007	1.517.362	1.380.615	215.180	2.682.797	2.530.666	152.131	115.863	36.268	29.852	66.120	49.938	79.790
3	Perum Jasa Tirta I	702.241	628.146	74.095	21.867	6.544	89.418	420	88.998	15.349	73.649	(172)	73.476	74.505	74.333
4	Perum Jasa Tirta II	1.067.488	925.132	142.356	106.230	-	248.587	-	248.587	44.176	204.410	(19.115)	185.295	204.350	185.235
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	99.890	106.197	(6.306)	908	71.442	(76.841)	46.139	(122.979)	-	(122.979)	349.939	226.960	(122.979)	226.960
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	3.766.408	3.588.352	178.056	109.655	-	287.711	44.001	243.711	71.921	171.790	(15.575)	156.215	168.242	156.367
7	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	493.927	444.373	49.554	24.280	-	73.834	49.261	24.573	11.000	13.573	3.761	17.334	13.496	3.761
8	Perum Perumnas	1.229.618	1.181.295	48.324	320.210	-	368.533	356.082	12.452	562	11.890	17.320	29.210	9.569	26.891
9	Perum Damri	1.559.749	1.525.752	33.998	34.901	33.017	35.882	13.410	22.472	(1.661)	24.133	(7.571)	16.562	24.133	16.562
10	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	3.762.774	3.268.055	494.719	221.163	22.097	693.786	-	693.786	149.949	543.837	(10.678)	533.159	543.837	533.159
Total Perum		78.299.182	75.401.155	2.898.026	2.424.235	449.733	4.972.528	3.111.707	1.760.821	501.473	1.259.348	376.970	1.636.319	1.269.354	1.636.532
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	18.358.510	17.945.781	412.729	722.449	456.210	678.968	441.705	237.263	144.916	92.346	456.154	548.500	113.656	568.531
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	57.052.444	48.466.594	8.586.050	222.294	11.126	8.792.218	3.812.854	5.184.363	1.922.024	3.262.335	311.914	3.574.253	3.069.554	3.376.995
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	81.616.288	72.600.893	9.015.315	4.704.900	581.710	13.138.505	1.917.934	11.220.571	2.334.533	8.886.038	(252.310)	8.633.728	8.668.906	8.416.598
4	PT Bio Farma (Persero)	15.713.328	16.982.906	(1.269.578)	611.667	-	(657.911)	643.589	(1.301.500)	(145.688)	(1.158.414)	(2.627)	(1.158.441)	(683.129)	(665.757)
5	PT Pertamina (Persero)	1.193.926.097	1.092.604.415	101.321.681	24.418.349	18.009.863	107.730.167	21.979.348	85.750.819	31.117.791	54.633.028	(3.630.059)	51.002.969	49.545.744	48.118.253
6	PT Pos Indonesia (Persero)	5.017.861	4.225.934	791.927	649.649	261.186	1.180.390	439.234	741.156	(5.979)	747.134	91.975	839.109	746.937	838.941
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	545.380.993	484.759.988	60.621.005	976.269	8.909.455	52.687.819	24.417.860	28.269.959	10.506.935	17.763.024	30.855.816	48.618.840	17.705.027	48.560.843
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	36.186.127	33.851.167	2.334.960	259.819	139.653	2.455.126	1.203.927	1.251.199	479.525	771.674	1.131.363	715.763	1.062.072	1.062.072
9	PT Semen Kumpang (Persero)	24.121	46.422	(22.301)	6	-	(22.295)	907	(23.202)	(23.202)	(23.202)	(23.202)	(23.202)	(23.202)	(23.202)
10	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	149.967.000	107.581.000	42.386.000	1.975.000	-	44.361.000	5.208.000	39.153.000	8.410.000	30.743.000	895.000	31.638.000	23.640.000	24.434.000
11	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	89.087	92.634	(3.547)	-	32.402	(35.949)	12.700	(48.649)	(547)	(48.102)	1.469	(46.633)	(48.102)	(46.633)
12	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	509.562	489.154	20.408	1.783	-	22.191	-	22.191	5.429	16.762	-	16.762	16.762	16.762
13	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	85.559	91.187	(5.628)	24.154	-	18.526	14.853	3.673	(653)	4.326	95.903	100.229	4.084	59.688
14	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	145.059.681	134.321.739	10.737.942	36.938.974	-	47.676.916	6.443.662	41.233.254	3.288.037	37.945.217	3.702.973	41.648.190	34.452.063	38.081.236
15	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	15.130.282	15.388.097	(257.815)	1.276.219	787.408	230.997	2.435.403	(2.204.406)	148.070	(2.352.476)	314.589	(2.037.887)	(2.452.172)	(2.137.583)
16	PT Boma Bisma Indra (Persero)	39.703	53.998	(14.295)	6.990	1.902	(9.206)	7.080	(16.286)	-	(16.286)	-	(16.286)	(16.286)	(16.286)
17	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	183.172	258.130	(74.958)	965.772	6.569	884.245	2.425	881.820	2.946	878.873	28.995	907.868	878.914	907.909
18	PT Barata Indonesia (Persero)	475.388	496.228	(20.841)	149.625	-	128.784	121.515	7.269	5.534	1.735	-	1.735	1.735	1.735
19	PT LEN Industri (Persero)	26.064.328	24.461.430	1.602.898	1.874.420	1.702.739	1.774.579	920.994	853.585	153.947	699.638	222.528	922.166	680.670	902.945
20	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	13.351.717	12.849.616	702.101	887.040	444.850	1.144.291	837.539	306.752	25.694	281.146	173.357	454.505	425.856	425.856
21	PT Amerta Karya (Persero)	14.887	56.315	(41.428)	2.494	1.371	(40.305)	-	(40.305)	588	(40.873)	-	(40.873)	(40.873)	(40.873)
22	PT Brantas Abipraya (Persero)	5.350.621	5.335.361	15.260	660.488	268.016	407.731	180.073	227.658	1.829	225.829	51.298	277.127	225.070	276.365
23	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	28.703.212	19.956.833	9.006.379	1.153.066	358.878	9.800.567	4.026.294	5.774.273	154.355	5.619.918	(137.374)	5.482.544	4.535.565	4.417.548
24	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	10.705.155	11.032.299	(327.144)	1.076.157	274.412	474.601	4.339.064	(3.864.464)	49.137	(3.913.601)	82.592	(3.831.009)	(2.589.402)	(2.561.482)
25	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	19.242.727	18.968.060	274.667	5.445.684	4.562.048	1.158.303	3.282.891	(2.124.588)	389.226	(2.513.814)	(79.215)	(2.593.029)	(2.266.814)	(2.338.245)
26	PT Hutama Karya (Persero)	30.252.293	28.044.528	2.207.765	2.621.234	199.669	4.629.330	1.643.551	2.985.779	219.257	2.766.522	5.416	2.771.938	2.731.253	2.736.669
27	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	19.812.143	18.002.591	1.809.551	2.400.463	1.487.388	2.722.626	1.891.555	831.071	701.633	129.438	(17.914)	111.524	415.654	396.274
28	PT Industri Kereta Api (Persero)	3.083.728	2.568.013	515.715	-	14.583	501.132	392.657	108.474	53.486	54.989	1.186	56.175	51.842	52.985
29	PT PDI Pulau Batam (Persero)	194.345	125.821	68.524	74.627	56.069	87.082	1.753	85.329	19.229	66.100	-	66.100	66.100	66.100
30	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	34.833.868	28.547.110	6.286.759	1.379.436	-	7.666.195	3.004.688	4.661.507	858.370	3.803.137	580.970	4.384.108	3.583.831	4.164.801
31	PT Indah Karya (Persero)	12.618	19.559	(6.941)	1.112	197.723	(203.552)	50.182	(253.733)	-	(253.733)	-	(253.733)	(253.733)	(253.733)
32	PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) (d/h PT Virama Karya (Persero))	428.731	401.523	27.208	4.874	-	32.082	9.798	22.284	9.658	12.627	(29)	12.597	12.627	12.597
33	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) (d/h PT Yodya Karya (Persero))	337.517	319.084	18.433	4.470	8.070	14.832	-	14.832	4.651	10.181	2.577	12.758	12.758	12.758
34	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (d/h PT Indra Karya (Persero))	241.592	222.466	19.126	1.374	5.985	14.515	1.741	12.774	-	12.774	1.348	14.122	12.774	14.122
35	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	94.071.081	68.050.709	26.020.371	1.576.897	1.017.360	26.579.908	-	26.579.908	4.910.512	21.669.396	996.941	22.666.338	21.463.599	22.538.872
36	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	206.652.602	130.593.007	76.059.595	343.891	-	76.403.486	-	76.403.486	15.238.365	61.165.121	(18.356)	61.146.765	55.782.742	55.740.401
37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	283.673.166	205.095.148	78.578.018	-	978.908	77.599.110	-	77.599.110	16.955.302	60.643.808	1.487.794	62.131.602	60.154.887	61.788.171
38	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	34.117.706	30.292.993	3.824.713	-	51.872	3.772.841	-	3.772.841	765.513	3.007.328	(214.393)	2.792.935	3.007.328	2.792.935

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

No.	BUMN	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Labas Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Beban Lain-Lain	EBIT	Beban Bunga	Labas Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Labas Rugi Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Labas Rugi Komprehensif	Labas Rugi Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali	Labas Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali
		1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = (10-11)	13	14
39	PT ASABRI (Persero)	3.610.605	3.248.802	361.803	-	-	361.803	-	361.803	78.613	283.190	(120.608)	162.582	283.190	162.582
40	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	(610.811)	346.485	(957.296)	50.679	8.302	(914.919)	-	(914.919)	7.459	(922.378)	(9.755)	(932.134)	(9.755)	(932.134)
41	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	3.949.293	3.788.282	161.011	-	150.829	10.183	-	10.183	(62.597)	72.779	(86.575)	(13.796)	72.781	(13.796)
42	PT Taspen (Persero)	17.702.362	17.769.959	(67.597)	1.720.954	13.066	1.640.292	-	1.640.292	398.158	1.242.134	(2.673.353)	(1.431.220)	1.244.673	(1.428.964)
43	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	54.151.656	49.260.133	4.891.523	1.423.625	-	6.315.148	7.606.342	(1.291.194)	(185.245)	(1.105.949)	9.615	(1.096.333)	(1.152.439)	(1.142.719)
44	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	6.177.057	5.983.300	193.757	259.475		453.231	150.806	302.426	108.175	194.250	5.057	199.307	193.873	198.927
45	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	33.684.890	27.097.798	6.587.092	655.798	2.571.065	4.671.825	2.567.982	2.103.844	323.929	1.779.915	(61.849)	1.718.066	1.769.533	1.707.697
46	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	42.193.090	43.444.276	(1.251.186)	1.004.076		(247.110)	369.114	(616.224)	(228.849)	(387.375)	(756.912)	(1.144.287)	(444.697)	(1.200.972)
47	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	7.136.670	6.165.597	971.072	312.340	-	1.283.412	-	1.283.412	298.158	985.254	(47.278)	937.975	931.669	886.672
48	PT Danareksa (Persero)	12.555.776	10.498.142	2.057.634	308.247	384.130	1.981.751	-	1.981.751	417.777	1.563.974	156.585	1.720.559	1.092.316	1.380.346
49	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	5.024.559	4.460.617	563.942	170.904	108.392	626.454	115.419	511.036	63.730	447.306	(2.490)	444.816	438.745	436.074
50	PT Jakarta Lloyd (Persero)	203.349	241.256	(37.907)	1.489	82.948	(119.366)	472	(119.839)	2.163	(122.002)	15	(121.987)	(122.002)	(121.987)
51	PT Primmisima (Persero)	7.762	24.478	(16.717)	19.593	21.253	(18.377)	-	(18.377)	-	(18.377)	-	(18.377)	(18.377)	(18.377)
52	PT Aviast Pariwisata Indonesia (Persero)	30.539.346	22.567.053	7.972.293	1.273.884	524.466	8.721.711	3.708.333	5.013.378	2.443.752	2.569.626	(41.414)	2.528.212	2.492.786	2.450.216
53	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	84.992	89.471	(4.479)	29	94	(4.544)	-	(4.544)	-	(4.544)	-	(4.544)	(4.544)	(4.544)
54	PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi)			-			-		-		-		-		
55	PT Produksi Film Negara (Persero)	12.456	16.518	(4.062)	34	267	(4.295)	265	(4.560)	(768)	(3.792)	-	(3.792)	(3.792)	(3.792)
Total Persero		3.292.382.208	2.829.740.699	462.641.509	100.612.771	44.692.237	518.562.043	104.004.507	414.557.536	102.387.976	312.169.559	32.739.244	344.908.804	290.971.588	325.074.294
Total		3.370.681.390	2.905.141.855	465.539.536	103.037.006	45.141.571	523.434.571	107.116.214	416.318.357	102.889.448	313.428.908	33.116.215	346.545.123	292.240.942	326.710.826

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2024

No	BUMN	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Negara
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11	13	14 = 12+13	15
1	Perum Perhutani	1.965.890	16.336.112	18.302.002	1.861.962	4.084.879	5.946.841	2.586.303	(1.334.150)	-	-	11.111.883	12.364.036	(8.875)	12.355.161	12.364.036
2	Perum Bulog	37.440.220	8.428.787	45.869.007	35.266.006	852.317	36.118.323	12.522.387	-	-	-	(2.562.400)	9.959.986	(209.303)	9.750.684	9.959.986
3	Perum Jasa Tirta I	768.133	559.133	1.327.266	248.367	14.381	262.747	31.701	4.186	-	7.508	1.020.493	1.063.889	630	1.064.519	1.063.889
4	Perum Jasa Tirta II	915.551	1.231.574	2.147.125	310.750	148.239	458.989	164.548	-	-	831.577	685.211	1.681.335	6.802	1.688.137	1.681.335
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	58.559	1.267.089	1.325.648	858.359	192.298	1.050.657	43.749	-	-	1.161.536	(930.294)	274.991	-	274.991	274.991
6	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	3.527.836	3.352.734	6.880.570	1.643.274	907.440	2.550.714	363.573	(64.059)	-	(216.483)	4.217.733	4.300.765	29.091	4.329.856	4.300.765
7	Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara	171.401	263.801	435.201	111.439	45.068	156.507	9.116	47.605	-	15.690	205.579	277.990	704	278.695	277.990
8	Perum Perumnas	5.076.863	3.224.944	8.311.607	2.639.630	4.215.917	6.855.547	1.000	3.528.375	-	244.280	(2.327.023)	1.446.631	9.429	1.456.060	1.446.631
9	Perum Damri	328.418	1.609.615	1.938.233	271.599	708.694	980.293	693.853	1.180.366	-	137.028	(1.053.307)	957.940	-	957.940	957.940
10	Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia	4.887.394	2.711.712	7.599.107	807.714	159.349	967.064	3.997.243	(516.195)	-	(43.452)	3.194.447	6.632.043	-	6.632.043	6.632.043
Total Perum		55.140.067	38.995.703	94.135.767	44.019.100	11.328.582	55.347.682	20.413.473	2.846.128	-	2.137.684	13.562.322	38.959.607	(171.522)	38.788.085	38.959.607
1	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	10.882.728	21.504.837	32.387.566	11.844.460	4.115.864	15.960.324	12.898.183	996.635	-	2.693.866	-339.309	16.249.375	177.867	16.427.241	16.249.375
2	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	23.656.358	122.401.925	146.058.283	22.823.227	49.535.224	72.358.451	40.216.132	(13.589.155)	-	45.620.754	(3.315.754)	68.931.978	4.767.854	73.699.832	68.931.978
3	PT Pupuk Indonesia (Persero)	50.343.800	88.952.855	139.296.655	25.286.189	14.649.740	39.935.929	25.000.000	-	-	29.656.092	44.430.946	99.087.038	273.688	99.360.726	99.087.038
4	PT Bio Farma (Persero)	11.238.467	19.488.262	30.726.730	10.960.982	4.998.702	15.959.684	17.481.279	(6.402.398)	-	2.488.277	(442.712)	13.124.445	1.642.601	14.767.046	13.124.445
5	PT Pertamina (Persero)	607.980.025	843.731.094	1.451.711.119	267.523.227	471.965.391	739.488.618	267.489.395	(16.597.763)	-	(2.347.661)	406.150.142	654.694.113	57.528.388	712.222.501	654.694.113
6	PT Pos Indonesia (Persero)	7.836.565	8.629.272	16.465.838	6.013.475	1.498.188	7.511.663	455.023	2.344	-	3.794.785	4.746.860	8.999.013	(44.838)	8.954.175	8.999.013
7	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	167.446.389	1.604.928.877	1.772.375.266	172.052.083	539.162.948	711.215.031	150.536.096	34.608	-	709.890.401	199.503.741	1.059.964.846	1.195.389	1.061.160.235	1.059.964.846
8	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	16.224.031	60.769.051	76.993.082	12.943.911	15.741.960	28.685.871	675.154	6.217.241	-	1.945.729	34.933.396	43.771.520	4.535.691	48.307.211	22.411.018
9	PT Semen Kumpang (Persero)	4.574	98.228	102.802	108.084	534.091	642.175	133.713	-	-	5.301	(678.386)	(539.373)	-	(539.373)	-
10	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	63.080.000	236.595.000	299.675.000	76.767.000	60.418.000	137.185.000	4.953.000	2.310.000	-	9.898.000	124.933.000	142.094.000	20.396.000	162.490.000	74.016.765
11	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	63.236	616.305	679.541	184.151	367.809	551.960	456.694	3.656	-	423.213	(755.982)	127.582	-	127.582	127.582
12	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	371.680	1.667.201	2.038.881	636.338	557.878	1.194.216	976.600	635	-	2.752.759	(2.885.329)	844.665	-	844.665	844.243
13	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	31.816	366.751	398.567	193.305	864.585	1.057.890	240.936	51	-	196.748	(1.140.984)	(703.250)	43.927	(659.323)	-
14	PT Mineral Industri Indonesia (Persero)	68.660.388	220.901.704	289.562.092	48.482.050	83.676.750	132.158.800	119.090.865	(69.543.526)	-	13.736.969	75.008.123	138.292.431	19.110.861	157.403.292	138.292.431
15	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	10.365.378	36.402.933	46.768.311	35.784.039	3.953.020	39.737.059	15.956.217	2.827.798	-	25.153.670	(37.588.566)	6.349.119	682.132	7.031.252	5.079.295

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2024

No	BUMN	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Negara
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11	13	14 = 12+13	15
16	PT Boma Bisma Indra (Persero)	202.416	592.240	794.657	708.547	55.416	763.962	340.916	22.806	-	(316.751)	(16.286)	30.688	6	30.694	30.688
17	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	267.617	891.888	1.159.505	348.519	619.680	968.199	350.000	1.229	-	773.584	(928.337)	196.476	(5.171)	191.305	196.476
18	PT Barata Indonesia (Persero)	616.747	1.250.922	1.867.669	1.794.131	3.747.486	5.541.616	762.915	3.221	-	603.839	(5.043.923)	(3.673.947)	-	(3.673.947)	-
19	PT LEN Industri (Persero)	48.541.444	18.725.268	67.266.712	39.618.436	10.805.096	50.423.532	21.850.575	(8.796.012)	-	2.044.720	1.427.258	16.526.541	316.639	16.843.180	16.526.541
20	PT Adhi Karya (Persero) Tbk	22.518.358	12.524.424	35.042.781	20.049.429	5.318.161	25.367.591	840.761	4.755.656	-	893.483	2.551.534	9.041.434	633.756	9.675.190	5.816.354
21	PT Amarta Karya (Persero)	272.384	159.487	431.871	112.880	249.314	362.194	44.285	-	-	530.350	(504.958)	69.677	-	69.677	69.677
22	PT Brantas Abipraya (Persero)	5.710.122	4.029.280	9.739.401	5.333.330	1.771.725	7.105.056	373.537	-	-	534.157	1.695.401	2.603.095	31.250	2.634.345	2.603.095
23	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6.854.331	133.872.108	140.726.439	20.360.544	62.824.742	83.185.286	3.628.936	3.997.085	-	(512.703)	26.929.716	34.043.034	23.498.119	57.541.153	23.830.124
24	PT Waskita Karya (Persero) Tbk	20.437.543	56.722.194	77.159.737	22.498.266	46.777.289	69.275.556	2.880.681	13.642.597	-	848.151	(14.564.295)	2.807.134	5.077.048	7.884.181	2.115.147
25	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	30.238.519	33.317.824	63.556.343	19.023.300	32.661.623	51.684.923	3.987.306	9.040.356	-	1.002.912	(5.161.894)	8.868.681	3.002.739	11.871.420	8.070.500
26	PT Hutama Karya (Persero)	56.457.972	139.584.491	196.042.463	26.406.169	31.635.843	58.042.012	131.846.000	44.037	-	740.784	4.624.010	137.054.831	945.620	138.000.451	137.054.831
27	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	29.120.452	27.469.264	56.589.716	22.639.226	18.695.574	41.334.800	619.990	4.710.055	-	2.232.293	4.558.994	12.121.331	3.133.584	15.254.916	6.181.879
28	PT Industri Kereta Api (Persero)	5.148.369	2.077.907	7.226.275	5.537.070	484.754	6.021.823	1.251.843	965.000	-	754.376	(1.805.752)	1.166.467	38.985	1.204.452	1.166.467
29	PT PDI Pulau Batam (Persero)	76.164	769.142	845.306	712.749	47.462	760.211	19.001	-	-	-	66.093	85.094	-	85.094	85.094
30	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	26.214.079	101.413.116	127.627.196	30.854.490	46.585.853	77.440.343	40.575.584	(33.331.222)	-	(953.677)	41.806.399	48.097.084	2.089.769	50.186.853	48.097.084
31	PT Indah Karya (Persero)	314.179	151.349	465.529	869.637	241.506	1.111.144	7.000	-	-	(652.615)	(645.615)	-	-	(645.615)	-
32	PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) (d/h PT Virama Karya (Persero))	328.337	154.055	482.392	124.775	48.014	172.789	25.000	1.051	-	85.898	197.654	309.603	-	309.603	309.603
33	PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) (d/h PT Yodya Karya (Persero))	395.930	320.018	715.948	198.888	9.349	208.238	50.000	-	-	84.502	373.209	507.711	-	507.711	507.711
34	PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (d/h PT Indra Karya (Persero))	190.457	170.658	361.115	111.588	59.443	171.031	10.001	-	-	107.315	72.768	190.084	-	190.084	190.084
35	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk			1.129.805.637			962.619.084	9.054.807	19.267.254	-	14.832.038	119.303.481	162.457.581	4.728.972	167.186.553	97.474.548
36	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk			2.427.223.262			2.113.748.581	11.666.667	18.095.274	-	33.984.019	220.050.469	283.796.429	29.678.252	313.474.681	147.574.143
37	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk			1.992.983.447			1.669.794.400	7.577.950	75.880.223	-	15.542.839	218.092.626	317.093.838	6.095.209	323.189.047	168.662.212
38	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk			469.614.502			437.042.613	7.017.222	4.418.900	-	1.989.694	19.146.073	32.571.889	-	32.571.889	19.543.133
39	PT ASABRI (Persero)			49.856.198			50.762.933	200.000	-	-	(2.934.770)	1.828.035	(906.735)	-	(906.735)	-
40	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	172.675	84	172.759	256.761	331.056	587.817	235.000	27.538.894	-	2.663.986	(30.852.938)	(415.058)	0	(415.058)	-
41	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)			15.296.697			12.771.675	878.358	673.568	-	219.043	754.035	2.525.003	18	2.525.021	2.525.003
42	PT Taspem (Persero)			397.577.064			386.414.926	500.000	-	-	(6.898.112)	17.470.857	11.072.745	89.394	11.162.139	11.072.745
43	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	8.949.506	97.987.456	106.936.962	18.956.568	109.822.991	128.779.559	34.436.289	489.221	-	303.602	(56.547.878)	(21.318.766)	(523.831)	(21.842.597)	-
44	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	7.137.809	2.946.079	10.083.888	1.422.771	138.067	1.560.838	7.629.900	1.898.022	-	(92.537)	(916.599)	8.518.786	4.264	8.523.050	8.518.786
45	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	17.233.640	77.666.722	94.900.362	14.656.717	45.620.012	60.276.728	22.368.743	2.000.000	-	(1.166.911)	11.322.540	34.524.373	99.261	34.623.634	34.524.373
46	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)			132.384.364			93.546.107	93.719.537	(62.006.445)	-	(146.059)	6.036.086	37.603.119	1.235.138	38.838.257	37.603.119
47	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	6.384.516	3.524.530	9.909.047	1.661.353	732.763	2.394.115	7.012.393	(2.630.821)	-	108.218	2.614.186	7.103.975	410.956	7.514.932	7.103.975
48	PT Danareksa (Persero)	18.392.289	45.339.266	63.731.555	12.572.842	9.096.396	21.669.238	18.332.900	5.478.207	-	4.717.384	1.613.085	30.141.576	11.920.741	42.062.317	30.141.576
49	PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	2.165.232	9.245.932	11.411.164	1.330.119	1.282.190	2.612.308	5.561.760	8.445	-	-	3.045.641	8.615.846	183.009	8.798.855	8.615.846

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)
NERACA PER 31 DESEMBER 2024

No	BUMN	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Negara
		1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (4+5)	7	8	9	10	11	12 = 7+8+9+10+11	13	14 = 12+13	15
50	PT Djakarta Lloyd (Persero)	227.677	464.565	692.242	411.669	294.237	705.906	1.954.659	1.426	-	65	(1.969.814)	(13.664)	0	(13.664)	-
51	PT Primmisima (Persero)	7.819	138.851	146.671	89.271	105.031	194.302	13.000	2.276	-	130.956	(193.863)	(47.631)	-	(47.631)	-
52	PT Aviast Pariwisata Indonesia (Persero)	18.711.342	85.107.608	103.818.950	15.227.098	52.515.597	67.742.695	78.656.758	(45.946.380)	-	(350.730)	2.473.923	34.833.571	1.242.684	36.076.255	34.833.571
53	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	34.658	253.256	287.915	161.518	19.851	181.369	11.000	-	-	226.332	(130.786)	106.545	-	106.545	106.545
54	PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam likuidasi)	61.256	422.840	484.096	329.545	107.446	436.991	198.870	0	0	-	(151.765)	47.105	-	47.105	47.105
55	PT Produksi Film Negara (Persero)	2.257	36.772	39.029	26.006	17.232	43.238	54.904	-	-	-	(59.113)	(4.209)	-	(4.209)	-
Total Persero		1.371.571.531	4.124.383.895	12.110.696.597	976.006.735	1.734.761.347	8.437.468.400	1.172.904.334	(53.515.948)	-	918.491.196	1.431.112.644	3.468.992.226	204.235.971	3.673.228.197	3.023.019.181
Total				12.204.832.364	1.020.025.834	1.746.089.929	8.492.816.083	1.193.317.807	(50.669.821)	-	920.628.880	1.444.674.966	3.507.951.833	204.064.449	3.712.016.282	3.061.978.787

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON-BUMN (MINORITAS)

No.	Nama Perusahaan	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
1	PT Perkebunan Nusantara I	10,58%	946.239	946.239.000.000
2	PT Perkebunan Nusantara IV	7,07%	593.847	593.847.000.000
3	PT Asean Bintulu Fertilizer	13,00%	39.000	125.307.000.000
4	PT Rekayasa Industri	4,97%	22.366	22.366.000.000
5	PT Indosat Tbk	0,00%	1	100
6	PT PANN Pembiayaan Maritim	0,00%	1	1.000.000
7	PT Bukit Asam Tbk	0,00%	5	500
8	PT Timah Tbk	0,00%	1	50
9	PT Aneka Tambang Tbk	0,00%	1	100
10	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	0,00%	1	100
11	PT Indofarma Tbk	0,00%	1	100
12	PT Kimia Farma Tbk	0,00%	1	100
13	PT Asuransi Jasa Indonesia	0,00%	1	1.000.000
14	PT Jasa Raharja	0,00%	1	1.000.000
15	PT Jaminan Kredit Indonesia	0,00%	1	1.000.000
16	PT Asuransi Kredit Indonesia	0,00%	1	1.000.000
17	PT Energy Management Indonesia	0,00%	1	1.000.000
18	PT Pegadaian	0,00%	1	1.000.000
19	PT Permodalan Nasional Madani	0,00%	1	1.000.000
20	PT Hotel Indonesia Natour	0,00%	1	1.000.000
21	PT Sarinah	0,00%	1	1.000.000
22	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan	0,00%	1	1.000.000
23	PT Sucofindo	0,00%	1	1.000.000
24	PT Surveyor Indonesia	0,00%	1	1.000.000
25	PT Perikanan Indonesia	0,00%	1	1.000.000
26	PT Berdikari	0,00%	1	1.000.000
27	PT Sang Hyang Seri	0,00%	1	1.000.000
28	PT Garam	0,00%	1	1.000.000
29	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	0,00%	1	1.000.000
30	PT Nindya Karya	0,00%	1	1.000.000
31	PT Kawasan Berikat Nusantara	0,00%	1	1.000.000
32	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	0,00%	1	1.000.000
33	PT Kawasan Industri Medan	0,00%	1	1.000.000
34	PT Kawasan Industri Makassar	0,00%	1	1.000.000
35	PT Balai Pustaka	0,01%	1	1.000.000
36	PT Kliring Berjangka Indonesia	0,00%	1	1.000.000
37	PT Perusahaan Pengelola Aset	0,00%	1	1.000.000
38	PT Dahana	0,00%	1	1.000.000
39	PT Pindad	0,00%	1	1.000.000
40	PT Dirgantara Indonesia	0,00%	1	1.000.000
41	PT PAL Indonesia	0,00%	1	1.000.000
42	PT Industri Nuklir Indonesia	0,00%	1	1.000.000
43	PT Semen Baturaja Tbk	0,00%	1	100
44	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	0,00%	1	500
45	PT Indonesia Asahan Aluminium	0,00%	1	415.000
46	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	0,00%	1	1.000.000
47	PT Angkasa Pura Indonesia	0,00%	2	2.000.000
48	PT Petrokimia Gresik	0,00%	1	1.000.000
49	PT Pupuk Kalimantan Timur	0,00%	1	500
50	PT Pupuk Kujang	0,00%	1	1.000.000
51	PT Pupuk Iskandar Muda	0,00%	1	1.000.000

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON-BUMN (MINORITAS)

No.	Nama Perusahaan	% Saham Kepemilikan RI	Jumlah Saham	Kepemilikan Pemerintah
52	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	0,00%	1	1.000.000
53	PT Inhutani I	0,00%	1	1.000.000
54	PT Inhutani V		1	1.000.000
Total				1.687.799.417.150

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

No.	Perusahaan Minoritas	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Labas Usaha	Pendapatan Lain - Lain	Beban Lain - Lain	EBIT	Beban Bunga	LABA SEBELUM PAJAK	Labas Rugi Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Labas Rugi Komprehensif	Labas Rugi Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali	Labas Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali
		1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
1	PT Perkebunan Nusantara I	13.849.263	11.659.753	2.189.510	71.999	-	2.261.509	2.197.797	63.712	48.086	255.261	303.347	48.345	303.686
2	PT Perkebunan Nusantara IV	39.314.800	33.106.889	6.207.911	1.042.477		7.250.388	2.506.279	4.744.109	3.300.304	38.264	3.338.567	3.362.542	3.399.320
3	PT Rekayasa Industri	3.970.608	2.417.563	1.553.045	3.354.713	982.427	3.925.331	245.550	3.679.781	3.580.225	26.250	3.606.475	3.535.976	3.559.150
4	PT Asean Bintulu Fertilizer			-			-		-	-		-		
5	PT Indosat Tbk	55.886.870	45.070.270	10.816.600	475.793	82.073	11.210.320	4.477.795	6.732.525	5.272.412	6.061	5.278.473	4.910.828	4.916.312
6	PT PANN Pembiayaan Maritim	7.518	15.688	(8.170)	-	-	(8.170)	-	(8.170)	(8.170)	-	(8.170)	(8.170)	(8.170)
7	PT Bukit Asam Tbk	42.764.968	37.429.963	5.335.005	1.207.931	-	6.542.936	283.690	6.259.246	5.139.423	467.158	5.606.581	5.103.720	5.570.878
8	PT Timah Tbk	10.856.422	9.122.067	1.734.355	89.937	16.028	1.808.264	205.593	1.602.671	1.186.697	20.933	1.207.630	1.186.646	1.207.579
9	PT Aneka Tambang Tbk	69.192.440	66.194.487	2.997.953	1.615.690	-	4.613.643	-	4.613.643	3.852.218	245.354	4.097.572	3.647.210	3.892.564
10	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	60.049.296	51.234.112	8.815.184	2.913.363	1.368.763	10.359.784	1.193.938	9.165.846	6.968.214	162.244	7.130.458	5.379.902	5.542.146
11	PT Indofarma Tbk	211.117	434.175	(223.059)	-	-	(223.059)	51.480	(274.539)	(272.219)	-	(272.219)	272.217	272.217
12	PT Kimia Farma Tbk	10.419.362	11.623.026	(1.203.663)	158.241	3.354	(1.048.777)	565.215	(1.613.991)	(1.301.884)		(1.301.884)	(959.481)	(959.481)
13	PT Asuransi Jasa Indonesia	1.764.921	1.793.983	(29.062)	139.221	313	109.846	-	109.846	157.940	(19.454)	138.486	157.332	137.879
14	PT Jasa Raharja	7.706.058	6.166.734	1.539.324	-	-	1.539.324	-	1.539.324	1.333.461	(274.114)	1.059.347	1.323.015	1.051.315
15	PT Jaminan Kredit Indonesia	8.535.236	7.255.751	1.279.485	7.566	-	1.287.051	-	1.287.051	1.161.494	(93.519)	1.067.975	1.161.456	1.067.938
16	PT Asuransi Kredit Indonesia	9.890.815	10.291.104	(400.289)	38.987	-	(361.301)	-	(361.301)	(419.572)	(124.884)	(544.457)	(419.572)	(544.457)
17	PT Energy Management Indonesia	138.793	135.494	3.299	2.352	138	5.514	-	5.514	4.242	-	4.242	4.242	4.242
18	PT Pegadaian	38.615.988	30.958.216	7.657.772	45.317	-	7.703.089	-	7.703.089	5.851.797	(106.198)	5.745.599	5.851.005	5.744.807
19	PT Permodalan Nasional Madani	16.684.468	15.027.847	1.656.621	315.027	-	1.971.648	-	1.971.648	1.498.031	(916)	1.497.115	1.490.002	1.489.080
20	PT Hotel Indonesia Natour	189.750	230.114	(40.364)	9.284	610	(31.690)	29.106	(60.796)	(62.471)	-	(62.471)	(62.471)	(62.471)
21	PT Sarinah	839.181	883.363	(44.182)	689.959	9.615	636.162	74.686	561.476	419.714	(6.005)	413.709	419.714	413.709
22	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	542.135	522.475	19.660	395.286	-	414.946	17.654	397.292	385.752	(6.898)	378.854	386.105	379.208
23	PT Sucofindo	3.853.757	3.179.527	674.231	19.447	-	693.678	-	693.678	532.512	(29.613)	502.899	531.991	502.383
24	PT Surveyor Indonesia	2.238.376	1.885.466	352.910	47.371	72.025	328.255	-	328.255	248.731	(7.542)	241.189	248.416	241.182
25	PT Perikanan Indonesia	416.889	434.657	(17.768)	240.460	165.810	56.882	43.839	13.042	13.042	(787)	12.256	13.042	12.256

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan rupiah)

No.	Perusahaan Minoritas	Pendapatan Usaha	HPP + Beban Usaha	Laba Usaha	Pendapatan Lain - Lain	Beban Lain - Lain	EBIT	Beban Bunga	LABA SEBELUM PAJAK	Laba Rugi Tahun Berjalan	Pendapatan Komprehensif	Laba Rugi Komprehensif	Laba Rugi Tahun Berjalan Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali	Laba Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepada Entitas Pengendali
		1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	10 = (8-9)	11	12=10+11	13	14
26	PT Berdikari	6.134.274	5.957.095	177.179	-	18.112	159.067	-	159.067	124.087	-	124.087	124.080	124.080
27	PT Sang Hyang Seri	623.140	711.215	(88.075)	77.613	43.898	(54.360)	-	(54.360)	(54.360)	-	(54.360)	(54.364)	(54.360)
28	PT Garam	226.382	195.671	30.710	45.677	10.680	65.707	176	65.532	57.726	(6)	57.719	57.726	57.719
29	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	3.119.724	3.077.392	42.332	17.780	-	60.111	21.722	38.389	15.076	(900)	14.176	16.351	14.176
30	PT Nindya Karya	5.821.165	5.825.364	(4.199)	430.123	84.456	341.467	44.526	296.942	168.285	533	168.818	167.077	167.709
31	PT Kawasan Berikat Nusantara	1.006.183	669.002	337.181	91.152	110.523	317.810	-	317.810	315.124	-	315.124	315.124	315.124
32	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	995.636	531.872	463.764	80.418	67.007	477.175	17.658	459.517	362.936	2.565	365.501	352.397	354.985
33	PT Kawasan Industri Medan	241.976	219.705	22.271	32.555	5.639	49.187	325	48.862	47.279	(55)	47.224	47.279	47.224
34	PT Kawasan Industri Makassar	68.321	52.493	15.828	18.511	-	34.339	448	33.892	27.886	992	28.878	27.886	28.878
35	PT Balai Pustaka	15.857	26.982	(11.125)	8.333	-	(2.792)	1.179	(3.972)	(2.067)	2.042	(26)	(2.067)	(26)
36	PT Kliring Berjangka Indonesia	187.466	91.395	96.070	3.491	1.242	98.320	-	98.320	73.856	(463)	73.393	73.718	73.255
37	PT Perusahaan Pengelola Aset	1.662.604	1.486.782	175.822	48.767	14.034	210.555	-	210.555	205.370	419.419	624.789	205.370	624.789
38	PT Dahana	3.704.406	2.962.044	742.362	27.036	55.372	714.026	71.603	642.423	501.756	167	501.923	499.638	499.805
39	PT Pindad	7.206.803	7.140.734	66.069	464.480	565.571	(35.022)	-	(35.022)	21.300	-	21.300	21.300	21.300
40	PT Dirgantara Indonesia	4.814.340	4.467.191	347.149	146.877	211.400	282.626	252.626	30.001	20.852	413	21.265	20.852	21.265
41	PT PAL Indonesia	4.031.000	3.898.135	132.865	63.338	86.839	109.364	52.113	57.251	33.830	(1.627)	32.203	33.832	32.205
42	PT Industri Nuklir Indonesia	-	2.447	(2.447)	827	3.487	(5.108)	-	(5.108)	(5.108)	-	(5.108)	(5.108)	(5.108)
43	PT Semen Baturaja Tbk	2.091.352	1.857.562	233.791	16.855	-	250.646	78.853	171.793	129.253	894	130.147	129.254	130.148
44	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	21.674.735	11.627.348	10.047.387	1.295.230	2.292.222	9.050.395	-	9.050.395	7.005.888	152.124	7.158.012	7.005.888	7.158.012
45	PT Indonesia Asahan Aluminium	11.364.184	9.120.191	2.243.994	510.893	59.251	2.695.636	6.322	2.689.314	1.960.904	7.595	1.968.499	1.962.068	1.969.499
46	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	3.565.117	1.555.955	2.009.162	21.310	72.327	1.958.146	146.829	1.811.317	1.676.572	20.533	1.697.105	1.677.252	1.697.786
47	PT Angkasa Pura Indonesia	20.491.015	14.515.580	5.975.435	596.817	375.846	6.196.406	3.335.312	2.861.094	796.796	(58.219)	738.577	855.896	797.818
48	PT Petrokimia Gresik	29.510.581	26.513.753	2.996.828	221.000	877.042	2.340.786	-	2.340.786	1.828.929	(44.067)	1.784.862	1.828.929	1.784.862
49	PT Pupuk Kalimantan Timur	24.825.463	19.999.560	4.825.903	435.562	16.697	5.244.768	-	5.244.768	4.110.745	14.421	4.125.166	4.110.745	4.125.166
50	PT Pupuk Kujang	7.575.183	7.002.307	572.876	75.328	54.766	593.438	-	593.438	455.219	25.367	480.586	455.219	480.586
51	PT Pupuk Iskandar Muda	6.013.323	5.425.335	587.988	10.554	325.659	272.883	-	272.883	205.188	-	205.188	205.188	205.188
52	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	13.884.016	12.053.310	1.830.706	1.005.282	1.134.470	1.701.518	-	1.701.518	1.309.547	(333.906)	975.641	1.309.547	975.641
53	PT Inhutani I	637.383	601.071	36.313	33.531	14.610	55.234	-	55.234	44.815	(30.238)	14.577	44.815	14.577
54	PT Inhutani V	189.826	218.621	(28.795)	39.705	10.288	623	-	623	78	(11.405)	(11.327)	78	(11.327)
	Jumlah	579.620.485	494.878.833	84.741.653	18.699.467	9.212.595	94.228.525	15.922.314	78.306.211	60.327.738	717.773	61.045.511	59.069.982	59.784.247

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN NON-BUMN (MINORITAS)
NERACA

(dalam jutaan rupiah)

No.	Perusahaan Minoritas	Kode	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disorot	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba	Ekuitas Yang Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Kepemilikan Negara (Rp Juta)
			1	2	3=(1+2)	4	5	6=(4+5)	7	8	9	10	11	12=7+8+9+10+11	13	14=12+13	16
1	PT Perkebunan Nusantara I	PN01	6.762.461	64.076.359	70.838.820	6.612.090	36.031.767	42.643.857	8.941.996	(11.101.819)	-	32.843.728	(2.565.463)	28.118.441	76.521	28.194.963	946.239
2	PT Perkebunan Nusantara IV	PN04	14.757.520	54.038.306	68.795.826	14.750.621	29.940.717	44.691.338	7.623.430	-	-	7.642.446	9.303.378	24.569.254	(464.767)	24.104.488	593.847
3	PT Rekayasa Industri	REIN	3.349.812	3.465.121	6.814.933	3.461.454	2.373.589	5.835.043	2.516.177	-	-	2.774.578	(4.759.279)	531.476	448.413	979.890	22.366
4	PT Asean Bintulu Fertilizer	ASBF	1.172.961	3.241.429	4.414.390	276.692	552.986	829.679	2.517.911	-	-	-	1.066.800	3.584.711	0	3.584.711	125.307
5	PT Indosat Tbk	IDST	14.877.675	99.509.023	114.386.698	31.009.045	46.725.856	77.734.901	806.270	17.713.642	-	360.449	14.618.070	33.498.431	3.153.366	36.651.797	0
6	PT PANN Pembiayaan Maritim	PAPM			776.459			163.319	1.315.061	87.690	-	0	(789.611)	613.140	0	613.140	1
7	PT Bukit Asam Tbk	TBBA	15.233.514	26.552.062	41.785.576	11.974.820	7.166.944	19.141.764	1.152.066	642.832	-	1.111.505	19.598.885	22.505.288	138.524	22.643.812	0
8	PT Timah Tbk	TINS	6.028.012	6.771.564	12.799.576	2.715.491	2.634.106	5.349.597	372.388	64.383	-	90.190	6.922.675	7.449.636	343	7.449.979	0
9	PT Aneka Tambang Tbk	ANTM	17.991.975	26.530.670	44.522.645	9.770.898	2.552.241	12.323.139	2.403.076	9.696.068	-	4.373.203	14.985.766	31.458.113	741.393	32.199.506	0
10	PT Perusahaan Gas Negara Tbk	PGAS	32.103.341	71.559.159	103.662.500	18.329.913	26.011.721	44.341.633	5.558.312	(7.554.603)	-	(608.249)	48.264.964	45.660.424	13.660.442	59.320.866	0
11	PT Indofarma Tbk	INFR	155.113	546.616	701.729	1.462.580	315.520	1.778.101	309.927	81.120	-	215.095	(1.682.493)	(1.076.351)	(21)	(1.076.372)	0
12	PT Kimia Farma Tbk	KIFR	4.125.238	11.537.841	15.662.880	7.101.266	4.102.100	11.203.366	556.659	(882.529)	-	7.139.568	(2.400.750)	4.412.947	46.567	4.459.514	0
13	PT Asuransi Jasa Indonesia	AJSI			15.616.613			12.450.300	425.000	482.359	-	2.783.124	(530.636)	3.159.847	6.466	3.166.313	1
14	PT Jasa Raharja	AJSR			18.374.228			6.645.252	8.500.000	13.504	-	(1.103.933)	4.226.858	11.636.429	92.547	11.728.976	1
15	PT Jaminan Kredit Indonesia	PSPU			32.358.328			19.014.093	10.638.733	-	-	(378.380)	3.082.999	13.343.352	883	13.344.235	1
16	PT Asuransi Kredit Indonesia	AKRI			33.755.899			23.449.500	9.611.000	-	-	(161.926)	856.977	10.306.051	348	10.306.399	1
17	PT Energy Management Indonesia	KONB	31.613	17.567	49.180	17.274	2.581	19.855	15.555	0	-	-	13.783	29.339	(14)	29.325	1
18	PT Pegadaian	PGDN			102.616.631			66.642.222	6.250.000	-	-	6.704.378	23.015.691	35.970.069	4.340	35.974.409	1
19	PT Permodalan Nasional Madani	PNMD			55.362.717			44.805.095	3.800.000	-	-	(2.066)	6.726.854	10.524.788	32.834	10.557.622	1
20	PT Hotel Indonesia Natour	HIIT	406.821	4.440.235	4.847.056	1.166.337	2.102.480	3.268.818	101.700	547.587	-	990.110	(69.958)	1.569.438	8.800	1.578.238	1
21	PT Sarinah	SRNH	611.025	881.849	1.492.874	948.493	90.502	1.039.995	46.850	181	-	(23.877)	429.719	452.874	6	452.879	1
22	PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	TWCB	212.790	868.531	1.081.321	263.425	137.894	401.318	250.000	205	-	(15.961)	446.477	680.721	(719)	680.002	1
23	PT Sucofindo	SUCO	3.228.807	2.009.927	5.238.734	923.307	380.584	1.303.891	300.000	1.141	-	485.147	3.146.905	3.933.193	1.651	3.934.843	1
24	PT Surveyor Indonesia	SRVI	1.798.475	824.561	2.623.036	451.255	137.388	588.643	25.000	105	-	1.764.712	248.416	2.038.233	(3.840)	2.034.393	1
25	PT Perikanan Indonesia	PPII	205.119	1.151.457	1.356.576	227.162	968.315	1.195.477	495.217	237.372	-	326	(571.816)	161.099	0	161.099	1
26	PT Berdikari	PPBR	1.382.608	304.662	1.687.270	1.331.977	18.446	1.350.423	75.000	-	-	57.742	204.124	336.866	(20)	336.847	1
27	PT Sang Hyang Seri	SHSR	874.339	5.811.250	6.685.589	1.751.328	1.810.585	3.561.914	1.913.159	(693.209)	-	4.684.356	(2.780.640)	3.123.667	9	3.123.675	1
28	PT Garam	GRAM	329.674	553.402	883.076	137.842	12.439	150.281	670.227	-	-	292.844	(230.276)	732.795	0	732.795	1
29	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	PPPI	1.294.301	3.757.341	5.051.642	1.200.051	55.300	1.255.351	942.745	883.386	-	(117.620)	2.087.710	3.796.221	70	3.796.291	1
30	PT Nindya Karya	NDYK	3.819.698	1.612.945	5.432.643	3.477.592	269.901	3.747.492	559.497	-	-	226.200	880.831	1.666.528	18.623	1.685.151	1
31	PT Kawasan Berikat Nusantara	KBRN	1.000.197	4.189.500	5.189.698	525.213	774.473	1.299.686	363.945	-	-	3.210.203	315.124	3.889.272	740	3.890.012	1
32	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	KIWK	984.767	3.157.966	4.142.733	845.644	756.556	1.602.200	89.488	933.131	-	40.769	1.186.464	2.249.853	290.680	2.540.532	1
33	PT Kawasan Industri Medan	KIMD	295.449	933.385	1.228.833	121.792	490.194	611.986	150.000	-	-	-	466.847	616.847	0	616.847	1
34	PT Kawasan Industri Makassar	KIMK	77.129	1.102.377	1.179.505	65.901	366.222	432.123	40.000	-	-	79.166	628.216	747.382	0	747.382	1
35	PT Balai Pustaka	BLPS	18.915	155.821	174.736	142.778	-	142.778	14.400	-	-	49.399	(31.841)	31.958	0	31.958	1
36	PT Klining Berjangka Indonesia	KLBI	2.500.018	43.078	2.543.096	1.835.369	14.420	1.849.789	500.000	-	-	28	191.200	691.229	2.079	693.308	1
37	PT Perusahaan Pengelola Aset	PPPA	5.485.189	11.981.895	17.467.084	3.295.202	2.938.769	6.233.971	5.668.998	(1.386.916)	-	5.602.513	1.348.528	11.233.123	(10)	11.233.113	1
38	PT Dahana	DAHA	2.638.177	2.361.840	5.000.018	1.177.975	900.693	2.078.668	250.000	2.013	-	559.988	1.932.216	2.744.217	177.132	2.921.349	1
39	PT Pindad	PIND	17.030.397	4.435.929	21.466.327	15.691.938	1.200.563	16.892.501	1.492.642	-	-	2.361.436	719.740	4.573.819	7	4.573.826	1
40	PT Dirgantara Indonesia	DIRI	10.421.035	4.230.859	14.651.894	6.740.084	3.501.352	10.241.436	22.292.763	1.691.956	-	1.370.174	(20.944.435)	4.410.458	0	4.410.458	1
41	PT PAL Indonesia	PPAL	7.505.424	4.937.517	12.442.942	7.491.439	3.205.043	10.696.482	5.165.661	128.100	-	763.969	(4.311.241)	1.746.489	(29)	1.746.460	1
42	PT Industri Nuklir Indonesia	BTEK	24.767	180	24.947	61.475	24.625	86.101	27.200	-	-	5.821	(94.174)	(61.154)	0	(61.154)	1
43	PT Semen Baturaja Tbk	SMBR	1.000.678	3.907.008	4.907.687	822.079	817.363	1.639.442	993.253	1.270.607	-	(76.995)	1.081.403	3.268.269	(24)	3.268.245	0
44	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	BRIS			408.613.432			363.571.860	23.064.630	(3.929.100)	-	844.270	25.061.772	45.041.572	0	45.041.572	0
45	PT Indonesia Asahan Aluminium	ISKA	11.943.473	28.079.900	40.023.373	7.340.959	585.099	7.926.058	20.910.219	(563.666)	-	275.984	10.312.635	30.935.172	1.162.143	32.097.315	0
46	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia	INLM	2.800.786	6.705.899	9.506.685	1.530.008	3.543.029	5.073.037	3.019.750	148	-	35.199	1.381.587	4.436.683	(3.035)	4.433.649	1

NERACA

(dalam jutaan rupiah)

[illegible]

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
LAPORAN LABA RUGI UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

No	Perusahaan Negara	Status Laporan	Pendapatan Usaha	HPP dan Bahan Usaha	Laba (Rugi) Usaha	Pendapatan Lain-Lain	Bahan Lain-Lain	Laba (Rugi) Sebelum Bunga dan Pajak	Beban Bunga	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Beban (Manfaat) Pajak	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Pendapatan (Beban) Komprehensif	Laba (Rugi) Komprehensif	Laba (Rugi) Tahun Berjalan Diatribusikan kepada Entitas Pengendali	Laba (Rugi) Komprehensif Diatribusikan kepada Entitas Pengendali
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7 = 5 - 6)	(8)	(9)	(10 = 7 + 8 - 9)	(11)	(12 = 10 - 11)	(13)	(14 = 12 - 13)	(15)	(16 = 14 + 15)	(17)	(18)
Persero																
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	Audited	7.980.283.957.363	5.443.058.822.075	2.537.227.135.288	88.767.403.843	21.836.990.756	2.604.157.548.175	-	2.604.157.548.175	374.011.178.915	2.230.146.369.260	(160.391.988.176)	2.069.754.381.084	2.230.146.369.260	2.069.754.381.084
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Audited	1.488.930.586.000	544.905.230.000	942.025.356.000	-	-	942.025.356.000	-	942.025.356.000	11.145.678.000	930.879.678.000	(53.941.163.000)	876.938.515.000	930.879.678.000	876.938.515.000
3	PT Sarana Multi griya Finansial	Audited	2.869.117.000.000	2.201.805.000.000	667.312.000.000	-	-	667.312.000.000	-	667.312.000.000	127.478.000.000	539.834.000.000	(4.236.000.000)	535.598.000.000	539.834.000.000	535.598.000.000
4	PT Geo Dipa Energi	Audited	1.161.794.362.577	818.931.235.714	342.863.126.863	64.394.475.429	13.423.062.328	393.834.539.964	-	393.834.539.964	120.906.627.004	272.927.912.960	4.026.425.373	276.954.338.333	272.927.912.960	276.954.338.333
5	PT Bina Karya	Audited	29.240.394.786	54.045.076.959	(24.804.682.173)	9.730.772.180	7.191.418.112	(22.265.328.105)	-	(22.265.328.105)	-	(22.265.328.105)	1.356.582.183	(20.908.745.922)	(22.265.328.105)	(20.908.745.922)
Total Persero			13.527.366.300.726	9.062.743.364.748	4.464.622.935.978	162.892.651.252	42.451.471.196	4.585.064.116.034	-	4.585.064.116.034	633.541.483.919	3.951.522.632.115	(213.186.143.620)	3.738.336.488.495	3.951.522.632.115	3.738.336.488.495
Badan Usaha Lainnya																
1	PT Tuban Petrochemical Industries	Audited	5.397.960.000.000	5.100.646.000.000	297.214.000.000	1.262.722.000.000	222.964.000.000	1.356.972.000.000	-	1.356.972.000.000	75.690.000.000	1.281.282.000.000	511.753.000.000	1.793.035.000.000	1.281.281.000.000	1.793.034.000.000
2	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Audited	3.653.685.000.000	3.635.189.000.000	18.496.000.000	63.420.000.000	-	61.916.000.000	-	61.916.000.000	(150.609.000.000)	232.525.000.000	(1.362.000.000)	231.163.000.000	232.525.000.000	231.163.000.000
3	Lembaga Pengelola Investasi	Audited	5.911.500.000.000	1.024.893.000.000	4.886.607.000.000	31.871.000.000	-	4.918.568.000.000	-	4.918.568.000.000	(505.221.000.000)	5.423.789.000.000	(11.607.243.000.000)	(6.183.454.000.000)	5.423.789.000.000	(6.183.454.000.000)
Total Badan Usaha Lainnya			14.963.045.000.000	9.760.638.000.000	5.202.407.000.000	1.378.013.000.000	222.964.000.000	6.357.456.000.000	-	6.357.456.000.000	(580.140.000.000)	6.937.596.000.000	(11.096.852.000.000)	(4.159.256.000.000)	6.937.595.000.000	(4.159.257.000.000)
Jumlah			28.490.411.300.726	18.823.381.364.748	9.667.029.935.978	1.540.905.651.252	265.415.471.196	10.942.520.116.034	-	10.942.520.116.034	53.401.483.919	10.889.118.632.115	(11.310.038.143.620)	(420.919.511.505)	10.889.117.632.115	(420.920.511.505)

PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN
NERACA PER 31 DESEMBER 2024

No.	Perusahaan Negara	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Total Aset	Liabilitas Jangka Pendek	Liabilitas Jangka Panjang	Total Liabilitas	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS	Ekuitas Lain	Saldo Laba (Rugi)	Ekuitas yang Didistribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas	Saham Negara (%)	Kepemilikan Negara
(1)	(2)	(3)	(4)	(7 = 3 + 4)	(5)	(6)	(10 = 5 + 6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16 = 13 + 12 + 14 + 15)	(17)	(18 = 16 - 17)	(19)	(20 = 18 + 19)
Persero																	
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	-	-	120.070.036.038.785	-	-	76.258.815.684.038	30.516.600.000.000	-	-	40.640.007.805	13.253.960.348.942	43.811.220.354.747	-	43.811.220.354.747	100,00	43.811.220.354.747
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	-	-	16.988.521.688.000	-	-	315.947.966.000	10.695.000.000.000	-	-	88.915.083.000	5.928.658.610.000	16.672.573.693.000	-	16.672.573.693.000	100,00	16.672.573.693.000
3	PT Sarana Multiwaya Finansial	-	-	58.138.498.000.000	-	-	37.578.528.000.000	14.320.000.000.000	-	-	1.869.165.000.000	4.360.405.000.000	20.559.960.000.000	-	20.559.960.000.000	100,00	20.559.960.000.000
4	PT Gas Diga Energi	1.408.880.551.361	6.399.046.562.016	7.807.927.113.377	545.435.029.154	2.686.167.877.090	3.211.602.906.244	3.975.443.770.000	-	-	(26.523.517.218)	647.403.954.351	4.596.324.207.133	-	4.596.324.207.133	94,50	4.343.727.362.817
5	PT Bina Karya	-	-	56.587.469.451	-	-	86.082.134.488	15.000.000.000	-	-	3.491.850.091	(47.967.015.126)	(29.475.165.035)	500.000	(29.474.665.035)	100,00	-
Total Persero		1.408.880.551.361	6.399.046.562.016	203.061.569.280.613	545.435.029.154	2.686.167.877.090	117.450.956.690.768	59.492.043.770.000	-	-	1.996.098.423.678	24.122.460.895.167	85.610.603.089.845	500.000	85.610.603.589.845	495	85.367.481.410.564
Badan Usaha Lainnya																	
6	PT Tuban Petrochemical Industries	5.576.169.000.000	7.191.582.000.000	12.767.751.000.000	1.951.973.000.000	1.688.413.000.000	3.640.386.000.000	7.841.307.000.000	309.290.000.000	-	976.752.000.000	-	9.127.349.000.000	16.000.000	9.127.365.000.000	35,23	3.215.436.945.568
7	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	-	-	40.112.997.000.000	-	-	35.120.367.000.000	42.802.431.000.000	-	-	125.394.000.000	(28.735.196.000.000)	13.992.629.000.000	1.000.000	13.992.630.000.000	100,00	13.992.629.000.000
8	Lembaga Pengelola Investasi	-	-	110.622.230.000.000	-	-	3.275.745.000.000	75.000.000.000.000	-	-	23.963.171.000.000	8.863.394.000.000	107.546.475.000.000	-	107.546.475.000.000	100,00	107.546.475.000.000
Total Badan Usaha Lainnya		5.576.169.000.000	7.191.582.000.000	12.767.751.000.000	1.951.973.000.000	1.688.413.000.000	42.036.498.000.000	125.443.738.000.000	309.290.000.000	-	24.765.317.000.000	(19.851.802.000.000)	130.666.463.000.000	17.000.000	130.666.470.000.000	235	124.754.540.945.568
Jumlah		6.985.049.551.361	13.590.628.562.016	375.764.529.280.613	2.497.408.029.154	4.354.580.877.090	159.487.454.690.768	184.935.781.770.000	309.290.000.000	-	25.761.415.423.678	4.270.568.895.167	216.277.056.089.845	17.500.000	216.277.073.589.845		210.142.022.356.132

**LAPORAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL**

No	Institusi	Penyertaan Modal Pemerintah			Surat hutang		
			Mata Uang Asing	IDR	Utang dalam MUA	Utang dalam IDR	
	A. PMN pada Lembaga Keuangan Internasional						
1	Asian Development Bank (ADB)	SDR	289.100.000	6.071.724.791.356			
	World Bank Group						
2	International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)	USD	249.898.720	4.037.613.618.555			
3	International Development Association (IDA)	USD	127.990.817	2.067.947.630.222			(5.237.901.545)
4	International Finance Corporation (IFC)	USD	309.305.000	4.997.440.885.000			
5	Multilateral Investment and Guarantee Agency (MIGA)	USD	3.797.820	61.361.377.740	USD	1.135.018	(18.338.485.826)
6	Bank Pembangunan Islam (IDB)	ID	241.205.452	5.065.835.782.925			
7	International Islamic Trade finance Corporation (ITFC)	USD	2.060.000	33.283.420.000			
8	The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit	ID	246.693	5.181.089.713			
9	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	USD	91.959.000	1.485.781.563.000			
10	Common Fund for Commodities (CFC) EUR 223.450 (Sept 2017)	EUR	223.450	20.382.990.680	EUR	223.450	(3.759.029.144)
		USD	1.028.901				
11	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	22.242.517	359.372.347.169			
12	Credit Guarantee and Investment Facility	USD	30.600.000	494.404.200.000			
13	Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	USD	672.100.000	10.859.119.700.000			
	Jumlah			35.559.449.396.361			(27.335.416.515)
	B. PMN Lainnya						
14	ASEAN Infrastructure Fund	USD	120.000.000	1.938.840.000.000			
15	International Rubber Consortium Limited	USD	4.000.000	64.628.000.000			
	Jumlah		-	2.003.468.000.000			-
	Jumlah		-	37.562.917.396.361	-	-	(27.335.416.515)

1. Kurs ID = kurs Islamic Dinar. Kurs ID sama dengan kurs SDR

2. Kurs Special Drawing Right (SDR); SDR1 = USD 1,29988

3. Kurs Euro to IDR 16.822,67

4. Kurs USD to IDR Rp 16.157

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit Operasional	Penghasilan Komprehensif Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi <i>Outstanding</i>	Saldo Akhir Nilai Investasi <i>Outstanding</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
31 Desember 2024	4.000.000.000.000	27.424.045.657.000	12.152.314.000	211.972.301.807.000	239.408.499.778.000

REALISASI PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Alokasi Pembiayaan Anggaran		DIPA 2024	Realisasi Tunai s.d. 31 Desember 2024	Persentase Realisasi
PEMBIAYAAN ANGGARAN UAP BUN INVESTASI PEMERINTAH		(97.880.003.731.764)	(60.791.578.681.665)	62,11%
1 PEMBIAYAAN INVESTASI		(96.421.017.731.764)	(59.332.592.681.665)	61,50%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		-	22.888.424.941.857	-
1	Penerimaan pembiayaan dari UAP DJPK	-	4.084.647.335.605	
2	Penerimaan pembiayaan dari BPJT	-	3.268.707.260.033	
3	Penerimaan pembiayaan dari UAKPA KBUMN	-	218.750.000.000	
4	Penerimaan pembiayaan dari UAKPA BLU BPD LH	-	322.114.659.182	
5	Penerimaan Pembiayaan dari UAKPA BLU LMAN	-	14.994.205.687.037	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		(96.421.017.731.764)	(82.221.017.623.522)	85,27%
I Investasi Klaster Infrastruktur		(59.515.000.000.000)	(51.014.999.997.857)	85,72%
1	PMN kepada PT Utama Karya (Persero)	(19.604.000.000.000)	(18.604.000.000.000)	94,90%
2	PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	(1.891.000.000.000)	(1.891.000.000.000)	100,00%
3	PMN kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	(6.000.000.000.000)	(5.999.999.997.857)	100,00%
4	Investasi kepada BLU LMAN	(15.000.000.000.000)	(7.500.000.000.000)	50,00%
5	Investasi Pemerintah Program FLPP	(17.020.000.000.000)	(17.020.000.000.000)	100,00%
II Investasi Klaster Pendidikan		(15.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	100,00%
1	Dana Abadi Pendidikan	(15.000.000.000.000)	(15.000.000.000.000)	100,00%
III Investasi Klaster Lingkungan Hidup		(1.212.670.000.000)	(512.670.000.000)	42,28%
1	Investasi kepada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)	(1.212.670.000.000)	(512.670.000.000)	42,28%
IV Investasi Klaster Kerja Sama Internasional		(2.023.117.731.764)	(2.023.117.731.764)	100,00%
1	Investasi kepada LKI	(1.984.501.866.764)	(1.984.501.866.764)	100,00%
	International Fund for Agricultural Development (IFAD)	(63.068.000.000)	(63.068.000.000)	100,00%
	International Development Association (IDA)	(326.792.480.000)	(326.792.480.000)	100,00%
	Islamic Development Bank (IsDB)	(1.594.641.386.764)	(1.594.641.386.764)	100,00%
2	Investasi kepada Badan Layanan Umum Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) (Saldo Kas BLU)	(38.615.865.000)	(38.615.865.000)	100,00%
V Investasi Klaster Lainnya		(18.670.230.000.000)	(13.670.229.893.901)	73,22%
1	PMN kepada PT Len Industri (Persero) (Non Tunai)	(649.230.000.000)	(649.229.893.901)	100,00%
2	PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	(3.556.000.000.000)	(3.556.000.000.000)	100,00%
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(2.000.000.000.000)	(2.000.000.000.000)	100,00%
4	PMN kepada PT Industri Kereta Api (Persero)	(965.000.000.000)	(965.000.000.000)	100,00%
5	PMN kepada PT Pelayaran Indonesia (Perseo)	(1.500.000.000.000)	(1.500.000.000.000)	100,00%
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	(10.000.000.000.000)	(5.000.000.000.000)	50,00%
2 Kewajiban Penjaminan		(1.458.986.000.000)	(1.458.986.000.000)	100,00%
I Penjaminan Pemerintah		(1.458.986.000.000)	(1.458.986.000.000)	100,00%
1	Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional	(823.986.000.000)	(823.986.000.000)	100,00%
	Penjaminan Infrastruktur dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur	(681.543.000.000)	(681.543.000.000)	100,00%
	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara	(55.492.000.000)	(55.492.000.000)	100,00%
	Percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera	(25.444.000.000)	(25.444.000.000)	100,00%
	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW (Infrastruktur Ketenagalistrikan)	(61.507.000.000)	(61.507.000.000)	100,00%

PENJELASAN MUTASI LAIN-LAIN PERUSAHAAN NEGARA (BUMN)

No.	BUMN	Saldo Ekuitas pada LKPN 2023	Laba Bersih	OCI Non Reval	OCI Reval	Laba Komprehensif	Dividen	PMN	Mutasi Ekuitas	ILKPN 2023 + Mutasi Ekuitas	Saldo Ekuitas	Selisih
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=7+8+9	11=3+10	12	13=12-11
	Persero											
1	PT Sarana Multi Infrastruktur	42.261.465.973.664	2.230.146.369.260	(160.391.988.176)	-	2.069.754.381.084	(520.000.000.000)	-	1.549.754.381.084	43.811.220.354.748	43.811.220.354.747	(1)
2	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	15.962.800.178.000	930.879.678.000	(53.941.163.000)	-	876.938.515.000	(167.165.000.000)	-	709.773.515.000	16.672.573.693.000	16.672.573.693.000	-
3	PT Sarana Multigriya Finansial	18.231.142.000.000	539.834.000.000	(4.236.000.000)	-	535.598.000.000	(97.780.000.000)	1.891.000.000.000	2.328.818.000.000	20.559.960.000.000	20.559.960.000.000	-
4	PT Geo Dipa Energi	4.102.656.727.593	257.928.812.280	3.805.148.044	-	261.733.960.324	(20.663.325.100)	-	241.070.635.224	4.343.727.362.817	4.343.727.362.817	(0)
	Total Persero	80.558.064.879.257	3.958.788.859.540	(214.764.003.132)	-	3.744.024.856.408	(805.608.325.100)	1.891.000.000.000	4.829.416.531.308	85.387.481.410.565	85.387.481.410.564	(1)
	Badan Usaha Lainnya											
5	PT Tuban Petrochemical Industries	2.582.402.670.566	451.377.312.849	181.656.962.154	-	633.034.275.003	-	-	633.034.275.003	3.215.436.945.568	3.215.436.945.568	-
6	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	8.761.466.000.000	232.525.000.000	(1.362.000.000)	-	231.163.000.000	-	5.000.000.000.000	5.231.163.000.000	13.992.629.000.000	13.992.629.000.000	-
7	Lembaga Pengelola Investasi	113.729.929.000.000	5.423.789.000.000	(11.607.243.000.000)	-	(6.183.454.000.000)	-	-	(6.183.454.000.000)	107.546.475.000.000	107.546.475.000.000	-
	Total Lembaga/Badan Usaha Lainnya	125.073.797.670.566	6.107.691.312.849	(11.426.948.037.846)	-	(5.319.256.724.997)	-	5.000.000.000.000	(319.256.724.997)	124.754.540.945.568	124.754.540.945.568	-
	JUMLAH	205.631.862.549.823	10.066.480.172.389	(11.641.712.040.978)	-	(1.575.231.868.589)	(805.608.325.100)	6.891.000.000.000	4.510.159.806.311	210.142.022.356.134	210.142.022.356.132	(1)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BANK INDONESIA

Status laporan	Nilai Awal Investasi Pemerintah	Surplus/Defisit TAB	Selisih Revaluasi		Kenaikan Investasi dari Selisih Revaluasi	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
			Saldo Periode Ini	Saldo Periode Lalu				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(7)=(2)+(5)+(6)+(7)
31 Desember 2024	3.726.349.000.000	52.192.065.688.526	105.851.405.732.722	85.208.328.394.931	20.643.077.337.791	(135.561)	401.109.298.000.000	473.944.440.890.756

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BPJS

BPJS	Status laporan	Saldo Awal Nilai Investasi Awal	Perolehan/ Penambahan Investasi	Penghasilan/Rugi Operasional	Kontribusi Kepada Program DJS	Delta Saldo Selisih Transaksi dengan Kepentingan Non Pengendali	Penghasilan/Rugi Komprehensif Lain	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)
BPJS Ketenagakerjaan	31 Desember 2024	7.313.062.079.771	-	277.711.649.297	-	-	(185.706.359.100)	12.440.541.271.726	12.532.546.561.923
BPJS Kesehatan	31 Desember 2024	9.649.555.725.127	-	254.516.322.708	-	-	37.655.580.924	10.289.025.406.713	10.581.197.310.345

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PTNBH

Investee	Status Laporan	Nilai Kekayaan Awal	Koreksi Nilai Kekayaan Awal	Surplus/(Defisit) Aktivitas	Surplus/(Defisit) Aktivitas untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/Penurunan Investasi dari aktivitas	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Pendapatan Komprehensif Lainnya untuk Kepentingan Non-Pengendali	Kenaikan/Penurunan Investasi dari Pend. Komp. Lainnya	Saldo Awal Nilai Investasi Outstanding	Saldo Akhir Nilai Investasi Outstanding
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)	(9)	(10)=(2)+(5)+(8)+(9)
Institut Pertanian Bogor	2024 Unaudited	2.065.425.950.255	-	102.793.748.899	-	102.793.748.899	(22.430.793.361)	-	(22.430.793.361)	2.910.480.548.431	2.990.843.503.969
Universitas Airlangga	2024 Audited	1.580.878.299.810	-	206.207.862.838	480.040.512	205.727.822.326	(856.491.270)	-	(856.491.270)	3.386.481.519.574	3.591.352.850.630
Institut Teknologi Bandung	2024 Audited	1.480.261.453.553	-	75.842.775.319	97.738.482	75.745.036.837	(7.509.133.325)	(286.660.073)	(7.222.473.252)	2.137.070.933.465	2.205.593.497.050
Universitas Indonesia	2024 Audited	3.391.030.031.348	-	198.226.754.815	-	198.226.754.815	(1.801.771.480)	-	(1.801.771.480)	4.791.021.213.806	4.987.446.197.141
Universitas Gajah Mada	2024 Audited	2.732.049.610.116	-	233.937.308.883	455.492.941	233.481.815.942	(2.877.166.147)	-	(2.877.166.147)	4.459.932.986.932	4.690.537.636.727
Universitas Pendidikan Indonesia	2024 Audited	1.260.368.332.545	-	196.044.927.310	(17.777.763)	196.062.705.073	(663.613.772)	-	(663.613.772)	1.142.149.933.752	1.337.549.025.053
Universitas Sumatera Utara	2024 Audited	1.914.901.341.726	-	74.097.024.894	-	74.097.024.894	2.322.083.832	-	2.322.083.832	1.898.360.166.970	1.974.779.275.696
Universitas Padjadjaran	2024 Audited	1.332.124.751.039	-	42.332.181.424	-	42.332.181.424	(4.127.500.282)	-	(4.127.500.282)	1.346.990.132.122	1.385.194.813.264
Universitas Diponegoro	2024 Draft Audited	1.782.365.799.939	-	379.280.078.097	-	379.280.078.097	38.112.617.013	-	38.112.617.013	4.086.012.209.150	4.503.404.904.260
Universitas Hassanudin	2024 Audited	2.046.177.096.397	-	162.072.441.085	21.971.828	162.050.469.257	(668.687.471)	-	(668.687.471)	2.492.172.787.826	2.653.554.569.612
Institut Teknologi Sepuluh Nopember	2024 Draft Audited	949.575.199.295	-	143.864.190.261	583.611.408	143.280.578.853	2.418.453.110	648.301	2.417.804.809	1.879.170.650.603	2.024.869.034.265
Universitas Negeri Sebelas Maret	2024 Audited	1.520.066.455.977	-	116.511.314.314	(150.381)	116.511.464.695	(44.053.938.404)	-	(44.053.938.404)	1.706.907.381.088	1.779.364.907.379
Universitas Negeri Malang	2024 Unaudited	1.846.612.548.097	-	187.731.751.565	-	187.731.751.565	-	-	-	1.954.637.430.081	2.142.369.181.646
Universitas Andalas	2024 Unaudited	1.493.595.705.524	-	124.629.593.520	-	124.629.593.520	(2.142.682.645)	-	(2.142.682.645)	1.278.810.808.160	1.401.297.719.035
Universitas Brawijaya	2024 Audited	3.422.807.945.353	-	211.435.185.277	-	211.435.185.277	(202.942.299)	-	(202.942.299)	3.610.213.266.894	3.821.445.509.872
Universitas Negeri Padang	2024 Unaudited	1.846.612.548.097	-	77.701.820.804	-	77.701.820.804	(32.174.830.703)	-	(32.174.830.703)	1.358.228.340.297	1.403.755.330.398
Universitas Syiah Kuala	2024 Audited	1.532.599.687.465	-	58.435.225.382	-	58.435.225.382	3.226.865.777	-	3.226.865.777	1.528.961.186.361	1.590.623.277.520
Universitas Terbuka	2024 Audited	3.552.533.805.610	-	128.336.585.204	-	128.336.585.204	(432.580.785.377)	-	(432.580.785.377)	3.675.028.228.668	3.370.784.028.495
Universitas Negeri Surabaya	2024 Unaudited	1.677.983.220.365	-	212.034.642.910	12.275.515	212.022.367.395	(96.959.776)	-	(96.959.776)	1.765.447.318.340	1.977.372.725.959
Universitas Negeri Yogyakarta	2024 Unaudited	1.373.142.652.142	-	282.685.189.529	-	282.685.189.529	(25.668.295.015)	-	(25.668.295.015)	1.452.469.064.422	1.709.485.958.936
Universitas Negeri Semarang	2024 Unaudited	1.708.859.618.819	-	172.670.692.798	-	172.670.692.798	(29.919.587.412)	-	(29.919.587.412)	1.868.130.629.320	2.010.881.734.706

Catatan: Dalam hal terdapat perbedaan, maka angka yang dirujuk adalah data yang tersaji dalam Laporan Keuangan pada masing-masing entitas.

MUTASI REK LAIN BI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN MIGAS

Uraian	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)		31 Desember 2023 (<i>Audited</i>)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	94,982,920	1.466.441	231,869,843	3.615.315
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PNPB SDA Migas dan PNPB Lainnya	3,369,269,620	53.610.034	2,913,888,069	44.321.477
2. Koreksi Pembukuan Kredit oleh BI			248,834	3.743
3. Penerimaan Lain-lain	36,172,466	586.645	26,141,048	407.692
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening			60,974	915
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit	-	3.778.394	-	3.146.519
Total Penerimaan	3,405,442,086	57.975.073	2,940,338,925	47.880.345
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. PBB Migas ke DJP	542,513,135	8.377.866	688,151,897	10.634.943
b. Pajak Penerangan Jalan Non PLN & ABT ke Pemda	1,148,723	17.989	1,129,124	17.168
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
· Pendapatan dari PNPB SDA Migas	457,721,301	7.129.748	-	-
· Pendapatan dari PNPB Migas Lainnya	816,347	13.126	1,724,999	26.593
Subtotal Pengeluaran Berkaitan dengan APBN/APBD	1,002,199,505	15.538.728	691,006,020	10.678.704
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
· Pembayaran Reimbursement PPN KKKS	580,978,473	9.108.884	553,746,492	8.434.215
· Pembayaran DMO Fee KKKS	534,349,150	8.498.254	590,228,339	9.038.476
· Pembayaran Underlifting KKKS	872,881,122	13.868.266	1,166,938,344	17.885.297
· Pembayaran Fee Penjual Migas	31,557,958	487.333	74,996,844	1.131.671
Subtotal Pengeluaran Non APBN/APBD	2,019,766,702	31.962.737	2,385,910,019	36.489.658
3. Koreksi Pembukuan Debit oleh BI			248,834	3.743
4. Retur/Pengembalian karena Salah Rekening			60,974	936
5. Pengeluaran Lainnya	6,656,188	107.131	0	-
6. Selisih Koreksi Kurs Pembukuan Debit		4.210.002	0	2.856.178
Total Pengeluaran	3,028,622,395	51.818.599	3,077,225,847	50.029.218
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	376,819,691	6.156.473	(136,886,922)	(2.148.873)
V. Saldo Akhir (I + IV)	471,802,611	7.622.915	94,982,920	1.466.441

MUTASI REK LAIN BI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PANAS BUMI

Uraian	31 Desember 2024 (<i>Audited</i>)	31 Desember 2023 (<i>Audited</i>)
I. Saldo Awal	1.912.870.273.099	1.588.329.504.770
II. Penerimaan:		
1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	3.610.596.954.925	3.727.920.311.039
2. Koreksi Pembukuan Kredit	-	-
Total Penerimaan	3.610.596.954.925	3.727.920.311.039
III. Pengeluaran:		
1. Pembayaran PBB Panas Bumi	447.695.185.254	439.988.647.320
2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi	179.482.201.175	175.871.851.026
3. Pembayaran penggantian bonus produksi kepada pengusaha Pabum	106.361.907.803	93.180.322.346
4. Pemindahbukuan PNBPNP Pengusahaan Panas Bumi ke Rek. KUN	2.707.210.760.839	2.694.338.722.018
5. Koreksi Pembukuan debit	-	-
Total Pengeluaran	3.440.750.055.071	3.403.379.542.710
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	169.846.899.854	324.540.768.329
V. Saldo Akhir (I + IV)	2.082.717.172.953	1.912.870.273.099

DAFTAR PINJAMAN ISDB CLOSING DATE (SELESAI) DAN ON GOING (MASIH BERJALAN)

No.	No Referensi	Nama Proyek	Modalitas	Kementerian / Lembaga	No Register	Loan Id	Tanggal Penandatanganan Perjanjian	Tanggal Batas Penarikan	Mata Uang	Nilai Komitmen	Pembatalan (Cancellation)	Penarikan	Pembayaran	Saldo Utang (Outstanding)	Tatacara Penarikan
Pinjaman closing date di 2024															
1	IDN-1012	Development of Trans South-South Java Road Project	Service Ijarah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1SMHNP	20999016	16 May 2017	3 Feb 2024	USD	15.000.000,00	4.178.350,56	10.821.649,44	541.082,47	10.280.566,97	Pembayaran Langsung
2	IDN-1012	Development of Trans South-South Java Road Project	Istisna'a	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1NQ47EHA	20999017	16 May 2017	2 Feb 2024	USD	235.000.000,00	36.674.350,44	198.325.649,56	9.916.282,48	188.409.367,08	Pembayaran Langsung
Pinjaman on going															
1	IDN-1024	The Development of Integrated Farming Systems in Upland Areas	ISFD Loan	Kementerian Pertanian	1P4VGA4A	20999018	15 Jan 2020	31 Dec 2026	USD	4.000.000,00		846.837,00		846.837,00	Rekening Khusus
2	IDN-1024	The Development of Integrated Farming Systems in Upland Areas	Installment Sale	Kementerian Pertanian	1FXSV52A	20999019	15 Jan 2020	31 Dec 2026	USD	66.000.000,00		33.536.303,00		33.536.303,00	Rekening Khusus
3	IDN-1031	Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospitals, and Vertical Technical Units-6in1 Referral Hospital	Installment Sale	Kementerian Kesehatan	1NAPT2PA	20999020	8 Dec 2020	19 Jun 2026	USD	12.153.000,00		3.064.877,23 637.699,65 2.427.177,58		3.064.877,23	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Rekening Khusus Pembayaran Langsung
4	IDN-1031	Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospitals, and Vertical Technical Units-6in1 Referral Hospital	Installment Sale	Kementerian Kesehatan	17AFHX	20999021	8 Dec 2020	30 Sep 2026	USD	154.239.000,00		151.566.276,29 - 151.566.276,29		151.566.276,29	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Rekening Khusus Pembayaran Langsung
5	IDN-1031	Strengthening of National Referral Hospitals, Province Referral Hospitals, and Vertical Technical Units-6in1 Referral Hospital	Installment Sale	Kementerian Kesehatan	1SF4H9CA	20999022	8 Dec 2020	29 Aug 2027	USD	95.326.000,00		47.665.274,30 - 47.665.274,30		47.665.274,30	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Rekening Khusus Pembayaran Langsung
6	IDN-1053	Development of Trans South-South Java Road Project Phase II	Installment Sale	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1QJNFXTA	20999023	4 Jun 2022	22 Sep 2027	USD	150.000.000,00		47.658.774,47		47.658.774,47	Pembayaran Langsung
7	IDN-1054	Strengthening of National Referral Hospital on Oncology Center	Ijarah	Kementerian Kesehatan	15A3839A	20999024	8 Feb 2023	22 Aug 2028	EUR	205.002.000,00		38.449.385,29 803.666,35 37.645.718,94		38.449.385,29	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus Rekening Khusus Pembayaran Langsung
8	IDN-1055	Integrated Fishing Ports and International Fish Markets	Ijarah	Kementerian Kelautan dan Perikanan	144HG51A	20999025	8 Feb 2023	26 Feb 2028	EUR	100.000.000,00		832.147,62		832.147,62	Pembayaran Langsung
9	IDN-1070	Strengthening Indonesia's Health Care Referral Network	Installment Sale	Kementerian Kesehatan	1CHPFTXA	20999026	31 Jan 2024	27 Aug 2029	EUR	803.300.000,00		369.331,40		369.331,40	Pembayaran Langsung dan Rekening Khusus

RINCIAN PORTOFOLIO KEWAJIBAN PENJAMINAN AKTIF PER PROGRAM PENJAMINAN

No	Rincian Program Penjaminan Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur	Pihak Terjamin	Penerima Jaminan	Jumlah Dokumen Penjaminan	Rentang Tenor (Tahun)	Nilai Penjaminan Kredit/Investasi (miliar)		Posisi <i>Outstanding Kredit/ Exposure</i> Investasi (miliar)	
						Original Curr.	Eq. IDR	Original Curr.	Eq. IDR
1	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara (Proyek 10.000 MW Tahap I)	PT PLN (Persero)	Perbankan	3	10 s.d. 13	IDR 4.674,96	IDR 14.140,10	IDR 755,35	IDR 1.186,28
						USD 0,63		USD 0,03	
2	Penyediaan Air Minum	PDAM	Perbankan	6	9 s.d. 10	IDR 338,72	IDR 338,72	IDR 175,61	IDR 175,61
3	Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada BUMN	BUMN	Lembaga Keuangan Internasional	14	15 s.d. 35	USD 4,15	IDR 80.302,17	USD 1,67	IDR 41.502,85
						EUR 1,04		EUR 0,49	
						JPY 0,00		JPY 75,77	
4	Pembangunan Jalan Tol di Sumatera	PT HK (Persero)	Lembaga Keuangan dan Wali Amanat	8	5 s.d. 25	IDR 38.870,00	IDR 47.952,80	IDR 17.407,54	IDR 26.490,34
						USD 0,60		USD 0,60	
5	Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)	PT PLN (Persero)	Pengembang Listrik Swasta	7	15 s.d. 20	USD 3,95	IDR 59.823,21	USD 3,99	IDR 60.363,10
6	Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur dengan skema KPBU)	PJPK	Badan Usaha	7	15 s.d. 21	IDR 68.536,14	IDR 132.780,30	IDR 44.916,15	IDR 102.687,41
						USD 4,24		USD 3,82	
7	Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah kepada BUMN	Pemda	PT SMI (Persero)	1	5 s.d. 9	IDR 3.702,90	IDR 3.702,90	IDR 883,69	IDR 883,69
8	Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	15 s.d. 18	IDR 23.419,13	IDR 23.419,13	IDR 22.414,12	IDR 22.414,12
9	Penyelenggaraan Kereta Cepat Jakarta Bandung	PT KAI (Persero)	Perbankan	1	40 s.d. 45	USD 0,54	IDR 8.215,39	USD 0,45	IDR 6.782,96
10	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	PT PLN (Persero)	Perbankan	4	10 s.d. 10	IDR 15.173,79	IDR 115.084,59	IDR 9.809,13	IDR 86.168,61
			Pengembang Listrik Swasta	2	15 s.d. 20	USD 6,60		USD 5,04	
Total				54		IDR 154.715,64	IDR 485.759,31	IDR 96.362,04	IDR 348.654,97
						USD 20,71		USD 15,59	
						EUR 1,04		EUR 0,49	
						JPY 0,00		JPY 75,77	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)	Keterangan	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)-(8)	(11)	(10)
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)			-			-	-	Bagian Satker	007
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)			-			-	-	Bagian Satker	050
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	173	978.087	978.260	71.022.653	-	71.022.653	(70.044.393)	Satker	026
4	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	823.680	12.823	836.503	23.824.331	-	23.824.331	(22.987.828)	Satker	040
5	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	38.714.646	18.278	38.732.925	37.134.994	157.263	37.292.257	1.440.668	Satker	040
6	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)	15.000.000	17.073.197	32.073.197	15.000.000	25.263.709	40.263.709	(8.190.512)	Bagian Satker	025
7	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	2.685.149.933	1.766.156	2.686.916.089	230.218.145	62.849	230.280.994	2.456.635.095	Satker	020
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	36.672	36.672	20.758.478	-	20.758.478	(20.721.805)	Satker	090
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)			-			-	-	Bagian Satker	088
10	Badan Promosi Pariwisata Indonesia			-			-	-	Bagian Satker	040
11	Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM)	11.728	118.928	130.656	238.133.059	310.713.668	548.846.727	(548.716.072)	Satker	029
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	-	106.732	106.732	57.243.480	2	57.243.482	(57.136.750)	Satker	020
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	-	37.918	37.918	13.813.231	-	13.813.231	(13.775.313)	Satker	036
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintang dan Karimun	5.937	136.412	142.349	188.164.080	3.957.698	192.121.778	(191.979.429)	Satker	999
15	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)			-			-	-	Bagian Satker	044
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	-	49.838	49.838	59.210.291	1.445	59.211.736	(59.161.898)	Satker	035
17	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	2.352.190	-	2.352.190	2.219.544	-	2.219.544	132.646	Bagian Satker	026
18	Dewan Pers	-	8.267	8.267	38.869.010	-	38.869.010	(38.860.743)	Satker	059
19	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)			-			-	-	Bagian Satker	010
20	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	-	-	-	33.363.995	-	33.363.995	(33.363.995)	Satker	007
21	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	-	-	19.055.299	-	19.055.299	(19.055.299)	Satker	033
22	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)			-			-	-	Bagian Satker	055
23	Komisi Banding Merek			-			-	-	Bagian Satker	013
24	Komisi Banding Paten			-			-	-	Bagian Satker	013
25	Komisi Informasi Pusat (KIP)	-	10.439	10.439	42.154.189	-	42.154.189	(42.143.750)	Satker	059
26	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)			-			-	-	Bagian Satker	043
27	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	-	-	-	15.480.318	-	15.480.318	(15.480.318)	Bagian Satker	034

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)	Keterangan	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)-(8)	(11)	(10)
28	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	-	-	-	18.169.670	-	18.169.670	(18.169.670)	Bagian Satker	034
29	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	-	10.317.655	10.317.655	3.693	8.114.533	8.118.226	2.199.429	Bagian Satker	074
30	Komite Nasional Disabilitas	-	-	-	6.863.268	-	6.863.268	(6.863.268)	Satker	027
31	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	-	52.125	52.125	57.294.730	9.896	57.304.626	(57.252.501)	Satker	059
32	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	12.340	12.340	13.614.459	-	13.614.459	(13.602.118)	Satker	047
33	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	48.433.000	-	48.433.000	40.328.319	-	40.328.319	8.104.681	Bagian Satker	084
34	Komite Cipta Kerja			-			-	-	Bagian Satker	035
35	Komite Penanganan Covid-19 dan PEN			-			-	-	Bagian Satker	035
36	Komite Nasional Geopark Indonesia			-			-	-	Bagian Satker	120
37	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)			-			-	-	Bagian Satker	012
38	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	-	-	-	496.576	-	496.576	(496.576)	Bagian Satker	078
39	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)			-			-	-	Bagian Satker	035
40	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	701	701	47.722.064	-	47.722.064	(47.721.363)	Satker	022
41	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)			-			-	-	Bagian Satker	015
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)			-			-	-	Bagian Satker	092
43	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	947.875	349.907	1.297.781	(1.297.781)	Bagian Satker	048
44	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan			-			-	-	Bagian Satker	035
45	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	-	3.250	3.250	3.770.833	-	3.770.833	(3.767.583)	Satker	015
46	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)			-			-	-	Bagian Satker	084
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)			-			-	-	Bagian Satker	035
48	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)			-			-	-	Satker	048
49	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (024_01_439505)			-			-	-	Satker	024
50	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)			-			-	-	Satker	024
51	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)			-			-	-	Bagian Satker	088
52	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.186.512	-	2.186.512	2.033.082	-	2.033.082	153.430	Bagian Satker	026
53	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)			-			-	-	Bagian Satker	026

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)	Keterangan	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)-(8)	(11)	(10)
54	Lembaga Sensor Film (LSF)	2.749.335	-	2.749.335	44.671.214	-	44.671.214	(41.921.878)	Satker	023
55	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)			-			-	-	Bagian Satker	024
56	Otoritas Nasional Senjata Kimia			-			-	-	Bagian satker	019
57	Sekretariat Pengadilan Pajak	3.036	462.589	465.625	85.964.379	-	85.964.379	(85.498.753)	Satker	015
58	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden			-			-	-	Bagian Satker	114
59	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19			-			-	-	Bagian satker	042
60	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)			-			-	-	Bagian Satker	088
61	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan			-			-	-	Bagian satker	007
62	Kantor Staf Presiden	-	38.349	38.349	109.035.120	-	109.035.120	(108.996.771)	Satker	007
63	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	1.323.802.394	-	1.323.802.394	1.235.186.654	-	1.235.186.654	88.615.740	Bukan Satker	025
64	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	10.000.000	58.744.574	68.744.574	60.792.740	1.714.629	62.507.370	6.237.204	Bukan Satker	025
65	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	6.600.000	83.541	6.683.541	7.504.261	125.220	7.629.481	(945.940)	Bukan Satker	007
66	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	26.928.688.894	298.373.009	27.227.061.903	25.931.760.820	4.731.751	25.936.492.571	1.290.569.332	Bukan Satker	025
67	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII			-			-	-	Bukan Satker	007
68	Otorita Asahan			-			-	-	Bukan Satker	019

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)	Keterangan	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)+(4)	(6)	(7)	(8) = (6)+(7)	(9) = (5)-(8)	(11)	(10)
69	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukan Satker)	8.376.892.162	233.401.560	8.610.293.722	8.097.361.772	-	8.097.361.772	512.931.950	Bukan Satker	999
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Satker) (999_08_984469)	-	388.377	388.377	75	117.480	117.555	270.822	Satker	999
70	SKK MIGAS (Satker) (999_08_999975)	4.924	229.134	234.058	1.759.603.101	-	1.759.603.101	(1.759.369.043)	Satker	999
	SKK MIGAS (Bukan Satker)	1.773.065.306	-	1.773.065.306	1.844.726.357	-	1.844.726.357	(71.661.052)	Bukan Satker	999
Jumlah		41.214.483.851	622.460.950	41.836.944.800	40.473.516.159	355.320.048	40.828.836.207	1.008.108.593		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA

LEMBAGA NON STRUKTURAL

DANA APBN DAN NON APBN

TAHUN 2024 AUDITED

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	APBN	Realisasi				Jumlah Realisasi	Sisa	Keterangan	BA
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Lain-Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (3)-(8)	(10)	(11)
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	7.887.022	-	7.886.916	-	-	7.886.916	106	Bagian Satker	007
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	2.834.812	-	2.834.812	-	-	2.834.812	-	Bagian Satker	050
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	80.415.697	9.060.090	58.553.377	1.378.517	-	68.991.983	11.423.714	Satker	026
4	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	26.631.400	6.665.462	15.067.923	2.008.594	-	23.741.979	2.889.421	Satker	040
5	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	41.651.395	5.511.653	27.875.745	4.636.100	-	38.023.499	3.627.896	Satker	040
6	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)	15.000.000	11.393.477	3.606.523	-	-	15.000.000	-	Bagian Satker	025
7	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	232.661.905	39.012.744	179.276.470	10.941.779	-	229.230.993	3.430.912	Satker	020
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	20.701.282	12.217.797	8.185.797	11.778	-	20.415.372	285.910	Satker	090
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)						-	-	Bagian Satker	088
10	Badan Promosi Pariwisata Indonesia						-	-	Bagian Satker	040
11	Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM)	888.903.313	18.294.050	512.261.824	5.823.059	-	536.378.933	352.524.380	Satker	029
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	56.735.740	21.680.272	34.628.444	149.600	-	56.458.316	277.424	Satker	020
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	12.687.514	-	11.194.669	-	-	11.194.669	1.492.845	Satker	036
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun	254.910.054	-	-	-	238.858.880	238.858.880	16.051.174	Satker	999
15	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)						-	-	Bagian Satker	044
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	68.985.254	6.604.126	49.971.198	6.416.645	-	62.991.970	5.993.284	Satker	035
17	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	2.352.190	-	-	-	2.219.644	2.219.644	132.546	Bagian Satker	026
18	Dewan Pers	45.437.740	3.385.832	34.727.556	1.297.813	-	39.411.201	6.026.539	Satker	059
19	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	750.443	-	748.007	-	-	748.007	2.436	Bagian Satker	010
20	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	36.103.469	3.208.485	29.030.278	59.635	-	32.298.398	3.805.071	Satker	007
21	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	21.000.165	154.394	18.232.684	452.352	-	18.839.430	2.160.735	Satker	033
22	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)	1.905.489	-	1.904.176	-	-	1.904.176	1.313	Bagian Satker	055
23	Komisi Banding Merek	1.646.910	-	420.000	425.600	-	845.600	801.310	Bagian Satker	013
24	Komisi Banding Paten						-	-	Bagian Satker	013
25	Komisi Informasi Pusat (KIP)	44.616.464	6.104.745	35.331.962	910.499	-	42.347.207	2.269.257	Satker	059
26	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)						-	-	Bagian Satker	043

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA

LEMBAGA NON STRUKTURAL

DANA APBN DAN NON APBN

TAHUN 2024 AUDITED

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	APBN	Realisasi				Jumlah Realisasi	Sisa	Keterangan	BA
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Lain-Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (3)-(8)	(10)	(11)
27	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	15.521.260	3.424.308	11.391.544	664.466	-	15.480.318	40.942	Bagian Satker	034
28	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	18.914.259	5.559.026	12.610.645	712.525	-	18.882.195	32.064	Bagian Satker	034
29	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	40.058.539	16.218.187	15.708.232	6.929.240	-	38.855.659	1.202.880	Bagian Satker	074
30	Komite Nasional Disabilitas	6.915.689	-	6.863.268	-	-	6.863.268	52.421	Satker	027
31	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	60.686.122	7.352.538	48.520.406	915.751	-	56.788.695	3.897.427	Satker	059
32	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	15.138.354	2.884.355	10.085.714	110.949	-	13.081.018	2.057.336	Satker	047
33	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	41.505.554	-	39.329.654	998.665	-	40.328.319	1.177.235	Bagian Satker	084
34	Komite Cipta Kerja						-	-	Bagian Satker	035
35	Komite Penanganan Covid-19 dan PEN						-	-	Bagian Satker	035
36	Komite Nasional Geopark Indonesia						-	-	Bagian Satker	120
37	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)						-	-	Bagian Satker	012
38	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	514.063	-	496.576	-	-	496.576	17.487	Bagian Satker	078
39	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)	17.578.236	-	14.858.194	-	-	14.858.194	2.720.042	Bagian Satker	035
40	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	47.201.018	11.891.938	34.056.995	61.956	-	46.010.890	1.190.128	Satker	022
41	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)						-	-	Bagian Satker	015
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	35.593.645	-	-	-	35.593.645	35.593.645	-	Bagian Satker	092
43	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	1.438.831	947.875	349.907	-	-	1.297.781	141.050	Bagian Satker	048
44	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan						-	-	Bagian Satker	035
45	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	3.995.358	-	3.772.247	-	-	3.772.247	223.111	Satker	015
46	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)						-	-	Bagian Satker	084
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	742.358	-	742.255	-	-	742.255	103	Bagian Satker	035
48	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)						-	-	Satker	048
49	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (024_01_439505)						-	-	Satker	024
50	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)						-	-	Satker	024
51	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)						-	-	Bagian Satker	088

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	APBN	Realisasi				Jumlah Realisasi	Sisa	Keterangan	BA
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Lain-Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (3)-(8)	(10)	(11)
52	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.186.512	-	-	-	2.033.082	2.033.082	153.430	Bagian Satker	026
53	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	1.693.766	-	930.697	-	-	930.697	763.069	Bagian Satker	026
54	Lembaga Sensor Film (LSF)	49.017.230	11.034.414	32.571.387	2.219.550	-	45.825.351	3.191.879	Satker	023
55	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)						-	-	Bagian Satker	024
56	Otoritas Nasional Senjata Kimia						-	-	Bagian satker	019
57	Sekretariat Pengadilan Pajak	89.059.044	54.571.773	27.509.712	3.519.349	-	85.600.834	3.458.210	Satker	015
58	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden	15.588.254	-	12.256.576	-	-	12.256.576	3.331.678	Bagian Satker	114
59	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19						-	-	Bagian satker	042
60	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)	850.000	-	-	-	786.008	786.008	63.992	Bagian Satker	088
61	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan						-	-	Bagian satker	007
62	Kantor Staf Presiden	120.995.820	45.306.170	57.310.754	14.386.302	-	117.003.226	3.992.594	Satker	007
63	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)						-	-	Bukan Satker	025
64	Badan Wakaf Indonesia (BWI)						-	-	Bukan Satker	025
65	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"						-	-	Bukan Satker	007
66	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)						-	-	Bukan Satker	025
67	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII						-	-	Bukan Satker	007
68	Otorita Asahan						-	-	Bukan Satker	019

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA
LEMBAGA NON STRUKTURAL
DANA APBN DAN NON APBN
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	APBN	Realisasi				Jumlah Realisasi	Sisa	Keterangan	BA
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Lain-Lain				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4)+(5)+(6)+(7)	(9) = (3)-(8)	(10)	(11)
69	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukan Satker)						-	-	Bukan Satker	999
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Satker) (999_08_984469)						-	-	Satker	999
70	SKK MIGAS (Satker) (999_08_999975)	1.824.551.524	-	-	-	1.773.065.306	1.773.065.306	51.486.218	Satker	999
	SKK MIGAS (Bukan Satker)						-	-	Bukan Satker	999
Jumlah		4.273.563.694	302.483.711	1.361.103.123	65.030.725	2.052.556.565	3.781.174.124	492.389.569		

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	Total Kewajiban	Total Ekuitas	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	Keterangan	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)					-			-	-	-	Bagian Satker	007
2	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)					-			-	-	-	Bagian Satker	050
3	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	1.343.779	-	40.717.428	8.687	42.069.894	-	-	-	42.069.894	42.069.894	Satker	026
4	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur	604.742	-	88.601.929	288.220	89.494.891	243.483	-	243.483	89.251.409	89.494.891	Satker	040
5	Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba	1.758.782	-	442.373.304	531.750	444.663.836	128.450	-	128.450	444.535.386	444.663.836	Satker	040
6	Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI)					-			-	-	-	Bagian Satker	025
7	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	152.760.110	-	308.147.681	2.887.406	463.795.197	7.477.898	-	7.477.898	456.317.299	463.795.197	Satker	020
8	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	-	-	199.614	246.800	446.414	-	-	-	446.414	446.414	Satker	090
9	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)					-			-	-	-	Bagian Satker	088
10	Badan Promosi Pariwisata Indonesia					-			-	-	-	Bagian Satker	040
11	Badan Restorasi Gambut Mangrove (BRGM)	3.760.863	-	14.625.734	26.476	18.413.073	1.868.513	-	1.868.513	16.544.560	18.413.073	Satker	029
12	Dewan Energi Nasional (DEN)	283.995	-	1.876.121	12.782	2.172.897	9.049	-	9.049	2.163.848	2.172.897	Satker	020
13	Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN)	140.504	-	320.138	248.658	709.301	293.988	-	293.988	415.313	709.301	Satker	036
14	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun	58.031	-	1.182.808.181	28.638.586	1.211.504.797	1.001.705	-	1.001.705	1.210.503.092	1.211.504.797	Satker	999
15	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)					-			-	-	-	Bagian Satker	044
16	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	111.994	-	9.801.099	562.941	10.476.035	395.322	-	395.322	10.080.713	10.476.035	Satker	035
17	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	2.352.190	-	-	-	2.352.190	-	-	-	2.352.190	2.352.190	Bagian Satker	026
18	Dewan Pers	245.373	-	1.794.349	1.496.853	3.536.575	208.612	-	208.612	3.327.963	3.536.575	Satker	059
19	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)					-			-	-	-	Bagian Satker	010
20	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)	552.319	-	1.745.847	276.855	2.575.021	282.933	-	282.933	2.292.087	2.575.021	Satker	007
21	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	-	-	1.238.723	-	1.238.723	68	-	68	1.238.655	1.238.723	Satker	033
22	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (WANTIKNAS)					-			-	-	-	Bagian Satker	055
23	Komisi Banding Merek					-			-	-	-	Bagian Satker	013
24	Komisi Banding Paten					-			-	-	-	Bagian Satker	013
25	Komisi Informasi Pusat (KIP)	373.439	-	1.976.914	-	2.350.352	41.275	-	41.275	2.309.078	2.350.352	Satker	059
26	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)					-			-	-	-	Bagian Satker	043
27	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia					-			-	-	-	Bagian Satker	034
28	Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)	-	-	712.525	-	712.525	-	-	-	712.525	712.525	Bagian Satker	034

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	Total Kewajiban	Total Ekuitas	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	Keterangan	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)
29	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	3.402.309	-	-	-	3.402.309	-	-	-	3.402.309	3.402.309	Bagian Satker	074
30	Komite Nasional Disabilitas	-	-	10.560	-	10.560	-	-	-	10.560	10.560	Satker	027
31	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	335.046	-	1.950.731	87.307	2.373.084	-	-	-	2.373.084	2.373.084	Satker	059
32	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	48.422	-	1.385.679	18.750	1.452.851	-	-	-	1.452.851	1.452.851	Satker	047
33	Komite Akreditasi Nasional (KAN)					-			-	-	-	Bagian Satker	084
34	Komite Cipta Kerja					-			-	-	-	Bagian Satker	035
35	Komite Penanganan Covid-19 dan PEN					-			-	-	-	Bagian Satker	035
36	Komite Nasional Geopark Indonesia					-			-	-	-	Bagian Satker	120
37	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)					-			-	-	-	Bagian Satker	012
38	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang					-			-	-	-	Bagian Satker	078
39	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP)					-			-	-	-	Bagian Satker	035
40	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	26.079	-	4.982.300	12.390.923	17.399.303	-	-	-	17.399.303	17.399.303	Satker	022
41	Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)					-			-	-	-	Bagian Satker	015
42	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)					-			-	-	-	Bagian Satker	092
43	Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)					-			-	-	-	Bagian Satker	048
44	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan					-			-	-	-	Bagian Satker	035
45	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	65.708	-	26.274	-	91.982	-	-	-	91.982	91.982	Satker	015
46	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)					-			-	-	-	Bagian Satker	084
47	Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)					-			-	-	-	Bagian Satker	035
48	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)					-			-	-	-	Satker	048
49	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) (024_01_439505)					-			-	-	-	Satker	024
50	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)					-			-	-	-	Satker	024
51	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)					-			-	-	-	Bagian Satker	088
52	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	2.186.512	-	-	-	2.186.512	-	-	-	2.186.512	2.186.512	Bagian Satker	026
53	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)					-			-	-	-	Bagian Satker	026
54	Lembaga Sensor Film (LSF)	419.020	-	3.705.207	1.822.613	5.946.841	-	-	-	5.946.841	5.946.841	Satker	023
55	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)					-			-	-	-	Bagian Satker	024
56	Otoritas Nasional Senjata Kimia					-			-	-	-	Bagian satker	019

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
TAHUN 2024 AUDITED
(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Nama Unit Badan Lainnya	Aset Lancar	Investasi	Aset Tetap	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	Total Kewajiban	Total Ekuitas	Total Kewajiban & Ekuitas Dana	Keterangan	BA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)	(12)=(10)+(11)	(13)	(14)
57	Sekretariat Pengadilan Pajak	584.519	-	16.954.760	1.099.914	18.639.193	1.248.382	-	1.248.382	17.390.810	18.639.193	Satker	015
58	Staf Khusus Presiden dan Utusan Khusus Presiden					-			-	-	-	Bagian Satker	114
59	Tim Pengembangan Vaksin COVID-19					-			-	-	-	Bagian satker	042
60	Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN)					-			-	-	-	Bagian Satker	088
61	Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan					-			-	-	-	Bagian satker	007
62	Kantor Staf Presiden	3.923.938	-	24.116.070	2.852.205	30.892.213	2.817.445	-	2.817.445	28.074.768	30.892.213	Satker	007
63	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	475.252.065	-	41.951.176	646.868	517.850.110	94.795.861	10.383.376	105.179.237	412.670.873	517.850.110	Bukan Satker	025
64	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	17.065.937	165.858	202.517	925.028.430	942.462.741	-	909.664.333	909.664.333	32.798.408	942.462.741	Bukan Satker	025
65	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	3.250.546	-	3.537.448	-	6.787.993	213.618	-	213.618	6.574.376	6.787.993	Bukan Satker	007
66	Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)	63.620.784.539	155.204.746.632	2.219.569.346	-	221.045.100.517	47.338.457.961	151.460.416.803	198.798.874.764	22.246.225.753	221.045.100.517	Bukan Satker	025
67	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII					-			-	-	-	Bukan Satker	007
68	Otorita Asahan					-			-	-	-	Bukan Satker	019
69	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukan Satker)	8.583.897.010	-	2.836.450.922	1.636.739.994	13.057.087.926	1.133.908.746	3.334.683.009	4.468.591.755	8.588.496.172	13.057.087.926	Bukan Satker	999
	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Satker) (999_08_984469)	14.946	-	-	-	14.946	-	-	-	14.946	14.946	Satker	999
70	SKK MIGAS (Satker) (999_08_999975)	32.394.969	-	68.333.977	58.610.050.351	58.710.779.297	43.344.682	58.555.708.079	58.599.052.761	111.726.536	58.710.779.297	Satker	999
	SKK MIGAS (Bukan Satker)	82.607.185	-	169.979.587	-	252.586.772	180.740.422	1.640.163.729	1.820.904.151	(1.568.317.379)	252.586.772	Bukan Satker	999
JUMLAH		72.990.604.870	155.204.912.490	7.490.096.138	61.225.963.372	296.911.576.870	48.807.478.412	215.911.019.328	264.718.497.740	32.193.079.130	296.911.576.870		

REKAPITULASI PENYETORAN PAJAK ROKOK KE RKUD PROVINSI DAN REKENING BPJS KESEHATAN TA 2024

No.	Nama Provinsi	Triwulan I Tahun 2024		Triwulan II Tahun 2024		Triwulan III Tahun 2024		Triwulan IV Tahun 2024	
		RKUD (Rp)	BPJS (Rp)	RKUD (Rp)	BPJS (Rp)	RKUD (Rp)	BPJS (Rp)	RKUD (Rp)	BPJS (Rp)
1	Provinsi Aceh	79.074.190.105,00	22.609.525.129,00	68.732.122.084,00	19.663.015.261,00	79.273.531.593,00	22.678.721.597,00	34.888.959.223,00	33.585.856.338,00
2	Provinsi Bali	80.417.334.982,00	-	69.907.962.689,00	-	80.629.710.255,00	-	54.153.825.597,00	-
3	Provinsi Bangka Belitung	27.919.723.703,00	-	24.271.023.198,00	-	27.993.457.294,00	-	18.801.416.989,00	-
4	Provinsi Banten	221.170.492.467,00	8.917.651.972,00	200.018.981.233,00	-	230.695.787.460,00	-	154.943.623.146,00	-
5	Provinsi Bengkulu	38.169.985.293,00	465.003.994,00	33.585.959.919,00	-	38.737.020.974,00	-	26.300.180.196,00	-
6	Provinsi DI Yogyakarta	68.950.242.220,00	-	59.939.451.632,00	-	69.132.333.886,00	-	46.431.772.365,00	-
7	Provinsi DKI Jakarta	210.932.496.318,00	-	183.366.696.816,00	-	211.489.550.918,00	-	142.044.020.992,00	-
8	Provinsi Gorontalo	22.780.199.960,00	-	19.803.160.216,00	-	22.840.360.510,00	-	15.340.411.069,00	-
9	Provinsi Jambi	69.243.402.042,00	-	60.194.299.742,00	-	69.426.267.917,00	-	46.629.189.076,00	-
10	Provinsi Jawa Barat	911.006.609.200,00	10.237.992.102,00	800.388.668.987,00	462.705.029,00	923.677.529.144,00	-	620.375.190.026,00	-
11	Provinsi Jawa Tengah	705.241.880.320,00	-	613.077.056.918,00	-	707.104.363.534,00	-	474.916.829.797,00	-
12	Provinsi Jawa Timur	751.444.950.210,00	19.245.942.747,00	664.218.152.495,00	5.754.686.091,00	766.088.942.146,00	6.637.279.245,00	507.103.275.703,00	11.887.563.965,00
13	Provinsi Kalimantan Barat	101.781.964.089,00	908.325.381,00	89.270.167.015,00	-	102.961.485.701,00	-	69.152.652.568,00	-
14	Provinsi Kalimantan Selatan	69.367.127.566,00	8.793.016.170,00	60.301.856.146,00	7.643.897.258,00	77.341.006.041,00	1.025.551.920,00	52.633.810.775,00	-
15	Provinsi Kalimantan Tengah	44.969.034.538,00	5.700.300.150,00	39.622.667.451,00	4.424.924.522,00	50.803.148.048,00	-	34.121.229.141,00	-
16	Provinsi Kalimantan Timur	73.791.978.770,00	-	64.148.443.862,00	-	73.986.857.046,00	-	49.692.245.455,00	-
17	Provinsi Kalimantan Utara	13.653.776.980,00	-	11.869.427.555,00	-	13.689.835.432,00	-	9.194.587.927,00	-
18	Provinsi Kepulauan Riau	39.961.335.379,00	-	34.738.971.931,00	-	40.066.869.833,00	-	26.910.356.918,00	-
19	Provinsi Lampung	161.277.428.574,00	6.003.449.541,00	141.057.089.533,00	4.362.618.648,00	166.184.344.885,00	1.538.307.657,00	112.648.591.266,00	-
20	Provinsi Maluku	35.159.596.003,00	166.654.948,00	30.709.625.406,00	-	35.419.544.545,00	-	23.789.045.402,00	-
21	Provinsi Maluku Utara	24.733.918.768,00	443.501.550,00	21.350.358.948,00	1.456.521.113,00	20.305.861.259,00	-	17.181.792.570,00	-
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	103.641.837.003,00	-	90.097.361.170,00	-	103.915.546.190,00	-	69.793.434.050,00	-
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	103.577.221.047,00	-	90.041.189.577,00	-	103.850.759.589,00	-	69.749.921.029,00	-
24	Provinsi Papua	20.017.398.618,00	-	17.401.416.697,00	-	20.070.262.848,00	-	13.479.913.428,00	-
25	Provinsi Papua Barat	10.448.085.948,00	-	9.082.673.565,00	-	10.475.678.446,00	-	7.035.844.005,00	-
26	Provinsi Papua Barat Daya	11.282.183.715,00	-	20.091.982.075,00	-	9.156.440.752,00	-	7.747.716.961,00	-
27	Provinsi Papua Pegunungan	16.975.068.689,00	10.185.041.213,00	22.776.797.487,00	833.882.351,00	48.386.583.216,00	978.109.733,00	36.101.362.668,00	916.225.603,00
28	Provinsi Papua Selatan	8.955.944.865,00	833.586.119,00	16.803.610.038,00	507.485.991,00	17.219.580.174,00	431.603.501,00	13.222.623.647,00	-
29	Provinsi Papua Tengah	24.066.886.072,00	1.052.106.704,00	21.836.306.938,00	-	25.185.329.878,00	-	34.216.869.622,00	-
30	Provinsi Riau	123.452.791.754,00	2.823.250.688,00	109.773.606.219,00	-	126.609.526.621,00	-	85.035.530.971,00	-
31	Provinsi Sulawesi Barat	26.177.701.284,00	907.868.901,00	22.755.096.568,00	790.784.806,00	26.597.842.106,00	559.258.743,00	18.239.689.792,00	-
32	Provinsi Sulawesi Selatan	170.769.502.902,00	2.973.212.359,00	149.526.626.868,00	1.510.450.631,00	172.380.580.391,00	1.820.974.454,00	115.928.197.313,00	1.071.858.745,00
33	Provinsi Sulawesi Tengah	56.628.533.772,00	1.421.050.638,00	49.509.865.114,00	953.485.629,00	58.202.888.375,00	-	39.091.162.009,00	-
34	Provinsi Sulawesi Tenggara	48.502.931.438,00	2.167.536.863,00	-	-	40.855.492.821,00	-	34.569.851.239,00	-
35	Provinsi Sulawesi Utara	44.444.764.125,00	5.285.771.533,00	43.231.480.278,00	-	49.861.869.730,00	-	33.489.032.625,00	-
36	Provinsi Sumatera Barat	105.956.508.016,00	-	92.109.538.456,00	-	106.236.330.050,00	-	71.352.156.313,00	-
37	Provinsi Sumatera Selatan	158.159.026.384,00	5.624.729.173,00	137.808.282.396,00	4.571.326.118,00	161.820.117.369,00	2.396.177.015,00	109.933.352.519,00	360.241.965,00
38	Provinsi Sumatera Utara	280.389.104.351,00	5.837.166.711,00	248.820.673.831,00	-	286.982.170.052,00	-	192.747.590.650,00	-
Total		5.064.493.157.470	122.602.684.586	4.432.238.651.053	52.935.783.448	5.175.654.807.029	38.065.983.865	3.488.987.255.042	47.821.746.616



Menteri Keuangan Republik Indonesia

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs <https://www.kemenkeu.go.id/>



Menteri Keuangan Republik Indonesia

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BUN Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Gedung Juanda I, Jl. Wahidin Raya No. 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710 Telepon (021) 3449230
Faximile (021) 3852143 Email portalkemenkeu@kemenkeu.go.id
Situs <https://www.kemenkeu.go.id/>